REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2026

REPUBLIK INDONESIA



BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR BOKS xii
DAFTAR SINGKATAN xiii

INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2026
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
BAB 1 PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL 1-1

1.1. Pendahuluan 1-1
1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global 1-2
1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 2025 1-5
1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2026 1-17
1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan 1-25
1.6. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian 1-26
1.7. Arah dan Kebijakan Fiskal 2026 1-29

BAB 2 PENDAPATAN NEGARA 2-1

2.1. Pendahuluan 2-1
2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026 2-2
2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026 2-4
2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026 2-10
2.1.1.3. Belanja Perpajakan 2-14
2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026 2-17
2.1.2.1. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 2-25
2.1.2.2. PNBP Lainnya 2-26
2.1.2.3. Pendapatan BLU 2-30
2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026 2-33

BAB 3 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 DAN KEWILAYAHAN 3-1

3.1. Pendahuluan 3-1
3.2. Ketahanan Pangan 3-2
3.2.1. Lumbung Pangan Nasional 3-5
3.2.2. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 3-6

3.2.3.	Pembangunan Pergaraman Nasional	3-7
3.2.4.	Penguatan Cadangan Pangan melalui Perum Bulog	3-8
3.3.	Kesehatan	3-9
3.3.1.	Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Kesehatan	3-9
3.3.2.	Program Percepatan Penurunan Stunting	3-13
3.3.3.	Cek Kesehatan Gratis	3-18
3.3.4.	Penuntasan Penanganan Tuberkulosis	3-19
3.3.5.	Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah	3-20
3.4.	Perlindungan Sosial	3-20
3.4.1.	Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial	3-21
3.4.2.	Peningkatan Akurasi Penerima Bantuan melalui Pemanfaatan DTSEN	3-23
3.4.3.	Skema Graduasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	3-25
3.5.	Pendidikan	3-26
3.5.1.	Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Pendidikan	3-26
3.5.2.	Anggaran Pendidikan 2026	3-29
3.6.	Ketahanan Energi	3-34
3.7.	Makan Bergizi Gratis	3-38
3.8.	Pertahanan Semesta	3-38
3.9.	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM	3-40
3.9.1.	Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)	3-44
3.10.	Percepatan Investasi dan Perdagangan Global	3-45
3.11.	Belanja K/L dan TKD Berdasarkan Wilayah	3-50
3.11.1.	Wilayah Sumatera	3-53
3.11.2.	Wilayah Jawa	3-55
3.11.3.	Wilayah Kalimantan	3-58
3.11.4.	Wilayah Sulawesi	3-60
3.11.5.	Wilayah Bali – Nusa Tenggara	3-63
3.11.6.	Wilayah Maluku-Papua	3-65
BAB 4	**BELANJA NEGARA**	**4-1**
4.1.	Pendahuluan	4-1
4.2.	Belanja Pemerintah Pusat	4-2
4.2.1.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021-2025 dan Anggaran Tahun 2026	4-2
4.2.1.1.	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi	4-3
4.2.1.1.1	Belanja Kementerian/Lembaga	4-3
4.2.1.1.2	Belanja non Kementerian/Lembaga	4-15
4.2.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	4-33
4.3.	Transfer ke Daerah	4-50
4.3.1.	Perkembangan Transfer ke Daerah 2021-2025 dan Rencana 2026	4-50
4.3.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	4-51
4.3.1.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	4-52
4.3.1.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4-54
4.3.1.3.1	DAK Fisik	4-54

4.3.1.3.2	DAK Nonfisik	4-56
4.3.1.3.3	Hibah kepada Daerah	4-61
4.3.1.4.	Dana Otonomi Khusus (Otsus)	4-63
4.3.1.5.	Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	4-65
4.3.1.6.	Dana Desa	4-67
4.3.1.7.	Dana Insentif Fiskal	4-68
BAB 5	**DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**5-1**
5.1.	Pendahuluan	5-1
5.2.	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026	5-2
5.2.1.	Defisit APBN Periode 2021-2025 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2026	5-2
5.2.2.	Pembiayaan Anggaran Periode 2021-2025 dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2026	5-3
5.2.2.1.	Pembiayaan Utang	5-4
5.2.2.2.	Pembiayaan Investasi	5-10
5.2.2.3.	Pemberian Pinjaman	5-25
5.2.2.3.1	Penyaluran Pemberian Pinjaman	5-25
5.2.2.3.2	Penerimaan Cicilan, Pengembalian, Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	5-27
5.2.2.4.	Kewajiban Penjaminan	5-28
5.2.2.5.	Pembiayaan Lainnya	5-36
BAB 6	**RISIKO FISKAL TAHUN 2026**	**6-1**
6.1.	Pendahuluan	6-1
6.1.1.	Umum	6-1
6.1.2.	Pengungkapan Risiko Fiskal	6-1
6.1.3.	Peta Risiko Fiskal	6-2
6.2.	Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal	6-4
6.2.1.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.1.	*Outlook* Risiko Ekonomi Makro	6-4
6.2.1.2.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.	Sensitivitas Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.1	Sensitivitas APBN Tahun 2026 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-5
6.2.1.3.2	Sensitivitas Proyeksi APBN terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah	6-7
6.2.1.4.	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	6-7
6.2.1.5.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara	6-10
6.2.1.6.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara	6-12
6.2.1.7.	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran	6-14
6.2.2.	Risiko Implementasi Program dan Kebijakan	6-18

6.2.2.1.	Risiko Program Pengembangan Koperasi Merah Putih	6-18
6.2.2.2.	Risiko Kebijakan Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara	6-20
6.2.2.3.	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*	6-22
6.2.2.4.	Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	6-23
6.2.2.5.	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-26
6.2.2.6.	Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang	6-28
6.2.3.	Risiko Kewajiban Kontinjensi	6-30
6.2.3.1.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan	6-30
6.2.3.1.1.	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-30
6.2.3.1.2.	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	6-38
6.2.3.1.3.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	6-40
6.2.3.2.	Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan	6-41
6.2.3.2.1.	Risiko Penugasan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur	6-41
6.2.3.2.2.	Risiko Jaminan Sosial	6-43
6.2.3.2.3.	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	6-48
6.2.3.2.4.	Risiko Fiskal dari Lembaga Keungan Tertentu	6-49
6.2.3.2.5.	Risiko Bencana	6-55
6.2.3.2.6.	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-58
6.2.4.	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-59
6.2.5.	Risiko Kesinambungan Fiskal	6-62
6.2.5.1.	Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal	6-62
6.2.5.2.	Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah	6-62
6.2.5.3.	Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal	6-63
6.2.6.	Risiko Fiskal Daerah	6-64
BAB 7	**KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH**	**7-1**
7.1.	Pendahuluan	7-1
7.2.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 – 2029	7-2
7.3.	Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2026 - 2029	7-4
7.4.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2026 – 2029	7-7
7.4.1.	Penerimaan Perpajakan	7-7
7.4.2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7-9
7.4.3.	Penerimaan Hibah	7-10
7.5.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2026 – 2029	7-11
7.5.1.	Belanja Pemerintah Pusat	7-11
7.5.1.1.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	7-13
7.5.1.2.	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	7-23
7.5.2.	Transfer Ke Daerah	7-27
7.6.	Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2026 – 2029	7-29

LAMPIRAN I DATA POKOK APBN TAHUN 2021-2026
LAMPIRAN II RINGKASAN PENJELASAN RKA-KL TA 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Postur RAPBN 2026	7
Tabel 1.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	1-7
Tabel 1.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	1-18
Tabel 1.3	Perkembangan dan Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2022–2026	1-24
Tabel 1.4	Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2025–2026	1-26
Tabel 2.1	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak	2-15
Tabel 2.2	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian	2-16
Tabel 2.3	Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan	2-16
Tabel 2.4	Perkembangan PNBP pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2021–2026	2-27
Tabel 2.5	Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2021–2026	2-32
Tabel 4.1	Belanja Pemerintah Pusat, 2025–2026	4-3
Tabel 4.2	Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2025-2026	4-12
Tabel 4.3	Belanja K/L Menurut Organisasi TA 2026	4-13
Tabel 4.4	Belanja Subsidi, 2025–2026	4-19
Tabel 4.5	Hibah Kepada Daerah, 2025-2026	4-62
Tabel 5.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2021 - 2026	5-4
Tabel 5.2	Pembiayaan Utang, 2021 - 2026	5-5
Tabel 5.3	Perbandingan Rasio Utang terhadap PDB Negara Sekawasan *(Emerging Countries)*, 2020-2024	5-6
Tabel 5.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN *Tradable* Domestik, 2021-2025	5-8
Tabel 5.5	Pembiayaan Investasi, 2021-2026	5-12
Tabel 5.6	Pembiayaan Investasi Tahun Anggaran 2026	5-24
Tabel 5.7	Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2026	5-26
Tabel 5.8	Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2021 - 2026	5-35
Tabel 5.9	Pembiayaan Lainnya, 2021 - 2026	5-37
Tabel 6.1	Sensitivitas APBN 2026 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	6-7
Tabel 6.2	Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat 2021 – Semester I 2025	6-16
Tabel 6.3	Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat Dalam Jangka Menengah Hingga Akhir 2029	6-16
Tabel 6.4	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE)	6-51
Tabel 6.5	Rencana Pembiayaan Eksplorasi Panas Bumi Melalui Dana PISP	6-59
Tabel 6.6	Komposisi Dampak Risiko Pinjaman Daerah Per Semester I Tahun 2025	6-66
Tabel 6.7	Komposisi Dampak Risiko Pinjaman Daerah Per Desember 2024	6-66
Tabel 7.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2026– 2029	7-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Asean & G20	1-2
Grafik 1.2	PMI Manufaktur Beberapa Negara	1-3
Grafik 1.3	Perkembangan Harga Komoditas	1-3
Grafik 1.4	Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Negara Terpilih	1-4
Grafik 1.5	Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2022–2025	1-10
Grafik 1.6	Neraca Pembayaran, 2022–2024	1-12
Grafik 1.7	Posisi Cadangan Devisa, 2022–2024	1-13
Grafik 1.8	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan *Yield* SBN 10 Tahun	1-14
Grafik 1.9	Perkembangan IHSG 2022–2025	1-15
Grafik 1.10	Perkembangan Harga Brent dan Rata-Rata ICP Indonesia	1-16
Grafik 1.11	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Global	1-18
Grafik 1.12	Dampak APBN Terhadap Sektor Riil	1-27
Grafik 1.13	Dampak APBN Terhadap Sektor Moneter	1-28
Grafik 1.14	Dampak APBN Terhadap Neraca Pembayaran	1-29
Grafik 2.1	Pajak Penghasilan, 2021–2026	2-9
Grafik 2.2	PPN dan PPnBM, 2021–2026	2-9
Grafik 2.3	Pajak Bumi dan Bangunan, 2021–2026	2-10
Grafik 2.4	Pajak Lainnya, 2021–2026	2-10
Grafik 2.5	Cukai, 2021–2026	2-13
Grafik 2.6	Bea Masuk, 2021–2026	2-13
Grafik 2.7	Bea Keluar, 2021–2026	2-14
Grafik 2.8	Belanja Perpajakan, 2021–2026	2-15
Grafik 2.9	Perkembangan PNBP, 2021–2026	2-18
Grafik 2.10	Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2021–2026	2-19
Grafik 2.11	Pendapatan SDA Nonmigas, 2021–2026	2-22
Grafik 2.12	Perkembangan Pendapatan KND, 2021–2026	2-26
Grafik 2.13	Perkembangan PNBP Lainnya, 2021–2026	2-27
Grafik 2.14	Perkembangan Pendapatan BLU, 2021–2026	2-31
Grafik 2.15	Hibah 2021–2026	2-34
Grafik 3.1	Anggaran Ketahanan Pangan, 2021–2026	3-3
Grafik 3.2	Anggaran Kesehatan, 2021–2026	3-9
Grafik 3.3	Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2021–2026	3-23
Grafik 3.4	*Human Development Index* (HDI), 2017–2023	3-27
Grafik 3.5	Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2021–2026	3-29
Grafik 3.6	Belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah, 2021–2026	3-52
Grafik 4.1	Perkembangan Belanja Negara, 2021–2026	4-1
Grafik 4.2	Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2021–2026	4-3
Grafik 4.3	Perkembangan Belanja K/L, 2021-2026	4-12
Grafik 4.4	Perkembangan Belanja Non-K/L, 2021-2026	4-15
Grafik 4.5	Pembayaran Bunga Utang, 2021–2026	4-16
Grafik 4.6	Belanja Subsidi, 2021–2026	4-17

Grafik 4.7	Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2021–2026	4-26
Grafik 4.8	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2021–2026	4-33
Grafik 4.9	Fungsi Pelayanan Umum, 2021–2026	4-34
Grafik 4.10	Fungsi Pertahanan, 2021–2026	4-35
Grafik 4.11	Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2021–2026	4-37
Grafik 4.12	Fungsi Ekonomi, 2021–2026	4-39
Grafik 4.13	Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2021–2026	4-40
Grafik 4.14	Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2021–2026	4-42
Grafik 4.15	Fungsi Kesehatan, 2021–2026	4-43
Grafik 4.16	Fungsi Pariwisata, 2021–2026	4-45
Grafik 4.17	Fungsi Agama, 2021–2026	4-46
Grafik 4.18	Fungsi Pendidikan, 2021–2026	4-46
Grafik 4.19	Fungsi Perlindungan Sosial, 2021–2026	4-48
Grafik 5.1	Perkembangan Defisit Anggaran, 2021–2026	5-3
Grafik 5.2	Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB, 2021–2025	5-5
Grafik 5.3	Investasi kepada BUMN dan BLU, 2021–2026	5-17
Grafik 5.4	Investasi Kepada Organisasi/LKI/BUI, 2021–2026	5-20
Grafik 5.5	Investasi Pemerintah oleh BUN (Nonpermanen), 2021–2026	5-22
Grafik 5.6	Penyaluran dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, 2021-2025	5-25
Grafik 5.7	Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2021-2025	5-26
Grafik 5.8	Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, 2021-2026	5-28
Grafik 6.1	Peta Risiko Fiskal Tahun 2026	6-3
Grafik 6.2	Hasil Analisis *Macro Stress Test* Terhadap Penerimaan Negara Dari 24 BUMN Tahun 2026	6-8
Grafik 6.3	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun Tahun 2026	6-8
Grafik 6.4	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Energi, Migas, Mineral & Batubara Tahun 2026	6-9
Grafik 6.5	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Kesehatan dan Manufaktur Tahun 2026	6-9
Grafik 6.6	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Tahun 2026	6-9
Grafik 6.7	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Infrastruktur 2026	6-9
Grafik 6.8	Hasil Analisis *Macro Stress Test* BUMN Klaster Logistik, Pariwisata, Pendukung, Telekomunikasi, & Media 2026	6-10
Grafik 6.9	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pendapatan Negara	6-10
Grafik 6.10	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Belanja Negara	6-14
Grafik 6.11	Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran	6-18
Grafik 6.12	Perkembangan Realisasi dan Proyeksi *Mandatory Spending* Terhadap Total Anggaran Tahun 2021-2026	6-22
Grafik 6.13	Peta Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*	*6-23*
Grafik 6.14	Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	6-26

Grafik 6.15	Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara	6-28
Grafik 6.16	Peta Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah	6-30
Grafik 6.17	Peta Risiko Penjaminan Program PEN	6-39
Grafik 6.18	Pinjaman Baru BUMN Infrastruktur 2015-2024	6-43
Grafik 6.19	Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur	6-43
Grafik 6.20	Peta Risiko Jaminan Sosial	6-44
Grafik 6.21	Proyeksi Rasio Klaim Program BPJS Ketenagakerjaan	6-46
Grafik 6.22	Proyeksi Rasio Klaim PT Asabri (Persero)	6-46
Grafik 6.23	Proyeksi Rasio Klaim PT Taspen (Persero)	6-48
Grafik 6.24	Peta Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah	6-49
Grafik 6.25	Peta Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	6-49
Grafik 6.26	Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Porsi Permodalan LPEI Tahun 2021–Desember 2025 (RKAT)	6-50
Grafik 6.27	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas, Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2020-Juni 2025	6-55
Grafik 6.28	Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2021–Juni 2025	6-56
Grafik 6.29	Peta Risiko Bencana	6-56
Grafik 6.30	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2021–2025	6-58
Grafik 6.31	Peta Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi	6-59
Grafik 6.32	Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik	6-61
Grafik 6.33	Peta Risiko Fiskal Inefisiensi Belanja Daerah	6-65
Grafik 7.1	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2026-2029	7-8
Grafik 7.2	Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2026-2029	7-9
Grafik 7.3	Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2026-2029	7-10
Grafik 7.4	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2026-2029	7-13
Grafik 7.5	Proyeksi Transfer Ke Daerah Jangka Menengah, 2026-2029	7-27
Grafik 7.6	Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2026-2029	7-31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Arah Kebijakan Wilayah dan Faktor Pendorong Akselerasi Antarwilayah Berdasarkan RPJMN, 2025-2029 3-50
Gambar 3.2 Proyeksi Belanja K/L dan TKD Per Kapita Berdasarkan Wilayah Tahun 2026 3-53
Gambar 3.3 Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sumatera pada Tahun 2026 3-54
Gambar 3.4 Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa pada Tahun 2026 3-57
Gambar 3.5 Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Kalimantan pada Tahun 2026 3-59
Gambar 3.6 Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sulawesi pada Tahun 2026 3-62
Gambar 3.7 Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada Tahun 2026 3-65
Gambar 3.7 Proyeksi Target *Output* Strategis Melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Maluku-Papua pada Tahun 2026 3-68
Gambar 4.1 Transfer Ke Daerah Tahun 2026 4-51
Gambar 4.2 Capaian *Output* DAK Fisik, Tahun 2021-2025 4-55
Gambar 4.3 Capaian Dana Otsus Tahun 2024 4-65
Gambar 6.1 Pengelolaan BUMN Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 6-21

DAFTAR BOKS

Boks 1.1	Dampak APBN Terhadap Ekonomi	1-27
Boks 2.1	Optimalisasi *Compliance Risk Management* Dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak	2-6
Boks 2.2.	Penguatan Posisi Indonesia Dalam Kerja Sama Kepabeanan Internasional dan Diplomasi Ekonomi	2-11
Boks 2.3	Hilirisasi Berbasis SDA untuk Akselerasi Ekonomi	2-20
Boks 2.4	Penguatan Pengawasan dan Penggalian Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2-25
Boks 4.1	Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	4-11
Boks 4.2	Otoritas Jasa Keuangan	4-32
Boks 4.3	Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja	4-48

DAFTAR SINGKATAN

1.	3G	:	Geologi, Geofisika, Geokimia
2.	3R	:	*Reuse, Reduce, Recycle*
3.	3T	:	Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
4.	3TP	:	Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan
5.	4K	:	Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, dan Kualitas
6.	4P	:	Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	ABS	:	*Automatic Blocking System*
8.	ADB	:	Asian Development Bank
9.	ADEM	:	Afirmasi Pendidikan Menengah
10.	ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
11.	ADIk	:	Afirmasi Pendidikan Tinggi
12.	ADWI	:	Anugrah Desa Wisata Indonesia
13.	AI	:	*Artificial Intelligence*
14.	AIIB	:	*Asian Infrastructure Investment Bank*
15.	AIP	:	Akumulasi Iuran Pensiun
16.	AKI	:	Angka Kematian Ibu
17.	AKI	:	Anugrah Kreasi Indonesia
18.	Alsintan	:	Alat Mesin Pertanian
19.	AMPK	:	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
20.	AP	:	*Availability Payment*
21.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22.	APDAL	:	Alat Penyalur Daya Listrik
23.	APH	:	Aparat Penegak Hukum
24.	APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
25.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
26.	ARG	:	Anggaran Responsif Gender
27.	AS	:	Amerika Serikat
28.	ASEAN	:	the Association of Southeast Asian Nations
29.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
30.	ASND	:	Aparatur Sipil Negara Daerah
31.	ASO	:	*Analog Switch Off*
32.	ATENSI	:	Asistensi Rehabilitasi Sosial
33.	ATM	:	*Average Time to Maturity*
34.	AUPB	:	Asas Umum Pemerintahan yang Baik
35.	AUTP	:	Asuransi Usaha Tani Padi
36.	BA	:	Bagian Anggaran
37.	BA BUN	:	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
38.	BBA	:	Bantuan Biaya Administrasi
39.	BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
40.	BHL	:	Badan Hukum Lainnya
41.	BI	:	Bank Indonesia

42.	BioCF ISFL	:	*Bio Carbon Fund Initiative For Sustainable Forest Landscape*
43.	BKB	:	Ina Keluarga Balita
44.	BKC	:	Barang Kena Cukai
45.	BLJSKBB	:	Balai Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
46.	BLK	:	Balai Latihan Kerja
47.	BLP	:	Bantuan Langsung Pupuk
48.	BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
49.	BLU	:	Badan Layanan Umum
50.	BMD	:	Barang Milik Daerah
51.	BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
52.	BMN	:	Barang Milik Negara
53.	BMP	:	Batas Maksimal Penjaminan
54.	BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
55.	BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
56.	BOP	:	Biaya Operasional Penyelenggaraan
57.	BOP	:	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
58.	BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
59.	BOSP	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
60.	BP	:	Bukan Pekerja
61.	BP2BT	:	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
62.	BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
63.	BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
64.	BPNT	:	Bantuan Pangan Nontunai
65.	BPP	:	Balai Penyuluhan Pertanian
66.	BPP	:	Belanja Pemerintah Pusat
67.	BPP	:	Biaya Pokok Penyediaan
68.	BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
69.	BReady	:	*Business Ready*
70.	BSF	:	*Bond Stabilization Framework*
71.	BSPS	:	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
72.	BSU	:	Bantuan Subsidi Upah
73.	BTS	:	Base Transceiver Station
74.	BUI	:	Badan Usaha Internasional
75.	BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
76.	BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
77.	BUP	:	Badan Usaha Pelaksana
78.	BUPI	:	Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
79.	Capex	:	*Capital Expenditure*
80.	CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
81.	CCUS	:	*Carbon Captured Utilization and Storage*
82.	CDS	:	*Cash Deficiency Support*
83.	CHSE	:	*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*
84.	CHT	:	Cukai Hasi Tembakau
85.	CJPP	:	*Central Java Power Plant*
86.	CMP	:	*Crisis Management Protocol*

87.	Covid-19	:	Corona Virus Disease 2019
88.	CP Aramco	:	*Contract Price Aramco*
89.	CPO	:	*Crude Palm Oil*
90.	CPP	:	Cadangan Pangan Pemerintah
91.	CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
92.	CTAS	:	*Core Tax Administration System*
93.	CWLS Ritel	:	*Cash Waqf Linked Sukuk Ritel*
94.	Dais	:	Dana Keistimewaan
95.	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
96.	DAP	:	Dana Abadi Pendidikan
97.	DAPODIK DASMEN	:	Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah
98.	DAS	:	Daerah Aliran Sungai
99.	DAU	:	Dana Alokasi Umum
100.	DBH	:	Dana Bagi Hasil
101.	DBS	:	*Digital Broadcasting System*
102.	DHE	:	Devisa Hasil Ekspor
103.	DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
104.	DJS	:	Dana Jaminan Sosial
105.	DLI	:	*Disbursement Linked Indicators*
106.	DMO	:	*Domestic Market Obligation*
107.	DOD	:	Desain Olahraga Daerah
108.	DPK	:	Dana Pihak Ketiga
109.	DR	:	Dana Reboisasi
110.	DRPLN-JM	:	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/*Blue Book*
111.	DRPPLN	:	Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri/*Green Book*
112.	DSP4	:	Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak
113.	DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
114.	DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
115.	DTP	:	Ditanggung Pemerintah
116.	DTPK	:	Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan
117.	EA	:	Etil Alkohol
118.	EA	:	*Executing Agency*
119.	EBT	:	Energi Baru Terbarukan
120.	ECB	:	the European Central Bank
121.	EF	:	*Endowment Fund*
122.	EGDI	:	*e-Government Development Index*
123.	EOR	:	*Enhanced Oil Recovery*
124.	e-PNBP	:	Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik
125.	ERI	:	*Electronic Registration and Identification*
126.	ESG	:	*Environmental, Social, and Governance*
127.	ETM	:	*Energy Transition Mechanism*
128.	EV	:	*Electric Vehicles*
129.	e-VOA	:	*Electronic Visa On Arrival*
130.	EWD	:	*Early Warning Detection*

131. FDI	:	*Foreign Direct Investment*
132. FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
133. FPP	:	Fasilitas Pengembangan Proyek
134. FTA	:	*Free Trade Agreement*
135. FTP	:	*Fast Track Program*
136. FX	:	*Foreign Exchange*
137. GAB	:	*Gender Action Budget*
138. Gemarikan	:	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
139. Germas	:	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
140. GEUDP	:	*Geothermal Energy Upstream Development Project*
141. GREM	:	*Geothermal Resource Risk Mitigation*
142. GRK	:	Gas Rumah Kaca
143. GTETI	:	*Global Tax Expenditures Transparency Index*
144. HAM	:	Hak Asasi Manusia
145. HBA	:	Harga Batubara Acuan
146. HCI	:	*Human Capital Index*
147. HDI	:	*Human Development Index*
148. HGBT	:	Harga Gas Bumi Tertentu
149. HJE	:	Harga Jual Eceran
150. HKPD	:	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
151. HPA	:	Hasil Pengelolaan Aset
152. HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
153. HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
154. HT-el	:	Hak Tanggungan Elektronik
155. HWI	:	*High Wealth Individual*
156. IBP	:	Indeks Biaya Pendidikan
157. ICP	:	*Indonesian Crude-Oil Price*
158. ICT	:	*Information and Communications Technology*
159. IFAD	:	International Fund For Agricultural Develoment Association
160. IGAHP	:	Indonesia Green Affordable Housing Program
161. IHK	:	Indeks Harga Konsumen
162. IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
163. IISMA	:	Indonesian International Student Mobility Awards
164. IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
165. IKJHI	:	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia
166. IKK	:	Indeks Kemahalan Konstruksi
167. IKM	:	Indeks Kepuasan Masyarakat
168. IKM	:	Industri Kecil dan Menengah
169. IKN	:	Ibu Kota Nusantara
170. IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
171. IMF	:	the International Monetary Fund
172. IMM	:	Indeks Modal Manusia
173. Indonesian AID	:	Indonesian Agency for International Development
174. Infokom	:	Informasi dan Komunikasi

175. IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
176. IPO	:	*Initial Public Offerings*
177. IPP	:	Indeks Pelayanan Publik
178. IPP	:	*Independent Power Producer*
179. IRR	:	*Internal Rate of Return*
180. IRTP	:	Industri Rumah Tangga Pangan
181. IsDB	:	Islamic Development Bank
182. ISLE-1 PforR	:	Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program For Results
183. ITDC	:	Injourney Tourism Development Corporation/ PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
184. Jamkes	:	Jaminan Kesehatan
185. JICA	:	Japan International Cooperation Agency
186. JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
187. JKM	:	Jaminan Kematian
188. JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
189. JKP	:	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
190. JP	:	Jaringan Perpipaan
191. JTTS	:	Jalan Tol Trans Sumatera
192. K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
193. KA	:	Kereta Api
194. KAJM	:	Kerangka Anggaran Jangka Menengah
195. KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
196. KB	:	Keluarga Berencana
197. KB	:	Kurang Bayar
198. KBMI	:	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
199. KCJB	:	Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
200. KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
201. Kemenag	:	Kementerian Agama
202. KemenATR/ BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
203. Kemendag	:	Kementerian Perdagangan
204. KemendesPDT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
205. Kementrans	:	Kementerian Transmigrasi
206. Kemendikdasmen	:	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
207. Kemendiktisaintek	:	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
208. Kemenbud	:	Kementerian Kebudayaan
209. Kemen-ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
210. Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
211. Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
212. Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
213. Kemenimipas	:	Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan
214. KemenPAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
215. Kemen PU	:	Kementerian Pekerjaan Umum

216. Kemenhum	:	Kementerian Hukum
217. Kementan	:	Kementerian Pertanian
218. Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
219. Komdigi	:	Komunikasi dan Digital
220. KI	:	Kawasan Industri
221. KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
222. KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
223. KIS	:	Kartu Indonesia Sehat
224. KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
225. KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
226. KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
227. KND	:	Kekayaan Negara Dipisahkan
228. KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
229. KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
230. KPPIP	:	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
231. KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
232. KRD	:	Kereta Rel Diesel
233. KRL	:	Kereta Rel Listrik
234. KRO	:	Klasifikasi Rincian Output
235. KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
236. KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
237. KUA	:	Kredit Usaha Alsintan
238. KUP	:	Ketentuan Umum Perpajakan
239. KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
240. LB	:	Lebih Bayar
241. LCS	:	*Local Currency Settlement*
242. LDKPI	:	Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
243. LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
244. LHR	:	Lalu Lintas Harian
245. LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan
246. LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
247. LKBN	:	Lembaga Kantor Berita Nasional
248. LKI	:	Lembaga Keuangan Internasional
249. LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
250. LMCs	:	*Like-Minded Countries*
251. LNPRT	:	Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga
252. LPBBT	:	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi
253. LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
254. LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
255. LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
256. LRT	:	*Light Rail Transit*
257. LST	:	Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
258. MBDK	:	Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
259. MBG	:	Makan Bergizi Gratis
260. MBKM	:	Merdeka Belajar Kampus Merdeka

261. MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
262. MEF	:	*Minimum Essential Force*
263. Mekaar	:	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
264. MICE	:	*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*
265. Migor	:	Minyak Goreng
266. Minerba	:	Mineral dan Batubara
267. MIP PNBP	:	Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
268. MMEA	:	Mengandung Etil Alkohol
269. Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
270. MOPS	:	*Mean Of Platts Singapore*
271. MRT	:	Mass Rapid Transit
272. MSIB	:	Magang dan Studi Independen Bersertifikat
273. MYC	:	*Multi Years Contract*
274. NFW	:	*Net Financial Worth*
275. NLE	:	*National Logistic Ecosystem*
276. Non-RM	:	Non Rupiah Murni
277. NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
278. NPL	:	*Non-Performing Loans*
279. NPP	:	Narkotika Psikotropika dan Prekursor
280. NPSN	:	Nomor Pokok Satuan Paud Nasional
281. NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan
282. NTMF	:	Neraca Transaksi Modal dan Finansial
283. NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
284. NTP	:	Nilai Tukar Petani
285. OAP	:	Orang Asli Papua
286. ODHIV	:	Orang Dengan HIV
287. OECD	:	the Organisation for Economic Co-Operation And Development
288. OI	:	Organisasi Internasional
289. OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
290. OPEC+	:	the Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus
291. OPT	:	Organisme Pengganggu Tanaman
292. ORI	:	Obligasi Negara Ritel
293. OSS	:	Online Single Submission
294. OSS-RBA	:	Online Single Submission Risk Based Approach
295. Otsus	:	Otonomi Khusus
296. P2P Lending	:	*Peer-to-Peer Lending*
297. P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
298. P3KE	:	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
299. PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
300. PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
301. PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
302. PBBL	:	Pembayaran Berkala Berbasis Layanan
303. PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
304. PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah

305. PCRM	:	*Post Clearance Control Risk Matrix*
306. PDB	:	Produk Domestik Bruto
307. PDF	:	*Project Development Facility*
308. PDN	:	Pinjaman Dalam Negeri
309. PDN	:	Pusat Data Nasional
310. PDRB	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto
311. PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
312. Pemda	:	Pemerintah Daerah
313. Pemprov DK	:	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
314. PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
315. PENA	:	Pahlawan Ekonomi Nusantara
316. Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
317. Permenko	:	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
318. PFB	:	Pooling Fund Bencana
319. PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
320. PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
321. PIK	:	Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
322. PIK	:	Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan
323. PIP	:	Program Indonesia Pintar
324. PIRT	:	Pangan Industri Rumah Tangga
325. PISA	:	P*rogramme For International Student Assessment*
326. PISP	:	Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
327. PJBTL	:	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
328. PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
329. PJU-TS	:	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya
330. PK2SIKM	:	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah
331. PK2UMK	:	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
332. PKE	:	Penugasan Khusus Ekspor
333. PKH	:	Penggunaan Kawasan Hutan
334. PKH	:	Program Keluarga Harapan
335. PKK	:	Program Kecakapan Kerja
336. PKLWN	:	Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan
337. PKP	:	Penghasilan Kena Pajak
338. P-KP	:	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
339. PKW	:	Program Kecakapan Wirausaha
340. PLN	:	Pinjaman Luar Negeri
341. PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
342. PLTMG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
343. PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
344. PLUT	:	Pusat Layanan Usaha Terpadu
345. PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
346. PMI	:	*Purchasing Managers' Index*
347. PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
348. PMN	:	Penyertaan Modal Negara

349. PMT	:	Pemberian Makanan Tambahan
350. PMT Bumil KEK	:	Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
351. PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
352. PN	:	Prioritas Nasional
353. PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
354. PNM	:	Permodalan Nasional Madani
355. PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
356. POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
357. Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
358. PP	:	Peraturan Pemerintah
359. PPA	:	Perlindungan Perempuan dan Anak
360. PPDGS	:	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis
361. PPDN	:	Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
362. PPDS	:	Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis
363. PPh	:	Pajak Penghasilan
364. PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
365. PPKSK	:	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
366. PPKT	:	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu
367. PPLN	:	Penerusan Pinjaman Luar Negeri
368. PPLP	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
369. PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
370. PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
371. PPPK	:	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
372. PPS	:	Program Pengungkapan Sukarela
373. PPSP	:	Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
374. PSN	:	Proyek Strategis Nasional
375. PSO	:	*Public Service Obligation*
376. PSPE	:	Pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
377. PT	:	Perguruan Tinggi
378. PT KAI	:	PT Kereta Api Indonesia
379. PT PII	:	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
380. PT RNI	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia
381. PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur
382. PTKIN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
383. PTM	:	Penyakit Tidak Menular
384. PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
385. PTN-BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
386. PUG	:	Pengarusutamaan Gender
387. PUPN	:	Panitia Urusan Piutang Negara
388. PUS	:	Pasangan Usia Subur
389. R&D	:	*Research and Development*
390. RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
391. RBL	:	*Result Based Lending*
392. rbph	:	Ribu Barel per Hari

393. rbsmph	:	Ribu Barel Setara Minyak Bumi per Hari
394. RDB	:	Rasio Desa Berlistrik
395. RE	:	Rasio Elektrifikasi
396. Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
397. RIA	:	*Regulatory Impact Assessment*
398. RIIM	:	Riset Inovasi Untuk Indonesia Maju
399. RIMP	:	*Rentang Irrigation Modernization Project*/Proyek Modernisasi Irigasi Rentang
400. RIRN	:	Rencana Induk Riset Nasional
401. RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
402. RKA-BUN	:	Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
403. RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
404. RKD	:	Rasio Kecukupan Dana
405. RKD	:	Rekening Kas Desa
406. RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
407. RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
408. RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
409. RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
410. RM	:	Rupiah Murni
411. RMP	:	Rupiah Murni Pendamping
412. RO	:	Rincian Output
413. RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
414. RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
415. RSPP	:	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran
416. RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
417. RT	:	Rumah Tangga
418. RTLH	:	Rumah Tidak Layak Huni
419. RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
420. SALM	:	*Sovereign Asset Liability Management*
421. Sarpras	:	Sarana dan Prasarana
422. SATRIA	:	Satelit Multifungsi Pemerintah
423. SBK	:	Subsidi Bunga Kredit
424. SBN	:	Surat Berharga Negara
425. SBP	:	Setoran Bagian Pemerintah
426. SBR	:	*Savings Bond Ritel*
427. SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
428. SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
429. SD	:	Sekolah Dasar
430. SDA	:	Sumber Daya Alam
431. SDG's	:	*Sustainable Development Goals*
432. SDM	:	Sumber Daya Manusia
433. SIGA	:	Sistem Informasi Keluarga
434. SIGNAL	:	Samsat Digital Nasional
435. SIH	:	Sertifikasi Industri Hijau
436. SIKSMA	:	Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat

437. SIMBARA	:	Sistem Informasi Mineral dan Batubara
438. Simluhtan	:	Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian
439. SIPATOK	:	Sistem Informasi Harga Patokan
440. SIPI	:	Surat Ijin Penangkapan Ikan
441. SJKU	:	Surat Jaminan Kelayakan Usaha
442. SKM	:	Sigaret Kretek Mesin
443. SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
444. SLF	:	*Securities Lending Facilities*
445. SMART PCC	:	*Sistem Manajemen Audit, Risiko, dan Targeting Post Clearance Control*
446. SMV	:	Special Mission Vehicle
447. SNI	:	Standar Nasional Indonesia
448. SOP	:	*Standard Operating Procedure*/ Standar Operasional Prosedur
449. SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
450. SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
451. SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
452. SPHP	:	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
453. SPM	:	Sigaret Putih Mesin
454. SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
455. SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
456. SPNS	:	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
457. SR	:	Sambungan Rumah
458. SRI	:	*Socially Responsible Investing*
459. SSB	:	Subsidi Selisih Bunga
460. SSRG	:	Skema Subsidi Resi Gudang
461. ST	:	Sukuk Tabungan
462. STEM	:	*Science, Technology, Engineering, Math*
463. Sukri	:	Sukuk Ritel
464. SUN	:	Surat Utang Negara
465. SWAP	:	*Sustainable Waste Action Programme In Pacific*
466. SWF	:	*Sovereign Wealth Fund*
467. SYC	:	*Single Year Contract*
468. T-1	:	Tahun Anggaran Sebelumnya
469. Tamsil	:	Tambahan Penghasilan
470. TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
471. THR	:	Tunjangan Hari Raya
472. TIK	:	Teknologi, Informasi dan Komunikasi
473. TKD	:	Transfer Ke Daerah
474. TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
475. TKG	:	Tunjangan Khusus Guru
476. TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
477. TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
478. TPID	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah
479. TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
480. TPIP-TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah
481. TPPAS	:	Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

482. TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
483. TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
484. Tukin	:	Tunjangan Kinerja
485. UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
486. UMi	:	Ultra Mikro
487. UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
488. UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
489. UMOT	:	Usaha Mikro Obat Tradisional
490. UN	:	United Nations
491. UPLAND	:	The Development Of Integrated Farming System At Upland Areas Project
492. UST	:	US Treasury
493. UU	:	Undang-Undang
494. Valas	:	Valuta Asing
495. VGF	:	*Viability Gap Fund*
496. VR	:	*Variable Rate*
497. WB	:	World Bank
498. WBBM	:	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
499. WBK	:	Wilayah Bebas Dari Korupsi
500. WCO	:	World Customs Organization
501. WEO	:	World Economic Outlook
502. WKP	:	Wilayah Kerja Panas Bumi
503. WNI	:	Warga Negara Indonesia
504. WP	:	Wajib Pajak
505. WUB	:	Wira Usaha Baru
506. ZEEI	:	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju



Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	Harga Minyak (US$/barel)	*Lifting* Minyak (rbph)	*Lifting* Gas (rbsmph)
APBN 2026	5,4	2,5	6,9	16.500	70	610	984
Outlook 2025	4,7-5,0	2,2-2,6	6,8-7,3	16.300-16.800	68-82	593-597	976-980

APBN 2026 | *Outlook* 2025



Pendapatan Negara dioptimalkan melalui *Core Tax*, *Joint Program*, SIMBARA, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum

Belanja Negara untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan a.l. Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Pendidikan Bermutu, Kesehatan Berkualitas, dan Penguatan Koperasi Desa

(689,1)
(2,68%) PDB

Pembiayaan Anggaran dilakukan secara *prudent* untuk mendukung Program prioritas

(RpTriliun)

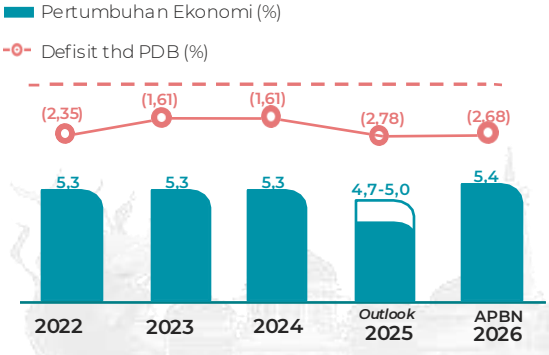


Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB dijaga dalam batas aman dan mendukung APBN ekspansif yang terarah dan terukur

Pendapatan Negara | Belanja Negara | Defisit Anggaran | Pembiayaan Anggaran

APBN 2026 **mewujudkan Asta Cita** untuk Indonesia Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur melalui **Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi** menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera

Kebijakan *countercyclical* untuk merespons gejolak perekonomian global dan risiko ketidakpastian, serta menjaga perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat



(Rp Triliun)

Pendapatan Negara	2.865,5	3.153,6
• Perpajakan	2.387,3	2.693,7
• PNBP	477,2	459,2
• Hibah	1,0	0,7
Belanja Negara	3.527,5	3.842,7
• Belanja Pemerintah Pusat	2.663,4	3.149,7
• Transfer ke Daerah	864,1	693,0
Defisit / Pembiayaan Anggaran	662,0	689,1

Outlook 2025 | APBN 2026

Ringkasan
Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF
APBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar dan dipertahankan selama 8 (delapan) dekade menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia untuk terus bersatu dalam menjaga kedaulatan, menyejahterakan rakyat, dan memajukan Indonesia Raya. Segala daya dan upaya segenap komponen bangsa harus dikerahkan untuk mewujudkan amanah dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 menjadi pijakan dalam menyusun strategi ekonomi dan fiskal. Pemerintah mendorong penguatan peran strategis APBN sebagai instrumen negara untuk mengoptimalkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi di tengah perubahan lanskap perekonomian global yang sangat dinamis.

Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan disrupsi perdagangan internasional, peran sentral APBN menjadi sangat strategis guna meredam tekanan eksternal sekaligus tetap mendorong agenda pembangunan nasional. Pada tahun 2026, ketidakpastian global diperkirakan masih terus berlanjut dan semakin kompleks. Risiko ketahanan pangan dan energi, serta eskalasi ketegangan geopolitik seperti konflik dan ancaman siber (*cyber*) dan nuklir semakin mengikis tatanan internasional yang dilandaskan pada aturan dan kesepahaman untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, tensi ketidakpastian global diharapkan mereda sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian global. Berdasarkan kondisi tersebut, International Monetary Fund (World Economic Outlook, Juli 2025) memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2026 tumbuh 3,1 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi global 2026 sedikit membaik jika dibandingkan *outlook* 2025 sebesar 3,0 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang sebesar 3,3 persen.

Di tengah tingginya risiko global, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi kuartal ke-II tahun 2025 mencapai 5,12 persen *(yoy)*, terutama didukung oleh terjaganya konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang tumbuh tinggi. Momentum tersebut akan terus dijaga sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai kisaran 5 persen sampai dengan akhir tahun 2025. Kinerja ekspor nasional terutama didorong oleh sektor industri pengolahan. Hal ini membuktikan bahwa strategi hilirisasi mulai menuai hasil. Upaya ini menggambarkan kita mampu berdiri di kaki sendiri untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja di tanah air. Indikator kesejahteraan rakyat Indonesia juga terus menunjukkan perbaikan. Lapangan kerja terus bertambah, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 (tingkat pengangguran terbuka Februari 2024 sebesar 4,82 persen). Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,47 persen yang merupakan terendah sejak kemerdekaan Republik Indonesia.

Laju inflasi tetap terkendali yang mencerminkan terjaganya daya beli masayarakat. Kinerja neraca perdagangan mencatatkan surplus 62 bulan berturut-turut di tengah perekonomian dunia yang relatif stagnan. Cadangan devisa pada Maret 2025 menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah.

Selain itu, dalam 10 (sepuluh) bulan pertama Kabinet Merah Putih, berbagai program prioritas strategis menunjukkan capaian sebagai modal penting menyongsong agenda pembangunan ke depan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil/menyusui, serta balita dan anak prasekolah di berbagai daerah. Sementara Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah melayani masyarakat melalui Puskesmas dan sekolah/madrasah. Di bidang pendidikan, 166 Sekolah Rakyat mulai beroperasi dan pembangunan SMA Unggul Garuda dimulai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Melanjutkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pencapaian target 3 Juta Rumah, serta penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di sektor pangan, optimasi 500 ribu hektar sawah dan 225 ribu hektar cetak sawah baru terus dilakukan untuk menjaga swasembada pangan. Modernisasi Alutsista dan intelijen dilanjutkan untuk memperkuat pertahanan semesta dan menjaga kedaulatan nasional. Berbagai capaian tersebut akan diakselerasi untuk memenuhi target tahun 2025 serta dilanjutkan dan dioptimalkan dalam agenda pembangunan tahun 2026.

Upaya menjaga kredibilitas Indonesia di kancah global dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk tetap berdiri sama tegak dengan negara-negara lain akan diteruskan. Keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat membuahkan penurunan tarif yang lebih rendah menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen. Hal tersebut akan berperan penting dalam menjaga kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Penyelesaian *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan Uni Eropa diharapkan membuka akses pasar Indonesia dan memperkuat hubungan ekonomi bilateral secara lebih luas dengan potensi penduduk dan ekonomi Uni Eropa yang besar. Selain itu, Pemerintah juga turut aktif membina kerjasama dalam forum BRICS, G20, OECD, dan ASEAN. Berbagai kesepakatan yang telah dicapai akan menjadi pelecut semangat Pemerintah untuk terus berperan aktif, baik secara bilateral maupun multilateral dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia melalui kerja sama internasional.

Selanjutnya, menghadapi dinamika global tahun 2026, Pemerintah Indonesia berfokus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi dunia usaha serta kelompok rentan. Strategi ekonomi dan fiskal akan diselaraskan dengan pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2026. Upaya dalam menjaga daya beli akan dilakukan melalui pengendalian inflasi serta optimalisasi program perlindungan sosial dan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Upaya meningkatkan investasi akan difokuskan pada sektor strategis bernilai tambah, sedangkan penguatan ekspor didorong melalui hilirisasi dan diversifikasi pasar. Sementara itu, dari sisi suplai, Pemerintah mendorong penguatan rantai pasok pertanian, hilirisasi industri, dan proyek strategis nasional (PSN).

Untuk mendukung transformasi struktural, Pemerintah melakukan langkah strategis antara lain diversifikasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, mendorong sektor industri, mengakselerasi ekspor dan konektivitas global, serta menguatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain*). Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi motor penggerak investasi produktif. Upaya

tersebut diperkuat dengan langkah penguatan regulasi dan penyederhanaan birokrasi sebagai kunci percepatan investasi serta pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Berpijak atas proyeksi perekonomian global tahun 2026, stabilitas ekonomi domestik, capaian pembangunan nasional tahun berjalan, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2026, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 5,4 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi terus diarahkan supaya lebih inklusif melalui pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan. Pemerintah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan mencapai rentang 6,5-7,5 persen. Rasio gini diupayakan menurun hingga rentang 0,377-0,380. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan mendekati 0 (nol) persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun ke kisaran 4,44-4,96 persen. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sehingga Indeks Modal Manusia (IMM) ditargetkan membaik mencapai 0,57. Selain itu, sasaran pembangunan nasional juga diupayakan semakin meningkat melalui indeks kesejahteraan petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan pekerjaan formal mencapai 37,95 persen. Di samping itu, *Gross National Income* (GNI) per Kapita ditargetkan mencapai USD5.520, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 37,14 persen dan indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 76,67.

Pokok-Pokok APBN Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, Pemerintah menyusun APBN tahun 2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda pembangunan (Asta Cita). Program Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan. APBN memainkan peran penting sebagai instrumen negara dalam mencapai tujuan tersebut, dengan mengedepankan prinsip alokasi adil, distribusi merata, serta stabilisasi ekonomi.

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 difokuskan untuk mewujudkan "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Strategi jangka pendek diarahkan untuk: *pertama*, memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan dan investasi dengan negosiasi, deregulasi, dan perluasan pasar ekspor. Upaya tersebut termasuk memperkuat strategi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. *Kedua*, melindungi dunia usaha dan daya beli masyarakat melalui pemberian insentif fiskal dan berbagai program perlindungan sosial. *Ketiga*, menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit serta melakukan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*), efisiensi, dan fokus belanja untuk agenda prioritas, optimalisasi pendapatan negara, serta mengoptimalkan *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial. Strategi jangka menengah membutuhkan konsistensi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial dengan ditopang pengelolaan fiskal yang sehat

dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi jangka menengah difokuskan melalui 8 (delapan) strategi, yaitu (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) Makan Bergizi Gratis (MBG); (4) program pendidikan bermutu; (5) program kesehatan berkualitas; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas Pemerintah yang diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, stabilitas harga pangan, serta mewujudkan petani dan nelayan sejahtera. Dukungan Pemerintah melalui anggaran ketahanan pangan mencakup antara lain pembangunan infrastruktur pertanian (seperti jaringan irigasi, bendungan, jalan usaha tani, cetak sawah), bantuan serta modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), subsidi pupuk, bantuan benih, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Selain itu, pendekatan kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta juga terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemerintah juga mendukung peningkatan produktivitas produksi pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, mekanisasi dan adopsi teknologi modern pertanian, serta penggunaan benih dan bibit unggul. Selain itu, Pemerintah juga mendorong peran Perum BULOG dalam menjaga stok beras dan pangan nasional.

Ketahanan energi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mewujudkan kemandirian energi. Dalam mendukung ketahanan energi, Pemerintah terus mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Transisi energi dilakukan dalam ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel untuk mendukung energi hijau. Langkah-langkah pengembangan pemanfaatan energi terbarukan, seperti biodiesel terus dilakukan bersama-sama antara produsen, Pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan *lifting* minyak bumi dan gas (Migas) dengan memanfaatkan sumur-sumur yang tidak aktif, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi modern, mengeksplorasi cadangan minyak baru, serta mendorong investasi sektor hulu Migas. Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan kebijakan subsidi energi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran dengan mengarahkan kelompok masyarakat sangat mampu agar tidak lagi menikmati subsidi energi dan kompensasi mulai tahun 2026. Penyaluran subsidi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan akurasi penerima manfaat subsidi.

Selanjutnya, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat terutama anak usia sekolah, pelaksanaan program MBG akan terus dioptimalkan. Dampak MBG terus diperkuat terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang. Peningkatan penggunaan sumber pangan lokal terus didorong guna memperbesar stimulus ekonomi mikro dan kecil sehingga masyarakat semakin berdaya.

Anggaran pendidikan menjadi anggaran wajib yang porsi anggarannya terus dijaga dan dilakukan penguatan dalam implementasinya untuk meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah terus mendukung peningkatan pendidikan yang berkualitas melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pemberian beasiswa, dukungan kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah, serta bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan perguruan tinggi. Selain itu, Pemerintah akan mendorong perluasan program unggulan di bidang pendidikan seperti

Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, serta akselerasi program rehabilitasi dan renovasi sekolah.

Sekolah Unggul Garuda merupakan sarana formal sebagai pusat pengembangan bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, serta difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan kemiskinan ekstrem. Para siswa di Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengasah bakat, minat, dan keahliannya sehingga setelah lulus mampu berdikari dan memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarganya. Selain itu, dalam mendukung kelancaran kegiatan belajar, Pemerintah melaksanakan program renovasi sekolah rusak dan kurang layak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan. Dengan demikian, sinergi antara program Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan renovasi sekolah akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua rakyat Indonesia, mulai dari dalam kandungan hingga lansia. Upaya di bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program untuk menjaga kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan, dukungan bantuan iuran PBI JKN, serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia akan mengurangi disparitas dan meningkatkan keadilan layanan kesehatan.

Sementara itu, pembangunan desa dan percepatan pemberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal tetap menjadi fokus Pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran koperasi diperkuat sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan tujuan mewujudkan ekonomi inklusif dan berkeadilan, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah terus memperkuat UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejolak global. Dukungan terhadap UMKM dilakukan melalui program KUR, kredit Ultra Mikro (UMi), serta fasilitasi dan pembinaan akses pembiayaan UMKM.

Menghadapi geopolitik global, serta untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan menjaga ketertiban, Pemerintah akan memperkuat pertahanan negara dengan penguatan postur pertahanan melalui pendekatan *optimum essential force,* serta upaya pemenuhan dan modernisasi/harwat/Alutsista/Alpalhankam/Almatsus. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kemampuan industri pertahanan dan produksi dalam negeri serta memberikan dukungan teknologi di bidang pertahanan. Selain itu, dalam penguatan di bidang hukum, Pemerintah akan menjaga penegakan hukum dan keadilan dalam penindakan perkara.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, peran BPI Danantara dan swasta diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Upaya Pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memberikan dukungan insentif fiskal untuk mendorong peningkatan dan percepatan investasi, serta pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Peningkatan investasi diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Selanjutnya, berbagai bauran strategi di atas dibingkai dalam kebijakan fiskal yang tercantum dalam APBN tahun 2026 yang akan dijaga tetap sehat, kredibel, dan produktif. Optimalisasi Pendapatan Negara akan dilakukan dengan menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan adaptif terhadap perkembangan global.

Kebijakan Perpajakan yang lebih adaptif dan efektif dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara di tengah berbagai tantangan yang ada. Kebijakan Perpajakan akan dilakukan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi dan hilirisasi industri.

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diarahkan untuk optimalisasi Pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Optimalisasi PNBP dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Di sisi lain, Belanja Negara akan terus dijaga tetap efisien dengan fokus pada program prioritas serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Belanja Pemerintah Pusat akan terus diarahkan pada belanja yang berkualitas. Arah Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2026 yaitu: (1) mengoptimalkan belanja pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan program pembangunan; (2) memprioritaskan belanja barang untuk mendukung kebijakan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat; (3) mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional; (4) mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan (5) melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Pemerintah terus meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan Transfer ke Daerah yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif serta mendukung prioritas nasional, utamanya pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya, peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik.

Selanjutnya, strategi Pembiayaan Anggaran diterapkan secara hati-hati (*prudent*), inovatif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengendalian rasio utang agar tetap dalam batas aman dan terkendali dengan mengutamakan sumber pembiayaan yang efisien. Selain itu, efektivitas pembiayaan investasi terus ditingkatkan dengan mendorong sinergi antara Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle* (SMV), serta BPI Danantara agar dapat menjadi katalis pembangunan tanpa membebani APBN secara langsung. Di sisi lain, Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), UMKM, dan usaha Ultra Mikro (UMi) melalui berbagai skema subsidi dan program.

Kebijakan *countercyclical* akan diarahkan untuk memberikan respons atas tantangan dinamika perekonomian global serta pijakan

yang kokoh demi mengantarkan Indonesia menjadi negara maju yang adil, tangguh, dan berdaulat. Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur tersebut, Defisit APBN diproyeksikan mencapai 2,68 persen terhadap PDB atau Rp689.147,9 miliar, dengan rasio utang terkendali dan dijaga dalam batas aman. Belanja Negara sebesar Rp3.842.728,4 miliar diarahkan secara efektif dan efisien untuk mendukung agenda pembangunan Pemerintah. Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp3.153.580,5 miliar yang akan dicapai melalui optimalisasi pendapatan (*extra effort*) secara konsisten dan berkelanjutan. Secara ringkas Postur APBN tahun 2026 disajikan dalam **Tabel 1**.

TABEL 1
POSTUR APBN 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2025		2026
	APBN	***Outlook***	**APBN**
A. PENDAPATAN NEGARA	**3.005,1**	**2.865,5**	**3.153,6**
I. Pendapatan Dalam Negeri	**3.004,5**	**2.864,5**	**3.152,9**
1. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	2.387,3	2.693,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	513,6	477,2	459,2
II. Penerimaan Hibah	**0,6**	**1,0**	**0,7**
B. BELANJA NEGARA	**3.621,3**	**3.527,5**	**3.842,7**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.701,4**	**2.663,4**	**3.149,7**
1. Belanja K/L	1.160,1	1.275,6	1.510,5
2. Belanja non-K/L	1.541,4	1.387,8	1.639,2
II. Transfer Ke Daerah	**919,9**	**864,1**	**693,0**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(63,3)**	**(109,9)**	**(89,7)**
D. DEFISIT ANGGARAN (A - B)	**(616,2)**	**(662,0)**	**(689,1)**
% Defisit terhadap PDB	*(2,53)*	*(2,78)*	*(2,68)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**616,2**	**662,0**	**689,1**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 1

Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro Fiskal

BAB I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL

1.1. Pendahuluan

Perekonomian global diproyeksikan masih bergejolak dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor.

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih terjaga sepanjang periode 2022-2024. Pertumbuhan ekonomi stabil di level 5 persen dengan inflasi terkendali pada periode tersebut. Tahun 2025, di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi pada semester I dapat dijaga sebesar 4,99 persen *(yoy)*, salah satu tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi pada bulan Juli 2025 relatif terkendali sebesar 2,37 persen *(yoy)*, sehingga menjaga tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor signifikan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah juga berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen tahun 2021 menjadi 8,47 persen tahun 2025, bahkan kemiskinan ekstrim dapat di turunkan dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen dalam periode yang sama. Tingkat ketimpangan juga berkurang dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,375 pada tahun 2025. Pemerintah juga terus memperbaiki upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator yang lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tahun 2025, Pemerintah menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai target dalam mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia dengan target sebesar 0,56.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam memengaruhi perekonomian. Besaran APBN dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sektor riil (permintaan agregat), sektor moneter, dan sektor eksternal (neraca pembayaran). Dalam APBN 2026, dampak APBN terhadap sektor-sektor ekonomi di evaluasi dalam tiga tahun terakhir untuk mendapat gambaran bagaimana APBN memberi manfaat dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Evaluasi terhadap dampak tersebut juga dapat memberi gambaran berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai di tahun 2026 yang memengaruhi penyusunan target asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam APBN 2026.

Kebijakan fiskal tahun 2026 merupakan keberlanjutan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan. Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas tersebut diharapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk mencapai Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, arsitektur APBN 2026 diarahkan untuk mencapai "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi". Kebijakan fiskal yang akan di tempuh pada tahun 2026 tersebut, akan bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meredam guncangan, melindungi dunia usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

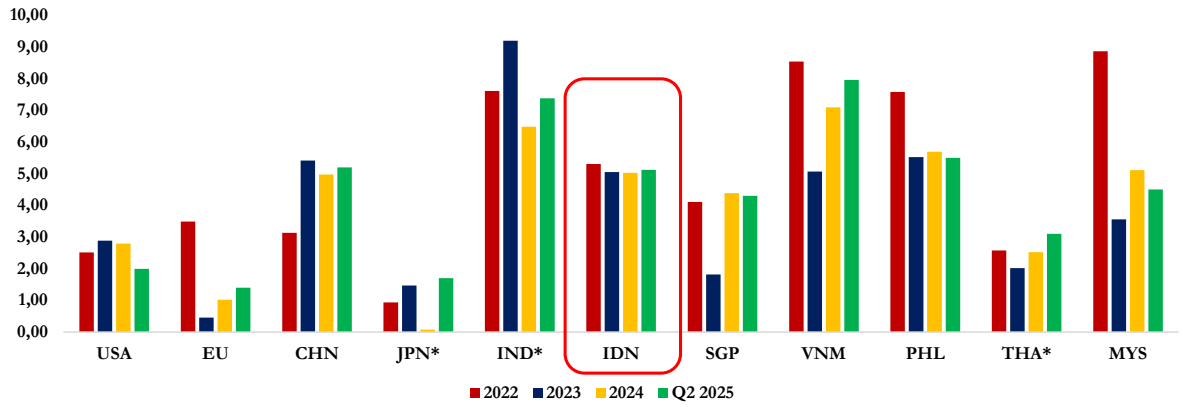
1.2. Dinamika dan Prospek Perekonomian Global

Sejak tahun 2022 hingga paruh pertama 2025, perekonomian global masih dilingkupi ketidakpastian. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh pergeseran globalisasi menuju fragmentasi, meningkatnya proteksionisme, dan melemahnya kerja sama internasional. Situasi tersebut diperburuk oleh konflik geopolitik yang berkelanjutan, seperti perang di Ukraina, ketegangan Israel–Iran, serta kebijakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) yang mengganggu stabilitas rantai pasok global. Akibatnya, arus perdagangan dan investasi global mengalami tekanan, volatilitas pasar keuangan meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tertekan.

Pada triwulan II tahun 2025, perekonomian global mencatat kinerja yang bervariasi antar kawasan. AS hanya tumbuh 2,00 persen *(yoy)* akibat tekanan dari peningkatan impor dan penurunan belanja Pemerintah. Sementara itu, Tiongkok tumbuh tinggi 5,20 persen *(yoy)*, melampaui ekspektasi pasar, berkat ketahanan ekspor menjelang penerapan tarif baru AS serta dukungan stimulus fiskal dan moneter. Kawasan Eropa mencatat pertumbuhan 1,40 persen *(yoy)*, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring penurunan inflasi dan pelonggaran kebijakan moneter oleh European Central Bank (ECB). Di kawasan ASEAN, pertumbuhan tetap terjaga didukung kuatnya permintaan domestik dan pemulihan sektor pariwisata, dengan Vietnam mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,96 persen *(yoy)*, diikuti Filippina sebesar 5,50 persen *(yoy)*, Indonesia sebesar 5,12 persen *(yoy)*, Malaysia 4,50 persen *(yoy)* dan Singapura 4,30 persen *(yoy)*. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN dan G-20 pada triwulan II 2025 dapat dilihat pada **Grafik 1.1**.

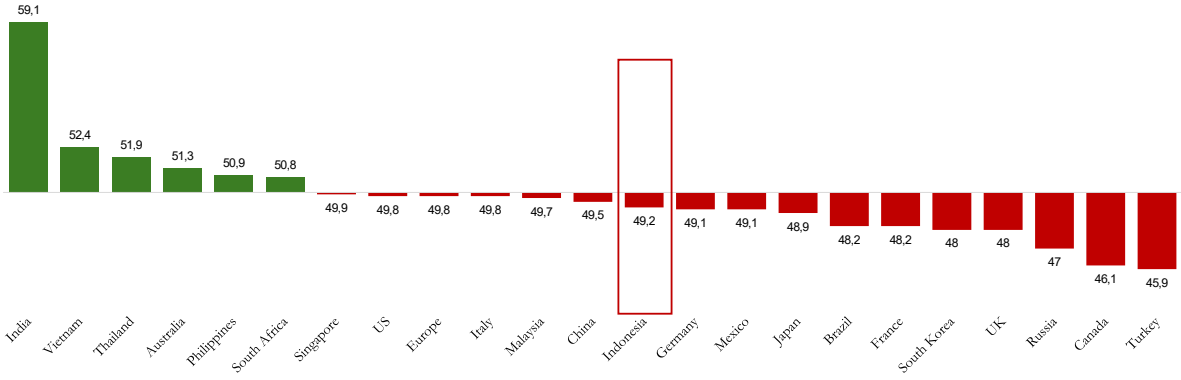
Meningkatnya ketidakpastian global menekan kinerja sektor manufaktur. Sebanyak 73,9 persen negara G20 dan ASEAN-6 masih berada di zona kontraksi pada Juli 2025. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur kawasan ASEAN melemah, tercermin dari penurunan *output*, pesanan baru, dan jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, beberapa negara menunjukkan perbaikan kinerja manufaktur.

GRAFIK 1.1
PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA ASEAN & G20
(dalam persen)



*) menggunakan data triwulan I 2025
Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.2
PMI MANUFAKTUR BEBERAPA NEGARA
JULI 2025

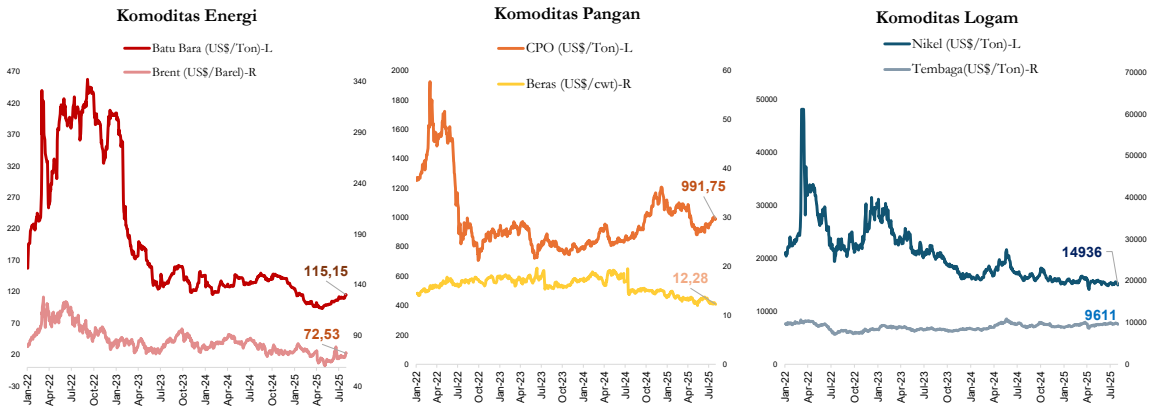


Sumber: Bloomberg

Di Eropa, sektor manufaktur tetap terkontraksi namun mulai menunjukkan perbaikan bertahap melalui stabilisasi pesanan baru dan kenaikan *output*. Pada bulan Juli, Indeks PMI Manufaktur Global kembali ke zona kontraktif (49,7) setelah mengalami ekspansi di bulan Juni (50,3) didorong oleh *front loading* sebelum pemberlakuan tarif impor AS. Ekspansi tertinggi dicatat oleh PMI India dengan indeks 59,1. Sementara itu, PMI AS dan Tiongkok mengalami kontraksi dengan indeks masing-masing 49,8 dan 49,5. Purchasing Managers Index Manufacture untuk beberapa negara dapat di lihat pada **Grafik 1.2**.

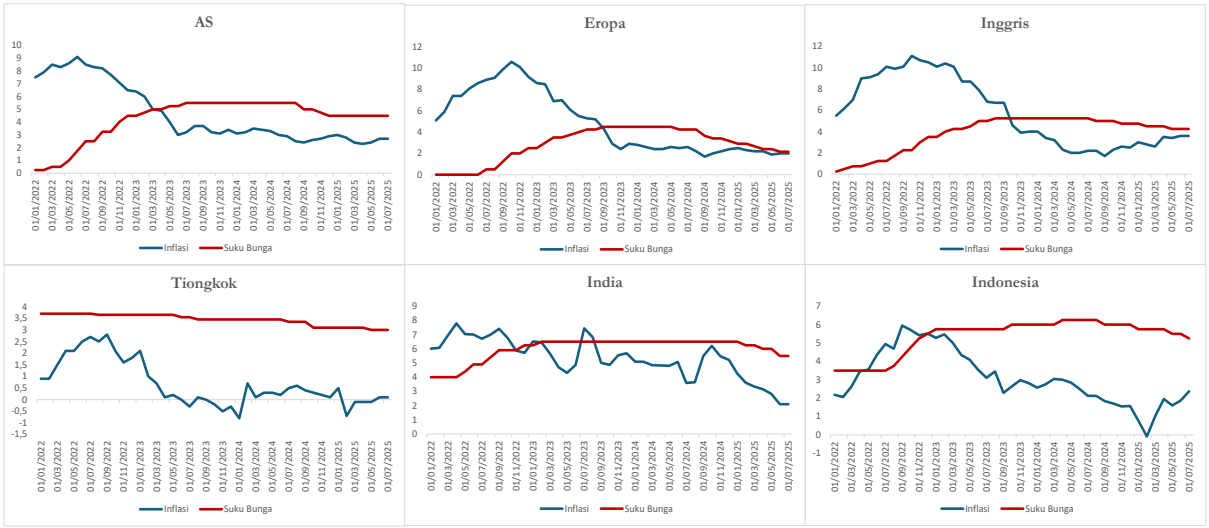
Harga komoditas global belum meningkat dengan volatilitas yang tinggi. Harga minyak dunia melemah karena peningkatan pasokan OPEC+ dan penurunan permintaan, dengan pergerakan yang fluktuatif dipengaruhi konflik di Timur Tengah. Harga logam dasar dan nikel tertekan oleh perlambatan industri dan kelebihan pasokan. Di sisi lain, tembaga dan batu bara membaik karena pasokan ketat dan lonjakan permintaan di Asia. Di sektor pangan, harga CPO fluktuatif akibat dinamika kebijakan dan penggunaan sumber energi terbarukan lainnya, sedangkan harga beras turun karena kelebihan pasokan meskipun terjadi peningkatan permintaan untuk stok AS. Perkembangan harga komoditas global dapat dilihat pada **Grafik 1.3**.

GRAFIK 1.3
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS*



*) sampai dengan 31 Juli 2025
Sumber: Bloomberg

GRAFIK 1.4
PERKEMBANGAN INFLASI DAN SUKU BUNGA NEGARA TERPILIH
(dalam persen)



Sumber: Bloomberg

Tekanan inflasi global terdispersi antara negara maju dan berkembang. Di negara maju, harga pangan, transportasi, dan jasa berkontribusi terhadap tingkat inflasi yang masih cukup tinggi meski mulai melandai, dipengaruhi terutama oleh harga energi yang mulai stabil. Sebaliknya, inflasi di negara berkembang relatif lebih terkendali, bahkan menurun, seiring stabilnya harga pangan dan permintaan domestik. Ke depan, berdasarkan proyeksi IMF, inflasi global diperkirakan terus menurun secara bertahap seiring normalisasi harga. Rata-rata inflasi global diproyeksikan turun dari 5,7 persen pada 2024 menjadi 4,2 persen pada 2025.

Pada tahun 2022 hingga awal 2025, suku bunga global mengalami dinamika signifikan akibat lonjakan inflasi pascapandemi dan gejolak geopolitik. Tahun 2022 ditandai dengan awal siklus pengetatan moneter, di mana bank sentral utama seperti The Fed, ECB, dan BoE secara agresif menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi masing-masing sebesar 4,5 persen, 2,0 persen, dan 4,0 persen pada akhir tahun. Tren ini berlanjut hingga 2023, mencapai puncaknya dengan suku bunga global tertinggi dalam dua dekade, menyebabkan kondisi keuangan mengetat dan memberi tekanan pada negara berkembang. Memasuki tahun 2024, inflasi mulai melandai, mendorong negara seperti Brasil dan Chile memulai pelonggaran suku bunga, sementara negara maju masih bertahan di level tinggi. Pada 2025, bank sentral utama mulai menurunkan suku bunga secara bertahap seiring meredanya inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, meski tetap berhati-hati terhadap risiko global seperti eskalasi geopolitik dan harga energi. Perkembangan laju inflasi dan tingkat suku bunga beberapa negara dapat dilihat pada **Grafik 1.4**.

Perkembangan nilai tukar mata uang global sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2025 ditandai dengan fluktuasi yang signifikan, didorong arah kebijakan moneter masing-masing negara, ketidakpastian geopolitik, dan dinamika harga komoditas. Pada periode 2022-2023, penguatan dolar AS cukup dominan seiring dengan pengetatan kebijakan agresif Federal Reserve (The Fed) untuk meredam inflasi, yang menyebabkan depresiasi mata uang di banyak negara berkembang. Memasuki tahun 2024 dan paruh pertama 2025, meskipun The Fed mulai menunjukkan sinyal pelonggaran dan bank sentral lain seperti ECB mulai memangkas suku

bunga, volatilitas masih tetap tinggi. Konflik geopolitik seperti di Timur Tengah dan perang di Ukraina terus memicu *risk sentiment*, mendorong investor mencari aset aman seperti dolar AS, Yen Jepang, atau emas, sehingga menekan nilai tukar mata uang negara-negara *emerging market*. Selain itu, ketidakpastian seputar kebijakan tarif dagang AS juga berkontribusi pada gejolak nilai tukar, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, menjadikan stabilitas nilai tukar sebagai tantangan berkelanjutan bagi otoritas moneter di seluruh dunia.

Volume perdagangan global diproyeksikan melambat namun diperkirakan akan membaik seiring penurunan tensi dagang. Bank Dunia memproyeksikan perlambatan dari 3,4 persen pada 2024 menjadi 1,8 persen pada 2025. Sejalan dengan Bank Dunia, IMF dalam WEO Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan global turun dari 3,8 persen pada 2024 menjadi 2,6 persen di 2025, meskipun meningkat 0,8 poin persentase dibanding WEO April 2025. Revisi proyeksi tersebut utamanya dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perdagangan di negara-negara utama serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor yang lebih besar ke negara berkembang diperkirakan mengalami pemulihan yang relatif lebih cepat dibandingkan negara yang lebih bergantung pada permintaan dari negara maju. Namun demikian, tingginya ketidakpastian kebijakan dan lemahnya permintaan global berpotensi menahan laju pemulihan secara lebih luas.

Prospek ekonomi global untuk tahun 2025 diproyeksikan membaik dibandingkan proyeksi sebelumnya, namun masih dibayangi risiko. IMF dalam WEO Juli 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0 persen, meningkat 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Perbaikan prospek ekonomi global didorong oleh kondisi sektor keuangan yang lebih longgar termasuk pelemahan dolar AS, tercapainya kesepakatan dagang beberapa negara dengan AS, ekspansi fiskal di beberapa negara yang meningkatkan permintaan, percepatan aktivitas ekonomi di awal periode (*front-loading*), serta penurunan inflasi global yang memperkuat daya beli dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, risiko pelemahan tetap perlu diwaspadai, terutama yang didorong oleh meningkatnya hambatan perdagangan, tingginya ketidakpastian, volatilitas keuangan yang membesar, serta melemahnya kepercayaan pelaku usaha.

1.3. Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik 2025

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah gejolak dan ketidakpastian global. Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 sempat menekan pertumbuhan ekonomi hingga terkontraksi sebesar 2,07 persen *(yoy)*. Namun, melalui respons kebijakan yang cepat dan terarah, khususnya lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perekonomian berhasil pulih dengan mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,70 persen *(yoy)* pada 2021. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 5,31 persen pada 2022 *(yoy)*, seiring dengan naiknya harga komoditas dan penguatan kinerja ekspor.

Momentum pemulihan terus berlanjut meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Pada 2023, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen *(yoy)* dan kembali tumbuh sebesar 5,03 persen *(yoy)* pada 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta penguatan aktivitas manufaktur. Dengan demikian, Indonesia berhasil menjaga tren pertumbuhan di kisaran 5 persen selama tiga tahun berturut-turut, mencerminkan

ketangguhan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Mengawali 2025, ekonomi Indonesia tumbuh resilien sebesar 4,87 persen *(yoy)* pada triwulan I di tengah peningkatan tekanan global. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan mendekati 5 persen, didukung stimulus fiskal seperti THR, diskon listrik dan tol, serta stabilisasi harga pangan. Investasi tumbuh moderat, sementara konsumsi Pemerintah terkontraksi akibat efek basis tinggi pasca-Pemilu. Ekspor tumbuh stabil 6,46 persen *(yoy)*, ditopang ekspor komoditas sawit dan besi baja yang tumbuh masing-masing 36,0 persen dan 6,6 persen *(yoy)*. Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh impresif di atas 10 persen berkat perbaikan distribusi pupuk yang mendorong optimalisasi panen raya. Industri pengolahan juga mencatat pertumbuhan solid, memperkuat fondasi transformasi ekonomi berbasis hilirisasi.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif pada triwulan II sebesar 5,12 persen *(yoy)* ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan juga kinerja ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97 persen *(yoy)*, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini didukung oleh berbagai insentif Pemerintah, seperti pemberian gaji ke-13, diskon tarif transportasi dan tol, penebalan bantuan sosial dan pangan, serta bantuan subsidi upah. Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur Lebaran, hari besar keagamaan, dan liburan sekolah juga turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat selama periode tersebut. Di sisi lain, konsumsi Pemerintah pada triwulan II masih sedikit terkontraksi sebesar 0,33 persen *(yoy)*, seiring dengan pertumbuhan belanja barang yang masih tumbuh negatif 9,7 persen *(yoy)*. Berbagai kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi pada triwulan II diarahkan untuk menjaga pengeluaran masyarakat pada kebutuhan pokok. Belanja negara penopang kinerja konsumsi Pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial pada triwulan II terserap lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III dan IV 2025, diperkirakan serapan belanja barang akan terakselerasi seiring dengan pelaksanaan program nasional seperti MBG, perumahan, koperasi, dan sekolah rakyat.

Aktivitas investasi pada triwulan II 2025 mencatat kinerja impresif, didorong oleh belanja modal Pemerintah dan *Capital Expenditure* (capex) BUMN sebagai katalis utama. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh sebesar 6,99 persen *(yoy)*, ditopang oleh tingginya penyerapan belanja modal, khususnya pada komponen mesin dan perlengkapan, sejalan dengan meningkatnya impor barang modal. Di sisi lain, investasi bangunan tumbuh sebesar 4,89 persen, mencerminkan menguatnya aktivitas konstruksi yang didorong oleh stimulus fiskal dan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dengan fondasi belanja modal Pemerintah, capex BUMN, dan dukungan bauran kebijakan, kinerja PMTB pada triwulan II 2025 menunjukkan momentum yang solid dan berkelanjutan.

Di tengah situasi perdagangan global yang masih penuh tantangan, kinerja ekspor impor barang dan jasa pada triwulan II 2025 tumbuh tinggi sebesar 10,67 persen dan 11,65 persen *(yoy)*. Ekspor barang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,62 persen *(yoy)*, terutama didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas. Peningkatan signifikan terlihat pada komoditas lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak kelapa sawit, serta komoditas besi dan baja. Sementara itu, ekspor jasa tumbuh 11,17 persen *(yoy)* terutama ditopang oleh kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tumbuh sebesar 13,96 persen *(yoy)*. Di sisi lain, impor

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Uraian	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
Konsumsi Rumah Tangga	4,9	4,8	4,9	4,7 – 5,0	5,2
Konsumsi Pemerintah	-4,4	3,0	6,6	4,9 – 5,2	4,3
PMTB	3,9	3,8	4,6	4,5 - 4,7	5,2
Ekspor	16,2	1,3	6,5	5,4 – 6,4	6,7
Impor	15,0	-1,6	7,9	6,6 – 7,7	7,2
Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,1	5,0	4,7 – 5,0	5,4

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan

barang tercatat tumbuh sebesar 12,17 persen *(yoy)* dipengaruhi oleh kelompok bahan baku/ penolong dan barang modal yang tumbuh masing-masing sebesar 4,53 persen dan 32,50 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran dapat di lihat pada **Tabel 1.1**.

Dari sisi produksi, sektor Manufaktur (industri pengolahan) tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2025, sektor manufaktur mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,68 persen *(yoy)*, ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga dan keberlanjutan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan subsektor industri logam dasar yang tumbuh tinggi sebesar 14,91 persen *(yoy)*, mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman tumbuh solid sebesar 6,15 persen *(yoy)*, seiring daya beli masyarakat yang terjaga dan pertumbuhan konsumsi domestik. Kinerja positif sektor manufaktur ini mencerminkan penguatan struktur industri nasional yang semakin produktif dan berdaya saing.

Kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kembali tumbuh positif pada triwulan II 2025 sebesar 1,65 persen *(yoy)* dengan kontribusi 13,83 persen terhadap PDB. Kinerja subsektor tanaman pangan tumbuh terkontraksi 6,01 persen *(yoy)* seiring dengan pengaruh pergeseran musim panen dari triwulan II ke triwulan I pada tahun 2025. Sementara itu, kinerja subsektor tanaman perkebunan tumbuh mencapai 3,26 persen *(yoy)*. Kinerja tersebut ditopang oleh permintaan tanaman sawit, kopi, dan kakao. Di samping itu, keberlanjutan kebijakan strategis Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional turutberkontribusi terhadap solidnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan II 2025 mencatat pertumbuhan positif meskipun pada tingkat yang relatif moderat sebesar 2,03 persen *(yoy)*. Pertumbuhan yang terbatas ini disebabkan oleh penurunan permintaan global terhadap ekspor batubara Indonesia dan tren harga batubara dunia yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, kinerja sektor ini turut ditopang oleh kinerja pertambangan bijih logam yang mampu tumbuh 2,06 persen *(yoy)* sejalan dengan program hilirisasi dan mulai beroperasinya sejumlah fasilitas pemurnian (smelter) mineral strategis, termasuk untuk komoditas bijih logam. Lebih lanjut, kinerja subsektor pertambangan dan penggalian lainnya juga tumbuh kuat sebesar 6,97 persen *(yoy)* seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional baik oleh Pemerintah maupun swasta.

Di tengah eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik global, Sektor Perdagangan tumbuh kuat sebesar 5,37 persen *(yoy)* pada triwulan II

2025. Kinerja yang solid ini terutama didukung oleh pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 6,50 persen *(yoy)*. Sejalan dengan hal tersebut, indeks perdagangan ritel nasional juga tumbuh positif sebesar 1,21 persen *(yoy)*. Sementara itu, subsektor perdagangan mobil dan sepeda motor mengalami kontraksi tipis 0,13 persen *(yoy)*. Secara keseluruhan, capaian yang cukup kuat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai kebijakan fiskal Pemerintah, termasuk melalui implementasi Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II. Stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung keberlangsungan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Sektor konstruksi pada triwulan II 2025 mencatat akselerasi dengan tumbuh 4,98 persen *(yoy)*, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18 persen *(yoy)*. Kinerja positif ini didorong oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis serta percepatan belanja modal Pemerintah. Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, laju pertumbuhan masih relatif terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian global yang menahan investasi swasta, serta tekanan pada biaya bahan bangunan akibat pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga komoditas konstruksi. Selain itu, sektor properti residensial belum sepenuhnya pulih, yang turut memengaruhi permintaan konstruksi swasta. Meskipun demikian, kontribusi dari proyek hilirisasi industri, pengembangan energi, dan konektivitas tetap menjadi penopang pertumbuhan sektor ini. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja infrastruktur dan menarik partisipasi swasta dalam pembiayaan proyek konstruksi. Di samping itu, stimulus fiskal di sektor perumahan, seperti PPN-DTP dan FLPP perumahan, juga turut memberikan dorongan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi.

Kinerja Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh kuat didorong peningkatan mobilitas masyarakat dan dukungan Pemerintah. Pada triwulan II 2025, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 8,04 persen *(yoy)*, sementara Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,52 persen *(yoy)*. Peningkatan aktivitas transportasi ditunjukkan oleh kenaikan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi, seperti kereta api, angkutan laut, dan penerbangan internasional. Jasa pergudangan dan kurir tumbuh 9,30 persen *(yoy)*, mencerminkan aktivitas *e-commerce* masih tinggi. Kinerja positif kedua sektor tersebut juga didukung oleh peningkatan arus wisatawan domestik dan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat 22,32 persen *(yoy)* dan wisatawan mancanegara naik 13,96 persen *(yoy)*. Secara keseluruhan, kuatnya kinerja pariwisata didorong oleh momentum HBKN/ libur sekolah, penyelenggaraan berbagai event budaya dan olahraga, serta dukungan Pemerintah melalui stimulus ekonomi, termasuk diskon tiket transportasi dan diskon tarif tol.

Sektor informasi dan komunikasi terus menjadi pendorong utama transformasi ekonomi digital nasional. Pada triwulan II 2025, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,92 persen *(yoy)* melanjutkan tren positif dari triwulan I yang tumbuh sebesar 7,72 persen *(yoy)*. Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya adopsi layanan digital seperti *e-commerce, fintech* pendidikan dan kesehatan berbasis daring serta didukung oleh infrastruktur digital yang semakin kuat. Transaksi digital mengalami peningkatan signifikan termasuk QRIS dan BI-FAST yang mencerminkan tingginya penetrasi sistem pembayaran berbasis teknologi. Sistem

pembayaran digital seperti QRIS, BI-FAST, dan layanan *digital banking* tumbuh pesat, baik dari sisi volume maupun jangkauan pengguna. Pemanfaatan QRIS lintas negara turut menjadi indikator penting dalam integrasi sistem pembayaran regional.

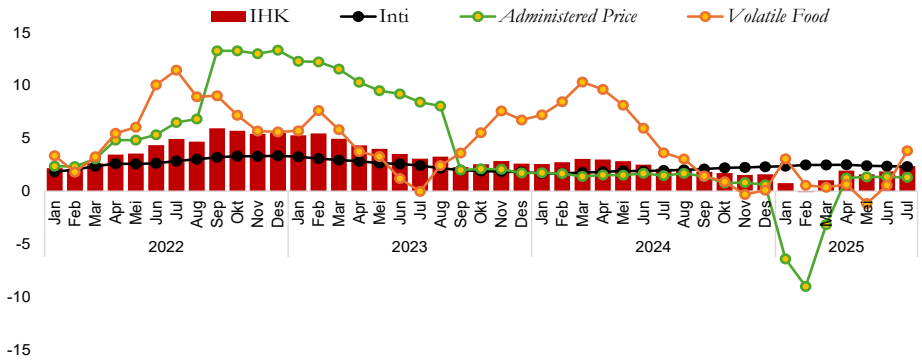
Pemerintah terus mendorong penguatan sektor ini melalui pengembangan sumber daya manusia digital dan penguatan regulasi. Program seperti *Digital Talent Scholarship*, *Digital Leadership Academy*, dan Gerakan Nasional Literasi Digital dijalankan untuk memperluas kapasitas talenta digital nasional. Di sisi regulasi, perlindungan data pribadi diperkuat melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, sementara keamanan digital ditingkatkan melalui koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan tetap menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif pada triwulan II 2025, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi, sebesar 5,83 persen *(yoy)*, didorong oleh peningkatan aktivitas pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Jawa dan Sumatra masing-masing tumbuh sebesar 5,24 persen *(yoy)* dan 4,96 persen *(yoy)*, seiring dengan penguatan kegiatan produksi, distribusi komoditas utama, serta ekspansi layanan berbasis informasi dan komunikasi. Kalimantan tumbuh 4,95 persen *(yoy)* seiring dengan penguatan sektor manufaktur dan perdagangan, sementara Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 3,73 persen *(yoy)* ditopang oleh pemulihan pariwisata. Adapun Maluku dan Papua tumbuh sebesar 3,33 persen *(yoy)*, dipengaruhi oleh moderasi aktivitas pertambangan. Capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap tumbuh sejalan dengan karakteristik dan keunggulan sektor masing-masing wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid turut ditopang oleh kondisi inflasi yang terkendali. Selama lima tahun terakhir, inflasi sempat berada di luar target pada tahun 2021 dan 2022 akibat dampak pandemi. Namun, seiring dengan meredanya tekanan harga, inflasi menunjukkan tren penurunan dan kembali berada dalam kisaran target, yaitu sebesar 2,6 persen *(yoy)* pada tahun 2023 dan turun menjadi 1,6 persen *(yoy)* di tahun berikutnya. Stabilitas harga pangan menjadi faktor utama penurunan inflasi, yang didukung oleh berbagai upaya stabilisasi pasokan di daerah, seperti pelaksanaan operasi pasar dan program pangan murah. Selain itu, kestabilan harga energi sepanjang tahun 2023-2024 serta penguatan inflasi inti turut berkontribusi dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Inflasi diperkirakan masih berada dalam batas sasaran Pemerintah pada tahun 2025. Meskipun pada triwulan pertama sempat di luar rentang sasaran akibat pemberian diskon listrik sebagai stimulus daya beli, inflasi kembali ke dalam rentang sasaran pada Juli 2025 dengan realisasi sebesar 2,37 persen *(yoy)*. Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut dan potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi harga energi domestik. Selain itu, pelaksanaan Program MBG juga perlu dikelola dengan cermat agar pasokan pangan nasional tetap aman. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, inflasi tahun 2025 diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,2 - 2,6 persen *(yoy)*. Perkembangan laju inflasi dapat dilihat dalam **Grafik 1.5**.

GRAFIK 1.5
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2022-2025
(dalam persen, yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Arah pembangunan yang inklusif telah menghasilkan kinerja ekonomi Indonesia yang kuat disertai inflasi terkendali. Kondisi tersebut mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, yang tergambar dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2024 tercatat 144,6 juta orang, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 135,3 juta orang. Sehingga, dalam periode 2022-2024 terdapat penambahan 9,3 juta lapangan kerja. Pada tahun 2024, elastisitas tenaga kerja tercatat sebesar 985 ribu, artinya bahwa setiap 1 persen pertumbuhan PDB riil dapat menciptakan tenaga kerja sebanyak 985 ribu pekerja.

Kondisi lapangan kerja tersebut mendorong penurunan jumlah pengangguran pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 7,47 juta orang dengan TPT sebesar 4,91 persen. Pada Februari 2025, kondisi lapangan kerja nasional semakin baik dengan TPT menurun hingga 4,78 persen. Pemerintah menargetkan TPT tahun 2025 berada dalam kisaran 4,5–5,0 persen.

Kondisi ketenagakerjaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Data Agustus 2024 menunjukkan bahwa pekerja di Pulau Jawa dan Sumatera masing-masing menyumbang 57,90 persen dan 20,97 persen dari total pekerja Indonesia. Kedua pulau tersebut juga mencatatkan TPT yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 5,33 persen dan 4,80 persen. Sebaliknya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan TPT terendah, yaitu sebesar 2,55 persen. Sementara itu, Maluku dan Papua mencatatkan TPT tertinggi, yaitu sebesar 5,48 persen.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor utama penyerap tenaga kerja, dengan total mencapai lebih dari 60 persen dari seluruh tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian dan perkebunan mendominasi di hampir semua wilayah, kecuali di Pulau Jawa yang didominasi oleh sektor perdagangan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pascapandemi paling signifikan terjadi di sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, seiring dengan pemulihan sektor pariwisata.

Perkembangan tingkat kemiskinan nasional juga terus menurun. Hal ini merupakan hasil dari program Pemerintah dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, dan stabilitas harga. Setelah berada di level dua digit akibat pandemi, tingkat kemiskinan kembali pada level satu digit di tahun 2022 sebesar 9,57 persen. Selanjutnya, tingkat kemiskinan September

2024 tercatat sebesar 8,57 persen dan per Maret 2025, tingkat kemiskinan sebesar 8,47 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan drastis dalam satu dekade terakhir, dari 6,20 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Pada Maret 2025, Pemerintah menggunakan garis kemiskinan internasional USD2,15 (2017 PPP) dan mencatat tingkat kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,41 persen poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan tahun 2025 berada dalam kisaran 7,0–8,0 persen.

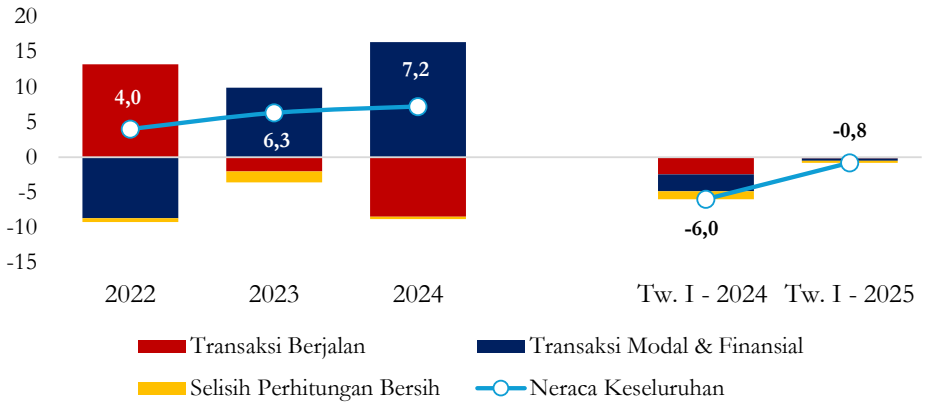
Ketimpangan terus menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan, tecermin dari penurunan Rasio Gini dari 0,384 pada tahun 2022 menjadi 0,379 pada Maret 2024. Pada Maret 2025, tingkat ketimpangan turun sebesar 0,004 poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,375. Penurunan ini mencerminkan distribusi konsumsi masyarakat Indonesia yang semakin merata. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen kuat Pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ke depan, kebijakan akan tetap difokuskan pada peningkatan kesejahteraan 40 persen penduduk terbawah, sekaligus memperkuat daya beli kelompok menengah dan atas untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Indikator pembangunan lainnya seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga menunjukkan perbaikan yang konsisten, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dan biaya produksi. Secara nasional, NTP meningkat dari 109,0 pada tahun 2022 menjadi 119,62 pada tahun 2024, didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani, khususnya di subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Sementara itu, NTN tercatat mencapai 106,45 pada 2022, namun kembali menurun menjadi 101,76 pada 2024 seiring dengan tekanan harga jual hasil tangkapan dan peningkatan biaya operasional nelayan. Target capaian NTP dan NTN tahun 2025 masing-masing berada pada kisaran 115 - 120 dan 105–108.

Peningkatan kualitas SDM terus menjadi prioritas utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan melalui Program Hasil Terbaik dan Cepat (PHTC), terutama program MBG, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan. Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat mengukur secara lebih komprehensif kapasitas dan daya saing SDM Indonesia. Pada tahun 2025, IMM ditargetkan hingga mencapai nilai 0,56.

Ketahanan dan stabilitas eksternal Indonesia relatif terjaga yang ditunjukkan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) konsisten surplus dalam kurun waktu 2022-2024. Surplus NPI 2022 tercatat USD 4,0 miliar, didorong oleh peningkatan surplus Neraca Transaksi Berjalan (NTB) dan Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF). Surplus NPI terus berlanjut di 2023 dan 2024 ditopang membaiknya kinerja NTMF di tengah peningkatan defisit NTB akibat moderasi surplus neraca perdagangan dan neraca pendapatan sekunder, penurunan defisit neraca jasa, dan peningkatan defisit neraca pendapatan primer. Moderasi surplus pada neraca pendapatan sekunder dipengaruhi oleh penurunan hibah Pemerintah, sementara penerimaan transfer personal remitensi relatif stabil. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer terus melebar didorong oleh peningkatan repatriasi pembayaran imbal hasil atas investasi asing. Di sisi lain, membaiknya kinerja NTMF ditopang oleh surplus investasi langsung yang konsisten, investasi portofilo yang berbalik arah dari defisit menjadi surplus, dan moderasi defisit investasi lainnya.

GRAFIK 1.6
NERACA PEMBAYARAN, 2022 - 2024
(USD miliar)

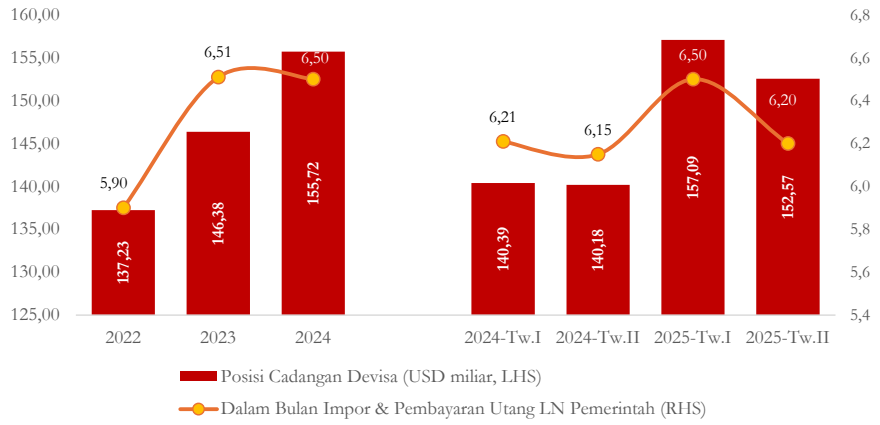


Sumber: Bank Indonesia, 2025 (diolah)

Pada tahun 2025, kinerja NPI tetap dapat menopang ketahanan eksternal meskipun mencatatkan defisit (TW I 2025: defisit USD0,8 miliar). Defisit ini disebabkan oleh defisit NTB dan investasi lainnya pada NTMF yang tidak cukup terkompensasi oleh surplus investasi langsung dan portofolio. NTB tercatat defisit sebesar USD0,2 miliar di tengah pelebaran defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa. Sementara itu, neraca perdagangan barang masih mencatatkan surplus di tengah gejolak harga komoditas. Neraca jasa memperlebar defisit NTB terutama didorong oleh kenaikan defisit neraca jasa transportasi dan moderasi surplus jasa perjalanan. Di sisi lain, NTMF mencatatkan defisit sebesar USD0,3 miliar pada triwulan I 2025 akibat surplus investasi langsung dan investasi portofolio yang lebih rendah dari defisit investasi lainnya. Kinerja neraca pembayaran Indonesia dapat di lihat pada **Grafik 1.6**.

Kinerja neraca pembayaran yang konsisten mencatatkan surplus selama 2022–2024 menopang penguatan cadangan devisa. Pada periode 2022-2024 posisi cadangan devisa meningkat dari sebesar 137,2 miliar dolar AS pada 2022 menjadi 155,7 miliar dolar AS di 2024. Tahun 2025, cadangan devisa bergerak fluktuatif dari 157,1 miliar dolas AS pada bulan Maret 2025 turun ke level terendahnya menjadi 152,1 miliar dolar AS pada April 2025. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri Pemerintah dan intervensi Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Pada bulan Mei 2025, cadangan devisa tercatat stabil di posisi 152,5 miliar dolar AS dan meningkat tipis menjadi 152,6 miliar dolar AS pada Juni 2025. Posisi ini ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa, surplus neraca perdagangan, dan penerbitan *global bond* Pemerintah. Cadangan devisa Indonesia tersebut setara dengan 6,4 bulan pembiayaan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Jumlah tersebut berada di atas standar kecukupan Internasional sebesar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa yang relatif masih kuat diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal dan mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Perkembangan cadangan devisa dapat dilihat pada **Grafik 1.7**.

GRAFIK 1.7
POSISI CADANGAN DEVISA, 2022 - 2024
(USD miliar)



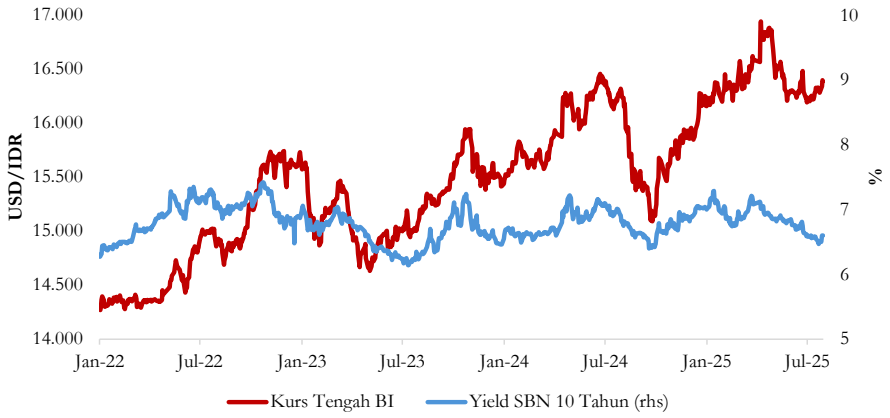
Sumber: Bank Indonesia, 2025 (diolah)

Di tengah defisit NTB dan fluktuasi NTMF pada NPI Indonesia, nilai tukar Rupiah bergerak fluktuatif mengikuti berbagai dinamika eksternal dan domestik. Pada periode 2022–2023, rupiah menghadapi tekanan dari konflik geopolitik yang memicu lonjakan inflasi global dan kemudian diikuti dengan era suku bunga tinggi di negara maju. Bank Indonesia (BI) merespons dengan kebijakan moneter ketat, menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi dan melakukan intervensi di pasar keuangan domestik. Memasuki tahun 2024, meskipun The Fed mulai memangkas suku bunga pada paruh tahun kedua, tekanan eksternal meningkat seiring eskalasi konflik Timur Tengah dan s*uper election year*. Rupiah sempat terdepresiasi ke titik terendah Rp16.458 per dolar AS pada Juni 2024. Kemudian, stabilitas nilai tukar yang membaik dan inflasi yang mulai terkendali mendorong BI melonggarkan suku bunga secara bertahap sejak September 2024, sementara rupiah bergerak menguat ke level Rp16.162 per dolar AS pada akhir tahun.

Memasuki 2025, ketidakpastian tetap tinggi, terutama pasca pengumuman rencana tarif resiprokal oleh Presiden Trump pada bulan April, menyebabkan rupiah terdepresiasi ke level terendah Rp16.943 per dolar AS. Rupiah kemudian mulai menguat setelah penundaan tarif disusul kesepakatan dagang Indonesia–AS pada bulan Juli. Per 31 Juli 2025, rupiah berada di level Rp16.459 per dolar AS atau melemah 1,8 persen dari posisi akhir 2024. Secara keseluruhan, rata-rata nilai tukar tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp16.300 - Rp16.800 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah dan *yield* SBN 10 tahun dapat di lihat pada **Grafik 1.8**.

Selain dampak pada nilai tukar rupiah, dinamika eksternal dan domestik juga memengaruhi pasar SBN, dengan *yield* SBN menunjukkan tren perbaikan yang signifikan selama tahun 2025. *Yield* SBN 10 tahun berada pada level 6,57 persen (per 31/07), menurun secara konsisten dari level 7,0 persen pada awal tahun 2025 seiring masuknya arus modal asing. Hal ini mencerminkan kuatnya minat terhadap SBN dan optimisme investor terhadap stabilitas perekonomian domestik. Sebelumnya, *yield* berfluktuasi di kisaran 6,27-7,42 persen pada tahun 2022 akibat tekanan pascapandemi dan awal siklus pengetatan moneter global. Memasuki tahun 2023, volatilitas berlanjut dengan *yield* sempat turun ke 6,14 persen pada bulan Juli, sebelum kembali naik di paruh tahun kedua. Kemudian, *yield* terus naik dari 6,46 persen pada awal tahun 2024 menjadi sekitar 7,0 persen pada akhir tahun, dipicu oleh ketidakpastian dan berbagai risiko geopolitik.

GRAFIK 1.8
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN *YIELD* SBN 10 TAHUN



Sumber: CEIC, diolah (s.d. 31 Juli 2025)

Pemerintah menargetkan *yield* SBN 10 tahun berada pada rentang 6,8-7,3 persen untuk tahun 2025, dengan tetap mewaspadai risiko global seperti kebijakan tarif AS. Sebagai upaya strategi diversifikasi sumber pembiayaan, Pemerintah merencakan penerbitan Dim Sum Bond berdenominasi renminbi Tiongkok dan Kangaroo Bond berdenominasi dolar Australia pada semester II 2025.

Di tengah fluktuasi pasar keuangan, intermediasi perbankan tetap tumbuh di tengah pelonggaran moneter. Kredit perbankan sempat tumbuh tinggi pada 2022 dan stabil di kisaran 10 persen *(yoy)* pada 2024 tetapi mulai mengalami perlambatan pada 2025. Per Juni 2025, penyaluran kredit mencapai Rp7.956,4 triliun atau tumbuh 7,6 persen *(yoy)*. Dalam upaya mendorong pertumbuhan kredit, BI juga meluncurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sejak awal 2025 sebagai salah satu bentuk insentif bagi perbankan. Dari sisi sumber dana, perbankan dihadapkan dengan risiko perlambatan sumber dana. Pada periode 2022–2023, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat terutama pada giro dan tabungan. Meski sempat pulih pada semester I 2024, tren tersebut kembali melemah pada 2025 akibat menurunnya pertumbuhan simpanan deposito. Hingga Juni 2025, DPK tumbuh 6,6 persen *(yoy)* mencapai Rp8.991 triliun, ditopang oleh DPK korporasi yang tumbuh 12,2 persen *(yoy)*, sementara DPK perorangan hanya naik 1,2 persen *(yoy)*. Penurunan suku bunga dan peralihan dana ke instrumen investasi lainnya seperti emas, obligasi, dan saham turut menjadi faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan DPK ke depan.

Intermediasi perbankan yang tumbuh solid didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang ample, dan kualitas aset yang baik. Pada Juni 2025, rasio kecukupan modal (CAR) tercatat tinggi sebesar 25,79 persen dengan rasio aset likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,05 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL gross) terjaga rendah pada kisaran 2–3 persen. Ke depan, dengan dukungan regulasi melalui implementasi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta digitalisasi layanan keuangan yang makin intensif, sektor perbankan diperkirakan masih mampu tumbuh resilien sehingga dapat berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

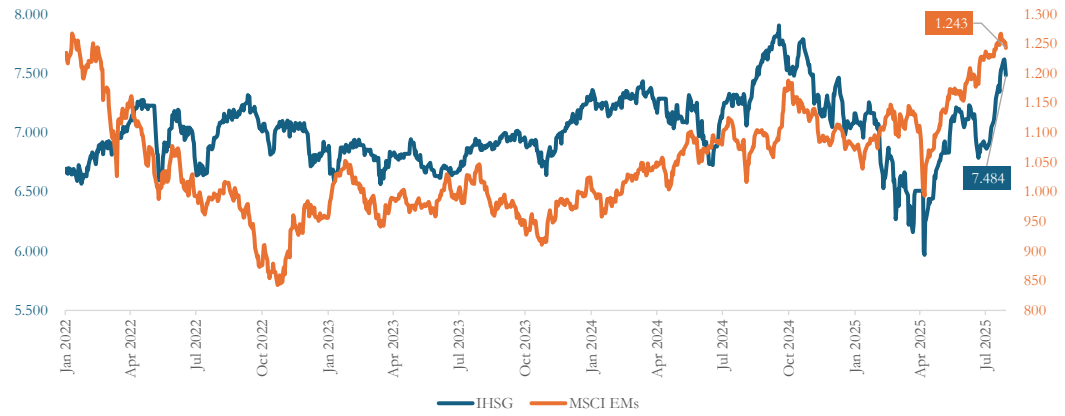
Selain perbankan, sumber pembiayaan pembangunan lainnya berasal dari pasar modal yang juga mencatatkan dinamika signifikan sepanjang 2022–2025, dipengaruhi oleh berbagai sentimen global dan domestik. Pada 2022, IHSG tumbuh 4,09 persen ke level 6.851,

ditopang pemulihan pascapandemi, kinerja positif sektor komoditas dan teknologi, serta stabilitas ekonomi nasional. Penguatan IHSG ke level 7.273 berlanjut di tahun 2023, meski dihadapkan pada kenaikan suku bunga The Fed dan ketegangan geopolitik. Namun, tahun 2024 yang menjadi tahun politik global menjadi tahun penuh volatilitas. IHSG sempat mencetak rekor 7.905 pada September, tetapi ditutup turun 2,65 persen ke 7.080 akibat perlambatan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian Pemilu AS.

Pengumuman *Liberation Day* oleh Donald Trump (2 April) yang mengguncang pasar global juga berdampak pada pasar modal Indonesia. Investor global beralih ke aset *safe haven*, sementara pasar Indonesia mencatat *net sell* asing sebesar Rp59,42 triliun hingga 24 Juli. Kepemilikan asing yang masih tinggi (39%) memperbesar dampak arus keluar tersebut. Meskipun demikian, sepanjang 2025, sejumlah IPO dari berbagai sektor memperluas pilihan investasi dan menunjukkan optimisme dunia usaha. Kapitalisasi pasar per Juli 2025 mencapai Rp13.485 triliun dari 920 emiten, dengan nilai *free float* Rp3.091 triliun. Aktivitas perdagangan tetap tinggi, tercermin dari rata-rata transaksi harian sebesar Rp13,34 triliun. Secara keseluruhan, meski dibayangi ketidakpastian global dan arus keluar modal, pasar saham Indonesia tetap tangguh, ditopang oleh fundamental ekonomi yang stabil, minat investor ritel, dan aksi korporasi yang aktif. Per 31 Juli 2025, IHSG berada pada level 7.484,34 atau menguat 5,71% *(ytd)*. Perkembangan IHSG dapat dilihat pada **Grafik 1.9**.

Lifting minyak dan gas (migas) hingga Juni 2025 menunjukkan peningkatan seiring efektivitas kebijakan Pemerintah di tengah tantangan keterbatasan infrastruktur produksi dan tantangan operasional. Hingga Juni 2025, capaian *lifting* migas menunjukkan tren positif dengan *lifting* minyak sebesar 578,0 ribu barel per hari (rbph) dan *lifting* gas mencapai 979,1 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Kinerja ini mencerminkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana *lifting* minyak meningkat 0,3 persen *(yoy)* dan *lifting* gas meningkat 3,4 persen *(yoy)*. Peningkatan ini dicapai meskipun sektor hulu migas masih menghadapi tantangan struktural, seperti dominasi lapangan yang *mature*, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta tingginya teknologi eksplorasi dan produksi.

GRAFIK 1.9
PERKEMBANGAN IHSG 2022 – 2025*

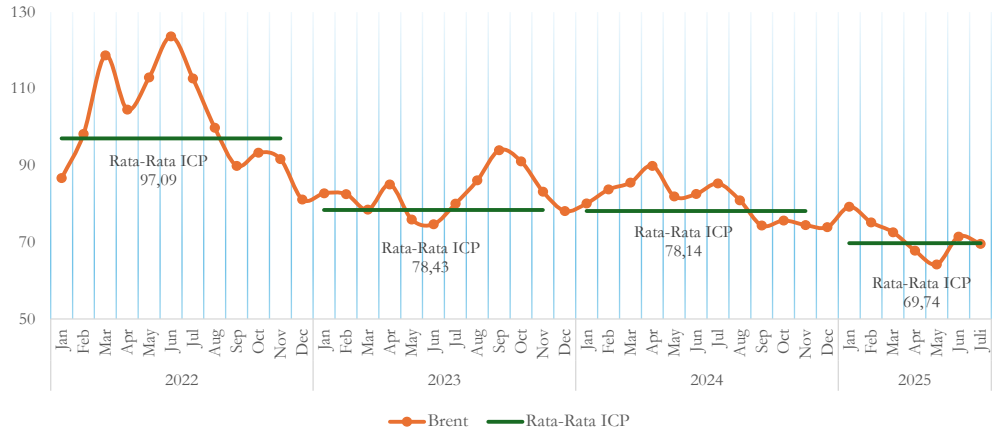


*) sampai dengan 31 Juli 2025
Sumber: Bloomberg

Kebijakan strategis Pemerintah turut mendorong peningkatan *lifting* migas di tahun 2025. Beberapa kebijakan tersebut antara lain akselerasi peningkatan produksi Blok Cepu sebesar 30 rbph (yang kini berkontribusi sekitar 25 persen dari total *lifting* minyak nasional), optimalisasi produksi dari lapangan baru seperti Forel dan Terubuk (Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B), serta dorongan kerjasama pengelolaan sumur antara BUMD, koperasi, dan UMKM sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 14 Tahun 2025. Selain itu, penyediaan insentif fiskal dan penyederhanaan regulasi tetap dilakukan untuk menarik investasi di sektor hulu migas. Secara keseluruhan, peningkatan *lifting* migas ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Tahun 2025 ditandai dengan fluktuasi tajam harga minyak mentah global, termasuk *Indonesian Crude Oil Price* (ICP), yang turut memengaruhi dinamika perekonomian Indonesia. Pada awal 2025, ICP Indonesia sempat menyentuh puncak kisaran USD76,81/barel pada Januari, meningkat sekitar USD5,20/barel dari Desember tahun 2024. Fluktuasi harga ICP yang signifikan sepanjang semester pertama 2025 mencerminkan pengaruh ketegangan geopolitik global, penyesuaian produksi OPEC+ dan dinamika permintaan energi global pasca-pandemi. Hal ini juga dipicu oleh optimisme pasar global setelah Tiongkok melakukan pelonggaran moneter dan stimulus fiskal serta kekhawatiran terhadap pengetatan pasokan akibat sanksi terhadap Rusia dan Iran. Volatilitas ini berdampak langsung pada pendapatan negara dari sektor migas serta realisasi subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Pemerintah terus mengarahkan agar tetap menjaga ketahanan fiskal dan mengedepankan kebijakan fiskal yang antisipatif dan adaptif terhadap dinamika eksternal, untuk memastikan keberlanjutan APBN serta menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi domestik. Perkembangan harga minyak mentah jenis Brent dan ICP Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 1.10**.

GRAFIK 1.10
PERKEMBANGAN HARGA BRENT DAN RATA-RATA ICP INDONESIA
(USD per barel)



Sumber: Bloomberg

1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2026

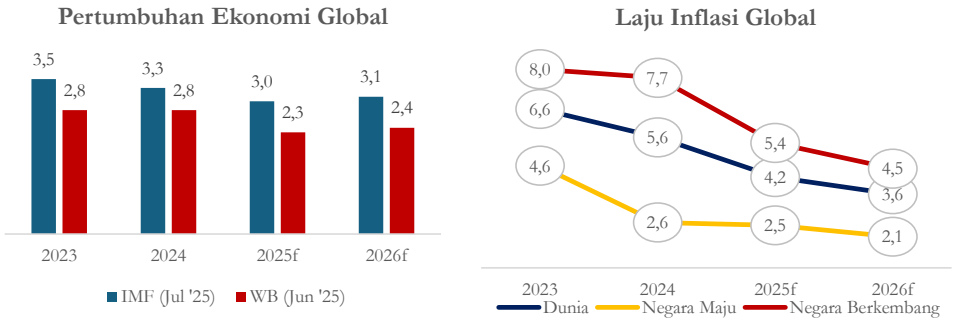
Pada tahun 2026, moderasi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih terus berlanjut. Salah satu faktor utama perlambatan adalah ketidakpastian kebijakan perdagangan global, khususnya antara AS dengan sejumlah mitra dagang utama. Ketegangan geopolitik antara AS–Tiongkok, konflik Rusia–Ukraina, konflik di wilayah Timur Tengah dan dinamika antara BRICS-Barat, mendorong deglobalisasi parsial dan relokasi rantai pasok global (*nearshoring* dan/atau *friendshoring*). Kondisi tersebut memicu lonjakan ketidakpastian kebijakan perdagangan, menghambat investasi swasta, serta mengurangi intensitas aktivitas manufaktur lintas batas. Volume perdagangan internasional mengalami revisi turun yang signifikan, sementara disrupsi rantai pasok global tetap menjadi hambatan utama. Sektor energi dan komoditas logam turut mengalami tekanan seiring proyeksi pelemahan permintaan global yang menurunkan harga minyak dan logam dasar.

Perekonomian global diproyeksikan tumbuh moderat pada tahun 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen pada 2026, sedikit meningkat dari 3,0 persen pada 2025. Perbaikan kondisi keuangan global, pelemahan tarif perdagangan yang lebih rendah dari perkiraan, serta stimulus fiskal di sejumlah ekonomi besar memberikan dorongan bagi pertumbuhan. Meski demikian, efek ini sebagian tertahan oleh pelemahan aktivitas pasca-*front-loading* perdagangan tahun sebelumnya serta ketidakpastian kebijakan yang masih tinggi. Bank Dunia bahkan lebih pesimistis dengan memproyeksikan pertumbuhan hanya 2,4 persen, salah satu capaian terlemah di luar masa resesi global. Prospek tersebut menggambarkan pelemahan yang bersifat luas, menjangkau negara maju maupun berkembang, serta *downside risk* yang tetap mendominasi, meski terdapat *upside risk* jika tercapai terobosan perundingan perdagangan yang dapat menurunkan hambatan tarif dan meningkatkan kepercayaan investor.

Dari sisi inflasi, tekanan harga global diperkirakan mulai menunjukkan tren penurunan. IMF memprediksi laju inflasi global sebesar 3,6 persen pada 2026, mencerminkan efek dari normalisasi harga energi dan pemulihan rantai pasok. Meski demikian, inflasi di sebagian negara maju diproyeksikan tetap berada di atas target bank sentral, sehingga kebijakan moneter yang restriktif masih diperlukan. Sementara itu, tekanan inflasi di negara berkembang relatif lebih terkendali, meskipun tetap rentan terhadap potensi lonjakan harga pangan yang dipicu oleh perubahan iklim dan konflik geopolitik. Ketidakpastian perdagangan yang berkepanjangan, potensi eskalasi tarif baru, serta kerentanan fiskal di negara dengan defisit tinggi menjadi *downside risk* utama yang dapat memperlambat penurunan inflasi.

Divergensi kebijakan moneter diperkirakan akan semakin nyata. Bank sentral di negara-negara maju seperti AS dan kawasan Eropa cenderung mulai melakukan pelonggaran suku bunga secara bertahap guna mendukung pertumbuhan pasca periode pengetatan yang berkepanjangan. Namun, proses pelonggaran ini akan berlangsung secara hati-hati mengingat risiko inflasi yang masih membayangi. Di sisi lain, negara berkembang menunjukkan respons kebijakan yang lebih bervariasi, bergantung pada dinamika eksternal, stabilitas nilai tukar, serta kapasitas fiskal masing-masing. Perbedaan arah kebijakan moneter tersebut dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan, terutama jika terjadi tekanan dari sisi pembiayaan global. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi global dapat dilihat pada **Grafik 1.11**.

GRAFIK 1.11
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI GLOBAL
(dalam persen)



Sumber: IMF & World Bank

Dari sisi fiskal, negara berkembang menghadapi tantangan yang semakin berat. Kenaikan beban utang, penurunan bantuan eksternal, dan tingginya kebutuhan belanja sosial mempersempit ruang gerak fiskal. Bank Dunia mencatat bahwa lebih dari setengah negara berpenghasilan rendah kini berada pada kategori risiko tinggi gagal bayar. Oleh karena itu, reformasi struktural dalam bentuk perluasan basis pajak dan penghapusan subsidi yang tidak tepat sasaran dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi global pada 2026 masih dipenuhi tantangan struktural, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Penurunan produktivitas dan investasi yang berkelanjutan serta meningkatnya fragmentasi perdagangan akibat proteksionisme dan ketegangan geopolitik menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak negara. Situasi ini diperburuk oleh tekanan fiskal dan tingginya beban utang di negara berpendapatan rendah yang menghadapi risiko gagal bayar dan keterbatasan ruang kebijakan ekonomi. Selain itu, dampak perubahan iklim semakin nyata melalui peningkatan frekuensi bencana dan ketidakpastian cuaca ekstrem. Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara dapat dilihat pada **Tabel 1.2**.

TABEL 1.2
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA
(dalam persen)

	2023	2024	2025f	Δ	2026f	Δ
Dunia	**3,5**	**3,3**	**3,0**	**⬆0,2**	**3,1**	**⬆0,1**
Negara Maju	**1,8**	**1,8**	**1,5**	**⬆0,1**	**1,6**	**⬆0,1**
Negara Berkembang	**4,7**	**4,3**	**4,1**	**⬆0,4**	**4,0**	**⬆0,1**
EU	0,7	1,2	1,3	⬆0,1	1,4	⬇0,1
ASEAN-5	4,1	4,6	4,1	⬆0,1	4,1	⬆0,2
AS	2,9	2,8	1,9	⬆0,1	2,0	⬆0,3
China	5,4	5,0	4,8	⬆0,8	4,2	⬆0,2
India	9,2	6,5	6,4	⬆0,2	6,4	⬆0,1
Indonesia	5,0	5,0	4,8	⬆0,1	4,8	⬆0,1

Δ: Perubahan Proyeksi dibandingkan WEO Edisi April 2025
Sumber: IMF WEO Edisi Juli 2025

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap kuat di 5,40 persen *(yoy)*, di tengah tantangan global yang masih berlanjut. Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan, didukung upaya Pemerintah untuk stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, dan peningkatan kesempatan kerja. Konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada program-program produktif yang mendorong kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk implementasi program MBG. Di sisi eksternal, kinerja ekspor akan diperkuat melalui hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor. Akselerasi investasi juga terus didorong melalui pembangunan infrastruktur yang merata dengan optimalisasi peran BPI Danantara, termasuk penguatan peran swasta melalui deregulasi, relaksasi, dan efisiensi. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung transformasi ekonomi ke arah sektor bernilai tambah tinggi, berkelanjutan, dan rendah emisi yang menjadi kunci peningkatan daya saing nasional. Meskipun demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan pelemahan permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh kuat ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam menjaga dan memperkuat daya beli masyarakat. Beragam program perlindungan sosial terus diperkuat, seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan PBI JKN, yang menyasar kelompok miskin dan rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selain itu, kebijakan subsidi energi, pelaksanaan program MBG, serta dukungan kepada UMKM melalui insentif fiskal dan akses pembiayaan, diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap tumbuh. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut antara lain melalui kebijakan peningkatan kualitas SDM, penguatan layanan dasar pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi Pemerintah diarahkan untuk mendukung keberlangsungan program prioritas termasuk MBG, renovasi sekolah, sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, perluasan akses layanan asuransi kesehatan, membangun/merenovasi rumah sakit, dan peningkatan ketahanan pangan serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga tetap mengupayakan efisiensi dan rekontruksi anggaran belanja yang memperkuat lapangan usaha rakyat melalui berbagai kebijakan strategis seperti hilirisasi industri dan ekonomi kreatif, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur digital.

Aktivitas investasi diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2026, didorong oleh berlanjutnya reformasi struktural dan penguatan ekosistem investasi. Pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur dasar. Optimalisasi peran Danantara sebagai *super holding* BUMN juga menjadi katalis penting dalam menarik investasi strategis dan mendorong realisasi proyek nasional, dengan penguatan peran swasta. Kebijakan penanaman modal diarahkan untuk mengakselerasi investasi ke sektor-sektor prioritas melalui penyempurnaan regulasi, penguatan sistem *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran dan efisien. Di samping itu, perluasan deregulasi, peningkatan efektivitas belanja negara, dan penguatan

kemitraan dengan sektor swasta terus didorong untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2026 diharapkan kembali mencatat pertumbuhan positif, meskipun ketidakpastian perdagangan global masih berlanjut. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah mendorong akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, diversifikasi produk dalam negeri untuk menciptakan komoditas ekspor baru yang bernilai tambah tinggi, serta perluasan pasar ekspor guna menjaga daya saing industri nasional. Program hilirisasi juga diperluas secara lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada komoditas pertambangan, agar dapat mendorong peningkatan nilai ekspor secara berkelanjutan. Di sisi kebijakan, Pemerintah terus melakukan deregulasi dan reformasi kebijakan perdagangan, serta mengurangi hambatan ekspor melalui diplomasi dagang dengan negara mitra. Sementara itu, kebijakan impor diarahkan untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri, menciptakan nilai tambah di sektor industri, dan perluasan negara asal impor untuk meminimalkan ketergantungan.

Sektor manufaktur diperkirakan tumbuh kuat pada 2026, seiring dukungan kebijakan transformasi industri dan percepatan hilirisasi. Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah, daya saing, dan teknologi melalui insentif investasi di sektor strategis seperti elektronik, semikonduktor, kendaraan listrik, dan energi baru terbarukan. Di sisi lain, penguatan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, sawit, dan pengembangan pusat data serta industri berbasis ekspor juga menjadi prioritas peningkatan sektor manufaktur. Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing di pasar global, perlu melakukan revitalisasi industri *low-tech*, seperti modernisasi industri makanan, minuman, tekstil, dan tembakau. Penguatan SDM industri dilakukan melalui vokasi dan pelatihan digital bagi pencari kerja, termasuk dari kelompok rentan. Seluruh langkah ini diperkuat oleh dorongan adopsi manufaktur hijau, efisiensi energi, ekonomi sirkular, dan penyederhanaan regulasi guna menarik investasi berkualitas.

Kinerja sektor pertanian pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh menguat, utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada. Selain itu program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Beberapa kebijakan yang mendukung kinerja sektor pertanian, diantaranya memperkuat rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian (a.l. melalui program MBG dan Program B40), pemanfaatan teknologi modern diperluas dengan dukungan SDM yang kompeten dan kelembagaan yang tangguh dan adaptif. Selain itu, pertanian juga diarahkan menuju sistem yang lebih produktif dan berorientasi pasar, meningkatkan kesejahteraan bagi petani/nelayan skala kecil dengan keberpihakannya melalui subsidi pupuk, bantuan benih, alat dan mesin pertanian, pengurangan bunga KUR, insentif dengan pembelian gabah/beras dari petani, perhutanan sosial, bantuan usaha nelayan, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, serta penguatan kapasitas usaha petani, nelayan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di samping itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan skala ekonomi petani melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), peningkatan kapasitas dan dukungan fasilitasi kemitraan, serta menerapkan skema agroforestri melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat untuk mendukung penyediaan bahan baku pangan secara berkelanjutan.

Sektor perdagangan diperkirakan mengalami akselerasi pertumbuhan pada tahun 2026. Hal ini seiring meningkatnya optimisme masyarakat

dalam beraktivitas ekonomi serta dukungan kuat dari berbagai kebijakan Pemerintah. Sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB, sektor ini terdorong oleh kebijakan Pemerintah yang menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penyaluran bantuan sosial, dan pemberian insentif fiskal, khususnya untuk mendukung sektor perdagangan ritel. Pemerintah juga memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah dan rantai nilai domestik melalui promosi, misi dagang, serta penguatan kerja sama antardaerah dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk akselerasi transformasi digital di daerah. Selain itu, upaya memperluas pasar dilakukan melalui peningkatan penjualan kendaraan listrik dan *hybrid* sebagai bagian dari transisi menuju industri ramah lingkungan. Sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial dan stabilisasi harga dengan penguatan sektor perdagangan dan industri turut menciptakan iklim usaha yang lebih dinamis dan tangguh. Di sisi lain, percepatan program MBG diproyeksikan akan meningkatkan aktivitas perdagangan. Lebih lanjut, efektivitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai *off-taker* produk desa semakin diperkuat untuk mendukung distribusi produk lokal. Dengan berbagai dorongan tersebut, sektor perdagangan pada tahun 2026 diperkirakan akan mencatat kinerja yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kinerja Sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan menguat pada tahun 2026, seiring dengan berbagai langkah strategis yang ditempuh Pemerintah untuk memperkuat kinerja sektor ini. Percepatan pembangunan dan operasionalisasi berbagai fasilitas pemurnian (smelter) terus didorong sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi guna meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas tambang dalam negeri. Di samping itu, Pemerintah juga berupaya menjaga daya saing dan permintaan terhadap batubara dan komoditas tambang lainnya melalui pemberian insentif yang tepat sasaran. Untuk subsektor migas dan panas bumi, fokus kebijakan diarahkan melalui koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna mempercepat dan meningkatkan aktivitas eksplorasi dan produksi yang diharapkan mampu mendorong kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Sektor konstruksi merupakan sektor strategis yang berperan sebagai tulang punggung pembangunan fisik dan infrastruktur nasional serta memiliki kontribusi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui keterkaitannya dengan sektor industri bahan bangunan, properti, dan jasa. Pada tahun 2026, sektor konstruksi diproyeksikan mencatat kinerja yang cukup baik, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, seperti pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Pemerintah juga meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan untuk memperluas cakupan proyek dan memperkuat efisiensi pembiayaan. Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kinerja sektor konstruksi.

Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diharapkan terus memperkuat kontribusi bagi perekonomian nasional pada tahun 2026. Pemerintah mengupayakan berbagai langkah strategis guna memperkuat kinerja sektor-sektor tersebut, melalui pengembangan destinasi wisata super prioritas/prioritas regeneratif, akselerasi sertifikasi halal untuk produk makanan-minuman, serta beberapa langkah perbaikan logistik seperti dukungan logistik dalam perluasan program MBG, dan integrasi *cold storage* dalam proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada tahun 2026, Sektor Informasi dan Komunikasi diproyeksikan akan menguat dengan dukungan kebijakan Pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi digital secara menyeluruh. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan menjadi lebih luas dan merata, termasuk peningkatan kapasitas jaringan internet *broadband* hingga ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, Pemerintah meningkatkan keterampilan digital masyarakat melalui program pelatihan intensif seperti *Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy,* dan Gerakan Nasional Literasi Digital yang menyasar berbagai lapisan masyarakat serta pelaku industri. Adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *big data*, dan *cloud computing* menjadi prioritas untuk memperkuat inovasi dan produktivitas di sektor publik maupun swasta. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperluas implementasi ekonomi digital di semua sektor untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing di pasar global. Pemerintah juga mengedepankan regulasi yang adaptif dan perlindungan data pribadi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi semua pengguna.

Pertumbuhan ekonomi kewilayahan pada tahun 2026 diperkirakan menguat dan merata seiring dukungan berbagai kebijakan pembangunan regional. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti program pembangunan 3 juta rumah, pembangunan sekolah rakyat, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Pemerintah memperkuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja guna mendorong belanja yang lebih produktif. Sinergi pendanaan antara pusat dan daerah juga terus dioptimalkan untuk memperluas skema pembiayaan pembangunan. Selain itu, dorongan terhadap belanja daerah yang lebih efisien dan terarah akan menjadi fokus utama. Pemerintah juga mendorong optimalisasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat daya saing ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Upaya menjaga inflasi agar tetap berada pada level yang ditargetkan sebesar 2,5 persen pada tahun 2026 terus dilakukan. Tingkat inflasi tersebut diharapkan mencerminkan kestabilan harga yang mampu menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pencapaian target inflasi ini juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang melalui insentif yang lebih optimal. Guna mencapai sasaran tersebut, pengendalian inflasi perlu diperkuat, terutama menjelang periode HBKN dan tahun baru yang biasanya disertai lonjakan permintaan di tengah tantangan pasokan dan distribusi. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan harga pangan melalui berbagai langkah, seperti pelaksanaan operasi pasar, intervensi terhadap pasokan dan harga, serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kinerja ekspor sebagai pilar penting penguatan sektor eksternal. Strategi hilirisasi yang dijalankan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Keberhasilan diplomasi perdagangan, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tarif AS atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, memperkuat posisi pasar ekspor Indonesia. Tarif Indonesia kini lebih kompetitif dibandingkan Vietnam dan negara lain di ASEAN, sehingga memberikan keunggulan signifikan bagi ekspor nasional dan memperkuat daya tarik investasi, termasuk

untuk relokasi industri yang berorientasi ekspor. Sementara itu, kesepakatan perjanjian perdagangan seperti Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) berpotensi memperluas pasar, mendorong investasi, meningkatkan PDB, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Di sisi lain, implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Alam, diharapkan semakin efektif dalam memperkuat cadangan devisa. Dengan demikian, stabilitas neraca perdagangan dapat terjaga dan berkontribusi positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2026 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh dinamika global yang penuh ketidakpastian, meskipun volatilitas cenderung mereda dibanding tahun 2025. Meredanya volatilitas nilai tukar terutama disebabkan oleh pasar keuangan global yang telah mengantisipasi arah kebijakan perdagangan ekonomi AS. Meski masih dominan, peran dolar AS sebagai *safe haven* mulai memudar, tercermin dari pelemahan indeks dolar dan meningkatnya preferensi pasar terhadap euro, yen, dan swiss franc sepanjang 2025. Potensi penurunan suku bunga The Fed, memberi ruang bagi kebijakan moneter domestik yang lebih akomodatif. Stabilitas nilai tukar turut diperkuat oleh inflasi yang terkendali berkat sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Bank Indonesia. Arus modal asing juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi nasional.

Di tengah faktor positif tersebut, sejumlah risiko terhadap nilai tukar tetap perlu diwaspadai. Potensi masih berlanjutnya defisit transaksi berjalan, kedalaman pasar keuangan domestik yang belum optimal, serta tingginya sensitivitas terhadap perubahan arus modal menjadi tantangan tersendiri. Di sisi eksternal, potensi reeskalasi kebijakan tarif oleh AS dan konflik di Timur Tengah, juga dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas nilai tukar. Dengan memperhatikan keseimbangan antara peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rupiah tahun 2026 diperkirakan pada level Rp16.500 per USD, dengan arah kebijakan yang tetap adaptif dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas makroekonomi nasional.

Pada tahun 2026, rata-rata imbal hasil SBN 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen. Ketahanan ekonomi domestik yang terus membaik menjadi penopang utama stabilitas pasar obligasi Pemerintah, meskipun menghadapi tekanan dari ketidakpastian global, khususnya peningkatan imbal hasil surat utang AS. Kredibilitas serta sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter menciptakan ruang bagi penurunan imbal hasil SBN. Daya tarik SBN turut didukung oleh kebijakan pro-pertumbuhan, strategi penerbitan SBN yang optimal, serta usaha pendalaman pasar keuangan. Dari sisi eksternal, minat investor asing terhadap SBN diperkirakan tetap kuat, ditopang oleh selisih imbal hasil dengan surat utang AS yang masih kompetitif, serta rendahnya persepsi risiko Indonesia sebagaimana tercermin dari stabilnya *spread Credit Default Swap* (CDS). Kombinasi faktor-faktor ini diharapkan menjaga kepercayaan investor dan mendukung penurunan *yield* SBN jangka panjang secara berkelanjutan. SBN Indonesia diperkirakan akan tetap kompetitif di antara instrumen obligasi pada negara *emerging markets*, terutama dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi domestik yang solid dan komitmen Pemerintah terhadap disiplin fiskal. Namun, tantangan dari dinamika geopolitik global dan potensi perubahan kebijakan negara maju tetap perlu diwaspadai sebagai faktor risiko bagi minat beli investor.

Dalam jangka pendek, Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi melalui strategi operasional dan kebijakan yang terarah. Sejumlah langkah utama yang akan ditempuh, antara lain: (i) penambahan *infill drilling*; (ii) optimalisasi pengurasan pada *reservoir-reservoir existing* maupun baru di sumur-sumur yang ada melalui *workover-well service*; (iii) reaktivasi sumur-sumur *idle*; serta (iv) pengeboran sumur-sumur *stepout* untuk menguras cadangan lama sekaligus memperoleh cadangan baru yang tidak dapat dijangkau dari sumur-sumur *existing*. Upaya peningkatan produksi juga difokuskan pada lapangan-lapangan *waterflood* dan EOR yang sudah berjalan, dengan menambah sumur *producer* maupun *injector*, serta melakukan *workover-well service* untuk meningkatkan efisiensi penyapuan dan memperbaiki injektivitas. Pemerintah juga akan mempercepat pengeboran sumur pengembangan yang telah melebihi slot *plan of development* (POD), menyelesaikan proyek-proyek migas strategis, termasuk proyek *waterflood*, EOR, dan pengembangan lapangan migas laut dalam. Di sisi lain, peningkatan serapan gas bumi di wilayah-wilayah seperti West Natuna Group dan Jawa Timur akan terus didorong, termasuk rekomendasi pemberian insentif bagi pengembangan lapangan migas yang memiliki potensi cadangan namun belum ekonomis. Dengan implementasi kebijakan ini, *lifting* migas diproyeksikan mengalami peningkatan moderat, yaitu mencapai 605–620 rbph untuk minyak dan 953–1.017 rbsmph untuk gas. Capaian ini diharapkan tidak hanya menjaga pasokan energi domestik, tetapi juga menahan tekanan terhadap neraca migas dan memperkuat ketahanan energi nasional secara bertahap. Ke depan, keberlanjutan *lifting* migas sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan fiskal, dorongan investasi di sektor energi, serta penguatan tata kelola yang adaptif terhadap tantangan global dan dinamika harga energi.

Pemulihan global yang masih terbatas, peningkatan produksi minyak global, dan kondisi geopolitik memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dunia yang stagnan membatasi kenaikan permintaan minyak global. Selain itu, inovasi dan pertumbuhan produksi moda transportasi berbasis *non-fossil fuel* juga berperan dalam mereduksi permintaan. Sementara itu dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak mentah OPEC+ yang akan dimulai pada semester II 2025 serta naiknya produksi minyak non-OPEC diprediksi dapat mendorong turunnya harga pada 2026. Dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memperburuk ekspektasi terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi dunia, turut memberikan dampak pada dinamika harga minyak mentah global. Dengan berbagai faktor tersebut, harga ICP di tahun 2026 diproyeksikan berada pada level USD70 per barel. Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2022-2024 serta target 2025-2026 dapat di lihat pada **Tabel 1.3**.

TABEL 1.3
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2022 - 2026

Indikator	2022	2023	2024	2025		2026	
				APBN	*Outlook*	KEM PPKF	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,3	5,1	5,0	5,2	4,7 - 5,0	5,2 - 5,8	5,4
Inflasi (%, yoy)	5,5	2,6	1,6	2,5	2,2 - 2,6	1,5 - 3,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	14.871	15.255	15.847	16.000	16.300 - 16.800	16.500 - 16.900	16.500
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	7,1	6,6	6,8	7,0	6,8 - 7,3	6,6 - 7,2	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	97	78	78	82	68 - 82	60 - 80	70
Lifting Minyak (rbph)	612	606	580	605	593 - 597	605 - 620	610
Lifting Gas (rbsmph)	954	1.006	1.017	1.005	976 - 980	953 - 1.017	984

Sumber : LKPP dan Kementerian Keuangan

1.5. Sasaran dan Indikator Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan untuk terus menurun hingga mencapai level 4,44 – 4,96 persen dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai angka 6,5 – 7,5 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem juga akan terus didorong untuk mencapai 0 – 0,5 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini 2026 ditargetkan menurun hingga berada pada rentang 0,377 – 0,380.

Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah yang didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan miskin, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan. Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dihadapkan pada tantangan demografi yang perlu terus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Selain itu, dinamika global yang penuh ketidakpastian juga menuntut SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan IMM yang pada tahun 2026 ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,57.

Tahun 2026, Pemerintah akan mengadopsi Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai indikator baru yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga petani yang ditargetkan mencapai 0,7731 dan terus meningkat sejalan dengan penguatan daya beli dan pendapatan petani melalui berbagai program dukungan produksi, akses pembiayaan, serta perlindungan sosial yang lebih adaptif. Selain itu, Pemerintah juga akan menggunakan Proporsi penciptaan lapangan kerja sebagai indikator baru pembangunan di tahun 2026 sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Pekerjaan formal memberikan jaminan pendapatan, kestabilan kerja, serta manfaat tambahan seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, dan jaminan hari tua. Semakin tinggi persentase dari indikator tersebut, semakin mencerminkan perkembangan positif dalam pasar tenaga kerja. Dalam tahun 2026 proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan sebesar 37,95 persen.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dunia yang semakin multipolar, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, pendapatan masyarakat diharapkan meningkat yang tecermin dengan peningkatan GNI per kapita Indonesia dari USD4.910 pada tahun 2024 ke level USD5.520 pada tahun 2026. Capaian ini akan mempertahankan status Indonesia pada kategori *upper middle-income country*. Dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta pembangunan rendah karbon, penurunan intensitas emisi GRK ditargetkan sebesar 37,14 persen, serta indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 76,67. Sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 secara lengkap disajikan pada **Tabel 1.4**.

TABEL 1.4
SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN, 2025-2026

Indikator	APBN 2025	APBN 2026
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	6,5 - 7,5
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0 - 0,5	0 - 0,5
Rasio Gini (Indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,380
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	4,44 - 4,96
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,57
Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	na	0,7731
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	na	37,95
GNI per Kapita (USD)	na	5.520
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	na	37,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	na	76,67

Sumber : Bappenas/Kementerian PPN

1.6. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis dalam memengaruhi arah dan stabilitas perekonomian Indonesia. Peran ini dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Fungsi alokasi berfokus pada upaya Pemerintah dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Salah satu pendekatan yang saat ini diutamakan adalah penerapan kebijakan fiskal yang pro terhadap pertumbuhan (*growth-friendly fiscal policy*), artinya, kebijakan pengeluaran dan penerimaan negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai ilustrasi bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga membuka akses pasar, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

Di sisi lain, fungsi distribusi bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang timbul akibat mekanisme pasar. Melalui APBN, Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui berbagai program seperti bantuan sosial, subsidi, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan lain yang mendorong keadilan sosial. Dalam fungsi ini, APBN dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sementara itu, fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan kemampuan APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika menghadapi guncangan baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi ini dijalankan melalui dua jalur utama, yaitu kebijakan diskresioner dan *automatic stabilizer*. Kebijakan diskresioner adalah tindakan aktif Pemerintah dalam merespons krisis atau perlambatan ekonomi, seperti peningkatan belanja negara atau pemberian insentif pajak yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, *automatic stabilizer* bekerja secara otomatis, misalnya melalui sistem pajak penghasilan yang menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga ketika pendapatan turun, beban pajak juga menurun dan daya beli tetap terjaga.

Dalam rangka menjalankan fungsi stabilisasi APBN, Pemerintah dapat menerapkan dua jenis kebijakan fiskal, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi saat mengalami perlambatan. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan untuk mencegah ekonomi yang tumbuh terlalu cepat

(*overheating*), yaitu dengan mengurangi belanja atau menaikkan pajak guna menghindari inflasi yang berlebihan.

Secara keseluruhan, dampak APBN terhadap perekonomian dapat terlihat pada berbagai sektor, antara lain sektor riil melalui peningkatan permintaan agregat, sektor moneter melalui pengaruh terhadap inflasi dan suku bunga, serta sektor eksternal melalui neraca pembayaran. Dengan pengelolaan yang tepat, APBN diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat daya saing nasional. Semua ini menjadi bagian dari upaya bersama menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

BOKS 1.1
DAMPAK APBN TERHADAP EKONOMI

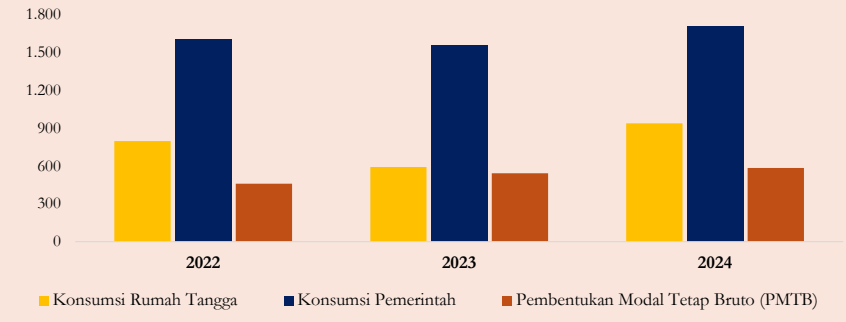
Dampak Terhadap Sektor Riil

APBN memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor riil melalui PKP (pengeluaran konsumsi Pemerintah), PMTB (pembentukan modal tetap bruto Pemerintah), dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Belanja Pemerintah dan transfer fiskal seperti subsidi dan bantuan sosial meningkatkan pendapatan *disposable* rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong konsumsi dan permintaan agregat. Konsumsi Pemerintah, terutama belanja barang dan jasa, secara langsung meningkatkan permintaan terhadap *output* sektor riil dan berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi dalam menghadapi fluktuasi siklus bisnis. Sementara itu, investasi Pemerintah dalam infrastruktur dan pemberian insentif fiskal kepada sektor swasta memperkuat kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi jangka panjang.

PKP berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara nominal, PKP pada tahun 2023 dan 2024 mencapai Rp1.556,6 dan Rp1.712,1 triliun dengan kontribusi terhadap PDB masing-masing mencapai 7,45 persen dan 7,73 persen. Secara rata-rata pada tahun 2023 dan 2024, belanja Pemerintah pusat dalam APBN berkontribusi sebesar 59 persen dan 60 persen terhadap PKP, dengan komponen utama pembentuk terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan TKD.

Peranan APBN terhadap PMTB menjadi pendorong aktivitas investasi nasional. Selama periode 2023–2024, anggaran Pemerintah dalam rangka PMTB masing-masing mencapai Rp543,5 dan Rp585,6 triliun dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,9 dan 9,1 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal. Dukungan Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal diarahkan untuk memperkuat perolehan aset produktif yang memiliki efek *multiplier*, sehingga mampu mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan.

GRAFIK 1.12
DAMPAK APBN TERHADAP SEKTOR RIIL
(Rp Triliun)



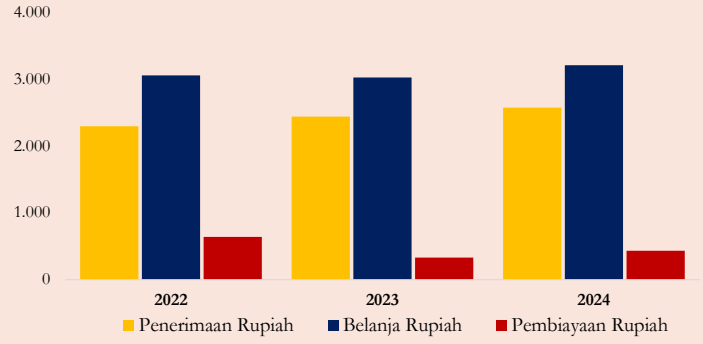
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

APBN juga memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah, seperti program bantuan sosial tunai (BST), Subsidi Energi (BBM, Listrik, LPG), serta program kartu sembako dan kartu prakerja ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, yang secara langsung memengaruhi konsumsi rumah tangga. Beberapa jenis belanja lain, seperti infrastruktur, insentif pajak, dan program stabilisasi harga berdampak secara tidak langsung terhadap konsumsi masyarakat melalui pendapatan, lapangan pekerjaan, dan ekspektasi perekonomian. Pada tahun 2024, secara nominal anggaran Pemerintah mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga menjadi sebesar Rp938,4 triliun, tumbuh 58,4 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp592,3 triliun. Kenaikan konsumsi tersebut terutama bersumber dari belanja subsidi dan kompensasi energi melalui belanja lain-lain. Dampak APBN terhadap sektor rill dapat dilihat pada **Grafik 1.12**.

Dampak Terhadap Sektor Moneter

Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN juga memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) dalam perekonomian. Pengaruh tersebut berasal dari operasi keuangan Pemerintah dalam transaksi-transaksi untuk meningkatkan penerimaan dan belanja negara serta pembiayaan APBN. Operasi keuangan Pemerintah pada tahun 2023 memberikan dampak ekspansi neto sebesar Rp252,7 triliun terhadap likuiditas perekonomian, meningkat dibandingkan dampak neto tahun 2022 sebesar Rp120,6 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pengaruh kontraksi moneter yang pada sisi penerimaan dan pembiayaan menurun dibandingkan tahun 2022, meskipun belanja Pemerintah sedikit menurun dari Rp3.051,2 triliun menjadi Rp3.019,9 triliun. Pada tahun 2024 operasi keuangan Pemerintah masih memberikan dampak ekspansi neto sebesar Rp202,2 triliun terhadap likuiditas perekonomian, yang didorong oleh injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja Pemerintah sebesar Rp3.204,3 triliun dan penarikan likuiditas masyarakat melalui pembiayaan sebesar Rp432,6 triliun dan penerimaan sebesar Rp2.569,5 triliun. Dampak APBN terhadap sektor moneter dapat dilihat pada **Grafik 1.13**.

GRAFIK 1.13
DAMPAK APBN TERHADAP SEKTOR MONETER
(Rp Triliun)



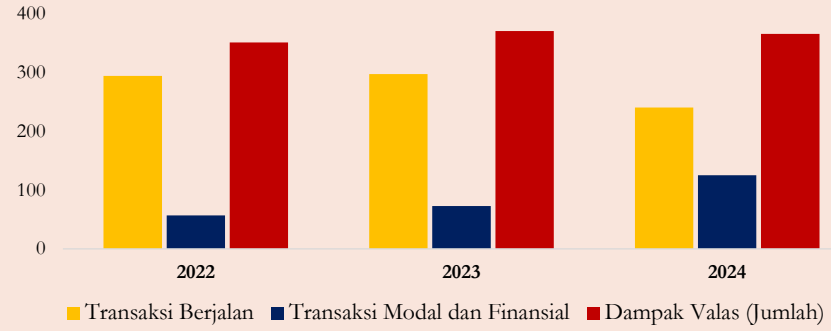
Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dampak Terhadap Neraca Pembayaran

Dampak APBN terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui pengaruh transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2022-2024, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas yang bersumber dari transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Penerimaan valas dari transaksi keuangan Pemerintah pada tahun 2023 mencapai Rp370,7 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp351,5 triliun. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh transaksi berjalan dari penerimaan valas pada neraca barang yang mencapai Rp297,5 triliun dan transaksi modal sebesar Rp73,2 triliun.

Pada tahun 2024, penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah sedikit menurun menjadi sebesar Rp366,1 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Kontribusi operasi keuangan Pemerintah terhadap neraca pembayaran pada tahun 2024 di satu sisi bersumber dari transaksi berjalan sebesar Rp240,6 triliun, yang terdiri dari neraca barang, neraca jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Di sisi lain, bersumber dari transaksi modal dan finansial yang mencapai Rp125,5 triliun yang dipengaruhi oleh penerbitan SBN luar negeri, pinjaman luar negeri, pembayaran SBN luar negeri jatuh tempo, dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Dampak APBN terhadap neraca pembayaran dapat dilihat pada **Grafik 1.14**.

GRAFIK 1.14
DAMPAK APBN TERHADAP NERACA PEMBAYARAN
(Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

1.7. Arah dan Kebijakan Fiskal 2026

Kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, perlu diwujudkan melalui reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus pada 8 (delapan) strategi: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global. Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut secara optimal, Pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama penguatan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi fiskal secara menyeluruh yang selama ini dilakukan akan terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong pembiayaan yang lebih inovatif dan *prudent*. Belanja negara diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya ungkit ekonomi, di antaranya dengan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta memastikan subsidi dan perlindungan sosial berjalan efektif dan lebih tepat sasaran. Sementara itu, pembiayaan difokuskan antara lain pada pengembangan skema KPBU yang berkelanjutan, penguatan peran *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF).

Kebijakan pendapatan negara disusun untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Pemerintah juga akan terus menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta PNBP. Untuk mendorong peningkatan rasio pendapatan negara yang lebih tinggi, serta menjaga APBN tetap sehat, efisien, dan

efektif, Pemerintah akan melakukan kebijakan mobilisasi pendapatan melalui:

1. Penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkelanjutan;
2. Penguatan peran Coretax dan *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan;
3. Penyelarasan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global;
4. Reformasi pengelolaan SDA dan BMN; serta
5. Peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur untuk mengakselerasi investasi hilirisasi industri.

Kebijakan belanja negara tahun 2026 secara umum difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat delapan kebijakan prioritas, yaitu:

1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing;
2. Ketahanan energi dilakukan dengan mendorong peningkatan *lifting* migas, menjaga stabilisasi harga, serta percepatan transisi energi terbarukan untuk kemandirian energi dan ekonomi;
3. Program MBG untuk anak sekolah, balita dan ibu hamil/menyusui akan diperluas dengan tetap memastikan kualitas pelaksanaan, termasuk kecukupan gizi dan higienitas makanan;
4. Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah;
5. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk melanjutkan program Pemeriksaaan Kesehatan Gratis;
6. Pembangunan desa akan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama melalui Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan melakukan pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan, ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan;
7. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilakukan melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pertahanan siber; serta
8. Percepatan investasi dan perdagangan global dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur perizinan, dan dorongan investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung delapan fokus kebijakan, belanja negara tahun 2026 diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; (ii) memperkuat belanja modal untuk mendukung program prioritas dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; (iii) mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (iv) melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; serta (v) memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam menghadapi tekanan global yang sangat dinamis dan mengatasi masalah struktural, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan pengelolaan defisit yang dilandasi oleh disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas serta keberlanjutan APBN. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dilaksanakan kebijakan *countercyclical* yang efektif dengan tetap melindungi dunia usaha dan masyarakat serta menjaga keberlanjutan fiskal. Arah kebijakan pembiayaan tahun 2026 adalah tetap menjaga pengelolaan pembiayaan secara prudent, inovatif, dan *sustainable* untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, melalui: (i) pengendalian rasio utang dalam batas aman dan *manageable*; (ii) optimalisasi dan sinergi Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicle (SMVs), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara; (iii) penggunaan SAL sebagai *fiscal buffer*; (iv) peningkatan efektivitas pembiayaan investasi; (v) pendalaman pasar keuangan domestik; dan (vi) mendorong pembiayaan inovatif termasuk KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Pembiayaan anggaran sebagai salah satu aspek utama dari APBN memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Salah satu peran penting tersebut adalah untuk menutup kesenjangan pembiayaan pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah. Pembiayaan Anggaran terdiri dari Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan, dan Pembiayaan Anggaran Lainnya.

Bab 2
Pendapatan Negara

BAB 2
PENDAPATAN NEGARA

2.1. Pendahuluan

Pendapatan Negara merupakan penopang utama pendanaan berbagai agenda pembangunan nasional dalam menggapai visi Indonesia Maju 2045. Untuk itu, Pendapatan Negara akan terus dioptimalkan di tengah tantangan global perubahan geopolitik serta menguatnya proteksionisme antarnegara yang memicu perang dagang dan pelemahan harga komoditas. Pemerintah berupaya untuk tetap adaptif dan efektif dalam kebijakan Pendapatan Negara dengan memperhatikan *best practices* internasional dan pergeseran struktur perekonomian menuju ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga terus menjaga efektivitas keberlanjutan reformasi kebijakan serta implementasi perbaikan administrasi Perpajakan dan PNBP.

Kinerja Pendapatan Negara secara nominal terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan tajam yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pendapatan Negara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan signifikan yang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi nasional. Kinerja Pendapatan Negara tersebut didorong oleh pertumbuhan Penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan Perpajakan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi dan meningkatnya aktivitas pelaku usaha. Selain itu, kinerja tersebut turut terdorong oleh naiknya volume perdagangan internasional serta harga komoditas utama Indonesia seperti kelapa sawit dan minerba di pasar global. Sementara itu, kenaikan PNBP tidak hanya dipicu oleh naiknya harga minyak bumi dan minerba, tetapi juga oleh peningkatan pendapatan dari layanan yang diberikan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Selama berlangsungnya pandemi, Pemerintah tetap melanjutkan reformasi perpajakan, melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bauran kebijakan serta membaiknya perekonomian nasional yang juga diiringi dengan peningkatan harga komoditas, reformasi pengelolaan aset, serta peningkatan inovasi layanan berdampak pada peningkatan kinerja Pendapatan Negara pada tahun 2022 sehingga mampu tumbuh 31,0 persen.

Kinerja positif Pendapatan Negara berlanjut pada tahun 2023 tumbuh 5,6 persen yang dipengaruhi oleh terjaganya kondisi ekonomi domestik dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pendapatan Negara tahun 2024 tumbuh 2,4 persen ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga serta peningkatan dividen dari BUMN, meskipun harga komoditas termoderasi.

Ketidakpastian global yang tinggi, peralihan dividen BUMN ke BPI Danantara, serta kebijakan tarif PPN 12 persen yang hanya terbatas pada barang mewah berdampak pada kinerja Pendapatan Negara Semester I tahun 2025 yang masih terkontraksi. Namun demikian, pada akhir tahun 2025, kinerja Pendapatan Negara diperkirakan akan tumbuh 0,5 persen, seiring terjaganya aktivitas dunia usaha, kinerja ekspor-impor, dan potensi membaiknya harga beberapa komoditas.

Untuk mendukung agenda pembangunan pada tahun 2026, Pendapatan Negara akan dioptimalkan dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global.

Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional serta memperhatikan kebijakan Pemerintah tersebut, Pendapatan Negara pada APBN tahun 2026 ditargetkan mencapai sebesar Rp3.153.580,5 miliar atau tumbuh 10,1 persen dari *outlook* 2025. Dengan demikian, rasio Pendapatan Negara mencapai 12,26 persen terhadap PDB.

2.1.1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Tahun 2026

Dalam lanskap global yang terus berkembang dan semakin kompleks, Indonesia memiliki peluang dan tantangan untuk memperkuat sistem perpajakannya agar lebih adaptif dan selaras dalam menghadapi perubahan zaman. Pemerintah dituntut untuk semakin proaktif dalam mengadopsi praktik terbaik perpajakan internasional, guna memastikan keselarasan dengan perekonomian global. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan dan efektivitas reformasi perpajakan melalui peningkatan tata kelola, efisiensi administrasi, dan pemanfaatan teknologi yang akan memperkuat fondasi Pendapatan Negara.

Penerimaan Perpajakan menjadi sumber pendapatan utama yang menopang Belanja Negara yang merupakan instrumen fiskal dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Porsi Penerimaan Perpajakan terhadap Belanja Negara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Porsi Penerimaan Perpajakan terhadap belanja negara pada akhir tahun 2025 diproyeksikan meningkat dari tahun 2021.

Secara nominal, Penerimaan Perpajakan mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir. Setelah terpuruk pada awal masa pandemi pada tahun 2020, Penerimaan Perpajakan tahun 2021 tumbuh signifikan sebesar 20,4 persen yang didukung oleh upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi yang masih berlangsung.

Selanjutnya reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 2021, dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Upaya tersebut merupakan buah strategi kebijakan guna membangun sistem pajak yang lebih berkeadilan, sehat, efektif, dan akuntabel. Dengan hadirnya *milestone* tersebut, peran Penerimaan Perpajakan diharapkan mampu menjadi penopang utama dalam pendanaan APBN guna mencapai visi misi Indonesia Emas 2045. Faktor pemulihan ekonomi nasional dan implementasi kebijakan UU HPP memberikan efek positif terhadap kinerja Penerimaan Perpajakan yang tumbuh signifikan mencapai 31,4 persen pada tahun 2022. Kinerja ini didorong oleh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, kenaikan harga komoditas global dan dampak basis pertumbuhan yang lebih rendah pada Tahun 2021.

Kinerja Perpajakan pada tahun 2023 dan 2024 tumbuh masing-masing mencapai 5,9 persen dan 3,6 persen di tengah ketidakpastian global yang meningkat dan moderasi harga komoditas. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh terjaganya aktivitas ekonomi domestik dan keberlanjutan reformasi perpajakan yang konsisten dilakukan oleh Pemerintah. Demikian juga pada tahun 2025, kinerja perpajakan diperkirakan masih tumbuh 7,0 persen.

Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi potensi Penerimaan Perpajakan tahun 2026 dengan mempertimbangkan tantangan yang ada, kebijakan umum perpajakan tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat;
2. Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan

hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan;
3. Penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; serta
4. Pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.

Dalam rangka mendukung kebijakan umum perpajakan, kebijakan teknis pajak tahun 2026 diarahkan melalui:

1. optimalisasi perluasan basis pemajakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, yang didukung optimalisasi Coretax dalam pengelolaan data perpajakan melalui peningkatan integrasi data antar instansi, serta optimalisasi pertukaran informasi dan data. Penggunaan *Compliance Risk Management* (CRM) dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak juga bertujuan untuk optimalisasi perluasan basis pemajakan;
2. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang menyeluruh, terintegrasi, termasuk melalui optimalisasi kegiatan joint program *(joint audit, joint analysis, joint investigation, joint collection,* dan *joint intelligence)* dalam rangka sinergitas Kementerian Keuangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif dengan menerapkan *multidoor approach*, serta implementasi *Compliance Improvement Plan* yang efektif;
3. pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah, diantaranya untuk mendukung iklim investasi, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi hijau, pembangunan infrastruktur serta meningkatkan daya beli masyarakat;
4. penyusunan regulasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, termasuk optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui regulasi yang memberikan *deterrent effect*;
5. penagihan piutang Pajak yang efektif melalui sinergi dengan instansi terkait untuk memberikan *deterrent effect* sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Sementara itu, kebijakan teknis Kepabeanan dan Cukai tahun 2026 diarahkan pada:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, melalui:
   a) Peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi;
   b) Optimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
   c) Peningkatan ekspor produk UMKM melalui optimalisasi klinik ekspor dan kolaborasi dengan berbagai entitas; serta
   d) Peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi.
2. Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif, melalui:
   a) Penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan laut;
   b) Penguatan pengawasan perbatasan, pesisir, serta pelabuhan dan bandara utama;
   c) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
   d) Pengawasan perdagangan barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi;
   e) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP);
   f) Pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara; serta

g) Peningkatan efektivitas penegakan hukum dan audit Kepabeanan dan Cukai.

3. Kebijakan untuk mendukung penerimaan negara yang optimal, melalui:
   a) Intensifikasi kebijakan CHT berlandaskan 4 pilar (pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok legal) dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai aspek fungsi distribusi;
   b) Intensifikasi tarif Bea Masuk komoditas tertentu;
   c) Ekstensifikasi BKC antara lain melalui penambahan objek Cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK);
   d) Perluasan basis penerimaan Bea Keluar, diantaranya terhadap produk emas dan batubara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM;
   e) Penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif; dan
   f) Penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (*joint program*);
4. Kebijakan untuk mendukung manajemen organisasi, SDM, dan IT, melalui:
   a) Penguatan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif;
   b) Penyempurnaan manajemen proses bisnis Kepabeanan dan Cukai;
   c) Pemenuhan dan penguatan SDM yang berintegritas, berkompeten, dan berbudaya sesuai kebutuhan dan nilai organisasi;
   d) Penyempurnaan *Core System* dan *Smart Customs;* dan
   e) Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga.

Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja ekonomi nasional yang membaik, keberlanjutan reformasi perpajakan, tantangan, dan potensi, target Penerimaan Perpajakan pada APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp2.693.714,3 miliar atau tumbuh 12,8 persen terhadap outlook tahun 2025. Dengan demikian rasio perpajakan pada tahun 2026 mencapai 10,48 persen terhadap PDB.

2.1.1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Tahun 2026

Penerimaan Pajak merupakan tulang punggung Pendapatan Negara guna mewujudkan agenda pembangunan nasional. Penerimaan Pajak dalam lima tahun terakhir konsisten tumbuh positif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dinamika perekonomian global dan domestik, perkembangan harga komoditas utama, dan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah.

Strategi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara bertahap mendorong kinerja ekonomi domestik yang berdampak pada penerimaan pajak tahun 2021 yang tumbuh sebesar 19,3 persen. Selanjutnya kondisi tersebut berlanjut dan diakselerasi dengan implementasi kebijakan UU HPP (antara lain Program Pengungkapan Sukarela/ PPS dan penyesuaian tarif PPN), serta tren peningkatan harga komoditas utama yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia, sehingga penerimaan pajak tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 34,3 persen.

Pada tahun 2023 penerimaan pajak meningkat sebesar 8,8 persen, didorong oleh stabilitas ekonomi dalam negeri serta berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain melanjutkan reformasi perpajakan, pemerintah juga menerapkan pengawasan yang menyeluruh dan terfokus sepanjang tahun. Selanjutnya, pada tahun 2024 penerimaan pajak tumbuh 3,4 persen seiring dengan terjaganya ekonomi domestik di

tengah stagnasi ekonomi global dan moderasi harga komoditas.

Sementara itu, pada tahun 2025, *outlook* Penerimaan Pajak menunjukkan tren positif diperkirakan tumbuh 7,5 persen seiring dengan proyeksi perekonomian dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP) melalui optimalisasi pengawasan berbasis data, pemanfaatan teknologi digital, serta penyempurnaan layanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Adapun beberapa perkembangan mengenai pelaksanaan reformasi perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, strategi dan kebijakan dalam mendukung reformasi struktural. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah terus memperkuat kebijakan perpajakan yang adaptif, berkeadilan, dan efisien.

Pada aspek Pajak Penghasilan Badan, arah kebijakan difokuskan pada penyederhanaan pengaturan mengenai penghasilan kena pajak, biaya yang dapat dikurangkan, serta perlakuan terhadap natura dan bentuk sejenis yang diterima dalam hubungan kerja. Pemerintah juga mendorong transparansi dan tata kelola yang baik melalui pemberian insentif penurunan tarif pajak bagi perseroan terbuka dengan kepemilikan publik tertentu. Di sisi lain, penguatan aturan pembentukan cadangan kerugian piutang usaha diarahkan untuk menciptakan perlakuan fiskal yang kredibel dan selaras dengan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, kebijakan teknis terkait pemungutan Pajak Penghasilan terus disempurnakan guna meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Penetapan tarif efektif dirancang untuk menyederhanakan perhitungan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi., Di sisi lain, pemerintah memperkuat pengaturan pajak terhadap natura dan fasilitas dengan memperjelas batasan objek pajak dalam konteks hubungan kerja. Selain itu, penyederhanaan pengenaan pajak final serta penyesuaian ketentuan omzet usaha bertujuan mendorong perluasan basis pajak, terutama bagi sektor informal dan pelaku UMKM. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan, pemerintah juga memperluas pelibatan pihak ketiga, termasuk penyelenggara platform digital, sebagai bagian dari strategi penguatan administrasi perpajakan yang lebih modern dan inklusif.

Selanjutnya, strategi kedua yaitu untuk mengatasi persoalan *shadow economy* yang berpotensi menggerus basis penerimaan pajak, Pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai langkah strategis yang terintegrasi dan sistematis. Pada tahun 2025, Pemerintah menyusun kajian pengukuran dan pemetaan *shadow economy* di Indonesia, penyusunan *Compliance Improvement Program* (CIP) khusus terkait *shadow economy*, serta analisis intelijen untuk mendukung penegakan hukum terhadap wajib pajak berisiko tinggi. Pemerintah juga akan melakukan kajian intelijen dalam rangka penggalian potensi *shadow economy* tersebut.

Langkah-langkah konkret dalam memitigasi dampak *shadow economy* yang telah dilakukan meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang mulai efektif dengan implementasi sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) pada 1 Januari 2025. Proses *canvassing* aktif dilakukan untuk mendata dan menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar, serta pemerintah telah menunjuk entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital PMSE untuk meningkatkan pengawasan dan penerimaan.

Ke depan, Pemerintah akan fokus mengawasi sektor-sektor dengan aktivitas *shadow economy* yang tinggi. Sistem layanan perpajakan akan terus diperbaiki melalui implementasi CTAS, dan

data pelaku usaha dari sistem OSS BKPM akan dimanfaatkan untuk menjaring UMKM. Selain itu, pemerintah akan melakukan pencocokan *(data matching)* atas data pelaku usaha di platform digital yang belum teridentifikasi secara fiskal guna memperkuat basis data dan meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Selanjutnya strategi ketiga berkenaan dengan kebijakan pajak internasional. Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi yang mengatur terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta pengenaan pajak minimum global. Penerapan pajak minimum global mulai berlaku pada tahun pajak 2025. Ketentuan Pajak Minimum Global akan mengenakan pajak efektif dengan tarif 15 persen untuk memastikan perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimum €750 juta membayar pajak efektif minimum 15 persen di yurisdiksi manapun perusahaan tersebut beroperasi. Pajak Minimum Global dikenakan melalui tiga mekanisme, yaitu: *Income Inclusion Rule* (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), dan *Undertaxed Payments Rule* (UTPR). IIR dan QDMTT berlaku mulai 1 Januari 2025 sedangkan UTPR akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Secara simultan, Pemerintah juga sedang berupaya untuk mendapatkan status *transitional qualified* atas penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia berdasarkan *peer review* oleh negara-negara yang tergabung dalam *Inclusive Framework* (IF) *on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Selanjutnya untuk meningkatkan transparansi, Indonesia telah melaksanakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS). Sejak 2018, pertukaran informasi keuangan secara otomatis telah berjalan. Upaya ini akan diperluas sesuai *Amended* CRS dan diharapkan dapat diterapkan mulai 2027. Upaya ini mencakup pelaporan produk uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral. Pemerintah juga bersiap mengadopsi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) guna memfasilitasi pertukaran data transaksi aset kripto secara internasional.

Sementara itu, kerja sama internasional juga diperkuat melalui kebijakan *Assistance in Recovery of Tax Claims*, yang memungkinkan penagihan pajak lintas negara secara resiprokal. Pemerintah telah menjalin kesepakatan dengan 81 negara dan sedang menyusun kerja sama lebih lanjut dengan Jepang dan Korea untuk mendukung pengamanan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan global.

Kebijakan di bidang pajak akan terus diperkuat guna memperkuat fungsi sumber Pendapatan Negara, redistribusi pendapatan, *regulerend*, serta alat untuk menjaga stabilitas dan daya saing. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sistem perpajakan yang adil, transparan, dan selaras dengan dinamika global.

Selanjutnya, penerimaan pajak pada APBN tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp2.357.714,3 miliar yang didukung oleh proyeksi perekonomian nasional dan kebijakan teknis pajak. Salah satu kebijakan teknis pajak adalah optimalisasi *Compliance Risk Management* dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana dijabarkan pada **Boks 2.1.**

BOKS 2.1

Optimalisasi *Compliance Risk Management* dalam Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam konteks administrasi perpajakan modern, pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional yang bersifat reaktif, seragam, dan menguras sumber daya. Tantangan globalisasi ekonomi, digitalisasi transaksi, serta meningkatnya kompleksitas skema penghindaran pajak mendorong otoritas perpajakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi strategi pengawasan yang lebih cerdas dan berbasis risiko. Salah satu pendekatan strategis yang terus dikembangkan adalah *Compliance Risk Management* (CRM), yaitu sistem manajemen risiko yang

bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko ketidakpatuhan WP secara sistematis dan berkelanjutan.

CRM bertumpu pada pemahaman bahwa tidak semua WP memiliki potensi ketidakpatuhan yang sama. Oleh karena itu, pendekatan ini mendorong segmentasi WP berdasarkan tingkat risiko, sehingga memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui CRM, otoritas pajak dapat memetakan WP ke dalam kategori risiko tinggi, menengah, atau rendah, dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti rekam jejak pelaporan pajak, transaksi bisnis, data pihak ketiga, dan perilaku kepatuhan historis. Dengan klasifikasi ini, strategi pengawasan pun disesuaikan: WP risiko tinggi dapat menjadi prioritas pemeriksaan atau klarifikasi, sedangkan WP risiko rendah cukup diawasi melalui edukasi dan pengingat kepatuhan.

Untuk mendukung CRM, pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data menjadi kunci utama. Pemerintah secara bertahap mengembangkan *compliance risk engine*, yaitu sistem yang memanfaatkan data dari SPT, e-Faktur, e-Bupot, data perbankan, hingga informasi ekspor-impor, untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara dini. Melalui integrasi dengan sistem *coretax* dan analitik berbasis *machine learning*, potensi penyimpangan dapat dikenali bahkan sebelum pelanggaran terjadi. Dengan demikian, pengawasan dapat beralih dari pendekatan reaktif menjadi preventif, mengurangi risiko pajak sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan negara.

Implementasi CRM yang optimal juga menuntut sinergi lintas unit. Fungsi intelijen, pemeriksaan, pengawasan, penyuluhan, dan penegakan hukum harus berkoordinasi erat untuk merancang dan melaksanakan intervensi yang sesuai. Sebagai contoh, hasil pemetaan risiko oleh fungsi intelijen dapat menjadi dasar bagi tim pengawasan untuk melakukan edukasi atau klarifikasi kepada WP, sementara hasil audit dapat dikembalikan sebagai masukan untuk penyempurnaan model risiko. Sinergi ini menciptakan alur kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko ketidakpatuhan.

Namun, keberhasilan CRM tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan data. Intervensi yang dirancang harus proporsional dan berbasis pada pendekatan perilaku. Artinya, otoritas pajak perlu menyesuaikan metode penanganan dengan tingkat dan motif ketidakpatuhan. WP yang tidak patuh karena ketidaktahuan atau kesalahan administratif misalnya sebaiknya dibina melalui edukasi dan asistensi. Sebaliknya, WP yang secara sadar menghindari pajak secara sistematis harus ditindak tegas melalui pemeriksaan dan penegakan hukum. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan keadilan dalam pengawasan, tetapi juga memperkuat *deterrent effect* di kalangan WP lainnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan CRM juga sangat penting. Efektivitas strategi pengawasan berbasis risiko harus diukur melalui berbagai indikator seperti peningkatan kepatuhan sukarela, penurunan *tax gap*, atau peningkatan pembayaran pasca intervensi. Melalui evaluasi ini, sistem CRM dapat diperbaiki secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan risiko yang dihadapi. Dengan menjadikan hasil pengawasan sebagai umpan balik, otoritas pajak dapat membangun siklus CRM yang adaptif dan berorientasi hasil.

Meskipun CRM menawarkan berbagai keunggulan, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kualitas data yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perlunya integrasi sistem lintas fungsi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan infrastruktur data, pelatihan teknis bagi pegawai, serta tata kelola CRM yang kuat agar pelaksanaan strategi ini berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Pada akhirnya, optimalisasi CRM bukan hanya soal efisiensi pengawasan, tetapi juga soal membangun sistem perpajakan yang berkeadilan, berdaya tahan, dan dipercaya oleh publik. CRM memungkinkan otoritas pajak untuk bertindak secara terukur dan berbasis bukti, sehingga menciptakan iklim kepatuhan yang sehat di tengah masyarakat. Ke depan, CRM harus terus dikembangkan sebagai fondasi utama dalam transformasi sistem perpajakan Indonesia menuju administrasi yang modern, responsif, dan berkelanjutan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Tren proyeksi perekonomian nasional yang membaik serta fluktuasi harga komoditas utama memengaruhi kinerja penerimaan PPh dalam periode 2021–2025. Pada tahun 2021, penerimaan PPh Migas tumbuh signifikan sebesar 60,0 persen, terutama dipengaruhi tren penguatan harga minyak mentah Indonesia selama tahun 2021. Penerimaan PPh Migas pada tahun 2022 juga masih berada pada level yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,3 persen, didorong oleh membaiknya harga minyak sejalan dengan peningkatan harga komoditas utama di dunia.

Selanjutnya moderasi harga komoditas yang berlangsung pada tahun 2023 dan 2024 berdampak pada kinerja PPh Migas yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 11,7 persen dan 5,3 persen. Sementara itu, berpijak pada capaian realisasi semester I tahun 2025 dan outlook ICP maupun *lifting* migas, serta penerimaan yang masih dicatat dalam deposit pada pajak lainnya, outlook PPh Migas tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp54.135,7 miliar. Berdasarkan tren perkembangan PPh Migas, proyeksi ICP, serta *lifting* migas, PPh Migas pada APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp55.236,4 miliar.

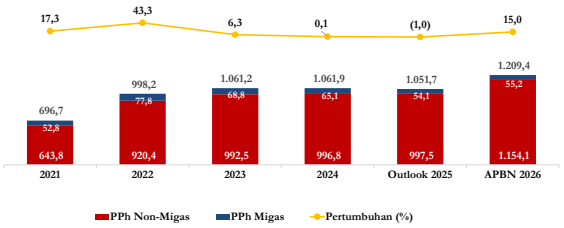
Sementara itu, dari sektor PPh Nonmigas, Pada tahun 2021, PPh Nonmigas tumbuh 14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi yang terus dilaksanakan setelah mengalami penurunan tajam di tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19.

Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan pertumbuhan signifikan 43,0 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian domestik yang terus membaik, tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang berjalan sepanjang semester I tahun 2022.

Pada tahun 2023, penerimaan PPh Nonmigas mampu tumbuh 7,8 persen seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga dan peningkatan utilisasi serta upah tenaga kerja. Selanjutnya penerimaan PPh Nonmigas pada tahun 2024 tumbuh 0,4 persen meskipun dibayangi moderasi harga komoditas. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh terjaganya aktivitas ekonomi nasional yang tercermin dari peningkatan PPh atas kegiatan transaksional seperti PPh 21, PPh final, dan PPh 26. Pada tahun 2025 *outlook* penerimaan PPh Nonmigas diperkirakan tumbuh 0,1 persen yang didukung stabilitas ekonomi nasional meskipun adanya dampak implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER), penurunan profitabilitas usaha di sektor komoditas, dan penerimaan yang masih tercatat pada deposit di komponen pajak lainnya.

Dengan memperhatikan capaian tahun-tahun sebelumnya, proyeksi perekonomian tahun 2026 dan optimalisasi kebijakan teknis perpajakan seperti kegiatan *joint program* serta peningkatan efektivitas pengawasan dengan fokus kepada Wajib Pajak Grup dan *High Wealth Individual* (HWI), penerimaan PPh Nonmigas dalam APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.154.127,0 miliar, dengan total penerimaan PPh mencapai Rp1.209.363,4 miliar. Perkembangan PPh 2021–2025 dan target tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.1.**

GRAFIK 2.1
PAJAK PENGHASILAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



sumber: Kementerian Keuangan

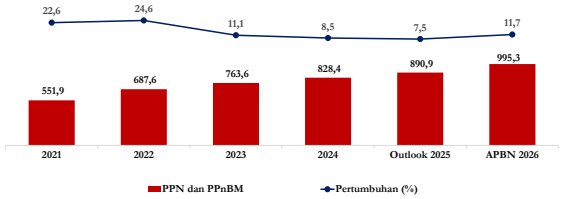
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung terjaga kinerjanya seiring dengan perkembangan perekonomian nasional. PPN dan PPnBM pada tahun 2021 tumbuh 22,6 persen yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM tumbuh positif mencapai 11,1 persen, sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Sementara itu kinerja PPN dan PPnBM berlanjut dan mampu tumbuh 8,5 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri. Dengan proyeksi ekonomi domestik yang masih terjaga di tengah perlambatan ekonomi global, *outlook* penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh 7,5 persen.

Selanjutnya, seiring dengan implementasi reformasi perpajakan serta proyeksi tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap solid, PPN dan PPnBM pada APBN tahun 2026 ditargetkan Rp995.277,4 miliar. Perkembangan PPN dan PPnBM tahun 2021–2025 dan target tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.2.**

GRAFIK 2.2
PPN DAN PPnBM, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada periode 2021-2025, penerimaan PBB mengalami pola yang fluktuatif terutama dipengaruhi PBB sektor minerba serta PBB sektor minyak dan gas. Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, pada tahun 2022, penerimaan PBB mampu kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang memengaruhi penerimaan PBB di tahun 2022 antara lain adanya peningkatan aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah pertambangan lapangan *onstream*.

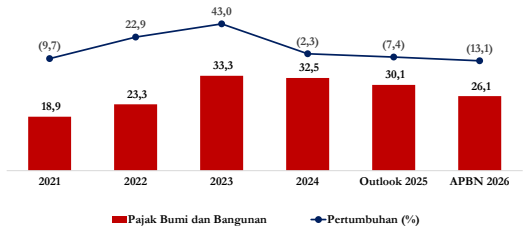
Pada tahun 2023, PBB kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 43,0 persen. Kinerja penerimaan PBB mengalami pola yang fluktuatif terutama dipengaruhi PBB sektor minerba serta PBB sektor minyak dan gas.

Selanjutnya, PBB mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen pada tahun 2024 akibat moderasi harga komoditas pada tahun sebelumnya. Tren ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025, sehingga pada akhir tahun 2025, PBB diperkirakan akan terkontraksi.

Dengan memperhatikan tren perkembangan PBB dan proyeksi moderasi harga komoditas terutama minerba, minyak, dan gas bumi,

PBB dalam APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp26.138,1 miliar. Perkembangan PBB tahun 2021–2025 dan target tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.3**.

GRAFIK 2.3
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



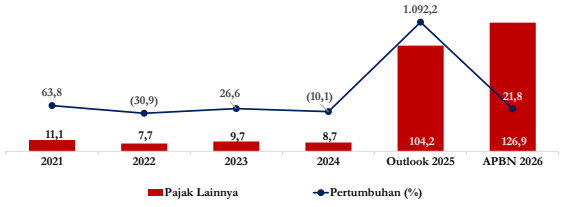
Sumber: Kementerian Keuangan

Pajak Lainnya

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi terutama dipengaruhi oleh penerimaan bea meterai dan bunga penagihan pajak. Pajak Lainnya pada tahun 2021 meningkat signifikan 63,8 persen yang disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. Namun kemudian, pada tahun 2022 Pajak Lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen terutama dipengaruhi penurunan Pendapatan Bunga Penagihan PPh.

Pada tahun 2023, Pajak Lainnya meningkat signifikan sebesar 26,6 persen dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran atas Bunga Penagihan PPh, Bea Meterai, dan Bunga Penagihan PPN. Namun demikian, Pajak Lainnya pada tahun 2024 terkontraksi 10,1 persen yang dipengaruhi oleh tidak berulangnya pembayaran bunga penagihan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, terdapat deposit yang merupakan kemudahan pembayaran bagi WP yang mendorong *outlook* penerimaan pajak lainnya tumbuh signifikan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi perekonomian tahun 2026 dan capaian tahun berjalan, Pajak Lainnya dalam APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp126.935,4 miliar. Perkembangan Pajak Lainnya tahun 2021–2025 dan target tahun 2026 ditunjukkan dalam **Grafik 2.4.**

GRAFIK 2.4
PAJAK LAINNYA, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.1.2. Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026

Kepabeanan dan Cukai sebagai komponen perpajakan memainkan peran strategis baik sebagai sumber penerimaan, mendukung perekonomian nasional, maupun melindungi masyarakat. Peran tersebut dilakukan secara harmonis bekerja sama dengan stakeholder lainnya sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan.

Perkembangan Kepabeanan dan Cukai dalam lima tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas perdagangan internasional. Seperti halnya penerimaan pajak, pertumbuhan double digits juga dicatatkan oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai 26,4 persen dan 18,0 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi pelunasan pita Cukai dan penyesuaian tarif Cukai hasil tembakau (CHT), perbaikan kinerja perdagangan internasional, peningkatan harga produk kelapa sawit, serta kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara itu, kinerja

penerimaan di sektor perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan yang ditopang oleh kenaikan penerimaan Bea Keluar.

Penurunan produksi hasil tembakau serta penurunan Bea Keluar akibat harga CPO yang lebih rendah dan menurunnya volume ekspor mineral berdampak pada penurunan kinerja Kepabeanan dan Cukai yang terkontraksi 9,9 persen di tahun 2023. Namun demikian, Kepabeanan dan Cukai tumbuh 4,9 persen pada tahun 2024 yang dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan ekspor tembaga. Meskipun demikian, kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami tekanan akibat terjadi fenomena *downtrading* ke golongan rokok yang lebih murah.

Selanjutnya, *outlook* Kepabeanan dan Cukai tahun 2025 diperkirakan tumbuh 3,4 persen yang didorong oleh kebijakan penguatan basis penerimaan dan *extra effort* pengawasan. Meskipun demikian, muncul berbagai tantangan, seperti melambatnya harga komoditas perdagangan internasional dan dampak dari kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan dapat mengganggu kinerja perdagangan internasional. Selain itu, fenomena *downtrading* diperkirakan masih terjadi di tahun 2025.

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan *outlook* penerimaan tahun 2025 serta kebijakan teknis pada Kepabeanan dan Cukai tahun 2026, penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp336.000,0 miliar atau meningkat 8,3 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan Kepabeanan dan Cukai juga dioptimalkan untuk penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi yang ditunjukkan dalam **Boks 2.2**

BOKS 2.2.
Penguatan Posisi Indonesia dalam Kerja Sama Kepabeanan Internasional dan Diplomasi Ekonomi

Di tengah arus globalisasi dan meningkatnya perdagangan lintas batas, kerja sama antarnegara menjadi semakin penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan aktivitas ekonomi. Salah satu bidang yang sangat strategis adalah kepabeanan yang meliputi sistem yang mengatur keluar masuknya barang antarnegara. Pemerintah terus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama kepabeanan internasional dan menjadikannya sebagai bagian integral dari strategi diplomasi ekonomi nasional.

Kerja sama kepabeanan internasional sebenarnya tidak hanya soal pemeriksaan barang di perbatasan atau pelabuhan. Di baliknya, terdapat sistem pertukaran data, kesepakatan pengakuan bersama atas pelaku usaha terpercaya, serta mekanisme kerja sama dalam memberantas penyelundupan dan perdagangan ilegal. Salah satu bentuk kerja sama yang dijalankan pemerintah adalah *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam program *Authorized Economic Operator* (AEO). Melalui MRA, pelaku usaha nasional yang telah terbukti patuh dan berintegritas akan mendapatkan perlakuan khusus atau kemudahan di negara mitra. Ini tentu menjadi keuntungan besar karena membuat ekspor Indonesia lebih cepat dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kesepakatan dalam bentuk *Customs Mutual Assistance Agreement* (CMAA) yang memungkinkan pertukaran informasi intelijen kepabeanan antarnegara. Dengan kerja sama ini, Indonesia bisa lebih efektif dalam mencegah kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkotika, senjata ilegal, atau barang palsu. Artinya, kerja sama ini tidak hanya penting untuk perdagangan, tapi juga untuk keamanan nasional.

Tak hanya berhenti di situ, peran pemerintah juga terlihat dalam berbagai forum internasional seperti World Customs Organization (WCO), ASEAN Customs, dan APEC. Kehadiran Indonesia dalam forum-forum ini menjadi saluran penting untuk ikut menyusun aturan main kepabeanan global. Pemerintah

memastikan bahwa suara Indonesia terdengar, dan kepentingan nasional, seperti perlindungan industri dalam negeri atau peningkatan ekspor, diperjuangkan.

Menariknya, kerja sama kepabeanan internasional ini juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia. Isu-isu teknis kepabeanan sering kali menjadi kunci dalam membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia. Misalnya, jika ada hambatan teknis di pelabuhan negara lain, institusi pemerintah yang berwenang dapat menjadi jembatan komunikasi untuk menyelesaikannya.

Untuk menunjang semua ini, pemerintah juga terus memperkuat sistem dalam negeri. Institusi terkait terus melakukan modernisasi sistem informasi, melatih petugas dengan standar internasional, dan membangun sistem manajemen risiko berbasis data. Selain itu, pemerintah membuka ruang dialog dengan dunia usaha agar kebijakan yang dibuat bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekspor-impor.

Dengan semua upaya ini, Indonesia semakin diperhitungkan dalam dunia kepabeanan internasional. Kerja sama yang dijalin bukan hanya soal kepentingan ekonomi, tapi juga membangun kepercayaan dan reputasi negara. Pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara tujuan ekspor, tetapi juga mitra yang andal dalam menjaga kelancaran dan keamanan arus perdagangan dunia.

Cukai

Fondasi pengenaan Cukai tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang selalu mengedepankan aspek-aspek 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal. Sejalan dengan hal itu, Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (*revenue collector*) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

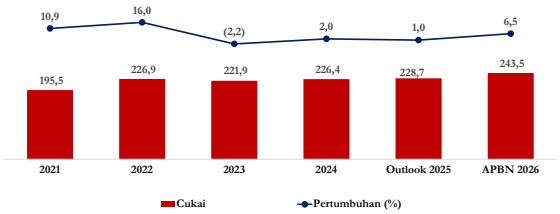
Penerimaan Cukai pada tahun 2021 dan 2022 tumbuh masing-masing sebesar 10,9 persen dan 16,0 persen seiring dengan tren konsumsi yang meningkat, penerapan kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan pemesanan pita Cukai, serta upaya penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Selanjutnya penurunan produksi hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) Golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) Golongan I berdampak pada penurunan penerimaan Cukai pada tahun 2023 yang terkontraksi 2,2 persen. Namun, penerimaan Cukai pada tahun 2024 tumbuh 2,0 persen seiring dengan upaya pengawasan dan penindakan BKC ilegal.

Kinerja tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun 2025 meskipun terdapat tekanan sejalan dengan perubahan perilaku konsumen dan produsen yang beralih ke produk hasil tembakau yang lebih murah serta adanya peredaran rokok ilegal. Untuk menurunkan peredaran rokok ilegal tersebut sekaligus meningkatkan penerimaan negara di bidang Cukai dan penerimaan daerah yang berasal dari rokok, Pemerintah akan meningkatkan pengawasan BKC ilegal antara lain berupa rokok ilegal, dengan cara memperkuat regulasi dan penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal dengan mengoptimalkan penggunaan penerimaan pajak rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sampai dengan akhir tahun 2025, *outlook* penerimaan Cukai diperkirakan tumbuh 1,0 persen.

Dengan melihat perkembangan penerimaan Cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, penerimaan Cukai dalam APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp243.533,7 miliar. Perkembangan penerimaan Cukai 2021 sampai dengan 2025 dan target 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.5**.

GRAFIK 2.5
CUKAI, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk menjadi instrumen penting dalam khazanah perdagangan internasional. Tidak semata sebagai sumber penerimaan tetapi juga sebagai pendorong efektivitas kerja sama internasional dan pendorong ekonomi nasional.

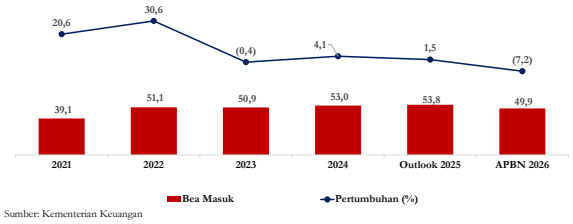
Dalam lima tahun terakhir, penerimaan Bea Masuk dipengaruhi oleh kinerja dan aktivitas perdagangan internasional. Penerimaan Bea Masuk pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencatatkan pertumbuhan *double digits* yang mencapai 20,6 persen dan 30,6 persen. Pemulihan ekonomi nasional memberikan kontribusi besar pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2022 didukung oleh penguatan tingkat permintaan dalam negeri serta kenaikan harga komoditas. Dalam periode tersebut, Pemerintah tetap memberikan insentif kepabeanan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Stagnasi perekonomian global berdampak pada penurunan nilai impor komoditas utama sehingga penerimaan Bea Masuk pada tahun 2023 mengalami kontraksi 0,4 persen. Namun demikian, penerimaan Bea Masuk pada tahun 2024 tumbuh 4,1 persen yang didorong oleh penguatan nilai tukar Dolar Amerika Serikat serta kenaikan nilai impor.

Selanjutnya *outlook* penerimaan Bea Masuk tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh 1,5 persen yang didorong permintaan terhadap bahan baku dan modal sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang didukung aktivitas pengawasan yang solid. Penerimaan tersebut juga telah memperhitungkan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional menuju swasembada. Meskipun demikian, perlu diwaspadai dampak penerapan tarif Bea Masuk hasil perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan domestik, kebijakan teknis, serta perkembangan dan *outlook* Bea Masuk tahun sebelumnya, Bea Masuk dalam APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp49.901,7 miliar. Perkembangan penerimaan Bea Masuk tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.6**.

GRAFIK 2.6
BEA MASUK, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Bea Keluar

Komponen pajak perdagangan intenasional yang berkaitan dengan aktivitas ekspor adalah Bea Keluar. Penerimaan Bea Keluar dalam lima tahun terakhir sangat dinamis yang dipengaruhi oleh harga komoditas utama dunia terutama yang dikenakan pungutan ekspor (seperti produk kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan pemerintah terkait ekspor komoditas.

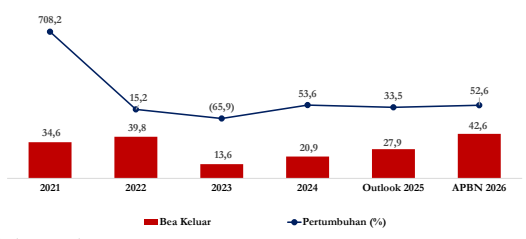
Keterbatasan pasokan komoditas CPO dunia menjadi faktor yang mengungkit penerimaan

Bea Keluar pada tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing tumbuh 708,2 persen dan 15,2 persen. Pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2021 dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dunia akibat kebijakan *lockdown* yang dilakukan negara produsen CPO. Selanjutnya kinerja pada tahun 2022 dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas terutama CPO serta mineral terutama disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Kinerja penerimaan Bea Keluar pada tahun 2023 terkontraksi 65,9 persen yang dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas utama dunia terutama CPO serta menurunnya volume ekspor mineral dan penyesuaian tarif Bea Keluar produk mineral seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA. Penerimaan Bea Keluar tahun 2024 *rebound* dan tumbuh 53,6 persen yang didorong terutama kebijakan relaksasi ekspor tembaga. Kinerja tersebut diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2025, sehingga *outlook* penerimaan Bea Keluar akan tumbuh 33,5 persen.

Dengan memperhatikan fluktuasi harga komoditas terutama CPO, kebijakan hilirisasi, kebijakan teknis, serta realisasi dan *outlook* Bea Keluar tahun sebelumnya, penerimaan Bea Keluar dalam APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp42.564,6 miliar. Perkembangan penerimaan Bea Keluar tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.7.**

GRAFIK 2.7
BEA KELUAR, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

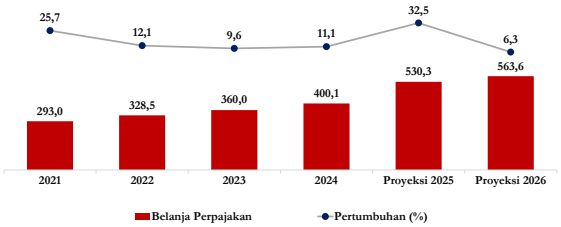
2.1.1.3. Belanja Perpajakan

Kebijakan Belanja Perpajakan dirancang secara terarah dan terukur sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Hal ini menjadi wujud peran aktif Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Belanja Perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan sektor, antara lain untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung pengembangan UMKM.

Laporan Belanja Perpajakan Indonesia disusun dengan memerhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana *best practice* internasional. Pada Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia tahun 2023 mendapatkan predikat *Advanced* dengan mengacu pada IMF Fiscal Transparency Code. Selanjutnya, pada tahun 2024, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat 2 dunia dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI 2024) di atas negara-negara maju. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menerapkan transparansi informasi kepada publik terkait insentif perpajakan.

Nilai Belanja Perpajakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, estimasi Belanja Perpajakan Indonesia mencapai Rp400.133,1 miliar atau 1,81 persen dari PDB, naik 11,1 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 360.007,0 miliar atau 1,72 persen dari PDB, sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang cukup menantang di tengah dinamika ekonomi global. Perkembangan nilai Belanja Perpajakan dari tahun 2021-2024 serta proyeksi tahun 2025-2026 dapat dilihat pada **Grafik 2.8.**

GRAFIK 2.8
BELANJA PERPAJAKAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Nilai Belanja Perpajakan berdasarkan jenis pajak sebagian besar berbentuk PPN dan PPnBM, yang menyumbang setengah lebih total Belanja Perpajakan. Pada tahun 2024, Belanja Perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp227.761,1 miliar atau 56,9 persen dari total estimasi Belanja Perpajakan.

Dari jumlah tersebut, 28,1 persen berasal dari PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok dan hasil perikanan & kelautan, serta 24,4 persen dari PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil (pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun). Sementara itu, Belanja Perpajakan PPh mencapai Rp140.685,0 miliar atau 35,2 persen dari total estimasi Belanja Perpajakan.

TABEL 2.1
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN
BERDASARKAN JENIS PAJAK
(triliun rupiah)

Berdasarkan Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PPN & PPnBM	169,9	190,4	208,2	227,8	343,3	371,9
Pajak Penghasilan	106,5	120,7	129,2	140,7	150,3	160,1
Bea Masuk & Cukai	16,6	16,4	21,5	31,3	36,2	31,1
PBB P5L	0,0	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1
Bea Meterai	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Total	**293,0**	**328,5**	**360,0**	**400,1**	**530,3**	**563,6**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Beberapa kebijakan yang memiliki nilai Belanja Perpajakan cukup tinggi dari jenis pajak PPh antara lain fasilitas PPh final untuk UMKM dan pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dari jenis pajak PBB P5L, terdapat penurunan nilai Belanja Perpajakan akibat turunnya harga minyak yang menyebabkan penurunan pendapatan kotor sebagai *proxy* untuk menghitung PBB untuk sektor usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Jika dilihat berdasarkan sektor pemanfaatannya, sektor industri pengolahan masih menerima Belanja Perpajakan terbesar yaitu sebesar Rp98.883,0 miliar atau sebesar 24,7 persen dari total Belanja Perpajakan tahun 2024. Tingginya pemanfaatan di sektor industri pengolahan sebagian besar dimanfaatkan oleh industri untuk pengusaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, pembebasan Bea Masuk untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta pembebasan Bea Masuk untuk barang modal. Selanjutnya sektor terbesar kedua yang memanfaatkan insentif Belanja Perpajakan adalah sektor 'Lainnya' yaitu sebesar 12,5 persen dari total yang sebagian besar berisi pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Sektor yang memanfaatkan Belanja Perpajakan terbesar selanjutnya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan serta jasa keuangan dan asuransi yaitu masing-masing sebesar 12,3 persen dan 11,4 persen dari total Belanja Perpajakan.

TABEL 2.2
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Sektor	Estimasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spesifik Sektor						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40,1	46,6	49,4	49,2	60,5	63,8
Pertambangan dan Penggalian	1,4	1,2	1,8	2,6	3,0	3,2
Industri Pengolahan	72,3	82,2	88,8	98,9	137,2	141,7
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,8	8,2	9,0	11,7	15,0	16,0
Pengadaan Air, Peng. Sampah dan Limbah	1,3	1,4	1,6	1,9	2,5	2,8
Konstruksi	5,7	7,1	8,7	9,3	22,1	23,7
Perdagangan	21,0	24,5	26,3	27,2	55,3	59,3
Transportasi dan Pergudangan	18,3	23,1	25,1	29,4	39,7	43,6
Penyediaan Akomodasi dan Mamin	1,8	2,2	2,5	2,7	3,1	3,5
Informasi dan Komunikasi	2,3	2,0	2,0	2,4	4,5	4,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	34,2	36,0	41,2	45,8	52,1	54,4
Real Estat	5,9	6,1	6,6	7,7	9,4	10,0
Jasa Perusahaan	2,9	4,8	4,5	4,6	8,4	9,3
Adm Pemerintahan dan Jamsos Wajib	23,5	20,5	18,4	20,0	21,6	23,4
Jasa Pendidikan	18,7	20,2	20,8	21,6	25,3	27,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,9	12,0	12,9	13,6	15,1	16,7
Lainnya	21,8	29,0	39,0	49,9	53,5	58,4
Multi sektor	1,2	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Total	**293,0**	**328,5**	**360,0**	**400,1**	**530,3**	**563,6**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Pada tahun 2024, nilai terbesar dari Belanja Perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencapai 45,3 persen dari total Belanja Perpajakan. Kebijakan ini terutama berupa pengecualian pajak untuk barang dan jasa penting seperti bahan kebutuhan pokok, PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan kelautan dan perikanan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum guna menjaga daya beli masyarakat. UMKM memperoleh manfaat sebesar Rp88.986,1 miliar atau 22,2 persen, melalui insentif yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Selain itu, sebesar Rp129.777,3 miliar diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia usaha dimana Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas antara lain seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

TABEL 2.3
ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN
BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN
(triliun rupiah)

Berdasarkan Tujuan	Estimasi				Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan iklim investasi	25,1	39,6	54,4	76,2	84,3	84,7
Mendukung dunia bisnis	43,5	52,1	52,1	53,6	56,9	58,1
Mengembangkan UMKM	72,7	81,5	85,3	89,0	96,4	104,7
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	151,8	155,3	168,2	181,4	292,7	316,1
Total	**293,0**	**328,5**	**360,0**	**400,1**	**530,3**	**563,6**

Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara

Perlu diketahui bahwa dengan terbitnya PMK Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, insentif DTP tidak lagi dikategorikan sebagai Belanja Perpajakan. Beberapa insentif perpajakan strategis dalam bentuk DTP, salah satunya adalah insentif perpajakan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) berupa PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah. Insentif ini diberikan dalam rangka mengakselerasi program KBLBB yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2023. Realisasi PPN ditanggung

pemerintah untuk tahun 2024 sebesar Rp775,8 miliar sedangkan untuk PPnBM ditanggung pemerintah mencapai sebesar Rp1.094,3 miliar. Pemberian dukungan tambahan untuk KBLBB ini beserta insentif fiskal dan non fiskal lainnya berhasil meningkatkan *share* penjualan KBLBB dari tahun ke tahun. Pada mulanya, *share* KBLBB terhadap seluruh populasi kendaraan bermotor pada tahun 2022 baru mencapai 1 persen, kemudian meningkat menjadi 1,7 persen pada tahun 2023 dan mencapai angka 5 persen pada tahun 2024. Hingga Juni 2025 ini *share* tersebut telah mencapai angka 9,7 persen.

Selanjutnya, terdapat insentif perpajakan untuk Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun berupa PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP Properti). Pemberian insentif ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

PPN DTP diberikan sebesar 100 persen untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2024 dari PPN yang terutang atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Realisasi PPN ditanggung pemerintah untuk tahun 2024 sebesar Rp2.789,7 miliar dan berhasil meningkatkan penjualan rumah hingga 40.087 unit. PPN DTP Properti dilanjutkan di tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.380,0 miliar.

2.1.2. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2021-2025 dan Rencana Tahun 2026

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama kurun waktu 2021-2024 secara umum menunjukkan tren pergerakan yang cukup dinamis, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,4 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas seperti minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar internasional yang memberikan kinerja positif pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 dimana PNBP terkontraksi sebesar 4,6 persen, yang disebabkan oleh tekanan pada kinerja Pendapatan SDA dan PNBP Lainnya.

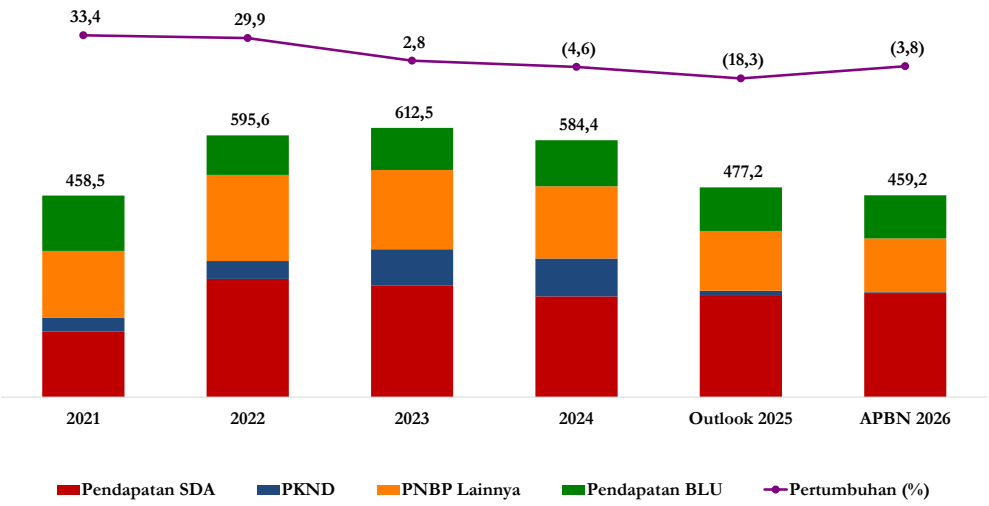
Pada tahun 2025, kinerja PNBP pada Semester I masih menghadapi tekanan yang disebabkan oleh dinamika perekonomian global. Hal ini dapat terlihat dari realisasi PNBP Semester I tahun 2025 yang terkontraksi sebesar 22,7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024. Fluktuasi harga komoditas terutama minyak bumi dan minerba sejak awal tahun 2025 sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja PNBP. Selain itu, peralihan pengelolaan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan tekanan yang cukup dalam pada pencapaian target PNBP di Semester I tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, hingga akhir tahun 2025 PNBP diperkirakan akan mencapai Rp477.227,9 miliar, atau terkontraksi 18,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Perkembangan PNBP selama 2021-2025 dan target tahun 2026 dapat dilihat pada **Grafik 2.9.**

Pada APBN tahun 2026, PNBP ditargetkan mencapai Rp459.199,9 miliar atau terkontraksi 3,8 persen dari *outlook* tahun 2025. Dalam rangka pencapaian target PNBP tersebut, kebijakan umum PNBP tahun 2026 diarahkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

2. Peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan
3. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

GRAFIK 2.9
PERKEMBANGAN PNBP, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA

Kinerja Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA Nonmigas selama periode tahun 2021–2024 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 39,6 persen tiap tahun terhadap total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan rata-rata sebesar 29,5 persen selama periode 2021–2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 79,8 persen utamanya dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas minyak bumi dan batubara di pasar internasional, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 9,9 persen disebabkan oleh tren ICP yang fluktuatif dan kinerja *lifting* migas yang belum optimal.

Pendapatan SDA pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp230.086,6 miliar, tumbuh sebesar 0,5 persen dari realisasi tahun 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas, terutama minyak bumi, mineral, dan batubara, serta peningkatan *lifting* migas yang memberikan dampak langsung bagi pendapatan SDA baik migas maupun nonmigas.

Pada APBN tahun 2026, Pendapatan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp236.614,1 miliar, tumbuh 2,8 persen dari *outlook* tahun 2025, terdiri dari Pendapatan SDA Migas sebesar Rp113.069,2 miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp123.544,9 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perbaikan tata kelola industri migas serta peningkatan monitoring, evaluasi, pengawasan,

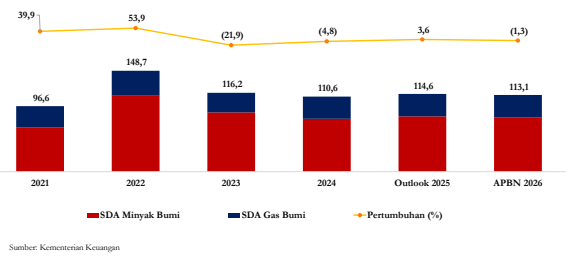
dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi.

Pendapatan SDA Migas

Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2021–2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,8 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan ICP yang mencapai US$97,1 per barel. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 21,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja ICP yang hanya mencapai US$78,4 per barel.

Pada tahun 2025, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp114.574,3 miliar atau tumbuh 3,6 persen dari realisasi tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama mempertimbangkan fluktuasi ICP dan target *lifting* migas. **Grafik 2.10** memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2021–2025 dan target tahun 2026.

GRAFIK 2.10
PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Migas dalam APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp113.069,2 miliar, terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp80.212,0 miliar dan Pendapatan SDA Gas Bumi sebesar Rp32.857,3 miliar. Pendapatan SDA Migas ini lebih rendah dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP) dan kenaikan biaya produksi. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

1. Mendorong penyempurnaan regulasi, baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, serta perbaikan tata kelola industri hulu migas;
2. Mendorong peningkatan *lifting* migas, antara lain dengan memanfaatkan sumur-sumur *idle* (*idle well*) yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada dilakukan dengan penerapan teknologi termasuk *Enhanced Oil Recovery* (EOR), serta percepatan *Plan of Development* (PoD) pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi;
3. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional *(cost recovery)* kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi;
5. Mendorong efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT); serta
6. Mendorong digitalisasi proses bisnis.

BOKS 2.3
Hilirisasi Berbasis SDA Untuk Akselerasi Ekonomi

Hilirisasi berbasis SDA sebagai salah satu landasan utama dalam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Strategi tersebut diperlukan untuk keluar dari *middle income trap* dan mewujudkan struktur ekonomi yang lebih kompleks, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi SDA yang melimpah, hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan eksternal, serta mendorong akselerasi pertumbuhan industri manufaktur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Di tengah tren global menuju dekarbonisasi, hilirisasi yang dilakukan tetap berwawasan lingkungan menjadi strategi kunci untuk tetap dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Kebijakan hilirisasi yang berwawasan lingkungan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan industri domestik dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi. Lebih lanjut, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan berorientasi pada dekarbonisasi, hilirisasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kompleksitas produk ekspor Indonesia serta memperluas basis industri berteknologi menengah dan tinggi *(medium-high tech)*.

Arah kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan dan komprehensif didasarkan pada empat pilar utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan memperkuat fondasi industri nasional. Secara strategis, hilirisasi memiliki empat manfaat utama: (i) menghasilkan nilai tambah dalam negeri melalui transformasi komoditas primer menjadi produk antara dan produk jadi; (ii) memperkuat struktur industri nasional dengan membangun keterkaitan antarsektor *(forward and backward linkages)* dan integrasi dalam rantai nilai global; (iii) menyediakan lapangan kerja dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik, khususnya di wilayah penghasil SDA dan kawasan industri; serta (iv) memperbaiki neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor produk olahan dan substitusi impor. Selanjutnya, untuk mengakselerasi hilirisasi secara berkelanjutan, kebijakan diarahkan pada empat pilar utama. Pertama, pengelolaan SDA secara berkelanjutan, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlangsungan pasokan bahan baku jangka panjang. Kedua, penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi, mencakup ketersediaan energi, air, pelabuhan, jalan, dan kawasan industri yang ramah lingkungan dan efisien. Ketiga, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan kepastian regulasi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan, serta perluasan akses ke pasar global. Keempat, penguatan riset dan inovasi teknologi, serta pengembangan SDM industri yang unggul, termasuk melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan.

Dari beberapa komoditas SDA, Pemerintah telah menetapkan hilirisasi atas sejumlah komoditas strategis sebagai langkah prioritas untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan kompleksitas produk dalam rantai nilai industri nasional. Saat ini, Pemerintah telah mengidentifikasi dan mendorong hilirisasi terhadap sedikitnya 28 komoditas strategis, yang mencakup: (i) mineral dan batubara, terdiri dari komoditas nikel, tembaga, bauksit, timah, pasir silika, dan batubara; (ii) migas; dan (iii) pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terdiri dari komoditas kelapa sawit, karet, kopi, cokelat, rumput laut, dan ikan. Berbagai komoditas tersebut diarahkan untuk dikembangkan secara bertahap menjadi produk-produk dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Tahapan hilirisasi meliputi: (1) ekstraksi/pemanfaatan SDA, (2) pengolahan awal seperti *smelting* dan *refining*, (3) produksi barang antara *(intermediate goods)*, (4) pengembangan komponen industri *(industrial parts*), dan (5) manufaktur produk akhir *(final goods)*. Strategi ini diharapkan menciptakan nilai tambah yang tinggi dan berkelanjutan dalam rantai nilai industri nasional.

Fokus utama hilirisasi untuk mendorong ekspor bernilai tinggi, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja nasional diletakkan pada pengembangan produk antara, komponen industri, dan produk akhir berteknologi tinggi. Beberapa produk antara dan komponen industri yang menjadi fokus pengembangan antara lain: baterai dan komponen kendaraan listrik, kabel dan *tube*, bahan baku konstruksi, suku cadang otomotif, pesawat dan elektronik, infrastruktur digital seperti *data center*, serta produk berbasis energi baru terbarukan seperti bioetanol dan biodiesel. Di sektor kimia dan kesehatan, pengembangan industri kosmetik dan farmasi juga didorong untuk mengurangi ketergantungan impor. Pada tahap produk akhir, hilirisasi difokuskan pada pengembangan *solar panel*, kendaraan listrik, semikonduktor, kemasan makanan, peralatan elektronik dan medis, serta produk olahan ikan dan rumput laut. Produk-produk ini memiliki nilai ekspor tinggi, prospek pasar global yang luas, serta potensi penciptaan lapangan kerja yang signifikan.

Potensi hilirisasi komoditas strategis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadikan strategi ini juga sebagai instrumen kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis keunggulan komparatif. Peta komoditas strategis Indonesia menunjukkan bahwa potensi hilirisasi tersebar luas di berbagai wilayah, dimana komoditas mineral logam berada di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan; migas di Sumatera dan Jawa; sawit di Sumatera dan Kalimantan; perikanan dan rumput laut di kawasan pesisir timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, strategi hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keunggulan komparatif. Ke depan, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga riset, serta keberpihakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pembiayaan investasi industri berkelanjutan. Melalui hilirisasi yang inklusif dan progresif, Indonesia diharapkan mampu membangun fondasi ekonomi baru yang lebih resilien, produktif, dan kompetitif dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Mengingat pentingnya hilirisasi berbasis SDA, maka hal tersebut akan terus dilanjutkan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan menjadi salah satu prioritas dalam 17 Program Prioritas Presiden.

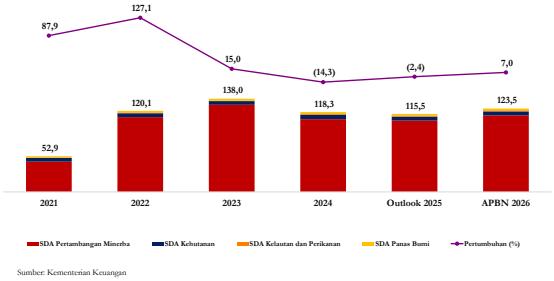
Pendapatan SDA Nonmigas

Pendapatan SDA Nonmigas selama periode 2021-2024 mengalami pertumbuham rata-rata sebesar 53,9 persen. Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh pergerakan Harga Batubara Acuan (HBA), volume produksi batubara dan kondisi geopolitik dunia. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini utamanya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas batubara yang meningkat sejak tahun 2022 dimana HBA mencapai rata-rata US$276,6 per ton. Adapun Pertumbuhan Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi hingga sebesar 14,3 persen dampak dari penurunan pendapatan royalti minerba akibat penurunan HBA rata-rata sebesar 42,2 persen menjadi US$121,5 per ton dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Nonmigas diperkirakan mencapai Rp123.544,9 miliar atau terkontraksi 7,0 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba terutama batubara yang terus berlanjut sejak awal tahun 2024.

Pendapatan SDA Nonmigas pada APBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp123.544,9 miliar, tumbuh 7,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas selama 2021–2025 dan target tahun 2026 disajikan dalam **Grafik 2.11**.

GRAFIK 2.11
PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan SDA Pertambangan Minerba sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 64,7 persen dalam periode 2021–2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan harga komoditas minerba terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2022 sebesar US$276,6 per ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun 2021 yang sebesar US$121,5 per ton. Selain itu, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga turut menyumbang tingginya pertumbuhan pendapatan SDA Nonmigas tahun 2022. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 16,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas mineral terutama batubara. Rata-rata HBA tahun 2024 sebesar US$121,5 per ton lebih rendah dari rata-rata HBA tahun 2023 yang sebesar US$201,1 per ton.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai Rp105.722,0 miliar, terkontraksi 1,9 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas minerba sejak awal tahun 2024 yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025.

Pada APBN tahun 2026, Pendapatan SDA Pertambangan Minerba ditargetkan sebesar Rp113.389,5 miliar atau tumbuh 7,3 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 dan fluktuasi Harga Mineral Acuan (HMA) beberapa mineral, antara lain emas, nikel, dan tembaga dalam beberapa tahun terakhir. Fluktuasi harga komoditas dunia tersebut merupakan tantangan yang masih sulit dikendalikan ditengah upaya optimalisasi kebijakan pengelolaan PNBP SDA. Untuk itu, Pemerintah mengambil berbagai kebijakan teknis dalam rangka pencapaian target PNBP Minerba antara lain:

1. Penguatan sinergi integrasi data lintas K/L melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA);
2. Penerapan *Automatic Blocking System* (ABS) untuk Wajib Bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban PNBP;
3. Kerjasama Kementerian ESDM/ Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri;
4. Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba;
5. Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan DMO batubara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan *smelter*.

Pendapatan SDA Kehutanan selama periode tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,9 persen. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 24,1 persen didukung oleh pendapatan dari produksi kayu bulat dan optimalisasi upaya penagihan piutang PNBP sektor kehutanan. Selain itu, jumlah pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebagai implementasi dari Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja terkait kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 6,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi kayu bulat.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan mencapai Rp5.882,7 miliar, terkontraksi sebesar 12,7 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya penundaan pembayaran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) oleh Wajib Bayar karena terdapat perbedaan data antara yang dimiliki Wajib Bayar dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.

Pada APBN tahun 2026, Pendapatan SDA Kehutanan ditargetkan sebesar Rp5.919,8 miliar atau naik 0,6 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan SDA Kehutanan tahun 2026, antara lain:

1. Perbaikan tata kelola kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya;
2. Peningkatan produktivitas kawasan hutan serta diversifikasi kegiatan usaha;
3. Memperkuat ekosistem usaha serta meningkatkan nilai tambah produk hutan;
4. Revitalisasi industri dan hilirisasi kayu dan hasil hutan bukan kayu;
5. Optimalisasi PNBP sektor kehutanan melalui peningkatan pengawasan;
6. Digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas tata kelola PNBP;
7. Optimalisasi penyelesaian piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan memprioritaskan koordinasi dengan K/L;
8. Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan.

Sementara itu, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan pada periode 2021–2024 mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata 22,3 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 68,5 persen. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, serta peningkatan jumlah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023, terkontraksi sebesar 46,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh implementasi PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dari Praproduksi yang belum berdampak optimal.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp1.627,6 miliar atau tumbuh 71,0 persen dari realisasinya pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diperkirakan berasal dari pendapatan SDA Perikanan dengan meningkatnya akurasi pendataan hasil produksi perikanan tangkap.

Pada APBN tahun 2026, Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp1.663,0 miliar atau naik 2,2 persen dari *outlook*

tahun 2025. Kebijakan PNBP sektor Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk optimalisasi PNBP dan peningkatan tata kelola antara lain melalui:

1. Penyesuaian jenis dan besaran tarif atas jenis PNBP dengan tetap menjaga kualitas layanan publik;
2. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Integrasi dan penguatan basis data;
4. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas dan optimalisasi pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN);
5. Penguatan fungsi evaluasi dan penilaian terhadap target PNBP;
6. Penguatan sistem pengawasan dan pemeriksaan;
7. Penguatan kerjasama lintas K/L;
8. Pengembangan lokasi prioritas pembersihan sedimentasi di laut;
9. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
10. Melengkapi regulasi pendukung dalam bentuk SOP, Juklak, dan Juknis;
11. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi dalam periode 2021–2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,2 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 23,7 persen disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) periode triwulan II tahun 2023 dengan diterimanya pembayaran listrik Wayang Windu Unit I periode Juli – Desember 2022 yang sebelumnya mengalami *dispute* eskalasi harga, serta setoran dari WKP *Supreme Energy* Rantau Dedap dan penambahan kapasitas WKP Sorik Merapi *Geothermal Power*. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang terkontraksi sebesar 1,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kewajiban Pemerintah khususnya pembayaran kembali PPN panas bumi dan PBB panas bumi.

Pada tahun 2025, Pendapatan SDA Panas Bumi diperkirakan mencapai Rp2.280,0 miliar atau terkontraksi 19,7 persen dari realisasi tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Setoran Bagian Pemerintah (SBP), utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasi, yang disebabkan antara lain oleh peningkatan beban imbalan pascakerja serta meningkatnya biaya bunga akibat penghentian kapitalisasi bunga pinjaman pada proyek yang dihentikan untuk sementara waktu.

Dalam APBN Tahun 2026, Pendapatan SDA Panas Bumi ditargetkan sebesar Rp2.572,6 miliar atau naik 12,8 persen dari *outlook* tahun 2025. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas Bumi antara lain:

1. Penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan Rancangan Permen ESDM terkait Mineral Ikutan dan Pemanfaatan Langsung), dan sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama pemerintah daerah;
2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas bumi, antara lain dengan percepatan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi, percepatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), optimalisasi penugasan dan koordinasi BUMN, penguatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi pemberian fasilitas fiskal;
3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan

hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), dan peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan pemanfaatan *brine* (limbah panas bumi);

4. Penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBP melalui e-PNBP, dan penggunaan aplikasi Genesis untuk penawaran wilayah panas bumi dan *platform* APDN untuk peningkatan TKDN.

BOKS 2.4
Penguatan Pengawasan dan Penggalian Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar penerimaan negara dalam APBN Indonesia. Menyadari peran penting tersebut, penguatan pengawasan dan penggalian potensi PNBP menjadi salah satu prioritas pemerintah guna menjamin stabilitas ekonomi serta keberlanjutan pendanaan agenda nasional. Pengawasan PNBP bertujuan untuk memastikan kepatuhan tata kelola PNBP dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Sementara itu, penggalian potensi PNBP bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara dari berbagai layanan, sumber daya alam, dan pengelolaan aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan masih adanya potensi PNBP yang belum diterima negara dan dimanfaatkan secara maksimal, pengawasan dan penggalian potensi PNBP menjadi aspek yang krusial untuk diperkuat.

Saat ini, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk meningkatkan peran tersebut, pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas pengawasan dan penggalian potensi PNBP yang berfokus pada: (i) memperluas kolaborasi antar lembaga guna mengoptimalkan kewenangan pemeriksaan PNBP; (ii) menyusun standar operasional terpadu guna memastikan konsistensi metode pengawasan/pemeriksaan; serta (iii) memperkuat sinergi dalam pelaksanaan *joint audit* penerimaan negara pada sektor PNBP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penggalian potensi PNBP antara lain: (i) penguatan organisasi dan regulasi, (ii) pengembangan ekosistem pengawasan PNBP melalui integrasi sistem informasi antar kementerian lembaga, (iii) percepatan dan optimalisasi penagihan piutang PNBP melalui implementasi *Automatic Blocking System* (ABS), serta (iv) transformasi layanan melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur. Rencana ini juga diperkuat dengan upaya peningkatan nilai tambah sektor sumber daya alam melalui program hilirisasi, penyesuaian tarif yang berkeadilan, optimalisasi pemanfaatan aset negara, peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP, serta identifikasi sumber-sumber penerimaan baru. Dengan implementasi rencana aksi pengawasan dan penggalian potensi PNBP di tahun 2026, Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga target penerimaan PNBP dalam APBN tahun 2026, sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal negara secara optimal.

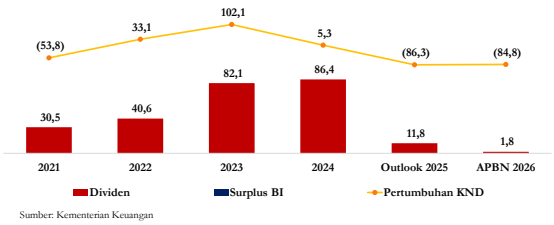
2.1.2.1. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif selama periode 2021–2024 yaitu tumbuh rata-rata sebesar 21,7 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan Pendapatan KND tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 102,1 persen yang disebabkan oleh peningkatan setoran dividen BUMN sebagai dampak dari membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022 seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun

2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya setoran dividen BUMN akibat penurunan kinerja BUMN Tahun Buku 2020 yang terdampak pandemi *Covid*-19, serta tidak adanya realisasi pendapatan KND dari sisa surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, kinerja capaian Pendapatan KND sangat dipengaruhi oleh kinerja BUMN dan lembaga lain termasuk dari sisa surplus BI pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Pendapatan KND dari sisa surplus BI tidak selalu terealisasi setiap tahun mengingat pendapatan tersebut baru diterima apabila jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban moneter BI.

Pada tahun 2025, Pendapatan KND diperkirakan sebesar Rp11.831,1 miliar atau terkontraksi 86,3 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara, sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). **Grafik 2.12** menjelaskan perkembangan Pendapatan KND periode 2021-2025 dan target tahun 2026.

GRAFIK 2.12
PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan KND pada APBN Tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp1.800,0 miliar atau turun 84,8 persen dari *outlook* tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara. Oleh karena itu, fokus kebijakan Pemerintah akan diarahkan pada optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* serta diikuti dengan perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

2.1.2.2. PNBP Lainnya

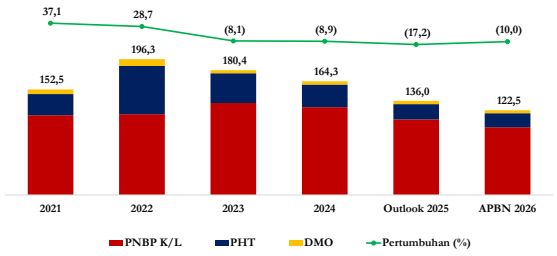
Selama periode 2021-2024, PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan *Domestic Market Obligation* (DMO) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 37,1 persen sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat serta terjadinya tren peningkatan harga komoditas batubara. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang terkontraksi sebesar 8,9 persen yang disebabkan oleh penurunan PHT akibat harga batubara yang termoderasi serta penurunan pendapatan tidak berulang pada beberapa K/L dan penurunan pendapatan Bendahara Umum Negara (BUN).

Kinerja PNBP K/L periode 2021-2024, terutama didukung oleh PNBP K/L Layanan yang tumbuh rata-rata 7,6 persen setiap tahunnya. PNBP K/L Layanan tersebut antara lain Pendapatan Layanan dari Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika, Pendapatan Layanan Administrasi Hukum, Pendapatan Jasa Transportasi, dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian. Sementara itu, PNBP K/L Nonlayanan terutama disumbang oleh Pendapatan atas Penempatan Uang di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum, Pendapatan atas penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), serta pendapatan premium atas obligasi negara.

Pada tahun 2025, PNBP Lainnya diperkirakan sebesar Rp136.002,6 miliar, terkontraksi 17,2

persen dari tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya PHT akibat moderasi HBA dan penurunan volume produksi batubara. Perkembangan PNBP Lainnya periode 2021–2025 dan target tahun 2026 dapat dilihat dalam **Grafik 2.13**.

GRAFIK 2.13
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada APBN tahun 2026, PNBP Lainnya ditargetkan sebesar Rp122.463,2 miliar terkontraksi 10,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025. Penerimaan ini terdiri dari Pendapatan PNBP K/L sebesar Rp97.908,9 miliar, PHT sebesar Rp20.242,5 miliar, dan Pendapatan DMO sebesar Rp4.311,7 miliar. Penurunan PNBP Lainnya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan DMO dan PNBP K/L khususnya PNBP K/L Nonlayanan antara lain Pendapatan atas Penempatan Uang di BI dan Bank Umum serta Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja TAYL.

Optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun 2026 masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya volatilitas harga komoditas, pemerataan kualitas layanan, kompleksitas integrasi teknologi, stagnasi PNBP konvensional, dan perbaikan tata kelola yang perlu dioptimalkan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan PNBP lainnya, antara lain:

1. Pengembangan sistem perizinan terpadu, aplikasi layanan, serta integrasi *database* lintas sektor untuk mempercepat administrasi dan mengurangi inefisiensi;
2. Evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBP serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;
3. Pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP;
4. Optimalisasi penagihan dan memperkuat pengelolaan piutang melalui ABS PNBP;
5. Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset/BMN; dan
6. Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan digitalisasi layanan publik.

TABEL 2.4
PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2021–2026
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	APBN 2026
1	Kementerian Komunikasi dan Digital	21,7	23,2	22,8	22,6	22,2	22,0
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,8	9,4	9,7	10,0	10,4	16,0
3	Kementerian Perhubungan	6,7	7,3	7,9	10,5	10,5	9,4
4	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	-	-	-	-	8,4	8,5
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2,2	2,6	3,0	3,1	3,3	3,6
6	Kementerian Hukum				-	2,1	2,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Dilihat dari layanan utama yang diberikan kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar di tahun 2026 (mencakup 63,0 persen dari total pendapatan PNBP K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Hukum. Perkembangan PNBP K/L dengan kontribusi layanan utama terbesar tahun 2021–2025 dan target tahun 2026 disajikan pada **Tabel 2.4.**

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi)

Target PNBP Lainnya pada Kemenkomdigi dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp22.000,0 miliar, terkontraksi 0,7 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi karena fiberisasi jaringan *microwave link* milik operator seluler dan tarif Rp0,0 kereta cepat. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenkomdigi, antara lain:

1. Otomatisasi proses perizinan melalui *online Machine to Machine* (M2M) dan *e-licensing*;
2. Percepatan dan kemudahan pelayanan permohonan ISR (Program Prima Aksi) serta *One Day Service* layanan perizinan ISR dan penerbitan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
3. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam kanal pelayanan infrastruktur digital yang terintegrasi;
4. Rasionalisasi PNBP BHP Frekuensi untuk mendorong akselerasi pemerataan infrastruktur digital melalui penggelaran jaringan yang lebih intensif oleh penyelenggara telekomunikasi;
5. Pemberlakuan interkoneksi sistem pembayaran BHP Frekuensi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); serta integrasi berbagai aplikasi seperti *Online Single Submision* (OSS), Yanlik, Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggara Penyiaran, dan Sistem Informasi Manajemen Spektrum untuk pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran;
6. Kemudahan dalam melakukan pemenuhan komitmen melalui aplikasi SIPAOLA (DJED-Pos).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Target PNBP Lainnya pada Polri dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp16.000,0 miliar, tumbuh 53,3 persen dari *outlook* tahun 2025. Pertumbuhan ini sebagian besar diperoleh dari layanan fungsi lalu lintas, seperti layanan SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan lainnya yang dipengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Polri, antara lain:

1. Digitalisasi sistem pelayanan Regident Mengemudi yang dilengkapi sistem IT di seluruh wilayah kepolisian;
2. Penerapan pendukung pelayanan aplikasi layanan digital antara lain *Online Single Submission* (OSS) dalam layanan pengajuan *event* keramaian komersial (musik dan olahraga) melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI (*event* olahraga), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi, Tim Transisi (Bank terkait, Telkom, Peruri) agar dapat dimasukkan dan terintegrasi dalam layanan aplikasi OSS.
3. Optimalisasi penerapan standar pelayanan sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhub dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp9.400,0 miliar, terkontraksi 10,6 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan target PNBP dari layanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji

Tipe (SRUT) pengaruh animo masyarakat dan kondisi ekonomi serta akibat adanya pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari 444 pelabuhan Pengumpan Lokal (PL) dan Pengumpan Regional (PR) kepada Pemda sehingga berdampak pada 185 Satker PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kebijakan yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhub, antara lain:

1. Peningkatan layanan dan tata kelola melalui:
   a) Peningkatan inovasi dan kualitas layanan PNBP (jasa kepelabuhanan, jasa kebandarudaraan, jasa kenavigasian, jasa sertifikasi perkeretaapian, dan jasa sertifikasi kendaraan bermotor);
   b) Simplifikasi layanan dan modernisasi proses bisnis dengan memanfaatkan TIK;
   c) Keterlibatan Mitra Instansi Pengelola PNBP (MIP-PNBP) seperti MIP pada jasa layanan transportasi.
2. Optimalisasi potensi PNBP melalui:
   a) Evaluasi tarif dan jenis PNBP atas layanan yang belum terpungut dan potensi layanan PNBP baru seperti *drone,* dan tarif volatil atau yang sifatnya mendesak;
   b) Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas)

Target PNBP Lainnya pada Kemenimipas dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp8.531,7 miliar, mengalami kenaikan 1,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan oleh: (a) Kebijakan masa berlaku Paspor 10 tahun yang dapat menurunkan volume Paspor dalam jangka panjang, namun telah diantisipasi dengan berbagai jenis paspor elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (b) Implementasi jenis dan tarif baru pada pelayanan keimigrasian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, (c) Potensi peningkatan PNBP pelayanan keimigrasian juga dipengaruhi kebijakan dari K/L lain yang terkait, seperti: kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing, kemudahan proses investasi, kebijakan pertukaran pelajar/mahasiswa, dan sebagainya, serta (d) Penyelenggaraan kegiatan produktif pada Lembaga Pemasyarakatan dan penetapan kegiatan industri pada Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Keputusan Menkumham. Penerimaan PNBP Lainnya Kemenimipas akan dioptimalkan melalui kebijakan, antara lain:

1. Pelaksanaan program peningkatan pelayanan keimigrasian, antara lain: *Eazy Passport*, Paspor Simpatik, e-VOA, *Immigration lounge*, pelaksanaan Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua, dan perluasan *VoA on Shipping*;
2. Digitalisasi dan integrasi sistem layanan keimigrasian, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi akuntabilitas pengelolaan PNBP;
3. Ekstensifikasi dan intensifikasi perolehan PNBP layanan Keimigrasian melalui inovasi layanan Keimigrasian yang relevan dengan kondisi nasional dan global;
4. Peningkatan kualitas SDM pengelola PNBP menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan regulasi;
5. Evaluasi tarif layanan imigrasi, melalui usulan penyesuaian penetapan tarif PNBP.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ BPN)

Target PNBP Lainnya pada KemenATR/BPN dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp3.589,9 miliar, tumbuh 7,4 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini antara lain dipengaruhi oleh adanya potensi kenaikan penerimaan PNBP

dari pelayanan pemeliharaan data pertanahan dan pelayanan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Adapun kebijakan yang akan dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan inovasi layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta diversifikasi layanan informasi;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Penyusunan kebijakan dalam usulan tarif yang selain mendorong kemudahan berinvestasi dan keberpihakan kepada masyarakat, namun tetap mempertimbangkan kontribusi terhadap penerimaan negara; serta
4. Optimalisasi penerimaan melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian;

Kementerian Hukum (Kemenhum)

Target PNBP Lainnya pada Kemenhum dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp2,132,0 miliar, meningkat 1,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan PNBP dari pelayanan fidusia, badan hukum, dan kekayaan intelektual melalui optimalisasi layanan jenis dan tarif PNBP Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, serta perluasan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan jasa hukum dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis digital. Kebijakan yang akan diambil untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari Kemenhum, antara lain:

1. Peningkatan kolaborasi dan kerja sama strategis melalui agen pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Mal Pelayanan Publik (MPP), dan kerja sama strategis kekayaan intelektual;
2. Intensifikasi layanan AHU melalui penguatan *corporate identity*;
3. Peningkatan kualitas layanan melalui pembentukan *Account Representative*;
4. Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual;
5. Transformasi digital melalui perluasan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik;
6. Evaluasi kebijakan jenis dan tarif PNBP Kementerian Hukum secara berkala.

2.1.2.3. Pendapatan BLU

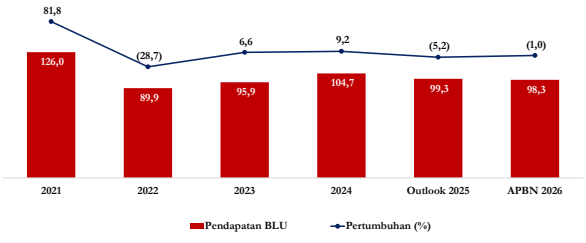
Selama tahun 2021–2024, kinerja Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun. Dalam periode tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang naik 81,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya capaian tersebut berasal dari peningkatan signifikan pada pungutan ekspor kelapa sawit akibat *commodity boom*, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah tercatat pada tahun 2022 dengan kontraksi sebesar 28,7 persen dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari dana kelolaan perkebunan kelapa sawit akibat kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO pada bulan tertentu di Tahun 2022 serta kebijakan tarif pungutan dana perkebunan sebesar US$0,0 atas ekspor CPO pada bulan Juli-November 2022.

Pada tahun 2025, realisasi Pendapatan BLU diperkirakan sebesar Rp99.307,6 miliar, terkontraksi 5,2 persen dari tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif PNBP pungutan ekspor sawit akibat pengenaan skema progresif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Namun demikian, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan mulai tanggal 17 Mei 2025 (menggantikan PMK nomor 62 Tahun 2024) berpotensi meningkatkan pendapatan

BLU sawit sampai akhir tahun 2025. Selain itu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh sudah tidak terdapat lagi penerimaan belanja modal TAYL pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) seperti pada tahun 2024.

Sampai dengan semester I tahun 2025, sebanyak 338 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada 23 K/L telah ditetapkan sebagai BLU. Secara umum, peran BLU diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan publik yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat, antara lain melalui penyediaan 127 fasilitas layanan kesehatan serta penyediaan 151 layanan pendidikan, mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maupun pendidikan vokasi. Di samping itu, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) turut memberikan akses pendidikan melalui program beasiswa dari jenjang sarjana hingga doktoral. Perkembangan Pendapatan BLU periode 2021–2025 dan target tahun 2026 disajikan dalam **Grafik 2.14.**

GRAFIK 2.14
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2026, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp98.322,6 miliar, turun 1,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan BLU Sawit dari BPDPKS seiring dengan tren moderasi harga komoditas sawit. PNBP BLU terus melakukan perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut didukung oleh pengelolaan keuangan yang fleksibel, penerapan sistem tata kelola yang baik *(good governance)*, penggunaan teknologi informasi, manajemen kinerja yang terukur, peningkatan SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan BLU, antara lain:

1. Digitalisasi layanan dan optimalisasi efisiensi keuangan BLU;
2. Penguatan sinergi dan transformasi infrastruktur BLU untuk ekonomi berkelanjutan;
3. Optimalisasi *Idle Cash* dan diversifikasi sumber pendapatan BLU; serta
4. Inovasi skema pembiayaan dan kemudahan akses layanan BLU.

Secara lebih rinci, enam K/L dengan pendapatan BLU terbesar yang berkontribusi 87,3 persen dari total pendapatan BLU pada APBN tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam APBN tahun 2026, pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan sebesar Rp41.690,0 miliar, turun 14,9 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut utamanya berasal dari pendapatan BLU BPDPKS. Namun demikian, penerapan PMK Nomor 30 Tahun 2025 terkait tarif Pungutan Ekspor CPO dan turunannya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan BLU sawit.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dalam APBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp24.537,3 miliar, naik 26,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari layanan rawat jalan dan rawat inap pada satker BLU rumah sakit di lingkungan Kemenkes.

TABEL 2.5
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2021-2026
(triliun rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	APBN 2026
1	Kementerian Keuangan	79,7	45,1	49,1	47,4	49,0	41,7
2	Kementerian Kesehatan	15,4	15,0	17,3	19,9	19,4	24,5
3	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	-	-	-	-	8,6	9,2
4	Kementerian Komunikasi dan Digital	3,7	3,9	3,8	8,1	4,2	3,7
5	Kementerian Agama	2,2	2,7	3,3	3,7	3,9	4,0
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,8	2,5	2,8	3,0	2,5	2,7

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

Dalam APBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemendiktisaintek ditargetkan sebesar Rp9.228,8 miliar, naik 7,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan 12 BLU Pendidikan yang baru pada tahun 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi)

Dalam APBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemenkomdigi ditargetkan sebesar Rp3.654,0 miliar, turun 12,2 persen dari *outlook* tahun 2025. Penurunan tersebut disebabkan sudah tidak ada lagi penerimaan belanja modal TAYL pada BAKTI seperti pada tahun 2024.

Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam APBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan sebesar Rp3.980,6 miliar, naik 3,3 persen dari target *outlook* tahun 2025. Kinerja pendapatan BLU Kemenag tersebut dipengaruhi oleh pendapatan BLU dari PTKIN.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dalam APBN tahun 2026, pendapatan BLU dari Polri ditargetkan sebesar Rp2.702,1 miliar, naik 7,0 persen dari *outlook* tahun 2025. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya 1 (satu) rumah sakit yang menjadi BLU pada tahun 2025 serta adanya layanan baru dan peningkatan kualitas dan kuantitas alat medis di rumah sakit BLU.

Perkembangan Pendapatan BLU dengan kontribusi terbesar tahun 2021–2026 disajikan pada **Tabel 2.5.**

Penguatan kebijakan pengelolaan BLU pada tahun 2026 difokuskan dalam beberapa bidang diantaranya sebagai berikut:

5. BLU Bidang Layanan Kesehatan
   a) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer melalui penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan;
   b) Prediksi penyakit dan deteksi dini penyakit kronis melalui kecerdasan buatan hingga *telemedicine* dengan sistem *real-time* diagnosis;
   c) Penguatan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan BPJS dan layanan kesehatan BLU lainnya.
   d) Membangun sistem respons kesehatan yang lebih cepat untuk menangani pandemi dan kondisi darurat kesehatan lainnya.
   e) Penguatan BLU di bidang riset kesehatan untuk vaksin, terapi genetik, dan obat-obatan inovatif.
6. BLU Bidang Layanan Pendidikan
   a) Implementasi sistem pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan.

b) Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi berbasis industri 4.0 dan 5.0.
c) Program pelatihan dan sertifikasi keterampilan digital seperti *blockchain*, dan *cybersecurity*.
d) Sistem pendidikan berbasis modular dengan sertifikasi digital yang fleksibel dan sesuai kebutuhan industri.
e) Transformasi kampus BLU menjadi pusat inovasi dengan energi hijau dan *smart technology*.

7. BLU Bidang Layanan Program Perlindungan Sosial
   a) Digitalisasi sistem bantuan sosial dan pembiayaan UMKM melalui optimalisasi teknologi terbaru;
   b) Dukungan riset dan pembiayaan untuk teknologi pertanian cerdas dan penguatan ketahanan pangan nasional;
   c) Integrasi sistem pembayaran digital berbasis BLU dengan inklusi keuangan.
8. BLU Bidang Layanan Infrastruktur
   a) Pendanaan proyek infrastruktur berkelanjutan yang mendukung kota hijau dan efisiensi energi.
   b) Penguatan infrastruktur digital mendukung konektivitas internet cepat daerah 3T.
   c) Kerja sama dengan sektor swasta untuk percepatan infrastruktur strategis.
   d) Penguatan sistem keamanan siber dalam pengelolaan aset berbasis teknologi.

2.1.3. Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2021–2025 dan Rencana Tahun 2026

Penerimaan Hibah memiliki karakteristik berbeda dari sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari Perpajakan dan PNBP. Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Hibah sangat berfluktuatif karena bersifat sukarela yang terdiri dari Hibah dalam negeri dan Hibah luar negeri. Hibah langsung dalam negeri terutama dipengaruhi oleh dukungan terhadap kehidupan demokrasi, hukum, dan pertahanan keamanan, sedangkan Hibah luar negeri didasarkan pada kegiatan K/L yang direncanakan dengan pemberi Hibah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Secara definisi, penerimaan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah ini memberikan manfaat langsung kepada pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah. Dukungan regulasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang mempermudah lembaga donor dalam menyalurkan Hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui mekanisme Hibah terencana maupun Hibah langsung membuat peningkatan tata kelola Hibah di K/L. Selain itu, dukungan teknis juga dilakukan melalui penguatan administrasi dan akuntansi bagi pengelolaan Hibah.

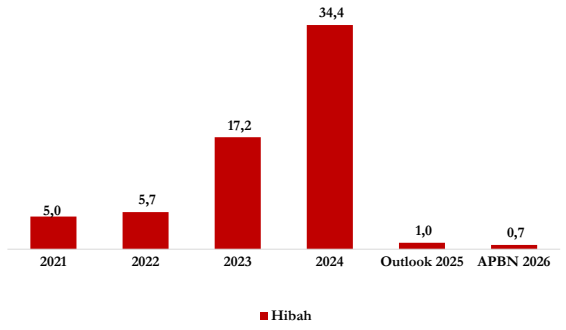
Peningkatan Hibah secara keseluruhan sangat berfluktuatif terutama dipengaruhi dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Penerimaan Hibah pada tahun 2021 dan 2022 tercatat masing-masing mencapai sebesar Rp5.013,0 miliar dan Rp5.687,7 miliar. Penerimaan Hibah tersebut dipengaruhi baik Hibah langsung yang berasal dalam negeri maupun Hibah luar negeri guna mendukung prioritas nasional diantaranya dukungan kehidupan demokrasi, hukum, dan pertahanan keamanan, pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, budaya, kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim, penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta percepatan pencegahan *stunting*. Penggunaan Hibah tersebut dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Penerimaan Hibah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai Rp17.184,2 miliar dan Rp34.387,4 miliar. Faktor yang memengaruhi adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Selanjutnya, *outlook* penerimaan Hibah pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp992,0 miliar. Penerimaan Hibah tersebut diperkirakan akan digunakan terutama antara lain untuk memperkuat penyediaan infrastruktur dan perumahan, peningkatan dukungan layanan kesehatan, peningkatan ekuitas, efisiensi, dan akuntabilitas, peningkatan sektor pertanian, serta manajemen di sektor kelautan.

Selanjutnya, pada APBN tahun 2026, target penerimaan Hibah ditetapkan sebesar Rp666,3 miliar yang didasarkan pada proyeksi Hibah, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan Hibah tahun 2021 sampai dengan 2025 dan target 2026 dapat ditunjukkan pada **Grafik 2.15.**

GRAFIK 2.15
HIBAH 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Proyeksi Hibah tersebut merupakan hasil nota kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima Hibah dengan organisasi atau negara pemberi Hibah, antara lain digunakan untuk dukungan ekonomi yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, percepatan penanganan stunting, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang dan manajemen sumber daya perikanan, pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta program pengembangan desa dan kewirausahaan program pengembangan desa dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan menjaga agar penerimaan Hibah baik terencana maupun langsung dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, tanpa ikatan politik, dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.

Bab 3

Prioritas Pembangunan
Tahun 2026 dan Evaluasi Kewilayahan

BAB 3
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 DAN KEWILAYAHAN

3.1. Pendahuluan

Pemerintah mendesain APBN tahun anggaran 2026 untuk mewujudkan delapan agenda pembangunan (Asta Cita) melalui berbagai kebijakan fiskal menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan mengusung tema "**Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi**", strategi kebijakan dalam APBN tahun anggaran 2026 ditempuh melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, yaitu di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, perluasan makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, percepatan investasi dan perdagangan global, serta yang tidak kalah penting melanjutkan program perlindungan sosial dan pembangunan menuju swasembada air, dengan penjelasan secara ringkas sebagai berikut.

Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan antara lain melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan infrastruktur pertanian, peningkatan dan pembangunan usaha pergaraman nasional terpadu, penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan, serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif.

Prioritas anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas antara lain melalui kebijakan peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan, peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penuntasan tuberkulosis, peningkatan kuantitas serta kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, serta pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Prioritas anggaran bidang perlindungan sosial diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan, antara lain melalui kebijakan (1) meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pemanfaatan DTSEN; (2) penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Prioritas anggaran bidang pendidikan diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional guna menghasilkan SDM Indonesia yang unggul, cerdas, berintegritas dan berdaya saing serta dapat merespons berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelaksanaan makan bergizi gratis, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, renovasi/ revitalisasi sekolah dan madrasah, mendorong penguatan PAUD serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif dan afirmatif.

Prioritas dukungan fiskal bidang ketahanan energi diarahkan untuk mendorong peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga, dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) antara lain melalui

kebijakan optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru, mendorong investasi sektor hulu migas, pengembangan program biodiesel untuk mendukung energi hijau, serta transformasi subsidi energi dan kompensasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar tercapai ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan keterjangkauan energi.

Prioritas anggaran Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Arah kebijakan dan strategi program MBG antara lain melalui penguatan kelembagaan, tata kelola dan kualitas pelaksanaan program, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, percepatan pencairan MBG, pelatihan SDM di SPPG, penguatan logistik dan distribusi, komunikasi dan partisipasi publik, kemitraan/kerjasama lintas sektor dan kolaborasi lintas K/L untuk mendukung MBG serta pemberdayaan ekonomi mikro-kecil.

Prioritas anggaran Pertahanan Semesta dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas pertahanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta penguatan hukum antara lain melalui (1) modernisasi/harwat Alutsista/Almatsus/ Alpalhankam; (2) pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan impor; (3) memperkuat komponen utama, cadangan dan pendukung personil TNI/ Polri; (4) pencegahan/penindakan terorisme; (5) pencegahan kejahatan siber, sandi dan sinyal; (6) pencegahan/penindakan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; (7) pencegahan/ penindakan korupsi dan pencucian uang; serta (8) pencegahan/penindakan perkara pidana umum, pidana khusus, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prioritas anggaran bidang Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM diarahkan untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dan pembaruan basis data tunggal UMKM.

Prioritas anggaran bidang Percepatan Investasi dan Perdagangan Global diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan daya saing ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta percepatan dan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan. Strategi yang dilaksanakan antara lain melalui kebijakan hilirisasi berbasis SDA dengan memperhatikan keunggulan komparatif masing - masing wilayah, fasilitasi kemudahan berusaha, pengembangan konektivitas yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan potensial ekonomi/daerah pengembangan pembangunan, dan penguatan aspek perdagangan melalui promosi dagang, digitalisasi fasilitasi ekspor dan impor, serta diversifikasi tujuan ekspor ke beberapa negara potensial di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

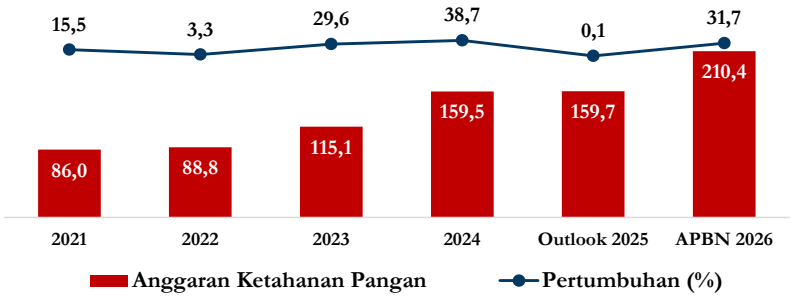
3.2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, pembangunan ketahanan pangan mempunyai peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri. Namun, tantangan terhadap ketahanan pangan semakin kompleks akibat perubahan iklim, ketidakstabilan pasar global, alih fungsi lahan, peningkatan biaya produksi, serta keterbatasan kapasitas dan

permodalan. Hal tersebut menyebabkan produksi pangan nasional kurang optimal dan harga pangan cenderung tidak stabil, serta mengancam kesejahteraan petani maupun nelayan. Oleh karena itu, Pemerintah menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Berdasarkan **Grafik 3.1**, anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021-2024 tumbuh dengan rata-rata mencapai 21,8 persen. *Outlook* anggaran ketahanan pangan tahun 2025 kembali tumbuh sebesar 0,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Pertumbuhan pada periode lima tahun tersebut utamanya dipengaruhi oleh pengembangan lahan dan infrastruktur pertanian serta dukungan alat, sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, pada tahun 2024 - 2025 Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang bersumber dari stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk mengatasi dampak kenaikan harga pangan. Pengadaan stok CPP tersebut juga memperoleh dukungan investasi dari Pemerintah mulai tahun 2025.

GRAFIK 3.1
ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Peningkatan anggaran ketahanan pangan diikuti dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan, seperti padi yang meningkat dari semula 52,26 ku/ha di tahun 2021 menjadi 52,90 ku/ha di tahun 2024, serta jagung dari semula 57,62 ku/ha di tahun 2021 menjadi 59,40 ku/ha di tahun 2024. Produksi beberapa komoditas pangan lainnya juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024, antara lain produksi daging ayam ras pedaging dari 3,19 juta ton di tahun 2021 menjadi 3,84 juta ton di tahun 2024, dan produksi telur ayam petelur dari 5,16 juta ton di tahun 2021 menjadi 6,34 juta ton di tahun 2024. Hal ini juga disertai dengan perbaikan kesejahteraan petani, ditandai oleh nilai tukar petani (NTP) sebesar 122,78 pada tahun 2024 yang lebih tinggi dari targetnya yang berada dalam rentang 115–120.

Pemanfaatan anggaran ketahanan pangan juga ditunjukkan dari beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2021–2025 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi naik dari 446,2 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 2,6 juta ha pada *outlook* tahun 2025; (2) bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan naik dari 25.134 unit pada tahun 2021 menjadi 75.731 unit pada *outlook* tahun 2025; (3) optimasi lahan pertanian naik

dari 29,6 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 500 ribu ha pada target tahun 2025; dan (4) penyediaan irigasi perpompaan naik dari 688 unit pada tahun 2021 menjadi 775 unit pada target tahun 2025.

Anggaran ketahanan pangan dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp210.422,6 miliar. Arah kebijakan anggaran ketahanan pangan tahun 2026 adalah: (1) mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional; (2) menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif; dan (3) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2026 dialokasikan melalui BPP, yakni belanja K/L dan non-K/L. Alokasi anggaran ketahanan pangan melalui belanja K/L dalam APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp74.544,5 miliar, antara lain belanja pada K/L: (1) Kementan, utamanya untuk penyediaan sarana-prasarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, pengelolaan pascapanen, dan pemasaran hasil pertanian; (2) KKP, utamanya untuk pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (3) Bapanas, utamanya untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah; (4) Barantin, utamanya untuk peningkatan kualitas dan keamanan pangan; (5) Kemen PU, utamanya untuk pembangunan infrastruktur pertanian; dan (6) Kemenko Bidang Pangan, utamanya untuk koordinasi dan pengendalian kebijakan di bidang pangan. Adapun anggaran ketahanan pangan melalui belanja non-K/L dalam APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp55.715,8 miliar, terdiri atas Subsidi Pupuk, SSRG, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP, Subsidi Bunga/Subsidi margin kredit usaha alsintan, serta antisipasi risiko terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Target output strategis bidang ketahanan pangan melalui BPP pada tahun 2026 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta ha; (2) cetak sawah seluas 250.000 ha; (3) optimasi lahan pertanian seluas 300.000 ha; (4) bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan sebanyak 42.338 unit; (5) bantuan benih dan calon induk ikan 137,6 juta ekor; (6) revitalisasi lahan garam seluas 1.000 ha; (7) pengembangan jaringan irigasi seluas 212.000 ha; (8) pengembangan bendungan (*on going*) sejumlah 15 unit; (9) penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 8,8 juta ton; (10) peningkatan fasilitas bagi 250 kampung nelayan; (11) penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan kepada 15.500 orang; dan (12) gerakan pangan murah kepada 38 kelompok masyarakat.

TKD turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan pada APBN 2026 sebesar Rp50.878,9 miliar, yakni melalui DAK serta Dana Desa. Dukungan DAK untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp244,4 miliar yang dialokasikan melalui DAK Fisik bidang pangan pertanian subbidang pertanian untuk mendukung distribusi pertanian, serta melalui Hibah UPLAND yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi dengan cara pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan.

Dukungan Dana Desa untuk ketahanan pangan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam skala desa, program ketahanan pangan dilaksanakan berdasarkan aspek: (1) ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa; (2) keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa; dan (3) pemanfaatan pangan di desa. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama desa dan antar desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan desa dan kawasan perdesaan. Selain itu, penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan lembaga ekonomi desa yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam masyarakat desa. Pada tahun 2024, program ketahanan pangan telah terlaksana di 75.108 desa. Untuk tahun 2025, ketahanan pangan melalui Dana Desa dialokasikan untuk 74.600 desa. Dana Desa tahun 2026 juga masih difokuskan untuk program ketahanan pangan, termasuk lumbung pangan dan energi dengan dialokasikan sebesar Rp50.634,5 miliar.

Target output strategis bidang ketahanan pangan melalui TKD pada tahun 2026 antara lain: (1) pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km; (2) pemberian bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.070 ha; (3) bantuan alsintan sebanyak 778 unit; (4) pembangunan unit olah pakan ternak sebanyak ±18 unit; dan (5) pembangunan/renovasi balai penyuluhan pertanian dan sarana pendukungnya sebanyak ±45 unit.

Anggaran ketahanan pangan juga dialokasikan melalui pembiayaan, di mana pada APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp29.283,5 miliar. Dukungan pembiayaan untuk bidang ketahanan pangan tersebut antara lain investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen) kepada Perum Bulog sebesar Rp22.734,0 miliar dan investasi kepada *International Fund for Agricultural Development Association* (IFAD) sebesar Rp49,5 miliar. Investasi kepada Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) bertujuan untuk menyerap produksi beras/gabah petani dalam negeri, menjaga ketersediaan pasokan, dan mengendalikan stabilitas harga di tingkat konsumen. Sementara itu, investasi kepada IFAD dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam RPJMN dan program prioritas nasional melalui proyek-proyek dalam IFAD *13th Replenishment* antara lain meningkatkan produksi pertanian, menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta meningkatkan nutrisi dan gizi penduduk pedesaan yang juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals SDG2 Zero Hunger*.

3.2.1. Lumbung Pangan Nasional

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional, Pemerintah meluncurkan Program Lumbung Pangan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan pertanian nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan strategis melalui pendekatan holistik. Program ini menargetkan swasembada pada beberapa komoditas seperti beras dan jagung.

Program Lumbung Pangan mengintegrasikan berbagai program strategis, mulai dari pengembangan lahan pertanian, modernisasi pertanian, penyediaan input pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pertanian. Program-program ini akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, khususnya Kementan dan Kemen PU. Kebijakan Kementan menekankan pada peningkatan produktivitas

pertanian melalui: (1) cetak sawah untuk memperluas cakupan pertanian; (2) optimasi lahan untuk memaksimalkan pemanfaatan yang ada; (3) bantuan alsintan, seperti *tractor crawler, rice transplanter, hand sprayer, drone seeder, combine harvester,* dan pompa; serta (4) bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, dan *ameliorant*. Sementara itu, Kemen PU menekankan pada penyediaan infrastruktur pendukung pertanian, meliputi pengembangan jaringan irigasi dan bendungan di area strategis.

Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran Program Lumbung Pangan melalui Kementan dialokasikan sebesar Rp23.735,3 miliar. Rencana pemanfaatan anggaran tersebut antara lain untuk cetak sawah 250.000 ha, optimasi lahan 300.000 ha, bantuan alsintan prapanen subsektor tanaman pangan 42.338 unit, dan bantuan alsintan pascapanen subsektor tanaman pangan 2.978 unit. Selain itu, anggaran Kemen PU yang turut mendukung Program Lumbung Pangan dialokasikan sebesar Rp19.093,1 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan jaringan irigasi sepanjang 212.000 ha, pemeliharaan prasarana jaringan irigasi 42.221 km, dan pengembangan bendungan sebanyak 15 unit. Program Lumbung Pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

3.2.2. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Tercatat lebih dari 2,7 juta nelayan dan pembudidaya ikan menggantungkan hidupnya pada sektor ini, tersebar mulai dari pesisir terpencil hingga kawasan perairan pedalaman. Sektor kelautan dan perikanan pun menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ketahanan pangan. Namun demikian, banyak kampung nelayan yang kondisinya tidak layak, serta belum memiliki prasarana dan sarana publik yang memadai. Tak sedikit kampung nelayan yang berkembang secara organik dan lemah kelembagaannya, sehingga masyarakatnya rentan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan inisiatif strategis untuk mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya menjadi pusat kegiatan ekonomi kelautan yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan serta pembudidaya ikan; (2) mentransformasi ruang hidup masyarakat pesisir menjadi lebih layak dan tertata; (3) mendorong kemandirian ekonomi berbasis koperasi lokal (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih/KDKMP); dan (4) mengembangkan potensi wisata bahari dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Program KNMP dirancang dengan pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan seluruh mata rantai nilai, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Intervensi yang dilakukan Pemerintah yaitu menyediakan berbagai fasilitas modern dan stratetis, antara lain dermaga, *docking* kapal, gudang beku, pabrik es, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, rumah produksi, sentra budidaya, sentra kuliner, menara pandang, sistem drainase dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), balai pelatihan, serta gedung perkantoran.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 KNMP, mencakup kampung nelayan tangkap dan kampung budidaya, di wilayah pesisir dan perairan darat secara nasional. Penetapan lokasi pembangunan KNMP dilandaskan pada kriteria objektif, yaitu: (1) mayoritas penduduk

berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan lebih dari 80 persen; (2) ketersediaan lahan minimal 1 hektare dengan status "*clear and clean*"; (3) memiliki potensi sumber daya ikan dan wisata bahari yang dapat dikembangkan; (4) terintegrasi dengan KDKMP; dan (5) keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan. Sasaran penerima manfaat dari program ini antara lain: (1) nelayan dan pembudidaya ikan; (2) Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Koperasi; dan (3) masyarakat sekitar kampung perikanan.

Pembangunan KNMP dilakukan secara bertahap, di mana pada tahun 2025 Pemerintah menargetkan pembangunan 100 KNMP, dan pada tahun 2026 targetnya bertambah menjadi pembangunan 250 KNMP. Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran Pembangunan KNMP dialokasikan sebesar Rp5.500,0 miliar antara lain untuk peningkatan fasilitas 250 kampung nelayan, penyaluran sarana penangkapan ikan 7.500 unit dan alat penangkapan ikan 45.000 unit, serta bantuan premi asuransi nelayan 275.000 orang. Sampai dengan saat ini, Pemerintah sedang mengkaji ratusan proposal lokasi pembangunan untuk memastikan ketepatan sasaran program. Lokasi pembangunan antara lain NTT, NTB, Jateng, Jabar, Banten, Sultra, Aceh, dan Kepri.

3.2.3. Pembangunan Pergaraman Nasional

Kebutuhan garam nasional setiap tahun terus meningkat karena dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, potensi pengembangan produksi garam lokal sebenarnya sangat besar. Namun, saat ini Indonesia masih mengandalkan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, terutama untuk kebutuhan industri.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam nasional, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Program Pembangunan Pergaraman Nasional bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam, meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan dan daya saing industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Strategi pelaksanaannya meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam. Ekstensifikasi dilakukan dengan membangun tambak garam terpadu hulu-hilir di wilayah potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal, guna menambah luas lahan produksi garam nasional. Sementara itu, intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan eksisting melalui perbaikan infrastruktur, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kompetensi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan petambak, sehingga dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha garam rakyat.

Sasaran penerima manfaat program adalah para pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pergaraman yang berada di wilayah-wilayah sentra garam nasional, khususnya: (1) petambak garam rakyat, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi, yang memiliki potensi untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha garamnya; (2) koperasi produsen garam, sebagai penggerak usaha bersama, serta memiliki kemampuan dalam mengelola produksi dan pemasaran garam secara kolektif, termasuk dalam mendukung

integrasi hulu-hilir di kawasan produksi; (3) wilayah dengan potensi lahan garam yang belum tergarap, untuk ekstensifikasi, menyasar lokasi-lokasi baru yang memenuhi syarat teknis dan sosial untuk dijadikan kawasan tambak garam terpadu; (4) wilayah eksisting sentra garam, untuk intensifikasi, menyasar petambak dan kelembagaan garam di lokasi-lokasi produksi yang sudah berjalan namun produktivitasnya masih rendah, agar dapat ditingkatkan melalui modernisasi sarana dan adopsi teknologi. Dengan sasaran tersebut, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume dan kualitas produksi garam nasional, tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat dan mewujudkan kemandirian garam melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi.

Pada tahun 2025, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Pergaraman Nasional sebesar Rp853,5 miliar, digunakan antara lain untuk revitalisasi 1.000 ha lahan garam dan penyediaan 17 unit prasarana usaha garam. Pada APBN tahun anggaran 2026, alokasi anggaran untuk Pembangunan Usaha Pergaraman meningkat menjadi sebesar Rp1.183,0 miliar. Target pemanfaatan anggaran pada tahun 2026 antara lain revitalisasi 1.000 ha lahan garam dan penyaluran 20 unit prasarana usaha garam.

3.2.4. Penguatan Cadangan Pangan melalui Perum Bulog

Pemerintah terus memperkuat kebijakan investasi strategis bidang ketahanan pangan, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas pengadaan gabah dan beras nasional. Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat nonpermanen dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme *revolving fund* dengan biaya rendah. Tujuan dan manfaat dana OIP Perum Bulog adalah: (1) menyerap produksi beras dan gabah dari petani dalam negeri, khususnya di 26 wilayah dan 8 sentra produksi; (2) menjaga ketersediaan beras di pasar dan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP); (3) menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani dan konsumen; (3) mengurangi ketergantungan impor beras; dan (4) mengurangi ketergantungan pada pinjaman bank, sehingga menurunkan beban bunga dan risiko penjaminan pemerintah. Dengan demikian, dana OIP Perum Bulog ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pasokan beras, menjaga stabilitas harga beras, serta meningkatkan kesejahteraan petani sesuai dengan tujuan dari program ketahanan pangan nasional.

Dana OIP Perum Bulog tahun 2025 digunakan untuk pembelian gabah dan beras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Manfaat dari penggunaan dana OIP Perum Bulog diantaranya terlihat dari peningkatan stok beras pada Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog.

Untuk tahun 2026, Perum Bulog menargetkan penyerapan gabah dan beras petani hingga 3 juta ton setara beras, yang pendanaannya sebagian difasilitasi melalui dana OIP. Pada APBN tahun anggaran 2026, Dana OIP Perum Bulog dialokasikan sebesar Rp22.734,0 miliar. Dalam pemanfaatan dana OIP Perum Bulog, Pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan

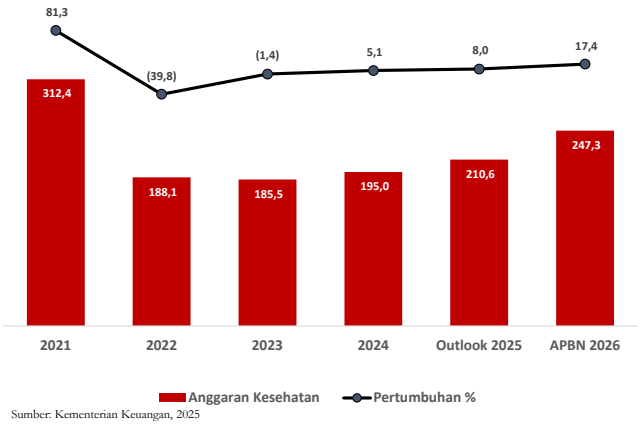
pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3. Kesehatan

Pemerintah terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan akses, mutu layanan, dan perlindungan keuangan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Untuk itu, alokasi anggaran kesehatan dilakukan secara optimal dan konsisten sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan sektor kesehatan menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan kualitas SDM yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas kesehatan SDM dimulai sejak masa kehamilan, dan memastikan kondisi kesehatan yang baik sejak dini sebagai dasar produktivitas di masa depan. Sejak 2016, anggaran kesehatan telah dialokasikan lebih dari 5 persen dari APBN, termasuk untuk merespons berbagai tantangan, seperti penanganan pandemi Covid-19 pada periode 2020 hingga 2023.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dilakukan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan menerapkan prinsip *money follow program*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan secara optimal. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan anggaran kesehatan tahun 2021—2026 ditunjukkan pada **Grafik 3.2**

GRAFIK 3.2
ANGGARAN KESEHATAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

3.3.1. Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Kesehatan

Pada tahun 2021 - 2024, realisasi anggaran kesehatan mengalami fluktuasi, yakni dari Rp312.383,4 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp195.023,8 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi realisasi anggaran kesehatan tersebut utamanya disebabkan oleh tambahan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 selama tahun 2020 - 2023. Realisasi anggaran kesehatan juga mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dan reformasi sistem kesehatan nasional. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan

berkeadilan, serta memperkuat kapasitas sektor kesehatan dalam merespons tantangan yang terus berkembang di masa depan.

Pemerintah terus mendorong upaya perluasan cakupan jaminan kesehatan atau *universal health coverage* (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan. Namun demikian, berbagai dinamika dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pembangunan bidang kesehatan di Indonesia, utamanya terkait ketahanan pendanaan Jaminan Kesehatan, antara lain: (1) tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang menunggak iuran; (2) implementasi pemanfaatan DTSEN dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan yang memerlukan waktu penyesuaian; (3) dampak inflasi dan perlambatan ekonomi, yang mengurangi kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan oleh masyarakat; (4) peningkatan beban klaim akibat meningkatnya utilisasi layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan berbiaya tinggi; (5) potensi kenaikan tarif layanan kesehatan; serta (6) implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang berpotensi menaikkan biaya jaminan kesehatan.

Pemerintah bertekad untuk terus mendorong perbaikan dalam pembangunan kesehatan nasional, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Jaminan Kesehatan. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pemerintah secara cermat akan menyusun strategi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, utamanya dalam penetapan besaran iuran, manfaat, dan tarif layanan. Evaluasi terhadap iuran peserta utamanya harus mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat dan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan sosial. Selain itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan, peningkatan upaya promotif-preventif, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem pengelolaan klaim dan data peserta, dan penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sinergi antara reformasi kebijakan pendanaan dan peningkatan layanan akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlanjutan jangka panjang program Jaminan Kesehatan sebagai pilar utama sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Outlook anggaran kesehatan tahun 2025 mencapai Rp210.640,8 miliar atau 96,4 persen dari APBN tahun 2025, dan relatif meningkat sebesar 8,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2024. Peningkatan ini utamanya karena pada tahun 2025 dilakukan upaya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta pelaksanaan pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui serta balita sebagai upaya pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan dalam mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan.

Perkembangan *output* prioritas bidang kesehatan pada tahun 2021-2025, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui jaminan kesehatan mencapai 93,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2025; (2) pendayagunaan dokter spesialis mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.278 orang dan ditargetkan bertambah sejumlah 670 orang pada tahun 2025; 3) jumlah sampel makanan serta obat, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa oleh UPT mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

sebanyak 322,7 ribu produk dan diperkirakan bertambah sejumlah 59 ribu produk pada tahun 2025; dan 4) fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada keluarga yang memiliki anak baduta naik dari 3,9 juta keluarga pada tahun 2021 diperkirakan terealisasi 8,0 juta keluarga pada tahun 2025.

Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan dinamis yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama bidang kesehatan yaitu meningkatnya proyeksi biaya kesehatan seiring dengan bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia (*aging population*) di Indonesia, yang secara langsung berdampak pada beban pembiayaan layanan kesehatan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi tingginya prevalensi penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan obesitas, serta permasalahan kesehatan baru seperti gangguan kesehatan mental. Selain itu, kapasitas layanan kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit masih perlu diperkuat untuk dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Adapun ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan antar wilayah juga menjadi hambatan serius dalam menjamin pemerataan akses dan kualitas layanan, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selain itu, upaya pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* masih belum optimal, sehingga memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi dan berbasis data untuk memastikan peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang. Tidak hanya itu, terdapat beberapa tantangan bidang kesehatan yang perlu diantisipasi seperti dampak perubahan iklim yang berimbas pada penurunan kualitas kesehatan, penyakit katastropik, risiko terhadap resistensi antimikroba, serta gaya hidup pasif (*sedentary*) yang dapat memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tantangan serta risiko bidang kesehatan tersebut, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Kebijakan anggaran kesehatan tahun anggaran 2026 yaitu: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan; (2) peningkatan cakupan CKG; (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas FKTP dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan di atas, anggaran kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp247.305,4 miliar atau 6,4 persen dari belanja negara tahun 2026. Anggaran kesehatan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2025, sehingga diharapkan target untuk mewujudkan pemerataan akses dan layanan kesehatan berkualitas dapat dilaksanakan dengan optimal untuk menghadapi berbagai tantangan dan mengantisipasi serta merespons berbagai risiko kesehatan.

Anggaran kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2026 utamanya dialokasikan melalui Belanja K/L yang dialokasikan sebesar Rp155.010,4 miliar. Anggaran kesehatan melalui belanja K/L yaitu: (1) Kemenkes, utamanya untuk melanjutkan implementasi transformasi sistem kesehatan yang berorientasi promotif-preventif, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, utamanya untuk

peningkatan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; (4) BGN, utamanya untuk pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita; serta (5) Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan terkait kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada RS TNI dan RS Polri, serta pembangunan RS Kejaksaan.

Adapun anggaran kesehatan melalui belanja non-K/L dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp24.292,1 miliar. Belanja non-K/L tersebut akan digunakan utamanya untuk jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri serta antisipasi pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan lainnya. Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp68.002,8 miliar yang terdiri dari beberapa jenis dana yaitu DAU, DBH, DAK, Dana Otsus, dan Dana Desa. Dukungan anggaran kesehatan melalui dari DAU tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp47.310,0 miliar. Selanjutnya, dukungan anggaran kesehatan melalui Dana Otonomi Khusus diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 yaitu penggunaan Dana Otonomi Khusus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20,0 persen untuk bidang kesehatan.

Selanjutnya, dukungan DAK Fisik di bidang Kesehatan diarahkan sesuai dengan kebijakan RKP 2026 yaitu meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan *existing* melalui pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas, serta pemenuhan standar RSUD termasuk kapasitasnya sebagai penyedia layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu-Anak. Salah satu kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2026 diarahkan untuk mendukung layanan operasional bidang kesehatan termasuk penurunan prevalensi *stunting,* serta perlindungan perempuan dan anak, dengan memperkuat sinergi pendanaan antara APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. DAK Nonfisik pendukung Bidang Kesehatan terdiri dari Dana BOK, Dana BOKB dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Prioritas kesehatan melalui Dana BOK diarahkan antara lain untuk: (1) reformasi sistem kesehatan nasional; (2) mendukung percepatan penurunan *stunting;* serta (3) meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) sebagai bentuk kebijakan afirmasi dalam upaya meningkatkan peminatan dan retensi dokter spesialis untuk bertugas di DTPK. Selain itu, terdapat dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi serta percepatan penurunan *stunting*. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan diarahkan untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak.

Kebijakan penggunaan Dana Desa juga turut diarahkan untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*. Fokus penggunaan ini dilaksanakan melalui: (1) promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di desa; (2) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis*;* (3) promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa;

dan (4) pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan desa. Pada tahun 2026, fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa tetap dilanjutkan.

Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2026, antara lain: (1) usia harapan hidup (UHH) dari 71,57 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,68 tahun pada tahun 2026; (2) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) yakni 2,18 (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) pada tahun 2020 menjadi 2,10 pada tahun 2026; (3) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 189 pada tahun 2020 menjadi 109 pada tahun 2026; (4) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 17,5 persen pada tahun 2026; (5) penurunan insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk dari 354 pada tahun 2021 menjadi 252 pada tahun 2026, dan (6) cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan 86,4 persen pada tahun 2021 menjadi 98,7 persen pada tahun 2026.

Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran *output* prioritas bidang kesehatan tahun 2026 antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) bantuan makan bergizi kepada 2,2 juta ibu hamil, 2,4 juta ibu menyusui, dan 2,6 juta balita; (3) bantuan Pendidikan SDM Kesehatan untuk 6,3 ribu orang dan Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Papua dan Papua Barat untuk 85 orang; (4) pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada 21,2 ribu lembaga; (5) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa oleh UPT Pusat sebanyak 59,4 ribu produk; (6) pembangunan ±31 puskesmas rusak berat; (7) penguatan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung layanan unggulan KJSU dan kesehatan ibu dan anak di ±242 RSUD; (8) pemanfaatan BOK di 10.221 puskesmas, 545 daerah, dan untuk 1.773 dokter; serta (9) pelaksanaan Program Bangga Kencana di 6.448 balai penyuluhan KB.

Selanjutnya, terdapat rencana keberlanjutan program unggulan pemerintahan yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain: (1) pemberian makan bergizi, termasuk untuk ibu hamil/menyusui dan balita sebagai upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat; (2) cek kesehatan gratis dan upaya pencegahan penyakit menular, sebagai upaya promotif preventif kesehatan; dan (3) penyediaan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah secara bertahap.

3.3.2. Program Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah menetapkan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu kebijakan utama di bidang kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam rangka memperkuat upaya tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dijalankan sejak tahun 2018. Peraturan ini juga berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan kerangka intervensi yang terpadu serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas instansi, guna memastikan pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan evaluasi pelaksanaan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (RPerpres PPPS) sebagai regulasi yang akan menggantikan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021.

RPerpres PPPS menekankan perlunya fokus bersama seluruh pihak pemangku kepentingan pada upaya untuk mencegah *stunting* pada anak, bukan hanya menangani anak yang mengalami *stunting*. Selanjutnya, diperlukan penguatan pemahaman bahwa *stunting* merupakan masalah gizi kronis (terjadi dalam kurun waktu yang lama) dan seiring dipenuhinya intervensi layanan lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, perlahan angka prevalensi akan menurun, sehingga fokus pada upaya penguatan pencegahan *stunting* merupakan hal yang krusial. Untuk itu, dalam penyusunannya, RPerpres PPPS yang di dalamnya berisi strategi nasional memuat kerangka kerja logis untuk menekankan pentingnya proses dan intervensi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Desain kerangka kerja logis dalam RPerpres PPPS menempatkan penurunan prevalensi *stunting* sebagai hasil jangka panjang (*impact*) yang akan dicapai dengan upaya pencegahan masalah gizi jangka pendek dan menengah (*outcome*) yang menyasar ibu hamil kurang energi kronis, ibu hamil dengan anemia, balita yang tidak naik berat badan, balita yang berat badannya kurang/ *underweight*, balita dengan gizi kurang, atau balita dengan gizi buruk. Selain itu, *outcome* ini dapat tercapai ketika terjadi peningkatan kecukupan gizi kelompok sasaran 1000 HPK dan balita serta menurunnya angka kesakitan kelompok balita (*intermediate outcome*), yang dapat tercapai dengan pemenuhan layanan intervensi lengkap (*output*) berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran. Beberapa layanan intervensi berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran antara lain: (1) kunjungan *ante natal care* pada ibu hamil sebanyak 6 kali; (2) konsumsi tablet tambah darah (TTD)/ *multiple micronutrient supplementation;* (3) deteksi dini masalah gizi melalui pemantauan pertumbuhan secara rutin; (4) pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dengan kurang energi kronis serta balita bermasalah gizi (tidak naik berat badan, berat badan kurang, gizi kurang); (5) tata laksana bagi balita gizi buruk; (6) praktik pemberian makan bayi dan anak yang baik dan benar (seperti ASI eksklusif dan MPASI beragam); (7) pemberian imunisasi; (8) konsumsi TTD dan skrining anemia pada remaja putri; (9) beberapa bentuk edukasi dan pendampingan lain (melalui pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga, PAUD-HI, bimbingan perkawinan, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin; serta (10) penyelesaian akar masalah gizi (seperti bantuan sosial, bantuan pangan, penyediaan air minum dan sanitasi, penyediaan akta kelahiran, dan Jaminan Kesehatan).

Sebagai bentuk penajaman dalam upaya memenuhi layanan intervensi lengkap secara optimal, akan dilakukan identifikasi rencana aksi sebagai komponen proses pada kerangka kerja logis. Komponen proses ini terdiri atas rambu-rambu aktivitas yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi menjadi alat yang memudahkan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan dalam melakukan analisis situasi untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan serta menajamkan proses pemetaan pemanfaatan anggaran, termasuk proses penandaan dan pelacakan, baik bersumber dari belanja K/L, belanja daerah, dan dukungan nonpemerintah. Proses ini dapat menginventarisasi kebutuhan pemanfaatan berbagai sumber anggaran untuk saling melengkapi dan bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.

Sampai dengan tahun 2024, pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* telah menunjukkan hasil signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 19,8 persen pada tahun 2024 (Survei Status Gizi Indonesia, 2024) dari semula sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kapasitas

penanganan *stunting* nasional dan daerah, serta peningkatan koordinasi intervensi gizi lintas sektor. Namun demikian, Pemerintah masih perlu melaksanakan berbagai strategi dalam upaya mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14,2 persen pada tahun 2029 sebagaimana dalam RPJMN tahun 2025 – 2029. Adapun dalam RKP tahun 2026, Pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi *stunting* pada balita menjadi 17,5 persen, penurunan prevalensi *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita menjadi 7,7 persen, serta perbaikan pada beberapa intervensi seperti cakupan anak usia 6 – 23 bulan yang mendapat MPASI menjadi 76,0 persen dan cakupan keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK menjadi 80,0 persen.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi berbagai tantangan dan risiko yang muncul dalam mengatasi masalah *stunting* di Indonesia, antara lain perlambatan penurunan angka prevalensi *stunting,* masih tingginya disparitas angka prevalensi *stunting* antar wilayah, serta risiko penambahan jumlah anak *stunting*. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan serta pelaksanaan yang optimal atas upaya intervensi pemerintah, diiringi dengan peningkatan sinergi multisektor dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

Dari sisi pemerintah pusat, dukungan APBN dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dialokasikan melalui:

1) Belanja K/L

Penanganan *stunting* secara terintegrasi di tingkat pusat melibatkan sejumlah K/L yang memiliki peran strategis sesuai sektor masing-masing, antara lain: (1) Kementerian Kesehatan berperan dalam penguatan intervensi spesifik, antara lain melalui perbaikan gizi, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Pertanian bertugas dalam peningkatan ketersediaan dan pasokan pangan bergizi; (3) Kementerian PU berkontribusi melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi layak; (4) sejumlah K/L lainnya terlibat dalam pemberian edukasi, pendampingan, dan dukungan teknis guna memperkuat upaya penurunan *stunting* secara komprehensif.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) yang telah dijalankan sejak 2018. Perpres ini menjadi acuan utama dalam membentuk kerangka intervensi yang terintegrasi serta mendorong sinergi antarinstansi, dengan mengamanatkan setiap K/L untuk berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya. Perpres ini juga menetapkan BKKBN sebagai koordinator pelaksana nasional yang bertanggung jawab dalam memastikan konvergensi program dari tingkat pusat hingga daerah. Guna mendukung implementasi program, dilakukan penguatan dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui penandaan (*tagging*) tematik anggaran belanja K/L yang relevan dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Tagging* ini memungkinkan identifikasi dan pengelolaan anggaran secara lebih terarah, dengan tingkat kepatuhan K/L yang meningkat signifikan dari 41,8 persen pada 2019 menjadi 100 persen pada 2023, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi pada upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara nasional.

Berdasarkan hasil *tagging* anggaran yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, jumlah *output*/ rincian *output* K/L yang mendukung percepatan penurunan *stunting* periode tahun 2021-2025 berfluktuasi. Dinamika ini utamanya disebabkan

oleh restrukturisasi program/kegiatan/*output*/ rincian *output* K/L serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) K/L. Adapun substansi intervensi yang dilaksanakan relatif sama sesuai dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi. Selanjutnya, implementasi kebijakan RSPP pada tahun 2021 juga menyebabkan perubahan struktur anggaran yang berdampak pada *tagging* anggaran tematik *stunting* dari sebelumnya pada level *output* menjadi pada level rincian *output* (RO), yang memungkinkan proses penajaman alokasi yang mendukung penurunan *stunting* dengan lebih akurat.

Realisasi anggaran pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting* pada periode 2021–2024 berfluktuasi utamanya dalam rangka merespons pandemi Covid-19 pada tahun 2020 s.d. 2023. Pada periode tersebut, terjadi peningkatan realisasi anggaran *stunting* karena dilaksanakan penambahan alokasi bantuan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi keluarga atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, yang juga menyasar kelompok sasaran intervensi *stunting*. Selanjutnya, sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19, realisasi anggaran *stunting* pada tahun 2024 sebesar Rp30.081,0 miliar difokuskan pada penguatan pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang langsung menyasar penyebab langsung *stunting* agar mencapai tujuan secara optimal.

Secara umum, output yang mendukung penurunan stunting pada tahun 2024 memiliki capaian volume output lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa capaian output tahun 2024 antara lain: (1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-*buffer stock* sebesar 603 ribu kg untuk ibu hamil KEK; (2) PMT kepada 100 ribu balita kurus; (3) penyaluran bantuan sosial pangan sembako kepada 18.8 juta keluarga; (4) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada 20 juta keluarga; (5) pembinaan desa pangan aman di 1.117 lembaga di desa; dan (6) pembangunan akses sanitasi layak untuk 68.884 keluarga.

Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam periode tahun 2021—2024, terjadi perluasan cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, dari 360 kabupaten/kota pada tahun 2020 menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi pada awal tahun 2025, terdapat 107 RO pada 18 K/L yang diidentifikasi sebagai RO yang mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dengan alokasi mencapai Rp32.747,9 miliar. Beberapa kegiatan dan target RO K/L tahun 2025 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*, antara lain:

1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara lain: (1) penyediaan makanan tambahan bagi 140.374 balita (Kemenkes, bersifat *buffer stock* karena kegiatan ini utamanya dilakukan melalui DAK Non-Fisik Kesehatan); dan (2) pemberian makan bergizi bagi 7,2 juta ibu hamil/ menyusui, dan balita.
2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan RO antara lain: (1) revitalisasi posyandu di 38 provinsi; dan (2) penyediaan buku KIA sebanyak 2.780.840 buku.
3) Peningkatan kualitas data dengan RO antara lain peningkatan kualitas data rutin kesehatan sebanyak 9 layanan.
4) Peningkatan akses pangan bergizi, dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target 50.000 Ha (Kementan); dan (2) Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dengan target 25 promosi (KKP).
5) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan, dengan RO antara lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

menyelenggarakan pendekatan holistik integratif dengan target 5.000 lemfbaga (Kemendikbudristek); dan (2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah termasuk pemberian materi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting* pada 1.132.363 pasang (Kemenag).

6) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, dengan RO antara lain cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan/KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk di antaranya ibu hamil dan balita untuk memastikan akses kelompok tersebut terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes).
7) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan RO antara lain: (1) infrastruktur air minum berbasis masyarakat dengan target 40.000 SR (Kementerian PU); dan (2) sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dengan skala individu dengan target 14.000 KK dengan kriteria desa yang memiliki ibu hamil, anak baduta, anak *stunting*, dan keluarga miskin (Kementerian PU).

Adapun arah kebijakan yang dialokasikan pemerintah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2026 yaitu: (1) penguatan konvergensi intervensi layanan lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran; (2) penguatan intervensi spesifik *stunting* melalui perilaku pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok sasaran serta deteksi dini dan tata laksana masalah gizi dan *stunting*, antara lain peningkatan cakupan anak usia 6 – 23 bulan yang mendapat MPASI dan pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (3) penguatan deteksi dini dan tata laksana masalah gizi pra-stunting ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita tidak naik berat badan, balita berat badan kurang, dan balita *wasting*; (4) penguatan intervensi sensitif *stunting* melalui pendampingan pada keluarga dengan masalah gizi pra-*stunting* dan penyelesaian akar masalah seperti edukasi, pemenuhan air minum dan sanitasi, serta peningkatan ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *stunting* melalui kampanye nasional pencegahan *stunting* dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

2) Transfer ke Daerah

TKD juga berperan dalam percepatan penurunan *stunting*, yakni melalui DAK dan Dana Desa. Total alokasi dukungan penurunan *stunting* tahun 2025 melalui DAK mencapai Rp9.909,8 miliar, yang terdiri dari (1) DAK Fisik sebesar Rp3.375,0 miliar melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang Air Minum; serta (2) DAK Nonfisik sebesar Rp6.534,8 miliar meliputi Dana BOK dan Dana BOKB. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik pada tahun 2025 diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya.

Selanjutnya, kebijakan DAK pada tahun 2026 masih diarahkan untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* dengan memperkuat sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Dukungan *stunting* dari DAK Fisik bersumber dari DAK Fisik Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi. Kegiatan intervensi *stunting* yang bersumber dari DAK Nonfisik tahun 2026 melalui Dana BOK dan Dana BOKB berfokus pada program yang menyasar penyebab terjadinya *stunting* dan kelompok sasaran prioritas. Dukungan dari Dana BOK melalui penyediaan bahan makanan tambahan berbasis lokal, pengadaan obat program gizi dan KIA, pelayanan imunisasi, dan pendampingan balita rujukan *stunting*. Dana BOKB akan mendukung penanganan *stunting* melalui kegiatan pelayanan KB, pendampingan keluarga beresiko *stunting*, fasilitasi kegiatan kelompok kegiatan pembangunan keluarga, pemberian edukasi gizi kepada kader dapur sehat atasi *stunting* (DASHAT), pelaksanaan

pemutakhiran data keluarga berisiko *stunting*, peningkatan kapasitas kader bangga kencana, dan pembinaan kegiatan orang tua asuh cegah *stunting* (GENTING).

Kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2026 juga diarahkan untuk promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa yang bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting*, penyebab tidak langsung (intervensi spesifik), dan memperkuat tata kelola pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan desa sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

3.3.3. Cek Kesehatan Gratis

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, upaya pembangunan kesehatan di Indonesia diarahkan tidak hanya pada aspek kuratif (pengobatan) tetapi juga pada penguatan upaya promotif dan preventif yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Kegiatan CKG merupakan bagian penting dari intervensi promotif preventif, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan deteksi dini penyakit di masyarakat, mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat melalui intervensi lebih awal atas berbagai penyakit kronis dan katastropik, memperkuat pelayanan kesehatan dasar sebagai ujung tombak sistem kesehatan nasional, serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang dapat dicegah.

Pelaksanaan CKG di Indonesia dilaksanakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) layanan CKG di hari ulang tahun, yang dilaksanakan untuk anak usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas dengan lokasi pelaksanaan di puskesmas dan klinik; (2) layanan CKG sekolah, yang dilaksanakan untuk anak usia sekolah 7-17 tahun pada tahun ajaran baru dengan lokasi pelaksanaan di masing-masing sekolah; dan (3) layanan CKG ibu hamil dan balita, yang dilaksanakan sesuai jadwal dengan lokasi pelaksanaan di posyandu dan puskesmas.

Pelayanan CKG diberikan secara menyeluruh untuk seluruh warga, sehingga bayi hingga lansia berhak mendapat pemeriksaan dasar minimal sekali setahun, tanpa biaya. Adapun target peserta CKG pada tahun 2025 adalah 60 juta warga, termasuk 50 juta pelajar, santri, ibu hamil, dan kelompok rentan. Adapun mulai bulan Agustus tahun 2025, cakupan peserta CKG diperluas ke 282.317 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, target peserta CKG pada tahun 2029 mencapai 70 persen dari populasi penduduk.

Dalam pelaksanaan CKG sejak 10 Februari 2025, terdapat beberapa tantangan yang diidentifikasi untuk dapat diantisipasi, antara lain: (1) pemeriksaan kesehatan rutin belum merata, terutama di kalangan pelajar, kelompok rentan, dan warga yang tinggal di daerah terpencil; (2) akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan; (3) kendala pendanaan, terutama pada program berbasis kegiatan lapangan; dan (4) kondisi peserta yang datang saat sudah sakit.

Pelaksanaan CKG untuk tahun 2026 ditargetkan menyasar 130,3 juta peserta di seluruh wilayah Indonesia, dengan anggaran dialokasikan sebesar Rp2.594,1 miliar. CKG ini ditargetkan dapat mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting,* mendeteksi lebih dini penyakit katastropik, memperkuat budaya hidup sehat, dan mengurangi biaya rumah tangga akibat keterlambatan diagnosis. Dalam jangka panjang, CKG dapat memperkuat sistem Jaminan Kesehatan, meningkatkan

produktivitas nasional, dan menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih adil dan efisien.

3.3.4. Penuntasan Penanganan Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) masih menjadi salah satu beban penyakit terbesar di Indonesia, menjadikan negara ini sebagai penyumbang kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India pada tahun 2023 (*Global TB Report,* 2024). Pada tahun 2023, estimasi insiden TB di Indonesia sebesar 1.090.000 atau 387 per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian karena TB diperkirakan sebesar 125.000 atau 44 per 100.000 penduduk (Laporan Program Penanggulangan TB Tahun 2023, 2024). Tingginya jumlah insiden dan kematian akibat TB tersebut diharapkan dapat dicegah melalui deteksi dan pengobatan dini. Kondisi TB di Indonesia diperparah oleh masih tingginya kasus TB laten (infeksi TB tanpa gejala), resistensi obat, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap gejala serta pentingnya menyelesaikan pengobatan secara tuntas.

Dalam kerangka kebijakan bidang kesehatan, penanganan TB menjadi salah satu program prioritas bidang kesehatan, sejalan dengan komitmen menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah bertekad untuk menurunkan angka kasus dan kematian akibat TB secara signifikan melalui pendekatan sistematis, lintas sektor, dan berbasis komunitas. Peningkatan deteksi dini, pelacakan kontak erat, perbaikan kualitas pengobatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan target eliminasi TB.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan TB di Indonesia antara lain: (1) rendahnya cakupan deteksi dini karena banyaknya kasus TB yang tidak terlaporkan atau tidak terdiagnosis; (2) stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB yang seringkali mengalami penolakan sosial, sehingga enggan berobat; (3) pengobatan TB memerlukan waktu lama (6–24 bulan), menyebabkan tingkat putus berobat cukup tinggi; (4) TB resistan obat membutuhkan penanganan dan biaya lebih besar, dengan keberhasilan pengobatan yang lebih kompleks; serta (5) keterbatasan tenaga dan fasilitas deteksi karena belum semua wilayah memiliki akses ke pemeriksaan laboratorium TB yang memadai.

Fokus program penanganan TB di Indonesia meliputi peningkatan deteksi kasus, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta intensifikasi upaya pencegahan dan edukasi. Dipilihnya penyakit TB sebagai prioritas mencerminkan besarnya beban penyakit ini sekaligus perlunya perbaikan sistem pengendalian TB. Target yang ingin dicapai adalah penurunan angka insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada 2029 sesuai dengan RPJMN 2025-2029.

Outlook output pelaksanaan penanganan TB pada tahun 2025 antara lain: (1) skrining TB sebanyak 7.630.000 orang; (2) penemuan kasus TB (persen dari estimasi kasus) sebanyak 981.000 kasus (90 persen); (3) inisiasi pengobatan TB (persen dari kasus ditemukan) sebanyak 931.950 kasus (95 persen); (4) keberhasilan pengobatan TB (persen dari kasus diobati), meliputi TB sensitif obat (TB SO) sebanyak 90 persen dari kasus yang diobati dan TB resisten obat (TB RO) sebanyak 80persen dari kasus yang diobati; dan (5) penemuan TB laten sebanyak 956.211 (72 persen) orang yang mendapatkan TPT (Terapi Pencegahan TB).

Untuk tahun 2026, anggaran penanganan TB dialokasikan sebesar Rp152,0 miliar dengan *output* antara lain pelaksanaan skrining TB sejumlah 58,3 juta orang dan pengobatan kasus TB. Penanggulangan TB diharapkan tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi gerakan nasional yang masif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia.

3.3.5. Revitalisasi Rumah Sakit di Daerah

Revitalisasi rumah sakit merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan dalam rangka memperkuat sistem pelayanan rujukan dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Program ini didorong oleh tingkat kesenjangan yang cukup besar atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Banyak rumah sakit, khususnya milik pemerintah daerah, menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur, peralatan medis, serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan.

Dalam upaya revitalisasi rumah sakit, akan dilakukan peningkatan kualitas RSUD dari kelas D/D pratama menjadi tipe C dalam rangka penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU). Penguatan KJSU adalah upaya pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yaitu ruang operasi, penambahan ruang rawat jalan, rawat inap (penambahan 50 tempat tidur), ruang perawatan intensif, ruang cath lab (ruang diagnostif dan terapeutik penyakit jantung dan pembuluh darah), ruang radiologi (CT-Scan, Mamografi), dan ruang-ruang penunjang lain yang memerlukan peningkatan. Pemerintah mengidentifikasi sebanyak 66 RSUD Kelas D/D Pratama di 24 provinsi yang perlu peningkatan kompetensi rumah sakit untuk mendukung program KJSU. Adapun sebanyak 32 rumah sakit berada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan 34 rumah sakit lainnya berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Pelaksanaan revitalisasi rumah sakit juga dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain proses pengadaan/pelaksanaan konstruksi dan manajemen konstruksi memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian revitalisasi rumah sakit menjadi lebih lambat. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendanaan revitalisasi rumah sakit agar target pelaksanaan revitalisasi pada 66 rumah sakit dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah melaksanakan strategi pelaksanaan revitalisasi rumah sakit, antara lain: (1) dalam penyiapan fasilitas dan bangunan, dilaksanakan analisis kebutuhan biaya; (2) dalam kegiatan pengadaan, mempertimbangkan keterbatasan waktu, dilaksanakan mekanisme pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*).

Selama tahun 2025, pelaksanaan revitalisasi rumah sakit dianggarkan sebesar Rp2.453,7 miliar dengan output penyelesaian revitalisasi 10 rumah sakit daerah pada tahun 2025 dan tambahan revitalisasi 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan secara *multi years* (2025 dan 2026). Sesuai dengan RPJMN, pada tahun 2029 ditargetkan sebanyak 85,0 persen rumah sakit di Indonesia diharapkan memiliki akreditasi paripurna.

Untuk tahun 2026, Pemerintah merencanakan anggaran revitalisasi rumah sakit sebesar Rp2.743,7 miliar. Dengan anggaran dimaksud, ditargetkan output yang akan dicapai yaitu penyelesaian revitalisasi 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan secara *multi years* (2025 dan 2026) serta penyelesaian 10 rumah sakit daerah yang dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan demikian, total pelaksanaan revitalisasi rumah sakit pada tahun 2025 dan 2026 mencapai 30 rumah sakit.

3.4. Perlindungan Sosial

Prioritas anggaran di bidang perlindungan sosial difokuskan untuk memperkuat peranannya sebagai jaring pengaman masyarakat serta membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan

di Indonesia terus mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan turun dari 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025 atau menurun 0,56 persen. Penurunan ini tidak terlepas dari kinerja positif pemerintah antara lain melalui berbagai program perlinsos diantaranya adalah PKH, Kartu Sembako, PBI Jaminan Kesehatan, PIP, KIP Kuliah, dan Subsidi. Selain itu, persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia sebesar US$2,15 (2017 PPP) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,99 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pemberian bansos yang lebih tepat sasaran sehingga upaya melindungi masyarakat dari risiko sosial dan mengentaskan kemiskinan akan lebih efektif. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran pemberian bansos adalah dengan memanfaatkan DTSEN sebagai data tunggal. Selain itu, Pemerintah terus mendorong mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui sinergi perlinsos dengan program pemberdayaan, memperkuat konvergensi dan komplementaritas antarprogram perlinsos, serta mengembangkan skema perlindungan sosial yang adaptif untuk menghadapi potensi krisis dan dinamika risiko ke depan.

Pada tahun 2026, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan mencapai 6,5 – 7,5 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0 – 0,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, selain perbaikan integrasi data dan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN, perlu komitmen seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pengentasan kemiskinan.

3.4.1. Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Perlindungan Sosial

Dalam periode tahun 2021—2024, realisasi anggaran perlinsos terkontraksi dari Rp468.198,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp455.887,4 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada 2021–2022 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada periode tersebut, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, antara lain: tahun 2021 terdapat penyaluran bansos Sembako Jabodetabek bagi 1,9 juta KPM, penyaluran bansos tunai Non Jabodetabek bagi 9,9 juta KPM, penyaluran bansos sembako PPKM bagi 5,9 juta KPM, dan pemberian bantuan tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN), serta penanganan bencana Covid-19 oleh BNPB. Pada tahun 2022, terdapat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 12,1 juta pekerja, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,7 juta KPM, BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta penerima, dan pemberian bantuan tunai bagi PKLWN, serta penanganan bencana Covid-19 oleh BNPB.

Setelah berakhirnya status pandemi Covid-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah mulai melakukan normalisasi anggaran perlinsos. Meski demikian, fungsi anggaran sebagai *shock absorber* tetap dijaga guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023 berbagai program perlinsos tetap dilaksanakan oleh Pemerintah seperti penyaluran bantuan PKH bagi 9,9 juta KPM, kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, bantuan PIP bagi 20,3 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi 96,78

juta jiwa, penyaluran subsidi energi dan non energi, pelaksanaan program Kartu Prakerja, dan penyaluran BLT Desa bagi 2,9 juta KPM melalui anggaran transfer ke daerah. Sebagai respons terhadap dampak El Nino pada tahun yang sama, pemerintah juga menyalurkan BLT El Nino bagi 18,8 juta KPM untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak lonjakan harga kebutuhan pokok.

Memasuki tahun 2024, pemerintah terus mengoptimalkan anggaran perlinsos guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas dan risiko global. Realisasi anggaran tahun ini tercatat sebesar Rp455.887,4 miliar, meningkat 4,5 persen dibandingkan realisasi 2023, terutama karena kenaikan subsidi energi dan non-energi. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos, jamsos, dan subsidi antara lain seperti PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako bagi 18,4 juta KPM, PIP bagi 21,2 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi 96,7 juta jiwa, subsidi energi dan non energi, serta BLT Desa bagi 2,5 juta KPM. Sebagai kelanjutan dari upaya optimalisasi yang telah dilakukan pada tahun 2024, *outlook* anggaran perlinsos hingga akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp468.084,1 miliar atau meningkat sebesar 2,7 persen dari realisasi pada tahun 2024. Anggaran perlinsos tahun 2025 tetap dioptimalkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan melanjutkan program utama seperti PKH dan Kartu Sembako, perbaikan basis data agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, serta penguatan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah juga mendorong integrasi program, peningkatan akses pendanaan dan pekerjaan, serta pengembangan skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap krisis dan perubahan iklim. Menanggapi tantangan ekonomi yang masih dinamis, Pemerintah pada tahun 2025 tidak hanya melanjutkan program bantuan sosial reguler, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial melalui penebalan bantuan sembako untuk 18,3 juta KPM serta Bantuan Subsidi Upah dengan target sebanyak 17 juta pekerja/buruh selama dua bulan.

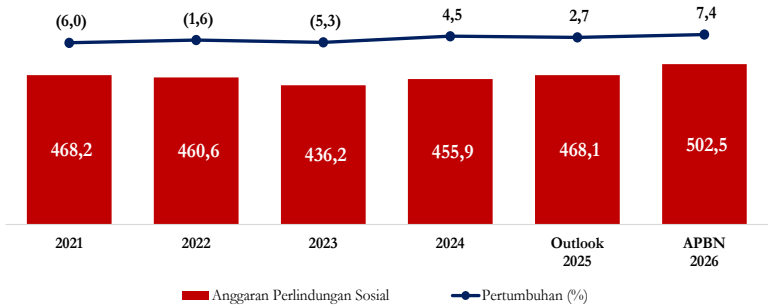
Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp502.509,3 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2026 tersebut akan terus dioptimalkan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan program perlinsos dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain penyaluran program yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan besaran bantuan yang cenderung tetap sehingga kecukupan manfaat yang dirasakan semakin menurun. Selain itu, program pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat masih terbatas sehingga masyarakat miskin belum dapat mandiri dan masih bergantung pada bantuan sosial yang diberikan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu penguatan strategi untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2026 yang akan ditempuh antara lain: (1) meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN; (2) penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2026 dialokasikan melalui BPP yang terdiri atas belanja K/L dan non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L dialokasikan sebesar

Rp171.115,9 miliar yang dialokasikan antara lain melalui: (1) Kementerian Sosial, antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan/kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, pelaksanaan ATENSI bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan total sebanyak 126,6 ribu orang, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebanyak 38,6 ribu siswa; (2) Kementerian Kesehatan, untuk penyaluran bantuan iuran program Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta PBPU dan BP Kelas III; (3) Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Kemenag, untuk pelaksanaan PIP bagi 22,1 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa; serta (4) BNPB, untuk penanggulangan bencana. Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp330.736,3 miliar antara lain untuk penyaluran subsidi Jenis BBM Tertentu sebanyak 19.162,5 ribu kiloliter, dan penyaluran subsidi bunga KUR sebanyak 6,1 juta debitur.

Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran Perlinsos melalui TKD tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp657,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa sebesar Rp625,5 miliar bagi 173,7 ribu KPM dan jamsos ketenagakerjaan sebesar Rp31,6 miliar. Pemenuhan anggaran BLT Desa diutamakan bagi desa yang memiliki warga miskin sesuai data angka kemiskinan desa. Fokus penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa tetap berlanjut pada tahun 2026 untuk mendukung Asta Cita dan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di desa. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2021—2026 dapat dilihat pada **Grafik 3.3.**

GRAFIK 3.3
PERKEMBANGAN ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

3.4.2. Peningkatan Akurasi Penerima Bantuan Melalui Pemanfaatan DTSEN

Ketidaktepatan sasaran masih menjadi tantangan dalam penyaluran perlinsos dimana masih ditemukan adanya permasalahan *inclusion* dan *exclusion error*. Upaya agar penyaluran perlinsos lebih tepat sasaran terus dilakukan dan sudah menjadi komitmen Pemerintah, mulai dari pemanfaatan DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan memanfaatkan atau berkolaborasi dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Upaya-upaya tersebut cukup baik untuk meningkatkan ketepatan sasaran, namun basis data masih perlu terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Mulai tahun 2025, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Pemerintah memanfaatkan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini untuk

memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi.

DTSEN merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diandalkan dalam pengelolaan program sosial dan bantuan pemerintah. Dengan memanfaatkan DTSEN, Pemerintah dapat lebih efektif dalam menyalurkan berbagai bansos, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala.

Pemanfaatan DTSEN memungkinkan transformasi sistem perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan, dan program bantuan sosial menjadi lebih terarah dan efisien. Dengan pendekatan berbasis data, program tidak hanya menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga dapat disesuaikan dengan dinamika kerentanan, karakteristik wilayah, dan potensi lokal.

Pemerintah telah memanfaatkan DTSEN untuk penyaluran bantuan antara lain PKH, Sembako, PBI Jaminan Kesehatan, dan penerima bantuan ATENSI. Keluarga dengan peringkat kesejahteraan sosial 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dapat ditetapkan sebagai penerima PKH dan peringkat kesejahteraan sosial 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dapat ditetapkan sebagai penerima Program Sembako dan PBI Jaminan Kesehatan, sedangkan penerima bantuan ATENSI dapat ditetapkan dari peringkat kesejahteraan sosial 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) atau berdasarkan hasil pengecekan lapangan.

Adapun beberapa manfaat DTSEN, antara lain: (1) menjadi data tunggal nasional; (2) bantuan sosial lebih tepat sasaran; (3) *profiling* sosial ekonomi nasional; (4) mengurangi kemiskinan dengan lebih tepat, efisien, dan akuntabel; (5) sebagai acuan utama dalam pemberian bantuan sosial; (6) menjaga efektifitas anggaran; dan (7) mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan tetap masih ada, terutama dalam hal pemutakhiran data dan pengecekan lapangan yang perlu dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk menjaga ketepatan penyaluran bantuan.

Salah satu langkah penting dalam memperbaiki dan menjaga kualitas DTSEN dalam rangka pemberian bantuan PKH, Sembako, PBI Jaminan Kesehatan, dan ATENSI adalah pelaksanaan *groundcheck* atau verifikasi lapangan. *Groundcheck* ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam DTSEN sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, serta memperbaiki atau mengupdate data yang tidak valid atau sudah tidak relevan lagi.

Proses *groundcheck* dilakukan dengan melibatkan petugas pendamping PKH yang telah terlatih untuk melakukan verifikasi langsung kepada keluarga penerima bansos atau individu yang terdaftar dalam DTSEN. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberadaan mereka, kondisi sosial-ekonomi, serta kecocokan data yang tercatat, seperti alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi kesehatan.

Dengan memanfaatkan DTSEN, diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan *inclusion* dan *exclusion error*, selain itu dapat menghindari tumpang tindih dengan program bantuan lainnya atau program prioritas lainnya. Pemanfaatan DTSEN sebagai pilar satu data pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis administrasi, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan transformasi sosial ekonomi Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

3.4.3. Skema Graduasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Graduasi merupakan mekanisme yang dipergunakan untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi bergerak ke arah transformasi sosial-ekonomi. Konsep ini menandai tahapan di mana penerima manfaat keluar dari program secara terencana karena telah mencapai tingkat kesejahteraan atau kapasitas tertentu.

Graduasi bukan hanya penghapusan nama dari daftar penerima bantuan, melainkan hasil dari proses peningkatan kapasitas dan pendapatan yang terukur. Selain itu, dengan adanya graduasi dapat mencegah ketergantungan bantuan sosial dalam jangka panjang dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terdapat tiga bentuk utama keluar dari program yang masing-masing mencerminkan dinamika yang berbeda yaitu graduasi kesejahteraan, graduasi program, dan terminasi.

Graduasi Kesejahteraan merupakan proses keluarnya KPM dari program bantuan sosial karena telah melampaui ambang batas kesejahteraan minimum yang ditetapkan. Peningkatan status kesejahteraan penerima manfaat ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan atau konsumsi, serta kapasitas sosial-ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam skema ini, acuan utama yang digunakan adalah ambang rentan, yaitu konsumsi per orang per bulan sebesar 1,5 kali Garis Kemiskinan (GK) yang menjadi batas transisi dari status rentan menuju ke calon kelas menengah (*aspiring middle class*). Kriteria graduasi kesejahteran dibagi berdasarkan 5 dimensi yaitu ekonomi dan konsumsi, perumahan dan akses dasar, pendidikan dan kesehatan, ketahanan sosial, serta data dan verifikasi lapangan.

Graduasi Program merupakan keluarnya penerima manfaat dari suatu program bantuan sosial karena telah melampaui batas *eligibilitas* status kesejahteraan dan telah berhasil mencapai tujuan-tujuan program tersebut. Graduasi ini berbeda dari graduasi kesejahteraan karena tidak hanya ditentukan oleh status kesejahteraan atau garis kemiskinan, tetapi juga oleh capaian program secara teknis dan fungsional. Kriteria graduasi program dibagi menjadi dua, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum ini dipergunakan untuk seluruh program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun kriteria umum mencakup; (1) tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan program karena perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau demografi; (2) telah mencapai tujuan akhir program, seperti peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, penyelesaian jenjang pendidikan, kemandirian ekonomi, atau terpenuhinya akses layanan dasar; dan (3) telah menyelesaikan seluruh tahapan intervensi program sesuai dengan desain dan siklus waktunya. Sedangkan kriteria khusus merupakan pemenuhan syarat khusus dari program.

Terminasi merupakan proses penghentian kepesertaan dalam program bantuan sosial yang tidak disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan, melainkan karena ketidaksesuaian administratif, pelanggaran aturan, atau kondisi objektif lainnya yang membuat penerima tidak

lagi memenuhi syarat program. Berbeda dari graduasi yang mencerminkan keberhasilan, terminasi bersifat korektif dan selektif, bertujuan untuk menjaga ketepatan sasaran, efisiensi program, dan integritas data penerima manfaat, berdasarkan hasil verifikasi lapangan atau pemutakhiran data. Terminasi dilakukan ketika terdapat ketidaksesuaian administratif dan kependudukan, tidak memenuhi ketentuan program, terdapat perubahan status ekonomi atau sosial yang tidak dikategorikan sebagai graduasi, serta berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan keputusan program.

Graduasi penduduk dari perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menuju kemandiran memiliki beberapa tahapan dari miskin hingga menengah. Masing-masing tahapan diintervensi melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan melalui keterampilan pekerjaan dan kewirausahaan.

Tahap I (miskin menuju rentan), pada tahap ini penerima manfaat mendapatkan stabilisasi ekonomi melalui bantuan sosial komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kapasitas awal mereka menuju kemandirian.

Tahap II (rentan menuju menengah), penerima manfaat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial dan mulai membangun kemandirian ekonomi. Fokus utama pada tahap ini adalah menciptakan stabilitas ekonomi melalui penguatan kapasitas kerja, akses modal, serta peluang usaha yang berkelanjutan.

Tahap III (menuju menengah ke menengah) berfokus pada kemandirian ekonomi penuh, di mana penerima manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial tetapi tetap mendapatkan dukungan untuk memperbesar skala usaha dan partisipasi dalam ekonomi nasional.

Sebagai strategi utama dalam mendorong graduasi dan kemandirian penduduk, Pemerintah saat ini melaksanakan program pelatihan keterampilan produktif dan penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan mikro, serta pendampingan intensif yang berkelanjutan. Hal ini harus diadaptasi sesuai profil kerentanan dan potensi lokal, dengan memanfaatkan kemitraan sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membuka akses pasar dan modal. Pada pelaksanaannya diperlukan evaluasi dan pemantauan perkembangan kondisi sosial ekonomi dan kelayakan graduasi untuk seluruh penerima manfaat. Monitoring pasca-graduasi kemudian akan memastikan kesinambungan usaha, serta memperkuat jejaring sosial-ekonomi.

3.5. Pendidikan

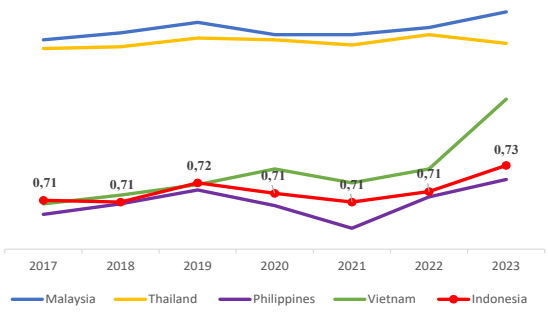
Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia menjadi pribadi yang berkualitas, adaptif serta berdaya saing ditengah kemajuan teknologi yang pesat serta dinamika global dan domestik saat ini. Pemerintah berkomitmen agar pendidikan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan konsisten mengalokasikan 20 persen dari belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

3.5.1. Perkembangan dan Arah Kebijakan Anggaran Pendidikan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Kawasan ASEAN, namun peningkatan kualitas SDM masih menjadi tantangan yang perlu penanganan lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) Indonesia yang masih lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN. HDI mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat yang meliputi 3 (tiga) dimensi

utama pembangunan manusia yaitu kesehatan (mencakup usia harapan hidup saat lahir), pendidikan (mencakup harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak. Skor HDI Indonesia pada tahun 2023 mencapai 0,728 dan berada pada peringkat 113 dari 193 negara yang dilakukan survei oleh UNDP. Dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 6 dari 11 negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masuk dalam kategori High Human Development, laju peningkatan SDM Indonesia masih lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Perkembangan skor HDI Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 3.4.**

GRAFIK 3.4
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI),
2017 -2023



Tantangan kedua adalah skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang belum meningkat signifikan. PISA merupakan survei yang dilakukan tiga tahunan oleh OECD untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun di suatu negara yang meliputi kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains. Skor PISA memberi gambaran mengenai kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah (*problem solving*) serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan ke dalam dunia nyata. Pada tahun 2022, Skor PISA Indonesia masih berada dibawah rata-rata skor PISA ASEAN, dimana Indonesia menempati peringkat 6 dari 8 negara ASEAN yang berpartisipasi pada PISA.

Selanjutnya, tingkat partisipasi peserta didik khususnya pada jenjang PAUD dan Perguruan Tinggi juga masih menjadi tantangan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia, dimana APK pada PAUD dan PT cenderung tidak meningkat yaitu rata-rata sebesar 36,16 persen dan 31,33 persen. Untuk meningkatkan partisipasi PAUD Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain program Satu Desa Satu PAUD, membangun lebih banyak PAUD khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), serta optimalisasi BOP PAUD. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Selain program tersebut, Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas SDM tersebut, Pemerintah berkomitmen mengalokasikan 20 persen dari APBN sebagai anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan terealisasi sebesar Rp479.584,8 miliar dan meningkat menjadi Rp569.083,9 miliar pada tahun 2024, atau secara rata-rata meningkat sebesar 5,9 persen. Selanjutnya pada tahun 2025, *outlook* anggaran pendidikan adalah sebesar Rp690.094,7 miliar meningkat 21,3 persen dari realisasinya pada tahun 2024.

Pemerintah telah memanfaatkan anggaran pendidikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengatasi tantangan dan

permasalahan dalam bidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; (2) memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan BLK Komunitas; (3) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah mulai tahun 2020; dan (4) pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan yang terus meningkat, dan hasil kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa. Mulai tahun 2024, Pemerintah menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik guna menunjang proses pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan sekolah rakyat, revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan untuk memperluas akses pendidikan sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan anggaran pendidikan dalam periode 2021-2025, terdapat berbagai capaian dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui PIP pada kisaran 20,6 juta jiwa per tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah pada kisaran 1.1 juta jiwa per tahun; (3) sejak tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2025, LPDP bekerja sama dengan Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen (d/h Kemendikbudristek) untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 24.967 orang dan beasiswa nongelar kepada 550.107 orang. Sementara itu pada tahun 2022 sampai dengan semester I tahun 2025, LPDP juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 11.456 orang dan beasiswa nongelar kepada 28.810 orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan (5) memperkuat peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *Endowment Fund* pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM unggul yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing yang dapat merepsons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026 akan difokuskan antara lain untuk: (1) peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) pemberian pelatihan intensif untuk guru berbasis standar pengajaran yang lebih berkualitas tinggi; (5) peningkatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif salah satunya dengan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui program MBG; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (7) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (8) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

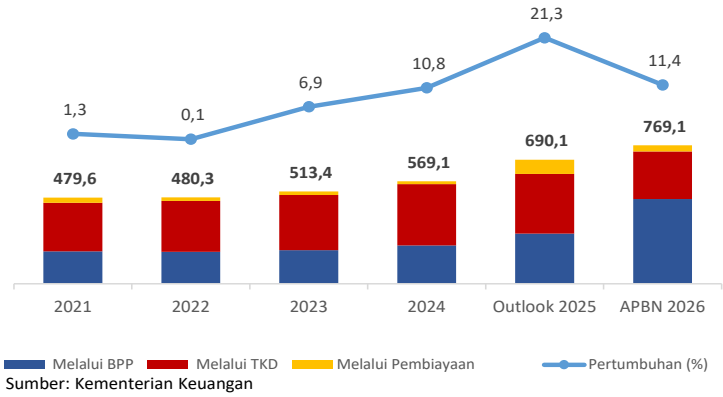
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga negara baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas nasional untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Untuk memastikan implementasi pendidikan dasar gratis berjalan secara efektif dan akuntabel, Pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap, selektif, dan afirmatif . Pelaksanaannya akan senantiasa mempertimbangkan kapasitas fiskal dalam

APBN dan APBD serta menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang. Arah kebijakan akan dirancang untuk menjamin prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan penguatan kualitas layanan pendidikan yang lebih merata pada tahap awal diprioritaskan untuk siswa miskin dan rentan miskin serta sasaran di daerah 3T.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp769.086,9 miliar atau 20 persen dari belanja negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD dan investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Perkembangan anggaran pendidikan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 3.5**.

GRAFIK 3.5
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

3.5.2. Anggaran Pendidikan 2026

Anggaran Pendidikan melalui BPP pada APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp470.462,5 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi siswa tidak mampu agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. Beberapa program prioritas pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut antara lain:

Makan Bergizi Gratis

Pemerintah melalui program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. MBG untuk anak sekolah dilakukan melalui pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan dan informasi dengan lebih baik dan lebih produktif dan dapat membentuk kebiasaan anak untuk makan makanan sehat dan beragam serta memperbaiki daya tahan tubuh dengan gizi yang seimbang.

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program MBG antara lain: (1) pemerataan distribusi penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3 T; (2) penguatan kerjasama dan pemberdayaan pelaku usaha daerah/UMKM/ masyarakat dalam mendukung MBG; (3) meningkatkan perekonomian nasional dan kemampuan menyerap tenaga kerja lokal; (4) meningkatkan keahlian SDM pendukung SPPG untuk memaksimalkan volume produksi di dapur dan meningkatkan kualitas serta nilai gizi makanan yang diberikan; dan (5) penguatan dukungan SDM dalam pengelolaan keuangan.

Arah kebijakan dan strategi program MBG untuk menghadapi tantangan akan difokuskan pada: (1) penguatan kelembagaan dan tata

kelola; (2) penguatan kualitas pelaksanaan program dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum; (3) percepatan pencairan MBG (simplifikasi, verifikasi *virtual account*); (4) pelatihan SDM di SPPPG; (5) penguatan logistik dan distribusi antara lain jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, dan aplikasi pemantauan logistik; (6) komunikasi dan partisipasi publik; dan (7) kolaborasi lintas K/L dan penguatan pemberdayaan ekonomi kecil.

Pemerintah mengalokasikan Rp71.000,0 miliar pada tahun 2025 untuk penyelenggaraan MBG dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran untuk program MBG dialokasikan sebesar Rp335.000,0 miliar. Pada tahun 2026, program MBG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 82,9 jutaan penerima manfaat (siswa, prasiswa, Ibu hamil/menyusui dan balita).

Sekolah Rakyat

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Masyarakat yang berada pada kelompok miskin cenderung memiliki akses yang terbatas kepada pendidikan yang berkualitas yang mengakibatkan rendahnya tingkat literasi dan keterampilan. Keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Akibatnya peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin rendah begitu juga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan penghasilan di masa depan. Di sisi lain, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan SDM yang unggul, cerdas dan berdaya saing. Pendidikan memiliki peran penting untuk menciptakan SDM unggul tersebut karena pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan serta meningkatkan mobilitas individu dalam mengakses peluang yang sulit dijangkau.

Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Pemerintah menginstruksikan untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, tanpa terkendala oleh latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional. Keberadaan asrama diharapkan dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter dan kepribadian luhur, sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis tetapi juga terpenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Sekolah Rakyat mempunyai visi mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui Pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan, dengan misi: (1) memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan; (2) menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan; (3) menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air; dan (4) menguatkan rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

Pada tahun 2025, Pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 166 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 66 lokasi. Untuk Tahap I infrastruktur dan asrama Sekolah

Rakyat akan menggunakan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial dan bangunan milik pemerintah daerah. Alokasi anggaran untuk memenuhi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I Rp1.764,0 miliar terdiri dari Belanja Operasional Kemensos Rp1.194,0 miliar dan Belanja Fisik Kementerian Pekerjaan Umum Rp570,0 miliar.

Pada tahun 2026, Pemerintah akan melanjutkan penyelenggaraan sekolah rakyat dengan mengalokasikan Rp24.947,2 miliar. Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

Sekolah Unggulan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang adaptif dengan perkembangan teknologi, Pemerintah membangun Sekolah Unggul Garuda yang sudah dimulai dari tahun 2025. Pembangunan Sekolah Unggul Garuda dapat menjangkau siswa-siswa berpotensi yang membutuhkan dukungan sarana ekosistem dari pemerintah seperti sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta bimbingan dalam pembelajaran untuk memaksimalkan potensinya. Sekolah Unggul Garuda memberikan akses bagi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengikuti pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter kepemimpinan dan membina peserta didik untuk dapat memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Sekolah ini akan menggunakan kurikulum yang inovatif dan mengadopsi program akademis berstandar tinggi guna menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional dan berwawasan luas, yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan, berkontribusi dalam pembangunan nasional serta mampu bersaing secara global. Para peserta didik tidak hanya dituntut untuk berprestasi secara akademis tetapi juga dapat menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata di masyarakat. Sekolah Unggul Garuda diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan kompetensi para generasi muda berbakat, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Dengan memperlengkapi putra-putri terbaik bangsa dengan pendidikan yang berkualitas, program ini membuka lebih banyak peluang bagi siswa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pada tahun 2025, Pemerintah telah mengalokasikan Rp2.000,0 miliar untuk kebutuhan pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan akan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan di sektor Pendidikan dan pengembangan dana abadi SMA Unggulan. Sekolah Unggul Garuda yang dibangun pada tahun 2025 mencakup empat lokasi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara. Pada tahun 2026, alokasi untuk Sekolah Unggul Garuda adalah Rp2.985,0 miliar yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan.

Revitalisasi Sekolah

Revitalisasi sekolah dan madrasah merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan oleh Presiden. Program ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang dalam kondisi rusak di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat keberadaan sarana dan prasana merupakan penunjang penting dalam proses pembelajaran.

Pada tahun 2025, ditargetkan sebanyak 10.440 satuan pendidikan dan 2.120 madrasah direvitalisasi. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp16.970,0 miliar untuk revitalisasi sekolah dan Rp2.520,0 miliar untuk revitalisasi madrasah. Pada tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan Rp27.565,7 miliar

untuk melanjutkan revitalisasi sekolah dan madrasah.

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini akan menggunakan skema swakelola (sekolah akan mengelola dana bantuan secara mandiri), dengan pelibatan peran serta masyarakat. Adapun program revitalisasi madrasah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mencakup pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang melekat.

Program revitalisasi sekolah dan madrasah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang layak dan aman sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain perbaikan gedung sekolah dan fasilitas fisik, program ini juga mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan sarana prasana digital di setiap kelas.

Selain keempat program prioritas di atas, Pemerintah juga tetap melanjutkan beberapa program prioritas lainnya antara lain BOS, PIP dan KIP Kuliah. BOS merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang merata dan terjangkau. BOS diberikan langsung kepada sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik dan digunakan untuk membantu satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan dengan lebih optimal. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar antara lain pembelian buku pelajaran, alat tulis, pemeliharaan fasilitas sekolah hingga biaya kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2026, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,3 juta siswa.

Selain melalui BOS, Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya personal pendidikan. PIP diharapkan dapat meningkatkan akses bagi anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah; untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal. Pada tahun 2026, PIP dialokasikan akan diberikan kepada 22,1 juta siswa.

Sebagai kelanjutan PIP, Pemerintah juga menyelenggarakan program KIP Kuliah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. KIP Kuliah ditujukan bagi anak yang memiliki potensi akademis yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas. KIP Kuliah dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup siswa lulusan SMA/SMK/sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan

mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran. Pada tahun 2026, penerima program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 1,2 juta mahasiswa.

Untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, Pemerintah juga melanjutkan program *link and match* yang menghubungkan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Program ini bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian/*skill* sesuai dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini akan dilakukan melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk sektor-sektor prioritas, yaitu permesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality, care services*, dan prioritas lainnya. Dalam APBN tahun anggaran 2026, *link and match* antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ditujukan untuk mendukung penyusunan kurikulum berbasis industri dan penjaminan mutu perguruan tinggi vokasi.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran besar bagi perkembangan pendidikan khususnya peserta didik. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional, perlu dilakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru. Transformasi guru meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarguru. Dalam APBN tahun anggaran 2026, peningkatan kompetensi guru antara lain untuk sertifikasi kepada 41.692 guru.

Anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui TKD. Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan melalui TKD dialokasikan sebesar Rp264.624,4 miliar. Anggaran pendidikan tersebut terdiri atas beberapa komponen, yaitu (1) DAU dan DBH yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, (2) DAK, dan (3) Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan. Anggaran pendidikan melalui DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat *block grant* dan digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah. Selanjutnya, dukungan pendidikan melalui Dana Otsus diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan.

Komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan adalah DAK Nonfisik terkait pendidikan. DAK Nonfisik terkait pendidikan antara lain meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, dan Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah. Target output tahun 2026 antara lain: (1) BOS untuk 43,7 juta siswa (2) BOP PAUD untuk 6,0 juta peserta didik, (3) BOP Kesetaraan untuk 1,0 juta peserta didik, (4) TPG ASND untuk 1,7 juta guru/tenaga pendidik ASND yang bersertifikat, (5) Dana Tamsil ASND untuk 22,7 ribu guru ASND, serta (6) TKG ASND untuk 65,9 ribu guru ASND.

Selain melalui BPP dan TKD, anggaran pendidikan juga dialokasikan melalui pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi yang terdiri dari investasi

pada BLU di bidang pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan melalui pembiayaan dialokasikan sebesar Rp34.000,0 miliar dan akan dimanfaatkan untuk pemenuhan belanja/ pembiayaan prioritas di bidang pendidikan. Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dana abadi di bidang pendidikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi. Pembiayaan pendidikan merupakan alokasi anggaran pendidikan yang ditempatkan dalam pos pembiayaan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) yang bersifat cadangan, guna menjawab kebutuhan pembiayaan di sektor pendidikan yang semakin kompleks dan dinamis. Mekanisme ini memungkinkan Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam merespons kebutuhan strategis di bidang pendidikan, termasuk pendanaan program prioritas.

3.6. Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, strategi untuk meningkatkan ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan produksi *lifting* migas, menjaga stabilitas harga, mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan energi mempunyai peran kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor energi merupakan sumber penerimaan negara, pendukung kegiatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas. Ketahanan energi terjadi ketika negara memiliki akses kepada sumber energi secara berkelanjutan (ketersediaan) dengan didukung iklim investasi yang kondusif (aksesibilitas). Selain itu, kemampuan untuk menyediakan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau (akseptabilitas) dengan harga terjangkau (keterjangkauan) menjadi syarat ketahanan energi.

Dalam mewujudkan ketahanan energi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut: (1) *lifting* minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. *Lifting* minyak bumi turun dari 707 ribu barel per hari (rbph) di 2020 menjadi 579,7 rbph di 2024. Menurunnya *lifting* minyak bumi menyebabkan Pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas; (2) sumber energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dengan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 14,68 persen pada tahun 2024. Sumber energi fosil meliputi batubara (40,48 persen), minyak bumi (29,15 persen), dan gas bumi (15,69 persen); (3) pengembangan dan investasi EBT tidak secepat yang diharapkan dikarenakan berbagai faktor antara lain daya tarik investasi dan infrastruktur EBT seperti jaringan transmisi yang masih terbatas; dan (4) subsidi energi dan kompensasi belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih banyak dinikmati oleh golongan mampu, sehingga berdampak pada besarnya anggaran subsidi energi dan kompensasi yang harus ditanggung Pemerintah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah menjadikan ketahanan energi sebagai agenda prioritas pada tahun 2026 dan memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan

energi. Pemanfaatan dukungan fiskal untuk ketahanan energi terutama diarahkan untuk peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga, dan pengembangan EBT. Adapun kebijakan dalam mencapai ketahanan energi, antara lain untuk:

1) Lifting Migas

Untuk mencapai ketahanan energi, swasembada migas perlu diupayakan, antara lain melalui peningkatan *lifting* minyak bumi. Untuk meningkatkan *lifting* tersebut, Pemerintah akan melakukan terobosan untuk meningkatkan produksi dan mendorong investasi sektor migas. Terdapat beberapa strategi peningkatan produksi yang dapat diterapkan Pemerintah. Pertama, Pemerintah dapat memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*. Data Kementerian ESDM menunjukkan terdapat 16.990 sumur *idle* dari sekitar 40.000 sumur migas, yang mana sekitar 4.495 sumur *idle* dapat dioperasikan kembali (reaktivasi). Kedua, optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Ketiga, Pemerintah mengeksplorasi cadangan minyak baru. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi terbukti sekitar 2,41 miliar barel dan 35,3 *Trillion Cubic Feet* (TCF) gas. Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas non perpajakan seperti perbaikan kontrak migas, misalnya dengan model baru *Gross Split* dengan bagi hasil untuk kontraktor mencapai 45-50 persen.

2) Energi Hijau

Dalam dua dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia terus mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia turut aktif dalam aksi global melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung transisi energi untuk mencapai tujuan jangka panjang menuju *Net Zero Emissions* (NZE). Strategi transisi energi yang lebih baik diwujudkan melalui perbaikan ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel:

a) Transisi Energi dalam Ekosistem Ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

RUPTL Pemerintah menetapkan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus didasarkan pada prinsip manfaat, keberlanjutan, efisiensi yang adil, optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi, kemandirian, serta pelestarian lingkungan. Penetapan tersebut dilakukan Pemerintah melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Pengembangan pembangkit listrik dengan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional secara memadai, dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengembangan pembangkit listrik juga sejalan dengan upaya nasional dalam transisi energi menuju pencapaian NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan tetap mengutamakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

b) Pengembangan Program Biodiesel Mendukung Energi Hijau

Pemanfaatan biodiesel sebagai salah satu biofuel berbasis minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*/CPO) terus didorong oleh Pemerintah. Hal itu dilakukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Porsi biodiesel dalam bahan bakar biosolar terus ditingkatkan secara bertahap dari 15 persen (B15) di 2015 menjadi 20 persen (B20) di 2016,

kemudian B30 di 2020, B35 di 2023, dan terakhir B40 di 2025. Sepanjang 2023-2024, program B35 menunjukkan kenaikan penyaluran biodiesel sebesar 7,8 persen, yaitu dari 12,26 juta kiloliter di tahun 2023 menjadi 13,15 juta kiloliter di 2024. Penyaluran biodiesel 2024 mencapai 116,4 persen dari targetnya sebesar 11,3 juta kiloliter. Program biodiesel diharapkan dapat berdampak positif pada penghematan devisa, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, meningkatnya pemanfaatan biodiesel membutuhkan dukungan finansial untuk menutup selisih harga yang muncul ketika harga biodiesel lebih tinggi dari solar.

3) Subsidi Energi dan Kompensasi Lebih Tepat Sasaran

Subsidi energi dan kompensasi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjalankan fungsi distribusi dan stabilisasi. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung berbagai strategi kebijakan di atas, maka pada tahun 2026 Pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi antara lain berupa insentif perpajakan terkait ketahanan energi, infrastruktur energi, energi baru terbarukan, subsidi energi dan kompensasi.

Dukungan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif perpajakan merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Insentif perpajakan ini dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya energi domestik, baik yang bersumber dari minyak dan gas bumi maupun energi baru dan terbarukan seperti panas bumi. Tujuan utama dari pemberian insentif ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi, mempercepat pengembangan infrastruktur energi, serta mendukung transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan. Dengan memberikan keringanan pajak, beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha menjadi lebih ringan, sehingga mereka memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melakukan investasi jangka panjang di sektor energi.

Ragam insentif perpajakan yang diberikan cukup luas, mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan eksplorasi minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, hingga insentif berupa pembebasan bea masuk dan cukai untuk impor barang modal dan barang penunjang dalam rangka pembangunan atau pengembangan infrastruktur energi. Salah satu bentuk insentif terbesar adalah PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA, termasuk biaya penyambungan listrik dan biayanya. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atas pemanfaatan listrik, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Selain itu, Pemerintah juga memberikan skema *tax holiday* untuk industri pionir dan *tax allowance* untuk penanaman modal di sektor tertentu dan/atau di daerah tertentu. Kebijakan ini mencerminkan upaya konkret untuk mendorong pemerataan investasi energi ke berbagai wilayah Indonesia.

Ketersediaan sumber energi dalam rangka mendukung ketahanan energi berupa anggaran infrastruktur energi dilakukan antara lain melalui Belanja K/L pada Kementerian ESDM maupun pemberian pinjaman (penerusan pinjaman) kepada badan usaha. Adapun pemanfaatan dari belanja Kementerian ESDM antara lain: (1) pemberian bantuan *converter kit* kepada petani

dengan tujuan mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; (2) pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu) di daerah 3T; (3) pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga; dan (4) pembangunan transmisi pipa gas bumi. Adapun penerusan/pemberian pinjaman kepada BUMN dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian target bauran EBT dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) dan pembangkit listrik tenaga air (*pumped storage*).

Dukungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penyediaan sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau tercermin pada anggaran yang terkait EBT. Dukungan tersebut terutama berupa insentif biodiesel yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)—sejak Januari 2025 berubah nama menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dana insentif tersebut berasal dari hasil pungutan ekspor komoditas sawit. Insentif biodiesel yang diberikan untuk menutup selisih biaya produksi biodiesel dengan harga solar sehingga harga biodiesel tetap terjangkau dan mendorong penggunaan biodiesel sebagai energi alternatif. Program pengembangan biodiesel melibatkan beberapa program lainnya seperti Program Sawit Rakyat, dukungan riset sektor sawit, dan pendidikan bagi keluarga petani.

Pemerintah mengimplementasikan program Mandatori B40 pada tahun 2025, yaitu program Pemerintah untuk mencampur 40 persen biodiesel berbasis minyak sawit (*Fatty Acid Methyl Ester*/FAME) dengan 60 persen minyak solar (diesel) sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Program tersebut didukung alokasi volume penyaluran 15,6 juta kiloliter ke seluruh Indonesia. Insentif biodiesel pada tahun 2025 mulai diarahkan hanya untuk biosolar bersubsidi untuk mendukung program subsidi tepat sasaran. Selain pengembangan biodiesel, Pemerintah juga berupaya melakukan pemanfaatan bahan bakar nabati lainnya seperti diesel hidrobiokarbon, bioetanol, dan bioavtur. Pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai energi hijau perlu ditingkatkan secara bertahap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, mempertimbangkan kaidah keteknikan, serta menjaga iklim usaha bahan bakar nabati dan lingkungan hidup. Selain insentif biodiesel, dukungan Pemerintah dalam bidang EBT antara lain untuk: (1) membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik mini *hydro* di beberapa daerah melalui SDG's Indonesia One-Green Finance Facility; dan (2) dukungan Kementerian ESDM dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan seperti penyusunan peta potensi EBT.

Subsidi energi dan kompensasi merupakan salah satu bentuk intervensi fiskal yang strategis dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang tidak mampu, serta memastikan keberlanjutan akses terhadap sumber daya energi utama seperti bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kg, dan listrik. Melalui subsidi energi dan kompensasi, Pemerintah berupaya mengurangi tekanan eksternal akibat fluktuasi harga komoditas global, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi makro. Dengan demikian, subsidi energi dan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi harga, tetapi juga sebagai pilar penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kondisi perekonomian yang normal, subsidi energi dan kompensasi didorong lebih tepat sasaran khususnya masyarakat miskin

dan rentan. Namun di sisi lain, penyaluran subsidi energi dan kompensasi masih belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga peran APBN dalam menjalankan fungsi distribusi masih perlu didorong lebih optimal. Oleh karena itu, kebijakan subsidi energi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran perlu didorong untuk APBN yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan kebijakan energi hijau untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan mendorong pemanfaatan EBT, sehingga dapat mengurangi emisi GRK. Namun demikian upaya mendorong subsidi tepat sasaran tersebut senantiasa memerhatikan kondisi daya beli masyarakat dan momentum yang tepat. Dalam jangka menengah, Pemerintah mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis target penerima manfaat. Harga komoditas energi dibentuk melalui mekanisme pasar sesuai harga keekonomian tanpa intervensi Pemerintah. Pemerintah berperan melindungi daya beli dan akses energi kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan, baik berupa *cash transfer* ataupun *inkind benefit*.

3.7. Makan Bergizi Gratis

Pemerintah melalui program pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Makanan yang disajikan dalam program ini dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi penerima manfaat serta menggunakan bahan makanan yang diolah dari sumber pangan lokal. Komposisi makanan kepada masing-masing kelompok sasaran memperhatikan kecukupan energi dan gizi sesuai umur dan jenis kelamin penerima MBG dimana makanan yang diberikan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, buah-buahan, serta susu sebagai pelengkap. Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan. Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien.

Distribusi MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta. SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat. Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman (*food and beverage)* sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran untuk program MBG melalui K/L dialokasikan sebesar Rp268.000,0 miliar. Pelaksanaan program MBG tahun 2026 untuk memenuhi target 82,9 juta peserta (siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita) membutuhkan anggaran Rp335.000,0 miliar*.

3.8. Pertahanan Semesta

Pertahanan Semesta merupakan implementasi dari UUD 1945 terutama Pasal 30 yang mengamanatkan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas TNI/Polri akan tetapi sebuah sistem yang mengintegrasikan kekuatan nasional secara menyeluruh. Pertahanan

*) sebagian dicadangkan

Semesta juga merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terutama Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman/gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut, misi Kabinet Merah Putih periode tahun 2025 – 2029, telah memasukan Pertahanan Semesta ke dalam Asta Cita kedua yang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dengan demikian, Pertahanan Semesta menjadi Prioritas Nasional dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian bangsa melalui penguatan sektor-sektor strategis antara lain: swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan impor, energi dan air yang dapat menjamin keberlanjutan sumber daya, ekonomi kreatif dan hijau mendorong inovasi dan keberlanjutan, serta ekonomi biru yang memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan.

Selain itu, besaran anggaran belanja pertahanan dipengaruhi juga oleh arah kebijakan Pemerintah yang mendukung kegiatan/sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial dan infrastruktur sehingga anggaran belanja lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan yang besar, maka distribusi logistik menjadi tantangan dan perhatian karena sifatnya yang kompleks. Ditambah lagi, adanya komitmen Pemerintah dalam diplomasi dan perdamaian dunia yang berdampak pada keaktifan diplomasi internasional dan misi perdamaian dunia dengan menggunakan pendekatan non-konfrontatif dalam kebijakan luar negeri.

Untuk mengetahui peta kekuatan militer suatu negara, dapat menggunakan *Asia Power Index* (API) yang dikeluarkan oleh *Lowy Institute*. Perhitungan API tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan yang didistribusikan di kawasan Asia Pasifik, serta membantu pemahaman dinamika geopolitik dan ekonomi. Berdasarkan *Asia Power Index* tahun 2025, peta kekuatan Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara dalam indeks kekuatan (sumber data *Global Firepower*) sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 15 kekuatan militer terbesar di dunia. Selain itu, pada periode tahun 2025 – 2029 API memproyeksikan indeks kekuatan militer Indonesia didasarkan pada : (i) penguatan diplomasi dan jaringan pertahanan internasional; (ii) penguatan modernisasi dan peningkatan ketahanan nasional; (iii) peningkatan kapasitas industri pertahanan dan pengaruhnya terhadap ekonomi; (iv) perluasan pengaruh budaya dan teknologi; dan (v) penguatan konsolidasi sebagai *middle power* yang stabil. Berdasarkan hal tersebut, maka anggaran Pertahanan Semesta akan diselaraskan untuk mendukung pertahanan dan keamanan wilayah, bangsa dan negara, namun perlu diimbangi dengan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Pertahanan Semesta.

Berdasarkan hal - hal di atas, maka output Pertahanan Semesta tahun 2026 dialokasikan antara lain untuk: **(1) Bidang Pertahanan**, antara lain (a) pengadaan/harwat alutsista strategis; (b) pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista; (c) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan; dan (d) penguatan kapasitas industri pertahanan; dan (e) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung.

(2) Bidang Ketertiban dan Keamanan, antara lain melalui: (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional. Dan **(3) Bidang Hukum**, antara lain melalui : (a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana narkotika dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.

Selain itu, Pertahanan Semesta perlu diperkuat dengan kerja sama yang intensif dengan berbagai *stakeholder* antara lain dengan : (1) K/L yang mempunyai tusi terkait dengan bidang pertahanan yaitu BIN, BNPT, BSSN dan Bakamla; (2) pemerintah daerah; (3) industri pertahanan antara lain PT Pindad (Persero); PT Dirgantara Indonesia (Persero); PT LEN (Persero); PT PAL (Persero); (4) badan usaha swasta; dan (v) masyarakat termasuk akademisi. Dan untuk mewujudkan daya gentar Pertahanan Semesta di kawasan Asia – Pasifik, maka Pemerintah perlu meningkatkan hubungan kerja sama antarnegara antara lain melalui (1) kerjasama industri pertahanan melalui J*oint Production, Join Investment, Joint Development, and Joint Marketing;* dan (2) penguatan dalam melakukan diplomasi internasional.

3.9. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM

Dalam usaha memperkuat peranan desa, koperasi, dan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, Pemerintah menyusun kebijakan komprehensif untuk periode 2025–2029. Kebijakan tersebut antara lain mencakup peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Selain itu, penguatan sistem pengawasan juga menjadi prioritas, seiring dengan perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi koperasi dan UMKM dalam rantai nilai komoditas unggulan nasional dan mendorong peningkatan mutu produk. Penguatan kewirausahaan juga menjadi salah satu pilar utama strategi pembangunan koperasi dan UMKM. Hal ini dilakukan melalui penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif, termasuk inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah akan melakukan pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha serta memastikan integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pelaku usaha. Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas, Pemerintah akan mengupayakan transformasi UMKM ke kelompok menengah. Usaha ini dilakukan melalui penyusunan standar program pemberdayaan yang terukur dan terintegrasi, pemanfaatan DTSEN, serta pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan pelaku usaha. Sistem informasi berbasis digital juga akan dikembangkan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi yang akuntabel.

Selaras dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi nasional dalam rangka pemberdayaan kelurahan/desa sehingga diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KDKMP ditargetkan terbentuk untuk penguatan usaha masyarakat. Pendekatan

ini mencakup pembentukan koperasi baru, penguatan koperasi aktif, serta revitalisasi koperasi tidak aktif, disertai model bisnis berbasis kawasan dan dukungan digitalisasi. Ke depan, KDKMP akan terus diperkuat untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan desa mandiri, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan kesejahteraan. KDKMP akan didorong menjadi simpul produksi, pengolahan, dan distribusi produk lokal yang berdaya saing, dengan penguatan kelembagaan, pelatihan manajerial, integrasi ke dalam rantai pasok nasional, dan dukungan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2025, Pemerintah berkomitmen untuk membentuk 80.000 koperasi disetiap desa/kelurahan dengan melakukan pengembangan koperasi yang ada, pembentukan koperasi baru, serta revitalisasi koperasi yang selama ini tidak aktif. Dukungan fiskal dalam penguatan koperasi tersebut dilakukan melalui APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap berkomitmen mendukung agar unit usaha yang dijalankan dapat berjalan optimal dengan ditopang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah prioritas pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Pemanfaatan dukungan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM ditunjukkan dari beberapa output periode 2021-2025 antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan usaha mikro kepada 78.882 UMKM pada tahun 2024-2025; (2) fasilitasi usaha mikro dalam pelaksanaan program MBG kepada 1.000 UMKM pada tahun 2025; (3) fasilitasi dan pembinaan desa untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan kepada 75,3 ribu desa; (4) pembangunan jalan desa sepanjang 160.250 km; (5) pembangunan jembatan desa mencapai 420.487 meter; (6) pembangunan dan rehabilitasi 3.341 unit pasar desa; (7) pengembangan 3.564 kegiatan BUM Desa; (8) pembangunan 1.829 unit embung; (9) pembangunan 536.574 unit irigasi desa; (10) pembangunan 330.857 unit sarana air bersih; (11) pembangunan 138.020 unit fasilitas MCK; (12) dukungan kegiatan pada 8.435 unit sarana prasarana olahraga; (13) dukungan kegiatan pada 12.587 unit Posyandu; (14) dukungan kegiatan pada 12.955 layanan PAUD; dan (15) dukungan kegiatan pada 12.897 unit Pondok Bersalin Desa.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM merupakan salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan terutama di desa. Dalam periode 2021-2024, status desa semakin membaik dimana jumlah desa mandiri dan desa maju meningkat. Pada tahun 2024, jumlah desa mandiri sebanyak 17.023 desa, bertambah sebanyak 13.745 desa atau 419,3 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal terus menurun. Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di desa juga terus menunjukkan perbaikan dari 13,1 persen di tahun 2021 menjadi 11,8 persen di tahun 2024.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya: (1) tingkat kemiskinan di perdesaan tergolong cukup tinggi, yakni mencapai 11,8 persen dibandingkan perkotaan yang mencapai 7,09 persen (BPS, 2024). Lebih dari separuh penduduk miskin (55,4 persen) tinggal di desa; (2) masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar antara desa dan kota; (3) Pemerintah desa juga perlu memperbaiki tata kelola; dan (4) meningkatkan kualitas penggunaan anggaran desa.

Menjawab tantangan tersebut, maka langkah strategis pembangunan desa, koperasi dan

UMKM pada tahun 2026 fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi desa. Arah kebijakan anggaran pembangunan desa, koperasi, dan UMKM tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM; (3) penguatan sistem pengawasan; (4) perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, dan digitalisasi koperasi dan UMKM; (5) mendorong peningkatan mutu produk; (6) penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif; (7) inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; (8) pemutakhiran regulasi yang mendukung iklim usaha; dan (9) integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM.

Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat peran pelaku usaha dalam perekonomian nasional. Rencana strategis prioritas bidang pembangunan desa, koperasi, dan UMKM melalui Belanja K/L pada tahun 2026 antara lain: (1) fasilitasi peningkatan kapasitas usaha UMKM; (2) fasilitasi usaha mikro dalam pelaksanaan program MBG; serta (3) fasilitasi dan pembinaan desa untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Beberapa program dukungan UMKM melalui Belanja K/L tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1) Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

   Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Dalam implementasinya, Pemerintah memegang peranan penting dalam mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem rantai pasok MBG, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal secara menyeluruh. Melalui program MBG, Pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang kerja dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha mikro. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, dibangun ekosistem keterlibatan UMKM secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Strategi ini menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan bagian penting dari rantai nilai yang terintegrasi. Pendekatan dari hulu hingga hilir ini bertujuan untuk menciptakan dampak ganda yaitu pemenuhan gizi anak-anak serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui peran aktif UMKM. Pemerintah terus mendorong akselerasi keterlibatan pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia agar program ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berdaya saing.

2) Program SAPA UMKM

   SAPA UMKM dirancang untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pemuktahiran Basis Data Tunggal UMKM (BDT-UMKM). SAPA UMKM menjadi program yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi dan memanfaatkan Basis Data Tunggal UMKM sebagai sumber datanya. SAPA merupakan platform pusat layanan dan informasi bagi pengusaha UMKM, yang akan mengintegrasikan seluruh layanan/ program pemberdayaan UMKM baik dari Pemerintah maupun Non Pemerintah, mulai dari akses pembiayaan, legalitas, pelatihan, pemasaran hingga ekspor. Platform SAPA UMKM dirancang untuk memberikan manfaat menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi pengusaha

UMKM, platform ini menyediakan akses terhadap berbagai layanan komprehensif yang mencakup seluruh rantai nilai usaha, mulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi, termasuk permodalan, pelatihan, sertifikasi, dan berbagai fitur pendukung usaha lainnya. Kehadiran platform ini memungkinkan monitoring perkembangan UMKM secara *real time* melalui aktivitas dan interaksi langsung yang tercatat dalam sistem, sekaligus menyediakan data analitik untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pada tingkat nasional, SAPA UMKM memberikan dampak strategis yang multidimensi. Platform ini berperan penting dalam verifikasi data UMKM secara akurat, identifikasi penerima Subsidi Pajak Usaha 0,5 persen, serta integrasi data nasional yang terpadu. Dukungan teknologi berupa versi *mobile* (Android dan iOS) bagi pengusaha UMKM dan versi website serta berbagai stakeholder terkait, memastikan aksesibilitas yang luas dan sinergi yang efektif dalam pemberdayaan UMKM. Desain platform yang terintegrasi ini tidak hanya menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien, tetapi juga memungkinkan pengukuran dampak program secara lebih akurat dan terukur.

3) Program Kartu Usaha (produktif)

Kartu Usaha dirancang untuk mendukung PHTC-5 yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Kegiatan ini menjadi kegiatan prioritas terpilih pada Rancangan RPJMN 2025-2029. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja dengan fokus pada peningkatan kapasitas. Pemerintah akan memastikan ketersediaan seluruh aspek penting dan sinergi antar K/L dalam pelaksanaan program kartu usaha.

Strategi pengembangan koperasi, UMKM dan kewirausahaan tahun 2026 antara lain: (1) rumah produksi bersama dan pabrik minyak makan merah sebagai bentuk modernisasi koperasi dan penguatan industri menengah berbasis sumber daya lokal; (2) korporatisasi petani dan koperasi multipihak untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani; (3) transformasi pembiayaan UMKM dengan pendekatan inovatif, khususnya dalam rantai pasok salah satunya melalui pembiayaan KUR Klaster; (4) Solar Untuk Koperasi (SOLUSI) nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui akses pasar dan pembiayaan; (5) *entrepreneur* hub atau e-Hub sebagai platform digital untuk pengembangan *start-up* dan wirausaha muda; serta (6) reformasi BLU dengan LPDB-KUKM menjadi solusi pembiayaan koperasi, dan SMESCO sebagai *center of excellence* bagi produk UMKM.

Dukungan untuk prioritas pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada APBN tahun anggaran 2026 juga dilakukan melalui Dana Desa. Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan desa, penguatan koperasi, dan pemberdayaan UMKM. Salah satu fokus penggunaannya diarahkan untuk mendukung penguatan lembaga ekonomi desa. Selanjutnya, sejalan dengan implementasi program Koperasi Desa Merah Putih, Dana Desa juga berfungsi untuk memberikan dukungan antara lain berupa: (a) pemberian dukungan melalui Dana Desa koperasi desa merah putih; dan (b) pemberian dukungan pembiayaan dimaksud dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman. Selain itu, dukungan untuk prioritas pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada APBN tahun anggaran 2026 melalui Pembiayaan berupa bantuan likuiditas. Bantuan likuiditas tersebut dilakukan dengan skema investasi Pemerintah non permanen sesuai PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi

Pemerintah dan PMK Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

3.9.1. Pembangunan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

Di banyak desa dan kelurahan Indonesia, rakyat masih menghadapi tantangan nyata yaitu harga sembako tinggi karena rantai distribusi yang panjang, petani dan nelayan terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak, UMKM terjerat rentenir, dan jutaan warga belum memiliki akses terhadap toko sembako, layanan farmasi, atau fasilitas keuangan dasar. Ketimpangan ini bukan sekadar soal logistik, melainkan soal keadilan dan kedaulatan ekonomi rakyat. Data resmi menunjukkan bahwa 70 persen desa dan kelurahan belum memiliki koperasi; 5 juta pelaku usaha mikro masih terjerat rentenir karena keterbatasan akses pembiayaan formal; dan lebih dari 50 ribu desa belum memiliki fasilitas kesehatan. Infrastruktur dasar belum menjangkau mayoritas desa baik dari sisi distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, logistik, hingga akses keuangan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan salah satunya diwujudkan dalam bentuk koperasi. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan dalam upaya menciptakan perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan, Presiden memberikan arahan kebijakan strategis untuk mendukung penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan KDKMP. Arahan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 16 K/L, para gubernur, dan bupati/walikota di Indonesia. Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP telah diterbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Berdasarkan Inpres ini diharapkan peran strategis KDKMP yang telah terbentuk kelembagaannya lebih dari 80 ribu se-Indonesia dapat berjalan lebih optimal dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan yang berkelanjutan.

KDKMP memiliki potensi besar untuk menjadi entitas ekonomi yang berperan strategis dalam mendorong kemajuan perekonomian di tingkat kelurahan/desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Melalui KDKMP, diharapkan terwujud usaha bersama yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kelurahan/desa. Selain itu, KDKMP juga diharapkan mampu menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi masyarakat desa, seperti terbatasnya akses terhadap permodalan dan pembiayaan, minimnya lapangan kerja, kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta tingginya tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang terjadi di pedesaan. Dengan demikian, KDKMP dipandang sebagai instrumen yang relevan dan adaptif dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal serta mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan/desa.

Jenis-jenis gerai yang dapat dikembangkan dalam KDKMP meliputi: (1) gerai sembako: menyediakan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sejenisnya; (2) gerai obat murah/apotek desa: melayani kebutuhan obat generik dan dasar di tingkat desa/ kelurahan; (3) gerai klinik desa: menyediakan layanan kesehatan dasar bagi warga desa, termasuk konsultasi dan pemeriksaan ringan; (4) gerai kantor koperasi: menjadi pusat administrasi, keanggotaan, edukasi, dan layanan

umum bagi anggota; (5) gerai unit simpan pinjam: dikenal sebagai embrio ”KopBank”, menawarkan produk simpanan dan kredit untuk anggota lokal; (6) gerai pergudangan: fasilitas penyimpanan dingin untuk produk pertanian dan komoditas rentan rusak; dan (7) usaha lain sesuai kebutuhan lokal: dapat berupa unit tambahan berdasarkan kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa, atau perintah tugas pemerintah (pupuk, LPG, dan lainnya).

Program ini dibangun melalui musyawarah warga, legalisasi badan hukum, integrasi digital nasional, dan pengawasan ketat oleh negara dengan dukungan penuh dari BUMN dan Himbara. Berdasarkan estimasi, koperasi ini diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam ekonomi kelurahan/desa. Ini adalah desain ulang ekonomi lokal, di mana kelurahan/desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek utama pertumbuhan bangsa. Dengan demikian, diharapkan pembentukan KDKMP dapat memberikan manfaat strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan/desa; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat; (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi; (5) modernisasi manajemen sistem perkoperasian; (6) menekan harga di tingkat konsumen; (7) meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik; (8) menekan pergerakan tengkulak; (9) memperpendek rantai pasok; (10) meningkatkan inklusi keuangan; (11) menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator usaha mikro, kecil dan menengah; (12) menekan tingkat kemiskinan ekstrem; dan (13) menekan inflasi. Adapun tujuan pembentukan KDKMP adalah untuk memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan serta sejalan dengan Asta Cita kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, Asta Cita ketiga yaitu melakukan pengembangan industri agro maritim dengan partisipasi koperasi, dan Asta Cita keenam yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

3.10. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global

Untuk mendukung implementasi kebijakan percepatan investasi dan perdagangan global, saat ini telah dibentuk lembaga Danantara yang akan menjadi driver pendorong investasi produktif dengan terus memperkuat peran Indonesia dalam global value chain. Sebagai lembaga yang bersifat katalis, Danantara diarahkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi jangka menengah dan panjang, terutama untuk sektor-sektor yang bersifat strategis, yang membutuhkan modal besar.

Untuk mengoptimalkan peran Danantara tersebut, keterlibatan Pemerintah melalui berbagai intervensi kebijakan belanja oleh beberapa Kementerian/Lembaga terkait juga masih sangat diperlukan. Penjabaran kegiatan beberapa Kementerian/Lembaga terkait yang relevan dengan upaya untuk melakukan percepatan investasi dan perdagangan global antara lain:

1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM

Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Investasi Hilirisasi/ BKPM menyampaikan informasi bahwa realisasi investasi Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, naik

signifikan dari Rp826,3 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1.714,2 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20,82 persen di tahun terakhir. Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri logam dasar yang menjadi pilar utama hilirisasi nasional. Dan yang tidak kalah penting, capaian investasi ini turut mendorong penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Tercatat, penyerapan tenaga kerja meningkat tajam dari 1,15 juta orang pada tahun 2020 menjadi lebih dari 2,45 juta orang pada tahun 2024, sebagai dampak langsung dari peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Distribusi investasi juga menunjukkan arah pemerataan pembangunan yang semakin merata. Selama periode ini, investasi di luar Jawa mencapai 51,9 persen atau sebesar Rp3.148,2 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa, yang mencatat 48,1 persen atau Rp2.919,4 triliun. Ini menandakan bahwa strategi percepatan pembangunan wilayah telah menunjukkan hasil nyata. Selain itu, program hilirisasi juga telah menjadi motor penggerak penting dengan nilai realisasi sebesar Rp783,2 triliun atau 12,91 persen dari total investasi lima tahun terakhir. Investasi di sektor hilir ini didorong oleh sektor-sektor strategis seperti minyak dan gas bumi, mineral, perkebunan, kehutanan, hingga kelautan.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dalam tahun 2025 terus memperkuat berbagai program strategis untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain; (i) Peningkatan Daya Saing Investasi; (ii) Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok; (iii) Pemasaran investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional; (iv) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal; (v) Percepatan Rencana Proyek di Bidang SDA, Manufaktur, Jasa dan Kawasan serta Infrastruktur; (vi) Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK; (vii) Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Migas dan Minerba; (viii) Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah; dan (ix) Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Sejauh ini, manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja tersebut, antara lain:

a. Fasilitasi investasi dan percepatan hilirisasi berdampak pada peningkatan aktivitas industri dan pembukaan lapangan kerja baru di berbagai daerah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat;

b. Dukungan terhadap investasi di luar Pulau Jawa melalui Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antarwilayah;

c. Pelaksanaan program kemitraan antara investor dan UMKM serta pelatihan bagi pelaku usaha dalam rantai pasok industri meningkatkan kompetensi dan daya saing UMKM lokal, sehingga dapat berperan dalam ekosistem investasi; dan

d. Reformasi kebijakan dan digitalisasi layanan melalui *Online Single Submission* (OSS) mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, dalam memperoleh izin usaha secara cepat dan transparan.

Selain itu, kegiatan untuk memperkuat percepatan investasi dan perdagangan global ini juga dilakukan dengan: (i) menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor; (ii) pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (targeted); (iii) meningkatkan

kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal; (iv) meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko; (v) mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam; dan (vi) memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal.

Untuk melanjutkan kebijakan tersebut pada tahun 2026 kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: (i) Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata; (ii) Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal; dan (iii) Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2. Kementerian Perdagangan

Untuk mempercepat investasi dan perdagangan global guna mendukung Prioritas Nasional pada tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tetap memperkuat/ meningkatkan/mendukung/ memperluas fasilitasi penguatan rantai nilai dan tata kelola untuk mendukung hilirisasi SDA dan pengembangan industri nasional, termasuk mendukung fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor bagi produk hilirisasi dan UMKM Berbasis SDA. Beberapa kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 antara lain peningkatan akses pasar bagi produk hasil hilirisasi, dukungan terhadap pelaku usaha dan UMKM, penurunan biaya logistik dan distribusi, serta kemudahan layanan perizinan dan tata niaga ekspor-impor Selain itu, yang akan diperkuat pada tahun 2026 adalah: (i) Pengamanan Pasar Dalam Negeri melalui Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah dan Optimalisasi Sarana Perdagangan, (ii) Peningkatan kebanggaan dan pemasaran produk dalam negeri, (iii) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen, Peningkatan edukasi pelaku usaha dan pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan, (iv) Perluasan Pasar Ekspor, dalam rangka membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui Penguatan Diplomasi Perdagangan, (v) Penguatan dan pengembangan produk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi, dan yang menyerap tenaga kerja yang tinggi, (vi) Fasiltasi pelayanan ekspor dan impor yang terintegrasi, (vii) Peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor, melalui Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor, Pemberdayaan UKM berorientasi ekspor, Integrasi informasi perdagangan internasional (*one stop service*), dan (viii) Optimalisasi pemanfaatan *e-commerce* dalam mendukung ekspor

3. Kementerian Perindustrian

Untuk mendukung percepatan investasi dan perdagangan global khususnya pada kebijakan hilirisasi industri, pada tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan dukungan hilirisasi industri untuk pengolahan kakao dan cokelat, dan hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri *Electric Vehicle* (EV) nasional. Selain itu, kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam unggulan (antara lain kelapa, kelapa sawit, rumput laut, garam, nikel, tembaga, dan bauksit), dan pengembangan industri prioritas (semikonduktor, KBLBB, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kosmetik dan

farmasi, mesin dan peralatan, dirgantara, dan jasa industri). Kebijakan yang akan ditempuh di jangka menengah guna mendukung hilirisasi dapat lebih masif lagi sehingga menarik minat investasi, Pemerintah akan tetap melakukan penguatan pembangunan sumber daya manusia industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi industri, penguatan IKM sebagai rantai pasok industri, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi, transformasi industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan aglomerasi industri melalui Kawasan Industri.

4. Kementerian ESDM

Untuk mendukung Prioritas Nasional khususnya dalam membentuk suatu ekosistem percepatan investasi dan perdagangan global, dari kesiapan infrastuktur energi, pada tahun 2025 Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) telah memperkuat/ meningkatkan/ mendukung/memperluas akses terhadap energi melalui pembangunan infrastrukur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pipa Transmisi Gas serta Survei Sumber Daya Alam, termasuk pengawasan pembangunan infrastruktur energi dan penyusunan kebijakan bidang energi dan sumber daya alam. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain akses terhadap energi energi yang andal, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masyarakat yang merata di seluruh wilayah serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan adil, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2026, Pemerintah juga berencana untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur energi seperti pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pipa Transmisi Gas, serta Survei Sumber Daya Alam. Untuk kebijakan yang strategis di jangka menengah, Pemerintah akan mendorong pengelolaan energi nasional yang efisien dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dalam negeri, perluasan akses energi bersih, serta pengembangan sumber daya manusia kompeten dalam mendukung transisi energi dan hilirisasi sumber daya mineral. Arah kebijakan ini berfokus pada pengelolaan energi, efisiensi, investasi energi baru dan terbarukan, keterjangkauan energi, serta pemanfaatan sumber daya manusia.

5. Kementerian Perhubungan

Guna mengembangkan infrastruktur konektifitas dalam rangka mendukung percepatan investasi dan perdagangan global, pada tahun 2025 Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memperkuat/ meningkatkan/ mendukung/memperluas konektivitas dan integrasi transportasi nasional, kinerja pelayanan transportasi, dan peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi. Selain itu, beberapa kegiatan terkait juga tetap dilanjutkan pembangunannya seperti pengadaan sarana dan prasarana transportasi, subsidi layanan angkutan perintis, pengembangan SDM bidang transportasi, dan peningkatan fasilitas pelabuhan seperti Pelabuhan Sapudi dan Marapokot, Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Kaimana, Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Carocok Painan dan Salakan, dan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kalianget. Manfaat yang diharapkan dapat

dirasakan antara lain tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan serta mendukung daya tarik investasi. Kemudian pada tahun 2026 dan di jangka menengah, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan antara lain:

a) Penyediaan Layanan Angkutan Perintis Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api (KA);
b) Layanan angkutan pemadu moda/ antarmoda, angkutan barang, angkutan umum massal perkotaan, angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan;
c) Subsidi angkutan umum perkotaan;
d) Pembangunan terminal penumpang tipe A, terminal barang internasional, pelabuhan penyeberangan;
e) Pembangunan jalur KA, jalur ganda KA, jalur elevated, sistem persinyalan & telekomunikasi, fasilitas stabling stasiun KA;
f) Penggantian/peningkatan jembatan KA dan Revitalisasi/pembangunan terowongan KA;
g) Layanan angkutan tol laut, angkutan ternak, angkutan rede, angkutan lebaran natal dan tahun baru (PN);
h) Pembangunan/pengembangan/ peningkatan/*replacement*/rehabilitasi fasilitas Pelabuhan;
i) Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis penumpang dan kargo; dan
j) Pengembangan bandara.

6. Kementerian Pekerjaan Umum

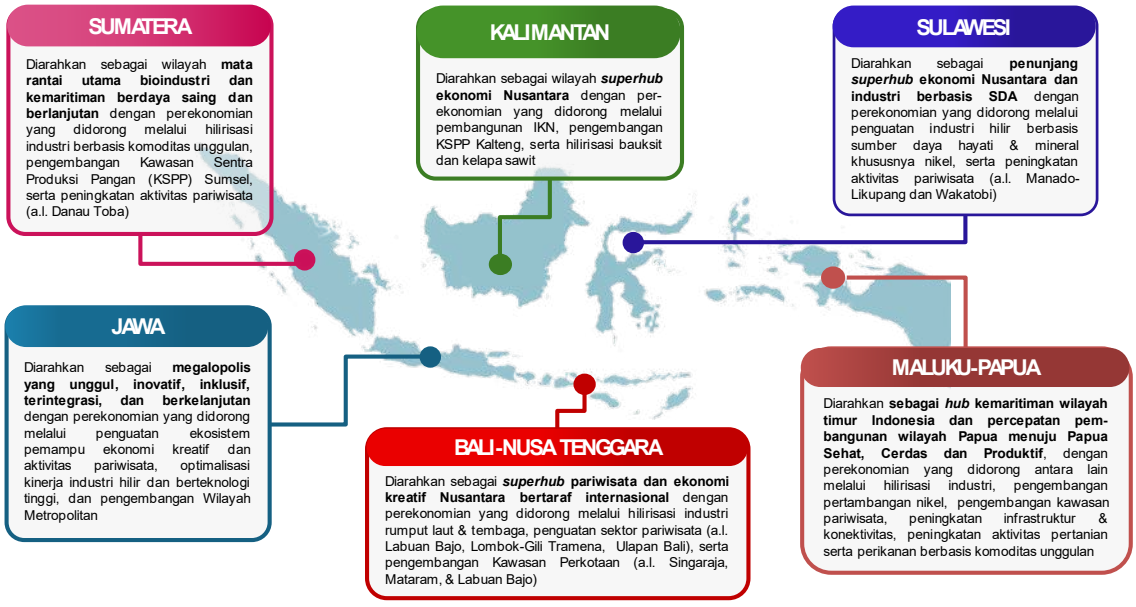
Dalam APBN tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum membangun dan mengembangkan dukungan infrastruktur untuk mempercepat dan meningkatkan daya tarik investasi dan perdagangan global antara lain melalui: (i) pembangunan bendungan, (ii) pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi; (iii) peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah; (iv) pembangunan jalan bebas hambatan; (v) pembangunan, peningkatan dan perluasan layanan SPAM; (vi) pembangunan dan optimalisasi/rehabilitasi pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D) dan persampahan; dan (vii) penataan kawasan strategis. Adapun kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk 1) dukungan ketahanan (swasembada) pangan melalui pembangunan bendungan, rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi mendukung, peningkatan konektivitas jalan daerah, 2) perwujudan swasembada air melalui pengendalian banjir perkotaan, pembangunan pengaman pesisir utara Jakarta dan pulau terdepan–terluar–tertinggal (3T), pembangunan dan perluasan SPAM Kabupaten/ Kota/ Regional, pembangunan Jakarta Sewerage Development Project, pengembangan SPAM Regional, dan optimalisasi/rehabilitasi SPAL-D, 3) reformasi pengelolaan sampah melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan 4) pengembangan konektivitas jalan strategis nasional, jalan perkotaan, dan jalan utama daerah tertinggal dan perbatasan. Pada tahun 2026, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektifitas, antara lain dengan melaksanakan rehabilitasi/ peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana (pengaman pantai), pembangunan bendungan, jalan bebas hambatan, pembangunan dan perluasan SPAM Kabupaten/Kota/Regional, dan pembangunan Jakarta Sewerage Development Project. Arah kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Presiden, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan air, transisi menuju ekonomi hijau, penguatan pariwisata berkelanjutan, serta konektivitas antar wilayah yang inklusif dan efisien.

3.10. Belanja K/L dan TKD Berdasarkan Wilayah

Sebagai instrumen fiskal yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. Melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN mendukung pembangunan dan penyediaan layanan masyarakat pada wilayah-wilayah di Indonesia. Pembangunan wilayah bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang optimal serta mewujudkan kesejahteraan melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja di daerah sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi, khususnya di daerah.

Pembangunan wilayah memiliki peran penting sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung capaian pembangunan. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran pembangunan kewilayahan diarahkan pada terciptanya wilayah yang inklusif, terintegrasi, berdaya saing, berketahanan dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi pada masing-masing wilayah melalui pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Prioritas Nasional (KPN), Wilayah Pembangunan Sumber Pertumbuhan Baru, serta Kawasan Transisi dan *Hinterland*. Sasaran pengembangan kewilayahan tersebut dilaksanakan melalui lima prioritas, yaitu: (1) penguatan peran dan konektivitas antarwilayah; (2) peningkatan daya saing wilayah melalui pengembangan potensi unggulan; (3) peningkatan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim; (4) pengurangan kesenjangan antar wilayah; serta (5) pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan rendah emisi. Tujuan pengembangan potensi wilayah dapat dilihat dari faktor pendorong yang mengakselerasi pemerataan antarwilayah yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2025–2029 disajikan dalam **Gambar 3.1**.

GAMBAR 3.1
ARAH KEBIJAKAN WILAYAH DAN FAKTOR PENDORONG AKSELERASI ANTARWILAYAH BERDASARKAN RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029

Untuk mendukung pembangunan wilayah, kebijakan fiskal perlu diarahkan selaras dengan tujuan untuk mencapai transformasi, akselerasi, dan pertumbuhan ekonomi, dengan memanfaatkan karakteristik serta potensi ekonomi daerah yang dapat menjadi modal utama untuk mencapai pembangunan dan pemerataan wilayah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan wilayah, tercipta pertumbuhan ekonomi, dan mampu mengatasi sejumlah permasalahan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN tahun 2025-2029, Pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah antara lain melalui Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Alokasi tersebut secara langsung diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program prioritas pemerintah seperti program di bidang ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja akan terus diperkuat untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menstimulus peningkatan kemandirian fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita masyarakat.

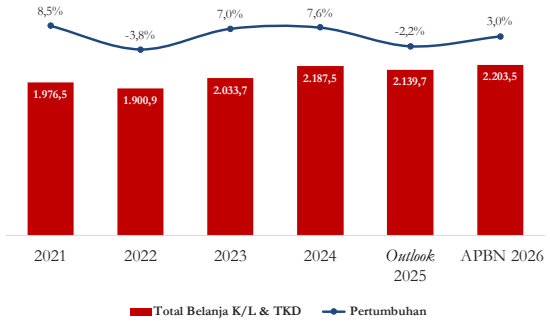
Dalam periode 2021-2025, APBN mampu berperan aktif, antisipatif, dan responsif menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik, dengan tetap terjaga untuk mendukung agenda pembangunan melalui mobilisasi pendapatan, belanja efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*. Realisasi Belanja K/L dan TKD meningkat dari Rp1.976.520,9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.139.695,7 miliar pada *outlook* 2025. Efektivitas Belanja Negara juga terus dijaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui alokasi Belanja K/L dan TKD ke seluruh wilayah di Indonesia, selaras dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Pada tahun 2026, kebijakan belanja Pemerintah akan terus difokuskan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mendukung tujuan tersebut, sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui strategi kebijakan fiskal daerah yang mendukung kebijakan prioritas tahun 2026 yaitu: (1) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dan TKD serta komponen APBN lainnya; (2) kebijakan TKD berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif; (3) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemudahan berusaha; (4) peningkatan kualitas belanja (belanja efisien dan produktif); serta (5) pembiayaan daerah yang semakin kreatif, inovatif, dan *prudent*.

Arah pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mendukung pencapaian trisula pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, kebijakan fiskal untuk daerah antara lain diarahkan untuk: (1) memperkuat ketahanan pangan; (2) mendorong ketahanan energi; (3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (4) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (5) mendukung efektivitas MBG; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; serta (7) akselerasi investasi. Pada APBN tahun 2026, Belanja K/L dan TKD dialokasikan

sebesar Rp2.148.245,6 miliar atau meningkat Rp8.550,0 miliar dari *outlook* 2025 sebesar Rp2.139.695,7 miliar. Alokasi tersebut terdiri dari Belanja K/L senilai Rp1.510.546,8 miliar dan TKD sebesar Rp649.995,0 miliar. Perkembangan anggaran Belanja K/L dan TKD dalam kurun waktu 2021-2026 seperti disajikan dalam **Grafik 3.6**.

GRAFIK 3.6
BELANJA K/L DAN TKD TAHUN 2021-2026
(triliun rupiah)



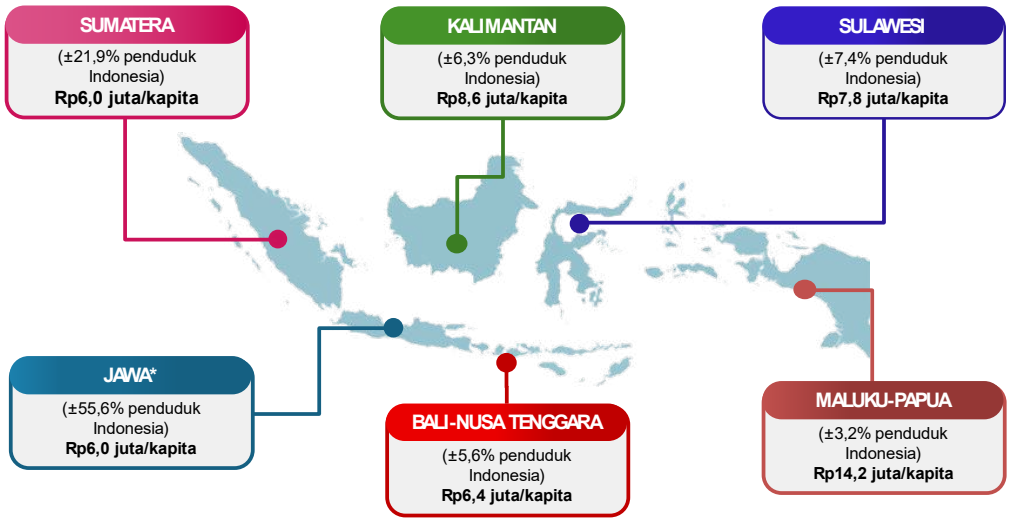
Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal Pemerintah melalui APBN juga dilakukan secara inklusif dengan berfokus kepada pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pada periode 2021-2025, realisasi Belanja K/L dan TKD pada seluruh wilayah di luar Jawa mengalami peningkatan. Wilayah dengan pertumbuhan realisasi Belanja K/L dan TKD tertinggi pada kurun waktu 2021 s.d. proyeksi *outlook* 2025 adalah Wilayah Kalimantan dengan pertumbuhan 60,1 persen yang utamanya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas sektor energi dan pertambangan serta pembangunan IKN. Selanjutnya diikuti oleh Wilayah Sumatera senilai 15,0 persen, Wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 10,2 persen, Wilayah Sulawesi sebesar 9,5 persen, dan Wilayah Maluku-Papua senilai 6,2 persen. Sementara itu, Wilayah Jawa mengalami peningkatan 1,1 persen, seiring dengan komitmen pemerataan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kebijakan Belanja K/L dan TKD yang inklusif juga ditunjukkan dengan peningkatan proporsi alokasi distribusi fiskal ke wilayah-wilayah di luar Wilayah Jawa. Pada periode 2021-2025, dari sisi persentase distribusi Belanja K/L dan TKD, wilayah-wilayah di luar Wilayah Jawa mengalami kenaikan dari proporsi tahun 2021 senilai 39,4 persen menjadi sebesar 43,5 persen pada proyeksi *outlook* s.d. akhir 2025. Selanjutnya, perkembangan distribusi alokasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa menurun dari proporsi tahun 2021 senilai 60,6 persen menjadi 56,5 persen pada proyeksi *outlook* s.d. akhir 2025. Alokasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa masih lebih tinggi, dipengaruhi oleh peran Wilayah Jawa sebagai pusat konsentrasi penduduk, pusat kegiatan ekonomi, dan adanya sejumlah program dimana lokus pencairan belanja yang dilaksanakan secara terpusat namun dengan keluaran dan penerima manfaat tersebar di seluruh Indonesia.

Selaras dengan tujuan kebijakan fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2026, alokasi Belanja K/L dan TKD diarahkan kepada program-program yang dirasakan manfaatnya langsung kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, antara lain: (1) Makan Bergizi Gratis (MBG); (2) program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; (3) penuntasan penanganan TB; (4) cek kesehatan gratis; (5) revitalisasi sekolah dan madrasah; (6) Sekolah Unggulan Garuda; (7) Sekolah Rakyat; (8) PIP dan KIP Kuliah; (9) PKH dan Kartu Sembako; (10) preservasi jalan; serta (11) cetak sawah dan cadangan pangan. Pada tahun 2026, alokasi Belanja K/L dan TKD secara nasional diperkirakan sebesar Rp7,7 juta per kapita, meningkat 6,5 persen dibandingkan *outlook* 2025. Proyeksi Belanja K/L dan TKD per kapita menurut wilayah pada tahun 2026 dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

GAMBAR 3.2
PROYEKSI BELANJA K/L DAN TKD PER KAPITA
BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

*Tidak termasuk Program Dukungan Manajemen

3.10.1. Wilayah Sumatera

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Wilayah Sumatera memiliki sasaran pembangunan sebagai mata rantai utama bioindustri dengan kemaritiman yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Wilayah Sumatera perlu didorong melalui optimalisasi hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan konektivitas, akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan di kawasan afirmasi, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta konservasi kelestarian lingkungan hidup.

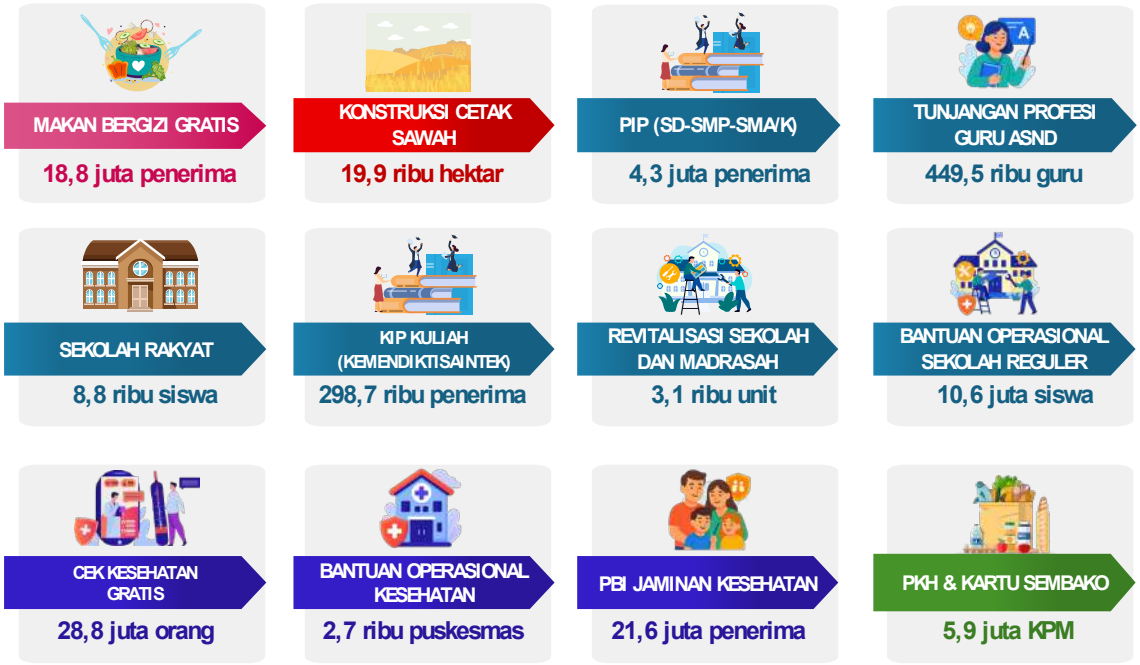
Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Sumatera menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk 61,5 juta jiwa atau 21,8 persen dari total populasi nasional, perekonomian Sumatera di tahun 2024 tumbuh sebesar 4,5 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp4.870,3 triliun atau 22,1 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan di Wilayah Sumatera adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,0 persen. Sektor lain yang menjadi pemicu pertumbuhan PDRB di Wilayah Sumatera adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 20,1 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,1 persen, dan Konstruksi sebesar 11,1 persen.

Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Seluruh provinsi di Wilayah Sumatera mengalami peningkatan IPM, dengan rata-rata IPM sebesar 74,0 meningkat dari tahun sebelumnya, dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan IPM senilai 78,0. Tingkat kemiskinan di Wilayah Sumatera turun menjadi senilai 8,4 persen, atau turun 9,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 4,7 persen, turun 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Sumatera turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,308 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,235.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sumatera. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Sumatera mengalami peningkatan 12,1 persen dari Rp308.225,5 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp345.489,5 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 15,5 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sumatera diproyeksikan sebesar Rp354.410,2 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp139.102,0 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp215.308,2 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sumatera, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dukungan fiskal dialokasikan pada sektor pendidikan antara lain untuk TPG dan dosen non-PNS, layanan pendidikan tinggi pada sejumlah universitas seperti Universitas Jambi, Universitas Malikussaleh dan Universitas Sriwijaya serta rehabilitasi dan renovasi sekolah. Pada sektor kesehatan, dukungan fiskal diberikan antara lain berupa operasional dan pemeliharaan Rumah Sakit Umum seperti RSU Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, RSU Dr. M Jamil Padang, dan RSU H. Adam Malik Medan, pengadaan obat-obatan dan bahan medis, serta pengadaan alat kesehatan. Dukungan fiskal pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan tol lintas Sumatera, bendungan seperti Bendungan Tiga Dihaji di Provinsi Sumatera Selatan dan Bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan jalan trans di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) Regional Sumatera, serta peningkatan jalur lintas kereta api lintas di Provinsi Sumatera Utara.

GAMBAR 3.3
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH SUMATERA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Sumatera diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan kawasan strategis, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta optimalisasi ekonomi biru seperti perikanan dan industri kelautan. Strategi pembangunan juga ditujukan untuk mewujudkan penguatan ketahanan pangan, air, energi terbarukan, peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan hidup untuk memperkuat ketahanan bencana. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Sumatera. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Sumatera, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp6,0 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Sumatera pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.3**.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Sumatera pada tahun 2026, antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas komoditas unggulan bioindustri Sumatera: sawit, karet, kelapa, dan kopi; (2) peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; (3) peningkatan produktivitas perikanan di seluruh provinsi untuk penyediaan pangan akuatik dan bahan baku industri pengolahan; (4) peningkatan investasi industri melalui penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan; (5) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (6) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (7) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (8) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (9) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (10) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal di Wilayah Sumatera pada tahun 2026 diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera antara 5,0-5,4 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 6,3-7,2 persen, mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan tinggi dalam target 75,0-84,0 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Sumatera diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi serta peningkatan produktivitas ketahanan pangan terutama perikanan.

3.10.2. Wilayah Jawa

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan sebagai megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan di Wilayah Jawa perlu didukung dengan peningkatan konektivitas dan penguatan kapasitas SDM yang menjadi landasan utama untuk mendorong kolaborasi lintas wilayah yang lebih optimal. Wilayah Jawa, memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional, seperti bagian utara sebagai rumah dari sektor-sektor strategis seperti industri berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, dan produksi ekspor yang kompetitif, serta bagian selatan yang

difokuskan untuk penguatan sektor pertanian dan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Jawa menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Dengan jumlah penduduk sebanyak 156,9 juta jiwa atau 55,7 persen dari jumlah penduduk nasional, perekonomian Jawa di tahun 2024 tumbuh sebesar 4,9 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp12.555,9 triliun atau 57,0 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan di Wilayah Jawa antara lain sektor Industri Pengolahan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,7 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,2 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,6 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,8 persen.

Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Rata-rata IPM di Wilayah Jawa sebesar 76,9 meningkat dari tahun sebelumnya, dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 83,1. Tingkat kemiskinan di Wilayah Jawa juga mengalami penurunan menjadi senilai 8,1 persen, atau turun 8,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 5,3 persen, turun 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Jawa turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,397 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,364.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Jawa. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Jawa mengalami peningkatan 3,6 persen dari Rp1.196.809,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.239.926,7 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 55,6 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa diproyeksikan sebesar Rp1.209.886,0 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp925.845,9 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp284.040,1 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Jawa, khususnya pada sektor-sektor prioritas, terutama pengembangan Wilayah Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. Pada sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk KIP Kuliah, program PIP, penyaluran BOS, TPG dan dosen non-PNS, bantuan pendanaan PTN BH, serta batuan pendanaan *competitive fund* (BOPTN Penelitian). Di bidang kesehatan dukungan fiskal diberikan antara lain berupa pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan, vaksin dan imunisasi, operasionalisasi dan pemeliharaan RS UPT pada 25 RS, obat-obatan dan bahan medis, pengadaan alat kesehatan, pembangunan dan pengembangan RS UPT vertikal Surabaya, serta bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Dukungan pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak, pembangunan pelabuhan, pembangunan fasilitas perkeretaapian, peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi, peningkatan Stasiun Tanah Abang, pembangunan bendungan seperti Bendungan Cijurey Provinsi Jawa Barat dan Bendungan Jragung di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan pengendali banjir disejumlah daerah.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Jawa diwujudkan melalui beberapa strategi utama, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Jawa sebagai pusat industri teknologi tinggi dan ekonomi kreatif yang berdaya saing global, mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan yang berpusat pada penguatan sektor pertanian dan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang dan penguatan ketahanan bencana. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Jawa. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Jawa tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Jawa diperkirakan mencapai Rp6,0 juta per kapita, dengan tidak termasuk program dukungan manajemen. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Jawa pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.4**.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Jawa pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; (2) pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur; (3) penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa; (4) pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat; (5) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (6) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (7) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (8) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (9) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (10) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

GAMBAR 3.4
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH JAWA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

* Sejumlah 850 unit madrasah masih dialokasikan terpusat

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal di Wilayah Jawa pada tahun 2026 diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa antara 5,6-6,1 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 6,4-6,9 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 83,3-92,3 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Jawa diharapkan turut menjaga kinerja pembangunan yang telah optimal dan mendukung pembangunan secara nasional.

3.10.3. Wilayah Kalimantan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, Wilayah Kalimantan diarahkan menjadi *superhub* ekonomi Nusantara. Pembangunan di wilayah ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pemerataan ekonomi wilayah timur Indonesia melalui pengembangan *superhub* serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Strategi tersebut didukung oleh pengembangan hilirisasi industri berbasis mineral dan sumber daya alam, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi IKN, serta pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan komoditas unggulan.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Kalimantan menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk sebanyak 17,6 juta jiwa atau 6,2 persen dari jumlah penduduk nasional. Dengan demografi masyarakat tersebut, pada tahun 2024, perekonomian Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,5 persen dengan nominal PDRB Rp1.815,1 triliun atau 8,2 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan Wilayah Kalimantan antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 27,3 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 15,5 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,5 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,2 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,1 persen.

Capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Rata-rata IPM di Wilayah Kalimantan mencapai 73,5 meningkat dari tahun sebelumnya, dengan tingkat IPM tertinggi berada pada Provinsi Kalimantan Timur dengan IPM senilai 78,8. Tingkat kemiskinan di Wilayah Kalimantan turun menjadi senilai 5,3 persen, atau turun 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 4,4 persen, turun 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Kalimantan turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,297 turun 4,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,259.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kalimantan. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Kalimantan mengalami peningkatan 72,0 persen dari Rp123.658,1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp212.675,5 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 8,4 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Kalimantan diproyeksikan sebesar Rp198.011,6 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp70.719,5 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp127.292,1 miliar.

GAMBAR 3.5
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH KALIMANTAN PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Implementasi dukungan fiskal melalui APBN pada tahun 2024 diberikan dalam upaya pengembangan dan pembangunan perekonomian di Wilayah Kalimantan seperti dalam rangka pembangunan di sektor prioritas. Dalam sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pada sejumlah pendidikan tinggi seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman dan Institut Teknologi Kalimantan, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan gedung pada UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, serta TPG dan dosen non-PNS. Selanjutnya, pada bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana Poltekkes Kalimantan Timur, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya, penyediaan alat laboratorium sesuai standar, pelatihan penurunan *stunting*, hingga komunikasi informasi edukasi terhadap obat dan pangan aman. Pada sektor infrastruktur, dukungan fiskal diberikan antara lain berupa pembangunan infrastruktur IKN, pembangunan jalan strategis, pengembangan Bandar Udara Long Apung Tahap III, Malinau, Kalimantan Utara, dan pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu peningkatan produktivitas, penguatan swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan produktivitas akan dicapai melalui pembangunan sumber daya manusia seperti sekolah dan rumah sakit berkualitas, serta modernisasi sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan. Penguatan swasembada pangan dan energi akan diwujudkan dengan mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai lumbung pangan nasional dan membangun infrastruktur energi terbarukan serta penyediaan air bersih. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terdorong melalui pembangunan IKN sebagai *superhub* ekonomi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekowisata, dan peningkatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung jalur logistik dan pemerataan ekonomi. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan

kualitas sumber daya manusia di Wilayah Kalimantan. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Kalimantan tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Kalimantan diperkirakan mencapai Rp8,6 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Kalimantan pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.5**.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Kalimantan tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan pusat aglomerasi baru untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan; (2) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pengembangan kawasan transmigrasi; (3) penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja; (4) penyediaan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses; (5) pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan dalam mendorong perwujudan hilirisasi SDA; (6) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (7) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (8) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (9) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; dan (10) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Kalimantan diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan antara 5,1-5,4 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 3,7-4,7 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 77,5-86,5 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Kalimantan diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas ketahanan pangan, serta mendukung peningkatan indeks kesehatan.

3.10.4. Wilayah Sulawesi

Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Wilayah Sulawesi diarahkan menjadi penunjang *superhub* ekonomi Nusantara dan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Untuk mendukung sasaran ini, strategi dan program prioritas pembangunan mencakup pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertambangan, percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), pengembangan wilayah metropolitan dan kawasan perkotaan sedang serta kecil, serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Pengembangan Wilayah Sulawesi perlu didukung antara lain melalui optimalisasi nilai tambah dari sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata serta dampak pengembangan industri terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Sulawesi menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 20,8 juta jiwa atau 7,4 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2024, perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar 6,2 persen dengan nilai PDRB sebesar

Rp1.568,8 triliun atau 7,1 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan Wilayah Sulawesi antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 22,0 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 18,7 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,0 persen. Selain berkontribusi besar terhadap PDRB Sulawesi, Sektor Industri Pengolahan juga merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2024, yaitu sebesar 12,0 persen.

Sejumlah capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 Tingkat IPM di Wilayah Sulawesi mencatatkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata IPM sebesar 72,3, dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan IPM senilai 75,0. Tingkat kemiskinan di Wilayah Sulawesi mengalami penurunan sebesar 9,5 persen dari tahun sebelumnya menjadi berada pada tingkat 9,1 persen. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT mengalami penurunan menjadi sebesar 3,6 persen, turun 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Sulawesi turut mencatatkan perbaikan, dengan rata-rata berada pada nilai 0,354 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,309.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sulawesi. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Sulawesi mengalami peningkatan 13,7 persen dari Rp143.383,2 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp162.982,5 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 7,3 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sulawesi diproyeksikan sebesar Rp156.994,8 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp63.343,4 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp93.651,4 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Sulawesi, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Di sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan pada 24 perguruan tinggi di seluruh provinsi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, TPG dan dosen non-PNS, pembangunan gedung pendidikan tinggi seperti di IAIN Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan, IAIN Manado Provinsi Sulawesi Utara, dan STAIN Majene Provinsi Sulawesi Barat, serta program KIP Kuliah dan PIP. Pada bidang kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, serta operasional dan pembangunan gedung layanan kesehatan ibu dan anak RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sedangkan pada sektor infrastruktur, dukungan fiskal diberikan antara lain berupa pembangunan bendungan Pemukkulu di Provinsi Sulawesi Selatan dan bendungan Budong-Budong di Provinsi Sulawesi Barat, pembangunan rumah susun hunian, pembangunan jalan strategis, serta penataan kawasan destinasi wisata Wakatobi serta Manado Likupang.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Sulawesi diarahkan pada tiga fokus utama yaitu peningkatan produktivitas berbasis potensi lokal, penguatan swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan produktivitas diharapkan tercapai melalui hilirisasi sumber daya mineral di kawasan industri terpadu, modernisasi sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, penguatan swasembada pangan didukung oleh pengembangan lumbung pangan

beserta infrastrukturnya dan swasembada energi difokuskan pada energi terbarukan, khususnya di daerah kepulauan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diwujudkan dengan memberdayakan ekonomi perdesaan dan daerah afirmasi, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses layanan dasar, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, serta mengelola multiancaman bencana geologi. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Sulawesi. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Sulawesi diperkirakan mencapai Rp7,8 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Sulawesi pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.6**.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Sulawesi tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) hilirisasi komoditas unggulan yang berbasis teknologi dan berkelanjutan; (2) pengembangan KEK, KI, DPP, dan sentra produksi berbasis sumber daya lokal; (3) peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan pariwisata; (4) pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi; (5) penguatan swasembada pangan; (6) pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan; (7) perluasan akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (8) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (9) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (10) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (11) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (12) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (13) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

GAMBAR 3.6
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH SULAWESI PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Sulawesi diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi antara 6,2-6,7 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8,2-9,0 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 70,0-79,0 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Sulawesi diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas ketahanan pangan, serta mendukung peningkatan indeks kesehatan.

3.10.5. Wilayah Bali – Nusa Tenggara

Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran pembangunan sebagai *superhub* pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara bertaraf internasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan optimalisasi diantaranya melalui penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah sektor-sektor potensial, dan pengembangan kinerja sektor pariwisata. Untuk menjawab tantangan tersebut, program dan pembangunan prioritas di Wilayah Bali–Nusa Tenggara mencakup: pengembangan KEK dan aglomerasi industri, penguatan ekosistem pariwisata berbasis budaya, bahari, petualangan, dan minat khusus yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif, pembangunan ekosistem ekonomi dan industri bernilai tinggi di wilayah metropolitan, serta penataan kawasan perkotaan kecil dengan karakter khusus.

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15,7 juta jiwa. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 persen terhadap penduduk Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,0 persen. PDRB Wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2024 sebesar Rp618,0 triliun atau sebesar 2,8 persen dari PDB Nasional. Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,2 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,2 persen. Sementara itu, sektor dengan persentase pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,7 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,7 persen.

Sejumlah capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Bali-Nusa Tenggara turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024. Rata-rata IPM di Wilayah Bali-Nusa Tenggara adalah sebesar 72,0 meningkat dari tahun sebelumnya. Tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi Bali dengan IPM senilai 77,8. Tingkat kemiskinan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara turun menjadi senilai 12,2 persen, atau turun 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT juga mengalami penurunan menjadi sebesar 2,5 persen, turun 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara turut mencatatkan perbaikan, yaitu rata-rata berada pada nilai 0,343, di mana Provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tingkat 0,316.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami peningkatan 8,9 persen dari Rp82.216,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp89.567,6 miliar pada tahun 2024,

dengan rata-rata kontribusi 4,1 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diproyeksikan sebesar Rp90.630,7 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp35.405,4 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp55.225,3 miliar.

Dukungan fiskal diberikan melalui APBN pada tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dalam sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan antara lain untuk TPG dan dosen non-PNS, penyediaan layanan pendidikan tinggi pada Universitas Udayana dan Universitas Nusa Cendana, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta pelaksanaan program KIP Kuliah dan PIP. Selanjutnya, pada sektor kesehatan antara lain berupa penyediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, pengadaan alat kesehatan, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah serta RS Umum Pusat Dr. Ben Mboi. Pada sektor infrastruktur dukungan fiskal yang diberikan antara lain berupa pembangunan bendungan Sidan, Temef, dan Manikin Meninting, pembangunan daerah irigasi Beringin Sila di Provinsi NTB, pembangunan jalan akses simpul transportasi di Provinsi NTT dan penataan kawasan destinasi wisata Labuan Bajo.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara diwujudkan melalui pengembangan ekosistem industri berbasis komoditas unggulan wilayah yang didukung oleh konektivitas logistik dan SDM yang berkualitas. Selain itu, fokus lainnya adalah penguatan ketahanan pangan, air, dan energi baru terbarukan, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di perkotaan dan daerah afirmasi, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan konservasi untuk memperkuat ketahanan bencana. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diperkirakan mencapai Rp6,4 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.7**.

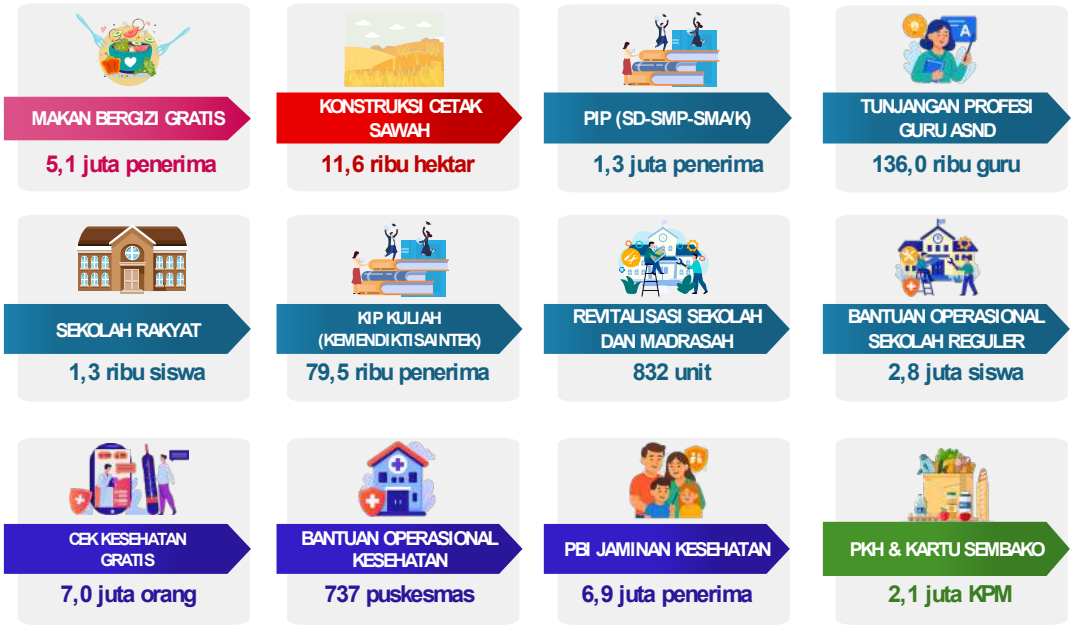
Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Bali–Nusa Tenggara pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata; (2) peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah, sistem pembelajaran jarak jauh, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pemerataan penyediaan tenaga pendidikan, tata kelola pelayanan pendidikan, pelestarian dan perlindungan budaya lokal, serta pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga; (3) peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; (4) pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi; (5) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (6) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (7) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; (8) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (9) pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara antara 5,2-5,7 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 10,3-11,0 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 76,7-85,7 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Bali-Nusa Tenggara diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi ekonomi, peningkatan indeks *wellbeing*, peningkatan produktivitas ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan.

3.10.6. Wilayah Maluku-Papua

Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029, Wilayah Maluku memiliki sasaran pembangunan untuk menjadi hub kemaritiman wilayah timur Indonesia dan pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif. Wilayah Maluku-Papua memiliki potensi besar seperti produksi tuna, cakalang, tongkol, potensi padi untuk ketahanan pangan, pangan lokal, potensi energi terbarukan, dan potensi sumber daya alam. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Wilayah Maluku-Papua perlu dukungan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan regional, khususnya makanan pokok selain hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas dan mutu serta sarana dan prasarana layanan dasar, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana transportasi yang mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, maupun udara.

GAMBAR 3.7
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja capaian indikator ekonomi di Wilayah Maluku-Papua pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2024, Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah penduduk sebanyak 9,0 juta jiwa atau 3,2 persen dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Wilayah Maluku-Papua mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 7,8 persen dengan nominal PDRB sebesar Rp529,5 triliun atau 2,7 persen dari PDB nasional. Sektor unggulan di Wilayah Maluku-Papua antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian dengan persentase kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 30,0 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 13,1 persen, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,2 persen. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi tahun 2024 di Wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 22,9 persen, serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,8 persen.

Sejumlah capaian indikator kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku-Papua turut menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 seperti ditunjukkan pada peningkatan IPM menjadi 66,5 persen meningkat dari tahun sebelumnya dan penurunan tingkat kemiskinan di Wilayah Maluku-Papua turun menjadi senilai 18,6 persen, turun 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, tingkat pengangguran yang diukur dengan TPT berada pada rata-rata sebesar 4,4 persen. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada Wilayah Maluku-Papua memiliki rata-rata berada pada nilai 0,344 dengan provinsi yang memiliki rasio gini terendah adalah Provinsi Maluku sebesar 0,291.

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak lepas dari implementasi dukungan fiskal yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Maluku-Papua. Pada periode 2021-2024, realisasi Belanja K/L dan TKD pada Wilayah Maluku-Papua mengalami peningkatan 12,0 persen dari Rp122.229,1 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp136.905,3 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi 6,3 persen terhadap Belanja K/L dan TKD secara nasional. Pada tahun 2025, realisasi Belanja K/L dan TKD di Wilayah Maluku-Papua diproyeksikan sebesar Rp129.762,5 miliar dengan perkiraan realisasi Belanja K/L senilai Rp41.218,0 miliar dan perkiraan realisasi TKD senilai Rp88.544,4 miliar.

Dukungan fiskal melalui APBN pada tahun 2024 diberikan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Wilayah Maluku-Papua, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Dukungan fiskal di sektor pendidikan dialokasikan antara lain untuk layanan pendidikan perguruan tinggi seperti Universitas Pattimura, Universitas Papua, Universitas Cendrawasih, dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, pembangunan gedung pendidikan tinggi IAIN Fattahul Muluk Papua, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta TPG dan dosen non-PNS. Dukungan fiskal bidang kesehatan antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana Poltekkes Sorong, Poltekkes Ternate, Poltekkes Jayapura, dan Poltekkes Maluku, penyediaan obat-obatan dan bahan medis, pelatihan penurunan *stunting*, operasional dan pemeliharaan RS Umum Pusat Dr. J. Leimina Ambon. Pada sektor infrastruktur antara lain berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan trans Papua Merauke-Sorong serta jalan di wilayah 3T Maluku-Papua, pembangunan bendungan Way Apu, pembangunan pasar sentral Sanggeng di Manokwari, pengembangan bandar udara seperti bandara Rendani Manokwari, Mozes-Kilangin Timika, Sultan Babullah Ternate, Utarom Kaimana, Kuabong Kao Halmahera Utara, Morotai, serta pembangunan bandar udara Siboru Fak-Fak. Berbagai dukungan

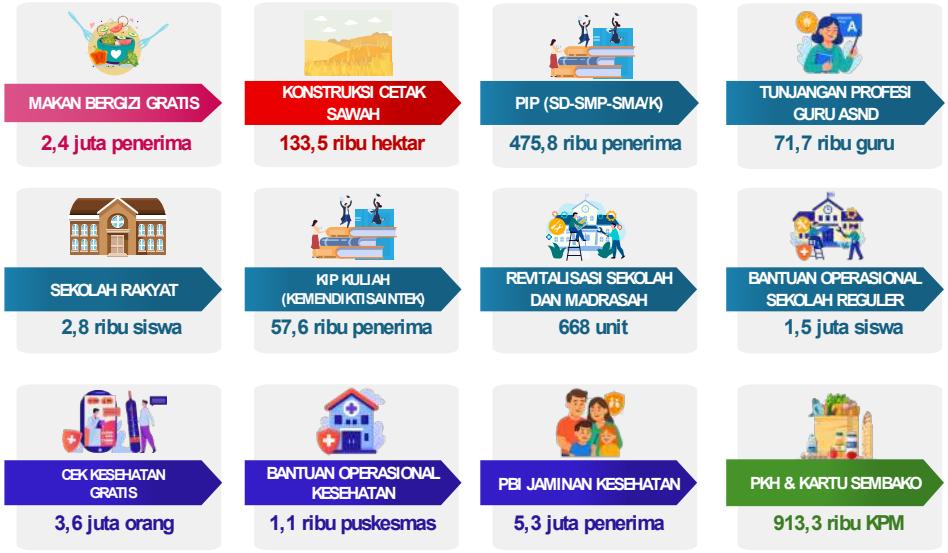
fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya pemerintah untuk membangun daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah.

Pada tahun 2026, pembangunan Wilayah Maluku-Papua diwujudkan melalui beberapa strategi utama yaitu Maluku yang diarahkan menjadi "*Hub* Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia", dengan fokus pada hilirisasi industri nikel dan gas bumi serta pengembangan sentra industri berbasis komoditas maritim unggulan. Sementara itu, Papua yang diarahkan pada "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua Menuju Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif", melalui pengembangan industri berbasis sumber daya alam seperti mineral dan migas serta penataan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB). Pembangunan Wilayah Maluku-Papua turut menekankan pentingnya pengembangan konektivitas logistik, peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk ketahanan bencana, serta perlindungan hukum atas masyarakat adat. Selain itu, diperlukan dukungan fiskal untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Wilayah Maluku-Papua. Untuk mendukung kebijakan pembangunan Wilayah Maluku-Papua tersebut, alokasi Belanja K/L dan TKD pada tahun 2026 di Wilayah Maluku-Papua diperkirakan mencapai Rp14,2 juta per kapita. Proyeksi sejumlah target *output* strategis melalui Belanja K/L dan TKD di Wilayah Maluku-Papua pada tahun 2026 antara lain disajikan dalam **Gambar 3.8**.

Highlight intervensi kewilayahan dan sarana prasarana Wilayah Maluku-Papua Tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) pengembangan ekosistem, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata; (2) pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi kawasan; (3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penguatan produksi dan pengembangan skala industri; (4) peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang kontekstual; (5) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (6) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau; (7) pemenuhan infrastruktur layanan dasar; (8) penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat; (9) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern; (10) pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif; dan (11) peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Dengan dukungan yang Pemerintah berikan, kebijakan fiskal sesuai KEM PPKF 2026 di Wilayah Maluku-Papua diharapkan dapat mendorong rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku-Papua antara 6,6-7,3 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat didorong untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 17,1-17,8 persen, SPM pendidikan tinggi dalam target 61,3-70,3 persen, kenaikan indeks kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani. Kebijakan fiskal di Wilayah Maluku-Papua diharapkan turut memberikan akselerasi bagi efisiensi dan kapabilitas ekonomi, peningkatan indeks *wellbeing*, peningkatan produktivitas ketahanan pangan terutama pertanian, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

GAMBAR 3.8
PROYEKSI TARGET *OUTPUT* STRATEGIS MELALUI BELANJA K/L DAN TKD DI WILAYAH MALUKU-PAPUA PADA TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 4
Belanja Negara

BAB 4
BELANJA NEGARA

4.1. Pendahuluan

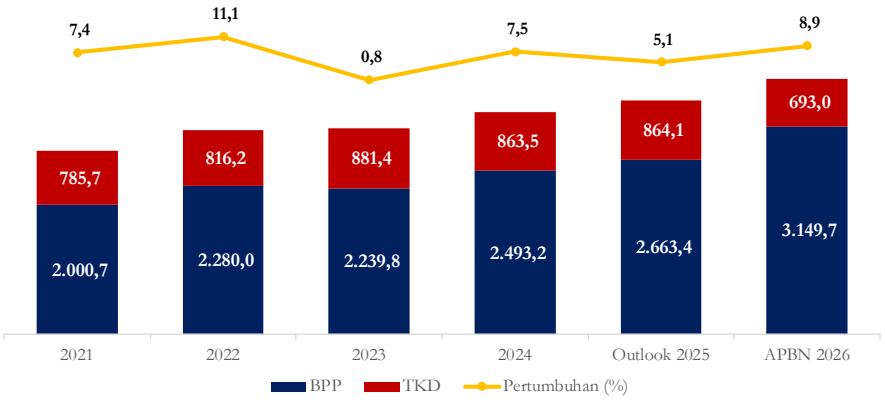
Kondisi perekonomian global dan nasional yang dinamis membuat peran belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal semakin strategis. Belanja negara berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitasnya. Belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang ada sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing.

Belanja Negara pada periode 2021-2025 telah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui penguatan kualitas belanja. Pada kurun waktu 2021-2024 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen dengan tingkat kemiskinan turun dari 9,03 persen di tahun 2024 menjadi 8,47 persen di tahun 2025 (data BPS per Maret 2025) dan tingkat pengangguran turun dari 4,91 persen di tahun 2024 menjadi 4,85 persen di tahun 2025 (data BPS per Agustus). Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah melalui belanja negara dalam meredam dampak negatif akibat dinamika perekonomian global dan domestik sehingga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga.

Belanja Negara mengalami peningkatan dari Rp2.786.413,8 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.527.506,1 miliar pada *outlook* APBN tahun 2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,1 persen. Pada tahun 2026, Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp3.842.728,4 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.149.733,4 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp692.995,0 miliar.

Pemanfaatan belanja negara dilaksanakan seoptimal mungkin agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja negara dengan penguatan belanja yang efektif (*spending better*) melalui kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN. Perkembangan Belanja Negara tahun 2021-2026 ditampilkan dalam **Grafik 4.1**

GRAFIK 4.1
PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Belanja Negara tahun 2026 secara umum diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Belanja Negara akan difokuskan untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" dengan kebijakan yang diarahkan antara lain untuk:

1. meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif;
2. memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa antara lain: ketahanan pangan, ketahanan energi, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
3. mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara;
4. melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; serta
5. memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

4.2. Belanja Pemerintah Pusat

4.2.1. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2021-2025 dan Anggaran Tahun 2026

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dari Rp2.000.703,8 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.493.223,9 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,6 persen. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan menghadapi dinamika perekonomian domestik dan global. Selanjutnya, untuk tahun 2025 BPP diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp2.663.444,6 miliar meningkat 6,8 persen dari tahun 2024.

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, kualitas BPP terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan utama yang diambil pemerintah antara lain:

1. peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan akselerasi sistem perlindungan sosial;
2. dukungan percepatan transformasi ekonomi antara lain melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan institusi;
3. penguatan reformasi subsidi dan efektivitas program perlinsos sehingga lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

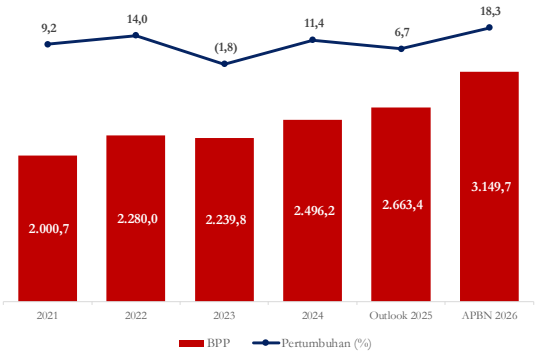
Pada tahun 2026 untuk mendukung tema kebijakan fiskal "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi", BPP akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah dengan kebijakan antara lain:

1. mengoptimalkan Belanja Pegawai untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan;
2. memprioritaskan Belanja Barang untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat;
3. mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional;
4. mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; serta

5. melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp3.149.733,4 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) penguatan ketahanan pangan; (2) penguatan ketahanan energi; (3) pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG); (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan (melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda); (5) perluasan akses dan layanan kesehatan masyarakat; (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (7) penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta; dan (8) akselerasi investasi dan perdagangan global. Perkembangan belanja pemerintah pusat dapat dilihat dalam **Grafik 4.2.**

GRAFIK 4.2
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1.1. Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) atau belanja non-K/L. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun anggaran 2026 terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.510.546,8 miliar dan belanja non-K/L sebesar Rp1.639.186,6 miliar. BPP menurut organisasi tahun 2025 dan tahun 2026 dapat dilihat dalam **Tabel 4.1**.

TABEL 4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2025–2026
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2025	APBN 2026
Belanja K/L	1.275,6	1.510,5
Belanja Non-K/L	1.387,8	1.639,2
Jumlah	2.663,4	3.149,7

Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1.1.1. Belanja Kementerian/Lembaga

Selama periode tahun 2021-2024, realisasi belanja K/L meningkat dari Rp1.190.813,3 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp1.324.004,2 miliar pada tahun anggaran 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 3,6 persen. Pada periode tahun 2021–2024, sebagian besar anggaran K/L digunakan untuk menangani dan memulihkan dampak Covid-19 hingga tahun 2022, meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan daya saing nasional, mendorong kelancaran aktivitas ekonomi, menyediakan perlindungan sosial sebagai wujud keadilan dan pengentasan kemiskinan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pelayanan dasar dan produktivitas.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2025, belanja K/L diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.275.634,2 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pelaksanaan program MBG; (2) penyaluran bantuan kepada masyarakat antara lain melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan iuran bagi peserta PBI JKN; (3) pembangunan lumbung pangan serta pengembangan jaringan irigasi dan bendungan; (4) revitalisasi rumah sakit dan cek kesehatan

gratis; (5) pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, non-Alutsista, dan alat material khusus (Almatsus) Polri; serta (6) pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya.

Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2025 antara lain: (1) peningkatan peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS); (3) peningkatan indeks PKH dan Kartu Sembako, optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta perbaikan ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); (4) percepatan pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan; (5) pemberian bantuan pendidikan di berbagai jenjang melalui PIP, Kartu Indonesi Pintar (KIP) Kuliah, dan beasiswa LPDP; (6) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar; (7) pengembangan lumbung pangan serta pengembangan jaringan irigasi dan bendungan; dan (8) pengadaan/pemeliharaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan dan menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain: (1) mendukung reformasi birokrasi sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatan kualitas pelayanan kepada publik; (2) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan TIK; (3) mendukung pendanaan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional prioritas untuk pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas secara selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan integrasi data penerima manfaat program perlinsos secara bertahap dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan.

Presiden menekankan pentingnya program kerja yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi antar K/L di tengah situasi global yang tidak menentu dan kondisi ruang fiskal yang cukup terbatas. Beberapa hal yang bersifat strategis dan krusial harus diupayakan secepat-cepatnya melalui pengoptimalan belanja K/L, antara lain dukungan untuk mewujudkan: (1) swasembada pangan dan energi; (2) program makan bergizi bagi anak sekolah, balita, dan ibu hamil/menyusui; dan (3) pentingnya penggunaan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan dan melanjutkan reformasi kesehatan. Selain itu, dukungan kebijakan anggaran untuk memperkuat penegakan hukum yang tegas khususnya untuk penanganan kasus judi *online*, narkoba, korupsi dan pencucian uang.

Untuk mengoptimalkan kondisi ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Secara umum efisiensi difokuskan antara lain pada: (1) belanja operasional perkantoran; (2) belanja pemeliharaan; (3) perjalanan dinas; dan (4) pengadaan peralatan dan mesin.

Kebijakan efisiensi di tahun 2025 bertujuan untuk lebih memfokuskan anggaran dan mendorong kegiatan *pro growth* yang mendukung penguatan beberapa agenda pembangunan prioritas, antara lain ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan potensi sumber devisa dan kemampuan daya saing melalui terobosan pengoptimalan pemanfaatan teknologi. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan *output* prioritas pada beberapa bidang pembangunan periode tahun 2021-2025 antara lain sebagai berikut:

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan dari bayi dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah juga melaksanakan program JKN untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selama periode tahun 2021-2025, *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui jaminan kesehatan mencapai 93,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2025; (2) pendayagunaan dokter spesialis mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.278 orang dan ditargetkan bertambah sejumlah 670 orang pada tahun 2025; (3) jumlah sampel makanan serta obat, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa oleh UPT mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 322,7 ribu produk dan diperkirakan bertambah sejumlah 59 ribu produk pada tahun 2025; dan (4) fasilitas dan pembinaan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) pada keluarga yang memiliki anak baduta naik dari 3,9 juta keluarga pada tahun 2021 diperkirakan terealisasi 8,0 juta keluarga pada tahun 2025.

Selain itu, program unggulan Pemerintah pada tahun 2025 di bidang kesehatan antara lain: (1) cek kesehatan gratis (CKG) dengan target 60 juta orang; (2) skrining TB sebanyak 7,6 juta orang; dan (3) revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan target 20 rumah sakit.

Selanjutnya, program-program pada **bidang perlindungan sosial** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa *output* prioritas selama periode tahun 2021-2025 antara lain: (1) jumlah penerima bansos BPNT sebanyak 18,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021 dan pada tahun 2025 diperkirakan terealisasi sebanyak 18,3 juta KPM melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun 2021; (3) pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebanyak 5.208 KPM pada tahun 2022 dan pada tahun 2025 diperkirakan terealisasi sebanyak 10.000 KPM; dan (4) pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.500 KPM pada tahun 2021 dan pada tahun 2025 diperkirakan terealisasi sebanyak 2.800 KPM.

Mulai tahun 2025, Pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menjadikan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan sosial dan ekonomi yang bertujuan agar program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, pada tahun 2025 Pemerintah mulai melaksanakan pendirian sekolah rakyat berasrama yang telah beroperasi sebanyak 166 sekolah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sementara itu, **pembangunan bidang pendidikan** yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan SDM Indonesia merupakan modal utama pembangunan nasional dan

menjadi faktor yang penting untuk menuju Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Beberapa *output* prioritas pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama periode tahun 2021–2025 yang pada tahun 2025 dialokasikan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 18,1 juta siswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18,6 juta siswa pada tahun 2025; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 1,1 juta mahasiswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1,0 juta mahasiswa pada tahun 2025; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sebanyak 255,1 ribu orang pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 478,7 ribu orang pada tahun 2025. Adapun pada Kementerian Agama, *output* prioritasnya antara lain: (1) siswa yang mendapatkan PIP sebanyak 2,1 juta siswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2,5 juta siswa pada tahun 2025; (2) mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak 55,7 ribu mahasiswa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 130,3 ribu mahasiswa pada tahun 2025; dan (3) guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi diperkirakan terealisasi sebanyak 225,5 ribu orang pada tahun 2025.

Para tahun 2025, program unggulan Pemerintah di bidang Pendidikan antara lain: (1) pembangunan empat SMA Unggul Garuda dan pengembangan dana abadi SMA Unggul Garuda; (2) program sekolah rakyat sebanyak 166 sekolah; (3) pemberian makan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima manfaat; dan (4) revitalisasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.560 sekolah dan madrasah.

Pembangunan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah dengan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Pembangunan bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan utama, baik pertanian maupun perikanan, dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta pengairan/irigasi. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menyediakan akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beberapa *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode tahun 2021-2025 antara lain: (1) pengembangan kawasan padi naik dari 446,2 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 2,6 juta ha pada *outlook* tahun 2025; (2) bantuan alsintan pra panen sub sektor tanaman pangan naik dari 25.134 unit pada tahun 2021 menjadi 75.731 unit pada *outlook* tahun 2025; (3) optimasi lahan pertanian naik dari 29,6 ribu ha pada tahun 2021 menjadi 500 ribu ha pada target tahun 2025; dan (4) penyediaan irigasi perpompaan naik dari 688 unit pada tahun 2021 menjadi 775 unit pada target tahun 2025.

Pada tahun 2025, program unggulan dibidang ketahanan pangan antara lain: (1) lumbung pangan nasional dengan target antara lain cetak sawah 225.000 ha dan bantuan alsintan prapanen subsektor tanaman pangan 75.731 unit; (2) pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan target 100 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia; dan (3) pembangunan Pergaraman Nasional melalui pendekatan terintegrasi dengan target antara lain revitalisasi lahan garam 1.000 ha dan bantuan prasarana usaha garam 17 unit.

Pada **bidang Pertahanan Semesta** upaya Pemerintah untuk memperkuat bidang tersebut melalui berbagai kegiatan prioritas pada beberapa K/L antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, BIN, MA, Kementerian Hukum, Kementerian HAM,

dan Kejaksaan RI. *Output* strategis pada bidang Pertahanan Semesta pada periode tahun 2021 sampai dengan 2025 meliputi: (1) bidang pertahanan, antara lain (a) pengadaan alutsista; (b) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (c) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (d) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan. (2) bidang ketertiban dan keamanan, antara lain (a) sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan; (b) sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar; (c) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme; dan (d) peningkatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dalam rangka penguatan ketahanan siber dan sandi nasional. (3) bidang hukum, antara lain (a) pencegahan pelanggaran hukum dan penanganan kriminalitas; (b) penindakan pidana narkoba dan obat terlarang; dan (c) penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L diarahkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Belanja K/L

Kebijakan Belanja K/L merupakan bagian dari Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan Belanja K/L tersebut antara lain:

a. Meningkatkan kualitas Belanja K/L agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel seiring dengan optimalisasi pemanfaatan TIK/digitalisasi birokrasi;
b. Pemanfaatan Belanja K/L sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP serta tema kebijakan fiskal tahun anggaran 2026;
c. Menjaga kebutuhan minimum Belanja Operasional pemerintahan, arahan Presiden, Prioritas Nasional dan belanja yang bersifat wajib dan/atau *mandatory*;
d. Memprioritaskan agenda Presiden untuk menjaga *mandatory spending,* dengan tetap melakukan langkah antisipasi dalam hal diperlukan penataan ulang/revisi belanja agar lebih efisien dan efektif dengan menggunakan basis kebijakan efisiensi 2025;
e. Memperhitungkan tambahan belanja pegawai dan operasional minimum untuk K/L yang mengalami transisi pasca restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
f. Menjadikan intervensi belanja sebagai stimulus/dukungan fasilitasi kebijakan untuk beberapa kegiatan yang bernilai tambah tinggi dan mampu menjaga ketahanan ekonomi karena memiliki karakteristik skala ekonomi yang luas, beragam, tersebar berkelanjutan, dan melibatkan sektor swasta;
g. Menjaga harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD serta komponen APBN yang lain;
h. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri (TKDN), terutama dalam pengadaan barang/jasa dalam negeri;
i. Menyelesaikan kegiatan prioritas Presiden tahun 2025;
j. Mendukung peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program/kegiatan melalui penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten; dan
k. Memanfaatkan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan non Rupiah Murni (non-RM) yang bersifat saling melengkapi dan merupakan bagian dari strategi pendanaan dalam APBN untuk mencapai target Prioritas Nasional.

2. Kebijakan Khusus Belanja K/L

Memanfaatkan belanja K/L dalam rangka penguatan tema/bidang/sektor/prioritas pembangunan yang mendukung Prioritas Nasional dan Arahan Presiden, melalui upaya intervensi utama pada bidang: (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi;

(3) percepatan perluasan MBG; (4) pendidikan; (5) kesehatan; (6) pembangunan desa, pengembangan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); (7) pertahanan semesta; (8) perlindungan sosial; dan (9) percepatan investasi dan perdagangan global dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani/ nelayan. Kebijakan anggaran Ketahanan Pangan tahun 2026 antara lain:

1) Meningkatkan produktivitas, antara lain:
   a) lntensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian;
   b) modernisasi sistem pertanian/ perikanan;
   c) penguatan infrastruktur pertanian; dan
   d) pembangunan pergaraman nasional.
2) Menjaga stabilitas harga pangan, antara lain:
   a) penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan; dan
   b) penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif.
3) Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, antara lain:
   a) bantuan sarana-prasarana pertanian/ perikanan; dan
   b) akses permodalan dan perlindungan usaha.

b. Bidang Ketahanan Energi

Bidang ketahanan energi diarahkan untuk peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan anggaran ketahanan energi tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan *lifting* migas, antara lain:
   a) memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif memproduksi tetapi belum secara resmi ditutup atau *idle well*;
   b) optimasi sumur-sumur produktif dengan teknologi baru dan mengeksplorasi cadangan minyak baru.
2) Mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain:
   a) transisi energi dalam ekosistem ketenagalistrikan; dan
   b) pengembangan biodiesel.
3) Mendukung kebijakan Subsidi energi dan kompensasi tepat sasaran.

c. Bidang Percepatan Perluasan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Bidang Percepatan Perluasan MBG diarahkan untuk penguatan kualitas pelaksanaan program, kolaborasi lintas K/L dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator, dan penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil. Kebijakan anggaran percepatan perluasan MBG tahun 2026 antara lain:

1) Penguatan kualitas pelaksanaan program, antara lain dengan:
   a) memastikan terpenuhinya kebutuhan makanan yang sehat, dengan kalori dan komposisi gizi yang seimbang;
   b) memastikan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan terjaga;
   c) melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program MBG terhadap gizi dan kesehatan anak;
   d) melakukan evaluasi secara ketat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program; dan
   e) melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

2) Kolaborasi lintas K/L dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator untuk memastikan bahwa kolaborasi lintas K/L mampu untuk mempercepat penurunan angka *stunting* secara bertahap, dengan mensinergikan program-program K/L terkait dengan program MBG.
3) Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil, antara lain dengan:
   a) memberdayakan UMKM sebagai pemasok bahan makanan, seperti sayuran dari petani lokal atau produk olahan makanan tradisional;
   b) memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi;
   c) menjadikan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pelibatan tenaga kerja tambahan dalam program MBG; dan
   d) memberikan akses kemudahan pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas UMKM.

d. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing guna merespon berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan anggaran pendidikan tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah;
2) Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat;
3) Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
4) Pemberian pelatihan intensif untuk guru berbasis standar pengajaran yang lebih berkualitas tinggi;
5) Peningkatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif, salah satunya dengan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui program MBG;
6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan;
7) Mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
8) Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

e. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Kebijakan anggaran kesehatan tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui peningkatan efektivitas program JKN;
2) Peningkatan akses, cakupan dan kualitas CKG;
3) Percepatan penuntasan tuberkulosis;
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan primer melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan layanan kesehatan rujukan melalui revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah;
5) Pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan
6) Pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

f. Bidang Pembangunan Desa, Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Bidang Pembangunan Desa, Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing dan kemandirian finansial. Kebijakan

anggaran pembangunan desa, pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2026 antara lain:

1) Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM melalui pengembangan sektor produksi;
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM UMKM;
3) Penguatan sistem pengawasan dan perluasan akses terhadap perizinan;
4) Pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, digitalisasi koperasi dan UMKM;
5) Mendorong peningkatan mutu produk dan penyediaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif;
6) Inkubasi usaha, penyediaan platform digital, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; dan
7) Integrasi dan pembaruan Basis Data Tunggal UMKM.

g. Bidang Pertahanan Semesta

Bidang Pertahanan Semesta diarahkan untuk memperkuat pertahanan, menjaga ketertiban dan keamanan serta memperkuat bidang hukum. Kebijakan anggaran pertahanan semesta tahun 2026 antara lain:

1) Penguatan pertahanan/keamanan melalui modernisasi/harwat alutsista/ alpalhankam/ almatsus;
2) Peningkatan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan produksi dalam negeri;
3) Pencegahan/penindakan terhadap gangguan terorisme, kejahatan siber, sandi, dan sinyal;
4) Pencegahan/penindakan jaringan narkotika, tindak pidana korupsi dan pencucian uang; dan
5) Pelaksanaan operasi pertahanan dan keamanan.

h. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kebijakan anggaran perlindungan sosial tahun 2026 antara lain:

1) Meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN;
2) Penyaluran bantuan sosial yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan;
3) Mendorong kemandirian ekonomi antara lain melalui akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha; dan
4) Mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

i. Bidang Percepatan lnvestasi dan Perdagangan Global

Bidang Percepatan lnvestasi dan Perdagangan Global diarahkan untuk memberikan nilai tambah, peningkatan daya saing, dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan anggaran percepatan investasi dan perdagangan global tahun 2026 antara lain:

1) Percepatan hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis sumber daya alam untuk percepatan ekonomi (tambang mineral, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan minyak bumi);
2) Pengembangan *Online Single Submission* (OSS) untuk memfasilitasi penerbitan berbagai izin usaha secara *online* dan terintegrasi;
3) Penyusunan dan promosi peta peluang investasi berbasis kewilayahan;
4) Peningkatan penerapan standardisasi industri;
5) Peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
6) Penguatan swasembada air, untuk memperluas akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat, antara lain melalui

peningkatan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Penguatan tema/sektor/bidang prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas didukung dengan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital, berorientasi pelayanan, akuntabel dan berintegritas.

BOKS 4.1
Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan

Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, sebagaimana dimandatkan dalam RPJPN tahun 2025–2045 dan RPJMN tahun 2025–2029. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pembangunan kesetaraan gender diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta memperkuat kelembagaan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pengambilan keputusan di seluruh lini. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan peningkatan kesetaraan gender difokuskan pada: (1) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (2) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (3) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (4) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan (5) penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, seluruh K/L diwajibkan mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dalam perencanaan dan penganggaran program, kegiatan, dan rincian *output* melalui penyusunan *Gender Action Budget* (GAB) serta penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Langkah ini bertujuan untuk memastikan alokasi belanja negara memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Belanja K/L dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp1.510.546,8 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan non Rupiah Murni (non-RM). Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk: (1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek *multiyears*; (3) penguatan alutsista/almatsus; (4) MBG; (5) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung; (6) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (7) meningkatkan produktivitas pangan antara lain melalui program cetak sawah serta optimalisasi lahan pertanian; (8) pembangunan Pergaraman Nasional; (9) CKG; serta (10) PKH dan kartu sembako menggunakan DTSEN.

Selanjutnya sumber dana Belanja K/L dalam tahun anggaran 2026 terdiri atas Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, antara lain: (1) PNBP akan digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan imigrasi, layanan jasa hukum, dan pengelolaan perijinan pertambangan mineral dan batubara; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana perkebunan, pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan layanan operasional UPT BLU; (3) PLN digunakan antara lain untuk: (a) *Strengthening Indonesia's Health Care Referral Network* (SIHREN); (b) proyek pengembangan proyek tol Semarang-Demak terintegrasi dengan tanggul laut; (c) proyek konstruksi jalan tol akses Patimban; dan (d) proyek sistem keamanan perbatasan nasional; (4) PDN digunakan antara lain untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang Seksi III dan modernisasi alutsista; dan (5) SBSN digunakan antara lain untuk: (a) pembangunan jalan perbaikan Geometrik Bts. Kota Singaraja – Mengwitani; (b) preservasi jalan Koppe – Taccipi Bts. Kota Watampone; (c) rehabilitasi daerah irigasi Cikunten II; (d) pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa (RSUA) di Kab. Jembrana Bali; dan (e) revitalisasi dan pengembangan asrama haji. Rincian belanja K/L menurut sumber dana dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

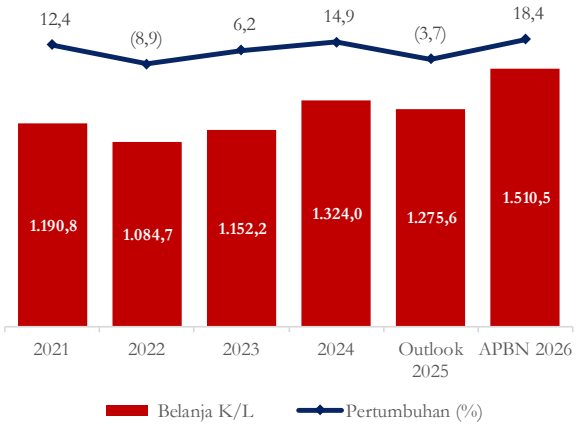
TABEL 4.2
BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2025-2026
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2025	APBN 2026
I. Rupiah Murni	**993,2**	**1.300,4**
II. Non Rupiah Murni	**282,4**	**210,1**
a. Rupiah Murni Pendamping	4,4	2,4
b. Pagu Penggunaan PNBP dan BLU	100,5	99,1
c. Pinjaman dan Hibah	163,1	93,7
d. SBSN	14,4	14,9
Belanja K/L	**1.275,6**	**1.510,5**

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja K/L tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.3**. Sedangkan rincian anggaran belanja K/L pada APBN tahun anggaran 2026 menurut organisasi disajikan dalam **Tabel 4.3**.

GRAFIK 4.3
PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4.3
BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI TA 2026
(triliun rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2026
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1,1
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
	002.01	SEKRETARIAT JENDERAL	3,4
	002.02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,5
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,8
4	005	MAHKAMAH AGUNG	14,8
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	20,3
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,6
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	7,8
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	10,2
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	187,1 *
10	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	52,0
11	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	40,1
12	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,5
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10,1
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28,5
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	114,0
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	88,9
17	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3,9
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	84,4
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,0
20	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,5
21	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,2
22	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,3
23	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,2
24	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,4
25	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	16,7
26	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	3,5
27	054	BADAN PUSAT STATISTIK	6,9
28	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	2,6
29	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	9,5
30	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,4
31	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8,6
32	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	146,1
33	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,2
34	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,2
35	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0,8
36	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,5
37	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,6
38	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,2
39	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,7
40	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3,5
41	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0,4
42	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,3
43	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2,3
44	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2
45	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1

46	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	
47	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,3	
48	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,6	
49	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,4	
50	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,4	
51	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,2	
52	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,6	
53	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1,8	
54	100	KOMISI YUDISIAL	0,2	
55	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0,5	
56	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	0,5	
57	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	0,2	
58	107	BADAN SAR NASIONAL	1,6	
59	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,2	
60	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,3	
61	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,5	
62	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,5	
63	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,7	
64	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2,5	
65	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,0	
66	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,2	
67	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,04	
68	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1,8	
69	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	0,4	
70	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	0,3	
71	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	6,1	
72	125	BADAN PANGAN NASIONAL	0,2	
73	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6,3	
74	127	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,8	
75	128	BADAN GIZI NASIONAL	268,0	*
76	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	0,4	
77	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	0,2	
78	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	0,2	
79	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	0,3	
80	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,3	
81	135	KEMENTERIAN HUKUM	4,2	
82	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	0,7	
83	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	18,8	
84	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	56,7	
85	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	61,9	
86	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	1,5	
87	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	0,6	
88	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	0,6	
89	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6,0	
90	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,4	
91	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	118,5	
92	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,9	
93	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,9	
94	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	0,5	
95	149	KEMENTERIAN KOPERASI	1,0	
96	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	0,5	
97	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,5	
98	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,9	
JUMLAH			**1.510,5**	

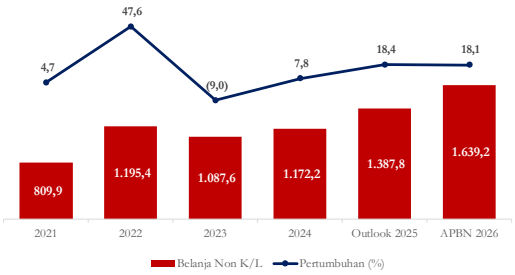
*) Sebagian dicadangkan

Sumber : Kementerian Keuangan

4.2.1.1.2. Belanja non Kementerian/ Lembaga

Perkembangan belanja non-K/L tahun 2021-2024 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 13,1 persen dari Rp809.890,4 miliar di tahun anggaran 2021 menjadi Rp1.172.219,7 miliar di tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025 belanja non-K/L diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.387.810,4 miliar atau meningkat sebesar 18,4 persen dibanding tahun anggaran 2024. Perkembangan belanja non-K/L tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.4.**

GRAFIK 4.4
PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun anggaran 2026, belanja non-K/L dialokasikan sebesar Rp1.639.186,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendukung UMKM dan petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana antisipatif antara lain untuk penanganan bencana.

Secara lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1.2.1. Program Pengelolaan Utang

Pembayaran bunga utang mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas Pinjaman dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran pembayaran beban bunga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara inheren, beban bunga utang terdampak risiko yang bersumber dari volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga. Faktor lain yang turut mempengaruhi beban bunga adalah sentimen pasar atas instrumen surat berharga negara, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan kondisi perekonomian terkini.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pembayaran bunga utang pada level yang efisien dan terkendali melalui kebijakan pengelolaan utang yang *prudent*, terukur, dan berbasis manajemen risiko. Dalam merancang strategi pembiayaan, Pemerintah selalu mempertimbangkan keseimbangan antara biaya utang dan tingkat risiko agar tidak membebani fiskal, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Untuk menjaga beban bunga tetap terkendali, Pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan yang efisien dan mengoptimalkan struktur portofolio utang, baik dari sisi tenor maupun jenis instrumen, guna menekan volatilitas biaya utang akibat perubahan suku bunga pasar. Pemerintah juga berkomitmen mengendalikan belanja bunga utang melalui kebijakan disiplin fiskal yang didukung dengan upaya meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pembayaran bunga utang, Pemerintah terus mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna membentuk pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam, aktif, dan

likuid. Upaya ini dilakukan melalui penguatan tiga pilar utama penopang pasar SBN, yaitu dari sisi *demand*, *supply*, dan infrastruktur pasar. Dari sisi *demand*, Pemerintah secara aktif memperluas basis investor melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan hubungan kelembagaan. Pemerintah juga menjalin sinergi yang erat dengan pelaku pasar melalui komunikasi intensif, penyediaan informasi yang transparan, dan riset berkala. Dari sisi *supply*, Pemerintah memprioritaskan penerbitan utang yang memperkuat basis pembiayaan domestik, termasuk mengutamakan penerbitan SBN di pasar dalam negeri, melakukan pengelolaan portofolio secara aktif melalui strategi *liability management*, serta terus mendorong inovasi dan diversifikasi instrumen untuk memenuhi preferensi investor. Sementara dari sisi infrastruktur, Pemerintah mengoptimalkan peran mitra distribusi dan dealer utama SBN, mendukung pengembangan *electronic trading platform*, serta menyempurnakan regulasi dan tata kelola pasar bersama otoritas terkait guna meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar SBN domestik.

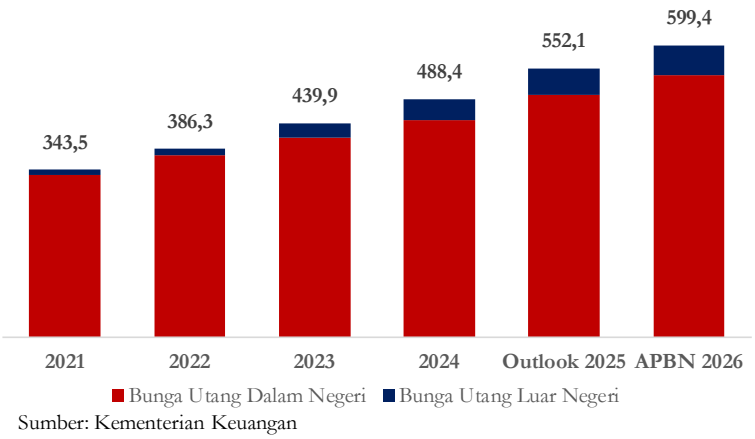
Secara singkat, kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang;
2. Mendorong efisiensi bunga utang melalui pengelolaan portofolio yang optimal serta penerbitan utang secara fleksibel dan oportunistis dari sisi *size*, *timing*, tenor, mata uang dan instrumen; dan
3. Mendorong pengembangan dan pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Dalam APBN tahun anggaran 2026 pembayaran bunga utang dialokasikan sebesar Rp599.440,9 miliar, naik 8,6 persen dari *outlook* pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2025. Jumlah tersebut terdiri atas: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp538.701,3 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp60.739,6 miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2026 tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun anggaran 2025 yang sebesar 13,0 persen (terhadap realisasi pembayaran bunga utang tahun anggaran 2024).

Perkembangan pembayaran bunga utang pada tahun 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.5.**

GRAFIK 4.5
PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

4.2.1.1.2.2. Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa dengan harga jual yang terjangkau, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

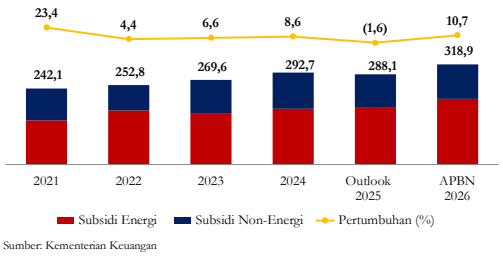
Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2021-2025 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Dalam periode 2021–2024, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,5 persen, yaitu dari Rp242.086,8 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp292.692,6 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya pada *outlook* tahun anggaran 2025, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp288.131,8 miliar. Selain itu, kebijakan pemerintah di bidang subsidi juga berpengaruh terhadap belanja subsidi, antara lain: (1) kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti pemberian diskon listrik, insentif perumahan dan UMKM; (2) bertambahnya jenis subsidi baru pada Subsidi Pajak DTP, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan; (3) implementasi subsidi tepat untuk BBM bersubsidi; (4) perubahan jenis pupuk dan jumlah komoditas yang disubsidi; dan (5) jumlah plafon penyaluran KUR.

Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2021–2025 juga dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) terus dilakukannya pemadanan data pada pelanggan listrik bersubsidi sesuai dengan DTKS; (2) melanjutkan verifikasi dan validasi data petani dalam rangka *update* penerima pupuk bersubsidi; dan (3) pendataan konsumen BBM dan LPG bersubsidi dalam rangka implementasi subsidi energi tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2021–2025 menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) validitas data penerima subsidi masih perlu ditingkatkan dan diperbarui secara berkala; (2) subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran (*inclusion* dan *exclusion error*); (3) fluktuasi ICP, harga acuan produk BBM (*Mean of Platts Singapore*/MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/CP Aramco), serta nilai tukar Rupiah; dan (4) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan transisi energi.

Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp318.886,2 miliar, terdiri atas Subsidi Energi sebesar Rp210.060,8 miliar dan Subsidi Non Energi sebesar Rp108.825,4 miliar. Perkembangan belanja subsidi selama tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.6.**

GRAFIK 4.6
BELANJA SUBSIDI, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Subsidi Energi terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada periode tahun 2021–2024, realisasi Subsidi Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama periode 2021–2024, Subsidi Energi meningkat dari semula sebesar Rp140.395,2 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp177.615,2 miliar pada tahun anggaran 2024. Pada *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp183.878,3 miliar.

Realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg selama periode 2021–2024 mengalami peningkatan dari semula Rp83.787,2 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp101.798,0 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp94.799,5 miliar. Realisasi pembayaran serta *outlook* perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh realisasi asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, harga acuan produk BBM (*Mean of Plats Singapore*/ MOPS) dan produk LPG (*Contract Price Aramco*/ CP Aramco), serta pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar. Kebijakan subsidi Jenis BBM Tertentu minyak solar pada periode tahun 2021–2025 telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pada tahun 2021-2022, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar sebesar Rp500/liter. Pada tahun 2023-2025, subsidi tetap Jenis BBM Tertentu minyak solar menjadi sebesar Rp1.000/liter.

Selama periode 2021–2025, perkembangan realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, realisasi volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar mencapai 15,4 juta kiloliter, meningkat menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun anggaran 2024. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak solar pada APBN tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 18,89 juta kiloliter. Volume penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kiloliter per tahun. Kuota penyaluran Jenis BBM Tertentu minyak tanah pada APBN tahun anggaran 2025 sebanyak 0,53 juta kiloliter. Selanjutnya, realisasi volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari 7,5 juta metrik ton pada tahun anggaran 2021 menjadi 8,2 juta metrik ton pada tahun anggaran 2024. Kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun anggaran 2025 sebanyak 8,17 juta metrik ton.

Realisasi Subsidi Listrik selama periode 2021–2024 mengalami peningkatan sebesar 10,2 persen, dari semula Rp56.608,0 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp75.817,3 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai Rp89.078,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; (2) LPG Tabung 3 kg dan BBM bersubsidi masih didistribusikan secara terbuka; (3) validitas dan akurasi data masyarakat yang berhak menerima

subsidi masih perlu ditingkatkan dan diperbarui secara berkala; (4) transformasi mekanisme penyaluran BBM dan LPG Tabung 3 kg secara tepat sasaran yang perlu dioptimalkan; dan (5) kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya melakukan beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran; (2) evaluasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 kg diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat; (3) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat sasaran dengan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan (4) memperkuat penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga agar diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan disertai dengan kebijakan *tariff adjustment* untuk pelanggan non subsidi, diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga akan melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg dari subsidi selisih harga menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah mempersiapkan basis data yang akan digunakan sebagai acuan seperti menyiapkan pengembangan fitur pendataan konsumen berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pencocokan data dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta penyiapan infrastruktur penyaluran LPG Tabung 3 kg. Selaras dengan hal itu, mulai bulan Januari 2024, pembelian LPG Tabung 3 kg di pangkalan hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi. Oleh karena itu, pengguna LPG Tabung 3 kg dapat terdata untuk mendukung kesiapan Indonesia menuju penyaluran LPG Tabung 3 kg yang berkeadilan.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Subsidi Energi dialokasikan sebesar Rp210.060,8 miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp105.414,4 miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp104.646,5 miliar. Dalam APBN tahun anggaran 2026 tersebut masih dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. Kebijakan transformasi Subsidi Energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam APBN tahun anggaran 2026 dapat dilihat dalam **Tabel 4.4.**

TABEL 4.4
BELANJA SUBSIDI, 2025–2026
(triliun rupiah)

Uraian	*Outlook* 2025	APBN 2026
A. ENERGI	**183,9**	**210,1**
1. Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	94,8	105,4
a. Jenis BBM Tertentu	26,1	25,1
b. LPG Tabung 3 Kg	68,7	80,3
2. Listrik	89,1	104,6
B. NON-ENERGI	**104,3**	**108,8**
JUMLAH	**288,1**	**318,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp105.414,4 miliar atau lebih tinggi 11,2 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp94.799,5 miliar. Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg dalam tahun anggaran 2026 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3 kg. Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; (2) melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan

dengan registrasi konsumen penggunanya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya; dan (3) melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan DTSEN. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam DTSEN. Pelaksanaan transformasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun anggaran 2026 tersebut menggunakan asumsi dan parameter, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP; (2) subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000/liter; serta (3) volume BBM jenis solar sebesar 18.636,5 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 526 ribu kiloliter.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Subsidi Listrik dialokasikan sebesar Rp104.646,5 miliar atau lebih tinggi 17,5 persen apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp89.078,7 miliar. Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Kenaikan BPP tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS; (2) peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk *cofiring* PLTU; dan (3) kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2026 adalah untuk: (1) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan DTSEN disertai dengan *tariff adjustment* untuk pelanggan non subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak.; dan (2) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Subsidi Non-Energi

Pada periode tahun 2021–2025, realisasi Subsidi Non Energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan tren yang semakin meningkat, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perubahan parameter yang digunakan dalam perhitungan subsidi serta adanya tambahan jenis subsidi baru. Dalam periode tahun 2021–2024, realisasi Subsidi Non Energi mengalami peningkatan rata-rata 4,2 persen per tahun dari Rp101.691,6 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp115.077,4 miliar pada tahun anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2025, *outlook* Subsidi Non Energi diperkirakan mencapai Rp104.253,5 miliar. Subsidi Non Energi terdiri dari Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah.

Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam APBN untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan program ketahanan pangan nasional. Dalam periode 2021-2024, realisasi Subsidi Pupuk mengalami peningkatan rata-rata 20,4 persen per tahun dari semula sebesar Rp27.155,3 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp47.387,4 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Pupuk diperkirakan mencapai Rp44.156,5 miliar. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terdaftar dalam eRDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Subsidi Pupuk tahun 2025 diberikan untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi dan komunikasi, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*/PSO). Dalam periode tahun 2021–2024, realisasi Subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 12,0 persen per tahun dari semula sebesar Rp5.682,1 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp7.976,0 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp7.956,6 miliar. Faktor yang memengaruhi kenaikan anggaran Subsidi PSO dalam periode tahun 2021-2025 antara lain peningkatan anggaran Subsidi PSO PT KAI terutama untuk mendukung LRT Jabodebek.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan kereta api untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api meliputi pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan angkutan kapal laut penumpang kelas ekonomi. Selanjutnya pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan informasi publik melalui peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam negeri termasuk daerah 3T dan luar negeri; pembentukan opini positif dan citra negara; dan pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (*media sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Dalam periode 2021-2024, realisasi Subsidi Bunga Kredit Program mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen per tahun dari Rp41.801,5 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp50.597,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Bunga Kredit Program diperkirakan mencapai Rp43.974,6 miliar. Faktor yang memengaruhi kenaikan Subsidi Bunga Kredit Program dalam periode 2021-2025 antara lain: kenaikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung peningkatan plafon penyaluran KUR dan penambahan jenis subsidi baru seperti Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan serta terdapat tambahan anggaran

berupa insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, IJP Pelaku usaha Korporasi dan IJP *Loss Limit* Program PEN, dan IJP BUMN program PEN.

Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mendukung investasi dan daya saing industri pada sektor-sektor tertentu. Dalam periode 2021–2024, perkembangan realisasi Subsidi Pajak DTP mengalami fluktuasi dari semula sebesar Rp27.052,8 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp9.116,4 miliar pada tahun anggaran 2024. Dalam *outlook* tahun anggaran 2025, Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai Rp8.165,8 miliar. Faktor yang memengaruhi fluktuasi anggaran Subsidi Pajak DTP dalam periode 2021-2025 antara lain perubahan jenis Subsidi Pajak dan tambahan insentif yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Subsidi Non Energi dialokasikan sebesar Rp108.825,4 miliar, lebih tinggi Rp4.571,9 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp104.253,5 miliar. Subsidi Non Energi tersebut terdiri dari Subsidi Pupuk Rp46.874,5 miliar, Subsidi PSO sebesar Rp9.014,8 miliar, Subsidi Bunga Kredit Program Rp42.286,2 miliar, dan Subsidi Pajak DTP sebesar Rp10.649,9 miliar.

Sebagaimana amanat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan sebagai upaya pencapaian produksi baik untuk sektor pertanian dan sektor perikanan, diperlukan dukungan prasarana dan sarana termasuk pupuk yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman dan penumbuhan pakan alami dalam produksi ikan, Pemerintah mengalokasikan Subsidi Pupuk kepada sektor pertanian dan sektor perikanan. Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan sebesar Rp46.874,5 miliar, lebih tinggi Rp2.718,0 miliar bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp44.156,5 miliar.

Pemerintah terus mengoptimalkan penyempurnaan kebijakan Subsidi Pupuk yang ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian strategis dan produktivitas perikanan budidaya serta menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani dan pembudidaya ikan. Penyempurnaan kebijakan tersebut meliputi antara lain: (1) peningkatan ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi melalui verifikasi dan validasi data petani penerima; (2) melakukan pemadanan data penerima pupuk bersubsidi dengan data lain seperti dukcapil, sensus pertanian, regsosek, dan sejenisnya; (3) subsidi pupuk diberikan kepada komoditas prioritas; (4) jenis pupuk bersubsidi yang diberikan hanya urea, NPK, dan organik; dan (5) penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung dari BUMN Pupuk hingga ke titik serah kepada penerima pupuk bersubsidi.

Arah kebijakan Subsidi Pupuk yang akan dilaksanakan pada APBN tahun Anggaran 2026 antara lain: (1) membangun dan mengembangkan sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi secara bertahap, sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang mengatur mengenai satu data Indonesia; (2) melakukan verifikasi dan validasi data penerima Subsidi Pupuk minimal 1-2 kali setahun, agar penerima pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran; (3) memadankan data penerima Subsidi Pupuk dengan data lain seperti data sensus pertanian, dukcapil, regsosek, dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan; dan (4) jenis pupuk bersubsidi yang dapat diberikan yaitu urea, NPK, dan organik, serta apabila diperlukan dapat diberikan juga jenis SP36 dan ZA; (5) Subsidi Pupuk diberikan kepada komoditas prioritas; (6) penyaluran

pupuk bersubsidi secara langsung dari BUMN Pupuk hingga ke titik serah kepada penerima pupuk bersubsidi yaitu gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pengecer, dan/atau koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk; dan (7) petani penerima Subsidi Pupuk dapat melakukan penebusan pupuk dengan menggunakan KTP/kartu tani digital/ biometrik dan membayar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik, Subsidi PSO dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp9.014,8 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi 13,3 persen atau Rp1.058,2 miliar apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp7.956,6 miliar. Pengembangan potensi dan peningkatan peranan PSO transportasi yaitu sebagai penghubung antar wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan kereta api kelas ekonomi bertujuan untuk: (1) menyediakan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat; (2) menyediakan angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan; (3) mengurangi penggunaan kendaran pribadi khususnya di wilayah perkotaan sehingga tingkat kemacetan di jalan raya menjadi berkurang dan produktivitas nasional menjadi meningkat; dan (4) mengurangi penggunaan BBM sehingga tingkat emisi karbon akibat polusi menjadi berkurang.

Dalam APBN tahun anggaran 2026 belanja Subsidi PSO dialokasikan sebesar Rp9.014,8 miliar dengan rincian sebagai berikut: (1) PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi sebesar Rp5.864,2 miliar untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta; dan penyelenggaraan sarana dan prasarana LRT Jabodebek, untuk 445,9 juta penumpang dengan kebijakan PSO dilaksanakan melalui rencana pemberlakuan tarif khusus kepada para penumpang berkebutuhan khusus (disabilitas) untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek; (2) PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi sebesar Rp2.968,5 miliar untuk layanan angkutan laut penumpang dengan trayek tetap, teratur, dan terjadwal bagi masyarakat dengan harga yang ekonomis untuk 4,3 juta penumpang; dan (3) PSO Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers sebesar Rp182,2 miliar dimanfaatkan antara lain: (a) sebagai penyedia informasi publik yang murah, mudah diakses, dan terjangkau; (b) mendukung ketersediaan informasi yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan dalam kerangka NKRI; (c) menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik; dan (d) melakukan pemerataan informasi melalui televisi, radio, media cetak, dan digital termasuk di wilayah 3T.

Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung penyediaan perumahan untuk MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM, petani, dan nelayan serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi Bunga Kredit Program dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp42.286,2 miliar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program antara lain untuk: (1) mendukung ketahanan pangan melalui Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP pada komoditas jenis pangan tertentu dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), serta Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan); (2) mendukung penyediaan perumahan bagi MBR melalui Subsidi Perumahan (SBUM Perumahan dan SBK Perumahan) dalam rangka mengurangi *backlog* perumahan; (3) meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, petani dan nelayan melalui Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR, (4) memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui Subsidi Bunga Penyediaan Air Minum, dan (5) pemulihan ekonomi nasional melalui Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

Dalam APBN tahun anggaran 2026 untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat dialokasikan sebesar Rp36.484,0 miliar. Program KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, petani dan nelayan, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk memperkuat permodalan debitur dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR disalurkan kepada UMKM yang *feasible* akan tetapi tidak/belum *bankable*. Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat diberikan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan UMKM khususnya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah antar K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan meningkatkan peran usaha mikro dan kecil dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat, dilakukan dengan kebijakan antara lain: (1) melanjutkan pemberian suku bunga KUR kepada UMKM, petani dan nelayan sebesar 3 persen untuk KUR Super Mikro dan sebesar 6 persen untuk KUR jenis lain; (2) penetapan target debitur baru dan debitur naik kelas untuk memperluas UMKM penerima KUR; dan (3) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebanyak 60-65 persen.

Selain Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dialokasikan sebesar Rp10,6 miliar. Kebijakan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2026, antara lain: (1) pemberian suku bunga sebesar 3 persen kepada petani atau kelompok tani serta pelaku UMKM sektor pertanian; (2) plafon sampai dengan Rp2,0 miliar dan calon debitur bukan merupakan debitur KUR; dan (3) pinjaman hanya diberikan satu kali per penerima dan alat mesin pertanian (alsintan) yang dibiayai wajib diusahakan sebagai program Taksi Alsintan.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR dialokasikan sebesar Rp16,2 miliar. Anggaran untuk Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR tersebut digunakan untuk penyaluran KUR tahun 2007 sampai dengan 2014. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Program KUR dalam bentuk pemberian imbal jasa penjaminan kepada Perusahaan Penjamin KUR. Subsidi yang dimaksud berupa IJP yang dibayarkan kepada Penjamin KUR.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Perumahan sebesar Rp5.567,4 miliar yang terdiri dari: SBK Perumahan sebesar Rp4.409,4 miliar dan SBUM Perumahan sebesar Rp1.158,0 miliar. SBK dan SBUM adalah subsidi yang diberikan untuk membantu MBR memperoleh rumah bersubsidi dengan harga terjangkau. SBUM diberikan untuk memenuhi sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah bagi MBR. MBR yang menjadi penerima FLPP, maka otomatis akan menerima SBUM. SBK merupakan subsidi untuk membantu MBR dalam membayar sebagian bunga kredit untuk pemilikan rumah subsidi.

Pada tahun anggaran 2026, anggaran SBK Perumahan digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (2015-2020), sedangkan SBUM Perumahan tetap menjadi komplemen KPR dari FLPP kepada MBR yang diberikan sebesar Rp4 juta/unit rumah untuk wilayah non-Papua dan Rp10 juta/unit rumah untuk wilayah Papua.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2026 anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dialokasikan sebesar Rp22,2 miliar. Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan digunakan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun 2020-2023. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Subsidi tersebut diberikan berupa Subsidi Bunga atas pinjaman yang disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/ PT SMI kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur di daerah antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan sumber daya air.

Subsidi Bunga Penyediaan Air Minum dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp10,8 miliar. Subsidi Bunga Penyediaan Air Minum diberikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum. Pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.

Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp5,8 miliar. SSRG diberikan dalam rangka membantu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga terjangkau dengan cara menjaminkan barang (komoditas) yang disimpan di gudang tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan SSRG mencakup antara lain: komoditas pangan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: (1) melanjutkan pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga 6 persen per tahun kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, maupun pelaku usaha dengan menjaminkan komoditas yang disimpan di gudang SRG; (2) melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Resi Gudang (SIRG) dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); (3) melakukan pelatihan pengelola gudang, dan perluasan lokasi sebagai upaya penetrasi gudang ke pasar; (4) sinergi dan penguatan peran Asosiasi Pengelola Gudang SRG; (5) penguatan pemantauan penyaluran SSRG; dan (6) sinergi K/L dalam pengembangan dan perluasan pemanfaatan SRG.

Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp169,2 miliar. Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan CPP diberikan dalam rangka melanjutkan pemberian pinjaman dengan penjaminan/tanpa penjaminan kepada Perum Bulog dan/atau ID Food melalui perbankan dan non perbankan untuk pembelian komoditas

jenis pangan tertentu. Selanjutnya, CPP dapat digunakan untuk menanggulangi gejolak harga pangan, kekurangan pangan, bencana alam, keadaaan darurat, dan bencana sosial.

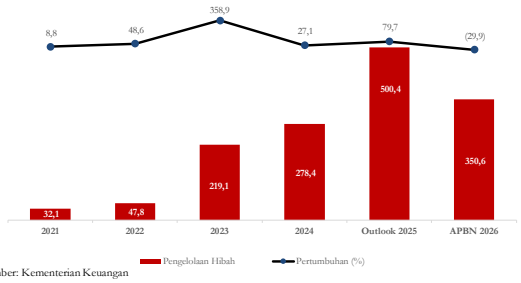
Sementara itu, dalam APBN tahun anggaran 2026, Subsidi Pajak DTP dialokasikan sebesar Rp10.649,9 miliar. Kebijakan Subsidi Pajak DTP yang akan dilaksanakan, yaitu melanjutkan pemberian subsidi pajak PPh DTP reguler pada sektor panas bumi dan SBN valas. Pemberian Pajak DTP SBN valas ditujukan antara lain untuk menarik investasi asing dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sementara tujuan Pajak DTP untuk sektor panas bumi diantaranya untuk mendorong pengembangan EBT dan mendukung transisi energi nasional menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

4.2.1.1.2.3. Program Pengelolaan Hibah

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan hibah ke daerah mulai tahun 2023 merupakan bagian dari Transfer ke Daerah, sehingga sejak tahun 2023 Program Pengelolaan Hibah hanya terdiri atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dan pengelolaan hibah lainnya. Berdasarkan penyesuaian perhitungan tersebut, realisasi program pengelolaan hibah negara dalam periode 2021-2024 mengalami peningkatan dari Rp32,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp278,4 miliar pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 program pengelolaan hibah negara diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp500,3 miliar. Pada tahun 2019, sesuai dengan amanat PP No.57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing, dibentuk Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Melalui LDKPI, Pemerintah telah memberikan hibah antara lain bantuan kemanusiaan, penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas pemerintahan di bidang keamanan. Mulai tahun 2022, pemberian hibah sepenuhnya menggunakan 100 persen dana hasil investasi *endowment fund* LDKPI.

Dalam program pengelolaan hibah negara juga terdapat realisasi *banking commission* yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam proses administrasi perbankan terkait hibah. Dalam periode 2021-2024 *banking commission* secara rata-rata terealisasi sebesar Rp0,2 miliar dan diperkirakan pada tahun 2025 akan terealisasi sebesar Rp1,1 miliar. Secara keseluruhan perkembangan program pengelolaan hibah periode tahun 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.7.**

GRAFIK 4.7
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2021–2026
(miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi pemberian hibah pada tahun 2024 mencapai Rp278,2 miliar yang diberikan kepada 89 negara. Dari segi kawasan, Asia dan Pasifik merupakan wilayah penerima hibah terbesar. Kawasan Asia mendominasi baik dari sisi nilai maupun jumlah program, terutama untuk isu-isu prioritas seperti kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan beasiswa. Sementara itu, kawasan Pasifik menjadi wilayah strategis yang menjadi salah satu penerima hibah terbesar melalui proyek-proyek yang dibiayai hibah Pemerintah Indonesia, antara lain *West Sepik Integrated Development Program* di Papua Nugini, pengiriman tenaga ahli ke Solomon untuk pengembangan budi daya *tilapia* dan ayam broiler, serta pelatihan SDM dan program

pemberdayaan keuangan di Timor-Leste. Kawasan Afrika juga menerima alokasi yang cukup besar melalui kegiatan pelatihan di sektor energi, pertanian berkelanjutan, dan program inseminasi buatan. Adapun kawasan Eropa dan Amerika tercatat sebagai penerima hibah dalam konteks tertentu, seperti dukungan pascabencana gempa di Turki dan pelatihan untuk negara-negara anggota Karibia.

Berbeda dengan tahun 2024, dari sisi kawasan, Afrika dan Asia menjadi wilayah dengan jumlah program dan nilai hibah terbesar dalam pelaksanaan hibah DRPH tahun 2025. Hibah ke kawasan Afrika mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari pelatihan di sektor pertanian, energi, dan kesehatan, hingga penguatan kelembagaan. Negara-negara seperti Guinea, Tanzania, Nigeria, Ghana, serta negara-negara *least developed countries* Afrika menerima manfaat besar dari berbagai program hibah yang dilaksanakan. Sementara itu, hibah ke kawasan Asia diberikan, terutama melalui pelaksanaan program-program hibah di Timor Leste, Afghanistan, Palestina, dan negara-negara di Asia Selatan.

Dalam penyusunan program hibah tahun 2026, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memainkan peran aktif dalam mendukung pembangunan negara-negara mitra, khususnya di kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika. Ketiga kawasan ini tetap menjadi prioritas utama dalam kerangka kerja sama pembangunan internasional Indonesia, mempertimbangkan adanya tantangan kapasitas kelembagaan, kesenjangan sosial, serta kebutuhan mendesak di berbagai sektor pembangunan di kawasan-kawasan prioritas. Hibah diharapkan tidak hanya merupakan wujud solidaritas, tetapi juga bagian dari kontribusi strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan global selatan (*Global South*).

Dalam APBN tahun anggaran 2026, program pengelolaan hibah dialokasikan sebesar Rp350,6 miliar terdiri dari pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI sebesar Rp349,6 miliar dan pengelolaan hibah lainnya untuk rencana pembayaran *banking commision* dengan alokasi sebesar Rp1,0 miliar, dari target pemberian hibah sebesar Rp552,0 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung Asta Cita 2 "memantapkan pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru" dimana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing merupakan alat diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi sosial budaya yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional, yaitu:

1. mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di seluruh penjuru dunia;
3. meningkatkan posisi dan kepentingan Indonesia di forum - forum internasional;
4. meningkatkan peran Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh; dan
5. mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar, mempromosikan produk, keahlian, dan teknologi dalam negeri, serta meningkatkan peluang investasi di luar negeri.

Program hibah tahun 2026 dirancang untuk tetap tanggap terhadap kondisi darurat kemanusiaan, baik akibat bencana alam, konflik, maupun krisis kesehatan. Fleksibilitas dalam pelaksanaan hibah akan terus dijaga agar program dapat merespons kebutuhan prioritas negara mitra secara cepat dan tepat. Selain itu, arah hibah akan tetap sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan fokus pada sektor-sektor strategis

seperti kesehatan, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, tata kelola pemerintahan, dan pendidikan. Secara khusus, pada sektor pendidikan, Pemerintah Indonesia akan menambah skema beasiswa baru yang bersifat lebih tematik dan menjawab kebutuhan nyata negara mitra. Selain kelanjutan program *The Indonesian AID Scholarship* (TIAS) dan INSPIRE, akan diperkenalkan pula skema beasiswa khusus seperti SHEMIND yang mendukung pendidikan di bidang profesi kesehatan, antara lain melalui pendidikan dokter baik level dokter umum dan dokter spesialis. Skema ini ditujukan untuk menjawab tantangan kekurangan tenaga medis terlatih di sejumlah negara mitra, serta memperkuat sistem layanan kesehatan nasional mereka secara berkelanjutan. Di sisi lain, untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pemberian hibah, Indonesia juga akan melanjutkan sejumlah program yang telah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah *West Sepik Integrated Development Program* di Papua Nugini yang akan terus dikembangkan sebagai model pembangunan terpadu. Program ini mencakup penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah terpencil. Di Timor-Leste, *Financial Management Reform Program* akan diperluas cakupannya, tidak hanya pada penguatan standar akuntansi pemerintah (PSAP), tetapi juga merambah pada reformasi perpajakan, sistem kepabeanan, manajemen aset negara, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di negara mitra.

Melalui pendekatan berkelanjutan dan adaptif, hibah Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen diplomasi, tetapi juga memberikan dampak nyata yang terukur bagi pembangunan negara mitra, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya dalam kerja sama pembangunan global.

4.2.1.1.2.6. Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program Pengelolaan Belanja Lainnya merupakan BPP yang menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Pada periode tahun 2021-2024, realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya secara rata-rata tumbuh sebesar 39,4 persen. Peningkatan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan listrik dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik, sekaligus mendukung pelaksanaan operasional dan likuiditas badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan energi domestik yang terjangkau masyarakat. Realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada periode 2021-2024 juga dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, meliputi bantuan iuran JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III, bantuan pembayaran tagihan listrik bagi golongan industri, bisnis, dan sosial, serta dana awal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja/buruh penerima iuran; (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja, meliputi bantuan biaya pelatihan dan insentif peserta serta biaya operasional program; (3) penyelenggaraan cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras serta menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan (4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman Papua, dan belanja bantuan operasional layanan pos universal.

Outlook Program Pengelolaan Belanja Lainnya tahun anggaran 2025 mencapai Rp358.188,6 miliar atau 72,9 persen dari pagunya. Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan utamanya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik serta belanja lainnya yang terprogram. Selain itu, *outlook* tersebut masih memperhitungkan alokasi untuk antisipasi penanggulangan bencana, dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan, pembayaran kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit, dukungan proyek prioritas nasional, dan keperluan mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya akan dimanfaatkan melalui BA K/L atau sub-BA BUN yang lain sesuai dengan peruntukkannya.

Anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp526.554,0 miliar. Arah kebijakan anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun anggaran 2026, antara lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan kegiatan mendesak; (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, antara lain kompensasi harga BBM dan listrik; dan (6) antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi-misi dan program kerja Pemerintah. Selain itu, Program Pengelolaan Belanja Lainnya pada APBN tahun anggaran 2026 juga akan digunakan untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi: (1) belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden, yakni untuk mendukung kegiatan bantuan Presiden/Wakil Presiden dalam bidang organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, atau kegiatan lainnya; (2) belanja operasional lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran sendiri, yakni operasional SKK Migas dalam rangka mendukung pelayanan, pengawasan, hingga pengembangan industri hulu migas serta operasional Kawasan Bintan-Karimun dalam rangka pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; (3) belanja ongkos angkut beras ASN distrik pedalaman di wilayah Papua, yakni dalam rangka kegiatan penyaluran beras untuk pegawai ASN di wilayah tersebut; dan (4) belanja bantuan operasional layanan pos universal, yaitu dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pos kepada masyarakat.

4.2.1.1.2.7. Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) terdapat tiga akun belanja, yaitu: (1) belanja pegawai yang terdiri atas anggaran kontribusi sosial yang dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri, serta pembayaran kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan (Jamkes) bagi ASN/TNI/Polri aktif maupun pensiunan, dan veteran; (2) belanja barang yang terdiri atas pembayaran kontribusi ke lembaga/organisasi internasional/*trust fund*, dukungan pemerintah proyek skema KPBU dan/atau skema pembiayaan lainnya melalui dana dukungan kelayakan proyek (*Viability Gap Fund*/VGF) dan dana fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Facility*/PDF), pembiayaan operasional BUN Pengelolaan Kas Negara, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pembayaran Manfaat Pensiun, serta penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah PEN; dan (3) Belanja Lain-lain terdiri atas pembayaran selisih harga beras Bulog serta pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan PNBP BUN.

Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,6 persen, yaitu dari sebesar Rp140.371,6 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp175.052,8 miliar pada tahun anggaran 2024. Realisasi pada tahun anggaran 2024 tersebut utamanya berasal

dari realisasi belanja kontribusi sosial yang mencapai sebesar Rp173.106,6 miliar, antara lain dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat pensiun dan Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun dan penyesuaian pensiun pokok sebesar 12 persen pada tahun 2024.

Dalam periode tahun 2021–2024, Pemerintah sudah merealisasikan anggaran dukungan fasilitas proyek melalui pemberian PDF pada proyek KPBU secara total mencapai Rp435,1 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk proyek KPBU Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), Proyek KPBU *Proving Ground* Bekasi, proyek KPBU KA Makassar Pare-Pare, dan proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan dan Riau. Selain itu, pada periode yang sama, Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran dukungan kelayakan proyek melalui pemberian VGF mencapai sebesar Rp85,4 miliar yang dimanfaatkan untuk pembangunan konstruksi proyek KPBU SPAM Pekanbaru tahap I hingga tahap III. Selain dukungan pada proyek KPBU, Pemerintah juga merealisasikan secara akumulatif pembayaran BOP Pembayaran Manfaat Pensiun mencapai sebesar Rp3.082,8 miliar yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) maupun PT ASABRI (Persero).

Sejak tahun 2021, Pemerintah telah melakukan investasi program PEN dalam bentuk investasi non-permanen kepada BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara lain melalui penugasan kepada dua BUMN dan satu lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN untuk memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi dalam program PEN. Berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana Investasi berhak mendapatkan penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya dan margin Investasi Pemerintah PEN mencapai sebesar Rp53,4 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2025, *outlook* pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus diperkirakan sebesar Rp189.139,5 miliar yang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja pegawai non-K/L melalui pembayaran kontribusi sosial diperkirakan sebesar Rp186.791,1 miliar; (2) belanja barang non-K/L diperkirakan sebesar Rp1.875,0 miliar yang diantaranya untuk penggantian biaya penugasan PDF pada proyek KPBU sebesar Rp266,6 miliar (termasuk dalam rangka pembangunan IKN), pembiayaan operasional BUN Pengelolaan Kas Negara sebesar Rp369,1 miliar, serta pembayaran BOP Pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp861,2 miliar; serta (3) belanja lain-lain melalui pembayaran selisih harga beras Bulog serta pengelolaan, pengembangan dan pengawasan PNBP BUN diperkirakan sebesar Rp473,4 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Program Pengelolaan Transaksi Khusus dialokasikan sebesar Rp193.954,9 miliar atau mengalami peningkatan 2,5 persen dibandingkan dengan

outlook tahun 2025 sebesar Rp189.139,5 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja pegawai non-K/L melalui pembayaran kontribusi sosial dialokasikan sebesar Rp191.412,2 miliar; (2) belanja barang non-K/L dialokasikan sebesar Rp2.028,2 miliar; dan (3) belanja lain-lain dialokasikan sebesar Rp514,5 miliar. Belanja kontribusi sosial akan dipergunakan antara lain untuk pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp177.121,4 miliar; dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp12.604,5 miliar.

Pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus untuk belanja barang non-K/L tahun 2026 terdapat alokasi pembayaran kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional (OI) dan *trust fund* untuk organisasi Asean Development Fund (ADF 14) dan Pandemic Fund. *Trust fund* tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp206,8 miliar atau mengalami peningkatan 24,4 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp166,2 miliar.

Selanjutnya, anggaran fasilitas penyiapan proyek melalui pemberian PDF pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp352,3 miliar dan akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek KPBU reguler dan proyek KPBU dalam rangka pembangunan IKN antara lain untuk proyek-proyek sedang berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan masuk ke dalam *pipeline*. Sedangkan anggaran dana dukungan kelayakan melalui pemberian VGF sebesar Rp219,2 miliar atau mengalami kenaikan 4,9 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp208,9 miliar. Kenaikan tersebut akan digunakan untuk mendukung sebagian biaya konstruksi pada proyek KPBU, salah satunya proyek KPBU TPPAS Legok Nangka yang akan memulai tahap pertama pelaksanaan konstruksi pada tahun 2026.

Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran operasional BUN dalam rangka Pengelolaan Kas Negara dialokasikan sebesar Rp376,4 miliar atau mengalami peningkatan 2,0 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp369,1 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut merupakan kewajiban PPN Pemerintah selaku pemilik rekening dan pengguna jasa transfer di Bank Indonesia antara lain untuk pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS di Bank Indonesia dan Bank Operasional, pembayaran imbal jasa perbendaharaan, ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban Pemerintah dan negara yang harus dibayar kepada beberapa pihak pemberi jasa dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran BOP Pembayaran Manfaat Pensiun dialokasikan sebesar Rp868,7 miliar atau mengalami peningkatan 0,9 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp861,2 miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran administrasi Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero). Selanjutnya, pada tahun 2026, kebutuhan dana penggantian biaya dan margin atas investasi Pemerintah dialokasikan sebesar Rp4,7 miliar atau mengalami peningkatan 57,7 persen terhadap *outlook* tahun 2025 sebesar Rp3,0 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2026, pembayaran selisih harga beras Bulog dialokasikan sebesar Rp160,2 miliar atau mengalami peningkatan 33,4 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp120,2 miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga beras Bulog tersebut merupakan pembayaran atas selisih antara harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dengan tunjangan beras dalam bentuk natura.

Anggaran Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengawasan PNBP BUN pada APBN tahun

anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp354,2 miliar atau mengalami peningkatan 0,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp353,2 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan sistem IT dan infrastruktur PNBP BUN, pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan kas negara, pengembangan aplikasi PNBP, pengawasan dan *monitoring* kegiatan BUN, dan pengembangan kualitas SDM. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan PNBP BUN secara optimal.

BOKS 4.2
OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pembentukan OJK merupakan respon terhadap kebutuhan akan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi. Tujuannya agar kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Pembentukan OJK juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, mewujudkan pertumbuhan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Untuk itu, fungsi dan tugas utama OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Fungsi dan tugas OJK semakin kompleks dengan perkembangan sektor jasa keuangan yang sangat dinamis serta bertambahnya mandat OJK sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai bentuk dukungan negara terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang komprehensif, UU P2SK menetapkan bahwa mulai tahun 2025, anggaran OJK merupakan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan kecukupan anggaran OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan. Meskipun anggarannya masuk dalam APBN, OJK tetap menjadi lembaga independen secara hukum dan operasional yang dijamin undang-undang.

Anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan di sektor jasa keuangan tersebut dan penerimaan lainnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Untuk memastikan tidak adanya perubahan proses bisnis terkait anggaran OJK, pengelolaan PNBP dimaksud memiliki kekhususan dengan diserahkelolakan langsung kepada OJK selaku Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP. Sebagai MIP PNBP, OJK tetap memiliki kewenangan untuk mengenakan, menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya secara akuntabel dan mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

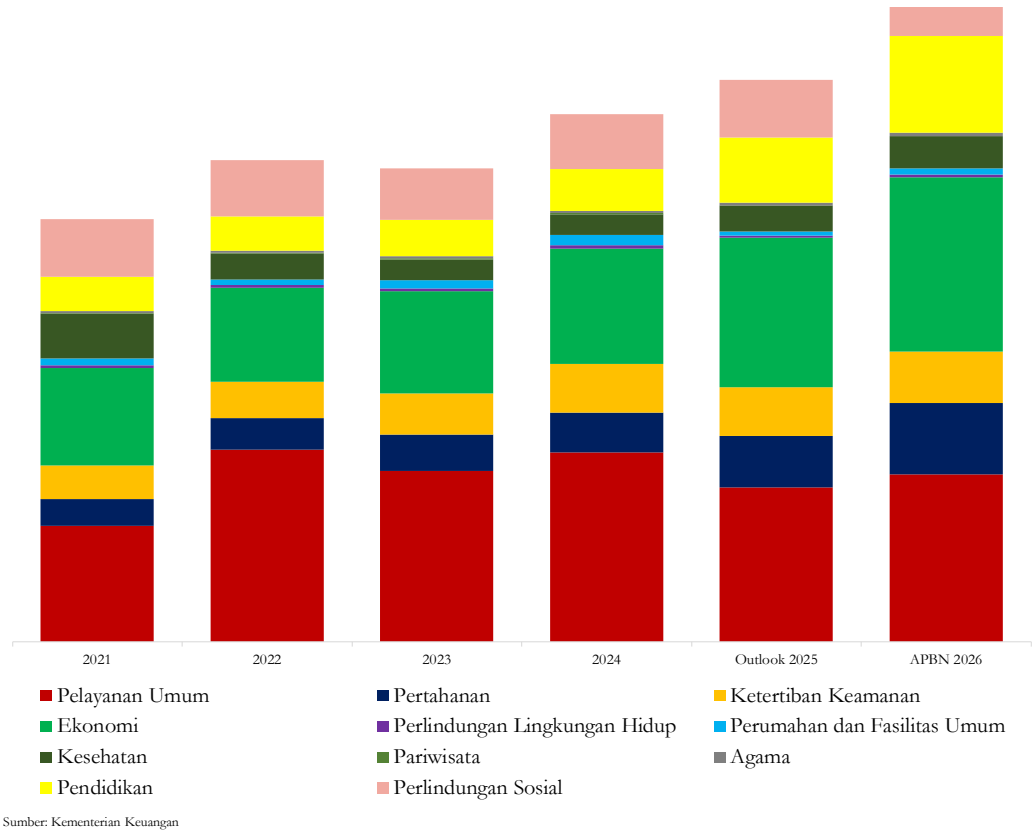
Dalam menyusun rencana kerja dan anggaran OJK, Dewan Komisioner OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk selanjutnya melakukan pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hasil pembahasan dengan DPR RI kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan Rancangan UU mengenai APBN. Salah satu hasil pembahasan untuk RKA OJK TA 2026 adalah OJK dapat melakukan pungutan pada awal triwulan dalam periode awal tahun kalender untuk memenuhi kebutuhan RKA OJK Tahun 2026.

4.2.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Untuk menggambarkan fokus Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung berbagai prioritas pembangunan, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat juga disajikan berdasarkan klasifikasi fungsi. Sebagaimana yang tedapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, klasifikasi fungsi dirinci ke dalam 11 fungsi yang terdiri atas: (1) Fungsi Pelayanan Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi Ekonomi; (5) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup; (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata; (9) Fungsi Agama; (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial.

Selama tahun 2021-2025, Fungsi Pelayanan Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang alokasinya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga dapat tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan pada tahun 2025 sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan anggaran menurut fungsi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.8.**

GRAFIK 4.8
PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI*, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

**) Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh K/L dan Non K/L.*

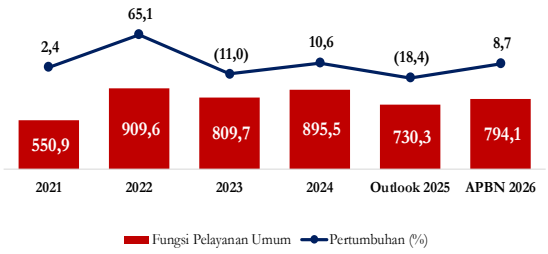
Fungsi Pelayanan Umum

Anggaran dalam Fungsi Pelayanan Umum terdapat pada beberapa K/L antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, anggaran Fungsi Pelayanan Umum juga mencakup alokasi non-K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi.

Dalam jangka waktu tahun 2021-2024, realisasi anggaran Fungsi Pelayanan Umum tumbuh rata-rata sebesar 17,6 persen, yakni sebesar Rp550.929,7 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp895.534,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Fungsi Pelayanan Umum dalam periode tersebut, antara lain: (1) peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional, yaitu dari 3,79 (2021) menjadi 4,07 (2024); (2) penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L dan Pemda; (3) penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan peringkat Indonesia pada *e-Government Development Index* (EGDI) yang semula peringkat 77 dari 193 negara pada tahun 2022 menjadi peringkat 64 dari 193 negara pada tahun 2024; (4) peningkatan capaian *Government Effectiveness index* (GEI) yang mengukur kualitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan dari nilai 0,346 pada tahun 2021 (peringkat 76) menjadi 0,580 pada tahun 2023 (peringkat 65); dan (5) pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, produktif, dan profesional, dalam APBN tahun anggaran 2026 anggaran Fungsi Pelayanan Umum dialokasikan sebesar Rp794.128,2 miliar. Anggaran tersebut tumbuh 8,7 persen dari *outlook* tahun anggaran 2025 sebesar Rp730.316,7 miliar. Melalui anggaran tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik antara lain: (1) penyediaan informasi dan data statistik yang berkualitas; (2) asistensi dan evaluasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), serta WBK/WBBM; (3) pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; (4) pengelolaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah; dan (5) peningkatan efektivitas diplomasi dan pelindungan serta pelayanan WNI, termasuk Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang integratif.

Selain itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L yang melaksanakan Fungsi Pelayanan Umum serta pembayaran kewajiban bunga utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien dan hati-hati. Perkembangan anggaran Fungsi Pelayanan Umum dalam periode 2021-2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.9.**

GRAFIK 4.9
FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan negara adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan wilayah serta rakyat dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi Pertahanan mencakup beberapa aspek utama, antara lain: (1) melindungi kedaulatan negara dengan menjaga wilayah dan pemerintahan agar tetap utuh dan tidak diganggu oleh pihak luar atau kelompok separatis; (2) menjaga keamanan nasional dengan melindungi masyarakat dari

ancaman seperti spionase, sabotase, dan konflik bersenjata; (3) pertahanan negara juga berperan dalam memperkuat posisi diplomatik melalui kerja sama militer dan keamanan dengan negara lain; (4) membangun ketahanan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (Pemerintah dan masyarakat) dalam menjaga stabilitas dan daya tahan negara terhadap berbagai gangguan; dan (5) pendidikan dan kesadaran bela negara dengan meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya ikut serta dalam upaya pertahanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

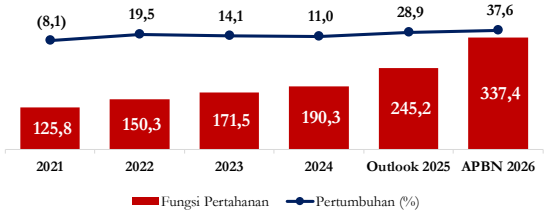
Anggaran dalam Fungsi Pertahanan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, dan Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,8 persen, yaitu dari Rp125.798,9 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp190.271,1 miliar pada tahun anggaran 2024. Peningkatan realisasi anggaran tersebut terutama untuk pengadaan dan modernisasi alutsista/nonalutsista dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI serta mengantisipasi dinamisasi geopolitik.

Pada tahun anggaran 2025, *outlook* Fungsi Pertahanan diperkirakan Rp245.236,5 miliar. Belanja Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2025 dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengadaan alutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista; (3) pembangunan rumah dinas prajurit; dan (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Pertahanan Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga diperlukan penguatan pada bidang pertahanan dan keamananan. Oleh karena itu, Pemerintah akan berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur pertahanan melalui pendekatan *Optimum Essential Force* (OEF) untuk mencapai kemampuan pertahanan negara yang ideal sebagai fondasi kedaulatan bangsa, kemandirian ekonomi, sosial, dan politik untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, arah kebijakan Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2026 dalam mendukung terwujudnya keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI, dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: (1) penguatan pertahanan negara melalui pemenuhan dan modernisasi alutsista; (2) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri; (3) penguatan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung; (4) penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara; serta (5) penguatan siber, sandi, dan sinyal dalam menjaga ketahanan negara di era digital.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Pertahanan dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp337.371,8 miliar*. Berdasarkan anggaran tersebut, *output* stategis pada Fungsi Pertahanan pada tahun anggaran 2026, antara lain: (1) pengadaan alutsista dan nonalutsista; (2) pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista dan nonalutsista; (3) pembangunan rumah dinas prajurit dan pos pengamanan perbatasan (pamtas); (4) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan; (5) penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalion dan kodam; serta (6) operasi bidang pertahanan. Perkembangan anggaran Fungsi Pertahanan dalam tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.10.**

GRAFIK 4.10
FUNGSI PERTAHANAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

*) *Sebagian dalam pipeline PLN*

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Fungsi Ketertiban dan Keamanan merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Fungsi Ketertiban dan Keamanan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa K/L, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam periode tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,5 persen, yaitu dari Rp157.369,6 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp230.128,0 miliar pada tahun anggaran 2024. Peningkatan anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh dukungan pelayanan internal Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pengamanan mudik lebaran, dan pengembangan peralatan Polri/Almatsus.

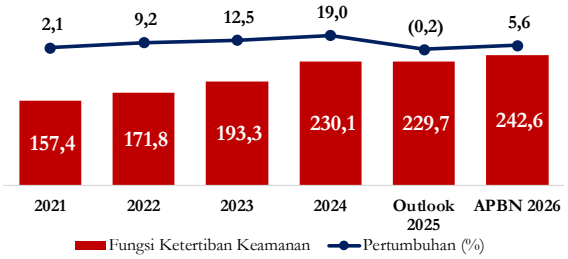
Selanjutnya, *outlook* Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp229.716,0 miliar. Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2025 dimanfaatkan antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) bantuan hukum litigasi; (3) penanganan tindak pidana narkoba; (4) penegakan hukum di wilayah perairan; (5) penanganan tindak pidana siber; (6) pelatihan integritas ASN; (7) operasi pemusnahan lokasi lahan tanaman narkotika; dan (8) penanganan dan pemulihan aset yang terkait perkara.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak-hak masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: (1) dinamika geopolitik dan potensi eskalasi ketegangan di kawasan dapat memengaruhi stabilitas keamanan kawasan; (2) upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, perluasan cakupan pemantauan ruang siber; (3) kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme dan separatisme/ konflik; serta (4) deradikalisme. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada tahun anggaran 2026 antara lain melalui: (1) penguatan alat dan sistem keamanan negara; (2) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; (3) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (4) penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (5) penguatan gerakan dan pendidikan anti narkotika, serta pencegahan dan penanggulangan narkoba; (6) peningkatan hubungan internasional yang kondusif; (7) penguatan kelembagaan dan budaya hukum; (8) pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran hukum; (9) pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang; (10) penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, dan PTUN; serta (11) pengembangan kompetensi di bidang teknis peradilan.

Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp242.568,1 miliar. Adapun target output prioritas Fungsi Ketertiban dan Keamanan pada tahun anggaran 2026 antara lain: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan judi konvensional dan online sebanyak 411 perkara; (3) penanganan tindak pidana siber sebanyak 30 perkara; (4) penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 7 perkara; (5) penanganan penyelundupan manusia (people smuggling)

sebenyak 40 perkara; (6) pelatihan penguatan integritas ASN/APH sebanyak 1.050 orang; (7) operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara sebanyak 25 perkara; dan (8) layanan pos bantuan hukum di PTUN sebanyak 3.362 orang. Perkembangan belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan dalam periode tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.11.**

GRAFIK 4.11
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Ekonomi

Anggaran Fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh beberapa K/L yang mengemban Fungsi Ekonomi diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Gizi Nasional, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, anggaran Fungsi Ekonomi juga dilaksanakan melalui beberapa program pada belanja non-K/L di antaranya: (1) program pengelolaan subsidi meliputi Subsidi Jenis BBM Tertentu, Subsidi LPG Tabung 3 kg, Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Subsidi Bunga KUR, Subsidi PSO Perkeretaapian, Subsidi PSO angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) program pengelolaan belanja lainnya untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik, serta operasional SKK Migas.

Anggaran Fungsi Ekonomi tersebut utamanya digunakan untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah diantaranya untuk: (1) melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi; (2) penguatan ketahanan pangan; (3) pemberdayaan ketahanan energi; (4) optimalisasi pemanfaatan TIK; (5) bantuan subsidi kepada MBR, UMKM, petani, dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam kurun waktu tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Ekonomi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8 persen, yaitu dari Rp461.417,6 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp546.197,7 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

Anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2021–2024 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah satunya dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan energi antara lain berupa: (1) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta api dan sarana prasarana perkeretaapian; (3) pembangunan dan pengembangan bandar udara; (4) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan laut; (5) pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi; serta (6) pemenuhan akses, pasokan energi dan tenaga listrik termasuk peningkatan infrastruktur energi (pengembangan teknologi penyimpanan energi dan pembangunan jaringan gas bumi).

Sementara itu, dalam *outlook* tahun 2025, anggaran Fungsi Ekonomi sebesar Rp707.465,0 miliar yang utamanya dipengaruhi oleh subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, subsidi bunga KUR, subsidi Pupuk, subsidi

PSO perkeretaapian dan PSO angkutan laut, serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik melalui program belanja lainnya. Selain itu, *outlook* anggaran Fungsi Ekonomi juga didorong oleh belanja K/L diantaranya melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Realisasi melalui belanja K/L tersebut antara lain digunakan untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur konektivitas termasuk penyediaan sarana dan prasarana transportasi, mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pemanfaatan TIK.

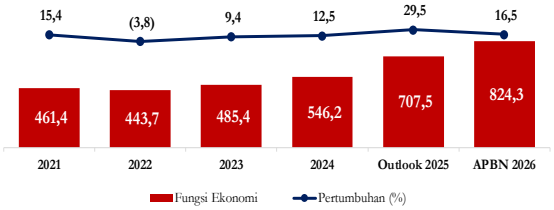
Beberapa kegiatan dan *output* melalui anggaran Fungsi Ekonomi diantaranya pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pembangunan/ modernisasi/peningkatan stasiun kereta api, pengembangan bandar udara dan pelabuhan, pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi, penguatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada proyek palapa ring dan kapasitas satelit, peningkatan akses internet, prasarana bidang kemaritiman, serta infrastruktur minyak dan gas bumi (jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan jaringan pipa gas transmisi ruas Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei).

Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Fungsi Ekonomi pada tahun 2026, meliputi: (1) mendukung program ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian dan infrastruktur pertanian serta sarana dan prasarana pertanian diantaranya penyediaan lahan pertanian, sarana produksi pertanian, serta pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan irigasi yang mendukung ketahanan pangan; (2) mendukung ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi termasuk penyediaan infrastruktur migas; (3) mendukung pengembangan dan pemerataan akses TIK dalam pemanfaatan teknologi digital; (4) melanjutkan pembangunan infrastruktur konektivitas dan jaringan transportasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah; (5) mendukung pembayaran kewajiban Pemerintah seperti kompensasi harga energi dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau; dan (6) melanjutkan pemberian bantuan program subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Guna mendukung kebijakan tersebut, anggaran Fungsi Ekonomi dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp824.299,2 miliar. Target yang akan dicapai pada tahun 2026 melalui anggaran Fungsi Ekonomi, antara lain: (1) pembangunan jalan nasional sepanjang 157,53 km; (2) preservasi jalan nasional sepanjang 1.571,15 km; (3) pembangunan jalan tol sepanjang 27,23km; (4) pembangunan jembatan sepanjang 4.081,98 m; (5) pembangunan *flyover/ underpass* sepanjang 150,0 m; (6) pengembangan 17unit bandara; (7) pengembangan pelabuhan Patimban (proyek I dan II); (8) pembangunan bendungan *on going* (kumulatif) 15 (14 lanjutan dan 1 selesai) unit; (9) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 15.851 Ha dan 197.430 Ha; (10) pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang dan ruas Dumai-Sei Mangkei; (11) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu jenis solar dengan volume 18.636,5 ribu kl dan jenis minyak tanah dengan volume 526 ribu kl; (12) penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg; dan (13) penyaluran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat kepada 6,1 juta debitur. Perkembangan

anggaran Fungsi Ekonomi dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.12.**

GRAFIK 4.12
FUNGSI EKONOMI, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2021–2024 dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial. Sementara pada tahun 2025, fungsi ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial.

Selama periode tahun 2021–2025, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dipergunakan antara lain untuk: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan konservasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove; dan (4) pengelolaan limbah. Dalam periode 2021–2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat dari Rp13.996,1 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp14.536,1 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya pada tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup diperkirakan sebesar Rp8.383,4 miliar pada *outlook* tahun 2025.

Pada tahun 2022 terdapat kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami penurunan. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022, yang antara lain dimanfaatkan untuk pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan limbah dan sampah, pemulihan lahan hutan, dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Pada tahun 2024, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023, yang antara lain dimanfaatkan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif, rehabilitasi ekosistem mangrove, bibit berkualitas dan bibit produktif, lahan gambut yang direstorasi, alat pemantauan kualitas air otomatis, alat pemantauan kualitas udara otomatis, dan infrastruktur teknologi informasi pertanahan dan ruang. Selanjutnya anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 antara lain dimanfaatkan untuk pengendalian pencemaran lingkungan; konservasi keanekaragaman hayati; pengelolaan sampah; rehabilitasi hutan; rehabilitasi ekosistem mangrove; penghijauan dan pengembangan perbenihan tanaman hutan; adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; pengukuran dan pemetaan kadastral; serta pendaftaran tanah dan ruang.

Adapun *output* prioritas Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2021–2025 antara lain: (1) indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 71,45 poin pada tahun 2021 dan ditargetkan sebesar 76,49 poin pada tahun 2025; (2) hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 57.277 ha pada tahun 2021 dan ditargetkan seluas 3.800 ha pada tahun 2025; (3) peta bidang tanah sebanyak 9.867.320 bidang pada tahun 2021 dan ditargetkan sebanyak 4.517.593 bidang pada tahun 2025;

(4) penurunan emisi gas rumah kaca; dan (5) stasiun Indonesia *Continuously Operating Reference Station* (Ina-CORS) yang terbangun sebanyak 86 unit pada tahun 2021 dan ditargetkan sebanyak 5 unit pada tahun 2025.

Selanjutnya, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2026 dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial. Pada tahun 2026 anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2026 yaitu Memantapkan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Adapun kebijakan Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup pada tahun 2026 diarahkan antara lain untuk: (1) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (3) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan (4) penguatan pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pengelolaan sampah; (2) pengendalian pencemaran lingkungan; (3) pengendalian kebakaran lahan; (4) penghijauan dan pengembangan perbenihan tanaman hutan; (5) rehabilitasi hutan; (6) konservasi keanekaragaman hayati; (7) konservasi ekosistem, spesies, dan genetik; (8) penyelenggaraan peta dasar geospasial; (9) pengukuran dan pemetaan kadastral; (10) pembinaan perencanaan tata ruang daerah; serta (11) pendaftaran tanah dan ruang.

Selanjutnya dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dialokasikan sebesar Rp13.358,6 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya seluas 75 ribu hektar; (2) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan seluas 6.400 hektar; (3) indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,67 poin; (4) indeks kinerja pengelolaan sampah sebesar 61 poin; dan (5) penurunan emisi gas rumah kaca;. Perkembangan anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.13.**

GRAFIK 4.13
FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada periode tahun 2021-2024 dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tahun 2025 beberapa Kementerian mengalami restrukturisasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, sehingga mulai Tahun 2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman , Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga

Penyediaan Air Minum. Selama periode tahun 2021–2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dimanfaatkan antara lain untuk: (1) meningkatkan akses MBR terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; (2) meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; dan (3) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami fluktuasi yaitu dari Rp30.621,5 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp48.104,1 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum diperkirakan sebesar Rp19.234,8 miliar.

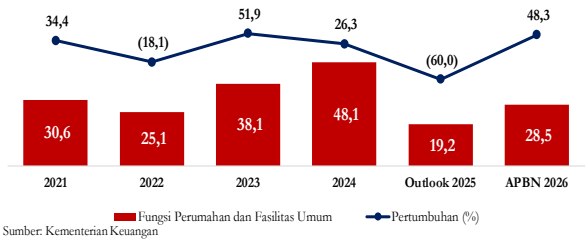
Pada tahun 2022, terdapat kebijakan anggaran yang difokuskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami penurunan. Pada tahun 2023, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang antara lain dimanfaatkan untuk penyelenggaraan permukiman, penyediaan akses rumah layak huni, penyediaan sanitasi yang layak, dan penyediaan air minum yang layak. Pada tahun 2024, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023, yang antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi direktif Presiden seperti pasar rusun dan Instruksi Presiden seperti Inpres Air Minum dan Air Limbah. Selanjutnya, anggaran pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum tahun 2025 dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyelenggaraan air minum yang aman; (2) penyelenggaraan sanitasi aman dan persampahan terpadu; (3) penyelenggaraan bangunan gedung dan pembangunan kawasan strategis; (4) penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman; (5) penyelenggaraan perumahan perkotaan; (6) penyelenggaraan perumahan perdesaan; (7) pembangunan desa dan perdesaan; (8) pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal; serta (9) pembangunan kawasan transmigrasi. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2021–2025, antara lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak 7.024 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.464 unit pada tahun 2025; (2) pembangunan rumah khusus sebanyak 3.311 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 476 unit pada tahun 2025; (3) prasarana dan sarana umum sebanyak 25.765 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.986 unit pada tahun 2025; (4) pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.300 liter/detik pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebesar 1.250 liter/detik pada tahun 2025; serta (5) sarana pemukiman yang dibangun di kawasan transmigrasi sebanyak 52 unit pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 854 unit pada tahun 2025.

Selanjutnya, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum pada tahun 2026 dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi. Selain melalui belanja K/L, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum juga dialokasikan pada belanja non-K/L yaitu melalui Subsidi Bunga Penyediaan Air Minum. Pada tahun 2026 anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mendukung salah satu Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2026 yaitu Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Adapun kebijakannya diarahkan antara lain untuk: (1) percepatan penyediaan perumahan dan permukiman; (2) peningkatan

kemandirian perdesaan yang berkelanjutan; dan (3) pembangunan perkotaan berkelanjutan. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) penyelenggaraan infrasruktur kawasan permukiman; (2) penyelenggaraan perumahan perdesaan; (3) peyelenggaraan perumahan perkotaan; (4) pembangunan desa dan perdesaan; dan (5) pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dialokasikan sebesar Rp28.533,2 miliar. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebesar 400.000 unit; (2) pembangunan rumah susun sebanyak 822 unit; (3) pembangunan rumah khusus sebanyak 654 unit; (4) prasarana dan sarana umum perumahan sebanyak 2.007 unit; (5) pembangunan SPAM dengan kapasitas 800 liter/detik; dan (6) sarana pemukiman yang dibangun di kawasan transmigrasi sebanyak 123 unit. Perkembangan anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.14.**

GRAFIK 4.14
FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Kesehatan

Realisasi anggaran Fungsi Kesehatan menunjukan tren yang dinamis dalam kurun waktu tahun 2021–2024. Pada tahun anggaran 2021, realisasi anggaran Fungsi Kesehatan sebesar Rp211.328,8 miliar dan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp99.345,8 miliar. Pada periode 2020-2022 anggaran Fungsi Kesehatan mengalami peningkatan signifikan yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sejak tahun 2023 Pemerintah terus berupaya mengantisipasi risiko kesehatan lainnya serta meningkatkan ketahanan bidang kesehatan.

Selama periode 2021-2024, anggaran Fungsi Kesehatan juga dimanfaatkan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan APBN melalui program JKN yang mendukung konsep cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) turut berperan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala masalah finansial. Sehingga, pemerintah melalui anggaran Fungsi Kesehatan terus berupaya agar program JKN dapat berkesinambungan antara lain melalui langkah-langkah: (1) pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar pemanfaatan program PBI Jaminan Kesehatan tepat sasaran; (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran Pemerintah kepada peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III; (3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Program JKN, dengan biaya yang terkendali; dan (4) peningkatan kepesertaan aktif JKN dan kolektabilitas iuran JKN.

Outlook Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2025 mencapai Rp124.682,2 miliar atau meningkat 25,5 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dalam upaya melanjutkan transformasi sistem kesehatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko kesehatan di masa depan, serta pemberian makanan bernutrisi bagi ibu hamil/menyusui dan balita.

Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan pada periode tahun 2021—2025 dimanfaatkan untuk *output* prioritas bidang kesehatan, antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui jaminan kesehatan sebanyak 93,5 juta jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi

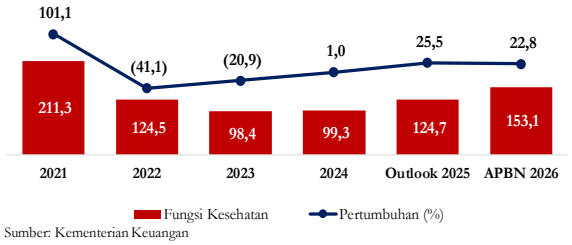
sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2025; (2) bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) sebanyak 2.068 orang pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 7.654 orang pada tahun 2025; dan (3) penanganan keluarga yang memiliki baduta terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari 3,9 juta keluarga pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 8,0 juta keluarga pada tahun 2025.

Kebijakan anggaran Fungsi Kesehatan pada tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas. Kebijakan Fungsi Kesehatan tahun anggaran 2026 yaitu: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (2) peningkatan cakupan cek kesehatan gratis (CKG); (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Target *output* prioritas Fungsi Kesehatan pada tahun anggaran 2026, di antaranya yaitu: (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; (2) bantuan makan bergizi kepada 2,2 juta ibu hamil, 2,4 juta ibu menyusui, dan 2,6 juta balita; (3) bantuan Pendidikan SDM Kesehatan untuk 6,3 ribu orang dan Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Papua dan Papua Barat untuk 85 orang; (4) pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) pada 21,2 ribu lembaga; dan (5) sampel makanan, obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sebanyak 59,4 ribu produk.

Guna mendukung kebijakan dan pencapaian target *output* tersebut, anggaran pada Fungsi Kesehatan dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp153.100,1 miliar atau meningkat 22,8 persen dari *outlook* tahun anggaran 2025. Anggaran pada Fungsi Kesehatan menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan anggaran Fungsi Kesehatan dalam periode 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.15.**

GRAFIK 4.15
FUNGSI KESEHATAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Anggaran pada Fungsi Kesehatan dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, BKKBN, dan BGN. Selain melalui Fungsi Kesehatan tersebut, terdapat belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di luar Fungsi Kesehatan yang berkontribusi pada kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait kesehatan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan.

Fungsi Pariwisata

Pada periode tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Pariwisata mengalami fluktuatif dengan realisasi sebesar Rp4.113,9 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp3.899,9 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Pariwisata diperkirakan sebesar Rp2.769,0 miliar. Pada tahun 2021 sektor pariwisata mengalami tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, yang menyebabkan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga sebagian besar hotel,

tempat hiburan, dan objek wisata tidak dapat beroperasi secara optimal.

Pada tahun 2022-2023, Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan meluncurkan program reaktivasi industri perhotelan sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor pariwisata. Program ini dirancang untuk menjaga kelangsungan operasional hotel sekaligus mendukung tenaga kesehatan yang bertugas di garis depan penanganan Covid-19. Langkah konkret dalam program reaktivasi meliputi penyediaan akomodasi khusus bagi tenaga kesehatan, pemberian insentif berupa pengurangan pajak, bantuan dana, dan pembebasan biaya tertentu bagi pelaku usaha perhotelan. Selain itu, pekerja hotel mendapatkan pelatihan untuk menerapkan protokol kebiasaan baru, dan diperkenalkan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) guna memastikan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan terpenuhi.

Dengan rangkaian inisiatif tersebut, program reaktivasi diharapkan dapat meredam efek negatif pandemi, memulihkan kepercayaan wisatawan, serta mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Tujuannya adalah menciptakan industri perhotelan yang lebih tangguh dan siap menyongsong tantangan masa depan.

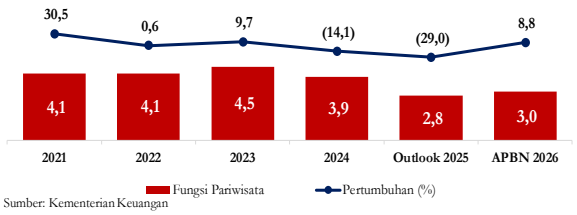
Memasuki tahun 2024, anggaran Fungsi Pariwisata dialokasikan untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RKP tahun anggaran 2024, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan di sektor pariwisata berfokus pada peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta investasi dan industrialisasi. Sementara itu, untuk tahun 2025, anggaran Fungsi Pariwisata dimanfaatkan antara lain untuk: (1) promosi, *event*, dan konferensi; (2) sertifikasi profesi dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) fasilitasi dan pembinaan industri parekraf; (4) fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, *start-up*, dan UMKM parekraf; (5) bimbingan teknis pengembangan *event* daerah; (6) bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif; (7) pembinaan olahragawan andalan nasional dalam peningkatan prestasi olahraga; dan (8) peningkatan potensi kemandirian pemuda.

Perkembangan anggaran Fungsi Pariwisata pada periode tahun 2021—2025 dimanfaatkan antara lain: (1) pelatihan SDM Ekonomi Kreatif sebanyak 100 orang pada tahun 2021, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.250 orang pada tahun 2025; (2) desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan sebanyak dua lokasi pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 18 kegiatan pada tahun 2025; (3) produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual yang diperkirakan terealisasi pada tahun 2025 sebanyak 150 produk; (4) peserta kampanye olahraga olimpik disekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi sebanyak 2.355 orang pada tahun 2021, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 17.000 orang pada tahun 2025; dan (5) pelatihan kader inti pemuda anti narkoba sebanyak 1.500 orang pada tahun 2021, dan diperkirakan terealisasi sebanyak 2.200 orang pada tahun 2025.

Pada APBN tahun anggaran 2026 anggaran Fungsi Pariwisata dialokasikan sebesar Rp3.011,5 miliar. Fungsi Pariwisata dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun target *output* prioritasnya antara lain: (1) bimbingan teknis pengembangan event internasional ditargetkan sebanyak 500 orang; (2) bimbingan teknis pengembangan wisata MICE ditargetkan sebanyak 1.275 orang; (3) diseminasi pemasaran pariwisata nusantara ditargetkan sebanyak 6.450 orang; (4) fasilitasi literasi bisnis untuk badan usaha ekonomi

kreatif ditargetkan sebanyak 120 badan usaha; (5) Pelatihan Talenta Digital ditargetkan sebanyak 1.000 orang; dan (6) kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi ditargetkan sebanyak dua lembaga. Perkembangan anggaran Fungsi Pariwisata dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.16.**

GRAFIK 4.16
FUNGSI PARIWISATA, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Agama

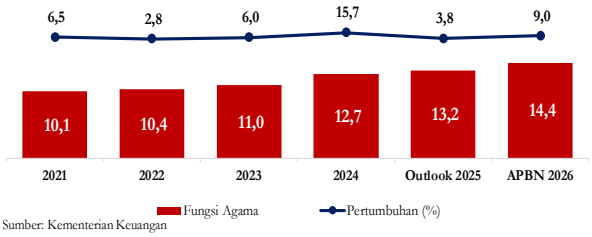
Sasaran strategis Fungsi Agama mencakup antara lain berupa meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; dan meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama. Pada periode tahun 2021–2024, realisasi anggaran Fungsi Agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,0 persen yaitu dari Rp10.106,5 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp12.738,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, pada *outlook* tahun anggaran 2025 anggaran Fungsi Agama diperkirakan terealisasi sebesar Rp13.219,1 miliar.

Arah kebijakan Fungsi Agama antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada Fungsi Agama; dan (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama, serta meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital, kemandirian pesantren, *cyber Islamic university,* dan peningkatan *religiosity index*.

Adapun *output* prioritas Fungsi Agama pada periode tahun 2021–2025, antara lain: (1) Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji sebesar 85,9 pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi mencapai 87,0 pada tahun 2025; (2) Indeks Kesalehan Umat Beragama sebesar 83,9 pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi mencapai 86,6 pada tahun 2025; (3) Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 72,4 pada tahun 2021 dan diperkirakan terealisasi mencapai 76,8 pada tahun 2025; dan (4) sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha sebanyak 959 ribu sertifikat pada tahun 2024 dan diperkirakan terealisasi sebanyak 1,2 juta sertifikat pada tahun 2025 .

Selanjutnya dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Agama dialokasikan sebesar Rp14.407,4 miliar. Fungsi Agama dikelola melalui Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun *output* prioritasnya antara lain: (1) layanan administrasi haji dalam negeri ditargetkan sebanyak 203,3 ribu jemaah; (2) petugas haji yang profesional ditargetkan sebanyak 1.200 petugas; (3) pembinaan lembaga penyelenggaraan ibadah haji khusus ditargetkan sebanyak 75 lembaga; dan (4) sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha yang ditargetkan sebanyak 1,3 juta sertifikat. Selain itu anggaran Fungsi Agama juga dilaksanakan untuk mendukung Prioritas lainnya yang merupakan lanjutan prioritas sebelumnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, transformasi digital. Perkembangan anggaran Fungsi Agama dalam periode 2021–2026 dapat dilihat pada **Grafik 4.17.**

GRAFIK 4.17
FUNGSI AGAMA, 2021–2026
(triliun rupiah)



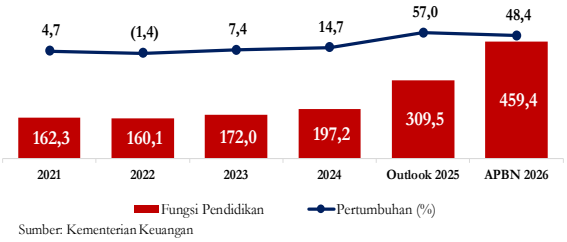
Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Pendidikan

Fungsi Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing yang dapat merespon berbagai tantangan pembangunan. Dalam kurun waktu 2021-2024, anggaran Fungsi Pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7 persen yaitu dari Rp162.346,0 miliar pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp197.180,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Pada tahun anggaran 2025, *outlook* anggaran Fungsi Pendidikan diperkirakan sebesar Rp309.542,4 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan kebijakan yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan antara lain melalui Revitalisasi Sekolah, Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana prasana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi; dan (8) peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Fungsi Pendidikan dialokasikan sebesar Rp459.413,7 miliar atau meningkat sebesar 48,4 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025. Dalam Fungsi Pendidikan terdapat sub Fungsi Pendidikan kedinasan yang tidak diperhitungkan sebagai anggaran pendidikan dan dalam Fungsi Pendidikan belum termasuk anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan pembiayaan. Adapun beberapa *output* prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 21,2 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa; (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 662,6 ribu guru; (4) MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat; dan (5) revitalisasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.744 sekolah/madrasah. Perkembangan anggaran Fungsi Pendidikan dalam periode 2021-2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.18.**

GRAFIK 4.18
FUNGSI PENDIDIKAN, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Selama periode tahun 2021–2024 anggaran pada Fungsi Perlindungan Sosial mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 1,8 persen per tahun, yaitu dari Rp272.675,2 miliar pada tahun anggaran

2021 menjadi Rp258.287,6 miliar pada tahun anggaran 2024. Penurunan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan PC PEN pada masa pandemi Covid-19 yang tidak dilanjutkan kembali seiring dengan beralihnya masa pandemi menjadi endemi di tahun 2023 serta pelaksanaan kebijakan normalisasi anggaran Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2024.

Dalam masa transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi, pemerintah tetap berupaya untuk mengoptimalkan Fungsi Perlindungan Sosial pada APBN sebagai *shock absorber* guna mengurangi tekanan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, antara lain berupa: (1) pada tahun 2021 dilaksanakan penyaluran bansos Sembako bagi masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai; (2) pada tahun 2022 dilakukan penyaluran BLT Minyak Goreng sebagai respons atas kenaikan harga minyak goreng dan penyaluran BLT BBM untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM; dan (3) pada tahun 2023 dilakukan penyaluran BLT El Nino sebagai respons atas perlambatan ekonomi yang terjadi akibat dampak El Nino.

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah berupaya mengoptimalkan peran anggaran Fungsi Perlindungan Sosial agar dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. *Outlook* anggaran Fungsi Perlindungan Sosial diperkirakan mencapai Rp272.879,5 miliar atau meningkat sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp258.287,6 miliar. Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2025 dialokasikan antara lain untuk: (1) penyaluran bantuan PKH; (2) penyaluran bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako; (3) pemberian rehabilitasi sosial dan layanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (4) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam; (5) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan penanganan komprehensif kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); (6) pemberian perlindungan bagi perempuan; (7) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan; serta (8) penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

Pada APBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dialokasikan sebesar Rp279.541,6 miliar atau meningkat sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2025. Anggaran tersebut akan diarahkan antara lain untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial. Adapun beberapa *output* pada Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2026 antara lain sebagai berikut: (1) bantuan pangan/kartu sembako bagi 18,3 juta KPM; (2) bantuan tunai bersyarat melalui program PKH bagi 10 juta KPM; (3) pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi 8 juta KPM; (4) pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan total sebanyak 126,6 ribu orang; (5) pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi 15 ribu KPM; (6) pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; (7) pemberian bimbingan teknis tentang kewirausahaan sebanyak 2.400 orang; (8) pemberian layanan tingkat nasional bagi AMPK korban kekerasan sebanyak 500 orang; (9) pemberian layanan rujukan akhir bagi Perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) sebanyak 300 orang; (10) penyaluran Subsidi Perumahan (SBUM Perumahan dan SBK Perumahan); serta (11) pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan. Perkembangan anggaran Fungsi Perlindungan Sosial dalam periode 2021–2026 dapat dilihat dalam **Grafik 4.19.**

GRAFIK 4.19
FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2021–2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

BOKS 4.3
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Pada APBN tahun anggaran 2026, Belanja Pegawai K/L dialokasikan sebesar Rp358.491,8 miliar. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L. Kebijakan Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2026 diarahkan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; (2) melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas; (3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan (4) menghitung kebutuhan ASN tahun 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan dan jumlah ASN yang pensiun serta berpedoman pada kebijakan *zero* atau *minus growth*.

Belanja Barang

Belanja Barang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pelaksanaan Belanja Barang yang efektif, efisien, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK melalui digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Selain itu, Belanja barang akan diprioritaskan untuk pengadaan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan belanja barang dilakukan secara transparan dan efisien untuk memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak perekonomian.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Belanja Barang K/L dialokasikan sebesar Rp705.488,2 miliar. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja Barang tahun anggaran 2026 antara lain difokuskan pada: (1) melanjutkan kebijakan efisiensi tahun 2025 sebagai baseline untuk penajaman Belanja Barang Operasional antara lain: perjalanan dinas, alat tulis kantor, kegiatan seremonial, lisensi aplikasi, pencetakan/souvenir, FGD/konsinyering/paket meeting/seminar, serta honorarium seiring dengan pemanfaatan TIK/digitalisasi birokrasi; (2) mengoptimalkan Belanja Pemeliharaan untuk menjaga nilai aset Barang Milik Negara (BMN); (3) meningkatkan kepatuhan

terhadap implementasi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur biaya; (4) melanjutkan sinkronisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada Pemda dan bantuan lainnya; serta (5) melanjutkan pendanaan kreatif untuk mendukung KPBU yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis belanja Pemerintah dalam APBN yang difokuskan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing yang mendukung transformasi ekonomi. Peningkatan kualitas belanja modal terus dilakukan salah satunya melalui penguatan pemanfaatan teknologi pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertahanan. Pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal diutamakan dengan komponen dalam negeri tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Sejalan dengan Tema dalam KEM PPKF tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, kebijakan fiskal tahun 2026 didesain untuk meredam gejolak, sekaligus mendukung agenda pembangunan. Kebijakan Belanja Modal tahun 2026, diarahkan untuk: (1) melakukan antisipasi dalam hal diperlukan langkah rekonstruksi Belanja Modal agar lebih efisien sebagai *fiscal buffer* dan fleksibilitas, khususnya untuk mendukung kebijakan strategis Presiden, dengan penajaman pada beberapa program/kegiatan/*output* terutama yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional ; (2) mendukung pendanaan kegiatan/*output* strategis yang mendukung PN serta berdampak kuat terhadap pertumbuhan secara sangat selektif berdasarkan skala prioritas; (3) mengembangkan pembiayaan inovatif untuk mendukung skema pendanaan konvensional secara lebih efektif dan efisien; (4) mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas; (5) mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, jaringan konektivitas, dan swasembada air. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, anggaran Belanja Modal dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp284.050,9 miliar.

Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan terhadap risiko sosial, Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan melalui program, antara lain PKH, BPNT/Kartu Sembako, PIP, Bantuan Pendidikan Mahasiswa/KIP Kuliah, Bantuan Iuran premi PBI Jaminan Kesehatan, serta pelaksanaan ATENSI bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada APBN tahun anggaran 2026, belanja bantuan sosial K/L dialokasikan sebesar Rp162.515,9 miliar, dengan arah kebijakan: (1) melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial antara lain seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP; bantuan premi PBI Jaminan Kesehatan, dan rehabilitasi sosial; (2) meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan DTSEN; sinergi antarprogram, penyempurnaan kelembagaan, serta perbaikan mekanisme penyaluran melalui digitalisasi bantuan; (3) mendorong pelaksanaan bantuan sosial adaptif dan sepanjang hayat yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif; serta (4) mendorong percepatan graduasi, antara lain melalui sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan lainnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3. Transfer ke Daerah

4.3.1. Perkembangan Transfer ke Daerah 2021-2025 dan Rencana 2026

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan alokasi belanja APBN ke daerah sebagai pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian TKD berbasis kinerja diimplementasikan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), untuk mempercepat peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Anggaran TKD selama periode tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,4 persen, yaitu dari sebesar Rp785.707,6 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp864.061,5 miliar pada *outlook* tahun 2025. Perkembangan anggaran TKD dalam periode 2021-2025 tersebut dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan implementasi UU HKPD pada tahun 2023, serta kebijakan efisiensi yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana mengendap di rekening kas daerah dan meningkatkan efisiensi belanja TKD. Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pusat dan daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengalokasian TKD tahun 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2026 sebagai berikut: (1) Transfer ke daerah utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional pemerintahan daerah dan layanan publik; (2) Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sejalan dengan kebijakan belanja negara dan mendukung program prioritas pemerintah; (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) mendukung pembangunan dan kegiatan layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan; (4) Dukungan TKD untuk implementasi Otonomi Khusus Aceh dan Papua serta Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (5) Dana Desa untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); (6) Pemerintah mendorong pembiayaan kreatif/ inovatif untuk pembangunan di daerah; dan (7) Kebijakan dan anggaran TKD menjadi satu kesatuan dengan program prioritas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Kebijakan dan anggaran TKD tahun 2026 tersebut tidak dapat dipisahkan dengan program prioritas Pemerintah di tahun 2026 yang dominan dilaksanakan dan dimanfaatkan untuk masyarakat daerah. Program prioritas Pemerintah tahun 2026 tersebut yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan TKD tahun 2026, diantaranya Makan Bergizi Gratis; Revitalisasi Sekolah dan Madrasah; TPG Non PNS dan TPD Non PNS serta pengembangan guru; PIP, KIP Kuliah, BOS dan Beasiswa lainnya; Sekolah Rakyat; Sekolah Unggulan Garuda; PBI Jaminan Kesehatan; Layanan Fasilitas Kesehatan; Subsidi Energi dan Kompensasi; Subsidi Non Energi; PKH dan Kartu Sembako; LPDP, Perumahan, KDMP, preservasi jalan dan jembatan; serta pembangunan lumbung pangan dan cadangan pangan. Anggaran untuk program prioritas Pemerintah di atas pada tahun 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.300,0 triliun, yang tidak dapat dipisahkan dan mendukung anggaran TKD tahun 2026

GAMBAR 4.1
TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

sebesar Rp692.995,0 miliar. Selanjutnya, rincian anggaran TKD tahun 2026 disajikan dalam **Gambar 4.1**.

4.3.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Sesuai ketentuan UU HKPD, pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya (T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase pembagian baru yang memperhatikan keadilan distribusi untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (pemerataan).

Pemerintah juga melakukan penambahan jenis DBH lainnya mulai tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan penggunaannya untuk infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan lainnya. Penggunaan DBH Perkebunan Sawit tersebut diharapkan dapat mendukung daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit, sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi barang dan jasa di daerah.

DBH terdiri atas: (1) DBH Pajak, yang terdiri dari DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri), DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan lainnya), serta DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); (2) DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), yang terdiri dari DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Panas Bumi, serta DBH SDA Perikanan; dan (3) DBH Perkebunan Sawit.

Kebijakan TKD termasuk DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, baik pada saat proses pengalokasian maupun penyaluran, yaitu berdasarkan UU HKPD, PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, serta PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Kebijakan pelaksanaan TKD berbasis kinerja tersebut tetap dilanjutkan pada tahun 2026.

Selama periode tahun 2021-2025, realisasi DBH mengalami tren meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,1 persen, dari sebesar Rp117.157,0 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp178.377,8 miliar pada *outlook* tahun 2025. Peningkatan DBH tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan dari sektor pajak, peningkatan harga komoditas pertambangan, serta penyelesaian Kurang Bayar (KB) DBH.

Kebijakan DBH tahun 2026 akan diarahkan untuk: (1) memperkuat sinergi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan program prioritas Pemerintah; (2) mendukung kapasitas APBD serta program prioritas tertentu yaitu cukai hasil tembakau, dana rebosiasi, dan tambahan DBH migas otsus; (3) meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; serta (4) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) yang telah mempertimbangkan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan program prioritas Pemerintah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan tersebut. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran 2026, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2024, KB DBH sampai dengan tahun anggaran 2023 telah diselesaikan sebesar Rp13.205,4 miliar. Pada awal semester II tahun 2025, dilakukan penyelesaian sebagian KB DBH s.d. tahun 2023 sebesar Rp18.516,5 miliar. KB DBH dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, pada APBN tahun anggaran 2026, DBH dialokasikan sebesar Rp58.515,0 miliar.

4.3.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Pagu DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan sinergi kebutuhan pendanaan program prioritas melalui Belanja Pemerintah, serta kebutuhan operasional pemerintahan daerah. Selanjutnya, pengalokasian pagu DAU antara provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

Selama periode 2021-2025, alokasi DAU cenderung meningkat, antara lain dipengaruhi oleh adanya kebijakan Pemerintah dalam dukungan pendanaan untuk PPPK dan kenaikan gaji ASND. Pertumbuhan DAU periode tahun 2021-2025 rata-rata sebesar 3,3 persen, yaitu dari sebesar Rp377.791,4 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp430.201,6 miliar pada *outlook* tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah terus melakukan perbaikan Belanja Negara yang mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja, termasuk pengelolaan DAU.

Pada tahun 2026, kebijakan DAU akan diarahkan untuk: (1) memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung tugas pemerintahan daerah; (2) mendukung kapasitas APBD serta melaksanakan program prioritas Pemerintah; (3) meningkatkan tata kelola DAU mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi; (4) meningkatkan kualitas dan akurasi data dasar perhitungan DAU; (5) penyesuaian perhitungan DAU untuk mendorong perbaikan pemerataan keuangan dan layanan publik; dan (6) melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Pengalokasian DAU pada tahun 2026 akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, dukungan pemenuhan belanja pegawai ASND, dan layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah. Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Faktor penyesuaian tersebut antara lain variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan. Sementara itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan antara lain potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per daerah dan perkiraan alokasi DAK Nonfisik tahun berkenaan per daerah. Pengalokasian DAU pada tahun 2026 juga memperhatikan kebutuhan pokok pemerintahan daerah sebagai upaya memberi dukungan dalam penyelenggaraan layanan dan birokrasi.

Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan data dasar yang bersumber dari beberapa instansi Pemerintah, yaitu:

1. kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN berdasarkan data gaji dan tunjangan melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari pemerintah daerah; dan (b) formasi PNSD berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. data jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
3. data luas wilayah yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut dari Badan Informasi Geospasial;
4. data panjang jalan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum;
5. data jumlah siswa yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. data IKK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik;
7. data Indeks Pariwisata yang bersumber dari Kementerian Pariwisata;
8. data Indeks Tutupan Lahan yang bersumber dari Kementerian Kehutanan;
9. data Indeks Pertanian yang bersumber dari Kementerian Pertanian;
10. data Indeks Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. data potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Kementerian Keuangan;
12. data perkiraan alokasi DBH yang bersumber dari Kementerian Keuangan; dan
13. data perkiraan alokasi DAK Nonfisik yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Kebijakan penyaluran dan penggunaan DAU tahun 2026 yaitu: (1) penggunaan DAU per daerah terdiri dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) dan (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Spesific Grant*); (2) penyaluran DAU dilaksanakan dengan berbasis kinerja, yaitu: (a) penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya berdasarkan penyampaian laporan belanja tertentu dan (b) penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan kinerja perencanaan anggaran dan kinerja laporan realisasi penyerapan; (3) penyederhanaan syarat salur DAU yang dilakukan melalui perampingan jumlah dokumen laporan syarat salur di tiap tahap penyaluran; dan (4) penyaluran DAU terintegrasi langsung dengan proses pemantauan dan evaluasi syarat salur dengan memanfaatkan teknologi informasi (pengembangan aplikasi penyaluran DAU).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanan penyaluran DAU, Pemerintah melaksanakan koordinasi dan pemberian edukasi secara berkala kepada pemerintah daerah dan mendekatkan layanan ke pemerintah daerah melalui pengalihan penyampaian syarat salur dan penyaluran DAU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selanjutnya, DAU dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp400.019,4 miliar.

4.3.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan tujuan (1) mempercepat pembangunan daerah, operasionalisasi layanan publik serta afirmasi daerah 3T; (2) menyinergikan DAK dengan Program Prioritas Pemerintah Pusat; (3) penguatan tata kelola penyaluran langsung kepada penerima manfaat dan penyedia layanan; (4) melanjutkan dukungan pembangunan dan pengembangan MRT Jakarta dengan menyinergikan pembiayaan dan Hibah kepada Daerah; dan (5) penguatan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai *output* yang direncanakan. Untuk mendukung kebijakan di atas, dalam APBN tahun anggaran 2026, DAK dialokasikan sebesar Rp157.090,0 miliar.

4.3.1.3.1. DAK Fisik

Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di daerah, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome* terutama penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, serta afirmasi daerah 3T.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik dilakukan dengan Belanja K/L dan pendanaan lainnya.

Selanjutnya, mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2021, DAK Fisik diarahkan untuk meningkatkan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya. Selain itu, DAK Fisik juga bersifat lintas sektor berdasarkan pada tema/program

yang mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu berkonsep tematik.

Mekanisme penyaluran DAK Fisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik, seperti perbaikan penyaluran bertahap DAK Fisik untuk meminimalisir potensi sisa DAK Fisik serta optimalisasi sisa DAK Fisik yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk memaksimalkan kemanfaatan/dampak DAK Fisik. Perbaikan tata kelola DAK Fisik tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Selanjutnya sejak tahun 2023, dilakukan penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional, yang semula ditetapkan oleh masing-masing K/L pengampu DAK Fisik menjadi satu peraturan Presiden melalui rincian Perpres Nomor 15 Tahun 2023, Perpres Nomor 57 Tahun 2024, dan Perpres Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik. Kebijakan penyatuan ini mempercepat proses pelaksanaan pengadaan di daerah. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan DAK Fisik dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.

Dalam periode tahun 2021-2025, alokasi DAK Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik dalam rangka perbaikan pengelolaan yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Pada *outlook* tahun 2025, DAK Fisik diperkirakan mencapai Rp17.618,9 miliar dan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional melalui bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, perdagangan, industri kecil dan menengah, serta perlindungan perempuan dan anak, salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kesehatan untuk peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Adapun hasil pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana layanan publik yang didanai oleh DAK Fisik dalam periode tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam **Gambar 4.2**.

Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2026, DAK Fisik dialokasikan sebesar Rp5.000,0 miliar yang akan diarahkan untuk dukungan pendanaan pembangunan di bidang-bidang yang merupakan urusan wajib dan atau sarana prasarana dasar sesuai prioritas nasional, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan *stunting*, serta produksi dan distribusi

GAMBAR 4.2
CAPAIAN *OUTPUT* DAK FISIK, TAHUN 2021-2025



Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: *output* tahun 2025 merupakan data target

pertanian, terutama pada daerah 3T. Untuk mendukung hal di atas, DAK Fisik tahun 2026 difokuskan pada bidang kesehatan, air minum, sanitasi dan persampahan, jalan, dan pertanian. Selanjutnya, sasaran *output* DAK Fisik tahun 2026 antara lain:

1. Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan:
   a. pembangunan ±31 puskesmas rusak berat di 31 Kab/Kota;
   b. penguatan RSUD untuk mendukung layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU)-Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di ±242 RSUD (16 Prov dan 224 Kab/Kota); dan
   c. penyediaan ±11 sarana RSUD (1 Prov dan 10 Kab/Kota), ±13 prasarana RSUD (13 Kab/Kota) dan ±30 alat kesehatan (1 Prov dan 29 Kab/Kota).
2. Bidang Konektivitas Subbidang Jalan:
   a. penanganan ±478 km jalan, dan
   b. penanganan ±89 m jembatan.
3. Bidang Air Minum:
   a. perluasan SPAM Jaringan Perpipaaan ±22.831SR;
   b. peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan ±14.115 SR; dan
   c. pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan ±9.617 SR.
4. Bidang Sanitasi:
   a. pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) skala individual dan komunal berupa tangki septik individual untuk minimal 50 KK sebanyak ±18.374 unit; dan
   b. penyediaan sarana dan prasarana pengeolaan sampah ±14 unit.
5. Bidang Pangan Pertanian Subbidang Pertanian:
   a. jalan pertanian sebanyak ±78 unit;
   b. pembangunan unit olahan pakan ternak sebanyak ±18 unit;
   c. pembangunan prasarana pengolahan dan bangsal pasca panen ±5 unit;
   d. pembangunan/renovasi balai penyuluhan pertanian dan sarana pendukungnya sebanyak ±45 unit;
   e. pembangunan *screen house modern* sebanyak ±15 unit;
   f. fasilitas revitalisasi *rice milling unit* dan prasarana pendukungnya sebanyak ±25 unit; serta
   g. pembangunan/renovasi puskeswan dan penyediaan sarana pendukungnya sebanyak ±35 unit.

4.3.1.3.2. DAK Nonfisik

Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik dalam APBN untuk mempercepat penyediaan layanan dasar publik di daerah. Kegiatan yang didanai DAK Nonfisik merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan operasionalisasi layanan publik, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pemerataan pelayanan antardaerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Nonfisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran DAK Nonfisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan Belanja Pemerintah Pusat maupun antar Transfer ke Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama periode tahun 2021-2025, DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,0 persen, yaitu dari sebesar

Rp127.568,6 miliar pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp143.789,8 miliar pada *outlook* tahun 2025. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2025, DAK Nonfisik mengalami penyempurnaan kebijakan baik tata kelola pengalokasian dan penyaluran, cakupan, besaran *unit cost,* serta target sasarannya. Dalam lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik mengalami perubahan sesuai dengan program prioritas nasional. Cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi bantuan operasional satuan pendidikan, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil, bantuan kepariwisataan, bantuan untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan perempuan dan anak, fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil menengah, serta bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.

Mekanisme penyaluran DAK Nonfisik juga terus disempurnakan dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja pelaksanaan DAK Nonfisik, seperti penyaluran DAK Nonfisik langsung ke penerima manfaat. Perbaikan tata kelola DAK Nonfisik tersebut telah diatur dalam PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2026 difokuskan untuk: (1) Peningkatan layanan dasar publik yang difokuskan pada pendidikan dan kesehatan, termasuk Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); (2) Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); serta (3) Perluasan penyaluran langsung ke penerima manfaat untuk tunjangan guru ASND dan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK.

Selanjutnya, untuk mendukung arah kebijakan tersebut, DAK Nonfisik pada APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp149.343,3 miliar, lebih tinggi sebesar Rp5.553,5 miliar atau 3,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh perluasan sasaran pada beberapa jenis DAK Nonfisik. DAK Nonfisik pada tahun 2026 terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASND, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada tahun 2026, terdiri atas: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan (3) BOP Pendidikan Kesetaraan.

BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pemerintah terus meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOS, mulai dari peningkatan *unit cost* untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS Kinerja, peningkatan tata kelola penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sejak

tahun 2020, serta penggunaan *unit cost* majemuk sejak tahun 2021 untuk mendorong percepatan pemanfaatan dana BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dana BOS tahun 2026 terdiri atas: (1) BOS Reguler yaitu Dana BOS yang diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (DAPODIK DASMEN) dan memenuhi syarat sebagai satuan pendidikan penerima dana BOS; (2) BOS Kinerja yaitu dana BOS yang digunakan untuk menambah pendanaan program sekolah prestasi dan sekolah berkinerja terbaik dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS pada tahun 2026 masih akan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga *unit cost* yang ditetapkan dapat merefleksikan kebutuhan riil di daerah dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi satuan pendidikan penerima dana BOS dengan kebutuhan riil di sekolah. Sasaran dana BOS tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sehingga dana BOS terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja. Selanjutnya, jumlah sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler sekitar 43,7 juta siswa, dana BOS Kinerja sebanyak 3.691 sekolah prestasi, dan 32.751 sekolah berkinerja terbaik. Dari aspek kewilayahan, secara umum dana BOS turut memberikan keberpihakan kepada daerah-daerah berupa penerapan *unit cost* majemuk pada BOS Reguler dengan mempertimbangkan indeks biaya pendidikan dan indeks kemahalan daerah.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan dana BOP PAUD, mulai dari penggunaan *unit cost* majemuk dalam pengalokasian BOP PAUD Reguler dan pengalokasian BOP PAUD Kinerja mulai tahun 2022. Dana BOP PAUD bertujuan untuk mendanai operasional penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini yang bermutu. Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD merupakan satuan pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) dan peserta didik yang terdata dalam DAPODIK pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Sasaran BOP PAUD tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sehingga Dana BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD Reguler, dan BOP PAUD Kinerja. Pada tahun 2026 BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD Reguler dengan target sasaran 6,0 juta peserta didik, BOP PAUD Kinerja untuk 2.570 lembaga PAUD.

Pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami ketertinggalan dalam mengenyam pendidikan di jalur formal. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah (Paket C). Mulai dari tahun 2023, pengalokasian dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan indikator *unit cost* majemuk yaitu memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) sehingga *unit cost* tersebut diharapkan dapat merefleksikan kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan pendidikan kesetaraan. Sasaran BOP Pendidikan

Kesetaraan dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sehingga Dana BOP Pendidikan Kesetaraan terdiri dari BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja. Target sasaran BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2026 terdiri dari BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler sebanyak 1,0 juta siswa, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja untuk 1.351 lembaga kesetaraan.

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND)

Tunjangan Guru ASND dalam tahun 2026 meliputi: (1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND; (2) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND; dan (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND.

Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang diberikan kepada PNSD dan PPPK di daerah yang telah bersertifikasi. Pemberian dana TPG ASND dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran dana TPG ASND setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan untuk peningkatan kualitas pengalokasian dana TPG ASND, khususnya terkait dengan penguatan akurasi data dan sasaran guru penerima melalui DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas daerah yang diperhitungkan melalui proses pengalokasian dan pengendalian penyaluran sesuai kebutuhan. Sasaran TPG ASND dipengaruhi oleh penambahan target sasaran guru yang telah bersertifikasi dan pemutakhiran DAPODIK. Selanjutnya, dana TPG ASND tahun 2026 ditujukan bagi sekitar 1,7 juta guru/tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat, meningkat sebanyak 77,0 ribu guru/tenaga pendidik dari tahun 2025.

Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) ASND dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru yang belum bersertifikasi melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,00 per-bulan selama 12 bulan tidak termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR). Sasaran Tamsil ASND tahun 2026 dipengaruhi oleh perubahan target sasaran dari semula 332,2 ribu guru di tahun 2025 menjadi 22,7 ribu guru pada tahun 2026 sejalan dengan pergeseran guru/tenaga pendidik penerima tambahan penghasilan yang telah bersertifikasi.

Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND dialokasikan sebagai kompensasi atas kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, seperti daerah terpencil, terbelakang, dan daerah perbatasan dengan negara lain, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri yang memiliki kewenangan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Dana TKG ASND pada tahun 2026 ditujukan bagi sekitar 65,9 ribu guru.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dana BOK dialokasikan untuk mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan *stunting,* serta meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan melalui tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan

kepulauan sebagai bentuk kebijakan afirmasi dalam upaya meningkatkan peminatan dan retensi dokter spesialis untuk bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Selain itu, dari aspek kewilayahan, secara umum dana BOK turut menunjukkan keberpihakannya dengan intervensi menu dan kegiatan tertentu untuk peningkatan capaian indikator kesehatan terutama pada DTPK.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola dana BOK, antara lain simplifikasi sistem pelaporan BOK, penyaluran langsung subjenis BOK Puskesmas ke rekening puskesmas sejak tahun 2023, dan untuk subjenis BOK baru yaitu Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan penyalurannya langsung ke rekening dokter mulai tahun 2026.

Dalam tahun 2026 Dana BOK terdiri atas: (1) BOK Dinas; (2) BOK Puskesmas; (3) BOK POM; dan (4) Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan. Selanjutnya, target sasaran Dana BOK pada tahun 2026 ditujukan untuk 10.221 puskesmas, 545 daerah, dan 1.773 dokter.

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Pemerintah mengalokasikan dana BOKB yang bertujuan untuk mendanai: (1) program/ kegiatan pelayanan KB; (2) percepatan penurunan *stunting*; (3) penggerakan di Kampung KB; (4) penggerakan lini lapangan; dan (5) pembinaan program Bangga Kencana. Selanjutnya, dana BOKB tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Program Bangga Kencana pada 6.448 balai penyuluhan KB serta penanganan desa lokus *stunting*.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya

Dana BOP Museum dan Taman Budaya dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya. Dana BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya guna mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya. Selanjutnya, dana BOP Museum dan Taman Budaya tahun 2026 ditujukkan bagi 111 museum dan 29 taman budaya.

Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA)

Dana Pelayanan PPA mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan perkawinan anak di daerah yang ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/ kota dengan memperhatikan kewenangan penyediaan layanan PPA di daerah.

Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan: (1) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta (3) penguatan data dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, Dana Pelayanan PPA tahun 2026 ditujukan bagi 305 pemerintah daerah.

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah

Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah merupakan jenis DAK Nonfisik yang mulai dialokasikan pada tahun 2025 dengan tujuan untuk memberikan layanan perpustakaan di daerah yang merata dan

berkualitas serta meningkatkan budaya literasi. Selanjutnya, Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah ditujukan bagi 272 daerah.

4.3.1.3.3. Hibah kepada Daerah

Hibah kepada Daerah merupakan salah satu komponen pendukung untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama adalah peruntukannya yang telah ditetapkan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai *Executing Agency* (EA), dan dilakukan melalui Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber dana Hibah kepada Daerah dapat berasal dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan Penerimaan Dalam Negeri. Dalam periode tahun 2021-2024, rata-rata kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah 73,6 persen dari pagu dengan kinerja realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,0 persen dari pagu.

Pemanfaatan program Hibah kepada Daerah berperan penting dalam mendukung ketercapaian prioritas nasional di daerah antara lain melalui penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah kepada Daerah pada tahun 2024 antara lain: (1) pembangunan 103,9 km jalan usaha tani; (2) sekolah lapang untuk 25.533 petani; (3) bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 3.572 unit dan 368 paket; (4) pemberian sarana produksi pertanian kepada 2.017 orang; (5) pelatihan sekolah bisnis kepada 4.516 petani; (6) lanjutan pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 km; (7) peningkatan kinerja pada 17 PDAM; (8) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota di Kota Palembang dengan *progress* penyelesaian mencapai 100 persen; (9) pemasangan 16.496 tangki septik; dan (10) pengelolaan area hutan dan lahan di 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Jambi yang dikelola secara berkelanjutan.

Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada tahun 2024 dipengaruhi oleh: (1) kecepatan pelaksanaan kegiatan di daerah; (2) sinkronisasi perencanaan APBD dan APBN; (3) penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan OPD pengelola keuangan serta antara pemerintah daerah dengan EA; dan (4) permintaan penyaluran dari daerah yang tidak tepat waktu. Selanjutnya, dengan pagu sebesar Rp1.609,0 miliar di tahun 2025, diperkirakan realisasi penyalurannya mencapai Rp1.287,2 miliar atau 80,0 persen dari pagu.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah melalui: (1) meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan program hibah; (2) membangun koordinasi yang intensif dengan K/L teknis selaku EA dan pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; dan (4) memastikan ketercapaian *output* dari program hibah.

Kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2026 diarahkan untuk: (1) melanjutkan dukungan penyediaan moda transportasi cepat perkotaan berbasis rel (MRT) yang menjadi prioritas pembangunan nasional; (2) melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; dan (3) mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2026, terdapat 3 (tiga) jenis Hibah kepada Daerah, yaitu 2 (dua) jenis Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan 1 (satu) jenis hibah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan. Secara keseluruhan, Hibah kepada Daerah dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp2.746,7 miliar yang terdiri atas Rp2.740,7 miliar bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan dan Rp6,0 miliar bersumber dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan. Rincian jenis Hibah kepada Daerah tahun 2025-2026 dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Program Hibah kepada Daerah tahun 2026 dan perkembangannya dijabarkan sebagai berikut.

A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan

1. *Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*

Hibah MRT bersumber dari pinjaman *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang pelaksanaannya dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2034 dan diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai penerima hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan berperan selaku EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dimana pembangunan MRT telah menjadi prioritas pembangunan nasional. Target *output* di tahun 2025 yaitu: (1) lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km; dan (2) pembangunan jalur MRT Jakarta Koridor Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.

Pada tahun 2026, Hibah MRT akan digunakan untuk mengakomodasi pembangunan lanjutan MRT *North-South* Fase 2A dan MRT *East-West* Fase 1 Tahap 1 yang dialokasikan sebesar Rp2.607,6 miliar atau naik sebesar 140,3 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025. Kenaikan alokasi Hibah MRT pada tahun 2026 disebabkan akan dilaksanakannya lanjutan pembangunan MRT Jakarta *East-West* Fase 1 Tahap 1 oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)

Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) dengan pelaksanaan mulai tahun 2021 dan diperpanjang sampai dengan tahun 2026

TABEL 4.5
HIBAH KEPADA DAERAH, 2025-2026
(triliun rupiah)

Uraian			2025 Outlook	2026 APBN
A.	**Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**1,27**	**2,74**
	1	Mass Rapid Transit (MRT) Project	1,09	2,61
	2	The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)	0,19	0,13
B.	**Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan**		**0,01**	**0,01**
	1	Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape	0,01	0,01
T O T A L			**1,29**	**2,75**

Sumber : Kementerian Keuangan

untuk 14 (empat belas) daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Bertindak selaku EA Hibah UPLAND adalah Kementerian Pertanian. Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Target *output* di tahun 2025 yaitu: (1) pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km; (2) terasering lahan seluas 15 ha; (3) bantuan sarana produksi pertanian untuk 3.357 ha; dan (4) pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit, dengan komoditas meliputi padi organik, kentang, pisang, kopi, nanas, kapulaga, bawang merah, mangga, manggis, dan ternak domba. Pada tahun 2026, Hibah UPLAND dialokasikan sebesar Rp133,1 miliar dengan target *output* tahun 2026 yaitu: (1) pembangunan jalan usaha tani sepanjang 103 km; (2) bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.070 ha; dan (3) pengadaan alsintan sebanyak 778 unit.

B. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan

***Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL)**

Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan multilateral yang dikelola oleh World Bank dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berperan selaku EA. Hibah BioCF ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. Target *output* di tahun 2025 adalah pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 (empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Di tahun 2026, Hibah BioCF ISFL dialokasikan sebesar Rp6,0 miliar. Pada tahun 2026, Hibah BioCF ISFL akan digunakan untuk pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 (empat) KPH.

4.3.1.4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode tahun 2021-2025, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp19.482,9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp17.006,1 miliar pada *outlook* tahun 2025. Perkembangan alokasi Dana Otsus tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan pagu DAU nasional dan penurunan persentase Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, Dana Otsus untuk wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional. Sedangkan untuk Dana Otsus Aceh sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun keenam belas (TA 2023) sampai dengan tahun kedua puluh (TA 2027), Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan sebesar 1,0 persen dari pagu DAU Nasional.

Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Revisi Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah untuk lebih mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua sekaligus sebagai upaya evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Dana Otsus pada periode 20 tahun sebelumnya. Pelaksanaan lebih lanjut

atas UU Nomor 2 Tahun 2021 diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selanjutnya, kebijakan teknis atas pengelolaan Dana Otsus diatur melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Pengelolaan Dana Otsus dan DTI masih menghadapi beberapa tantangan antara lain: (1) kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola Dana Otsus dan DTI yang masih rendah; (2) kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan; (3) kualitas data dan informasi laporan pelaksanaan Dana Otsus dan DTI; dan (4) dukungan sistem informasi yang masih belum optimal.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI tahun 2026 meliputi: (1) mendukung Program Prioritas Nasional, dengan memperkuat sinergitas peran Kementerian/Lembaga; (2) mendorong penggunaan Dana Otsus untuk mendukung target capaian rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan daerah; (3) mengoptimalkan capaian output melalui sinergitas dengan sumber pendanaan lain di luar Dana Otsus; (4)meningkatkan kualitas penyaluran melalui simplifikasi penyaluran dengan tetap mengutamakan capaian kinerja realisasi anggaran dan capaian output; (5) meningkatkan kapasitas SDM melalui bimtek, asistensi, dan supervisi tata kelola Dana Otsus.; (6) mengefektifkan tata kelola Dana Otsus melalui integrasi sistem informasi yang ada di Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri (SIPPP-SIKD-SIPD) melalui sistem interoperabilitas.

Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan DTI disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dana Otsus dan DTI dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp14.000,6 miliar yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar Rp9.000,4 miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar Rp4.000,2 miliar; dan (3) DTI provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp1.000,0 miliar.

Penggunaan Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada ketentuan penggunaan Dana Otsus dan DTI yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, serta PMK Nomor 33 Tahun 2024. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan untuk bidang pendidikan paling sedikit 30 persen, untuk bidang kesehatan paling sedikit 20 persen, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2026, penggunaan Dana Otsus diprioritaskan untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain pendidikan, kesehatan, MBG, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Selanjutnya, penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan

pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

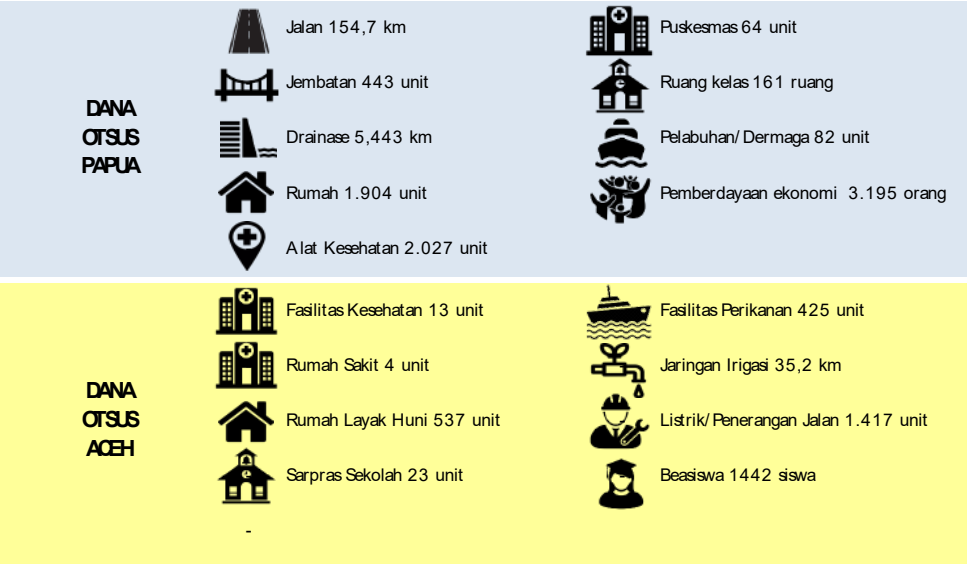
Anggaran DTI tahun 2026 dan sisa lebih perhitungan anggaran DTI sampai dengan tahun anggaran sebelumnya khusus untuk Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Dana Otsus Aceh sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diarahkan penggunaannya untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Mulai tahun 2024 mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI diatur melalui PMK Nomor 33 Tahun 2024. Penyaluran Dana Otsus Papua kepada masing-masing pemerintah daerah dilakukan secara langsung ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota. Adapun untuk penyaluran Dana Otsus kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih dilakukan melalui RKUD Provinsi. Sejalan dengan kebijakan penggunaan Dana Otsus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan Dana Otsus tahun 2024 telah menghasilkan beberapa capaian *output* utama, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana disajikan dalam **Gambar 4.3**.

4.3.1.5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

GAMBAR 4.3
CAPAIAN DANA OTSUS TAHUN 2024



Sumber: Laporan Tahunan Dana Otsus TA 2024 yang disampaikan Daerah per Bulan Juli 2025

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait, untuk dianggarkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dalam periode tahun 2021-2024, Dana Keistimewaan DIY mengalami peningkatan 2,5 persen, yaitu dari sebesar Rp1.320,0 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.420,0 miliar pada tahun 2024. Kemudian, pada *outlook* tahun 2025 Dana Keistimewaan DIY diperkirakan mencapai Rp1.000,0 miliar.

PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan merupakan salah satu *tools* dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Dana Keistimewaan DIY, menjaga efektifitas kemanfaatan *output*, serta meningkatkan akuntabilitas Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan tata kelola Dana Keistimewaan DIY dimulai dari usulan kebutuhan yang disampaikan ke pemerintah pusat sudah mendapatkan reviu dari Inspektorat Daerah Provinsi DIY. Reviu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Dana Keistimewaan DIY sesuai dengan Perdais, kesesuaian dengan prioritas daerah, kesesuaian dengan RPJMD, kesesuaian biaya dengan ketentuan satuan biaya, sinergi dengan sumber pendanaan lainnya, dan kesesuaian dengan ketentuan penggunaan.

Selanjutnya usulan tersebut akan dinilai dan dievaluasi oleh Pemerintah berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan rencana induk keistimewaan; (3) kesesuaian dengan dokumen perencanaan daerah; (4) kesesuaian dengan rencana kerja K/L; (5) kesesuaian dengan pencapaian kemanfaatan *output*; (6) kesesuaian dengan kewenangan keistimewaan DIY; (7) kesesuaian dengan ketentuan penggunaan; (8) kesesuaian dengan dokumen rencana tata ruang; dan (9) hasil pemantauan dan evaluasi K/L. Hasil penilaian dan evaluasi usulan Dana Keistimewaan DIY oleh pemerintah pusat menjadi dasar penyusunan penggunaan Dana Keistimewaan DIY di dalam RAPBD.

Peningkatan tata kelola juga dilakukan dengan penyederhanaan mekanisme penyaluran dengan penyederhanaan dan fleksibilitas penyampaian syarat salur. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan yaitu: (1) tahap I sebesar 15 persen disalurkan paling lambat bulan Maret; (2) tahap II sebesar 65 persen paling lambat bulan September; dan (3) tahap III sebesar 20 persen paling lambat bulan Desember, dengan persyaratan penyaluran yakni laporan tahunan, laporan realisasi anggaran, dan laporan capaian *output* yang telah diverifikasi.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY diantaranya: (1) kesenjangan antarwilayah di Provinsi DIY masih relatif tinggi; (2) angka kemiskinan di Provinsi DIY masih relatif tinggi; (3) masih terdapat sisa Dana Keistimewaan DIY di akhir tahun; (4) Pemerintah DIY belum menyelesaikan Rencana Induk Penggunaan Dana Keistimewaan sesuai amanat PP 37 Tahun 2023. Selanjutnya, usulan perbaikan kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, yaitu: (1) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY untuk: (a) wilayah yang masih tinggi angka kemiskinan di DIY; (b) program/kegiatan yang berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan; dan (c) mendukung program kebudayaan dan pariwisata; (2) mendorong Pemerintah DIY untuk menyelesaikan rencana induk penggunaan Dana Keistimewaan DIY; serta (3) melakukan efisiensi pada belanja jasa/

sewa, belanja pendukung seperti belanja barang habis pakai dan perjalanan dinas, serta fokus pada belanja pemberdayaan ekonomi.

Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya: (1) perbaikan kualitas evaluasi usulan Dana Keistimewaan DIY agar fokus pada kegiatan pengurangan kesenjangan dan angka kemiskinan; (2) revisi PMK Nomor 163 Tahun 2023; dan (3) mendorong Provinsi DIY segera menyelesaikan rencana induk keistimewaan yang akan menjadi salah satu acuan penggunaan Dana Keistimewaan DIY.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pada APBN tahun anggaran 2026, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sebesar Rp1.000,0 miliar, dengan arah kebijakan yaitu: (1) meningkatkan sinergi rencana kerja Dana Keistimewaan DIY dengan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung prioritas nasional; (2) meningkatkan sinergi penggunaan Dana Keistimewaan DIY dengan sumber penerimaan APBD lainnya; (3) fokus penggunaan Dana Keistimewaan DIY pada penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah di DIY; (4) mendorong pembentukan Dana Abadi Daerah yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY dan/atau sisa penggunaan Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran sebelumnya. Pembentukan Dana Abadi Daerah mengecualikan kapasitas fiskal Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai syarat pembentukan Dana Abadi Daerah; (5) meningkatkan efisiensi belanja perjalanan dinas dan belanja penunjang/operasional kegiatan; serta (6) mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.

4.3.1.6. Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang ditujukan untuk percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Dana Desa dialokasikan untuk setiap desa dengan formula pengalokasian memperhatikan antara lain alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus meningkat. Selama rentang waktu 2021-2025, Dana Desa menunjukkan pola yang berfluktuasi dan diproyeksikan mencapai Rp68.900,0 miliar pada *outlook* tahun 2025. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk program prioritas nasional, kondisi fiskal negara, serta bertambahnya jumlah desa penerima dari 74.961 desa pada tahun 2021 menjadi 75.259 desa pada tahun 2025.

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, Dana Desa diarahkan penggunaannya melalui program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa. Dana Desa juga mendukung penurunan prevalensi *stunting* melalui program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa. Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi, Dana Desa juga diperuntukkan untuk program ketahanan pangan dan hewani

Dampak nyata dari Dana Desa diantaranya adalah membaiknya status desa. Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menurun sebanyak 7.823

desa dari semula 18.284 desa pada tahun 2021 turun menjadi 10.461 desa pada tahun 2024. Selain itu, capaian *outcome* atas penggunaan Dana Desa selama periode 2021-2025 dapat diproksikan dari indikator penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,8 juta jiwa dari 15,4 juta jiwa pada Maret tahun 2021 menjadi 12,6 juta jiwa pada Maret tahun 2025. Selain itu, pada periode yang sama terdapat penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari semula 13,1 persen pada tahun 2021 menjadi 11,0 persen pada tahun 2025.

Sejak tahun 2024 dan berlanjut pada tahun 2025, penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan: (1) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas desa; dan (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Tahapan penyaluran Dana Desa mengalami perubahan, dari sebelumnya 3 (tiga) tahap sebelum tahun 2024 menjadi 2 (dua) tahap. Meskipun demikian, terdapat penambahan syarat salur yaitu perekaman pagu Dana Desa *earmarked* yang ditujukan untuk mendapatkan informasi pagu Dana Desa *earmarked* lebih awal. Perubahan penyaluran Dana Desa tersebut untuk mendorong desa bertransformasi menjadi desa mandiri dan mendorong desa menganggarkan Dana Desa selaras dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2026, yaitu:

1. mengarahkan fokus pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program Pemerintah berpedoman pada Asta Cita sesuai kewenangan desa, melalui: (a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan; (b) penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana; (c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa; (d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya; (e) dukungan implementasi koperasi desa merah putih; (f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa; (g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau (h) program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa;

2. memberikan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berupa: (a) pemberian dukungan pembiayaan melalui Dana Desa untuk KDMP; dan (b) pemberian dukungan pengembalian pinjaman dimaksud dalam rangka menjamin terjaganya kualitas aset pemberi pinjaman;

3. menambah kriteria Alokasi Afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana; serta

4. transformasi skema penyaluran dalam mendukung tata kelola APBN yang sehat dan kredibel.

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam APBN tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp60.570,0 miliar.

4.3.1.7. Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memacu pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis. Perkembangan Dana Insentif Fiskal periode tahun 2021-2025

cenderung fluktuatif dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dana Insentif Fiskal tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6.000,0 miliar yang dialokasikan untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4.000,0 miliar dan penghargaan kinerja tahun berjalan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam *outlook* tahun 2025, Dana Insentif Fiskal diproyeksikan mencapai Rp5.880,0 miliar. Pengaturan Dana Insentif Fiskal tahun 2025 diatur dalam PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan KMK Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik dalam rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dialokasikan berdasarkan nilai peningkatan kinerja dan/atau nilai capaian kinerja tahun terakhir. Alokasi Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya dibagikan kepada daerah yang berkinerja baik berdasarkan: (1) klaster daerah; (2) kriteria utama; dan (3) kategori kinerja.

Klaster daerah terdiri dari:

1. klaster A, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
2. klaster B, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/ kabupaten/kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal;
3. klaster C, merupakan daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/ kota dan tidak termasuk kategori daerah tertinggal; dan
4. klaster D, merupakan daerah dengan kategori daerah tertinggal.

Kriteria utama digunakan dengan ketentuan:

1. klaster A menggunakan indikator: (a) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 dan tahun 2023; dan (b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024;

2. klaster B menggunakan indikator: (a) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 2022 dan tahun 2023; dan (b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024;

3. klaster C menggunakan indikator: (a) opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023; dan (b) ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 2024; dan

4. klaster D menggunakan indikator minimal opini wajar dengan pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Kategori Kinerja terdiri atas: (1) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah; (2) kinerja pelayanan dasar; (3) kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional; dan (4) kinerja sinergi kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya, jumlah daerah yang mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal untuk kinerja tahun berjalan yaitu: (1) klaster A, 2 provinsi, 11 kota, 23 kabupaten; (2) klaster B, 2 provinsi, 5 kota, 19 kabupaten; (3) klaster C, 4 provinsi, 7 kota, 42 kabupaten; dan (4) klaster D, 19 kabupaten. Adapun Dana Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan telah dialokasikan sebesar Rp300,0 miliar.

Sesuai ketentuan PMK Nomor 91 Tahun 2024, Dana Insentif Fiskal digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa: (1) dukungan infrastruktur pelayanan publik; (2) peningkatan perekonomian; (3) pelayanan bidang kesehatan; dan/atau (4) pelayanan bidang pendidikan.

Beberapa isu dalam pelaksanaan Dana Insentif Fiskal diantaranya: (1) indikator kinerja terlalu banyak, di tahun 2025 untuk kinerja tahun sebelumnya terdapat 20 indikator kinerja; dan (2) pengalokasian bersifat komposit dari beberapa indikator, sehingga daerah tidak dapat mengetahui indikator mana kinerjanya yang lebih baik dari indikator lainnya. Dalam menangani isu tersebut disampaikan beberapa usulan perbaikan kebijakan, diantaranya: (1) penyederhanaan indikator kinerja; (2) lebih selektif dalam menentukan pemerintah daerah yang mendapat alokasi Dana Insentif Fiskal; dan (3) penggunan Dana Insentif Fiskal *Block Grant*.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Dana Insentif Fiskal dialokasikan sebesar Rp1.800,0 miliar, dengan arah kebijakan Dana Insentif Fiskal yaitu: (1) mengalokasikan Dana Insentif Fiskal pada tahun anggaran 2026 dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah; serta (2) Dana Insentif Fiskal dapat dialokasikan berdasarkan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat (penurunan pengangguran dan penurunan kemiskinan), penurunan prevalensi *stunting*, iklim investasi daerah, pengendalian inflasi, dan/atau kinerja pemerintah daerah lainnya.

Bab 5
Defisit dan Pembiayaan Anggaran

BAB 5
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.1. Pendahuluan

Kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2026 disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang dan transformasi struktural ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi perang tarif dan meluasnya konflik geopolitik menimbulkan ketidakstabilan yang berpotensi menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dunia, serta memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan APBN. Selain itu, meningkatnya ketegangan, fragmentasi, serta kecenderungan proteksionisme akan mendorong ekonomi biaya tinggi, mengganggu kelancaran rantai pasok global, dan memperlambat kinerja perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor. Di tengah tantangan itu, pembiayaan diharapkan tetap menjadi instrumen penting dalam APBN, yang tidak hanya berfungsi untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan dinamika tersebut, perkembangan defisit anggaran menunjukkan adanya upaya konsolidasi fiskal pascapandemi, di mana pada tahun 2023 defisit berhasil ditekan hingga mencapai level 1,61 persen terhadap PDB. Namun, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjawab berbagai tantangan, kebijakan fiskal kembali diarahkan untuk bersifat ekspansif di mana pada tahun 2024 defisit anggaran mencapai 2,30 persen terhadap PDB (setara dengan Rp509.161,5 miliar). Di tengah ketidakpastian dan melemahnya perekonomian global, implementasi kebijakan PPN 12% yang terbatas, dan pergeseran penerimaaan dividen BUMN dari sebelumnya masuk APBN menjadi beralih ke BPI Danantara yang memberikan tekanan pada pendapatan negara, maka *outlook* APBN 2025 diproyeksikan sebesar 2,78 persen terhadap PDB (Rp662.004,4 miliar) dengan tetap menjaga APBN dalam posisi sehat untuk mendukung agenda prioritas nasional dan transisi pemerintahan. Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah merencanakan defisit yang lebih terkendali di angka 2,68 persen dari PDB (Rp689.147,9 miliar). Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memulai kembali konsolidasi fiskal secara bertahap, sambil tetap menyediakan ruang yang cukup untuk belanja produktif dan akselerasi pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional, Pemerintah mengarahkan agar defisit kumulatif APBD terhadap PDB pada tingkat aman dan terkendali untuk menjaga konsistensi pengelolaan fiskal pusat dan daerah. Dengan demikian, total defisit nasional yang mencakup APBN dan APBD tetap berada dalam batas aman di bawah tiga persen dari PDB sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini mencerminkan upaya Pemerintah memperkuat kesinambungan fiskal serta memastikan sinkronisasi belanja pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2026, kebijakan fiskal diarahkan secara ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Hal ini diantaranya diwujudkan melalui strategi pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable baik melalui pembiayaan utang maupun nonutang. Dalam

APBN tahun anggaran 2026, Pembiayaan anggaran difokuskan dalam rangka mendukung agenda pembangunan strategis nasional, yaitu utamanya untuk mendukung kedaulatan pangan, energi dan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang optimal dengan biaya efisien dan risiko terkendali di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Strategi ini meliputi, pengendalian utang dalam batas aman dan manageable. Efektivitas pengelolaan utang akan terus ditingkatkan melalui penerbitan SBN dengan biaya dan risiko yang terkendali, serta mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan (*sustainable financing*) dengan senantiasa menjaga transparansi dan integritas pasar.

Pada aspek pembiayaan investasi, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat peran BLU dan SMV sebagai agen pembangunan strategis dalam mengelola pembiayaan investasi secara efisien dan tepat sasaran. Sinergi antarlembaga seperti BUMN, BPI Danantara, serta berbagai badan lainnya juga terus ditingkatkan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan MBR, serta mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, dan perumahan layak.

Di sisi lain, Pemerintah dapat memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai *fiscal buffer* dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pengelolaan SAL secara efisien dan optimal diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi APBN dalam menanggapi kondisi darurat maupun situasi ekonomi yang tidak terduga, sehingga stabilitas fiskal nasional tetap terjaga dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2026 menjadi bagian integral dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

5.2. Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 - 2025 dan Rencana Tahun 2026

5.2.1. Defisit APBN Periode 2021-2025 dan Rencana Defisit APBN Tahun Anggaran 2026

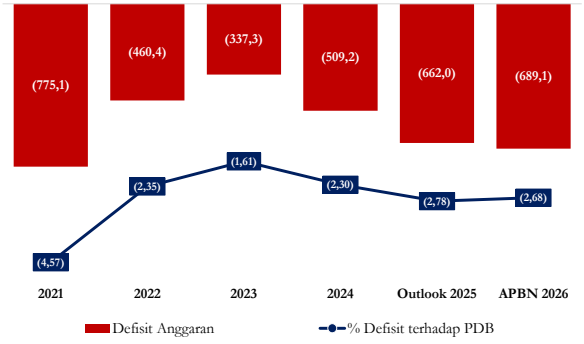
Dalam lima tahun periode RPJMN 2020-2024, Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan dan masa transisi dengan memperhatikan target pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini.

Secara umum defisit anggaran dijaga dalam batas aman (*prudent*) dan masih berada dalam level risiko yang terkendali (*risk appetite)*. Dalam perkembangannya, defisit anggaran cenderung turun dari 6,14 persen terhadap PDB pada tahun 2020 menjadi sebesar 4,57 persen terhadap PDB pada tahun 2021, namun masih di atas tiga persen terhadap PDB sebagai dampak dari kebijakan *extraordinary* Pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19. Tren positif terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023, di mana defisit anggaran secara bertahap terus menurun sehingga menjadi 2,35 persen dan 1,61 persen terhadap PDB. Realisasi defisit pada tahun 2024 dijaga sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Di tengah gejolak dan menurunnya pertumbuhan ekonomi

global, implementasi kebijakan PPN 12 persen yang hanya terbatas pada barang mewah, dan pergeseran penerimaaan dividen BUMN dari sebelumnya masuk APBN menjadi beralih ke BPI Danantara, kinerja pendapatan negara mengalami tekanan. Namun demikian, *outlook* defisit APBN 2025 tetap dapat dijaga pada kisaran 2,78 persen terhadap PDB dengan tetap mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah pada tahun 2025.

Dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah dengan DPR RI telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 mempunyai nilai strategis, karena merupakan APBN pertama yang disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga akan merefleksikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, APBN tahun anggaran 2026 juga dirancang untuk merespon gejolak perokonomian global dan risiko ketidakpastian, serta menjaga perekonomian domestik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka defisit APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 2,68 persen terhadap PDB atau Rp689.147,9 miliar dengan tetap menjaga APBN yang ekspansif dan sehat, namun tetap terarah dan terukur. Perkembangan defisit anggaran tahun 2021-2025 dan APBN tahun anggaran 2026 sebagaimana ditampilkan dalam **Grafik 5.1**

GRAFIK 5.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2. Pembiayaan Anggaran Periode 2021 - 2025 dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2026

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi melalui *counter cyclical* yang efektif, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan fiskal, arah kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2026 tetap dijaga secara pruden, inovatif dan *sustainable*, untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, yang ditempuh dengan: (1) mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan *manageable*, (2) optimalisasi dan sinergi Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle* (SMV), dan Badan Pengelola Investasi Danantara; (3) menggunakan SAL sebagai *fiscal buffer*; (4) meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi; (5) memperdalam pasar keuangan domestik, dan (6) mendorong pembiayaan inovatif, termasuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Dengan penyajian dimaksud akan didapat gambaran yang jelas terkait sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran secara keseluruhan. Berkaitan hal tersebut, pembiayaan anggaran dalam APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp689.147,9 miliar atau 2,68 persen terhadap PDB. Perkembangan pembiayaan anggaran tahun 2021-2026 ditampilkan pada **Tabel 5.1.**

TABEL 5.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2021 - 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
PENDAPATAN NEGARA	**2.011,3**	**2.635,8**	**2.783,9**	**2.850,6**	**2.865,5**	**3.153,6**
BELANJA NEGARA	**2.786,4**	**3.096,3**	**3.121,2**	**3.359,8**	**3.527,5**	**3.842,7**
KESEIMBANGAN PRIMER	**(431,6)**	**(74,1)**	**102,6**	**(20,7)**	**(109,9)**	**(89,7)**
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(775,1)**	**(460,4)**	**(337,3)**	**(509,2)**	**(662,0)**	**(689,1)**
% Defisit terhadap PDB	***(4,57)***	***(2,35)***	***(1,61)***	***(2,30)***	***(2,78)***	***(2,68)***
PEMBIAYAAN ANGGARAN	**871,7**	**591,0**	**356,7**	**554,9**	**662,0**	**689,1**
Pembiayaan Utang	870,5	696,0	404,0	558,1	715,5	832,2
Pembiayaan Investasi	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(59,3)	(139,7)	(203,1)
Pemberian Pinjaman	1,9	2,1	4,5	(0,2)	(0,4)	(0,4)
Kewajiban Penjaminan	(2,7)	(1,1)	(0,3)	(1,5)	-	-
Pembiayaan Lainnya	144,4	0,7	38,5	57,8	86,6	60,4
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	96,7	130,6	19,4	45,7	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.1. Pembiayaan Utang

Sebagaimana tertuang dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026, APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama, yaitu meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan. Di tengah kondisi global yang sarat ketidakpastian, peran APBN menjadi sentral dalam memitigasi risiko perekonomian yang meningkat sekaligus memastikan program-program pembangunan prioritas dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah memastikan rancangan strategi pengelolaan utang tahun 2026 dapat mendukung agenda tersebut. Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan sehingga APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan. Peran APBN sebagai *shock absorber* juga terus dioptimalkan dalam rangka menghadapi dinamika dan siklus perekonomian. Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara *prudent*, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal.

Di samping untuk memenuhi pembiayaan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai *policy enabler* untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang yang memenuhi prinsip-prinsip:

1) akseleratif, dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan;
2) efisien, dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang;
3) seimbang, dengan menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2021–2026 dapat dilihat pada **Tabel 5.2.**

TABEL 5.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2021 - 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
I. Surat Berharga Negara (Neto)	**877,5**	**658,8**	**308,2**	**450,7**	**585,1**	**799,5**
II. Pinjaman (Neto)	**(7,0)**	**37,2**	**95,8**	**107,3**	**130,4**	**32,7**
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	**0,9**	**8,2**	**14,6**	**15,0**	**9,5**	**(6,5)**
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2,5	10,1	17,5	20,1	16,7	7,3
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1,5)	(1,9)	(2,9)	(5,1)	(7,2)	(13,9)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	**(7,9)**	**29,0**	**81,2**	**92,3**	**120,9**	**39,2**
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	74,2	108,3	162,7	179,8	215,9	144,5
i. Pinjaman Tunai	41,6	65,6	83,0	60,0	69,0	41,9
ii. Pinjaman Kegiatan	32,6	42,7	79,7	119,7	147,0	102,6
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	30,6	40,9	81,6	115,5	142,3	98,0
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	2,0	1,8	(1,9)	4,2	4,7	4,7
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(82,1)	(79,3)	(81,5)	(87,5)	(95,1)	(105,3)
Jumlah	**870,5**	**696,0**	**404,0**	**558,1**	**715,5**	**832,2**

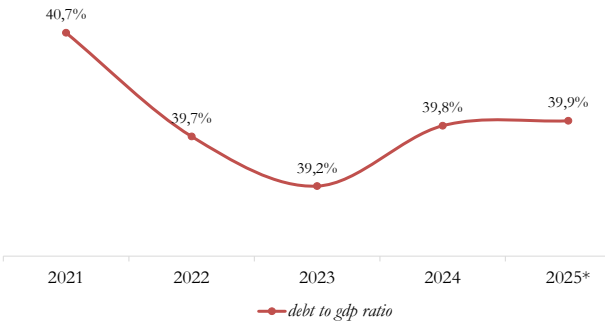
Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan pembiayaan utang tahun 2026 diarahkan sebagai instrumen penguatan *counter cyclical* yang dikelola secara *prudent* dan *sustainable*. Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengutamakan pembiayaan *innovative, prudent,* dan *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pembiayaan utang diarahkan untuk:

1) Mengendalikan utang dalam batas aman dan *manageable;*
2) Mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
3) Pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan
4) Menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

Pemerintah senantiasa mengelola utang secara pruden, terukur, dan terarah, dengan tetap menjaga risiko pada tingkat yang terkendali. Melalui penegakan disiplin fiskal yang konsisten, rasio utang terhadap PDB tetap terjaga stabil meskipun Indonesia menghadapi guncangan akibat krisis multidimensi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

GRAFIK 5.2
PERKEMBANGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB, 2021-2025
(persen)



* Realisasi s.d. Juni 2025
Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagaimana terlihat pada **Grafik 5.2**, selama periode 2021 hingga Semester I 2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, berada pada kisaran 39 persen. Pada tahun 2021, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, namun kembali turun di

bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai sebesar 39,8 persen.

Jika dibandingkan dengan negara-negara *peer* di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.3**. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen. Arah pengelolaan utang Indonesia terukur dan *prudent*. Meskipun dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan rasio utang dari 24,7 persen di 2014 menjadi 39,8 persen di 2024, namun posisi rasio utang Indonesia tetap relatif rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara berkembang lainnya. Peningkatan rasio utang Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif, tidak hanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis, tetapi juga sebagai respon atas krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah perlu menyediakan ruang fiskal yang cukup besar untuk program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk perlindungan sosial, vaksinasi, serta dukungan bagi dunia usaha. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menegakkan disiplin fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60,0 persen terhadap PDB.

TABEL 5.3
PERBANDINGAN RASIO UTANG TERHADAP PDB NEGARA SEKAWASAN *(EMERGING COUNTRIES)*, 2021-2024
(persen)

Negara	2021	2022	2023	2024
Argentina	80,8	85,0	156,6	83,2
Brazil	77,3	71,7	73,8	76,5
Malaysia	63,4	61,1	69,8	70,4
Philippines	60,4	60,9	60,1	60,7
Vietnam	39,2	34,9	34,4	32,9
Indonesia	40,7	39,7	39,2	39,8
Thailand	59,7	60,9	61,9	63,7

Dalam APBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp832.208,9 miliar yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara. Sementara itu, pinjaman Pemerintah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/proyek prioritas Pemerintah

Surat Berharga Negara

SBN merupakan instrumen utang yang sangat penting. Penerbitan SBN merupakan sumber utama pembiayaan utang untuk membiayai defisit APBN, pengelolaan kas Pemerintah, serta pengelolaan portofolio utang Pemerintah.

Selain sebagai instrumen fiskal, SBN juga merupakan instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat dan investor. SBN merupakan instrumen investasi yang aman karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin oleh Undang-Undang. SBN merupakan

instrumen investasi yang menguntungkan karena masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat memeroleh keuntungan baik dari imbal hasil atau kupon SBN itu sendiri maupun dari selisih harga jual dan beli SBN *(capital gain)*.

SBN juga digunakan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Selain itu, SBN turut berperan penting menjadi acuan *(benchmark)* bagi penerbitan obligasi atau sukuk korporasi oleh sektor swasta termasuk BUMN. Penerbitan obligasi atau sukuk korporasi akan mengacu kepada tingkat imbal hasil *(yield)* SBN dengan tenor yang bersesuaian (sebagai *benchmark*) untuk menentukan tingkat imbal *(yield)* yang wajar.

Penerbitan SBN dilakukan secara teratur dan dalam jumlah yang terukur dalam rangka memenuhi kebutuhan APBN dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan daya serap pasar. Pemerintah menerbitkan SBN di pasar domestik melalui lelang secara reguler maupun menerbitkan SBN ritel. Sementara itu, Pemerintah menerbitkan SBN di pasar internasional sebagai pelengkap dengan tujuan diversifikasi dan perluasan basis investor, mengelola daya serap pasar domestik, serta menyediakan *benchmark* untuk penerbitan obligasi atau sukuk korporasi di pasar internasional.

Pemerintah menerbitkan SBN ritel sebagai alternatif instrumen investasi yang khusus ditujukan kepada individu warga negara Indonesia (investor ritel) di pasar perdana. Sampai dengan saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima jenis SBN ritel, yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Savings Bond Ritel (SBR),* Sukuk Tabungan (ST), dan *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel)*. Penerbitan SBN ritel bertujuan memperluas basis investor SBN domestik, mendorong masyarakat berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang, serta mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Peran penting lainnya adalah turut mengembangkan dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh investor domestik dalam jangka panjang dapat mendukung terwujudnya pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid sehingga tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang berasal dari pasar keuangan global. Sejak tahun 2018, Pemerintah juga menerbitkan beberapa jenis SBN tematik dalam rangka mendukung pembiayaan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Penerbitan SBN tematik ini mengacu kepada *Green Bond and Green Sukuk Framework* tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan *SDGs Government Securities Framework* tahun 2021 dan *Sustainable Government Securities Framework* tahun 2025.

Hingga saat ini telah diterbitkan *Green Sukuk* di pasar global dan domestik, *Sustainable Development Goals (SDG) Bonds* di pasar global dan domestik serta *Blue Bonds* di pasar global *(Samurai market)*. Sejak pertama kali menerbitkan *Green Sukuk* pada tahun 2018 hingga Juli 2025, penerbitan *Green Sukuk* telah mencapai US$7,70 miliar di pasar global dan Rp83.020,3 miliar di pasar domestik. Sementara itu, hingga saat ini total penerbitan *SDG Bonds* sebesar EUR1,25 miliar di pasar global dan Rp16.852,8 miliar di pasar domestik. Adapun untuk *Blue Bonds* yang diterbitkan di *Samurai market* hingga saat ini telah mencapai JPY49,40 miliar.

Pengembangan terbaru lainnya dari SBN adalah melalui penerbitan tematik sukuk pada dimensi sosial, yaitu *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam mendukung Gerakan Wakaf Nasional, serta mendorong pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia. Melalui CWLS, Pemerintah memfasilitasi para wakif baik bersifat temporer maupun permanen, untuk menempatkan dana

wakafnya pada instrumen Sukuk yang aman dan produktif. Sejak pertama kali diterbitkan pada Maret 2020 dengan nilai Rp50,0 miliar, hingga akhir Juni 2025 CWLS telah mencapai total penerbitan sebesar Rp1.159,3 miliar.

Kepemilikan SBN Rupiah *tradable* dikelompokkan berdasarkan investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan dan Bank Indonesia mendominasi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai 44,2 persen terhadap *outstanding*. Secara rinci, perkembangan kepemilikan SBN *tradable* domestik masing-masing investor disajikan dalam **Tabel 5.4.**

TABEL 5.4
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN *TRADABLE* DOMESTIK, 2021-2025
(persen)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
Bank	34,0	32,0	26,5	17,4	19,0
Institusi Negara	17,1	19,2	19,4	26,8	25,2
Non Bank	48,9	48,8	54,1	55,8	55,7
- Reksadana	3,4	2,7	3,2	3,1	2,9
- Asuransi dan dana pensiun	14,0	16,4	18,5	19,0	19,0
- Non Residen	19,0	14,4	14,9	14,5	14,6
- Individu	4,7	6,5	7,7	9,0	9,3
- Lain-lain	7,7	8,8	9,8	10,2	10,0
Jumlah	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

* Posisi akhir Juni 2024
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp799.534,8 miliar atau naik jika dibandingkan dengan *outlook* APBN tahun 2025.

Dalam rangka memenuhi target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun anggaran 2026, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN untuk tahun 2026 sebagai berikut:

a) Penguatan sisi penawaran (*supply*) melalui: (1) memprioritaskan penerbitan di pasar domestik dan SBN Valas sebagai pelengkap; (2) mengelola portofolio SBN secara aktif; dan (3) diversifikasi instrumen SBN.
b) Penguatan sisi infrastruktur, melalui: (1) mengembangkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN dan *primary dealers*; dan (2) menyempurnakan infrastruktur IT transaksi pasar primer SBN , termasuk pengembangan *electronic trading platform*.
c) Penguatan sisi permintaan *(demand)* melalui: (1) pendalaman pasar keuangan; (2) perluasan basis investor maupun institusi; dan (3) sinergi kebijakan dengan otoritas sektor keuangan dan moneter.

Penerbitan SBN juga digunakan untuk *project financing* melalui penerbitan SBSN pembiayaan proyek. Pokok-pokok kebijakan pengalokasian pembiayaan proyek melalui SBSN tahun anggaran 2026, sebagai berikut:

a) Alokasi SBSN proyek akan ditetapkan dengan mengacu pada BMP-SBSN dan kebutuhan riil pembiayaan proyek dari K/L.
b) Alokasi SBSN proyek difokuskan pada pencapaian langsung agenda pembangunan sesuai RPJMN 2025-2029, utamanya proyek strategis *(major project)*.
c) Pengalokasian mempertimbangkan kapasitas eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya, termasuk aspek lahan, persyaratan teknis/administrasi, serta tata kelola penyelenggaraan proyek oleh K/L khususnya saspek pengadaan, pengendalian, dan pengawasannya.
d) Dilakukan implementasi *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan berdasarkan kinerja K/L pada periode sebelumnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

e) Mendorong optimalisasi SBSN dalam rangka integrasi/bauran pendanaan dengan berbagai sumber pendanaan lain dalam bentuk pembiayaan campuran *(blended financing)*, utamanya dengan KPBU.

Pinjaman

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, selain melakukan penerbitan SBN, Pemerintah juga melakukan penarikan Pinjaman. Pemerintah memanfaatkan Pinjaman sebagai salah satu instrumen dalam pembentukan portofolio yang optimal dengan biaya minimal dan dalam kerangka risiko yang dapat ditoleransi. Sebagai langkah diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah dapat melakukan pengadaan Pinjaman dalam bentuk Pinjaman Kegiatan dan Pinjaman Program, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Pembiayaan pinjaman (neto) pada APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp32.674,1 miliar, turun 74,9 persen dibandingkan *outlook* tahun 2025 sebesar Rp130.387,1 miliar. Pinjaman neto tersebut akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri neto sebesar negatif Rp6.536,5 miliar dan pinjaman luar negeri neto sebesar Rp39.210,6 miliar.

Pinjaman Dalam Negeri

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008), Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan daerah melalui penerusan pinjaman.

Pinjaman Dalam Negeri (neto) dalam APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar negatif Rp6.536,5 miliar, yang terdiri atas penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) sebesar Rp7.334,8 miliar dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp13.871,3 miliar. Alokasi Pinjaman Dalam Negeri (neto) tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target APBN tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.174,8 miliar dan target *outlook* APBN 2025 yaitu sebesar Rp9.522,0 miliar.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi perencanaan dan penganggaran Pinjaman Dalam Negeri dalam APBN;
2. Memprioritaskan akselerasi penyelesaian kegiatan prioritas Pemerintah dari RPJMN 2020-2024;
3. Memprioritaskan kapasitas pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan prioritas Pemerintah yang tercantum pada RPJMN 2025-2029;
4. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri; dan
5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pelaku industri dalam negeri di sisi kapasitas pelaksanaan kontrak.

Pinjaman Luar Negeri

Dalam rangka pembiayaan APBN dan pengelolaan portofolio utang yang optimal, Pemerintah memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri baik dalam bentuk pinjaman program dan pinjaman kegiatan. Pinjaman program digunakan untuk membiayai APBN secara umum *(general financing)* yang tidak terkait dengan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Sementara itu, pinjaman kegiatan digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu, khususnya proyek-proyek prioritas Pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman tunai tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengutamakan pinjaman tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dengan

memperhatikan kapasitas pemberi pinjaman dan ketersediaan *underlying* transaksi; dan
2. Memanfaatkan pinjaman tunai sebagai bantalan *(buffer)* pembiayaan APBN serta fleksibilitas instrumen pembiayaan APBN.

Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2026 direncanakan sebesar US$2,6 miliar. Target penarikan pinjaman tunai tersebut dapat disesuaikan dengan kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, pemenuhan *underlying* transaksi maupun kebutuhan fleksibilitas instrumen pembiayaan APBN.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan pinjaman kegiatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan;
2. Meningkatkan kualitas penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*) dan pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*);
3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman;
4. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan;
5. Memberikan *reward and punishment* sesuai dengan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Penarikan pinjaman kegiatan dalam APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp102.613,5 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok Pinjaman luar negeri tahun 2026 diproyeksikan sebesar negatif Rp105.332,8 miliar. Dalam pemenuhan pembayaran cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha agar dapat melaksanakan secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari risiko gagal bayar.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp39.210,6 miliar, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp144.543,4 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp105.332,8 miliar.

5.2.2.2. Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan serta mendorong peningkatan nilai tambah dalam perekonomian nasional. Investasi ini diwujudkan melalui penempatan dana dan/atau barang oleh Pemerintah untuk jangka panjang, dengan harapan dapat menghasilkan pengembalian nilai pokok disertai manfaat ekonomi, sosial, dan/atau bentuk manfaat lainnya di masa mendatang. Namun demikian, pembiayaan investasi saat ini menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Tantangan tersebut antara lain (1) dampak positif sosial dan ekonomi masih perlu dioptimalkan; (2) tata kelola perlu terus dijaga; (3) peran BLU masih perlu ditingkatkan; (4) kualitas SDM perlu ditingkatkan; (5) akses kesehatan dan penyediaan perumahan yang belum optimal; serta (6) peningkatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar K/L, pemerintah daerah, BPI Danantara/ BUMN, BLU, dan badan/lembaga lainnya.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka dalam APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah menyusun kebijakan dan arah pembiayaan investasi yang diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2025–2029 berfokus pada antara lain: (1) pengelolaan pembiayaan investasi untuk mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), serta energi baru terbarukan; (2) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle (SMV)*, dan *Sovereign Wealth Funds (SWF)*, serta (3) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada BUMN sebagai *agent of development*.

Pada APBN tahun anggaran 2025, sasaran kebijakan pembiayaan investasi antara lain: (1) melanjutkan dukungan untuk akses pembiayaan perumahan bagi MBR; (2) mendukung ketahanan pangan; (3) mendukung pembiayaan koperasi; (4) mengembangkan konektivitas dan layanan transportasi massal; serta (5) mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional.

Selanjutnya, pembiayaan investasi tahun 2026 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyediaan perumahan bagi MBR. Pembiayaan investasi untuk mendukung ketahanan pangan dilakukan melalui beberapa program Pemerintah di antaranya program peningkatan produksi pangan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Pembiayaan investasi tahun 2026 juga ditujukan untuk penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain itu, pembiayaan investasi juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan koperasi, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui pembiayaan kepada organisasi/ lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional.

Selanjutnya, kebijakan pembiayaan investasi di tahun 2026 antara lain ditujukan untuk: (1) meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal; (2) memberdayakan peran BLU dan SMV sebagai *agent of development* dan dukungan pembangunan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; (3) mendorong penguatan sinergi antara BPI Danantara, BUMN, BLU, SMV, dan badan/lembaga lainnya; serta (4) mendukung pengembangan pasar keuangan/pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2026 akan dikelola secara optimal dalam rangka menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pemerintah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembiayaan investasi melalui kebijakan pengalokasian yang selektif dan fokus bersinergi dengan agenda pembangunan pada RPJMN 2025-2029. Sementara itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi ukuran dalam memastikan optimalisasi dan batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi.

Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 0,8 persen terhadap PDB. Selain itu, alokasi pembiayaan investasi tahun 2026 juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN jangka menengah-panjang. Pembiayaan investasi dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah

pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan peran aktif sebagai *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, pembiayaan investasi (neto) dialokasikan sebesar negatif Rp203.056,8 miliar. Dari sisi pengeluaran investasi, dalam APBN tahun anggaran 2026, dialokasikan sebesar Rp207.051,5 miliar untuk investasi kepada BUMN dan BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/BUI, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen), dan pembiayaan investasi lainnya. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan investasi yang dicatat dalam penerimaan kembali investasi ditargetkan sebesar Rp3.994,7 miliar dalam APBN tahun anggaran 2026. Perkembangan pembiayaan investasi tahun 2021-2026 ditampilkan dalam **Tabel 5.5**.

TABEL 5.5
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2021-2026
(triliun rupiah)

URAIAN	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	APBN 2026
I. Investasi kepada BUMN dan BLU	**(135,2)**	**(112,0)**	**(94,6)**	**(58,2)**	**(38,9)**	**(41,5)**
II. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	**(21,0)**	**(0,5)**	**-**	**(5,0)**	**-**	**-**
III. Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI	**(0,9)**	**(1,0)**	**(1,6)**	**(2,0)**	**(1,8)**	**(2,0)**
IV. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**(10,0)**	**(20,3)**	**(19,5)**	**(17,0)**	**(39,3)**	**(51,8)**
V. Pembiayaan Investasi Lainnya	**-**	**-**	**-**	**-**	**(74,4)**	**(111,8)**
1. Pembiayaan Pendidikan	-	-	-	-	(55,0)	(9,0)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	-	-	-	-	(19,4)	(42,1)
3. Cadangan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	(60,8)
VI. Penerimaan Kembali Investasi	**24,7**	**27,1**	**25,8**	**22,9**	**14,8**	**4,0**
JUMLAH	(142,5)	(106,7)	(89,9)	(59,3)	(139,7)	(203,1)

Sumber: Kementerian Keuangan

A. Investasi kepada BUMN dan BLU

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan secara mendasar, antara lain: (1) definisi BUMN diperluas menjadi badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung, atau badan usaha yang terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia; (2) dibentuknya BPI Danantara yang merupakan badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain; (3) Kekuasaan yang dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan termasuk kekuasaan pemerintah pusat selaku pemegang saham pada BUMN dan pemilik modal pada Perum, kecuali pada BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pembiayaan investasi, terdapat perubahan dalam mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN di mana Pemerintah masih dapat memberikan PMN yang bersumber dari APBN ke *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, BUMN, dan/atau Anak Usaha BUMN. PMN yang bersumber dari APBN tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, investasi kepada BUMN dan BLU sebesar Rp41.456,3 miliar akan dialokasikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Selaras dengan kebijakan fiskal tahun 2026, investasi Pemerintah kepada BUMN dan BLU tahun 2026 diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BUMN dan BLU diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur sesuai prioritas pembangunan Pemerintah.

1. Bidang Infrastruktur

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah fokus kepada percepatan peningkatan infrastruktur. Komitmen Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui penambahan PMN kepada BUMN.

Beberapa capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN pada tahun 2020 – Semester I tahun 2025 antara lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (Medan–Binjai, Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Kayu Agung, Palembang–Sp. Indralaya, Pekanbaru–Dumai, Binjai-Langsa, Sp. Indralaya-Muara Enim, Kisaran–Indrapura, Kuala Tanjung–Parapat, Lubuk Linggau–Bengkulu, Sigli–Banda Aceh, Pekanbaru–Padang, Betung–Jambi, Rengat–Pekanbaru, dan Kayu Agung–Palembang–Betung), yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, mempermudah distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; (2) perwujudan kemandirian dan ketahanan energi melalui peningkatan jumlah desa berlistrik sebanyak 3.234 desa pada periode 2021-2024 sehingga Rasio Desa Berlistrik (RDB) pada tahun 2024 sebesar 93,05 persen serta Rasio Elektrifikasi (RE) nasional terus ditingkatkan dari 98,9 persen pada tahun 2020 menjadi 99,8 persen pada akhir tahun 2024; (3) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda transportasi yang terintegrasi; serta (4) penyaluran pembiayaan likuiditas kepada bank penyalur oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebanyak 663.615 unit rumah kepada MBR melalui program FLPP selama 2020 – Semester I tahun 2025.

Untuk tahun 2026, investasi kepada BUMN dan BLU di bidang infrastruktur difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor antara lain sebagai berikut:

a) Sektor Perumahan

Sektor perumahan memegang peranan yang penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) yang sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya. Akses terhadap hunian yang memenuhi standar minimum kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masih menjadi tantangan bagi kelompok MBR. Penyediaan hunian terjangkau yang layak menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan akses MBR terhadap perumahan yang layak.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah kembali memberikan alokasi pembiayaan investasi untuk keberlanjutan program FLPP dalam rangka penyediaan rumah dengan harga terjangkau bagi MBR. Selain itu, tambahan PMN juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BUMN dalam menjalankan mandat dan mendukung program FLPP tahun 2026.

Manfaat yang akan didapatkan melalui pembiayaan investasi pada program FLPP

tersebut antara lain: (1) mendukung pembiayaan target KPR FLPP; (2) mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR; serta (3) meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengalokasikan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp5.848,6 miliar dalam APBN tahun anggaran 2026. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program perumahan nasional dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b) Sektor Pengadaan Lahan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan bagi kepentingan umum merupakan kewajiban Pemerintah. Pelaksanaan tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum berkonsekuensi pada penyediaan anggaran untuk mengadakan tanah. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), diatur penugasan kepada BLU untuk melakukan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Penetapan suatu proyek ke dalam klaster PSN dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan pemenuhan tiga kriteria yaitu kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Berdasarkan kriteria tersebut, KPPIP melakukan pengkajian atas proyek-proyek yang diusulkan untuk menjadi PSN oleh kementerian teknis selaku *project owner*, yang mana hasil pengkajian tersebut dievaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian teknis dan kemudian ditetapkan daftar proyek/program yang menjadi PSN, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017, dalam Pasal 4 diatur bahwa pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan PSN dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan. Alokasi anggaran PSN bukan lagi merupakan alokasi per tahun anggaran, namun telah menjadi satu keseluruhan total alokasi anggaran yang diperbaharui setiap tahunnya berdasarkan sisa realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya, kemudian dituangkan di dalam *project list* tahunan.

Pada tahun 2026, alokasi pembiayaan investasi pada bidang infrastruktur khususnya sektor pengadaan lahan akan diberikan kepada BLU LMAN. LMAN mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan uang ganti kerugian pengadaan lahan dalam rangka

pembangunan infrastruktur PSN. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur khususnya PSN, skema pendanaan melalui LMAN merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam rangka menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah PSN oleh LMAN merupakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) yang mencakup tema *Industry, Innovation, and Infrastructure* dalam rangka membangun infrastruktur yang kuat dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN adalah sebesar Rp167.390,3 miliar. Selanjutnya, realisasi pendanaan pengadaan lahan PSN sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp143.388,1 miliar atas lahan 131 PSN yang terdiri dari 56 proyek jalan tol, 40 proyek bendungan, 10 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek irigasi, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 1 proyek air baku, dan 17 proyek IKN. Atas realisasi tersebut, telah dibebaskan 211.226 bidang tanah dan 11.180 nonbidang tanah dengan total luasan 348.885.950 m^2.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi untuk alokasi dana pendanaan pengadaan lahan PSN melalui LMAN sebesar Rp9.607,7 miliar yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk pengadaan lahan enam PSN Jalan Tol seluas 7.052.200 m^2. Pengalokasian dana pengadaan tanah PSN melalui LMAN juga akan memberikan manfaat berupa kepastian bagi berbagai pihak antara lain kementerian teknis, masyarakat, atau pihak yang berhak, serta perusahaan pelaksana konstruksi bahwa Pemerintah telah memberikan komitmen pendanaan yang pasti dalam rangka pembebasan lahan yang terdampak dalam pembangunan PSN. Pengalokasian dana pengadaan tanah tersebut juga mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta mendukung terwujudnya swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

2. Bidang Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dengan demikian, besaran alokasi untuk anggaran pendidikan bergantung pada besaran APBN setiap tahunnya dan kegiatannya harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Dalam memenuhi *mandatory spending* bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, salah satu komponennya dipenuhi melalui pembiayaan investasi pada Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dana Abadi di Bidang Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keberlanjutan anggaran pendidikan di Indonesia. Selain itu, Dana Abadi di Bidang Pendidikan memberikan fleksibilitas sehingga diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif. Dana Abadi di Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menciptakan sebuah dana yang bermanfaat antargenerasi (*intergenerational fund*) guna mewujudkan keberlangsungan pendanaan (*sustainable funding*) sektor pendidikan di Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P Tahun Anggaran 2010, Pemerintah menetapkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan bentuk dana abadi (*endowment fund*). Dana abadi tersebut kemudian dikelola oleh

BLU LPDP. Sesuai perkembangannya, selain program DPPN yang kini berganti nama menjadi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Pemerintah mulai mengalokasikan dana abadi lainnya, yaitu Dana Abadi Penelitian pada tahun 2019, kemudian Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2020.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2025, akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh LPDP telah mencapai Rp154.107,7 miliar. LPDP sebagai pengelola dana abadi tersebut melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*) dengan risiko terukur. Dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan, LPDP telah menyalurkan beasiswa gelar untuk S2 dan S3 (beasiswa *native* LPDP) kepada 55.492 orang dari tahun 2013 – Semester I tahun 2025. LPDP juga berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek dan Kemendikdasmen (d/h Kemendikbudristek) untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 24.967 orang dan beasiswa nongelar kepada 550.107 orang dari tahun 2020 – Semester I tahun 2025. Selain itu, LPDP juga bekerja sama dengan Kemenag untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada 11.456 orang dan beasiswa nongelar kepada 28.810 orang dari tahun 2022 – Semester I tahun 2025. LPDP juga telah menyalurkan pendanaan riset untuk 3.460 proyek. Melalui bantuan tersebut, diharapkan Dana Abadi di Bidang Pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM dan riset Indonesia. Peningkatan kualitas SDM diharapkan akan melahirkan pemimpin dan profesional di berbagai bidang, sedangkan peningkatan dan pengembangan kualitas riset Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sampai dengan akhir tahun 2025, hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan diproyeksikan sebesar Rp10.743,6 miliar yang terdiri dari hasil pengembangan Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp8.854,3 miliar, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp876,8 miliar, Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp675,0 miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp337,5 miliar. Secara akumulatif, total hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sejak 2010 – Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp53.636,2 miliar.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan investasi untuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar. Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada LPDP untuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas di Indonesia; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui SDM yang berkualitas; (3) meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mampu bersaing secara global; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas riset di Indonesia; serta (5) tersedianya dana untuk pendidikan antargenerasi.

3. Bidang Lainnya

Pemerintah juga memberikan alokasi pembiayaan investasi untuk bidang lainnya yang mencakup sektor lingkungan hidup. Sebagaimana tercantum dalam *World Risk Report* (WRR) Tahun 2023, Indonesia menempati peringkat kedua dari 193 negara dengan indeks risiko bencana tertinggi secara global. Peringkat ini memperhitungkan komponen bahaya, tingkat keterpaparan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karenanya, terdapat urgensi yang tinggi dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana melalui

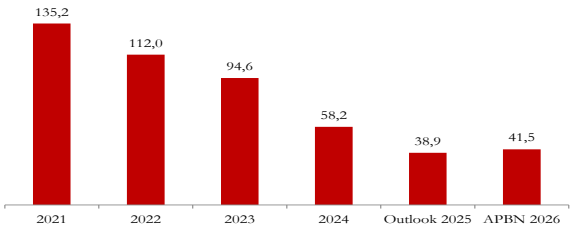
pengalokasian dana penanggulangan bencana, di antaranya untuk memperkuat peran APBN dalam menanggung dan mengurangi risiko bencana, memfasilitasi pembiayaan risiko bencana, meningkatkan tata kelola pembiayaan risiko bencana, serta memastikan ketersediaan pembiayaan bencana yang memadai, tidak hanya pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, namun juga pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan saat tidak terjadi bencana. Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada BLU BPDLH pada APBN tahun anggaran 2026.

Pengalokasian investasi kepada BPDLH dalam APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.000,0 miliar merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana dalam rangka menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, berkelanjutan, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana. Alokasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana juga mendukung agenda RPJMN 2025-2029 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs), yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan.

Sejak tahun 2020 - Semester I tahun 2025, akumulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang dikelola oleh BPDLH mencapai Rp7.300,0 miliar. Dana tersebut diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi yang aman dan memberikan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risiko yang terukur. Realisasi imbal hasil pengembangan Dana Bersama Penanggulangan Bencana hingga Semester I tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.046,1 miliar yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan yang memperkuat kapasitas nasional dalam penanggulangan bencana. Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, maka mulai tahun 2025, BPDLH mulai dapat menyalurkan Dana Bersama Penanggulangan Bencana dalam bentuk pembiayaan premi asuransi BMN dan kegiatan penanggulangan bencana. Hasil investasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2026 bersama akumulasi pengembangan hasil investasi sebelumnya diproyeksikan akan disalurkan untuk membiayai premi asuransi BMN sebesar Rp188,5 miliar dan belanja penanggulangan bencana sebesar Rp107,7 miliar. Peningkatan kinerja pengelolaan *endowment fund* menjadi kunci penting untuk meningkatkan kapasitas keuangan BPDLH dalam mengakomodasi besaran penyaluran dana yang diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan investasi kepada BUMN dan BLU pada tahun 2021-2026 disajikan pada **Grafik 5.3**.

GRAFIK 5.3
INVESTASI KEPADA BUMN DAN BLU, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

B. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan

nasional dan jati diri sebagai negara maritim dilakukan antara lain melalui mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI), serta melalui dukungan pembangunan dunia, termasuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pembangunan internasional. Investasi kepada Organisasi/LKI/BUI ditujukan dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota, serta mempertahankan/meningkatkan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*).

Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional semakin mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada Organisasi/LKI/BUI sebesar Rp1.960,3 miliar dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/BUI. Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/BUI dalam APBN tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Investasi kepada International Development Association (IDA)

IDA merupakan salah satu anak grup Bank Dunia yang mempunyai misi membantu negara-negara berkembang dan miskin di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pemberian hibah dan pinjaman. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk pinjaman jangka panjang, biasanya dalam jangka waktu 30-40 tahun dan tidak berbunga (*interest-free loan*). Sampai dengan Semester I tahun 2025, IDA mempunyai 174 negara anggota.

Total nilai investasi Pemerintah pada IDA hingga Semester I tahun 2025 adalah sebesar US$127,9 juta atau ekuivalen Rp2.077,4 miliar dengan posisi hak suara sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar 269.228 atau 0,8 persen. Keanggotaan Indonesia bertujuan untuk mendukung program IDA, yang merupakan salah satu lembaga yang selama ini telah ikut menopang pembiayaan pembangunan Indonesia, dan juga untuk memperoleh tambahan hak suara yang lebih besar dalam lembaga ini sehingga Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mengarahkan agenda dan prioritas nasional. Dalam mendukung pembiayaan pembangunan, Indonesia diwajibkan untuk berkontribusi pada IDA serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk pertanian dan perikanan. Saat ini, IDA tidak lagi memberikan pinjaman kepada Indonesia karena status sebagai *graduate country* (tidak lagi digolongkan sebagai negara miskin). Dengan status sebagai *graduate country* dan donor, Indonesia dapat berperan aktif di dalam penentuan kebijakan IDA.

Adapun komitmen Indonesia pada IDA's 19th Replenishment disampaikan pada tahun 2019, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam delapan kali cicilan (2022-2029). Komitmen Indonesia pada IDA's 20th Replenishment disampaikan pada tahun 2022, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam delapan kali cicilan (2023-2030). Kemudian, komitmen

Indonesia pada IDA's 21st Replenishment disampaikan pada tahun 2025, dengan total US$30,0 juta dan dibayarkan dalam delapan kali cicilan (2026-2033).

Pada APBN tahun anggaran 2026, Indonesia berkomitmen untuk membayar cicilan pada IDA's 19th Replenishment sebesar US$6,0 juta ekuivalen Rp99,0 miliar, IDA's 20th Replenishment sebesar US$6,0 juta ekuivalen Rp99,0 miliar, dan IDA's 21st Replenishment sebesar US$1,4 juta ekuivalen Rp22,3 milliar sehingga total alokasi penambahan investasi kepada IDA adalah sebesar Rp220,3 miliar.

Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)

IsDB bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota serta masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan, selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta mempromosikan perdagangan luar negeri antarnegara anggota. Selain itu, IsDB juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi modal serta memberikan pinjaman untuk proyek produktif Pemerintah dan swasta.

Total nilai investasi Pemerintah pada IsDB hingga Semester I tahun 2025 adalah sebesar US$ 241,2 juta atau ekuivalen Rp5.379,2 miliar dan Indonesia mendapatkan hak suara sebesar 7,9 persen. Indonesia berkomitmen sebesar ID79,9 juta pada IsDB General Capital Increase (GCI) 4 yang akan dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035. Pada IsDB GCI 6, Indonesia berkomitmen sebesar ID124,5 juta yang akan dicicil sebesar ID8,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2036. Selanjutnya, pada IsDB Specific Capital Increase (SCI), Indonesia berkomitmen sebesar ID881,6 juta yang akan dicicil sebesar ID62,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun 2023-2036.

Pada APBN tahun anggaran 2026, Indonesia berkomitmen membayar cicilan tahun ke-11 untuk IsDB GCI 4 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp89,0 miliar, cicilan tahun ke-4 untuk IsDB GCI 6 sebesar ID8,9 juta ekuivalen Rp198,2 miliar, cicilan tahun ke-3 untuk IsDB SCI sebesar ID63,0 juta ekuivalen Rp1.403,3 miliar, sehingga total penambahan investasi kepada IsDB adalah sebesar Rp1.690,5 milliar.

Penambahan investasi yang dilakukan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB kepada negara anggota, yang secara tidak langsung juga akan memberikan tambahan akses pembiayaan untuk pembangunan Indonesia, serta dengan adanya *Executive Director* permanen dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawar Indonesia di IsDB maupun forum internasional. Fasilitas pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor strategis melalui *Member Country Partnership Strategy* (MCPS) sesuai dengan RPJMN 2025-2029 terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, dan penguatan sektor swasta.

Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD merupakan lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfungsi untuk mendanai pembangunan pertanian. Pembiayaan IFAD bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui beberapa jenis instrumen keuangan untuk sektor publik yang mencakup pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD bekerja sama dengan Pemerintah, pendonor, organisasi nonpemerintahan, dan rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi *country specific*, yang akan meningkatkan akses penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, teknologi, lahan, dan sumber daya alam. Keanggotaan Indonesia

dalam IFAD menimbulkan konsekuensi dalam hal penyertaan modal.

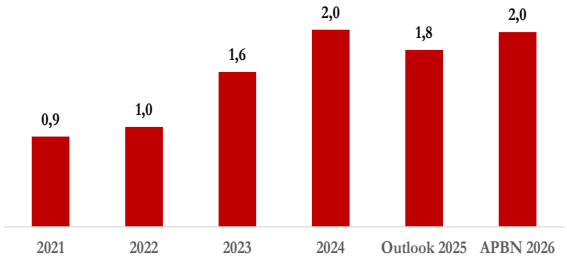
Sampai dengan Semester I tahun 2025, Indonesia memiliki hak suara sejumlah 49.711 *votes* atau sejumlah 0,7 persen dari keseluruhan total suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat memperoleh bantuan pembangunan sesuai dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan diharapkan dapat memperluas jangkauan proyek yang mendukung sektor pertanian skala kecil, memberikan solusi bagi tantangan perubahan iklim, teknologi pascapanen yang dapat mengurangi *food losses*, dan mencapai *output* berkesinambungan. Total nilai investasi Pemerintah pada IFAD sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar US$ 91,9 juta atau ekuivalen Rp1.492,5 miliar. Komitmen pembayaran kepada IFAD didasarkan pada komitmen Indonesia pada IFAD's 13th Replenishment yang disampaikan dalam 47th Session of the IFAD's Governing Council Meeting pada bulan Februari 2024 di Roma, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan jadwal pembayaran sebesar US$3,0 juta pada tahun 2025 dan 2026, serta US$4,0 juta pada tahun 2027.

Dengan demikian, pada APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada IFAD sebesar US$3,0 juta ekuivalen Rp49,5 miliar. Manfaat dari penambahan investasi dapat meningkatan kapasitas pendanaan IFAD dalam bentuk hibah dan pinjaman jangka panjang dengan biaya murah, untuk proyek-proyek di sektor pertanian, pedesaan, dan kelautan. Dana dari IFAD's 13th Replenishment secara umum digunakan pada program/proyek yang mendukung pencapaian SDG1 *No Poverty* dan SDG2 *Zero Hunger*.

Pendanaan dari IFAD's 13th Replenishment akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berfokus pada empat isu, yaitu lingkungan dan perubahan iklim, gender, kepemudaan, serta nutrisi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pencapaian SDGs karena ditujukan langsung bagi kelompok marginal. Pengalaman IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan perempuan dan pemuda akan sangat bermanfaat untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi dalam proyek investasi IFAD di Indonesia tercatat sebagai *best practices* dan diapresiasi di forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan ke negara lainnya.

Perkembangan pembiayaan investasi kepada organisasi/LKI/BUI dalam rangka meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 5.4**.

GRAFIK 5.4
INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BUI, 2021 – 2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

C. Investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen)

Dalam APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) sebesar Rp51.795,7 miliar untuk mendukung sektor perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sektor pangan melalui investasi kepada Perum BULOG, dan sektor lainnya melalui pemanfaatan Dana *Repayment* PEN Daerah oleh PT SMI (Persero). Penjelasan lebih lanjut tentang investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) dalam APBN tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program FLPP merupakan terobosan kebijakan Pemerintah di bidang perumahan guna meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan. Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dana FLPP untuk pembiayaan KPR FLPP telah dialokasikan sejak tahun 2010 dengan total dana kelolaan dari APBN sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp135.050,1 miliar. Dana FLPP dikelola oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, dana FLPP mulai dialihkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada tahun 2022.

Pada tahun 2024, BP Tapera telah menyalurkan sebanyak 200.300 unit rumah KPR FLPP (dengan nilai penyaluran dana sebesar Rp24.577,2 miliar). Capaian ini melebihi target yang ditetapkan oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) sebanyak 200.000 unit rumah. Secara keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp166.218,4 miliar untuk pembiayaan dan perkembangan kinerja penyaluran FLPP sampai dengan Semester I tahun 2025 sebanyak 1.719.855 unit rumah.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) untuk Program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp25.100,0 miliar dalam APBN tahun anggaran 2026.

Investasi kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Perum BULOG melaksanakan pengadaan gabah/beras dalam negeri dari petani, pengelolaan, dan penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah serta melaksanakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk menjamin kualitas gabah/beras. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Perum BULOG telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) pada tahun 2025, sehingga dengan adanya OIP tersebut, Perum BULOG memperoleh pendanaan yang fleksibel guna meningkatkan kapasitas pengadaan gabah dan beras nasional. Selanjutnya dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah (CJP) guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung serta untuk meningkatkan pendapatan petani, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas dan dukungan pendanaan melalui skema investasi pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka pendanaan CJP sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen)

kepada Perum BULOG dialokasikan sebesar Rp22.734,0 miliar. Alokasi tersebut untuk mendukung program ketahanan pangan dalam rangka pemenuhan sebagian penyerapan gabah/beras petani dalam negeri sebanyak tiga juta ton. Hal ini akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terutama pada aspek ekonomi dan investasi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani, menjaga stabilisasi harga beras di pasaran, pengurangan ketergantungan pada impor beras, peningkatan efisiensi distribusi dan penyimpanan beras. Dengan adanya pengalokasian dana tersebut, Perum BULOG dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan nasional, memastikan stok beras yang cukup untuk kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.

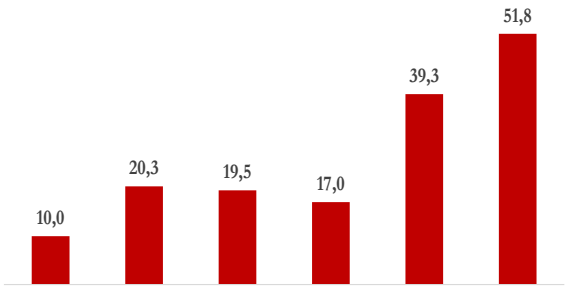
Dana *Repayment* PEN Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sesuai dengan fungsi dan mandat yang diberikan oleh Pemerintah, PT SMI (persero) sedang bertransformasi sebagai *Development Finance Institution* (DFI) dengan fokus pada pertumbuhan pembiayaan di sektor publik. Pada prinsipnya, dana investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) yang berasal dari pengembalian (*repayment*) pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang bersumber dari APBN dalam rangka PEN akan menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung transformasi PT SMI (Persero) dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman kepada sektor publik (BLU, Badan Usaha, dan/atau Pemda). Kemudian, berdasarkan kerja sama/perjanjian investasi antara Pemerintah dan PT SMI (Persero), dilaksanakan penyaluran dana investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) dari hasil pengembalian pinjaman PEN Daerah kepada PT SMI (Persero). Pengelolaan dana investasi pemerintah oleh PT SMI (Persero) selaku OIP bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa pembayaran bunga pinjaman oleh debitur dan manfaat sosial/lainnya berupa dampak dari pembangunan infrastruktur di daerah.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) kepada PT SMI (Persero) dialokasikan sebesar Rp3.961,7 miliar. Investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) tersebut akan disalurkan untuk fasilitas pembiayaan publik pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, air bersih, pengelolaan persampahan, dan lain-lain. Manfaat dari penambahan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) tersebut yaitu: (1) meningkatkan investasi sektor infrastruktur yang berdampak pada pemerataan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB); (2) meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat; (3) meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola pembiayaan guna menyediakan infrastruktur layanan dasar; dan (4) meningkatkan kapasitas usaha perseroan untuk menyalurkan pembiayaan publik yang *concesional* kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau Pemda pada sektor strategis dan prioritas sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Perkembangan investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) tahun 2021 - 2026 ditunjukkan pada **Grafik 5.5.**

GRAFIK 5.5
INVESTASI PEMERINTAH OLEH BUN (NONPERMANEN), 2021 – 2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

D. Pembiayaan Investasi Lainnya

Dalam APBN tahun anggaran 2026, pembiayaan investasi lainnya dialokasikan sebesar Rp111.839,3 miliar yang terdiri dari pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi, dan cadangan pembiayaan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembiayaan investasi lainnya dalam APBN tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan, bersifat cadangan, dialokasikan sebesar Rp9.000,0 miliar dalam APBN tahun anggaran 2026 sebagai pemenuhan amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 persen dari APBN sebagai anggaran pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung sektor pendidikan melalui tambahan alokasi anggaran pada pos pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pembiayaan pendidikan untuk pembiayaan Dana Abadi Sekolah Unggul Garuda, Dana Abadi Sekolah Rakyat, tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, dan pembiayaan dalam rangka kegiatan pendidikan lainnya.

Cadangan Pembiayaan Investasi

Dalam rangka mengakomodasi rencana pembiayaan investasi kepada BUMN, BLU, Lembaga/Badan Lainnya, dan/atau Investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) yang masih memerlukan kondisi/prasyarat tertentu serta dukungan pencapaian program prioritas Pemerintah, Pemerintah juga mengalokasikan cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp42.074,3 miliar. Alokasi tersebut dapat digunakan antara lain: (1) untuk mendukung Program KKMP/KDMP yang sejalan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (2) untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP melalui investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen) dan investasi pada BUMN yang menerima penugasan dari Pemerintah dalam pencapaian target 350.000 unit rumah.

Cadangan Pembiayaan Lainnya

Pemerintah juga mengalokasikan cadangan pembiayaan lainnya sebesar Rp60.765,0 miliar dalam APBN tahun anggaran 2026. Cadangan pembiayaan lainnya disiapkan sebagai instrumen fleksibilitas fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sifatnya mendesak, strategis, dan belum dapat dipastikan secara rinci pada tahap awal perencanaan. Termasuk di dalamnya mengantisipasi kebutuhan tambahan untuk Program KKMP/KDMP dan pembiayaan program prioritas lainnya. Mengingat dinamika pelaksanaan program prioritas Pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, sosial, maupun geopolitik, dengan demikian, Pemerintah mengalokasikan cadangan pembiayaan lainnya yang berfungsi sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) yang memberikan ruang bagi Pemerintah untuk dapat merespons perubahan kebutuhan pendanaan program prioritas Pemerintah secara cepat dan tepat.

E. Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Program PEN merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sekaligus mengatasi dampaknya terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Salah satu bentuk intervensi Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN adalah melalui investasi Pemerintah berupa investasi langsung dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah, yang disalurkan kepada Pemda melalui PT SMI (Persero). Pinjaman PEN

Daerah merupakan bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Dalam skema investasi langsung berupa pinjaman ini, Pemda melakukan pembayaran kembali atas pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo melalui mekanisme pemotongan langsung pada penyaluran DTU.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan *sustainable financial model*, maka proyeksi penerimaan kembali investasi Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp3.994,7 miliar dialokasikan sebagai modal tambahan bagi PT SMI (Persero) untuk menyediakan pembiayaan publik jangka panjang dengan tingkat bunga konsesional. Penerimaan kembali investasi dari pinjaman dimaksud akan digunakan sebagai pembiayaan investasi PEN Daerah untuk memastikan implementasi program pembiayaan PEN Daerah melalui mekanisme investasi Pemerintah dapat berjalan.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan *sustainable financial model*, dari total *outstanding* Pinjaman PEN Daerah yang akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp15.506,5 miliar akan dimanfaatkan kembali melalui skema investasi Pemerintah. Investasi ini dilaksanakan oleh PT SMI (Persero) selaku OIP dalam bentuk instrumen investasi langsung, berupa pemberian pinjaman dalam rangka penyediaan pembiayaan publik kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau Pemda. Adapun proyeksi penerimaan kembali Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp3.994,7 miliar, akan disalurkan sebesar Rp3.961,7 miliar sebagai modal tambahan bagi PT SMI (Persero) untuk fasilitas pembiayaan publik pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, air bersih, pengelolaan persampahan, dan lain-lain dengan tingkat bunga konsesional.

Alokasi pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2026 dirinci dalam investasi kepada BUMN dan BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/BUI, investasi Pemerintah oleh BUN (nonpermanen), investasi lainnya, dan penerimaan kembali investasi sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 5.6.**

TABEL 5.6
PEMBIAYAAN INVESTASI TAHUN ANGGARAN 2026
(triliun rupiah)

Uraian	Jumlah
I. Investasi kepada BUMN dan BLU	**(41,5)**
1. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(5,8)
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(25,0)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(9,6)
4. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	(1,0)
Dana Bersama Penanggulangan Bencana/*Pooling Fund* Bencana	(1,0)
II. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	-
III. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	**(2,0)**
1. Islamic Development Bank (IsDB)	(1,7)
2. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(0,05)
3. International Development Association (IDA)	(0,2)
IV. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen)	**(51,8)**
1. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(25,1)
2. Dana *Repayment* PEN Daerah PT SMI (Persero)	(4,0)
3. Investasi kepada Perum BULOG	(22,7)
V. Investasi Lainnya	**(111,8)**
1. Pembiayaan Pendidikan	(9,0)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	(42,1)
3. Cadangan Pembiayaan Lainnya	(60,8)
VI. Penerimaan Kembali Investasi	**4,0**
Jumlah	**(203,1)**

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.3. Pemberian Pinjaman

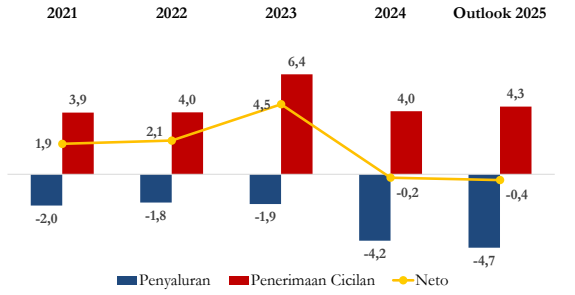
Program pemberian pinjaman diatur dalam pasal 7 dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di mana diamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada entitas tertentu dengan dana bersumber dari APBN. Amanat tersebut diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

Pemberian pinjaman berperan sebagai opsi pendanaan berbunga rendah pada BUMN dan pemda untuk digunakan dalam *capital expenditure*, khususnya proyek penugasan Pemerintah yang berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang sejalan dengan RPJMN. Namun demikian, tren pemberian pinjaman dalam beberapa tahun terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah BUMN dan pemda yang mengajukan proposal pemberian pinjaman baru, sedangkan beberapa pinjaman telah selesai masa penarikannya.

Sumber pembiayaan pemberian pinjaman diperoleh melalui *lender* (lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor) untuk kemudian diteruspinjamkan kepada BUMN/pemda untuk membiayai proyek sesuai daftar kegiatan yang diterbitkan Bappenas. Adapun persetujuan permintaan pendanaan proyek oleh Bappenas diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali debitur dan kelayakan kegiatan/proyek.

Realisasi penyaluran dan penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2021–2024 dan *outlook* 2025 ditampilkan dalam **Grafik 5.6**.

GRAFIK 5.6
PENYALURAN DAN PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN, 2021-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.3.1. Penyaluran Pemberian Pinjaman

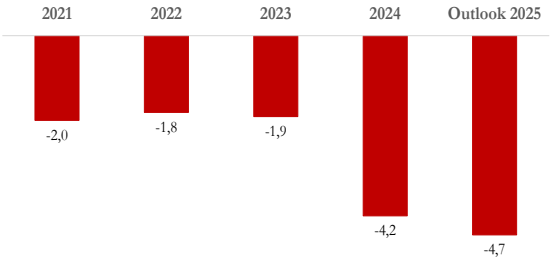
Dalam kurun waktu periode 2021-2024 telah disalurkan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN/Pemda sebesar Rp9.948,32 miliar. Program pemberian pinjaman memberikan dukungan penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, *pumped storage*, dan *mini hydro* di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, program pemberian pinjaman juga mendukung pemanfaatan energi panas bumi Indonesia melalui pendanaan pembangunan pembangkit listrik *geothermal* serta eksplorasi sumber panas bumi sebagai upaya Pemerintah meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan.

Pada periode 2021-2024, melalui pinjaman *Regional Infrastructure Development Facility, Leveraging Private Infrastructure Investment Project, SDG Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), serta Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase I dan Phase II,* program pemberian pinjaman memberikan bantuan pendanaan di bidang infrastruktur terutama di sektor-sektor vital di daerah seperti pelabuhan, jalan tol, pasar, rumah sakit, hingga sistem penyaluran air minum untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengembangan aktivitas ekonomi daerah.

Pemberian pinjaman pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target SDGs, serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti PLTA dan PLTP. *Outlook* penyaluran pemberian pinjaman tahun 2025 sebesar Rp4.689,07 miliar atau 50,0 persen dari pagu APBN dikarenakan adanya perubahan rencana penarikan pinjaman pada Pemprov DKI Jakarta akibat proses *procurement* ulang paket pekerjaan *Rolling Stock* proyek konstruksi MRT Jakarta serta belum dipenuhinya dokumen rekomendasi penyelesaian isu *retroactive financing* pada PT PLN Persero.

Perkembangan penyaluran pemberian pinjaman tahun 2021–2025 ditampilkan dalam **Grafik 5.7.**

GRAFIK 5.7
REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN, 2021-2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberian pinjaman tahun 2026 digunakan untuk mendukung pencapaian target SDGs dengan mendorong penyelesaian proyek ketenagalistrikan terutama yang berbasis energi baru dan terbarukan, serta pembangunan infrastruktur layanan masyarakat berkualitas dan berstandar internasional selaras dengan RPJMN 2025-2029.

Di bidang kelistrikan, pemberian pinjaman masih mendanai proyek-proyek konstruksi PLTP dan PLTA untuk meningkatkan tingkat bauran energi Indonesia menjadi lebih *sustainable* dan ramah lingkungan. Melalui pembangunan pembangkit listrik *geothermal* dan *pumped storage*, pemberian pinjaman turut mendukung upaya pensiun dini PLTU bertenaga batu bara yang sejalan dengan target ketahanan energi Indonesia pada Asta Cita Presiden RI melalui transisi energi Indonesia dari semula bergantung pada bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Di bidang infrastruktur, pemberian pinjaman mendanai proyek-proyek di bidang transportasi serta penyediaan sistem air minum di daerah sebagai upaya Pemerintah melaksanakan pemerataan pembangunan. Proyek konstruksi MRT Jakarta yang telah berjalan sejak 2017 kini tengah dalam pengerjaan fase II yang menghubungkan jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dan Bundaran HI-Ancol Barat. Disamping itu, dalam rangka penyediaan sistem air minum sehat dan berkualitas, melalui pinjaman SIO-GFF, Pemerintah mendanai proyek SPAM di Dumai, Jakarta, dan Cilegon.

Adapun rincian penyaluran pemberian pinjaman tahun 2026 ditampilkan dalam **Tabel 5.7.** sebagai berikut:

TABEL 5.7
RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2026
(miliar rupiah)

No.	Pengguna Dana	Jumlah
1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(845,1)
2	PT Pertamina (Persero)	(27,4)
3	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(1.164,3)
5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	(2.623,0)
Total		**(4.659,8)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda

a) Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN

Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN dilakukan dengan cara:

1) Penjadwalan Kembali;
2) Perubahan Persyaratan;
3) *Debt to Asset Swap*;
4) PMN;
5) Penghapusan; dan
6) Keringanan (*discount*) pembayaran.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, terdapat dua usulan restrukturisasi pinjaman dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen (PT Mega Eltra dan BTN). Total hak tagih pemerintah yang telah dan akan direkstrukturisasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp852,23 miliar.

b) Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda

Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda yang mengalami kesulitan pembayaran telah dilakukan restrukturisasi pinjaman. Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2016 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan melalui skema:

1) Penjadwalan kembali.
2) Perubahan persyaratan.

Penghapusan melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh kewajiban non pokok atas pinjaman Pemda dengan kewajiban Pemda untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana yang dibiayai dengan dana belanja modal yang bersumber dari APBD (*debt swap*).

Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih dari satu cara. Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tersebut perlu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Setelah syarat dan ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan hasil analisis prospek usaha dan kemampuan bayar Pemda, maka dilakukan amendemen terhadap perjanjian pinjaman dimaksud.

Sampai dengan Semester I tahun 2025 masih terdapat empat Pemda yang sedang dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme restrukturisasi pinjaman, yaitu Pemprov. Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar. Selain itu, terdapat satu Pemda dalam proses penyelesaian utang negara melalui mekanisme potong DAU yaitu Pemkab. Aceh Timur dan dua BUMD dalam proses penyelesaian di PUPN, yaitu PDAM Kabupaten Biak dan Sorong.

5.2.2.3.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman tahun 2026 bersumber dari pembayaran kembali sejumlah utang pokok dari debitur kepada Pemerintah atas Pemberian/Penerusan Pinjaman yang sebelumnya diterima. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman menjadi pengurang atas kewajiban debitur (BUMN/Pemda/dll) serta merupakan bentuk pengelolaan pembiayaan terhadap beban utang yang dibayarkan Pemerintah ke *lender* dalam rangka penerusan pinjaman.

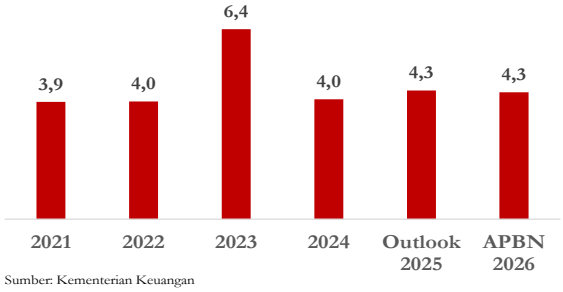
Cicilan pokok Pemberian Pinjaman dibayarkan sesuai jumlah, tingkat bunga, mata uang, dan tanggal jatuh tempo yang diatur pada Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan menjadi pengurang nilai kewajiban yang harus

dibayarkan debitur. Jumlah cicilan pokok Pemberian Pinjaman yang diterima Pemerintah pada periode 2021-2025 cenderung fluktuatif, sejalan dengan jumlah kewajiban pinjaman yang jatuh tempo pada periode tersebut, restrukturisasi pinjaman yang diajukan debitur, serta jumlah pinjaman baru yang memasuki masa jatuh tempo.

Nilai proyeksi Penerimaan Kembali Cicilan Pokok Pemberian Pinjaman tahun 2026 sejumlah Rp4.255,6 miliar. Penerimaan cicilan pokok yang bersumber dari BUMN masih menjadi kontributor terbesar Penerimaan Cicilan Pokok Pemberian Pinjaman.

Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Grafik 5.8**.

GRAFIK 5.8
PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN, 2021-2026
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.4. Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 Pemerintah telah memberikan penjaminan. Dalam perkembangannya, selama periode tahun 2020-2025, Pemerintah juga memberikan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha dalam program PEN dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan pelaku usaha dalam program PEN dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

Mekanisme penjaminan diberikan dalam bentuk penjaminan kredit (pinjaman perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Tujuh proyek infrastruktur dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek 10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Infrastruktur dengan Skema Pinjaman Langsung; (4) Proyek Jalan Tol di Sumatera; (5) Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek); (6) Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan (7) Proyek Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan penjaminan antara lain melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam bentuk penjaminan kredit dan/atau penjaminan obligasi kepada BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha yang diberikan oleh perbankan. Adapun untuk penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip alokasi risiko dalam proyek KPBU. Disamping itu, terdapat pula bentuk penjaminan atas kelayakan usaha pihak terjamin, yaitu untuk proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas (proyek 10.000 MW tahap 2), serta bentuk penjaminan kepada BUMN selaku penyedia pembiayaan infrastruktur daerah.

Klasifikasi Penjaminan Pemerintah dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu dukungan penjaminan dalam rangka penyediaan infrastruktur nasional, dukungan penjaminan dalam rangka kesinambungan program PEN, penugasan penyediaan pembiayaan

infrastruktur daerah kepada BUMN, pemberian jaminan Pemerintah dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah, dan dukungan terhadap pembayaran kewajiban pinjaman pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional yang telah melewati masa jatuh tempo.

Dukungan Penjaminan dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek transmisi. Adapun nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan US$3,9 miliar. Untuk pembangunan Proyek 10.000 MW Tahap I mencakup 37 PLTU memiliki total kapasitas sebesar 9.975 MW. Dikarenakan berbagai kendala, 4 (empat) PLTU dengan jumlah kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan Semester I tahun 2025, kapasitas PLTU yang telah beroperasi mencapai 9.722 MW dengan sisa kapasitas sebesar 175 MW yang masih dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali sebanyak 10 (sepuluh) PLTU (7.490 MW), di wilayah Sumatera 8 (delapan) PLTU (1.411 MW), di wilayah Kalimantan dan Sulawesi 9 (sembilan) PLTU (845 MW), serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak 6 (enam) PLTU (151 MW). Dari sisi penjaminan, sampai dengan Semester I tahun 2025, sebanyak 34 pinjaman telah selesai/lunas dengan total nilai pinjaman sebesar Rp36.217,0 miliar dan US$4,0 miliar. Sedangkan, penjaminan yang masih efektif yaitu 2 (dua) surat jaminan dengan posisi *outstanding* sebesar Rp588,4 miliar.

Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam mendukung Program Percepatan Penyediaan Air Minum diberikan kepada perbankan dalam rangka menjamin pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2009 yang kemudian diberikan kembali berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Sejak awal program hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 (satu) surat pengakhiran surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan senilai Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng, melainkan menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, hingga Semester I tahun 2025 terdapat 10 PDAM yang telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, PDAM Denpasar, PDAM Buleleng, PDAM Giri Menang (atas penjaminan

berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009), PDAM Tirta Mangkuluku Kota Palopo, dan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Total fasilitas pinjaman yang telah lunas adalah sebesar Rp320,2 miliar. Penjaminan yang masih efektif sebanyak 4 (empat) surat jaminan dengan posisi *outstanding* penjaminan sebesar Rp215,7 miliar. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum telah dilakukan oleh 10 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat, sementara untuk 3 (tiga) proyek PDAM yang baru mendapatkan penjaminan di awal tahun 2023 berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dengan rincian 2 (dua) PDAM telah selesai konstruksi 100 persen yaitu PDAM Giri Menang dan PDAM Kota Bogor, sementara 1 (satu) PDAM yaitu PDAM Kota Palembang masih dalam proses konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas 8 (delapan) ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, hingga Semester I tahun 2025 Pemerintah telah menerbitkan 10 surat/perjanjian penjaminan Pemerintah terdiri dari 9 (sembilan) surat jaminan Pemerintah dengan nilai jaminan Rp54.943,7 miliar dan 1 (satu) perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US$0,6 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar Rp26.475,8 miliar. Sampai dengan Semester I tahun 2025, terdapat 6 (enam) ruas jalan tol yang telah selesai proses pembebasan lahan dan pembangunannya, serta beroperasi seluruhnya, yaitu: (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru–Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu Agung.

Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU sebagaimana amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur j.o. PMK Nomor 68 tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiayaan Lainnya. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT PII (Persero). Sampai dengan Semester I tahun 2025, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 7 (tujuh) perjanjian penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant*/CJPP) dengan nilai proyek sebesar ±US$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 (enam) proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II Elevated, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo-Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun *outstanding* penjaminan KPBU sebesar Rp48.199,7 miliar dan US$3,8 miliar. Secara umum, hingga Semester I tahun 2025 perkembangan pembangunan proyek CJPP telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk perkembangan proyek 6 (enam) ruas jalan tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian-

Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,6 persen (ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020. Untuk ruas 4 dalam proses amandemen terkait pengurangan lingkup proyek); (2) jalan tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (porsi BUJT) sebesar 100 persen; (3) jalan tol ruas Serang-Panimbang dengan progress pengadaan tanah sebesar 99,1 persen dan progres konstruksi seksi 2 adalah 88,8 persen; (4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan dengan progres pengadaan tanah sebesar 85,0 persen dan progres konstruksi seksi 2A sebesar 63,0 persen, seksi 2B sebesar 59,2 persen dan seksi 3 sebesar 74,2 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo- Banyuwangi dengan progres pengadaan tanah untuk seksi 1-3 sebesar 99,7 persen, dan untuk seksi 4-7 sebesar 74,2 persen; dan (6) jalan tol Jakarta Cikampek II Elevated telah digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan penyesuaian tarif telah diberlakukan pada tanggal 9 Maret 2024.

Selain itu, Pemerintah juga menjamin pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sebagaimana amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah sampai dengan Semester I tahun 2025 telah menandatangani 14 perjanjian jaminan dengan total nilai US$4,1 miliar dan €1,0 miliar, dengan posisi *outstanding* sebesar US$1,1 miliar, €1,0 miliar, dan ¥143,4 miliar. Adapun perkembangan penarikan pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Semester I tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (2) Pengembangan Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber pendanaan IBRD World Bank dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (*Power Grid Enhancement Project*) dengan sumber pendanaan IsDB dengan capaian 100,0 persen; (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; (5) Pembangunan KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian sebagai berikut:

1. Komponen I pembangunan infrastruktur Kawasan dan peningkatan infrastuktur dengan rincian paket 1 dan paket 2 telah mencapai 100,0 persen, paket 3,4, dan 5 akan konstruksi di tahun 2026, paket 6 telah mencapai 68,6 persen, sedangkan paket 8 dan 9 proses penyiapan *technical documents* ke AIIB;
2. Komponen II hampir semua progres di atas 80,0 persen dan untuk komponen 13-TA-A dan Komponen 13-TA-A dan 13-TA-B telah mencapai 100,0 persen.

(6) Proyek *Hydropower Plant* dengan sumber pendanaan KfW dengan capaian sebagai berikut:

1. PLTA Bakaru I dan II untuk *stage* 1 PLTA Bakaru II terealisasi sebesar 83,7 persen;
2. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalibumi I, PLTM Lapai I, PLTM Riorita dan PLTA Watunohu dalam proses *Detail Engineering Design* (DED); dan
3. PLTM Banangar tidak dilanjutkan karena merupakan Kawasan cagar alam berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S-187/PIKA/PKS/KSA.0/5/2019 tanggal 9 Mei 2019.

Progres pinjaman 2,9 persen. (7) *Geothermal Power Generation* yang dibiayai ADB dengan capaian 31,8 persen (untuk *Ordinary Capital Resources*) dan 5,7 persen (untuk *Clean*

Technology Fund); (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema *Result Based Lending* yang dibiayai KfW dengan capaian terhadap *Distributed Linked Indicators* (DLI) 1-7 telah hampir seluruhnya tercapai kecuali untuk DLI 2B dan DLI 8; (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur Tahap 2 (Kalimantan dan Maluku-Papua) yang dibiayai ADB dengan capaian tehadap 8 DLI telah tercapai 6 DLI yaitu DLI 1-DLI 4, DLI 6, dan DLI 7, sementara 2 (dua) DLI yang belum terapai yaitu DLI 5 dan DLI 8; (10) Jaringan Distribusi Timur Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan capaian dari 9 DLI telah tercapai DLI 1a, 1b, 2a, 2b, DLI 5 dan DLI 6, sedangkan yang belum tercapai yaitu DLI 3, DLI 4, dan DLI 7; dan (11) Jaringan Listrik Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah yang dibiayai oleh ADB dengan DLI 1, DLI 3A, DLI 3B, DLI 5A, DLI 5B, DLI 7, DLI 8, DLI 9B dan DLI 10 telah tercapai. Sedangkan yang belum tercapai yaitu DLI 2, DLI 4, DLI 6A, DLI 6B, DLI 9A, DLI 10 dan DLI 11. Program *Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification Program for Results* (ISLE-1 PforR) dengan capaian 4 DLI mencapai target antara lain DLI 1, DLI 9.1, DLI 10, dan DLI 11, sedangkan yang belum mencapai target yaitu DLI 2-DLI 8, DLI 9.2, dan DLI 10.

Terkait penjaminan untuk proyek LRT Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan penjaminan untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 miliar pada tahun 2017 dan penambahan plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Rp23.419,1 miliar, dengan *outstanding* pinjaman per Semester I tahun 2025 sebesar Rp21.958,3 miliar. Dalam periode Semester I tahun 2025, LRT telah melayani penumpang sebanyak 13.040.403 penumpang dengan rata-rata sebanyak 61.511 penumpang per hari. Pendapatan yang diperoleh dalam periode Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp159,5 miliar.

Selanjutnya, penjaminan untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah hingga akhir Semester I tahun 2025 telah menerbitkan 4 (empat) surat jaminan untuk pinjaman PT PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman sebesar Rp15.173,8 miliar dan 3 (tiga) surat jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar US$9,2 miliar. Keempat pinjaman tersebut terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap I dengan total kapasitas 275 MW dengan status telah beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap II dengan total kapasitas 610 MW dengan status telah beroperasi sebesar 510 MW; (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa dengan status 100 persen telah beroperasi; dan (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang masih dalam tahap awal konstruksi. Sementara untuk proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha, PLTU Jawa 4 sebesar 2.000 MW telah beroperasi, PLTU Jawa 1 sebesar 1.000 MW dalam tahap konstruksi, dan PLTU Jawa 3 telah diterminasi karena tidak mencapai *financial close* dalam batas waktu yang telah disepakati. Sampai dengan Semester I tahun 2025, nilai *outstanding* penjaminan program PIK adalah Rp9.010,2 miliar dan US$5,0 miliar.

Sementara itu, penjaminan terhadap proyek penyelenggaraan kereta cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan berdasarkan Perpres 107 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 93 Tahun 2021. Penjaminan ini diberikan agar pihak terjamin dapat memenuhi kewajiban penempatan modal pada perusahaan patungan yang dibentuk konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium BUMN Tiongkok atau untuk memenuhi kewajiban membiayai perubahan harga (*cost overrun*) pada proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Total nilai pinjaman yang dapat ditarik adalah sebesar US$ 0,5 miliar dengan *outstanding* pinjaman adalah sebesar US$ 0,3 miliar.

Dukungan penjaminan pada Program PEN

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk kepada BUMN dan pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, pada tahun 2020, Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero) dalam hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi ambang batas/*threshold* yang telah ditetapkan.

Untuk dukungan *loss limit* pelaku UMKM tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada tahun 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan nilai *outstanding* sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp6.519,6 miliar, yang berasal dari penjaminan PEN generasi ke-2, sementara *outstanding* penjaminan PEN generasi ke-1 sudah selesai. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* sehingga Pemerintah tidak menanggung beban klaim dalam hal *loss ratio* melebihi *threshold* yang ditentukan sebagaimana penjaminan PEN UMKM generasi ke-1.

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *backstop loss limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII (Persero). Untuk dukungan *backstop loss limit* tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran

kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp1.556,2 miliar.

Dalam perkembangannya, Pemerintah juga telah menyediakan fasilitas penjaminan PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam rangka program PEN, baik yang berasal dari pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan oleh BUMN terjamin. Selain menjamin secara langsung, Pemerintah turut menunjuk PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan usaha penjaminan yang dapat turut menjamin BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN. Untuk PEN BUMN, telah diterbitkan penjaminan sebesar Rp63.255,1 miliar dengan nilai *outstanding* penjaminan sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp11.645,3 miliar.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Penjaminan untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur beserta perubahannya dan PMK nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Pinjaman diberikan berdasarkan Surat Jaminan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah nomor S-81/MK.08/2017 tanggal 24 Januari 2017 kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero).

Outstanding pinjaman daerah dalam rangka penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga Semester I tahun 2025 sebesar Rp1.925,4 miliar untuk pembiayaan 6 (enam) proyek. Jumlah tersebut merupakan *outstanding* pinjaman dari PT SMI (Persero) kepada Pemda untuk membiayai pembangunan 5 (lima) proyek yang sudah dalam tahap beroperasi atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, dan membiayai pembangunan 1 (satu) proyek yang masih dalam tahap konstruksi. Secara umum, proyek infrastruktur daerah yang dilakukan Pemda dengan menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) yaitu proyek RSUD, jalan, jembatan, dan pasar.

Proyek yang masih mempunyai pinjaman aktif kepada PT SMI (Persero) sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pinjaman kepada Kabupaten Kepulauan Yapen untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan, dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp6,6 miliar.
2. Fasilitas pinjaman kepada Kabupaten Penajam Paser Utara untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp551,1 miliar.
3. Fasilitas pinjaman kepada Provinsi Maluku Utara untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp53,2 miliar.
4. Fasilitas pinjaman kepada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk proyek jalan dan jembatan yang sudah dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp217,9 miliar.
5. Fasilitas pinjaman kepada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk proyek RSUD yang sudah

dioperasikan dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp137,0 miliar.

6. Fasilitas pinjaman kepada Kabupaten Poso untuk proyek RSUD yang masih dalam konstruksi dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp9,1 miliar.

Kebijakan Kewajiban Penjaminan

Kewajiban penjaminan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian penjaminan, Pemerintah telah menyusun Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2024–2027 sebesar 0,6 persen terhadap PDB per tahun. Selama awal tahun 2025 hingga Semester I tahun 2025 belum terdapat realisasi BMP. Adapun akumulasi realisasi pemberian penjaminan Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp582.319,1 miliar atau sekitar 2,3 persen terhadap proyeksi PDB tahun 2026.

Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang dapat digunakan apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan dilakukan penempatan dana pada instrumen investasi dengan pengelolaan dana melalui operator investasi Pemerintah. Hingga Semester I tahun 2025, posisi saldo Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp13.268,3 miliar, sedangkan Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp406,9 miliar. Pada APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko. Rincian alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah tahun 2021–2026 ditampilkan pada **Tabel 5.8.**

TABEL 5.8
ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2021 - 2026
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	*Outlook* 2025*	APBN 2026*
A.	**Dukungan Penjaminan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Nasional**	**(715,7)**	**(316,9)**	**(296,2)**	**(824,0)**	**-**	**-**
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(15,6)	(5,8)	(7,7)	-	-	-
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	-
3.	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(5,4)	(7,7)	(6,7)	(55,5)	-	-
4.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(100,0)	(141,9)	(96,8)	(25,4)	-	-
5.	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(173,7)	(158,5)	(159,8)	(681,5)	-	-
6.	Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	(420,5)	-	(18,7)	-	-	-
7.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(0,5)	(3,1)	(6,4)	(61,5)	-	-
8.	Penjaminan Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung	-	-	-	-	-	-

B.	**Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**	**(2.000,0)**	**(814,0)**	**-**	**(635,0)**	**-**	**-**
1.	Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN	(2.000,0)	(814,0)	-	(635,0)	-	-
C.	**Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN**	**-**	**-**	**(34,4)**	**-**	**-**	**-**
D.	**Pemberian Jaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
E.	**Dukungan terhadap Pembayaran Kewajiban Pinjaman Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Telah Melewati Masa Jatuh Tempo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Jumlah		**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(1.459,0)**	**-**	**-**

Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan

***** Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2025 dengan pertimbangan masih terdapat program-program prioritas lainnya serta dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai masih mencukupi terhadap potensi risiko

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.2.5. Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya terdiri atas Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Hasil Pengelolaan Aset (HPA). Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan nonutang selama ini berperan sebagai salah satu instrumen strategis Pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Pada tahun 2026, SAL akan tetap dikelola secara efisien dan optimal guna memperkuat fungsi stabilisasi fiskal (*fiscal buffer*), khususnya dalam menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian domestik dan global. Kebijakan yang dirancang mencakup penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek dengan profil risiko yang terkendali. Apabila dibutuhkan, SAL juga dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit APBN. Selain itu, upaya optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan SAL Level Efisien dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko yang *prudent*.

Pada tahun 2021, Pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun 2022, Pemerintah tidak menggunakan dana SAL dalam upaya menutup defisit APBN. Baru pada pada tahun 2023, Pemerintah menggunakan kembali SAL sebesar Rp35.000,0 miliar. Sebagai upaya mengefisienkan pembiayaan anggaran terutama yang berasal dari penerbitan utang, tahun 2024 Pemerintah menggunakan SAL sebesar Rp56.381,0 miliar. Sesuai *outlook* laporan semester I APBN tahun 2025, SAL diproyeksikan akan digunakan sebesar Rp85.600,0 miliar yang akan diperuntukkan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban Pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit termasuk penambahan pembiayaan investasi pada APBN tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pengelolaan SAL sebagai *buffer* likuiditas menjadi krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Selain penggunaan SAL, pembiayaan lainnya juga berasal dari HPA yang merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari proses penjualan/likuidasi aset-aset bank eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks. Bank Dalam Likuidasi (BDL). Pada APBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp60.000,0 miliar dan alokasi HPA sebesar Rp400,0 miliar. Perkembangan pembiayaan lainnya tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel 5.9.**

TABEL 5.9
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2021 - 2026
(triliun rupiah)

Uraian	2021	2022	2023	2024	Outlook 2025	APBN 2026
1. Saldo Anggaran Lebih	144,0	-	35,0	56,4	85,6	60,0
2. Hasil Pengelolaan Aset	0,5	0,6	1,2	1,4	0,9	0,4
3. Pembiayaan Lain-lain	-	-	2,2	0,1	0,1	-
Jumlah	**144,5**	**0,6**	**38,5**	**57,8**	**86,6**	**60,4**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 6
Risiko Fiskal

BAB 6
RISIKO FISKAL TAHUN 2026

6.1. Pendahuluan

6.1.1. Umum

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian guna mencapai tujuan bernegara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal diharapkan dapat mendukung pencapaian berbagai agenda pembangunan dan menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi perekonomian dunia yang dinamis, APBN juga didesain agar memiliki daya tahan yang andal sehingga efektif untuk meredam ketidakpastian dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks ini, pengendalian dan mitigasi risiko fiskal menjadi salah satu instrumen dalam upaya meredam ketidakpastian serta memelihara peran kebijakan fiskal agar dapat berfungsi secara optimal.

Risiko fiskal atau risiko keuangan negara merupakan faktor dan/atau kejadian yang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang memengaruhi kesinambungan APBN dan/atau aset dan kewajiban negara. Risiko tersebut timbul karena berbagai faktor yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan tekanan fiskal terhadap APBN pada saat pelaksanaannya baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Selain itu, risiko fiskal juga dapat memberikan tekanan terhadap APBN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan risiko fiskal secara efektif tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memastikan tercapainya tujuan dan strategi kebijakan fiskal. Pengelolaan risiko fiskal salah satunya diarahkan untuk menjaga agar realisasi atas target yang ditetapkan dalam APBN berada pada level yang dapat dikelola (*manageable*). Melalui pengelolaan risiko fiskal yang baik, APBN diharapkan mampu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sebagai langkah awal dalam perumusan strategi dan pengelolaan mitigasi risiko fiskal, Pemerintah melakukan identifikasi berbagai risiko yang sumber utamanya berasal dari perubahan kondisi global dan domestik, pelaksanaan APBN, dan risiko fiskal lainnya.

Peningkatan kesadaran Pemerintah mengenai pengelolaan risiko fiskal mendorong upaya perbaikan yang berkelanjutan guna pelaporan internal serta pengungkapan eksternal. Nota Keuangan menjadi salah satu dokumen penting dalam mengungkapkan risiko kepada pihak eksternal. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan untuk empat tujuan strategis, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) meningkatkan transparansi fiskal; (3) meningkatkan akuntabilitas fiskal; serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal.

6.1.2. Pengungkapan Risiko Fiskal

Pengungkapan risiko fiskal telah menjadi bagian dari Nota Keuangan dan APBN sejak tahun 2008 dan terus mengalami perbaikan dari

tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan dan belanja negara (2) risiko utang Pemerintah Pusat; (3) risiko kewajiban kontinjensi; dan (4) risiko atas belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, Pemerintah melakukan penyesuaian seiring dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar pengungkapan dan kebijakan mitigasi risiko menjadi lebih komprehensif. Pembagian taksonomi risiko dalam pengungkapan risiko fiskal tahun 2016 meliputi: (1) risiko penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang mencakup risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko transaksi internasional, dan risiko program sejuta rumah untuk rakyat. Untuk tahun 2017 dan 2018, pengungkapan risiko ditambahkan dengan pembahasan atas identifikasi berbagai sumber risiko yang berasal dari stabilisasi harga pangan, risiko program pembiayaan perumahan, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

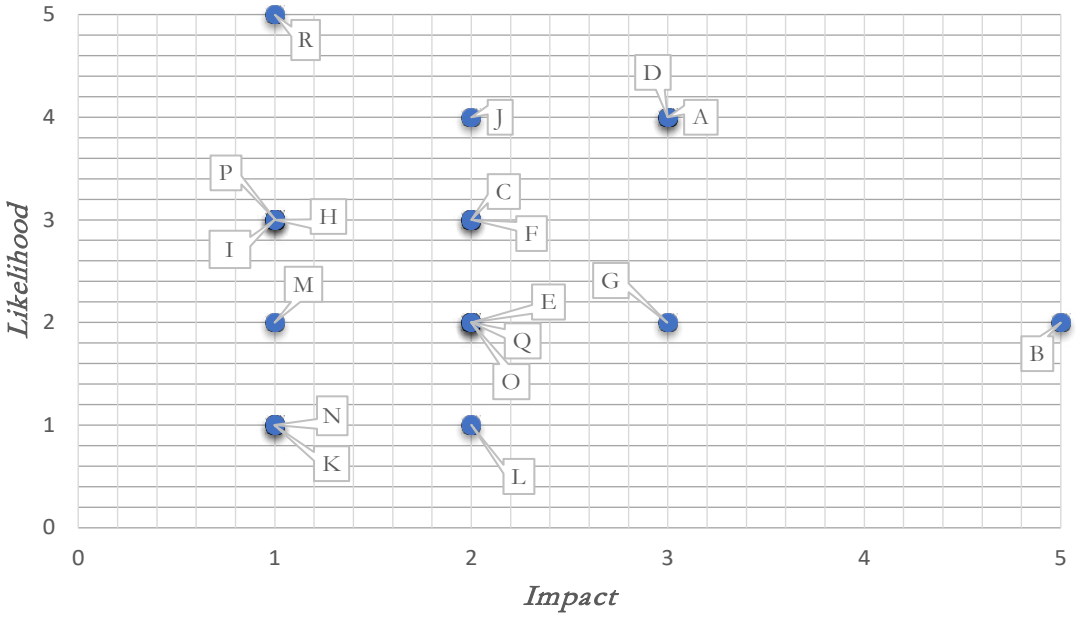
Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pada tahun 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait program PEN.

Pada tahun 2022 sampai 2025, seiring dengan penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; (3) risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Mulai tahun 2024, terdapat penambahan risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta didasarkan oleh kerangka pengelolaan risiko oleh OECD pada tahun 2024 terkait pengelolaan risiko fiskal daerah.

6.1.3. Peta Risiko Fiskal

Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal beserta dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*) untuk tahun anggaran 2026 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang digambarkan pada **Grafik 6.1 .** Dalam peta risiko tersebut, sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. Dampak *(impact)* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti Sangat Kecil, level 2 Kecil, level 3 Sedang, level 4 Tinggi, serta level 5 Sangat Tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti Sangat Rendah, level 2 Rendah/Jarang, level 3 Mungkin, level 4 Sangat Mungkin, serta level 5 Hampir Pasti.

GRAFIK 6.1
PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2026



KODE	SUMBER RISIKO
A	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara
B	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara
C	Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran
D	Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*
E	Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR
F	Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara
G	Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah
H	Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
I	Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur
J	Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
K	Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
L	Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)
M	Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
N	Risiko fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu
O	Risiko Bencana
P	Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi
Q	Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik
R	Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

Sumber : Kementerian Keuangan

6.2. Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal

Pengelolaan risiko fiskal terus berkembang seiring dengan dinamika kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah sebagai berikut:

6.2.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro bersumber dari perubahan indikator fundamental makro ekonomi yang memengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga menyebabkan perubahan proyeksi fiskal dalam APBN. Volatilitas beberapa indikator utama ekonomi makro berdampak kepada pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

6.2.1.1. *Outlook* Risiko Ekonomi Makro

Ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dipicu oleh semakin kuatnya fragmentasi geoekonomi, ketegangan politik antarnegara, serta meningkatnya kecenderungan proteksionisme. Polarisasi ekonomi dunia, terutama yang disebabkan oleh konflik dagang dan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, berpotensi menghambat arus perdagangan internasional serta mengurangi aliran investasi global. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah potensi eskalasi perang dagang. Kebijakan protektif seperti kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk dari Kanada, Meksiko, dan Tiongkok, termasuk produk baja dan aluminium, serta tindakan balasan dari negara-negara mitra dagang Amerika Serikat, dapat memicu gangguan dalam rantai pasok global. Situasi ini berisiko mendorong kenaikan inflasi dan memberikan tekanan tambahan pada kinerja perdagangan internasional.

Indonesia tidak luput dari dampak situasi global ini. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas, ketegangan dagang global dapat menekan permintaan terhadap produk ekspor utama Indonesia, seperti batu bara, CPO, dan nikel. Penurunan nilai ekspor tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Perekonomian global diperkirakan masih berada dalam kondisi lemah hingga tahun 2026. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025 , International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,0 persen pada 2025 dan mencapai 3,1 persen di tahun 2026. Beberapa faktor utama yang memengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi global, diantaranya adalah eskalasi perang tarif dan kebijakan proteksionis yang semakin luas, gangguan pada rantai pasok global, ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang meningkat, serta sentimen pasar yang memburuk.

Moderasi inflasi global diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2025–2026, meskipun dengan laju yang lebih lambat akibat tekanan geopolitik dan tensi dagang yang belum mereda. IMF memperkirakan inflasi global akan turun menjadi 4,2 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2026, sedikit lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Kebijakan moneter global yang cenderung melonggar sejak paruh kedua 2024 masih terus berlanjut, namun suku bunga diperkirakan tetap lebih tinggi dibanding era 2010-an. Di Amerika Serikat, pemangkasan suku bunga berjalan lebih lambat, didorong oleh kebijakan yang cenderung meningkatkan tekanan inflasi. Hal ini menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi, yang berpotensi membatasi ruang pelonggaran moneter di negara-negara berkembang.

Sementara itu, negara-negara di kawasan Eropa cenderung memangkas suku bunga lebih cepat karena progres pengendalian inflasi yang relatif lebih *on-track* dan kondisi ekonomi domestik

yang lemah. Perbedaan arah kebijakan ini mendorong divergensi moneter global, menciptakan kesenjangan suku bunga yang melebar dan meningkatkan volatilitas nilai tukar serta arus modal, terutama di negara-negara berkembang.

Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga diperkirakan melambat tajam. Menurut IMF, volume perdagangan global yang tumbuh 3,5 persen pada 2024 diproyeksikan hanya akan meningkat 2,6 persen pada 2025 dan 1,9 persen pada 2026. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya hambatan perdagangan internasional dan lemahnya pertumbuhan *output* serta investasi, berlanjutnya eskalasi perang dagang terutama akibat pengenaan kebijakan tarif agresif oleh AS sejak awal 2024.

Beberapa risiko global tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi akan menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Risiko yang akan memengaruhi ekonomi domestik tersebut diantaranya eskalasi perang dagang dan tensi geopolitik yang masih berlanjut, tingkat suku bunga global, dan volatilitas nilai tukar.

6.2.1.2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian perlu diwaspadai. Kondisi ini tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, volume perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dinamika perekonomian global perlu diantisipasi dan diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat. Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026. Risiko tersebut antara lain (1) pelemahan nilai tukar; (2) tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi; (3) eskalasi tensi geopolitik; (4) ruang kebijakan fiskal yang terbatas; dan (5) penambahan pembiayaan dari sumber utang dari proyeksi awal serta volatilitas pasar keuangan.

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai landasan dalam penyusunan APBN. Dinamika perekonomian global dan domestik dapat menyebabkan deviasi antara asumsi tersebut dengan kondisi riil yang terjadi. Deviasi ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal karena dapat mengakibatkan perbedaan antara target dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan anggaran. Sebagai ilustrasi, realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dari target APBN dengan belanja negara yang tetap terealisasi sesuai target APBN akan menimbulkan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Meskipun dampak deviasi antara asumsi makro dan realisasi dinilai relatif kecil, Pemerintah tetap melakukan mitigasi dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana ini berfungsi sebagai bantalan fiskal (*fiscal cushion*) yang dapat digunakan untuk meredam dampak fiskal dan mencegah pelebaran defisit APBN secara signifikan.

6.2.1.3. Sensitivitas Ekonomi Makro

6.2.1.3.1. Sensitivitas APBN Tahun 2026 terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN Tahun 2026, ditetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam menghitung besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut merupakan hasil proyeksi yang didasarkan pada asesmen terhadap dinamika perekonomian terkini dan estimasi atas perkembangan ekonomi di masa mendatang. Perubahan indikator asumsi dasar

ekonomi makro dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap besaran APBN karena setiap indikator pada dasarnya saling berinteraksi dalam kerangka perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya, dampak perubahan indikator tersebut dapat bersifat positif maupun negatif terhadap APBN yang dapat memberikan gambaran awal mengenai kapasitas fiskal negara untuk menghadapi dinamika dan eksternalitas ekonomi. Berikut disajikan gambaran mengenai dampak perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam menentukan besaran dalam postur APBN.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan berpengaruh pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan yaitu PPh nonmigas, PPN, Cukai, pajak lainnya, dan Bea Masuk. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat berdampak langsung pada besaran pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tingkat suku bunga berdampak pada perubahan biaya dari bunga utang *(cost of fund)*.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Di sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berpengaruh pada penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh Pasal 22 impor, PPN impor, PPnBM impor, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh antara lain terhadap pembayaran bunga utang dan subsidi energi. Pada sisi pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/*Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia/ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas terutama pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Namun demikian, secara tidak langsung perubahan harga ICP juga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait sehingga dampaknya pada sisi pendapatan negara baik di sisi perpajakan maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Di sisi belanja negara, peningkatan ICP akan berpengaruh langsung terhadap kenaikan belanja subsidi energi. Perubahan *lifting* minyak dan gas akan berdampak terhadap postur APBN. Perubahan tersebut akan memengaruhi anggaran yang bersumber dari produksi serta penjualan minyak mentah dan gas yaitu pada sisi pendapatan negara antara lain penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas.

Setiap perubahan pada sisi belanja negara akan diikuti dengan perubahan anggaran *mandatory spending* yaitu alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas perubahan satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya sehingga angka-angka estimasi dampak perubahan indikator ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam **Tabel 6.1** bersifat indikatif.

TABEL 6.1
SENSITIVITAS APBN 2026 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	Sensitivitas Proyeksi APBN 2026						
	Pertumbuhan Ekonomi (↑ 0,1%)	Inflasi (↑ 0,1%)	SBN 10 tahun (↑ 0,1%)	Nilai tukar (↑Rp100/US$)	ICP (↑ 1US$/barel)	*Lifting* minyak (↑ 10rb boepd)	*Lifting* Gas Bumi (↑ 10rb boepd)
A. Pendapatan Negara	**2,1**	**1,9**	**0,0**	**5,3**	**3,5**	**1,8**	**1,3**
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,1	1,9	0,0	5,3	3,5	1,8	1,3
1. Penerimaan Perpajakan	2,1	1,9	0,0	3,5	1,9	0,3	0,4
2. PNBP	0,0	0,0	0,0	1,8	1,6	1,5	0,9
II. Penerimaan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**6,1**	**10,3**	**0,0**	**0,0**
I. Belanja Pemerintah Pusat *	0,0	0,0	1,9	6,1	10,3	0,0	0,0
II. Transfer ke Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	**2,1**	**1,9**	**(1,9)**	**(0,8)**	**(6,8)**	**1,8**	**1,3**
D. Pembiayaan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Catatan:
1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (cateris paribus)
2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah
* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya potensi Kompensasi Energi

Sumber: Kementerian Keuangan

Analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro merupakan perkiraan perubahan besaran komponen-komponen dalam APBN 2026 jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat linier dengan asumsi *ceteris paribus* yaitu ketika variabel lain tidak berubah. Analisis sensitivitas digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan langkah mitigasi terhadap potensi risiko ekonomi makro yang mungkin terjadi.

6.2.1.3.2. Sensitivitas Proyeksi APBN Terhadap Variabel Ekonomi Makro dalam Jangka Menengah

Proyeksi APBN jangka menengah disusun dengan memperhatikan perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik terutama perkembangan indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya akan memengaruhi penyusunan postur APBN jangka menengah yaitu perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Perkembangan perekonomian jangka menengah yang lebih dinamis karena ketidakpastian menyebabkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang lebih dinamis sehingga proyeksi APBN jangka menengah lebih sensitif.

6.2.1.4. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Kinerja keuangan BUMN di tahun 2026 akan berpotensi dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, residu dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas rantai pasok global dan harga komoditas.

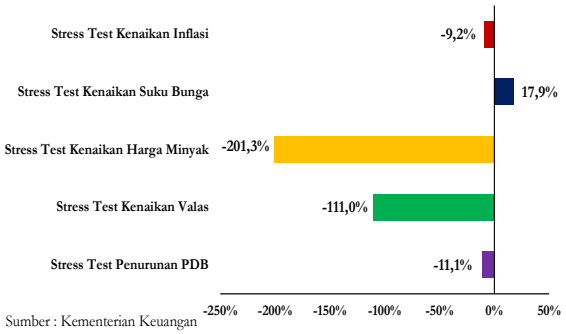
Faktor-faktor risiko tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan eksposur fiskal APBN melalui BUMN. Di sisi pendapatan negara, risiko penurunan kinerja BUMN

dapat berdampak pada menurunnya setoran pajak dan dividen. Di sisi belanja negara, ketidakstabilan harga energi dan pangan global berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi BUMN untuk menjaga daya beli masyarakat.

Perubahan eksposur APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan dengan menggunakan model *macro stress test*. Model tersebut menggunakan sampel 24 BUMN yang mencakup beberapa klaster dengan 5 variabel ekonomi makro yakni pertumbuhan PDB, valas, harga minyak, suku bunga, dan inflasi. Proyeksi dilakukan baik secara agregat terhadap 24 BUMN maupun terhadap masing-masing klastering.

Berdasarkan proyeksi secara agregat sesuai **Grafik 6.2**, semua variabel ekonomi makro memiliki pengaruh terhadap eksposur APBN (penerimaan dan belanja negara) dari 24 BUMN, dan variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah harga minyak dan nilai tukar. Kenaikan harga minyak memiliki dampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi yang diberikan Pemerintah kepada BUMN halmana dalam model *macro stress test*, subsidi dan kompensasi menjadi pengurang kontribusi APBN dari BUMN (penerimaan pajak). Kenaikan harga minyak tersebut berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti pada PT PLN (Persero) yang menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Selain itu, kenaikan valas juga memengaruhi penurunan kontribusi APBN dari BUMN yang disebabkan oleh kenaikan biaya pokok yang bersumber dari pembelian bahan baku dan pembelian tenaga listrik BUMN yang menggunakan transaksi valas.

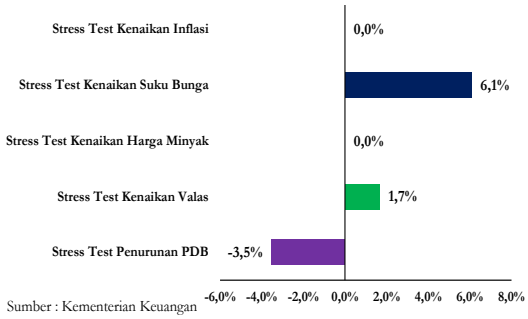
GRAFIK 6.2
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DARI 24 BUMN TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Selain dilakukan *stress test* secara agregat, dilakukan juga *stress test* untuk BUMN yang terbagi menjadi 6 (enam) klaster secara terpisah. Dari proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun, sesuai **Grafik 6.3,** fluktuasi penerimaan perpajakan dan PNBP dari BUMN klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun secara dominan dipengaruhi oleh variabel PDB, valas dan suku bunga. Kenaikan suku bunga dan valas akan meningkatkan *margin* pendapatan BUMN klaster Jasa Keuangan, Asuransi, dan Dana Pensiun. Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi *margin* pendapatan.

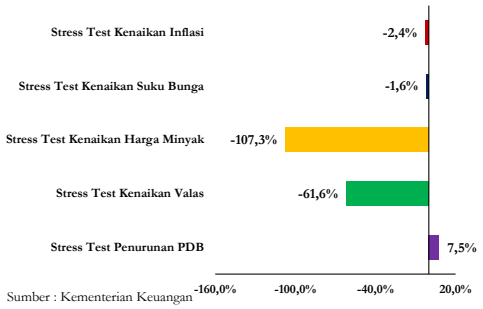
GRAFIK 6.3
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN KLASTER JASA KEUANGAN, ASURANSI, DAN DANA PENSIUN TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan **Grafik 6.4,** seluruh variabel asumsi makro ekonomi memiliki dampak terhadap eksposur APBN dari BUMN klaster Energi, Migas, Mineral & Batubara. Variabel yang memiliki dampak signifikan adalah kenaikan harga minyak dan valas karena dapat meningkatkan subsidi dan kompensasi serta menurunkan pendapatan pajak dari BUMN klaster Energi, Migas, Mineral & Batubara.

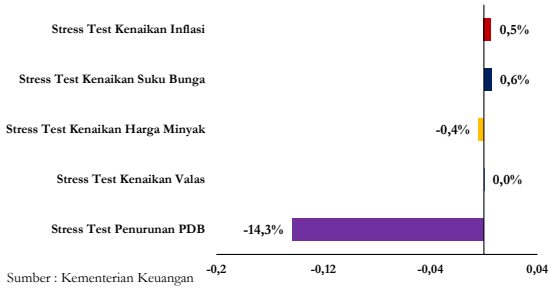
GRAFIK 6.4
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN KLASTER ENERGI, MIGAS, MINERAL & BATUBARA TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Hasil proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN klaster Kesehatan dan Manufaktur sesuai **Grafik 6.5,** variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap eksposur APBN adalah penurunan PDB.

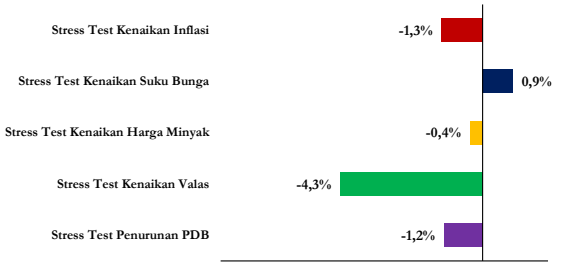
GRAFIK 6.5
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN BUMN KLASTER KESEHATAN DAN MANUFAKTUR TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk BUMN klaster Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana pada **Grafik 6.6,** terdapat 3 (tiga) variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap eksposur APBN yakni PDB, valas, dan inflasi.

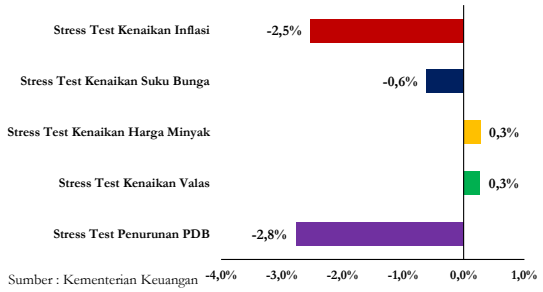
GRAFIK 6.6
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN PANGAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN TAHUN 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Begitu juga dengan BUMN klaster Infrastruktur sebagaimana pada **Grafik 6.7,** terdapat 3 variabel yang memiliki dampak signifikan pada kontribusi APBN dari BUMN yaitu penurunan PDB, kenaikan suku bunga, dan kenaikan inflasi.

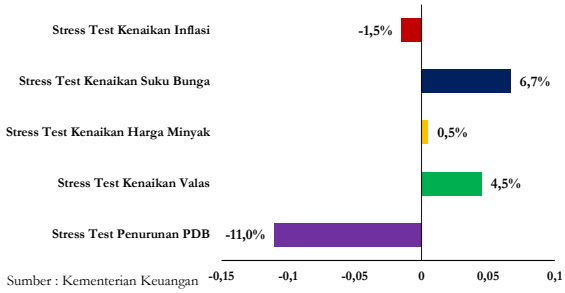
GRAFIK 6.7
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST*
BUMN KLASTER INFRASTRUKTUR 2026



Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan proyeksi perubahan eksposur APBN dari BUMN klaster Logistik, Pariwisata, Pendukung, Telekomunikasi, & Media sesuai **Grafik 6.8,** menunjukkan bahwa variabel-variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh terhadap kontribusi APBN yang bersumber dari BUMN klaster Logistik, Pariwisata, Pendukung, Telekomunikasi, & Media adalah PDB, valas, suku bunga dan inflasi.

GRAFIK 6.8
HASIL ANALISIS *MACRO STRESS TEST* BUMN KLASTER LOGISTIK, PARIWISATA, PENDUKUNG, TELEKOMUNIKASI, & MEDIA 2026



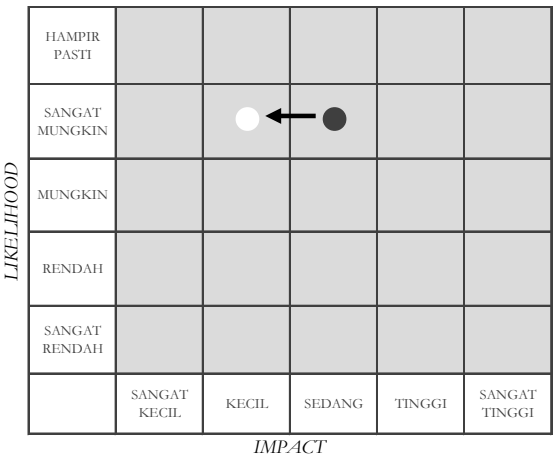
Sumber : Kementerian Keuangan

Mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional di tahun 2026, dimungkinkan timbul risiko baru yang bersumber dari BUMN. Pemerintah dan BPI Danantara akan bersinergi untuk memperkuat manajemen risiko pengelolaan BUMN secara strategis dan institusional, agar masing- masing BUMN telah memiliki rencana mitigasi risiko yang memadai dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul terhadap setiap perubahan variabel makro ekonomi di tahun 2026, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, daya saing dan nilai tambah dari BUMN serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

6.2.1.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara

Kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian perlu diwaspadai. Kondisi ini tercermin dari pergerakan berbagai indikator utama, seperti pertumbuhan PDB global, *volume* perdagangan internasional, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dinamika perekonomian global tersebut dapat berisiko terhadap deviasi asumsi dasar ekonomi makro yang dapat berimbas pada capaian pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak risiko tersebut. Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada **Grafik 6.9** berikut.

GRAFIK 6.9
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PENDAPATAN NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan Perpajakan

Pencapaian penerimaan perpajakan neto Semester I tahun 2025 sebesar Rp978.292,9 miliar, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp831.265,4 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp147.027,5 miliar, atau masing-masing telah mencapai 38,0 persen dan 48,7 persen dari target yang tercantum dalam APBN 2025. Sampai dengan akhir tahun 2025, *outlook* penerimaan perpajakan diperkirakan 95,8 persen terhadap APBN tahun 2025 yang dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi nasional, penerapan PPN 12 persen secara terbatas pada barang mewah, fluktuasi harga komoditas utama, implementasi reformasi perpajakan, kebijakan perbaikan administratif, serta upaya pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Capaian tersebut tumbuh 7,0 persen dari realisasi tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut, target penerimaan perpajakan tahun 2026 disusun dengan memperhatikan tantangan dan kebijakan, serta proyeksi perekonomian.

Kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan efektif dapat menjadi peluang untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah berbagai tantangan yang ada. Sistem perpajakan Indonesia perlu terus diselaraskan agar semakin *compatible* dengan perubahan struktur ekonomi serta menerapkan *best practice* perpajakan internasional guna memastikan keberlanjutan mobilisasi pendapatan domestik. Tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tensi geopolitik, justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi perpajakan yang berkelanjutan yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang keberlanjutan fiskal kedepan. Dengan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian, reformasi perpajakan diarahkan antara lain untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target perpajakan yang optimal, diperlukan penguatan di berbagai aspek, termasuk administrasi, SDM, dan infrastruktur, sehingga sistem perpajakan dapat lebih mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Dalam rangka mitigasi risiko dan tantangan dimaksud, Pemerintah telah menyusun kebijakan umum perpajakan tahun 2026, antara lain: (1) perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat; (2) peningkatan kepatuhan melalui pengawasan berbasis teknologi informasi, memperkuat sinergi dan *joint program*, serta penegakan hukum untuk mendukung perbaikan sistem administrasi dan organisasi perpajakan; (3) penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan penerimaan dan rasio perpajakan; serta (4) pengelolaan pemberian insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk mengakselerasi investasi, serta hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah tinggi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP terdiri atas Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal dari sumber daya alam sehingga kinerja PNBP relatif tergantung pada volatilitas harga komoditas. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP seperti kinerja perekonomian, perubahan kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya.

Kinerja PNBP yang berasal dari SDA pada Semester I tahun 2025 mencapai sebesar Rp102.651,5 miliar atau 47,1 persen terhadap target APBN 2025, terkontraksi sebesar 10,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Pendapatan SDA Migas sendiri terkontraksi sebesar 15,0 persen (*yoy*). Di sisi lain, penguatan dolar AS terhadap Rupiah dan peningkatan *lifting* minyak bumi dan gas bumi, belum mampu menutup penurunan Pendapatan SDA Migas sebagai dampak dari penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP).

Penurunan pendapatan SDA Nonmigas utamanya disebabkan oleh kinerja penerimaan royalti batubara yang menurun dampak penurunan volume produksi batubara disebabkan berkurangnya konsumsi batubara dalam negeri. Pendapatan KND hingga pertengahan tahun 2025 telah mencapai Rp11.831,1 miliar, turun 80,3 persen dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp60.103,3 miliar dan

diproyeksikan tidak akan mencapai target APBN TA 2025 sebesar Rp90.000,0 miliar. Realisasi KND berasal dari dividen interim BRI sebesar Rp10.882,5 miliar dan dividen SMV Keuangan sebesar Rp948,7 miliar. Penurunan pendapatan KND disebabkan oleh adanya pengalihan sebagian setoran dividen BUMN ke BPI Danantara.

Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan PNBP 2026 diarahkan untuk: (1) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatakan kepatuhan dan tata kelola PNBP, serta optimalisasi PNBP termasuk pemanfaatan aset/BMN; (3) peningkatan sinergi antar instansi Pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

6.2.1.6. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Belanja Negara

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi nasional dan menjaga ketahanan dari tekanan eksternal, belanja negara yang berkualitas menjadi prasyarat penting dalam kebijakan fiskal. Tahun 2026 diperkirakan masih akan menjadi periode yang menantang bagi pengelolaan risiko fiskal APBN. Berbagai perkembangan global, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional *(decoupling)*, serta potensi disrupsi rantai pasok dunia, menjadi faktor-faktor yang perlu dicermati secara seksama. Dalam situasi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai landasan penyusunan APBN memiliki tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Apabila terjadi deviasi terhadap asumsi tersebut, maka dampaknya dapat dirasakan langsung terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, pembiayaan, maupun keseimbangan fiskal secara keseluruhan.

Untuk mengukur efektivitas belanja negara dan menjaga kesinambungannya, Pemerintah senantiasa memantau berbagai variabel ekonomi makro yang berpotensi memengaruhi postur APBN yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, harga minyak mentah dunia serta *lifting* minyak dan gas. Indikator pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung memengaruhi kinerja penerimaan negara. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang optimis sebagai bagian dari upaya mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Namun demikian, potensi perlambatan ekonomi global, melemahnya permintaan ekspor, dan ketidakpastian investasi dapat menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan. Apabila realisasi pertumbuhan lebih rendah dari asumsi, maka pendapatan perpajakan berpotensi tertekan terutama dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan belanja negara yang di-*earmark* seperti komponen dana bagi hasil dari Transfer ke Daerah.

Dari sisi harga, inflasi menjadi indikator penting lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Ketidakpastian global, termasuk gangguan pasokan pangan dan energi, dapat mendorong inflasi domestik lebih tinggi dari yang diasumsikan. Dalam kondisi tersebut, daya beli masyarakat berisiko menurun dan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan bantuan sosial cenderung meningkat. Kenaikan belanja yang tidak diantisipasi sebelumnya, khususnya untuk subsidi energi

dan kompensasi harga, dapat menimbulkan tekanan terhadap postur belanja negara dan berpotensi mengganggu kesinambungan pelaksanaan program lainnya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi secara umum.

Selain itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga memiliki pengaruh yang besar terhadap *cost of fund* pembiayaan APBN. Dalam konteks global yang masih cenderung ketat dari sisi kebijakan moneter, terdapat potensi kenaikan *yield* obligasi yang dapat berdampak juga ke pasar domestik. Apabila imbal hasil SBN meningkat lebih tinggi dari yang diasumsikan, maka beban bunga utang juga akan meningkat, sehingga menyerap sebagian ruang belanja negara. Situasi ini dapat mengurangi fleksibilitas fiskal, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan atau efisiensi belanja. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang *prudent* dan terukur tetap menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan fiskal.

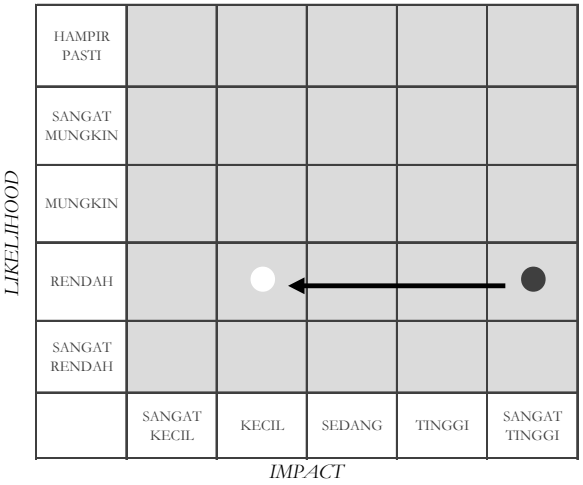
Dari sisi nilai tukar, pergerakan rupiah terhadap dolar AS juga menjadi salah satu aspek yang penting. Depresiasi nilai tukar di atas asumsi dapat berdampak pada kenaikan biaya belanja yang berbasis valuta asing, seperti pembayaran utang luar negeri, subsidi energi impor, dan pengadaan barang modal tertentu. Selain itu, pelemahan rupiah juga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi domestik. Oleh sebab itu, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu prasyarat dalam menjaga ketahanan APBN dari risiko eksternal.

Risiko lainnya bersumber dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berfluktuasi akibat dinamika pasar global dan situasi geopolitik. Harga minyak yang lebih tinggi dari asumsi dapat memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor migas, namun pada saat yang sama juga dapat meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi, terutama jika harga jual ke konsumen tidak disesuaikan. Sebaliknya, apabila harga minyak turun dan tidak diimbangi dengan peningkatan *lifting*, maka penerimaan negara berpotensi menurun. Dengan demikian, pergerakan harga minyak perlu diantisipasi dengan baik agar dampaknya terhadap APBN dapat dikendalikan secara proporsional.

Terakhir, realisasi *lifting* minyak dan gas yang tidak sesuai dengan target juga dapat memengaruhi pendapatan negara. Berbagai tantangan teknis dan struktural, seperti penurunan produksi alamiah, tertundanya proyek hulu migas, atau kendala investasi, dapat menyebabkan realisasi *lifting* lebih rendah dari asumsi. Dalam kondisi demikian, PNBP dari sektor migas berisiko tidak mencapai target, yang pada akhirnya dapat mengurangi kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, berbagai risiko terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026 dapat menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan APBN, baik dari sisi kemampuan untuk memenuhi target penerimaan, menjaga efisiensi belanja, maupun mengelola pembiayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat strategi pengelolaan risiko fiskal melalui penyusunan skenario alternatif, penguatan cadangan fiskal, serta peningkatan kualitas belanja. Selain itu, koordinasi kebijakan antarotoritas dan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi menjadi sangat penting agar APBN tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap belanja negara ditampilkan pada **Grafik 6.10.**

GRAFIK 6.10
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP BELANJA NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.1.7. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Anggaran

Kebijakan proteksionisme perdagangan yang diinisiasi oleh negara maju utamanya Amerika Serikat diikuti oleh eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi global di tahun 2026. Hal ini berdampak pada dinamika penyusunan proyeksi pendapatan negara maupun belanja negara yang tentu saja berdampak pada besaran defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan utang. Beberapa indikator risiko pengelolaan utang yang terkait dengan dinamika perekonomian dan pasar keuangan global yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali *(refinancing)*, serta risiko *shortage* pembiayaan.

1. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), merupakan potensi penambahan beban anggaran akibat perubahan tingkat bunga di pasar yang dapat meningkatkan pembayaran kewajiban utang. Indikator risiko tingkat bunga salah satunya tercermin dari rasio *Variable Rate* (VR), yaitu rasio komposisi jumlah utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Rasio VR masih terkendali walaupun cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya *outstanding* SBN dalam rangka implementasi SKB 2 dan 3 tahun 2020–2022 yang seluruhnya diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, peningkatan rasio VR juga merupakan konsekuensi dari peningkatan penerbitan SBN Ritel dengan tingkat bunga mengambang sebagai bagian dari upaya pendalaman dan perluasan basis investor domestik serta penarikan pinjaman yang sebagian besar mengacu pada tingkat bunga mengambang. Rasio VR tahun 2020 mencapai 14,2 persen di mana 7,6 persen diantaranya berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI. Sampai dengan Semester I tahun 2025 rasio VR meningkat menjadi sebesar 19,9 persen, dengan komposisi rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN SKB kepada BI sebesar 10,9 persen. Dalam jangka menengah, rasio VR diperkirakan akan terus menurun seiring jatuh tempo SBN SKB yang dimulai tahun 2025, dimana sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap. Terdapat potensi *refinancing* dengan tingkat bunga tetap yang lebih rendah mengingat kenaikan tingkat bunga oleh otoritas moneter global diproyeksikan tidak akan berlanjut dan cenderung berada dalam siklus penurunan tingkat bunga seiring dengan laju inflasi yang sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pengelolaan risiko tingkat bunga akan tetap memperhatikan arah pemulihan ekonomi global serta dinamika kondisi pasar keuangan.
2. Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar salah

satunya tercermin dari komposisi jumlah utang dalam denominasi utang valas (*Foreign Exchange*/FX) terhadap total utang. Rasio utang valas pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,5 persen dan terus menurun hingga mencapai 28,3 persen sampai dengan Semester I tahun 2025. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak komitmen Pemerintah dalam implementasi strategi yang mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar domestik.

3. Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*), merupakan risiko dimana Pemerintah tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi pada saat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya beban APBN akibat meningkatnya beban bunga utang. Upaya meminimalkan risiko dapat dilakukan dengan mendistribusikan jatuh tempo utang setiap tahun sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan pada suatu periode tertentu. Risiko *refinancing* diterjemahkan dalam rasio jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total uang dan *Average Time to Maturity* (ATM). Rasio jatuh tempo utang dalam 1 tahun mengalami kenaikan dari 7,8 persen pada tahun 2020 menjadi 9,3 persen sampai dengan Semester I tahun 2025 diakibatkan oleh upaya Pemerintah untuk mendorong pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan SBN kepada investor ritel yang pada umumnya memiliki tenor yang pendek. Risiko *refinancing* yang dikelola dengan baik terlihat dari stabilnya rasio utang jatuh tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar 42,7 persen selama periode 2020–2024. Dalam periode yang sama, ATM stabil pada kisaran 7,8 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah yakni minimal 7 tahun. Hal ini menggambarkan Pemerintah memiliki keleluasaan yang cukup terkait ketersediaan dana pelunasan kewajiban sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anggaran Pemerintah dalam jangka pendek. Sejauh ini risiko *refinancing* cukup terjaga berkat komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek dengan tetap memperhatikan kecenderungan *demand* investor, termasuk biaya pengadaan utang. Pengendalian kemampuan pembayaran kewajiban utang menjadi penting dalam rangka menurunkan risiko gagal bayar dan mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk optimalisasi belanja dan kesinambungan fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan *reprofiling* utang melalui operasi *liability management*.
4. Risiko *shortage* pembiayaan merupakan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan tahun berjalan dikarenakan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada biaya dan risiko yang terkendali dilakukan untuk memastikan terpenuhinya defisit, menjaga kas negara, menghindari potensi risiko *default* atas kewajiban utang yang harus dipenuhi, mendukung pengelolaan portofolio utang yang optimum, serta mendukung kesinambungan fiskal. Pemerintah senantiasa berupaya untuk menerapkan strategi pembiayaan utang yang fleksibel dan oportunistik dengan mengoptimalkan bauran instrumen pembiayaan utang yang ada dan senantiasa

melakukan monitoring kondisi pasar keuangan. Selain itu, *timing* pembiayaan juga menyesuaikan kondisi kas, realisasi APBN, serta kondisi pasar. Dinamika APBN, kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan dikelola dan direspon dengan baik melalui berbagai forum koordinasi reguler dan strategi pengelolaan utang yang fleksibel namun tetap dilaksanakan secara *prudent*.

Perkembangan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2020 sampai Semester I tahun 2025 ditunjukkan pada **Tabel 6.2.** Dalam jangka menengah, Pemerintah akan tetap memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik, dengan tingkat bunga tetap dan tenor jangka menengah panjang. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan ketersediaan penerbitan instrumen utang jangka pendek berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

TABEL 6.2
PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2021 – Semester I 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	Sem I 2025
Indikator Risiko Utama					
Interest Rate Risk (%)					
- Rasio *Variable Rate*	16,3	18,8	19,7	20,2	19,9
- Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI	7,4	8,2	9,6	10,8	10,9
Exchange Rate Risk (%)					
- Rasio Utang FX-Total Utang	30,0	29,2	28,3	28,7	28,3
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%)	6,4	7,5	8,3	9,7	9,3
- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%)	22,8	24,6	27,3	29,5	29,5
- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%)	40,1	42,5	44,6	46,5	44,8
- *Average Time to Maturity (tahun)*	8,6	8,3	7,9	7,9	7,8

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.3
PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA MENENGAH HINGGA AKHIR 2029

Uraian	s.d. 2029
Indikator terkait Pengelolaan Utang	
Interest Rate Risk	
- Rasio *Variable Rate*	maksimal 20,0 persen
Exchange Rate Risk	
- Rasio Utang FX-Total Utang	maksimal 30,0 persen
Refinancing Risk	
- Utang Jatuh Tempo <1 tahun	maksimal 12,5 persen
- *Average Time to Maturity (tahun)*	minimal 7,0 tahun
Indikator terkait Fiskal (%)	
- Rasio utang terhadap PDB	Kisaran 40,0 persen
- Rasio bunga terhadap PDB	Kisaran 3,0 persen

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif. Hal ini dimaksudkan agar risiko nilai tukar terus dijaga untuk mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah juga berupaya melakukan pengelolaan portofolio secara aktif untuk menyeimbangkan biaya dan risiko utang serta memperhitungkan kemampuan membayar kembali. Risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal, yaitu rasio utang terhadap PDB, diproyeksikan tetap pada level yang *manageable* dalam jangka menengah dengan memperhatikan kondisi pemulihan ekonomi.

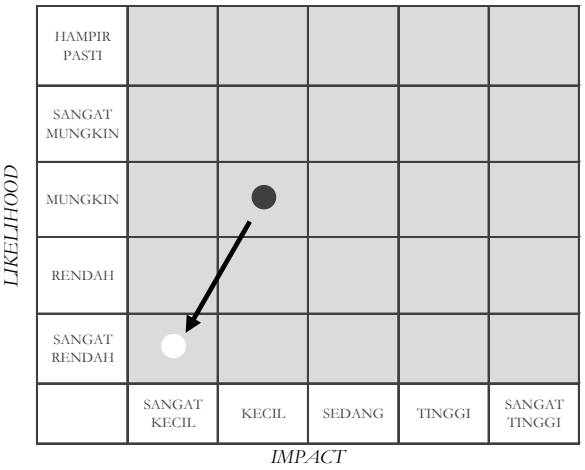
Beberapa upaya dalam mitigasi meningkatnya risiko utang antara lain:

1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali. Pemerintah berupaya agar indikator risiko tetap berada di level yang terkendali, antara lain:
    a) Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap. Hal ini dapat ditempuh, misalnya di pasar SBN, dengan melakukan penguatan pada sisi penawaran, infrastruktur, dan permintaan. Penguatan sisi penawaran SBN dilakukan antara lain melalui prioritas penerbitan SBN di pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar dan stabilitas pasar keuangan, sedangkan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang kuat (*hard currency*), mengelola portofolio SBN secara aktif, dan diversifikasi instrumen SBN mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN, mengurangi fragmentasi pasar, serta mengendalikan risiko utang. Penguatan sisi infrastruktur SBN antara lain dengan mengoptimalkan peran dan kapasitas mitra penjualan SBN di pasar perdana, mendukung dalam pengembangan *electronic trading platform,* menyempurnakan protokol manajemen krisis, *Bond Stabilization Framework* (BSF), *Securities Lending Facilities* (SLF), serta infrastruktur transaksi SBN secara *online*. Penguatan sisi permintaan dengan melakukan penyusunan dan harmonisasi strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur serta edukasi dan sosialisasi yang aktif dan dinamis, termasuk penguatan program kerja sama kelembagaan, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas otoritas serta akademisi, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
    b) Memprioritaskan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap.
    c) Mengupayakan langkah-langkah pengelolaan portofolio utang lebih aktif, dengan memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang.
    d) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.
2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan utang. Kebijakan mitigasi terhadap risiko *shortage* pembiayaan dilakukan melalui strategi diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya mengandalkan pada penerbitan SBN, tetapi juga melakukan pengembangan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa contoh peluang pembiayaan, yaitu:
    a) Memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan lain, antara lain *idle cash* dari BLU dan dana SAL.

b) Pengembangan pembiayaan kreatif, dengan mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*) dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan antara lain melalui KPBU, untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan defisit APBN.
c) Pengendalian penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN dengan memperhatikan kondisi kas serta target biaya dan risiko yang menjadi acuan dalam strategi pengelolaan utang, termasuk kondisi pasar.
d) Diversifikasi instrumen SBN, baik konvensional maupun syariah, dengan memperhatikan basis dan perilaku investor yang ingin dikelola dan preferensi dari investor maupun ekosistem sistem keuangan, misalnya pengembangan SBN Ritel baik dari sisi tema, struktur, maupun perluasan jalur distribusi dan kanal pembayaran, penerbitan SBN sebagai alternatif instrumen pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMN, BUMD, dan lembaga Pemerintah lainnya, serta penerbitan SBN dengan tema tertentu yang difokuskan pada program prioritas pembangunan dan/atau komitmen Pemerintah terhadap pembiayaan inklusif dan berkelanjutan seperti *thematic bonds* yang mendukung *Sustainable Development Goals*, perubahan iklim, dan termasuk rencana prioritas mencapai *net zero emission*.
e) Melakukan perencanaan strategis atas *private placement* institusi potensial secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah akan melakukan optimalisasi *private placement* terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.

Adapun peta risiko dampak perubahan ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran digambarkan pada **Grafik 6.11.**

GRAFIK 6.11
PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PEMBIAYAAN ANGGARAN



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2. Risiko Implementasi Program dan Kebijakan

6.2.2.1. Risiko Program Pengembangan Koperasi Merah Putih

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah untuk memperkuat sektor koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini memiliki risiko fiskal dan risiko keberlanjutan yang perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap APBN.

Pengembangan KDKMP dilakukan menggunakan pembiayaan modal dan pembiayaan operasional. Pembiayaan modal berupa pembangunan gerai akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)

dengan pembayaran melalui bantuan dukungan pembiayaan dari Dana Desa/DAU/DBH. Sementara itu, pembiayaan operasional yang diterima KDKMP ditanggung oleh KDKMP dengan dukungan pengembalian pinjaman apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya.

Beberapa risiko yang timbul atas implementasi Program KDKMP antara lain:

1. Risiko Fiskal di Pemerintah Pusat adalah risiko penyediaan alokasi bantuan likuiditas perbankan dalam penyaluran kepada KDKMP serta penempatan dana pemerintah untuk mendukung implementasi program KDKMP. Penyediaan alokasi bantuan likuiditas merupakan risiko Investasi Pemerintah kepada Perbankan yang ditetapkan melalui skema Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah. Risiko Investasi Pemerintah dapat dirincikan bahwa jumlah nilai dana anggaran yang digunakan oleh Pemerintah dalam mendukung Bantuan Likuiditas kepada Perbankan. Nilai dana investasi yang dibutuhkan cukup besar sehingga diperlukan ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pengeluaran anggaran tanpa membahayakan stabilitas keuangan negara atau keberlanjutan posisi fiskal.
2. Risiko Fiskal di Pemerintah Kabupaten/ Kota/Desa. Risiko fiskal di pemerintah kabupaten/kota/desa adalah risiko berkurangnya kapasitas fiskal daerah dan desa karena sebagian anggaran digunakan untuk membayar pembiayaan KDKMP. Penggunaan Dana Desa untuk KDKMP akan berdampak pada perubahan prioritas penggunaan Dana Desa, struktur dan penganggaran dalam APBDes, serta tidak tercapainya tujuan awal Dana Desa.
3. Risiko Implementasi. Risiko implementasi adalah risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gerai KDKMP yang bersifat serentak dengan desain yang sama. Risiko ini muncul karena dengan beragamnya kondisi KDKMP maka perlu dilakukan penyesuaian pembangunan gerai untuk disesuaikan dengan kondisi ketersedian lahan, kapasitas fiskal, dan kondisi khusus dari pemerintah desa/ pemerintah daerah. Pelaksanaan serentak ini juga meningkatkan peluang pembangunan gerai yang tidak sesuai kualitas standar yang ditetapkan.
4. Risiko Keberlanjutan Program. Risiko keberlanjutan program merujuk pada potensi hambatan, tantangan, atau faktor yang dapat mengancam kemampuan program ini untuk tetap berjalan secara efektif dalam jangka panjang. Risiko ini meliputi: (1) risiko finansial, yaitu pendapatan tidak mencukupi dan ketergantungan pada pinjaman; (2) risiko kapasitas pengurus, yaitu pengurus koperasi belum kompeten dalam manajemen; (3) risiko kepemimpinan dan tata kelola, yaitu konflik internal, sistem pengawasan lemah, dan minimnya transparansi; (4) risiko sosial dan partisipasi, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan koperasi dan kurangnya dampak positif koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat; (5) risiko usaha, yaitu unit usaha yang tidak kompetitif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan (6) risiko regulasi, yaitu paket regulasi yang belum lengkap dan potensi adanya perubahan regulasi.

Dalam implementasi program KDKMP perlu adanya langkah mitigasi untuk menanggulangi risiko di atas, antara lain:

1. Mitigasi Risiko terhadap Bantuan Likuiditas kepada Perbankan. Mitigasi yang dilakukan adalah melakukan sinergi dengan para

pihak terkait di Kementerian Keuangan dalam rangka penyediaan dana anggaran Investasi Pemerintah yang mencukupi melalui penyediaan data target penyaluran Perbankan kepada KDKMP serta melakukan mitigasi mengenai monitoring dan evaluasi terkait pengembalian Investasi Pemerintah berupa Imbal Hasil Investasi/ pengembalian investasi dari Perbankan kepada Pemerintah.

2. Mitigasi Risiko Fiskal di Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa. Mitigasi terhadap risiko ini adalah dengan mempertimbangkan alokasi DAU/DBH/Dana Desa dalam analisis pinjaman kepada KDKMP. Selain itu, telah diatur beberapa hal berikut:
   a) Adanya relaksasi regulasi mengenai pergeseran anggaran dalam APBDes; dan *refocusing* kebijakan penggunaan Dana Desa yang dimuat dalam RUU APBN.
   b) Keluaran *(output)* Belanja Modal yang dihasilkan dari pencairan Pembiayaan Belanja Modal menjadi aset Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
3. Mitigasi Risiko Implementasi. Mitigasi terhadap risiko ini antara lain:
   a) Kementerian Koperasi menyiapkan rancangan alternatif desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan KDKMP dan kondisi di daerah.
   b) Perlu dibentuk tim pengawas independen di tingkat regional yang bertugas memverifikasi progres pembangunan secara objektif sebelum pembayaran dari Dana Desa/DAU/DBH dapat dicairkan kepada kontraktor.
4. Mitigasi Risiko Keberlanjutan Program. Mitigasi yang dilakukan antara lain:
   a) Penerapan penilaian terhadap usulan pinjaman dan rencana bisnis yang sesuai standar perbankan;
   b) Pembatasan pinjaman yang akan digunakan untuk *operational expenditure*;
   c) Pencairan pinjaman yang dilakukan bertahap sesuai kebutuhan;
   d) Penguatan sistem keuangan dan manajemen risiko usaha;
   e) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pengurus koperasi;
   f) Perbaikan tata kelola koperasi dan sistem akuntabilitas;
   g) Pelibatan aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi;
   h) Analisis usaha yang memadai dan kolaborasi dengan pelaku ekonomi yang sudah ada; dan
   i) Penyusunan paket regulasi yang lengkap dan adaptif.

6.2.2.2. Risiko Kebijakan Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami transformasi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Presiden memberikan kuasa kepada Menteri BUMN dan Danantara untuk mengelola kepemilikan negara atas BUMN. Menteri BUMN tetap menjalankan fungsi sebagai regulator, pengawas, dan pemilik modal atas BUMN berbentuk Perum, serta memegang saham Seri A Dwiwarna pada BUMN Persero sebagai bentuk kontrol strategis negara. Selain itu, Menteri BUMN juga memegang saham Seri A Dwiwarna pada holding operasional dan holding investasi sebesar 1,0 persen.

Danantara, sebagai pengelola utama BUMN memegang 99,0 persen saham Seri B pada holding operasional dan holding investasi. Dengan struktur ini, pengelolaan operasional BUMN dilakukan oleh Danantara melalui holding operasional, sementara fungsi kepemilikan strategis tetap berada pada negara melalui Menteri BUMN. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, serta memisahkan secara tegas fungsi pengawasan dan pengelolaan.

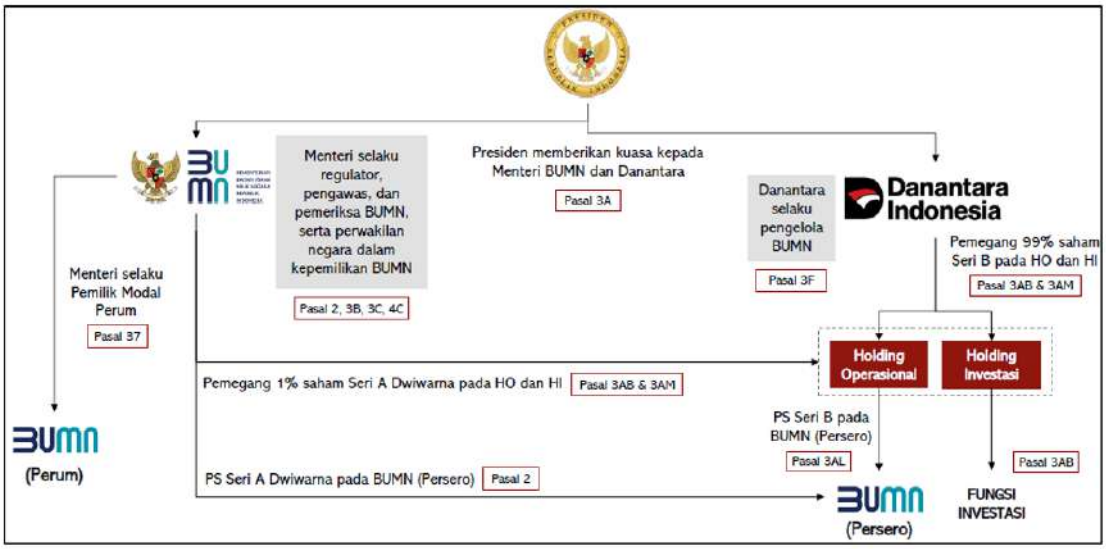
Holding operasional dibentuk sebagai entitas yang fokus pada pengelolaan dan pengawasanlangsung atas aktivitas operasional BUMN-BUMN sektor tertentu. Fungsi utamanya adalah memastikan BUMN mampu menjalankan bisnis intinya secara efektif, efisien, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global. Dalam konteks pengelolaan risiko, holding operasional berperan untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan mitigasi terhadap risiko yang timbul dari aktivitas operasional BUMN. Fungsi ini memastikan agar risiko yang melekat pada operasional BUMN tidak langsung membebani fiskal dan akan dikelola oleh Danantara melalui holding operasional.

Sementara itu, holding investasi berfungsi untuk mengelola investasi dan pengembangan aset BUMN. Fokus holding investasi adalah menciptakan nilai tambah melalui strategi investasi yang tepat dan ekspansi bisnis yang prospektif. Holding investasi difokuskan untuk mendorong peningkatan *Return on Assets* (ROA) BUMN melalui pengelolaan portofolio investasi secara lebih dinamis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar, sehingga potensi penguatan kinerja BUMN akan lebih optimal.

Sinergi holding operasional dan investasi di bawah Danantara menjadi instrumen strategis untuk memitigasi risiko fiskal secara efektif. Melalui holding operasional, risiko yang berasal dari operasional BUMN terutama di sektor strategis dan layanan publik, dikendalikan melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang ketat, sehingga potensi kerugian yang dapat membebani APBN dapat diminimalisasi. Sementara itu, holding investasi berperan dalam mengoptimalkan aset dan memperkuat kapasitas investasi BUMN melalui pengelolaan portofolio yang *prudent*, sehingga memberikan imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara. Sinergi antara keduanya menciptakan mekanisme yang memisahkan risiko bisnis operasional dari risiko investasi. Mekanisme ini memastikan bahwa eksposur fiskal Pemerintah

atas kinerja BUMN tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan nilai ekonomi dan kontribusi BUMN bagi pembangunan nasional.

GAMBAR 6.1
PENGELOLAAN BUMN BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 2025



Sumber : Danantara

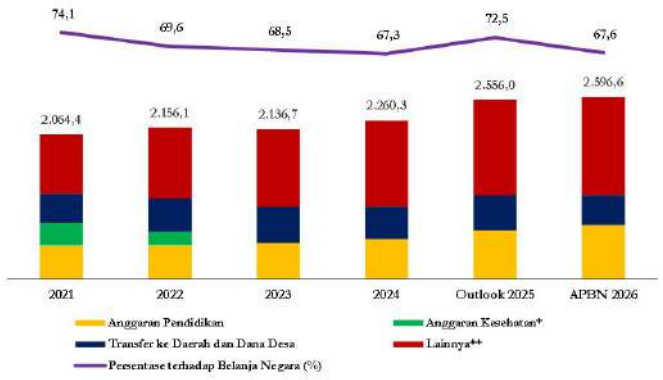
Namun demikian, masih terdapat risiko fiskal dalam hal BUMN mendapatkan penugasan Pemerintah hal mana Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman, penjaminan Pemerintah Pusat, atau dukungan lainnya. Selain itu, risiko fiskal yang timbul sebelum terbentuknya Danantara, tetap menjadi tantangan yang harus dikelola baik oleh BUMN itu sendiri, Danantara, maupun Pemerintah sebagai pemegang saham utama. Untuk itu koordinasi dan sinergi antara Pemerintah dan Danantara perlu diperkuat.

6.2.2.3. Risiko Pelaksanaan Kebijakan *Mandatory Spending*

Dalam kerangka hukum pengelolaan keuangan negara, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur alokasi belanja negara yang bersifat mengikat (*mandatory spending*). Alokasi belanja ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang berkeadilan. Salah satu bentuk kewajiban tersebut diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20,0 persen dari APBN serta dari APBD. Ketentuan konstitusional ini diperkuat lebih lanjut melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penerapan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud tersebut secara yuridis merupakan bentuk *constitutional mandate* yang harus dipenuhi setiap tahun anggaran. Namun demikian, dari perspektif kebijakan fiskal, implementasi ketentuan ini memiliki implikasi terhadap kapasitas dan fleksibilitas fiskal negara. Hal ini disebabkan karena komposisi *mandatory spending,* termasuk anggaran pendidikan, bersifat *nondiscretionary* dan meningkat secara otomatis seiring dengan bertambahnya total belanja negara. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja negara lainnya, misalnya subsidi energi akibat lonjakan harga komoditas global, belanja perlindungan sosial dalam rangka stabilisasi sosial ekonomi, atau belanja tak terduga akibat kondisi kedaruratan, maka secara proporsional kewajiban alokasi anggaran pendidikan juga akan meningkat untuk menjaga pemenuhan ambang batas 20,0 persen dari total belanja.

GRAFIK 6.12
PERKEMBANGAN REALISASI DAN PROYEKSI *MANDATORY SPENDING* TERHADAP TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021-2026
(triliun rupiah)

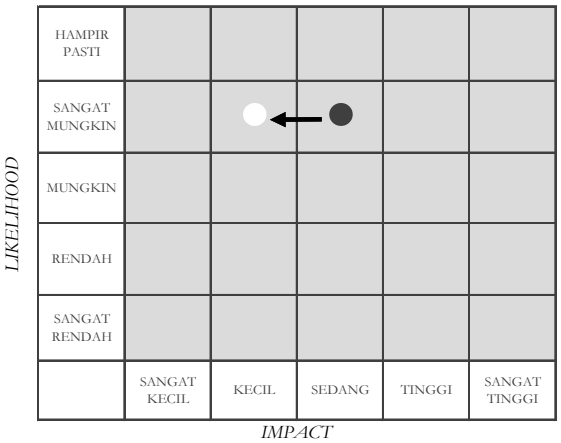


* Mulai tahun 2023, anggaran kesehatan tidak lagi termasuk *mandatory spending*
** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi

Sumber : Kementerian Keuangan

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko fiskal yaitu semakin menyempitnya ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai belanja-belanja strategis lainnya. Di samping itu, risiko juga dapat timbul dari sisi efektivitas alokasi anggaran pendidikan itu sendiri, dimana berdasarkan evaluasi capaian indikator sumber daya manusia, beberapa permasalahan struktural masih dihadapi, antara lain rendahnya Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*), stagnasi skor Indonesia dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA), rendahnya angka partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi, serta tingginya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan pendidikan vokasi. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban konstitusional atas anggaran pendidikan memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban legal-formal, tetapi juga menghasilkan manfaat substantif dalam pembangunan manusia Indonesia. Adapun peta risiko pelaksanaan kebijakan *mandatory spending* sesuai konstitusi dapat dilihat pada **Grafik 6.13** berikut:

GRAFIK 6.13
PETA PELAKSANAAN KEBIJAKAN
MANDATORY SPENDING



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mitigasi risiko tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan penguatan efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan terutama melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*). Arah kebijakan belanja diarahkan pada peningkatan akses pendidikan di seluruh jenjang melalui program bantuan dan perluasan wajib belajar, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui pendekatan *link and match*. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui pemberian beasiswa, dukungan penelitian dan pengembangan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan.

6.2.2.4. Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah telah menghadirkan berbagai program pembiayaan perumahan. Program-program ini berasal dari dua sumber utama, yaitu APBN dan non-APBN. Program berbasis APBN antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Sementara itu, program pembiayaan dari luar APBN meliputi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sektor perumahan serta dana Tapera yang dihimpun dari simpanan wajib peserta (sektor formal), yang dikelola oleh BP Tapera untuk pembiayaan perumahan berkelanjutan.

Adapun potensi risiko fiskal yang dapat timbul dari program pembiayaan perumahan bagi MBR antara lain terdiri dari:

1. Risiko yang bersumber dari potensi tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN atas *backlog* kepemilikan rumah bagi MBR. Berdasarkan data Susenas BPS tahun

2024, terdapat *backlog* pemilikan rumah sebesar 9,9 juta rumah tangga, dengan 79,0 persen berada di wilayah perkotaan dan 21,0 persen berada di wilayah pedesaan. Selain itu, terdapat *backlog* kepenghunian sebesar 6,6 juta rumah tangga, dengan 67,0 persen berada di wilayah perkotaan dan 33,0 persen di wilayah pedesaan. Disamping itu, terdapat 26,9 juta rumah tangga *backlog* rumah tidak layak huni, dengan 45,0 persen di wilayah perkotaan dan 55,0 persen di wilayah pedesaan. Potensi *backlog* ini dapat meningkatkan beban fiskal melalui kebutuhan tambahan belanja dan pembiayaan dari APBN untuk menutup kesenjangan kepemilikan rumah.

2. Risiko penurunan kemampuan bayar MBR akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau angka inflasi yang tinggi, berpotensi meningkatkan risiko kredit macet, yang berdampak pada kebutuhan dukungan fiskal lebih besar.
3. Risiko penurunan kinerja lembaga pembiayaan, baik akibat masalah operasional maupun risiko keuangan, Pemerintah berpotensi harus melakukan injeksi modal tambahan untuk menjaga kelangsungan program pembiayaan perumahan.
4. Risiko dari program baru akibat paket kebijakan tertentu Pemerintah pada sektor perumahan yang muncul ketika siklus anggaran telah berjalan dapat menimbulkan risiko fiskal jika tidak direncanakan dengan baik.
5. Potensi risiko ketika terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/atau bunga terutang yang jatuh tempo atas pinjaman Pembiayaan KPR FLPP PT SMF (Persero) selaku kreditur kepada Bank Penyalur selaku debitur. Sehingga terdapat potensi risiko PT SMF (Persero) tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban akibat adanya gagal bayar dari Bank Penyalur dan pendanaan Surat Utang tertahan di pembiayaan KPR FLPP.
6. Risiko *mismatch* antara sumber pendanaan dengan penyaluran KPR FLPP karena perbedaan tenor pembiayaan KPR FLPP dengan tenor surat utang PT SMF (Persero). Hal ini terjadi karena sebagian pembiayaan FLPP kepada Bank Penyalur didukung dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh PT SMF (Persero).
7. Risiko penambahan target unit rumah kepada PT SMF (Persero) tanpa adanya penambahan PMN. Hal ini dapat menimbulkan risiko kekurangan pendanaan bagi bank penyalur.

Berdasarkan analisis, potensi risiko fiskal dalam pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR pada tahun 2026 memiliki level dampak kecil. Probabilitas kejadian risiko tersebut juga dinilai rendah, mengingat saat ini telah terdapat program yang berjalan di bidang perumahan dan pembiayaan perumahan pada tahun 2025. Namun, apabila ada kebutuhan untuk meningkatkan alokasi biaya tambahan, diperlukan intervensi khusus dari Pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program tanpa menimbulkan tekanan signifikan pada APBN.

Dalam rangka mengurangi *backlog* kepemilikan rumah, terdapat beberapa Langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk memitigasi potensi risiko pada program pembiayaan perumahan, antara lain:

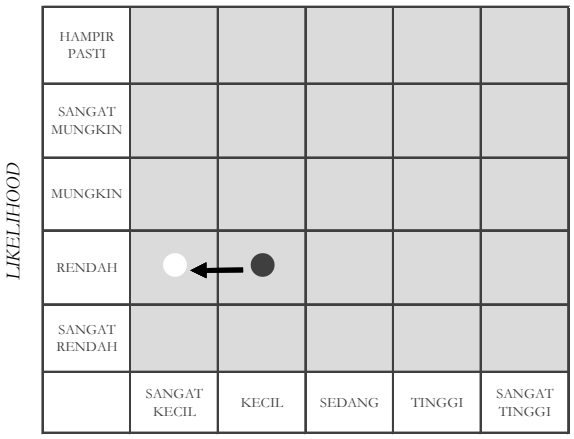
1. Penyempurnaan skema FLPP dengan memperkenalkan skema *tiering* suku bunga/ margin yang dikategorikan berdasarkan kelompok desil penghasilan MBR. Skema ini dapat dilengkapi dengan pembatasan jangka waktu masa subsidi. Skema ini masih dalam tahap pengkajian bersama. Tujuan dari perubahan ini adalah meningkatkan

daya ungkit FLPP dan membuat pasar perumahan tetap terjangkau.

2. Perluasan penerima manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Skema baru ini masih dalam tahap pembahasan bersama *stakeholders* terkait dalam ekosistem pembiayaan perumahan dan pemilik program KUR. Melalui skema ini diharapkan dana KUR yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah dan perbankan dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor perumahan.
3. Untuk meningkatkan daya ungkit fiskal, Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan dana investasi melalui pembentukan dan pemanfaatan dana perumahan, terutama yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera. Dana ini dihimpun dari iuran peserta dan anggaran FLPP, kemudian diinvestasikan ke instrumen yang aman secara profesional dan akuntabel. Hasil investasinya digunakan kembali untuk membiayai program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Mendorong diversifikasi skema pembiayaan yang berasal dari non-APBN melalui *blended financing* dalam *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau, pemanfaatan investasi BPI Danantara dan pembiayaan domestik lainnya.
5. Meningkatkan akses MBR terhadap pembiayaan perumahan terjangkau melalui modifikasi skema dan model bisnis kredit/ pembiayaan perumahan.
6. Meningkatkan pemanfaatan CSR perumahan dari perusahaan-perusahaan sebagai tanggung jawab sosial.
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketat pada realisasi program pembiayaan perumahan oleh Kementerian PKP dan BP Tapera, termasuk penguatan integrasi data dan sistem verifikasi penerima manfaat, guna memastikan program tepat sasaran dan mendukung pengurangan *backlog* kepemilikan rumah secara efektif.
8. Meningkatkan peran Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang diharapkan dapat menjadi fasilitator sarana koordinasi dan kolaborasi antar anggota ekosistem pembiayaan perumahan.
9. Skema bantuan PSU (bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman) yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan permukiman.
10. Pemerintah turut membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian dan mengurangi *backlog* perumahan, terutama bagi MBR *non fixed income* dan mengatasi masalah kekumuhan di perkotaan.
11. Peningkatkan pembangunan perumahan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
12. Pembiayaan bagi perbaikan rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian melalui kredit mikro perumahan.
13. Peningkatan akses MBR khususnya dari sektor informal terhadap pembiayaan perumahan terjangkau.

Upaya-upaya tersebut di atas diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan rumah. Dengan implementasi mitigasi risiko yang tepat, dampak risiko fiskal dan operasional dari program pembiayaan perumahan dapat diminimalkan hingga mencapai tingkat yang sangat kecil. Adapun peta risiko program pembiayaan perumahan bagi MBR ditampilkan pada **Grafik 6.14** berikut:

GRAFIK 6.14
PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MBR



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.5. Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam rangka memperkuat struktur pendapatan negara dan mendukung kesinambungan fiskal, Pemerintah berencana melaksanakan beberapa kebijakan di bidang pendapatan negara pada tahun 2026. Kebijakan tersebut antara lain meliputi pengenaan cukai atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), penerapan pajak minimum global, serta implementasi *joint program* untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, untuk menjaga efektivitas kebijakan serta stabilitas pendapatan negara, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan baik pada sisi administrasi maupun pada pengawasan di lapangan.

1. Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Pengaturan pengenaan cukai atas MBDK bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi atas produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi menghadapi risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kebijakan ini. Dari sisi kesiapan pelaku usaha, risiko terutama bersumber dari keberagaman produk dan rantai distribusi yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan. Selain itu, penting untuk selalu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat secara kontinyu atas efek negatif dari konsumsi gula berlebih bagi kesehatan.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi cukai MBDK, mulai dari penerapan cukai dan pelaporannya. Pemerintah akan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi serta edukasi lainnya yang relevan. Dari sisi pengawasan, kerja sama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan yang terkait perlu dilakukan guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. Selain itu, pengawasan akan dilakukan melalui sistem yang terintegrasi sehingga pengawasan akan menjadi semakin mudah, efektif dan efisien.

2. Penerapan Pajak Minimum Global

Ketentuan pajak minimum global telah berlaku sejak 1 Januari 2025, khususnya untuk *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) dan *Income Inclusion Rule* (IIR). Sedangkan untuk *Undertaxed Payment Rule* (UTPR), akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026. Penerapan ketentuan pajak minimum global bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi dan menerapkan pemajakan yang berkeadilan atas laba korporasi multinasional.

Penerapan pajak minimum global memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas negara mengingat perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara. Langkah aktif dari Pemerintah seperti pertukaran data dan informasi serta komunikasi aktif antar otoritas perpajakan global, diperlukan untuk memastikan agar perusahaan multinasional yang masuk dalam lingkup pengenaan pajak minimum global melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh. Selain itu kesadaran dari wajib

pajak (*voluntary compliance*) perlu ditumbuhkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkala dan inklusif.

Penerapan pajak minimum global juga berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan biaya administrasi bagi otoritas perpajakan. Untuk meminimalisasi biaya kepatuhan bagi wajib pajak, Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang jelas dan memadai serta memperkuat sistem administrasi dan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

3. Implementasi *Joint Program* untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah terus melaksanakan *joint program* lintas instansi sebagai upaya penguatan kepatuhan perpajakan, melalui integrasi dan pertukaran data, pengawasan bersama, serta penegakan hukum kepada wajib pajak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan penerimaan dan perluasan basis perpajakan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi antara lain kompleksitas koordinasi antar lembaga, integrasi sistem teknologi informasi, dan kerahasiaan data wajib pajak.

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah potensi resistensi dari wajib pajak akibat meningkatnya intensitas pengawasan dan permintaan data yang lebih rinci. Untuk itu, Pemerintah akan terus memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan *joint program* serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang andal dan terintegrasi sehingga kepastian hukum dan hak wajib pajak dapat terpenuhi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Dengan demikian, *joint program* dapat diimplementasikan secara efektif dan mendukung peningkatan kepatuhan serta penerimaan negara secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi risiko tersebut, implementasi kebijakan pendapatan negara tahun 2026 perlu dilaksanakan secara terukur dan berbasis pada prinsip kehati-hatian. Pemerintah akan terus mengedepankan penguatan koordinasi lintas instansi serta peningkatan sistem administrasi melalui pengembangan teknologi informasi yang andal dan terpercaya sebagai langkah utama dalam mitigasi risiko. Di samping itu, keterlibatan aktif pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, Pemerintah, DPR, serta masyarakat akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga tetap menjaga iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta mendukung tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Saat ini, PNBP masih didominasi oleh kontribusi dari penerimaan berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang masih rentan terhadap dinamika kondisi perekonomian global. Tantangan yang masih dihadapi meliputi fluktuasi harga (migas, batubara, mineral, sawit, dll), penurunan produksi, praktik *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *illegal logging*, penagihan piutang dan pemanfaatan aset negara yang belum optimal, belum meratanya layanan publik, serta sistem data dan layanan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terdigitalisasi, akan memengaruhi kinerja PNBP di tahun berjalan.

Untuk dapat menjawab tantangan dan hambatan yang dapat menjadi sumber risiko dari PNBP, maka Kebijakan PNBP 2026 difokuskan pada arah kebijakan yang mencakup:

1. Optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Penguatan tata kelola PNBP melalui inovasi kebijakan, evaluasi berkelanjutan,

peningkatan kepatuhan, pengawasan yang lebih efektif, serta optimalisasi pemanfaatan aset negara/BMN.

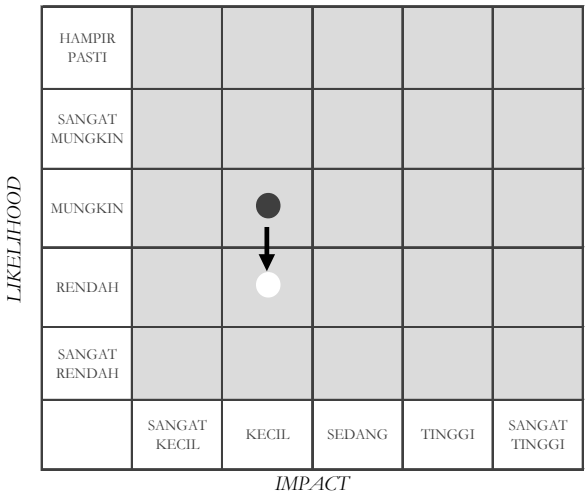
3. Peningkatan sinergi antarinstansi dan akselerasi digitalisasi untuk mendukung integrasi sistem dan efisiensi layanan.

Pemerintah senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan yang antara lain dilakukan melalui evaluasi penerapan tarif PNBP sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 UU Nomor 9 tahun 2018. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan melalui penyesuaian kebijakan tarif memiliki risiko bagi penerimaan PNBP. Penerapan PP Nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan atas PP Nomor 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara berpotensi memengaruhi pencapaian penerimaan dari Batubara khususnya pada Penjualan Hasil Tambang.

Selain itu, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah melakukan perubahan pada organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan. Badan ini bertugas melaksanakan perencanaan dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan dana, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas dana dari komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Penghimpunan dana berasal dari pungutan atas ekspor komoditas perkebunan maupun produk turunannya, serta iuran yang dibebankan kepada pengusaha perkebunan. Risiko implementasi kebijakan reorganisasi perlu dimitigasi melalui pemantauan penyelesaian proses penyusunan organisasi yang dilakukan paling lambat 17 Januari 2026. Implementasi penerapan tarif Pungutan Ekspor khususnya untuk tambahan komoditas yang dikelola yaitu Kelapa dan Kakao akan turut memengaruhi capaian PNBP terkait.

Selanjutnya, upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi SDA meski di satu sisi diharapkan dapat mendorong optimalisasi pendapatan negara, namun di saat yang sama juga memiliki potensi pengurangan penerimaan PNBP karena adanya kebijakan insentif. Untuk menarik minat investor dalam membangun fasilitas yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah (seperti *smelter*, dll), Pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengenaan tarif royalti 0 (nol) persen untuk komoditas tertentu, seperti batu bara, yang diolah lebih lanjut dalam proses hilirisasi, khususnya untuk gasifikasi batu bara. Pemerintah memastikan pemberian insentif tersebut memberikan kontribusi luas bagi perekonomian dan kesejahteraan sehingga tetap mendorong optimalisasi pendapatan negara secara keseluruhan.

GRAFIK 6.15
PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.6. Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan bagian dari upaya mengejar ketertinggalan pembangunan, baik fisik maupun SDM. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut,

pembiayaan utang telah berkontribusi untuk mengakselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga berperan besar dalam mendorong penguatan pasar keuangan domestik sekaligus menjadi alat dalam menjaga keseimbangan makro.

Peran penting pembiayaan utang memiliki konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap PDB sebelum pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pemerintah mengimplementasikan fleksibilitas disiplin fiskal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit diperbolehkan melampaui 3,0 persen terhadap PDB hingga tahun 2022 yang berdampak peningkatan kebutuhan pembiayaan dan risiko utang, namun masih dalam batas wajar dan terkendali. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih cepat dan *smooth* dimana defisit anggaran berhasil turun ke level 2,35 persen terhadap PDB. Defisit APBN bahkan terus membaik pada tahun 2023. Momentum pertumbuhan pendapatan dampak kenaikan harga komoditas dan terjaganya belanja menekan realisasi defisit APBN tahun 2023 menjadi 1,65 persen. Pada saat itu, pembiayaan utang didesain untuk kebutuhan berjaga-jaga menghadapi risiko ketidakpastian global di tahun 2024.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, perang Israel-Iran menyebabkan lonjakan harga minyak dan komoditas dunia. Di sisi lain, ketegangan perdagangan antara AS-China sedikit menurun dengan kesediaan untuk bernegosiasi. Namun belum dicapainya kesepakatan masih memberikan ketidakpastian bagi perdagangan global. Volatilitas harga yang tinggi dan ekonomi global yang melemah, menyebabkan tekanan temporer pada nilai tukar dan naiknya *yield* global, termasuk *yield* SBN domestik. Kenaikan *yield* dan volatilitas nilai tukar dapat berdampak pada peningkatan beban bunga utang ke depan. Dari dalam negeri, program Asta Cita yang mulai dilaksanakan pada 2025, mendorong realokasi dan *refocusing* APBN pada program prioritas Presiden. Efisiensi anggaran, Makan Bergizi Gratis, Pembentukan BPI Danantara, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Tiga Juta Rumah, diakomodir melalui penyesuaian pada postur APBN. Penyesuaian kebijakan pembiayaan utang yang dinamis, dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang selama ini telah diimplementasikan untuk mendukung keberlanjutan fiskal. Selain itu, keberadaan legal *framework* yang jelas mengenai disiplin fiskal maksimum 3,0 persen terhadap PDB akan meminimalisasi risiko deviasi yang mungkin terjadi.

Dalam rangka menjaga agar strategi dan kebijakan pengelolaan utang dapat terimplementasi dengan baik, Pemerintah telah memiliki kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Dari aspek regulasi, Pemerintah telah memiliki kerangka hukum terkait strategi pengelolaan utang baik dalam jangka menengah maupun tahunan yang disertai target indikator-indikator risiko utang, yaitu risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, dan risiko *refinancing*. Dari aspek kelembagaan, Pemerintah secara reguler telah dan terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa berbagai aspek terkait kebijakan pembiayaan utang telah dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka pembiayaan APBN yang lebih luas, Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam memenuhi target pembiayaan dan keleluasaan dalam memanfaatkan pembiayaan nonutang dalam hal risiko dan tekanan pasar menjadi material. Selain itu, Pemerintah senantiasa menjaga komunikasi yang intensif dengan investor dan para pelaku pasar untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan pembiayaan akan senantiasa mempertimbangkan stabilitas pasar keuangan.

Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah berkomitmen menjalankan kebijakan optimalisasi pengadaan utang baru dari sumber pembiayaan domestik dan menggunakan sumber pembiayaan eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah mengupayakan pengembangan pembiayaan alternatif nonutang seperti mengombinasikan beberapa instrumen utang (*blended financing*), mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan nonutang antara lain melalui KPBU dengan tetap memperhatikan level biaya dan risiko yang dapat ditanggung Pemerintah, atau melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian pengeluaran pembiayaan investasi.

6.2.3. Risiko Kewajiban Kontinjensi

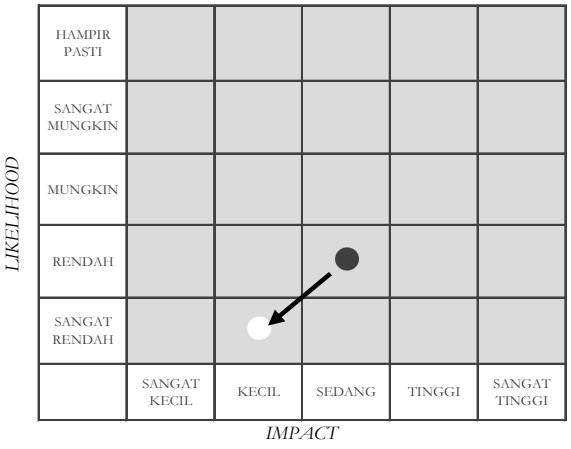
Dalam APBN tahun 2026, risiko kewajiban kontinjensi di bagi menjadi dua yaitu risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari penjaminan dan risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari non-penjaminan. Hasil identifikasi risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1. Risiko Kewajiban Kontinjensi Penjaminan

6.2.3.1.1. Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah

Pemberian jaminan Pemerintah atas pinjaman yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur menimbulkan konsekuensi fiskal bagi Pemerintah berupa peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah. Kewajiban kontinjensi Pemerintah dari Penjaminan akan berdampak pada APBN apabila Pihak Terjamin mengalami gagal bayar *(default)* sehingga Pemerintah wajib membayar klaim penjaminan dimaksud. Secara umum, risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian jaminan (dukungan) Pemerintah berada pada kategori kecil dengan level kemungkinan sangat rendah dan level dampak yang kecil mengingat telah dilakukan berbagai upaya mitigasi risiko dalam rangka mencegah terjadinya gagal bayar. Peta risiko baik sebelum maupun setelah dilakukan mitigasi digambarkan pada **Grafik 6.16.**

GRAFIK 6.16
PETA RISIKO PENJAMINAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 1)

   Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur *Fast Track Program* (FTP) 1 tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan 45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menjadi piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero). Total kapasitas proyek FTP 1 yang sudah beroperasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebanyak 30 pembangkit dengan total kapasitas sebesar 9.726 MW atau 98,27 persen dari target sebesar 9.897 MW. Adapun total keseluruhan proyek FTP I sesuai Perpres adalah sebesar 9.975 MW

namun terdapat PLTU dengan kapasitas 14 MW berstatus gagal tender dan sebesar 64 MW berstatus terminasi. Selain itu sebesar 175 MW sedang dalam proses penyelesaian. Sampai dengan Semester I tahun 2025 , secara total terdapat 34 dari 36 pinjaman FTP Tahap 1 yang telah dinyatakan lunas melalui Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan oleh kreditur. Dengan demikian, Surat Jaminan Pemerintah (SJP) atas 34 pinjaman tersebut dengan sendirinya juga berakhir. Sedangkan atas 2 (dua) pinjaman yang penjaminannya masih aktif/belum lunas (PLTU Teluk Balikpapan dan PLTU Tenayan) dijadwalkan lunas pada akhir 2025. Dengan demikian, atas program ini tidak terdapat risiko pemjaminan infrastruktur Pemerintah di tahun 2026. Terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; (3) melakukan monitoring pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan *stakeholder's management*; (6) mengoptimalkan *blending* batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga *security of supply* batu bara.

2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program*/FTP 2)

   Risiko fiskal yang timbul dari dukungan kepada Program FTP II berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) terjadi dalam konteks PT PLN (Persero) gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek pengembang listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP) maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Secara keseluruhan Pemerintah telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek dengan skema IPP. Dari total 13 SJKU tersebut, 3 (tiga) SJKU telah berakhir yaitu untuk Proyek PLTU Kaltim, PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) proyek yaitu PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 dimana dasar hukum penerbitan SJKU mengacu kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah menjadi PMK Nomor 135/PMK.08/2019. Sehingga, sampai dengan Semester I tahun 2025 Pembangkit FTP II yang memperoleh SJKU terdiri dari 7 (tujuh) proyek dengan total kapasitas 1.110 MW. Total kapasitas proyek FTP II yang sudah beroperasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar 836 MW atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. Adapun sisa unit pembangkit yang belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh kemajuan progresnya dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek yang masih dalam pembangunan terdapat potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya keterlambatan proses pengadaan pembangkit dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit sehingga dapat menyebabkan keterlambatan Tanggal Operasi Komersial atau *Commercial Operation Date* (COD) pembangkit dari jadwal yang seharusnya. Sedangkan dari sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan kesesuaian

jadwal antara COD pembangkit dan ketersediaan transmisi dan gardu induk untuk penyelesaian evakuasi dan *backfeeding*.

3. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan program 35.000 MW, Pemerintah memberikan dukungan fiskal, salah satunya melalui Penjaminan Pemerintah. Penjaminan tersebut terbagi ke dalam dua bentuk yaitu Jaminan Kredit bagi proyek swakelola oleh PT PLN (Persero) dan Jaminan Kelayakan Usaha bagi proyek yang bekerja sama dengan *Independent Power Producer* (IPP). Hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 6 (enam) Jaminan yang masih aktif yaitu 2 (dua) Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 serta empat Jaminan Kredit untuk mendukung pendanaan proyek transmisi dan gardu induk Jawa Bagian Tengah, serta PLTU dan PLTMG Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Berdasarkan progres konstruksi, PLTU Jawa 1 dan PLTU Jawa 4 yang menerima Jaminan Kelayakan Usaha telah beroperasi penuh secara komersial dan memberikan kontribusi terhadap sistem kelistrikan PT PLN (Persero). Sementara itu, untuk proyek-proyek yang memperoleh Jaminan Kredit, sebanyak 10 pembangkit telah beroperasi hingga Maret 2025 dengan total kapasitas mencapai 3.765 MW atau sebesar 94,5 persen dari total kapasitas 3.985 MW yang mencakup 18 pembangkit. Selanjutnya, untuk proyek transmisi dan gardu induk yang tersebar di 18 lokasi, seluruhnya telah selesai dibangun dan beroperasi dalam mendukung sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali. Dalam pembangunan proyek PIK yang masih dalam proses konstruksi, terdapat sejumlah risiko utama yang diidentifikasi antara lain terkait kondisi keuangan kontraktor dan proses pengalihan kelanjutan proyek. Berbagai rencana mitigasi risiko yang disusun di antaranya melalui percepatan pengalihan pekerjaan kepada anak perusahaan PT PLN (Persero) dan kontraktor baru untuk mendukung pencapaian target COD. Dengan adanya dukungan penjaminan Pemerintah terhadap proyek PIK, Pemerintah juga akan terdampak risiko fiskal apabila PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial, meskipun tingkat probabilitasnya tergolong sangat rendah. Untuk memastikan pengelolaan risiko yang optimal, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan *action plan* yang telah ditetapkan. Pemerintah juga secara berkala memantau kondisi likuiditas PT PLN (Persero) guna memastikan kemampuan korporasi dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik terkait pembayaran *debt service* kepada kreditur maupun pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) kepada IPP.

4. Program Percepatan Penyediaan Air Minum

   Periode pemberian jaminan atas Program Percepatan Penyediaan Air Minum berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 11 PDAM telah mendapatkan penjaminan Pemerintah, namun hanya 10 PDAM yang memanfaatkan penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng menggunakan dana internal untuk membangun proyeknya. Dari 10 PDAM tersebut, seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan proyek 100,0 persen dan 9 (sembilan) PDAM telah melunasi pinjaman perbankannya. Sementara satu PDAM lainnya yaitu Perumda Tirta Wijaya Cilacap masih memiliki pinjaman yang dijamin Pemerintah. Sampai dengan Semester I tahun 2025, seluruh PDAM melakukan pembayaran kembali pinjaman

perbankan dengan tertib dan tidak terdapat PDAM yang mengalami gagal bayar.

Periode pemberian jaminan atas Program Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terdapat tiga PDAM yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah, yaitu PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang. Sampai dengan Semester I tahun 2025, telah terdapat penarikan pinjaman sebagai berikut: PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram sebesar Rp118,6 miliar, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp48,5 miliar, dan Perumda Tirta Musi Kota Palembang sebesar Rp70,4 miliar. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Musi Kota Palembang adalah sebesar Rp7,7 miliar untuk pokok dan Rp3,1 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh PT Air Minum Giri Menang Perseroda adalah sebesar Rp13,2 miliar untuk pokok dan sebesar Rp10,3 miliar untuk bunga. Pembayaran yang telah dibayarkan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebesar Rp4,0 miliar untuk pokok dan Rp4,5 miliar untuk bunga. Adapun perkembangan penyelesaian pembangunan ketiga proyek PDAM tersebut adalah PT Air Minum Giri Menang Perseroda Kota Mataram dan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah selesai 100,0 persen, sedangkan Perumda Tirta Musi Kota Palembang telah mencapai sebesar 81,9 persen.

Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat potensi risiko terjadi gagal bayar yang mengakibatkan jaminan terklaim. Pemerintah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya gagal bayar, antara lain monitoring atas pelaporan yang dilakukan oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun pelaporan dilakukan secara triwulanan atas perkembangan proyek, penarikan pinjaman, pembayaran pinjaman, serta *escrow account*. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2019, dilakukan pula monitoring atas capaian IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. Dalam hal PDAM tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat memberikan rekomendasi baik finansial maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan manajemen.

5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

   Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) , risiko infrastruktur adalah kejadian yang berpotensi terjadi selama masa berlaku perjanjian kerja sama, yang dapat berdampak negatif terhadap investasi badan usaha, termasuk modal ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Mengingat tingginya risiko infrastruktur, diperlukan penjaminan infrastruktur dalam skema KPBU, yang merupakan pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yang diatur melalui perjanjian penjaminan. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi badan usaha dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat risiko tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU.

   Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penjaminan yang diberikan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan penjaminan yang diberikan bersama-sama oleh BUPI dan Pemerintah dengan skema pembagian risiko (*risk sharing*). Keterlibatan Pemerintah dalam proses penjaminan ini menimbulkan risiko fiskal, yakni kewajiban kontinjensi yang dapat muncul jika terjadi klaim penjaminan akibat ketidakmampuan PJPK dalam memenuhi kewajiban finansialnya saat risiko infrastruktur terjadi. Risiko fiskal ini mencerminkan potensi

beban keuangan tambahan bagi Pemerintah yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU.

Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang menerima penjaminan bersama dari BUPI dan Pemerintah. Proyek-proyek tersebut meliputi PLTU Batang 2x1.000 MW, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Lingkup penjaminan oleh BUPI pada proyek jalan tol mencakup pembayaran yang mungkin terjadi akibat keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan pengembalian Dana Talangan Tanah, keterlambatan penyesuaian tarif, dan risiko politik temporer hingga permanen.

Sementara lingkup penjaminan oleh Pemerintah pada proyek jalan tol umumnya meliputi risiko terminasi proyek, dimana probabilitasnya sangat rendah. Oleh karena itu, potensi risiko fiskal yang muncul dari Penjaminan Bersama pada proyek di sektor jalan tol dapat dikategorikan sangat rendah dikarenakan adanya BUPI yang berperan sebagai *ring fencing* bagi APBN.

Selain dari sektor jalan tol, penjaminan infrastruktur juga disediakan untuk Proyek PLTU Batang 2x1.000 MW yang dilakukan dengan penjaminan bersama antara Pemerintah dan BUPI. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih US$4,2 miliar ini ditandatangani bersamaan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek ini mencapai penutupan finansial *(financial close)* pada 6 Juni 2016 dan telah beroperasi sejak Agustus 2022, dengan masa konsesi selama 25 tahun. Pemerintah dan BUPI menjamin risiko kegagalan pembayaran pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan risiko terminasi akibat kondisi politik, dengan pembagian tanggung jawab klaim hingga Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sementara sisanya dijamin oleh Pemerintah. Konsep penjaminan infrastruktur seperti ini biasa disebut dengan *amount-sharing*, berbeda dari konsep penjaminan yang berlaku di sektor jalan tol yang menerapkan prinsip *risk sharing*.

Mengingat adanya batas maksimal atas penjaminan yang dilakukan oleh BUPI, maka jumlah diatas batas maksimal tersebut dapat dikategorikan sebagai risiko yang bisa berdampak kepada APBN. Dalam upaya mitigasi risiko, utamanya untuk Proyek PLTU Batang, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana setiap tahunnya yang diakumulasikan pada rekening Dana Cadangan Penjaminan. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pemantauan intensif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko infrastruktur, terutama risiko kahar *(force majeure)* melalui forum *Joint Monitoring Committee* yang dilakukan setiap triwulanan.

Dengan keberadaan BUPI sebagai *fiscal tool* Pemerintah, mekanisme yang telah dirancang dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin kelangsungan proyek infrastruktur yang mendapat jaminan serta penerapan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara *(ring fencing)*. Berkenaan dengan penjaminan yang dilakukan oleh BUPI secara sendiri dan dalam upaya melakukan mitigasi risiko terhadap beban APBN terhadap penjaminan BUPI tersebut, dilakukan mekanisme penerbitan surat tidak keberatan (*no objection letter*) oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan kecukupan kapasitas BUPI dan mengurangi risiko dalam pemberian jaminan. Selain itu, Pemerintah juga berusaha memastikan bahwa kewajiban finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan dalam kerangka kebijakan penjaminan. Langkah

ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek KPBU, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah

   Untuk memperluas sumber pembiayaan infrastruktur di luar APBN, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) yang setara dengan pinjaman kepada Pemerintah. Untuk mendukung skema tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan jaminan Pemerintah atas pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN dalam rangka pembiayaan proyek infrastruktur. Melalui mekanisme ini, BUMN dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan jangka panjang dengan tingkat bunga yang kompetitif.

   Hingga Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 10 Jaminan Pemerintah (*sovereign guarantee)* atas pinjaman langsung PT PLN (Persero) untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Selain itu, penjaminan *direct lending* juga diberikan kepada ITDC untuk mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam rangka pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2. Pemerintah terus memperkuat pengelolaan risiko atas proyek-proyek dalam skema *direct lending*.

   Beberapa risiko yang diidentifikasi antara lain mencakup potensi memburuknya kondisi keuangan BUMN Terjamin, keterlambatan dalam pencapaian indikator kinerja (*Disbursement Linked Indicators*/DLI) untuk program *Result-Based Lending* (RBL), keterlambatan target operasi komersial (*Commercial Operation Date*/COD), serta risiko operasional lainnya. Meskipun demikian, seluruh risiko tersebut hingga tahun 2025 masih dapat dikelola secara efektif dan diproyeksikan tidak akan menimbulkan risiko gagal bayar (*default*) terhadap Jaminan Pemerintah yang telah diberikan.

   Sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan risiko yang *prudent*, berbagai langkah mitigasi telah dilaksanakan, antara lain melalui pemantauan rutin atas kemajuan proyek/program bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) selaku *co-guarantor*, pelaporan berkala capaian proyek/program, serta koordinasi intensif dengan unit terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu proyek. Upaya mitigasi lainnya juga diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen komitmen pencapaian target antara BUMN Terjamin, pemegang saham, serta Kementerian Keuangan selaku Penjamin sebagai bentuk penguatan tata kelola dalam penerbitan jaminan skema *Direct Lending*.

7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

   Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan penugasan untuk membiayai pembangunan dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I. Sampai dengan Semester I tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan 10 surat/perjanjian jaminan Pemerintah yang terdiri dari 9 (sembilan) surat jaminan

Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan 1 (satu) satu perjanjian penjaminan atas 1 (satu) obligasi global sebesar US$0,6 miliar. Dari pinjaman yang dijamin, terdapat 3 (tiga) pinjaman yang telah lunas yaitu pinjaman untuk ruas Medan-Binjai, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, dan ruas Palembang-Simpang Indralaya. Dengan adanya pelunasan pinjaman tersebut, maka Semester I tahun 2025, nilai *outstanding* pinjaman dan obligasi yang dijamin Pemerintah diluar fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS) adalah sebesar Rp16.522,9 miliar dan obligasi global sebesar US$0,6 miliar.

Dari struktur pendanaan JTTS Tahap I khususnya 6 (enam) ruas yang terbagi dalam sepuluh surat jaminan Pemerintah, maka risiko gagal bayar atas penjaminan Pemerintah dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas CDS, mengusahakan pemanfaatan *value capture* untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta melakukan pemantauan berkala kemampuan bayar kewajiban pinjaman.

Risiko lainnya yang dapat timbul adalah kecukupan CDS dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol terhadap biaya operasi dari delapan ruas JTTS Tahap I lainnya yang dibangun dengan pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi melalui pengurangan beban pinjaman dengan memanfaatkan hasil *asset recycling* ruas–ruas JTTS Tahap I yang telah beroperasi, diantaranya Ruas Medan–Binjai dan Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar. Selain itu, pada Semester I tahun 2025, pinjaman ruas Palembang-Simpang Indralaya juga telah dilunasi. Hal tersebut mendukung efisiensi beban pinjaman yang harus ditanggung oleh PT Hutama Karya (Persero).

Atas rencana pembangunan JTTS Tahap II, risiko fiskal dapat timbul sebagai konsekuensi pemberian jaminan Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan dan pengoperasian proyek JTTS Tahap II. Skema pembangunan JTTS Tahap II menggunakan skema bauran dukungan fiskal yang meliputi: (1) PMN; (2) Dukungan Konstruksi; (3) Jaminan Pemerintah; dan (4) pendanaan sektor berupa Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL).

8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan *(Light Rail Transit)* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

   Dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*/ LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagai amanat percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek, Pemerintah telah menerbitkan satu surat Jaminan Pemerintah atas fasilitas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Adapun risiko fiskal yang dapat terjadi dengan adanya jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek LRT Jabodebek tersebut adalah dalam hal PT KAI (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban finansial kepada sindikasi kreditur secara tepat waktu (risiko *default*) sehingga Pemerintah yang harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Sejak beroperasi pada Agustus 2023 hingga Semester I tahun 2025, PT KAI telah memenuhi seluruh kewajiban keuangan kepada sindikasi kreditur. Adapun tingkat probabilitas risiko *default* PT KAI (Persero) pada tahun 2025 masuk dalam kategori sangat rendah mengingat telah tersedianya fasilitas mitigasi risiko dalam bentuk *bridging loan* PT KAI (Persero) yang bertujuan untuk memenuhi *gap*/*mismatch* antara pendapatan proyek LRT Jabodebek dengan subsidi Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan PT KAI (Persero).

9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI (Persero)

   Sebagai bagian dari upaya mendukung penyediaan infrastruktur daerah, Pemerintah

telah menetapkan kebijakan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur/ SMI (Persero) untuk menyalurkan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/ PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perusahaan Perseroan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Meskipun demikian, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang perlu dikelola secara cermat.

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pemerintah tidak lagi memberikan penjaminan atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada PT SMI (Persero). Berdasarkan ketentuan pada UU HKPD dan PP HKFN, Pemberian pinjaman kepada Pemda dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB/LKBB) yang mendapat penugasan dari Pemerintah. Selanjutnya, terhadap risiko fiskal yang muncul pada saat Pemda mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban kepada LKB/LKBB, Pemerintah dapat melakukan pemotongan (*intercept*) DAU/DBH yang tidak ditentukan penggunaanya kepada Pemda yang bersangkutan. Dalam hal terdapat penilaian atas kemampuan fiskal Pemda yang rendah, maka atas tertundanya pemotongan (*intercept*) DAU/DBH yang tidak ditentukan penggunaannya tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan untuk membayar kewajiban Pemda kepada LKB/LKBB.

Untuk memitigasi potensi gagal bayar Pemda kepada LKB/LKBB, telah disusun langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) mengurangi probabilitas terjadinya risiko melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait penugasan pembiayaan daerah oleh LKB/LKBB. Koordinasi ini dilakukan dalam forum SOP *Link* yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan LKB/LKBB. Forum tersebut membahas isu-isu strategis dan upaya penyelesaian hambatan (*debottlenecking*); dan (2) penyediaan alternatif solusi terhadap permasalahan pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui perhitungan potensi dana transfer dan optimalisasi belanja tak terduga, agar Pemda tetap memprioritaskan program-program strategis yang telah tertuang dalam APBD.

Sampai dengan Semester I tahun 2025, total eksposur yang terdiri atas *outstanding* pokok pinjaman dan bunga terutang tercatat sebesar Rp362,5 miliar, berasal dari portofolio pinjaman daerah kepada 5 (lima) Pemda (debitur). Berdasarkan analisis, probabilitas dampak risiko terhadap APBN saat ini dikategorikan rendah. Dengan memperhatikan hal tersebut, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan portofolio pinjaman daerah serta langkah mitigasi yang telah diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan memastikan agar kebijakan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah tidak menimbulkan beban yang signifikan terhadap APBN.

10. Percepatan Penyelenggaraan Prasana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (KCJB)

    Pemerintah melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK

Nomor 89 Tahun 2023, telah menerbitkan Jaminan Pemerintah dalam rangka pembiayaan *Cost Overrun* Proyek KCJB senilai US$542,7 juta. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran serta PT PII (Persero) sebagai *ring fencing* APBN dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak risiko, Pemerintah menugaskan PT PII (Persero) untuk melakukan penjaminan secara bersama dengan menanggung porsi jaminan secara *first loss* sebesar US$120,0 juta atau 22,1 persen dari nilai pinjaman. Selain itu, PT PII (Persero) juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan risiko atas jaminan bersama dengan tim Kementerian Keuangan.

Adapun pemberian penjaminan Pemerintah ini dapat menimbulkan risiko keuangan negara di kemudian hari dari kemungkinan terjadinya klaim jaminan atas ketidakmampuan PT KAI (Persero) dalam membayar pinjaman kepada kreditur secara tepat waktu (risiko *default*). Beberapa risiko utama yang dapat diidentifikasi diantaranya: ketidaktercapaian proyeksi *ridership* (jumlah penumpang) KCJB, penurunan volume angkutan batu bara yang dilakukan PT KAI (Persero), penurunan harga batu bara, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan RMB Tiongkok. Dalam rangka pengelolaan risiko penjaminan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan diantaranya dalam bentuk dukungan dari K/L terkait maupun penguatan manajemen risiko di internal PT KAI (Persero).

6.2.3.1.2. Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

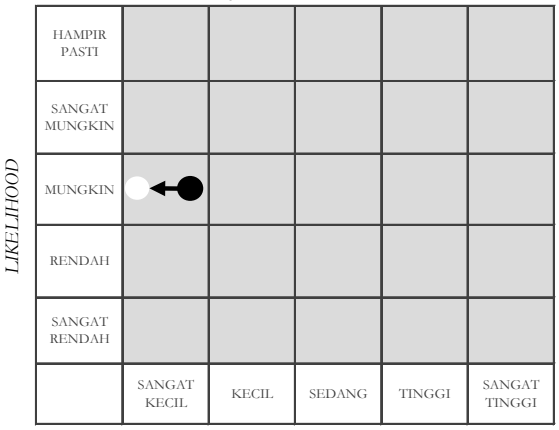
Penjaminan Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan dukungan berupa penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun BUMN. Adapun program penjaminan PEN kepada UMKM Gen-1 telah berakhir di tahun 2024. Di sisi lain, untuk penjaminan PEN UMKM Gen-2, Pemerintah tidak memberikan dukungan *loss limit* atas penjaminan dimaksud sehingga risiko klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin (PT Askrindo dan PT Jaskrindo). Adapun untuk penjaminan Korporasi akan berakhir di tahun 2025 sehingga tidak terdapat *outstanding* yang berpotensi menimbulkan risiko bagi APBN di tahun 2026. Sedangkan untuk program PEN kepada BUMN masih terdapat *outstanding* hingga tahun 2029.

Adapun risiko fiskal yang timbul dari program penjaminan ini bersumber dari kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan usaha telah melewati ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa sumber risiko yang dapat diidentifikasi, antara lain kinerja keuangan pelaku usaha belum kembali pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada potensi terjadinya klaim penjaminan. Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya stabilitas sistem keuangan akibat kondisi global yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan/ kinerja perekonomian yang tidak sesuai harapan.

Dengan melihat kondisi pada tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026, dampak risiko fiskal yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan program PEN berada pada kategori sangat kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim ke Pemerintah berada pada kategori mungkin karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan yang ditunjuk sampai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan. Dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan

dana cadangan kewajiban penjaminan dengan tujuan menurunkan dampak dari kewajiban kontinjensi Pemerintah dengan akumulasi sampai dengan Semester I tahun 2025 sebesar Rp6.449,0 miliar, maka peta risiko penjaminan program PEN dapat ditampilkan sebagaimana **Grafik 6.17**.

GRAFIK 6.17
PETA RISIKO PENJAMINAN PROGRAM PEN



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Penjaminan PEN UMKM

   Berdasarkan data realisasi Program PEN UMKM Gen-1 per Semester I tahun 2025, akumulasi total kredit modal kerja yang dijamin sebesar Rp52.829,9 miliar untuk 2.450,8 ribu pelaku usaha. Atas penjaminan tersebut sudah tidak terdapat *outstanding* di tahun 2025, dikarenakan program dimaksud telah berakhir di tahun 2024. Atas program tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa *loss limit* di mana Pemerintah menetapkan batas/ *threshold* maksimal 90,0 persen atas *loss ratio* dari akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan dengan akumulasi IJP yang diterima oleh badan usaha penjaminan. Adapun *loss ratio* PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) sebagai pelaksana penugasan penjaminan Pemerintah masing-masing sebesar 20,9 persen dan 23,2 persen. Sehingga dapat disampaikan bahwa *loss ratio* dimaksud masih jauh dari *threshold* yang ditetapkan Pemerintah.

2. Penjaminan PEN Pelaku Usaha Korporasi

   Selama pelaksanaan program penjaminan PEN korporasi sampai dengan Semester I tahun 2025, akumulasi total kredit modal kerja korporasi yang mendapatkan penjaminan mencapai Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Total IJP yang diterima oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp571,1 miliar dan total IJP *loss limit* yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp154,2 miliar. Program Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha Korporasi akan berakhir di tahun 2025 sehingga untuk tahun 2026 tidak lagi memiliki potensi risiko.

3. Penjaminan PEN BUMN

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PEN, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 211 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk BUMN dalam Rangka Pelaksanaan PEN. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemberian fasilitas penjaminan kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan penugasan khusus dalam program PEN. Fasilitas penjaminan tersebut diberikan untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial BUMN, baik yang bersumber dari pinjaman maupun dari penerbitan obligasi dan sukuk. Selain pemberian penjaminan secara langsung oleh Pemerintah, PMK 211/2020 juga mengatur penunjukan PT PII (Persero) dan/atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai badan usaha penjaminan untuk mendukung program ini. Untuk memperkuat kredibilitas serta menjaga kapasitas dan likuiditas kedua badan usaha tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan memastikan penyelesaian piutang regres dari BUMN penerima penjaminan.

Hingga Semester I tahun 2025 , nilai penjaminan yang masih berjalan (*outstanding*) tercatat sebesar Rp10.313,9 miliar, yang terdiri dari: (1) obligasi

sebesar Rp3.900,3 miliar; (2) sukuk sebesar Rp1.148,1 miliar; dan (3) pinjaman sebesar Rp5.265,5 miliar, dari total *plafon* penjaminan sebesar Rp61.045,1 miliar. Selain itu, fasilitas bank garansi dalam skema ini telah digunakan sebesar €0,073 miliar dari total fasilitas €0,134 miliar.

Sampai dengan Semester I tahun 2025 , belum terdapat klaim atas penjaminan Pemerintah kepada BUMN. Meski demikian, Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko, seperti ketidakmampuan BUMN dalam memenuhi kewajiban finansialnya, keterbatasan porsi *first loss* yang ditanggung PT PII (Persero), serta adanya obligasi dan pinjaman yang sepenuhnya dijamin Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemerintah secara rutin memantau pelaksanaan penjaminan berdasarkan ketentuan PMK 211/2020 dan mengalokasikan dana cadangan penjaminan tambahan untuk memperkuat skema penjaminan BUMN.

6.2.3.1.3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka kebutuhan menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilisasi pasokan serta harga pangan, Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk mendukung pelaksanaan penugasan tersebut, diperlukan adanya dukungan Pemerintah. Salah satunya melalui skema Operator Investasi Pemerintah (OIP) kepada Perum Bulog untuk meningkatkan kapasitas pendanaan Perum Bulog dan mengurangi ketergantungan pada kredit perbankan. Melalui skema tersebut, Pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada Perum Bulog sebesar Rp16.576,0 miliar yang digunakan untuk mendanai sebagian program pengadaan 3 juta ton beras dan setara beras (gabah) dalam negeri, dan Rp5.500,0 miliar untuk program pengadaan 1 juta ton jagung. Terdapat risiko cadangan pangan tidak dapat disalurkan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Perum Bulog. Hal ini akan berdampak pada kemampuan Perum Bulog dalam mengembalikan fasilitas pendanaan dari Pemerintah. Risiko tersebut dapat dimitigasi, salah satunya dengan melibatkan lembaga Pemerintah terkait, yaitu Badan Pangan Nasional agar menugaskan Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran persediaan cadangan pangan sehingga dapat mengurangi risiko kemampuan Perum Bulog dalam mengembalikan fasilitas pendanaan dari Pemerintah.

Selain itu, untuk mendukung kemampuan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam memperoleh pinjaman sehubungan penugasan penyelenggaran CPP, Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah atas pinjaman. Dasar hukum penjaminan Pemerintah atas penyelenggaraan CPP adalah Perpres Nomor 125 Tahun 2022 dan PMK Nomor 34 Tahun 2023. Untuk memberikan *ring fencing* dan meminimalkan beban kepada APBN atas penjaminan, Pemerintah menugaskan PT PII (Persero) untuk bersama-sama memberikan Penjaminan Pemerintah (*co guarantee*). Adapun risiko keuangan negara yang dapat timbul dari penjaminan Pemerintah adalah dalam hal terjadi klaim jaminan atas ketidakmampuan pihak terjamin membayar kewajibannya kepada kreditur tepat waktu (risiko *default*). Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala atas pemenuhan kewajiban pinjaman, penggunaan *escrow account* dan kewajiban penyediaan dana pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo. Dalam penyelenggaraan CPP, selain dukungan dalam bentuk Penjaminan Pemerintah dapat pula disinergikan bentuk dukungan fiskal lainnya, yaitu berupa subsidi bunga.

6.2.3.2. Risiko Kewajiban Kontinjensi Non Penjaminan

6.2.3.2.1. Risiko Penugasan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Pada awal tahun 2025, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, pendapatan beberapa BUMN yang menjalankan proyek-proyek infrastruktur khususnya di sektor energi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi keuangan pada masa pandemi, namun untuk beberapa BUMN infrastruktur khususnya di sektor konstruksi relatif masih dalam proses perbaikan kondisi keuangan pasca pandemi. Pemulihan kinerja keuangan beberapa BUMN infrastruktur tersebut didukung oleh aktivitas industri dan mobilitas yang telah berjalan kembali normal, namun terdapat potensi peningkatan risiko yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik yang berdampak pada risiko kenaikan harga komoditas sektor energi serta risiko penguatan dolar Amerika Serikat. Sampai dengan tahun 2024, secara umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) mengalami perbaikan dimana terdapat peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Hal ini juga didukung oleh trend positif pendapatan penjualan tenaga listrik dan komitmen Pemerintah dalam melakukan pembayaran subsidi dan kompensasi. Situasi geopolitik serta kondisi makroekonomi diantaranya potensi risiko kenaikan harga komoditas sektor energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas serta fluktuasi nilai tukar berdampak pada kinerja keuangan BUMN Energi terutama terhadap kenaikan biaya operasional yang harus ditanggung.

Adapun untuk PT Pertamina (Persero), sepanjang tahun 2024, risiko volatilitas harga komoditas energi global masih dapat terkelola dengan baik sehingga tidak memberikan risiko tambahan bagi kinerja sektor hulu dan kinerja keuangan korporasi. Sementara bagi sektor hilir, kembalinya mobilitas masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, volume BBM penugasan *Public Service Obligation* (PSO) serta risiko kekurangan pendanaan pengadaan BBM tersebut dapat dikendalikan.

Pada akhirnya, harga komoditas energi global yang cenderung stabil dan masih dalam kisaran asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah menjadi faktor terjaganya risiko peningkatan beban belanja subsidi dan belanja kompensasi dalam APBN sehingga risiko fiskal yang bersumber dari BUMN sektor energi masih terkelola secara *prudent*.

Di sisi lain, beberapa BUMN di bidang konstruksi menunjukkan perbaikan kinerja keuangan pada tahun 2022, namun pada tahun 2023-2024 terdapat beberapa BUMN konstruksi yang mengalami penurunan kinerja. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMN sektor konstruksi adalah terkait adanya tekanan likuditas khususnya pada arus kas operasional, tingginya tagihan bruto, dan juga penurunan kontrak baru. Oleh karena itu, BUMN Konstruksi perlu mendapatkan kredit modal kerja dari perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi tersebut untuk penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Penugasan Pemerintah pada BUMN untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada kebutuhan pendanaan investasi pada BUMN infrastruktur. Untuk dapat menjalankan penugasan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan APBN untuk penguatan kapasitas BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Selanjutnya, BUMN infrastruktur akan menambah utang baru baik berupa

penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang sebagai *leveraging* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan dapat meningkatkan nilai aset dan *leveraging* BUMN infrastruktur.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan risiko kepada APBN di kemudian hari, mengingat sebagian besar pembiayaannya yang digunakan oleh BUMN tersebut berasal dari perbankan/lembaga keuangan dan pasar modal. Sebagai langkah mitigasi awal, Pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur. Dalam pemberian penjaminan, Pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan tersebut sehingga risiko terjadinya klaim penjaminan dapat diantasipasi sejak awal.

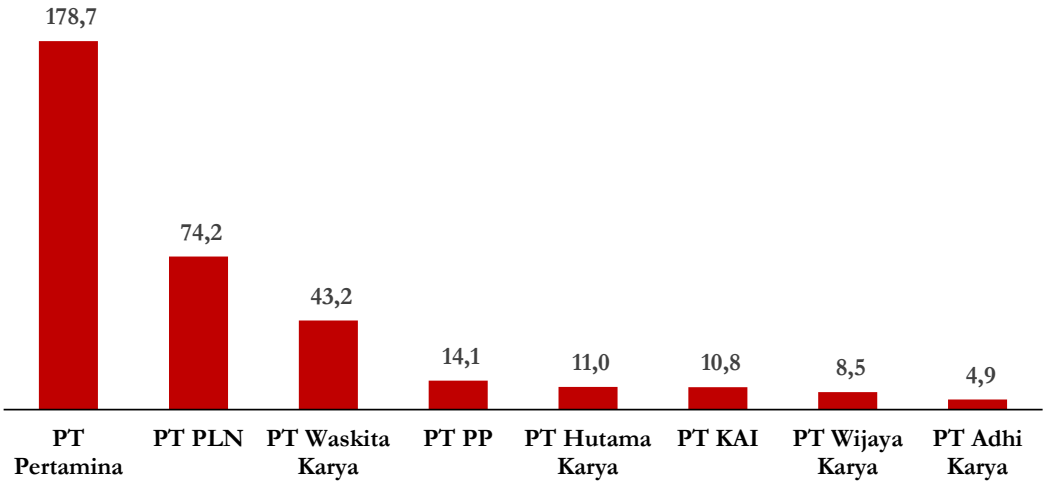
Beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam peningkatan utang baru baik untuk membiayai modal kerja maupun untuk aktivitas operasional korporasi. Hal ini menyebabkan akumulasi utang baru terlihat membesar. Risiko APBN yang berasal dari peningkatan utang BUMN infrastruktur tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. BUMN infrastruktur yang telah mendapat jaminan Pemerintah akan menimbulkan risiko APBN yang bersifat langsung sebagai akibat potensi pembayaran klaim terhadap pinjaman BUMN infrastruktur yang memperoleh jaminan Pemerintah. Sedangkan risiko BUMN infrastruktur yang bersifat tidak langsung kepada APBN adalah risiko keuangan yang berdampak dari kinerja keuangan BUMN infrastruktur berupa kewajiban kontinjensi APBN sebagai *last resort* serta dampak lanjutannya kepada perbankan dan pasar modal.

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari BUMN infrastruktur antara lain: (1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat *feasible* secara ekonomi, tetapi secara komersial tidak sepenuhnya *viable*; (2) fluktuasi variabel ekonomi makro; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko operasional yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; (6) *mismatch* pendanaan dimana proyek jangka panjang dibiayai dengan pendanaan jangka pendek (Kredit Modal Kerja); dan (7) tuntutan hukum.

Terhadap risiko BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan (risiko penjalaran/*contagion risk* BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman BUMN infrastruktur dari perbankan untuk membangun proyek prioritas dan strategis nasional berpotensi memunculkan risiko penjalaran kepada sektor keuangan apabila BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko tersebut diukur menggunakan Altman Z-score untuk memprediksi kemampuan bayar masing-masing BUMN kepada kreditur. Sementara itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui monitoring kinerja keuangan, *default indicator*, dan *operating indicator*. Seluruh indikator tersebut dibandingkan dengan kinerja perbankan nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil analisis dari indikator tersebut, Pemerintah dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BUMN perbankan.

Selama tahun 2025, secara umum BUMN infrastruktur memiliki risiko keuangan yang berada pada ambang batas aman namun sebagian lainnya membutuhkan dukungan Pemerintah.

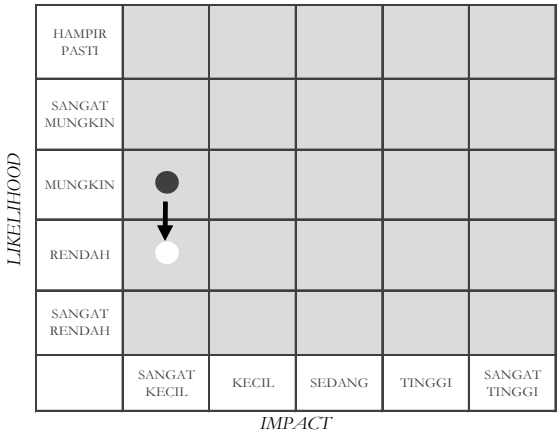
GRAFIK 6.18
PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR 2015-2024
(triliun rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

Walaupun risiko keuangan pada BUMN infrastuktur dapat terdampak dari struktur permodalan yang ditopang oleh tingginya pinjaman, namun pendapatan pada BUMN infrastruktur secara umum mulai mengalami peningkatan. Dengan demikian, secara umum risiko penjalaran kepada BUMN perbankan tergolong relatif rendah, tercermin dari indikator kesehatan BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi perbankan ketika dilakukan guncangan *(shock)* terhadap BUMN infrastruktur. Indikator kesehatan yang digunakan adalah sisi rasio kecukupan modal dan rasio kredit macet/*Non Perfoming Loan* (NPL). Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penjalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan. Secara umum, risiko penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur berada pada kategori level kemungkinan rendah dan level dampak sangat kecil, sebagaimana digambarkan dalam **Grafik 6.19**

GRAFIK 6.19
PETA RISIKO BUMN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



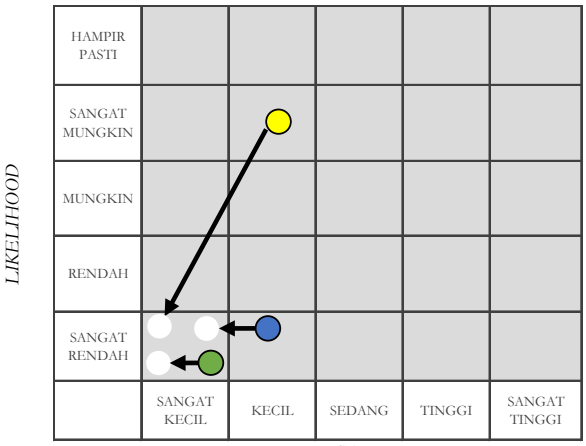
Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.2.2. Risiko Jaminan Sosial

Program Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan berdasarkan amanat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara yang dikelola oleh PT Taspen (Persero), dan program jaminan sosial TNI/Polri yang dikelola oleh PT Asabri (Persero). Tujuan pengelolaan risiko dari

program jaminan sosial nasional untuk menjaga kesinambungan program jaminan sosial. Konteks pengelolaan risiko berupa asesmen risiko terhadap aspek ketahanan dana program jaminan sosial dalam membiayai manfaat program yang dapat berdampak terhadap tambahan beban APBN. Adapun Peta Risiko atas risiko jaminan sosial dapat dilihat pada **Grafik 6.20** berikut.

GRAFIK 6.20
PETA RISIKO JAMINAN SOSIAL



Sumber: Kementerian Keuangan

- Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan
- Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

1. Program Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

Kondisi kesehatan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga akhir tahun 2025 diperkirakan masih cukup terkendali, meskipun menunjukkan tren penurunan yang perlu dimitigasi. Salah satu indikator yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan rasio klaim pada Semester I 2025 yang mengindikasikan tekanan terhadap ketahanan DJS Kesehatan di tahun 2026. Untuk menjaga stabilitas program JKN, diperlukan bauran kebijakan dan langkah-langkah pengendalian yang komprehensif, terutama dalam hal kepesertaan, kolektabilitas iuran, dan pengelolaan klaim manfaat jaminan kesehatan.

Di sisi kepesertaan, terdapat beberapa tantangan utama antara lain: (1) tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang menunggak iuran, serta peserta dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha yang belum mendaftarkan diri kembali setelah pemberhentian; (2) *inclusion* dan *exclusion error* data peserta PBI, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kontribusi yang seharusnya dibayarkan; serta (3) dampak potensi penurunan kondisi ekonomi, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, yang dapat mengurangi jumlah peserta PPU sehingga berpotensi meningkatkan peserta nonaktif.

Tidak hanya itu, efektivitas penerimaan iuran juga masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya: (1) rendahnya kepatuhan pembayaran iuran dari peserta PBPU dan BP, yang memengaruhi *cash flow* DJS Kesehatan; (2) iuran JKN belum menjadi prioritas dalam proses penganggaran beberapa pemerintah daerah (Pemda), sehingga kolektabilitas iuran di daerah belum optimal; serta (3) dampak inflasi dan perlambatan ekonomi, yang mengurangi kemampuan membayar iuran JKN (*ability to pay*) masyarakat, khususnya peserta mandiri dan pekerja informal.

Di sisi lain, peningkatan beban klaim juga menjadi tantangan serius yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: (1) meningkatnya utilisasi layanan kesehatan untuk penyakit katastropik dan berbiaya tinggi; (2) kurang efektifnya kebijakan peningkatan kesehatan masyarakat dan program promotif-preventif; (3) potensi *fraud* dan *moral hazard*, baik dari peserta maupun fasilitas kesehatan; (4) potensi kenaikan tarif layanan kesehatan; serta (5) potensi dampak kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang berpotensi menaikkan biaya jaminan kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat diimplementasikan. Pertama, optimalisasi keakuratan data kepesertaan dan penguatan pengawasan kepatuhan melalui integrasi data antar BPJS menjadi fondasi utama. Di sisi layanan, perbaikan program promotif-preventif serta efektivitas sistem rujukan berjenjang dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai *gate keeper* akan membantu mengendalikan mutu dan biaya layanan. Selain itu, penguatan *tools* deteksi kecurangan pada BPJS Kesehatan dan pihak-pihak terkait juga diperlukan untuk meminimalkan *fraud* dan *moral hazard*. Secara fundamental, perbaikan tata kelola menyeluruh mencakup aspek manfaat dan pendanaan JKN harus dilakukan untuk memastikan perbaikan layanan sekaligus mengantisipasi potensi menurunnya ketahanan DJS.

Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama: (1) masyarakat/peserta, (2) pemerintah pusat, dan (3) pemerintah daerah. Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program. Selain itu, dalam rangka menjaga kondisi likuiditas DJS Kesehatan perlu melakukan pembiayaan kreatif seperti *supply chain financing* dan instrument pembiayaan lainnya.

Selanjutnya, dampak potensial terhadap APBN perlu dikelola dengan cermat, terutama terkait (1) penyesuaian bantuan iuran peserta PBI, (2) peningkatan kontribusi pemerintah untuk peserta PBPU/BP kelas III, serta (3) beban iuran pemerintah sebagai pemberi kerja PPU Penyelenggara Negara. Melalui sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga terkait yang mencakup perbaikan tata kelola, penataan pendanaan, dan penyesuaian bertahap ini, stabilitas DJS Kesehatan dapat terjaga sehingga program JKN tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

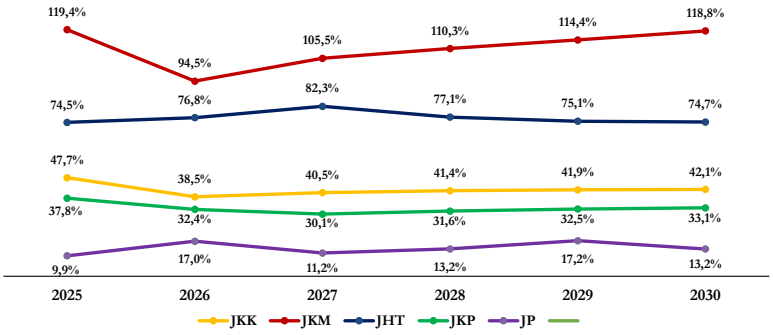
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) . Program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi tekanan terhadap kesehatan keuangan, yang dinilai dari rasio klaim dan pertumbuhan aset neto. Secara umum, risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Semester I tahun 2025 masih berada dalam batas terkendali. Namun, untuk jangka menengah, Program JKM perlu mendapat perhatian karena terdapat proyeksi peningkatan rasio klaim akibat peningkatan manfaat dan tingginya angka kematian pada masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19, khususnya pada peserta Bukan Penerima Upah.

Untuk program JKK, rasio klaim diperkirakan mencapai 38,5 persen pada tahun 2026, dengan kecenderungan naik namun masih terkendali dalam jangka panjang. Untuk program JKM, rasio klaim diproyeksikan sebesar 94,5 persen pada tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan risiko dalam jangka menengah. Evaluasi dan penyesuaian iuran khususnya pada peserta bukan penerima upah perlu dilakukan untuk memitigasi tekanan kecukupan keuangan terhadap cadangan dana JKM. Untuk program JHT, rasio klaim tahun 2026 diperkirakan sebesar 76,8 persen dengan Rasio Kecukupan Dana yang masih mencukupi, sehingga kondisi program ini relatif aman dalam jangka menengah. Untuk program JP, rasio klaim tercatat sebesar 4,8 persen per Semester I tahun 2025 , yang mencakup pembayaran manfaat

pensiun normal, manfaat *lump sum*, klaim ahli waris, dan cacat total tetap. Untuk menjaga ketahanan dana jangka panjang, mitigasi risiko yang akan dilaksanakan berupa dua langkah yaitu (1) menyusun kajian evaluasi ketahanan dana program; dan (2) optimalisasi pengelolaan aset dan strategi investasi, termasuk manajemen portofolio untuk menghadapi volatilitas pasar. Untuk program JKP, rasio klaim diproyeksikan stabil pada angka 32,4 persen di tahun 2026 sebagaimana digambarkan pada **Grafik 6.21**. Hal ini mencerminkan bahwa ketahanan dana program masih dalam kondisi terkendali. Secara keseluruhan, setelah mempertimbangkan seluruh indikator klaim dan kecukupan dana, risiko fiskal dari program-program BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2025–2026 masih terkendali. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap ketahanan program JKM tetap diperlukan, guna memastikan keberlanjutan jangka menengah dan panjang, termasuk dari aspek manfaat, struktur iuran, serta tata kelola investasi.

GRAFIK 6.21
PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

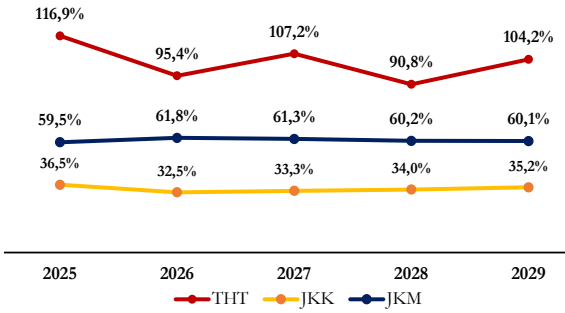


Sumber : BPJS Ketenagakerjaan

3. Program yang dikelola oleh PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) mengelola program JKK, JKM, Tabungan Hari Tua (THT), dan JP. Secara umum, kondisi pendanaan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang relatif baik. Potensi risiko fiskal dari program JKK dan JKM tergolong terkendali dengan proyeksi rasio klaim tahun 2026 masing-masing sebesar 32,5 persen untuk JKK dan 61,8 persen untuk JKM. Namun demikian, program THT diproyeksikan memiliki rasio klaim sebesar 95,4 persen pada tahun 2026 dan akan melebihi 100,0 persen setelah tahun 2029. **Grafik 6.22** menunjukkan bahwa dalam jangka panjang rasio klaim untuk JKK dan JKM cenderung stabil, sedangkan untuk THT menunjukkan pola fluktuatif hingga tahun 2028 akibat penyesuaian premi dan klaim sebagai dampak perubahan usia pensiun dalam UU TNI No. 3 Tahun 2025. Secara umum sustainabilitas program-program yang dikelola PT Asabri (Persero) masih dalam kondisi baik, hanya program THT yang memerlukan perhatian khusus. Rasio klaim terhadap premi yang melebihi 100,0 persen menunjukkan adanya risiko defisit *underwriting* yang dapat mengarah pada penurunan nilai aset THT dalam jangka panjang, terutama apabila pembayaran klaim terus bergantung pada likuidasi aset.

GRAFIK 6.22
PROYEKSI RASIO KLAIM PT ASABRI (PERSERO)



umber : PT Asabri (Persero)

Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan serta penanganan terhadap aset tidak produktif, baik melalui penambahan aset baru maupun pemulihan aset bermasalah.

Selain itu, risiko fiskal lain berasal dari potensi penurunan nilai aset investasi akibat fluktuasi pasar serta masih adanya aset non-produktif yang memengaruhi peningkatan nilai investasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen PT Asabri (Persero) telah melakukan serangkaian langkah mitigasi antara lain perbaikan dari sisi tata kelola, *rebalancing* aset secara bertahap ke instrumen yang lebih produktif, pengelolaan investasi yang disesuaikan dengan karakteristik tiap program kelolaan, penerapan prinsip *Liabilities Driven Investing* untuk menyelaraskan aset dengan kewajiban kepada peserta, pemantauan berkala terhadap limit likuiditas masing-masing program, serta penguatan fungsi komite investasi.

Program JP sendiri dibiayai langsung melalui APBN setiap tahunnya, sehingga tidak memengaruhi besaran manfaat yang diterima pensiunan TNI/Polri. Namun demikian, mengingat skema *pay-as you-go* berpotensi meningkatkan beban fiskal di masa depan, maka perlu dilakukan kajian terhadap reformasi program pensiun guna menciptakan skema yang lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat yang optimal.

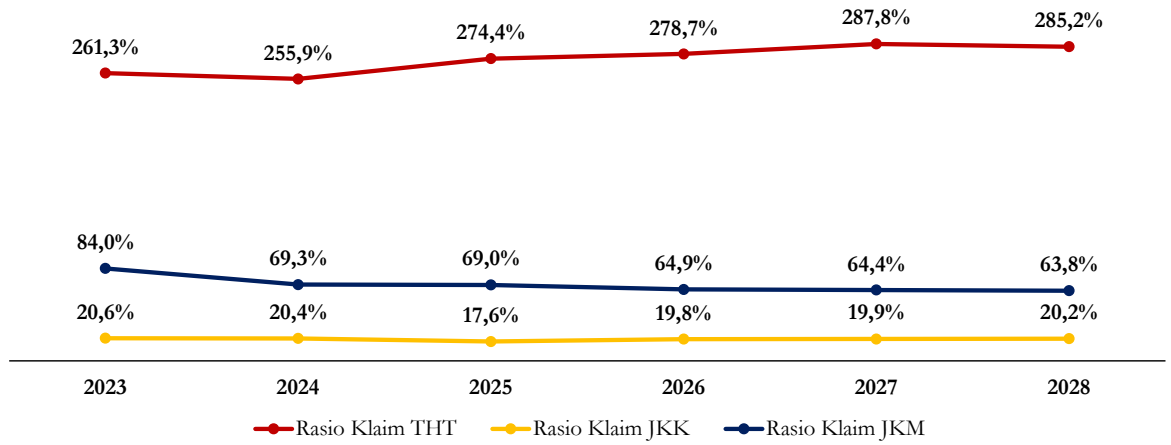
4. Program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan JP. Kesinambungan program tersebut, salah satunya dapat dinilai dari rasio likuiditas masing-masing program. Untuk program JKK, rasio likuiditas terjaga di atas 100,0 persen, sehingga seluruh kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar dan program tergolong relatif aman. Program THT diproyeksikan memiliki rasio likuiditas di atas 100,0 persen hingga tahun 2026, namun menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang karena eksposur terhadap risiko likuiditas akibat mayoritas peserta berada pada usia 40–50 tahun. Sementara itu, rasio likuiditas program JKM masih berada di bawah 100,0 persen, meskipun rasio klaimnya menunjukkan tren penurunan sehingga terdapat akumulasi aset yang dapat membantu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat. Proyeksi rasio likuiditas masing-masing program tersebut ditampilkan pada **Grafik 6.23**.

Program JKK relatif aman dengan realisasi rasio klaim tahun 2024 sebesar 20,4 persen, dan diproyeksikan sebesar 17,6 persen pada 2025. Rasio klaim ini menunjukkan tren konsisten di bawah 30,0 persen hingga tahun 2029, menandakan tingkat kecelakaan kerja ASN yang stabil, meskipun mitigasi tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan ini. Untuk program JKM, rasio klaim sebesar 69,3 persen pada 2024 dan diproyeksikan turun menjadi 69,0 persen di 2025, serta terus menunjukkan tren penurunan hingga 2029. Namun, potensi peningkatan rasio klaim dapat terjadi apabila terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi, sehingga evaluasi dan monitoring atas kematian ASN tetap penting dilakukan.

Program THT diperkirakan menghadapi risiko likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi oleh ASN usia 40–50 tahun. Rasio Kecukupan Dana (RKD) justru menunjukkan tren peningkatan, dari 108,7 persen pada 2024 menjadi 110,9 persen pada 2029, didorong oleh peningkatan nilai aset dan penurunan liabilitas manfaat masa depan. Terkait program pensiun, skema pendanaan *pay-as-you-go* yang berasal dari APBN tidak terekspos risiko kekurangan pendanaan.

GRAFIK 6.23
PROYEKSI RASIO KLAIM PT TASPEN (PERSERO)



Sumber : PT Taspen (Persero)

Namun, potensi risiko tetap ada pada investasi dana AIP, yang sensitif terhadap kondisi pasar. Risiko fiskal dari program Pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati hati. Potensi sumber risiko berasal dari skema dan pembiayaan program, serta kemungkinan kewajiban kontinjensi jika terjadi perubahan kebijakan.

Dari sisi investasi, dana program dikelola dengan prinsip kehati-hatian, terdiri dari 66,7 persen obligasi (mayoritas Surat Berharga Negara), 21,3 persen deposito, dan 12,0 persen investasi lainnya. Komposisi tersebut relatif aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal di masa depan.

6.2.3.2.3. Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

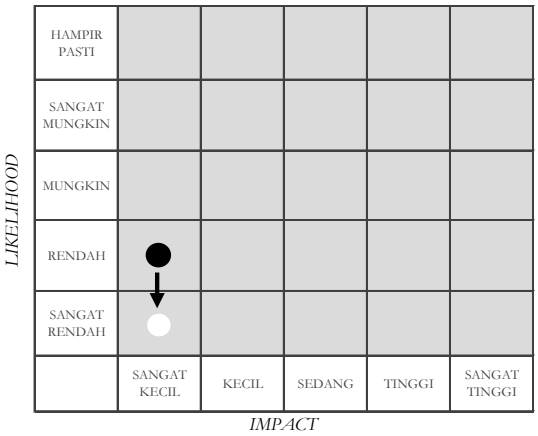
Pemerintah berdasarkan undang-undang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun lingkup hukum privat. Namun, pada saat Pemerintah melaksanakan kebijakan dan tindakannya terkadang berpotensi menimbulkan sengketa dengan masyarakat baik secara individu maupun bersama-sama (kolektif). Sebagian besar penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat dilakukan melalui jalur hukum *(legal approach)*, halmana masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu kebijakan/tindakan yang diputuskan oleh Pemerintah akan mengajukan gugatan di lembaga peradilan. Dalam hukum privat, tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah berupa gugatan perdata dengan objek gugatan perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam tindakan hukum publik, tuntutan hukum diajukan melalui gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dengan objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Gugatan kepada Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagian besar adalah gugatan perdata dalam bentuk tuntutan ganti kerugian baik materiil ataupun immateriil serta pelepasan tanah dan/atau bangunan milik negara (Barang Milik Negara/BMN).

Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan kepada Pemerintah yang telah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan berdampak kepada APBN berupa pengeluaran negara sejumlah nominal tertentu atau pelepasan (penghapusan) BMN. Oleh karena itu, tuntutan hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan penatausahaan yang baik agar dapat diketahui seberapa besar gugatan tersebut akan berdampak pada APBN, serta merumuskan instrumen mitigasi agar tidak menimbukan dampak yang lebih besar. Berdasarkan data yang telah ditatausahakan per Semester I tahun 2025 melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH) (https://sepatuh.kemenkeu.go.id), terdapat 145 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*. Atas perkara *inkracht* tersebut menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp9,3 triliun, US$116,03 juta, MYR2,05 juta, serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan total seluas seluas 424 ha.

Potensi pengeluaran negara (APBN) atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk pada level dampak Kecil dengan level kemungkinan Rendah. Atas pengukuran level dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat dipetakan dalam **Grafik 6.24** berikut.

Untuk memitigasi risiko atas tuntutan hukum kepada Pemerintah, Kementerian/Lembaga akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisir kewajiban Pemerintah yang akhirnya berdampak pada APBN.

GRAFIK 6.24
PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH

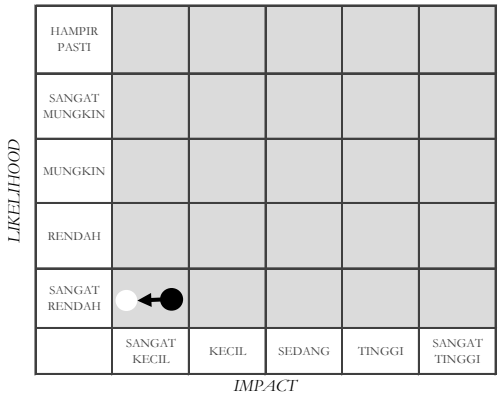


Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.2.4. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Secara umum, risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu berada pada level dampak sangat kecil dan level kemungkinan sangat rendah, yang dapat dilihat pada **Grafik 6.25** berikut.

GRAFIK 6.25
PETA RISIKO FISKAL DARI LEMBAGA KEUANGAN TERTENTU



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pada tahun 2025 total aset LPEI diproyeksikan turun sebesar 7,0 persen dari realisasi tahun 2024. Seiring dengan kondisi perekonomian global yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: (1) risiko kredit dari tekanan kondisi geopolitik, nilai tukar dan kondisi lainnya yang berpotensi menekan kondisi usaha eksportir; dan (2) risiko dari klaim penjaminan dan asuransi.

Tahun 2025, total pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp51.681,6 miliar turun 8,0 persen dibandingkan tahun 2024. Hal ini utamanya disebabkan oleh rencana hapus buku sebesar Rp6.630,9 miliar. Sementara itu, pertumbuhan *goodbank* pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.853,7 miliar. Penjaminan komersial termasuk Penugasan Khusus Ekspor (PKE) diproyeksikan tumbuh sebesar 45,0 persen dan asuransi diproyeksikan turun sebesar 21,6 persen.

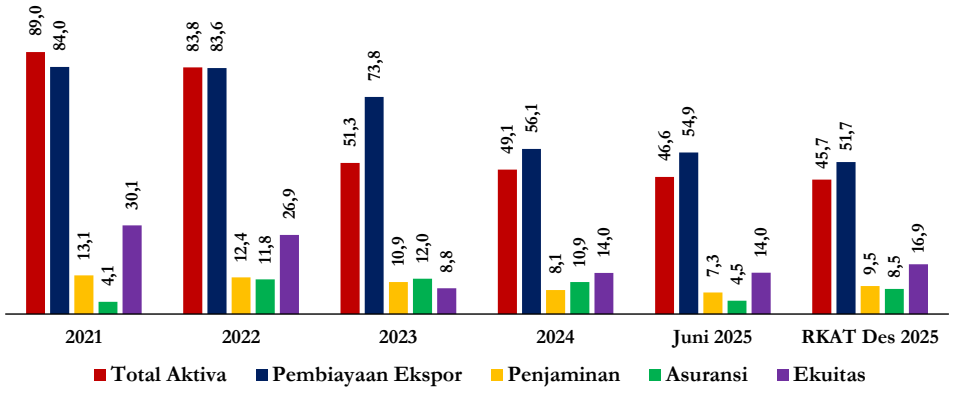
Sampai Semester I tahun 2025, PKE berhasil merealisasikan *new disbursement* sebesar Rp5.500,5 miliar, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 6.4**. PKE tersebut terdiri dari fasilitas PKE UKM sebesar Rp40,3 miliar, PKE *Trade Finance* sebesar Rp2.861,8 miliar, PKE Kawasan sebesar Rp2.476,4 miliar, PKE Alat Transportasi sebesar Rp51,7 miliar dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan sebesar Rp70,3 miliar. Sehingga total *outstanding* pembiayaan PKE posisi per Semester I tahun 2025 telah mencapai Rp5.829,5 miliar**.** Sumber risiko penugasan umum dan penugasan khusus berasal dari risiko gagal bayar atas *outstanding* pembiayaan ekspor yang diberikan kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak ke penurunan nilai ekuitas. Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI periode 2021 – 2025 ditampilkan pada **Grafik 6.26**.

Sampai Semester I tahun 2025, total pembiayaan ekspor tercatat sebesar Rp54.912,1 miliar namun demikian diproyeksikan menurun sampai dengan akhir tahun 2025 menjadi Rp51.681,6 miliar yang disebabkan adanya rencana hapus buku sebesar Rp6.630,9 miliar di tahun 2025. Adapun NPL *gross* tercatat sebesar Rp16.801,6 miliar dan diproyeksikan membaik menjadi Rp10.659,6 miliar di akhir tahun 2025.

Dalam rangka memitigasi risiko kredit, LPEI telah melakukan berbagai upaya perbaikan antara lain: (1) penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta penerapan prinsip kehati-hatian; (2) optimalisasi perbaikan kualitas aset Lembaga baik oleh LPEI melalui deteksi dini melalui mekanisme *watchlist* maupun penyelesaian oleh PT IEB Prima Aset; (3) Penguatan proses bisnis internal melalui integrasi dan penyempurnaan *tools* manajemen risiko kredit antara lain, implementasi *Early Warning Detection* (EWD) *tools*; dan (4) penguatan *Governance, Risk, dan Compliance* melalui pelaksanaan manajemen risiko operasional.

Terkait dengan tingkat kecukupan modal, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LPEI per Juni 2025 tercatat sebesar 37,3 persen pada tingkat yang kuat dan diproyeksikan sebesar 37,8 persen pada Desember 2025 di atas rata-rata perbankan. Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko fiskal tergolong cukup rendah, mempertimbangkan CAR yang masih terjaga dan memenuhi batas minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

GRAFIK 6.26
PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN PORSI PERMODALAN LPEI
Tahun 2021 – Desember 2025 (RKAT)
(triliun rupiah)



Sumber : LPEI

TABEL 6.4
JENIS PENUGASAN KHUSUS EKSPOR (PKE)

No.	Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan telah Berakhir)	Alokasi Dana (triliun rupiah)	Tahun
1.	KMK No. 1156/KMK.08/2015 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	0,3	2015
2.	KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 (PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah)	0,7	2015
3.	KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 (PKE Gerbong Penumpang Kereta Api)	1,0	2017
4.	KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 (PKE Pesawat Udara)	0,4	2017
No.	**Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) (Masa Penugasan masih berjalan/ masih terdapat *outstanding*)**	**Alokasi Dana (triliun rupiah)**	**Masa Penugasan**
1.	KMK No. 428/KMK.08/2020 (PKE Industri Penerbangan)	1,0	s.d. 31 Desember 2021
2.	KMKNo.406/KMK.08/2021 (PKE Alat Transportasi)	1,5	s.d 31 Desember 2026
3.	KMK No. 272/KMK.08/2022 (PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas)	0,5	s.d. 31 Desember 2024
4.	KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 (PKE Pariwisata Mandalika)	1,6	s.d. 31 Desember 2024
5.	KMK No. 145/2023 (PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan)	0,5	s.d. 31 Desember 2027
6.	KMK No. 460/2023 atas perubahan KMK No. 1/KMK.08/2019 dan KMK No.787/KMK.08/2017 (PKE Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur)	2,6	s.d. 31 Desember 2028
7.	KMK Nomor 37 Tahun 2025 atas perubahan KMK No. 409/KMK.08/2021, KMK No. 428/KMK.08/2020 dan No.372/KMK.08/2020 (PKE UKM)	2,0	s.d. 31 Desember 2029
8.	KMK No. 50 tahun 2025 atas perubahan KMK No. 494/KMK.08/2022, KMK No. 410/KMK.08/2021 dan 526/KMK.08/2019 (PKE Trade Finance)	2,5	s.d. 31 Desember 2029

Sumber: Kementerian Keuangan

2. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada investor dalam berinvestasi terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dilakukan dengan menjamin risiko politik dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta konsistensi dalam pemberian penjaminan dan pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

Lebih lanjut, PT PII (Persero) telah mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) atas kredit BUMN di bidang infrastruktur (penjaminan kredit), yaitu pemberian jaminan terhadap risiko gagal bayar pinjaman dan/ atau obligasi BUMN dalam rangka penyediaan infrastruktur. Selain itu, untuk memperluas peran PT PII (Persero) dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah, PT PII (Persero) juga terlibat dalam pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam rangka penyelematan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program PEN sebagaimana dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/ atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Dalam menjalankan fungsi penjaminan infrastruktur sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini Pemerintah telah melakukan penyertaan modal ke PT PII (Persero) melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan penyertaan modal yang diperuntukan kepada penjaminan di luar bidang infrastruktur sebesar Rp1.570,0 miliar. Sampai dengan Semester I tahun 2025, PT PII (Persero) telah melaksanakan penjaminan atas 54 proyek dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp552.818,6 miliar yang terdiri dari 46 penjaminan proyek infrastruktur dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp489.455,5 miliar dan 8 (delapan) penjaminan BUMN dalam rangka PEN dengan nilai investasi proyek sebesar Rp63.363,1 miliar. Proyek infrastruktur yang telah dijamin tersebar dalam tujuh sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan (21 proyek); (2) sektor telekomunikasi dan informatika (4 proyek); (3) sektor air minum (6 proyek); (4) sektor transportasi (3 proyek); (5) sektor ketenagalistrikan (9 proyek); (6) sektor pariwisata (1 proyek) dan (7) sektor konservansi energi (2 proyek).

Atas penjaminan tersebut sampai dengan Semester I tahun 2025 , dengan ekuitas sebesar Rp15.400,8 miliar (tanpa memperhitungkan tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp1.570,0 miliar), *Gearing Ratio* PT PII (Persero) berada pada 6,2 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 46 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp95.940,6 miliar. Adapun batas ketentuan tingkat *Gearing Ratio* telah ditetapkan sebesar maksimal dua belas kali berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan.

Dari sisi penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi. Sampai dengan

Semester I tahun 2025, PT PII (Persero) sedang melaksanakan penugasan aktif sebanyak 8 (delapan) proyek, yang terdiri dari 7 (tujuh) proyek KPBU dan 1 (satu) proyek non-KPBU. Untuk penugasan proyek KPBU meliputi 1 (satu) proyek sektor transportasi, 2 (dua) proyek sektor air minum, 1 (satu) proyek sektor minyak dan gas bumi, 1 (satu) proyek rumah sakit umum daerah, 1 (satu) proyek ekonomi fasilitas perkotaan (pasar) dan 1 (satu) proyek sektor fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan (kapal riset). Sedangkan untuk proyek non-KPBU berupa proyek pemanfaaatan BMN.

Adapun potensi risiko PT PII (Persero) selaku BUPI di tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas akibat terjadinya klaim Penjamin

   Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek untuk proses pembayaran klaim. Dari nilai efektif eksposur penjaminan sebesar Rp103.720,7 miliar, terdapat potensi risiko klaim penjaminan yang terpicu oleh sebab cidera janji PJPK. Risiko klaim tersebut utamanya bersumber dari kemungkinan terjadinya keterlambatan pengadaan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin, keterlambatan atau tiadanya pembayaran *availability payment* di sektor telekomunikasi dan keterlambatan atau tiadanya pembayaran *monthly payment* di sektor air minum, dan risiko terminasi perjanjian kerja sama di sektor air minum. Terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk dapat mempercepat pengadaan tanah dan memilah alternatif kompensasi yang dapat diberikan. Untuk risiko keterlambatan pembayaran *availability payment* di sektor telekomunikasi, terus dilakukan koordinasi dengan PJPK untuk penggunaan anggaran pembayarannya. Sementara terkait dengan risiko keterlambatan pembayaran *monthly payment* dan terminasi perjanjian Kerjasama di sektor air minum, masih terus dilakukan usaha perbaikan kinerja PJPK dan restrukturisasi PKS. Sedangkan potensi risiko klaim penjaminan kredit, bersumber dari potensi gagal bayar atas pemenuhan kewajiban dari pinjaman dan obligasi BUMN Terjamin.
2. Risiko Kredit atas Tagihan Regres

   Atas pembayaran klaim penjaminan, PT PII (Persero) memiliki hak regres berupa piutang yang ditagihkan kepada PJPK, dan atas piutang tersebut PT PII (Persero) memiliki risiko kredit terkait dengan pemulihan atas tagihan regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya tagihan regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar tagihan regres. Dari uraian potensi klaim di atas, eksposur tagihan regres yang berpotensi tidak terpulihkan akan dicatatkan dan dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai pengurang nilai aset tercatat.

Secara keseluruhan sampai dengan Semester I tahun 2025 , indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi likuiditas atas sumber daya keuangan yang tersedia sampai dengan Semester I tahun 2025 adalah sebesar Rp16.674,1 miliar. Dalam hal risiko atas klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), maka terdapat potensi risiko fiskal berupa kebutuhan tambahan ekuitas dari Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim dan melakukan penjaminan.

Sebagai salah satu bentuk mitigasi terhadap potensi risiko fiskal yang bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas potensi risiko yang

berasal dari kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) yang berdampak kepada APBN dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

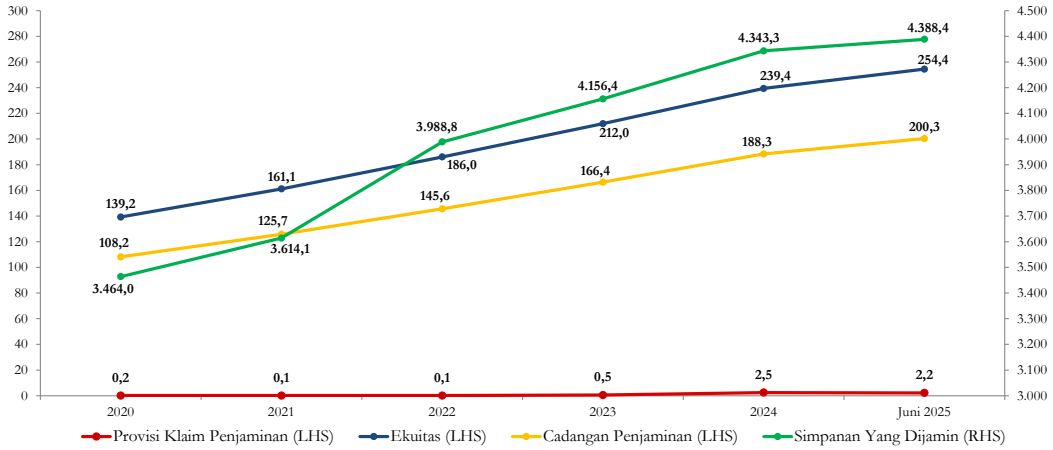
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan LPS diantaranya: (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan, iuran berkala penjaminan polis, serta kontribusi pertama bank dan perusahaan asuransi; (2) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya; (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank; (5) mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan perusahaan asuransi; (6) melakukan pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, baik sendiri maupun bersama dengan OJK; serta (7) melakukan penempatan dana pada bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari OJK.

Sampai dengan Semester I tahun 2025 , ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp254.426,3 miliar. Risiko fiskal berpotensi muncul dari LPS akibat adanya risiko likuiditas dan/atau risiko solvabilitas yang terjadi di LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 UU LPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU P2SK, dalam hal LPS akan atau telah mengalami kesulitan likuiditas karena menjalankan tugas dan fungsinya, LPS berwenang menjual dan/atau repo SBN yang dimiliki kepada BI dan/atau pihak lain, menerbitkan surat utang, meminjam kepada pihak lain, dan/atau meminjam kepada Pemerintah. Dengan demikian, risiko likuiditas LPS dapat menimbulkan risiko fiskal akibat adanya potensi pengajuan pinjaman LPS kepada Pemerintah. Selanjutnya dari sisi solvabilitas LPS, dalam hal modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dengan demikian, risiko solvabilitas yang terjadi di LPS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sehingga modal LPS kurang dari Rp4.000,0 miliar berpotensi menyebabkan timbulnya risiko fiskal untuk menambah PMN.

Mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari LPS adalah dengan telah dibentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran LPS dalam melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah dengan asesmen kondisi keuangan dan likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak terjadi suatu guncangan (*shock*) yang ekstrem pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan sangat kecil dengan *likelihood* sangat rendah. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam periode 2020 - Mei 2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.27.**

GRAFIK 6.27
PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS, PROVISI KLAIM PENJAMINAN, DAN CADANGAN PENJAMINAN 2020 - JUNI 2025
(triliun rupiah)



Sumber : LPS

Keterangan

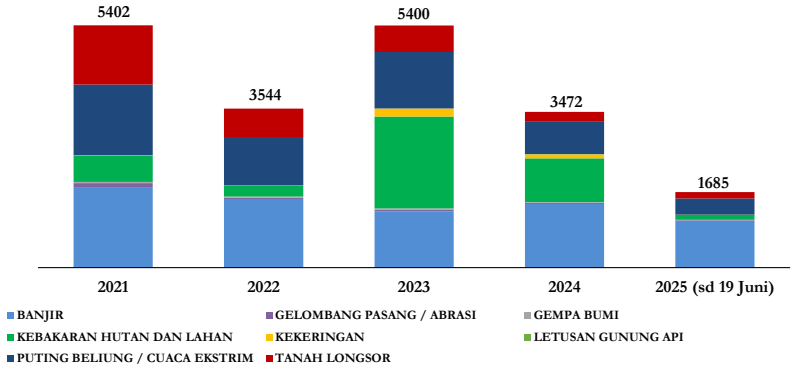
1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2024 berdasarkan Laporan Keuangan (Audited), sedangkan posisi ekuitas per 30 Juni 2025 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit.
2. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan.
3. Simpanan yang dijamin tahun 2020-2024 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Juni 2025 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 30 Juni 2025.

6.2.3.2.5. Risiko Bencana

Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta potensi risiko pembiayaan bencana yang bersumber dari APBN. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia dengan keterjadian terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Berikut data kejadian bencana alam periode tahun 2021 sampai dengan Semester I tahun 2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.28.**

Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian per tahun akibat bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana penyumbang kerugian secara finansial terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran, dan banjir. Bencana Tsunami di Aceh pada 2004 menjadi bencana penyumbang terbesar kerugian negara sebesar Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana Gempa Yogyakarta pada 2006 sebesar Rp29.150,0 miliar, bencana Gempa Padang pada 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, Gempa dan Tsunami Sulteng pada 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan Gempa NTB pada 2018 sebesar Rp18.200,0 miliar. Lalu, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI Jakarta pada 2007 sebesar Rp5.180,0 miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar.

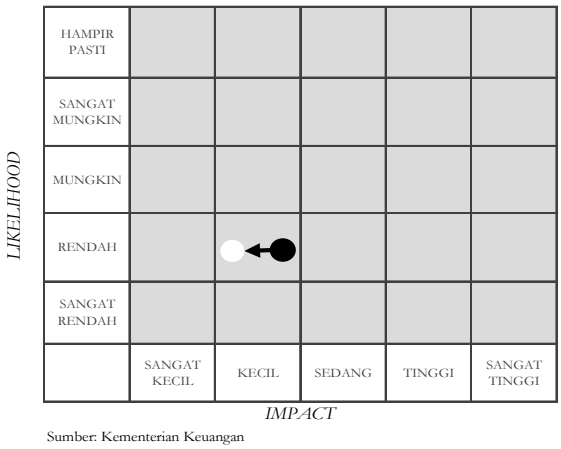
GRAFIK 6.28
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2021–JUNI 2025



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Potensi risiko fiskal yang bersumber dari bencana alam adalah kerugian finansial yang diakibatkan bencana alam melebihi anggaran bencana yang sudah dialokasikan di APBN. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Rata-rata realisasi dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN dalam periode tahun 2014–2024 adalah sekitar Rp4.295,0 miliar per tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko kerugian akibat bencana alam dikategorikan kecil dengan *likelihood* yang rendah sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.29.**

GRAFIK 6.29
PETA RISIKO BENCANA



Sumber: Kementerian Keuangan

Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar bencana nonalam antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampak bencana nonalam berpotensi sangat substansial, misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan dan ekonomi. Dalam konteks penanggulangan bencana alam, Pemerintah memiliki tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pemerintah juga menetapkan strategi kebijakan mitigasi pembiayaan risiko bencana, sebagai berikut:

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, terdiri dari: (a) mengombinasikan instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif; (b) menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau bencana dengan dampak kerugian yang kecil melalui APBN dan/atau APBD; (c) menggunakan instrumen pembiayaan kontinjensi sebagai komplemen APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian

sedang sampai tinggi; (d) membentuk *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN; serta (e) mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.

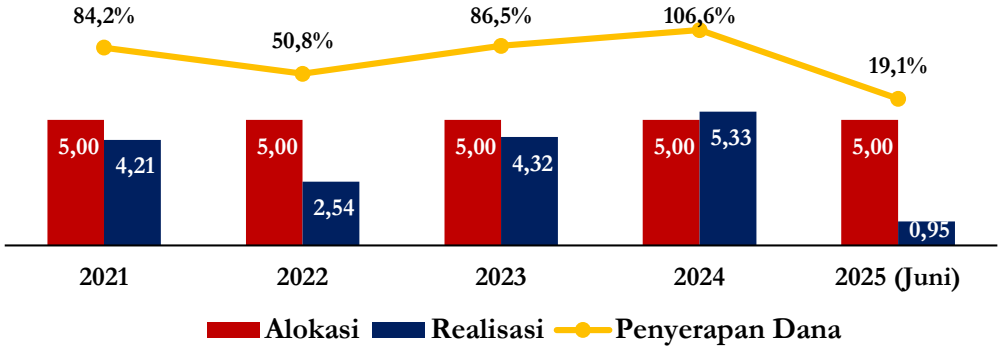
2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD yang mempunyai nilai ekonomis dan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan pelayanan umum, perlindungan rumah MBR, dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko seperti asuransi pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), asuransi usaha ternak sapi, asuransi budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah MBR.
4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
6. Pengembangan model risiko Keuangan Negara yang bersumber dari bencana alam yang risetnya dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 serta dilakukan perluasan cakupan pada tahun 2025. Riset ini bertujuan untuk menghitung dan memetakan potensi kerugian finansial akibat bencana serta mengidentifikasi opsi-opsi pembiayaan yang optimal. Dengan model ini, Pemerintah dapat memperkirakan potensi nilai risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan alokasi dana yang dapat me-*leverage* kemampuan APBN/APBD. Selain itu, melalui model, Pemerintah dapat menyusun strategi pembiayaan risiko bencana yang lebih implementatif.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *expost* dan pembiayaan *ex-ante*, baik yang diserap Pemerintah (*risk-retain*) maupun ditransfer kepada pihak lain. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui realokasi anggaran di beberapa K/L pada tahun bersangkutan ketika terjadi bencana maupun alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman.

Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*). Dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN) dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana *on-call*) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemda. Perkembangan dana cadangan bencana alam tahun 2021-2025 ditampilkan dalam **Grafik 6.30**

Skema *risk transfer* diimplementasikan melalui pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asuransi pertanian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian bencana.

GRAFIK 6.30
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, 2021–2025
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Opsi lain *ex-ante financing* yang diterapkan dalam jangka pendek adalah dengan pembentukan *pooling fund* bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana. Saat ini telah terbit PMK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang menjadi pedoman operasionalisasi *pooling fund* bencana mulai tahun 2025. *Pooling fund* bencana merupakan dana bersama penanggulangan bencana yang berasal dari berbagai sumber. Dana bersama tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pascabencana.

6.2.3.2.6. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan Panas Bumi

Dalam rangka mendukung pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia, Pemerintah memberikan dukungan fiskal melalui pemberian fasilitas dana Pembiayaan Infrastruktur Panas Bumi (PISP) untuk dukungan eksplorasi pada wilayah yang masih dimiliki Pemerintah dan pembiayaan ekplorasi kepada BUMN dan Badan Usaha melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.08/2022 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur. Diharapkan, adanya fasilitas fiskal ini dapat mendorong kegiatan eksplorasi dan meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi di industri panas bumi. Sampai dengan Semester I tahun 2025, dana PISP digunakan untuk membiayai eksplorasi panas bumi yang ditampilkan pada **Tabel 6.5**.

Selain pembiayaan eksplorasi, Dana PISP juga telah disalurkan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pembiayaan pembangunan PLTP *Small Scale* 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, dengan nilai sebesar USD17,5 juta. Sebagai salah satu instrumen fiskal, program percepatan pengembangan energi panas bumi melalui fasilitas *de-risking* memberikan potensi eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan eksplorasi. Pengeboran lokasi Jailolo yang direncanakan akan dimulai pada kuartal IV tahun 2025, dapat memberikan eksposur kepada APBN untuk melakukan penggantian (*revolving*) Dana PISP apabila terjadi risiko kegagalan eksplorasi. Dari sisi *likelihood*, berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50 persen, sehingga dari aspek *likelihood* risiko berada di level Mungkin.

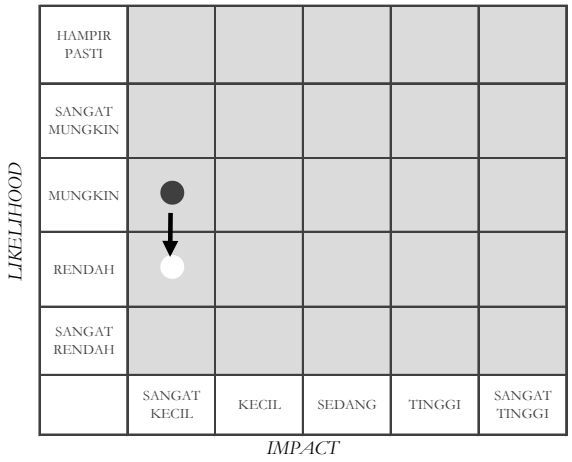
TABEL 6.5
RENCANA PEMBIAYAAN EKSPLORASI PANAS BUMI MELALUI DANA PISP

No.	Lokasi	Pembiayaan	Progres
1.	Jailolo, Malut	PISP dan *Geothermal Energy Upstream Development Project* (GEUDP) (Hibah Bank Dunia)	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2025.
2.	Wae Sano, NTT	PISP	Pengeboran direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2026.
3.	Cimanggu, Jawa Barat	PISP dan *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM) (Pinjaman Bank Dunia)	Sedang dalam tahap *assessment* proposal pembiayaan

Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa langkah mitigasi oleh Pemerintah atas risiko tersebut adalah sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja kegiatan ekplorasi secara presisi (2) pemantauan progress pelaksanaan kegiatan dukungan ekplorasi secara berkala bersama dengan Kementerian ESDM dalam forum komite bersama (3) mengoptimalkan sumber pembiayaan dengan skema *co-finance* Dana PISP dengan berbagai sumber dana eksternal seperti GEUDP dan GREM untuk meminimalkan dampak ke APBN dalam hal terjadi risiko kegagalan ekplorasi, (4) dan mengoptimalkan fungsi BUPI sebagai *ring-fence* APBN melalui penjaminan atas penanggungan dalam pemberian dukungan ekplorasi. Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Mungkin menjadi Rendah, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.31.**

GRAFIK 6.31
PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN PANAS BUMI



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Pengelolaan risiko berbasis neraca konsolidasi sektor publik memberikan gambaran secara holistik kondisi keuangan entitas sektor publik, yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan BUMN (BUMN Keuangan dan BUMN Nonkeuangan). Analisis risiko neraca konsolidasi sektor publik menggunakan pendekatan *Sovereign Asset Liability Management* (SALM), untuk mengevaluasi kesesuaian (*matching*) struktur aset dan kewajiban sektor publik dari aspek nilai, jangka waktu, jenis mata uang, dan atribut lain yang relevan. Analisis SALM juga mengidentifikasi eksposur mendadak (*sudden shock*) yang ditransmisikan entitas publik baik secara langsung maupun tidak langsung pada APBN.

Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi variabel perekonomian global dan domestik. Dari sisi global, risiko didorong oleh volatilitas harga komoditas di tengah konflik geopolitik, inflasi tinggi yang berkelanjutan, ketidakpastian pasar keuangan global, lambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara ekonomi utama, serta semakin intensifnya fragmentasi ekonomi. Kondisi dimaksud berpengaruh terhadap volatilitas indikator perekonomian seperti harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi.

Dari sisi domestik, ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan kondisi risiko eksternal. Aktivitas ekonomi nasional masih

didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, iklim investasi yang relatif kondusif, serta inflasi yang berada dalam kisaran yang terkendali. Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial yang disesuaikan dengan dinamika harga dan diarahkan untuk menopang konsumsi kelompok rentan. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas wilayah terus diupayakan guna menurunkan biaya logistik dan mendorong peningkatan daya saing perekonomian. Meskipun demikian, neraca perdagangan menghadapi tekanan seiring dengan perlambatan permintaan global terhadap ekspor nasional dan peningkatan impor barang modal dan jasa, yang berkontribusi terhadap potensi pelebaran defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, Bank Indonesia telah mulai melakukan pelonggaran kebijakan moneter secara bertahap, sejalan dengan terjaganya inflasi dan stabilitas nilai tukar. Penurunan suku bunga kebijakan diharapkan dapat mendukung pemulihan aktivitas ekonomi dan mengurangi beban pembiayaan, termasuk bagi sektor publik. Namun demikian, ketidakpastian global, termasuk dinamika suku bunga global, harga komoditas, dan tensi geopolitik, tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dengan berbagai risiko ketidakpastian, analisis risiko SALM dilakukan untuk mengukur ketahanan neraca konsolidasi sektor publik terhadap dinamika perekonomian tersebut. Secara spesifik, analisis dilakukan terhadap tiga risiko utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan nilai tukar.

1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

   Secara agregat, risiko likuiditas dan solvabilitas neraca konsolidasi sektor publik pada 2026 cukup stabil. Hal ini terlihat dari proyeksi *current ratio* sebesar 0,8 dan risiko solvabilitas sebesar 2,1. Hal ini menunjukkan kondisi neraca negara masih cukup aman, yang didukung oleh pengendalian defisit APBN. Meskipun terdapat dinamika pada ekonomi global yang dapat memengaruhi neraca konsolidasi sektor publik, secara umum neraca negara diproyeksikan masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban.

2. Risiko Nilai Tukar

   Dari perspektif neraca konsolidasi sektor publik, penambahan utang dalam valas oleh entitas sektor publik akan meningkatkan risiko nilai tukar akibat melebarnya gap antara kewajiban valas dengan aset valas, dimana saat ini terdapat *gap* sebesar US$27,8 miliar. *Gap* antara kewajiban valas dengan aset valas perlu dijaga, sehingga tidak melebar yang dapat berdampak pada kondisi solvabilitas neraca, dimana pelemahan nilai tukar akan meningkatkan valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi rupiah sebesar 10,0 persen akan menurunkan nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 0,4 persen.

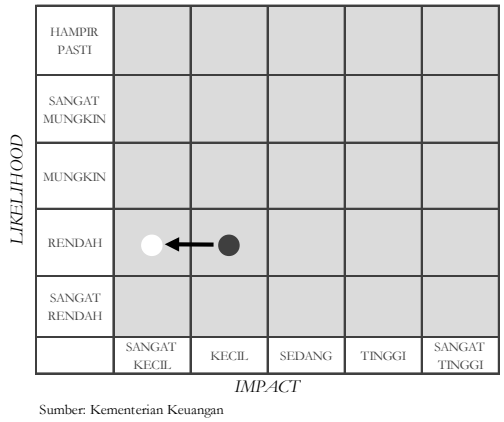
Meskipun terdapat dinamika pada beberapa parameter risiko di atas, secara umum neraca konsolidasi sektor publik masih memiliki aset yang lebih besar dari kewajiban, sehingga memiliki ekuitas (*net worth*) surplus. Hal ini antara lain didukung oleh pengendalian tingkat defisit yang dapat memperlambat pertumbuhan utang Pemerintah dan strategi pengelolaan cadangan devisa yang efektif.

Secara parsial, Pemerintah Umum, yang merupakan konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berkontribusi signifikan dalam komposisi aset dan kewajiban sektor publik. Berdasarkan analisis tren neraca Pemerintah Umum, terdapat risiko penurunan *Net Financial Worth* (NFW), di

mana total kewajiban melebihi aset keuangan. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum Triwulan I Tahun 2025 mencatat posisi NFW mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 3,3 persen (q-to-q), meskipun realisasi APBN periode berikutnya mencatat kinerja positif. Dinamika perekonomian global tetap perlu diwaspadai, akibat berlanjutnya konflik geopolitik dan kebijakan tarif agresif AS dan volatilitas kebijakan The Fed, dapat mendorong peningkatan imbal hasil SBN dan pada akhirnya berpotensi menambah beban pembayaran kewajiban utang serta memengaruhi struktur neraca pemerintah.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berasal dari global dan domestik, risiko fiskal pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali, dengan tingkat kemungkinan yang moderat. Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang diarahkan pada belanja produktif diproyeksikan mampu menjaga APBN tetap sehat dan *sustain*. Kewajiban pemerintah pusat yang terjadi saat periode pandemi dan akan jatuh tempo pada beberapa tahun mendatang berpotensi memperbaiki struktur kewajiban dan mendorong pertumbuhan positif NFW di tahun 2026. Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak risiko atas neraca konsolidasi sektor publik masuk dalam kategori kecil dengan *likehood* pada kategori rendah yang digambarkan pada **Grafik 6.32** berikut.

GRAFIK 6.32
PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK



Sumber: Kementerian Keuangan

Beberapa mitigasi risiko yang akan dilakukan dalam rangka menjaga neraca negara dalam kondisi sehat serta mengendalikan berbagai risiko terkait secara efektif, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, dan entitas sektor publik lain.
2. Penguatan tata kelola fiskal melalui revaluasi aset secara berkala, optimalisasi manajemen utang, serta akselerasi kebijakan pembiayaan inovatif melalui peran *Special Mission Vehicle* (SMV), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan sinergi dengan BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), serta badan hukum lainnya untuk mengurangi porsi pembiayaan dalam APBN dalam bentuk penerbitan utang.
3. Pengendalian utang Pemerintah Pusat dan BUMN melalui: (a) penerapan disiplin fiskal secara konsisten termasuk penarikan utang sesuai rencana; (b) penguatan pengelolaan risiko dan portofolio utang secara lebih aktif seperti *debt swap, buyback* dan *reprofiling*, serta memanfaatkan instrumen lindung nilai dan/atau *liability management*; (c) pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pembiayaan kreatif untuk mendorong partisipasi dana nonpublik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang APBN; dan (d) penguatan peran SMV sebagai *fiscal agency* serta sinergi bersama BUMN, BLU dan badan hukum lainnya dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Pengendalian eksposur risiko nilai tukar dan penguatan aset valas (cadangan devisa), akan dilakukan dengan melakukan berbagai upaya strategis seperti pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, perbaikan iklim investasi dan pariwisata, serta penerapan kebijakan lalu lintas devisa yang efektif.

6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal

Kesinambungan fiskal adalah kemampuan Pemerintah dalam mendanai agenda pembangunan nasional, merespons dinamika perekonomian global, dan menjawab tantangan struktural dengan tetap menjaga APBN sehat dan kredibel dalam jangka menengah-panjang. Risiko kesinambungan fiskal dapat terjadi ketika Pemerintah tidak mampu mengelola APBN secara efektif dan efisien secara berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang. Indikator utama yang digunakan untuk memonitor kesinambungan fiskal adalah defisit anggaran dan rasio utang. Pemerintah harus berupaya menjaga APBN tetap sehat sehingga dapat menjalankan fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi dalam jangka menengah-panjang.

6.2.5.1. Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal

Risiko global berpotensi menjadi sumber utama ketidakpastian dalam jangka menengah-panjang. Globalisasi yang bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara di triwulan pertama 2025 ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, orientasi "*inward looking*", dan prinsip "*my country first*". Kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun sejak pasca-Perang Dunia II mulai runtuh, sementara blok perdagangan dan investasi ditinggalkan. Akibatnya, rantai pasok global terganggu, risiko dan biaya transaksi meningkat, serta ekspor-impor melemah. Volatilitas global memicu arus ke luar modal asing, menekan nilai tukar, mendorong inflasi, dan memaksa sejumlah negara untuk mempertahankan suku bunga di level yang tetap tinggi.

Pemerintah terus berkomitmen mencapai Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur yang berlandaskan pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang difokuskan pada ketahanan pangan, ketahanan energi, efektivitas MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global harus ditopang dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan struktural harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu: (1) perubahan iklim yang perlu diantisipasi dan dimitigasi; (2) bonus demografi yang semakin terbatas; (3) pergeseran aktivitas ekonomi ke ekonomi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat; serta (4) perlunya penguatan kualitas SDM dan optimalisasi pengelolaan SDA.

6.2.5.2. Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah

Kesinambungan fiskal pascapandemi membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada kinerja fiskal. Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan pemulihan struktural yang kuat dan mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal jangka menengah. Pada tahun 2020, tantangan global akibat pandemi Covid-19 sempat menekan rasio pendapatan ke level 10,7 persen PDB, namun Pemerintah merespons dengan langkah cepat melalui berbagai strategi pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan yang terstruktur. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif pada tahun 2021 dengan rasio pendapatan negara meningkat menjadi 11,9 persen PDB, dan pada tahun 2022 melonjak signifikan menjadi 13,5 persen PDB yang merupakan capaian

tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kinerja ini tetap terjaga pada tahun 2023 dengan rasio pendapatan negara 13,4 persen PDB, dan pada tahun 2024 di angka 12,9 persen PDB.

Kinerja defisit anggaran dan keseimbangan primer pada tahun 2021-2024 mengalami penguatan dan dapat dikendalikan dalam batas aman. Kinerja defisit anggaran menunjukan tren penguatan mulai tahun 2021 setelah turun cukup dalam pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Tahun 2021, defisit anggaran tercatat pada level 4,57 persen PDB dan terus menguat sekaligus mencapai konsolidasi fiskal lebih cepat dengan tingkat defisit terkendali pada level 2,35 persen PDB pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, keseimbangan primer tahun 2022 menguat pesat mendekati level positif pada level negatif 0,38 persen PDB dibanding kinerja tahun 2021 sebesar negatif 2,5 persen PDB seiring dengan membaiknya kinerja fiskal didorong kondisi perekonomian yang mulai pulih. Pada tahun 2023, defisit mencapai level 1,61 persen PDB yang merupakan tingkat defisit terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Kinerja defisit tersebut diikuti dengan capaian keseimbangan primer positif sebesar 0,49 persen PDB yang didukung oleh kinerja penerimaan yang positif. Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi, defisit dan keseimbangan primer tahun 2024 mampu dijaga dalam batas aman yaitu masing-masing sebesar 2,29 persen dan negatif 0,09 persen PDB.

Selama periode 2021-2024, rasio utang terhadap PDB menunjukkan tren penurunan dan tetap berada pada level yang aman untuk mendukung target pembangunan. Pada tahun 2021, rasio utang berada pada level 40,7 persen PDB dipengaruhi oleh meningkatnya belanja untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Rasio utang terhadap PDB pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menurun pada level 39,7 dan 39,2 persen terhadap PDB seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan negara dan belanja produktif. Pada tahun 2024, rasio utang berada pada level 39,8 persen PDB.

6.2.5.3. Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan fiskal (*prudent and sustainable*). Pemerintah terus berkomitmen menjaga defisit dalam batas aman serta mengelola rasio utang terhadap PDB secara terkendali. APBN difungsikan secara optimal sebagai instrumen *countercyclical* untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran dalam merespons kebutuhan strategis. Efisiensi dan efektivitas belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak besar terhadap pemulihan dan transformasi ekonomi.

APBN tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan inovasi dan kualitas SDM, serta daya saing dan ketahanan nasional serta pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan fiskal juga ditujukan untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui empat strategi, yaitu:

1. Mobilisasi Pendapatan.

   Strategi ini dilakukan melalui penguatan efektivitas reformasi perpajakan yang berkesinambungan, penguatan peran *Coretax dan Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) dalam sistem perpajakan dan pelayanan, penyelarasan sistem perpajakan yang compatible dengan

perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global; pengelolaan SDA dan BMN; dan peningkatan efektivitas pemberian insentif fiskal yang dilakukan secara terukur.

2. Belanja efisien dan produktif.

   Strategi ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah dengan mengarahkan ke belanja yang lebih produktif; memperkuat belanja modal untuk mendukung program strategis dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, mengoptimalkan belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; melanjutkan reformasi subsidi dan bansos agar lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

3. Pembiayaan Inovatif, *Prudent* dan *Sustainable*.

   Strategi ini dilakukan dengan menjaga pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang ditempuh dengan: (1) mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *manageable*; (2) memberdayakan SMV, dan Badan Layanan Umum (BLU) serta sinergi dengan Danantara untuk mendukung agenda pembangunan; (3) memanfaatkan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian; (4) penguatan ketahanan fiskal melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien; dan (5) meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi.

4. *Collaborative risk mitigation*. Strategi menjaga kesinambungan fiskal disempurnakan melalui upaya penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan *buffer* untuk antisipasi ketidakpastian, memperkuat fleksibilitas fiskal, manajemen kas, serta kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah.

6.2.6. Risiko Fiskal Daerah

1. Risiko Inefisiensi Belanja Daerah

   Serapan belanja daerah cenderung lambat di awal tahun dan melonjak di akhir tahun, meskipun dalam dua tahun ini terdapat indikasi perbaikan yang terlihat dari besaran indeks pola belanja daerah. Indeks pola belanja daerah tersebut menunjukkan kenaikan dari 64,8 persen pada 2023 menjadi 65,5 persen di 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pola belanja berkat upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah daerah. Namun di tahun 2025 terdapat kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang menyebabkan berkurangnya besaran belanja pemerintah daerah. Hal ini kemudian mendorong pemerintah daerah melakukan *refocussing* anggaran dan menyesuaikan prioritas-prioritas belanjanya dan menyebabkan beberapa belanja terlambat di-*disburse*. Indeks pola belanja daerah (proyeksi sampai desember 2025) juga mengalami penurunan menjadi sebesar 65,3 persen di tahun 2025 sebagai dampak akibat hal ini.

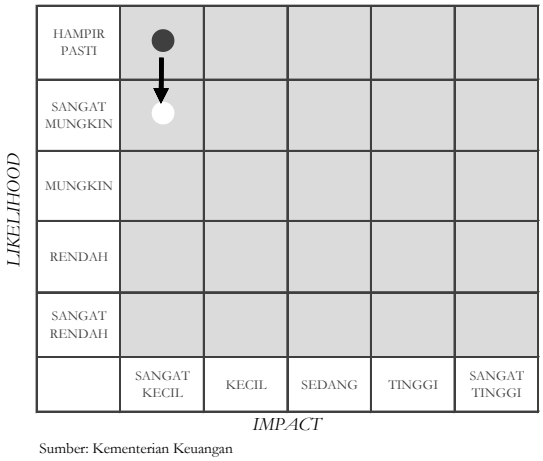
   Pemantauan pola belanja daerah krusial untuk meningkatkan kualitas belanja. Meskipun mengalami perbaikan, namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan belanja daerah masih kurang disiplin, efisien, dan akuntabel, serta cenderung *back loaded* (menumpuk di triwulan IV) yang akhirnya akan menghambat efek pengganda ekonomi di daerah. Dampaknya, secara tidak langsung penerimaan pajak dari transaksi pemerintah

daerah turut terpengaruh. Untuk menjawab fenomena ini, UU HKPD mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan berbasis kinerja agar belanja lebih responsif, optimal, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Beberapa strategi yang telah diterapkan untuk memitigasi risiko implementasi belanja daerah yang tidak efisien antara lain seperti harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dilakukan sesuai dengan prioritas pemerintah. Penyaluran transfer berbasis kinerja diterapkan dengan menekankan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan dan pelaporan dana. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana transfer difokuskan pada *output* dan *outcome* untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui regulasi dan tata kelola yang baik menjadi langkah penting dalam optimalisasi penggunaan dana. Ke depan, upaya perbaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah terus didorong, termasuk menyeimbangkan belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta mendorong perbaikan manajemen kas di daerah. Dengan implementasi strategi tersebut, diharapkan belanja daerah dapat lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi di atas dan beberapa mitigasi yang akan dilakukan dan direncanakan akan dilakukan di tahun 2026 serta tahun-tahun selanjutnya (jangka panjang) diharapkan akan terjadi perbaikan pola belanja daerah sehingga *likelihood* dan *impact* dapat membaik atau setidaknya tidak memburuk. Oleh karena itu, peta risiko potensi implementasi belanja daerah yang tidak efisien dapat dilihat pada **Grafik 6.33**.

GRAFIK 6.33
PETA RISIKO FISKAL INEFISIENSI BELANJA DAERAH



Sumber: Kementerian Keuangan

2. Risiko Kontinjensi Pembiayaan Utang Daerah

Salah satu bentuk risiko fiskal yang perlu diwaspadai adalah risiko kontinjensi yang bersumber dari kewajiban pembayaran kembali atas berbagai bentuk utang daerah. Risiko ini tidak terbatas pada pinjaman daerah dari PT SMI, tetapi juga mencakup kewajiban jangka pendek lainnya seperti pinjaman kepada lembaga keuangan bank maupun nonbank, utang belanja, utang PFK, dan bentuk kewajiban jangka pendek lainnya. Gagal bayar atau tidak terbayarnya kewajiban tersebut umumnya disebabkan oleh pengelolaan likuiditas dan solvabilitas kas daerah yang kurang optimal. Ketika likuiditas daerah terganggu, maka penyelesaian kewajiban atas utang-utang tersebut berpotensi terhambat, sehingga menimbulkan gejolak di daerah. Gejolak di daerah ini bisa merambat ke permintaan tambahan pendanaan dari pusat oleh pemerintah daerah. Dalam kasus pinjaman dari PT SMI (Persero), apabila mekanisme pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pelunasan pinjaman tidak mencukupi, maka dana jaminan penugasan perlu digunakan untuk menutup kekurangan. Apabila dana jaminan penugasan juga tidak mencukupi, maka berpotensi diperlukan

tambahan pembiayaan dari APBN untuk menjaga keberlangsungan kewajiban pembayaran tersebut.

Strategi mitigasi risiko kontinjensi pembiayaan utang daerah mencakup penguatan penilaian untuk persetujuan utang secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi alokasi anggaran pemda untuk pembayaran pokok dan bunga. Selain itu, peningkatan *risk awareness* di kalangan Pemda didorong agar mitigasi risiko dapat dilakukan sejak dini. Sinergi dengan SMV juga diperkuat untuk meminimalkan risiko pinjaman daerah melalui pemantauan alokasi pembayaran dalam APBD, penilaian keuangan dan kesesuaian proyek dengan prioritas pemerintah, serta peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam pengelolaan pinjaman dan risiko fiskal guna menjaga *cash flow* APBD.

Dalam melakukan estimasi besaran risiko pinjaman daerah, perhitungan dilakukan dengan melihat selisih antara *golden cash ratio* terhadap *cash ratio actual* masing-masing pemerintah daerah. *Cash ratio* sendiri adalah perbandingan atas total kas dan setara kas dibagi dengan total kewajiban lancar. Sedangkan golden cash ratio adalah rasio ideal *cash ratio* yaitu lebih dari atau sama dengan 1. Selisih antara *golden cash ratio* dan aktual *cash ratio* kemudian dikalikan dengan besaran kewajiban lancar masing-masing daerah sehingga didapat potensi dampak risiko pinjaman daerah secara umum. Berdasarkan simulasi dan proyeksi dengan data sampai dengan Semester I tahun 2025 potensi risiko adalah sebesar Rp22.578,1 Miliar dan ini merupakan penurunan bila dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp32.515,0 Miliar. Secara detail, komposisi dampak risiko pinjaman (utang) daerah berdasarkan data per Semester I tahun 2025 dan data per Desember 2024.

TABEL 6.6
KOMPOSISI DAMPAK RISIKO PINJAMAN DAERAH PER SEMESTER I TAHUN 2025

Current Ratio	Jumlah Pemda	Dampak (miliar rupiah)
>1	344	0
0,5-1	65	2.554,20
<0,5	126	20.023,90
Total	**535**	**22.578,10**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6.7
KOMPOSISI DAMPAK RISIKO PINJAMAN DAERAH PER DESEMBER 2024

Current Ratio	Jumlah Pemda	Dampak (miliar rupiah)
>1	307	0
0,5-1	68	2.639,80
<0,5	160	29.875,20
Total	**535**	**32.515,00**

Sumber: Kementerian Keuangan

Bab 7

Kerangka Anggaran Jangka Menengah

BAB 7
KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH

7.1. Pendahuluan

Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara modern yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesinambungan fiskal. Dalam era ketidakpastian global yang kian kompleks, pengelolaan anggaran negara tidak lagi cukup dilakukan dengan pendekatan jangka pendek atau satu tahun saja. Perencanaan fiskal membutuhkan perspektif yang lebih luas dan berjangka menengah agar kebijakan yang ditempuh Pemerintah tidak sekadar responsif, tetapi juga mampu memberikan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan konsisten. Dengan adanya KAJM, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilakukan dengan landasan makro-fiskal yang lebih solid, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penyusunan KAJM diperkuat melalui kerangka hukum yang kokoh yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola negara harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini juga mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, yang menjadi payung hukum terbaru dalam memperkuat implementasi kerangka penganggaran jangka menengah. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berbasis kinerja, berorientasi hasil, dan memanfaatkan instrumen KAJM untuk mengukur kemampuan fiskal dalam mendukung prioritas pembangunan sekaligus menjaga disiplin anggaran.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023, KAJM disusun dengan horizon waktu lima tahun ke depan setiap masa awal Pemerintahan Presiden baru. Namun, pada tahun kedua sampai dengan tahun ke lima pemerintahan dimaksud, KAJM disusun dengan horizon waktu empat tahun. Meskipun terdapat perbedaan horizon periode penyusunan KAJM, setiap tahun akan selalu ada penyesuaian KAJM. Dengan demikian, setiap penyusunan APBN tahunan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari kerangka fiskal jangka menengah. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah untuk mengantisipasi dinamika perekonomian global dan domestik, sekaligus memberikan kepastian arah kebijakan fiskal bagi pemangku kepentingan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan horizon jangka menengah, Pemerintah dapat lebih realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, mengendalikan defisit dan utang, serta memastikan program prioritas pembangunan nasional mendapat alokasi pendanaan yang memadai dan berkesinambungan.

Salah satu fungsi KAJM adalah untuk meningkatkan akuntabilitas melalui keterpaduan antara rencana jangka menengah dengan tahun yang direncanakan sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan publik dan investor atas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, KAJM juga dapat membantu meminimalkan risiko kebijakan, dengan menekankan pentingnya disiplin fiskal serta kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, keberadaan KAJM tidak hanya memperkuat proses penganggaran, tetapi juga memperkokoh fondasi fiskal Indonesia dalam menghadapi tantangan jangka panjang, termasuk agenda menuju Indonesia Emas 2045.

Ke depan, penerapan KAJM akan terus diperkuat sehingga dapat menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti eskalasi ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Melalui desain yang fleksibel namun disiplin, KAJM memungkinkan Pemerintah menjaga ruang fiskal yang memadai untuk merespons gejolak, sekaligus tetap berkomitmen pada prioritas pembangunan nasional. Dengan landasan hukum yang kuat dan mekanisme yang semakin matang, KAJM menjadi instrumen kunci dalam memastikan APBN tidak hanya menjadi dokumen keuangan tahunan, melainkan juga alat strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 – 2029

Dalam jangka menengah, akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai melalui penguatan investasi, khususnya investasi asing langsung (FDI), serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Investasi memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, Pemerintah telah membentuk BPI Danantara sebagai pengelola aset strategis, khususnya dari BUMN. Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengelola investasi aset dan dana Pemerintah secara produktif, sekaligus meningkatkan peran swasta baik domestik maupun asing dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM menjadi agenda utama guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan kapasitas produksi nasional. Transformasi menuju ekonomi hijau juga terus didorong melalui pemanfaatan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, guna membangun fondasi pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Peningkatan produktivitas menjadi faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, yang perlu didukung oleh reformasi regulasi, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Dengan langkah strategis yang konsisten dan adaptif, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, pengelolaan ekspektasi inflasi menjadi elemen penting dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk periode 2025 - 2027 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 sebagai bentuk komunikasi publik untuk memperkuat ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar. Di samping itu, penguatan program ketahanan pangan terus didorong guna menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan akses yang merata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas juga berperan penting dalam menurunkan kesenjangan harga antarwilayah serta menjaga

kestabilan inflasi dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran yang sama hingga tahun 2029, sehingga ekspektasi pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga.

Pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah diperkirakan tetap dipengaruhi oleh faktor global dan fundamental domestik yang saling berinteraksi. Meredanya ketidakpastian global serta penyesuaian kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat, diperkirakan akan memberikan ruang bagi penguatan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Di sisi domestik, kelanjutan reformasi struktural, hilirisasi industri, dan peningkatan investasi langsung diharapkan mendorong penguatan kinerja transaksi berjalan dan meningkatkan cadangan devisa. Penguatan ekspor berbasis manufaktur dan sumber daya alam bernilai tambah tinggi juga akan mendukung stabilitas eksternal. Di samping itu, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga akan memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Arus modal masuk, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung, diperkirakan akan meningkat seiring membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat secara bertahap dalam jangka menengah.

Yield SBN 10 tahun dalam jangka menengah diproyeksikan bergerak stabil dengan kecenderungan menurun secara bertahap, seiring meredanya tekanan eksternal dan membaiknya persepsi risiko fiskal domestik. Stabilitas makroekonomi, pengelolaan fiskal yang berhati-hati, serta kebijakan pembiayaan yang terdiversifikasi akan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pasar obligasi. Dari sisi eksternal, ekspektasi penurunan suku bunga global serta menurunnya tekanan inflasi global akan memperkuat daya tarik surat utang negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, keberlanjutan kebijakan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas penerimaan negara akan mendukung kredibilitas fiskal, yang pada akhirnya akan menekan premi risiko dan menurunkan yield SBN. Penguatan pasar keuangan domestik, termasuk pendalaman pasar SBN dan peningkatan partisipasi investor domestik, turut menopang kestabilan yield SBN. Dengan pengelolaan fiskal yang disiplin dan koordinasi kebijakan yang erat antara otoritas fiskal dan moneter, yield SBN diperkirakan tetap terkendali dan berkontribusi pada efisiensi pembiayaan utang dalam jangka menengah.

Perkembangan geopolitik di kawasan produsen utama minyak, kebijakan produksi dari negara-negara OPEC+ dan mitranya, serta ketidakpastian ekonomi global menjadi elemen penting yang dipantau secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah dalam jangka menengah memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Di sisi lain, tren transisi energi menuju penggunaan energi bersih dan terbarukan juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap permintaan global atas minyak mentah dalam jangka menengah. Dalam konteks tersebut, harga ICP diperkirakan akan bergerak dalam kisaran yang stabil namun tetap diwarnai potensi fluktuasi yang perlu diantisipasi.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berhati-hati, dengan mengelola risiko harga minyak secara terukur agar tidak menimbulkan tekanan terhadap postur APBN. Pengelolaan asumsi harga ICP yang realistis menjadi penting untuk menjaga akurasi perhitungan pendapatan

dan belanja negara dari sektor migas. Dengan strategi kebijakan yang *prudent*, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ketahanan APBN terhadap gejolak eksternal, dan tetap mendukung kesinambungan pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam jangka menengah.

Dalam jangka menengah, peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi akan menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas melalui akselerasi transformasi sektor hulu, khususnya dengan mendorong investasi pada lapangan migas baru, pemanfaatan teknologi *Enhanced Oil Recovery* untuk meningkatkan produksi minyak sumur tua, dan pengembangan wilayah kerja laut dalam serta wilayah timur Indonesia yang masih memiliki potensi cadangan besar. Penguatan kebijakan fiskal melalui skema insentif keekonomian proyek, kepastian hukum, dan penyederhanaan proses perizinan juga dapat menarik minat investor, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek migas strategis. Selama periode 2026–2030, *lifting* minyak mentah diperkirakan mengalami peningkatan bertahap seiring dengan implementasi kebijakan strategis di sektor hulu migas. Pemerintah terus mendorong percepatan proyek strategis migas, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta pemberian dukungan fiskal, dan penyederhanaan perizinan untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas. Seluruh strategi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan pasokan energi domestik, memperkuat ketahanan energi nasional, serta transformasi ekonomi jangka menengah menuju visi Indonesia Emas 2045. Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dalam jangka menengah dapat dilihat pada **Tabel 7.1**.

TABEL 7.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO,
2026 – 2029

Indikator	APBN 2026	Proyeksi		
		2027	2028	2029
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,4	5,3-5,9	5,6-7,0	5,8-8,0
Inflasi (%, yoy)	2,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata)	16,500	15.700-16.900	15.700-16.900	15.700-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata)	6,9	6,3-7,0	6,0-7,0	6,0-7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata)	70	60-80	60-80	60-80
Lifting Minyak (rbph)	610	599-685	622-789	654-907
Lifting Gas (rbsmph)	984	946-1126	1027-1326	1113-1535

Sumber: Kementerian Keuangan

7.3. Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2026 - 2029

Untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera, dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi kebijakan agar dapat menghadapi dinamika perekonomian, menjawab tantangan, serta mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kondisi perekonomian global hingga saat ini masih

dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang tinggi, terutama akibat terjadinya perang dagang. Di samping itu, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural yang harus direspons secara tepat, terukur, dan konsisten yaitu: (1) makin terbatasnya bonus demografi; (2) aktivitas ekonomi yang bergeser ke ekonomi digital dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat; (3) perlunya peningkatan kualitas SDM dan tata kelola SDA; serta (4) perubahan iklim yang kian ekstrem. Situasi ini memerlukan desain kebijakan fiskal yang dalam jangka pendek, mampu meredam gejolak secara efektif serta dalam jangka menengah, dapat mendukung agenda pembangunan secara optimal. Selanjutnya, diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi bangsa sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi kebijakan fiskal jangka menengah perlu disusun dengan konsisten untuk mendorong transformasi ekonomi-sosial yang membutuhkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, strategi fiskal jangka menengah ditujukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera yang fokus utamanya menyasar pada: (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) efektivitas MBG; (4) pendidikan bermutu; (5) kesehatan berkualitas; (6) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (7) penguatan pertahanan semesta; serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Pertama, penguatan ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, stabilisasi harga pangan, serta mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Indonesia, dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, menghadapi tantangan besar untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Peningkatan krisis pangan global sebagai akibat dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, dan dinamika geopolitik dunia mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan sistem ketahanan pangan. Selain itu, Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan terhadap impor pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, daging sapi, dan susu, berisiko tinggi terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi ekonomi fiskal jangka menengah akan fokus pada penguatan produksi domestik, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan terutama petani dan peternak.

Kedua, ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan konsep tersebut, strategi peningkatan ketahanan energi dijalankan dengan meningkatkan produksi *lifting* migas, menjaga stabilitas harga, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, serta mempercepat pengembangan ekonomi hijau. Ketahanan energi memiliki dampak signifikan dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor energi merupakan sumber dari penerimaan negara, bahan bakar kegiatan masyarakat, dan kegiatan ekonomi dari hulu sampai dengan hilir. Ketahanan energi dilihat dari empat kategori yaitu: (1) ketersediaan yaitu ketika negara memiliki akses ke sumber energi secara berkelanjutan; (2) aksesibilitas yaitu didukung iklim investasi yang kondusif; (3) keterjangkauan secara harga; serta (4) akseptabilitas yaitu tersedianya sumber energi yang beragam dan berkelanjutan atau energi hijau.

Ketiga, program MBG merupakan program unggulan Pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,

khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini sekaligus berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, serta penguatan SDM Indonesia. Dengan pendekatan menyeluruh, efektivitas MBG diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal. Selain itu, penyelenggaraan MBG juga merupakan bagian dari strategi Pemerintah di bidang pendidikan dan berpotensi berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan.

Keempat, program pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun SDM unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Pendidikan yang bermutu juga berperan penting dalam membangun karakter, meningkatkan daya saing, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memutus mata rantai kemiskinan, dan mengasah *critical thinking* sebagai bekal untuk menuju visi Indonesia Emas 2025. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah menyiapkan langkah komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia baik dari sisi kualitas guru, infrastruktur fisik, serta anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan terus dioptimalkan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, peningkatan *link and match*, mendorong penguatan PAUD, serta mendukung berbagai penguatan program unggulan antara lain Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat.

Kelima, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM. Strategi untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas ditempuh dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan melindungi keuangan masyarakat sehingga beban biaya kesehatan masyarakat berkurang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan sepanjang hayat, mulai dari dalam kandungan hingga lansia antara lain dengan menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemeriksaan kesehatan, JKN, serta layanan kesehatan bagi lansia.

Keenam, penguatan peran desa, koperasi, dan UMKM dalam pembangunan terus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Pembangunan desa dari desa dan dari bawah merupakan prioritas nasional jangka menengah dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar publik, termasuk perumahan dan pemukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas. Dalam rangka meningkatkan peran UMKM dan koperasi, Pemerintah menyusun strategi kebijakan jangka menengah, yang mencakup: (1) peningkatan produktivitas melalui pengembangan sektor produksi serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM; serta (2) penguatan sistem pengawasan seiring dengan perluasan akses terhadap perizinan, pembiayaan, pelatihan berbasis kompetensi, serta digitalisasi UMKM dan Koperasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi UMKM dan koperasi dalam rantai nilai komoditas unggulan nasional dan mendorong peningkatan mutu produk.

Ketujuh, penguatan pertahanan semesta dipersiapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Strategi penguatan pertahanan semesta, antara lain:

(1) modernisasi Alpalhankam untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara; (2) meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri; (3) memperkuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, termasuk penambahan Batalyon dan Komando Daerah Militer (KODAM); (4) penguatan area Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *Air Defence Identification Zone* (ADIZ), dan skenario area *Choke and Flash Point;* (5) memperkuat keamanan siber; (6) memperkuat diplomasi international prajurit TNI; serta (7) memperkuat penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penguasaan teknologi,

Kedelapan, akselerasi investasi dan perdagangan global dilakukan dengan strategi komprehensif untuk menarik investasi produktif dalam rantai nilai global, antara lain reformasi struktural dengan deregulasi dan kemudahan perizinan melalui *omnibus law,* konsolidasi perizinan, dan digitalisasi layanan. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal seperti *tax allowance* dan *tax holiday* untuk industri padat karya dan industri energi terbarukan, serta pembiayaan inovatif dana sosial syariah dan obligasi hijau. Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lembaga pengelola aset negara dan manajer investasi Pemerintah untuk memperkuat upaya percepatan di sisi investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

7.4. Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Tahun 2026 – 2029

Dalam menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan nasional, strategi mobilisasi pendapatan negara menjadi kunci. Upaya ini ditempuh melalui penguatan efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN), serta pemberian insentif fiskal yang lebih terarah dan terukur untuk mendorong akselerasi investasi.

Pendapatan negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi global dan domestik, dinamika geopolitik, perubahan struktur ekonomi, serta transisi demografi. Di samping itu, volatilitas harga komoditas turut menentukan besarnya penerimaan dari sektor sumber daya alam.

Untuk menjamin keberlanjutan fiskal, kebijakan reformasi pendapatan negara yang konsisten akan memainkan peran strategis dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan difokuskan pada optimalisasi sumber penerimaan negara dengan tetap menjaga keseimbangan antara iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Beberapa langkah konkret yang akan terus dilanjutkan meliputi penguatan reformasi perpajakan, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran untuk mendukung transformasi ekonomi, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis perpajakan, serta penyesuaian sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi nasional dan praktik perpajakan internasional. Di sisi lain, reformasi pengelolaan SDA dan aset negara juga terus diperkuat melalui inovasi layanan serta peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan negara pada jangka menengah diproyeksikan akan terus meningkat hingga dapat mencapai 12,86 - 16,76 persen dari PDB di tahun 2029 seiring dengan prospek perekonomian nasional yang diperkirakan semakin meningkat.

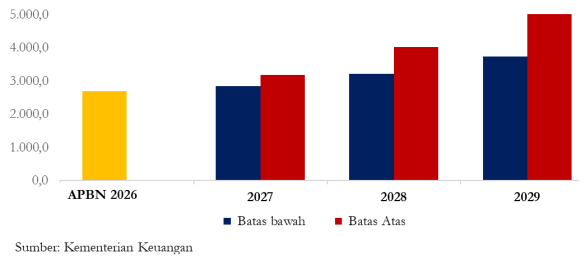
7.4.1. Penerimaan Perpajakan

Framework perpajakan dalam pengelolaan fiskal senantiasa menjaga keseimbangan antara perpajakan sebagai instrumen untuk optimalisasi pendapatan, mengendalikan eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan

untuk menciptakan keadilan, serta mendorong daya saing melalui pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan perpajakan diarahkan untuk mendorong optimalisasi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara. Transformasi ini didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (*coretax system*) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju. Secara bersamaan, arah kebijakan tetap difokuskan pada pembangunan ekosistem perpajakan yang berkeadilan, tangguh, dan inklusif. Di sisi lain, Pemerintah juga berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global. Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 - 15,01 persen terhadap PDB sebagaimana ditunjukkan dalam **Grafik 7.1**.

GRAFIK 7.1
PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN JANGKA MENENGAH 2026-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Stabilitas ekonomi makro domestik yang terjaga di tengah ketidakpastian global menjadi penopang kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir. Penerimaan pajak akan diupayakan mencapai tax *buoyancy* di atas 1. Pemerintah akan terus berkomitmen menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi. Penguatan kepercayaan publik dilakukan melalui mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem *Coretax*. Selain itu, Pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis.

Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI). Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan. Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 10,48 - 13,95 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

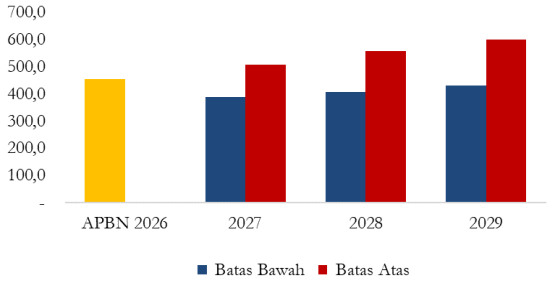
Sementara itu, peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal. Digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan terus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Implementasi *Customs*

Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan *National Logistic Ecosystem* (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional. CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses *customs clearance*, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara *end-to-end* dalam satu ekosistem digital yang efisien. Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko (*risk-based audit*) yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal. Upaya tersebut juga didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi BKC. Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2029 akan diupayakan terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1 persen terhadap PDB.

7.4.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP diposisikan sebagai instrumen penting dalam struktur penerimaan negara dan akan terus diakselerasi pemanfaatannya dalam jangka menengah, meskipun terdapat risiko eksternal seperti volatilitas harga komoditas, terutama pada sektor SDA yang berkontribusi signifikan. Pemerintah akan memperkuat tata kelola PNBP melalui pendekatan berbasis data dan peningkatan kapabilitas sistem, guna mendukung penyediaan layanan publik yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, PNBP pada tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 1,33 - 1,76 persen terhadap PDB. Proyeksi jangka menengah PNBP dapat dilihat pada **Grafik 7.2**.

GRAFIK 7.2
PROYEKSI PNBP JANGKA MENENGAH, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Kinerja Pendapatan SDA dalam jangka menengah masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas terutama harga minyak bumi dan gas bumi, serta mineral dan batubara. Pendapatan SDA migas akan terus dioptimalkan antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan *lifting* migas, pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas serta meningkatkan monitoring, evaluasi, pengawasan, transparansi, penggalian potensi melalui penggunaan teknologi, dan digitalisasi proses bisnis. Sementara itu, pendapatan SDA nonmigas secara umum masih diarahkan pada langkah optimalisasi pendapatan baik dari sektor pertambangan mineral, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor panas bumi. Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan antara lain meliputi peningkatan kualitas pengelolaan PNBP SDA melalui pengawasan/pemeriksaan serta penguatan sinergi antarinstansi melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) dan *Automatic Blocking System* (ABS), penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri, perbaikan serta peningkatan tata kelola dan pengawasan SDA untuk kawasan hutan,

optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui penyempurnaan kebijakan serta perbaikan tata kelola, serta penguatan regulasi maupun tata kelola pengusahaan panas bumi. Langkah kebijakan optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap dilakukan dengan menjaga keseimbangan dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi keadilan antargenerasi.

Pendapatan KND akan difokuskan pada optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas sejalan dengan perpindahan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara. Upaya optimalisasi penerimaan tersebut dilakukan melalui perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN dengan tetap mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi dan *covenant*.

PNBP Lainnya dalam jangka menengah terutama pada layanan K/L akan diarahkan pada pengembangan sistem lebih lanjut untuk mempercepat administrasi dan mengurangi inefisiensi, evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBP serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBP, optimalisasi penagihan dan memperkuat pengelolaan piutang melalui ABS PNBP, optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset/ BMN, dan peningkatan sinergi antar instansi Pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta digitalisasi layanan publik.

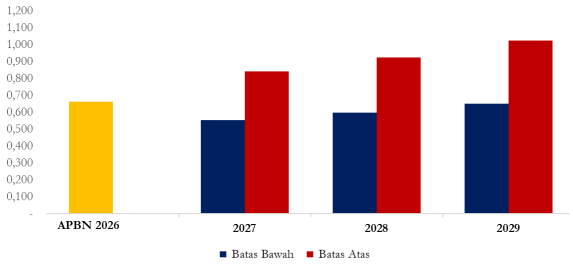
Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga akan terus dioptimalkan dan diarahkan melalui digitalisasi layanan dan efisiensi keuangan, transformasi infrastruktur yang mendukung ekonomi berkelanjutan, optimalisasi serta diversifikasi sumber pendapatan, hingga inovasi skema pembiayaan dan peningkatan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

7.4.3. Penerimaan Hibah

Dalam jangka menengah, pengelolaan penerimaan hibah diarahkan secara proaktif dan terencana untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Karakteristik hibah yang bersifat sukarela membuka ruang kolaborasi strategis dengan para donor, untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pemanfaatan hibah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional untuk menjamin sinergi yang konstruktif dan berkelanjutan. Sementara itu, hibah yang tidak terencana, baik dari dalam maupun luar negeri, tetap dapat dimanfaatkan secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dilaporkan secara transparan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penerimaan hibah juga mencakup program yang bersifat berkelanjutan atau *multiyears*, dengan fokus pada isu-isu strategis sesuai agenda pembangunan berkelanjutan seperti transformasi ekonomi, penanggulangan perubahan iklim, pengurangan emisi di kawasan perkotaan, serta pelestarian keanekaragaman hayati dan hutan. Proyeksi penerimaan hibah tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 disajikan dalam **Grafik 7.3**.

GRAFIK 7.3
PROYEKSI HIBAH JANGKA MENENGAH, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

7.5. Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara Tahun 2026 – 2029

7.5.1. Belanja Pemerintah Pusat

Untuk mendukung pencapaian target Prioritas Nasional, antara lain ditempuh melalui peningkatan efektivitas BPP. Dalam tata kelola BPP di jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen menekankan pentingnya efisiensi belanja dan memberikan alokasi yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kebijakan BPP dalam jangka menengah diarahkan untuk terus memperkuat daya saing Indonesia, meningkatkan ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik dan program pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, menurunkan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, melanjutkan reformasi subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Anggaran BPP memiliki peran penting sebagai instrumen Pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam jangka menengah, arah kebijakan BPP berpedoman pada RPJMN tahun 2025-2029, yang merupakan implementasi tahap pertama RPJPN tahun 2025-2045. Untuk itu, anggaran BPP dijabarkan ke dalam upaya-upaya transformatif belanja sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN tahun 2025-2045. Tahapan pertama dalam proses transformasi tersebut meliputi:

1. Transformasi Sosial

Menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia Indonesia yang lebih produktif.

2. Transformasi Ekonomi

Melanjutkan beberapa kebijakan strategis, antara lain: (1) hilirisasi dan revitalisasi industri berbasis sumber daya alam (antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, perikanan dan kelautan) yang memiliki keunggulan komparatif, kemampuan daya saing, dan mampu memperluas kesempatan kerja; (2) meningkatkan kapasitas riset dan inovasi sebagai basis penyusunan kebijakan strategis; (3) melanjutkan penerapan kebijakan energi hijau dan pelaksanaan transisi energi; (4) memenuhi kebutuhan akses pelayanan digital di seluruh wilayah Indonesia; dan (5) melanjutkan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan yang diutamakan di luar pulau Jawa.

3. Transformasi Tata Kelola

Memperkuat fungsi kelembagaan, meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit, menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Mengembangkan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, menjaga

tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar keamanan nasional. Mewujudkan demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif, penguatan diplomasi, dan membangun kekuatan pertahanan yang berorientasi kepulauan dan kemaritiman dengan industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Meningkatkan karakter manusia dengan mengoptimalkan nilai agama dan budaya serta peran keluarga, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), dan mengakselerasi penurunan emisi gas rumah kaca.

6. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Meningkatkan pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi, mempercepat pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital, melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan menuntaskan pemenuhan layanan dasar berkualitas, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

7. Kesinambungan Pembangunan

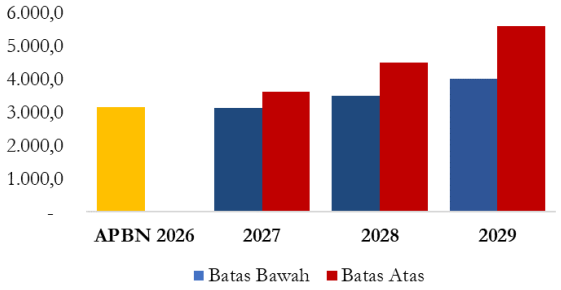
Melanjutkan kebijakan reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non Pemerintah.

Untuk mewujudkan proses transformasi tersebut, pada tahun kedua dari periode RPJMN 2025-2029, intervensi kebijakan BPP berorientasi pada penguatan program-program kerakyatan dan juga tetap berpedoman pada delapan prioritas nasional yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi hijau; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; serta (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penjabaran atas delapan prioritas nasional tersebut secara umum melalui: (1) peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, digitalisasi birokrasi, serta pola

fleksibel untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan produktivitas Pemerintahan, menjaga kesejahteraan ASN/TNI/Polri, dan melaksanakan keberlanjutan reformasi program pensiun; (2) melanjutkan kebijakan penajaman belanja operasional, pemanfatan teknologi untuk efisiensi belanja, penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya, dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memberdayakan industri dalam negeri dan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional; (3) memprioritaskan belanja pada program-program prioritas dan strategis yang mendukung kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing, penguatan pemanfataan teknologi pada belanja modal untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertahanan, serta mengutamakan belanja modal dengan komponen dalam negeri yang tinggi untuk mendukung kemandirian industri; (4) melakukan pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, dan mendorong pendalaman pasar Surat Berharga Negara yang lebih aktif dan likuid; (5) mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN agar bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan kualitas implementasi program utama bantuan sosial seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan PBI Jaminan Kesehatan guna memastikan kecukupan nilai manfaat, dan sinergi kebijakan bantuan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian yang lebih berkelanjutan; dan (6) melakukan reformasi kebijakan subsidi dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran subsidi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN, daya beli masyarakat, dan kondisi perekonomian nasional. Proyeksi BPP jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.4**.

GRAFIK 7.4
PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

7.5.1.1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Arah kebijakan BPP jangka menengah selanjutnya dijelaskan ke dalam kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan kebijakan Belanja Non Kementerian/Lembaga (Belanja Non-K/L)

1. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja K/L Pada Jangka Menengah

Belanja K/L jangka menengah difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat antara lain: membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah; menyelenggarakan cek kesehatan gratis, menuntaskan kasus TB, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas; jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; penyediaan rumah murah bersanitasi baik; penegakan hukum, serta kemudahan berusaha. Pemanfaatan belanja K/L juga difokuskan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, energi dan digital, khususnya yang mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, ketahanan pangan dan swasembada air, melaksanakan percepatan perluasan MBG; melaksanakan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM;

melakukan penguatan pertahanan semesta; serta peningkatan investasi dan perdagangan.

Beberapa bentuk intervensi belanja K/L pada jangka menengah sesuai dengan tujuh agenda transformasi dalam RPJMN, antara lain:

1) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Transformasi Sosial

Proyeksi kebijakan strategis dalam rangka transformasi sosial di jangka menengah secara umum dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Di bidang pendidikan secara umum difokuskan pada penguatan pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik. Pada aspek pendidikan dasar dan menengah, antara lain akan dilaksanakan: (1) perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan; (2) penguatan kualitas pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan masyarakat; (3) penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun pra sekolah; (4) penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan; (5) penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta; (6) penguatan pemanfaatan teknologi; (7) penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;(8) peningkatan kualitas pendidikan vokasi; (9) pemerataan akses pendidikan, dilihat dari tingkat penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang (MA/Ulya/ SMTK/SMAK/ Uttama) dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi; dan (10) pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan bahasa. Pada aspek kependidikan tinggi, akan dilaksanakan (1) keberlanjutan KIP Kuliah, (2) Beasiswa Pendidikan Tinggi, (3) Beasiswa Pendidikan Indonesia, (4) Magang Berdampak dan Program Kreativitas/Prestasi Mahasiswa, (5) Program Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Penguatan Kelembagaan untuk transformasi perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Akreditasi Wajib, (7) Pengembangan Sekolah Unggul Garuda, (8) Pembangunan Infrastruktur dan Peralatan yang meliputi pelaksanaan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta, dan (9) Pengembangan *Science Techno Park* (*STP*). Penguatan intervensi di bidang pendidikan di jangka menengah ini juga akan didukung dengan mewujudkan sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional dan penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif. Langkah yang dilakukan antara lain dengan mewujudkan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal, melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional, serta tetap melanjutkan pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar.

Pada bidang kesehatan, beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain adalah peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan penguatan pelayanan kesehatan, yang didukung dengan peningkatan kualitas tata kelolanya melalui transformasi layanan primer, layanan lanjutan, sistem ketahanan kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan teknologi kesehatan. Penguatan bidang kesehatan ini juga akan didukung dengan: (1) penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans; (2) perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang

tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (3) penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (4) peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM; dan (5) peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Kemudian pada bidang perlindungan sosial, akan dilaksanakan: (1) penguatan data tunggal terintegrasi yang ter*update* secara dinamis; (2) kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah; (3) pengembangan *care economy* melalui perluasan keterlibatan *care giver*; (4) kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan swasta, BUMN, dan filantropi; (5) penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial; (6) penyediaan pelayanan pendidikan fakir miskin melalui Sekolah Rakyat; (7) integrasi pemberdayaan KPM masyarakat lintas K/L; (8) penguatan unit layanan sosial sebagai *centre of excellence*; dan (9) pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan meningkatkan peranan kartu kesejahteraan.

2) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Transformasi Ekonomi

Untuk mempercepat transformasi ekonomi, beberapa kebijakan strategis di jangka menengah disusun kembali dengan menata ulang arah kebijakannya, dan disertai dengan penguatan, dan penajaman. Beberapa kebijakan strategis tersebut antara lain dengan melakukan percepatan investasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, pengembangan dan pembangunan infrastruktur konektivitas, serta hilirisasi industri, dan melaksanakan proses penguatan dan transisi energi.

Untuk percepatan investasi, antara lain akan dilaksanakan: (1) penguatan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor; (2) pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*); (3) pengoptimalan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam; (4) penguatan tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal; (5) penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran; (6) mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri; (7) mendukung pemetaan potensi dan peluang penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan realisasi penanaman modal; (8) meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan negara-negara potensial dan *stakeholders* terkait; dan (9) memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif, guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan peran dalam *Global Production Network* (*GPN*) dan *Global Value Chain* (*GVC*).

Dari sisi pemanfaatan hasil riset dan inovasi, akan dilaksanakan: (1) penguatan tata kelola riset yang terintegrasi untuk memastikan seluruh kegiatan riset lintas sektor, kementerian/lembaga, dan daerah berjalan secara sinergis di bawah satu sistem nasional yang terpadu; (2) peningkatan kualifikasi dan kapasitas manajemen talenta nasional riset dan inovasi melalui beberapa program seperti program talenta riset unggul, *talent pool* SDM riset unggul (*degree by research*), *research assistant*, *postdoctoral*, *visiting research fellow/ visiting professor*, *joint research/research visit*, serta peningkatan jumlah peneliti dengan kualifikasi

doktoral; (3) peningkatan kontribusi riset terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional, antara lain sektor pangan, kesehatan, transisi energi berkeadilan, industri manufaktur berbasis teknologi tinggi, dan pembangunan berkelanjutan; (4) hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri, serta perluasan mekanisme lisensi dan *spin-off* hasil riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, dan (5) transformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem riset nasional yang akan terus dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen riset terpadu, penguatan basis data riset nasional, keterbukaan data dan hasil riset (*open data* dan *open science*), serta reformasi birokrasi tematik berbasis kinerja.

Untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, antara lain akan dilaksanakan:

(1) Ketahanan Pangan dan Air

Dilakukan dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, waduk, dan embung, dimana kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan air baku dan mendukung produktivitas pertanian. Kebijakan tersebut mencakup pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi dari hulu ke hilir, penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis *City-Wide Inclusive Sanitation* (*CWIS*), dan penguatan tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan.

(2) Menghubungkan Wilayah dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Program pembangunan jalan diarahkan untuk menghubungkan sentra ekonomi di wilayah-wilayah potensial seperti kawasan pertanian, industri kecil, dan destinasi wisata unggulan, termasuk akses ke perbatasan dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain memperluas akses, juga akan diperkuat kebijakan penanganan *Over Dimension Over Loading* (*ODOL*) serta program keselamatan jalan nasional. Melalui penguatan jaringan transportasi darat, dimana waktu tempuh di lintas utama ditargetkan turun hingga 1,7 jam per 100 km pada tahun 2029, serta menjadikan konektivitas sebagai katalis pemerataan ekonomi antarwilayah. Selain peningkatan konektivitas antarwilayah, kebijakan ini juga mencakup dukungan percepatan hilirisasi industri melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung di dalam dan luar kawasan industri, sehingga manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh sektor riil.

(3) Memperkuat Layanan Dasar dan Dukungan bagi Pendidikan Masyarakat

Peranan pembangunan infrastruktur juga diperkuat dalam mendukung pemerataan layanan dasar, termasuk air minum, sanitasi, dan persampahan, terutama di wilayah tertinggal dan kawasan pendidikan masyarakat (Sekolah Rakyat). Kebijakan diarahkan untuk membangun 30 daerah tertinggal melalui peningkatan akses layanan dasar, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pengembangan pembangunan perkotaan berkelanjutan juga menjadi fokus penting — untuk mendorong kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan pada 10 lokasi prioritas wilayah metropolitan dan 40 lokasi prioritas non-metropolitan yang berpotensi menjadi simpul pertumbuhan wilayah.

(4) Mendorong Transisi menuju Ekonomi Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan

Pengembangan dan pembangunan infrastuktur juga akan diperkuat guna mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular melalui reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini berjalan berdampingan dengan pengembangan *City-Wide Inclusive Sanitation* dan sistem SPAM regional, untuk memastikan seluruh rantai layanan — dari sumber air, distribusi, hingga pengolahan limbah — dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, juga akan turut didorong pembangunan infrastruktur hijau yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata, termasuk di 13 lokasi destinasi wisata prioritas nasional seperti Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, dan Borobudur. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan lingkungan di kawasan wisata dan perkotaan.

(5) Meningkatkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Guna merespons atas adanya peningkatan risiko hidrometeorologi, akan ditempuh kebijakan penguatan pengendalian banjir di wilayah padat penduduk, pengamanan pantai dan wilayah pesisir, serta pengendalian daerah rawan longsor dan aliran lahar. Kebijakan ini juga terintegrasi dengan upaya pengelolaan sumber daya air dan sanitasi berketahanan iklim, serta pembangunan sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem. Dengan demikian, setiap infrastruktur yang dibangun tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan iklim jangka panjang.

Pada aspek hilirisasi, dan melaksanakan proses penguatan dan transisi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029, antara lain akan dilaksanakan penguatan pembangunan sumber daya manusia industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi industri, penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai rantai pasok industri, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi, transformasi industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan aglomerasi industri melalui Kawasan Industri. Hilirisasi tersebut dilakukan dengan memperkuat pasokan energi nasional, membangun ekosistem energi bersih, mengembangkan potensi geologi, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pelayanan publik berbasis teknologi. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan pasokan energi, ekosistem energi bersih, wisata geologi, dan *net zero emission*, dengan mendorong penguatan kemandirian energi, dan industrialisasi nasional yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan energi bersih, hilirisasi mineral strategis, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang adaptif.

Pada jangka menengah, kebijakan juga akan diarahkan untuk mendorong pengelolaan energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dalam negeri, perluasan akses energi bersih, serta pengembangan sumber daya manusia kompeten dalam mendukung transisi energi dan hilirisasi sumber daya mineral. Arah kebijakan ini berfokus pada pengelolaan energi, efisiensi, investasi energi baru dan terbarukan, keterjangkauan energi, serta pemanfaatan sumber daya manusia. Untuk mempercepat transisi energi dan hilirisasi sumber daya dengan memperkuat pasokan energi nasional,

akan dibangun suatu ekosistem energi yang bersih, dikembangkan potensi geologi, dan ditingkatkan daya saing sumber daya manusia serta pelayanan publik berbasis teknologi.

3) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Transformasi Tata Kelola

Kebijakan penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan di jangka menengah antara lain melanjutkan penyusunan *grand design* Reformasi Birokrasi Nasional, percepatan transformasi digital Pemerintah, penyusunan kebijakan pelaksanaan UU ASN, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, kebijakan dan penerapan standarisasi pelayanan publik dan pelayanan inklusif. Selain itu juga melanjutkan kegiatan advokasi kebijakan dan pembinaan terhadap para analis kebijakan, yang diharapkan dapat mendorong terjadinya transformasi tata kelola. Transformasi ini juga berfokus pada pengembangan SDM aparatur negara karena menjadi kunci dalam melaksanakan agenda pembangunan sehingga tingkat kompetensi dan keterampilan mereka menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik, kebijakan di jangka menengah juga diarahkan untuk mendorong instansi Pemerintah untuk menjadi organisasi pembelajar dengan cara membangun budaya belajar pegawainya. Dari aspek kelembagaan, Pemerintah juga akan menyusun media pembelajaran melalui pusat unggulan (*center of excellence*) yang dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Di samping itu, implementasi atas sistem pembelajaran terintegrasi di Lembaga Pelatihan Pemerintah akan terus dipantau dengan menekankan pola pembelajaran yang digunakan melalui pendekatan *formal learning* (10 persen), *social learning* (20 persen) dan *experiential learning* (70 persen).

Hal lain yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan transformasi sistem penggajian. Kemudian mendorong *human capital management* ASN berbasis digital melalui strategi: percepatan digitalisasi manajemen ASN, termasuk interoperabilitas sistem informasi ASN dan *HR analytics.*

4) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Pada jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan keamanan dalam negeri, penguatan intelijen, dan penanggulangan terorisme; penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; penguatan keamanan insani, perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia; penguatan keimigrasian; serta pencegahan dan penanggulangan narkoba. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan keterpaduan penegakan hukum demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, meningkatkan efektivitas penyuluhan dan penerangan hukum, menegakkan hukum yang adil, transparan dan berorientasi pada *restorative justice*, meningkatkan manfaat ekonomi dalam pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, serta membangun budaya hukum dan HAM dalam mewujudkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat. Hal lain yang akan dilakukan untuk memperkuat stabilitas keberlangsungan pembangunan, juga dilakukan dengan penguatan stabilitas ekonomi makro guna menjamin bahwa seluruh agenda

pembangunan dapat didukung pendanaannya berdasarkan kapasitas fiskal yang ada.

Dari sisi stabilitas pertahanan dan keamanan, kebijakan pertahanan di jangka menengah diarahkan untuk: (1) mewujudkan postur pertahanan negara yang memenuhi kekuatan pokok TNI yang optimal (*optimum essential force*); (2) mewujudkan wilayah perbatasan, wilayah perairan, wilayah yurisdiksi laut, laut lepas, dan wilayah udara serta daerah rawan yang bebas baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa; (3) mewujudkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera; (4) meningkatkan sinergi Kementerian/ Lembaga dan Pemda dalam menghadapi segala ancaman; (5) pengelolaan sumber daya pertahanan, dan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara; (6) mewujudkan Industri Pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam, (7) meningkatkan pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global; dan (8) mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan bidang pertahanan yang baik.

Dari sisi ketertiban dan keamanan, kebijakan pada jangka menengah diarahkan untuk: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif; (2) penegakan hukum yang humanis, akuntabel, dan berkeadilan; (3) pengembangan dan pengelolaan SDM yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh; dan (4) penyediaan infrastruktur yang berdaya guna dan modern.

Untuk pembangunan budaya hukum guna mewujudkan masyarakat sadar hukum, dilakukan antara lain melalui: (1) meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan hukum masyarakat; (2) meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum; (3) pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat; (4) penegakan hukum yang adil dan transparan; (5) optimasi layanan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum; dan (6) meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha.

Guna meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam forum kerjasama ekonomi dan politik pada tataran regional dan internasional, kebijakan yang akan digulirkan di jangka menengah, antara lain melalui: (1) penguatan integritas kedaulatan NKRI dan diplomasi ketahanan nasional; (2) peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi tawar Indonesia; (3) peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia; (4) peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, berkesinambungan, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia; (5) peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia; (6) peningkatan keterlibatan aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional; (7) peningkatan diplomasi *soft power* dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional; dan (8) penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

Guna menjaga stabilitas ekonomi dari sisi makro fiskal dalam jangka menengah, kebijakan

yang akan dilaksanakan antara lain dengan mendorong: (1) peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi pendapatan negara, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBP; (2) optimalisasi belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja negara dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat *countercyclical* dalam rangka percepatan investasi publik; dan (3) perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif yang dikelola secara *prudent* dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

5) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Kebijakan di jangka menengah untuk mendukung ketahanan sosial, budaya dan ekologi antara lain akan melaksanakan: (1) peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana, kompetensi guru dan pendidik, dan bantuan dan beasiswa pendidikan, serta sinkronisasi kurikulum dan konten pendidikan; (2) peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama, termasuk upaya penyediaan anggaran yang memadai pada fungsi agama; (3) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, seperti intensifikasi dialog antar agama, penanganan konflik yang lebih cepat, dan penggunaan platform digital dalam rangka upaya pengukuhan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan penguatan moderasi beragama pada seluruh lapisan masyarakat; (5) melaksanakan koordinasi strategis implementasi peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan; (6) melakukan koordinasi strategis implementasi UU Tindak pidana kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan (7) melaksanakan koordinasi strategis implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Kebijakan lainnya yang perlu diperkuat adalah perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan ekologi melalui pelibatan langsung peran masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen mengglulirkan beberapa kebijakan, antara lain: (1) peningkatan kontribusi sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup yang dapat berkontribusi pada peningkatan PDB melalui peningkatan produksi kayu bulat, kayu olahan, hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekspor kayu olahan; (2) pemanfaatan ekonomi sumber daya alam hayati (bioprospeksi) serta peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH); (3) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies, pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan, dan manajemen sumber daya genetik keanekaragaman hayati; (4) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan pengurangan dan penanganan sampah; (6) peningkatan dan penyadartahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas Bank Sampah dan Mitra *Reduce, Reuse, Recycle* (3R); (7) pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan sampah, penyediaan standar, dan fasilitas pengelolaan sampah; (8) melakukan konservasi sumber daya air dalam rangka penyediaan air berkelanjutan; (9) peningkatan resiliensi terhadap bencana hidrometeorologi; dan (10) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor hutan dan lahan serta sampah dan limbah.

6) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Kebijakan yang akan dilaksanakan di jangka menengah untuk pengembangan wilayah antara lain: (1) peningkatan konektivitas yang menghubungkan daerah potensial dengan kawasan regional maupun internasional untuk mendukung daya saing ekonomi, percepatan pembangunan kewilayahan, dan kedaulatan nasional; (2) peningkatan efektivitas konektivitas *backbone* antar pulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan; (3) pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi; (4) peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik sebagai bagian dari pelayanan dasar; (5) pemenuhan (*compliancy*) standar teknis sarana dan prasarana transportasi; dan (6) peningkatan konektivitas (antara lain peningkatan jalan di kawasan Trans Papua, perbatasan, dan 3T guna memberikan aksesibilitas bagi masyarakat, penanganan jalan akses menuju pelabuhan, bandara, dan terminal, dan pembangunan jalan tol trans Jawa, Non Trans Jawa, Jabodetabek, dan Trans Sumatera).

Untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan wilayah tengah dan timur Indonesia serta sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah barat, antara lain dengan melanjutkan pembangunan IKN yang difokuskan pada: (1) pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun; (2) pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegritas; (3) pembangunan awal klaster-klaster ekonomi prioritas; (4) pemenuhan kebutuhan ASN, pegawai lembaga negara/badan publik, serta personel pertahanan dan keamanan; (5) pengembangan layanan kesehatan unggulan; (6) pengembangan program kota hutan melalui rehabilitasi hutan dan konservasi alam, pembangunan koridor dan pusat konservasi satwa; dan (7) penciptaan ruang terbuka hijau dan pembangunan lanjutan persemaian.

7) Intervensi Belanja K/L Dalam Rangka Mendukung Kesinambungan Pembangunan

Untuk mendukung kesinambungan pembangunan di jangka menengah, Pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan tetap melanjutkan peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang semakin adaptif dan tepat sasaran. Kebijakan ini juga didukung dengan perluasan MBG, memperkuat ketahanan pangan, swasembada air, ketahanan energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital. Selain itu, intervensi belanja juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya UMKM dan koperasi, serta pengembangan industri kreatif untuk memberi peluang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif diarahkan menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Untuk memastikan bahwa proses kesinambungan seluruh pembangunan tersebut tetap terjaga, perlu pula didukung dengan stabilitas ekonomi makro, ketertiban, pertahanan dan keamanan, serta supremasi hukum menjadi prasyarat yang diperlukan dan harus diperkuat.

2. Strategi Kebijakan Fiskal Belanja Non-K/L Pada Jangka Menengah

Program Pengelolaan Subsidi

Kebijakan program pengelolaan subsidi jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) pelaksanaan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (5) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Kebijakan Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi pembayaran atas kewajiban Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi kebutuhan belanja pegawai; dan (5) antisipasi keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Kebijakan BPP pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain difokuskan untuk: (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk aparatur negara; (2) memenuhi pembayaran kontribusi sosial dalam rangka pembayaran manfaat pensiun kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri; (3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah pada lembaga/organisasi internasional dan *trust fund* dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah di tingkat internasional; (4) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema KPBU dan/atau skema pembiayaan lainnya, baik berupa dana dukungan kelayakan (*Viability Gap Fund*/VGF) maupun dana fasilititas penyiapan proyek (*Project Developmen Fund*/PDF) dengan prioritas pada sektor-sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (urban) seperti sektor air, perumahan, kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, dan transportasi perkotaan; (5) mendukung pembangunan IKN; dan (6) melaksanakan pembayaran selisih harga beras Bulog yang merupakan pembayaran atas selisih antara harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog dengan tunjangan beras dalam bentuk natura.

Program Pengelolaan Hibah

Program Pengelolaan Hibah difokuskan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2 "*Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru*", di mana pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing merupakan alat diplomasi politik, diplomasi ekonomi, dan diplomasi sosial budaya yang bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional, yaitu: (1) mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di berbagai penjuru dunia; (3) meningkatkan posisi dan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional; (4) meningkatkan peran Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh; dan (5) mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar mempromosikan produk, keahlian, dan

teknologi dalam negeri, serta meningkatkan peluang investasi di luar negeri.

7.5.1.2. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

1. Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi Pelayanan Umum dalam jangka menengah diarahkan pada: (1) peningkatan kinerja birokrasi dan mutu pelayanan publik; (2) penguatan transparansi informasi dan komunikasi kepada masyarakat; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pembinaan, pengembangan kompetensi, dan penyempurnaan manajemen aparatur sipil negara; (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan belanja daerah; serta (5) penguatan diplomasi ekonomi, kerja sama internasional, dan pelindungan WNI di luar negeri. Anggaran pada fungsi Pelayanan Umum tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang semakin baik, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

2. Fungsi Pertahanan

Fungsi Pertahanan dalam jangka menengah difokuskan antara lain untuk: (1) modernisasi alutsista/alpalhankam untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara dan meningkatkan daya gentar Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kawasan regional dan global; (2) meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor peralatan militer dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri; (3) memperkuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, termasuk penambahan untuk Batalyon dan Komando Daerah Militer (KODAM); (4) penguatan area ALKI, *Air Defence Identification Zone* (ADIZ), dan skenario area *Choke and Flash Point*; (5) memperkuat keamanan siber dalam menjaga ketahanan negara di era digital; (6) penguatan diplomasi internasional prajurit TNI; dan (7) penguatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta penguasaan teknologi.

3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Dalam melaksanakan Fungsi Ketertiban dan Keamanan jangka menengah, maka K/L terkait akan memfokuskan antara lain untuk: (1) memperkuat Polri dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) mendukung pemenuhan almatsus Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) memantapkan kemampuan dan profesionalisme personil Polri dalam rangka melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas termasuk pencegahan pelanggaran dan penanggulangan aksi radikal, kriminalitas, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (5) membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; (6) penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan (7) terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur konektivitas yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan; (2) mendorong penciptaan lapangan kerja melalui hilirisasi industri, percepatan investasi, dan perdagangan global; (3) meningkatkan

ketahanan energi melalui ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan akseptabilitas yang mendukung EBT dan pengembangan ekonomi hijau; (4) meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, terutama yang mendukung program prioritas antara lain di bidang ketahanan pangan, energi, dan swasembada air; (5) mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan dalam mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan, dan kesejahteraan petani/nelayan melalui penguatan infrastruktur pertanian dan lumbung pangan, serta bantuan sarana prasarana pertanian/perikanan; (6) melaksanakan transformasi subsidi energi lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat, serta mengelola belanja subsidi (energi dan non-energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya.

5. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka menengah akan diarahkan antara lain untuk: (1) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim; (3) pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; dan (4) penguatan pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pengelolaan sampah, penurunan emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dalam jangka menengah akan diarahkan pada: (1) pengembangan perumahan; (2) pengembangan permukiman; (3) peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; dan (4) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui antara lain: (1) pengelolaan perumahan publik vertikal yang terpadu; (2) penyelenggaraan revitalisasi perkotaan; (3) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; (4) penyediaan akses air siap minum perpipaan; (5) penyediaan akses sanitasi aman; (6) pembangunan sistem pengolahan persampahan; dan (7) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

7. Fungsi Kesehatan

Kebijakan Fungsi Kesehatan yang akan ditempuh Pemerintah dalam jangka menengah diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas bidang kesehatan dan mendukung transformasi sistem kesehatan antara lain melalui: (1) peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program JKN; (2) penguatan upaya promotif-preventif dengan cek kesehatan gratis dan mendorong kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat; (3) peningkatan akses, ketersediaan, kualitas dan aspek keadilan dalam memperoleh pelayanan kesehatan; (4) peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur kesehatan di daerah; (5) peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil/menyusui dan balita; (6) peningkatan kemandirian farmasi; dan (7) pemerataan dan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan.

8. Fungsi Pariwisata

Kebijakan penganggaran fungsi pariwisata di jangka menengah akan berfokus dukungan pada 6 (enam) arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Adapun 6 (enam) arah kebijakan pengembangan

pariwisata tersebut adalah sebagai berikut: (1) berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan pariwisata yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata, dengan fokus pada peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja pariwisata. Kebijakan ini mencakup 3 Sasaran Program (SP) yakni Terserapnya tenaga kerja pariwisata di destinasi prioritas dan regeneratif, termanfaatkannya kerja sama dan kebijakan strategis bidang kepariwisataan dan meningkatnya kapabilitas SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri; (2) difokuskan pada pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata. Pendekatan pengembangan dilakukan dengan mengutamakan kesiapan destinasi menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam 20 besar *Travel and Tourism Development Index* (*TTDI*) dunia. Dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata berpedoman pada 4 (empat) pilar utama yaitu pengelolaaan destinasi yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan pelestarian budaya, dan keberlanjutan pelestarian lingkungan. Pariwisata berkelanjutan diterapkan pada semua jenis destinasi dan semua aktivitas wisata agar pengelolaan dan pengembangan destinasi, dan wisatawan yang berkunjung lebih bertanggung jawab; (3) menitikberatkan pada pengembangan industri dan investasi pariwisata yang berkualitas yang diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata khususnya pada indikator rasio PDB sektor pariwisata. Fokus utama dari arah kebijakan ini adalah mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan dan berkualitas melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan pelaku usaha secara menyeluruh, dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir; (4) pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata berkualitas dirancang untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata, khususnya melalui indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memperkuat citra pariwisata Indonesia di pasar global dan domestik melalui strategi promosi yang terintegrasi, inovatif, dan inklusif. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan utama *leisure*/rekreasi; (5) mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata, terutama pada indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama arah kebijakan ini adalah menarik wisatawan dengan tujuan utama bisnis, melalui penguatan ekosistem *event* pariwisata dan pengembangan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (*MICE*). Fokus program dalam arah kebijakan ini mencakup penguatan dan penyelenggaraan event berbasis kekayaan intelektual, di mana setiap kegiatan dikembangkan dari karya budaya, kuliner, seni pertunjukan, cerita rakyat, serta produk kreatif unggulan Indonesia yang memiliki nilai komersial sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. *Event-event* tersebut dikurasi secara selektif untuk merepresentasikan karakter lokal dan meningkatkan daya saing budaya Indonesia di tingkat global. Hal ini

diwujudkan melalui Program Karisma *Event* Nusantara (KEN) dimana pemerintah berupaya meningkatkan kualitas kurasi *event* daerah agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas budaya; dan (6) difokuskan pada tata kelola birokrasi untuk pembangunan pariwisata yang berkualitas serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Transformasi birokrasi menjadi kunci dalam kebijakan ini, dengan menekankan pentingnya dampak kinerja strategis di tingkat pemerintahan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh.

9. Fungsi Agama

Kebijakan penganggaran pada fungsi agama di jangka menengah, akan berfokus pada dukungan peningkatan peran masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik moderasi beragama, ditandai dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam membangun kehidupan beragama yang moderat dan harmonis. Kemudian juga akan berfokus pada peningkatan layanan keagamaan yang transformasional, dengan tolok ukur Indeks Layanan Keagamaan. Layanan ini mencakup aspek kemudahan, kualitas, dan keterjangkauan dalam memenuhi kebutuhan umat beragama.

10. Fungsi Pendidikan

Kebijakan Fungsi Pendidikan dalam jangka menengah diarahkan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan, antara lain: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) dengan pengembangan korelasi antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi yang berorentasi *teaching industry*, perguruan tinggi, korporasi dan balai pelatihan (antara lain pelatihan di BLK, pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan; (8) penguatan *talent and skill* untuk industri berbasis teknologi tinggi, energi terbarukan, dan pembangunan industri farmasi; (9) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi; (10) pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Unggul, Sekolah Rakyat serta revitalisasi sarana prasarana sekolah dan madrasah; dan (11) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

11. Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi Perlindungan Sosial merupakan belanja yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemerintah konsisten mengarahkan belanja Fungsi Perlindungan Sosial untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dalam jangka menengah-panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan

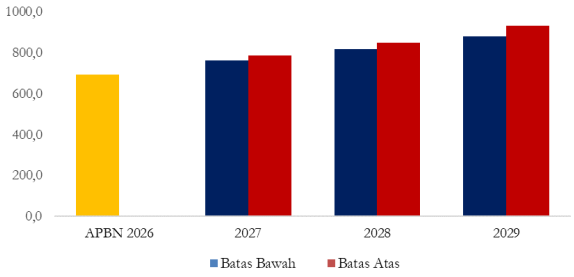
melaksanakan transformasi sosial dimana salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemenuhan perlindungan sosial melalui penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah kebijakan Fungsi Perlindungan Sosial akan dilaksanakan antara lain melalui: (1) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (2) inklusi sosial untuk kesejahteraan disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya; (3) reformasi pensiun melalui keseimbangan iuran dan manfaat; (4) reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran; (5) pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya; serta (6) peningkatan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

7.5.2. Transfer Ke Daerah

Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung tujuan dimaksud, kebijakan pengelolaan TKD dalam jangka menengah akan diarahkan untuk: (1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal dan isu strategis nasional; (2) *enforcement* pemenuhan Pemerintah daerah untuk belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, antara lain bidang pendidikan; (3) *refocusing* pemanfaatan belanja *mandatory* oleh daerah untuk penguatan akses dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan (4) sinergisitas program dan kebijakan dengan belanja K/L maupun program Pemerintah yang relevan.

Mempertimbangkan hal tersebut, pada periode jangka menengah, Pemerintah akan terus melakukan penguatan pengelolaan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang tetap fokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, proyeksi TKD jangka menengah dapat dilihat pada **Grafik 7.5**.

GRAFIK 7.5
PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH JANGKA MENENGAH, 2026 - 2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, alokasi DBH diformulasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya (T-1). Alokasi DBH dalam jangka menengah akan mengikuti perkembangan penerimaan negara yang dibagihasilkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Fokus dari kebijakan DBH pada periode jangka menengah akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance* dan untuk mengatasi eksternalitas

negatif. Kebijakan DBH pada jangka menengah juga akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah daerah, antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan termasuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah berkomitmen menjaga pemanfaatan DAU dalam jangka menengah untuk mampu mendukung daerah dalam memberikan layanan dasar publik yang memenuhi standar pelayanan minimal dan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. Kebijakan penyaluran berbasis kinerja akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa DAU sebagai salah satu sumber utama keuangan dalam APBD dapat digunakan dengan optimal dalam mencapai output layanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta layanan umum bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus berinovasi dan menyempurnakan kebijakan penyaluran DAU berbasis kinerja agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien. Tata kelola dan tata laksana penyaluran DAU akan terus diupayakan dengan penyederhanaan syarat salur sehingga terwujud mekanisme penyaluran yang lebih efektif dan optimal ke daerah.

Kebijakan DAU pada periode jangka menengah difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja layanan publik daerah melalui sinergi dengan program prioritas nasional melalui kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*specific grant*). DAU yang Ditentukan Penggunaannya ditujukan untuk memberikan dukungan pencapaian daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal layanan publik bidang pendidikan, dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, akses, dan pemerataan layanan pendidikan di daerah. Dalam bidang kesehatan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya diharapkan mampu memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan.

Dalam jangka menengah, DAK Fisik diproyeksikan tetap direncanakan untuk mendukung prioritas nasional dan pembangunan infrastruktur di daerah. Kebijakan alokasi DAK Fisik tersebut sejalan dengan kinerja positif realisasi penyaluran dan penyerapan DAK Fisik dan kebermanfaatan *output* dan *outcome* DAK Fisik. Selanjutnya, DAK Nonfisik dalam jangka menengah akan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional diantaranya penguatan pelayanan dasar publik prioritas, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan.

Hibah kepada Daerah diproyeksikan berfluktuasi dalam periode jangka menengah. Kebijakan pengalokasian Hibah kepada Daerah pada periode jangka menengah diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; (3) penanganan pemulihan infrastruktur pasca bencana alam; dan (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar K/L untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada periode jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang pendidikan, kesehatan,

dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif; (2) perbaikan perencanaan dengan capaian *output* yang terukur mengacu kepada rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan papua; (3) pengalokasian Dana Otsus memperhatikan variabel yang mendorong peningkatan kinerja tata kelola Pemerintahan yang baik; (4) peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta infrastruktur penunjang pengembangan sentra Pemerintahan Daerah Otonomi Baru; (5) keberlanjutan prioritas program strategis bersama yang sinergi antara provinsi/kabupaten/kota terutama penajaman dan perbaikan kualitas program, antara lain pembenahan tata kelola beasiswa SUP; (6) perluasan dan peningkatan cakupan jaringan dan aksesibilitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (7) penguatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penggunaan Dana Otsus; (8) peningkatan kualitas tata kelola Dana Otsus yang menerapkan sistem informasi terintegrasi melalui mekanisme interoperabilitas; serta (9) penguatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BPK, dan perguruan tinggi negeri.

Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada jangka menengah diarahkan untuk: (1) melakukan penajaman capaian *output* penggunaan yang terukur sesuai dengan rencana induk penggunaan Dana Keistimewaan; (2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan Dana Keistimewaan terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antardaerah; serta (3) meningkatkan sinergi kebijakan Dana Keistimewaan dengan rencana kerja K/L.

Pada periode jangka menengah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, kebijakan Dana Desa diarahkan untuk: (1) mendukung kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan, potensi, dan karakteristik desa; (2) mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan keberpihakan serta pemberian insentif bagi kinerja desa; (3) mengoptimalkan sinergitas dukungan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan sumber pendanaan lainnya; (4) meningkatkan strategi dan kualitas perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa melalui penguatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah desa, Pemerintah daerah, dan K/L; serta (5) mendukung implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang saling terkoneksi sesuai dengan kewenangan. Kebijakan pengelolaan Dana Insentif Fiskal pada jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong iklim kompetisi antardaerah dan konsistensi peningkatan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, dan pelayanan dasar; (2) menyelaraskan indikator kinerja dan penggunaan Dana Insentif Fiskal sesuai dengan kebijakan APBN dan prioritas nasional; dan (3) mendorong perbaikan pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.

7.6. Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2026 – 2029

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen utama

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyadari tantangan pengelolaan fiskal yang ada, Pemerintah memandang perlunya optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan ruang fiskal, pentingnya mendorong agar belanja semakin efisien dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta terus mendorong inovasi pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. Di tengah kondisi global dan dinamika pengelolaan fiskal, pembiayaan anggaran merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan keuangan negara melalui APBN. Salah satu peran pembiayaan anggaran adalah menutup *financing gap*, yaitu selisih antara pendapatan negara yang belum cukup dengan kebutuhan belanja untuk melaksanakan agenda pembangunan Pemerintah dengan tetap menjaga koridor defisit di bawah tiga persen terhadap PDB sebagaimana amanat peraturan perundangan yang berlaku. Rincian pembiayaan anggaran jangka menengah terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Terkait penerbitan utang jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan portofolio utang dengan risiko yang dapat ditoleransi. Dalam mewujudkannya, pengadaan utang baru diarahkan untuk memprioritaskan dalam mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan tenor menengah-panjang. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang agar sesuai koridor yang ditetapkan dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah, yaitu dengan menjaga prinsip pengelolaan utang yang mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan untuk menjaga momentum pertumbuhan perekonomian; (2) prinsip efisien, yaitu melakukan pengadaan utang baru dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta diversifikasi instrumen utang; serta (3) prinsip seimbang, yaitu menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal dengan menyeimbangkan antara biaya dan risiko.

Kebijakan umum pengelolaan utang dalam periode jangka menengah 2026-2029 dilakukan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara untuk: (1) mengendalikan utang dalam batas aman dan *manageable;* (2) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka pendek, menengah, dan panjang; (3) pengelolaan utang senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terukur, serta mendorong pembiayaan inovatif yang *sustainable* dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan (4) menerbitkan SBN dengan biaya dan risiko yang optimal dan terkendali serta menjaga prinsip transparansi dan integritas pasar serta disiplin fiskal.

Pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2025 – 2029 berfokus pada antara lain: (1) pengelolaan pembiayaan investasi untuk mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta energi baru terbarukan; (2) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF, serta (3) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada BUMN sebagai *agent of development*.

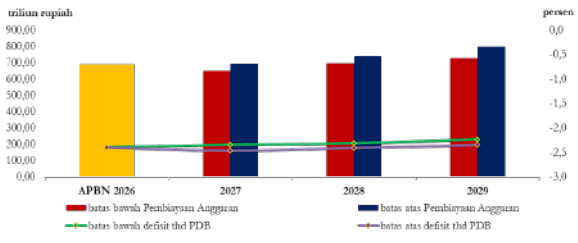
Pemberian pinjaman periode tahun 2026-2029 digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pencapaian target SDGs, serta mendorong penyelesaian proyek-proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan guna mendukung target kemandirian energi Indonesia pada Asta Cita Presiden RI 2025-2029 melalui transisi energi Indonesia dari semula bergantung pada bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Terkait dukungan terhadap pengembangan energi baru terbarukan, pemberian pinjaman akan disalurkan untuk pendanaan proyek konstruksi dan eksplorasi panas bumi (PLTP) serta pembangunan PLTA. Sedangkan terkait infrastruktur, pemberian pinjaman untuk proyek konstruksi MRT Jakarta merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam penyediaan alternatif moda transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dan berstandar internasional. Prakiraan maju penyaluran pemberian pinjaman dilakukan secara proporsional berdasarkan rencana kerja pelaksanaan proyek yang menjadi objek pendanaan pemberian pinjaman.

Dalam jangka menengah, pengelolaan penjaminan Pemerintah bertujuan untuk: (1) melakukan perhitungan batas maksimal penjaminan; (2) menilai risiko penjaminan yang dapat berpotensi membebani APBN; (3) memantau dan memitigasi risiko penjaminan Pemerintah; dan (4) memastikan akurasi dan kelengkapan dari data dalam rangka pelaporan dan akuntansi. Ruang lingkup kewajiban penjaminan oleh Pemerintah adalah untuk proyek atau program strategis Pemerintah mencakup infrastruktur maupun noninfrastruktur dengan Batas Maksimum Penjaminan Pemerintah ditetapkan sebesar maksimal 0,6 persen per tahun terhadap PDB untuk penerbitan penjaminan baru periode tahun 2025-2029.

Kebijakan pembiayaan anggaran lainnya diarahkan pada pengelolaan sumber-sumber penerimaan pembiayaan secara efisien dan optimal sebagai penyangga fiskal (*fiscal buffer*), khususnya dalam menghadapi dinamika perekonomian domestik dan global yang masih penuh tantangan. Kebijakan ini mencakup antara lain penempatan sebagian SAL pada instrumen keuangan jangka pendek yang memiliki tingkat risiko yang terukur dan dapat dikelola. Apabila diperlukan, SAL juga dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Selain itu, upaya optimalisasi SAL dilakukan melalui pemanfaatan SAL level efisien yang mempertimbangkan profil risiko secara cermat. Di samping itu, dalam kerangka kebijakan jangka menengah, optimalisasi HPA juga menjadi prioritas, khususnya yang bersumber dari penjualan maupun penyelesaian aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional serta eks Bank Dalam Likuidasi.

Dengan memperhatikan kebijakan pada pembiayaan anggaran pada jangka menengah, prakiraan maju defisit dan pembiayaan anggaran ditampilkan pada **Grafik 7.6**.

GRAFIK 7.6
PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2026-2029
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran I

Data Pokok APBN

Negara 2021 - 2026

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2021-2026

Indikator	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	3,7	5,3	5,1	5,0	4.7 - 5.0	5,4
Inflasi (%,yoy)	1,9	5,5	2,6	1,6	2.2 - 2.6	2,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.312	14.871	15.255	15.847	16,300 - 16,800	16.500
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,4	7,0	6,6	6,8	6.8 - 7.3	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	68	97	78	78	68 - 82	70
***Lifting* Minyak Mentah (ribu barel per hari)**	660	612	605	580	593 - 597	610
***Lifting* Gas (ribu barel setara minyak per hari)**	995	954	1.000	1.017	976 - 980	984

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2021-2026
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
A. PENDAPATAN NEGARA	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.783.929,7**	**2.850.605,2**	**2.865.501,7**	**3.153.580,5**
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.766.745,5**	**2.816.217,9**	**2.864.509,7**	**3.152.914,2**
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.154.208,2**	**2.231.839,8**	**2.387.281,8**	**2.693.714,3**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.157.982,1	2.305.623,7	2.601.248,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	73.695,4	90.897,7	64.489,9	73.857,7	81.658,1	92.466,3
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**458.493,0**	**595.594,6**	**612.537,3**	**584.378,1**	**477.227,9**	**459.199,9**
II. PENERIMAAN HIBAH	**5.013,0**	**5.696,1**	**17.184,2**	**34.387,4**	**992,0**	**666,3**
B. BELANJA NEGARA	**2.786.411,4**	**3.096.262,7**	**3.121.217,2**	**3.359.766,7**	**3.527.506,0**	**3.842.728,4**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.496.223,9**	**2.663.444,5**	**3.149.733,4**
1. Belanja K/L	1.190.813,3	1.084.674,7	1.152.229,3	1.324.004,2	1.275.634,2	1.510.546,8
2. Belanja Non K/L	809.890,5	1.195.353,2	1.087.557,4	1.172.219,7	1.387.810,4	1.639.186,6
II. TRANSFER KE DAERAH*	**785.707,6**	**816.234,8**	**881.430,5**	**863.542,8**	**864.061,5**	**692.995,0**
C. KESEIMBANGAN PRIMER	**(431.568,9)**	**(74.077,9)**	**102.595,0**	**(20.735,0)**	**(109.856,5)**	**(89.707,0)**
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	**(775.064,3)**	**(460.419,7)**	**(337.287,6)**	**(509.161,5)**	**(662.004,3)**	**(689.147,9)**
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	*(4,57)*	*(2,35)*	*(1,61)*	*(2,30)*	*(2,78)*	*(2,68)*
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	**871.723,2**	**590.978,1**	**356.663,7**	**554.888,6**	**662.004,4**	**689.147,9**
I. PEMBIAYAAN UTANG	**870.535,9**	**696.019,4**	**403.952,2**	**558.063,9**	**715.453,1**	**832.208,9**
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(89.897,8)**	**(59.332,6)**	**(139.691,1)**	**(203.056,8)**
III. PEMBERIAN PINJAMAN	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.468,4**	**(218,9)**	**(372,6)**	**(404,2)**
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(1.459,0)**	**-**	**-**
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	**144.425,7**	**667,2**	**38.471,5**	**57.835,2**	**86.615,0**	**60.400,0**
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**96.658,9**	**130.558,5**	**19.376,2**	**45.727,2**	**-**	**0,0**

Ket. : *) Perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA. 2021-2026
(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	**2.006.334,0**	**2.630.147,0**	**2.766.745,5**	**2.816.217,9**	**2.864.509,7**	**3.152.914,2**
1. Penerimaan Perpajakan	**1.547.841,1**	**2.034.552,4**	**2.154.208,2**	**2.231.839,8**	**2.387.281,8**	**2.693.714,3**
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.474.145,7	1.943.654,8	2.089.718,3	2.157.982,1	2.305.623,7	2.601.248,0
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	696.676,6	998.213,8	1.061.234,0	1.061.940,5	1.051.659,1	1.209.363,4
a) Pendapatan PPh Migas	52.839,0	77.842,6	68.773,2	65.106,4	54.135,7	55.236,4
b) Pendapatan PPh Nonmigas	643.837,6	920.371,2	992.460,8	996.834,2	997.523,4	1.154.127,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900,5	687.609,5	763.632,7	828.436,3	890.948,2	995.277,4
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,8	23.264,7	33.270,7	32.491,0	30.083,3	26.138,1
4) Pendapatan Cukai	195.517,8	226.880,8	221.851,1	226.371,5	228.702,8	243.533,7
5) Pendapatan Pajak Lainnya	11.126,0	7.686,1	9.729,8	8.742,8	104.230,4	126.935,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	73.695,4	90.897,7	64.489,9	73.857,7	81.658,1	92.466,3
1) Pendapatan Bea Masuk	39.122,7	51.077,7	50.891,8	52.965,3	53.765,6	49.901,7
2) Pendapatan Bea Keluar	34.572,7	39.819,9	13.598,2	20.892,3	27.892,5	42.564,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**458.493,0**	**595.594,6**	**612.537,3**	**584.378,1**	**477.227,9**	**459.199,9**
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	149.489,4	268.770,9	254.203,0	228.928,8	230.086,6	236.614,1
1) Pendapatan SDA Migas	96.616,4	148.698,9	116.178,6	110.622,2	114.574,3	113.069,2
a) Pendapatan Minyak Bumi	64.998,8	111.992,9	87.408,9	77.961,1	81.567,0	80.212,0
b) Pendapatan Gas Bumi	31.617,6	36.705,9	28.769,7	32.661,1	33.007,3	32.857,3
2) Pendapatan SDA Nonmigas	52.873,0	120.072,0	138.024,5	118.306,6	115.512,3	123.544,9
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	44.835,4	110.786,8	129.126,8	107.777,6	105.722,0	113.389,5
b) Pendapatan Kehutanan	5.400,3	5.804,1	5.429,6	6.739,1	5.882,7	5.919,8
c) Pendapatan Perikanan	708,2	1.192,9	636,9	951,8	1.627,6	1.663,0
d) Pendapatan Panas Bumi	1.929,1	2.288,2	2.831,2	2.838,1	2.280,0	2.572,6
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	30.496,8	40.597,1	82.058,7	86.384,6	11.831,1	1.800,0
c. PNBP Lainnya	152.504,0	196.324,3	180.415,1	164.348,0	136.002,6	122.463,2
d. Pendapatan BLU	126.002,8	89.902,3	95.860,4	104.716,7	99.307,6	98.322,6
II PENERIMAAN HIBAH	**5.013,0**	**5.696,1**	**17.184,2**	**34.387,4**	**992,0**	**666,3**
PENDAPATAN NEGARA	**2.011.347,1**	**2.635.843,0**	**2.783.929,7**	**2.850.605,2**	**2.865.501,7**	**3.153.580,5**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2021-2026
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
1	PELAYANAN UMUM	550.929,7	909.580,8	809.701,5	895.534,5	730.316,7	794.128,2
2	PERTAHANAN	125.798,9	150.276,9	171.480,9	190.271,1	245.236,5	337.371,8
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	157.369,6	171.798,5	193.328,7	230.128,0	229.715,9	242.568,1
4	EKONOMI	461.417,6	443.654,1	485.426,3	546.197,7	707.465,0	824.299,2
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	13.996,1	12.805,9	13.512,9	14.536,1	8.383,4	13.358,6
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	30.621,5	25.071,8	38.073,6	48.104,1	19.234,8	28.533,2
7	KESEHATAN	211.328,8	124.469,6	98.406,4	99.345,8	124.682,2	153.100,1
8	PARIWISATA	4.113,9	4.139,2	4.539,6	3.899,9	2.769,0	3.011,5
9	AGAMA	10.106,5	10.392,3	11.012,9	12.738,5	13.219,1	14.407,4
10	PENDIDIKAN	162.346,0	160.139,7	171.955,0	197.180,5	309.542,4	459.413,7
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	272.675,2	267.699,1	242.348,8	258.287,6	272.879,5	279.541,6
Jumlah		**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.496.223,9**	**2.663.444,5**	**3.149.733,4**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2021-2026
(miliar rupiah)

URAIAN	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
1. Belanja Pegawai	**387.752,5**	**402.441,7**	**412.711,3**	**464.859,3**	**520.227,6**	**582.200,8**
2. Belanja Barang	**530.059,3**	**426.149,1**	**432.715,0**	**523.368,0**	**479.221,9**	**707.516,4**
3. Belanja Modal	**239.632,3**	**240.570,3**	**303.041,3**	**355.511,1**	**344.332,0**	**284.050,9**
4. Pembayaran Bunga Utang	**343.495,4**	**386.341,8**	**439.882,6**	**488.426,4**	**552.147,9**	**599.440,9**
a. Dalam Negeri	332.863,1	373.617,9	409.307,3	445.938,6	496.986,1	538.701,3
b. Luar Negeri	10.632,3	12.723,9	30.575,3	42.487,8	55.161,8	60.739,6
5. Subsidi	**242.086,8**	**252.812,9**	**269.592,1**	**292.692,6**	**288.131,8**	**318.886,2**
a. Subsidi Energi	140.395,2	171.858,8	164.292,3	177.615,2	183.878,3	210.060,8
b. Subsidi Non Energi	101.691,6	80.954,1	105.299,8	115.077,4	104.253,5	108.825,4
6. Belanja Hibah	**4.319,0**	**5.803,3**	**219,1**	**278,4**	**202,7**	**350,6**
7. Bantuan Sosial	**173.654,1**	**161.523,1**	**156.601,6**	**154.949,8**	**154.240,1**	**167.515,9**
8. Belanja Lain-Lain	**79.704,4**	**404.385,8**	**225.023,7**	**216.138,2**	**324.940,7**	**489.771,7**
Jumlah	**2.000.703,8**	**2.280.027,9**	**2.239.786,7**	**2.496.223,9**	**2.663.444,6**	**3.149.733,4**

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2021-2026 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2026
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.050,0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
	002.01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.415,9
	002.02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6.484,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.835,0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	14.753,8
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	20.250,0
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.609,4
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	7.800,0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	10.220,5
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	187.100,0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	52.016,0
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	40.145,0
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.501,8
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.118,0
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28.489,4
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	-
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	114.000,0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	88.897,7
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.860,9
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	84.440,1
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.000,0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	-
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	485,2
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	236,7
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	280,3
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL *)	-
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	214,1
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	393,0
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	16.670,0
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	3.495,5
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	6.927,0
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	2.597,0
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	9.499,3
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	378,0
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.624,3
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	146.050,0
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.247,0
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	212,0
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	775,1
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.516,6

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2021-2026 (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2026
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.638,0
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	161,6
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.675,4
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.539,6
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	379,3
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	333,6
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA *)	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL *)	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI *)	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL *)	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.271,3
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	190,0
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	117,7
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	293,3
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	279,3
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	639,5
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.374,9
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.400,4
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.156,0
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.581,9
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.800,0
68	100	KOMISI YUDISIAL	195,3
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	491,0
70	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	546,3
71	107	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	1.553,7
72	108	BADAN SAR NASIONAL	163,5
73	110	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	252,0
74	111	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	469,6
75	112	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	2.527,9
76	113	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.719,8
77	114	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-
78	115	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	2.472,9
79	116	SEKRETARIAT KABINET	997,7
80	117	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.159,7
81	118	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	36,5
82	119	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.752,0
83	120	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	-
84	122	BADAN KEAMANAN LAUT	384,9
85	123	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	259,2
86	124	BADAN EKONOMI KREATIF	6.144,6
87	125	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	233,3
88	126	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	6.262,0
89	127	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	1.796,1
90	128	BADAN PANGAN NASIONAL	268.000,0

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2021-2026 (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2026
91	129	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	358,0
91	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	221,9
92	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	207,0
92	132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	262,6
93	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	333,6
93	135	KEMENTERIAN HUKUM	4.221,2
94	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	718,1
94	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	18.849,1
95	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	56.682,1
95	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	61.873,9
96	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	1.507,4
96	141	BADAN PENYELENGGARA HAJI	579,0
97	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	551,8
97	143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6.039,3
98	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.396,4
98	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	118.500,0
99	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.895,5
99	147	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.851,7
100	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	528,5
100	149	KEMENTERIAN KOPERASI	962,0
101	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	546,6
101	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.504,2
102	152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1.902,0
JUMLAH			**1.510.546,8**

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (1)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
001 MPR	**1.050,0**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	735,0
2 Program Dukungan Manajemen	315,0
002 DPR	
Sekretariat Jenderal	**3.415,9**
1 Program Dukungan Manajemen	3.415,9
Dewan Perwakilan Rakyat	**6.484,1**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	5.926,8
2 Program Dukungan Manajemen	557,3
004 BPK	**6.835,0**
1 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	5.425,0
2 Program Dukungan Manajemen	1.410,0
005 MA	**14.753,8**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	198,6
2 Program Dukungan Manajemen	14.555,1
006 KEJAKSAAN RI	**20.250,0**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.657,3
2 Program Dukungan Manajemen	11.592,7
007 KEMEN SETNEG	**2.609,4**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	243,9
2 Program Dukungan Manajemen	2.365,5
010 KEMENDAGRI	**7.800,0**
1 Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	896,7
2 Program Tata Kelola Kependudukan	2.069,7
3 Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	262,8
4 Program Dukungan Manajemen	4.570,7
011 KEMENLU	**10.220,5**
1 Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	1.981,1
2 Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	-
3 Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	300,1
4 Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	-
5 Program Dukungan Manajemen	7.939,3
012 KEMENHAN	**187.100,0**
1 Program Penggunaan Kekuatan	-
2 Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	13.813,2
3 Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	36,7
4 Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	84.489,1
5 Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	948,5
6 Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	1.843,1
7 Program Dukungan Manajemen	80.072,7
8 Program Pelaksanaan Tugas TNI	5.896,6
013 KEMENKUMHAM	**-**
1 Program Pembentukan Regulasi	-
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-
3 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-
4 Program Dukungan Manajemen	-
015 KEMENKEU	**52.016,0**
1 Program Pengelolaan Belanja Negara	24,4
2 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.997,1
3 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	289,2
4 Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi	90,0
5 Program Dukungan Manajemen	49.615,3
018 KEMENTAN	**40.145,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	747,7
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6.623,7
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	23.814,7
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
5 Program Dukungan Manajemen	8.958,8

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (2)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
019 KEMENPERIN	**2.501,8**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	117,3
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	729,5
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.655,0
020 KEMEN ESDM	**10.118,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	340,6
2 Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	208,7
3 Program Energi dan Ketenagalistrikan	5.954,0
4 Program Pertambangan Mineral dan Batubara	53,2
5 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	37,2
6 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
6 Program Dukungan Manajemen	3.524,2
022 KEMENHUB	**28.489,4**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.834,9
2 Program Infrastruktur Konektivitas	16.876,5
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
4 Program Dukungan Manajemen	9.777,9
023 KEMENDIKBUDRISTEK	**-**
1 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	-
2 Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	-
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-
4 Program Pendidikan Tinggi	-
5 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-
6 Program Dukungan Manajemen	-
024 KEMENKES	**114.000,0**
1 Program Kesehatan Masyarakat	-
2 Program Sumber Daya Kesehatan	59.414,2
3 Program Pelayanan Kesehatan Primer	2.690,6
4 Program Sistem Ketahanan Kesehatan	9.607,5
5 Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	29.697,8
6 Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-
7 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.969,3
8 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
9 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
10 Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-
11 Program Dukungan Manajemen	9.620,6
025 KEMENAG	**88.897,7**
1 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.737,1
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	-
3 Program Wajib Belajar 13 Tahun	15.791,6
4 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	9.784,8
5 Program Pendidikan Tinggi	8.907,8
6 Program Dukungan Manajemen	51.676,5
026 KEMEN NAKER	**3.860,9**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	968,1
2 Program Pembinaan Ketenagakerjaan	1.604,0
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.288,7
027 KEMENSOS	**84.440,1**
1 Program Perlindungan Sosial	77.861,3
2 Program Dukungan Manajemen	6.578,8
029 KEMEN LHK	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	-
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	-
4 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
6 Program Dukungan Manajemen	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (3)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
032 KKP	**13.000,0**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	266,7
2 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	384,6
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	44,5
4 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	8.673,1
5 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
6 Program Dukungan Manajemen	3.631,1
033 KEMEN PU PERA	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-
2 Program Ketahanan Sumber Daya Air	-
3 Program Infrastruktur Konektivitas	-
4 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
5 Program Dukungan Manajemen	-
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	**-**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	**485,2**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	217,4
2 Program Dukungan Manajemen	267,8
036 KEMENKO BID. PMK	**236,7**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	50,1
2 Program Dukungan Manajemen	186,6
040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF	**-**
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-
2 Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	-
3 Program Dukungan Manajemen	-
041 KEMEN BUMN	**280,3**
1 Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	82,5
2 Program Dukungan Manajemen	197,8
042 KEMEN RISTEK/BRIN *)	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
044 KEMEN KUKM	**-**
1 Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
047 KEMEN PP PA	**214,1**
1 Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	69,1
2 Program Dukungan Manajemen	145,0
048 KEMEN PAN RB	**393,0**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	139,5
2 Program Dukungan Manajemen	253,5
050 BIN	**16.670,0**
1 Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	12.994,9
2 Program Dukungan Manajemen	3.675,1
051 BSSN	**3.495,5**
1 Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	3.060,7
2 Program Dukungan Manajemen	434,9
052 WANTANAS	**-**
1 Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
054 BPS	**6.927,0**
1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	3.133,4
2 Program Dukungan Manajemen	3.793,6
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	**2.597,0**
1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.069,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.527,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (4)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
056 KEMEN ATR/BPN	**9.499,3**
1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	2.122,9
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	281,6
3 Program Dukungan Manajemen	7.094,8
057 PNRI	**378,0**
1 Program Perpustakaan dan Literasi	72,3
2 Program Dukungan Manajemen	305,7
059 KEMEN KOMINFO/KOMDIGI	**8.624,3**
1 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-
2 Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital	1.612,5
3 Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital	4.535,3
4 Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	-
5 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	-
6 Program Komunikasi Publik	-
7 Program Dukungan Manajemen	2.198,5
8 Program Komunikasi Publik dan Media	278,0
9 Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	-
060 POLRI	**146.050,0**
1 Program Profesionalisme SDM Polri	1.388,4
2 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3.535,7
3 Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	54.327,3
4 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13.708,8
5 Program Dukungan Manajemen	73.089,8
063 BPOM	**2.247,0**
1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	708,3
2 Program Dukungan Manajemen	1.538,8
064 LEMHANAS	**212,0**
1 Program Pembinaan Ketahanan Nasional	59,0
2 Program Dukungan Manajemen	153,0
065 BKPM/ KEMEN INVESHIL	**775,1**
1 Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	298,5
2 Program Dukungan Manajemen	476,6
066 BNN	**1.516,6**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	144,8
2 Program Dukungan Manajemen	1.371,8
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	**-**
1 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
068 BKKBN	**3.638,0**
1 Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	359,3
2 Program Dukungan Manajemen	3.278,7
074 KOMNAS HAM	**161,6**
1 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	30,2
2 Program Dukungan Manajemen	131,4
075 BMKG	**2.675,4**
1 Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.369,9
2 Program Dukungan Manajemen	1.305,5
076 KPU	**3.539,6**
1 Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	87,3
2 Program Dukungan Manajemen	3.452,3
077 MK RI	**379,3**
1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	201,5
2 Program Dukungan Manajemen	177,8
078 PPATK	**333,6**
1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	82,1
2 Program Dukungan Manajemen	251,5
079 LIPI *)	**-**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (5)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
080 BATAN *)	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
081 BPPT *)	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
082 LAPAN *)	-
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
083 BIG	**2.271,3**
1 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	2.118,7
2 Program Dukungan Manajemen	152,5
084 BSN	**190,0**
1 Program Standardisasi Nasional	44,2
2 Program Dukungan Manajemen	145,8
085 BAPETEN	**117,7**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	13,6
2 Program Dukungan Manajemen	104,1
086 LAN	**293,3**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	47,2
2 Program Dukungan Manajemen	246,1
087 ANRI	**279,3**
1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	93,3
2 Program Dukungan Manajemen	186,1
088 BKN	**639,5**
1 Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	19,4
2 Program Dukungan Manajemen	620,1
089 BPKP	**2.374,9**
1 Program Pengawasan Pembangunan	395,5
2 Program Dukungan Manajemen	1.979,4
090 KEMENDAG	**1.400,4**
1 Program Perdagangan Luar Negeri	98,0
2 Program Perdagangan Dalam Negeri	37,9
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
4 Program Dukungan Manajemen	1.264,5
092 KEMENPORA	**1.156,0**
1 Program Keolahragaan	742,0
2 Program Kepemudaan	56,5
3 Program Dukungan Manajemen	357,6
093 KPK	**1.581,9**
1 Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	329,8
2 Program Dukungan Manajemen	1.252,1
095 DPD	**1.800,0**
1 Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	1.082,2
2 Program Dukungan Manajemen	717,8
100 KY RI	**195,3**
1 Program Penegakan Integritas Hakim	39,2
2 Program Dukungan Manajemen	156,0
103 BNPB	**491,0**
1 Program Ketahanan Bencana	250,0
2 Program Dukungan Manajemen	241,0
104 BP2MI	**546,3**
1 Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	69,8
2 Program Dukungan Manajemen	476,6
106 LKPP	**216,3**
1 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	78,1
2 Program Dukungan Manajemen	138,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (6)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
107 BASARNAS	**1.553,7**
1 Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	685,2
2 Program Dukungan Manajemen	868,5
108 KPPU	**163,5**
1 Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan	56,3
2 Program Dukungan Manajemen	107,2
109 BPWS	**-**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
110 OMBUDSMAN RI	**252,0**
1 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	37,0
2 Program Dukungan Manajemen	215,0
111 BNPP	**469,6**
1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	35,3
2 Program Dukungan Manajemen	434,3
112 BPKPB PB BATAM	**2.527,9**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.428,9
2 Program Dukungan Manajemen	1.099,0
113 BNPT	**1.719,8**
1 Program Penanggulangan Terorisme	1.435,0
2 Program Dukungan Manajemen	284,7
114 SETKAB	**-**
1 Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
115 BAWASLU	**2.472,9**
1 Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	42,7
2 Program Dukungan Manajemen	2.430,3
116 LPP RRI	**997,7**
1 Program Penyiaran Publik	15,9
2 Program Dukungan Manajemen	981,8
117 LPP TVRI	**1.159,7**
1 Program Penyiaran Publik	184,0
2 Program Dukungan Manajemen	975,7
118 BPKPB PB SABANG	**36,5**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	5,3
2 Program Dukungan Manajemen	31,2
119 BAKAMLA	**1.752,0**
1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	1.504,9
2 Program Dukungan Manajemen	247,1
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI	**-**
1 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	-
2 Program Dukungan Manajemen	-
122 BPIP	**384,9**
1 Program Pembinaan Ideologi Pancasila	194,9
2 Program Dukungan Manajemen	190,0
123 LPSK	**259,2**
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	122,2
2 Program Dukungan Manajemen	137,0
124 BRIN	**6.144,6**
1 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.269,8
2 Program Dukungan Manajemen	3.874,8
125 BAPANAS	**233,3**
1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	89,2
2 Program Dukungan Manajemen	144,1

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (7)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	**6.262,0**
1 Program Pengembangan Kawasan Strategis	5.618,0
2 Program Dukungan Manajemen	644,1
127 BADAN KARANTINA INDONESIA	**1.796,1**
1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	604,6
2 Program Dukungan Manajemen	1.191,4
128 BGN	**268.000,0**
1 Program Dukungan Manajemen	12.419,8
2 Program Pemenuhan Gizi Nasional	255.580,2
129 KEMENKOPOLKAM	**358,0**
1 Program Dukungan Manajemen	255,0
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	103,0
130 KEMENKO-KUM-HAM-IMIPAS	**221,9**
1 Program Dukungan Manajemen	188,1
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	33,8
131 KEMENKO-PANG	**207,0**
1 Program Dukungan Manajemen	157,0
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	50,0
132 KEMENKO-INPENHAN	**262,6**
1 Program Dukungan Manajemen	189,6
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	72,9
134 KEMENKO PM	**333,6**
1 Program Dukungan Manajemen	279,9
2 Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	53,7
135 KEMENKUM	**4.221,2**
1 Program Dukungan Manajemen	3.394,0
2 Program Pembentukan Regulasi	47,0
3 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	780,2
136 KEMENHAM	**718,1**
1 Program Dukungan Manajemen	483,1
2 Program Pemajuan dan Penegakan HAM	235,1
137 KEMEN IMIPAS	**18.849,1**
1 Program Dukungan Manajemen	13.071,7
2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5.777,4
138 KEMENDIKDASMEN	**56.682,1**
1 Program Dukungan Manajemen	4.827,6
2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	21.155,8
3 Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	198,2
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.210,2
5 Program Wajib Belajar 13 Tahun	27.290,3
139 KEMENDIKTISAINTEK	**61.873,9**
1 Program Dukungan Manajemen	19.270,4
2 Program Pendidikan Tinggi	41.520,9
3 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.082,5
140 KEMENBUD	**1.507,4**
1 Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	654,7
2 Program Dukungan Manajemen	852,7
141 BPH	**579,0**
1 Program Dukungan Manajemen	94,1
2 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	485,0
142 BPJPH	**551,8**
1 Program Dukungan Manajemen	160,8
2 Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	391,0
143 KEMENHUT	**6.039,3**
1 Program Dukungan Manajemen	4.203,2
2 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	112,3
3 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.723,7

TABEL 7
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2021-2026 (8)
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	APBN 2026
144 KEMEN-LH	**1.396,4**
1 Program Dukungan Manajemen	861,2
2 Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	58,8
3 Program Kualitas Lingkungan Hidup	476,4
145 KEMEN PU	**118.500,0**
1 Program Dukungan Manajemen	9.052,6
2 Program Infrastruktur Konektivitas	42.606,6
3 Program Ketahanan Sumber Daya Air	32.095,2
4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	140,6
5 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.694,3
6 Program Prasarana Strategis	23.910,7
146 KEMEN PKP	**10.895,5**
1 Program Dukungan Manajemen	982,0
2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.913,5
147 KEMENPAR	**1.851,7**
1 Program Dukungan Manajemen	963,6
2 Program Pariwisata	604,0
3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	284,1
148 KEMENKRAF	**528,5**
1 Program Dukungan Manajemen	448,2
2 Program Ekonomi Kreatif	80,3
149 KEMENKOP	**962,0**
1 Program Dukungan Manajemen	313,3
2 Program Perkoperasian	648,8
150 KEMEN UMKM	**546,6**
1 Program Dukungan Manajemen	288,9
2 Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan	257,7
151 KEMENDES-PDT	**2.504,2**
1 Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.808,3
2 Program Dukungan Manajemen	695,9
152 KEMENTRANS	**1.902,0**
1 Program Dukungan Manajemen	564,4
2 Program Transmigrasi	1.337,6
JUMLAH	**1.510.546,8**

keterangan:

*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124)

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
I	**SEKTOR TRANSPORTASI**
	1 Perkeretaapian Makassar-Parepare
	2 Proving Ground BPLJSKB Bekasi
	3 Bandar Udara Singkawang
	4 Perkeretaapian Metropolitan Bandung
II	**SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN**
	1 Jalan Tol Batang-Semarang
	2 Jalan Tol Pandaan-Malang
	3 Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated
	4 Jalan Tol Manado-Bitung
	5 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
	6 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
	7 Jalan Tol Cileunyi-Sumendang-Dawuan
	8 Jalan Tol Serang-Panimbang
	9 Jalan Tol Semarang-Demak
	10 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo
	11 Jalan Tol Kediri-Tulungagung
	12 Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
	13 Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan
	14 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
	15 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
	16 Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami
	17 Jembatan Calender Hamilton
	18 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan
	19 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau
	20 Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena, Segmen Mamberamo Elelim
	21 *Flyover* Panorama 1 Sitinjau Lauik
III	**SEKTOR AIR MINUM**
	1 SPAM Umbulan
	2 SPAM Kota Bandar Lampung
	3 SPAM Semarang Barat
	4 SPAM Regional Jatiluhur I
	5 SPAM Kota Pekanbaru
	6 SPAM Regional Karian-Serpong
	7 SPAM Regional Jatigede
	8 SPAM KabupatenKaro
	9 SPAM Kota Denpasar
	10 Revitalisasi dan Optimalisasi Sistem Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai (WS) Lombok
	11 Bendungan Bodri
	12 Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering

TABEL 8
DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU

NO	URAIAN
IV	**SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	1 Palapa Ring Paket Barat
	2 Palapa Ring Paket Tengah
	3 Palapa Ring Paket Timur
	4 Satelit Multi Fungsi
V	**SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**
	1 PLTU Batang, Jawa Tengah
	2 APJ Kabupaten Madiun
	3 Penerangan Jalan Umum Lombok Barat
	4 Jaringan Gas Palembang
VI	**SEKTOR PERSAMPAHAN**
	1 Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka
	2 Tempat Pengolahan Akhir Sampah Manggar
VII	**SEKTOR KESEHATAN**
	1 RSUD Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda
	2 RSUD Wangaya
	3 RSPTN Universitas Padjajaran
VIII	**SEKTOR PENDIDIKAN**
	1 Armada Kapal Riset Nasional BRIN
IX	**SEKTOR PASAR UMUM**
	1 Pasar Tabanan
X	**MULTI SEKTOR IKN**
	1 Pemanfaatan dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN
	2 PPSP IKN
	3 FPP IKN Sektor Perumahan Tahap I
	4 FPP IKN Sektor Perumahan Tahap II
	5 FPP IKN Renewable Energy
	6 FPP IKN Sektor Jalan dan MUT
	7 FPP KA Bandara Sepinggan

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 9
TRANSFER KE DAERAH, 2021-2026

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
1. Dana Bagi Hasil	**117.157,0**	**168.414,1**	**205.666,6**	**153.174,6**	**178.377,8**	**58.515,0**
2. Dana Alokasi Umum	**377.791,4**	**378.000,0**	**398.029,6**	**429.210,6**	**430.201,6**	**400.019,4**
3. Dana Alokasi Khusus	**184.638,3**	**173.164,6**	**181.357,6**	**183.538,5**	**162.696,0**	**157.090,0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	57.069,7	54.784,0	50.334,7	50.890,1	17.618,9	5.000,0
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	127.568,6	118.380,7	128.081,9	130.441,2	143.789,8	149.343,3
c. Hibah kepada Daerah*	-	-	2.940,9	2.207,2	1.287,2	2.746,7
4. Dana Otonomi Khusus	**19.482,9**	**20.436,3**	**17.241,3**	**18.271,5**	**17.006,1**	**14.000,6**
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	**1.320,0**	**1.320,0**	**1.372,7**	**1.420,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
6. Dana Desa	**71.853,7**	**67.906,1**	**69.856,8**	**70.925,9**	**68.900,0**	**60.570,0**
7. Dana Insentif Fiskal**	**13.464,3**	**6.993,7**	**7.906,0**	**7.001,7**	**5.880,0**	**1.800,0**
Jumlah	**785.707,6**	**816.234,8**	**881.430,5**	**863.542,8**	**864.061,5**	**692.995,0**

Ket. : * mulai tahun 2023 menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

** sebelum tahun 2023 adalah Dana Insentif Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 10
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2021-2026

(miliar rupiah)

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	*Outlook* 2025	APBN 2026
A. Pembiayaan Utang	**870.535,9**	**696.019,4**	**403.952,2**	**558.064,0**	**715.453,1**	**832.208,9**
I. SBN (neto)	877.506,5	658.816,9	308.193,8	450.733,3	585.066,0	799.534,8
II. Pinjaman (neto)	(6.970,7)	37.202,5	95.758,4	107.330,7	130.387,1	32.674,1
1. Pinjaman Dalam Negeri (neto)	944,2	8.201,3	14.558,4	15.019,5	9.522,0	(6.536,5)
2. Pinjaman Luar Negeri (neto)	(7.914,9)	29.001,2	81.200,0	92.311,2	120.865,2	39.210,6
B. Pembiayaan Investasi	**(142.462,8)**	**(106.724,3)**	**(89.897,8)**	**(59.332,6)**	**(139.691,1)**	**(203.056,8)**
C. Pemberian Pinjaman	**1.940,1**	**2.146,8**	**4.468,4**	**(218,9)**	**(372,6)**	**(404,2)**
D. Kewajiban Penjaminan	**(2.715,7)**	**(1.130,9)**	**(330,5)**	**(1.459,0)**	**0,0**	**0,0**
E. Pembiayaan Lainnya	**144.425,7**	**667,2**	**38.471,5**	**57.835,2**	**86.615,0**	**60.400,0**
Jumlah	**871.723,2**	**590.978,1**	**356.663,7**	**554.888,7**	**662.004,4**	**689.147,9**

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran II

Ringkasan Penjelasan

RKA-KL TA 2026

Lampiran II
Ringkasan Penjelasan RKA-KL TA 2026

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
(BA 001)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) adalah lembaga negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). MPR memiliki wewenang yaitu: (1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; (3) memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; (4) melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; (5) memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan (6) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Selain memiliki wewenang, dalam UU MD3, MPR memiliki tugas : (1) memasyarakatkan ketetapan MPR; (2) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (3) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan (4) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya, MPR menjalankan program kegiatan serta didukung oleh anggaran yang tersedia. Pada APBN tahun 2024, realisasi anggaran MPR *audited* sebesar Rp858,3 miliar yang terdiri dari belanja operasional dan belanja non operasional. Penggunaan Belanja operasional dipergunakan antara lain untuk belanja operasional pegawai (belanja dan tunjangan Pimpinan MPR dan pegawai) dan belanja operasional barang (operasional dan pemeliharaan perkantoran). Belanja non operasional dipergunakan antara lain untuk pelaksanaan tugas konstitusional MPR yaitu: (1) pelaksanaan tugas pimpinan MPR; (2) sosialisasi Empat Pilar MPR; (3) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; (4) penyerapan aspirasi masyarakat; (5) penyelenggaraan sidang tahunan MPR, sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode tahun 2019-2024, sidang paripurna awal jabatan MPR periode tahun 2024-2029, dan sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029; dan (6) pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen (pengelolaan administrasi yaitu: (1) reformasi birokrasi; (2) publikasi dan layanan informasi; (3) perencanaan dan evaluasi; (4) sarana dan prasarana; dan (5) pengendalian internal).

Dari program kegiatan yang ada, terdapat kegiatan yang mendukung Prioritas MPR RI (prioritas lembaga) yang diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR RI sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Anggaran yang

telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Lembaga dengan alokasi sebesar Rp556,7 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Lembaga yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) sosialisasi Empat Pilar MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) penyelenggaraan sidang-sidang MPR.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung prioritas lembaga antara lain bangsa dan negara ini mempunyai anggota MPR periode tahun 2024-2029 serta pemerintahan baru periode tahun 2024-2029 sebagai lanjutan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029 oleh MPR, masyarakat mendapatkan pemasyarakatan Empat Pilar MPR dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, masyarakat/warga negara mendapatkan hak mendapatkan penafsiran Konstitusi sesuai mekanisme peraturan yang berlaku, masyarakat/akademisi mendapatkan akses untuk menyampaikan masukan terkait kajian Pokok-Pokok Haluan Negara, meningkatnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik seiring upaya peningkatan harmonisasi hubungan antarlembaga negara, masyarakat mendapat jaminan kepastian bahwa setiap bentuk kerja sama internasional mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan tetap dalam koridor konstitusi, terimplementasinya etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR.

Kendala/tantangan yang dihadapi dalam mengelola anggaran MPR tahun 2024 secara umum antara lain dengan adanya keterbatasan anggaran yang dikelola pemerintah pada tahun 2024, alokasi awal pada pagu anggaran MPR TA 2024 tidak semuanya dapat memenuhi perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah diajukan MPR sebelumnya. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain optimalisasi kegiatan dan anggaran serta penguatan sinergi komunikasi antara MPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran MPR RI dialokasikan sebesar Rp969,2 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp193,1 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp776,1 miliar. Belanja operasional dipergunakan antara lain untuk belanja operasional pegawai (belanja dan tunjangan Pimpinan MPR dan pegawai) dan belanja operasional barang (layanan perkantoran). Belanja non operasional dipergunakan antara lain untuk pelaksanaan tugas konstitusional MPR yaitu: (1) pelaksanaan tugas Pimpinan MPR; (2) sosialisasi Empat Pilar MPR; (3) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI 1945, serta pelaksanaannya; (4) penyerapan aspirasi masyarakat; (5) penyelenggaraan sidang tahunan MPR, sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode tahun 2019-2024, sidang paripurna awal jabatan MPR periode tahun 2024-2029, dan sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029; dan (6) pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen (pengelolaan administrasi (1) reformasi birokrasi; (2) publikasi dan layanan informasi; (3) perencanaan dan evaluasi; (4) sarana dan prasarana; dan (5) pengendalian internal). Adapun *outlook* MPR RI tahun 2025 sebesar Rp903,6 miliar.

Dari program kegiatan yang ada, terdapat kegiatan yang mendukung prioritas lembaga yang diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR RI sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan prioritas lembaga dengan alokasi sebesar Rp597,9 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan prioritas lembaga yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) sosialisasi Empat Pilar MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta

pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) penyelenggaraan sidang-sidang MPR.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung prioritas lembaga antara lain terjaminnya pelaksanaan tugas konstitusional MPR dimana salah satunya adalah masyarakat mendapatkan pemasyarakatan Empat Pilar MPR dan menyampaikan aspirasi masyarakat, masyarakat/warga negara mendapatkan hak mendapatkan penafsiran konstitusi sesuai mekanisme peraturan yang berlaku, masyarakat/akademisi mendapatkan akses untuk menyampaikan masukan terkait kajian Pokok-Pokok Haluan Negara, meningkatnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik seiring upaya peningkatan harmonisasi hubungan antarlembaga negara, menjamin kepastian bahwa setiap bentuk kerja sama internasional mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan tetap dalam koridor konstitusi, terimplementasinya etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPR.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp1.050,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 100 persen dialokasikan untuk mendukung prioritas lembaga, antara lain melalui: (1) kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR; (2) kebijakan sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; (3) penyerapan aspirasi masyarakat; dan (4) penyelenggaraan sidang-sidang MPR dengan memperhatikan perkembangan dinamika yang terjadi dan jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain meningkatkan kualitas pemasyarakatan Empat Pilar MPR, meningkatkan publikasi hasil kajian dan pemanfaatan hasil kajian MPR, meningkatkan kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sidang dan rapat MPR RI, mengkaji mekanisme dan bentuk hukum penafsiran konstitusi, menyelesaikan kajian bentuk hukum PPHN, meningkatkan peran aktif dalam konsultasi dan komunikasi antar lembaga negara, memperkuat diplomasi antar parlemen berlandaskan politik bebas aktif, dan pembangunan kepercayaan masyarakat/*branding* MPR.

Proyeksi kebijakan strategis MPR RI pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis MPR RI masih melanjutkan kebijakan strategis tahun sebelumnya antara lain meningkatkan kualitas pemasyarakatan Empat Pilar MPR, meningkatkan publikasi hasil kajian dan pemanfaatan hasil kajian MPR, meningkatkan kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sidang dan rapat MPR RI, mengkaji mekanisme dan bentuk hukum penafsiran konstitusi, menyelesaikan kajian bentuk hukum PPHN, meningkatkan peran aktif dalam konsultasi dan komunikasi antar lembaga negara, memperkuat diplomasi antar parlemen berlandaskan politik bebas aktif, dan pembangunan kepercayaan masyarakat/*branding* MPR.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BA 002)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, mengatur tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas dan wewenangnya di pemerintahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, DPR diberikan penguatan kewenangan untuk memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, sebagai berikut: (1) Fungsi Legislasi, yaitu menyusun, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan dari DPR ataupun Pemerintah; (2) Fungsi Anggaran yaitu, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, dan kebijakan-kebijakan anggaran negara lainnya; dan (3) Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan DPD.

Dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan tugas dan wewenangnya, berperan melaksanakan amanat rakyat. DPR RI sebagai lembaga politik mengalami perubahan mendasar sebagai hasil tuntutan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan reformasi tersebut telah mengubah sistem politik Otoritarian menjadi sistem demokrasi, yang ditransmisikan melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Melalui amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan menegaskan prinsip saling kontrol dan menjaga keseimbangan (*checks and balances*) dalam hubungan antar lembaga negara.

Dalam APBN tahun anggaran 2026 anggaran DPR RI terdiri atas Rp6.484,1 miliar untuk satker Dewan dan Rp3.415,9 miliar untuk satker Setjen. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp6,0 miliar atau 0,1 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan:

1. Fasilitasi *Meaningful Participation* dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Polhukam;
2. Fasilitasi *Meaningful Participation* dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Ekkuinbangkesra.

Pagu Alokasi Anggaran DPR RI tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi belanja pegawai, operasional kantor, dan kegiatan Prioritas DPR RI di Tahun 2026.

Kebijakan strategis yang direncanakan DPR RI untuk dilaksanakan pada tahun 2026 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis DPR antara lain: (1) terwujudnya capaian kinerja fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan peran diplomasi parlemen, yang dimanfaatkan dalam pembangunan nasional.; (2) terwujudnya penguatan tata kelola kelembagaan DPR RI dan pengelolaan aspirasi masyarakat yang berperan dalam pembangunan nasional; (3) terwujudnya layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan andal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal dalam mendukung kinerja DPR RI; serta (4) terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23E ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Selanjutnya pada ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya; dan ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilengkapi dengan seperangkat dukungan peraturan perundang-undangan berupa penetapan paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain ketiga paket undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur tugas dan wewenang yang diemban oleh BPK.

BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola Keuangan Negara.

BPK juga berwenang untuk memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan sistem pengendalian internal Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah. BPK juga dapat memberikan Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran BPK *audited* dialokasikan sebesar Rp4.801,3 miliar yang terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, dan operasional kantor di seluruh satker BPK, serta belanja non operasional antara lain untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (kepatuhan), termasuk pemeriksaan investigasi untuk membantu upaya pemberantasan korupsi (*combating fraud*), mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas.

Alokasi anggaran tahun 2024 tersebut dimanfaatkan untuk mendukung seluruh kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan. Kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 yang difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. Selain pemeriksaan Tematik Nasional, prioritas pemeriksaan tahun 2024 terdiri dari: (1) Pemeriksaan Sesuai Mandat; (2) Dukungan Pemeriksaan Tahun 2021-2023 atas PN 1, 2, 3, 4, 5, dan 7; (3) Pemeriksaan Tematik Lokal; (4) Pemeriksaan Signifikan Lainnya (Pemeriksaan Pembangunan Ibu Kota Negara; (5) Pemeriksaan Investigatif; dan (6) Pemeriksaan Mandiri/Portofolio satker. Keseluruhan prioritas pemeriksaan BPK tahun 2024 dilaksanakan melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BPK dialokasikan sebesar Rp6.154,6 miliar yang terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, dan operasional kantor di seluruh satker BPK, serta belanja non operasional antara lain untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan, baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. (kepatuhan), termasuk Pemeriksaan Investigasi untuk membantu upaya pemberantasan korupsi (*combating fraud*), mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas.

Outlook BPK tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.769,6 miliar yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan tahun 2025. Pemeriksaan Tematik Nasional TA 2025 diprioritaskan untuk (1) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak; (2) Ketahanan Pangan; dan (3) Pembangunan Manusia. Selain itu terdapat Pemeriksaan Tematik Lokal yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Wilayah Barat dan Timur dengan tema: Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selain BPD, Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi, dan Sektor Pelayanan Publik. Pelaksanaan pemeriksaan menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) yang dilakukan dengan mengidentifikasi area audit/akun yang memiliki risiko salah saji yang material baik yang disebabkan oleh risiko bawaan maupun risiko pengendalian dan menjadikannya fokus pemeriksaan, serta memperhatikan risiko fraud untuk menjalankan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran BPK dialokasikan sebesar Rp6.835,0 miliar yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan. Selain melaksanakan Pemeriksaan Sesuai Mandat, Pemeriksaan Investigatif, dan Pemeriksaan Mandiri/Portofolio Satker, BPK juga menetapkan tema Pemeriksaan Tematik Nasional untuk tahun 2026, yaitu Ketahanan Energi dengan hasil pemeriksaan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang akan menjadi *benchmark*. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari Prioritas Nasional 2, yakni Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. BPK juga menetapkan tema pemeriksaan lainnya yakni transformasi digital, manajemen aset, *regulatory cost*, dan otonomi daerah, khususnya pengelolaan dana desa dan BLUD bidang kesehatan. Seluruh prioritas pemeriksaan BPK tahun 2026 akan dilaksanakan melalui tiga jenis pemeriksaan utama, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Kebijakan strategis BPK untuk periode 2027 hingga 2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berdasarkan pembidangan sesuai UUD 1945 yang terdiri atas 12 bidang, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) kesejahteraan sosial, (5) perekonomian nasional, (6) pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, (7) hubungan luar negeri dan pertahanan negara, (8) hukum, keamanan, dan demokrasi, (9) agama dan pembangunan kebudayaan, (10) tata kelola birokrasi dan pemerintahan, (11) otonomi daerah dan pembangunan kewilayahan, serta (12) cabang-cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara. Seluruh bidang ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan fokus dan arah pemeriksaan BPK agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

MAHKAMAH AGUNG
(BA 005)

Mahkamah Agung (MA) berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung berwenang untuk: (1) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali UU menentukan lain; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU; (3) menyatakan tidak sah peraturan perundangan di bawah UU atas alasan bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (4) kewenangan lainnya yang diberikan UU. Selain itu berdasarkan Pasal 22 dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa MA dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam hal pengawasan, sesuai Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 bahwa MA berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya; serta berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal terkait teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 32 juga mengatur bahwa sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, maka MA juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 diatur bahwa untuk membantu penyelenggaran tugas-tugas nonyudisial untuk pelaksanaan fungsi satu atap, Sekretariat MA melaksanakan fungsi sebagai berikut: (1) koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung; (2) pembinaan dan dukungan teknis, organisasi, administrasi dan keuangan di lingkungan MA dan semua badan peradilan; (3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di semua lingkungan badan peradilan; (4) pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di semua lingkungan badan peradilan; (5) pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di semua lingkungan badan peradilan; dan (6) pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan badan peradilan.

Sedangkan tugas Kepaniteraan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan MA. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepaniteraan MA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; (2) koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan MA; (3) pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial; (4) pelaksanaan minutasi perkara; (5) pembinaan lembaga teknis dan evaluasi; dan (6) pelaksanaan administrasi kepaniteraan.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran MA *audited* sebesar Rp11.627,2 miliar, terdiri atas (1) belanja operasional, antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, lembur, operasional satuan kerja; dan (2) belanja nonoperasional, antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, belanja pembangunan gedung kantor baru, renovasi dan perluasan gedung kantor, pemenuhan sarana lingkungan, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan meubelair gedung kantor. Kegiatan yang mendukung PN diarahkan antara lain

untuk: (1) pendukung kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara; (2) pengembangan sistem penanganan perkara; (3) peningkatan kompetensi hakim, pos bantuan hukum dan sidang di luar gedung pengadilan; serta (4) pembebasan biaya perkara dan sidang terpadu.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan antara lain untuk: (1) percepatan penyelesaian perkara; (2) penguatan layanan berbasis elektronik, seperti *e-Court* dan e-Berpadu; (3) peningkatan kualitas pelayanan publik; serta (4) perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, BMN dan keuangan. Kegiatan yang mendukung prioritas lainnya merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 22 gedung pengadilan tingkat pertama dan delapan gedung pengadilan tingkat banding, serta pembangunan lima gedung pengadilan tingkat banding baru.

Anggaran MA yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan PN yang berasal dari Rupiah Murni (RM). Kegiatan PN yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain untuk: (1) kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara; (2) pengembangan sistem penanganan perkara; (3) peningkatan kompetensi hakim, pos bantuan hukum dan sidang di luar gedung pengadilan; serta (4) pembebasan biaya perkara dan sidang terpadu. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja yang mendukung PN antara lain untuk: (1) memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; (2) meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan; (3) mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis; (5) memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak.

Dalam menghadapi kendala/tantangan dalam mengelola anggaran MA tahun 2024, MA melakukan terobosan kebijakan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sejalan dengan asas peradilan "sederhana, cepat, dan biaya ringan". Terobosan kebijakan utama mencakup digitalisasi menyeluruh melalui sistem Sistem Informasi Perkara (SIP), salah satunya berupa e-*Court* meliputi e-*Filing*, e-*Payment*, e-*Summons*, dan e-*Litigation*) yang secara signifikan mengurangi biaya panjar perkara bagi pencari keadilan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses peradilan. Selain itu, MA juga telah mendigitalisasi manajemen keuangan dan aset internal antara lain melalui aplikasi: (1) e-Iplans sebagai aplikasi perencanaan; (2) SIKEP sebagai aplikasi pengelolaan data kepegawaian; (3) e-Bima untuk pemantauan dan pelaksanaan anggaran; (4) e-Prima untuk pengadaan barang dan jasa; serta (4) e-SADEWA untuk pengelolaan BMN. Inisiatif tersebut telah berkontribusi pada akuntabilitas keuangan yang lebih baik yang dapat dibuktikan melalui Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang konsisten dari BPK maupun dari realisasi anggaran yang relatif tinggi.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran MA Agung dialokasikan sebesar Rp12.684,1 miliar dengan outlook sebesar Rp12.424,4 miliar, yang pemanfaatannya antara lain untuk (1) belanja operasional, seperti belanja gaji, tunjangan, lembur, operasional satuan kerja; dan (2) belanja nonoperasional, antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, belanja pembangunan gedung kantor baru, renovasi dan perluasan gedung kantor, pemenuhan sarana lingkungan, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan meubelair gedung kantor. Dari anggaran MA tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) mendukung seluruh program dan kegiatan PN; serta (2) mendukung pelaksanaan prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung PN diarahkan untuk mendukung kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara, pengembangan sistem penanganan perkara, peningkatan kompetensi hakim, pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, sidang terpadu, perkara yang diselesaikan melalui

sidang itsbat nikah diluar negeri, penyusunan pedoman peradilan, kebijakan penguatan kelembagaan.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk untuk percepatan penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik meliputi e-*Court* dan e-Berpadu, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, BMN dan keuangan. Kegiatan yang mendukung prioritas lainnya merupakan kegiatan antara lain untuk memenuhi kebutuhan: (1) belanja pegawai; (2) operasional kantor; (3) pelaksanaan tugas fungsi penyelesaian perkara; dan (4) lanjutan pembangunan 22 gedung pengadilan tingkat pertama dan 8 gedung pengadilan tingkat banding serta pembangunan 5 gedung pengadilan tingkat banding baru.

Anggaran MA yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar 100 persen. Kegiatan PN dan/atau prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain meliputi; (1) kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara; (2) pengembangan sistem penanganan perkara; (3) peningkatan kompetensi hakim, pos bantuan hukum; (4) sidang di luar gedung pengadilan; serta (5) pembebasan biaya perkara dan sidang terpadu. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung PN dan/atau prioritas lainnya antara lain memberikan: (1) kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; (2) meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan; (3) mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis; serta (4) memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran MA dialokasikan sebesar Rp14.753,8 miliar. Anggaran MA tersebut dipergunakan antara lain untuk: (1) belanja operasional, antara lain belanja gaji, tunjangan, lembur, operasional satuan kerja; serta (2) belanja non-operasional antara lain pelaksanaan tugas dan fungsi MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang masuk ke dalam komponen 005 yaitu dukungan penyelanggaraan tugas dan fungsi unit, dan belanja modal sesuai dengan prioritas/arahan Presiden untuk pembangunan gedung kantor peradilan, serta sarana prasarananya. Anggaran MA TA 2026 tersebut untuk mendukung PN, antara lain melalui; (1) kegiatan bimbingan teknis penanganan perkara; (2) pengembangan sistem penanganan perkara; (3) peningkatan kompetensi hakim, pos bantuan hukum dan sidang di luar gedung pengadilan; (4) pembebasan biaya perkara dan sidang terpadu; (5) perkara yang diselesaikan melalui sidang *itsbat* nikah diluar negeri; (6) penyusunan pedoman peradilan, kebijakan penguatan kelembagaan, penyusunan kajian bidang hukum. Dan sebesar untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui: (1) kegiatan untuk percepatan penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik, seperti e-Court dan e-Berpadu; (2) peningkatan kualitas pelayanan publik; serta (3) perbaikan manajemen internal kelembagaan termasuk manajemen SDM, BMN dan keuangan.

Sasaran strategis MA pada tahun anggaran 2026 antara lain meliputi; (1) terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern. Sasaran tersebut mencerminkan komitmen MA untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan TI; (2) memperkuat alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, diversi dan keadilan restoratif, (3) meningkatkan akses terhadap layanan peradilan; serta (4) meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik. Sasaran tersebut bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Sasaran tersebut bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat

dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas aparatur SDM, BMN dan keuangan agar tertata dengan baik.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis anggaran MA tahun anggaran 2026, maka *output* MA direncanakan antara lain meliputi: (1) layanan pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum dengan target sebesar 65.826 orang; (2) perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan target sebesar 1.145 perkara; (3) sidang di luar Gedung Pengadilan dengan target sebesar 7.021 perkara; (4) layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan PTUN dengan target sebesar 3.362 orang; serta (5) perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer dengan target sebesar 384 perkara.

Proyeksi kebijakan strategis MA pada tahun anggaran 2027-2029 itu berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis MA tahun 2025-2029 antara lain meliputi: (1) Sasaran Strategis Tahap 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern dengan indikator sasaran strategis yaitu persentase penyelesaian perkara tepat waktu, persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu, persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu, persentase pengiriman salinan putusan pidana, militer, dan jinayat oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan, persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, agama, dan TUN, persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi, persentase perkara perdata, agama, dan TUN yang menggunakan *e-Court*, persentase perkara pidana, militer, dan jinayat yang dilimpahkan melalui e-Berpadu, persentase layanan perkara pidana, militer, dan jinayat yang diajukan melalui e-Berpadu; (2) Sasaran Strategis Tahap 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik dengan indikator sasaran strategis yaitu: Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN, persentase penanganan pengaduan tepat waktu, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan; (3) Sasaran Strategis Tahap 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional dengan indikator sasaran strategis yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Nilai Sistem Merit (NSM), Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), predikat opini WTP merupakan hasil audit dari BPK.

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 006)

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI *jo* Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, antara lain mengatur bahwa Kejaksaan RI mempunyai tugas menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU, yang dipimpin oleh Jaksa Agung untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kejaksaan RI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kejaksaan RI antara lain pembinaan SDM, penyusunan perencanaan strategis dan kinerja organisasi, serta pengelolaan Teknologi Informasi (TI) dan dokumentasi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kejaksaan RI *audited* sebesar Rp18.787,8 miliar yang terdiri atas belanja program dukungan manajemen, antara lain mencakup: (1) kegiatan yang bersifat administratif dan pendukung internal seperti pembinaan SDM, dukungan sarana prasarana, serta perencanaan dan pengawasan, serta (2) belanja program penegakan dan pelayanan hukum, antara lain mencakup pelaksanaan fungsi penegakan hukum Kejaksaan, penuntutan dan eksekusi, penyidikan tindak pidana tertentu, serta bantuan hukum dan pertimbangan hukum. Realisasi anggaran Kejaksaan RI tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) mendukung seluruh program dan kegiatan PN, dan (2) prioritas lainnya seperti peningkatan kualitas SDM Kejaksaan**.** Kegiatan yang mendukung PN antara lain diarahkan untuk: (1) memperkuat/meningkatkan/ mendukung/memperluas aspek-aspek seperti integritas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan; (2) meningkatkan efektivitas penegakan hukum; (3) meningkatkan penggunaan TI dan digitalisasi proses kerja; serta (4) memperkuat pengawasan internal dan tata kelola organisasi demi mewujudkan Kejaksaan RI yang profesional, transparan, dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan PN. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk memenuhi peningkatan kualitas aparatur SDM Kejaksaan.

Sumber dana pada anggaran Kejaksaan RI yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari RM sebesar 99,2 persen, dan yang bersumber dari Nonrupiah Murni (Non-RM) selain PLN dan PDN sebesar 0,8 persen. Kegiatan PNdan/atau prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain perumusan rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas apartur SDM Kejaksaan RI. Adapun manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja Kejaksaan RI antara lain untuk: (1) memberikan pelayanan hukum yang lebih cepat dan tepat, transparan dan akuntabel; (2) mendukung penguatan kapasitas aparatur Kejaksaan RI, serta (3) memberikan akses layanan hukum yang lebih luas dan merata.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Kejaksaan RI dialokasikan sebesar Rp24.276,1 miliar dan *outlook* realisasi sebesar Rp23.985,3 miliar, dimanfaatkan untuk: (1) belanja operasional antara lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman (*magistraat*) seperti kepentingan penegakan hukum baik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, pemulihan aset, kegiatan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset; serta (2) belanja non-operasional antara lain untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan kinerja penegakan hukum,

peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas apartur SDM, dan tugas/fungsi lainnya di bidang manajerial yutisial (*officer van justitie*). Dari anggaran tahun 2025, anggaran Kejaksaan RI dimanfaatkan antara lain untuk: (1) mendukung seluruh program dan kegiatan PN; serta (2) mendukung prioritas lainnya. Kegiatan Kejaksaan RI yang mendukung PN antara lain diarahkan untuk memperkuat/ meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum; pelaksanaan RPJPN 2025-2029; dan kegiatan yang langsung mengarah pada pelayanan hukum yang baik untuk masyarakat.

Sedangkan kegiatan Kejaksaan RI yang mendukung prioritas lainnya diarahkan antara lain untuk: (1) program penegakan dan pelayanan hukum; dan (2) program dukungan manajemen untuk kepentingan penegakan hukum. Selain iru, anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari RM sebesar 96,7 persen, dan anggaran non-RM yang berasal dari SBSN sebesar 1,7 persen, dan non-RM berasal dari PNBP sebesar 1,6 persen. Kegiatan PN dan/ atau prioritas lainnya masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung PN dan/atau prioritas lainnya antara lain peningkatan kualitas penegakan hukum, peningkatan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan hukum Kejaksaan kepada masayrakat.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Kejaksaan RI dialokasikan sebesar Rp20.250,0 miliar, antara lain dimanfaatkan untuk: (1) mendukung PN melalui kegiatan layanan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri; (2) mendukung operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara; (3) memberikan rekomendasi kebijakan evaluasi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan *restorative;* (3) mendukung pengembangan RSU Adhyaksa DK Jakarta, pembangunan RSU Adhyaksa Bali, pembangunan rumah Susun negara/mess Kejaksaan di wilayah Papua dan Maluku; dan (4) mendukung prioritas lainnya melalui kegiatan penanganan perkara, belanja pegawai, layanan Perkantoran, Belanja Modal, serta belanja sarana dan prasarana. Sasaran strategis Kejaksaan RI tahun anggaran 2026 antara lain untuk; (1) peningkatan kualitas aparatur penegakan hukum; (2) peningkatan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi; serta (3) peningkatan profesionalisme serta kesejahteraan aparatur Kejaksaan.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis anggaran Kejaksaan RI tahun anggaran 2026, maka *output* Kejaksaan RI antara lain meliputi: (1) layanan penyuluhan hukum di lingkungan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan target sebesar 4.135 kegiatan penyuluhan; (2) operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset dengan target sebesar 25 perkara; (3) penyusunan rekomendasi kebijakan evaluasi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dengan target 1 rekomendasi kebijakan; (4) pengembangan RSU Adhyaksa DK Jakarta dan pembangunan RSU Adhyaksa Bali dengan target sebesar dua rumah sakit; serta (5) pembangunan satu rumah susun negara/*mess* Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Proyeksi arah kebijakan strategis Kejaksaan RI pada tahun 2027-2029 berdasarkan RPJMN 20252029 maupun Rencana Strategis Kejaksaan RI antara lain melalui dua program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program berikut dibawah ini.

1. Program Dukungan Manajemen, sebagai berikut:
    a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI;
    b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI;
    c. Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI;

d. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI;
e. Meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI;
f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI;
g. Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum;
h. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
i. Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI;
j. Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen;
k. Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI;
l. Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI;
m. Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
n. Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani;
o. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berbasis TI;
p. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI.

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara;
   b. Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara;
   c. Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional;
   d. Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien;
   e. Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional;
   f. Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
   g. Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
   h. Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional;
   i. Meningkatnnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain;
   j. Meningkatnnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer;
   k. Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan;
   l. Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan;
   m. Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi;
   n. Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern;
   o. Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan;
   p. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum;
   q. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum; dan
   r. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan RI, maka ditetapkan Sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program. Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Arah

kebijakan dan strategi Kejaksaan RI yang telah dirumuskan pada sebelumnya, akan dilaksanakan melalui dua program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
(BA 007)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara antara lain mengatur bahwa Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut,

1. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden,
2. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara,
3. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing,
4. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, dan pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, serta penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, penyelesaian permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, perubahan pidana mati atau perubahan pidana penjara seumur hidup, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional,
5. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri, serta penyelenggaraan kemitraan,
6. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir,
7. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah,
8. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden,
9. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama,
10. pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian,

11. pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian,
12. koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian,
13. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan,
14. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian,
15. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri,
16. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian, dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Sekretariat Negara *audited* dialokasikan sebesar Rp5.068,3 miliar, antara lain dimanfaatkan untuk belanja pegawai serta operasional dan pemeliharaan kantor dan belanja non operasional, serta untuk dukungan Prioritas Nasional layanan kerja sama selatan-selatan dan memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 0,13 persen. Kegiatan Prioritas Nasional masih tetap berlanjut ke tahun 2025 berupa layanan kerja sama selatan-selatan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu peningkatan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain penyiapan pergantian Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum dan penyiapan fasilitas sarana prasarana Istana dan kantor Kementerian Sekretariat Negara di Ibukota Nusantara dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam APBN tahun 2025, *outlook* Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp2.901,9 miliar, antara lain untuk belanja pegawai serta operasional dan pemeliharaan kantor dan belanja non operasional, serta dukungan Prioritas Nasional layanan kerja sama selatan-selatan *triangular* (KSST), dan kegiatan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat kerja sama pembangunan internasional. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 0,2 persen. Kegiatan Prioritas Nasional yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 yaitu dukungan Prioritas Nasional layanan kerja sama selatan-selatan dan pelaksanaan manajemen pengetahuan KSST. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional yaitu peningkatan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam APBN tahun 2026, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan sebesar Rp2.609,4 miliar. Berdasarkan hasil rekonstruksi, pemanfaatan alokasi anggaran tersebut antara lain untuk belanja pegawai serta operasional dan pemeliharaan kantor; belanja non operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara. Dari total alokasi anggaran tahun 2026, sebesar 0,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik luar negeri. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain mendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional agar tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, melakukan *refocusing* dan rekonstruksi anggaran dalam rangka pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara yaitu dukungan Prioritas Nasional layanan kerja sama selatan-selatan dan pelaksanaan manajemen pengetahuan KSST.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri antara lain mengatur bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Dalam Negeri juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri antara lain seperti:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
4. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
6. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri.
7. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) *audited* dialokasikan sebesar Rp5.169,3 miliar, yang antara lain dimanfaatkan untuk gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran, dan belanja non operasional, antara lain untuk: penyepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara; pengintegrasian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional; penyaluran bantuan keuangan ke partai politik; pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK nasional; pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp.391,4 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp.3.450 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik; serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Adapun kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya antara lain untuk: Pengembangan SIPD; pengawasan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dan Tim Pengendalian Inflasi (TPID); pelaksanaan forum komunikasi sosial

dan penguatan demokrasi dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2024; penanganan konflik pertanahan di daerah; fasilitasi penataan kelembagaan PKK dan Posyandu, pengelolaan keuangan desa, dan pengembangan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel); pemenuhan pendanaan Pilkada serentak dan fasilitasi daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); dan penyediaan jasa jaringan komunikasi data, pengadaan blangko, dan pengelolaan penerbitan KTP-el.

Seluruh alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 62,17 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 28,66 persen, Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 4,64 persen dan PNBP sebesar 4,52 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: pengelolaan implementasi SIPD; bantuan keuangan partai politik; pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional; percepatan pencegahan dan penurunan stunting; implementasi kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP); asistensi dan supervisi pembentukan UPTD/BLUD; *Flood Management and Coastal Protection in North Java Project* (FMCPNJP); dan pengembangan aplikasi digital ID.

Selanjutnya untuk kontrak tahun jamak, antara lain: percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*; implementasi kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP); *Flood Management and Coastal Protection in North Java Project* (FMCPNJP); Program Penguatan Pemerintahan serta Pembangunan Desa (P3PD); dan *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project* yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Tersalurkannya bantuan keuangan partai politik kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sebagai upaya penguatan kelembagaan partai politik tahun 2024.
2. Menguatnya penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi dan 306 Kabupaten/Kota.
3. Menguatnya penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 kepada 546 daerah.
4. Terlaksananya pengesahan APBD di 25 provinsi secara tepat waktu, dan sebanyak 542 daerah pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5 persen pada provinsi dan 8 persen pada kabupaten/kota dari tahun sebelumnya.
5. Percepatan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) melalui pelatihan bagi 123.854 aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, dan terselenggaranya pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional sebanyak 930 orang.
6. Terlaksananya perekaman KTP-elektronik sebanyak 203.986.447 jiwa atau mencapai 98,24 persen, dan penerbitan dokumen kependudukan (akta kelahiran sebanyak 77.016.736 jiwa atau 99,03 persen, akta kematian sebanyak 11.279.440 akta, akta perkawinan sebanyak 87.469.241 akta, akta perceraian sebanyak 3.238.261 akta, dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 44.203.619 jiwa atau mencapai 59,59 persen).
7. Terselenggaranya evaluasi kinerja kepada 275 penjabat kepala daerah (28 penjabat gubernur, 191 penjabat bupati, dan 56 penjabat walikota) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
8. Terselenggaranya pemantauan inflasi di provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia dan melaksanakan rapat koordinasi secara mingguan bersama kementerian/lembaga terkait secara

rutin; kolaborasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) menghasilkan angka inflasi yang terjaga dengan capaian inflasi bulan Desember 2024 sebesar 1,57 persen secara *YoY*.

9. Terselenggaranya Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2024 dengan kuota sejumlah 721 orang dengan jumlah pendaftar sebanyak 35.918 orang.
10. Terwujudnya pembinaan inovasi daerah dan penilaian inovasi daerah pada 529 pemerintah daerah yang berpartisipasi melaporkan data inovasi melalui aplikasi indeks inovasi daerah dengan total inovasi sebanyak 31.719 untuk diberikan Penghargaan *Innovative Government Award* tahun 2024.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum yaitu penyesuaian program anggaran dengan adanya kebijakan nasional *Automatic Adjustment* Belanja *K/L* dan efisiensi belanja yang berdampak belum optimalnya pencapaian target keluaran *(output)* dan lambatnya pelaksanaan anggaran. Sementara itu, beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: pencermatan kegiatan yang fokus berdampak langsung kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran; serta *refocusing* anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak dan tidak dapat ditunda, dengan tetap menjaga kualitas keluaran *(output)* kegiatan.

Dalam APBN tahun 2025, *outlook* realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2.973,6 miliar. Adapun APBN tahun 2025 anggaran Kementerian Dalam Negeri antara lain untuk belanja gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran dan belanja non operasional miliar, antara lain untuk: penguatan kerja sama pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya; fasilitasi daerah dalam penerapan SPM urusan pendidikan berdasarkan tipologi daerah; pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional; peningkatan daerah dengan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD; penyaluran bantuan keuangan ke partai politik; pelayanan koneksitas *warehouse* berbasis NIK nasional; pengelolaan implementasi SIPD; serta pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah.

Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya antara lain untuk: pengelolaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) termasuk bidang keuangan daerah; pengawasan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; penataan lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pemutakhiran profil desa dan kelurahan; fasilitasi peningkatan kinerja kabupaten/kota dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan daerah, penerapan perencanaan dan penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT); pengadaan blangko KTP-el, penyediaan jasa jaringan komunikasi data secara *online* dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Seluruh alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 67,3 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 31,6 persen, Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen, dan PNBP sebesar 1,0 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: pengembangan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); serta pengembangan SIPD kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini, bantuan keuangan partai politik, pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional, sedangkan untuk kegiatan yang berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun jamak, antara lain *ID for Inclusive Service Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project* yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Terlaksananya pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024 secara serentak sebanyak 961 orang yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur untuk 33 provinsi, 363 bupati dan 362 wakil bupati untuk 363 kabupaten, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
2. Terselenggaranya Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang diikuti oleh 1.065 orang yang terbagi dalam dua gelombang, yaitu gelombang pertama diikuti oleh 979 orang di Akmil, Magelang, Jawa Tengah dan gelombang kedua diikuti oleh 86 orang di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
3. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang diikuti oleh 1.020 peserta, terdiri atas 38 Sekretaris Daerah Provinsi, 35 Kepala Bappeda Provinsi, 468 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan 479 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
4. Tercapainya perekaman KTP elektronik sebanyak 206.059.056 jiwa atau mencapai 97,05 persen (data per 6 November 2025).
5. Terselenggaranya Pemadanan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan yang bersumber dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu data diterima sebanyak 286.917.226 jiwa; data padan sebanyak 286.907.699 jiwa (99,99 persen); dan data padan meninggal sebanyak 729.834 jiwa (data per 17 Juli 2025).
6. Tersalurkannya bantuan keuangan partai politik kepada 8 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR-RI hasil Pemilu 2024 sebagai upaya penguatan kelembagaan partai politik Tahun 2025.
7. Terlaksananya Perundingan ke-45 *Joint Indonesia-Malaysia* (*JIM*) *Boundary Committee* pada 17-20 Februari 2025 di Jakarta yang membahas survei dan demarkasi batas darat negara di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
8. Terlaksananya penandatanganan *MoU* Kemendagri bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dengan 24 Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia pada 17 April 2025 sebagai dukungan terhadap perluasan implementasi SP2D *Online* melalui SIPD.
9. Penguatan Kelembagaan Posyandu pada 540 Lembaga di 38 Provinsi dalam Pelaksanaan Registrasi Posyandu 6 Bidang SPM melalui Kepmendagri Nomor 100.3-2843 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Posyandu.
10. Terlaksananya monitoring dan evaluasi mingguan kepatuhan pemerintahan daerah dalam melaksanakan Program Prioritas Presiden, diantaranya Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Koperasi Merah Putih, Pembangunan 3 Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

11. Terwujudnya penguatan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD Rl) sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2025 kepada 546 daerah.

Sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, anggaran Kemendagri TA.2025 dikenakan efisiensi sebesar Rp2.174,0 miliar atau 45,37 persen dari pagu APBN tahun 2025. Selanjutnya, telah dilakukan relaksasi sebesar Rp1.138,0 miliar untuk mengakomodasi kegiatan prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional yang menjadi penugasan Kementerian Dalam Negeri, dan kegiatan yang mendesak.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp7.800,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 20,0 persen atau Rp1.561,0 miliar dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Presiden di daerah yaitu: pertumbuhan ekonomi; pengendalian inflasi; Makan Bergizi Gratis; pembangunan 3 juta rumah; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Sekolah Rakyat; swasembada dan lumbung pangan; cek kesehatan gratis; penanganan sampah; fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi; serta program bantuan pemerintah insentif/penghargaan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, sebesar 11,5 persen atau Rp900,7 miliar dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional yang diarahkan untuk:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
6. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: pemantapan demokrasi dan stabilitas politik dalam negeri, hukum, trantibum linmas dan pengawasan pemerintahan daerah; penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa; penguatan implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi dan pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Berdasarkan Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025, telah disusun Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk periode jangka menengah 5 tahun ke depan, yang didasarkan pada Visi Kemendagri yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
2. Untuk mewujudkan Visi Tahun 2025-2029 tersebut, Kemendagri menjabarkan dalam 4 Misi sebagai berikut:
    a. Memperkuat implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
    b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
    c. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
    d. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Dalam Negeri mendapat penugasan sebanyak 5 Indikator Program Prioritas dan 22 Indikator Kegiatan Prioritas, antara lain yaitu:
    a. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
    b. Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkategori "Sangat Baik".
    c. Indeks Penerapan SPM.
    d. Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB *(local tax ratio)*.
    e. Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori "Baik".
4. Selain melaksanakan penugasan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas pada RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Dalam Negeri juga melaksanakan Rincian Output Prioritas Nasional serta Prioritas Kementerian Dalam Negeri. Terhadap kegiatan prioritas tersebut, terdapat target kinerja yang selesai pelaksanaannya di tahun 2027 antara lain terkait penyusunan rekomendasi masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan terdapat kegiatan yang akan berlanjut pelaksanaannya pada periode 2027-2029 antara lain yaitu fasilitasi peningkatan mutu dan layanan SPM dan peningkatan angka Indeks Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berkategori "Sangat Baik".

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Luar Negeri juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri antara lain seperti perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, pengoordinasian, sinkronisasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengoordinasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan RI, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Perwakilan RI, pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian dan Perwakilan RI, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri *audited* sebesar Rp8.912,0 miliar yang antara lain dimanfaatkan untuk belanja pegawai, belanja operasional perkantoran dan belanja non operasional seperti kegiatan diplomasi bilateral dan multilateral, pelindungan WNI di luar negeri, dan kegiatan pelayanan publik. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk melaksanakan kegiatan terkait perundingan batas maritim, implementasi perjanjian pengelolaan ruang udara, pemutakhiran kebijakan satu peta, optimalisasi kontribusi indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MP PBB, pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia serta penguatan infrastruktur diplomasi. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN . Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain perundingan batas maritim, optimalisasi kontribusi indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MP PBB, dan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain adanya dukungan dan pemahaman dunia internasional terhadap keutuhan wilayah Indonesia, terselesaikannya negosiasi batas negara Indonesia, meningkatnya peran Indonesia bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, terlindunginya WNI di luar negeri melalui penguatan sistem pelindungan baik melalui kebijakan maupun inovasi digital. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain diplomasi ekonomi yang melibatkan banyak pemangku

kepentingan belum terkoordinasi secara optimal dan terstruktur dengan baik, sehingga prioritas dan strategi kerja sama ekonominya tidak sejalan, dinamika politik dalam negeri Indonesia dan negara mitra yang mempengaruhi jalannya perundingan, dan adanya modus kejahatan lintas negara yang kompleks dan terus berkembang. Sebagai contoh di tahun 2024 terdapat perkembangan kasus online scam di wilayah Asia Tenggara yang menyita perhatian publik. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain: (1) pelaksanaan forum koordinasi perdana lintas kementerian yang dikoordinir Kemenlu untuk membahas *cross-cutting issue* yang berdimensi hubungan luar negeri; (2) kampanye dan sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat sebagai langkah preventif diplomasi; (3) memperkuat koordinasi dan kerja sama antar Lembaga untuk pelayanan dan perlindungan WNI; dan (4) peningkatan kapasitas SDM di Pusat dan Perwakilan RI untuk penangangan kasus-kasus menonjol.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, *outlook* realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri diproyeksikan sebesar Rp8.700,0 miliar dan dimanfaatkan antara lain untuk belanja pegawai, belanja operasional perkantoran dan belanja non operasional seperti untuk kegiatan diplomasi bilateral dan multilateral, pelindungan WNI di luar negeri, dan kegiatan pelayanan publik. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp182,0 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp9.604,0 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat: (1) penetapan batas maritim/penegasan batas barat; (2) peran aktif Indonesia sebagai anggota HAM PBB; (3) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MP PBB; (4) diplomasi hilirisasi industri dan mineral kritis, (5) rekomendasi kebijakan terkait diplomasi ekonomi guna mendorong kemitraan strategis; (6) grand design strategi dan dasar hukum kerja sama pembangunan internasional,; (7) kebijakan peningkatan peran diaspora dalam pembangunan nasional; (8) kebijakan pengembangan aset soft power,; (9) pelayanan dan pelindungan WNI di Luar Negeri (oleh Kemenlu Pusat); (10) koordinasi dan kerja sama pelayanan dan pelindungan; (11) pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri (oleh Perwakilan RI) dan (12) penyusunan strategi kebijakan penguatan postur diplomasi. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk: (1) peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global; (2) diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional melalui penguatan promosi *Trade, Tourism, and Investment* (TTI) dan integrasi dalam ekonomi global; (3) perluasan kerja sama ekonomi internasional untuk mendorong daya saing, serta penguatan posturing kerja sama pembangunan internasional; dan (4) peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) penetapan batas maritim/penegasan batas barat; (2) peran aktif Indonesia sebagai Anggota HAM PBB; (3) optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MP PBB; (4) rekomendasi kebijakan terkait diplomasi ekonomi guna mendorong kemitraan strategis; (5) grand design strategi dan dasar hukum kerja sama pembangunan internasional; (6) kebijakan peningkatan peran diaspora dalam pembangunan nasional; (7) kebijakan pengembangan aset *soft power*; (8) pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri (oleh Kemenlu Pusat); (9) koordinasi dan kerja sama pelayanan dan pelindungan; (10) pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri (oleh Perwakilan RI); dan (11) koordinasi penyusunan regulasi pendukung postur diplomasi. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terjaganya kedaulatan Indonesia serta meningkatnya kontribusi Indonesia pada forum internasional, menguatnya ketahanan pangan,

energi dan transformasi digital melalui kerja sama strategis dengan mitra global melalui pelaksanaan diplomasi ekonomi hingga mengoptimalkan kontribusi diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Kementerian Luar Negeri dialokasikan sebesar Rp10.220,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (1) penguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam forum dan organisasi internasional, pembangunan postur diplomasi, serta pelibatan diaspora indonesia; (2) pengembangan diplomasi kebudayaan; (3) penguatan diplomasi ekonomi; (4) perlindungan dan pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri; dan (5) percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *Good Neighbour Policy*. Selebihnya untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata; (2) peningkatan kualitas diplomasi Indonesia dalam menyukseskan prakarsa dan rekomendasi kebijakan dalam forum regional dan global; (3) penguatan hukum dan perjanjian internasional serta koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional yang meliputi hukum dan perjanjian di bidang sosial, ketenagakerjaan dan migrasi, pendidikan, riset, kesehatan, kebudayaan, perdagangan, investasi serta pada bidang lingkungan hidup; dan (4) pemberian layanan keprotokoleran dalam rangka kunjungan Presiden/Wakil Presiden dan delegasi tingkat tinggi lainnya . Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (1) penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional melalui intensifikasi promosi dan pembentukan norma dalam rangka mencapai kesepakatan di bidang ekonomi terutama pada sektor prioritas serta pembangunan internasional sesuai dengan prioritas nasional; (2) peningkatan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, membangun postur diplomasi serta meningkatkan pelibatan diaspora Indonesia; dan (3) percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI, termasuk Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Luar Negeri pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri antara lain Penguatan integritas kedaulatan NKRI dan diplomasi ketahanan nasional, Peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi tawar Indonesia, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, berkesinambungan, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia, peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap wni di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia, peningkatan keterlibatan aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional, peningkatan diplomasi *soft power* dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional, penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan mengatur bahwa Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pertahanan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan, antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, pelaksanaan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan, pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan, pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan keveteranan, pelaksanaan pengembangan teknologi pertahanan, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dalam APBN Tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan *audited* sebesar Rp190.461,9 miliar, yang pemanfaatannya antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan belanja non operasional antara lain untuk operasi, dukungan kesiapan operasi TNI, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, peningkatan perumahan dinas, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, pengadaan Alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista/non-Alutsista, pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, pembinaan potensi dan kekuatan sumber daya pertahanan, pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, dan penelitian dan pengembangan pertahanan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung kesiapan operasi TNI, peningkatan perumahan prajurit TNI, pengadaan Alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista/non-Alutsista, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan potensi dan kekuatan sumber daya pertahanan, pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, penelitian, dan pengembangan pertahanan.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan pertahanan. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain kesiapan operasi TNI, peningkatan perumahan prajurit TNI, pengadaan Alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista/non Alutsista,

pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan potensi dan kekuatan sumber daya pertahanan, pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, dan penelitian dan pengembangan pertahanan dan Kontrak Tahun Jamak antara lain pengadaan KRI/ KAL/Alpung, pengadaan senjata, pengadaan amunisi, pemeliharaan dan perawatan KRI/KAL/ Alpung, pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kesadaran bela negara bagi masyarakat, percepatan modernisasi Alutsista dan Sarpras pertahanan TNI, perkuatan operasional dan kesiapsiagaan tempur prajurit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI dan penguatan peran TNI dalam diplomasi pertahanan dan kerjasama lnternasional. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran Tahun 2024 secara umum adalah anggaran yang masih terbatas sehingga terdapat penundaan kegiatan yang sudah diprogramkan. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain menyusun kegiatan secara tepat sesuai dengan prioritas dan bersifat mendesak.

Dalam APBN Tahun 2025, *outlook* realisasi anggaran Kementerian Pertahanan diproyeksikan sebesar Rp247.525,7 miliar, yang dimanfaatkan antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, dan belanja non operasional seperti operasi, dukungan kesiapan operasi TNI, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, peningkatan perumahan dinas, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, pengadaan Alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista/non-Alutsista, pembangunan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, pembinaan potensi dan kekuatan sumber daya pertahanan, pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, dan penelitian dan pengembangan pertahanan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas dan prioritas lainnya.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung kesiapan operasi TNI, peningkatan perumahan prajurit TNI, pengadaan Alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista/non Alutsista, pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan potensi dan kekuatan sumber daya pertahanan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan pertahanan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai Kontrak Tahun Tunggal antara lain peningkatan perumahan prajurit TNI, pengadaan Alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista/Non Alutsista, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan potensi dan kekuatan sumber daya pertahanan, pembinaan dan pengembangan industri pertahanan, dan penelitian dan pengembangan pertahanan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terjaganya kedaulatan NKRI dan perekonomian masyarakat sekitar, menumbuhkan kesadaran bela negara dan mendorong terciptanya kemandirian bangsa, peningkatan operasional di jajaran TNI, penguatan kesiapan personel dan materiel untuk menghadapi konflik dan gangguan keamanan dari negara asing, percepatan modernisasi dan pemeliharaan Alutsista, penguatan lnfrastruktur pangkalan dan dukungan logistik TNI dan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp187.100,0 miliar[1], dari total anggaran yang ada, sebesar 31,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan dukungan kesiapan operasi, peningkatan perumahan dinas prajurit, pengadaan Alutsista strategis, pemeliharaan/perawatan/peningkatan Alutsista, dan pembangunan/pengadaan sarpras pertahanan, dan sebesar 69,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan latihan, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, perumusan kebijakan dan regulasi pertahanan negara, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan pertahanan.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain melalui pemenuhan dan modernisasi Alutsista, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, penguatan komponen cadangan, dan penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Pertahanan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan antara lain terwujudnya postur pertahanan negara yang memenuhi kekuatan pokok TNI yang optimal (*optimum essential force*), terwujudnya wilayah perbatasan, wilayah perairan, wilayah yurisdiksi laut, laut lepas, dan wilayah udara serta daerah rawan yang bebas baik dari pelanggaran maupun ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa, terwujudnya kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional dan sejahtera, meningkatnya sinergi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam menghadapi segala ancaman, pengelolaan sumber daya pertahanan, dan pemberdayaan wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara, terwujudnya Industri Pertahanan dalam negeri guna mendukung kemandirian dalam pemenuhan Alpalhankam, meningkatnya pengaruh dan peran diplomasi pertahanan di kawasan dan global, dan terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan bidang pertahanan yang baik.

1 sebagian dicadangkan

KEMENTERIAN KEUANGAN
(BA 015)

Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi utama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Selain fungsi utama tersebut, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi pendukung antara lain: 1) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; 4) pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan; 5) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; 6) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; 7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Keuangan *audited* dialokasikan sebesar Rp82.826,2 miliar, antara lain untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional seperti pemeliharaan aset, kebutuhan dasar perkantoran, langganan daya dan jasa, serta sewa operasional perkantoran dan belanja non operasional seperti untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, penyediaan sarana prasarana, dan kebutuhan TIK Strategis. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk kegiatan promosi ekspor UMKM; pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN); *joint task force on narcotics*; pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi; dan dukungan jaminan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengembangan audit *algorithm* untuk pengawasan; perumusan *Asean Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN); dan evaluasi penerbitan *green sukuk*. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain promosi ekspor UMKM; beasiswa dokter spesialis; *joint task force on narcotics*; dan perumusan *Asean Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) dan tidak terdapat Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya sebagai kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terbukanya peluang UMKM berbasis ekspor; perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal, termasuk Narkotika, Psikotropika dan Prekursor; peningkatan kapasitas SDM bidang kesehatan; jaminan ketersediaan cadangan pangan, dan penguatan pendanaan bagi usaha mikro. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain perlunya asistensi yang intensif kepada UMKM terkait dengan ekspor, proses pendanaan pengadaan tanah PSN memiliki eksternalitas tinggi, terdapat keterbatasan literatur baik kajian maupun *paper* yang membahas terkait dengan signifikansi *greenium* dalam penerbitan sukuk.

Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain peningkatan kapasitas UMKM untuk melakukan ekspor; dukungan pembiayaan untuk PSN; pemanfaatan AI dalam pelaksanaan audit; dan implementasi ekonomi hijau.

Dalam APBN tahun 2025, *outlook* anggaran Kementerian Keuangan diproyeksikan sebesar Rp71.461,4 miliar, yang dimanfaatkan antara lain untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional seperti pemeliharaan aset, kebutuhan dasar perkantoran, langganan daya dan jasa, serta sewa operasional perkantoran, dan belanja non operasional seperti untuk untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, penyediaan sarana prasaran, dan kebutuhan TIK Strategis. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional maupun Prioritas lainnya, Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk kegiatan promosi ekspor UMKM; sinergi patroli laut terkoordinasi; perumusan rekomendasi penguatan pengelolaan Sumber Daya Alam; *Joint Task Force On Narcotics*; perumusan rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; dukungan jaminan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah; pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel; perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka persiapan aksesi Indonesia pada OECD; implementasi digital payment marketplace pada satker Kementerian Negara/Lembaga; dan pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi. Kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengembangan CEISA 4.0: *driving digital transformation*; penyiapan dan pengembangan transaksi dalam rangka percepatan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif; perumusan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclatures*; dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain promosi ekspor UMKM; sinergi patroli laut terkoordinasi; dukungan jaminan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah; pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi; dan perumusan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclatures* dan dan tidak terdapat Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya sebagai kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terbukanya peluang UMKM berbasis ekspor; perlindungan masyarakat dari peredaran barang ilegal, termasuk Narkotika, Psikotropika dan Prekursor; percepatan layanan ekspor-impor; jaminan ketersediaan cadangan pangan, dan penguatan pendanaan bagi usaha mikro.

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar Rp52.016,0 miliar dari total anggaran yang ada, dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan promosi ekspor UMKM; sinergi patroli laut terkoordinasi; perumusan rekomendasi penguatan pengelolaan Sumber Daya Alam; Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah; implementasi *digital payment marketplace* pada satker Kementerian Negara/Lembaga; pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel; beasiswa afirmasi; serta pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi. kemudian anggaran juga akan dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti perumusan rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; pengembangan transformasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) berkelanjutan; pembangunan smart customs and excise system; kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan TPPU lintas negara; peningkatan kapasitas SDM khusus di bidang kepatuhan perpajakan; dan pengawasan keamanan informasi sistem pengelolaan keuangan negara model tiga lini. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain kebijakan peningkatan penerimaan negara yang dilaksanakan melalui efektivitas reformasi perpajakan; penguatan Coretax, CEISA,

SIMBARA; reformasi pengelolaan SDA dan BMN; dan insentif fiskal yang terukur. Dari sisi kebijakan belanja negara dilaksanakan melalui efisiensi dan efektivitas belanja pusat dan daerah; subsidi dan perlinsos yang efektif dan tepat sasaran, serta sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selanjutnya, dari sisi kebijakan pembiayaan negara dilaksanakan melalui efektivitas belanja investasi; perluasan dukungan pemerintah untuk skema pembiayaan kreatif, penguatan peran DANANTARA, BUMN, BLU, dan SMV; efisiensi pembiayaan anggaran untuk antisipasi ketidakpastian; serta kolaborasi fiskal, moneter, sektor keuangan dan Pemda.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 antara lain peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi pendapatan negara, baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); optimalisasi belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja negara dengan penguatan jenis belanja produktif dan bersifat countercyclical dalam rangka percepatan investasi publik; serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif yang dikelola secara prudent dan kredibel untuk menutup *financing gap* APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian antara lain mengatur bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, keamanan pangan, pascapanen, serta hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas bidang tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pertanian juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian, penyelenggaraan perakitan dan modernisasi pertanian, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, realiasi anggaran Kementerian Pertanian *audited* sebesar Rp14.305,7 miliar, yang pemanfaatannya antara lain untuk belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, dan belanja non-operasional seperti untuk peningkatan produksi padi dan jagung melalui kegiatan optimasi lahan rawa, penyediaan benih (padi dan jagung), alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen, sarana produksi (pupuk dan pestisida), pompanisasi air sungai untuk lahan tahan hujan, peningkatan produksi hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya), peningkatan produksi peternakan (daging, susu, telur, dan lainnya), peningkatan produksi perkebunan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, standardisasi instrumen pertanian, pengawasan dan pengendalian internal, serta kegiatan kesekretariatan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas pangan strategis utamanya padi dan jagung, komoditas hortikultura, komoditas perkebunan, dan komoditas peternakan dalam rangka pencapaian swasembada pangan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis berupa pengawasan dan pengendalian internal, koordinasi, kerjasama, dan kegiatan strategis mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain kegiatan olah lahan optimasi lahan yang Survei Investigasi Desain (SID) dan konstruksinya telah dikerjakan tahun 2024, lanjutan pompanisasi/perluasan areal tanam, penyediaan benih padi dan sarana produksi, dan sebagainya, dan tidak ada untuk kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain ketersediaan pangan yang mencukupi utamanya beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, kemudahan mendapatkan akses pupuk (bersubsidi) bagi petani, peningkatan lapangan kerja pada sektor pertanian, dan sebagainya. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain terbatasnya anggaran, perubahan struktur organisasi yang mengurangi cakupan tugas, fungsi

dan kewenangan Kementerian Pertanian, serta dinamika lingkungan eksternal seperti dampak perubahan iklim ekstrem kekeringan (El Niño) dan ekstrem basah (La Nina), serangan hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, pandemi Covid, serta disrupsi terhadap distribusi komoditas pangan strategis akibat ketegangan geopolitik global. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain optimalisasi anggaran internal melalui refocusing anggaran untuk program strategis peningkatan produksi pangan terutama padi dan jagung, perluasan areal tanam melalui kegiatan pompanisasi untuk antisipasi dampak iklim ekstrem berkepanjangan, dan kegiatan strategis lainnya.

Dalam APBN tahun 2025, *outlook* anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan sebesar Rp27.300,8 miliar, yang dimanfaatkan antara lain untuk belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, dan belanja non operasional yang dipergunakan antara lain untuk mendukung program pencapaian swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia berupa cetak sawah, olah lahan optimasi lahan tahun 2024, optimasi lahan baru tahun 2025, perluasan area tanam/pompanisasi, tumpang sisip padi gogo pada lahan perkebunan, pemanfaatan potensi tanam Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk penyediaan benih (padi dan jagung), alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen, sarana produksi (pupuk dan pestisida), peningkatan produksi hortikultura dan peternakan (mendukung pekarangan pangan bergizi), peningkatan produksi perkebunan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, perakitan dan modernisasi pertanian, hilirisasi komoditas pertanian, pengawasan dan pengendalian internal, serta kegiatan kesekretariatan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas pangan strategis utamanya padi dan jagung, komoditas hortikultura, komoditas perkebunan, dan komoditas peternakan dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis berupa pengawasan dan pengendalian internal, koordinasi, kerjasama, dan kegiatan strategis mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, PLN dan PDN, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sesuai dengan Pagu Indikatif yang ditetapkan sebagai kontrak tahun tunggal antara lain olah lahan kegiatan optimasi lahan tahun 2025 dan cetak sawah tahun 2025, termasuk penyediaan benih (padi) dan sarana produksi (pupuk), alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen, dan tidak ada untuk kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara ketersediaan pangan yang mencukupi utamanya beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, kemudahan mendapatkan akses pupuk (bersubsidi) bagi petani, peningkatan lapangan kerja pada sektor pertanian, dan sebagainya.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan sebesar Rp40.145,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: a) Perluasan area dan perlindungan lahan melalui kegiatan: cetak sawah seluas 250.000 ha, optimalisasi lahan seluas 300.000 ha, olah tanah cetak sawah 2025 seluas 225.000 ha, lahan konservasi dan rehabilitasi, penyediaan jalan usaha tani; b) Peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas-komoditas strategis lainnya, utamanya yang masih bergantung pada impor seperti: komoditas perkebunan: kelapa, lada, tebu, kopi, kakao, jambu mete, pala, sagu; komoditas tanaman pangan: ubi, gandum, pangan lokal; serta komoditas hortikultura: bawang merah dan putih, cabai, buah dan florikultura; c) Penyediaan irigasi untuk lahan pertanian terdiri atas: irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi air, operasional pemeliharaan jaringan irigasi

tersier, serta survei investigasi desain (SID) jaringan irigasi tersier; d) Penyiapan benih unggul baik benih sumber dan benih sebar; e) Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen; g) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida melalu penyediaan pembenah tanah dan pestisida; h) Mendukung hilirisasi komoditas strategis pertanian; i) Peningkatan produksi susu, daging sapi, dan unggas, termasuk pengendalian terhadap Penyebaran Penyakit Hewan Menular Stratgis (PHMS) melalui vaksinasi. Adapun untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengawasan dan pengendalian internal, koordinasi, kerjasama, dan kegiatan strategis lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis, termasuk pengalokasian anggaran Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan kinerja) pengalihan penyuluh pertanian daerah ke pusat.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Pertanian pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian sesuai Prioritas Nasional (PN) 2 berupa pencapaian Swasembada Pangan dan berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bioenergi dalam mewujudkan Swasembada Energi, sedangkan kontribusi pada Prioritas Nasional (PN) 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian, serta dalam Prioritas Nasional (PN) 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Prioritas Nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/*Quick Wins* (QW) dengan penjabaran: (QW-1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil (kontribusi: produksi pangan asal pertanian bergizi dan produksi susu); (QW-3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional (kontribusi: swasembada pangan padi, jagung, kedelai, singkong, dan tebu. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, dan sagu); dan (QW-5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (kontribusi: perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian).

Terkait dengan 17 Program Prioritas (PP) Presiden, sebanyak 3 (tiga) diantaranya terkait dengan pertanian, yaitu: (PP-1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air (kontribusi: swasembada pangan, kawasan sentra produksi pangan (KSPP) padi, jagung, hortikultura, tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 juta ha tercapai tahun 2029); (PP-12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani (kontribusi: menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas); dan (PP-14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik Mandiri lainnya (kontribusi: program kredit usaha tani: peternakan, perkebunan, produksi pangan rakyat).

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(BA 019)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perindustrian juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian antara lain seperti layanan dukungan manajemen.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Perindustrian audited dialokasikan sebesar Rp3.733,9 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk hilirisasi sumber daya alam, fasilitasi dan pembinaan industri hijau, fasilitasi dan pembinaan industri halal. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni, dan non Rupiah Murni selain PLN dan PDN Kegiatan Prioritas Nasional yang berlanjut sebagai kontrak tahun jamak adalah Pembangunan Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk pembelian KBLBB roda dua baru, fasilitasi sertifikasi TKDN, dan fasilitasi dan pembinaan industri halal.

Dalam APBN tahun 2025, outlook anggaran Kementerian Perindustrian dproyeksikan sebesar Rp1.797,0 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri pengolahan kakao dan cokelat, dan hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri Electric Vehicle (EV) nasional. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni dan non Rupiah Murni selain PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional yang berlanjut sebagai kontrak tahun jamak adalah Pembangunan Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK).

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp2.501,8 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 26,4 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, sebesar 43,2 persen untuk belanja pegawai, 14,6 persen untuk belanja operasional, dan 15,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan antara lain hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam unggulan (kelapa, kelapa sawit, rumput laut, garam, nikel, tembaga, bauksit, dll), dan pengembangan industri prioritas (semikonduktor, KBLBB, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kosmetik dan farmasi, mesin dan peralatan, dirgantara, dan jasa industri).

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025 – 2029 dan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi

8 persen pada tahun 2029 antara lain penguatan pembangunan sumber daya manusia industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi industri, penguatan IKM sebagai rantai pasok industri, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi, transformasi industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan aglomerasi industri melalui Kawasan Industri.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(BA 020)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain mengatur bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi dan geologi serta penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian ESDM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ESDM antara lain koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian ESDM berdasarkan LKPP *audited* sebesar Rp6.914,1 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, serta belanja non operasional antara lain untuk Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi, Pembinaan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Mineral dan Batubara, serta Survei dan Pemetaan Geologi. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas akses terhadap energi melalui pembangunan infrastrukur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani dan Nelayan, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pipa Transmisi Gas, serta Survei Sumber Daya Alam. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengawasan pembangunan infrastruktur energi, Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga, Modernisasi Peralatan Survei Geologi, pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), dan penyusunan kebijakan bidang energi dan sumber daya alam. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 15,6 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 16,7 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan Nelayan Sasaran; dan kontrak tahun jamak antara lain pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pipa Transmisi Gas Cirebon – Semarang Tahap II. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas

Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain akses terhadap energi yang andal, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masyarakat yang merata di seluruh wilayah serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan adil, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain perubahan kebijakan yang sangat dinamis terkait transisi pemerintahan di penghujung tahun sehingga Kementerian ESDM perlu memetakan kembali skala prioritas agar output tetap terjaga dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pengendalian perjalanan dinas bagi ASN Kementerian ESDM.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian ESDM dialokasikan sebesar Rp3.909,7 miliar, sementara *outlook* tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp4.363,8 miliar. Anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 digunakan untuk memenuhi belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, serta belanja non operasional antara lain untuk Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi, Pembinaan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Mineral dan Batubara, serta Survei dan Pemetaan Geologi. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas akses terhadap energi melalui pembangunan infrastrukur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pipa Transmisi Gas serta Survei Sumber Daya Alam, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengawasan pembangunan infrastruktur energi dan penyusunan kebijakan bidang energi dan sumber daya alam. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 2,2 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 45,5 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 antara lain pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pipa Transmisi Gas. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain akses terhadap energi energi yang andal, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk masyarakat yang merata di seluruh wilayah serta mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan adil, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam APBN tahun 2026, Alokasi Anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 10.118,0 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 56,1 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pembangunan infrastruktur energi antara lain Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran, Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T Infrastruktur Listrik Perdesaan, PLTS, Pompa Air Tenaga Surya, PLTMH, Pipa Transmisi Gas serta Survei Sumber Daya Alam. Sementara sebesar 7,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi, Pembinaan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan, Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Mineral dan Batubara, serta Survei dan Pemetaan Geologi. Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2026 yaitu memperkuat infrastruktur, kerja sama internasional, dan adopsi teknologi untuk mendukung ketahanan energi nasional, hilirisasi mineral, serta pengelolaan data dan sumber daya manusia yang unggul menuju

transisi energi berkelanjutan. Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan infrastruktur energi, kerja sama internasional, teknologi mutakhir, dan integrasi sektor.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian ESDM pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian ESDM yaitu: (1) Pada tahun 2027 yaitu mendorong pengelolaan energi nasional yang efisien dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dalam negeri, perluasan akses energi bersih, serta pengembangan sumber daya manusia kompeten dalam mendukung transisi energi dan hilirisasi sumber daya mineral. Arah kebijakan ini berfokus pada pengelolaan energi, efisiensi, investasi energi baru dan terbarukan, keterjangkauan energi, serta pemanfaatan sumber daya manusia; (2) Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2028 yaitu mengakselerasi transisi energi dan hilirisasi sumber daya dengan memperkuat pasokan energi nasional, membangun ekosistem energi bersih, mengembangkan potensi geologi, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pelayanan publik berbasis teknologi. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan pasokan energi, ekosistem energi bersih, wisata geologi, *net zero emission*, serta layanan publik digital; dan (3) Arah kebijakan Kementerian ESDM pada tahun 2029 yaitu mendorong ketahanan, kemandirian energi, dan industrialisasi nasional yang berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan energi bersih, hilirisasi mineral strategis, pengelolaan geologi berbasis teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan yang adaptif. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan tata kelola yang adaptif, efisiensi energi, hilirisasi strategis, pengelolaan geologi berbasis teknologi, serta sumber daya manusia yang unggul.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perhubungan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan antara lain seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan berdasarkan LKPP *audited* sebesar Rp45.883,7 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai dan belanja operasional dasar pemerintahan, serta belanja non operasional antara lain untuk pelaksanaan program-program prioritas Kementerian. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan antara lain konektivitas nasional, kinerja pelayanan transportasi, dan keselamatan transportasi. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 32,7 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 16,9 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 50,5 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pengadaan sarana dan prasarana transportasi, subsidi layanan angkutan perintis, serta pengembangan SDM bidang transportasi, dan kontrak tahun jamak antara lain pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkeretaapian. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya aksesibilitas dan keselamatan transportasi, efisiensi logistik, serta terbukanya lapangan kerja. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain permasalahan teknis di lapangan, serta keterlambatan pekerjaan dan realisasi fisik sumber dana SBSN. Sedangkan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain percepatan pelaksanaan kegiatan, lelang tidak mengikat, optimalisasi melalui revisi anggaran, evaluasi pemanfaatan sisa anggaran, perbaikan perencanaan dan jadwal pencairan, perpanjangan kontrak tahun jamak, koordinasi dengan instansi terkait, pemantauan penarikan dana, serta revisi pinjam pagu dan luncuran SBSN.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Perhubungan dialokasikan sebesar Rp31.456,2 miliar, sementara *outlook* tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp23.095,1 miliar. Anggaran

Kementerian Perhubungan tahun 2025 digunakan untuk memenuhi belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya, serta belanja non operasional antara lain untuk optimalisasi pelayanan publik meliputi layanan keperintisan, peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi serta dukungan terhadap pembangunan IKN. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas konektivitas dan integrasi transportasi nasional, kinerja pelayanan transportasi, dan peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan SDM transportasi, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kualitas rekomendasi kebijakan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 46,7 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 25,1‑persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 28,2 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pengadaan sarana dan prasarana transportasi, subsidi layanan angkutan perintis, dan pengembangan SDM bidang transportasi. Sementara untuk kontrak tahun jamak antara lain *Replacement* Fasilitas Pelabuhan Sapudi dan Marapokot, Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Kaimana, Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Carocok Painan dan Salakan, dan Pembangunan Pelabuhan Rakyat Kalianget. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kemenhub dialokasikan sebesar Rp28.489,4 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 44,5 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan layanan angkutan perintis transportasi darat, laut, udara dan kereta api, peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi, serta penguatan konektivitas dan integrasi transportasi, dan sebesar 55,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti optimalisasi pelayanan transportasi publik dan peningkatan kinerja pelayanan transportasi. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan keselamatan transportasi, dan pengembangan infrastruktur dengan pelibatan badan usaha.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Perhubungan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang difokuskan pada Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan antara lain:

1. Penyediaan Layanan Angkutan Perintis Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api (KA);
2. Layanan angkutan pemadu moda/antarmoda, angkutan barang, angkutan umum massal perkotaan, angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan;
3. Subsidi angkutan umum perkotaan;
4. Pembangunan terminal penumpang tipe A, terminal barang internasional, pelabuhan penyeberangan;
5. Pembangunan jalur KA, jalur ganda KA, jalur *elevated*, sistem persinyalan & telekomunikasi, fasilitas *stabling* stasiun KA;
6. Penggantian/peningkatan jembatan KA dan Revitalisasi/pembangunan terowongan KA;
7. Layanan angkutan tol laut, angkutan ternak, angkutan rede, angkutan lebaran natal dan tahun baru (PN);

8. Pembangunan/pengembangan/peningkatan/*replacement*/rehabilitasi fasilitas Pelabuhan;
9. Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis penumpang dan kargo;
10. Pengembangan bandara; dan
11. Diklat Teknis Transportasi Udara dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Transportasi Darat, Laut, Udara.

KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Kesehatan. juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain seperti perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Kesehatan *audited* sebesar Rp95.080,6 miliar. Dari total realisasi anggaran, sebesar 67,3 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 32,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. Program Prioritas Nasional Tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan Iuran PBI JKN dan PBPU, Pelaksanaan Vaksin Imunisasi Program dan Pengadaan Alat & Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi, Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya, RS UPT Vertikal Makassar, Gedung Pelayanan Stroke, Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB), Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB), Surveilans Aktif P2 TBC, Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, Pemenuhan Alat, Reagen untuk Skrining, Diagnostik dan Pemantauan Pengobatan HIV AIDS, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan, Sarana dan Prasarana P2 TBC, Penguatan Labkesmas, Penguatan Layanan Kekarantinaan, Penyelenggaraan Haji, Penguatan satu sehat, dan Pengampuan KJSU.

Kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat transformasi kesehatan di Tahun 2024 antara lain Penguatan Layanan Primer seperti Penguatan pelaksanaan SHK, pengintegrasian konten kesehatan pada kurikulum sekolah, Penguatan Layanan Rujukan dengan Pengampuan 5 penyakit prioritas tambahan (non KJSU) seperti TB, DM, PIE, Keswa, Gastrohepatologi, Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan) dengan target 10 antigen vaksin sudah dapat diproduksi dalam negeri, 8 BBO utama sudah dapat diproduksi dalam negeri, Penguatan Pembiayaan Kesehatan dengan program Peningkatan jumlah skrinning kesehatan dalam program JKN, Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan dengan target SIP nakes dilakukan 1x seumur hidup, Fellowship tenaga Kesehatan pendukung layanan KJSU-KIA, penambahan beasiswa dokter spesialis bekerja sama dengan LPDP, Penguatan Teknologi Kesehatan dengan program Penguatan pengelolaan BGSi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Prevalensi stunting dan kasus TB masih tinggi, Belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, Prevalensi PTM semakin meningkat, Banyaknya FKTP dan labkesmas yang kondisi bangunannya kurang baik dan terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain dengan penyusunan Rancangan Rencana Induk Bidang Kesehatan yang

akan memperkuat sinergisme perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Pembangunan nasional.

Pada tahun 2025, anggaran Kementerian Kesehatan dialokasikan sebesar Rp105.649,4 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 68,5 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 31,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya. *Outlook* anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 sebesar Rp86.065,5 miliar. Program Prioritas Nasional Tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Bantuan Iuran PBI JKN dan PBPU, Pelaksanaan Vaksin Imunisasi Program, Pembangunan RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan), Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Penyediaan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Haj, Obat dan Perbekkes Haji, Program Pencegahan dan Pengendalian TB, HIV/AIDS, Malaria, Pengadaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi, Penyediaan Alat dan Bahan Kesehatan, Skrining Kesehatan & Skrining Bayi Baru Lahir, Fasilitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Layanan KJSU (SIHREN), Layanan Kekarantinaan dan Deteksi Dini Penyakit, Layanan Surveilans dan Intensifikasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit, dan Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan termasuk Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Wilayah Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2025, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan melanjutkan Transformasi Kesehatan, melalui: Penguatan Layanan Primer seperti Penguatan pelaksanaan SHK, pengintegrasian konten kesehatan pada kurikulum sekolah, Penguatan Layanan Rujukan dengan Pengampuan 5 penyakit prioritas tambahan (non KJSU) seperti TB, DM, PIE, Keswa, Gastrohepatologi, Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan (Farmalkes dan tanggap darurat kesehatan) dengan target 10 antigen vaksin sudah dapat diproduksi dalam negeri, 8 BBO utama sudah dapat diproduksi dalam negeri, Penguatan Pembiayaan Kesehatan dengan program Peningkatan jumlah skrinning kesehatan dalam program JKN, Peningkatan Produksi, Distribusi dan Mutu SDM Kesehatan dengan target SIP nakes dilakukan 1x seumur hidup, *Fellowship* tenaga Kesehatan pendukung layanan KJSU-KIA, penambahan beasiswa dokter spesialis bekerja sama dengan LPDP, Penguatan Teknologi Kesehatan dengan program Penguatan pengelolaan BGSi. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain Prevalensi stunting dan kasus TB masih tinggi, Belum terpenuhinya jumlah Nakes dan Named sesuai standar di FKTP dan FKRTL, Prevalensi PTM semakin meningkat, Banyaknya FKTP dan labkesmas yang kondisi bangunannya kurang baik dan terobosan kebijakan yang dilaksanakan, antara lain dengan pelaksanaan Quick win presiden seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk mencegah penyakit dengan melakukan deteksi dini, penanggulangan TB dan peningkatan kualitas RS Kab/Kota.

Untuk APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp114.000,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional seperti bantuan iuran PBI JKN dan PBPU, *Quick Win* Presiden : pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan TB dan peningkatan kualitas RS Kab/Kota, penguatan konvergensi penurunan stunting, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, labkesmas dan RS, Pelayanan kesehatan di RS Vertikal, Peningkatan kualitas alkes, Karantina Kesehatan, Peningkatan kualitas pendidikan Kesehatan dan penguatan pelaksanaan transformasi kesehatan. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan antara lain: Peningkatan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, Akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan, Peningkatan ketahanan farmasi dan alat kesehatan, Penguatan sistem tanggap darurat kesehatan nasional, Peningkatan Sinergisme Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan oleh pusat dan daerah, Peningkatan tata kelola pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan, peningkatan produksi, pemerataan dan penigkatan kualitas SDM Kesehatan, percepatan adopsi teknologi digital dan penguatan ekosistem data

kesehatan untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data serta meningkatkam inovasi teknologi untuk pelayanan kesehatan presisi.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung kebijakan pada agenda pembangunan kesehatan jangka menengah, antara lain Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. Agenda tersebut tentunya akan didukung oleh Kementerian Kesehatan melalui Transformasi Kesehatan yaitu transformasi layanan primer, layanan lanjutan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan dan tata kelola, SDM Kesehatan dan teknologi kesehatan.

KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama, antara lain mengatur bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang agama, dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Agama juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama, antara lain seperti penyusunan perencanaan dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan layanan umum lainnya.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Agama *audited* sebesar Rp80.551,5 miliar, terdiri dari belanja operasional yang antara lain digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan melekat ASN, belanja operasional dan pemeliharaan kantor, langganan daya dan jasa dan sewa serta belanja non operasional yang antara lain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, pelaksanaan dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit, dan pelaksanaan kegiatan prioritas kementerian dan prioritas lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp37.566 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp1.422 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pemberian BOS pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, PIP/KIP Kuliah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan, BOP pendidikan, TPG dan TPD Non ASN, insentif guru, bantuan rumah ibadah, jaminan produk halal, insentif dan peningkatan kompetensi penyuluh, revitalisasi KUA, pelaksanaan haji dan umrah, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, dan penyediaan buku nikah, serta kegiatan prioritas nasional lainnya yang menggunakan skema SBSN. Kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan antara lain untuk layanan urusan agama, pembangunan dan rehab satuan pendidikan, penguatan moderasi beragama, transformasi digital, dan pemberdayaan pesantren. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 33,7 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN sebesar 1,4 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 11,8 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun jamak antara lain *The Development of* UIN Maulana Malik Ibrahim *Phase II*. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dan keagamaan, meningkatkan daya saing pendidikan agama dan keagamaan, memperkukuh kerukunan umat beragama, mendorong kesejahteraan pendidik, mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang responsif dan inklusif. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain keberadaan peraturan perundangan yang belum sepenuhnya selaras, masih terbatasnya kapasitas pendanaan yang tersedia, perlunya peningkatan

integrasi dan pemutakhiran data, kapasitas pelaksana di berbagai daerah yang variatif, dinamika dalam proses pelaksanaan anggaran, dan perlunya penyesuaian terhadap transformasi digital, serta penguatan koordinasi dan SOP antarunit dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program atau kegiatan dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan dan harmonisasi regulasi teknis yang lebih adaptif, penguatan sistem data terpadu yang responsif melalui integrasi sistem informasi, percepatan transformasi digital layanan publik bidang pendidikan dan agama, serta sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan ormas keagamaan serta pemda guna menciptakan ekosistem pelaksanaan program yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Agama dialokasikan sebesar Rp78.602,2 miliar. *Outlook* realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp69.838,6 miliar, terdiri dari belanja operasional yang antara lain digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan melekat ASN, belanja operasional dan pemeliharaan kantor, langganan daya dan jasa dan sewa dan belanja non operasional yang antara lain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, pelaksanaan dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit, dan pelaksanaan kegiatan prioritas kementerian dan prioritas lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp32.635,0 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp5.390,0 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/ meningkatkan/mendukung/memperluas pemberian BOS pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, PIP/KIP Kuliah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan, BOP pendidikan, TPG dan TPD Non ASN, insentif guru, dan penyediaan buku nikah, revitalisasi KUA, bantuan operasional KUA, pembinaan keluarga/keluarga sakinah, pembinaan dan peningkatan kompetensi penyuluh agama, bantuan renovasi/fasilitasi rumah ibadah, pengadaan/penyediaan kitab suci, bantuan operasional FKUB, dan tunjangan penyuluh Non ASN, serta kegiatan prioritas nasional lainnya yang menggunakan skema SBSN. Kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk digitalisasi layanan keagamaan, pembangunan dan rehab satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 38,1 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0,5 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 9,8 persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan keagamaan yang merata dan terjangkau, guru dan pendidik non-ASN mendapatkan insentif lembaga keagamaan dan pendidikan dukungan operasional, serta layanan kehidupan beragama mudah diakses melalui transformasi digital.

Dalam APBN TA 2026, anggaran Kementerian Agama dialokasikan sebesar Rp88.897,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 35,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PIP/KIP Kuliah, TPG Non ASN, BO PTN, BOP RA, Bantuan Operasional PTNBH, dan sebesar 4,5 persen dari Rupiah Murni untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan prioritas Kementerian Agama, bantuan rumah ibadah dan bantuan kepada ormas keagamaan, pembinaan keluarga dan masyarakat keagamaan, pengelolaan potensi ekonomi umat, kegiatan yang diperuntukkan untuk pengukuhan kerukunan umat beragama, penguatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya peningkatan transformasi digital dan peningkatan layanan publik melalui rehabilitasi gedung kantor. Khusus alokasi anggaran yang bersumber dari Non Rupiah Murni, sebesar 3,2 persen dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Adapun kebijakan strategis yang dialokasikan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara

lain kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan rumah ibadah, dan digitalisasi tata kelola.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian/Lembaga Kementerian Agama pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Kementerian Agama antara lain:

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah, ditandai dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama. Hal ini mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam membangun kehidupan beragama yang moderat dan harmonis.
2. Meningkatnya layanan keagamaan yang transformasional, dengan tolok ukur Indeks Layanan Keagamaan. Layanan ini mencakup aspek kemudahan, kualitas, dan keterjangkauan dalam memenuhi kebutuhan umat beragama.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan, dilihat dari tingkat penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang (MA/Ulya/SMTK/SMAK/Uttama, dll.) dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Sasaran ini menunjukkan perhatian terhadap inklusivitas dan keadilan pendidikan.
4. Meningkatnya hasil belajar peserta didik, khususnya dalam literasi dan numerasi, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang ramah anak. Ini mencerminkan upaya peningkatan mutu pembelajaran di madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
5. Meningkatnya pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, diukur melalui proporsi guru dan tenaga kependidikan profesional. Hal ini sangat penting untuk menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan.
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas, dengan indikator lulusan cepat terserap di dunia kerja dan meningkatnya peringkat perguruan tinggi keagamaan di tingkat global.
7. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, yang ditandai dengan nilai reformasi birokrasi. Ini merupakan landasan utama terciptanya birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah, perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2024, dari total realisasi anggaran *audited* yang ada yaitu sebesar Rp5.500,4 miliar, sebesar 30,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 69,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan yang masih sama seperti tahun 2023. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain lain transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), *link and match* ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, dan reformasi birokrasi.

Pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp4.809,8 miliar dengan *outlook* Rp12.671,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, bantuan BSU sebesar Rp10.200 miliar dan bantuan JKP sebesar Rp1.200,0 miliar. Anggaran lainnya diperuntukan bagi Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pemagangan, Sertifikasi, perluasan kesempatan kerja, penguatan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, pengembangan ekosistem digital ketenagakejaan serta reformasi birokrasi.

Pada APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp3.860,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, bantuan JKP sebesar Rp1.152,8 miliar. Anggaran lainnya diperuntukan bagi Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pemagangan, Sertifikasi, perluasan kesempatan kerja, transformasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakejaan serta reformasi birokrasi.

Adapun arah kebijakan ketenagakerjaan periode tahun 2027-2029 diarahkan pada penciptaaan sistem pengembangan keahlian yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kebutuhan pasar kerja kerja melalui sejumlah langkah:

1. Penciptaan lapangan kerja:
    a. menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya dan produktif. Fokus pada lapangan kerja di sektor industri manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi serta lapangan kerja hijau;

b. menyediakan sistem pemetaan dan proyeksi kebutuhan keahlian tenaga kerja berbasis sektoral dan wilayah yang detil serta berkala; dan
c. memperluas peluan pasar tenaga kerja berkualitas di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia.

2. Pengembangan keahlian:
   a. melaksanakan Revitalisasi Pelatihan Vokasi secara konsisten;
   b. mewujudkan Sistem Pemantauan Keterampilan;
   c. melaksanakan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja lama (terutama yang low-skilled) berbasis pembelajaran sepanjang hayat;
   d. mengembangkan program fasilitasi transisi. *school-to-work*; dan
   e. memperkuat keterampilan digital.
3. Fasilitasi mobilitas tenaga kerja:
   a. mewujudkan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang mutakhir, komprehensif dan kredibel;
   b. melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan berbasis SIPK secara efisien;
   c. menciptakan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi PMI; dan
   d. menciptakan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif jender, inklusif dan memfasilitasi dinamikan perubahan pola bekerja.

KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial antara lain mengatur bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu; penetapan standar rehabilitasi sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Sosial juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Sosial *audited* sebesar Rp78.677,0 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor, dan belanja non operasional antara lain untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Asistensi Rehabilitasi Sosial, Pengelolaan Data, dan Pemberdayaan Sosial. Dari anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penguatan reformasi birokrasi dan operasional pendukung pelaksanaan program perlindungan sosial. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni serta Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial, antara lain bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi). Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terjaganya daya beli keluarga miskin dan rentan melalui bantuan sosial, peningkatan keberfungsian sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat karena dinamisnya data di lapangan, pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata sehingga menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial . Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pembangunan lumbung sosial untuk distribusi bantuan bencana yang lebih cepat, peningkatan pelayanan inklusif, serta percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terluar).

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Sosial dialokasikan sebesar Rp79.588,0 miliar dengan *outlook* realisasi belanja, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor serta pelaksanaan tusi lainnya; dan belanja non operasional untuk pelaksanaan program perlindungan sosial. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/

memperluas pelaksanaan program perlindungan sosial, antara lain pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako/BPNT, asistensi rehabilitasi sosial, sertifikasi SDM kesejahteraan sosial, akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial ekonomi, dan operasional Sekolah Rakyat sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni serta Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas lainnya antara lain menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan Pendidikan yang layak dan berkualitas, peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran Kemensos dialokasikan sebesar Rp84.440,1 milyar. Dari total anggaran yang ada, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Program Keluarga Harapan, bantuan sosial program sembako/BPNT, operasional penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja pegawai. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/BPNT.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Sosial pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Sosial antara lain Penguatan data tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis; kolaborasi dan integrasi program Bersama pemerintah daerah; pengembangan *care economy* melalui perluasan keterlibatan *care giver*; kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan swasta, BUMN dan filantropi; Penguatan kompetensi dan tingkat kesejahteraan pilar-pilar sosial ; Penyediaan pelayanan Pendidikan fakir miskin melalui Sekolah Rakyat; integrasi pemberdayaan KPM masyarakat lintas K/L; penguatan unit layanan sosial sebagai *centre of excellence*; dan Menjamin bantuan sosial tepat sasaran dan peranan kartu kesejahteraan. Strategi ini antara lain diwujudkan melalui kegiatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemutakhiran DTSEN untuk penerima bantuan sosial dan program pemberdayaan, asistensi rehabilitasi sosial.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BA 032)

Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi yaitu: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, pelindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; (2) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; (4) penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; (5) penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; (6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Selain fungsi utama tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjalankan fungsi pendukung yaitu pelaksanaan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi dan pelayanan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain seperti (1) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) pengawasan dan/atau pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (3) pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data, informasi dan intelijen bidang kelautan dan perikanan; (4) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan manajemen pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan; (5) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; (6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif dan/atau ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan *audited* sebesar Rp6.300,0 miliar antara lain untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp1.900,0 miliar dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp1.023,6 miliar serta belanja non operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.324,7 miliar. Berdasarkan sumber dana, APBN tahun 2024 yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp6.343,3 miliar, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp170,4 miliar, Hibah Luar Negeri sebesar Rp271,4 miliar, Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp2,0 miliar, BLU Rp103,0 miliar, PNBP Rp358,1 miliar. Berdasarkan program, APBN tahun 2024 terdiri atas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp380,7 miliar, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp214,5 miliar, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp131,5 miliar, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2.529,8 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.991,7 miliar. Berdasarkan fungsi, APBN tahun 2024 digunakan untuk mendukung fungsi Pendidikan sebesar Rp200,2 miliar, fungsi Ekonomi sebesar Rp6.681,8 miliar, dan fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp366,4 miliar. APBN tahun 2024 tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Prioritas Nasional diantaranya *Major Project* Korporasi Nelayan, Korporasi Perikanan Budi Daya, Bantuan Pemerintah, pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan bertaraf Internasional, serta pengawasan kelautan dan perikanan.

Dalam APBN tahun 2025, *outlook* anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan diproyeksikan sebesar Rp6.583,7 miliar antara lain untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp1.919,7 miliar dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp931,3 miliar serta belanja non operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.146,8 miliar. Berdasarkan sumber dana, APBN tahun 2025 yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp6.955,5 miliar, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1.326,0 miliar, Hibah Luar Negeri sebesar Rp95,7 miliar, BLU Rp134,7 miliar, PNBP Rp457,1 miliar dan SBSN sebesar Rp25,9 miliar. Berdasarkan program, APBN tahun 2025 terdiri atas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp398,2 miliar, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp161,0 miliar, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp358,4 miliar, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp4.655,9 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.424,2 miliar. Berdasarkan fungsi, APBN tahun 2025 digunakan untuk mendukung fungsi Pendidikan sebesar Rp336,9 miliar, fungsi Ekonomi sebesar Rp8.213,8 miliar, dan fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp447,1 miliar. APBN tahun 2025 tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prioritas Nasional, dan Prioritas Presiden yaitu (1) Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebesar Rp853,3 miliar; (2) Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) sebesar Rp400,0 miliar (3) Revitalisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan di 4 lokasi sebesar Rp217,5 miliar; (4) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap I di 65 lokasi sebesar Rp1.340,6 miliar. Pembangunan KNMP tahap II di 35 lokasi sebesar Rp859,4 miliar akan dilaksanakan melalui skema *Multi Years Contract* (MYC).

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dialokasikan sebesar Rp13.000,0 miliar antara lain untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp2.331,1 miliar dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp756,4 miliar serta belanja non operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.912,5 miliar. Berdasarkan sumber dana, APBN tahun 2026 yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp12.341,6 miliar, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp250,0 miliar, Hibah Luar Negeri sebesar Rp28,0 miliar, BLU Rp217,5 miliar, PNBP Rp74,9 miliar dan SBSN sebesar Rp87,9 miliar. Berdasarkan program, APBN tahun 2026 terdiri atas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp266,7 miliar, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp384,6 miliar, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp44,5 miliar, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp8.673,9 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.631,1 miliar. APBN tahun 2026 tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prioritas Nasional, Prioritas Presiden yaitu (1) Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebesar Rp1.200,0 miliar; (2) Pembangunan KNMP di 250 lokasi sebesar Rp5.000,5 miliar; (3) Budi Daya Ikan Nila Salin, Modelling Budi Daya Rumput Laut dan Komoditas Unggulan Tematik Lainnya sebesar Rp300,0 miliar; (4) Revitalisasi Peralatan Laboratorium Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp150,0 miliar, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu (1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Provinsi Bali; (2) Pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu (Ambon New Port) di Provinsi Maluku; (3) Revitalisasi Kawasan Tambak Pantura Jawa di Provinsi Jawa Barat; (4) Kawasan Tambak Budi Daya Udang Terintegrasi (Integrated Shrimp Farming) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (5) Modernisasi Kapal Perikanan.

Selain itu, APBN tahun 2026 dimanfaatkan untuk mendukung Kebijakan Ekonomi Biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Kebijakan ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut,

serta diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, termasuk program Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH). Dukungan Prioritas Nasional (PN) pada APBN tahun 2026 mencapai > 72 persen dengan rincian PN-2 (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru) sebesar 99,3 persen; dan 0,7 persen merupakan gabungan PN-4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas), PN-5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri); dan PN-8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2027–2029 disusun sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis KKP 2025–2029, yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekosistem laut. Melalui pendekatan Kebijakan Ekonomi Biru, KKP berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut agar tetap menjadi modal pembangunan jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, KKP menargetkan perluasan kawasan konservasi laut dari 31,3 juta hektare pada 2027 menjadi 32,5 juta hektare pada 2029, serta menurunkan sampah plastik laut hingga 70 persen. Upaya ini tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati laut, tetapi juga memperkuat peran karbon biru dalam mitigasi perubahan iklim global.

Dari sisi ekonomi, sektor perikanan diproyeksikan tumbuh konsisten dengan PDB perikanan meningkat dari Rp657.000,0 miliar pada tahun 2027 menjadi Rp719.000,0 miliar pada tahun 2029, didukung oleh peningkatan produksi perikanan hingga 30 juta ton dan produksi garam nasional mencapai 5 juta ton sebagai bagian dari target swasembada garam nasional. Di saat yang sama, pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus diperkuat melalui percepatan penataan ruang laut dan zonasi pesisir hingga mencapai 100 persen. Peningkatan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta penguatan kelembagaan ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Pendekatan pembangunan berbasis komunitas tersebut memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kelautan tidak hanya mendorong kinerja sektor industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir serta penduduk pulau-pulau kecil yang menggantungkan hidup pada sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada sisi hilir, KKP memfokuskan kebijakan pada peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Nilai ekspor hasil perikanan diproyeksikan mencapai US$8,5 miliar, seiring dengan meningkatnya konsumsi ikan nasional menjadi 28,6 kilogram per kapita per tahun serta penerapan standar mutu dan keamanan pangan yang lebih ketat. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan menjadi pengungkit utama keberhasilan kebijakan. Indeks kapasitas SDM kelautan dan perikanan ditargetkan terus meningkat untuk mendukung profesionalisme dan daya saing global, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi KKP diharapkan mencapai 90,25 sebagai cerminan tata kelola yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.

Proyeksi ini menegaskan arah pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia menuju sektor yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi biru nasional.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BA 035)

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian; (2) perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian; (3) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian; (4) pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian; (5) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet; (6) penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; dan (7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator, pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian *audited* direalisasikan sebesar Rp524,0 miliar dengan realisasi anggaran *audited* sebesar Rp478,7 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan belanja non operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta penugasan strategis lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, mendorong pengembangan industri dalam negeri, peningkatan ekspor nasional, serta pengembangan ekosistem ketenagakerjaan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk koordinasi pengendalian inflasi, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, stabilisasi harga pangan, restrukturisasi bumn, pelaksanaan kebijakan ekonomi digital, program kartu prakerja, percepatan sertifikasi halal umk, percepatan penyelesaian proyek strategis nasional, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta peningkatan kerjasama internasional. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 (seratus) persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0 (nol) persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0 (nol) persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 antara lain implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan industri, peningkatan ekspor, dan pengembangan ekosistem ketenagakerjaan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung

Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain ekonomi yang tumbuh stabil di kisaran 5,0 persen, tingkat inflasi yang berada dalam rentang sasaran serta tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang menurun. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain adanya penyesuaian prioritas kegiatan akibat dinamika ekonomi global dan transisi pemerintahan dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penerapan kebijakan efisiensi, digitalisasi pelaksanaan kegiatan, serta peninjauan ulang belanja perjalanan dinas yang difokuskan hanya pada kegiatan strategis dan prioritas nasional.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dialokasikan sebesar Rp459,8 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp250,5 miliar antara lain untuk belanja pegawai, kebutuhan operasional pimpinan serta layanan perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp209,3 miliar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta penugasan strategis lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp44,4 miliar dan prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp164,9 miliar. Adapun outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp313,1 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk akselerasi di bidang industri, penguatan logistik, peningkatan ekspor, pengembangan KEK, transformasi ekonomi digital, produktivitas tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan inklusi keuangan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengendalian inflasi (koordinasi TPIP), transisi energi, hilirisasi industri, kartu prakerja, transformasi digital, pemberdayaan UMKM, penguatan sistem logistik nasional dalam upaya, penurunan biaya logistik, diversifikasi dan daya saing ekspor, perundingan Indo-Pacific Economic Forum, dan aksesi keanggotaan indonesia dalam OECD. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 (seratus) persen, non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0 (nol) persen, dan non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 antara lain hilirisasi industri, penguatan logistik, peningkatan ekspor, pengembangan KEK, transformasi ekonomi digital, produktivitas tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan inklusi keuangan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau prioritas lainnya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen, stabilisasi harga melalui pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp485,2 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp203,1 miliar antara lain untuk belanja pegawai, kebutuhan operasional pimpinan serta layanan perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp252,1 miliar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta penugasan strategis lainnya. Dari total anggaran dimaksud, alokasi sebesar 10 (sepuluh) persen dialokasikan untuk mendukung Kegiatan Prioritas Nasional, melalui kegiatan antara lain Kebijakan Terkait Ekosistem Ekonomi Digital, Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030 dan Kebijakan dibidang Moneter, Sektor Eksternal dan Fiskal dan sebesar 90 (sembilan puluh) persen untuk mendukung pelaksanaan tusi, dukungan manajemen dan kegiatan prioritas lainnya, melalui beberapa kegiatan seperti koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara, koordinasi kerja sama ekonomi dan investasi, koordinasi perniagaan dan ekonomi digital, koordinasi energi dan sumber daya mineral, koordinasi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata, pengembangan kawasan ekonomi khusus, koordinasi lintas sektor, dan layanan dukungan sekretariat. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain akselerasi di bidang industri, penguatan logistik,

peningkatan ekspor, pengembangan kawasan ekonomi, transformasi ekonomi digital, produktivitas tenaga kerja, dan inklusi keuangan.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain penguatan diplomasi ekonomi, swasembada energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, akselerasi transformasi ekonomi hijau, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan sektor keuangan, dan nilai tambah pariwisata, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengembangan industri, hilirisasi, integrasi ekonomi, investasi dan perdagangan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
(BA 036)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan antara lain mengatur bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PMK, antara lain: (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (2) perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (3) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (4) pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (5) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; (6) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet; (7) penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; (8) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; (9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator; (10) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran *audited* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp269,4 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk operasional kantor, belanja pegawai serta belanja modal, dan belanja non operasional antara lain untuk dukungan program kebijakan Kemenko PMK. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dimanfaatkan untuk menunjang Program Revolusi Mental (Prioritas Nasional 4) dan Program Jaminan Sosial (Prioritas Nasional 3), sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya dimanfaatkan untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Percepatan Penurunan *Stunting*, Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Pencegahan dan Penanganan Pornografi, serta Subsidi LPG tepat sasaran. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja yang mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya, antara lain meningkatkan efektifitas kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan keluarga, pembangunan karakter, ketanggapan bencana dan konflik sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam menghadapi tantangan global. Kendala/tantangan yang

ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum, antara lain terbatasnya ruang fiskal untuk perluasan kegiatan lintas sektor dan terbatasnya sumber daya manusia pendukung program lintas kementerian/lembaga. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penguatan sistem manajemen kinerja yang berbasis *cascaded KPIs*, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kinerja, dan digitalisasi koordinasi kebijakan melalui pengembangan ekosistem Satu PMK untuk Kebijakan Presisi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya tahun 2024 tidak berlanjut ke tahun 2025, melainkan Kemenko PMK mendapatkan amanah dalam melaksanakan koordinasi pada Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya, yakni Peningkatan Gizi dan Pencegahan *Stunting*, Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting*, serta Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis. Selain itu, Kemenko PMK mempunyai kontrak tahun jamak, antara lain pengembangan *Dashboard* Satu PMK, penguatan sistem pemantauan reformasi sosial, dan sistem pelaporan berbasis indikator yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp111,2 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk operasional kantor, belanja pegawai serta belanja modal, dan belanja non operasional antara lain untuk dukungan program kebijakan Kemenko PMK. Dalam pelaksanaanya sesuai dengan perkembangan kebijakan, *outlook* anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp206,3 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, selama tahun anggaran 2025 berjalan belum ada *tagging* anggaran untuk program dan kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya. Namun demikian, terdapat kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional oleh Kemenko PMK diarahkan untuk Prioritas Nasional 4 dan 8, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Penuntasan TBC, Renovasi Sekolah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah, dan Membangun Sekolah Unggulan Terintegrasi. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya, antara lain meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan pembangunan manusia yang lebih responsif, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa, serta terbangunnya sinergi antar sektor untuk mendukung transformasi sosial menuju SDM unggul dan inklusif dalam menghadapi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya tahun 2025 yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pengarusutamaan gender, fasilitasi koordinasi pelaksanaan revitalisasi pendidikan karakter, serta dukungan penguatan regulasi pelayanan kepemudaan. Sementara itu, kegiatan dengan kontrak tahun jamak antara lain pengembangan *dashboard* kebijakan bidang PMK, penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2025–2045, fasilitasi percepatan regulasi Wajib Belajar 13 Tahun, serta reformulasi tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana dan konflik sosial.

Pemerintah terus memperkuat pembangunan manusia melalui berbagai program yang dikawal oleh Kemenko PMK. Pada bidang keluarga dan kependudukan, terdapat beberapa isu yang dikawal yakni Pengarusutamaan Gender, Penguatan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak, serta pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Pada bidang kesehatan, fokus diarahkan pada Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, Penanggulangan Tuberkulosis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), serta Pembangunan Rumah Sakit yang berkualitas. Pada bidang pendidikan, terdapat pengawalan isu terkait Renovasi Sekolah, Pengembangan Sekolah Unggulan Terintegrasi, Digitalisasi

Pembelajaran, pendirian Sekolah Unggul Garuda, serta Penguatan Kolaborasi Internasional melalui Program *Joint Degree* dan *Joint Research*, termasuk Pemberdayaan Alumni LPDP. Selanjutnya pada bidang penguatan karakter jati diri bangsa, terdapat program Penguatan Kesehatan Fisik, Moral, dan Mental yang dilaksanakan secara berkelanjutan, serta Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bermartabat. Lebih lanjut pada bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial, terdapat isu Penguatan Resiliensi Masyarakat guna membangun ketangguhan dalam menghadapi berbagai risiko bencana dan dinamika sosial.

Selain penjabaran isu di atas, Kemenko PMK juga mengemban peran strategis lainnya dalam mendukung tata kelola pembangunan manusia dan kebudayaan. Melalui Satu Data PMK diharapkan dapat memperkuat integrasi dan interoperabilitas data dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. Sebagai Koordinator Pengampu Pilar Sosial Budaya ASEAN, Kemenko PMK berperan aktif dalam memperkuat kerja sama regional di bidang sosial budaya. Selain itu, Kemenko PMK juga turut mengawal penyusunan *Strategic Plan* pasca-2025 ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC) guna memastikan arah pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai penguatan agenda pembangunan manusia, Kemenko PMK menetapkan enam program *flagship* dalam Renstra sebagai pendorong transformasi strategis. "Bijak Cerdas Ber-AI" mendorong literasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis dan produktif. "#SatuIsyarat" memperkuat inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. *One Health*/Satu Kesehatan mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk pencegahan penyakit dan krisis kesehatan. "Satu Edukasi" menyatukan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan merata. "#KarakterKita!" membangun karakter bangsa yang berintegritas, gotong royong, dan berjiwa nasionalisme. Sementara itu, *flagship* "Budaya Tangguh Bencana" mendorong peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai program atau isu penting yang dikawal tersebut menjadi pendorong utama dalam akselerasi peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) khususnya dalam lingkup dimensi survival, pendidikan, dan kesehatan untuk menuju sumber daya manusia Indonesia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing global.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Kemenko PMK sebesar Rp206,7 miliar guna mendukung tugas fungsi Kemenko PMK dalam memastikan pelaksanaan Prioritas Nasional, Prioritas Program, Program Hasil Terbaik Cepat, dan arahan Presiden lainnya. Anggaran yang mendukung Prioritas Nasional dialokasikan sebesar 0,72 persen dari total anggaran, antara lain melalui kegiatan Peningkatan Gizi dan Pencegahan *Stunting* serta Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* dengan adanya dukungan Sekretariat Nasional Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dan Satu Data *Stunting*, dan Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis. Sementara itu, anggaran yang mendukung Prioritas lainnya sebesar 99,3 persen dari total anggaran, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Program Unggulan Transformasi Digital Satu PMK untuk Kebijakan Presisi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (2) Pemenuhan anggaran Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) untuk mendukung Implementasi Prioritas Nasional dalam RKP 2026 dan Program Direktif Presiden; serta (3) Program Unggulan Pembangunan Talenta Kecerdasan Artifisial (KA) Nasional. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026, antara lain penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak, Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender, penguatan regulasi pelayanan kepemudaan, serta pengembangan *Precision Policy Dashboard* berbasis Satu Data PMK untuk mendukung kebijakan presisi lintas sektor.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, antara lain penguatan koordinasi kebijakan pembangunan manusia berbasis siklus hidup, implementasi reformasi sosial melalui revitalisasi pendidikan karakter dan keluarga, digitalisasi koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan ekosistem kebijakan presisi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta penguatan tata kelola dan pengendalian pembangunan karakter dan budaya bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BA 041)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan badan usaha milik negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha milik negara.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian BUMN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian BUMN antara lain seperti penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian BUMN *audited* sebesar Rp297,0 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional antara lain untuk gaji, tunjangan, dan operasional kantor dan belanja non operasional. Dari alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program Prioritas Kementerian BUMN dengan alokasi sebesar Rp160,84 miliar. Secara umum anggaran Kementerian BUMN tidak dilakukan tagging dalam program Prioritas Nasional, namun BUMN dan Kementerian BUMN turut mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan melakukan berbagai koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai Kementerian Lembaga. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara terdapat kegiatan tertunda dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penyusunan ulang prioritasisasi Kementerian BUMN dengan optimalisasi anggaran yang ada.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian BUMN dialokasikan sebesar Rp277,5 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp159,1 miliar antara lain untuk gaji, tunjangan, dan operasional kantor dan belanja non operasional sebesar Rp118,4 miliar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp8,9 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp109,6 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk pembinaan BUMN untuk mendukungan BUMN dalam pengembangan EV Battery, dalam rangka hilirisasi bahan tambang, pengembangan sektor hulu dan hilir migas, Pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas, Pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro, Pengembangan RS Internasional di KEK Kesehatan Sanur, Pembangunan infrastruktur bandara IKN, Pembangunan infrastruktur energi IKN, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Pengembangan kawasan pelabuhan, Pengembangan Bandara, kecukupan penyediaan energi dan tenaga Listrik, Penguatan Sinergi dan Integrasi BUMN Logistik, Unlock Value PT Indonesia Asahan Alumunium, Kebijakan Dukungan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Penetapan Direksi dan Dekom atau Dewas BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Pembinaan dan Pengawasan BUMN. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain dapat mendukung capaian dari Prioritas Nasional/Asta Cita.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp236,7 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Penguatan Kapasitas BUMN, Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan EV Battery, Pembinaan BUMN dalam Rangka Penyelenggaraan CPP dan Penyaluran Pupuk Subsidi, Peningkatan Swasembada Gula, Pembinaan BUMN dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Pembinaan BUMN dalam Penguatan Sinergi dan Integrasi BUMN Logistik, Pembinaan BUMN dalam rangka pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro, Pembinaan BUMN dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pembinaan BUMN dalam rangka Transformasi BUMN Ekosistem Maritim Terintegrasi dan sebesar 44 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyusunan Regulasi, Pelaksanaan Fungsi Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pengelolaan Penugasan, dan Pengawasan BUMN. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Penyusunan Regulasi pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian BUMN pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian BUMN antara lain Peningkatan Kinerja dan Produktivitas BUMN yang diukur melalui *Return on Asset* (ROA) dan *Total Asset Turnover* (TATO), Peningkatan pengelolaan risiko BUMN yang optimal, dan Peningkatan profitabilitas BUMN yang diukur melalui *Profit Margin Ratio* (PMR).

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BA 047)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.

Selain itu, Kemen PPPA juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, penyediaan layanan rujukan akhir bagi bagi perempuan korban kekerasan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional, serta pengelolaan data gender dan anak. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemen PPPA juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemen PPPA antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran *audited* sebesar Rp292,3 miliar, yang terdiri dari belanja operasional sebesar untuk belanja pegawai dan belanja barang, serta belanja non operasional untuk belanja barang dan belanja modal. Dari alokasi anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat, meningkatkan, dan memperluas layanan terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), serta standardisasi dan sertifikasi lembaga PPPA seperti PUSPAGA yang Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, dan *Daycare* Ramah Anak. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, serta dibuatnya Peta Jalan Ekonomi Perawatan.

Sumber pendanaan untuk Prioritas Nasional berasal dari Rupiah Murni sebesar 41,4 persen. Tidak ada kegiatan Prioritas Nasional dan/atau prioritas lainnya yang berlanjut ke tahun 2025 baik sebagai kontrak tahun tunggal maupun kontrak tahun jamak.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain: (1) perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya; (2) perempuan rentan (penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, perempuan pra sejahtera, dan/atau perempuan penyintas bencana) mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan; serta (3) Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan dan program yang responsif gender dan ramah anak.

Kendala yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 yaitu belum optimalnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak antara pusat dan daerah serta keterbatasan SDM dan sarana prasarana layanan untuk melakukan penanganan dan pendampingan perempuan dan anak korban di daerah.

Terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS); (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024; (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024; berbagai Peraturan Turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta (4) usulan DAK Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak dalam bentuk renovasi dan perlengkapan peralatan UPTD dan Rumah Perlindungan Sementara.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kemen PPPA dialokasikan sebesar Rp300,7 miliar, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp141,1 miliar untuk belanja pegawai dan belanja barang, serta belanja non operasional sebesar Rp65,4 miliar untuk belanja barang dan belanja modal. Dari alokasi anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp94,2 miliar. Adapun *outlook* tahun 2025 sebesar Rp153,7 miliar.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Program tersebut meliputi: (1) peningkatan Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) melalui perluasan call center SAPA 129; (2) koordinasi dan bimbingan teknis kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; (3) pengembangan desa ramah perempuan dan anak menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI); serta (4) penguatan satu data gender dan anak.

Sumber pendanaan untuk Prioritas Nasional berasal dari Rupiah Murni sebesar 31,3 persen. Tidak ada kegiatan Prioritas Nasional dan/atau prioritas lainnya yang berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional antara lain: perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya; perempuan rentan (penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, perempuan pra sejahtera, dan/atau perempuan penyintas bencana) mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan; serta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mampu menyusun kebijakan dan program yang responsif gender dan ramah anak..

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp214,1 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp145,1 miliar dialokasikan untuk operasional dan Rp69,1 miliar dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Kemen PPPA termasuk kegiatan Prioritas Nasional. Tugas dan fungsi Kemen PPPA antara lain meliputi Penyediaan layanan rujukan akhir perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) pada Kementerian/ Lembaga, Peningkatan keterlibatan dan kapasitas perempuan pelaku usaha dan Penyediaan sistem layanan pengaduan kekerasan SAPA 129 *(contact center)* serta penyusunan kebijakan strategis. Kebijakan strategis yang direncanakan disusun pada tahun 2026 antara lain: (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Ekonomi Perawatan; (2) Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; (3) Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan dan Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia; (4) Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyediaan Layanan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual bagi Tenaga Layanan; (5) Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan; (6) Rancangan Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; (7) Rancangan Peraturan

Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2026-2029; (8) Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; serta (9) Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kemen PPPA mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden melalui kebijakan yang memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai elemen esensial dalam transformasi ketahanan sosial dan budaya bangsa. Visi Kementerian PPPA yaitu "Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perempuan yang Berdaya, dan Anak yang Terlindungi dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Kemen PPPA juga mendukung 8 Misi Presiden dan Wakil Presiden (Asta Cita) yang dimandatkan dalam Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 khususnya PN ke-1, 4, dan 6. Kemen PPPA juga merumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Kebijakan strategis Kemen PPPA tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Efektivitas Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak" dan "Meningkatnya efektivitas kinerja kelembagaan Kemen PPPA yang profesional, transparan, dan akuntabel", dengan masing-masing sasaran strategis:

Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang serta Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan kesejahteraan dan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang pembangunan; dan, 2) Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO.

Meningkatnya Pemenuhan Hak Universal, Resiliensi serta Perlindungan Anak dari Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya; dengan arah kebijakan: 1) Meningkatkan efektivitas pemenuhan hak anak dan partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan, 2) Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan sesuai standar bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Menguatnya Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dan PUHA dalam Proses Pembangunan, dengan arah kebijakan: 1) Menguatkan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan di K/L dan pemda; dan, Menguatkan efektivitas tata kelola dan pelembagaan PUHA dalam proses pembangunan.

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA yang Andal, dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya pembangunan di Kemen PPPA.

Kebijakan strategis yang akan disusun Kemen PPPA tahun 2025-2029 diantaranya: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU KIA; Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*); Rancangan Perpres tentang Grand Design Kepemimpinan Perempuan yang Inklusif; Rancangan Perpres tentang Kabupaten/Kota Layak Anak; Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS; dan Rancangan Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kebijakan lain yang akan disusun antara lain, Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan PUG; Permen PPPA tentang Panduan dan Petunjuk Teknis Ruang Bersama Indonesia; Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Keuangan Inklusif; Permen PPPA tentang Pengasuhan Keluarga; Revisi Permen PPPA tentang Penyelenggaraan KLA; Permen PPPA tentang Pencegahan Kekerasan di Ruang Publik; Revisi Permen PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang

Disabilitas; Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi percepatan PPPA dalam pencapaian sasaran strategis, Kemen PPPA telah menetapkan tiga program *quick win* yang membutuhkan kolaborasi lintas K/L dan pemda, yaitu: 1) Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai bentuk inisiatif kolektif untuk menguatkan kualitas hidup anak dan perempuan lewat adanya ruang aman untuk berkreasi, belajar bersama di tingkat desa/kelurahan; 2) Perluasan fungsi *call center* SAPA 129 untuk memperluas jangkauan layanan pengaduan dan respons cepat dan; 3) Penguatan Satu Data Gender dan Anak Berbasis Desa/Kelurahan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.

Berdasarkan Renja dan RKA-K/L Kemen PPPA TA 2026, terdapat kegiatan dan *output* yang akan berhenti, berlanjut, serta kegiatan dan output baru yang akan dilaksanakan tahun 2027-2029. Ringkasan kegiatan dan *output* tersebut sebagai berikut:

Kegiatan yang akan berhenti:

1. Rancangan Perpres tentang RAN Gender dan Perubahan Iklim, akan diintegrasikan dengan kebijakan KLHK;
2. Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, akan diintegrasikan dengan Pembinaan Daerah tentang PUG dan Integrasi Gender dalam Pembangunan;
3. Anggota Legislatif dan Kepala Daerah yang diberikan Peningkatan Kapasitas, akan dilaksanakan melalui Advokasi/Pembinaan K/L di KPU, Bawaslu, Kemenkopolkam;
4. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Keluarga dalam KG, dilaksanakan melalui Advokasi/Pembinaan K/L di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Perubahan Permen PPPA Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum BK TKI, dilaksanakan melalui Advokasi/Pembinaan K/L di Kemen Pelindungan PMI/BP2MI;
6. K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam PHP dalam RT dan Rentan, dilaksanakan melalui Koordinasi Peningkatan Perlindungan Perempuan dari KDRT KK SD dengan Kemendukbangga/BKKBN;
7. Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam PHP RT dan Rentan, menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN;
8. Rancangan Perpres Tentang Partisipasi Anak dan Permen PPPA tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Hak Anak, dilaksanakan melalui Advokasi/Pembinaan K/L;
9. Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHSIPA, dilaksanakan melalui Fasilitasi/Pembinaan K/L/Daerah dalam Penyelenggaraan PUHA;
10. K/L Diberikan Bimtek Supervisi Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam PHA dilaksanakan melalui Fasilitasi/Pembinaan K/L/D Penyelenggaraan PUHA;
11. Anak Penyintas Kekerasan yang Menerima Penguatan Resiliensi dan Kapasitas; dilaksanakan melalui Fasilitasi/Pembinaan K/L/Daerah dalam Penyelenggaraan PUHA;
12. Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan DRPPA Mandiri, selanjutnya akan dilaksanakan Pembinaan daerah dalam implementasi RBI.

Kegiatan yang berlanjut:

1. Penyusunan kebijakan bidang KG, PHP, PHA (UU, RPP, RPerpres, Permen PPPA);
2. Rekomendasi kebijakan bidang KG, PHP, PHA, dan PKA;
3. KIE/Layanan penyebaran informasi kebijakan KG, PHA, dan pencegahan KtP/A;
4. Data dan informasi bidang KG, PHP, PHA, dan PKA;
5. Persiapan, pelaksanaan, dan analisis SPHPN dan SNPHAR tahun 2027;

6. Fasilitasi/Advokasi K/L tentang peningkatan kesejahteraan/kepemimpinan perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan, pelaksanaan PKA, dan pembinaan PUG dan integrasi gender dalam pembangunan serta penyelenggaraan PUHA;
7. Pembinaan Daerah tentang PUG dan integrasi gender dalam pembangunan;
8. Pembinaan Daerah tentang perlindungan perempuan dari kekerasan;
9. Pembinaan Daerah tentang peningkatan PHA, penyelenggaraan PUHA & Forum Anak;
10. Pelatihan Fasilitator PUG, dan Pelatihan SDM Potensial tentang Peningkatan KKP;
11. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan KKP, PHP, PHA, dan PKA;
12. Pemantauan dan Evaluasi kebijakan KG, PHP, PHA, PKA, penyelenggaraan PUG di K/L dan Daerah, serta Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak;
13. Layanan Rujukan Akhir Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO, dan Layanan Rujukan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Perlakuan Salah Lainnya, termasuk layanan bantuan spesifik dan koordinasi penyediaan layanan rujukan akhir (gelar kasus);
14. Pengawasan Penyelenggaraan PA di K/L dan Daerah, Layanan pengaduan masyarakat dan layanan mediasi pelanggaran hak anak, dan laporan hasil pengawasan.

Kegiatan baru:

1. Kerjasama LM, dan Koordinasi pelaksanaan kebijakan PM dalam PUG;
2. Fasilitasi Daerah dalam pembentukan UPTD PPA, Standarisasi UPTD PPA, dan Sertifikasi petugas layanan PPA;
3. Fasilitasi dan Pembinaan K/L dan Daerah tentang penyelenggaraan layanan terpadu sesuai standar;
4. Rekomendasi kebijakan terkait Tata kelola Penyelengaraan Pelayanan Terpadu;
5. Rekomendasi kebijakan tentang daycare berbasis komunitas;
6. Pemantauan dan evaluasi pembentukan UPTD PPA dan Pelaksanaan Layanan Terpadu.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA 048)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain mengatur bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PANRB juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB antara lain seperti pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, bidang pengelolaan anggaran, keuangan dan aset pemerintah, bidang hukum, bidang komunikasi dan hubungan masyarakat, bidang kearsipan, dan bidang pengelolaan data dan informasi.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian PANRB sebesar Rp466,6 miliar dan pada akhir tahun 2024 (*audited*) teralokasi sebesar Rp433,3 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan belanja non-operasional antara lain untuk penyusunan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pemberian dukungan administrasi dalam pencapaian tugas utama. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) mendukung pembangunan portal pelayanan publik terintegrasi; (2) memperkuat koordinasi percepatan implementasi kebijakan SPBE; (3) memperkuat penyusunan rekomendasi pemetaaan proses bisnis tematik; (4) memperkuat fasilitasi penerapan platform tunggal Manajemen ASN; (5) memperkuat penerapan budaya kerja; (6) memperkuat Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPPNAS); dan (7) meningkatkan penerapan MPP Digital. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk: (1) evaluasi Reformasi Birokrasi; (2) evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (3) pendampingan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Publik; dan (4) pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, dan lainnya. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025, antara lain pengembangan Platform Digital Nasional. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain penataan tenaga non-ASN menjadi PPPK, pelaksanaan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan dengan berfokus pada pengadaan guru dan tenaga kesehatan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain proses likuidasi Satker Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan transisi pergeseran tugas dan fungsi KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN, dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pembentukan organisasi kementerian negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan penyusunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian PANRB dialokasikan sebesar Rp393,0 miliar dengan *outlook* sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp310,1 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan belanja non-operasional. Dari alokasi anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas dan prioritas. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) mendukung koordinasi dan asistensi penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) mendukung penyusunan rancangan kebijakan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta (3) mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan terkait SDM Aparatur, meliputi kebijakan: (1) budaya kerja dan citra institusi; (2) manajemen talenta dan karier pegawai ASN; (3) pengembangan kompetensi pegawai ASN; (3) manajemen penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja; (4) pengelolaan kinerja pegawai, perencanaan dan pengadaan kebutuhan pegawai ASN Nasional; (5) pengembangan Platform Digital Manajemen ASN; (6) mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; (7) memperluas monitoring dan penguatan penerapan kebijakan pelayanan publik ramah kelompok rentan; (8) penguatan pemanfaatan JIPPNAS; (9) penguatan penerapan Survei Kepuasan Masyarakat; dan (10) penguatan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya, diarahkan untuk: (1) penyusunan PerPres tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional; (2) penyusunan PerMen PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2030; (3) evaluasi Reformasi Birokrasi; (4) evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (5) pendampingan dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Publik; dan (6) pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 antara lain pengembangan Platform Digital Manajemen ASN. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau prioritas lainnya antara lain perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik instansi pemerintah yang agile, SDM yang kompeten sehingga tercipta pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi dan terdigitalisasi.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp393,0 miliar untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (1) koordinasi keterpaduan layanan publik prioritas dalam Portal Pelayanan Publik; (2) sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait Sistem Merit ASN; (3) koordinasi keterpaduan layanan administrasi pemerintahan prioritas dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan; dan (4) pengembangan Platform Digital Manajemen ASN. Sedangkan untuk menunjang Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) asistensi dan evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP serta WBK/WBBM; (2) pendampingan penyusunan arsitektur inisiatif strategis nasional; (3) penyusunan peta proses bisnis tematik; (4) penataan organisasi instansi pemerintah; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026, antara lain: (1) koordinasi dan asistensi penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) asistensi dan evaluasi kebijakan *Conflict Of Interest;* dan (3) Peraturan Pemerintah terkait Pemberian Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian PANRB pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian PANRB, antara lain penyusunan kebijakan nasional Transformasi Digital Pemerintah, sebagai kelanjutan kebijakan yang diselaraskan dengan perkembangan terkini di dunia serta kemajuan teknologi dan pengembangan portal nasional.

BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Negara (BIN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang intelijen untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BIN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen, antara lain meliputi: (1) penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri; serta (2) pelaksanaan koordinasi intelijen negara.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama tersebut, BIN juga memberikan dukungan administrasi pada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIN, antara lain untuk: (1) mendukung pencapaian sasaran prioritas khususnya pembangunan kualitas aparatur SDM, reformasi struktural, perubahan *mindset* dan *culture reset* aparatur; (2) mendukung penggunaan anggaran yang tepat sasaran guna meningkatkan kualitas intelijen dengan penyampaian yang cepat, tepat dan akurat; (3) mengoptimalkan kegiatan dan/atau operasi intelijen di dalam maupun luar negeri yang didukung jaringan intelijen dan teknologi intelijen terkini, andal, terintegrasi; serta (4) meningkatkan efektivitas koordinasi antarpenyelenggara intelijen negara dan kerja sama intelijen dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan nasional yang akan mengarah pada peningkatan investasi baik domestik maupun asing sehingga dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran BIN *audited* sebesar Rp30.509,5 miliar yang terdiri atas belanja operasional antara lain belanja pegawai, belanja operasional dan belanja nonoperasional antara lain untuk: (1) operasi intelijen; dan (2) modernisasi peralatan intelijen teknologi dan siber. Dari anggaran BIN tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) mendukung program dan kegiatan PN; dan (2) mendukung prioritas lainnya. Adapun kegiatan yang mendukung PN antara lain untuk: (1) mendukung operasi kontra terorisme; (2) operasi kontra separatisme; (3) penguatan operasi intelijen siber; (4) peningkatan kerja sama intelijen antarlembaga intelijen dunia; (5) peningkatan kompetensi aparatur SDM intelijen siber yaitu integrasi *Cyber Intelijen Analytics* (CIA); serta (6) pembentukan tim respon ancaman.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya antara lain diarahkan untuk: (1) meningkatkan kerja sama intelijen siber antarlembaga intelijen dunia; (2) memperkuat NSOC-SOC; serta (3) meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh Kemenhan/TNI/Polri/BSSN dan BIN. Sumber dana anggaran BIN yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN berasal dari RM, dan non-RM berasal dari PLN dan PDN. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja BIN untuk mendukung PN dan/atau prioritas lainnya yaitu terwujudnya stabilitas keamanan nasional. Adapun upaya mengatasi kendala/tantangan yang dihadapi BIN dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 antara lain melalui: (1) terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, seperti melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan nasional intelijen negara dalam rangka penguatan keamanan dalam negeri; (2) meningkatkan kekuatan BIN dalam mencegah, menanggulangi, dan menangkal ancaman melalui deteksi dini dan peringatan dini dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional; serta (3) optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi BIN guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, *outlook* BIN diperkirakan sebesar Rp15.444,8 miliar yang terdiri atas belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja

nonoperasional antara lain untuk: (1) operasi intelijen, dan (2) modernisasi peralatan intelijen teknologi dan siber. Dari *outlook* BIN tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN dan prioritas lainnya. Adapun kegiatan yang mendukung PN antara lain diarahkan untuk mendukung: (1) operasi kontra terorisme; (2) operasi kontra separatisme; (3) penguatan operasi intelijen aiber; (4) peningkatan kerjasama intelijen antarlembaga intelijen dunia; (5) peningkatan kompetensi aparatur SDM intelijen siber, dan integrasi *Cyber Intelijen Analytics* (CIA); serta (6) pembentukan tim respon ancaman intelijen siber. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya antara lain diarahkan untuk: (1) meningkatkan kerja sama intelijen siber antarlembaga intelijen dunia; (2) memperkuat NSOC-SOC; dan (3) meningkatkan kompetensi CSIRT yang dilaksanakan oleh Kemenhan/TNI/Polri/BSSN dan BIN. Anggaran BIN yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari anggaran RM, dan anggaran Non-RM yang berasal dari PLN dan PDN.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran BIN dialokasikan sebesar Rp16.450,0 miliar antara lain dimanfaatkan untuk mendukung PN melalui kegiatan: (1) operasi intelijen kontra terorisme; (2) operasi intelijen kontra separatisme; dan (3) sekolah tinggi intelijen negara. Strategi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dituangkan ke dalam delapan misi agenda pembangunan atau RPJPN tahun 2025-2045 yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, ketahanan sosial budaya, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan sarana prasarana, dan kesinambungan pembangunan.

BIN mendukung misi PN kedua yaitu: (1) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, dan (2) mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Selain itu, BIN melaksanakan program prioritas intelijen dan keamanan dalam negeri dengan sasaran terwujudnya sistem deteksi dini yang mampu mendukung keamanan negara. Sasaran program tersebut diwujudkan melalui kegiatan prioritas penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan dalam negeri yang dituangkan ke dalam proyek PN penguatan operasi intelijen dan kontra intelijen dan penguatan apartus SDM intelijen.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategis anggaran BIN tahun anggaran 2026, maka *output* BIN antara lain direncanakan untuk: (1) operasi intelijen kontra terorisme dengan target sebesar 96 operasi; (2) operasi intelijen kontra separatisme dengan target sebesat 86 operasi; (3) penguatan operasi intelijen siber; (4) integrasi *Cyber Intelligent Analytics* (CIA); (5) peningkatan kerja sama intelijen siber antarlembaga intelijen dunia; (6) pembentukan tim respon zncaman siber; serta (7) peningkatan kompetensi aparatus SDM intelijen siber.

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) antara lain mengatur bahwa BSSN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSSN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN antara lain seperti koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran BSSN *audited* sebesar Rp 884,2 miliar yang terdiri atas: (1) belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan kantor; dan (2) belanja nonoperasional antara lain untuk belanja pelaksanaan tugas fungsi BSSN, dan belanja non operasional berkarakteristik operasional yaitu lisensi dan internet monitoring keamanan siber. Dari realisasi anggaran BSSN tahun anggaran 2024 imanfaatkan untuk: (1) mendukung program dan kegiatan PN; dan (2) mendukung prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung PN diarahkan untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN. Selain itu, sumber dana pada anggaran BSSN yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari RM sebesar 100 persen. Pada kegiatan PN dan/atau prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun anggaran 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain dimanfaatkan untuk; (1) pembinaan peningkatan kapasitas keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup instansi pengelola aplikasi umum inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional; (2) pembinaan kematangan keamanan siber sektor pemerintahan, pembangunan manusia dan perekonomian; serta (3) peningkatan kapasitas aparatur SDM keamanan siber/sandi. Adapun manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung PN dan/atau prioritas lainnya antara lain: (1) tersedianya layanan digital pemerintah yang lebih aman: (2) terwujudnya perlindungan data dan informasi publik yang lebih kuat; (3) terciptanya ekosistem ekonomi digital yang terpercaya dan tersedianya aparatur SDM keamanan siber/sandi yang profesional dan kompeten.

Selain itu, upaya BSSN dalam mengatasi kendala/tantangan yang masih dihadapi antara lain melalui: (1) terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan meliputi memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal; (2) melakukan percepatan belanja sejak awal tahun anggaran; (3) mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun; serta (4) meningkatkan koordinasi antarpengelola anggaran dan PPK dengan unit kerja pengelola kegiatan dalam rangka melakukan pengawasan, perhitungan dan pelaporan data capaian *output*.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, *outlook* BSSN diperkirakan sebesar Rp1.065,5 miliar terdiri atas: (1) belanja operasional meliputi belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan kantor; dan (2) belanja nonoperasional antara lain untuk belanja pelaksanaan tugas fungsi BSSN, lisensi dan internet monitoring keamanan siber. Dari *outlook* BSSN tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN, serta mendukung prioritas lainnya. Untuk kegiatan yang mendukung PN antara lain diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas infrastruktur, tata kelola,

operasi keamanan siber dan sandi; dan (2) peningkatan kualitas aparatur SDM keamanan siber dan sandi. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk belanja pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN. *Outlook* BSSN tahun anggaran 2025 yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari RM sebesar 100 persen. Adapun manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung PN dan/ atau prioritas lainnya antara lain meliputi : (1) meningkatnya keamanan layanan digital publik; (2) mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui ekosistem digital yang aman; (3) meningkatnya literasi keamanan siber dan sandi di kalangan masyarakat; serta (4) meningkatkan kualitas aparatur SDM keamanan siber dan sandi yang profesional dan kompeten.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran BSSN dialokasikan sebesar Rp2.995,5 miliar dimanfaatkan untuk mendukung PN melalui kegiatan penguatan ekosistem keamanan siberdan sandi di Indonesia yang pendanaannya bersumber dari PLN. Selain itu, anggaran BSSN tahun anggaran 2026 untuk mendukung belanja operasional, dan belanja nonoperasional yang berkarakteristik operasional meliputi belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan kantor, lisensi perangkat kamanan siber/sandi, serta internet monitoring keamanan siber. Kebijakan strategis BSSN yang direncanakan pada tahun anggaran 2026 yaitu melalui penguatan teknologi keamanan siber/ sandi yang aman, tangguh, dan mandiri melalui kegiatan penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia, dan pemeliharaan operasional perangkat keamanan siber/sandi secara berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis BSSN pada tahun 2027-2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis BSSN antara lain meliputi: (1) pembangunan sarana dan prasarana keamanan siber, sandi dan sinyal; (2) sertifikasi produk keamanan siber, sandi dan sinyal; (3) pelatihan dan peningkatan profesionalisme SDM keamanan siber, sandi dan sinyal; (4) peningkatan budaya keamanan siber, sandi dan sinyal; (5) perumusan kebijakan keamanan siber, sandi dan sinyal; (6) kerja sama antar Lembaga; (7) peningkatan maturitas Lembaga; (8) operasi keamanan siber, sandi dan sinyal; serta (9) penanganan kejahatan siber, sandi dan sinyal.

BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik antara lain mengatur bahwa Badan Pusat Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pusat Statistik juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik, antara lain kegiatan supervisi kegiatan lapangan, rapat teknis pimpinan, serta pembinaan administrasi survei dan sensus.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran *audited* Badan Pusat Statistik sebesar Rp4.411,8 miliar, terdiri dari: (1) belanja operasional antara lain untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, serta belanja barang operasional lainnya; dan (2) belanja non operasional antara lain untuk belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, belanja peralatan dan mesin-ekstrakomptabel, serta belanja gedung dan bangunan-ekstrakomptabel. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional digunakan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Penyusunan Disagregasi PMTB, Survei Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA), Rangkaian Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 Tahun Pertama, Pendataan Statistik Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik Wisatawan Mancanegara, Survei *E-Commerce*, Rangkaian Kegiatan Sensus Pertanian 2023 Tahun Keempat, Statistik Tanaman Pangan, serta Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area. Sementara itu, kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya indikator makro, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pembinaan Statistik Sektoral, Statistik Harga, Statistik Industri, Statistik Pariwisata, Pendataan Potensi Desa, dan lainnya. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain tersedianya data statistik sesuai dengan tema pembangunan TA 2024, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sehingga Pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi kelompok penduduk miskin dan miskin ekstrim serta proses pembangunan ekonomi menjadi lebih terarah. BPS melakukan beberapa terobosan kebijakan, antara lain: (1) menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2024 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja BPS se-Indonesia di awal tahun anggaran 2024 untuk menjadi pedoman pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran 2024; (2) melakukan uji coba kegiatan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan kualitas data yang akan dihasilkan pada tahun 2026; serta (3) memanfaatkan metode *blended learning* dalam pelatihan petugas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Badan Pusat Statistik dialokasikan sebesar Rp5.705,9 miliar, terdiri dari: (1) belanja operasional antara lain untuk belanja keperluan kantor, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, serta belanja barang operasional lainnya; dan (2) belanja non operasional antara lain untuk belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja non operasional lainnya, belanja peralatan dan mesin, serta belanja gedung dan bangunan. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan kebijakan, *outlook* anggaran Badan Pusat Statistik tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp4.717,6 miliar.

Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pemanfaatan *Big Data* untuk statistik resmi, penguatan penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral, dan penyusunan data inflasi. Sementara itu, kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA), Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti), Persiapan Sensus Ekonomi, dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran BPS dialokasikan sebesar Rp6.927,0 miliar, yang terdiri dari anggaran Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp3.140,2 miliar dan Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp3.710,8 miliar. Dari total anggaran program PPIS, sebesar Rp3.140,2 miliar dialokasikan untuk mendukung sensus dan survei terkait Prioritas Presiden, yaitu: (1) bidang kedaulatan pangan antara lain melalui Survei Pertanian Tanaman Pangan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional; (2) bidang ekonomi produktif antara lain melalui Sensus Ekonomi 2026, Survei Harga Produsen, Survei Harga Konsumen, dan Survei Angkatan Kerja Nasional; serta (3) bidang ekonomi inklusif antara lain melalui Susenas, Survei Rumah Tangga Terintegrasi, Sakernas, serta Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Di samping itu, anggaran program PPIS digunakan untuk mendukung program prioritas Kementerian/Lembaga berdasar amanat langsung undang-undang dan prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah.

Pada tahun 2026, kegiatan periodik/baru antara lain Sensus Ekonomi TA 2026, Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan, Survei Biaya Hidup, Pengembangan *Mixed Method*, Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI), dan Survei Penyusunan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT NTP). Kegiatan rutin BPS pada tahun 2026 antara lain Sakernas (Mei, Agustus, dan November), Susenas (September dan Seruti), Publikasi Statistik Tanaman Pangan (Ubinan dan KSA), Pemutakhiran Data Perkembangan Desa, Survei Kesejahteraan Petani, serta kegiatan rutin lainnya. Sementara itu, Program Dukman digunakan untuk mengakomodasi kegiatan antara lain Prioritas Nasional Laporan Kerjasama OECD Bidang Statistik serta kebutuhan tambahan untuk kegiatan rutin, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat dan STIS), Layanan Hukum (Penyusunan Naskah Turunan UU Statistik), Layanan Pengawasan Internal, Layanan Perkantoran (Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan), dan Layanan Prasarana Internal. Rencana kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, antara lain: (1) efisiensi anggaran dalam pelaksanaan survei dengan *multimode data collection* dan pelatihan petugas secara *blended learning* (luring dan daring); dan (2) menentukan fokus kegiatan dan *quick wins* tahun 2026, yaitu Sensus Ekonomi 2026 dan penyediaan data PDB/PDRB yang berkualitas, serta pemutakhiran dan pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Inpres DTSEN ini bertujuan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi dari berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran, memanfaatkan teknologi dan metodologi terkini

untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses bisnis statistik, serta mendukung program prioritas pemerintah.

Proyeksi kebijakan strategis BPS pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis BPS, antara lain: (1) penguatan peran BPS dalam mendukung pembangunan nasional; (2) modernisasi proses bisnis statistik untuk statistik berkualitas; (3) penguatan layanan statistik; (4) penguatan sumber daya manusia dan budaya organisasi; (5) penguatan tata kelola dan kelembagaan; dan (6) penguatan kolaborasi dan komunikasi publik.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BA 055)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain mengatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PPN/Bappenas juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, antara lain operasional perkantoran dan gaji pegawai.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian PPN/Bappenas *audited* direalisasikan sebesar Rp2.015,9 miliar, terdiri dari belanja operasional Rp476,0 miliar untuk gaji tunjangan pegawai dan pemeliharaan gedung perkantoran, dan belanja non operasional sebesar Rp1.670,0 miliar untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan, meliputi RPJPN, RPJMN, dan RKP, penyelarasan rencana pembangunan nasional baik pusat maupun daerah, serta pelaksanaan prioritas nasional. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik. Kegiatan prioritas lainnya diarahkan untuk Koordinasi Penyusunan RKP 2025, Penyusunan RPJMN 2025-2029, serta Sosialisasi dan Publikasi RPJPN 2025-2045. Kegiatan Prioritas Nasional dan kegiatan prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 adalah Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan *Geopark* dan Sistem Informasi KRISNA. Manfaat yang dirasakan dengan adanya intervensi kebijakan adalah penetapan target prioritas nasional menjadi lebih terukur. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 antara lain dengan adanya *automatic adjusment*, rencana kegiatan dan anggaran yang sebelumnya telah disusun harus disesuaikan kembali. Strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan penugasan sehari-hari.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan sebesar Rp1.971,0 miliar, terdiri dari: (1) belanja operasional Rp583,0 miliar untuk gaji tunjangan pegawai dan pemeliharan gedung perkantoran; dan (2) belanja non operasional Rp1.388,0 miliar untuk penyusunan RKP 2026 dan sosialisasi RPJMN 2025-2029, pengawalan Rencana Strategis K/L Tahun 2025-2029, penyelarasan rencana pembangunan nasional baik pusat maupun daerah, serta pengawalan dan pengendalian pelaksanaan prioritas nasional. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan kebijakan, *outlook* anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp1.234,4 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; serta (3) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Sementara itu, untuk

kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk koordinasi penyusunan RKP 2026 serta diseminasi UU RPJPN 2025-2045 dan Perpres RPJMN 2025-2029. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas tetap menjalankan sejumlah mandat dari Presiden melalui Peraturan Presiden ataupun Instruksi Presiden, antara lain Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Bagi-Pakai DTSEN, Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Program Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Terpadu melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Pelaksanaan Satu Data lndonesia, Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian SDGs, Pengawalan Transformasi Indonesia dan Penyusunan Peraturan Turunan UU 59/2024 RPJPN 2025-2045, serta Pengawalan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. *Outlook* realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp1.234,4 miliar.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan sebesar Rp2.597,0 miliar. Anggaran tersebut termasuk alokasi untuk penerimaan pegawai CPNS dan CPPPK baru pada tahun 2025 sebanyak 1.531 orang yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai. Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan penting lainnya seperti: kegiatan Pengembangan Ekonomi Biru, Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah, Koordinasi Proses Aksesi Indonesia ke OECD lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Kebijakan Perencanaan Transfer ke Daerah (TKD) dan Penguatan Fondasi Keuangan Daerah, Kebijakan Percepatan Pembangunan Pedesaan, Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara, Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan *Geopark*, Kebijakan Perencanaan Ekonomi Hijau pada Sektor Prioritas, Kebijakan Keanekaragaman Hayati Nasional, Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Kebijakan Perencanaan Bioekonomi dan Konservasi Sumber Daya Air, Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik dalam Sistem Pangan Nasional, Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029, Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Internasional, Sistem Informasi KRISNA, Rekomendasi Kebijakan Satu Data Indonesia, Kebijakan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Nasional, Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Sistem Informasi E-Monev, Rekomendasi Rancangan Kebijakan tentang Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional, serta Beasiswa Pendidikan PNS Perencana Pembangunan Nasional. Selain itu juga akan digunakan untuk mendukung Prioritas lainnya seperti Pengendalian Pelaksanaan PSN termasuk Program MBG, Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha, Infrastruktur Desa, Rumah Murah Bersanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air, serta Pengembangan Koperasi Desa Merah-Putih.

Kebijakan prioritas Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas antara lain (i) Pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta Target dan Indikator Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045, (ii) Kajian/Reviu terhadap Isu dan Permasalahan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional dan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Penguatan Perencanaan Jangka Menengah, (iv) Penerapan MRPN, (v) Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional, (vi) Penguatan Pembiayaan Inovatif dalam Pembangunan Nasional, serta (vii) Penguatan Peran *Enabler* Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BA 056)

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam meyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional mengamanatkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; survei dan pemetaan pertanahan; penetapan hak dan pendaftaran tanah; redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp7.862,0 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 32,2 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 67,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai, belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut adalah kebijakan stelsel positif dan berstandar dunia. Tantangan yang ditemukan antara lain diperlukan seluruh perangkat data yang terupdate, penguatan SDM, dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain *Intermobility* dengan Badan Informasi Pertanahan Dunia penerapan ISO pada semua aspek.

Dalam APBN tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.454,8 miliar dengan *outlook* realisasi sebesar Rp6.455,0 miliar. Dari total alokasi tersebut, sebesar 24,8 persen dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75,2 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai, belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang

mendukung prioritas nasional. Kebijakan strategis yang dilaksanakan antara lain penguatan basis data pertanahan dan tata ruang (lengkap dan berkualitas).

Untuk APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp9.499,3 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 18,3 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 81,7 persen dialokasikan untuk mendukung prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai, belanja sewa), kegiatan sarana dan prasarana kantor, kegiatan pelayanan pengukuran, kegiatan pelayanan pendaftaran pertanahan, kegiatan pelayanan pertimbangan teknis, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan antara lain penguatan basis data pertanahan dan tata ruang (lengkap dan berkualitas).

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, antara lain:

1. Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah;
2. Optimalisasi Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan;
4. Meningkatkan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
5. Memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan;
6. Reformasi Birokrasi dengan menerapkan merit sistem dan perbaikan SDM;
7. Terwujudnya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah dalam rangka terciptanya pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan *green economy*.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
(BA 057)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Perpustakaan Nasional memiliki tugas: (1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (2) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (3) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (4) mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Perpustakaan Nasional audited adalah sebesar Rp680,9 miliar yang terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji dan belanja pemeliharaan kantor, dan belanja non operasional yang digunakan untuk Program Perpustakaan dan Literasi. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp370,6 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp133,4 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan: (1) pengarusutamaan naskah kuno nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) di 6 (enam) daerah; (2) alih aksara, alih bahasa dan pengkajian naskah kuno sebanyak 284 naskah; (3) tenaga perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan uji kompetensi sebanyak 3.846 orang; (4) pelestarian naskah kuno dan bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi sebanyak 95.450 eksemplar; (5) peningkatan koleksi perpustakaan melalui penghimpunan koleksi karya cetak dan karya rekam, pengadaan bahan perpustakaan dan langgaran jurnal elektronik sebanyak 1.377.967 eksemplar; (6) perpustakaan yang tergabung dalam jejaring sebanyak 781 perpustakaan; (7) akreditasi perpustakaan sesuai standar sebanyak 3.249 perpustakaan; (8) penguatan koleksi perpustakaan daerah di 10.381 perpustakaan; (9) perpustakaan yang mendapatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebanyak 1.628 perpustakaan; (10) pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dan pergruan tinggi sebanyak 10.900 perpustakaan; (11) pembudayaan kegemaran membaca dan literasi kepada 166.950 orang; dan (12) layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Bung Karno dan Bung Hatta sebanyak 2.325 orang, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penguatan sistem informasi berbasis teknologi informasi, penguatan kemitraan dan kerjasama perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan sesuai standar dan tata kelola manajemen perpustakaan yang baik dan handal. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 51,05 persen persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,06 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pengarusutamaan naskah kuno nusantara sebagai IKON di daerah, alih aksara, alih bahasa dan pengkajian naskah kuno, tenaga perpustakaan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan uji kompetensi, pelestarian naskah kuno dan bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi, peningkatan koleksi perpustakaan melalui penghimpunan koleksi karya cetak, pengadaan bahan perpustakaan dan langgaran jurnal elektronik, perpustakaan yang tergabung dalam jejaring, akreditasi perpustakaan sesuai standar, penguatan koleksi perpustakaan daerah, perpustakaan yang mendapatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi, pembudayaan kegemaran membaca

dan literasi, dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Bung Karno dan Bung Hatta. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek literasi, pelestarian warisan budaya, dan penguatan akses terhadap informasi. Melalui program-program strategis seperti pengarusutamaan naskah kuno Nusantara, pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap kekayaan intelektual dan sejarah bangsa yang selama ini kurang dikenal. Langkah ini tidak hanya memperkuat identitas dan IKON, tetapi juga meneguhkan peran bahan perpustakaan sebagai modal budaya yang bersifat transgenerasi. Alih aksara, alih bahasa, konservasi, serta digitalisasi bahan pustaka menjadi instrumen penting untuk menjadikan informasi lebih inklusif dan mudah diakses, tanpa batasan wilayah maupun generasi. Lebih lanjut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpustakaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, serta uji kompetensi. Upaya ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme pustakawan sekaligus meningkatkan mutu layanan perpustakaan di seluruh Indonesia. Dukungan yang terintegrasi terhadap berbagai jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, hingga perpustakaan khusus, yang meliputi akreditasi dan pembentukan jejaring kolaboratif, telah berhasil memperluas jangkauan layanan informasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ruang-ruang literasi yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Hadirnya pojok baca digital dan layanan literasi sosial di berbagai daerah menjadi contoh nyata bagaimana revolusi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat masyarakat membaca dan belajar sepanjang hayat. Secara keseluruhan, seluruh upaya ini memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Masyarakat kini dapat menikmati keterampilan literasi yang lebih baik, kemudahan akses terhadap sumber pengetahuan yang beragam, pelestarian budaya bangsa yang semakin terjaga, serta terbentuknya ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, program-program tersebut tidak hanya menunjang pencapaian target pembangunan nasional, tetapi juga memperkokoh fondasi pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif di era global. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: (a) penguatan budaya baca dan literasi dilaksanakan secara menyeluruh dengan fokus pada peningkatan kecakapan literasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pemberdayaan perpustakaan sekolah sebagai pusat pembelajaran literasi, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di desa-desa guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dan kontekstual, serta penyelenggaraan festival literasi nusantara dan Gerakan Indonesia Membaca yang menjadi agenda nasional untuk menumbuhkan kegemaran membaca secara luas dan berkelanjutan; (b) pengarusutamaan naskah nusantara sebagai bagian dari IKON menjadi perhatian utama. Pemerintah mempercepat proses pelestarian naskah kuno melalui digitalisasi yang masif, bersama dengan serangkaian kegiatan alih aksara, alih media, alih bahasa, dan alih wahana, serta penelitian mendalam terhadap naskah-naskah tersebut. Langkah ini merupakan upaya strategis dalam menjaga dan meneruskan warisan intelektual dan budaya bangsa kepada generasi mendatang, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan nasional; (c) standarisasi dan pembinaan perpustakaan melalui penyusunan kajian perpustakaan Indonesia 2024 sebagai pedoman nasional, pelaksanaan akreditasi perpustakaan secara konsisten, sekaligus peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan; (d) penguatan kemitraan lembaga dan sinkronisasi sistem informasi layanan terpadu, dilakukan secara aktif dengan memperluas kemitraan perpustakaan dan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri, serta mengintegrasikan berbagai sistem informasi manajemen layanan koleksi, pembinaan perpustakaan, dan tata kelola secara terpadu. Hal ini akan memperkuat efektivitas pengelolaan perpustakaan nasional serta menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan akurat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Perpustakaan Nasional dialokasikan sebesar Rp721,7 miliar yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp277,0 miliar antara lain untuk belanja gaji sebesar Rp194,9 miliar dan belanja pemeliharaan sebesar Rp82,0 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp444,2 miliar antara lain untuk Program Perpustakaan dan Literasi. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi belanja PNRI diproyeksikan sebesar Rp442,1 miliar.

Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp364,0 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp91,2 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) mewujudkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui kegiatan antara lain: (a) tenaga pustakawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi sebanyak 4.260 orang; (b) pengembangan koleksi perpustakaan melalui penghimpunan karya cetak dan karya rekam, pengadaan bahan perpustakaan dan langganan jurnal elektronik sebanyak 1.323.146 eksemplar; (c) perpustakaan yang tergabung jejaring sebanyak 654 perpustakaan; (d) akreditasi perpustakaan sesuai standar sebanyak 7.025 perpustakan; (e) pengembangan dan pembinaan jenis perpustakaan umum sebanyak 10.034 perpustakaan; (f) pengembangan koleksi di daerah sebanyak 11.309 perpustakaan; (g) perpustakaan yang mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebanyak 1.450 perpustakaan; (h) pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebanyak 60.000 orang; (i) layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Bung Karno dan Bung Hatta sebanyak 2.350 orang; (2) mewujudkan pemajuan naskah kuno nusantara melalui kegiatan antara lain: (a) pengarusutamaan naskah kuno nusantara sebagai IKON di 11 daerah; (b) verifikasi, validasi, pemetaan, penghargaan, alih aksara, alih bahasa, alih wahana, saduran dan kajian naskah kuno nusantara sebanyak 2.290 naskah; (c) naskah kuno nusantara dan bahan perpustakaan yang di preservasi sebanyak 171.525 eksemplar. Kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penguatan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, pengembangan kemitraan dan kerjasama yang sinergis antar perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan tata kelola perpustakaan nasional yang prima. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 50,4 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,06 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain tenaga pustakawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, pengembangan koleksi perpustakaan melalui penghimpunan karya cetak dan karya rekam, pengadaan bahan perpustakaan dan langganan jurnal elektronik, perpustakaan yang tergabung jejaring, akreditasi perpustakaan sesuai standar, pengembangan dan pembinaan berbagai jenis perpustakaan, pengembangan koleksi di daerah, perpustakaan yang mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: (a) melalui peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, masyarakat akan memperoleh layanan informasi yang lebih profesional, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan; (b) pengembangan koleksi yang beragam dan mutakhir, baik dalam bentuk karya cetak maupun sumber elektronik, akan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber pengetahuan dan informasi; (c) integrasi perpustakaan dalam jejaring serta penerapan akreditasi perpustakaan sesuai standar menjamin peningkatan mutu layanan dan efisiensi pengelolaan, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan perpustakaan yang terstandarisasi dan berkualitas tinggi; (d) upaya pembinaan serta pengembangan perpustakaan di berbagai wilayah, khususnya di daerah, akan mendukung pemerataan akses informasi, sekaligus mengurangi kesenjangan layanan perpustakaan; dan (e) program transformasi

berbasis inklusi sosial membuka peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan secara setara tanpa hambatan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp378,0 miliar dimana sebesar 16,5 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (1) mewujudkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui kegiatan antara lain: (a) tenaga pustakawan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.600 orang; (b) perpustakaan yang mendapatkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebanyak 750 perpustakaan; (c) pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) sebanyak 360 orang; dan (d) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi yang melibatkan para mahasiswa sebanyak 1.000 kelompok; (2) mewujudkan pemajuan naskah kuno nusantara melalui kegiatan antara lain (a) alih wahana naskah kuno nusantara sebanyak 100 naskah; (b) bahan perpustakaan yang dialih media sebanyak 38.000 eksemplar; (c) naskah kuno nusantara yang dialih media sebanyak 6.500 eksemplar; dan sebesar 83,5 persen untuk belanja operasional pegawai dan pemeliharaan kantor. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain (1) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan yang dilaksanakan melalui strategi (a) Penguatan kelembagaan Perpustakaan Nasional dan daerah; (b) Peningkatan Perpustakaan terakreditasi; (c) Penyediaan bahan bacaan bermutu secara merata; (d) Peningkatan akses perpustakaan digital dan perpustakaan keliling; (e) Revitalisasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan meningkatkan peran pustakawan. (2) Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi yang dilaksanakan melalui strategi (a) Pengembangan perpustakaan sebagai ruang kreatif dan destinasi wisata edukatif berbasis literasi; (b) Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan yang berkelanjutan; (c) Peningkatan peran relawan dan mahasiswa untuk meningkatkan kecakapan literasi. (3) Pemajuan Naskah Kuno Nusantara yang dilaksanakan melalui strategi (a) Penyusunan, penyediaan, pengkajian, dan pemanfaatan bahan pengayaan literasi berbasis naskah kuno Nusantara; (b) Pengajuan naskah kuno Nusantarasebagai IKON dan MoW; (c) Pemanfaatan naskah kuno Nusantara untuk Internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan sejarah bangsa; (d) Pelestarian naskah kuno Nusantara.

Proyeksi kebijakan strategis Perpustakaan Nasional pada tahun 2027–2029 berdasarkan RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025–2029 antara lain mendukung pencapaian tujuan yang terdapat pada Prioritas Nasional ke-4 "Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas." Dengan kegiatan prioritas (1) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan; dan (2) Peningkatan budaya kegemaran membaca. Kemudian pada Prioritas Nasional ke-8 "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur". Dengan kegiatan prioritas Perlindungan dan pelestarian warisan budaya.

Arah kebijakan utama yang secara langsung mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029, yaitu: (1) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan; (2) Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi; dan (3) Pemajuan Naskah Kuno Nusantara. Ketiga arah kebijakan utama dan strategi Perpustakaan Nasional yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional tersebut diwujudkan melalui program Perpustakaan dan Literasi dengan sasaran program, yaitu (1) Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan, (2) Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai SNP, dan (3) Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan,

pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara. Sementara itu, satu arah kebijakan lainnya dikategorikan sebagai arah kebijakan pendukung. Kebijakan lainnya adalah Penguatan Kemitraan Strategis dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Nasional yang diwujudkan melalui program Dukungan Manajemen. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan target RPJMN, kebijakan ini dipandang penting karena menjadi fondasi bagi keberhasilan implementasi ketiga arah kebijakan utama.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
(BA 059)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital antara lain diatur bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Komdigi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, pelindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Komdigi juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komdigi antara lain seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Komdigi berdasarkan LKPP audited sebesar Rp18.160,0 miliar yang terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor, dan belanja non operasional antara lain untuk Penyediaan Infrastruktur TIK, Komunikasi Publik, Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Pemanfaatan TIK, dan Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Infrastruktur Digital dengan penyediaan Palapa Ring, BTS 4G, Akses Internet dan Satelit SATRIA 1, memperkuat Ekosistem Digital dengan penyediaan Sumber Daya Manusia Digital (SDM) dan Ekosistem Digital, memperkuat Ruang Digital dengan regulasi pelindungan anak di ruang digital, penyediaan sistem penanganan dan penanggulangan konten ilegal, sistem kepatuhan moderasi konten dan memperkuat Komunikasi Publik dan Media terkait Direktif Presiden (Penurunan Stunting, Sosialisasi PEMILU dan PILKADA), Pengelolaan Media Massa, Pengembangan Komunikasi Strategis, Pengawasan Ruang Siaran TV dan Radio, mendukung Kemerdekaan Pers, dan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya antara lain diarahkan untuk Layanan Dukungan Pengawasann Spektrum Frekuensi, Layanan Perizinan Spektrum, Layanan Penanganan Spektrum Frekuensi Radio, Layanan Penyebaran Informasi Bencana, Layanan Pos dan Penyiaran, Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Layanan Pengendalian Sistem dan Transaksi Elektronik, Penanganan Tindak Pidana ITE, Layanan Aplikasi Pemerintahan, Pedoman Smart City, Dukungan Komunikasi Publik, Diseminasi Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah, Dukungan Event Internasional, Penyediaan Platform SDM Digital Nasional, Pelatihan Aparatur Bidang e-Government, serta Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 7,5 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 13,5 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 79,0 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Palapa Ring, BTS 4G, Akses Internet, SATRIA 1, Digital Talent Scholarship, Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), Komunikasi Publik dan Media terkait Direktif Presiden, Pengelolaan Media Massa, Pengawasan Ruang Siaran TV dan Radio, serta Indeks Kemerdekaan Pers. Sedangkan untuk kontrak tahun jamak antara lain Peralatan dan Fasilitas Pengembangan Kependidikan STMM, Manajemen proyek Pusat Data Nasional, dan

Manajemen pengendalian dan pengawasan (MPP) pembangunan Pusat Data Nasional Cikarang. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain Pemerataan Akses Informasi dan Layanan Digital, Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing SDM, Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital, Akses Informasi Publik yang Lebih Transparan dan Kredibel, Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain adanya Perubahan atau penambahan kebijakan nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, serta perubahan struktur organisasi pemerintah menyebabkan penyesuaian ulang terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penguatan infrastruktur dan kebijakan strategis digital. Pemerintah menyelesaikan pembangunan 5.618 BTS 4G di wilayah 3T serta memastikan konektivitas untuk mendukung Pemilu 2024. Di sisi regulasi, telah diterapkan pakta integritas bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menekan perjudian online, serta menyiapkan spektrum frekuensi baru guna mendukung perluasan layanan 4G dan 5G. Peluncuran Indonesia Digital Test House (IDTH) turut mendorong pengujian perangkat digital berstandar internasional. Selain itu, Kementerian Komdigi mengembangkan Pusat Data Nasional melalui kebijakan afirmatif, memperkuat komunikasi publik dengan inovasi M-Government, serta meningkatkan literasi masyarakat lewat e-book Pemilu Damai "Pemilu Pedia". Seluruh langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Komdigi dialokasikan sebesar Rp7.728,9 miliar, sementara *outlook* tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp9.522,1. Anggaran Kementerian Komdigi tahun 2025 digunakan untuk memenuhi belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor, serta belanja non operasional antara lain untuk Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital, Komunikasi Publik dan Media, Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital, dan Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Infrastruktur Digital dengan penyediaan Palapa Ring, BTS 4G, Akses Internet dan SATRIA 1, memperkuat Ekosistem Digital dengan penyediaan SDM Digital dan Ekosistem Digital, memperkuat Ruang Digital dengan regulasi pelindungan anak di ruang digital, penyediaan sistem penanganan dan penanggulangan konten ilegal, sistem kepatuhan moderasi konten dan memperkuat Komunikasi Publik dan Media terkait Direktif Presiden (Makan Bergizi Gratis), Pengelolaan Media Massa, Pengembangan Komunikasi Strategis, Pengawasan Ruang Siaran TV dan Radio, mendukung Kemerdekaan Pers, dan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi, Layanan Perizinan Spektrum, Layanan Penanganan Spektrum Frekuensi Radio, Layanan Penyebaran Informasi Bencana, Layanan Pos dan Penyiaran, Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Layanan Pengendalian Sistem dan Transaksi Elektronik, Penanganan Tindak Pidana ITE, Layanan Aplikasi Pemerintahan, Pedoman Smart City, Dukungan Komunikasi Publik, Diseminasi Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah, Dukungan Event Internasional, Penyediaan Platform SDM Digital Nasional, Pelatihan Aparatur Bidang e-Government, dan Pengukuran IMDI. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 9,0 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 10,0 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 81,0 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 hanya sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Palapa Ring, BTS 4G,

Akses Internet, SATRIA 1, Digital Talent Scholarship, TKPPSE, Komunikasi Publik dan Media terkait Direktif Presiden, Pengelolaan Media Massa, Pengawasan Ruang Siaran TV dan Radio, serta Indeks Kemerdekaan Pers. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain Pemerataan Akses Informasi dan Layanan Digital, Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing SDM, Perlindungan Masyarakat di Ruang Digital, Akses Informasi Publik yang Lebih Transparan dan Kredibel, serta Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp8.624,3 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 68,8 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Layanan Selular 4G, Sistem Informasi Kebencanaan, Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), Layanan Perizinan Frekuensi, OM Palapa Ring, OM BTS 4G (hanya terlayani untuk 3 bulan layanan), OM SATRIA-1 (hanya terlayani untuk 4 bulan layanan), OM Akses Internet (hanya terlayani untuk 8 bulan layanan), OM Pusat Data Nasional (PDN), Penanggulangan Konten Ilegal, Eksosistem Startup Digital, Layanan Publik Bidang Telekomunikasi, Perizinan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, dan Startup Digital Terakselerasi. Selanjutnya sebesar 31,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio, Pemeliharaan Alat Monitoring UPT, Pemeliharaan SMFR, Pemeliharaan SIMS, Pemenuhan Kapasitas Perangkat Balai Uji, Pemanfaatan Teknologi Digital bagi masyarakat di wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informasi, Layanan Pengelolaan PNBP domain.id, Layanan Pengawasan dan Pengendalian sektor pos, penyiaran dan telekomunikasi, Pengembangan inovasi AI dan Teknologi Baru, serta Tata Kelola Internal (Dukungan Manajemen).

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan kelanjutan dari arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi besar Renstra 2025–2029, yaitu mewujudkan transformasi digital yang bermakna. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas internet, penguatan ekosistem digital untuk pertumbuhan ekonomi, percepatan transformasi digital pemerintah, pengembangan masyarakat digital, serta penciptaan ruang digital yang aman. Pada komunikasi publik, kebijakan ditujukan untuk diseminasi informasi program prioritas Presiden secara luas, dan orkestrasi penyelenggaraan komunikasi publik. Pendekatan dilakukan secara lebih kolaboratif, dengan mengedepankan peranan aktif ekosistem dan pelaku industri sebagai mitra strategis dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Beberapa program strategis disiapkan untuk mendukung kesuksesan program prioritas presiden, antara lain penyediaan akses internet yang menjangkau titik-titik lokasi strategis seperti sekolah rakyat, pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) untuk kepentingan sektor publik seperti mendukung digitalisasi bansos, serta pelatihan SDM *Digital Talent Scholarship* yang juga diarahkan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(BA 060)

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain mengatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Penegakkan Hukum (Gakkum), perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang harkamtibmas, gakkum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Polri juga menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Polri antara lain meliputi: (1) pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh; (2) pengembangan infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern; serta (3) peningkatan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran Polri *audited* sebesar Rp136.563,0 miliar yang terdiri atas (1) belanja operasional antara lain untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri; (2) belanja nonoperasional antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Polri seperti intelijen keamanan, pembinaan masyarakat, penjagaan, patroli, pengawalan, penyelidikan, penyidikan; serta (3) penanganan unjuk rasa dan konfik sosial. Dari realisasi anggaran tahun 2024 tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN; dan prioritas lainnya sesuai dengan prioritas Polri. Adapun kegiatan yang mendukung PN antara lain diarahkan untuk: (1) memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri; (2) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (3) penindakan tindak pidana terorisme; (4) penindakan tindak pidana narkoba; (5) penindakan tindak pidana siber; (6) penindakan tindak pidana perairan; (7) pengendalian operasi kepolisian: (8) pelayanan kesehatan Polri; (9) pengembangan peralatan Polri; serta (10) prasarana bidang pertahanan dan keamanan.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya sesuai dengan prioritas Polri antara lain diarahkan untuk: (1) penanganan pengaduan masyarakat terhadap personil Polri; (2) penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi; (3) perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya; (4) penanganan tindak pidana siber; (5) pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas; (6) pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar; (7) penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia; (8) penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan; serta (10) perburuan dan penangkapan gembong terorisme dan jejaringnya. Khusus anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan PN bersumber dari RM; serta bersumber dari Non-RM yang berasal dari PLN, PDN dan sumber Non-RM lainnya. Kegiatan PN dan/atau prioritas lainnya sesuai prioritas Polri yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain meliputi: (1) pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) penanggulangan konflik secara humanis fungsi teknis Brimob, Binmas dan Sabhara; (2) sertifikasi pendidik dan pengasuh, pendidikan dan latihan SPPA; (3) penanganan tindak pidana terorisme, narkoba, siber dan perairan; (4) peningkatan kapasitas sdm siber melalui sertifikasi CEH dan CHFI; (5) pengamanan IKN; (6) bakti kesehatan; (7) pemenuhan Almatsus; (8) pemenuhan *Catching Net Samapta*; (9) pemenuhan kendaraan listrik R-4 "Yanmas"; (10) pemenuhan kendaraan

angkut khusus *Tactical Advanced* TDD *Active System*; (11) pemenuhan stasiun pengisian kendaraan listrik; (12) peningkatan layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal; (13) pembangunan Polsubsektor di wilayah perbatasan; serta (14) pembangunan Polsek, tetapi Polri tidak memiliki kontrak tahun jamak.

Adapun manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung PN dan/atau prioritas lainnya antara lain untuk; (1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif; dan (2) meningkatnya pelayanan harkamtibmas dan gakkum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Polri masih menghadapi kendala/tantangan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2024 antara lain: (1) tingginya angka kejahatan konvensional yang mengancam jiwa dan harta benda; (2) maraknya judi online dan kejahatan terhadap perempuan dan anak; (3) tingginya angka kejahatan transnasional seperti pelanggaran hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); (4) tingginya penyelundupan dan peredaran narkoba melalui wilayah laut dan wilayah perbatasan NKRI; (5) tingginya kejahatan siber di ruang media sosial serta digunakan sebagai sarana penipuan, pencurian data pribadi; serta (6) penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan yang semakin beragam. Untuk itu, Polri berupaya melakukan beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain meliputi; (1) peningkatan kualitas SDM Polri melalui sertifikasi, pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kemampuan agar semakin profesional, modern dan terpercaya; serta (2) peningkatan kualitas pelaksanaan tugas melalui pengembangan peralatan Polri dan pelayanan publik kepolisian.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, *outlook* anggaran Polri diperkirakan sebesar Rp138.545,2 miliar yang terdiri atas belanja operasional berupa dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian; serta (2) belanja non operasional berupa pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian seperti intelijen keamanan, pembinaan masyarakat, penjagaan, patroli, pengawalan, penyelidikan, penyidikan dan penanganan unjuk rasa dan konfik sosial. Dari *outlook* anggaran Polri tahun anggaran 2025 tersebut dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan PN dan prioritas lainnya (prioritas Polri). Kegiatan yang mendukung PN diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri, dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan tindak pidana terorisme, penindakan tindak pidana narkoba, penindakan tindak pidana siber, sertifikasi, penindakan tindak pidana perairan, pengendalian operasi kepolisian, pelayanan kesehatan Polri, pengamanan destinasi wisata, pengembangan peralatan Polri, dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya (prioritas Polri) diarahkan untuk penanganan pengaduan masyarakat terhadap personil Polri, penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi, perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya, penanganan tindak pidana siber, pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar, penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia, penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan, dan perburuan dan penangkapan gembong terorisme dan jejaringnya. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan PN bersumber dari RM dan bersumber dari Non-RM yang utamanya dari PLN dan PDN. Adapun kegiatan PN dan/atau prioritas lainnya (prioritas Polri) yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) Dikbangspes Penanggulangan Konflik secara Humanis Fungsi Teknis Brimob, Binmas, dan Sabhara; (2) Sertifikasi Pendidik dan Pengasuh, Pendidikan dan Latihan SPPA; (3) Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Narkoba, Siber dan Perairan; (4) Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI; (5) pengamanan IKN; (6) bakti kesehatan; (7) pemenuhan Almatsus; (8) pemenuhan *Catching Net*

Samapta; (9) Pemenuhan Kendaraan Listrik R-4 "Yanmas"; (10) Pemenuhan Kendaraan Angkut Khusus *Tactical Advanced* TDD *Active System*; (11) Pemenuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik; (12) Peningkatan Layanan RPK Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal; (13) pembangunan Polsubsektor di wilayah perbatasan; serta (14) pembangunan Polsek, tetapi Polri tidak memiliki kontrak tahun jamak. Adapun manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung PN dan/atau prioritas lainnya antara lain menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif dan meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Polri dialokasikan sebesar Rp145.650,0 miliar. Dari anggaran Polri tersebut sebesar 10,8 persen dialokasikan untuk mendukung PN antara lain melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri, pengkajian dan strategi SDM Polri, dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan tindak pidana terorisme, penindakan tindak pidana narkoba, penindakan tindak pidana siber, penindakan tindak pidana perairan, pengendalian operasi kepolisian, pelayanan kesehatan Polri, pengembangan peralatan Polri, dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan, dan sebesar 0,21 persen dialokasikan untuk mendukung prioritas lainnya (prioritas Polri), antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penanganan pengaduan masyarakat terhadap personil Polri, penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi, perburuan dan penangkapan bandar narkoba dan jejaringnya, penanganan tindak pidana siber, pelatihan SDM Polri yang unggul dan berintegritas, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar, penyelesaian kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia, penanganan objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan, dan perburuan dan penangkapan gembong terorisme dan jejaringnya.

Kebijakan strategis Polri yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain untuk: (1) memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara prediktif dan proaktif; (2) mewujudkan kualitas pelayanan publik Polri yang semakin inovatif berbasis digital; (3) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, dan humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI); (4) mewujudkan pengelolaan SDM yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional; 5) mengembangkan Almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE); serta (6) meningkatkan budaya integritas, akuntabilitas dan kehormatan pada aetiap pelaksanaan tugas kepolisian.

Proyeksi kebijakan strategis Polri pada tahun 2027-2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Polri antara lain meliputi: (1) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif; (2) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan; (3) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh, Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern; serta (5) Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BA 063)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan ketentuan pada pasal 2, tugas utama BPOM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan baik sebelum maupun setelah beredar sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian izin edar, pengujian sampel produk, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan penandaan serta penanganan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan. Selain itu dilakukan juga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan POM audited sebesar Rp2.192,8 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai dan Operasional Kantor dan belanja non operasional antara lain untuk Pengawasan Obat dan Makanan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat antara lain: (1) peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan, baik jalur legal dan ilegal melalui penguatan regulasi dan penggalangan stakeholder dari hulu ke hilir; (2) peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan melalui simplifikasi dan digitalisasi layanan publik yang bersifat proaktif; (3) peningkatan regulatory assistance atau pendampingan bagi pelaku usaha, termasuk lembaga riset dan UMKM tematik dan berbasis kearifan lokal dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan dan mutu, serta daya saing Obat dan Makanan; (4) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) BPOM melalui peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis sistem merit untuk mewujudkan SMART ASN; (5) penguatan laboratorium pengujian termasuk di daerah penyangga IKN; (6) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan; (7) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta upaya preventif dan promotif kesehatan; (8) penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengawalan percepatan penurunan stunting dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM); dan (9) penguatan regulasi dan kelembagaan serta peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Reformasi Birokrasi

Adapun kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Penunjang Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 89,4 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0,01 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 10,6 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain nihil dan kontrak tahun jamak antara lain nihil. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: (1) kemudahan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dalam memahami persyaratan perizinan secara jelas melalui berbagai terobosan pelayanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi

juga mudah diakses, ramah bagi kelompok rentan, dan memberdayakan komunitas; (2) kemudahan masyarakat mengecek legalitas produk obat dan pangan melalui sistem informasi publik berbasis mobile dan aksesibel seperti aplikasi "CekBPOM", Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun media sosial (Instagram, Facebook, dll); (3) perluasan UPT BPOM hingga menjangkau 37 provinsi menghadirkan layanan pengawasan obat dan makanan yang lebih dekat, cepat, dan merata, sehingga masyarakat semakin terlindungi dalam mengakses produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain :

1. Kejahatan siber di bidang obat dan makanan
2. Meningkatnya peredaran produk ilegal melalui platform digital menuntut BPOM untuk memperkuat pengawasan siber, penindakan hukum yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi modus distribusi yang semakin canggih dan lintas batas
3. Percepatan Dinamika Pasar sebagai Tantangan terhadap Adaptasi Sistem Pengawasan
4. Munculnya produk baru hasil riset dan teknologi menantang kemampuan sistem pengawasan untuk tetap relevan dan responsif. BPOM dituntut memiliki kebijakan dan metode evaluasi yang adaptif guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk inovatif.
5. Maraknya penyebaran hoaks terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Hoaks berbasis isu kesehatan, terutama terkait kandungan zat dalam obat dan pangan, berpotensi memicu kepanikan publik dan penurunan kepercayaan terhadap otoritas. Literasi digital dan komunikasi risiko menjadi kunci dalam menangkal disinformasi tersebut.
7. BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan, memiliki tugas salah satunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam mengakses, memilih, dan menyebarkan informasi Obat dan Makanan agar terhindar dari hoaks.
8. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular.
9. Tren konsumsi produk tinggi gula, garam, lemak, serta peningkatan permintaan obat dan suplemen kesehatan menuntut pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko. BPOM perlu memastikan bahwa produk yang beredar tidak memperburuk beban kesehatan masyarakat.

Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam, dan kosmetik untuk meningkatkan tingkat maturitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
2. Pengawasan menyeluruh terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar, demi menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya.
3. Peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam pengawasan pangan industri rumah tangga serta pemberdayaan masyarakat melalui program Kabupaten/Kota Pangan Aman.
4. Pengujian cepat dan akurat terhadap sampel pada kejadian luar biasa keracunan pangan sesuai standar.
5. Penguatan jejaring laboratorium, baik internal maupun eksternal, agar mampu memenuhi standar pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang berlaku.
6. Pemantauan dan penindakan atas pelanggaran hukum di bidang peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk melalui patroli siber dan penyidikan kejahatan.
7. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui Program BPOM *Goes to School/Campus/Community*.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan POM dialokasikan sebesar Rp2.560,9 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai dan operasional kantor dan belanja non operasional antara lain untuk Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun *outlook* anggaran Badan POM tahun 2025 sebesar Rp1.736,1 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat: (1) pengawalan pengawasan fasilitas produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan produk *high risk* lainnya melalui *on site inspection*; (2) penanganan kosmetik yang dibuat berdasarkan

kontrak produksi dan *skincare* etiket biru yang tidak sesuai ketentuan; (3) penguatan daya saing Obat Bahan Alam Indoensia dengan meingkatkan produk eskpor; (4) peningkatan maturitas industri Obat Bahan Alam dan Industri Farmasi terkait dengan sistem manajemen mutu; (5) pengawasan Obat dan Makanan secara daring melalui siber; (6) operasi tematik dalam rangka pemberantasan Obat dan Makanan ilegal; (7) penguatan *regulatory science* melalui penyusunan NSPK; (8) penguatan komunikasi publik dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan; (9) peningkatan peran dinkes kab/kota dalam pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian melalui DAK; (10) dukungan BPOM dan kerja sama lintas sektor dalam upaya menjadi WHO *Listed Authority*. (11) implementasi grand design penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan; dan (12) hilirisasi hasil riset obat pengembangan baru, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 89,3 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 10,7 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Nihil dan kontrak tahun jamak antara lain Nihil. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Respon Cepat terhadap Produk Berisiko

   Dengan penguatan sistem pengawasan dan laboratorium, BPOM dapat lebih sigap mendeteksi dan menarik produk berbahaya dari peredaran, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan.

2. Peningkatan Literasi Konsumen

   Alokasi belanja untuk edukasi publik mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat tentang cara memilih dan menggunakan obat dan makanan secara bijak, mendorong perilaku konsumsi yang lebih sehat dan bertanggung jawab

3. Dukungan terhadap UMKM dan Produk Lokal

   Kebijakan belanja juga diarahkan untuk pembinaan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi standar keamanan pangan dan produk obat tradisional, sehingga daya saing produk lokal meningkat dan kepercayaan konsumen terjaga.

4. Penguatan Ketahanan Kesehatan Nasional

   Melalui pengawasan yang lebih kuat terhadap rantai distribusi obat dan makanan, masyarakat memperoleh jaminan atas ketersediaan produk yang tidak hanya aman, tetapi juga terjamin mutu dan efektivitasnya mendukung sistem kesehatan nasional yang tangguh.

5. Akses Produk Aman dan Bermutu Lebih Merata

   Intervensi kebijakan belanja memungkinkan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil dapat mengakses produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp2.247,0 miliar. Total anggaran tersebut sebesar 21,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan sebesar 78,8 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM mencakup belanja pegawai dan belanja rutin pemeliharaan. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan berdasarkan anggaran 2026 antara lain :

1. Mendorong inovasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta peningkatan pelayanan publik guna memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar,

2. Pendampingan pelaku usaha khususnya UMKM dalam pemenuhan standar mutu dan keamanan guna meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global,
3. Pengembangan kerja sama strategis dengan instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta organisasi internasional untuk meningkatkan efektivitas pengawasan,
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya dan infrastruktur guna mendukung efektivitas pengawasan.

Proyeksi kebijakan strategis BPOM pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga antara lain melalui :

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal *farmakovigilans*, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(BA 064)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), antara lain mengatur bahwa Lemhannas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggarakan pendidikan, penyiapan kader, dan pemantapan pimpinan tingkat nasional (Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N), menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai masalah nasional, regional, dan internasional (Kajian Jangka Panjang, Kajian Urgent dan Cepat, Kajian Risiko Krisis, *Jakarta Geopolitical Forum*), dan menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan (*Retreat* Kepala Daerah, *Training of Trainers*, Gebyar Wawasan Kebangsaan, *Talkshow* Wawasan Kebangsaan *Goes To Campus*). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lemhannas RI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI antara lain dukungan Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Lemhannas RI *audited* sebesar Rp182,1 miliar. Realisasi tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan (*Training of Trainers*, Gebyar Wawasan Kebangsaan, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi DPR RI 2024-2029), sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penyelenggarakan pendidikan penyiapan kader pimpinan tingkat nasional dan menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai masalah nasional. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain menyebarluaskan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa kepada para masyarakat/akademisi/tokoh masyarakat/agama, dan lainnya.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Lemhannas RI dialokasikan sebesar Rp187,1 miliar dan o*utlook* tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp145,0 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/penyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional (Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N)) dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan (*Retreat* Kepala Daerah, *Training of Trainers*, Gebyar Wawasan Kebangsaan, *Talkshow* Wawasan Kebangsaan *Goes To Campus*), sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai masalah nasional, regional, dan internasional (Kajian Jangka Panjang, Kajian Urgent dan Cepat, Kajian Risiko Krisis, *Jakarta Geopolitical Forum*), pelaksanaan pengukuran indeks ketahanan nasional, dan pelaksanaan dukungan manejemen. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan dengan adanya kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional

dan/atau Prioritas lainnya antara lain untuk membentuk pemimpin tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional dan meningkatkan dan memantapan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp212,0 miliar terbagi menjadi Belanja Operasional dan Belanja Pelaksanaan Tusi: a.l. Pendidikan pemantapan pimpinan nasional dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain melaksanakan Pendidikanx Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan (termasuk Retret DPRD), dan Dialog Wawasan Kebangsaan (*Talkshow* Wawasan Kebangsaan *Goes To Campus* dan Gebyar Wawasan Kebangsaan).

Proyeksi kebijakan strategis Lemhannas RI pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis K/L Pendidikan, Pengarustamaan Gender, Reformasi Birokrasi, Digitalisasi dan Kepemimpinan Indonesia antara lain Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional (Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N)) yang mendukung beberapa tematik APBN (Pendidikan, Pengarustamaan Gender, Digitalisasi dan Kepemimpinan Indonesia), Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang mendukung tematik APBN (Pengarustamaan Gender), Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan (termasuk *Retreat* DPRD) yang mendukung tematik APBN (Pengarustamaan Gender), Dialog Wawasan Kebangsaan (*Talkshow* Wawasan Kebangsaan *Goes To Campus* dan Gebyar Wawasan Kebangsaan) yang mendukung tematik APBN (Pengarustamaan Gender), Pengkajian Strategik (Kajian Jangka Panjang, Kajian *a* dan Cepat, Kajian Risiko Krisis, *Jakarta Geopolitical Forum*) yang mendukung beberapa tematik APBN (Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Ketahanan Pangan, dan Ekonomi Hijau), Indeks Ketahanan Nasional yang mendukung tematik APBN (Digitalisasi) dan Dukungan Manajemen yang Akuntabel serta Profesional yang mendukung tematik APBN (Reformasi Birokrasi).

KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
(BA 065)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi antara lain mengatur bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan di bidang hilirisasi merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian/ Investasi dan Hilirisasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. Koordinasi dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. Koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
15. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;

16. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM *audited* dialokasikan sebesar Rp1.147,7 miliar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran, dan belanja non operasional antara lain untuk kegiatan bidang perencanaan penanaman modal, bidang hilirisasi investasi strategis, bidang pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, bidang kerja sama penanaman modal, bidang pelayanan penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, bidang teknologi informasi penanaman modal, dan layanan dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan percepatan hilirisasi investasi strategis. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) Peningkatan Daya Saing Investasi; (2) Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok; (3) Pemasaran investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional; (4) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal; (5) Percepatan Rencana Proyek di Bidang SDA, Manufaktur, Jasa dan Kawasan serta Infrastruktur; (6) Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK; (7) Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Migas dan Minerba; (8) Hasil perundingan kerja sama penanaman modal Bilateral, Regional dan Multilateral; (9) Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta (10) Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Fasilitasi investasi dan percepatan hilirisasi berdampak pada peningkatan aktivitas industri dan pembukaan lapangan kerja baru di berbagai daerah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Dukungan terhadap investasi di luar Pulau Jawa melalui Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antarwilayah;
3. Pelaksanaan program kemitraan antara investor dan UMKM serta pelatihan bagi pelaku usaha dalam rantai pasok industri meningkatkan kompetensi dan daya saing UMKM lokal, sehingga dapat berperan dalam ekosistem investasi; dan
4. Reformasi kebijakan dan digitalisasi layanan melalui OSS (*Online Single Submission*) mempermudah masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, dalam memperoleh izin usaha secara cepat dan transparan.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain:

1. Adanya restrukturisasi organisasi yang mengakibatkan penyesuaian struktur kelembagaan

pasca perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
2. Tahun 2024 juga merupakan tahun politik (Pemilu dan Pilpres) yang berdampak pada kehati-hatian penggunaan anggaran; dan
3. Keterbatasan SDM di bidang pengelolaan anggaran, sehingga terdapat rangkap jabatan antara tugas dan fungsi pada unit kerja dengan pengelola anggaran.

Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan target investasi dimana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk tahun 2024, meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp1.400 triliun. Ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
2. Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik. Indonesia akan memulai produksi massal baterai kendaraan listrik pada April 2024. Ini menandai langkah signifikan dalam hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai USD9,8 miliar (sekitar Rp142 triliun);
3. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil menerbitkan lebih dari 8 juta NIB hingga Maret 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah usaha yang terdaftar dan perbaikan layanan perizinan;
4. Optimalisasi Layanan Perizinan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meningkatkan layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Contact Center OSS untuk mempermudah investor dalam mengurus izin usaha.
5. Dalam pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian seiring dengan dinamika yang terjadi. Di tengah ketidakpastian global dan iklim usaha saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama K/L meyakini perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2021 dilakukan terhadap substansi pengaturan yang dianggap belum optimal dalam tataran implementasi. Hal tersebut dinilai dapat semakin dipertajam melalui konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan kalangan masyarakat dari berbagai aspek, sehingga baik pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), persyaratan dasar, perizinan berusaha, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, pengawasan, serta sanksi dapat lebih implementatif.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dialokasikan sebesar Rp681,9 miliar. Adapun *outlook* anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 sebesar Rp603,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasional antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran, dan belanja non operasional antara lain untuk kegiatan bidang perencanaan penanaman modal, bidang hilirisasi investasi strategis, bidang pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, bidang kerja sama penanaman modal, bidang pelayanan penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, bidang teknologi informasi penanaman modal, dan layanan dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, dialokasikan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk:

1. Menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor;
2. Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*);
3. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
4. Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis

risiko;
5. Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam; dan
6. Memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal.

Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah; (2) Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok; (3) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal; (4) Satuan Tugas Percepatan Investasi; (5) *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* di Bidang Jasa dan Kawasan; (6) Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); (7) Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di 15 Komoditas Prioritas; (8) Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional; (9) Hasil perundingan kerja sama penanaman modal Bilateral, Regional dan Multilateral; (10) Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah; dan (11) Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Peningkatan Lapangan Kerja;
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Daerah;
3. Akses Lebih Luas terhadap Layanan Perizinan dan Kemudahan Berusaha;
4. Peningkatan Daya Saing SDM Lokal;
5. Penurunan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah; dan
6. Terciptanya Ekosistem Investasi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp775,1 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 35,9 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (1) Peningkatan Daya Saing Investasi; (2) Kemitraan Usaha Nasional; (3) Fasilitasi Relokasi Perusahaan Asing ke Indonesia dan Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri; (4) Eksekusi Proyek Wilayah Barat dan Timur yang Terkendala Untuk Percepatan Realisasi Investasi; (5) Pengawalan Percepatan Realisasi Investasi Hijau Berkelanjutan (6) Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi sebagai Lokasi Strategis; (7) Penguatan Kesepakatan dan Implementasi Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal; (8) Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di 15 Komoditas Prioritas; dan (9) Pusat Komputasi dan *Data Recovery Center* Sistem OSS, dan sebesar 64,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
2. Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah I, II, III, IV dan V
3. Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I, II, III, IV dan V
4. Bahan Informasi Potensi Penanaman Modal
5. Fasilitas Berusaha terkait Kepabeanan
6. Fasilitas Berusaha terkait Perpajakan
7. Layanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. Peningkatan Mutu Pelayanan PTSP Pusat

Kebijakan strategis yang dialokasikan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman

modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
2. Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal; dan
3. Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM antara lain:

1. Menguatkan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor;
2. Pelaksanaan kegiatan promosi yang fokus dan terarah (*targeted*);
3. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
4. Meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan penyelesaian masalah perizinan berbasis risiko;
5. Mengoptimalkan penanaman modal bidang hilirisasi untuk mendukung nilai tambah sumber daya alam;
6. Memperkuat tata kelola teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan penanaman modal yang berkualitas dan percepatan peningkatan penanaman modal;
7. Penyederhanaan perizinan berusaha, harmonisasi kebijakan lintas sektor, dan kebijakan insentif penanaman modal yang tepat sasaran;
8. Mendorong UMKM naik kelas untuk meningkatkan kemandirian penanaman modal dalam negeri;
9. Mendukung pemetaan potensi dan peluang penanaman modal di daerah untuk meningkatkan pemerataan realisasi penanaman modal;
10. Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan negara-negara potensial dan *stakeholders* terkait, serta memperkuat kesepakatan dan perjanjian yang dapat diimplementasikan secara efektif, guna menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan meningkatkan peran dalam *Global Production Network* (GPN) dan *Global Value Chain* (GVC);
11. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola penanaman modal; dan
12. Meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berintegritas dan profesional untuk mendukung tata kelola dan pelayanan penanaman modal yang berkualitas.

Berdasarkan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029, kegiatan kementerian pada periode 2027–2029 direncanakan tetap berlanjut sebagai kelanjutan dari program dan kebijakan yang telah berjalan sebelumnya. Namun demikian, arah pengembangan dan prioritas kegiatan ke depan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program serta kebijakan nasional yang akan ditetapkan pada periode mendatang.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
(BA 066)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (P4GN). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BNN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNN antara lain seperti Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi; Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam P4GN; Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap P4GN; Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; Pengujian dan pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor; serta Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Struktur organisasi BNN meliputi Kepala BNN, Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, lima Deputi (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama), tiga Pusat (Penelitian, Data, dan Informasi; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Laboratorium Narkotika), tiga Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar Rehabilitasi BNN, dua Balai Rehabilitasi BNN, dan tiga Loka Rehabilitasi BNN), serta Instansi Vertikal berupa 34 Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 182 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNN didukung oleh 5.623 Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran LKPP audited BNN sebesar Rp1.519,9 miliar antara lain untuk pembangunan/pengadaan sarana prasarana, seperti Sarana Laboratorium Narkoba Daerah. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7) melalui kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kegiatan spesifiknya meliputi, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mencakup kegiatan seperti Sarana Laboratorium Narkoba Daerah, Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa, Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika, dan Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal). Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, yang mencakup kegiatan seperti Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi, Petugas Pembina Agen Pemulihan yang Terlatih, Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang memenuhi standar Pelayanan Minimal (SPM), Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional, Fasilitas Pembina Unit IBM, Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi, SMP dan SMU Sederajat yang memperoleh pengembangan *soft skill*, dan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang terbentuk.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelaksanaan P4GN dan Program Dukungan Manajemen. Sumber dana Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP). Informasi mengenai kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih berlanjut ke tahun 2025. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain, Peningkatan Indeks P4GN yang mencapai 65,1 dari target 64, dikategorikan "Efektif". Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang mencapai 82,47 dari target 76. Penguatan ketahanan komunal masyarakat melalui intensifikasi Gerakan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar). Peningkatan layanan rehabilitasi penyalahguna/pecandu narkotika. Penguatan sinergi lintas program dan lintas sektor. Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK atas Laporan Keuangan selama 16 kali berturut-turut sejak Tahun 2008 hingga 2023. Penghargaan seperti Anggota "Terbaik" kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2024, Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Award 2024 kategori Instansi Vertikal Informatif, Lembaga dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi oleh Ombudsman, Anugerah Reksa Bandha dari DJKN, Penghargaan untuk Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik, serta Penghargaan dari Drug Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat atas kerjasama pemberantasan jaringan narkotika internasional. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain: Dinamika modus operandi narkotika dan pertumbuhan jaringan gelap narkotika yang sangat progresif. Keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi yang masih jauh di bawah tingkat kebutuhan (estimasi kebutuhan 3,3 juta orang, namun ketersediaan kapasitas hanya untuk 29 ribu orang).

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BNN dialokasikan sebesar Rp2.455,1 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.694,5 miliar, antara lain untuk pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengembangan organisasi dan SDM, penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, dan pengelolaan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan. Serta belanja non operasional sebesar Rp760,6 miliar (pagu belanja modal) antara lain untuk penguatan lembaga rehabilitasi pemerintah dan masyarakat, pelaksanaan rehabilitasi, serta pengelolaan sarana prasarana. Dari alokasi anggaran yang ada, sebesar Rp109,4 miliar dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan sebesar Rp2.345,7 miliar untuk mendukung Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Prioritas Nasional 07) melalui P4GN. Outlook realisasi anggaran BNN pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.313,6 miliar. Kegiatan-kegiatan di antaranya:

1. Penyelenggaraan Advokasi.
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif.
3. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.
4. Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi.
5. Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat.
6. Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri.
7. Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba.
8. Pemberdayaan Peran serta Masyarakat.
9. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
10. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
11. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
12. Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran.
13. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor.

14. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba.
15. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.
16. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.
17. Pengelolaan Informasi dan Edukasi.
18. Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Program Dukungan Manajemen. Kegiatan-kegiatan di antaranya:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
2. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia.
3. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.
4. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Pengawasan.
5. Pengembangan Akuntabilitas Kinerja.
6. Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN.
7. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan.
8. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: Peningkatan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang diukur melalui Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba", Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan, Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup, Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika diungkap, Persentase penyelesaian penyidikan TPPU, Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN, Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional, Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya/Waspada" menjadi "Waspada/Siaga/Aman", Indeks Regulasi Bidang P4GN, Indeks Pelayanan Bantuan Hukum, Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika yang berhasil dipetakan, Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika P-21, Persentase tersangka DPO dan Target Operasi (TO) yang tertangkap, Jumlah penyelidikan tindak pidana psikotropika dan NPS, Indeks kepuasan layanan rehabilitasi, Jumlah titik lahan tanaman ganja dimusnahkan, Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja, Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba, Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu, Jumlah metode pengujian baru, dan Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang terpublikasi.

Proyeksi kebijakan strategis BNN pada tahun 2026 dan seterusnya sebagaimana arah kebijakan Kepala BNN Tahun 2025 dan rekomendasi perbaikan kinerja pada laporan kinerja 2024, antara lain:

1. Memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dilembagakan dan didukung regulasi agar memiliki landasan yuridis formal dalam melaksanakan program-program penanganan permasalahan narkoba.
2. Melakukan penguatan jejaring intelijen di daerah untuk memperluas jangkauan sumber informasi.
3. Membentuk satuan tugas pengejaran DPO di luar negeri dengan melibatkan anggota satuan tugas dari instansi terkait lainnya.
4. Mendorong keterlibatan aktif BNN di wilayah dalam agenda perencanaan program pembangunan daerah dan pemerintah desa/kelurahan.
5. Mendorong jajaran penegak hukum menggunakan paradigma *rehabilitative justice* melalui asesmen terpadu terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

6. Mendorong pemanfaatan aset tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang untuk mendukung pelaksanaan program P4GN di BNN.
7. Memperluas kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai BNN sebagai sarana pengembangan kapasitas ataupun pengembangan karier pegawai.
8. Melakukan penyesuaian target indikator kegiatan utama dengan mempertimbangkan target nasional dan capaian tahun sebelumnya.
9. Memastikan penetapan *output* rencana aksi yang implementatif dapat menjawab permasalahan tata kelola organisasi dengan memastikan ketersediaan sumber daya.
10. Pemilihan sasaran kegiatan utama Reformasi Birokrasi Tematik yang lebih sesuai.
11. Peningkatan *awareness* kelompok kerja dalam pencapaian indikator kegiatan utama.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran BNN dialokasikan sebesar Rp1.516,6 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp16,41 miliar dialokasikan untuk mendukung PNBP, melalui kegiatan antara lain Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, Penyelenggaraan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Prioritas Nasional 07) melalui P4GN. Kegiatan- kegiatan pada program P4GN di antaranya:

1. Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba;
3. Penguatan Kemitraan dan Sistem Hukum P4GN;
4. Penyelenggaraan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba;
5. Penyelenggaraan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
6. Pelayanan Pengujian dan Pengembangan Laboratorium Narkotika.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Program Dukungan Manajemen. Kegiatan-kegiatan di antaranya:

1. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Operasional dan Manajemen Kelembagaan;
2. Pengawasan dan Pembinaan Kinerja dan Aparatur;
3. Pelayanan Dukungan Teknologi, Data dan Informasi P4GN;
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur BNN.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: Peningkatan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang diukur melalui Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba", Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan, Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup, Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika diungkap, Persentase penyelesaian penyidikan TPPU, Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN, Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional, Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya/Waspada" menjadi "Waspada/Siaga/Aman", Indeks Regulasi Bidang P4GN, Indeks Pelayanan Bantuan Hukum, Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika yang berhasil dipetakan, Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika P-21, Persentase tersangka DPO dan Target Operasi (TO) yang tertangkap, Jumlah penyelidikan tindak pidana psikotropika dan NPS, Indeks kepuasan layanan rehabilitasi, Jumlah titik lahan tanaman ganja dimusnahkan, Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja, Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba, Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu, Jumlah metode pengujian baru, dan Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang terpublikasi.

Kebijakan strategis yang dialokasikan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain meningkatkan

penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta mewujudkan manajemen organisasi yang profesional, produktif, proporsional, dan berkinerja tinggi. Proyeksi kebijakan strategis BNN pada tahun 2026 dan seterusnya sebagaimana arah kebijakan Kepala BNN Tahun 2025 dan rekomendasi perbaikan kinerja pada laporan kinerja 2024, antara lain memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dilembagakan dan didukung regulasi agar memiliki landasan yuridis formal dalam melaksanakan program-program penanganan permasalahan narkoba. Melakukan penguatan jejaring intelijen di daerah untuk memperluas jangkauan sumber informasi. Mendorong keterlibatan aktif BNN di wilayah dalam agenda perencanaan program pembangunan daerah dan pemerintah desa kelurahan. Mendorong jajaran penegak hukum menggunakan paradigma *restorative justice* melalui asesmen terpadu terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Mendorong pemanfaatan aset tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang untuk mendukung pelaksanaan program P4GN di BNN. Melakukan penyesuaian target indikator kegiatan utama dengan mempertimbangkan target nasional dan capaian tahun sebelumnya. Memastikan penetapan output rencana aksi yang implementatif dapat menjawab permasalahan tata kelola organisasi dengan memastikan ketersediaan sumber daya. Pemilihan sasaran kegiatan utama Reformasi Birokrasi Tematik yang lebih sesuai. Peningkatan *awareness* kelompok kerja dalam pencapaian indikator kegiatan utama.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis BNN 2025- 2029 antara lain berfokus pada arah kebijakan, yaitu:

1. Arah Kebijakan ke-1 dan Strategi Pemberdayaan Karakter Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba.

   Arah kebijakan "Pemberdayaan Karakter dan Budaya Individu, Keluarga, dan Masyarakat sebagai Upaya Strategis Pencegahan terhadap Bahaya Narkoba" difokuskan pada aspek *demand reduction* yang memuat upaya pencegahan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kesiapsiagaan wilayah sebagaimana salah satu kinerja yang ingin dicapai pada Sasaran Strategis BNN ke-1. Salah satu fokus dari arah kebijakan ini terletak pada pemberdayaan karakter dan budaya dengan rangkaian proses dan orientasi mencapai perubahan pada individu, keluarga, dan masyarakat yang dikelilingi oleh lingkungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan arah yang ingin dicapai sebagai bentuk upaya pencegahan yaitu diawali dengan memperoleh pengetahuan, kemudian menimbulkan sikap kesadaran, dan akhirnya perubahan perilaku untuk menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, beberapa strategi yang dapat dielaborasi sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Mengoptimalkan pemanfaatan data sosial dan spasial untuk membangun jejaring masyarakat sebagai mitra strategis BNN dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti kawasan rawan narkoba, pesisir, dan perbatasan negara. Jaringan ini diarahkan menjadi simpul informasi, advokasi, dan pemulihan berbasis komunitas.
   b. Membangun sistem respons ketanggapdaruratan narkoba berbasis *catchment area* dan data empirik, dengan mempertimbangkan dinamika sosial lokal, pola kerentanan, serta karakteristik target kelompok rentan (remaja, pekerja, pelajar, dan komunitas marjinal). Sistem ini harus adaptif terhadap pergeseran tren dan berbasis pada pemetaan intervensi wilayah prioritas.
   c. Mengintegrasikan intervensi lingkungan mikro dan meso (keluarga, sekolah, komunitas) melalui perluasan cakupan program deteksi dini penyalahgunaan narkoba, yang dilakukan secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan, pendidik, dan pekerja sosial. Fokus diarahkan

pada identifikasi risiko secara cepat, serta rujukan layanan yang tepat sasaran dan tidak bersifat represif.

d. Merumuskan kebijakan P4GN yang adaptif dan berbasis pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner—psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan spasial—untuk memahami dinamika penyalahgunaan narkoba di tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Kebijakan ini dikembangkan melalui pemanfaatan hasil kajian dari berbagai sumber, termasuk riset akademik, temuan lapangan, dan data tren permasalahan yang dikonsolidasikan secara sistematis oleh BNN.
e. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluh serta agen pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguatan jejaring kerja lokal, serta insentif kinerja berbasis dampak. Peran mereka dikembangkan tidak hanya sebagai komunikator, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku dan pembangun ketahanan komunitas.

2. Arah Kebijakan ke-2 dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum, Kolaborasi dan Jaringan pada Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional dalam Pemutusan Jaringan Narkoba.

   Arah kebijakan ini merujuk pada pendekatan *supply reduction*, yang merupakan strategi dominan dalam kebijakan pengendalian narkotika secara global. Pendekatan ini berfokus pada upaya pengendalian suplai narkotika melalui pelarangan distribusi lintas negara, pengendalian prekursor, penindakan terhadap peredaran gelap, serta penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, *supply reduction* menjadi prioritas strategis dalam pemberantasan narkotika karena menyasar langsung pada pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, baik di tingkat lokal, nasional, maupun lintas negara. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga, sistem informasi yang terintegrasi, dan kapasitas kelembagaan dalam penegakan hukum. Penanganan kejahatan narkotika yang bersifat lintas batas dan terorganisir tidak dapat dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu, BNN memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan instansi penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan TNI, serta kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis global.

   Untuk mendukung arah kebijakan ini, diperlukan pemahaman hukum yang selaras, integrasi data lintas lembaga, serta rekonsiliasi peran antarinstansi yang menjadikan isu narkotika sebagai *shared outcome* nasional. Sinergi lintas sektor juga perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan dan personel yang mumpuni, baik di pusat maupun daerah. Berikut adalah strategi operasional yang mendukung arah kebijakan ini:

   a. Melakukan pemetaan jaringan narkotika secara komprehensif berdasarkan pembagian peran antarinstansi, untuk memastikan efektivitas pembagian fungsi pencegahan, penindakan, dan penelusuran alur logistik maupun keuangan;
   b. Meningkatkan efektivitas pos interdiksi terpadu di wilayah rawan seperti jalur udara, laut, darat, dan wilayah perbatasan negara, melalui integrasi informasi, patroli bersama, dan pelibatan multisektor;
   c. Membangun dan memperkuat kerja sama operasional dengan negara-negara tetangga, khususnya dalam hal pertukaran intelijen, pelacakan lintas batas, dan ekstradisi pelaku kejahatan narkotika lintas negara;
   d. Mengembangkan sistem informasi penelusuran aset dan transaksi keuangan yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, untuk memperkuat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis narkotika;
   e. Memanfaatkan teknologi informasi, seperti analitik digital, pelacakan berbasis AI, dan *platform* intelijen narkotika, dalam proses penyidikan dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika;

f. Meningkatkan koordinasi antar direktorat dan sektor terkait dalam lingkup pemberantasan, disertai dengan simplifikasi proses bisnis dan SOP penegakan hukum narkotika agar lebih responsif dan kolaboratif;
g. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel BNN, khususnya di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan, melalui pelatihan fungsional, manajemen intelijen, serta pelatihan lintas yurisdiksi;
h. Mengadopsi praktik terbaik *(best practices)* dari negara-negara yang menetapkan penanganan narkotika sebagai prioritas nasional, termasuk pendekatan berbasis kawasan, sistem peradilan khusus narkotika, dan koordinasi berbasis data intelijen nasional;
i. Meningkatkan pemahaman dan literasi hukum aparat BNN di daerah, untuk menjamin keseragaman penerapan aturan, akurasi dalam penanganan perkara, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam litigasi dan non-litigasi.

3. Arah Kebijakan ke-3 dan Strategi Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Rehabilitasi dalam Penanganan Pengguna Narkoba untuk Pemulihan, Penyelamatan Jiwa dan Kesehatan Pengguna Narkoba.

   Setelah arah kebijakan pertama dan kedua menekankan pada dimensi *supply dan demand reduction* melalui pelarangan, pencegahan, dan pemberantasan, arah kebijakan ketiga difokuskan pada aspek pembangunan manusia, khususnya melalui pendekatan rehabilitasi yang berbasis hak atas kesehatan dan kehidupan. Ini mencerminkan pergeseran global menuju kebijakan narkotika yang lebih humanis, dengan orientasi keterpulihan fisik dan reintegrasi sosial pengguna narkoba. Berbeda dengan periode sebelumnya yang cenderung menempatkan rehabilitasi sebatas ketersediaan layanan, Renstra 2025–2029 menetapkan orientasi strategis yang lebih eksplisit pada pemulihan menyeluruh berbasis standar layanan, jangkauan geografis, dan keadilan akses. Fokus diarahkan pada pemulihan kesehatan fisik dan peluang reintegrasi sosial bagi penyalahguna.

   Adapun strategi untuk arah kebijakan ke-3 ini adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan standar nasional guna mendukung percepatan pemulihan dan penyelamatan jiwa pengguna narkoba;
   b. Menerapkan program dan layanan yang berorientasi pada pencegahan overdosis dan penyakit menular;
   c. Mendukung keterpulihan melalui penguatan lingkungan sosial yang sehat dan inklusif, termasuk pelibatan keluarga, komunitas, dan dunia kerja.
   d. Mengadopsi praktik-praktik internasional terbaik dalam rehabilitasi yang berbasis pemulihan, partisipatif, dan berkelanjutan.
   e. Meningkatkan kapasitas petugas rehabilitasi dan agen pemulihan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan etika layanan.

4. Arah Kebijakan ke-4 dan Strategi Penyelenggaraan Kebijakan P4GN berbasis Data Strategis (*Evidence Based Policy*)

   Kebijakan berbasis bukti menekankan penggunaan data dan penelitian ilmiah yang akurat dalam merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam upaya P4GN melalui pengumpulan data komprehensif, dukungan penelitian ilmiah, evaluasi program berkala, serta penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan penguatan pemanfaatan data dan operasi intelijen telah menjadi tren di berbagai belahan dunia. Intelijen menjadi kunci dalam upaya penyitaan narkoba sebelum berjalan masuk ke dalam "pasar" dan mengidentifikasi ancaman

baru terkait narkoba bagi masyarakat (*Australian Crime Commission*, 2015). Merespons hal tersebut, dalam dokumen Renstra 2025-2029 dimuat arah kebijakan terkait penguatan peran dan fungsi data intelijen sebagai basis utama kebijakan P4GN. Pengumpulan dan pemanfaatan data intelijen dalam pelbagai kebijakan P4GN diharapkan dapat terwujud dengan tersedianya informasi terkait parameter, dampak, dan ancaman aktivitas kriminal narkoba untuk memberi informasi bagi keputusan strategis dan operasional dalam konteks P4GN. Adapun strategi yang diusulkan untuk arah kebijakan ke-4 adalah:

a. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan data P4GN melalui integrasi lintas unit, penyempurnaan kualitas data, serta penyediaan platform berbasis teknologi informasi yang mendukung perumusan kebijakan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan secara tepat sasaran.
b. Membangun dan memperkuat basis data intelijen narkotika yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi dengan tingkat keamanan tinggi, untuk mendukung efektivitas analisis ancaman, pelacakan jaringan, dan pengambilan kebijakan strategis di bidang P4GN.
c. Memperluas dan mengintensifkan kemitraan dengan masyarakat dan stakeholder lokal sebagai sumber informasi dan data intelijen yang kredibel, termasuk pelibatan penggiat P4GN, tokoh masyarakat, dan komunitas berbasis wilayah rawan narkoba.
d. Mengidentifikasi dan mengelola profil pengguna (*end-user*) data intelijen secara sistematis, guna memastikan kejelasan tujuan penggunaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan informasi dalam pengambilan keputusan atau operasi.
e. Memetakan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan BNN dalam hal pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data intelijen, yang berorientasi pada pemutakhiran teknologi dan etika intelijen.

5. Arah Kebijakan ke-5 dan Strategi Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Melalui Transformasi Digital Menuju *Joined Up Governance*

Hasil evaluasi paruh waktu Renstra BNN 2019-2024 menegaskan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan khususnya melalui transformasi digital masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Transformasi digital kini menjadi kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta menjaga nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Digitalisasi juga berperan sebagai enabler dalam merespons dinamika global dan tantangan kompleks kebijakan P4GN yang menuntut inovasi berkelanjutan.

Lebih jauh, refleksi terhadap pelaksanaan Renstra BNN 2015–2019 dan 2020–2024 menunjukkan bahwa isu integrasi dan koordinasi lintas unit maupun lintas lini terutama antara BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota—perlu lebih ditegaskan dalam kebijakan kelembagaan ke depan. Isu ini penting karena keberhasilan P4GN sangat bergantung pada sinergi dan kesinambungan antarlembaga serta antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, arah kebijakan kelembagaan ke-5 dalam Renstra BNN 2025–2029 diarahkan pada transformasi tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi, guna mendukung kinerja kelembagaan yang berorientasi hasil (*shared outcomes*) dan responsif terhadap kebutuhan lintas sektor. Pendekatan ini mendorong penerapan prinsip *joined-up governance*—yakni tata kelola terintegrasi yang memperkuat koordinasi internal dan eksternal berbasis sistem digital.

Adapun strategi yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan untuk arah kebijakan ke- 5 adalah sebagai berikut:

a. Membangun kolaborasi lintas unit dan lintas instansi yang berlandaskan pada prinsip *shared outcome* dan *shared flexible resources* untuk memperkuat sinergi program dan efisiensi pelaksanaan kebijakan;

b. Mempersiapkan sistem pengembangan SDM berbasis talenta digital (*digital talent*) melalui peningkatan literasi teknologi, pelatihan terpadu, dan seleksi berbasis kompetensi digital;
c. Mengoptimalkan pengelolaan data pengaduan pelayanan publik sebagai instrumen monitoring kualitas layanan dan umpan balik kebijakan yang responsif dan berbasis bukti;
d. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM melalui penyusunan *Human Capital Development Plan* (*HCDP*) serta penguatan implementasi kebijakan sistem merit dalam manajemen talenta BNN;
e. Mengeksplorasi alternatif pembiayaan dan model pendanaan inovatif untuk mendukung keberlanjutan inisiatif strategis dan efisiensi belanja kelembagaan, termasuk digitalisasi;
f. Meningkatkan mutu layanan publik di satuan kerja vertikal melalui penguatan sarana, prasarana, dan sistem kerja yang mendukung integrasi dan standardisasi layanan lintas wilayah;
g. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) *Squad Model* lintas kedeputian sebagai wadah kolaborasi dinamis untuk inisiasi, pelaksanaan, dan pemantauan program dan kegiatan;
h. Membentuk Unit Transformasi Kelembagaan yang berfungsi sebagai pusat penggerak perubahan, pengawal pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, serta penjamin keberlanjutan transformasi digital dan organisasi.

Kegiatan dan proyek sebagai implementasi dari kebijakan strategis ini akan mencakup upaya-upaya untuk mencapai Indeks P4GN dengan target 65,5 di tahun 2027, 66 di tahun 2028, dan 67 di tahun 2029, serta peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 87 di tahun 2027, 89 di tahun 2028, dan 90 di tahun 2029. Ini menunjukkan fokus berkelanjutan pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta penguatan internal organisasi BNN.

KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang meliputi: penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum; pengelolaan barang milik/kekayaan negara; pengawasan atas pelaksanaan tugas; serta penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dalam tahun anggaran 2024, anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terealisasi sebesar Rp4.518,5 miliar, yang terdiri dari belanja operasional untuk belanja pegawai dan belanja barang operasional (belanja rutin) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Kementerian/ Lembaga, serta belanja non operasional untuk berbagai program strategis. Program belanja non operasional tersebut meliputi: pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan; fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK bagi keluarga dengan baduta; fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri melalui PIK Remaja dan BKR; fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia melalui kelompok BKL; pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA di Kampung KB; pengembangan rumah data kependudukan paripurna di Kampung KB; bimbingan teknis intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana; fasilitasi integrasi dan intensifikasi pelayanan KB di wilayah khusus; serta kegiatan percepatan penurunan stunting dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).

Dari realisasi anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta memperluas jangkauan program pembangunan keluarga secara merata dan berkelanjutan. Sedangkan kegiatan Prioritas lainnya diarahkan untuk memperkuat basis data keluarga sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Bangga Kencana serta intervensi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara tepat sasaran. Sumber pendanaan untuk Prioritas Nasional berasal dari Rupiah Murni sebesar 99,6 persen, Non Rupiah Murni dari PLN dan PDN sebesar 0,4 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,01 persen.

Kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya yang berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal meliputi: pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan;

fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK bagi keluarga dengan baduta; fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri; pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas; fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus; serta Pemutakhiran Pendataan Keluarga.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari intervensi kebijakan belanja ini antara lain: meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB yang terjangkau dan merata; tersedianya data keluarga yang akurat untuk intervensi program yang tepat sasaran; meningkatnya kesadaran dan partisipasi keluarga dalam perencanaan kehidupan berkeluarga; serta terbangunnya ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Kendala yang ditemukan dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 meliputi: rotasi SDM pada Dinas OPDKB yang menghambat koordinasi terkait program 1000 HPK; belum optimalnya kegiatan orientasi pengelolaan Kampung KB; terbatasnya fasilitator sebaya untuk workshop/pelatihan; serta belum meratanya pemahaman Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain: himbauan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melakukan advokasi dan KIE kepada mitra strategis; pembuatan bahan ajar Orientasi Pengelolaan Kampung KB; fasilitasi dan pembinaan berkala kepada Pemda terkait pembangunan berwawasan kependudukan; penyelenggaraan *workshop* penguatan kebijakan dan strategi KB Pascapersalinan secara offline dan online; serta pengadaan modul/materi dan media edukasi gizi dan anemia.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dialokasikan sebesar Rp4.400,2 miliar, yang terdiri dari belanja operasional untuk belanja pegawai dan belanja barang operasional (belanja rutin) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Kementerian/Lembaga, serta belanja non operasional untuk berbagai program strategis. *Outlook* anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2025 sebesar Rp3.833,3 miliar. Program belanja non operasional tersebut meliputi: pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan; fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK bagi keluarga; fasilitasi dan pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri melalui PIK Remaja dan BKR; pengembangan Kampung KB yang berkualitas; fasilitasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus; Fasilitasi dan Pembinaan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya); Fasilitasi dan Pembinaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI); Fasilitasi dan Pembinaan Lansia Berdaya; Fasilitasi dan Pembinaan Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (GENTING); serta Fasilitasi *AI-Superapps*.

Kegiatan Prioritas Kemendukbangga/BKKBN difokuskan pada Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI). Dari alokasi anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan Prioritas Nasional diarahkan untuk mengelola dinamika kependudukan secara seimbang dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta menyediakan data kependudukan dan keluarga yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Sedangkan kegiatan Prioritas lainnya diarahkan untuk menyediakan data mikro keluarga yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara tepat sasaran. Sumber pendanaan untuk Prioritas Nasional berasal dari Rupiah Murni sebesar 99,7 persen, Non Rupiah Murni dari PLN dan PDN sebesar 0,3 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,00 persen.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dari intervensi kebijakan belanja ini antara lain: meningkatnya akses dan kualitas layanan keluarga berencana; tersedianya data keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar intervensi program yang tepat sasaran; meningkatnya ketahanan serta kesejahteraan keluarga; serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga. Intervensi ini juga diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk, percepatan penurunan stunting, dan terbangunnya keluarga yang tangguh sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp3.638,0 miliar yang terdiri dari belanja operasional untuk belanja pegawai dan belanja barang operasional (belanja rutin) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar Kementerian/Lembaga, serta belanja non operasional yang berasal dari Hibah Luar Negeri INEY dan PNPB, dengan tambahan anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM).

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 meliputi: meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan KBKR yang komprehensif; meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung SDM berkualitas; meningkatkan kualitas data dan informasi keluarga; meningkatkan kualitas penggerakan program Bangga Kencana; serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan mitra kerja (pentahelix) di seluruh tingkatan wilayah.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN diarahkan untuk mendukung prioritas nasional memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

Pembangunan keluarga akan diarahkan pada penguatan 8 fungsi keluarga melalui pendekatan siklus hidup mulai dari balita, remaja, dewasa/produktif, dan lanjut usia. Pada segmen balita, fokus diberikan pada pola pengasuhan orang tua kepada anak tanpa diskriminasi gender. Isu sensitivitas gender juga ditekankan pada program remaja. Untuk pengelolaan kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN akan fokus pada koordinasi di setiap tingkatan wilayah dan sektor pembangunan untuk memastikan integrasi pengelolaan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan pada seluruh tingkatan wilayah dan sektoral. Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi akan fokus pada penurunan disparitas pelayanan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan, serta kelompok-kelompok marginal dan pria sehingga pelayanan KB menjadi bersifat universal dan inklusif.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI
(BA 074)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Selain itu, kewenangan Komnas HAM diatur juga dalam Peraturan Perundang-Undangan lain meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk melakukan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Komnas HAM tergabung dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial skala nasional; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu lembaga pemantau secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait, dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Komnas HAM juga menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komnas HAM dan Komnas Perempuan seperti: koordinasi lintas sektor untuk penerapan kebijakan program dan anggaran; koordinasi penanganan kasus dan advokasi; penguatan sistem dan informasi data; koordinasi antar unit dalam pelaksanaan kampanye dan diseminasi informasi HAM; sinergi unit dukungan seperti keuangan, SDM, rumah tangga, perencanaan, monev, pengawasan internal, organisasi dan tata kelola serta koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM internal. Untuk diketahui bahwa dalam Bagian Anggaran Komnas HAM (BA 074) juga melingkupi kegiatan yang diampu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Komnas HAM audited terealisasi sebesar Rp139,6 miliar yang bersumber dari RM dan non RM. Alokasi ini terbagi menjadi belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Perkantoran Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta belanja non operasional antara lain untuk pelaksanaan kegiatan baik di Program Dukungan Manajemen maupun Program Teknis di Pemajuan dan Penegakan HAM. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan Prioritas Nasional terdiri dari: Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-hak korban; Pengamatan Situasi HAM di Papua; Pengembangan Sistem Pusdahamnas; Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; dan Pengawasan dan Evaluasi K/L Melalui Penilaian HAM serta kegiatan yang diampu Komnas Perempuan seperti Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil-Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi; Diskriminasi dan Tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah Terorisme; dan Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi Nasional Untuk Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Inklusif di Tengah Laju Perubahan Iklim dan Potensi Resesi Dunia. Sedangkan kegiatan Prioritas lainnya digunakan untuk Penanganan Aduan Dugaan Pelanggaran HAM, Penanganan Kasus, Pengkajian dan Penelitian Peraturan Perundang-undangan serta Penyebarluasan Wawasan HAM. Prioritasnya juga dialokasikan untuk kegiatan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas Perempuan dalam hal menyebarluaskan pemahaman, pemantauan, analisis serta pemberian saran atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan adalah sebesar

Rp160,5 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp97,4 miliar antara lain untuk Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dan belanja non operasional sebesar Rp63,2 miliar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dan Komnas Perempuan termasuk untuk mendukung output Prioritas Nasional serta Belanja Modal. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp9,9 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp41,0 miliar. *Outlook* realisasi anggaran Komnas HAM pada tahun 2025 sebesar Rp140,7 miliar.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L Melalui Penilaian HAM; Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban (Rekomendasi Kebijakan); Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua (Rekomendasi Kebijakan); Rekomendasi Pengembangan Cetak Biru Penguatan Sistem Koordinasi dan Integrasi Lembaga Pengada Layanan Dalam Pelaksanaan SPPT-PKKTP (Rekomendasi Kebijakan); Rekomendasi Penguatan Arah Kebijakan Penyikapan Kekerasan Berbasis Gender Berperspektif Kepulauan dan Inklusif di Era Digital (Rekomendasi Kebijakan), sedangkan kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Meningkatkan Percepatan Pelayanan Aduan; Penanganan Kasus; Kajian Isu-Isu Strategis HAM; Diseminasi dan Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Wawasan HAM Masyarakar dan Semua Upaya Guna Pemantauan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp9,9 miliar atau 6,2 persen persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 adalah Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L Melalui Penilaian HAM (Lembaga); Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Perangkat Daerah Melalui Penilaian HAM (Pemerintah Daerah); Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban (orang). Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain adanya peningkatan kesejahteraan; akses yang lebih baik terhadap layanan dasar; peningkatan infrastruktur dan konektivitas; penciptaan lapangan pekerjaan, rasa aman dan terlindungi serta lingkungan hidup yang lebih terjaga.

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dialokasikan sebesar Rp161,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp14,9 miliar atau 9,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kementerian/Lembaga Melalui Penilaian HAM; Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Perangkat Daerah Melalui Penilaian HAM; Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak Dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua; Penguatan Tata Kelola Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM yang Terintegrasi; Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban; Transformasi dan Inovasi Digital yang Inklusif Dengan Memastikan Prinsip *Due Diligence* (uji cermat tuntas) untuk Penyikapan Kompleksitas kekerasan terhadap perempuan (KtP); Pemajuan Kerangka Regulasi dan Kolaborasi Untuk Mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam Menjaga Keberagaman dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan; Transformasi Norma Sosial Keluarga Untuk Perlindungan Perempuan yang Inklusif, Setara, dan Berkeadilan; Penguatan Peran Kepemimpinan Lembaga Nasional HAM Melalui Kolaborasi Lintas Pihak Untuk Meningkatkan Kapasitas Penyikapan Kekerasan terhadap Perempuan serta Pelanggaran HAM secara Komprehensif dan Inklusif; Membangun Ruang Damai Bersama Perempuan di Tanah Papua; dan Menguatkan Integrasi Pendekatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dengan

perspektif inklusi berbasis kepulauan; dan sebesar Rp36,1 miliar atau 22,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat reguler seperti Pengelolaan Aduan Dugaan Pelanggaran HAM, Penanganan Kasus Melalui Mekanisme Pamantauan, Mediasi dan Penyelidikan HAM, Pengamatan Situasi HAM Nasional, Pelaksanaan Kajian dan Peneliatian serta Penyebarluasan Wawasan HAM Melalui Sosialisasi dan Diseminasi HAM kepada Aparat Pemerintah dan Masyarakat serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Penyebarluasan Pemahaman, Analisis Isu Perlindungan, Pelaksanaan Pemantauan dan Pemberian Saran dan Pertimbangan Sebagai Bentuk Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia Serta Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia Perempuan.

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 merupakan kebijakan strategis yang sudah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2026-2029 (Renstra). Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan adalah sinkronisasi rumusan kinerja dengan struktur agenda pembangunan periode kinerja 2025-2029 berkesesuaian dengan rumusan RPJM Nasional, Renstra K/L dan RKP yang secara paralel masih dalam proses penyusunan. Dalam hal ini Komnas HAM telah mengidentifikasi bahwa dalam struktur Visi Misi Rancangan RPJM Nasional 2025-2029 terdapat substansi HAM yang dapat dijadikan rujukan utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional yakni tertuang dalam Asta Cita ke-1 "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)" dan Asta Cita ke-7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan", di sisi lain Komnas HAM juga melakukan pencermatan terhadap Asta Cita lainnya dalam rangka membangun peluang untuk mendorong pengarusutamaan nilai-nilai HAM di setiap agenda pembangunan. Berdasarkan penjabaran tersebut, Komnas HAM telah menjabarkan turunannya dalam Renstra Komnas HAM yang disusun untuk periode 2025-2029. Selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada Pembangunan Fondasi Transformasi, Komnas HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan Visi 2025-2029 yakni "Fondasi HAM Nasional yang Kokoh, Inklusif, dan Akuntabel untuk Mengembangkan Kondisi HAM yang Kondusif" untuk mewujudkan hal tersebut Komnas HAM berfokus untuk "Memperkuat Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM dalam Penyelenggaraan Negara dan Kehidupan Bermasyarakat" dan "Memperkuat Komnas HAM sebagai Lembaga HAM yang Independen, Inklusif dan Akuntabel".

Dalam rangka mendukung visi dan misi, Komnas HAM menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mewujudkan hal tersebut, yakni:

1. Menguatnya prinsip-prinsip HAM dalam regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan, dan praktik bisnis;
2. Meningkatnya efektivitas upaya penyelesaian pelanggaran HAM; dan
3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan komnas ham yang kompeten, responsif, inklusif, dan akuntabel.

Sebagai strategi Komnas HAM untuk tercapainya tujuan di atas, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yakni:

1. Meningkatnya regulasi, penyelenggaraan pemerintahan, budaya kewargaan dan praktik bisnis yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM;
2. Terwujudnya upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang efektif;
3. Terwujudnya kelembagaan komnas HAM yang kompeten, responsif, inklusif dan akuntabel.

Dalam kerangka kerja sepanjang pelaksanaan Renstra Komnas HAM 2025-2029, telah ditetapkan 8 (delapan) isu prioritas Komnas HAM, yakni:

1. Pencegahan dan penanganan konflik agraria dan SDM berbasis HAM;

2. Pengarusutamaan nilai-nilai HAM dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Pengarusutamaan nilai-nilai HAM dalam kegiatan bisnis;
4. Peningkatan penyebarluasan wawasan HAM masyarakat terkait dengan teknologi informasi;
5. Penguatan jaminan pelindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi;
6. Penguatan dan penempatan pelindungan pembela HAM dan pembela lingkungan;
7. Penguatan kelembagaan Komnas HAM sebagai nasional;
8. Pengembangan strategi Komnas HAM di Tingkat internasional, regional, dan nasional.

Proyeksi kebijakan strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, serta mengacu pada Rencana Strategis Komnas HAM. Proyeksi ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, dengan fokus utama terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain melalui:

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kementerian/Lembaga Melalui Penilaian HAM;
2. Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Perangkat Daerah Melalui Penilaian HAM;
3. Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak Dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua;
4. Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban; dan
5. Penguatan Tata Kelola Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM yang Terintegrasi.

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BA 075)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika antara lain mengatur bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BMKG menyelenggarakan fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terkait pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca. Selain itu, BMKG juga menyelenggarakan peringatan dini bencana, menjalin kerja sama internasional, melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta melakukan pembinaan dan pengendalian instrumentasi serta jaringan komunikasi guna mendukung layanan informasi yang andal. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BMKG juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BMKG antara lain perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat. Dukungan tersebut mencakup penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, pengelolaan SDM dan keuangan, penguatan sistem informasi manajemen, serta fasilitasi komunikasi publik dan kerja sama kelembagaan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus penting melalui pengembangan kompetensi berbasis merit system, pelatihan teknis dan manajerial, serta penguatan budaya kerja yang adaptif dan profesional. Fungsi dukungan ini juga mencakup pengawasan internal, pengelolaan risiko kelembagaan, serta penyusunan regulasi dan standar operasional prosedur untuk memastikan tata kelola organisasi yang akuntabel, efisien, dan selaras dengan arah strategis BMKG dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran BMKG audited sebesar Rp 3.114,5 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.728,5 miliar antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang Operasional, serta Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor dan belanja non operasional sebesar Rp1.737,0 miliar antara lain untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi BMKG, yang mencakup pengelolaan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan infrastruktur. Selain itu, belanja ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan manajerial dan administratif, antara lain: pengelolaan layanan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama, pengelolaan perencanaan, program dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan urusan rumah tangga di lingkungan BMKG. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp1.339,8 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp2.126,2 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan bencana dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, memperluas pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan *Strengthening climate* and *weather service capacity*, Pengembangan sistem big data dan HPC, Pemeliharaan operasional aloptama MKG, Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi risiko iklim dan geofisika secara berkelanjutan melalui kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), dan Sekolah Lapang Geofisika (SLG), sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penyelenggaraan layanan informasi

meteorologi, klimatologi, dan geofisika; pengelolaan data observasi di tingkat nasional dan regional; pengembangan serta penguatan perangkat teknologi komputasi dan sistem pengelolaan data; kalibrasi dan rekayasa peralatan observasi; serta pengoperasian layanan sistem jaringan komunikasi. Kegiatan ini juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia BMKG, serta penguatan sistem manajemen kinerja internal dan akreditasi kelembagaan guna menjamin mutu layanan dan tata kelola yang akuntabel. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 26,3 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PNBP sebesar 73,7 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Sekolah Lapang, pemeliharaan peralatan Aloptama, layanan informasi MKG dan kontrak tahun jamak antara lain kelengkapan kesiapsiagaan mitigasi bencana, peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami, penguatan peralatan untuk dukungan data prakiraan musim dan iklim, serta peringatan dini cuaca (*Strengthening Climate and Weather Service Capacity* - Phase II). Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain penguatan kelompok masyarakat akan sadar terhadap bencana, menumbuhkan rasa sadar diri terhadap pentingnya informasi cuaca untuk kegiatan sehari – hari, membantu kelompok masyarakat dalam menumbuhkan sektor ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain penggunaan anggaran yang akuntabel sesuai target dan sasaran pada UPT daerah, kesederhanaan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan agar tidak terpusat dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain mendelegasikan kepada UPT daerah untuk melakukan pemeliharaan Aloptama, memonitoring penggunaan anggaran melalui sistem yang terpadu dan berbasis kinerja.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BMKG dialokasikan sebesar Rp2.826,9 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.732,2 miliar antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang Operasional, serta Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor dan belanja non operasional sebesar Rp1.094,7 miliar antara lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi BMKG, yang mencakup pengelolaan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, infrastruktur, dan modifikasi cuaca. Selain itu, belanja ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan manajerial dan administratif, antara lain: pengelolaan SDM BMKG, pengelolaan layanan hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama, pengelolaan perencanaan, program dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan urusan rumah tangga di lingkungan BMKG. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp612,2 miliar. Outlook realisasi anggaran BMKG pada tahun 2025 sebesar Rp2.506,3 miliar.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat dan mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan produktivitas lokal, khususnya dalam sektor pangan, air, energi, dan agromaritim, melalui penyediaan informasi iklim dan cuaca yang presisi serta literasi adaptasi melalui kegiata Penguatan Strengthening climate and weather service capacity Phase II, Optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengelolaan data. Selain itu, BMKG juga berkontribusi dalam mendorong transisi energi bersih dan pengembangan ekonomi hijau-biru melalui dukungan data meteorologi untuk energi terbarukan dan penguatan observasi gas rumah kaca. Di sisi lain, untuk mendukung keselamatan dan efisiensi transportasi serta memperkuat respons adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar, Peralatan monitoring gempabumi dan tsunami, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Sekolah Lapang Iklim (SLI), dan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG), sedangkan

untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penyelenggaraan layanan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca; pengelolaan data observasi di tingkat nasional dan regional; pengembangan serta penguatan perangkat teknologi komputasi dan sistem pengelolaan data; kalibrasi dan rekayasa peralatan observasi; serta pengoperasian layanan sistem jaringan komunikasi. Kegiatan ini juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia BMKG, serta penguatan sistem manajemen kinerja internal dan akreditasi kelembagaan guna menjamin mutu layanan dan tata kelola yang akuntabel. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 5,2 persen dan Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 94,8 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pemeliharaan Operasional Aloptama MKG dan kontrak tahun jamak antara lain Strengthening Climate and Weather Service Capacity - Phase II (SIMM-2) . Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya akses dan pemanfaatan informasi prakiraan cuaca, iklim, dan musim yang akurat oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sektor pangan, energi, air, dan transportasi; meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya cuaca ekstrem, gempa bumi, tsunami, dan perubahan iklim melalui edukasi publik yang masif dan inklusif; serta meningkatnya kapasitas kelompok rentan seperti petani, nelayan, pelajar, dan komunitas lokal dalam memahami dan memanfaatkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan produktif dan adaptif. Selain itu, kegiatan BMKG juga mendukung penguatan ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui layanan informasi maritim dan program pemberdayaan komunitas pesisir. Seluruh intervensi ini secara terpadu berkontribusi terhadap peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana serta mendorong pembangunan yang berketahanan iklim di berbagai sektor strategis.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran BMKG dialokasikan sebesar Rp2.675,4 miliar untuk Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang Operasional, serta Belanja Operasional Pemeliharaan Kantor dan belanja non operasional antara lain *project Strengthening Climate and Weather Service Capacity - Phase* II (SIMM-2), pembangunan tower pemantau GRK, pengembangan prakiraan cuaca berbasis dampak untuk kdukungan ketahanan pangan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap informasi MKG melalui Sekolah lapang baik sekolah lapang Gempabumi, Iklim, Cuaca Nelayan, Pemeliharaan operasional aloptama MKG, Sewa jaringan komunikasi, Program SDM unggul, Pengembangan sistem layanan cuaca dan iklim, Modernisasi infrastruktur observasi dan diseminasi informasi, Penguatan sistem peringatan dini gempa dan tsunami serta Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan informasi MKG di tingkat nasional, regional dan global, serta melanjutkan program pemeliharaan aloptama dan memperkuat sistem peringatan dini (Cuaca, Iklim, Gempa dan Tsunami).

Proyeksi kebijakan strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika antara lain Modernisasi sistem manajeman dan implementasi BIG data AI untuk peningkatan akurasi, user engagement dan nilai guna layanan MKG, Implementasi layanan BMKG terintegrasi, inovasi AI, dan Socio 5.0 untuk meningkatkan socio-preneurship, serta excellent service bidang MKG bersifat inklusif di tingkat nasional, regional, dan global.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1999 tentang Kementerian/Lembaga Komisi Pemilihan Umum antara lain mengatur bahwa Kementerian/Lembaga Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian/Lembaga Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian/Lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga Komisi Pemilihan Umum antara lain seperti mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum *audited* sebesar Rp47.177,8 miliar terdiri dari belanja operasional antara lain untuk memenuhi belanja gaji Pegawai KPU dan layanan perkantoran 553 satker KPU dan belanja non operasional, antara lain untuk membiayai Tahapan Pemilu 2024. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas kegiatan Tahapan Pemilu 2024 yaitu Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; Pembentukan Badan Adhoc; Masa Kampanye Pemilu; Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Penetapan Hasil Pemilu, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk kegiatan layanan perkantoran, bimbingan teknis kepemiluan, evaluasi Pemilu, dan supervisi monitoring pasca Tahapan Pemilu. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 51,7 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN, yaitu HLDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN, yaitu HLDN sebesar 48,3 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal; Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan Pendataan DPT Berkelanjutan. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat dapat menyalurkan aspirasi suaranya melalui TPS pada Hari H Pemilu 2024. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain kegiatan yang saling beririsan, kebutuhan anggaran yang mendadak karena kebijakan Pimpinan KPU, realisasi anggaran yang masih belum mencapai target, dan pelaksanaan PSU pasca Putusan MK yang berdampak kepada penyediaan anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan PSU, menyusun instrumen evaluasi Tahapan Pemilu 2024, dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung Tahapan Pilkada 2024 dari APBN.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Komisi Pemilihan Umum dialokasikan sebesar Rp3.062,3 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2.669,5 miliar antara lain untuk memenuhi belanja gaji Pegawai KPU dan kebutuhan layanan perkantoran 553 satker KPU dan belanja non operasional sebesar Rp392,8 miliar, antara lain untuk penguatan kelembagaan SDM, pengelolaan data dan informasi Kepemiluan, perbaikan sarana dan prasarana kantor/gedung/gudang, pelaksanaan diklat struktural dan teknis kepemiluan, pengelolaan akademi tata kelola

Pemilu, dan persiapan penyusunan regulasi, rencana kegiatan dan anggaran KPU untuk Pemilu 2029. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp54,6 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp1.418,1 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal; Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan Pendataan DPT Berkelanjutan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penguatan kelembagaan SDM, pengelolaan data dan informasi Kepemiluan, perbaikan sarana dan prasarana kantor/gedung/gudang, pelaksanaan diklat struktural dan teknis kepemiluan, pengelolaan akademi tata kelola Pemilu, dan persiapan penyusunan regulasi, rencana kegiatan dan anggaran KPU untuk Pemilu 2029. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 48,0 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN, yaitu HLDN sebesar 52,1 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal; Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan Pendataan DPT Berkelanjutan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain termutakhirkannya masyarakat sebagai Pemilih Pemilu.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran KPU dialokasikan sebesar Rp3.539,6 miliar yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional; pelaksanaan tugas fungsi KPU; dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang menjadi Prioritas KPU di Tahun 2026 yaitu Kebijakan Pengadaan Logistik, Pengelolaan JDIH, Pengelolaan Kehumasan, Penyusunan Peta Indeks, Evaluasi Teknis Kepemiluan, dan Fasilitasi Sengketa Hukum KPU. Kebijakan strategis yang menjadi Prioritas Nasional direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal, Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu, dan Pendataan DPT Berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis KPU pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis KPU antara lain perbaikan sarana dan prasarana kantor, penguatan kelembagaan SDM, persiapan Tahapan Pemilu 2029, penguatan IT KPU dalam mendukung Tahapan Pemilu 2029, dan penyusunan regulasi tentang Pemilu 2029.

MAHKAMAH KONSTITUSI
(BA 077)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1)Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2)Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3)Memutus pembubaran partai politik; (4)Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (1)MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugas tersebut, MK menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekuasan Kehakiman. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, MK juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan MK.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran MK *audited* sebesar Rp606,4 miliar, terdiri dari belanja operasional untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Operasional Pemeliharaan Kantor dan belanja non operasional antara lain untuk Penanganan Perkara Konstitusi, Bimtek Hukum Acara Peradilan Konstitusi, dan Layanan Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp386,6 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp123,4 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus (20), sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran MK dialokasikan sebesar Rp611,5 miliar, terdiri dari belanja operasional dan belanja non operasional antara lain untuk Penanganan Perkara Konstitusi, Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara, dan Layanan Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp2,5 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp456,3 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Penanganan Perkara Konstitusi. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Pada tahun 2025, *outlook* anggaran MK diproyeksikan terealisasi sebesar Rp611,5 miliar atau 100 persen dari anggaran yang dialokasikan pada APBN 2025.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp379,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,7 persen direncanakan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan, Pembangunan *e-learning,* Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara, dan Grand Design Pengembangan SDM, peningkatan kompetensi dan Profesionalisme untuk SDM Berkualitas serta Identikasi Kebutuhan Pemenuhan SDM MK berdasarkan Anjab MK, dan sebesar 99,3 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara

lain melalui beberapa kegiatan seperti Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Infromasi Perkara dan Putusan MK melalui Media Massa, Elektronik, dan Tatap Muka, Pengelolaan Kebijakan Startegis dan Literasi Konstitusi, dan Sistem Teknologi dan Informasi. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Proyeksi kebijakan strategis MK pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis MK antara lain Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Penguatan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (BA 078)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) antara lain mengatur bahwa PPATK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, PPATK menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, PPATK juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan PPATK antara lain seperti koordinasi kegiatan di lingkungan PPATK; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPATK; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, manajemen internal, dan dokumentasi PPATK; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana PPATK; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan PPATK; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala PPATK.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran PPATK *audited* sebesar Rp266,4 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp207,4 miliar antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp177,2 miliar, belanja barang operasional sebesar Rp30,2 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp59,0 miliar antara lain untuk pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan kemitraan; pengelolaan data pelaporan dan pengawsan kepatuhan Pihak Pelapor; dan pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp1,9 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp3,3 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pelatihan bagi aparat penegak hukum. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain Peningkatan kompetansi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU dan TPPT; Memperkuat integritas sistem keuangan; Pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT; dan Mencegah kebocoran kekayaan negara. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain Manajemen risiko belum sepenuhnya diimplementasikan; Tindak lanjut HA/HP yang masih rendah; Potensi tindak pidana pencucian uang pada Pemilu dan Pilkada; dan Pemenuhan kewajiban sebagai anggota *Financial Action Task Force* (FATF) dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain Peningkatan kualitas teknologi informasi melalui perpanjangan *Annual Fee* aplikasi go-AML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT berdasarkan IT-*Masterplan*; Penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu; Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan

Indonesia dalam FATF; Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset; Peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT; dan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance* serta penguatan sarana dan prasarana internal.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran PPATK dialokasikan sebesar Rp354,6 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp196,9 miliar antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp157,2 miliar dan belanja barang operasional sebesar Rp39,7 miliar serta belanja non operasional sebesar Rp157,6 miliar antara lain untuk pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan kemitraan; pengelolaan data pelaporan dan pengawsan kepatuhan pihak pelapor; dan pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp15,7 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp5,7 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pelatihan bagi aparat penegak hukum; pelaksanaan implementasi dan penilaian kepatuhan indonesia atas standar dan konvensi internasional; kontribusi rezim APU-PPT Indonesia dalam keanggotaan FATF; kerja sama internasional dalam keanggotaan FATF; hasil analisis dan pemeriksaan sektor perjudian; hasil analisis dan pemeriksaan sektor lingkungan hidup; hasil analisis dan pemeriksaan sektor korupsi; hasil analisis dan pemeriksaan sektor narkotika, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pelaksanaan implementasi dan penilaian kepatuhan indonesia atas standar dan konvensi internasional; kerja sama internasional dalam keanggotaan FATF; hasil analisis dan pemeriksaan sektor perjudian; hasil analisis dan pemeriksaan sektor lingkungan hidup; hasil analisis dan pemeriksaan sektor korupsi; hasil analisis dan pemeriksaan sektor narkotika. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan kompetansi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU dan TPPT; memperkuat integritas sistem keuangan; pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT; dan mencegah kebocoran kekayaan negara.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp333,6 miliar. dari total anggaran yang ada, sebesar 5,7 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan (1) pelaksanaan implementasi strategi dan rencana aksi nasional APUPPT dan PPSPM sebesar Rp1,0 miliar; (2) penyusunan dokumen Indeks Kinerja Rezim APUPPT sebesar Rp2,7 miliar; (3) kontribusi Indonesia dalam keanggotaan FATF sebesar Rp4,7 miliar; (4) hasil analisis dan pemeriksaan sektor korupsi sebesar Rp1,5 miliar; (5) hasil analisis dan pemeriksaan sektor narkotika sebesar Rp1,5 miliar; (6) hasil analisis dan pemeriksaan sektor perjudian sebesar Rp0,4 miliar; (7) hasil analisis dan pemeriksaan sektor lingkungan sebesar Rp0,6 miliar; (8) hasil analisis dan pemeriksaan sektor perpajakan sebesar Rp.1,5 miliar; dan (9) sarana PTI sebesar Rp5 miliar, dan sebesar 1,1 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti (1) hasil analisis dan hasil pemeriksaan prokatif PPATK sebesar Rp2,0 miliar; (2) laporan informasi intelijen (fit pro) sebesar Rp0,1 miliar; (3) hasil analisis dan hasil pemeriksaan reaktif PPATK sebesar Rp0,9 miliar; dan (4) pelaksanaan asistensi dan pemantauan produk intelijen keuangan PPATK sebesar Rp0,7 miliar. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain (1) Penguatan posisi strategis Indonesia dalam FATF dan kesiapan *Mutual Evaluation Review* (MER) 2029; (2) Optimalisasi intelijen keuangan guna suksesi Asta Cita (orientasi pada pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara); (3) Peningkatan kompetensi

pihak pelapor; (4) Modernisasi infrastruktur digital PPATK; (5) Penguatan harmonisasi regulasi dan orkestrasi kolaborasi antar-lembaga; (6) Penguatan transformasi organisasi PPATK.

Proyeksi kebijakan strategis PPATK pada tahun 2027–2029 berdasarkan RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis PPATK antara lain (1) Menguatkan pengaturan dan pengawasan untuk menghasilkan data yang berkualitas; (2) Memanfaatkan data intelijen keuangan untuk menghasilkan produk intelijen keuangan (PIK) sesuai dengan program prioritas pemerintah; (3) Menguatkan transformasi digital untuk deteksi dan prediksi kebocoran kekayaan negara; (4) Menguatkan interkonektivitas dalam ketersediaan akses dan mendorong pemanfaatan PIK, serta menyediakan regulasi yang memperluas peran PPATK; (5) Mewujudkan transformasi organisasi untuk perubahan proses bisnis yang inovatif, efisien, dan terintegrasi; dan (6) Transformasi tata kelola manajemen internal berbasis *good governance* melalui kapabilitas *Human Capital* SDM PPATK berbasis digital serta pemenuhan dukungan sarana dan prasarana perkantoran.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
(BA 083)

Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi geospasial. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BIG juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG antara lain seperti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan Informasi Geospasial audited sebesar Rp769,7 miliar, antara lain untuk pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pemutakhiran Ina-Geoid, pembakuan nama unsur rupabumi, penyediaan data batimetri, penyediaan data geospasial dasar skala besar, penyediaan IGT integrasi spasial dan statistik, pengelolaan simpul jaringan Informasi Geospasial (IG) nasional dan penyediaan informasi geospasial berkualitas yang siap publikasi. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk penyediaan peta dasar skala besar 1:5000, penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 wilayah laut, perapatan stasiun pasang surut dan stasiun InaCORS, dukungan teknis pemetaan batas wilayah administrasi, pembinaan penyelenggaraan IGT siap berbagi-pakai, dan penguatan Geospatial Computing Center untuk mendukung penyediaan peta dasar skala besar 1:5000, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pemutakhiran Ina-Geoid, pembakuan nama unsur rupabumi, Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yang Terdelineasi, Rekomendasi Penyelenggaraan IGT, Pemanfaatan Atlas, Pembinaan Simpul Jaringan yang Optimal, Layanan Jasa IG, dll. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 99,5 persen dan bersumber dari PNBP sebesar 0,5 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5000. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 untuk seluruh pulau Sulawesi yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal seperti informasi geospasial yang akurat menjadikan pemanfaatan ruang lebih tertata dan efisien; Informasi spasial skala besar/detil akan membantu dalam penataan wilayah agar sesuai dengan potensi dan risiko geografis setiap daerah; Mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan, mendapat perhatian pembangunan; dan banyak manfaat lainnya. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain blokir/efisiensi anggaran pada banyak RO mengakibatkan Tidak optimalnya pendampingan fungsi simpul jaringan IG; Kurangnya pemantauan geodinamika (pergerakan lempeng bumi); Penyiapan dokumen rencana induk penyelenggaraan IG yang belum tersedia dan masih terbatasnya penyedia dalam penyelenggaraan IG skala besar dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain kedepannya diharapkan untuk kegiatan prioritas seperti penyediaan peta dasar skala besar dapat menggunakan pembiayaan bersumber dari pinjaman luar negeri (PHLN), untuk mengurangi potensi blokir dan efisiensi anggaran sehingga target pemerintah dalam penyediaan peta dasar skala besar dapat tercapai tepat waktu.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Informasi Geospasial dialokasikan sebesar Rp352,3 miliar. Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya program dan kegiatan Prioritas Nasional, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp599,9 miliar pada 23 Juni 2025 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN). Anggaran Badan Informasi Geospasial terdiri dari belanja operasional sebesar Rp140,1 miliar antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan belanja non operasional sebesar Rp811,9 miliar antara lain untuk pengelolaan stasiun Ina-CORS, pengelolaan stasiun pasang surut, pemutakhiran Ina-Geoid, pembakuan nama unsur rupabumi, penyediaan data batimetri, penyediaan data geospasial dasar skala besar, penyediaan IGT integrasi spasial dan statistik, pengelolaan simpul jaringan Informasi Geospasial (IG) nasional dan penyediaan informasi geospasial berkualitas yang siap publikasi. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp694 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp112,0,iliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional awalnya diarahkan untuk pemantauan dan pengintegrasian penurunan muka tanah, isu perubahan iklim dengan menyelenggarakan kegiatan IGT integrasi abrasi, IGT integrasi kekeringan, pemetaan rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk wilayah Jawa dan penyediaan peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5000 di Kalimantan, namun untuk menindaklanjuti Inpres 1 tahun 2025 maka diprioritaskan untuk penyediaan peta dasar skala besar 1:5000, penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 wilayah laut, perapatan stasiun pasang surut dan stasiun Ina-CORS, dukungan teknis pemetaan batas wilayah administrasi, pembinaan penyelenggaraan IGT siap berbagi-pakai, dan penguatan Geospatial Computing Center untuk mendukung penyediaan peta dasar skala besar 1:5000 sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk diarahkan untuk pemenuhan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 36,6 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN sebesar 63 persen dan Non Rupiah Murni selain yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0,4 persen . Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Skala 1:5000. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain tersedianya peta dasar skala besar 1:5000 untuk seluruh pulau Sulawesi yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal seperti informasi geospasial yang akurat menjadikan pemanfaatan ruang lebih tertata dan efisien; Informasi spasial skala besar/ detil akan membantu dalam penataan wilayah agar sesuai dengan potensi dan risiko geografis setiap daerah; Mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan, mendapat perhatian pembangunan; dan banyak manfaat lainnya.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp2.271,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 90,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Penyediaan Peta dasar skala besar 1:5000, Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan sebesar 10,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Penyediaan Peta dasar skala besar 1:5000, penguatan Geospatial Computing Center untuk mendukung penyediaan peta dasar skala besar 1:5000.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Informasi Geospasial pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial

antara lain menjamin ketersediaan Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan; meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial; Meningkatkan berbagi pakai informasi geospasial melalui JIGN; Peran industri geospasial yang semakin meningkat; dan Meningkatkan penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(BA 084)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional antara lain mengatur bahwa Badan Standardisasi Nasional (BSN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugas tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BSN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN antara lain seperti (1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; (2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; (3) Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; (4) Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional; (6) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional; dan (7) Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran BSN audited dialokasikan sebesar Rp233,6 miliar, terdiri dari belanja operasional dan belanja non operasional. Penggunaan belanja operasional dipergunakan antara lain untuk belanja operasional pegawai dan belanja operasional barang (operasional dan pemeliharaan perkantoran). Belanja non operasional dipergunakan antara lain untuk pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian antara lain (1) Pengembangan standar; (2) Penerapan standar dan penilaian kesesuaian; (3) Penyelenggaraan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; (4) Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran: dan (5) Pengelolaan manajemen dan Sumber Daya Organisasi. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas (1) Bimbingan teknis penerapan SNI kepada UMKM; (2) Bimbingan teknis kepada organisasi dan Lembaga Penilaian Kesesuaian; (3) Peningkatan produk ber-SNI yang diekspor; (4) Peningkatan akses pasar melalui negosiasi perdagangan internasional; (5) Skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian bagi UMKM; (6) Perumusan SNI; dan (7) Pengadaan alat laboratorium SNSU, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk (1) Layanan pelatihan standardisasi; (2) Kaji ulang dan rekomendasi tanggapan draft Standar Internasional; (2) Layanan akreditasi; (3) Layanan kalibrasi; (4) Penerbitan SPPT SNI; (5) Monitoring efektivitas penerapan SNI. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain (1) Bertambahnya SNI yang tersedia sebagai landasan penjaminan kualitas barang, jasa, proses, sistem, dan personal; (2) Semakin banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang mendapatkan pembimbingan dan fasilitasi penerapan SNI; (3) Tersedianya ruang lingkup akreditasi LPK untuk pengujian produk yang akan menerapkan SNI; dan (4) Kemudahan akses promosi dan informasi pengembangan pasar

untuk produk ber-SNI di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain (1) keterbatasan SDM; dan (2) sebaran pelaku usaha khususnya UMKM yang akan dibimbing dalam penerapan SNI berada hampir diseluruh wilayah Indonesia. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain (1) Kurasi pelaku usaha yang akan diberikan pembimbingan penerapan SNI agar lebih tepat sasaran; (2) ToT kepada pendamping UMKM di wilayah guna mendukung pelaksanaan fasilitasi penerapan SNI untuk UMKM secara massif, efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia; (3) Mengoptimalkan peran Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN yang ada di 6 (enam) daerah dalam pembinaan penerapan SNI; (4) Mengoptimalkan SDM yang ada dalam menyusun materi pembinaan penerapan SNI Bina UMK; (5) Kolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC untuk pengembangan pasar untuk produk ber-SNI; dan (6) Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BSN dialokasikan sebesar Rp223,9 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp147,1 miliar antara lain untuk Belanja Pegawai sebesar Rp95,4 miliar dan Belanja Barang barang (operasional dan pemeliharaan perkantoran) sebesar Rp51,7 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp76,8 miliar antara lain untuk Belanja Barang sebesar Rp52,1 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp24,7 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp61,3 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp4,1 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri yang diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas (1) Fasilitasi dan pembinaan SNI Bina UMK; (2) Fasilitasi penerapan SNI; (3) Jaringan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM di daerah; (4) Layanan pelatihan publik; (5) Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; (6) Standar dalam rangka mendukung ekspor; (7) Sistem dan kebijakan pengembangan standar; (8) Penilaian akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi dan Inspeksi; (9) Evaluasi assesmen akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi; (10) Sistem dan skema akreditasi; (11) Akreditasi layanan diseminasi SNSU; (12) Penyidikan dan pengujian SNSU; dan (13) Pengadaan Alat Laboratorium SNSU, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk (1) Layanan otoritas sponsor; (2) Pengembangan Kompetensi SDM Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; (3) Perumusan SNI; dan (4) Rekomendasi pengembangan Standar Internasional. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 36,3 persen dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 63,7 persen dari total alokasi anggaran Prioritas Nasional. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain (1) Ssemakin banyak SNI yang tersedia; (2) Semakin banyak bimbingan dan fasilitasi penerapan SNI yang menjangkau pelaku usaha khususnya UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; (3) Saling pengakuan terhadap sistem akreditasi di Indonesia dengan beberapa negara sehingga mengurangi potensi dilakukannya resertifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap barang dan jasa ketika berpindah dari satu negara ke negara lain; dan (4) Tersedianya acuan pengukuran yang sama untuk berbagai sektor di seluruh wilayah tanah air untuk memastikan bahwa pernyataan mutu yang diberikan oleh produsen sama dengan kebutuhan mutu dari konsumen.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun

Anggaran 2026, total Pagu BSN TA 2026 sesuai Pagu Anggaran sebesar Rp190,0 miliar yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp144,1 miliar dan PNBP sebesar Rp45,9 miliar.

Rincian anggaran BSN Tahun Anggaran 2026 per jenis belanja: Belanja Operasional sebesar Rp142,0 miliar dan Belanja Non Operasional sebesar Rp48,0 miliar. Rincian Belanja Operasional sebesar untuk Belanja Pegawai (001) sebesar Rp102,9 miliar dan untuk Belanja Barang (002) sebesar Rp39,1 miliar. Rincian Sumber Pembiayaan Belanja Non Operasional terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2,2 miliar dan PNBP sebesar Rp45,8 miliar. Rincian Output (RO) yang teralokasi pada Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Tahun 2026 mendukung Prioritas Nasional 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri", Program Prioritas 05-Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Terdapat 17 (tujuh belas) RO PN di Program Standardisasi Nasional yang telah teranggarkan berdasarkan Alokasi Anggaran mendukung Prioritas Nasional 05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yakni: (1) Layanan pelatihan publik; (2) Penilaian akreditasi laboratorium dan penyelenggaran uji profisiensi; (3) Penilaian akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; (4) Evaluasi asesmen akreditasi laboratorium dan lembaga sertifikasi; (5) Sistem dan skema akreditasi; (6) Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi; (7) Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Termoelektrik dan Kimia; (8) Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi; (9) Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia, (10) Fasilitasi dan Pembinaan SNI kepada UMK, (11) Fasilitasi Penerapan SNI termasuk sektor hilirisasi, (12) Fasilitasi Keberterimaan Produk ber-SNI dalam Perdagangan Internasional, (13) Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, (14) Rekomendasi Pengembangan Standar Internasional, (15) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, (16) Standar bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian termasuk mendukung sektor Hilirisasi, dan (17) Standar bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi. Selanjutnya pada Program Dukungan Manajemen terdapat satu RO PN yaitu Pengelolaan Kerja Sama. Seluruh RO ini akan tetap berlanjut untuk periode 2027 hingga 2029.

Arah kebijakan strategis BSN untuk periode 2027 hingga 2029 adalah Peningkatan Daya Saing dan Peningkatan kualitas hidup bangsa. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, maka BSN menetapkan strategi sebagai berikut (1) Peningkatan ketersediaan standar; (2) Penguatan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; (3) Penguatan penyelenggaraan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; (4) Penguatan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; (5) Peningkatan penerapan standar; (6) Penguatan dukungan ekspor produk ber-SNI; dan (7) Pengelolaan manajemen dan sumber daya organisasi.

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dengan tugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (Sumber: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran).

Dalam menjalankan tugas tersebut, BAPETEN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat; menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota Masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Cakupan pengawasan BAPETEN dalam pemanfaatan tenaga nuklir yaitu bidang kesehatan, industri, penelitian, dan energi nuklir. Sistem regulasi, perizinan, dan inspeksi yang dikembangkan oleh BAPETEN perlu didukung oleh hasil-hasil kajian atas penerapan rekayasa teknologi yang baik, standar nasional maupun internasional yang telah digunakan oleh negara-negara lain. Dengan peran yang komprehensif tersebut, BAPETEN berkontribusi secara langsung dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan teknologi, ketahanan energi, dan kualitas sumber daya manusia, menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran BAPETEN *audited* sebesar Rp133,0 miliar, antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ketenaganukliran seperti pelaksanaan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang industri dan penelitian, penyelenggaraan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif bidang industri dan penelitian, penerbitan sertifikasi dan penunjukkan laboratorium uji kesesuaian, penyusunan regulasi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun bidang instalasi dan bahan nuklir, penyusunan regulasi dan rekomendasi kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas perizinan dan inspeksi dalam keselamatan, keamanan dan garda aman ketenaganukliran; pengembangan sistem informasi pengawasan partisipatif ketenaganukliran; peningkatan sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional; perumusan dan pengembangan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengembangan sistem pengawasan PLTN. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 6,05 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0 (nol) persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 1,42 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak tidak ada. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terjaminnya keamanan, keselamatan dan garda aman bagi masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran terkait perjalanan dinas sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui inspeksi ke fasilitas kurang optimal dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain melalui pengembangan aplikasi sistem inspeksi dan sistem perizinan, pengemabangan dan pelaksanaan inspeksi partisipatif, pelaksanaan *On the Spot Licensing* (OTSL) dan pembinaan teknis perizinan, serta pelaksanaan konsultasi publik dalam proses penyusunan regulasi ketenaganukliran. Pengembangan sisitem inspeksi dan perizinan yang

dikembangkan diantaranya adalah Sistem Akuntansi Limbah Terpadu, Sistem Informasi Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir, Sistem Inspeksi B@lis Infara 2.5 berbasis teknologi informasi, dan sistem perizinan terintegrasi melalui B@lis 2.5. Dalam proses penyusunan peraturan, BAPETEN tetap melaksanakan konsultasi publik untuk menjaring masukan dari *stakeholders* terkait peraturan yang sedang disusun. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme hybrid. Selain itu, BAPETEN tetap berkomitmen dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur keamanan nuklir dengan melakukan operasionalisasi dan pemasangan RDMS sebanyak 2 (dua) unit.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BAPETEN dialokasikan sebesar Rp156,7 miliar yang, terdiri dari belanja pegawai dan barang operasional sebesar Rp102,2 miliar serta belanja non operasional sebesar Rp54,5 miliar. Anggaran belanja non operasional tersebut digunakan di 2 (dua) Program, yaitu Program Riset dan Inovasi Iptek sebesar Rp34,7 miliar serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp19,8 miliar. Pada program Riset dan Inovasi Iptek, alokasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas Lembaga seperti: penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ketenaganukliran, pelaksanaan inspeksi, pengembangan Sistem Informasi pengawasan partisipatif ketenaganukliran, pengembangan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional, pengembangan Sistem Pengawasan PLTN, serta perumusan dan pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran. Sedangkan untuk program Dukungan Manajemen, alokasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengawasan seperti: pengelolaan organisasi dan SDM, pengelolaan litigasi dan legislasi hukum, Kerjasama dan komunikasi publik, pengelolaan sistem informasi dan teknologi, pengelolaan keuangan, BMN dan umum, serta pengelolaan risiko, pengendalian dan pengawasan internal.

Sebagai dukungan pelaksanaan Prioritas Nasional, program dan kegiatan BAPETEN telah difokuskan kepada program dan kegiatan untuk diversifikasi menuju energi yang bersih melalui pembangunan tenaga nuklir dengan menyiapkan baik regulasi, kebijakan, sistem informasi, sistem pengawasan, sumber daya manusia,dan teknologi serta infrastruktur; peningkatan pengelolaan limbah B3 dan Zat Radioaktif; optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif berbagai bidang dan khususnya bidang ketenaganukliran; dan peningkatan kualitas pelayanan rujukan dalam mendukung pembangunan Rumah Sakit (RS) yang berkualitas dan pengembangan pelayanan kesehatan. Alokasi anggaran untuk dukungan pelaksanaan Prioritas Nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp26,375 miliar (16,83 persen dari total pagu tahun 2025). Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 13,45 persen, Non-Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non-Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 3,37 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal di BAPETEN tidak ada dan kontrak tahun jamak juga tidak tersedia. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain adanya rasa aman bagi Masyarakat dalam pemanfaatan ketenaganukliran, khususnya bahaya radiasi, adanya jaminan perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan ketenaganukliran, dan persiapan pengawasan Pembangunan PLTN pada masa mendatang.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran BAPETEN yang dialokasikan sebesar Rp117,7 miliar yang terdiri dari Rp104,1 miliar (88,45 persen) untuk Belanja Pegawai dan Barang Operasional dan sisanya sebesar Rp13,6 miliar (11,55 persen) untuk kegiatan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari total anggaran pengawasan ketenaganukliran tersebut, sebesar Rp3,2 miliar (27,45 persen dari alokasi PNBP, atau sebesar 2,72 persen dari total anggaran BAPETEN dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional. Dengan

keterbatasan anggaran pada anggaran tersebut, BAPETEN melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional seperti: pelaksanaan inspeksi pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran baik di bidang kesehatan, industri, penelitian, instalasi dan bahan nuklir, serta pelaskanaan kegiatan monitoring keamanan nuklir pada Objek Vital Nasional dan *Major Public Event*.

Sesuai dengan Rencana Strategis BAPETEN TA 2025-2029, pelaksanaan program dan kegiatan BAPETEN dilaksanakan berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi BAPETEN dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah Kebijakan BAPETEN Tahun 2027-2029 yang telah ditetapkan yaitu: Peningkatan Sistem Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang mendukung Investasi; Pembangunan Sistem Pengawasan dalam rangka menyongsong PLTN di Indonesia; Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Radiasi Pengion Bidang Kesehatan dan Industri; Peningkatan Sistem Pemantauan Lingkungan, Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional; dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berkelanjutan.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN) antara lain mengatur bahwa LAN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, LAN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, pembinaan atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, dan koordinasi, asesmen, dan penyusunan strategi tata kelola fasilitas dan infrastruktur pembelajaran ASN. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, LAN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN antara lain seperti koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LAN, pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab LAN, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan LAN.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran LAN audited direalisasikan sebesar Rp319,7 miliar, antara lain dipergunakan untuk belanja program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN dan kegiatan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran strategis LAN. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan peran strategis LAN yang lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber seluruhnya dari Rupiah Murni. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain terdapatnya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dan pemblokiran akun perjalanan dinas ditahun berjalan sehingga merubah skenario kegiatan yang telah dilaksanakan dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain merubah metode pelaksanaan pengembangan kompetensi dari luring menjadi *blended learning* maupun daring.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran LAN dialokasikan sebesar Rp328,5 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp222,0 miliar antara lain untuk belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp106,5 miliar antara lain untuk belanja program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN serta dalam kegiatan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran strategis LAN. Pada tahun 2025, *outlook* anggaran LAN diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp282,5 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp0,5 miliar

dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp51,8 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk tugas, fungsi, dan peran strategis LAN. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain kegiatan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan) Nasional Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Nasional. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain dihasilkan rencana pengembangan kompetensi (Human Capital Development Plan) Nasional.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp293,3 miliar antara lain digunakan untuk kegiatan Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah (IKK) dan Penerapan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*ASN Corporate University*), dan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti Pelatihan, Uji Kompetensi, Akreditasi, Assessment dan Pemyelenggaran Pendidikan Terapan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah (IKK) dan Penerapan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*ASN Corporate University*).

Proyeksi kebijakan strategis LAN pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis LAN antara lain Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan Instansi Pemerintah, Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, dan Peningkatan Peran Aktif LAN dalam mendukung Program Direktif Presiden.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 087)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia antara lain mengatur bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, ANRI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, ANRI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan ANRI antara lain: (a) perumusan dan penetapan kebijakan nasional bidang kearsipan, (b) pelaksanaan kebijakan nasional bidang kearsipan, (c) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kearsipan, (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kearsipan, (e) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, (f) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia, (g) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan (h) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dalam APBN tahun 2024, Arsip Nasional Republik Indonesia *audited* terealisasi sebesar Rp275,2 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk gaji dan tunjangan serta pemeliharaan kantor dan belanja non operasional antara lain untuk belanja barang dan/atau jasa habis pakai yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja satuan kerja dan pelayanannya bersifat eksternal. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mewujudkan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar 100 persen.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: (i) akses mudah terhadap informasi publik dan sejarah; (ii) pelayanan publik lebih cepat dan transparan; (iii) pelestarian warisan budaya dan sejarah; (iv) pemberdayaan daerah dan komunitas; (v) perlindungan hukum atas informasi dan dokumen penting; dan (vi) dukungan terhadap reformasi birokrasi.

Terdapat beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain: (i) Regulasi Pelatihan Kearsipan, yaitu Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan; (ii) Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan ANRI, berupa Keputusan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; (iii) Pencabutan Regulasi SPBE, yaitu Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; (iv) Ekspansi Aplikasi SRIKANDI, berupa Penerapan di Tingkat Nasional dan Daerah; (v) Penguatan Pengawasan dan Koordinasi Kearsipan Nasional; dan (vi) Penghargaan Memori Kolektif Bangsa (MKB) Tahun 2024.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran ANRI dialokasikan sebesar Rp293,8 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp179,8 miliar antara lain untuk gaji dan tunjangan serta pemeliharaan kantor dan belanja non operasional sebesar Rp114,0 miliar antara lain untuk belanja barang dan/atau jasa habis pakai yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja satuan kerja dan pelayanannya bersifat eksternal. Dari alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain (i) digitalisasi arsip terjaga dan arsip statis; (ii) pengawasan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan; (iii) penetapan arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa; dan (iv) Peningkatan informasi arsip di JIKN.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain mempermudah akses atas informasi arsip untuk meningkatkan memori dan jati diri bangsa serta pengetahuan masyarakat tentang sejarah bangsa, selain itu menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp279,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 23,6 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, diantaranya adalah melalui kegiatan pengembangan prasarana pusat layanan khazanah kearsipan melayu nusantara melalui (i) digitalisasi arsip terjaga dan arsip statis; (ii) pengawasan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan; (iii) penetapan arsip sebagai memori kolektif bangsa; dan (iv) Peningkatan informasi arsip di JIKN.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain peningkatan implementasi tata kelola kearsipan pada seluruh aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menjadikan arsip sebagai substansi strategis pada berbagai program pembangunan serta Prioritas Direktif Presiden diantaranya untuk membentuk karakter serta identitas dan jati diri bangsa pada Penyelenggaraan sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, koperasi merah putih, dan digitalisasi sekolah.

Proyeksi kebijakan strategis ANRI pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis ANRI antara lain (i) pengembangan budaya tertib arsip melalui penguatan tata kelola kearsipan dan percepatan digitalisasi arsip; dan (ii) pengembangan memori kolektif bangsa melalui: (a) peningkatan penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan arsip; (b) peningkatan pelayanan dan pemanfaatan informasi kearsipan pada publik; dan (c) pembangunan pusat khazanah kearsipan nusantara.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)

Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara antara lain mengatur bahwa Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Manajemen ASN. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Kepegawaian Negara juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara antara lain seperti pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Badan Kepegawaian Negara *audited* dialokasikan sebesar Rp1.500,1 miliar terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai serta Belanja Operasional Perkantoran dan belanja non-operasional antara lain untuk kegiatan Seleksi CASN Formasi Tahun 2024, pembinaan dan pelayanan Manajemen ASN, serta pengawasan dan pengendalian Sistem Merit. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk beberapa kegiatan seperti: (1) pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi ASN; (2) penyusunan standar penilaian kompetensi ASN; (3) rekomendasi kebijakan tentang sistem penggajian pegawai ASN pada instansi pemerintah; (4) layanan data ASN terintegrasi; (5) penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah; (6) pengawasan nilai dasar kode etik dan kode perilaku pegawai ASN; (7) pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; serta (8) penanganan dan penyelesaian pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Sedangkan, untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk pembangunan/pengembangan *data center* (dc) dan *disaster recovery center* (drc). Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain melakukan kerja sama penyediaan layanan *co-location* perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BKN dan Kementerian Keuangan. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 1,4 persen. Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain hasil dari disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penerapan sistem merit. Tugas dan fungsi tersebut sebelumnya merupakan kewenangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang melalui Undang-undang ini, nama lembaga tersebut tidak lagi disebutkan sebagai lembaga pengelola ASN. Dalam hal ini, sistem merit menjadi fungsi yang akan dilimpahkan ke lembaga pengelola ASN, salah satunya BKN dan beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara. Perubahan Peraturan Presiden tersebut juga bersama-sama dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Kepegawaian Negara dialokasikan sebesar Rp804,6 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai, serta Belanja Operasional Perkantoran dan belanja non-operasional antara lain untuk kegiatan Seleksi PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024, pembinaan dan pelayanan Manajemen ASN, serta pengawasan dan pengendalian Sistem Merit. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk kegiatan seperti: (1) rekomendasi kebijakan *roadmap* penerapan sistem pensiun; dan (2) database profile ASN serta pengawasan dan pemberian rekomendasi penindakan atas pelanggaran penerapan prinsip sistem merit dalam manajeman ASN. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya, diarahkan untuk kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi untuk pembangunan/pengembangan *data center* (dc) dan *disaster recovery center* (drc) dan penguatan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN termasuk sistem merit. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 0,59 persen. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain melalui reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi seperti penguatan digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan melalui penataan ulang struktur organisasi BKN berkaitan dengan perubahan atribusi dan delegasi kewenangan terhadap BKN berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, penataan ulang struktur organisasi BKN juga dibutuhkan untuk memastikan kantor-kantor regional dapat memainkan peran yang tepat, tidak hanya dalam pemberian layanan administrasi kepegawaian, tetapi juga sebagai *strategic partner* dari pembina kepegawaian.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp639,5 miliar dari total anggaran yang ada, seluruhnya dialokasikan pada belanja operasional kantor sehingga tidak terdapat alokasi untuk mendukung Prioritas Nasional, yang dalam Renja K/L masih disebutkan antara lain melalui: (1) kegiatan Standar Penilaian Kompetensi dan Potensi; (2) Penerapan Manajemen Kinerja Periodik (Harian, Bulanan, Tahunan) secara Digital untuk Mendukung *Total Reward*; (3) Penerapan Perencanaan Kebutuhan ASN berbasis Prioritas Nasional (RPJM) dan Potensi Daerah; (4) Pengembangan Backend Services Layanan Kepegawaian; (5) Penguatan Data Profile ASN; (6) Interoperabilitas Database Profile ASN; (7) Pengukuran Penerapan Kebijakan Sistem Merit ASN; serta (8) Pengawasan Penerapan Sistem Merit ASN, dan mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan Penerapan Manajemen Talenta Melalui Program Talent Pool di Instansi Pemerintah dan penguatan Sistem Meritokrasi dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain kegiatan yang berhubungan dengan manajemen talenta dalam menjamin keterpenuhan infrastruktur manajemen talenta dan berjalannya manajemen talenta di K/L/D.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029, antara lain mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 (lima) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain transformasi tata kelola, dengan program pembangunan: (1) transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; (2) penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan; (3) transformasi manajemen asn; dan (4) transformasi kesejahteraan, transformasi sistem penggajian dan pensiunan ASN. Kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 yaitu, mendorong *human capital management* ASN berbasis digital melalui strategi: (1) percepatan digitalisasi manajemen

ASN, termasuk interoperabilitas sistem informasi ASN dan *HR analytics*; BKN sebagai penggerak utama manajemen talenta dalam menjamin keterpenuhan infrastruktur manajemen talenta dan berjalannya manajemen talenta di K/L/D; (2) eksplorasi sumber pendanaan alternatif melalui mitra pembangunan nasional dan internasional; (3) kolaborasi multi-pihak (antara lain KPK, Kejaksaan, BPK) untuk pengawasan sistem merit; (4) perluasan peran Kantor Regional BKN sebagai *strategic partner* Pejabat Pembina Kepegawaian; dan (5) sertifikasi SDM pengelola ASN. Selain itu, kebijakan strategis transformasi kelembagaan dan governansi BKN melalui strategi: (1) penataan kewenangan Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN; (2) penguatan transformasi digital berbasis pengguna; (3) penerapan *shared outcomes, shared accountability, shared resources* antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan (4) pelaksanaan manajemen talenta dan mobilitas talenta BKN yang menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BA 089)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional termasuk penguatan pengendalian intern pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama,BPKP juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP, antara lain pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawalan Program Strategis Nasional (PSN), pengawalan pelaksanaan program prioritas Presiden termasuk yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres).

BPKP mengawal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) K/L/D termasuk membina dalam implementasinya. Dalam pembinaan penerapan SPIP, BPKP mendampingi KLD untuk memperbaiki kualitas perencanaan strategis, memastikan struktur dan kegiatan pengendalian terbangun dengan memadai, disiplin dilaksanakan, serta memberikan dampak dan manfaat yang nyata dan terukur. BPKP juga memastikan pencegahan dan pengendalian atas *fraud* mendapat perhatian yang cukup dari pimpinan KLD. BPKP secara intensif melakukan pembinaan dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada KLD di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu penyelenggaraan SPIP dengan menjalankan peran pengawasan intern dengan efektif. Pembinaan yang dilakukan menyasar pada perbaikan infrastruktur dasar APIP, antara lain dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Auditor) dan kapabilitas APIP menjalankan praktik profesional pengawasan intern.

BPKP mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan pada 99 K/L, 544 pemerintah daerah, dan 29.707 pemerintah desa. Selain itu, BPKP juga mengawasi dan mendampingi 114 BUMN dan anak perusahaan, 1.206 BUMD, 964 BLU/D, serta 4.424 BUMDes. Pengawalan pada berbagai lini pemerintahan dalam periode tersebut dilakukan melalui lebih dari 48.000 penugasan berupa *assurance* maupun *consulting* baik di lingkup pemerintah pusat, maupun oleh 36 Kantor Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran BPKP *audited* direalisasikan sebesar Rp2.415,5 miliar yang digunakan antara lain untuk mendukung tugas utama BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, pengembangan kompetensi pegawai, pelaksanaan manajemen pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional sebesar 17,52 persen dan Prioritas lainnya sebesar 46,61 persen dari total anggaran non-operasional selain sarana dan prasarana.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung program prioritas melalui rekomendasi strategis dan upaya tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas Lainnya diarahkan untuk pengawasan keuangan Negara/Daerah. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional yaitu Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain potensi penerimaan Negara/Daerah

sebesar Rp6,1 triliun, efisiensi pengeluaran Negara/Daerah Rp60,1 triliun, dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp12,0 triliun. Dalam pengawasan pembangunan, BPKP berperan dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program-program pembangunan nasional, seperti program penurunan prevalensi stunting, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, serta program ketahanan pangan. Dalam program penurunan prevalensi *stunting,* BPKP mengawasi ketepatan dan efektivitas alokasi belanja senilai Rp126,1 triliun pada 17 K/L. BPKP juga memastikan akses sekitar 12 ribu desa/kelurahan lokus stunting untuk mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak. Intervensi program dipastikan tepat sasaran kepada ibu hamil, remaja putri, anak-anak, dan calon pasangan usia subur. Dalam sektor ketahanan pangan, BPKP melakukan pengawasan atas tata kelola pada sisi *on farm, off farm*, dan resiliensi pangan untuk 14 komoditas pangan utama. BPKP mengawal perbaikan tata kelola *supply chain* komoditas pangan untuk menjaga stabilitas ketersediaan stok dan harga pangan. Pada sisi *on farm*, BPKP bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengawal alih fungsi lahan guna menjaga jumlah produksi pertanian. Pada sisi *off farm*, BPKP juga mengawal agar produksi dan distribusi beras selaras dengan kebutuhan beras nasional. Selain beras, BPKP juga mengawasi hilirisasi industri kelapa sawit. Pengawasan BPKP menjumpai adanya potensi penerimaan negara cukup besar yang dapat dipungut dari perusahaan sawit dalam bentuk pajak, PNBP, dan denda. Tidak jelasnya identifikasi subjek hukum atas kebun kelapa sawit yang diduga melanggar kawasan hutan masih menjadi permasalahan serius dalam hilirisasi kelapa sawit.

Selain itu, BPKP turut mengawal pembangunan infrastruktur dan konektivitas, percepatan transformasi digital, terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional XXI dan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024, serta transparansi dan akuntabilitas pemilu. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain perubahan kebijakan dalam menyesuaikan RPJMN terbaru dan pergantian pimpinan K/L/D sebagai proses Pemilu. Beberapa terobosan kebijakan yang dilaksanakan antara lain melalui optimalisasi penyelesaian tindak lanjut pengawasan dan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis BPKP.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BPKP dialokasikan sebesar Rp2.473,7 miliar, antara lain digunakan untuk mendukung tugas utama BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, pengembangan kompetensi pegawai, pelaksanaan manajemen pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dari total anggaran tersebut, BPKP mengalokasikan Rp65,3 miliar untuk mendukung kegiatan yang termasuk dalam Prioritas Nasional, dan Rp345,6 miliar untuk kegiatan Prioritas lainnya.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung program prioritas melalui rekomendasi strategis dan upaya tindak lanjut hasil pengawasan. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengawasan keuangan negara/daerah. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan rekomendasi strategis dan tindak lanjut hasil pengawasan pembangunan nasional seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp65,3 miliar atau 2,9 persen dari total alokasi dana Rupiah Murni di BPKP.

Manfaat bagi masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain potensi penerimaan Negara/Daerah sebesar Rp3,29 triliun (per semester I), efisiensi pengeluaran Negara/Daerah Rp2,56 triliun (per semester I), dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp15,37 triliun (per semester I). Dalam pengawasan pembangunan, BPKP berperan dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program-program pembangunan nasional, mengawal upaya efisiensi penggunaan anggaran negara tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan melalui

program makan bergizi gratis. Di sektor pendidikan, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas dan merata terhadap layanan pendidikan berkualitas melalui transformasi dan revitalisasi sekolah. Di bidang kesehatan, intervensi tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis dan mempercepat pembangunan rumah sakit yang lengkap dan berkualitas. Selain itu, melalui penguatan akurasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan.

Di tahun 2025, BPKP ditugasi mengawal implementasi efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Inpres ini menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp256,1 triliun. BPKP memastikan efisiensi belanja tidak berdampak negatif terhadap program prioritas dan pelayanan publik. Program strategis lain yang diawasi BPKP program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, kelompok rentan, dan masyarakat miskin. Pengawasan dilakukan berbasis data dan mencakup 950 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan tujuan mencegah penyimpangan dan memastikan ketepatan sasaran. BPKP juga berperan dalam penyelenggaraan pelatihan kepada 30.027 SPPG pada 57 satuan pendidikan di 15 Komando Latihan.

Pengawasan terhadap Prioritas lainnya juga mencakup pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang pendidikan. Hingga semester I tahun 2025, BPKP telah melakukan evaluasi terhadap kesiapan 63 Sekolah Rakyat (SR), persiapan 37 SR lainnya, transformasi 12 sekolah menjadi Sekolah Unggul Garuda, serta persiapan pembangunan 4 Sekolah Unggul Garuda baru. Pengawasan atas program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, yang mencakup anggaran sebesar Rp17,1 triliun di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Rp4,5 triliun di Kementerian Agama dilakukan untuk memastikan program terlaksana dengan baik. Di sektor kesehatan, BPKP mengawasi pelaksanaan PHTC Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Hingga 13 Juni 2025, progres pembangunan fisik RS PHTC baru mencapai 3 dari 32 lokasi (9,37 persen). Permasalahan yang diidentifikasi antara lain ketidakpastian status lahan, ketidaksiapan lahan, serta keterlambatan pengadaan alat kesehatan dan pemenuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Pelaksanaan PKG juga belum optimal, dengan capaian hanya 10,22 juta orang dari target 102,36 juta (9,98 persen) per 25 Juni 2025. Hambatan utama meliputi belum jelasnya target sasaran PKG oleh pemerintah daerah, keterbatasan alat kesehatan, tenaga medis, serta ketersediaan bahan medis habis pakai dan pendanaan program. Dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, BPKP mengawal pelaksanaan PHTC Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif. Pengawasan mencakup kesiapan regulasi, tata kelola, serta pemanfaatan dan sinkronisasi data penerima manfaat. Berdasarkan hasil pengawasan, BPKP memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dan pemanfaatan data, guna meningkatkan akurasi sasaran program serta efektivitas penurunan kemiskinan yang ditargetkan pada kisaran 7–8 persen dan graduasi 1,5 juta keluarga.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran BPKP dialokasikan sebesar Rp2.374,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp39,9 miliar atau 8,35 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih maupun Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional seperti pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan penguatan tata kelola transformasi digital pemerintahan. Program-program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan adaptif. Sementara itu, alokasi sebesar Rp102,6 miliar untuk Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung program-program yang bersifat sektoral dan lintas wilayah,

seperti pengawasan terhadap pelaksanaan PHTC di bidang pendidikan dan kesehatan, pengawalan pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas dan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), serta penguatan program perlindungan sosial melalui Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif. Kebijakan strategis tahun 2026 diarahkan pada penguatan pengawasan berbasis data, peningkatan sinergi antar *stakeholders*, dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan. BPKP diharapkan mampu menjaga akuntabilitas anggaran serta memastikan belanja negara memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada periode 2027-2029, BPKP melaksanakan kebijakan jangka menengah yang menjabarkan RPJMN 2025-2029 dan KPJM 2027-2029. Arah kebijakan strategis BPKP difokuskan pada penguatan efektivitas pengawasan intern pemerintah, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta optimalisasi pemanfaatan hasil pengawasan untuk mendukung pengambilan keputusan nasional yang tepat dan berbasis data.

BPKP memproyeksikan penguatan peran pengawasan strategis melalui peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan maturitas sistem SPIP terintegrasi, serta percepatan digitalisasi sistem pengawasan. Pelaksanaan pengawasan diarahkan pada program-program prioritas pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Selama periode tersebut, kegiatan yang tetap berlanjut mencakup pembinaan kapabilitas APIP, peningkatan maturitas SPIP terintegrasi, pengawasan lintas sektor terhadap program prioritas nasional serta penguatan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi. Sementara kegiatan yang dihentikan atau dialihkan adalah kegiatan yang bersifat duplikasi dengan instansi pengawasan lain, kegiatan administratif manual yang tidak efisien, serta asistensi intensif terhadap instansi yang telah mencapai tingkat maturitas tinggi, yang akan dialihkan menjadi kegiatan monitoring dan evaluasi berkala.

BPKP memberikan perhatian pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional bidang pembangunan manusia. Pengawasan difokuskan pada efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan ketepatan sasaran agar program berjalan transparan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan *stunting*.

Selain itu, BPKP juga memperkuat pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor-sektor strategis, khususnya industri perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara dan nikel. Hasil pengawasan menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan negara yang besar dari pajak, PNBP dan denda yang belum tergali secara optimal akibat lemahnya tata kelola, ketidakjelasan subjek hukum, serta kurangnya integrasi data antar instansi. Oleh karena itu, BPKP akan mengambil peran dalam mendorong perbaikan tata kelola sektor-sektor tersebut melalui audit lintas sektor, reviu kebijakan, serta analisis untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(BA 090)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan antara lain mengatur bahwa Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Perdagangan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan antara lain seperti (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan; (3) pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Perdagangan; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan (6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan *audited* sebesar Rp2.095,6 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, sebesar 24,19 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional dan sebesar 75,81 persen untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Promosi Dagang dan Misi Dagang, Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan *Trade Expo Indonesia*, Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra, Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia, Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor Secara Digital dan Terintegrasi, Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat, Pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat, Pengawasan *post border*, Pengawasan Barang Beredar, Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK, Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi, Kampanye Bangga Buatan Indonesia, Konsumen Yang Di Edukasi, *Export Coaching Program*. Pada tahun 2024, kebijakan strategis yang dilaksanakan untuk memperkuat hal tersebut antara lain Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, Pembinaan dan pengembangan e-commerce, Melakukan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Edukasi Konsumen, Mengimplementasikan dan Pemanfaatan SRG, Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengembangan pasar dalam negeri, Melakukan Misi Dagang, Pameran, dan Promosi peningkatan ekspor ke Luar Negeri, Melakukan Perundingan dan Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional, Memfasilitasi Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Ekspor-Impor, Pengembangan SDM yang meliputi vokasi Kemetrologian, dan pelatihan ekspor dan SDM Perdagangan. Kendala/ tantangan yang ditemukan antara lain Penurunan nilai ekspor indonesia pada periode Januari-Mei 2024 sebesar 104,25 persen (*yoy*) dikarenakan adanya kontraksi nilai ekspor non migas (-3,84 persen). Salah satu faktor penyebabnya adalah penurunan harga komoditas dunia. Pelemahan kinerja ekspor non migas Indonesia pada periode Januari-Mei 2024 disebabkan oleh penurunan

beberapa komoditas unggulan ekspor non migas seperti batubara dan CPO serta penurunan permintaan (*demand*) dari beberapa negara mitra dagang seperti RRT dan India, sehingga berdampak pada menurunnya surplus neraca perdagangan non migas dibanding periode Januari-Mei 2023. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan Kementerian Perdagangan, antara lain:

1. Penanganan Kasus *Trade Remedies*

   Upaya masif yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan telah berhasil mengamankan potensi nilai ekspor Indonesia sebesar USD 38,8 Juta atau setara dengan Rp 617 miliar pada periode Januari – Maret 2024 dengan kurs 1 USD = Rp 15.893 (kurs tengah BI 4 April 2024) untuk produk *Dumping A4 Copy Paper* oleh Australia.

2. Menyusun Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Industri Dalam Negeri

   Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai impor yaitu Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

3. Diversifikasi Pasar untuk Menjaga Neraca Perdagangan

   Kementerian Perdagangan pada tahun 2024 akan melakukan diversifikasi pasar ke negara-negara potensial, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Pasar Potensial adalah negara tujuan ekspor non migas diluar pasar utama (10 negara tujuan ekspor non migas terbesar) yang mempunyai potensi besar melalui pendekatan: jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, GDP perkapita, potensi impor dari dunia, dan perjanjian perdagangan. Rencananya, negara tujuan ekspor nonmigas ke pasar potensial, yaitu Pakistan, Bangladesh, United Arab Emirates, Turkiye, Saudi Arabia, Mexico, Mesir, Afrika Selatan, Chile, dan Maroko. Upaya diversifikasi pasar ekspor ini merupakan salah satu mandat Presiden Republik Indonsia yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan, yaitu peningkatan ekspor ke negara nontradisional (*emerging economies*). Peningkatan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.

4. Memperkuat Pilar Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Akses Digitalisasi, Kemitraan, dan Pembiayaan

   Peningkatan daya saing UMKM dapat dilakukan dengan kolaborasi antara market place, ritel modern, dan lembaga perbankan.

   a. Akses Kemitraan: Kementerian Perdagangan membantu UMKM untuk bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. Kemitraan dilakukan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
   b. Akses Pembiayaan: Kementerian Perdagangan akan berperan aktif membantu UMKM untuk mendapatkan permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, diperlukan juga lembaga pembiayaan ekspor Indonesia untuk mempercepat laju ekspor nasional.
   c. Akses Digitalisasi: Perlunya *marketplace* untuk dapat mengembangkan perdagangan dunia. Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan *marketplace* untuk membantu akses digitalisasi untuk mengembangkan marketplace para UMKM di Indonesia.

5. Mendorong Ekspor Produk Prioritas dalam Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

   Satgas Peningkatan Ekspor Nasional telah menetapkan sebanyak 14 produk prioritas yang dapat didorong dalam ekspor jangka pendek, yaitu HS 03 (Ikan dan Olahan Ikan), HS 04 (Sarang Burung Walet), HS 08 (Kelapa dan Kelapa Olahan), HS 09 (Kopi dan Rempah Olahan), HS 115 (Margarin), HS 19 dan 21 (Makanan Olahan), HS 23 (Bungkil dan Pakan Ternak), HS 25 (Semen), HS 15,28,29,33,34,38,29 (Produk Kimia), HS 71 (Logam Mulia dan

Perhiasan), HS 84 (Mesin-Mesin), HS 85 (Elektronik), HS 87 dan 89 (Otomotif, Sepeda, Kapal dan Bagiannya), dan HS 94 (*Furniture*).

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Perdagangan dialokasikan sebesar Rp1.853,3 miliar antara lain untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp322,7 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp1.531,0 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/ meningkatkan/mendukung/memperluas Fasilitasi Penguatan Rantai Nilai dan Tata Kelola untuk Mendukung Hilirisasi SDA dan Pengembangan Industri Nasional, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Fasilitasi Akses Pasar Domestik dan Ekspor bagi Produk Hilirisasi dan UMKM Berbasis SDA. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 17,41 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 antara lain PN 05 Hilirisasi SDA & pengembangan industri domestik. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain Peningkatan akses pasar bagi produk hasil hilirisasi, Dukungan terhadap pelaku usaha dan UMKM, Penurunan biaya logistik dan distribusi dan Kemudahan layanan perizinan dan tata niaga ekspor-impor

Dalam Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran Kementerian Perdagangan dialokasikan sebesar Rp1.400,4 miliar. Adapun Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Perdagangan terdiri dari tiga fokus program kerja, yaitu (1) Pengamanan Pasar Dalam Negeri melalui Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah, Optimalisasi Sarana Perdagangan, Peningkatan kebanggaan dan pemasaran produk dalam negeri, Peningkatan Pemberdayaan Konsumen, Peningkatan edukasi pelaku usaha dan pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan (2) Perluasan Pasar Ekspor, dalam rangka membuka akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui Penguatan Diplomasi Perdagangan, Penguatan dan pengembangan produk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi, dan produk ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi, dan Fasiltasi pelayanan ekspor dan impor yang terintegrasi, dan (3) Peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor, melalui Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor, Pemberdayaan UKM berorientasi ekspor, Integrasi informasi perdagangan internasional (*one stop service*), dan Optimalisasi pemanfaatan e-commerce dalam mendukung ekspor.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain mengatur bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain seperti menyusun kebijakan bidang pemuda dan olahraga, melaksanakan koordinasi lintas sektor baik bidang pemuda maupun olahraga, memberikan bantuan, fasilitasi dan pembinaan kepada masyarakat maupun lembaga kepemudaan dan keolahragaan dengan tujuan untuk meningkatkan IKU yang diampu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga *audited* sebesar Rp2.667,8 miliar. Anggaran tersebut antara lain untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor program kepemudaan dan program keolahragaan, yang selanjutnya menghasilkan kebijakan strategis yang selaras dengan pembangunan kepemudaan, peningkatan budaya olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk kegiatan dan program lain terkait kepemudaan dan keolahragaan yang tidak secara langsung mendukung prioritas nasional yang tertuang di RPJMN dan RKP, serta untuk dukungan manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD, pembentukan pusat latihan atlet elite nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain mendapatkan peluang untuk dilibatkan dalam koordinasi strategis di bidang pemuda dan olahraga, sehingga dapat berperan dalam penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kebijakan yang efektif tersebut dapat menghasilkan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat selaku penerima manfaat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti fasilitasi dan pembinaan, serta pemberian bantuan di bidang pemuda dan olahraga. Peningkatan prestasi olahraga juga merupakan dampak yang nyata dari fasilitasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain efisiensi anggaran pada tahun 2024, dimana banyak target dan alokasi program prioritas yang terpangkas dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain penguatan implementasi Koordinasi

Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan (termasuk penyusunan RAN dan RAD), DBON (termasuk pendampingan penyusuan DOD), Undang-Undang Keolahragaan, Penyusunan Renstra Kemenpora Tahun Anggaran 2025-2029 dan kebijakan lainnya.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan sebesar Rp2.330,4 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp281,8 miliar antara lain untuk memenuhi gaji pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dan belanja non operasional sebesar Rp2.048,6 miliar antara lain untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp1.721,2 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp609,2 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor program kepemudaan dan program keolahragaan, yang selanjutnya menghasilkan kebijakan strategis yang selaras dengan pembangunan kepemudaan, peningkatan budaya olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga.

Berikut beberapa kegiatan prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mendukung Indikator pada RPJMN dan RKP: Festival Komunitas Pemuda (*Youth Community Fest*), Pesta Prestasi, Wira Muda, *Collab Rangers*, *Sport Industry Summit*, Kejuaraan Tarkam, dan melanjutkan membangun Pusat Pelatihan Atlet Nasional, pengiriman kontingen pada *SEA Games* 2025, dan event lainnya, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk kegiatan dan program lain terkait kepemudaan dan keolahragaan yang tidak secara langsung mendukung prioritas nasional yang tertuang di RPJMN dan RKP, serta untuk dukungan manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD, pembentukan pusat latihan atlet *elite* nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi by event seperti yang ada selama ini. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain mendapatkan peluang untuk dilibatkan dalam koordinasi strategis di bidang pemuda dan olahraga, sehingga dapat berperan dalam penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kebijakan yang efektif tersebut dapat menghasilkan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat selaku penerima manfaat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti fasilitasi dan pembinaan, serta pemberian bantuan di bidang pemuda dan olahraga. Peningkatan prestasi olahraga juga merupakan dampak yang nyata dari fasilitasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp1.156,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 74,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan, revisi peraturan di bidang pemuda dan olahraga, fasilitasi dan pembinaan di bidang pemuda dan olahraga, pemberian bantuan sebagai stimulan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, serta indikator utama Kementerian Pemuda dan Olahraga lainnya, dan sebesar 26,0 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan

seperti kegiatan dan program lain terkait kepemudaan dan keolahragaan yang tidak secara langsung mendukung prioritas nasional yang tertuang di RPJMN dan RKP, serta untuk memenuhi dukungan manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain peresmian dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029, penyusunan peta jalan kepramukaan, penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional, penyempurnaan Indeks Pembangunan Olahraga dan Desain Besar Olahraga Nasional, serta kebijakan strategis lainnya.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain bidang pemuda akan berfokus pada Peningkatan Kualitas Hidup Pemuda di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Kesejahteraan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender dalam Mendukung Capaian IPP, Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor yang Strategis dan Berkelanjutan untuk Pelayanan Kepemudaan, dan Pengembangan Moralitas dan Karakter Pemuda yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila, serta bidang olahraga akan berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan praktik yang diadopsi oleh negara-negara dengan sistem politik sejahtera (*welfare state*), yang menempatkan pembangunan olahraga sebagai bagian integral dari strategi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Peningkatan kesejahteraan tersebut diaktualisasikan melalui peningkatan kualitas manusia, yang meliputi dimensi kesehatan dan kebugaran jasmani, pembentukan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, penguatan sikap sportivitas dan kedisiplinan, serta peningkatan prestasi. Sebagai instrumen pembangunan SDM, olahraga memiliki relevansi strategis dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengelolaan Sistem Keolahragaan Nasional secara baik dan benar menjadi elemen penting dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Dukungan dalam bidang olahraga tersebut diantaranya adalah Pengembangan Budaya Olahraga yang Inklusif bagi Seluruh Lapisan Masyarakat, Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional, dan Peningkatan Pertumbuhan Industri Olahraga yang Mampu Berkontribusi kepada Pertubumbuhan Ekonomi Nasional.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 (UU 19/2019) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002). KPK berperan sebagai trigger mechanism yang mendorong dan sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 19/2019 menjadi landasan legal KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Rencana Strategis KPK Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi KPK dilakukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional sebagaimana terdapat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta tujuan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Arah kebijakan pembangunan KPK secara umum mencakup arah kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pencegahan tindak pidana korupsi, pendidikan antikorupsi, dan penindakan tindak pidana korupsi, serta arah kebijakan yang ditujukan untuk penguatan tata kelola kelembagaan KPK untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK (*enabler*)

Dalam APBN tahun 2024, anggaran KPK *audited* dialokasikan sebesar Rp1.353,6 miliar yang dimanfaat untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional perkantoran dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. Untuk kinerja organisasi, KPK menetapkan empat Sasaran Strategis (SS) dengan delapan indikator pada Rencana Kerja (Renja). SS pertama, Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Antikorupsi. SS ini merupakan sasaran akhir dari Strategi Pendidikan Antikorupsi, di mana dengan pendidikan antikorupsi maka seluruh komponen bangsa dalam ranah publik (pejabat), privat (pelaku usaha), dan masyarakat (individu maupun kolektif) bersikap serta berperilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilannya diukur dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi Persepsi dan dimensi Pengalaman. IPAK memiliki rentang nilai 0-5, dimana nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. IPAK diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK), yang mana survei mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifkasi (*graft/gratuities*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), dan sembilan nilai antikorupsi.

Berdasarkan data yang ada, nilai IPAK sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil pengukuran BPS, nilai IPAK tahun 2024 adalah 3,85. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,92.

SS Kedua, Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi. SS ini merupakan sasaran akhir dari strategi Pencegahan korupsi, di mana melalui pencegahan korupsi

akan terwujud sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi. Dengan demikian, maka peluang untuk melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara akan tertutup bagi siapapun.

Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan dua indikator, yaitu Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dan dua persen Capaian Rencana Aksi Stranas PK. Survei Penilaian Integritas (SPI) mengukur tingkat/risiko korupsi di instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI fokus pada pemetaan risiko dan praktik korupsi serta efektivitas kegiatan antikorupsi. Output yang dihasilkan bukan hanya indeks namun juga rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD berdasarkan hasil empiris. Skor SPI bersumber dari kombinasi persepsi, pengalaman dan data objektif (faktor koreksi) para pemangku kepentingan K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Hasil survei berbentuk angka yang menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani kejadian tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut juga semakin baik. SPI melibatkan 642 instansi baik pada tingkat K/L, Pemda, BUMD, dan BUMN. Survei ini diikuti oleh lebih dari 770.000 responden. Pada tahun ini pula, KPK menggandeng 40 PTN dan satu PTKIN dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil SPI tahun 2024, skor SPI 2024 adalah 71,53 dari target 76.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK adalah mandat dari Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang bertujuan memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi. Stranas PK dipimpin oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari lima K/L, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Kepresidenan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Koordinator Timnas PK. Selanjutnya Timnas PK melaporkan pelaksanaan rencana aksi (Renaksi) Stranas PK kepada Presiden.

Pada periode Tahun 2023-2024, Timnas PK telah menetapkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi (PK) atau Aksi PK beserta 58 *output* Aksi PK. *Output-output* tersebut diturunkan menjadi target output dan untuk mencapainya dibutuhkan *milestone* (tahapan) untuk mencapai target *ouput*. Secara total terdapat 432 *milestone* yang dilaksanakan oleh 61 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 22 kabupaten/kota. Sebanyak 251 *milestone* berhasil meraih nilai kategori baik (80–100 persen) dan 192 diantaranya mencapai nilai sempurna 100 persen. Hingga periode B24 atau akhir tahun 2024, realisasi pelaksanaan aksi STRANAS PK adalah 81,78 persen dari target 75 persen.

SS Ketiga, Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan bagi siapa saja yang berniat melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan dua indikator yaitu: satu persen *sentencing rate* dan dua persen *asset recovery*. Definisi *sentencing* menurut *Black's Law Dictionary* adalah putusan hakim yang menyatakan bentuk hukuman bagi terdakwa untuk dilaksanakan. Putusan hakim sangat tergantung dari tuntutan yang diajukan baik pasal yang didakwakan, lamanya hukuman badan, serta denda dan/atau uang pengganti sesuai peraturan perundang-undangan. Akurasi tuntutan yang akan diukur terdiri dari elemen tuntutan yakni: (1) lamanya pidana penjara, (2) nilai denda, (3) nilai uang pengganti dan/atau rampasan yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK), atau tingkat banding (Pengadilan Tinggi), atau tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dalam satu tahun kinerja. Nilai persentase *sentencing rate* di tiap tingkat peradilan tahun 2024 sebagai

berikut: (1) tingkat pertama: 102,38 persen; (2) tingkat banding: 81,04 persen; dan (3) tingkat kasasi: 84,37 persen. Dari hasil perhitungan menggunakan formula yang ada, maka nilai akhir persentase *sentencing rate* 2024 sebesar 78,49 persen dari target 90 persen.

Asset recovery adalah proses pengembalian kekayaan negara yang kurang dan/atau hilang dan/atau uang hasil suap, termasuk hasil pengembangannya berdasarkan putusan pengadilan atas uang pengganti, denda, dan rampasan. Pengembalian kekayaan negara direalisasikan dalam bentuk PNBP yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda/hibah/alih fungsi pemanfaatan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, KPK telah melakukan berbagai upaya mengoptimalkan kegiatan sita eksekusi, lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP)/HIbah, dan penagihan uang pengganti, serta eksekusi uang rampasan.

Sampai dengan tahun 2024, nilai eksekusi yang dihasilkan sebesar Rp4.601,3 miliar sedangkan nilai piutang sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.168,0 miliar. Berdasarkan data tersebut dan menggunakan rumus di atas, maka realisasi persentase *asset recovery* tahun 2024 adalah 74,60 persen (dari target 70 persen) sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 106,57 persen. Dari total nilai *asset recovery* sebesar Rp4.601,3 miliar terdiri dari denda sebesar Rp173,3 miliar; uang pengganti sebesar Rp1.108,8 miliar; rampasan sebesar Rp2.162,1 miliar; dan PSP/hibah sebesar Rp1.157,0 miliar. Sedangkan untuk total nilai asset recovery tahun 2024 sebesar Rp739.6 miliar.

SS Keempat, Tercapaianya Tata Kelola Kelembagaan, Sasaran strategis ini merupakan pemenuhan asas akuntabilitas dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus juga konsekuensi dari penggunaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategis ini, KPK merumuskan tiga indikator yaitu: (1) Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK); (2) Persentase Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK); dan (3) Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK. Pada tahun 2024, KPK kembali memperoleh predikat WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023, sebagaimana disampaikan melalui Surat BPK No. 83/S/III/05/2024 pada tanggal 22 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2023. Nilai SAKIP KPK memperoleh predikat A (memuaskan). Sedangkan Nilai SPIP KPK pada tahun 2024 adalah 3,148 atau berada di tingkat 3 dengan predikat Terdefinisi.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran KPK dialokasikan sebesar Rp1.237,4 miliar yang dimanfaatkan untuk membiayai dua Program, yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi. Untuk kinerja organisasi, KPK menetapkan empat SS dengan lima indikator, yaitu: (1) Menguatnya Sikap dan Perilaku Masyarakat yang Anti Korupsi dengan indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (target 3,97); (2) Terwujudnya Integritas dan Pencegahan Korupsi pada Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Indeks Integritas Nasional (target 74,52) dan Capaian Rencana Aksi Stranas PK (target 35 persen); (3) Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan indikator Prosentase Asset Recovery (target 70 persen); dan (4) Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Kolaboratif, Transformatif, dan Berintegritas dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi KPK (target BB).

Tahun 2026 merupakan tahun kedua KPK menerapkan kebijakan anggaran pelaksanaan pembangunan jangka menengah KPK berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPK Tahun 2025-2029 (Renstra KPK 2025-2029) yang telah disusun dengan mengacu pada Perpres 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029). Dalam RPJMN 2025-2029 tersebut, KPK mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan.

Berdasarkan peninjauan terhadap arah kebijakan pada PN 7, KPK mendukung pelaksanaan tiga arah kebijakan dengan penjabaran intervensi sebagai berikut:

1. **Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang**, diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis; (b) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi; (c) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. **Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum**, diarahkan untuk mewujudkan lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel dilakukan melalui: (a) penguatan kelembagaan hukum; dan (b) penerapan dan penegakan hukum.
3. **Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara**, diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi yang difokuskan pada penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara.

Guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan nasional dan pencapaian sasaran strategis tersebut, anggaran KPK dialokasikan sebesar Rp1.581,9 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional perkantoran dan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari total anggaran tersebut, dialokasikan sebesar Rp55,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan amanat Prioritas Nasional yang diampu oleh KPK. KPK mengampu 15 (lima belas) rincian output prioritas nasional, sebagai berikut:

1. Dokumen Perancangan, Kajian, Konsep, Panduan Manajemen Risiko Kecurangan pada Layanan Pemerintah.
2. Pengembangan Digitalisasi dan AI-Machine Learning LHKPN.
3. Sistem Aplikasi Deteksi Kecurangan pada Layanan Strategis Pemerintah.
4. Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Kewajiban Indonesia untuk Aksesi Konvensi Anti-Suap OECD.
5. Kampanye (Digital dan Non Digital) Nilai Antikorupsi, Penyusunan Grand Design Tata Kelola ACLC KPK Tahun 2026-2029.
6. Pelatihan Integritas ASN dan APH, Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif.
7. Rekomendasi Kebijakan Integrasi Pencegahan Korupsi di K/L dan Stranas PK.
8. Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kegiatan Lobi.
9. Rekomendasi Kebijakan Korupsi Sektor Swasta.
10. Fasilitasi dan pembinaan implementasi pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar, menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti.
11. Monitoring Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi.
12. Layanan Penyidikan Perkara TPPU.
13. Penyusunan Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan Sistem Antikorupsi (Budaya, Antikorupsi, Pencegahan, Pemberantasan Tipikor dan *Asset Recovery*).

Adapun arah kebijakan dan strategi pada tahun 2027–2029, sejalan dengan Renstra KPK 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Peningkatan sistem integritas instansi pemerintah (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) melalui implementasi rencana aksi perbaikan integritas.
   b. Peningkatan sistem integritas pada penyelenggaraan pelayanan publik (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah).
   c. Peningkatan integritas ASN dan APH melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Penguatan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Peningkatan implementasi rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola pada sektor strategis pemerintahan.
   b. Pengelolaan, pemanfaatan, dan peningkatan akurasi pelaporan LHKPN untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
   c. Pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
   d. Peningkatan pencegahan korupsi pada badan usaha pada sektor usaha prioritas.
   e. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.
   f. Penguatan kelembagaan dan efektivitas implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Nasional.

3. Peningkatan Efektivitas dan Akurasi Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Pengembangan dan pembinaan jaringan kerjasama kelembagaan untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
   b. Mendorong pemenuhan persyaratan aksesi Indonesia ke dalam keanggotaan OECD Bidang Anti Korupsi.
   c. Peningkatan Integritas Pendidikan
   d. Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:
   e. Penguatan kebijakan Pendidikan Antikorupsi.
   f. Integrasi Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.
   g. Pembangunan ekosistem pendidikan berintegritas.
   h. Pemberdayaan jejaring Pendidikan Antikorupsi.
   i. Monitoring dan Evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi berbasis elektronik pada setiap jenjang pendidikan.
   j. Pengembangan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk setiap jenjang pendidikan.

4. Penguatan Nilai Antikorupsi Masyarakat

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
   b. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi antikorupsi dan integritas yang berdampak dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan media digital.
   c. Modernisasi pengembangan kompetensi antikorupsi dan integritas.

d. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi.
e. Konsolidasi strategi peningkatan nilai antikorupsi berbasis data dan segmentasi prioritas.

5. Penguatan Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Mendorong pengungkapan kasus (case building) melalui investigasi yang modern seperti hasil analisis big data, artificial intelligence (AI), dan sumber data/informasi terkait lainnya.
   b. Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terintegrasi.
   c. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.
   d. Peningkatan kualitas penuntutan tindak pidana korupsi.
   e. Optimalisasi penyelamatan nilai aset obyek tindak pidana korupsi.
   f. Optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui koordinasi dan/atau supervisi.
   g. Optimalisasi pemanfaatan data LHKPN untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
   h. Optimalisasi hasil pemeriksaan gratifikasi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Peningkatan Efektivitas dan Akurasi Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Pemanfaatan big data dan pusat data analitik untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
   b. Optimalisasi analisis potensi korupsi dan kerugian negara berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
   c. Pengembangan dan pembinaan jaringan kerjasama kelembagaan untuk penindakan tindak pidana korupsi.

7. Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Optimalisasi penggunaan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akurasi pemeriksaan LHKPN.
   b. Mengintegrasikan data KPK dan penggunaan artificial intelligence (AI) dalam Analisis Pusat Data KPK.
   c. Pembangunan sistem deteksi kecurangan pada layanan strategis pemerintahan.
   d. Percepatan transformasi digital dan satu data KPK.

8. Tata Kelola Kelembagaan KPK yang Akuntabel, Kolaboratif, Transformatif dan Berintegritas

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan, kinerja, tata kelola aset, pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan kearsipan.
   b. Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, manajemen kinerja, dan manajemen risiko organisasi.
   c. Transformasi budaya kerja dan sistem kerja yang adaptif dan kolaboratif.
   d. Percepatan penerapan manajemen talenta ASN KPK.
   e. Upskilling dan reskilling kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis human capital development plan.
   f. Penyelenggaraan layanan hukum yang andal.
   g. Pemenuhan layanan internal yang berkualitas.
   h. Penguatan sistem pengendalian internal organisasi.

9. Memperkuat Kepercayaan Publik dan Reputasi KPK

   Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Menjaga citra positif KPK melalui pemberitaan dan efektivitas publikasi.
   b. Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (BA 095)

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan November 2001 telah melahirkan lembaga negara baru yaitu bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ide pembentukan DPD RI dalam kerangka sistem parlemen Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan tujuan tersebut diharapkan proses yang terjadi di lembaga perwakilan dapat diselenggarakan dengan sistem *double check* yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR RI sebagai *political representation* dan DPD RI sebagai *regional representation*.

Anggota DPD RI sebagai wakil daerah yang berjumlah empat orang yang terpilih dari setiap provinsi memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili dan mengafirmasi kepentingan daerah dalam wilayah NKRI, mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E UUD 1945, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kelembagaan DPD RI terus mengalami evolusi dan perkembangan dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan (4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

DPD RI mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi Legislasi, yaitu mengajukan dan membahas RUU tertentu dengan DPR; (2) Fungsi Pertimbangan, yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembuatan undang-undang tertentu; (3) Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR; dan (4) Fungsi Perwakilan, yaitu mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional dalam rangka memperkuat sistem *checks and balances*.

Fungsi DPD RI tersebut dilakukan oleh Anggota DPD RI dalam Alat Kelengkapan yang terdiri atas 12 Alat Kelengkapan yang bersifat tetap yakni Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerjasama Parlemen, Badan Urusan Legislasi Daerah serta satu Alat Kelengkapan yang bersifat *ad hoc*, yaitu Panitia Khusus, maupun secara perseorangan yang dilaksanakan dalam format menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI maka dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberi dukungan teknik administratif dan keahlian, mencakup organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota negara dan kantor Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai kesekretariatan lembaga negara antara lain mengatur urusan pemerintah di bidang pelayanan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi, keahlian dan pengelolaan kantor DPD RI di ibukota provinsi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) menyelenggarakan dukungan administratif; Memberikan dukungan dalam hal administrasi seperti perencanaan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, keprotokolan lembaga, penyiapan dukungan kegiatan sidang dan rapat-rapat, tata kelola kearsipan dan risalah, pengelolaan dan pemberian informasi kegiatan DPD RI, penyiapan dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana serta penyiapan materi bagi pimpinan dalam rangka konsultasi dan koordinasi antar lembaga; (2) menyelenggarakan dukungan keahlian; Memberikan dukungan keahlian berupa penyusunan kajian dan analisis dalam rangka usul Prolegnas, penyusunan dokumen naskah akademik dan draf RUU, perancangan draf RUU, pemberian dukungan keahlian pada saat sidang atau rapat pembahasan di DPD RI dan DPR RI, serta pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI; (3) menyelenggarakan dukungan pengelolaan kantor DPD RI di ibukota provinsi; dan (4) memberikan dukungan dalam hal administrasi dan opersional di kantor DPD RI di ibukota provinsi berupa perencanaan program dan anggaran, tata kelola kearsipan dan risalah, dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana di kantor DPD RI di ibukota provinsi serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, instansi Pemerintah yang bersifat vertikal dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Umum dengan uraian fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan utama, yaitu: (1) perumusan dan evaluasi rencana strategis; merumuskan dan mengevaluasi rencana strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; (2) koordinasi dan pembinaan; koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; (3) dukungan persidangan; merumuskan kebijakan,

melakukan pembinaan, serta melaksanakan dukungan persidangan yang dibutuhkan oleh DPD RI; (4) dukungan administrasi; merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, dan melaksanakan dukungan administrasi kepada DPD RI, termasuk dukungan administratif dan keahlian di daerah pemilihan; (5) pengawasan internal; perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas kinerja; (6) pelaporan; bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan DPD RI; serta (7) fungsi lain; melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh DPD RI.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Sekretariat Jenderal DPD RI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain seperti kebijakan pendukung, berupa: (1) struktur organisasi, yaitu menetapkan susunan organisasi sekretariat Jenderal DPD RI, termasuk jabatan Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektorat; (2) tugas dan fungsi, yaitu mengatur tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam Sekretariat Jenderal, serta pembentukan unit kerja seperti Biro dan Bagian; (3) pengangkatan dan pemberhentian, yaitu mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal oleh Presiden atas usul Pimpinan DPD, serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya oleh Sekretaris Jenderal; (4) pendanaan, yaitu menegaskan bahwa seluruh biaya operasional Sekretariat Jenderal DPD RI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (5) Staf Khusus, yaitu mengatur pengangkatan Staf Khusus Pimpinan DPD RI, termasuk jumlah, penanggung jawab, masa jabatan, dan hak keuangan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran DPD RI *audited* sebesar Rp1.198,2 miliar yang dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja non operasional termasuk dana hibah yang diterima Sekretariat Jenderal DPD RI dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembangunan gedung kantor DPD RI Provinsi Jatim serta ABT untuk kegiatan yang bersifat penting dan mendesak.

Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Lembaga DPD RI yang diarahkan untuk kegiatan: (1) pengelolaan kesekretariatan pimpinan DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan pengembangan kerja sama DPD; (3) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI; (4) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah; (5) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum; (6) pengelolaan keuangan keanggotaan DPD dan operasional persidangan dan rapat-rapat; (7) penatausahaan organisasi dan tata laksana, keanggotaan, pengembangan SDM, dan advokasi hukum; (8) perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI; (9) pengelolaan sistem teknologi informasi, risalah dan dokumentasi; (10) penyelenggaraan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan media; (11) penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana DPD RI; dan (12) penyelenggaraan pengawasan internal.

Terkait dengan materi/produk legislasi yang ditargetkan DPD RI pada Tahun 2024 sebanyak 35 materi/produk legislasi, DPD RI dapat merealisasikan 38 materi/produk legislasi yang merupakan output strategis DPD RI antara lain menyelesaikan RUU Usul Inisiatif DPD RI, yaitu: (1) RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (3) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; (4) RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah; dan (5) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemberian Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul dari DPR dan Pemerintah, Hasil Pertimbangan, dan melakukan Pengawasan atas pelaksanaan UU Tertentu sesuai kewenangan DPD, dan menyelesaikan materi Prolegnas Usul DPD RI untuk Tahun 2025, serta menyelesaikan tugas dan fungsi DPD

lainnya seperti melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda serta Pemantauan dan Peninjauan UU, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PRODUK LEGISLASI	JUMLAH OUTPUT STRATEGIS RUU/MATERI	
		TARGET	REALISASI
1.	RUU Usul Inisiatif	5 RUU	5 RUU
2.	Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan atas RUU	9 RUU	13 RUU
3.	Hasil Pertimbangan DPD RI atas Anggaran	1 MATERI	1 MATERI
4.	Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Tertentu	19 UU	18 UU
5.	Prolegnas Usul DPD Tahun 2025	1 MATERI	1 MATERI
JUMLAH PRODUK LEGISLASI		**35 RUU/UU/MATERI**	**38 RUU/UU/MATERI**

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Lembaga, antara lain:

1. Penyampaian Aspirasi Daerah; DPD RI menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah pusat dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Melalui fungsi legislasi, DPD RI dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta isu-isu lain yang relevan dengan kepentingan daerah. DPD RI juga dapat memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU yang diajukan oleh DPR dan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan daerah serta pertimbangan atas RUU APBN dan RUU Pajak, Pendidikan dan Agama;
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan; DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, serta tidak merugikan masyarakat. Hasil pengawasan DPD RI dapat menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah tindak lanjut;
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dengan menyuarakan aspirasi daerah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan, DPD RI diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Melalui fungsi legislasi, DPD RI dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat;
4. Penguatan Hubungan Pusat-Daerah; DPD RI berperan penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui fungsi- fungsi yang dimilikinya, DPD RI dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, diharapkan hubungan pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal;
5. Peningkatan Partisipasi Publik; DPD RI juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan daerah. Melalui berbagai forum konsultasi dan pertemuan dengan masyarakat, DPD RI dapat menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan. Partisipasi publik yang lebih luas diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran DPD RI dialokasikan sebesar Rp1.303,7 miliar yang dimanfaatkan untuk belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai dan barang operasional

dan Belanja Barang seperti: (1) pengelolaan kesekretariatan pimpinan DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan pengembangan kerja sama DPD; (3) penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD, dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI; (4) pengkajian aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran daerah; (5) perancangan perundang-undangan dan pengkajian kebijakan hukum; (6) pengelolaan keuangan keanggotaan DPD dan operasional persidangan dan rapat-rapat; (7) penatausahaan organisasi dan tata laksana, keanggotaan, pengembangan sdm, dan advokasi hukum; (8) perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI; (9) pengelolaan sistem teknologi informasi, risalah dan dokumentasi; (10) penyelenggaraan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan media; (11) penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana DPD RI; dan (12) penyelenggaraan pengawasan internal.

Outlook DPD RI tahun 2025 sebesar Rp1.300,2 miliar dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan: (1) penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI; (2) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia; dan (3) pengelolaan sistem dan teknologi. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas Lembaga diarahkan untuk: (1) penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI; (3) pemasyarakatan produk hukum; (4) pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI; (5) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia; (6) pengelolaan perencanaan dan keuangan; (7) pengelolaan keuangan keanggotaan DPD, operasional dan rapat-rapat; (8) pengelolaan sistem dan teknologi; (9) pengelolaan komunikasi dan informasi; (10) pengelolaan layanan umum, sarana dan prasarana di kantor pusat; (11) pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan; dan (12) pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal.

Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Lembaga antara lain:

1. Penyampaian Aspirasi Daerah; DPD RI menjadi jembatan antara daerah dan pemerintah pusat dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Melalui fungsi legislasi, DPD RI dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta isu-isu lain yang relevan dengan kepentingan daerah. DPD RI juga dapat memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU yang diajukan oleh DPR dan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan daerah serta pertimbangan atas RUU APBN dan RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan; DPD RI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, serta tidak merugikan masyarakat. Hasil pengawasan DPD RI dapat menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah tindak lanjut.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dengan menyuarakan aspirasi daerah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan, DPD RI diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Melalui fungsi legislasi, DPD RI dapat mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat.
4. Penguatan Hubungan Pusat-Daerah; DPD RI berperan penting dalam menjaga hubungan

yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui fungsi- fungsi yang dimilikinya, DPD RI dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, diharapkan hubungan pusat dan daerah dapat berjalan lebih baik, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal.

5. Peningkatan Partisipasi Publik; DPD RI juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan daerah. Melalui berbagai forum konsultasi dan pertemuan dengan masyarakat, DPD RI dapat menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan. Partisipasi publik yang lebih luas diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran DPR RI dialokasikan sebesar Rp1.800,0 miliar yang dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (1) penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI; (3) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia; dan (4) pengelolaan sistem dan teknologi, serta untuk mendukung Prioritas Lembaga, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI; (3) pemasyarakatan produk hukum; (4) pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI; (5) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia; (6) pengelolaan perencanaan dan keuangan; (7) pengelolaan keuangan keanggotaan DPD, operasional dan rapat-rapat; (8) pengelolaan sistem dan teknologi; (9) pengelolaan komunikasi dan informasi; (10) pengelolaan layanan umum, sarana dan prasarana di kantor pusat; (11) pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan; dan (12) pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas legislasi melalui: (1) meningkatkan kualitas RUU inisiatif DPD RI berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA); (2) Meningkatkan kualitas Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Usul Pemerintah dan DPR berdasarkan ASMASDA; (3) meningkatkan kualitas Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN berdasarkan ASMASDA; dan (4) meningkatkan kualitas Pertimbangan DPD RI atasu RUU Pajak, Pendidikan dan Agama berdasarkan ASMASDA
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, melalui: (1) meningkatkan kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA; (2) meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA; dan (3) meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
3. Mewujudkan tata kelola DPD RI yang efektif melalui peningkatan capaian Reformasi Birokrasi yang optimal.

Proyeksi kebijakan strategis DPD RI pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis DPD RI 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan kualitas legislasi melalui: (1) meningkatkan kualitas RUU inisiatif DPD RI berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah (ASMASDA); (2) meningkatkan kualitas Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Usul Pemerintah dan DPR berdasarkan ASMASDA; (2) meningkatkan kualitas Pertimbangan DPD RI atas RUU APBN berdasarkan ASMASDA; dan (3) Meningkatkan kualitas Pertimbangan DPD RI atasu RUU Pajak, Pendidikan dan Agama berdasarkan ASMASDA
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, melalui: (1) meningkatkan kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA; (2) meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan

UU sesuai ASMASDA; dan (3) meningkatkan kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

3. Mewujudkan tata kelola DPD RI yang efektif melalui peningkatan capaian Reformasi Birokrasi yang optimal melalui kegiatan antara lain; (1) penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI; (2) penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI; (3) pemasyarakatan produk hukum; (4) pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI; (5) pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia; (6) pengelolaan perencanaan dan keuangan; (7) Pengelolaan keuangan keanggotaan DPD, operasional dan rapat-rapat; (8) pengelolaan sistem dan teknologi; (9) pengelolaan komunikasi dan informasi; (10) pengelolaan layanan umum, sarana dan prasarana di kantor pusat; (11) pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan; dan (11) pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal.

KOMISI YUDISIAL RI
(BA 100)

Komisi Yudisial lahir berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan dasar tersebut selanjutnya diturunkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (3) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (4) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain wewenang dan tugas di atas, Komisi Yudisial memiliki wewenang lain, diantaranya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim.

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia diorientasikan untuk membangun sistem *check* and *balances* dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam memperoleh calon Hakim Agung dan calon hakim ad hoc yang akan diusulkan kepada DPR RI, serta meningkatkan kapasitas para hakim dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Komisi Yudisial *audited* dialokasikan sebesar Rp165,7 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan belanja non operasional miliar antara lain untuk belanja modal sarana dan prasarana, sistem informasi pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Advokasi Preventif, Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu, dan Pengukuran Indeks Integritas Hakim, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk rekrutmen CHA dan Hakim Ad Hoc di MA, Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas, Pemantauan Persidangan & Penyelenggaraan Peradilan, Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung, Pelatihan dan Pengembangan SDM, Monitoring dan Pengawasan Kinerja dan Anggaran, serta pelaksanaan RUU Komisi Yudisial. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Pengukuran Indeks Integritas Hakim, dan tidak terdapat kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain berdampak positif terutama untuk para masyarakat pencari keadilan, dengan adanya pelatihan kepada hakim, maka

akan menambah kemampuan hakim dalam memutus perkara serta dengan adanya pengukuran terhadap integritas hakim, maka dapat dijadikan acuan dalam perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integritas hakim. Selain itu terdapat kegiatan seleksi hakim agung yang handal untuk menghasilkan hakim yang profesional. Dalam proses penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaaran KEPPH memastikan masyarakat dapat kepastian hukum.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Komisi Yudisial dialokasikan sebesar Rp184,5 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan belanja non operasional antara lain untuk belanja modal sarana dan prasarana, sistem informasi pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi. *Outlook* Komisi Yudisial tahun anggaran 2025 sebesar Rp178,9 miliar yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim, Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial, Pungukuran Integritas Hakim, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Peningkatan Kualitas Pengawasan Hakim, Pelaksanaan Pemantauan Persidangan, Penanganan Penyelesaian Advokasi Hakim antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan regulasi prioritas Komisi Yudisial, integrasi sistem informasi dan pengamanan data, serta penguatan peran penghubung Komisi Yudisial.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain tetap mendorong penguatan RUU Komisi Yudisial, memperkuat peran dan sinergitas KY – MA dalam bidang pengawasan hakim, serta kerjasama dengan stakeholders terkait.. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim, Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial, Pungukuran Integritas Hakim dan tidak ada kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain berdampak positif terutama untuk para masyarakat pencari keadilan, dengan adanya pelatihan kepada hakim, maka akan menambah kemampuan hakim dalam memutus perkara serta dengan adanya pengukuran terhadap integritas hakim, maka dapat dijadikan acuan dalam perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integritas hakim. Selain itu terdapat kegiatan seleksi hakim agung yang handal untuk menghasilkan hakim yang profesional. Dalam proses penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaaran KEPPH memastikan masyarakat dapat kepastian hukum.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Komisi Yudisial dialokasikan sebesar Rp195,3 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 12,18 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan, Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim, Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial, Pengukuran Indeks Integritas Hakim, Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan Hakim untuk Kemudahan Akses Publik yang Transparan dan Akuntabel, Pengukuran Indeks Integritas Hakim, dan sebesar 24,63 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, berdasarkan kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun

2026 antara lain Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Peningkatan Kualitas Pengawasan Hakim, Pelaksanaan Pemantauan Persidangan, Penanganan Penyelesaian Advokasi Hakim antara lain melalui beberapa kegiatan seperti penguatan regulasi prioritas Komisi Yudisial, integrasi sistem informasi dan pengamanan data, serta penguatan peran penghubung Komisi Yudisial.

Proyeksi kebijakan strategis Komisi Yudisial pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis K/L, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan Penyelundupan, dengan melaksanakan kegiatan antara lain: (1) Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan; (2) penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim; (3) rekomendasi hasil kajian penguatan kelembagaan Komisi Yudisial; (4) pengukuran indeks integritas hakim; (5) peningkatan kualitas layanan pengawasan hakim untuk kemudahan akses publik yang transparan dan akuntabel; (6) rekomendasi tindaklanjut penguatan kelembagaan penghubung Komisi Yudisial.; (7) pembentukan penghubung Komisi Yudisial; dan (8) pembangunan gedung Komisi Yudisial.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
(BA 103)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan Lembaga pemerintah non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara khususnya dalam aspek perlindungan terhadap masyarakat dari risiko dan dampak bencana. Dalam menjalankan tugas tersebut, BNPB juga menjalankan fungsi strategis salah satunya adalah perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BNPB juga menjalankan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu, serta fungsi koordinasi dan pelaksana dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana *audited* terealisasi sebesar Rp4.916,1 miliar terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional yang bersumber dari rupiah murni sebanyak 24 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp4.447 miliar dan untuk mendukung Prioritas Lainnya sebanyak 87 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp469,0 miliar.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 diantaranya melalui kegiatan penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana, sistem informasi bidang kebencanaan, fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat menuju desa tangguh bencana, penyediaan rambu, papan evakuasi dan informasi bencana, penguatan sistem peringatan dini, bantuan kebencanaan melalui dana siap pakai untuk kegiatan dukungan kaji cepat, pencarian pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, penyediaan hunian dan dukungan operasi udara, layanan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, layanan pemulihan dan peningkatan bidang fisik, sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan di daerah pasca bencana, pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana di daerah, pembangunan sarana dan prasarana pusdalops regional dan revitalisasi pendukung pusdalops pusat, pengelolaan layanan komunikasi kebencanaan, serta simulasi penanggulangan bencana.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain dapat membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya yang berada di wilayah rawan bencana sehingga dapat mengurangi/mencegah jatuhnya korban jiwa, dan kerugian harta benda. Upaya penanggulangan bencana mencakup kegiatan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi, dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana dan terpadu.

Kendala dan tantangan dalam upaya penanggulangan bencana secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat atas pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana khususnya bagi yang belum merasakan dampak bencana;
2. Tingginya intensitas kejadian bencana (alam dan non alam) dan ketidakpastian situasi yang dihadapi (kondisi geografis wilayah dan perubahan iklim), serta potensi eskalasi dampak yang

harus ditangani pada saat keadaan darurat bencana, sehingga berdampak pada tuntutan dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan responsif
3. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan kebijakan dan manajemen penanganan darurat bencana pada tingkat daerah.
4. Keterlambatan penerbitan *No Objection Letter* (NOL) atas kegiatan yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri;
5. Pergantian Kepala Daerah maupun kepala OPD/BPBD, sehingga komitmen untuk penyusunan strategi/rencana penanggulangan bencana belum optimal;
6. Kondisi peralatan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah saat ini sebagian besar telah menurun kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan peremajaan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan efektivitas respon bencana, sehingga perlu dilakukan upaya peremajaan untuk mendukung respon bencana yang optimal;
7. Kurangnya komitmen daerah dalam mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk peralatan yang telah dihibahkan ke daerah;
8. Belum optimalnya manajemen risiko sebagai bentuk pengendalian internal;
9. Masih terdapatnya kesenjangan regulasi, yang mana BNPB telah mengidentifikasi beberapa dokumen perencanaan serta regulasi di tingkat nasional yang patut menjadi perhatian. Kebutuhan regulasi pada RPJMN 2025-2029 mengamanahkan revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Untuk mengakomodir perubahan ini, revisi juga diperlukan pada peraturan turunan, seperti PP Nomor 21 tahun 2008, PP Nomor 22 Tahun 2008, dan PP Nomor 23 Tahun 2008. Lebih lanjut, usulan penyusunan Peraturan Presiden tentang *Multi-Hazard Early Warning System* (MHEWS) juga perlu dipertimbangkan.

Upaya mendorong peningkatan kinerja penanggulangan bencana dalam menghadapi tantangan ke depan yaitu;

1. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan mitra internasional untuk mencapai target kinerja BNPB dan mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan kapasitas personil penanggulangan bencana baik pusat maupun daerah;
3. Penguatan tata kelola dalam penyaluran Dana Siap Pakai agar penanganan darurat bencana lebih profesional, transparan, dan akuntabel;
4. Penguatan komitmen dan peran aktif unit kerja di lingkungan BNPB dalam menyelenggarakan manajemen risiko;
5. Percepatan dan koordinasi yang intens dengan *World Bank* dalam pelaksanaan kegiatan IDRIP serta monitoring dan evaluasi bersama agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan;
6. Koordinasi dan pendampingan teknis lebih intens dengan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
7. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses digitalisasi tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana;
8. Monitoring dan evaluasi progress perencanaan serta capaian dari seluruh program agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
9. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan penggunaan produk dalam negeri dan mengoptimalkan penggunaan e-katalog.

Dalam APBN 2025, pagu BNPB sebesar Rp1.427,6 miliar terdiri dari Program Ketahanan Bencana dan program Dukungan Manajemen. Dari alokasi pagu tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional untuk 27 kegiatan dan prioritas lainnya untuk mendukung 142 kegiatan. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mencapai tujuan strategis dalam mengurangi risiko, memperkuat ketangguhan, serta mempercepat pemulihan

wilayah dan masyarakat terdampak, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia serta percepatan transformasi digital, diantaranya penguatan sistem informasi kebencanaan dan integrasi data spasial berbasis risiko.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau lainnya yang masih berlanjut di tahun 2026 diusulkan sebagai usulan tambahan anggaran, diantaranya Rekomendasi Kebijakan Penilaian Indeks Risiko bencana dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana, Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana, Penyaluran Dana Siap Pakai, Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Daerah Pascabencana, Pemenuhan Kebutuhan Peralatan PB dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana melalui edukasi, pelatihan, dan pembangunan sistem peringatan dini, mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda akibat bencana, mempercepat proses pemulihan daerah terdampak bencana.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran BNPB dialokasikan sebesar Rp491,0 miliar untuk belanja operasional layanan perkantoran yang meliputi belanja untuk gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor, serta belanja Non Operasional yang terdiri dari alokasi untuk Dana Siap Pakai penanggulangan tanggap darurat bencana dan alokasi non operasional dari sumber dana PNBP.

Arah kebijakan BNPB Tahun 2025-2029 juga harus selaras dengan seluruh arahan kebijakan nasional untuk mendukung sistem dan tata kelola penanggulangan bencana nasional, meliputi Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, Rancangan Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi di atas, pada periode tahun 2025-2029 BNPB akan menjalankan tujuh program yang terdiri dari:

1. Program Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana;
2. Program Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana;
3. Program Manajemen Penanganan Darurat Bencana;
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
5. Program Logistik dan Peralatan;
6. Program Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Tata Kelola (Dukungan Manajemen);
7. Program Pengawasan (Dukungan Manajemen).

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BA 104)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain mengatur bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta Peraturan Presiden Nomor 166 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan, serta pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan suburusan Kementerian di daerah. Adapun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia, penyeleggaraan pelayanan penempatan, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dan pemerintah negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna dan keluarganya, pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BP2MI. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, KP2MI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KP2MI antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KP2MI, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KP2MI, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KP2MI, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Adapun untuk mendukung tugas dan fungsi BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai standar, perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi, biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia serta proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran KP2MI/BP2MI *audited* dialokasikan sebesar Rp500,7 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp270,1 miliar antara lain untuk belanja gaji, tunjangan dan operasional dan belanja non operasional sebesar Rp264,7 miliar antara lain untuk pelayanan penempatan, pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp79,9 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp184,7 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/

memperluas orientasi pra pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah, pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia non pemerintah, pelayanan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sarana dan prasarana pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sistem informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan dukungan administrasi pelayanan publik yang mendukung penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. *Outlook* anggaran KP2MI/BP2MI tahun 2025 sebesar Rp463,6 miliar. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain orientasi pra pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah, pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia non pemerintah, pelayanan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya dan tidak ada kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain kemudahan akses informasi peluang kerja luar negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, akses pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan akses pelatihan kewirausahaan serta pembiayaan wirausaha bagi Purna Pekerja Migran Indonesia dan akses pelayanan publik lainnya dalam rangka mendukung penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu ke hilir. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain kondisi geopolitik dan stabilitas perekonomian global yang menekan jumlah permintaan Pekerja Migran Indonesia khususnya pada skema pemerintah sehingga terdapat potensi ancaman tidak tercapainya target kinerja dan penyerapan anggaran. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia, pembebasan bea masuk barang kiriman Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penguatan pencegahan penempatan non prosedural Pekerja Migran Indonesia, penguatan promosi penempatan dan upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja melalui pembentukan Komunitas Relawan dan Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran KP2MI/BP2MI dialokasikan sebesar Rp494,6 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp298,6 miliar antara lain untuk belanja gaji, tunjangan dan operasional dan belanja non operasional sebesar Rp195,9 miliar antara lain untuk penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sarana dan prasarana pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sistem informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan dukungan administrasi pelayanan publik yang mendukung penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp81,3 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp114,6 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas orientasi pra pemberangkatan (OPP) Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah, pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia non pemerintah, pelayanan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia, pelayanan kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah penempatan Pemerintah, pelayanan kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia, pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas

lainnya diarahkan untuk penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sarana dan prasarana pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan sistem informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan dukungan administrasi pelayanan publik yang mendukung penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain orientasi pra pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah, pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia non pemerintah, pelayanan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Pelayanan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya dan tidak ada kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain kemudahan akses informasi peluang kerja luar negeri bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, akses pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan akses pelatihan kewirausahaan serta pembiayaan wirausaha bagi Purna Pekerja Migran Indonesia dan akses pelayanan publik lainnya dalam rangka mendukung penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari hulu ke hilir.

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran KP2MI/BP2MI dialokasikan sebesar Rp546,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp51,9 miliar atau 9,5 persen dari anggaran dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Layanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Pekerja Migran Indonesia Penempatan oleh Pemerintah, Layanan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia, Layanan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia, Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dari Penempatan Pemerintah, Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah, dan sebesar Rp494,4 miliar atau 90,5 persen dari anggaran untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti belanja operasional (belanja pegawai dan operasional perkantoran), layanan penyiapan dan layanan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia skema Pemerintah, Edukasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman, Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia, Pelayanan Publik Lainnya dalam rangka mendukung penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan bahasa dan kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pembentukan Atase Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan layanan pengaduan permasalahan pekerja Migran Indonesia melalui Tim Reaksi Cepat penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia, dan kemudahan akses pembiayaan dan literasi keuangtan bagi Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga.

Proyeksi kebijakan strategis KP2MI/BP2MI pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis KP2MI/BP2MI antara lain Jumlah Kerja Sama Internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil (terkait kesepakatannya) dan proporsi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum (terkait persentasenya).

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, LKPP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu.

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, LKPP juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LKPP, antara lain seperti: (1) Meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ; (2) Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan; dan (3) Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola internal LKPP.

Selama periode RPJMN 2020-2024, perkembangan anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Pada tahun 2024, anggaran LKPP *audited* dialokasikan sebesar Rp219,4 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 14,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: 1) Peningkatan Jumlah Produk yang Masuk E-catalogue; 2) Sistem e-purchasing Terintegrasi; 3) Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi; 4) Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi; 5) SPSE Terpusat; dan 6) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3). Kendala/tantangan yang ditemukan, antara lain belum adanya kebijakan terkait pembayaran pada katalog elektronik; masih terdapat beberapa K/L/Pemda yang masih belum menggunakan *service-service* dari SPSE terpusat, kurangnya komitmen dari beberapa LPSE untuk mengimplementasi aplikasi SPSE Terpusat. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain menyusun kebijakan terkait pembayaran pada katalog elektronik; mendorong K/L/Pemda untuk mengimplementasikan aplikasi SPSE Terpusat dan meningkatkan penggunaan *service-service* dari SPSE Terpusat.

Pada tahun 2025, anggaran LKPP dialokasikan sebesar Rp166,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 5,6 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain

melalui beberapa kegiatan seperti : (1) Penguatan kompetensi SDM PBJ; (2) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3); (3) Pengembangan Rancangan Peraturan tentang PBJ Berkelanjutan; (4) Peningkatan jumlah produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah; (5) Pembinaan K/L/Pemda untuk menerapkan produk ramah lingkungan/berkelanjutan dalam PBJ; (6) Peningkatan kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional; (7) Peningkatan jumlah penyedia UMK yang *on-boarding* di Sistem Pengadaan Digital; (8) Peningkatan jumlah pelaku UMK yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam PBJ; (9) Peningkatan jumlah desa yang memiliki nilai maturitas/tata kelola pengadaan yang baik; (10) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi; (11) Peningkatan jumlah K/L/Pemda yang terbangun kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan; dan (12) Peningkatan jumlah peserta pelatihan anti korupsi PBJ.

Untuk APBN tahun 2026, anggaran LKPP dialokasikan sebesar Rp216,3 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 14,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional melalui beberapa kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional seperti: : (1) Penguatan kompetensi SDM PBJ; (2) Penguatan UKPBJ untuk Mencapai Maturitas (Level 3); (3) Pengembangan Rancangan Peraturan tentang PBJ Berkelanjutan; (4) Peningkatan jumlah produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah; (5) Pembinaan K/L/Pemda untuk menerapkan produk ramah lingkungan/berkelanjutan dalam PBJ; (6) Peningkatan kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional; (7) Peningkatan jumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional; (8) Peningkatan jumlah penyedia UMK yang *on-boarding* di Sistem Pengadaan Digital; (9) Peningkatan jumlah pelaku UMK yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas usaha dalam PBJ; (10) Peningkatan jumlah desa yang memiliki nilai maturitas/tata kelola pengadaan yang baik; (11) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi; (12) Peningkatan jumlah K/L/Pemda yang terbangun kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan; (13) Peningkatan jumlah peserta pelatihan anti korupsi PBJ; dan (14) Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait prinsip bisnis berintegritas.

Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain: (1) Penguatan transformasi tata kelola pengadaan, (2) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai implementasi dari UU PBJ Publik; (3) Peningkatan komitmen K/L/Pemda untuk membelanjakan anggaran pengadaan semaksimal mungkin untuk produk dalam negeri dan produk UMK; (4) Pembinaan stakeholder untuk pencegahan korupsi pengadaan; serta (5) Pembinaan desa untuk memenuhi maturitas tata kelola pengadaan.

Proyeksi kebijakan strategis K/L pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 yang mendukung beberapa kebijakan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 5 agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain (1) Peningkatan jumlah produk UMK dan produk berkelanjutan dalam PBJ, serta penerapannya melalui belanja pengadaan; (2) Peningkatan jumlah desa yang memenuhi maturitas tata kelola pengadaan level 2; (3) Peningkatan kinerja pengadaan; (4) Peningkatan peran pelaku usaha dalam negeri untuk terlibat langsung dalam pengadaan internasional; serta (5) Terbentuknya kapabilitas pencegahan korupsi dalam pengadaan.

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BA 107)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, antara lain seperti pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan, dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *audited* dialokasikan sebesar Rp1.863,1 miliar terdiri dari belanja operasional, antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor dan belanja non operasional, antara lain untuk penyelenggaraan Operasi SAR, pembinaan tenaga SAR, dan pembinaan potensi SAR. Dari alokasi anggaran yang ada telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pelaksanaan Operasi SAR dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi SAR, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan kapsitas tim urban SAR, Sertifikasi ARO (*Aeronautica Radio Operator*), pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, pembinaan, pelatihan, latihan dan siaga SAR. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93,9 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 6,1 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain penyelenggaraan Operasi SAR, pemeliharaan sarana dan prasarana SAR, sistem komunikasi SAR, dan teknlogi informasi SAR dan kontrak tahun jamak antara lain tidak terdapat kegiatan tersebut. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain tersedianya layanan SAR di seluruh wilayah NKRI dan pemberdayaan masyarakat di bidang SAR. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain keterbatasan anggaran, wilayah kerja yang luas dan medan yang sulit tidak dibarengi dengan pemenuhan peralatan dan SDM dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain menghasilkan sumber pembiayaan lainnya selain RM yaitu PNBP dari kegiatan yang berupa pelatihan SAR dan kesiapsiagaan SAR pada bidang pariwisata dan keselamatan transportasi.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dialokasikan sebesar Rp1.497,6 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp799,5 miliar antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor dan belanja non operasional sebesar Rp698,1 miliar, antara lain untuk penyelenggaraan Operasi SAR, pembinaan tenaga SAR, dan pembinaan potensi SAR. Dari

alokasi anggaran yang ada dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pelaksanaan Operasi SAR dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi SAR, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan kapasitas tim urban SAR dan latihan SAR. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen (40), Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain penyelenggaraan Operasi SAR, pemeliharaan sarana dan prasarana SAR, sistem komunikasi SAR, dan teknlogi informasi SAR dan kontrak tahun jamak antara lain tidak terdapat kegiatan tersebut. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain tersedianya layanan SAR di seluruh wilayah NKRI.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp1.409,7 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 37,7 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pelaksanaan Operasi SAR dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi SAR, dan sebesar 3,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti latihan dan siaga SAR dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan SAR. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain melaksanakan efisiensi anggaran dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain persentase keberhasilan evakuasi korban Pencarian dan Pertolongan mencapai 98 persen, Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan mencapai 60,9 persen dan ketersediaan SDM Pencarian dan Pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020 mencapai 24.808 orang).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
(BA 108)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
6. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
8. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha *audited* dialokasikan sebesar Rp127,2 miliar terdiri dari belanja operasional, antara lain untuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan kantor dan belanja non operasional, antara lain untuk program pengawasan persaingan usaha dan program dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya yang masuk dalam Program Dukungan Manajemen. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Program Pengawasan Persaingan Usaha, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Program Dukungan Manajemen. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 49,64 persen dibandingkan dengan total pagu 2024, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 50,35 persen (bersumber dari PNBP) dibandingkan dengan total pagu 2024. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 bukan merupakan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Indeks Persaingan Usaha (IPU) merupakan indikator yang menunjukkan kinerja persaingan usaha secara nasional untuk menilai tingkat intensitas persaingan usaha di Indonesia, baik tingkat nasional maupun daerah. Selain menjadi salah satu indikator kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya, pengukuran indeks ini memiliki peran penting dalam memberikan gambaran terkait peningkatan daya saing, produktivitas, dan efisiensi sektor ekonomi di Indonesia. Nilai IPU tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,04 menjadi 4,95 poin naik dari besaran indeks 4,91 di tahun 2023. Nilai IPU berperan penting dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana dicanangkan pemerintah, hanya dapat tercapai melalui peningkatan nyata dalam kualitas persaingan usaha nasional. Namun, untuk mendorong pertumbuhan tersebut,

diperlukan loncatan nilai IPU sebesar 29 persen, dari 4,95 poin saat ini ke angka 6,33 poin.
2. Pengawasan kemitraan KPPU mendorong perbaikan pengelolaan kebun plasma seluas 25.692 hektar oleh beberapa perusahaan. Perubahan ini meningkatkan hasil panen dan pendapatan 12.499 kepala keluarga (sekitar 48.668 jiwa). Selain itu, plasma juga mendapatkan pengembalian lahan seluas 101 hektar dari perusahaan inti.
3. KPPU berhasil memastikan mitra pengemudi dari dua aplikator besar memperoleh hak yang lebih setara, termasuk lebih dari 4.000 mitra yang sebelumnya diputus kemitraannya mendapatkan kembali sisa saldo senilai Rp500 juta.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain:

1. Terbatasnya waktu dan sumber daya untuk menyusun peraturan turunan dari pengesahan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang KPPU yang disahkan pada tanggal 10 September 2024.
2. Perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) belum dialokasikan dalam pembiayaan kegiatan sehingga nomenklatur teknis KPPU masih disebutkan Program Pengawasan Persaingan Usaha;
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk memperluas cakupan wilayah survei ini menjadi kendala belum optimalnya capaian realisasi Indeks Persaingan Usaha belum memenuhi target (realisasi 4.95 dari target 5.00 pada 2024);
4. Pelaksanaan layanan publik belum 100 persen dialihkan ke layanan digital sehingga *stakeholder* KPPU yang terdapat di 38 provinsi belum memiliki pemahaman yang sama.

Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
2. Pengusulan perubahan nomenklatur dan penambahan anggaran untuk perluasan tugas dan fungsi KPPU sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) sehingga nomenklatur menjadi Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan.
3. Pelaksanaan survei IPU sebagai kontribusi mencapai target Indeks Persaingan Usaha yang merupakan agenda Prioritas Nasional untuk menjadi agenda Prioritas Presiden;
4. Pembaruan peraturan KPPU/Peraturan Ketua:
    a. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2024-2029
    b. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan
    c. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pengawas Persaingan Usaha
    d. Peraturan Komisi KPPU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
    e. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dialokasikan sebesar Rp105,4 miliar terdiri dari belanja operasional, antara lain untuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan kantor dan belanja non operasional, antara lain untuk program pengawasan persaingan usaha dan program dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya yang masuk dalam

Program Dukungan Manajemen. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Program Pengawasan Persaingan Usaha, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Program Dukungan Manajemen. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 71,33 persen dibandingkan dengan total pagu 2025, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 28,67 persen (bersumber dari PNBP) dibandingkan dengan total pagu 2025. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 bukan merupakan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Penegakan hukum persaingan usaha melalui Putusan KPPU yaitu perkara *Google Play Billing* System dengan total denda sebesar Rp202,5 miliar, yang menunjukkan perhatian serius KPPU terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan di sektor digital. KPPU juga menjatuhkan denda sebesar Rp12 miliar terkait pelanggaran Tender yang melibatkan PDAM di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini menjadi cerminan pengawasan efektif terhadap sektor pengadaan barang dan jasa publik.
2. KPPU telah menangani berbagai laporan dan melakukan 10 penyelidikan kemitraan, mayoritas terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit dan transportasi daring. Dari kegiatan tersebut, terlihat dampak nyata berupa perbaikan struktur kemitraan dan peningkatan kebermanfaatan bagi mitra binaan.
3. KPPU menerima dan melakukan penilaian atas 63 notifikasi transaksi merger dan akuisisi, dengan total nilai transaksi yang dilaporkan mencapai Rp244,05 triliun. Sebagian besar merupakan pengambilalihan saham, terutama di sektor transportasi-logistik, energi dan pertambangan, teknologi dan telekomunikasi, properti, dan perbankan dan keuangan. Peningkatan jumlah notifikasi mencerminkan semakin tingginya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Dominasi aksi korporasi ini ada pada korporasi lokal dengan lokal, sebanyak 28 aksi.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran KPPU dialokasikan sebesar Rp163,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 49,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan, dan sebesar 6,7 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Program Dukungan Manajemen. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026, KPPU mendukung Prioritas Nasional (PN-05): Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Program Prioritas (PP-05): Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global, untuk mencapai Kegiatan Prioritas (KP-08): Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, Proyek Prioritas (ProP-04): Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat.

Proyeksi kebijakan strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap mendukung Prioritas Nasional (PN-05).

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia antara lain mengatur bahwa Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) mempunyai tugas: a) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f) membangun jaringan kerja; g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Ombudsman menyelenggarakan fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Ombudsman diberikan kewenangan: a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b) memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c) meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d) melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; e) menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f) membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g) demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi. Selain wewenang sebagaimana dimaksud, Ombudsman berwenang: a) menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan b)menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Ombudsman *audited* dialokasikan sebesar Rp234,5 miliar, terdiri dari belanja operasional, antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Operasional Perkantoran dan belanja non operasional, antara lain untuk Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung penguatan transformasi pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui beberapa kegiatan seperti: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti: (i) Laporan Pengawasan Eksternal Melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri; (ii) Akses

Pengaduan Pelayanan Publik; (iii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (iv) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (v) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (vi) Lembaga yang Didampingi Dalam Optimalisasi SP4N-LAPOR! terkait External Complaint Handling (vii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (viii) Survei Indeks Persepsi Maladministrasi; (ix) Opini Pengawasan Pelayanan Publik; (x) Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xi) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xiii) Dukungan Manajemen. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 12,42 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang Diselesaikan; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan; (iii) Survei Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat; (iv) Survei Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan; (v) Laporan Pengawasan Eksternal Melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri; (vi) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (vii) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (viii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (x) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xi) Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI; (xii) Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat; (xiii) Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi; dan (xiv) Dukungan Manajemen. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah K/L/D yang patuh dalam pemenuhan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (kepatuhan tinggi), terselesaikannya permasalahan pelayanan publik terkait maladministrasi yang dialami masyarakat, adanya perbaikan kebijakan pelayanan publik melalui saran Ombudsman, dan adanya penyelematan kerugian publik baik materiil maupun imateriil melalui pengawasan Ombudsman. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya anggaran non operasional yang merupakan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi Ombudsman dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan penajaman belanja barang (operasional, perjalanan dinas, paket meeting, dan honor).

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Ombudsman dialokasikan sebesar Rp255,6 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp198,5 miliar antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Operasional Perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp57,1 miliar antara lain untuk Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Program Dukungan Manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" dan Prioritas Nasional 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru" dengan beberapa kegiatan seperti: (i)

Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; (iii) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (iv) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (v) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; (vi) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan seperti: (i) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (ii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (iii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (iv) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (v) Laporan Pengawasan Tata Kelola SP4N-LAPOR!; (vi) Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan; (vii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (viii) Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; (ix) Aduan terkait Kinerja Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang Diselesaikan; (x) Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan; (xi) Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu terkait Pencegahan Maladministrasi; dan (xii) Dukungan Manajemen. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 13,42 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; (iii) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; (iv) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden; (v) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; (vi) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah; (vii) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (viii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (ix) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (x) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik; (xi) Laporan Pengawasan Tata Kelola SP4N-LAPOR!; (xii) Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan; (xiii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (xiv) Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; (xv) Aduan terkait Kinerja Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang Diselesaikan; (xvi) Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan; (xvii) Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu terkait Pencegahan Maladministrasi; dan (xviii) Dukungan Manajemen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pemahaman dan partisipasi pengguna layanan publik melalui penguatan sistem pengawasan pelayanan publik, terselesaikannya permasalahan pelayanan publik terkait maladministrasi yang dialami masyarakat, adanya perbaikan kebijakan pelayanan publik melalui saran Ombudsman, dan adanya penyelematan kerugian publik baik materiil maupun imateriil melalui pengawasan Ombudsman.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Ombudsman dialokasikan sebesar Rp252,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14,5 persen untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (i) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; (ii) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; (iii) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik;

(iv) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden; (v) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan (vi) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, dan sebesar 85,5 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui kegiatan: (i) Akses Pengaduan Pelayanan Publik; (ii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat; (iii) Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan; (iv) Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Bersifat Tematik dan Selektif Khusus Program Prioritas Presiden; (v) Laporan Pengawasan Tata Kelola SP4N-LAPOR!; (vi) Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan; (vii) Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan; (viii) Manajemen Pengetahuan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; (ix) Aduan Terkait Kinerja Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang Diselesaikan; (x) Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan; (xi) Unit Kerja yang Dilakukan Penjaminan Mutu Terkait Pencegahan Maladministrasi; dan (xii) Dukungan Manajemen. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain dalam rangka mendukung Prioritas Nasional 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru"; Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan"; Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pengguna layanan publik; Meningkatkan kualitas instansi pelayanan publik; serta Penguatan sistem pengawasan pelayanan publik. Selain itu Ombudsman juga mendukung Asta Cita Program Prioritas Presiden melalui pengawasan pelayanan publik pada sektro strategis, yaitu: Pengawasan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengawasan penyelenggaraan program Investasi dan Hilirisasi Nasional; Pengawasan penyelenggaraan penyediaan dan produksi pangan; Pengawasan penyelenggaraan penerapan Energi Baru Terbarukan; Pengawasan penyelenggaraan program sekolah rakyat dan sekolah unggul terintegrasi; Pengawasan penyelenggaraan pada sektor hukum dan peradilan; Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, diantaranya jaminan sosial dan bantuan sosial; serta Pengawasan penyelenggaraan implementasi Koperasi Merah Putih.

Proyeksi kebijakan strategis Ombudsman pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia antara lain dalam rangka mendukung Prioritas Nasional 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru"; Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan"; Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pengguna layanan publik; Meningkatkan kualitas instansi pelayanan publik; serta Penguatan sistem pengawasan pelayanan publik. Selain itu Ombudsman juga mendukung Asta Cita Program Prioritas Presiden melalui pengawasan pelayanan publik pada sektor strategis, yaitu: Pengawasan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengawasan penyelenggaraan program Investasi dan Hilirisasi Nasional; Pengawasan penyelenggaraan penyediaan dan produksi pangan; Pengawasan penyelenggaraan penerapan Energi Baru Terbarukan; Pengawasan penyelenggaraan program sekolah rakyat dan sekolah unggul terintegrasi; Pengawasan penyelenggaraan pada sektor hukum dan peradilan; Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, diantaranya jaminan sosial dan bantuan sosial; serta Pengawasan penyelenggaraan implementasi Koperasi Merah Putih. Seluruh kegiatan Ombudsman yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 direncanakan akan tetap berlanjut selama periode 2027-2029.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BA 111)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain mengatur bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dan dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri, dimana pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain seperti: (1) penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (2) pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (3) pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; (4) inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; (5) penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; (6) penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; serta (7) pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana induk (Renduk) dan rencana aksi (Renaksi) pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Renduk Pengelolaan BWN-KP merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP. Renduk Pengelolaan BWN-KP selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga anggota BNPP.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan *audited* sebesar Rp231,6 miliar, terdiri dari belanja operasional lain untuk Belanja Pegawai dan Pelaksanaan dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 13 Pos Lintas Batas Negara dan belanja non operasional, antara lain untuk: (1) Identifikasi Pilar/Patok dan Sarpras batas negara wilayah darat; (2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT; (3) Indentifikasi Pilar Titik Referensi (TR) dan Pemeliharaan/Kalibrasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; (4) Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (5) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Major Project di PKSN Paloh Aruk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat; (6) Penyusunan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau; (7) Pemutakhiran Data Perhitungan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas (IPKP Kecamatan Lokpri) di Kawasan Perbatasan; (8) Pelatihan penanggulangan stunting dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan; (9) Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara; (10) Fasilitasi Penyusunan Lokasi Prioritas Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029; dan (11) Koordinasi Pengendalian dan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakordalrenbangtas) Tahun 2024. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) memperkuat pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara; (2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga perbatasan negara; (3) mendukung percepatan penurunan angka prevalansi stunting pada masyarakat di kawasan perbatasan; dan (4) mendukung pembangunan di enam Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk: (1) mendukung pertahanan keamanan melalui Identifikasi Pilar/Patok dan Sarpras batas negara wilayah darat, Indentifikasi Pilar Titik Referensi (TR) dan Pemeliharaan/Kalibrasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; (2) mendukung pembangungan di 18 PKSN melalui Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (3) mendukung pemenuhan layanan sosial dasar melalui Pemutakhiran Data Perhitungan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas (IPKP Kecamatan Lokpri) di Kawasan Perbatasan; (4) menyediakan data jaringan jalan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau; (5) meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara; dan (6) memperkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengendalian dan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Rakordalrenbangtas). Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 98,01 persen. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang tanda batas wilayah negara serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga perbatasan negara, dan mengedukasi masyarakat tentang deteksi dini pada 1000 hari pertama kehidupan melalui peran Camat dan Tenaga Kesehatan untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalansi *stunting* pada masyarakat di kawasan perbatasan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain adanya kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas termasuk paket meeting di akhir tahun anggaran 2024 menyebabkan belanja pendukung kegiatan meeting tidak bisa terserap dan membuat satuan kerja dan unit kerja kesulitan dalam mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan, terutama untuk pekerjaan kontraktual. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi akhir tahun anggaran, dan meningkatkan kualitas belanja yang efisien, efektif dan produktif.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dialokasikan sebesar Rp267,1 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp183,2 miliar antara lain untuk Belanja Pegawai dan Pelaksanaan dukungan operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 15 Pos Lintas Batas Negara dan belanja non operasional sebesar Rp83,9 miliar antara lain untuk: (1) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum

Batas Wilayah Laut di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Hankam di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; (3) Identifikasi Sarana Prasarana Pendukung Pertahanan Udara; (4) Penyusunan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) di 22 PKSN; (5) Penyusunan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) Bidang Konektivitas, Aksesibilitas, Energi Kawasan Perbatasan; (6) Pemutakhiran Data dan Perhitungan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di Kawasan Perbatasan; (7) Pelaksanaan Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan; dan (8) Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) Bidang Infrastruktur Pemerintahan di 11 Kecamatan Perbatasan Prioritas (3 Kabupaten). Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp2,92 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp80,96 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) Memperkuat Keamanan dan Ketertiban Perlintasan Jalur Tidak Resmi di Kawasan Perbatasan Negara; (2) Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara; (3) Meningkatkan Pemahaman Kepada Masyarakat Pesisir Tentang Batas Laut/ Batas Maritim dan Keterampilan Alat Navigasi; dan (4) Meningkatkan Sinergitas Pengelolaan Jalur Perlintasan Tradisional dan Jalur Tidak Resmi. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk: (1) Mendukung Pertahanan Keamanan Melalui Identifikasi Pilar/Patok dan Sarana Prasarana Batas Negara Wilayah Darat, serta Identifikasi Pilar Titik Referensi (TR) dan Pemeliharaan/Kalibrasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; (2) Mendukung Pembangunan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) melalui Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan; (3) Mendukung Pemenuhan Layanan Sosial Dasar melalui Pemutakhiran Data Perhitungan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) di Kawasan Perbatasan; (4) Menyediakan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau; (5) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara; dan (6) Memperkuat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengendalian dan Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 1,09 persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas lainnya antara lain: (1) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Pesisir tentang Batas Laut/Batas Maritim dan Keterampilan dalam Menggunakan Alat Navigasi; (2) Masyarakat dapat Berperan serta dalam Pengawasan Aktivitas Lintas Batas Negara di Jalur Tradisional dan Jalur Tidak Resmi; dan (3) Masyarakat Mendapatkan Pengetahuan dan Wawasan tentang Tanda Batas Wilayah Negara serta Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Menjaga Perbatasan Negara.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp469,6 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,58 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui: (1) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut; (2) Fasilitasi dan Koordinasi Camat dalam Peningkatan Tata kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan; dan (3) Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara, dan sebesar 99,42 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) Pelaksanaan Dukungan Operasional Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pendukung di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN); (2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Darat; (3) Fasilitasi Penanganan Dampak Pasca

Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat; (4) Identifikasi Patok/Pilar dan Sarana Prasarana Batas Negara Wilayah Darat; (5) Pemberdayaan Masyarakat Desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara; (6) Koordinasi pra teknis perundingan batas maritim; (7) Koordinasi pembangunan pos pengamanan dan sarana prasarana pendukung di PPKT; (8) Identifikasi Pilar Titik Referensi (PTR) sebagai Pilar Pendekat Titik Dasar (TD) batas negara wilayah laut; (9) Analisa potensi aktivitas lintas batas negara pada kawasan pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G); (10) Identifikasi kebutuhan sarana prasarana pelayanan lintas batas negara pada pos lintas batas tradisional; (11) Identifikasi pembangunan PLBN gelombang 3; (12) Peningkatan sinergitas pengelolaan jalur perlintasan tradisional dan jalur tidak resmi; (13) Pengukuran kinerja Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP-PPKP) pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Darat dan Laut; (14) Perencanaan penataan ruang pada kawasan hasil perundingan antar negara; (15) Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; (16) Peningkatan kapasitas aparatur bidang penataan ruang kawasan perbatasan negara; (17) Penyusunan data jaringan infrastruktur fisik kawasan perbatasan di Provinsi Papua Barat Daya; (18) Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP-KPP) Bidang Konektivitas, Aksesibilitas dan Energi; (19) Fasilitasi dan koordinasi percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan negara bersama sektor terkait; (20) Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP-KPP) di kawasan perbatasan; (21) Identifikasi tata kelola sarana prasarana pemerintahan kecamatan dan desa terintegrasi di kawasan perbatasan; dan (22) Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (1) Mewujudkan penyelesaian, penetapan dan penegasan batas wilayah negara, memperkuat sistem pertahanan batas wilayah negara serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di perbatasan negara; (2) Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; (3) Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia berdasarkan penataan ruang kawasan perbatasan; dan (4) Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan antara lain: (1) Mewujudkan penyelesaian, penetapan dan penegasan batas wilayah negara, memperkuat sistem pertahanan batas wilayah negara serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di perbatasan negara; (2) Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; (3) Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia berdasarkan penataan ruang kawasan perbatasan; dan (4) Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BA 112)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengatur bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam/BP Batam) mempunyai tugas fungsi memaksimalkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang bidang lainnya. Tugas-tugas BP Batam ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2011 yaitu melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2021 jo Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam memiliki wewenang menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB); dan menetapkan jenis dan jumlah Barang Konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran BP Batam *audited* dialokasikan sebesar Rp2.647,4 miliar, terdiri dari belanja operasional dan belanja non operasional antara lain untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung program kegiatan Prioritas Nasional dan pengembangan di KPBPB Batam. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp827,7 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp2.235,7 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk pengembangan sarana prasarana infrastruktur KPBPB Batam diantaranya pada sektor peningkatan konektivitas jalan, penyediaan air bersih dan jaringan pipa distribusi air, serta pengembangan infrastruktur pelabuhan laut dalam rangka mendukung peningkatan investasi di Kota Batam, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk kegiatan pengembangan fasilitas infrastruktur kawasan, pemeliharaan aset-aset BP Batam serta mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 16,32 persen, dan Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan RMP sebesar 3,32 persen, dan bersumber dari PNBP, Non Rupiah Murni selain PLN dan RMP sebesar 80,36 persen. Kegiatan Prioritas Nasional yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun jamak yaitu Revitalisasi Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil, sedangkan kegiatan Prioritas lainnya antara lain Pembangunan Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang *Eco-City*, Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung Banun dan Pembangunan Gudang Logistik. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya antara lain pemerataan pengembangan infrastruktur di beberapa wilayah, pengembangan jalan koridor utama yang menghubungkan pelabuhan, bandara, kawasan industri dan pariwisata menjadi lancar, ketersediaan air bersih yang mencukupi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Batam yang lebih tinggi dari capaian nasional yaitu mencapai 6,69 persen. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain penyerapan anggaran belum optimal dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak cukup sehingga menyebabkan adanya luncuran kegiatan ke tahun berikutnya, penyelesaian kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih terkendala

di lapangan dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk investasi yang merupakan sumber terbesar dari penerimaan PNBP BP Batam untuk mendanai berbagai program dan kegiatan.

Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain peningkatan kualitas perencanaan serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk kegiatan prioritas yang memberikan *output* dan dampak langsung pada peningkatan layanan kepada investor dan masyarakat, serta mengurangi kegiatan pertemuan di luar kantor yang tidak esensial.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran BP Batam dialokasikan sebesar Rp1.992,7 miliar, terdiri dari belanja operasional untuk mendanai belanja gaji dan tunjangan, langganan daya dan jasa, serta operasional layanan perkantoran lainnya dan belanja non operasional antara lain untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung program kegiatan Prioritas Nasional, pengembangan infrastruktur kawasan serta untuk mendukung kegiatan pelayanan dan perijinan. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur jalan yang merupakan sarana mobilitas arus masuk dan keluar barang yang menghubungkan bandara, pelabuhan, kawasan wisata dan kawasan industri, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional Rempang *Eco-City*, pengembangan konektivitas jalan, penyediaan infrastruktur air bersih, pengembangan sarana prasarana pelabuhan, fasilitas wisata, pemeliharaan aset-aset BP Batam serta kegiatan pelayanan perijinan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan RMP sebesar 0,71 persen, dan dan bersumber dari PNBP, Non Rupiah Murni selain PLN dan RMP sebesar 99,29 persen. Kegiatan Prioritas Nasional yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun jamak antara lain Peningkatan Jalan Gajah Mada (*Landing Point Fly Over* - Simpang Laluan Madani) dan Peningkatan Jalan R Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning), sedangkan kegiatan Prioritas lainnya yang berlanjut ke tahun 2026 antara lain Peningkatan Jalan R. Suprapto (Ruas Dam Mukakuning), Peningkatan Jalan Kartini (Ruas Temiang - Simpang Marina City), serta pembangunan fasum dan fasos Tanjung Banun. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya antara lain penyediaan fasilitas investasi yang mudah diakses oleh investor, kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan industri yang tercukupi, mobilitas arus masuk dan keluar dari dan ke Kawasan Industri menjadi semakin baik sehingga dapat menurunkan biaya logistik, layanan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi cepat dan mudah sehingga akan semakin banyak investor yang menjalankan usahanya di Batam dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang akan menyebabkan peningkatan taraf kesejahteraan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp2.527,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 5,1 persen dialokasikan untuk mendukung penyelesaian kegiatan Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Peningkatan Jalan Gajah Mada (*Landing Point Fly Over* - Simpang Laluan Madani) dan Peningkatan Jalan R Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning), dan sebesar 94,89 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pengembangan infrastruktur kawasan, pemeliharaan aset-aset, serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan perijinan usaha kepada pelaku usaha. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, seiring dengan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam pelaksanaan birokrasi dan layanan perijinan kepada investor dan masyarakat, mendukung kegiatan/ *output* yang bersifat strategis serta berdampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam,

memfokuskan pada percepatan penyelesaian pembangunan proyek tahun jamak dan kegiatan yang direncanakan selesai pada tahun 2026, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja strategis/prioritas serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Mengacu pada arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 13 Maret 2025 dan 22 Mei 2025 di Istana Negara Jakarta agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian, hingga kesejahteraan masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal tersebut sejalan dengan upaya Batam dalam meningkatkan realisasi investasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Batam hingga 10 persen pada tahun 2029. Adapun arahan Bapak Presiden RI kepada BP Batam adalah sebagai berikut:

1. Jadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi;
2. Optimalisasi sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Melakukan penyelarasan terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi;
4. Mempercepat simplifikasi perizinan yang transparan dan akuntabel;
5. Selesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif;
6. Mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Rempang dengan tetap menjaga iklim investasi;
7. Kembangkan Batam menjadi kota yang indah, nyaman dan menarik bagi penduduk serta pekerja; dan
8. Pengelolaan investasi Batam bisa memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Proyeksi kebijakan strategis BP Batam pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis BP Batam antara lain yaitu:

1. Meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan melalui rencana strategis sebagai berikut:
    a. Peningkatan investasi swasta dalam 6 (enam) sektor prioritas: Hub Logistik Internasional. Kedirgantaraan, *Light and Valuable*, Digital dan Kreatif, Perdagangan Internasional dan *Finance Center*, dan Integrated *Health Tourism*;
    b. Pengembangan kawasan strategis prioritas di Batam dalam kerangka wilayah penataan dan pengembangan (WPP);
    c. Upaya penurunan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing; dan
    d. Peningkatan pemanfaatan aset menuju penerimaan yang optimal dalam rangka mendukung pendanaan tugas pengelolaan KPBPB Batam.
2. Meningkatkan kinerja organisasi BP Batam sebagai Lembaga yang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB yang berkualitas, akuntabel dan efisien melalui rencana strategis sebagai berikut:
    a. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta peningkatan pelayanan dari segi kemudahan dan kecepatan; dan
    b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pendukung investasi.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
(BA 113)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah mengamanatkan BNPT untuk menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme serta menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis. BNPT berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden dalam menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Selain itu, BNPT memiliki fungsi menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dalam menjalankan fungsinya, BNPT bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum; mengoordinasikan program pemulihan korban; serta merumuskan dan melaksanakan kerja sama internasional di bidang penanggulangan terorisme.

Dalam APBN Tahun 2024, realisasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme *audited* sebesar Rp456,2 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor dan belanja non operasional sebesar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; bidang penindakan dan pembinaan kemampuan; bidang kerja sama internasional; dan dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Pemberdayaan Masyarakat melalui Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) dan Kesiapsiagaan Nasional dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan peran dan sinergi antar lembaga dalam kontra radikalisasi, penanganan *foreign terrorist fighter*, dan partisipasi aktif BNPT serta perlindungan WNI dari ancaman terorisme di luar negeri. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain keterbatasan struktur organisasi di daerah sehingga menghambat pelaksanaan program pencegahan berbasis kewilayahan dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain BNPT telah mengajukan usulan penyesuaian struktur organisasi sebagai tindak lanjut atas amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dialokasikan sebesar Rp626,4 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp101,7 miliar antara lain untuk pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran dan pemeliharaan kantor dan belanja non operasional sebesar Rp524,7 miliar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dalam penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; bidang penindakan dan pembinaan kemampuan; bidang kerja sama internasional; dan dukungan manajemen serta pembangunan gedung pusat kesiapsiagaan nasional. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp26,8 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp69,8 miliar.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan peran dan sinergi antar lembaga dalam kontra radikalisasi, penanganan *foreign terrorist fighter*, dan partisipasi aktif BNPT serta perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.

Dalam APBN tahun 2026, sesuai hasil penelaahan final RKA-K/L TA 2026 *pasca* penetapan Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, anggaran BNPT dialokasikan sebesar Rp1.719,7 miliar. Pagu tersebut terdiri dari Program Penanggulangan Terorisme sebesar Rp1.435,0 miliar yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp1.431,2 miliar dan belanja dukungan operasional sebesar Rp3,8 miliar. Selain itu, Program Dukungan Manajemen dialokasikan sebesar Rp284,7 miliar, yang mencakup belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp100,8 miliar, belanja barang operasional dan pemeliharaan sebesar Rp61,9 miliar, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp120,6 miliar, dan belanja dukungan operasional sebesar Rp1,2 miliar.

Kebijakan strategis yang dialokasikan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan; Sasaran Wilayah Pelibatan Sektor Terpadu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme; Deradikalisasi Luar Lapas; Kegiatan Kontra Radikalisasi; Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional; Analisis dan Pengendalian Krisis; *Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism*, secara kelembagaan BNPT sedang mengajukan perubahan struktur organisasi tata kelola (SOTK) dimana BNPT akan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di beberapa wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan aksi cepat tanggap BNPT dalam melaksanakan penanggulangan terorisme. Atas kebijakan tersebut, hanya kegiatan *Countering Terrorism And Preventing Violent Extremism* yang dapat dilaksanakan.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam rangka mewujudkan visi BNPT "Masyarakat dan Negara yang Aman dari Ancaman Terorisme Untuk Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang merupakan landasan utama dalam menyukseskan transformasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu "Menuju Indonesia Emas 2025".

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BA 115)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain mengatur bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Pemilu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Pemilu. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum antara lain seperti Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu; pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum *audited* dialokasikan sebesar Rp15.689,7 miliar terdiri dari belanja operasional miliar antara lain untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai, Keperluan Kantor, Sewa, Jasa Profesi, Pemeliharaan Gedung, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan belanja non operasional antara lain untuk Belanja Kegiatan, Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri dan Belanja Modal lainnya. Dari anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar dan Prioritas lainnya . Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu; Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan; Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga *Ad Hoc*; Pengawasan Masa Kampanye Pemilu; Pengawasan Masa Tenang; Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara; Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu; Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Pengawasan Logistik. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 87,24 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN, yaitu HLDN sebesar 41,00 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif dan kontrak tahun jamak antara lain (tidak ada). Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat diberikan kesempatan untuk menjadi kader pengawas pemilu partisipatif atau lebih dikenal sebagai pemantau pemilu. Kendala/

tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain banyak daerah yang tidak ditemukan kasus perkara Pemilu sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang outputnya berupa perkara dan terdapat penambahan satuan kerja baru di pertengahan tahun maupun menjelang akhir tahun sehingga penganggaran tidak terserap optimal dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain mengidentifikasi kegiatan dan satuan yang lebih cocok dan layak untuk dijadikan realisasi output, yang akan diakomodir dalam penyusunan Renstra dan Renja selanjutnya.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dialokasikan sebesar Rp2.416,9 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp987,8 miliar antara lain untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai, Keperluan Kantor, Sewa, Jasa Profesi, Pemeliharaan Gedung, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan belanja non operasional sebesar Rp575,1 miliar antara lain untuk Belanja Kegiatan, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp40,1 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp25,6 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta keberlanjutan program pusat pendidikan pengawas pemilu partisipatif, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu; Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi; Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan; Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 1,7 persen dan Non Rupiah Murni yang berasal dari HLDN sebesar 17,3 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu dan kontrak tahun jamak antara lain (tidak ada). Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat diberikan kesempatan untuk menjadi kader pengawas pemilu partisipatif atau lebih dikenal sebagai pemantau pemilu, menjaga akurasi data pemilih dengan kondisi mobilisasi yang dinamis, mengembangkan sistem informasi pengawasan pemilu untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang berbasis teknologi sistem informasi.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Bawaslu dialokasikan sebesar Rp2.472,9 miliar yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional. Kegiatan yang menjadi Prioritas Bawaslu di Tahun 2026 antara lain adalah Penguatan Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilu sebagai Penyelenggara Pemilu, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Pengawas Pemilu, Sosialisasi Rencana Strategis Bawaslu 2025-2029 Bersama Mitra Kerja Bawaslu, dan Evaluasi Peraturan Bawaslu dalam rangka Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum antara lain Pusat Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)", dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pangarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu "Penguatan Lembaga Demokrasi" diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu "Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil" diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebiiakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan pengratan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pcmilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 "Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan" pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General.*

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu "Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu" diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan meldui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih

dalam pemilu dan (2) pelayanan ldentitas Kependudukan Digital bagi pcnduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dengan sasaran utama "Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia."

   Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

   a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

      Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel.
      Target KP:

Baseline	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

   b. PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

      Indikator KP2 : Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.
      Target KP:

Baseline	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

2. PN7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama "Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani." Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

   PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

   a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

      Indikator KP3 : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
      Target KP:

Baseline	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

   b. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

      Indikator KP4 : Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan.

Target KP:

Baseline	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, Bawaslu menjalankan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis):**
   a. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
   b. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
   c. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.
2. **Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu**

   Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, merujuk pada kegiatan tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, kegiatan strategis nasional 2027-2029 Bawaslu pada masa tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilu 2029 adalah sebagai berikut:

   a. Perencanaan, Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
   b. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
   c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga *Ad-Hoc*
   d. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
   e. Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu
   f. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
   g. Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
   h. Pengawasan Masa Kampanye Pemilu
   i. Pengawasan Masa Tenang
   j. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
   k. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu
   l. Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
   m. Pengawasan Logistik.
3. **Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan**

   Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC) – RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(BA 116)

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penyiaran Radio dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiaran. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia antara lain seperti menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia *audited* dialokasikan sebesar Rp965,5 miliar, terdiri dari belanja operasional, antara lain untuk belanja pegawai serta belanja barang operasional sebesar Rp260,8 miliar dan belanja non operasional, antara lain untuk pelaksasnaan tugas dan fungsi sebagai penyiaran publik LPP RRI serta belanja modal untuk mendukung sarana prasarana penyiaran publik seperti peralatan teknik dan kelanjutan pembangunan gedung samping Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas pengembangan infrastruktur penyiaran teknologi dan media baru, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, pengembangan program dan produksi siaran radio publik untuk meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan dan berdaya saing, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, penyelenggaraan layanan dan pengembangan layanan usaha yang mendukung memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penyelenggaraan dan pengembangan stasiun siaran internasional untuk memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, penyelenggaraan dan pengembangan stasiun siaran lokal, regional untuk revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain menambah informasi mengenai kebencanaan sehingga masyarakat dapat meminimalisir efek negatif dari bencana. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain metode dalam pengelolaan anggaran dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain mengadakan dan mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai tata cara kelola anggaran.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dialokasikan sebesar Rp1.070,3 miliar, terdiri dari belanja operasional, antara lain untuk belanja pegawai operasional serta belanja barang operasional dan belanja non operasional, antara lain untuk kegiatan tugas dan fungsi penyiaran publik Radio Republik Indonesia serta belanja modal yang digunakan sebagai penunjang sarana pra sarana penyiaran publik. Dari alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan

yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/ memperluas layanan siaran yang berisikan konten-konten siaran, layanan siaran multiplatform, layanan konten digital, program produksi siaran tanggap bencana prioritas nasional. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas lainnya antara lain menambah informasi mengenai kebencanaan sehingga masyarakat dapat meminimalisir efek negatif dari bencana.

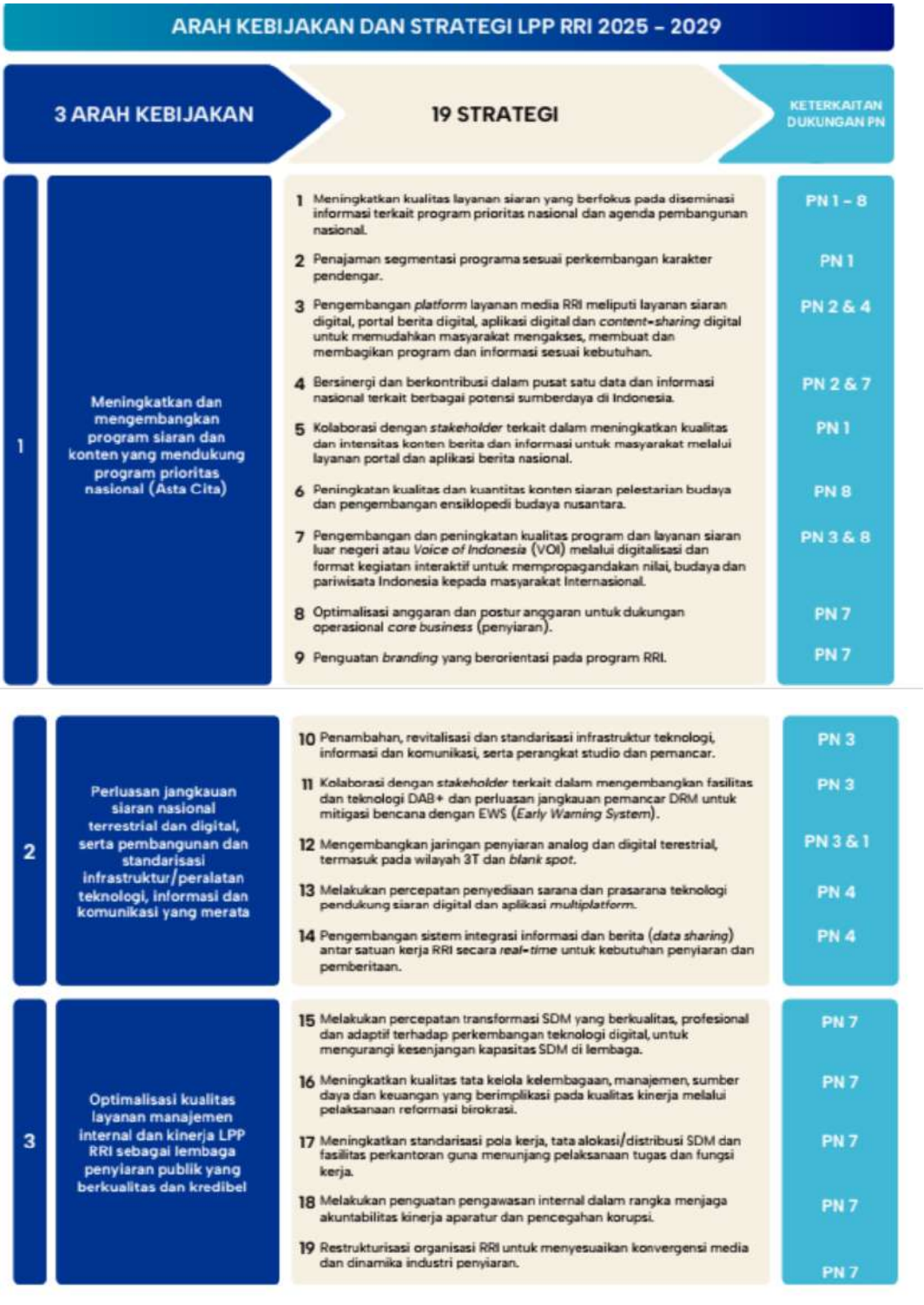
Dalam APBN tahun 2026, anggaran LPP RRI dialokasikan sebesar Rp997,7 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 1,6 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan infrastruktur sarana dan prasarana teknik, revitalisasi perangkat siaran, pengembangan program dan produksi siaran radio publik, layanan siaran informasi politik internasional, layanan siaran informasi ekonomi, perdagangan dan investasi, layanan konten digital, layanan siaran informasi perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, layanan informasi budaya dan pariwisata, layanan siaran membangun kesiapgaan masyarakat terhadap bencana, program tanggap bencana, layanan siaran berisikan nilai-nilai keindonesiaan, layanan siaran penyandang disabilitas, layanan konten terkait ekonomi digital . Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain meningkatnya layanan siaran yang menunjang capaian program prioritas nasional, meningkatnya jangkauan dan layanan siaran radio serta penguatan platform digital, meningkatkannya kualitas tata kelola kelembagaan dan manajemen LPP RRI yang dinamis, transparan, akuntabel dan adaptif.

Proyeksi kebijakan strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029, KPJM 2027 – 2029 dan Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2025 – 2029.

RRI berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan pertahanan keamanan di Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi, memberikan edukasi, serta melakukan publikasi dan promosi guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis tersebut. RRI juga memantau dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dari program kerja pemerintah tersebut yang berdampak kepada masyarakat, juga menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan, RRI terus menghadirkan program, kegiatan, serta layanan siaran yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Komitmen RRI sejalan dengan visi pemerintah, *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*. Peran aktif RRI diwujudkan melalui penyediaan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas serta bernilai positif bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan konten siaran, RRI berfungsi sebagai perekat sosial, pengawal demokrasi, serta agen pencerdasan kehidupan bangsa, sekaligus menjaga citra positif Indonesia di kancah internasional.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap 8 Program Prioritas Nasional, RRI menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2025–2029. Kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi utama RRI serta selaras dengan program nasional, yang tertuang dalam 3 Arah Kebijakan dan 16 Strategi Utama sebagai berikut:



Kegiatan di LPP RRI yang tetap berlanjut selama periode 2027 – 2029 adalah pengadaan terkait infrastruktur, sarana dan prasarana teknik prioritas nasional, revitalisasi perangkat siaran Prioritas Nasional dan kegiatan penyiaran yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia secara umum ada yang berhenti, berlanjut dan timbul kegiatan baru diperiode 2027 – 2029.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (BA 117)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) antara lain mengatur bahwa LPP TVRI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, LPP TVRI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik dengan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. LPP TVRI juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LPP TVRI antara lain seperti pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.

Dalam APBN tahun 2024, alokasi anggaran LPP TVRI *audited* dialokasikan sebesar Rp1.435,7 miliar, antara lain untuk membiayai berbagai Program Prioritas Nasional, kebutuhan Pengembangan dan Usaha, Layanan BMN, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan lain sebagainya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru; Sarana Prasarana Penunjang Pemilu; Siaran Berita; Produksi Program Hiburan; Penyiaran Olahraga; Siaran Internasional; Kanal Pendidikan dan Budaya; Program Siaran Pendidikan Agama; Siaran Pemilu; serta Siaran Event Olaharaga Olimpiade dan PON, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Layanan BMN, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan lain sebagainya. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 84,08 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 15,92 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; Penyediaan Multipleksing dan Fasilitas Teknik Pada Wilayah Layanan; Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat mendapatkan hiburan dan informasi yang sehat serta pemerintah dapat menyampaiakn informasi terkait program-program pemerintah hingga ke daerah 3T. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain kerena ketersediaan anggaran yang masih terbatas sehingga LPP TVRI tidak dapat melaksanakan output-output prioritas secara maksimal.

Dalam APBN tahun 2025, alokasi anggaran LPP TVRI dialokasikan sebesar Rp1.524,2 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp848,1 miliar antara lain untuk pemenuhan belanja operasional, seperti untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan belanja non operasional sebesar Rp676,0 miliar antara lain untuk membiayai berbagai Program Prioritas Nasional, kebutuhan Pengembangan dan Usaha, Layanan BMN, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan lain sebagainya. Dari alokasi anggaran yang ada,

telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp390,8 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp1.133,3 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/ mendukung/memperluas Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan; Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas; Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif; serta Siaran Peningkatan Kesehatan dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Layanan BMN, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan dan lain sebagainya. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 86,63 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 13,07 persen. Outlook anggaran LPP TVRI tahun 2025 sebesar Rp1.389,4 miliar. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat mendapatkan hiburan dan informasi yang sehat serta pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait program-program pemerintah hingga ke daerah 3T.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran LPP TVRI dialokasikan sebesar Rp1.159,7 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 10,12 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Pembangunan Transmisi dan Multipleksing Pada Wilayah Layanan; Penguatan Infrastruktur Transmisi Digital Pada Wilayah Layanan; Penyediaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika; Penyediaan Infrastruktur Teknologi Multiplatform OTT; Penyediaan Infrastruktur Teknologi Distribusi TV Platform; Penyediaan Infrastruktur Teknologi Manajemen Arsip Digital; Pemeliharaan Peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran; Pemeliharaan Infrastruktur Transmisi Digital; Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informatika; Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Multiplatform OTT; Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Manajemen Arsip Digital; Siaran Informasi Publik dalam Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia; Siaran Informasi dalam Penguatan Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; Siaran Program dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas; Siaran Informasi Publik dalam Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; Siaran Informasi dalam Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya; serta Siaran Informasi dalam Penguatan Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, dan sebesar 89,88 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Pemenuhan Belanja Pegawai, Belanja Operasional dan Layanan Perkantoran, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Umum, Layanan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kerjasama terkait Pengembangan Usaha. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain (1) Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM; (2) Mendukung Investasi untuk Percepatan IKN; (3) Peningkatan PNBP dan Optimalisasi Aset; (4) Partisipasi Publik dan *Center of Citizen Journalism*; (5) Peningkatan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel; (6) Mendukung Seni dan Budaya sebagai *Soft Power* Diplomasi Indonesia di Dunia; (7) Penguatan Infrastruktur Digital TVRI dan Sarana Prasarana; (8) Penghapusan *Blank Spot*; (9) Mempersiapkan TVRI sebagai *Center Of Content Creator*; (10) Kualitas Konten Siaran dan Multiplatform; (11) Literasi Digital; (12) Literasi Media dan Pendidikan Demokrasi.

Proyeksi kebijakan strategis Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia antara lain (1) Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM; (2) Mendukung Investasi untuk Percepatan IKN; (3) Peningkatan PNBP dan Optimalisasi Aset; (4) Partisipasi Publik dan *Center of Citizen Journalism*; (5) Peningkatan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel; (6) Mendukung Seni dan Budaya sebagai *Soft Power* Diplomasi Indonesia di Dunia; (7) Penguatan Infrastruktur Digital TVRI dan Sarana Prasarana; (8) Penghapusan *Blank Spot*; (9) Mempersiapkan TVRI sebagai *Center Of Content Creator*; (10) Kualitas Konten Siaran dan Multiplatform; (11) Literasi Digital; (12) Literasi Media dan Pendidikan Demokrasi.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BA 118)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 bertugas mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menyelenggarakan fungsi pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan di Kawasan Sabang.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (*audited)* sebesar Rp54,3 miliar terdiri dari belanja operasional untuk kebutuhan gaji pegawai dan operasional pemeliharaan perkantoran serta belanja non operasional antara lain untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur Kawasan dan kegiatan mendukung investasi Kawasan serta dukungan manajemen. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk Finalisasi penuntaskan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Aset Potensial untuk peningkatan PNBP dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan Optimalisasi peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan dari sektor Pelabuhan dan Pariwisata serta menarik investasi ke Kawasan melalui sektor tersebut. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 31 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Peningkatan Gangway Pelabuhan Penyeberangan Balohan.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan pendapatan masyarakat Kota Sabang dampak dari aktivitas Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Pariwisata di Kawasan Sabang. Secara umum, dalam menghadapi kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024, antara lain dengan melakukan identifikasi skala prioritas dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya-upaya peningkatan pendapatan tersebut di atas.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian/Lembaga Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dialokasikan sebesar Rp53,5 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp34,4 miliar antara lain untuk untuk kebutuhan gaji pegawai dan operasional pemeliharaan perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp19,1 miliar antara lain untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur Kawasan dan kegiatan mendukung investasi Kawasan serta dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp11,8 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp4,1. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk Finalisasi penuntaskan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang sebelumnya tidak terlaksana disebabkan dampak dari kebijakan efisiensi belanja tahun anggaran 2024, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan BPKS. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber

dari Rupiah Murni sebesar 22 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Peningkatan *Gangway* Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat Kota Sabang terlihat dari aktivitas Pelabuhan yang semakin meningkat tiap triwulannya.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp36,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 12 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Peningkatan *Gangway* Pelabuhan Penyeberangan Balohan, dan sebesar 9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Penyusunan Rencana Bisnis Operasional dan Pengelolaan Pelabuhan Sabang. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain melakukan Percepatan Pembangunan KPBPB Sabang sebagai salah satu Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Aceh.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang antara lain : Pengembangan Pelabuhan CT-3 dan CT-1 Sabang dan Penguatan industri transportasi laut di Sabang (Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda); Pengembangan Sabang *Integrated Special Tourism Zone* dan *Urban renewal* Kota Tua Sabang (Terwujudnya perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan); serta Pengembangan *Sabang International Maritime Research Center* dan *University* (Pengembangan Ekonomi Biru Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru).

BADAN KEAMANAN LAUT RI
(BA 119)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut antara lain mengatur bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan laut. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Keamanan Laut juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Keamanan Laut antara lain seperti ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, dan dokumentasi Bakamla.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Badan Keamanan Laut *audited* dialokasikan sebesar Rp1.916,1 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp179,6 miliar antara lain untuk (1) pembayaran gaji; (2) tunjangan; (3) operasional; serta (4) pemeliharaan kantor dan belanja non operasional sebesar Rp1.034,4 miliar antara lain untuk (1) kegiatan peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut; (2) kegiatan penyiapan kebijakan keamanan dan keselamatan laut; (3) kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerjasama keamanan dan keselamatan laut; (4) kegiatan pengadaan materian, sarana prasarana, dan manajemen BMN Bakamla; (5) kegiatan penyeleanggaraan administrasi perencanaan dan penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi; (6) kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan akuntabilitan Bakamla; serta (7) kegiatan penyelenggaraan manajemen pelaksanaan tugas teknis kamla. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp821,7 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp86,1 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/ mendukung Operasi Bidang Keamanan, Pembangunan Pangkalan Setokok, dan *National Maritime Security System*, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Integrasi Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Pengadaan Alat Komunikasi Radio di KN, Pengadaan Cat, Operasional Narahubung, Pembelian Data AIS Satelit, Pematangan Lahan Stasiun, Sertifikasi Lahan, Pembangunan Markas Komando dan Puskodal Zona Bakamla Tengah dan Zona Bakamla Timur, Pembangunan Rumah Dinas Zona Bakamla Timur, Perubahan Masterplan Pangkalan Setokok, dan Aplikasi Indeks Keamanan Laut. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 76,87 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 0,12 persen, dan Non Rupiah Murni (SBSN) selain PLN dan PDN sebesar 23,13 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Operasi Bidang Keamanan dan Pembangunan Pangkalan Setokok dan tidak ada kegiatan kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya tingkat keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang ditandai dengan nilai IKLN yang meningkat dari tahun sebelumnya, khusus pada pembangunan pangkalan Setokok yaitu penangangan eskalasi ancaman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia utama pada laut Natuna dan resiko perompakan dengan kekerasan, dan tindak kejahatan di laut berupa *IUU Fishing* serta *transnational crimes*. Tidak terdapat Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024. Secara umum beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain Pelaksanaan Pengukuran Indeks

Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kondisi keamanan laut nasional yang didalamnya termasuk keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Badan Keamanan Laut dialokasikan sebesar Rp1.084,7 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp197,0 miliar antara lain untuk (1) pembayaran gaji; (2) tunjangan; (3) operasional; serta (4) pemeliharaan kantor dan belanja non operasional sebesar Rp2.533,7 miliar antara lain untuk kegiatan peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut, kegiatan penyiapan kebijakan keamanan dan keselamatan laut, kegiatan peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerjasama keamanan dan keselamatan laut, kegiatan pengadaan materian, sarana prasarana, dan manajemen BMN Bakamla, kegiatan penyeleanggaraan administrasi perencanaan dan penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi, kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan akuntabilitan Bakamla, serta kegiatan penyelenggaraan manajemen pelaksanaan tugas teknis kamla. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp736,9 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp73,6 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas patroli bersama, patroli mandiri, pembangunan sarana dan prasarana Pangkalan Setokok, sarana keamanan dan keselamatan laut pendukung keberhasilan operasi laut, pembangunan fasilitas personel, sarana kebijakan keamanan dan keselamatan laut, rekomendasi kebijakan terhadap RUU keamanan laut, serta kerja sama luar negeri strategis, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Pengadaan senjata 30 mm (2 Unit Multiyears 2 Tahun), Pengadaan HSC, Pengadaan Cat Bakamla, Operasional Narahubung, dan Penyediaan Layanan Data Maritim dan Peningkatan Sistem Analisis Bakamla. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 62,08 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni (SBSN) selain PLN dan PDN sebesar 38,13 persen. *Outlook* anggaran Badan Keamanan Laut RI tahun 2025 sebesar Rp2.484,2 miliar. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Sarana Keamanan dan Keselamatan Laut Pendukung Keberhasilan Operasi Laut dan tidak ada kegiatan kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain terwujudnya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia melalui sistem informasi/sistem peringatan dini, berdaya gentar kawasan, kemampuan penindakan dan diplomasi *coast guard* yang berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional.

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran Bakamla dialokasikan sebesar Rp1.752,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 85,57 persen diantaranya untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan Sarana Keamanan dan Keselamatan Laut Pendukung Keberhasilan Operasi Keamanan, Pembangunan Fasilitas Personel, Sarana Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan Pendukung Kapasitas Sistem Peringatan Dini (*National Maritime Security System*), dan Pembangunan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut, Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut, dan sebesar 14,43 persen untuk mendukung prioritas lainnya. Kebijakan strategis dan prioritas tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026, antara lain Pembangunan *National Maritime Security System* (NMSS) yang merupakan sistem yang sangat dibutuhkan guna menunjang tugas dan fungsi sarana keamanan, pembangunan sistem tersebut dinilai efektif dan efisien karena dapat diintegrasikan dengan sarana yang dimiliki Bakamla RI saat ini serta pembangunan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut di Asahan, Supiori, Kupang, Kotawaringin Barat, Konawe Selatan, Nias Selatan, Pesisir Barat, dan Merauke.

Proyeksi kebijakan strategis Bakamla pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Bakamla antara lain Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan melalui Indeks Keamanan Laut Nasional dan melaksanakan Proyek Prioritas Bakamla yaitu : kerja sama keamanan laut, kerja sama patroli internasional, pengadaan dan harwat alpalhankam keamanan laut, penyusunan kebijakan keamanan laut, patroli, operasi, dan kolaborasi instansi keamanan laut, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, pembangunan fasilitas kesejahteraan personel dan pembangunan fasilitas profesionalisme personel.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila antara lain mengatur bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPIP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPIP juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, terhadap aktivitas kepaskibraan dan purnapaskibraka.

Dalam APBN tahun anggaran 2024, realisasi anggaran *audited* Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebesar Rp314,2 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji dan tunjangan serta belanja operasional pemeliharaan kantor, dan belanja non operasional antara lain untuk pelaksanaan dukungan manajemen dan program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat pancasila melalui beberapa kegiatan diantaranya Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas; Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas; Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/ Lembaga/Daerah; Layanan Komunikasi melalui Media Massa; Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila; Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila; Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP; Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Nspk Standardisasi Dan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara; Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara Dan Asn Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara; dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelaksanaan Kesepakatan Pengembangan Hubungan Kemitraan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen masyarakat Lainnya (Non Prioritas); Kesepakatan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang non-Prioritas; Rekomendasi Hasil Pembudayaan Pancasila; Rekomendasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial/Politik dan Komponen Masyarakat lainnya serta Purnapaskibraka; Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi Dan Institusionalisasi Pancasila Dalam Hukum Nasional Dan Peraturan Daerah; Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila; Nspk Materi, Bahan Ajar Dan Metode Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila. Khusus

alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 36 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila; Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila; Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila; Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain adanya penguatan pemahaman dan pengamalan ideologi pancasila pada masyarakat, pencegahan disintegrasi bangsa maupun konflik sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkarakter pancasila, dan memastikan terwujudnya masyarakat yang bersatu, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kendala/tantangan yang ditemukan antara lain kurangnya SDM pada direktorat dan belum adanya kesepahaman dalam melakukan mekanisme penyusunan naskah kerja sama. Beberapa terobosan kebijakan yang dimungkinkan dilaksanakan, antara lain selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat dan menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan naskah kerja sama.

Dalam APBN tahun anggaran 2025, anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dialokasikan sebesar Rp374,4 miliar, terdiri dari: (1) belanja operasional sebesar Rp133,6 miliar meliputi belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp93,0 miliar serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp40,6 miliar; dan (2) belanja non operasional sebesar Rp240,9 miliar antara lain untuk dukungan Program Dukungan Manajemen lainnya serta pelaksanaan Program Pembinaan Ideologi Pancasila. Alokasi anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp136,7 miliar dan untuk Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp48,2 miliar. Dalam pelaksanaanya sesuai dengan perkembangan kebijakan, *outlook* anggaran BPIP tahun anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp352,2 miliar.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung implementasi pancasila dan peta jalan melalui pelaksanaan kegiatan berikut: (38), sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila; Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila; Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila; Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila; Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila; Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 36 persen.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila; Fasilitasi Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila; Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan

Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila; Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila; Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila; Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila; Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Sertifikasi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila; Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila; Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila dan Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain pemahaman dan pengamalan ideologi pancasila pada masyarakat, pencegahan disintegrasi bangsa maupun konflik sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkarakter pancasila, dan memastikan terwujudnya masyarakat yang bersatu, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dialokasikan sebesar Rp384,9 miliar. Rencana kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (1) penguatan landasan hukum BPIP melalui penyelesaian dan implementasi Undang-Undang BPIP yang akan memperjelas fungsi dan kewenangannya dalam pembinaan ideologi Pancasila; (2) penguatan ekosistem pendidikan Pancasila secara nasional, termasuk penggunaan buku teks utama Pancasila dan pengembangan metode pembelajaran yang inovatif; (3) penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi internal BPIP melalui identifikasi kerangka regulasi adaptif dan pengembangan sistem Satu Data BPIP untuk perencanaan berbasis data; (4) peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat melalui program pembinaan relawan dan pencarian *role-model* Pancasila yang kontekstual; dan (5) penguatan peran BPIP sebagai "dapur kebijakan" yang memberikan kajian strategis dan rekomendasi evaluatif terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila antara lain dalam rangka mendukung prioritas nasional untuk "memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)", proyek-proyek strategis BPIP pada tahun 2027 hingga 2029 akan bergeser dari fokus pembangunan fondasi ke arah penguatan implementasi dan dampak nyata Pancasila dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan mencakup intensifikasi pengembangan ekosistem digital Pancasila untuk edukasi yang lebih luas dan adaptif, penguatan kolaborasi lintas sektor dan internasional untuk membumikan nilai-nilai Pancasila serta mempromosikannya sebagai *soft power* Indonesia di dunia, pengarusutamaan Pancasila dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik melalui pengukuran indeks implementasi dan rekomendasi berbasis bukti, serta pengembangan pusat-pusat keunggulan Pancasila untuk riset mendalam dan pencetakan duta-duta Pancasila yang kompeten. Keseluruhan proyek ini bertujuan untuk memastikan Pancasila menjadi energi pendorong bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
(BA 123)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 antara lain mengatur bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab kepada Presiden untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana,, dengan kewenangan untuk:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas Terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman;
7. Memindahkan atau merelokasi Terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran LPSK *audited* dialokasikan sebesar Rp274,4 miliar, antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya akses terhadap keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana terutama yang berasal dari kalangan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain keterbatasan sumber daya anggaran dan manusia yang dialokasikan kepada LPSK yang menyebabkan belum optimalnya layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain menyusun instrumen pengukuran Indeks Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka penguatan kualitas akses terhadap keadilan dan menjadi instansi pengusul Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban bagi korban kekerasan seksual.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran LPSK dialokasikan sebesar Rp229,9 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp41,3 miliar antara lain untuk belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp188,6 miliar antara lain untuk belanja barang serta belanja modal untuk mendukung pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp12,3 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp217,6 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk pemberian rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pemenuhan

layanan dan kebijakan transformasi akses terhadap keadilan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain penguatan tugas dan wewenang LPSK melalui penguatan kebijakan pemulihan korban melalui mekanisme restitusi dan/atau *Victim Trust Fund*, pengembangan sistem informasi layanan terpadu perlindungan saksi dan korban berbasis teknologi informasi, dan akselerasi pemenuhan hak saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam APBN tahun 2026, anggaran LPSK dialokasikan sebesar Rp259,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 1,18 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pemberian rekomendasi kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebesar 98,82 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelaksanaan tugas dan wewenang melalui layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain penyusunan kajian *grand design innovative financing* untuk perlindungan dan pemulihan saksi dan korban serta cetak biru pengembangan sistem informasi layanan terpadu perlindungan saksi dan korban berbasis teknologi informasi.

Proyeksi kebijakan strategis LPSK (52) pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis LPSK antara lain memperkuat posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban, mengembangkan sistem perlindungan yang holistik dan integratif, mewujudkan transformasi kelembagaan yang lincah dan kokoh, menguatkan dan menegakkan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta melindungi dan memenuhi hak-hak pembela HAM dan kelompok rentan. Beberapa kegiatan strategis yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 adalah pengukuran Indeks Perlindungan Saksi dan Korban serta pengembangan sistem informasi terpadu perlindungan saksi dan korban berbasis teknologi informasi.

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BA 124)

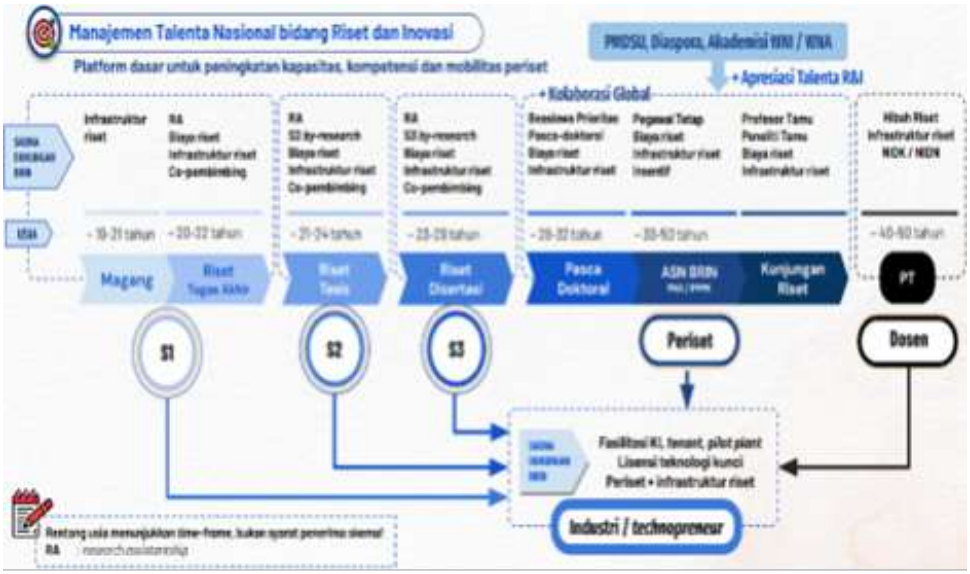
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diatur bahwa BRIN memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, BRIN menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, termasuk penguatan ekosistem riset nasional. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utamanya, BRIN juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN, antara lain melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional, pembinaan talenta riset, dan pengelolaan infrastruktur riset terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan, termasuk perguruan tinggi dan industri.

Untuk menuju Indonesia Maju dengan pendapatan per-kapita yang tinggi di masa depan tidak mungkin dicapai tanpa **penguatan ekonomi berbasis pengetahuan dengan nilai tambah dan daya saing yang tinggi**. Khususnya di tengah kompetisi global dan ketidakpastian geopolitik saat ini, peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saat ini pemerintah melalui BRIN fokus pada **pengembangan produk berbasis riset dari sumber daya alam lokal**, baik yang terbarukan (komoditas pertanian dan kelautan) maupun non-terbarukan (bahan tambang). Upaya ini sekaligus sebagai solusi fundamental mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka pendek maupun panjang melalui peningkatan: a) **hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam lokal**; b) daya saing produk di pasar global dengan mengeksplorasi keunikan lokal; c) kemandirian dan ketahanan nasional melalui pemenuhan kebutuhan dari sumber daya alam lokal.

Untuk memastikan dukungan riset dan inovasi yang berkualitas dan berstandar global, pemerintah melalui BRIN telah melakukan **investasi signifikan untuk memperkuat sumber daya** (manusia, infrastruktur, pendanaan) riset dan inovasi nasional. Pemerintah memastikan bahwa talenta unggul dan berkualifikasi tinggi di berbagai bidang dapat berkarir di tanah air sesuai bidangnya. Kolaborasi BRIN dan perguruan tinggi dalam manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi memastikan generasi muda Indonesia dapat mencapai jenjang tertinggi S3 sebelum usia 29 tahun, dan memilih karir di berbagai bidang sesuai kepakaran dan minatnya. Pemerintah juga menyediakan **500 posisi periset setiap tahun bagi para talenta riset dan diaspora berkualifikasi S3 dari berbagai bidang untuk berkarya di tanah air**.

Gambar 1

Platform Dasar Manajemen Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Pembinaan talenta secara berkelanjutan ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur riset dan inovasi canggih yang dikelola oleh BRIN untuk dibuka untuk dimanfaatkan seluruh komunitas akademia dan periset, baik dari perguruan tinggi, komunitas dan juga industri. Pengelolaan infrastruktur secara terpusat dan terbuka tidak hanya memastikan negara mampu menyediakan beragam infrastruktur canggih dan modern, tetapi juga memastikan pemeliharaan dan operasional secara berkelanjutan. Di lain sisi, dukungan **pengelolaan dana abadi riset secara terbuka dan kompetitif** oleh BRIN dan LPDP memastikan sistem merit yang kondusif untuk memotivasi produktivitas komunitas periset nasional.

Perbaikan tata kelola sumber daya (manusia, infrastruktur, pendanaan) diatas menjadi basis penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional secara nyata. Hal ini ditunjukkan dengan **peningkatan kuantitas dan kualitas keluaran riset dan inovasi** dalam 4 tahun terakhir, seperti: a) publikasi terindeks global; b) kekayaan intelektual (paten dll); c) lisensi dan kemitraan dengan industri terkait, sebagaimana ditampilkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2

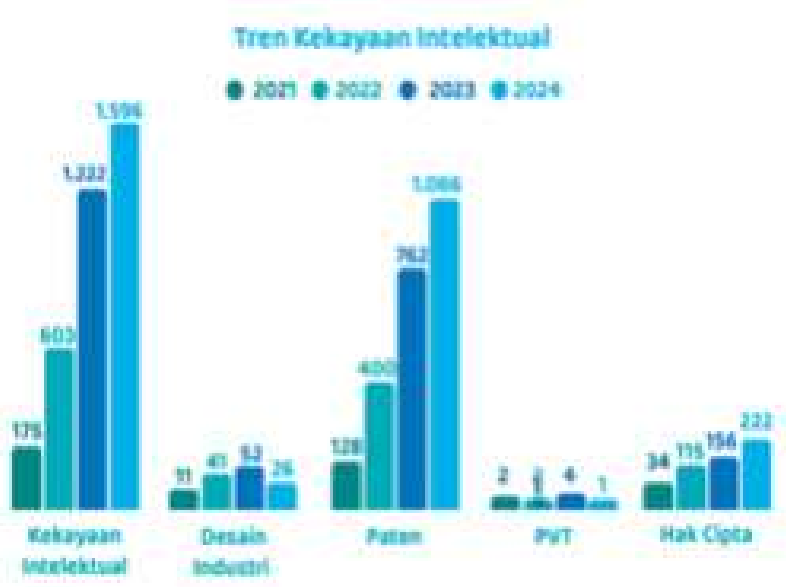
Peningkatan Kuantitas Publikasi Terindeks Global

Tahun 2021-2024



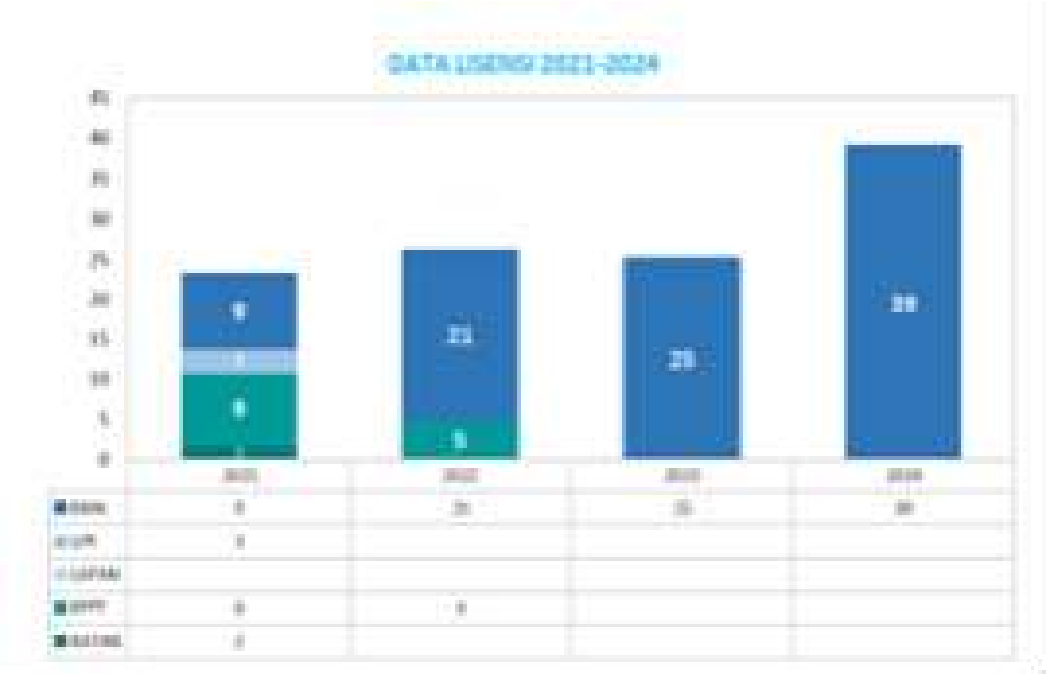
Sumber: Laporan Tahunan 2024 BRIN, 2025

Gambar 3
Peningkatan Kuantitas Kekayaan Intelektual
Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Tahunan 2024 BRIN, 2025

Gambar 4
Peningkatan Kuantitas Lisensi
Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Secara makro hal ini tercermin dari peningkatan signifikan peringkat Global Innovation Indonesia (GII) Indonesia.

Gambar 5
Peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index (GII)
Hingga Tahun 2024



Sumber: www.wipo.int 2025, Data diolah

Dalam APBN Tahun 2024, anggaran BRIN *audited* dialokasikan sebesar Rp4.993,5 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp3.702,3 miliar antara lain untuk belanja pegawai dan operasional serta pemeliharaan, serta belanja non-operasional sebesar Rp2.208 miliar untuk dukungan riset dan inovasi antara lain untuk manajemen talenta nasional riset dan inovasi, dan juga riset-riset terkait pangan, kesehatan, energi, dan kedirgantaraan. Dari alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp2.026,1 miliar telah dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional, seperti peningkatan kualifikasi dan mobilitas talenta riset dan inovasi, serta pengembangan berbagai purwarupa hasil riset dan inovasi di bidang budidaya tanaman, hilirisasi produk pertanian, teknologi energi berkelanjutan, vaksin dan obat, alat kesehatan, teknologi nuklir untuk energi, radioisotop dan radiofarmaka, teknologi pesawat udara, hingga teknologi satelit. Serta sebesar Rp3.884,3 miliar untuk Prioritas lainnya, termasuk di antaranya pengembangan kompetensi SDM riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, serta pemeliharaan dan operasional fasilitas riset dan inovasi, serta belanja pegawai.. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 62,4 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 20,8 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 16,8 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 antara lain program peningkatan kualifikasi dan mobilitas talenta riset dan inovasi, program mobilitas talenta riset dan inovasi, pusat kolaborasi riset, pemanfaatan riset dan inovasi untuk masyarakat dan lembaga, serta kegiatan riset dan inovasi di berbagai bidang. Intervensi belanja riset ini telah memberi manfaat nyata melalui peningkatan produktivitas riset nasional, penguatan daya saing produk inovasi, serta peningkatan peringkat Global Innovation Index Indonesia.

Dalam APBN Tahun 2025, anggaran awal BRIN dialokasikan sebesar Rp5.842,3 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp3.785,4 miliar untuk kebutuhan gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan, serta belanja non-operasional sebesar Rp2.056,8 miliar antara lain untuk pengembangan manajemen talenta riset dan inovasi, serta riset terkait dengan pangan, kesehatan, energi, dan kedirgantaraan. Sumber pendanaan terdiri dari RM sebesar Rp4.899,3 miliar atau sebesar 83,86 persen, dan Non RM sebesar Rp 942,8 miliar atau sebesar 16,1 persen yang terdiri dari sumber pendanaan PNBP sebesar Rp221,4 miliar atau sebesar 3,8 persen, PLN sebesar 559,6 miliar atau sebesar 9,6 persen, HLN sebesar Rp11,8 miliar atau sebesar 0,2 persen, dan

sumber pendanaan SBSN sebesar Rp 150 miliar atau sebesar 2,6 persen. Dari alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp1.921,5 miliar diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN), terutama PN 04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan program seperti peningkatan kualifikasi talenta riset dan inovasi; program mobilitas talenta riset dan inovasi; pusat kolaborasi riset terfasilitasi; serta pengembangan berbagai purwarupa hasil riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan, energi dan manufaktur, kesehatan, teknologi nuklir, penerbangan dan antariksa, elektronika dan informatika, kebumian dan maritim, hayati dan lingkungan, serta nanoteknologi dan material. Sementara Rp3.920,7 miliar untuk mendukung prioritas lainnya, termasuk diantaranya pengembangan kompetensi SDM riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, serta pemeliharaan dan operasional fasilitas riset dan inovasi. Kegiatan Prioritas Nasional yang akan berlanjut ke tahun 2026 antara lain peningkatan kualifikasi dan mobilitas talenta riset dan inovasi; pusat kolaborasi riset; pemanfaatan riset dan inovasi untuk masyarakat dan lembaga; serta kegiatan riset dan inovasi di berbagai bidang. Dari kegiatan tersebut, manfaat yang diharapkan masyarakat antara lain meningkatnya ketahanan kesehatan, pangan, energi, dan kedirgantaraan berbasis teknologi lokal yang lebih mandiri dan terjangkau.

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran T.A. 2026, anggaran BRIN adalah sebesar Rp6.144,6 miliar, anggaran tersebut terdiri dari anggaran operasional sebesar Rp3.840,4 miliar untuk membiayai gaji dan tunjangan serta operasional dan juga pemeliharaan, serta sebesar Rp2.304,2 miliar untuk membiayai kegiatan non operasional terkait dengan manajemen talenta nasional riset dan inovasi, pemanfaatan dan fasilitasi riset dan inovasi, serta riset dan inovasi di berbagai bidang termasuk penguatan infrastruktur riset dan inovasi.

HILIRISASI SUMBER DAYA ALAM LOKAL BERBASIS RISET DAN INOVASI

Pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai penggerak ekonomi menjadi keniscayaan di era kompetisi dan geopolitik global saat ini. Tetapi peningkatan nilai tambah ini hanya dapat dilakukan melalui proses industrialisasi dan pengembangan produk berbasis riset, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan mitra global.

Pasca konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, pendanaan) riset dan inovasi pemerintah ke dalam BRIN, dan keberhasilan penguatan ekosistem riset dan inovasi, saat ini **negara telah hadir dan mampu memfasilitasi industri dan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan produk berbasis riset** tanpa harus melakukan investasi besar melalui pemanfaatan bersama sumber daya periset dan infrastruktur yang terbuka bagi seluruh pihak.

Selain peningkatan kemampuan pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing, fasilitasi bagi industri dan pelaku usaha ini akan mendorong p**ertumbuhan belanja riset dan inovasi non-pemerintah sebagai upaya untuk mencapai target belanja riset dan inovasi nasional sebesar 1 persen dari PDB** dengan rasio kontribusi pemerintah dibanding non-pemerintah sebesar 1 banding 4. Selanjutnya BRIN juga telah membakukan model bisnis untuk percepatan adopsi riset ke industri melalui mekanisme lisensi dan royalti berbasis penjualan riil produk inovasi. Dengan mekanisme ini negara melalui BRIN tidak mengenakan biaya bagi industri yang melakukan pengembangan produk bersama memanfaatkan periset dan infrastruktur yang dikelola BRIN, tetapi akan diminta untuk melakukan lisensi saat riset telah menghasilkan inovasi. Insentif ini melengkapi *tax deduction* bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas pengembangan produk berbasis riset, dan e-katalog inovasi untuk aneka produk inovasi nasional yang telah diberlakukan selama ini.

Dalam konteks hilirisasi sumber daya alam lokal, BRIN fokus pada **pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam terbarukan** seperti komoditas pertanian, peternakan dan kelautan, serta eksplorasi dan pemanfaatan kekayaan hayati dan budaya nusantara. Untuk mempercepat hilirisasi di sektor tersebut, telah dimulai platform **kolaborasi lokal dan global dengan mitra perguruan tinggi, komunitas dan industri** untuk: a) eksplorasi kekayaan hayati darat dan laut, geologi darat dan laut, serta budaya (arkeologi, bahasa, manuskrip nusantara); b) biologi struktur untuk mengeksplorasi data molekuler kekayaan hayati dan aplikasinya di bidang pertanian dan kesehatan; c) teknologi akselerator untuk aplikasi industri, pangan dan kesehatan; d) revitalisasi reaktor nuklir untuk produksi radioisotop dan radiofarmaka, serta persiapan PLTN; e) teknologi kedirgantaraan untuk penginderaan jauh mendukung program pangan, kelautan dan pertahanan keamanan.

Pengembangan produk berbasis riset yang telah dan sedang dilaksanakan di BRIN dan para mitra kolaborasi **difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemandirian kesehatan**. **Sektor pangan mencakup pengembangan**: a) varietas dan teknologi budidaya presisi di level molekuler untuk tanaman pangan dan peternakan di berbagai wilayah dengan agroekologi yang berbeda; b) teknologi penanganan hama dan penyakit tanaman pangan dan ternak; c) teknologi pasca panen; d) teknologi perpanjangan masa simpan produk pangan (pengemasan, penyimpanan, iradiasi); dan e) produk turunan komoditas pangan. Pengembangan di sektor pangan sekaligus ditujukan untuk mendukung program MBG (Makan Bergizi Gratis), serta peningkatan nilai ekspor komoditas pangan ke mancanegara.

Sektor kesehatan mencakup pengembangan: a) bahan baku obat dari bahan alam lokal; b) obat dan vaksin penyakit endemik lokal (demam berdarah, TBC, beberapa jenis kanker); c) alat kesehatan (kit deteksi dini beragam penyakit endemik lokal, MRI portabel); dan d) identifikasi dan mitigasi penyakit zoonosis.

Sektor energi fokus pada pengembangan: a) transisi hijau PLTU batubara melalui pemanfaatan *co-firing* berbasis biomassa lokal; dan b) penguasaan teknologi reaktor nuklir untuk PLTN generasi ke-4.

Riset juga berperan mendukung **hilirisasi aset benda maupun tak benda nusantara** dari beragam koleksi ilmiah nasional yang dikelola oleh BRIN, seperti: spesimen fisik (hidup dan mati) dari kekayaan hayati, artefak dan ekofak, manuskrip lokal, bahasa lokal, dan bebatuan. Beragam koleksi ilmiah ini telah dikembangkan menjadi beragam produk turunan seperti *asset store* untuk industri gim global, *corpus* untuk layanan bahasa berbasis kecerdasan artifisial, *story building* pembentuk ikon destinasi wisata di berbagai daerah, serta beragam eduwisata di kebun raya dan animalium.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN UNTUK HILIRISASI

Secara spesifik, teknologi kedirgantaraan (penerbangan dan antariksa) memiliki peranan penting di Indonesia yang merupakan negara kepulauan memanjang di sepanjang garis ekuator dan 60 persen wilayahnya didominasi oleh lautan.

Dengan karakter di atas, BRIN fokus pada pengembangan teknologi penginderaan jauh berbasis citra dari satelit penginderaan jauh dan pesawat nir awak. Negara kepulauan yang besar seperti Indonesia sangat bergantung pada informasi penginderaan jauh untuk mengelola seluruh wilayahnya, baik untuk kebutuhan pemantauan lahan pertanian, zonasi penangkapan ikan, pemetaan, pemantauan cuaca dan iklim termasuk sumber polusi, mitigasi bencana, dan pertahanan keamanan.

BRIN telah melakukan program terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan data penginderaan jauh secara mandiri, dan sekaligus mendorong tumbuhnya *space economy* di masa depan. Program-program yang telah dimulai:

1. Pengembangan GEOMIMO untuk pengolahan data citra satelit secara otomatis dari berbagai satelit yang berbeda.
2. Membuka data citra satelit yang telah diolah untuk dimanfaatkan *startup* pengembang platform layanan berbasis data penginderaan jauh.
3. Pengembangan pesawat nir awak untuk pemantauan dan akuisisi citra penginderaan jauh.
4. Pengembangan satelit penginderaan jauh skala nano dan *low equatorial orbit*, serta *floater* bersama mitra industri.
5. Pengembangan bandar antariksa komersial bersama mitra global, sekaligus sebagai pusat pengembangan *space economy* di masa depan.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK INDUSTRI, MEDIS DAN ENERGI

Di tengah keterbatasan sumber energi fosil dan potensi pertumbuhan konsumsi energi, PLTN telah menjadi salah satu solusi teknologi ramah lingkungan yang terus dikembangkan di BRIN. BRIN bersama mitra global fokus pada pengembangan teknologi nuklir berbasis reaktor, khususnya PLTN generasi ke-4, selain terus melakukan persiapan teknis untuk memastikan kesiapan Indonesia mengadopsi PLTN.

Saat ini BRIN juga telah memulai proses revitalisasi reaktor riset Siwabessy di Serpong untuk menjadi pemasok bahan baku radioisotop dan radiofarmaka. Indonesia selama ini sepenuhnya tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan radioisotop dan radiofarmaka. Pasca revitalisasi, produksi radioisotop dan radiofarmaka ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga akan menjadi komoditas ekspor memasok kebutuhan kawasan.

Di lain sisi, BRIN juga fokus pada pengembangan teknologi nuklir berbasis akselerator untuk aplikasi industri dan medis. Saat ini periset BRIN sedang menyelesaikan akselerator 13 MeV yang akan diselesaikan pada tahun 2026, dan langsung dilanjutkan ke akselerator berkapasitas 30 MeV.

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2027-2029

Visi BRIN Tahun 2025-2029 adalah Menjadi Penghela Utama Dalam **Penguatan** Ekosistem Riset dan Inovasi yang **Berdaya Saing** dan **Berkualitas** untuk **Indonesia Maju** Menuju Indonesia Emas 2045, dengan arah dan kebijakan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BRIN 2025-2029 sebagai berikut: **1) Arah Kebijakan 1: Penguatan kapasitas SDM iptek dan tata kelola infrastruktur riset untuk mendorong peningkatan produktivitas riset, akselerasi inovasi, serta penguatan kolaborasi multipihak dalam ekosistem iptek dan inovasi,** dengan strategi: a) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Iptek dan, b) mengembangkan dan mengintegrasikan tata kelola serta pemanfaatan infrastruktur riset; **2) Arah Kebijakan 2: Penguatan kemitraan multipihak dalam pendanaan riset dan inovasi,** dengan strategi: a) menginisiasi skema-skema baru dan strategis untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pendanaan riset dan inovasi, b) memberikan insentif finansial dan fiskal bagi dunia usaha yang berkontribusi pada riset dan inovasi, c) meningkatkan fasilitasi program *matching fund* dan *competitive grant* bagi swasta, d) memperluas dan memperkuat jejaring dengan mitra kolaborasi baik dalam maupun luar negeri, dan e) mengoptimalisasikan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); **3) Arah Kebijakan 3: Penguatan ekosistem intermediasi riset dan inovasi melalui pengembangan Hub Tematik dan kolaborasi** dengan strategi: a) mendorong pembentukan dan pengembangan Hub Tematik berbasis kebutuhan nasional dan potensi daerah serta, b) meningkatkan kolaborasi dan intermediasi riset antara pelaku riset, pemerintah, industri, dan masyarakat; **4) Arah Kebijakan 4: Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi pemanfaatan riset dan inovasi secara luas oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha**, dengan strategi: meningkatkan relevansi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta

5) Arah Kebijakan 5: Peningkatan kualitas tata kelola BRIN yang efisien, efektif, prioriter, transparan, dan akuntabel dengan strategi: meningkatkan kualitas tata Kelola dalam mencapai optimalisasi reformasi birokrasi melalui penguatan pelayanan publik, sistem digital, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja.

Memasuki periode 2027–2029, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan memasuki fase konsolidasi dan percepatan dalam mewujudkan sasaran RPJMN 2025–2029 di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, dengan menempatkan riset dan inovasi sebagai penggerak utama transformasi ekonomi nasional berbasis pengetahuan. Periode ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem riset nasional yang produktif, terintegrasi, kolaboratif, berdaya saing global dan berorientasi pada pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional sekaligus memastikan keberlanjutan transformasi menuju Indonesia Emas 2025, melalui kegiatan pengembangan riset dan inovasi sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Riset BRIN 2025–2029.

Fokus kebijakan strategis diarahkan pada penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional, peningkatan produktivitas, kualitas riset dan inovasi serta perluasan dampak inovasi terhadap masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan BRIN pada periode 2027–2029 berlandaskan lima pilar strategis yang menjadi penjabaran dari arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Pertama, penguatan tata kelola riset yang terintegrasi untuk memastikan seluruh kegiatan riset lintas sektor, kementerian/lembaga, dan daerah berjalan secara sinergis di bawah satu sistem nasional yang terpadu. Kedua, peningkatan kualifikasi dan kapasitas manajemen talenta nasional riset dan inovasi melalui beberapa program seperti program talenta riset unggul, *talent pool SDM* riset unggul*, (degree by research)*, *research assistant, postdoctoral, visiting research fellow/visiting professor, joint research/research visit*, serta peningkatan jumlah peneliti dengan kualifikasi doktoral. Upaya ini bertujuan menciptakan generasi periset yang adaptif, kreatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Ketiga, peningkatan kontribusi riset terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional, antara lain sektor pangan, kesehatan, transisi energi berkeadilan, industri manufaktur berbasis teknologi tinggi, dan pembangunan berkelanjutan. BRIN juga menargetkan penguatan riset tematik di beberapa bidang lainnya seperti bidang bioteknologi, ekonomi biru, teknologi digital, serta mitigasi perubahan iklim. Keempat, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan inovasi akan diperkuat melalui kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri, serta perluasan mekanisme lisensi dan *spin-off* hasil riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Kelima, transformasi kelembagaan dan digitalisasi sistem riset nasional akan terus dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen riset terpadu, penguatan basis data riset nasional, keterbukaan data dan hasil riset (*open data* dan *open science*), serta reformasi birokrasi tematik berbasis kinerja. Selain itu, BRIN juga menargetkan peningkatan rasio riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri, serta perbaikan *Global Innovation Index* hingga mencapai peringkat 49 pada tahun 2029.

Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, strategi pembiayaan riset diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan dan efisiensi melalui diversifikasi sumber pendanaan. BRIN akan mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersinergi dengan dana abadi riset, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta mendorong partisipasi sektor swasta dan filantropi melalui skema kemitraan. Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) akan diperluas menjadi wadah riset nasional yang melibatkan perguruan tinggi, industri, dan lembaga internasional dalam kegiatan riset strategis, riset kolaboratif, dan riset ekspedisi. Selain itu, peningkatan kerja sama global akan terus dilakukan melalui partisipasi aktif BRIN dalam konsorsium dan forum riset internasional untuk memperluas jejaring kolaborasi dan memperkuat diplomasi iptek Indonesia di tingkat dunia.

Selama periode 2027–2029, BRIN akan melanjutkan berbagai kegiatan prioritas yang telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja riset nasional. Program terkait manajemen talenta nasional riset dan inovasi, pemanfaatan dan fasilitasi riset dan inovasi sampai dengan hilirisasi riset dan inovasi, serta riset dan inovasi di berbagai bidang, termasuk juga penguatan infrastruktur riset dan inovasi. Selain itu, BRIN juga melakukan pengembangan beberapa hub tematik sebagai upaya penguatan ekosistem kolaborasi riset dan inovasi baik di daerah maupun nasional. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan BRIN dalam pencapaian target indikator RPJMN 2025-2029.-

BADAN PANGAN NASIONAL
(BA 125)

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: (i) koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (ii) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (iii) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; (iv) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; dan (v) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Badan Pangan Nasional juga menjalankan fungsi: (i) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; (ii) pengembangan sistem informasi pangan; (iii) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; (iv) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; (v) pelaksanaan dukungan yang bersifat susbtansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan (vi) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Perkembangan anggaran Badan Pangan Nasional dari tahun 2024 sampai dengan 2026 mengalami fluktuasi. Anggaran Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023 dialokasikan pada BA tersendiri (BA 125). Secara rinci perkembangan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

Perkembangan Anggaran Badan Pangan Nasional
(dalam miliar Rupiah)

Kementerian/Lembaga	2024 (*audited*)	2025 (*outlook*)	2026 (APBN)
Badan Pangan Nasional	36.391,7	2.692,0	233,3

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan Pangan Nasional audited sebesar Rp36.391,7 miliar atau 99,5 persen dari total pagu Rp36.566,1 miliar dengan rincian realisasi reguler Rp421,2 miliar atau 95,2 persen dari pagu reguler sebesar Rp442,6 miliar dan realisasi anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebesar Rp35.970,4 miliar atau 99,6 persen dari pagu penyaluran CPP sebesar Rp36.566,1 miliar. Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dan penyaluran CPP, tahun 2024 Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi anggaran belanja tambahan yang berasal dari BA Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp36.123,5 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran Bantuan Pangan Beras, Daging Ayam dan Telur Ayam dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I bulan Maret – Mei 2023 sebanyak 8,4 juta paket senilai Rp365,7 miliar;
2. Bantuan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap I Februari – Maret 2024 sebanyak 2,9 juta paket senilai Rp264,6 miliar;
3. Bantuan Beras Tahap I Februari – Maret 2024 sebanyak 44,0 juta paket senilai Rp5.754,1 miliar;
4. Bantuan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap II April – Juni 2024 sebanyak 4,3 juta paket senilai Rp419,7 miliar;

5. Bantuan Beras Tahap II April – Juni 2024 sebanyak 66,0 juta paket senilai Rp8.631,1 miliar;
6. Bantuan Daging Ayam dan Telur Ayam Tahap II September – November 2023 sebanyak 8,5 juta paket senilai Rp359,1 miliar;
7. Bantuan Beras Tahap III Agustus, Oktober, Desember 2024 sebanyak 66,0 juta paket senilai Rp9.141,4 miliar;
8. Bantuan Beras Tahap II 2023 dan kurang bayar bantuan beras tahap I Tahun 2023 senilai Rp11.187,8 miliar.

Anggaran tahun 2026 untuk Badan Pangan Nasional adalah sebesar Rp233,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp89,2 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp144,1 miliar. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp74,2 miliar, belanja barang sebesar Rp154,4 miliar, dan belanja modal sebesar Rp4,7 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel berikut:

Matriks Indikator Kinerja Utama
Badan Pangan Nasional Tahun 2024 – 2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2024	2025	2026
		Realisasi	Target	Target
1.	Inflasi Pangan Bergejolak (Persen)	0,12	3-5	3-5
2.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale*/FIES (Persen)	4,02	3,75	3,6
3.	Pola Pangan Harapan (Skor)	93,5	94	94,5
4.	Indeks Keamanan Pangan Segar (Persen)	60	61	62
5.	Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai)	66,89	73	81

Target sesuai dengan draft Renstra Badan Pangan Nasional 2025 – 2029

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode 2025 – 2029 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Badan Pangan Nasional mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

   Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.

   Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

2. PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;

   Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

   Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

3. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.

   Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi.

   Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Succes Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:
   a. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri.
   b. Pengendalian impor dan ekspor pangan.
   c. Penguatan cadangan pangan nasional.
   d. Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan.
   e. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
   f. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses mayarakat terhadap pangan, dengan strategi:
   a. Perluasan akses informasi kerawanan pangan.
   b. Mitigasi potensi krisis pangan.
   c. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.
   d. Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi.
   e. Pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui

   SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
   a. Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
   b. Sosialisasi, promosi, edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
   c. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal.
   d. Penguatan data situasi konsumsi pangan.

SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

a. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar.
b. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar.
c. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
d. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pre market dan post market.
e. Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.

4. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui SS5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:

a. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
b. Penguatan sistem pengawasan internal.
c. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan.
d. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel.
e. Penataan organsisasi dan penguatan kelembagaan.
f. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Untuk mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi, misi Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
1.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan dan Harga Pangan 2. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan 3. Analisis Kebijakan Eksport dan Impor Pangan 4. Penguatan data dan informasi ketersediaan, harga dan cadangan pangan 5. Pengembangan kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit 6. Penguatan Tata kelola cadangan pangan masyarakat 7. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 8. Penguatan Sarana Logistik Pangan 9. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	1. Penguatan data dan isntrumen dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan 2. Penguatan data dan informasi penyelamatan pangan 3. Penyelenggaraan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan 4. Penyelenggaraan bantuan pangan fortifikasi dan/ atau biofortifikasi 5. Pencegahan dan kesiapsiagaan pangan 6. Penguatan aksi penyelematan pangan 7. Fasilitasi sarana penyelamatan pangan

NO	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
3.	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Pengembangan produk pangan lokal 2. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan lokal 3. Analisis konsumsi pangan 4. Promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA 5. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 6. Penguatan kelembagaan dan pengawas keamanan dan mutu pangan 7. Penguatan pelayanan perizinan keamanan dan mutu pangan 8. Penguatan pengawasan keamanan dan mutu pangan 9. Penguatan prasarana dan sarana keamanan pangan
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	1. Fasilitasi layanan perkantoran 2. Fasilitasi layanan hukum 3. Penguatan layanan kehumasan dan pengelolaan informasi publik 4. Fasilitasi layanan protokoler 5. Fasilitasi layanan umum 6. Penguatan layanan data dan informasi pangan 7. Pengembangan satu data pangan 8. Penguatan organisasi dan tata kelola internal 9. Pengelolaan Barang Milik negara (BMN) 10. Penguatan Sumber Daya Manusia 11. Fasilitasi layanan sarana internal 12. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis kinerja 13. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Prioritas 14. Pengelolaan manajemen keuangan yang akuntabel 15. Pengawasan dan Audit Internal 16. Penguatan Kerja Sama Bidang Pangan

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
(BA 126)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara antara lain mengatur bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Dalam menjalankan tugas tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.

Dalam APBN Tahun 2024, realisasi belanja Otorita Ibu Kota Nusantara *audited* sebesar Rp626,2 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dengan alokasi sebesar Rp46,5 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp0,7 miliar. Alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.

Dalam APBN Tahun 2025, anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara dialokasikan sebesar Rp6.395,5 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp199,9 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp6.195,5 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp947,7 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan Prioritas Nasional seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp254,5 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.954,9 miliar, dan Belanja Modal sebesar Rp4.186, miliar. Adapun *outlook* realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar Rp4.745,0 miliar.

Alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2025 didistribusikan ke dalam 2 (dua) program, yaitu: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp558,3 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5.837,2 miliar. Alokasi anggaran pada program Dukungan Manajemen digunakan antara lain untuk mendukung pencapaian output di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama; Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat; Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; dan Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Alokasi anggaran pada program Pengembangan Kawasan Strategis digunakan untuk mendukung pencapaian output di Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Selain itu, alokasi anggaran tahun 2025 untuk melaksanakan Program Pengembangan Kawasan Strategis dan digunakan untuk mendukung pembangunan komplek perkantoran legislatif dan yudikatif (pembangunan bangunan gedung dan kawasan Lembaga DPR I, Lembaga DPR II, Lembaga DPD, Lembaga MPR dan bangunan pendukung, kawasan sidang paripurna, Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan, Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid, termasuk alokasi untuk manajemen konstruksi) sebesar Rp2.295,5 miliar ; pembangunan jalan kawasan kompleks Yudikatif, Legislatif, dan Kawasan Pendukung KIPP 1A (pembangunan

dan supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif, legislatif, kawasan pendukung KIPP 1A) sebesar Rp854,9 miliar; dan pembangunan jaringan perpipaan (pembangunan dan supervisi pembangunan embung KIPP 1B, embung KIPP 1C, kolam retensi, bangunan/kantor pendukung, jaringan perpipaan air minum, serta manajemen konstruksi induk) sebesar Rp539,0 miliar. Seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari tambahan anggaran Tahun 2025 dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak sampai dengan tahun 2028. Selain itu, anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara juga bertambah sebesar Rp12,2 miliar dikarenakan adanya pengesahan belanja modal atas pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air Sepaku Semoi ke Instalasi Pengolahan Air Sepaku (15 objek pengadaan tanah seluas 28.081,00 m^2).

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 diarahkan antara lain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara meliputi pembangunan jalan dan jembatan, perkantoran, hunian, kawasan, dan konservasi sumber daya air, pemindahan ASN/TNI/POLRI, pengurusan perizinan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kota cerdas, pelayanan kesehatan, pengelolaan kawasan lindung, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan alokasi total sebesar Rp947,7 miliar.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara dialokasikan sebesar Rp6.262,0 miliar. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp5.617,9 miliar diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pada Program Pengembangan Kawasan Strategis, sisanya sebesar Rp644,0 miliar untuk memenuhi kebutuhan pada Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja operasional gaji pegawai sebesar Rp423,0 miliar (6,75 persen) dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp136,2 miliar (2,18 persen). Adapun, anggaran non operasional dialokasikan sebesar Rp5.702,8 miliar (91,07 persen). Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2026 tersebut sudah termasuk alokasi untuk kelanjutan kontrak tahun jamak. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain untuk mewujudkan IKN sebagai kota masa depan yang inklusif, kota hijau dan berkelanjutan, kota dengan peluang ekonomi untuk semua, kota pelayanan pemerintahan daerah khusus kelas dunia, kota yang memiliki infrastruktur untuk penyelenggaraan pemerintahan yang aman, nyaman, inklusif, dan berbasis teknologi, serta untuk menciptakan SDM dan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara yang kredibel, agile, efektif, dan efisien.

Proyeksi kebijakan strategis Otorita Ibu Kota Nusantara pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Otorita Ibu Kota Nusantara antara lain mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2025–2028 adalah sebesar Rp48.800,0 miliar yang seluruhnya akan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga lainnya tetap dilanjutkan sampai dengan berakhirnya masa kontrak tahun jamak.

BADAN KARANTINA INDONESIA
(BA 127)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina; (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Sebagai lembaga yang relatif baru terbentuk, Badan Karantina Indonesia memperoleh DIPA pertama kali pada 15 Januari 2024 setelah melalui proses revisi pergeseran anggaran antar K/L yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Karantina Indonesia. Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Badan Karantina Indonesia audited sebesar Rp1.358,5 miliar, yang terdiri dari belanja operasional dan non operasional. Anggaran non operasional yang tersedia diantaranya dialokasikan pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas untuk mendukung Prioritas Nasional "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain terkait dengan masih berprosesnya pengalihan aset dan sumber daya manusia dari K/L terkait.

Dalam APBN tahun 2025, Badan Karantina Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.420,5 miliar, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.095,0 miliar untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran, dan belanja non operasional sebesar Rp325,6 miliar. Dari anggaran non operasional yang tersedia, sebesar Rp242,1 miliar dialokasikan pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas untuk mendukung Prioritas Nasional "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri". Alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Badan Karantina Indonesia, termasuk Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp1.198,6 miliar dan PNBP sebesar Rp221,9 miliar. Adapun *outlook* realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.213,2 miliar.

Terobosan penting yang dilakukan Badan Karantina Indonesia pada tahun 2025 adalah melalui pengembangan sistem biosecurity dalam bentuk penguatan sistem Karantina dan biosecurity nasional, berupa serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan serta memfasilitasi perdagangan yang aman.

Dalam APBN tahun anggaran 2026, anggaran Badan Karantina Indonesia dialokasikan sebesar Rp1.796,1 miliar yang digunakan untuk mendukung Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk belanja non operasional untuk mendukung Prioritas Nasional melalui program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas dan belanja operasional untuk mendukung prioritas lainnya. Belanja non operasional tersebut akan dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan seperti peningkatan

kinerja dan kompetensi SDM karantina, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkarantinaan, serta digitalisasi sistem layanan perkarantinaan.

Proyeksi kebijakan strategis Badan Karantina Indonesia pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 diarahkan untuk mendukung kebijakan prioritas nasional 2 (PN 02), yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, melalui beberapa program prioritas, antara lain:

1. Badan Karantina Indonesia memegang peran strategis dalam membangun kerja sama negara-negara maju yang tergabung dalam OECD yang mendukung program prioritas Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi Nasional. Hal ini akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), melalui percepatan keanggotaan dengan proyek prioritas penyempurnaan standar, kebijakan, dan regulasi perkarantinaan yang sejalan dengan *best practices* OECD, serta harmonisasi regulasi dan peningkatan kepatuhan terhadap standar internasional menjadi syarat penting dalam proses integrasi sistem nasional ke dalam tatanan OECD.
2. Badan Karantina Indonesia juga mendukung program prioritas Swasembada Pangan. Program prioritas tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas Pengembangan Pangan Hewani, melalui proyek prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan pendekatan Satu Kesehatan atau *One Health*.
3. Kegiatan prioritas selanjutnya adalah Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan melalui proyek prioritas, yaitu: (1) pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; (2) pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan; dan (3) peningkatan kapasitas penjaminan mutu dan keamanan pangan.
4. Dalam prioritas pembangunan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik, Badan Karantina Indonesia juga berkontribusi dalam kegiatan prioritas Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan melalui proyek prioritas Pengendalian Jenis Spesies Asing yang Invasif, Vektor Penyakit, dan Zoonosis. Selain itu, Badan Karantina Indonesia juga turut berkontribusi kegiatan prioritas Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan Mendukung Bioekonomi melalui proyek prioritas Pemanfaatan Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan secara Berkelanjutan.
5. Badan Karantina Indonesia juga berperan strategis dalam menjaga integritas sumber daya hayati nasional melalui kegiatan prioritas Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik melalui proyek prioritas Pengelolaan Keamanan Hayati (*Biosafety*).

Sejalan dengan dukungan terhadap Prioritas Nasional, Badan Karantina Indonesia memiliki tujuan strategis yaitu: (1) meningkatkan perlindungan yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK; (2) meningkatkan keamanan pangan dan pakan; dan (3) meningkatkan tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas. Tujuan strategis tersebut akan dijabarkan melalui dua program yaitu: Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi pangan yang Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis tersebut, sebagai berikut: (1) meningkatnya kebijakan karantina secara efektif untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati dan peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; (2) meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan karantina yang efektif, terstandardisasi dan terintegrasi; dan (3) meningkatnya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya sasaran strategis dijabarkan dalam arah kebijakan yang melanjutkan sebagian dari arah kebijakan sebelumnya dan melanjutkan arah kebijakan secara berkelanjutan, diantaranya: (1) penguatan kebijakan dan kelembagaan; (2) pengembangan Sumber

Daya Manusia Karantina; (3) revitalisasi laboratorium termasuk sarana dan prasarana instalasi karantina; dan (4) digitalisasi sistem layanan perkarantinaan.

BADAN GIZI NASIONAL
(BA 128)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional yang mempunyai fungsi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sebagai bagian dari transformasi sosial dan investasi negara dalam pembangunan manusia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai prioritas strategis nasional pada tahun 2026. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, meliputi anak-anak sekolah, santri, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268.000,0 miliar[2] dalam anggaran APBN 2026 untuk mendukung pelaksanaan program ini secara menyeluruh dan berkeadilan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan bahan pangan bergizi lokal, operasional dapur komunitas, distribusi makanan harian, edukasi perilaku hidup sehat, pengembangan sistem pelaporan digital, serta pengawasan berlapis oleh lembaga pemerintah dan independen.

Pelaksanaan MBG didukung oleh pembangunan sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi yang dirancang secara *end-to-end* untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tinggi. Sistem ini terdiri dari berbagai layanan, termasuk dashboard kebijakan, pemetaan gizi, operasional, serta pelaporan insiden; manajemen pengetahuan seperti menu makanan, pelatihan daring, dan komunitas; serta integrasi dengan sistem pendidikan, kesehatan, dan kependudukan melalui pelacakan berbasis NIK dan pemantauan real-time. Komponen inti mencakup pengelolaan penerima manfaat, rantai pasok, armada, dapur, mitra, inventaris, keuangan, SDM, dan pengaduan, yang seluruhnya terhubung dalam platform dengan sistem autentikasi tunggal (SSO), pertukaran data terstandar, serta dukungan audit trail dan arsip elektronik. Arsitektur ini memungkinkan sinergi operasional antar instansi dan pemberdayaan pelaku lokal seperti petani, nelayan, peternak, dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan, sehingga memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.

Sebaran target penerima manfaat di setiap wilayah diresepresentasikan dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan simpul utama pelaksanaan MBG yang bertugas dalam pengolahan dan distribusi makanan bergizi harian. Pemerintah menetapkan rasio 1 SPPG untuk 3.000–4.000 penerima manfaat dengan memperhatikan kepadatan dan karakter wilayah. Dari total seluruh SPPG, sebanyak 6.800 unit akan dibangun di wilayah 3T guna menjamin pemerataan akses dan pelayanan. SPPG dikelola berbasis komunitas dan melibatkan masyarakat, lembaga lokal seperti sekolah, pesantren, dan puskesmas sebagai basis operasional, serta lembaga ekonomi maupun UMKM. Setiap SPPG dilengkapi dapur higienis, logistik pangan lokal, tenaga kerja masyarakat, dan sistem pelaporan berbasis digital.

2 sebagian dicadangkan

Proyeksi sebaran target SPPG secara wilayah terdiri dari kurang lebih 30.000 di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen pemerataan pembangunan.

Untuk memastikan jangkauan yang merata dan tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah telah memetakan potensi lokasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

1. Wilayah Jawa – Bali

   Wilayah ini menunjukkan konsentrasi tertinggi potensi pembentukan SPPG, sejalan dengan populasi siswa yang sangat besar. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi penyumbang dominan, dengan potensi ribuan titik layanan SPPG. Bali juga tercatat memiliki persebaran yang cukup merata hingga ke tingkat kecamatan.

2. Wilayah Sumatera

   Sebaran potensi SPPG di Sumatera terdistribusi dari Aceh hingga Lampung. Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan mencatat jumlah potensi tertinggi di wilayah ini. Sebaran cenderung terfokus pada kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi, namun juga mencakup wilayah pesisir dan dataran tinggi.

3. Wilayah Kalimantan – Sulawesi

   Wilayah ini memiliki tingkat konsentrasi menengah dalam potensi SPPG. Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan menjadi pusat pertumbuhan titik-titik layanan. Meskipun beberapa daerah menghadapi tantangan geografis seperti luas wilayah dan aksesibilitas terbatas, pemetaan menunjukkan keterwakilan yang cukup merata.

4. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

   Wilayah timur Indonesia menunjukkan jumlah potensi SPPG yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah barat, namun menjadi sangat strategis karena mencakup sebagian besar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, dan beberapa wilayah pesisir Papua tercatat sebagai titik utama distribusi. Untuk mendukung pelaksanaan di wilayah ini, dibutuhkan strategi logistik dan koordinasi khusus.

Peta sebaran SPPG menunjukkan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan faktor populasi, aksesibilitas wilayah, dan kebutuhan layanan gizi dalam menetapkan titik-titik potensial. Wilayah barat Indonesia (Jawa dan Sumatera) mendominasi jumlah SPPG karena kepadatan penduduk, sementara wilayah timur mendapat perhatian khusus dalam rangka menjamin keadilan sosial dan akses setara terhadap layanan gizi nasional.

Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang terintegrasi dari berbagai lintas sektor, Pemerintah memastikan bahwa Program MBG menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Program ini diharapkan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN (BA 129)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memiliki mandat strategis sebagai simpul utama koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Fungsi ini meliputi sinkronisasi, pemantauan, fasilitasi penyelesaian permasalahan, serta evaluasi atas kebijakan dan program K/L yang berkaitan dengan stabilitas politik, ketertiban keamanan, serta isu-isu lintas sektor yang berdampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembangunan nasional. Kemenko Polkam menjalankan peran sebagai pengendali keseluruhan proses koordinasi untuk memastikan konsistensi kebijakan, efektivitas implementasi program K/L, dan keselarasan pelaksanaan agenda Prioritas Nasional sesuai arahan Presiden.

Transformasi kelembagaan Pemerintah pada awal periode 2024–2029 melalui pemisahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kemenko Polkam dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sektoral. Pemisahan ini memperjelas jalur kerja koordinatif serta mengurangi beban isu yang sebelumnya sangat heterogen dalam satu kementerian koordinator. Dengan pemisahan tersebut, koordinasi isu politik dan keamanan kini dapat dilakukan secara lebih cepat, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lapangan, sedangkan koordinasi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dilakukan oleh kementerian koordinator baru dengan pendekatan yang lebih regulatif, investigatif, dan penguatan penegakan hukum. Melalui restrukturisasi ini, Kemenko Polkam memperoleh ruang lebih besar untuk menyelesaikan isu-isu kritikal seperti stabilitas politik, keamanan siber, keamanan wilayah dan maritim, potensi eskalasi konflik sosial, penguatan ketertiban masyarakat, serta respons pemerintah terhadap ancaman keamanan lintas negara.

Dalam kerangka pembangunan nasional, peran Kemenko Polkam menjadi semakin sentral untuk menjamin stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan konsistensi penyelenggaraan negara. Sepanjang tahun 2024, melalui pagu audited sebesar Rp323,7 miliar, kegiatan Kemenko Polkam diarahkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap agenda Prioritas Nasional. Pengawalan ini mencakup penyelenggaraan Pemilu Serentak; penanganan dinamika dan eskalasi keamanan di wilayah-wilayah rawan; konsolidasi keamanan Ibu Kota Nusantara; pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorganisir seperti narkotika, perdagangan orang, penyelundupan, perjudian daring, serta migrasi ilegal; penguatan keamanan siber dan tata kelola kecerdasan buatan; serta peningkatan kesiapsiagaan nasional menghadapi konflik horizontal dan bencana. Seluruh pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta mitra internasional sesuai kebutuhan isu.

Memasuki tahun anggaran 2025, Kemenko Polkam menerima pagu APBN sebesar Rp268,3 miliar dan outlook realisasi sebesar Rp226,1 miliar, yang diarahkan untuk menuntaskan agenda-agenda prioritas melalui pengoperasian instrumen koordinatif yang diperkuat. Pada tahun ini, Kemenko Polkam mengaktifkan sembilan Desk Koordinasi Prioritas, yaitu Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Keamanan Siber

dan Perlindungan Data, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Selain itu, dua Satgas Terpadu juga dioperasikan, yaitu Satgas Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Satgas Terpadu Penguatan Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara, serta satu Pokja lintas sektor yang fokus pada Sistem Pengawasan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Seluruh perangkat koordinatif ini berfungsi memastikan percepatan penyelesaian isu-isu strategis lintas K/L yang menjadi perhatian Presiden.

Melalui instrumen tersebut, Kemenko Polkam mengawal implementasi prioritas jangka pendek dan menengah seperti penguatan keamanan dan desain sistem pertahanan IKN; penyelesaian permasalahan hukum terkait konflik sosial, lahan, dan ketertiban masyarakat; peningkatan integrasi kebijakan keamanan siber lintas lembaga; fasilitasi koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan; perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri termasuk pekerja migran; pencegahan peredaran narkotika dan perdagangan orang; serta konsolidasi kebijakan penegakan atas perjudian daring dan penyelundupan lintas batas. Pengawalan ini dilakukan dengan pendekatan respons cepat, konsolidasi lintas institusi, pemetaan risiko sektoral, dan monitoring berkala pelaksanaan prioritas nasional.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kemenko Polkam dialokasikan sebesar Rp358,0 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 4,7 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui penyusunan Rekomendasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan, Demokrasi dan Kepemiluan, Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Nusantara, Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara, Penanganan Perkara secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penguatan Penegakan Hukum, Standar Kurikulum, Kompetensi, Sertifikasi, Akreditasi, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Profesi Lintas Lembaga Penegak Hukum, dan Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibu Kota Nusantara. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain mendukung beberapa kegiatan yang sesuai dengan sebagian atau seluruh 8 (delapan) agenda pembangunan di jangka menengah-panjang, antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional (PN):

1. PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,
2. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; dan
3. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Dengan demikian, restrukturisasi kelembagaan, penguatan instrumen koordinatif, dan dukungan anggaran Kemenko Polkam secara langsung menentukan kemampuan Pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Tanpa koordinasi yang kuat dan terpadu di bawah Kemenko Polkam, risiko fragmentasi kebijakan, keterlambatan respons terhadap isu strategis, serta gangguan terhadap kesinambungan pemerintahan akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan kemampuan koordinasi dan pengawalan agenda prioritas melalui Kemenko Polkam merupakan elemen kunci dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan nasional, stabilitas negara, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
(BA 130)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) antara lain mengatur bahwa Kemenko Kumham dan Imipas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenko Kumham Imipas menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kemenko Kumham Imipas juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, antara lain seperti:

1. koordinasi kegiatan di Kemenko Kumham Imipas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Kemenko Kumham Imipas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Kumham Imipas;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan data dan informasi;
8. pengawasan internal; dan
9. pengelolaan dan pelaksanaan manajemen kinerja internal Kemenko Kumham Imipas.

Dalam APBN tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran, mengingat Kemenko Kumham dan Imipas merupakan kementerian yang baru terbentuk pada akhir tahun 2024 yang mana merupakan pemecahan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kemenko Kumham dan Imipas dialokasikan sebesar Rp9,0 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni. Kemudian, Kemenko Kumham dan Imipas mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp200,1 miliar bersumber dari SABA, sehingga total anggaran Kemenko Kumham Imipas sebesar Rp209,1 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp92,3 miliar antara lain untuk belanja pegawai serta belanja operasional keperluan perkantoran, dan belanja non operasional sebesar Rp116,8 miliar antara lain untuk pelaksanaan kegiatan pada program dukungan manajemen dan program teknis. Selanjutnya, *outlook* tahun 2025 pada Kemenko Kumham Imipas diperkirakan sebesar Rp198,7 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp0,5 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp5,99 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif dan Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum. Alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restorative dan tidak ada yang berlanjut sebagai kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan

dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Pemulihan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat: Keadilan restoratif memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah, mendorong pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih luas;
2. Pengurangan Residivisme: Dengan pendekatan yang lebih fokus pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, diharapkan dapat terjadi penurunan angka residivisme (pengulangan tindak pidana). Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk kembali ke masyarakat;
3. Peningkatan Rasa Keadilan: Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan korban dan pemulihan kerugian yang dialami. Hal ini dapat meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan korban serta masyarakat secara keseluruhan;
4. Penyelesaian Perkara yang Lebih Cepat dan Efisien: Penerapan keadilan restoratif dapat mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, mengurangi beban kerja sistem peradilan, dan memberikan solusi yang lebih cepat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini merupakan salah satu amanat dari dilaksanakannya SPTTI (Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi);
5. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat tentang hukum dan dampaknya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan pemulihan dalam penanganan tindak pidana;
6. Penguatan Nilai-Nilai Keadilan dalam Masyarakat: Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab dalam masyarakat, serta mendorong budaya damai dan penyelesaian konflik yang lebih konstruktif; dan
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Keadilan restoratif juga dapat menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun korban, dengan memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan manusiawi.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kemenko Kumham Imipas dialokasikan sebesar Rp221,9 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 0,22 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui Rekomendasi Kebijakan Penguatan Substansi Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif, dan sebesar 1,93 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum);
2. Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum);
3. Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pembangunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat;
4. Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) Penegakan dan pelayanan keimigrasian terkait strategi pelayanan keimigrasian; dan
5. Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan terkait strategi pelayanan pemasyarakatan.

Selain itu, kebijakan strategis pada Kemenko Kumham Imipas yang dialokasikan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Sinkronisasi pembangunan Hukum: kebijakan Strategis ini merupakan upaya sinkronisasi pembangunan hukum meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam Pembentukan Lembaga Tunggal pengelola regulasi, Penerapan keadilan restoratif, Implementasi Pilar Budaya Hukum,

Implementasi Pilar Materi Hukum, Implementasi Pilar Kelembagaan Hukum, Implementasi Pilar Penegakan Hukum, Implementasi Pilar Informasi dan Komunikasi Hukum, Peningkatan kualitas pelayanan bidang hukum, Penyelesaian permasalahan di bidang hokum;

2. Sinkronisasi pembangunan Hak Asasi Manusia: kebijakan Strategis ini merupakan upaya sinkronisasi pembangunan Hak Asasi Manusia meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam P5 HAM terkait Hak Sipil dan Politik, P5 HAM terkait Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Peningkatan kualitas pelayanan bidang Hak Asasi Manusia, Penyelesaian permasalahan di bidang Hak Asasi Manusia;
3. Sinkronisasi pembangunan Imigrasi dan Pemasyarakatan: kebijakan Strategis ini merupakan upaya sinkronisasi pembangunan imigrasi dan pemasyarakatan meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam penegakan Hukum di bidang keimigrasian, meliputi penindakan dan pro yustisia, pemasyarakatan berbasis pendekatan (*treatment approach*), peningkatan kualitas pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, penyelesaian permasalahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
4. Penyelesaian permasalahan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan lintas K/L: kebijakan Strategis ini merupakan upaya penyelesaian berbagai permasalahan bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan lintas K/L yang berpotensi menghambat tujuan pembangunan nasional.

Proyeksi kebijakan strategis Kemenko Kumham Imipas pada tahun 2027 sampai dengan 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kemenko Kumham Imipas antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan pembangunan Hukum, penghormatan, pemajuan, pelindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia agar dapat mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
2. Melaksanakan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai prioritas;
3. Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi Kemenko Kumham Imipas untuk mewujudkan birokrasi digital dalam meningkatkan layanan berkualitas; dan
4. Membangun budaya kerja ASN dan meningkatkan profesionalitas ASN Kemenko Kumham Imipas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
(BA 131)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan antara lain mengatur bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menjalankan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas pangan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan antara lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan instansi lain yang melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pangan.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran dialokasikan sebesar Rp9,5 miliar, yang bersumber dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang pada transisi sebelum dilaksanakan restrukturisasi berkedudukan sebagai Kementerian/Lembaga pengampu. Anggaran tersebut terdiri dari belanja Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp7,0 miliar dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan (CL) sebesar Rp2,4 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Lainnya dengan realisasi sebesar Rp5,2 miliar atau sebesar 54,7 persen. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain belum mendapatkan alokasi anggaran sendiri secara definitif serta perangkat organisasi berdasarkan struktur yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 147 tahun 2028 masih belum terbentuk secara utuh dan lengkap namun beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain telah menyusun rancangan perencanaan strategis pembangunan di bidang Pangan untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dalam APBN tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp44,1 miliar dengan *outlook* realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp194,1 miliar terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai sebesar dan belanja non operasional antara lain untuk belanja barang. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program Prioritas lainnya diarahkan untuk Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain : Cadangan Pangan Pemerintah dan Stabilisasi Harga Pangan, Pengelolaan Sampah, Susut dan Sisa Pangan, Pengendalian Gas Rumah Kaca, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan dialokasikan sebesar Rp207,0 miliar, dari total anggaran yang ada dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya antara lain melalui beberapa kegiatan seperti Cadangan Pangan Pemerintah dan Stabilisasi Harga Pangan, Pengelolaan Sampah, Susut dan Sisa Pangan, Pengendalian Gas Rumah Kaca, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain Intensifikasi yaitu Penyediaan Pupuk untuk Petani, Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pendayagunaan Penyuluh

Pertanian Penyediaan Bibit Unggul dan Ekstensifikasi yaitu Pengembangan Cetak Sawah di wilayah Lumbung Pangan baru Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan antara lain pencapaian target yang ditetapkan dari Indeks Ketahanan Pangan, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pangan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan); Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan; dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dalam jangka menengah 2027-2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2025-2029.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
(BA 132)

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dana Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda Pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan Koordinasi Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/ Lembaga yang Terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;
3. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
4. Pengelolaan dan Penanganan terkait dengan isu dan agenda Pembangunan nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
5. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. Pengawalan Program Prioritas Nasional dan Kebijakan Lain yang Telah Diputuskan Oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
7. Penyelesaian Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Tidak Dapat Diselesaikan atau Disepakati Antar Kementerian/Lembaga dan Memastikan Terlaksananya Keputusan Dimaksud;
8. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga yang Terkait dengan Isu dan Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;
9. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Koordinator;
10. Pengawasan Atas Pelaksanaan Fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Presiden.

Berdasarkan peraturan dimaksud, Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan fokus pada 4 program prioritas bidang yaitu:

1. Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2. Bidang Konektivitas
3. Bidang Infrastruktur Dasar
4. Bidang Pembangunan Perumahan dan Sarana,

Selama periode 2024-2025, perkembangan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah *(miliar rupiah)*	Keterangan
1	2024	304,4	*audited*
2	2025	230,0	*Pagu APBN*

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan, dimana Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, merupakan salah satu Kementerian yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian. Sehubungan dengan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2024, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024 tentang Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (BA 120) ditetapkan sebagai Kementerian Pengampu bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (BA 132). Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran mencapai 88,8 persen yang di antaranya dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Adapun program yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam kurun waktu Oktober – Desember 2024 mencakup sejumlah program *quick wins*, antara lain : *One Spatial Planning Policy* (OSPP), Penyusunan Rencana Tata Ruang, Cetak Biru Kawasan Transmigrasi dan *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP), Persiapan Moda Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, Penurunan Harga Tiket Pesawat, Rencana Kereta Cepat Jakarta – Surabaya, Reorientasi Fokus PT PELNI, Transportasi Massal Bali, Revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Persiapan Bali *International Air Show* 2025, *Sustainable Aviation Fuel* (SAF), Pengawalan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan, Pengawalan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian, Pemanfaatan Tanah *Idle* untuk Perumahan, Peresmian dan Percepatan Pemanfaatan Rusun, Perbaikan Kualitas Rumah Dengan Skema BSPS, Perkuatan Kolaborasi Dengan *Stakeholders* Perumahan, Persiapan Pembangunan 3 Juta Rumah Baru, Status Rumah Khusus (Rhusus) bagi Pejuang eks Timor Timur.

Outlook realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp202,2 miliar. Sepanjang semester I Tahun Anggaran 2025, anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung program strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan antara lain melalui Koordinasi Kebijakan *One Spatial Planning Policy* (OSPP), Koordinasi Tata Ruang dan OSS, Koordinasi Fasilitasi Legislasi RDTR Kawasan Perbatasan Negara, Koordinasi Pengelolaan Potensi Perairan Darat Indonesia, Koordinasi *Supply Chain* sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional, Koordinasi Transmigrasi Rempang, Koordinasi Pengembangan Kawasan Pulau Laut Kalimantan Selatan, Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Pendukung Ketahanan Pangan dan Energi, Koordinasi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT), Koordinasi Persiapan Penyusunan *Area of Interest* (AoI) Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025, Koordinasi Optimalisasi

Kebandarudaraan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Regulasi Kereta Api Berkecepatan Tinggi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi, Koordinasi Pengembangan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) di Indonesia, Koordinasi Penurunan Harga Tiket, Koordinasi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Penanganan Angkutan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), Koordinasi Kerja Sama Strategis untuk Pembangunan Transportasi Berkelanjutan dan Infratstruktur Modern, Koordinasi Proyek *Giant Sea Wall* (GSW) di Teluk Jakarta, Koordinasi Perlindungan Pesisir, Penanganan Banjir, dan Percepatan Pembangunan Tanggul Laut, Koordinasi Persiapan Arus Mudik Lebaran 2025, Koordinasi Penyediaan Lahan Perumahan Melalui Pemanfaatan Lahan *Idle*; Koordinasi Pembangunan IKN, Koordinasi Pembahasan Sinergi Penguatan Pembiayaan Perumahan Nasional Bersama, Koordinasi Pengelolaan Sampah, dan Koordinasi Pembahasan Potensi Skema Pembiayaan Perumahan Melalui Skema KPBU Untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga telah menyelenggarakan kegiatan berskala internasional yaitu *International Conference on Infrastructure* yang menghadirkan lebih dari 7.000 peserta dari pemangku kepentingan investasi infrastruktur dalam hal membahas lima prioritas strategis pembangunan infrastruktur nasional.

Anggaran TA 2026, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dialokasikan sebesar Rp262,5 miliar. Dari total alokasi anggaran tersebut, antara lain akan digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya, berupa kegiatan seperti : Penyelenggaraan *International Conference on Infrastructure* 2026 dan Tindak Lanjut *International Conference on Infrastructure* 2025, Koordinasi *One Spatial Planning Policy* dan Koordinasi *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP), Koordinasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional, Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi, Koordinasi Penanganan Angkutan *Over Dimension Overloading* (ODOL), Koordinasi Satgas Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Koordinasi Penyusunan RUU Stranas Sistem Transportasi Nasional, Koordinasi Pembangunan Sekolah Rakyat dan Madrasah, *Project Fasilitation Office (PFO)* - Kantor/Sekretariat Fasilitasi Investasi Infrastruktur, Koordinasi Keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN), Koordinasi Pembangunan Tanggul Pantai Utara Jawa (*Giant Sea Wall*), Koordinasi Pembangunan Tiga Juta Rumah, Koordinasi Pemanfaatan Skema Kemitraan Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Sektor Perumahan, Koordinasi Percepatan Penyediaan Perumahan Layak di Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan. Peningkatan. Rehabilitasi Serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan, Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Konektivitas Jalan Daerah, serta arahan Presiden lainnya di tahun berjalan.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BA 134)

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024, dan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan untuk mendukung Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PM berwenang merumuskan, menetapkan, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis lintas sektor yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Kemenko PM mengampu dua Instansi yaitu Badan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, BP Taskin memiliki mandat utama untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Tugas dan fungsi DJSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2014, yaitu merumuskan kebijakan umum serta menyelaraskan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta menyusun rekomendasi kebijakan dana jaminan sosial.

Dalam APBN tahun 2024, Kemenko PM belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri karena masih tergabung dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hal ini disebabkan oleh status Kemenko PM sebagai kementerian baru hasil restrukturisasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih, sehingga proses pemisahan anggaran dan penetapan kode satker masih dalam tahap penyesuaian.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kemenko PM dialokasikan sebesar Rp139,7 miliar. *Outlook* realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp277,5 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian (SKP) dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan PDB ekonomi kreatif dan proporsi penduduk kelas menengah. Kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan. Kemenko PM mendukung Prioritas Direktif Presiden melalui SKP terlaksananya sekolah rakyat, koperasi desa merah putih (KDMP) dan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh anggaran Kemenko PM bersumber dari Rupiah Murni untuk mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 antara lain Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Kemandirian Sosial dan Ekonomi, Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan, Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain dapat mencapai tingkat kemiskinan 7,8 persen sampai 8,0 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0,5 persen sampai 1,0 persen, proporsi penduduk kelas menengah 17,5 persen, proporsi PDB ekonomi kreatif 7,3 persen sampai 7,9 persen, persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial 68 persen, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 32,1 persen, persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan 74,1 persen, sesuai dengan mandat yang diberikan pada RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kemenko PM dialokasikan sebesar Rp333,6 miliar. Anggaran belanja sebagaimana dimaksud digunakan untuk mendanai 3 (tiga) instansi yang terdiri dari Kemenko PM sebesar Rp272,9 miliar, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sebesar Rp 32,7 miliar, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebesar Rp27,9 miliar. Sebesar 29,2 persen dari total anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Kemenko PM terutama dalam penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Kebijakan strategis tersebut dilandasi oleh:

1. Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
2. Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE);
3. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Melalui Inpres No. 8 Tahun 2025, Kemenko PM juga menjalankan peran dalam mengkoordinasikan 45 K/L, 38 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, melakukan konvergensi semua program K/L dan Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, Filantropi dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta akan menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung pada Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Arah kebijakan dan strategi utama Kemenko PM terwujud dalam empat fokus SKP, yaitu: (1) penguatan integrasi dan pemutakhiran basis DTSEN sebagai fondasi ketepatan sasaran kebijakan; (2) penyelenggaraan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif agar responsif terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi; (3) optimalisasi pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat; serta (4) percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu guna memperkuat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan wilayah. Keempat fokus ini menjadi pilar untuk memastikan mandat nasional dapat dijalankan secara konsisten melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kerangka kebijakan nasional yang diamanatkan pada Kemenko PM menempatkan pengentasan kemiskinan (PN 6) dan penguatan ekonomi kreatif (PN 3) sebagai agenda utama yang harus berjalan terpadu. Dalam konteks ini, keempat fokus SKP Kemenko PM berfungsi sebagai instrumen penerjemah kerangka nasional tersebut ke dalam langkah koordinatif lintas K/L. Penguatan ekonomi kreatif yang menjadi fokus PN 3 terutama didukung melalui arah kebijakan pemberdayaan dan kemandirian. Percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi inti PN 6 dijalankan melalui integrasi data, penguatan perlindungan sosial, serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Adapun pembangunan desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu (fokus SKP4) menopang kedua agenda tersebut sekaligus, dengan memperluas basis ekonomi kreatif di wilayah perdesaan serta mempercepat penurunan kemiskinan secara terarah di tingkat lokal.

Kemenko PM secara konsisten melakukan SKP pada Prioritas Direktif Presiden yaitu terlaksananya sekolah rakyat, koperasi desa merah putih (KDMP) dan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG). SKP akan dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan dinamika prioritas direktif Presiden kedepan.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2005, Kemenko PM dan DJSN memiliki peran dalam mendorong peningkatan kepesertaan program jaminan sosial, mendorong semua manfaat program jaminan sosial nasional dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap pembentukan regulasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan implementasi, serta memonitoring evaluasi penyelenggaraan program.

Memasuki periode 2027–2029, arah kebijakan Kemenko PM difokuskan pada fase konsolidasi

dan akselerasi pencapaian target RPJMN 2025–2029, sekaligus memperkuat fondasi kelembagaan dan sistem data pemberdayaan masyarakat menuju periode RPJMN berikutnya. Fase ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh kebijakan lintas K/L yang dikoordinasikan Kemenko PM telah terintegrasi secara operasional, terukur hasilnya, dan berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*).

Dalam mendukung pelaksanaan empat fokus sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian diperlukan kerangka pendanaan yang dirancang secara komprehensif dan akuntabel, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko PM untuk tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan baik. Proyeksi perhitungan pagu untuk Kemenko PM adalah Rp425,1 miliar di tahun 2027, Rp544,9 miliar di tahun 2028, dan Rp711,1 miliar di tahun 2029. Perhitungan ini didasarkan pada target Kemenko PM untuk mengawal kebijakan pengentasan kemiskinan hingga mencapai 4,5–5,0 persen pada tahun 2029.

Kemenko PM dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan secara konsisten akan merujuk dokumen RPJMN 2025-2029, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sehingga agenda percepatan pengentasan kemiskinan berfokus pada tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat juga ditekankan untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan produktif dan mandiri dengan menyiapkan ekosistem yang memungkinkan untuk maju. Ekosistem dirancang untuk menggerakkan pendidikan dan pemberdayaan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui program sekolah rakyat, makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan merah putih sehingga tercipta kemandirian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

KEMENTERIAN HUKUM
(BA 135)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum antara lain mengatur bahwa Kementerian Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Hukum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum antara lain seperti (1) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual; (2) pelaksanaan pembinaan hukum nasional; (3) perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum; (4) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; (6) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; (7) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian; (8) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; (9) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; (10) pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; (11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; dan (12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Hukum merupakan restukturisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia, serta pembinaan hukum nasional. Realisasi anggaran Kemenkumham audited tahun 2024 sebesar Rp20.893,8 miliar. Setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih pemerintahan baru periode tahun 2024-2029, Kemenkumham dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemecahan ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Kemenkumham, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan urusan hukum dan hak asasi manusia, serta urusan keimigrasian dan pemasyarakatan. Dengan pemecahan ini, diharapkan masing-masing kementerian dapat lebih fokus pada bidang tugasnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Hukum semula dialokasikan sebesar Rp5.066,6 miliar. Dalam rangka menindaklanjuti hasil restrukturisasi organisasi, telah dilakukan pergeseran anggaran belanja pegawai kepada Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp561,6 miliar pada tahun berjalan, sehingga anggaran Kementerian Hukum menjadi Rp4.505,0 miliar. Adapun rincian anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2.162,6 miliar antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp1.455,1 miliar dan Belanja Barang Operasional Perkantoran sebesar Rp707,5 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp2.342,4 miliar antara lain untuk pembahasan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi dan Non Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Legalisasi Apostile, Tindak Lanjut Permintaan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan, Penyelesaian Amnesti, Pengawasan Kenotariatan, Administrasi Badan Usaha, Penegakan Hukum Kekayaan

Intelektual, IP Expo General Assembly (WIPO GA), Layanan Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum Nasional, Penyelenggaraan Peacemaker Justice Awards dan Peacemaker Training, Pembentukan Pos Bantuan Hukum pada Desa/Kelurahan, Analisis Kebijakan Bidang Hukum, Peningkatan Kompetensi ASN Bidang Hukum dan Transformasi Digital Layanan Hukum.

Selanjutnya, *outlook* tahun 2025 pada Kementerian Hukum diperkirakan sebesar Rp4.075,2 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas: (1) Pemenuhan Layanan Akses Terhadap Keadilan berupa Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi untuk Masyakarat Miskin; (2) Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu melalui penyusunan RPP Pelaksana UU KUHP dan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP; (3) Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian melalui Penyusunan RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, RUU Jaminan Benda Bergerak, Naskah Urgensi Dasar Hukum Pengesahan Konvensi HCCH 1965 Service Convention, Penyusunan Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Limited Liability Partnership (LLP) dan Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia; (4) Penguatan Kualitas Regulasi melalui Penghitungan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada K/L/D; (5) Penguatan Kelembagaan Regulasi melalui Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi dan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah dan (6) Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba melalui Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan layanan hukum melalui transformasi digital. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 1,62 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,19 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin, penyusunan RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan dan PKPU, RUU Narkotika dan Psikotropika, Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi, Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah serta Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain (1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui implementasi reformasi hukum yang jelas dan terukur sehingga dapat membuat masyarakat lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (2) memastikan masyarakat miskin dapat menyelesaikan sengketa hukum melalui jalur peradilan maupun di luar jalur peradilan, memastikan hak-hak mereka terpenuhi; (3) memberikan manfaat bagi debitur dan kreditur dalam menyelesaikan masalah utang piutang, serta menjaga iklim usaha yang stabil.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Hukum dialokasikan sebesar Rp4.221,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 2,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan: (1) RUU KUH Acara Perdata; (2) RUU Kepailitan dan PKPU; (3) RUU Narkotika dan Psikotropika; (4) RUU Desain Industri; (5) RUU Hukum Perdata Internasional; (6) RPerpres Service Convention; (7) Pedoman Evaluasi PUU; (8) Informasi Indeks Reformasi Hukum; (9) Draft Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (10) Draft Naskah Akademik RUU tentang Bantuan Hukum; (11) Draft Naskah Akademik RUU tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa; (12) Fasilitasi dan Pembinaan Panitia Pengawas Daerah; (13) Informasi Peta Permasalahan Hukum; (14) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; (15) Layanan Pendampingan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan; (16) Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi; (17) Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia; (18) Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah; serta (19) Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP. Alokasi untuk mendukung Prioritas lainnya dialokasikan sebesar 6,79 persen, antara lain melalui kegiatan Transformasi Digital Layanan Hukum. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (1) penguatan layanan hukum kepada masyarakat melalui transfomasi digital hukum; (2) penguatan layanan administrasi hukum umum melalui (a) integrasi data fidusia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian; (b) program penguatan dan pelaksanaan penegasan status kewarganegaraan melalui sistem elektronik; (c) keanggotaan Indonesia dalam *Hague Conference on Private International Law* (HCCH) untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; (3) penguatan layanan kekayaan intelektual, melalui (a) fasilitasi dan konsultasi inventarisasi KIK di wilayah yang memiliki potensi KIK; (b) mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang hak cipta; desain industri dan kekayaan intelektual komunal; (4) peningkatan kualitas regulasi, melalui (a) integrasi aplikasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan; (b) fasilitasi perancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan; (c) peningkatan pemantauan dan peninjauan undang-undang; (5) peningkatan literasi hukum masyarakat, melalui pembudayaan hukum melalui pemberdayaan Posbankum desa/kelurahan dan kegiatan penyuluhan hukum; (6) peningkatan kapasitas ASN dibidang hukum.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Hukum pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum antara lain: (1) Pembangunan budaya hukum guna mewujudkan masyarakat sadar hukum, melalui (a) meningkatkan pengetahuan; pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat dan (b) meningkatkan kepatuhan hukum Instansi Pemerintah dan Badan Hukum; (2) Pembangunan Hukum Nasional Berkepastian dan Berkeadilan melalui (a) pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat; (b) penegakan hukum yang adil dan transparan; (c) optimasi layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum; (d) meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha; (3) Tata kelola pemerintahan Kementerian Hukum yang baik, transparan, akuntabel dan profesional melalui penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Beberapa kegiatan prioritas nasional yang akan tetap berlanjut selama priode 2027-2029 adalah sebagai berikut : (1) RUU KUH Acara Perdata, (2) RUU Kepailitan & PKPU, (3) RUU Desain Industri, (4) RUU Hukum Perdata Internasional, (5) RUU Narkotika dan Psikotropika, (6) RPerpres Service Convention (7) Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP, (8) Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah, (9) Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi untuk masyarakat miskin berhadapan dengan hukum, dan (10) Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai *Roadmap* Pengembangan KI di Indonesia.

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
(BA 136)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Hak Asasi Manusia memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia, dan Peraturan Presiden 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) antara lain mengatur bahwa Kementerian HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian HAM menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan di bidang hak asasi manusia. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian HAM juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian HAM, antara lain seperti:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian;
3. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
4. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian HAM masih menggunakan anggaran Unit Kerja Eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) audited sebesar Rp80,0 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp29,7 miliar antara lain untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Direktorat Jenderal HAM, operasional kantor, persediaan barang konsumsi, listrik, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin dan pelaksanaan tusi lainnya (15) dan Belanja Non-Operasional sebesar Rp50,3 miliar antara lain untuk pelaksanaan program pemajuan dan penegakan HAM pusat dan wilayah. Sedangkan, realisasi anggaran Kemenkumham audited tahun 2024 sebesar Rp20.893,8 miliar. Setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih pemerintahan baru periode tahun 2024-2029, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemecahan ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Kemenkumham, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan urusan hukum dan HAM, serta urusan keimigrasian dan pemasyarakatan. Dengan pemecahan ini, diharapkan masing-masing kementerian dapat lebih fokus pada bidang tugasnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Dari alokasi anggaran tahun 2024 yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp7,0 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp 43,3 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk penyusunan profil pembangunan HAM, pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM, pelaksanaan Stranas Bisnis dan HAM, serta indeks HAM, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk:

1. Diseminasi dan penguatan HAM;
2. Informasi & dokumentasi HAM;

3. Kerjasama HAM yang ditindaklanjuti;
4. Kab/Kota Peduli HAM;
5. Stranas Bisnis dan HAM;
6. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti;
7. Rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial;
8. Rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah; dan
9. Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran HAM melalui diseminasi dan penguatan HAM di wilayah Indonesia;
2. Tersedianya informasi & dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat, meningkatnya kerjasama HAM yang ditindaklanjuti;
3. Meningkatnya jumlah kab/kota Peduli HAM;
4. Tersedianya Stranas Bisnis dan HAM;
5. Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
6. Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial;
7. Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah; dan
8. Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian HAM dialokasikan sebesar Rp174,3 miliar dan *outlook* realisasi anggaran tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp113,8 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk:

1. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM;
2. Strategi Nasional Bisnis dan HAM;
3. Penyusunan Profil Pembangunan HAM;
4. Pedoman dan Penguatan PUU Pengarusutamaan HAM;
5. Rekomendasi dan Analisis PUU dari Perspektif HAM;
6. Pendidikan HAM bagi K/L/D; dan
7. Indeks HAM Indonesia.

Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk:

1. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai HAM kepada masyarakat dan pelaku usaha diantaranya melalui pembentukan desa sadar HAM, kampung rekonsiliasi dan perdamaian (REDAM), penyebarluasan nilai nilai ham dengan perluasan pendidikan, sosialisasi, pembuatan konten kreatif, iklan dan lainnya;
2. Penanganan pengaduan/isu aktual dugaan pelanggaran HAM dan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
3. Penguatan instrumen HAM melalui Revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Penerjemahan *General Comment* untuk kemudian menjadi Peraturan Teknis serta penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang HAM;
4. *Monitoring* dan pelaporan implementasi instrumen HAM internasional kepada Dewan HAM PBB dan mengembangkan kerja sama bilateral serta menginisiasi forum *Government Focal Point of Human Rights on Southeast Asia* sebagai langkah awal Indonesia mempengaruhi dan memimpin di kawasan dalam bidang HAM;
5. Melakukan penilaian kepatuhan HAM bagi K/L/D dan Pelaku Usaha;

6. Melakukan pemantauan dan membantu percepatan pelaksanaan program dan proyek Strategi Nasional;
7. Melaksanakan Hari HAM Sedunia sebagai tindak lanjut amanah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang akan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB;
8. Pengembangan Satu Data HAM; dan
9. Pengembangan SDM HAM dan Kementerian HAM;

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain:

1. Terwujudnya penguatan fondasi internalisasi nilai-nilai HAM di masyarakat, penyelenggara negara, dan pelaku usaha;
2. Terwujudnya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dan secara bertahap penyelesaian amanah tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
3. Terwujudnya kepatuhan masyarakat, penyelenggara negara, dan pelaku usaha dalam menerapkan nilai-nilai HAM pada kehidupan, kebijakan, dan pembangunan nasional;
4. Terwujudnya Satu Data HAM yang dapat menyajikan informasi tentang HAM bagi stakeholder terkait dan masyarakat serta sebagai bahan kebijakan P5HAM; dan
5. Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM serta meningkatnya citra Indonesia di mata internasional dalam komitmennya mengimplementasikan HAM global.

Hal tersebut di atas menjadi modal bagi Pemerintah secara bertahap dapat mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi yang substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin di kawasan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kemeterian HAM dialokasikan sebesar Rp718,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain untuk Pengukuran Indeks HAM, Pembentukan Desa Sadar HAM dan Pembangunan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian). Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain:

1. Mewujudkan penguatan fondasi nilai-nilai HAM di masyarakat, penyelenggara negara, dan pelaku usaha melalui Pembentukan Desa Sadar HAM, Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM), pendidikan HAM, konten kreatif, internalisasi instrumen HAM dalam peraturan Perundang-undangan;
2. Terwujudnya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dan secara bertahap penyelesaian amanah tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
3. Terwujudnya kepatuhan masyarakat, penyelenggara negara, dan pelaku usaha dalam menerapkan nilai-nilai HAM pada kehidupan, kebijakan, dan pembangunan nasional;
4. Terwujudnya Satu Data HAM yang dapat menyajikan informasi tentang HAM bagi *stakeholder* terkait dan masyarakat serta sebagai bahan kebijakan P5HAM; dan
5. Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang berperspektif HAM serta meningkatnya citra Indonesia di mata internasional dalam komitmennya mengimplementasikan HAM global.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian HAM pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian HAM antara lain melalui:

1. Penguatan peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui penguatan kelembagaannya dan pelaksanaan Audit HAM bagi K/L/D, Pelaku Usaha, Komunitas dan Masyarakat;

2. Peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui perluasan pendidikan HAM, pembentukan Desa Sadar HAM, Kampung REDAM, dan iklan serta konten kreatif;
3. Peningkatan Layanan P5HAM berkualitas dan berorientasi kepada Masyarakat;
4. Menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme non-Yudisial,
5. Memberikan bantuan pemerintah terhadap daerah konflik;
6. Membangun citra positif dunia internasional; dan
7. Mewujudkan Satu Data HAM.

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
(BA 137)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan antara lain mengatur bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan antara lain seperti: (1) koordinasi kegiatan kementerian; (2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kementerian; (3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi kementerian; (4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; (5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; (6) koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan audited masih bergabung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Anggaran tersebut sebesar Rp14.010,4 miliar yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp4.879,8 miliar antara lain untuk kebutuhan perkantoran dan belanja pegawai, dan Rp9.130,6 miliar antara lain untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan dan pelayanan hukum bidang imigrasi pemasyarakatan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp7,5 miliar dan Prioritas Lainnya dengan alokasi sebesar Rp14.002,9 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan keadilan restoratif, perluasan implementasi SPPT-TI, penyelenggaraan penguatan program pengendalian penyakit menular, piloting pembelajaran inklusif bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan piloting implementasi alternatif pemidanaan dan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk program dukungan manajemen dan reformasi birokrasi, serta program penegakan dan pelayanan hukum. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan publik, terwujudnya kepastian hukum, sistem pemasyarakatan yang produktif dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain perubahan kebijakan atau regulasi yang dinamis dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan dan webinar, kebijakan keimigrasian (Golden, Bridging, Diaspora Visa), dan penguatan *Restorative Justice* melalui Litmas dan pendampingan Pra-Adjudikasi.

Dalam APBN tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dialokasikan sebesar Rp15.962,1 miliar dengan *outlook* realisasi anggaran diproyeksiksn sebesar Rp15.122,5 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp7.903,5 miliar antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp6.457,1 miliar dan belanja barang operasional sebesar Rp1.446,3 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp8.058,6 miliar antara lain untuk dukungan manajemen yang terdiri dari belanja tugas dan fungsi sebesar Rp628,6 miliar, belanja sarana dan prasarana sebesar Rp2.900,5 miliar, dan program penegakan dan pelayanan hukum yang terdiri dari belanja bahan makanan dan kebutuhan dasar warga binaan pemasyarakatan sebesar Rp2.444,9 miliar, belanja pemeliharaan SIMKIM sebesar Rp220,6 miliar, dokumen keimigrasian sebesar Rp654,6 miliar, belanja tugas dan fungsi sebesar Rp1.206,8 miliar dan belanja Prioritas Nasional sebesar Rp2,6 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp2,6 miliar dan Prioritas Lainnya dengan alokasi sebesar Rp15.959,5 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat reformasi publik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung 13 program akselesari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan, serta mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 2 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar nol persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/ atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan kualitas layanan, penguatan rasa aman dan tertib di masyarakat, terciptanya sistem pemasyarakatan yang rehabilitatif dan produktif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pemasayarakatan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyaraktan dialokasikan sebesar Rp18.849,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp131,4 miliar atau 0,7 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan:

1. Tata Kelola Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri;
2. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuala Lumpur;
3. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Hongkong;
4. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Tokyo;
5. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Den Haag;
6. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Sydney;
7. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuching;
8. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Los Angeles;
9. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Jeddah;
10. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di KDEI Taipei;
11. Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kota Kinabalu;
12. Operasi Mandiri Tingkat Pusat Pusat;
13. Operasi Mandiri di Wilayah;
14. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI;
15. Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selanjutnya, sebesar 99,3 persen dari APBN tahun 2026 dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk mendukung stabilitas keamanan nasional;
2. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan pelindungan hukum berlandaskan prinsip keadilan, keadilan restoratif dan kepuasan masyarakat serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berkelanjutan;
3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global; dan
4. Pelaksanaan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam penegakan, pengawasan dan pelindungan hukum di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum, meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan warga binaan secara khusus, meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasyarakatan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi, pembangunan Lapas berkapasitas besar (*mega prison*), meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu:

1. Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan untuk mendukung stabilitas keamanan nasional;
2. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan pelindungan hukum berlandaskan prinsip keadilan, keadilan restoratif dan kepuasan masyarakat serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berkelanjutan;
3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global; dan
4. Pelaksanaan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam penegakan, pengawasan dan pelindungan hukum di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Antara lain pemenuhan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, penguatan layanan keimigrasian berbasis digital, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM), penguatan pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), Memberantas peredaran Narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan, Membangun tambahan Lapas *Modern Super Maximum Security* dan Lembaga Pendidikan berstandar Internasional, Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasyarakatan, memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
(BA 138)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain mengatur bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; (3) pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; (4) penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; (5) penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; (6) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; dan (7) pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan; dan (8) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain seperti pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah *audited* sebesar Rp38.765,0 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2.785,0 miliar antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan belanja non operasional sebesar Rp35.980,0 miliar antara lain untuk belanja bantuan pemerintah, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja barang pendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan prioritas lainnya Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp32.665,0 miliar dan prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp6.101,0 miliar Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk untuk mendukung peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pemajuan dan pelestarian bahasa melalui berbagai kegiatan seperti Program Indonesia Pintar, ADEM, Aneka Tunjangan Guru Non-ASN, Sertifikasi Guru, Pendidikan Kecakapan Kerja dan Kecakapan Wirausaha, PAUD Holistik Integratif, SMK Pusat Keunggulan, akreditasi satuan pendidikan, fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan kegiatan yang mendukung program Prioritas Nasional lainnya, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya antara lain diarahkan untuk program beasiswa unggulan, pengembangan manajemen talenta nasional, dukungan penyelenggaraan SILN, kegiatan prioritas lainnya, serta pelaksanaan tugas dan fungsi, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar

dan Menengah. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 99,25 persen,dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,75 persen yang bersumber dari Hibah LN, PNBP dan BLU. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Program Indonesia Pintar, aneka tunjangan guru Non ASN, ADEM, PAUD Holistik Integratif, SMK Pusat Keunggulan, sertifikasi guru, akreditasi lembaga, fasilitasi program BIPA, serta berbagai program prioritas nasional lainnya, selain itu pada Kemendikdasmen tidak ada kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kualitas pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, hal ini dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas terus mengalami peningkatan dari 9,13 tahun pada tahun 2023 menjadi 9,22 tahun pada tahun 2024, capaian pembelajaran yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN) juga menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kualitas pembelajaran. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain adanya blokir anggaran, kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, serta tantangan lainnya seperti belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan, disparitas kualitas antar satuan pendidikan dan kompetensi pendidik, serta relevansi pendidikan menengah dan vokasi untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain percepatan sertifikasi pendidik, kebijakan guru ASN yang dapat mengajar di sekolah swasta, penyederhanaan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru BK dan guru kelas sekolah dasar dalam melaksanakan layanan BK, peluncuran gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Senam Anak Indonesia Hebat, Gerakan Bangga, Mahir, dan Maju dengan Bahasa Indonesia, penguatan literasi numerasi berbasis PISA, pelaksanaan Vocationomics melalui forum kebijakan untuk dapat saling berinteraksi, berbagi, dan berdiskusi terkait gagasan pendidikan vokasi dan ekonomi.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dialokasikan sebesar Rp33.545,2 miliar dengan *outlook* realisasi sebesar Rp47.026,2 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan belanja non operasional yang digunakan antara lain untuk belanja bantuan pemerintah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja barang pendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan prioritas lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung penguatan pendidikan karakter, percepatan wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, pengembangan talenta dan prestasi, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial, SPMB yang berkeadilan, Tes Kemampuan Akademik (TKA), penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan, melalui berbagai kegiatan antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), aneka tunjangan guru non ASN, Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), PAUD Holistik Integratif, SMK Pusat Keunggulan, program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Kecakapan Wirausaha, sertifikasi guru, SMK Pusat Keunggulan, akreditasi lembaga, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, fasilitasi program BIPA, fasilitasi penutur bahasa daerah dalam program pelindungan bahasa daerah dan berbagai kegiatan yang mendukung program Prioritas Nasional lainnya. Kegiatan yang mendukung

Prioritas lainnya diarahkan untuk fasilitasi dan layanan beasiswa prestasi, beasiswa unggulan, pengembangan pendidikan, sains dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, manajemen talenta, dukungan penyelenggaraan pendidikan di SILN, kegiatan prioritas lainnya, serta pelaksanaan tugas dan fungsi, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 99,6 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 0,4 persen yang bersumber dari BLU dan PNBP. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Program Indonesia Pintar, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, dan aneka tunjangan guru non ASN, serta berbagai kegiatan yang mendukung program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program wajib belajar 13 tahun, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan program pendidikan dan pelatihan vokasi, selain itu pada Kemendikdasmen tidak ada kontrak tahun jamak. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan; menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan; meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan; serta meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp56.682,1 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 75,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain Program Indonesia Pintar, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, dan aneka tunjangan guru non-ASN, dan sebesar 15,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan pengelolaan pengujian pendidikan, Pendidikan Profesi Guru, afirmasi kualifikasi S1/DIV, program Pembelajaran Mendalam (PM) dan atau Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) dan atau program peningkatan kepemimpinan sekolah, serta gaji dan operasional perkantoran. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai penterjemahan asta cita antara lain: a) Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; b) peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru; c) pembelajaran mendalam (Deep Learning); d) pengembangan talenta dan prestasi; e) pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; f) penguatan karakter: 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat & Pagi Ceria; g) pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial; h) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan; i) Penguatan karakter: pelatihan guru BK dan ke-BK-an; j) Tes Kemampuan Akademik (TKA); k) penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi; dan l) pembangunan kebahasaan dan kesastraan.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain: a) perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan; b) penguatan kualitas pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan masyarakat; c) penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun pra sekolah; d) penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan; e) penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta; f) penguatan pemanfaatan teknologi; g) penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; h) peningkatan kualitas pendidikan vokasi; dan i) pembangunan kebahasaan dan kesastraan bahasa daerah dan penginternasionalan bahasa.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI (BA 139)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi antara lain mengatur bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi; b) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi; d) pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi; e) pelaksanaan fasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi; f) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; g) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; h) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; i) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi baru memiliki DIPA pada tahun 2025. Pada tahun 2024, anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi masih tergabung dalam anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam APBN tahun 2024 (berdasarkan LK Audited Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) realisasi anggaran *audited* sebesar Rp100.016,8 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk gaji, tunjangan dan kebutuhan operasional kantor, dan belanja non operasional yang digunakan antara lain untuk pembangunan, beasiswa, bantuan pemerintah, dan bantuan sosial. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp53.681,68 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp54,10 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: a) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN 01); b) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 03); c) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 04); d) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 07). Untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk program percepatan stunting. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 91,4 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 4,0 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 4,6 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain KIP Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Beasiswa Dosen Gelar, Sarana dan Prasarana melalui Pendanaan SBSN, Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi, Program Pembelajaran Digital, Inovasi Wirausaha, dan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mahasiswa, Uji Kompetensi Profesi Pendidikan Tinggi Vokasi, Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi, dan program prioritas lainnya dan kontrak tahun jamak antara lain Sarana dan Prasarana melalui Pendanaan PHLN. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatkan

akses pendidikan, mempercepat pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan daya saing global, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mendorong inovasi, kewirausahaan dan pemberdayaan, dan memperkuat kualitas dosen dan lembaga. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain: 1) sempat terjadi gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa terganggu sehingga terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan 2) keterlambatan penyerapan anggaran karena proses pengadaan barang dan jasa yang lambat. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1) peningkatan program pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi; dan 2) penguatan peran tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dialokasikan sebesar Rp57.681,3 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp14.981,7 miliar untuk belanja operasional pegawai (komponen 001) dan belanja operasional barang (komponen 002), dan belanja non operasional sebesar Rp42.699,6 miliar antara lain untuk KIP Kuliah, beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, beasiswa kemitraan negara berkembang, beasiswa gelar dosen, tunjungan profesi dosen dan tunjungan kehormatan guru besar Non PNS, BOPTN, revitalisasi perguruan tinggi, dan program prioritas presiden Sekolah Unggul Garuda. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp22.894,6 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp34.786,7 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan akses pendidikan, mempercepat pemerataan pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong inovasi kewirausahaan dan pemberdayaan mahasiswa, memperkuat kualitas dan kesejahteraan dosen, peningkatan ekosistem sains dan teknologi, menciptakan SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 80,6 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN sebesar 1,2 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN sebesar 18,2 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain KIP Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Beasiswa Dosen Gelar, Sekolah Unggul Garuda, Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi, Program Pembelajaran Digital, Inovasi Wirausaha, dan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mahasiswa, Uji Kompetensi Profesi Pendidikan Tinggi Vokasi, Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi, dan program prioritas lainnya dan kontrak tahun jamak antara lain sarana dan prasarana melalui Pendanaan PHLN dan SBSN. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau prioritas lainnya antara lain meningkatkan akses pendidikan, mempercepat pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan daya saing global, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mendorong inovasi, kewirausahaan dan pemberdayaan, memperkuat kualitas dosen dan lembaga, mewujudkan pelaku sains dan teknologi unggul yang berdampak pada pembangunan bangsa, serta menciptakan budaya sains dan teknologi. Adapun *outlook* realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp52.923,2 miliar.

Dalam APBN tahun 2026, Alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah sebesar Rp61.873,9 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar 36,9 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan peningkatan dialokasikan dan perluasan akses pendidikan tinggi; pengembangan *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM); penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah;

Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen; penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi; penguatan kapasitas iptek dan inovasi; peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk pengawasan Ketenaganukliran; Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing; pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi serta penguatan tata kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN); pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG); produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan. Selain itu, sebesar 63,1 persen dari anggaran dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: peningkatan kesejahteraan dosen melalui pemberian tunjangan kinerja dosen; perluasan *talent pool* dan daya pikat talenta melalui perbaikan regulasi terkait beban kerja tridharma Perguruan Tinggi; penguatan intervensi pembinaan serta fasilitasi talenta melalui pemberian beasiswa S1 hingga S3; penguatan kolaborasi SDM iptek yang mencakup optimalisasi pemanfaatan *platform* kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra; penyediaan sarana dan prasarana esensial untuk proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain memperkuat SDM unggul, pusat riset dan akselerator kebijakan strategis, kampus sebagai simbol pertumbuhan ekonomi, dan perluasan delegasi kewenangan ke perguruan tinggi.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi antara lain KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Tinggi, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Magang Berdampak dan Program Kreativitas/Prestasi Mahasiswa, Program Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan, Penguatan Kelembagaan untuk transformasi perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Akreditasi Wajib, Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Hilirisasi dan Kemitraan, Pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Pembangunan Infrastruktur dan Peralatan yang meliputi pelaksanaan Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta, Pengembangan *Science Techno Park* (*STP*), dan program prioritas lainnya.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
(BA 140)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan antara lain mengatur bahwa Kementerian Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Kebudayaan juga menjalankan fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan; (2) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional; (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; (4) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; (5) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; (7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2025, Kementerian Kebudayaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.374,3 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai dan operasional kantor perkantoran serta belanja non operasional antara lain untuk belanja bantuan pemerintah, belanja modal, dan belanja barang pendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan prioritas lainnya. Outlook realisasi anggaran pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.257,2 miliar. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung pengelolaan warisan budaya, penguatan wilayah dan lembaga adat, penyelenggaraan event dan apresiasi masyarakat, promosi dan kerja sama kebudayaan, pembinaan dan sertifikasi tenaga dan lembaga kebudayaan, pemajuan kebudayaan desa, manajemen talenta nasional bidang seni budaya, penyensoran film dan iklan film, produksi konten budaya, revitalisasi dan penataan sarana prasarana bidang kebudayaan, pendataan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya, fasilitasi bidang kebudayaan, serta berbagai program prioritas lainnya. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 98,4 persen, Non Rupiah Murni yang bersumber dari Badan Layanan Umum sebesar 1,6 persen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya adalah terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Kebudayaan dialokasikan sebesar Rp1.507,4 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 45,1 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pengelolaan warisan budaya, penguatan wilayah dan lembaga adat, penyelenggaraan event dan apresiasi masyarakat, promosi dan kerja sama kebudayaan, pembinaan dan sertifikasi tenaga dan lembaga kebudayaan, pemajuan kebudayaan desa, manajemen talenta nasional bidang seni budaya, penyensoran film dan iklan film, produksi konten budaya, revitalisasi dan penataan sarana prasarana bidang kebudayaan, pendataan inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya, fasilitasi bidang kebudayaan, serta sebesar 54,9 persen dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas lainnya. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (1) pelindungan kebudayaan dan tradisi; (2) diplomasi, promosi dan

kerjasama kebudayaan; (3) pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; (4) penguatan tata kelola kementerian dalam mendukung reformasi birokrasi; (5) pengawasan dan akuntabilitas kinerja kementerian.

Proyeksi kebijakan strategis K/L Kementerian Kebudayaan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan adalah pelestarian dan pemajuan kebudayaan melalui: (1) revitalisasi nilai budaya dan penguatan kearifan lokal serta pengelolaan dan pemajuan warisan budaya dalam memperkaya kebudayaan nasional; (2) rekognisi global budaya Indonesia melalui penguatan diplomasi, promosi dan kerja sama; (3) talenta nasional bidang seni dan budaya yang unggul dan berkualitas; (4) pengelolaan Kekayaan Budaya Nasional secara optimal dan komprehensif yang mendukung produktivitas; dan (5) keterlibatan kelompok masyarakat berkreatifitas dan berekspresi budaya.

KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
(BA 141)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah, bahwa Kementerian Haji dan Umrah adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Haji dan Umrah dalam pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pelayanan haji, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai mandat penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama pada sektor kehidupan beragama. Penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya aktivitas ritual, tetapi juga instrumen kebijakan negara dalam memperkuat kualitas kehidupan beragama, membangun moderasi beragama, meningkatkan kesejahteraan umat melalui ekosistem ekonomi haji dan umrah, memperkuat diplomasi internasional, serta menjamin kesehatan jamaah haji melalui Pusat Kesehatan Haji. Peran strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam pembangunan nasional, khususnya bidang agama, antara lain sebagai berikut:

1. menjamin hak konstitusional umat islam dalam beribadah;
2. penguatan kualitas keagamaan dan spiritualitas umat;
3. penguatan kelembagaan keagamaan negara;
4. diplomasi keagamaan dan peran global indonesia;
5. perlindungan dan pelayanan kesehatan jamaah;
6. bimbingan, pendaftaran, perizinan, dan akreditasi penyelenggara haji khusus dan umrah;
7. pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah melalui unit pengawasan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Haji dan Umrah dialokasikan sebesar Rp129,7 miliar yang terdiri dari belanja operasional dan belanja non operasional yang antara lain digunakan untuk dukungan Program Dukungan Manajemen lainnya serta pelaksanaan Program Kementerian Haji dan Umrah. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp90,0 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung Penyelenggaraan Haji Tahun 2025. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 43,5 persen dari total anggaran Badan Penyelenggara Haji TA 2025. Adapun rincian kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan Haji Tahun 2025 yaitu Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler sebesar Rp6,1 miliar, dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri sebesar Rp2,4 miliar, dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi luar negeri sebesar Rp16,0 miliar, dan dukungan bina haji

sebesar Rp65,6 miliar. *Outlook* anggaran Tahun 2025 Badan Penyelenggaran Haji diperkirakan sebesar Rp171,7 miliar.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Haji dan Umrah dialokasikan sebesar Rp579,0 miliar. Adapun anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Layanan Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Dalam Negeri, Layanan Transportasi Jemaah Haji Dalam Negeri, Layanan Dukungan Fasilitas Petugas Haji yang Profesional. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (i) terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah; (ii) terbangunnya ekosistem haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat; (iii) terwujudnya tata kelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Haji dan Umrah pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umrah antara lain (1)terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah; (2)terbangunnya ekosistem haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat; dan (3)terwujudnya tatakelola Kementerian Haji yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas.

Arah kebijakan Pertama, yaitu "Terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada mutu layanan serta peningkatan kualitas ibadah" sangat penting karena ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, tapi juga pengalaman yang membutuhkan manajemen logistik dan pelayanan yang prima. Fokus pada aspek transformatif menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya sebagai ibadah ritual ataupun memenuhi kewajiban, tapi juga memberikan dampak perubahan positif dan pengalaman mendalam bagi jemaah, baik secara spiritual maupun sosial. Hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan edukasi, pembinaan mental dan spiritual selama proses haji, serta layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup jemaah setelah kembali ke tanah air.

Arah kebijakan kedua, yaitu "Terbangunnya ekosistem haji yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat" memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di Arab Saudi, peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan peningkatan layanan haji dan umrah. Kebijakan ini menunjukkan visi yang lebih luas, yaitu menjadikan ibadah haji sebagai peluang untuk pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, dengan mengembangkan produk-produk lokal, jasa, dan usaha mikro yang terkait dengan penyelenggaraan haji, atau memfasilitasi jemaah untuk berkontribusi dalam ekonomi syariah.

Arah kebijakan ketiga yaitu "Terwujudnya tatakelola Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, transparan, adaptif, dan berintegritas". Dengan tata kelola yang baik, penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan lebih profesional dan mendapatkan kepercayaan lebih baik lagi dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga akan meningkatkan kepercayaan jemaah dan publik terhadap proses pengelolaan haji, serta meminimalkan potensi penyimpangan atau korupsi.

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(BA 142)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disebut BPJPH, merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPJPH menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, BPJPH juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH.

Pada APBN tahun 2025, anggaran BPJPH dialokasikan sebesar Rp436,8 miliar dan diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp365,9 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pencapaian Prioritas Nasional ke-2 yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru" dengan Kegiatan Prioritas Ekosistem Halal; dan Prioritas Nasional ke-8 yaitu "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur" dengan Kegiatan Prioritas Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Anggaran TA 2025 bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp378,8 miliar (86,7 persen) dan Badan Layanan Umum sebesar Rp57,9 miliar atau (13,2 persen). Anggaran tahun 2025 terdiri dari belanja operasional sebesar Rp59,9 miliar (13,7 persen) antara lain untuk belanja pegawai (001) sebesar Rp 35,1 miliar dan belanja operasional dan pemeliharaan kantor (002) sebesar Rp24,7 miliar serta belanja non operasional sebesar Rp376,9 miliar (86,2 persen).

Dari anggaran non operasional tersebut, dialokasikan anggaran untuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui pernyataan halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 1.148.565 sertifikat halal dengan alokasi anggaran sebesar Rp 264,1 miliar (60,4 persen) serta kegiatan pendukung sertifikasi halal sebesar Rp112,7 miliar (25,8 persen) yang dialokasikan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas ekosistem halal seperti: 1) Pelayanan registrasi dan sertifikasi halal; 2) Pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal; 3) Kemitraan dan standardisasi halal; dan 4) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPJPH.

Kegiatan Prioritas Nasional yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui pernyataan halal pelaku UMK dengan kuota 1.350.000 sertifikat halal. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, memperkuat daya saing produk halal di pasar domestik dan global, melindungi pelaku usaha dan produk dalam negeri dari gempuran produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, menguatkan ekosistem halal di Indonesia menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran BPJPH dialokasikan sebesar Rp551,8 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama untuk mendukung pencapaian output Prioritas Nasional ke-2 dan Prioritas Nasional ke-8 b, antara lain melalui kegiatan: 1) Pelayanan registrasi dan sertifikasi halal; 2) Pembinaan dan pengawasan jaminan

produk halal; 3) Kemitraan dan standardisasi halal; dan 4) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPJPH.

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam mendukung terwujudnya ekosistem halal dan transformasi penyelenggaraan jaminan produk Halal antara lain: Penguatan regulasi BPJPH pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, Akselerasi fasilitasi sertifikasi Halal, digitalisasi layanan jaminan produk halal, penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal, pengembangan kebijakan ekosistem halal, penguatan kemitraan ekosistem halal, pengembangan riset pendukung ekosistem halal, penguatan laboratorium halal serta pembentukan UPT layanan jaminan produk halal BPJPH di daerah.

Proyeksi kebijakan strategis BPJPH sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPJPH Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Peningkatan Kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar, dengan strategi pencapaian yaitu:
    a. fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melinatkan bergagai pihak termasuk Kementeria/ lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
    b. optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan Service Level Agreement (SLA);
    c. penyederhanaan proses sertifikasi halal;
    d. perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal;
    e. penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk;
    f. peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani;
    g. peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel,e-commerce, dan pusat perdagangan halal;
    h. peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya;
    i. penguatan branding halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional; dan
    j. peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    k. Pemanfaatan teknologi blockchain dan QR code untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal;
    l. peningkatan integrasi sistem halal dengan ekosistem digital guna mempermudah akses informasi dan layanan halal;
    m. pengembangan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja LPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, dan Komisi Fatwa MUI dalam penyelenggara JPH;
    n. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha; dan
    o. penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mengenai daftar produk bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, dan status pengajuan melalui platform daring.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk, dengan strategi pencapaian yaitu:
    a. penguatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen;

b. penyelenggaraan kampanye nasional tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media cetak, elektronik, dan digital;
c. penguatan edukasi halal ke dalam program pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;
d. penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang halal bagi masyarakat umum, termasuk komunitas ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda;
e. publikasi layanan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI);
f. pemanfaatan media sosial, webinar, dan podcast untuk menyebarluaskan informasi terkait halal secara lebih luas dan interaktif;
g. penyediaan layanan chatbot atau hotline halal sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat terkait kehalalan produk;
h. penguatan peran tokoh agama, ulama, dan komunitas keagamaan untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan seharihari;
i. pelibatan organisasi keagamaan, majelis taklim, dan lembaga sosial dalam kampanye kesadaran halal;
j. penguatan peran masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi halal bagi masyarakat;
k. penguatan pembinaan kepada lembaga JPH (LPH, LHLN, dan Lembaga Pelatihan Kerja) serta SDM halal (auditor halal, pendamping PPH, penyelia halal, juru sembelih halal);
l. penguatan kolaborasi dengan media massa dan influencer untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal secara lebih menarik dan mudah dipahami; dan
m. peningkatan kolaborasi platform e-commerce untuk menyediakan fitur pencarian produk halal yang memudahkan konsumen dalam berbelanja;
n. pengembangan sistem pengawasan digital dan integrasi pengawasan JPH dengan Online Single Submission (OSS);
o. peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses;
p. penguatan standar pengujian kehalalan produk pada Laboratorium LPH;
q. pemberlakuan penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi JPH secara transparan;
r. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
s. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal;
t. peningkatan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
u. penguatan pengawasan pemeriksaan implementasi SJPH bagi produk luar negeri yang disertifikasi BPJPH; dan
v. penguatan sistem pengawasan produk halal pada program Makan Bergizi Gratis, konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dan pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

3. Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal:
   a. perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH;
   b. peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
   c. peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;

d. pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
e. penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
f. penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
g. peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
h. peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
i. peningkatan sosialiasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
j. penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional;
k. peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.

4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel Dalam periode 2025–2029, strategi yang dilakukan yaitu:
   a. penerapan perencanaan strategis berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program dan kebijakan BPJPH;
   b. peningkatan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
   c. peningkatan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
   d. penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur;
   e. pengembangan sistem manajemen organisasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan internal;
   f. peningkatan kompetensi pegawai BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi;
   g. pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis merit untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai;
   h. penguatan fungsi audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan manajemen risiko;
   i. penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan *outcome* agar lebih fokus pada pencapaian target strategis BPJPH;
   j. peningkatan kualitas standar layanan publik;
   k. penguatan kelembagaan BPJPH melalui pengembangan struktur organisasi satu atap dan penyempurnaan regulasi; dan
   l. peningkatan kuantitas sarana dan prasarana layanan JPH yang merata dan inklusif baik di BPJPH dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

KEMENTERIAN KEHUTANAN
(BA 143)

Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan mengatur bahwa Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Kehutanan juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian, dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan audited sebesar Rp7.818,2 miliar. Terdiri dari belanja operasional sebesar antara lain untuk untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya, dan belanja non operasional antara lain untuk pengembangan perbenihan tanaman hutan, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pencegahan dan pengamanan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemulihan ekosistem, penyiapan kawasan perhutanan sosial, penanganan konflik tenurial dan hutan adat, pengembangan usaha perhutanan sosial, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan dampak lingkungan, pengelolaan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia LHK, dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp3.854,6 miliar dan prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp1.248,4 miliar. Kegiatan yang mendukung prioritas nasional diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, peningkatan kuantitas/ketahanan air, dan peningkatan pemerataan wilayah, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk mendukung penanganan konflik, perbaikan tata kelola, digitalisasi kementerian, dan peningkatan reformasi birokrasi. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional bersumber dari Rupiah Murni dengan porsi sebesar 61,3 persen dan dari Non Rupiah Murni (PNBP dan HLN) sebesar 38,7 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain kegiatan rehabilitasi hutan secara vegetatif dan secara sipil teknis, rehabilitasi hutan mangrove, peningkatan investasi pada badan usaha, pengembangan multiusaha kehutanan, penanganan konflik tenurial, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan pengembangan kelompok perhutanan sosial. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung prioritas nasional dan/atau prioritas lainnya antara lain peningkatan ekonomi kelompok usaha perhutanan sosial, peningatan ekonomi kelompok tani hutan, menurunnya konflik tenurial, menurunnya luas kebakaran hutan, ekosistem hutan yang semakin lestari dan terjaga.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain pemenuhan belanja pegawai dalam rangka kenaikan tunjangan kinerja 80 persen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi 2 (dua) entitas terpisah yaitu: (i) Kementerian Kehutanan dan (ii) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH sesuai struktur Kabinet Merah Putih. Terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain melakukan relaksasi blokir *Automatic Adjustment* dan optimalisasi anggaran Kementerian dalam rangka pemenuhan belanja pegawai serta melakukan restrukturisasi anggaran dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Dalam APBN tahun 2025, Kementerian Kehutanan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp5.158,5 miliar dan diperkirakan akan terealisasikan sebesar Rp5.376,0 miliar, yang terdiri dari: (i) belanja operasional, antara lain dialokasikan untuk belanja gaji, tunjangan, operasional kantor dan pelaksanaan tusi lainnya dan (ii) belanja non operasional, antara lain dialokasikan untuk penertiban kawasan hutan, hilirisasi bidang kehutanan, agroforestry dalam mendukung ketahanan pangan energi dan air, digitalisasi bidang kehutanan, akses kelola kawasan untuk masyarakat, pengembangan perbenihan tanaman hutan, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pencegahan dan pengamanan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemulihan ekosistem, penyiapan kawasan perhutanan sosial, penanganan konflik tenurial dan hutan adat, pengembangan usaha perhutanan sosial, pengendalian kebakaran hutan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan prioritas nasional dengan alokasi sebesar Rp1.455,6 miliar dan prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp913,7 miliar. Kegiatan yang mendukung prioritas nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan agroforestry dalam mendukung ketahanan pangan energi dan air, akses kelola masayarakat, penyelesaian konflik tenurial, penyelesaian dan penetapan hutan adat, pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial, peningkatan produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, penyelamatan tumbuhan dan satwa liar, dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung prioritas lainnya diarahkan untuk penetapan kebijakan bidang kehutanan, pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), digitalisasi perizinan berusaha termasuk pada pintu masuk wisata alam, dan peningkatan kompetensi SDM aparatur. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni dengan porsi sebesar 16,25 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan dari Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 83,7 persen persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain penertiban dan penataan kawasan hutan, penyediaan bibit produktif dan berkualitas hasil pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan lahan dalam mendukung ketahanan pangan energi dan air, hilirisasi industri pengolahan hasil hutan, peningkatan investasi badan usaha bidang kehutanan, peningkatan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, peningkatan ekonomi kelompok tani hutan, pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial, penyelesaian konflik tenurial, penyelesaian hutan adat, akses kelola kawasan untuk masyarakat, dan peningkatan kompetensi SDM di bidang kehutanan. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung prioritas nasional dan/atau prioritas lainnya antara lain kepastian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa tepian hutan, meningkatnya kelestarian kawasan hutan, berkurangnya

konflik tenurial, berkurangnya kejadian kebakaran hutan, peningkatan industri maupun UMKM bidang kehutanan, dan peningkatan SDM bidang kehutanan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran Kementerian Kehutanan dialokasikan sebesar Rp6.039,3 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 22,9 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan agroforestry dalam mendukung ketahanan pangan dan energi, penertiban dan penataan kawasan hutan, pemulihan ekositem kawasan konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan dalam mendukung ketahanan pangan energi dan air, rehabilitasi untuk penyelamatan imbuhan mata air, pengembangan sarana prasarana destinasi wisata alam, pembangunan mikro/minihidro, pengembangan dan peningkatan kemandirian kelompok usaha perhutanan sosial, penetapan hutan adat, akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, pengamanan kawasan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, dan pengembangan SDM bidang kehutanan. Selanjutnya, sebesar 9,5 persen untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan perubahan peruntukan penggunaan dan fungsi kawasan hutan, informasi geospasial tematik kehutanan, data dan informasi inventarisasi sumber daya hutan nasional, penguatan kelembagaan pengelola daerah aliran sungai, arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, layanan pembayaran kewajiban PNBP dan penataan hasil hutan, layanan ekspor impor hasil hutan, pemulihan ekosistem kawasan konservasi, penangan konflik tenurial, layanan penyiapan perhutanan sosial, pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, pengembangan generasi muda cinta alam, dan peningkatan kompetensi SDM aparatur. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, penguasaan hutan yang berkeadilan bagi masyarakat, pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi dan air melalui *agroforestry* berbasis masyarakat, *One Map Policy* untuk mengurangi tumpang tindih dan konflik kawasan, dan digitalisasi layanan kehutanan dalam modernisasi tata kelola hutan dalam penyederhanaan birokrasi dan percepatan izin berusaha.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Kehutanan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan antara lain ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat yang masuk dalam proyek strategis nasional.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (BA 144)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian LH/BPLH menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian LH/BPLH juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LH/BPLH antara lain seperti pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LH/BPLH, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas urusan Kementerian LH/BPLH di daerah, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian LH/BPLH.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian LH/ BPLH merupakan kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga dalam APBN tahun 2024 masih mengacu pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Laporan Keuangan audited alokasi anggaran sebesar Rp7.818,2 miliar terdiri Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Modal. Dari anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp3.854,3 miliar antara lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, membangun lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sisanya sebesar Rp4.672,7 miliar dialokasikan untuk mendukung kegiatan Prioritas lainnya, yaitu diarahkan untuk pertumbuhan PDB dan ekspor LHK, peningkatan nilai transaksi keuangan kelompok tani untuk mendorong pemerataan pembangunan dan penurunan beban lingkungan kebakaran hutan dan lahan, laju deforestasi, dan perbaikan parameter lingkungan.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian LH/BPLH dialokasikan sebesar Rp1.079,8 miliar dan diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp1.050,5 miliar terdiri dari belanja operasional sebesar Rp526,9 miliar antara lain untuk menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Kementerian sebanyak 1.925 orang, menjaga pemenuhanan belanja pemerintahan dan belanja wajib yang bersifat mandatori antara lain belanja operasional dan pemeliharaan peralatan-peralatan teknis dan belanja non operasional sebesar Rp552,9 miliar antara lain untuk meningkatkan kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang andal, meningkatkan ekonomi hijau, dan meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim serta menguatkan penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp394,7miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp685,1 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas swasembada pangan, energi, air dengan kegiatan pembanguan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, fasilitasi dan pembinaan program gambut lestari serta pengujian laboratorium dan metrologi lingkungan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan tata ruang, pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber seluruhnya dari Rupiah Murni. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan kualitas tutupan lahan, pemantauan kualitas air laut, pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui adipura, pembangunan instalasi pengelolaan air limbah. Saaat ini belum terdapat kegiatan kontrak tahun jamak di Kementerian LH/BPLH. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan meningkatnya kualitas udara, mutu air sungai yang semakin baik, menurunya degradasi hutan dan lahan, menurunnya kerugian akibat bencana hidrometeorologi, berkurangnya kerugian akibat perubahan iklim dan kualitas pengeloaan sampah semakin baik.

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran Kementerian LH/BPLH dialokasikan sebesar Rp1.396,4 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar Rp222,8 miliar atau sebesar 16,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pencegahan dampak lingkungan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pengendalian pencemaran lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pemulihan kerusakan lingkungan, pengolahan sampah, mitigasi perubahan iklim dan inventarisasi gas rumah kaca serta pencegahan kebakaran lahan. Sebesar 84,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pembinaan dan koordinasi kegiatan perencanaan dan evaluasi, pembinaan penyelenggaran manajemen dan organisasi kementerian, penyelengaraan ketatausahaan, pengendalian lingkungan hidup wilayah, pengembangan kompetensi sumber daya lingkungan hidup, pengembangan generasi lingkungan, standarisasi instrumen lingkungan hidup, dan pengawasan profesional guna menjamin mutu kinerja yang bebas dari pelanggaran. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dan pembangunan berketahanan iklim.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rancangan Rencana Strategis Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 antara lain (i) meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (ii) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim, (iii) meningkatkan nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (iv) menguatkan penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor, serta (v) meningkatkan tatakelola pemerintah digital yang efektif, lincah kolaboratif, profesional dan berdampak. Salah satu proyek yang direncanakan pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 adalah pembangunan Pengelolaan Sampah Untuk Energi Listrik (PSEL), Pusat Daur Ulang Sampah, dan Instalasi Pengelolaan Limbah. Hal ini untuk mendukung tercapainya timbulan sampah yang dikelola sebesar 100 persen pada tahun 2029.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
(BA 145)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, penyelenggaraan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum, serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pekerjaan Umum juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PU, pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PU, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, terdiri atas belanja operasional untuk pembayaran gaji ASN, tunjangan, perjalanan dinas teknis, serta operasional kantor pusat dan balai, dan belanja non operasional yang dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan; pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi; pengendalian banjir dan pembangunan pengaman pantai; pembangunan dan preservasi jalan/jembatan nasional; pembangunan jalan bebas hambatan; pembangunan, peningkatan dan perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); pembangunan dan optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D); pembangunan TPA/TPST; penataan kawasan kumuh; rehabilitasi dan renovasi prasarana strategis (pendidikan/perekonomian/keagamaan, dll) serta untuk program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM).

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional ditujukan untuk 1) pembangunan bendungan multiguna/*multipurpose*, 2) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi mendukung ketahanan (swasembada) pangan, 3) pembangunan pengaman pesisir utara Jakarta, 4) pembangunan jalan/jembatan strategis, akses simpul transportasi, dan jalan lintas Jawa/Sumatera/Papua, 5) penataan kawasan destinasi pariwisata prioritas (DPP), 6) rehabilitasi infrastruktur/bangunan/gedung pasca bencana, 7) pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi prasarana olahraga mendukung *event* nasional dan internasional, 8) pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah dasar, menengah, dan madrasah, serta 9) dukungan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya yaitu pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, serta dukungan teknis dan kelembagaan. Khusus alokasi anggaran yang telah

dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni (RM), dan Non Rupiah Murni yang berasal dari PHLN, PDN, dan SBSN.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air baku, dan pembangunan/peningkatan jaringan SPAM serta kontrak tahun jamak antara lain pembangunan bendungan, prasarana pengendali banjir, jalan bebas hambatan, hingga pembangunan sarana prasarana dan bangunan gedung pemerintahan IKN. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan kapasitas tampungan air, penurunan waktu tempuh jaringan jalan lintas utama, meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak dan aman.

Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain permasalahan lahan, keterlambatan pelaksanaan lelang, belum terpenuhinya *readiness criteria* dan kesiapan pelaksana di daerah, kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam, serta fluktuasi harga bahan konstruksi. Adapun beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain percepatan pelaksanaan Inpres AMAL, IJD dan Irigasi, peningkatan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, serta penerapan digitalisasi pemantauan kinerja proyek melalui *i-eMonitoring*.

Dalam APBN tahun 2025, *outlook* Kementerian Pekerjaan Umum diproyeksikan terealisasi sebesar Rp85.737,3 miliar, dan dimanfaatkan untuk belanja operasional seperti pembayaran gaji ASN, tunjangan, perjalanan dinas teknis, serta operasional kantor pusat dan balai, dan belanja non operasional antara lain untuk pembangunan bendungan, pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi; peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah; pembangunan jalan bebas hambatan; pembangunan, peningkatan dan perluasan layanan SPAM; pembangunan dan optimalisasi/rehabilitasi pengelolaan SPAL-D dan persampahan; penataan kawasan strategis; rehabilitasi bangunan gedung negara dan prasarana publik; PHTC Revitalisasi Madrasah, rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan, pasar, olahraga, dan kesehatan; Dapur untuk Penyediaan Makan Bergizi, dan Peningkatan Bangunan Pondok Pesantren, serta pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya.

Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk 1) dukungan ketahanan (swasembada) pangan melalui pembangunan bendungan, rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi mendukung, peningkatan konektivitas jalan daerah, 2) perwujudan swasembada air melalui pengendalian banjir perkotaan, pembangunan pengaman pesisir utara Jakarta dan pulau terdepan–terluar–tertinggal (3T), pembangunan dan perluasan SPAM Kabupaten/Kota/Regional, pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project,* pengembangan SPAM Regional, dan optimalisasi/rehabilitasi SPAL-D, 3) reformasi pengelolaan sampah melalui pembangunan TPST, 4) pengembangan konektivitas jalan strategis nasional, jalan perkotaan, dan jalan utama daerah tertinggal dan perbatasan, serta 5) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pembangunan sekolah rakyat dan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak serta dukungan teknis dan kelembagaan. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni (RM), dan Non Rupiah Murni yang berasal dari PHLN, PDN, dan SBSN.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana (pengaman pantai) dan kontrak tahun jamak antara lain pembangunan bendungan, jalan bebas hambatan, pembangunan dan perluasan SPAM Kabupaten/

Kota/Regional, pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project*, rehabilitasi bangunan gedung negara dan prasarana publik, serta pembangunan gedung pemerintahan dan penataan kawasan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan kapasitas tampungan air, efisiensi pemanfaatan air irigasi, penurunan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional, peningkatan akses air minum aman dan sanitasi (akses air limbah domestik) aman, pemulihan fungsi bangunan gedung negara dan fasilitas publik, peningkatan pelayanan publik di Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan olahraga.

Dalam APBN tahun 2026, Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp118.500,0 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 62,1 persen untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pembangunan bendungan; pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi; penyediaan air baku; pembangunan infrastruktur berketahanan bencana (pengendalian banjir dan pengaman pantai); peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah; pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM Kabupaten/Kota/Regional; pembangunan dan optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan setempat (SPALD–S); pembangunan sistem pengelolaan persampahan terpadu; pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan kawasan industri, pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat; pembangunan/renovasi sekolah rakyat; serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia konstruksi, dan sebesar 37,9 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti rehabilitasi dan renovasi prasarana strategis, rehabilitasi bangunan gedung negara dan prasarana publik, pembangunan gedung pemerintahan dan penataan kawasan pada Daerah Otonomi Baru Papua, serta penataan kawasan strategis tertentu lainnya. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: dukungan pelaksanaan/penyelesaian prioritas Presiden (irigasi dukungan swasembada pangan, penyediaan SPAM terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, dan sekolah rakyat), pelaksanaan kegiatan *committed* dan pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar (terutama lanjutan kegiatan kontrak tahun jamak).

Memasuki pertengahan periode RPJMN 2025–2029, Kementerian Pekerjaan Umum mengambil peran dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berorientasi pada ketahanan, pemerataan, dan keberlanjutan. Setelah melalui fase percepatan pembangunan infrastruktur di awal periode, fokus kebijakan pada tahun 2027 hingga 2029 diarahkan untuk mengonsolidasikan hasil pembangunan, memperkuat daya tahan infrastruktur terhadap perubahan iklim dan bencana, serta memastikan manfaat infrastruktur benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Arah kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Presiden, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan dan air, pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, transisi menuju ekonomi hijau, penguatan pariwisata berkelanjutan, serta konektivitas antar wilayah yang inklusif dan efisien.

1. Mendorong Ketahanan Pangan dan Air

   Kementerian Pekerjaan Umum berperan langsung dalam memperkuat ketahanan pangan dan air nasional. Melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, waduk, dan embung, kebijakan diarahkan untuk menjamin ketersediaan air baku dan mendukung produktivitas pertanian. Program rehabilitasi irigasi yang telah berjalan pada 2025–2026 akan dilanjutkan dan diperluas pada 2027–2029, bersamaan dengan pengoperasian bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas tampung air nasional menjadi 63,54 m^3/kapita pada 2029.

Selain itu, kebijakan juga mencakup pengembangan sistem penyediaan air minum terintegrasi dari hulu ke hilir, penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis *City-Wide Inclusive Sanitation (CWIS)*, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Kementerian juga menekankan penguatan peran masyarakat dan ekosistem air minum–sanitasi berbasis inovasi dan kolaborasi agar layanan dasar dapat terjaga secara mandiri di tingkat lokal.

2. Menghubungkan Wilayah dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

   Dalam mendukung prioritas konektivitas nasional, Kementerian Pekerjaan Umum berfokus pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan nasional serta integrasinya dengan jaringan logistik dan kawasan produktif. Pada periode 2027–2029, program pembangunan jalan diarahkan untuk menghubungkan sentra ekonomi di wilayah-wilayah potensial seperti kawasan pertanian, industri kecil, dan destinasi wisata unggulan, termasuk akses ke perbatasan dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

   Selain memperluas akses, Kementerian juga memperkuat kebijakan penanganan *Over Dimension Over Loading (ODOL)* serta program keselamatan jalan nasional. Melalui penguatan jaringan transportasi darat, waktu tempuh di lintas utama ditargetkan turun hingga 1,7 jam per 100 km pada tahun 2029 menjadikan konektivitas sebagai katalis pemerataan ekonomi antarwilayah. Selain peningkatan konektivitas antarwilayah, kebijakan ini juga mencakup dukungan percepatan hilirisasi industri melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung di dalam dan luar kawasan industri, sehingga manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan oleh sektor riil.

3. Memperkuat Layanan Dasar dan Dukungan bagi Pendidikan Masyarakat

   Kementerian berkomitmen memperkuat peran infrastruktur dalam mendukung pemerataan layanan dasar, termasuk air minum, sanitasi, dan persampahan, terutama di wilayah tertinggal dan kawasan pendidikan masyarakat (*Sekolah Rakyat*). Kebijakan diarahkan untuk membangun 30 daerah tertinggal melalui peningkatan akses layanan dasar, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pengembangan pembangunan perkotaan berkelanjutan juga menjadi fokus penting — untuk mendorong kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan pada 10 lokasi prioritas wilayah metropolitan dan 40 lokasi prioritas non-metropolitan yang berpotensi menjadi simpul pertumbuhan wilayah.

4. Mendorong Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan

   Sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan terhadap ekosistem ekonomi sirkular melalui reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini berjalan berdampingan dengan pengembangan *City-Wide Inclusive Sanitation* dan sistem SPAM regional, untuk memastikan seluruh rantai layanan — dari sumber air, distribusi, hingga pengolahan limbah — dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, Kementerian turut mendorong pembangunan infrastruktur hijau yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata, termasuk di 13 lokasi destinasi wisata prioritas nasional seperti Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, dan Borobudur. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan lingkungan di kawasan wisata dan perkotaan.

3. Meningkatkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

   Sebagai respons atas meningkatnya risiko hidrometeorologi, Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana sebagai agenda prioritas.

   Langkah-langkah yang ditempuh meliputi penguatan pengendalian banjir di wilayah padat penduduk, pengamanan pantai dan wilayah pesisir, serta pengendalian daerah rawan longsor dan aliran lahar. Kebijakan ini juga terintegrasi dengan upaya pengelolaan sumber daya air

dan sanitasi berketahanan iklim, serta pembangunan sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem. Dengan demikian, setiap infrastruktur yang dibangun tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan iklim jangka panjang.

5. Optimalisasi Pendanaan dan Reformasi Tata Kelola

   Dengan keterbatasan ruang fiskal nasional, pendekatan *Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)* menjadi acuan dalam penyusunan RKA-K/L periode 2027–2029. Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong optimalisasi pendanaan melalui kombinasi sumber APBN, *Public Private Partnership (KPBU)*, dan *blended finance*. Proyek-proyek yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial tinggi akan diutamakan, sementara kegiatan nonprioritas akan diarahkan untuk mencari skema pendanaan alternatif. Selain efisiensi pembiayaan, reformasi tata kelola juga diperkuat melalui digitalisasi sistem perencanaan dan pengawasan, peningkatan transparansi, serta penguatan kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Pendekatan inovatif dan kolaboratif ini diharapkan mampu memastikan kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur nasional.

Dengan arah kebijakan yang selaras dengan prioritas Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen menjadikan infrastruktur bukan hanya simbol pembangunan fisik, tetapi sebagai alat pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas hidup, dan penggerak ekonomi rakyat.

Sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan, sejumlah kegiatan dan proyek infrastruktur strategis bidang pekerjaan umum akan selesai pada Tahun 2026 dan menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program 2027–2029.

Kegiatan/proyek infrastruktur bidang pekerjaan umum yang akan selesai Tahun 2026, antara lain:

1. Bidang sumber daya air:
   a. Proyek mendukung program swasembada pangan, yaitu: Infrastruktur Jaringan Irigasi Rawa dan Pengendalian Banjir pada KSPP Kab. Merauke (10.000 Ha); Dukungan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 melalui Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah tersebar.
   b. Penyelesaian 1 (satu) bendungan *on-going* yaitu: Bendungan Jragung.
   c. Proyek Infrastruktur Berketahanan Bencana seperti Groundsill Srandakan, Kali Bekasi, Pantai Pulau Terluar Prov. Kepri.
   d. Proyek mendukung SPAM terintegrasi Hulu-Hilir: Bendung Gerak Sembayat.
2. Bidang Bina Marga:
   a. Pembangunan jalan (157,53 km),
   b. pembangunan dan duplikasi jembatan (4.081,98 m),
   c. pembangunan jalan bebas hambatan (27,23 km),
   d. pembangunan *flyover/underpass* (150,00 m), dan
   e. peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan (1.571,15 km).
3. Bidang Cipta Karya:
   a. Kegiatan yang akan selesai di tahun 2026 dan tidak berlanjut di tahun 2027 adalah Pembangunan IKN, untuk selanjutnya seluruh aset yang telah dibangun di IKN akan diserahkan terimakan dan dilanjutkan pengelolaannya oleh OIKN.
   b. Selain itu, pembangunan gedung pemerintahan dan penataan kawasan pada Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan akan selesai di tahun 2026.
   c. Rehabilitasi bangunan gedung negara dan prasarana publik terdampak aksi demonstrasi di

provinsi Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi selatan diselesaikan di tahun 2026.

d. Dukungan Swasembada Air berupa pembangunan SPAM terintegrasi hulu dan hilir terutama untuk perluasan atau optimalisasi layanan SPAM yang masih *idle* diproyeksikan untuk selesai di tahun 2026, termasuk dengan optimalisasi SPALD-S dan SPALD-T.

4. Bidang prasarana strategis:
   a. Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah antara lain; Lanjutan Pembangunan Sekolah Rakyat sebanyak 104 Unit, Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC sebanyak 1.000 Unit, Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi Infrastruktur Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur sebanyak 2 Unit, Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Kabupaten Bojonegoro sebanyak 2 Unit, Lanjutan Optimalisasi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Nusa Tenggara Timur I sebanyak 11 Unit, Optimalisasi Rehabilitasi SMPN 1 Kedungbanteng Kab Tegal sebanyak 1 Unit, Optimalisasi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Nusa Tenggara Timur II sebanyak 25 Unit.
   b. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi antara lain; Lanjutan Pembangunan Lanjutan KDP Gedung Kuliah Politani Kupang sebanyak 1 Unit, Optimalisasi KDP RSPTN Universitas Mataram sebanyak 1 Unit, Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Dharma Acarya dan Fakultas Dharma Duta Brahma Widya IAHN, Palangkaraya sebanyak 1 Unit.
   c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga antara lain; Lanjutan Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, Kota Medan Tahap II sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Prasarana Olahraga Jakarta sebanyak 1 Unit, Lanjutan Renovasi Stadion Wibawa Mukti sebanyak 1 Unit, Lanjutan Perencanaan P3SON Hambalang, Jawa Barat.
   d. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan antara lain; Lanjutan Pembangunan Pasar Painan sebanyak 1 Unit, Lanjuta Pembangunan Pasar Beringin Jaya Kota Sungai Penuh sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Pasar Ngawen Blora sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Pasar Kesamben Kabupaten Blitar sebanyak 1 Unit, Lanjutan Renovasi Pasar Kroya sebanyak 1 Unit.
   e. Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan antara lain; Lanjutan Rehabilitasi Masjid Syuhada Yogyakarta sebanyak 1 Unit.
   f. Prasarana Bidang Kesehatan antara lain; Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Musi Rawas sebanyak 1 Unit

Kegiatan/proyek yang tetap berlanjut selama periode 2027-2029, antara lain:

1. Bidang sumber daya air:
   a. Proyek untuk mendukung program swasembada pangan untuk pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan irigasi air tanah seperti: D.I. Rentang, D.I. Komering, D.I. Batang Asai, Bendung Jatimlerek, D.I. Waduk Bening, D.I. Siman, D.I. Mrican, D.I. Cisadane, serta Dukungan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025.
   b. Lanjutan penyelesaian 14 Bendungan: Mbay, Bagong, Bener, Manikin, Budong-budong, Way Apu, Cijurey, Cibeet, Jenelata, Karangnongko, Cabean, Tiga Dihaji, Bulango Ulu, Riam Kiwa.
   c. Proyek Infrastruktur Berketahanan Bencana: pengaman Pantai Pesisir Teluk Jakarta, Pengendalian Banjir Jabodetabekpunjur, pengendali lahar Gunung Marapi, NUFReP, FMNJP.
   d. Proyek mendukung SPAM terintegrasi Hulu-Hilir: Air Baku Kertasari, Air Baku Karian, Air Baku Sidan, Air Baku DAS Kawal.
   e. Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA melalui operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

2. Bidang Bina Marga
    a. Pembangunan jalan (TA. 2027 : 541,27 km, TA. 2028 : 540,31 km, TA. 2029 : 425,60 km),
    b. Pembangunan dan duplikasi jembatan (TA. 2027 : 4.046,84 m, TA. 2028 : 6.515,37 m, TA. 2029: 6.548,83 m),
    c. Pembangunan jalan bebas hambatan (TA. 2027 : 51,42 km, TA. 2028 : 71,05 km, TA. 2029 : 23,90 km),
    d. Pembangunan *flyover/underpass* (TA. 2027 : 4.249,53 m, TA. 2028 : 10.640,81 m, TA. 2029 : 8.570,76 m), dan
    e. Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan (TA. 2027 : 6.678,60 km, TA. 2028 : 6.548,85 km, TA. 2029 : 5.151,74 km).
3. Bidang Cipta Karya
    a. Pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM Kabupaten/Kota/Regional;
    b. Pembangunan dan optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan setempat (SPALD–S);
    c. Pembangunan sistem pengelolaan persampahan terpadu;
    d. Pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas dan kawasan industri,
    e. Pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat; R
    f. Rehabilitasi bangunan gedung negara dan prasarana publik terdampak aksi demonstrasi,
    g. Pembangunan gedung pemerintahan dan penataan kawasan pada Daerah Otonomi Baru Papua Pegunungan, serta
    h. Penataan kawasan strategis pada 10 kota wilayah metropolitan dan 40 kota non wilayah metropolitan, serta kawasan strategis prioritas lainnya.
4. Bidang Prasarana Strategis
    a. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi antara lain; Lanjutan Pembangunan Sport Science USU sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Gedung Menara Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Lanjutan GIK UGM Tahap II sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Gedung Training Center Universitas Aissyah Yogyakarta sebanyak 1 Unit..
    b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga antara lain; Lanjutan Pembangunan Stadion Agus Salim sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Asrama Atlet Cibubur Youth Elite Sport Center sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Stadion Wergu Wetan Kab. Kudus sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Stadion Joyokusumo Pati sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Stadion Sudiang, Kota Makassar sebanyak 1 Unit.
    c. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan antara lain; Lanjutan Lanjutan Pasar Loka Anambas sebanyak 1 Unit, Lanjutan Revitalisasi Pasar di Jember sebanyak 1 Unit, Lanjutan Rehabilitasi Pasar Wakuru Muna sebanyak 1 Unit, Lanjutan Pembangunan Pasar Turatea Jeneponto Sebanyak 1 Unit.
    d. Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan antara lain; Lanjutan Revitalisasi Kawasan Masjid Demak, sebanyak 1 Unit.
    e. Prasarana Bidang Kesehatan antara lain; Lanjutan Pembangunan RSUD Poso sebanyak 1 Unit.
    f. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan antara lain; Lanjutan Revitalisasi Masjid Seribu Bulan sebanyak 1 Unit, Lanjutan Revitalisasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Kota Makassar sebanyak 1 Unit.
    g. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya antara lain; Lanjutan Pembangunan Shelter Tsunami Cilacap sebanyak 1 Unit.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (BA 146)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PKP menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PKP juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PKP.

Pada tahun 2024, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp14.680,8 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai dan belanja barang operasional, serta belanja non operasional sebesar Rp14.333,0 miliar antara lain untuk belanja barang non operasional program dukungan manajemen, dan belanja barang non operasional program perumahan dan kawasan permukiman. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pembangunan Rumah Susun (Rusun), Pembangunan Rumah Khusus, Bantuan PSU, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Pembangunan Rusun Asrama Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Rusun Asrama Pendidikan Keagamaan. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 98,3 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 1,7 persen. Kegiatan kontrak tahun jamak antara lain pembangunan Rusun ASN IKN dan pembangunan Rusun ASN di DOB Papua. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kualitas hidup masyarakat sebagai dampak dari peningkatan kualitas rumah yang dihuni. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain perubahan prioritas kegiatan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan direktif, strategis, dan tematik dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan akses rumah layak huni, serta inovasi pengadaan bantuan PSU melalui e-katalog.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian PKP dialokasikan sebesar Rp5.274,4 miliar, sementara outlook tahun 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp4.713,6 miliar. Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 digunakan untuk memenuhi belanja operasional antara lain untuk belanja pegawai dan belanja non operasional antara lain untuk belanja barang non operasional program dukungan manajemen dan belanja barang non operasional program perumahan dan kawasan permukiman. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas BSPS, Pembangunan Rusun, Pembangunan Rumah Khusus, Bantuan PSU, dan Penanganan Kawasan Kumuh. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Pembangunan Rusun Pendidikan Tinggi, Rusun Asrama Pendidikan Keagamaan, serta pemeliharaan dan perawatan

Tower Rusun. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun jamak antara lain Pembangunan Rusun. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain meningkatnya kualitas hidup masyarakat sebagai dampak dari peningkatan kualitas rumah yang dihuni.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp10.895,5 miliar dari total anggaran yang ada, sebesar 89.5 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan BSPS, Pembangunan Rusun, Pembangunan Rumah Khusus, PSU Rumah Umum, Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi, dan sebesar 10.6 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan pada program dukungan manajemen dan program dukungan fisik lainnya. Kebijakan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sesuai target.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian PKP pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian adalah pembangunan dan renovasi 3 juta rumah antara lain 1 Juta Rumah di Perkotaan, 1 Juta Rumah di Perdesaan, dan 1 Juta Rumah di Pesisir.

KEMENTERIAN PARIWISATA
(BA 147)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata antara lain mengatur bahwa Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Pariwisata juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata antara lain:

1. Sekretariat Kementerian

   Berfungsi dalam koordinasi perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, perencanaan, sumber daya manusia, kehumasan, dan akuntabilitas kelembagaan.
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan

   Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata.
3. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

   Bertugas menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan destinasi pariwisata serta penguatan infrastruktur pendukung.
4. Deputi Bidang Industri dan Investasi

   Merumuskan kebijakan terkait penguatan usaha, fasilitasi industri, investasi, dan pembiayaan sektor pariwisata.
5. Deputi Bidang Pemasaran

   Menetapkan dan melaksanakan kebijakan promosi dan pemasaran destinasi baik di dalam maupun luar negeri.
6. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)

   Mengelola kebijakan pengembangan *event*, festival, dan kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) secara nasional dan internasional.
7. Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata

   Menjalankan kebijakan teknis di tingkat operasional di wilayah kerja masing-masing, sesuai arahan dan kebijakan Kementerian yakni bidang pendidikan dan pengembangan zona otorita pariwisata.

Melalui struktur tersebut, Kementerian Pariwisata menjalankan fungsi secara terpadu, dari perumusan kebijakan (berbasis data, kajian, dan konsultasi publik), penetapan kebijakan (melalui regulasi dan keputusan menteri), hingga pelaksanaan kebijakan (melalui program, kegiatan, dan fasilitasi langsung kepada masyarakat dan pelaku industri) yang secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan pariwisata. Deputi ini menangani pelatihan, sertifikasi, penguatan standar kompetensi, serta mendorong kolaborasi dengan mitra nasional maupun internasional untuk membangun ekosistem SDM yang unggul dan adaptif.
2. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bertanggung jawab atas perencanaan teknis destinasi, penyusunan pola perjalanan tematik, pemetaan kawasan, serta mendorong

penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan melalui berbagai pendekatan regeneratif.

3. Deputi Bidang Industri dan Investasi menyusun strategi penguatan usaha, mendorong fasilitasi pembiayaan, membina ekosistem rantai pasok, serta merumuskan arah investasi yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Peran ini juga mencakup pelaksanaan sertifikasi usaha dan perlindungan pelaku usaha secara menyeluruh.
4. Deputi Bidang Pemasaran menetapkan strategi branding nasional seperti "Wonderful Indonesia," menyelenggarakan kampanye promosi baik di dalam maupun luar negeri, serta mengelola kerja sama co-branding dengan pelaku usaha. Kebijakan pemasaran disusun berdasarkan segmentasi pasar dan tren wisatawan global yang dinamis.
5. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan bertanggung jawab atas kebijakan pengembangan event sebagai daya tarik wisata. Deputi ini melaksanakan kurasi dan fasilitasi event nasional dan internasional, mendukung program unggulan seperti Karisma Event Nusantara (KEN), serta mendorong penguatan MICE sebagai bagian dari portofolio wisata berkualitas.

Pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh unit pelaksana teknis seperti Politeknik Pariwisata yang bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pariwisata, serta Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang menjalankan fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan destinasi super prioritas seperti Borobudur, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Pariwisata dialokasikan sebesar Rp1.488,7 miliar dan diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp1.330,6 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan belanja non operasional antara lain untuk Program Pariwisata, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen (di luar Operasional). Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp653,3 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp835,4 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas Peningkatan SDM, Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Peningkatan Industri dan Investasi, Pengembangan Pemasaran dan Event serta Pendidikan di Bidang Pariwisata, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk Layanan Kesekretariatan dan Belanja Operasional.

Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 89,6 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 10,4 persen yang berasal dari PNBP dan BLU. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan aksesibilitas dan konektivitas bagi masyarakat dan wisatawan; meningkatnya peluang ekonomi baru melalui atraksi wisata, wisata religi dan gastronomi; meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah di destinasi wisata serta penguatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp1.851,7 miliar untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan peningkatan SDM, pengembangan destinasi dan infrastruktur, peningkatan industri dan investasi, pengembangan pemasaran dan event serta pendidikan di bidang pariwisata, dan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti layanan kesekretariatan dan belanja operasional. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain (1) Gerakan Wisata Bersih; (2) sinergi peningkatan keselamatan wisata (safety), peningkatan sinergi dan koordinasi keselamatan di daya tarik wisata (DTW) dan usaha pariwisata; (3) pengembangan pariwisata berkualitas melalui pengembangan

destinasi pariwisata, SDM, investasi & industri, pemasaran, produk wisata dan event, serta pengembangan wisata minat khusus seperti gastronomy, wellness, dan marine tourism. (4) Event by Indonesia, dengan penyelenggaraan event berkualitas dengan ciri khas Indonesia dan mengangkat nama di kancah global; dan (5) Desa Wisata, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Pariwisata pada tahun 2027 sampai dengan 2029 mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 yang mengintegrasikan 5 (lima) aspek pengarusutamaan pembangunan yang terdiri dari Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, Pengarusutamaan SDGs, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, dan Pembangunan Berketahanan Iklim. Kelima prinsip tersebut menjadi fondasi dalam setiap perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan, guna memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Rancangan Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana diamanatkan dalam 2 (dua) Perpres tersebut, Renstra Kementerian Pariwisata mengacu pada arah kebijakan Prioritas Nasional (PN) 3 (Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi) dengan Program Prioritas (PP) Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, yang dituangkan dalam bentuk sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang mendukung penguatan 3 (tiga) Destinasi Prioritas Regeneratif (DPR) yaitu Bali, Kepulauan Riau dan Greater Jakarta dan pengembangan 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Lombok-Gili Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru-dan Morotai.

Dalam periode tahun 2025-2029, Kementerian Pariwisata memiliki 6 (enam) arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Adapun 6 (enam) arah kebijakan Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan I berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan pariwisata yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata (SS 1), dengan fokus pada peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja pariwisata. Kebijakan ini mencakup 3 Sasaran Program (SP) yakni Terserapnya tenaga kerja pariwisata di destinasi prioritas dan regeneratif, termanfaatkannya kerja sama dan kebijakan strategis bidang kepariwisataan dan meningkatnya kapabilitas SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dalam implementasinya, SP pertama difokuskan pada pelatihan teknis dan manajerial bagi tenaga kerja industri pariwisata melalui pendekatan berbasis kompetensi dan skema sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dan internasional. Untuk SP kedua, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan utama. Pertama, Pengembangan Manajemen Strategis, dengan menghasilkan kebijakan sektoral dan tematik berbasis data. Rekomendasi kebijakan bidang kepariwisataan ini

menjadi dasar harmonisasi kebijakan lintas sektor dan pengambilan keputusan internal. Kedua, Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Internasional, yang mencakup partisipasi dalam forum global (seperti UNWTO dan ASEAN), adopsi praktik baik, dan penyusunan posisi strategis Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral. Upaya ini menguatkan dimensi global dan legitimasi internasional dari kebijakan nasional. Adapun SP ketiga, dijalankan melalui penguatan sistem pendidikan vokasi kepariwisataan modern dan responsif terhadap perubahan industri. 6 (enam) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Bali, Makassar, Medan, Palembang, Lombok, dan Bandung menjalankan mandat ini dengan spesialisasi wilayah dan fokus pengembangan wisata tematik pada wisata budaya, wisata bahari, wisata geopark, wisata olahraga, Pariwisata Ramah Muslim dan wisata kuliner. Kurikulum diperbarui secara berkala berdasarkan kebutuhan industri, dan kerja sama internasional dengan lembaga pendidikan serta pelaku industri global terus diperluas untuk menjamin relevansi lulusan.

Arah Kebijakan II difokuskan pada pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata. Pendekatan pengembangan dilakukan dengan mengutamakan kesiapan destinasi menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam 20 besar Travel and Tourism Development Index (TTDI) dunia. Dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata berpedoman pada 4 (empat) pilar utama yaitu pengelolaaan destinasi yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial ekonomi, keberlanjutan pelestarian budaya, dan keberlanjutan pelestarian lingkungan. Pariwisata berkelanjutan diterapkan pada semua jenis destinasi dan semua aktivitas wisata agar pengelolaan dan pengembangan destinasi, dan wisatawan yang berkunjung lebih bertanggung jawab

Langkah operasional yang ditempuh meliputi perancangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, yang difokuskan pada fasilitasi penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan, mitigasi risiko destinasi pariwisata, pendampingan pengembangan kawasan destinasi pariwisata prioritas bidang perancangan destinasi, indeks pengembangan kepariwisataan nasional, indeks daya saing kepariwisataan, serta Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, difokuskan pada pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata secara inklusif melalui pengelolaan destinasi yang partisipatif dan berkelanjutan serta pengembangan produk pariwisata yang atraktif dengan memastikan kesiapan destinasi wisata sesuai dengan identitas destinasinya, kemudian merangkai destinasi wisata secara terintegrasi, dan mencitrakan secara komprehensif kepada calon wisatawan serta diversifikasi produk pariwisata yakni Marine, Gastronomy dan Wellness, ataupun tematik lainnya, seperti kebudayaan dan Geopark. Peningkatan amenitas dan aksesibilitas pariwisata dilakukan melalui dua bagian wilayah yaitu Wilayah I meliputi Jawa dan Sumatera, Wilayah II meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pengelolaan kawasan otorita pariwisata prioritas menjadi bagian penting dari strategi ini dengan menekankan pengelolaan kawasan otorita pariwisata yang berada di bawah kewenangan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, yaitu Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dengan fokus pengelolaan pada peningkatan efektivitas tata kelola destinasi melalui pendekatan zonasi kawasan, penguatan fungsi kelembagaan, dan penyelarasan investasi dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Arah Kebijakan III menitikberatkan pada pengembangan industri dan investasi pariwisata yang berkualitas yang diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata khususnya pada indikator rasio PDB sektor pariwisata. Fokus utama dari arah kebijakan ini adalah mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan dan berkualitas melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan

pelaku usaha secara menyeluruh, dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir. Kebijakan ini dioperasionalisasikan melalui 5 (lima) fokus utama kegiatan. Pertama, Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, untuk menjamin kualitas layanan, keamanan konsumen, dan keberlanjutan usaha, dengan mengadopsi standar internasional dan integrasi aspek ramah lingkungan dan ramah sosial ke dalam proses sertifikasi. Kedua, Peningkatan Kapasitas Manajemen Industri yang difokuskan pada pelaku usaha mikro hingga menengah, termasuk agregator, dengan dukungan pelatihan tata kelola, transformasi digital, mitigasi risiko usaha, dan sistem rantai pasok yang adil dan efisien. Pendekatan supply meet demand mendorong kelokalan dan daya saing komunitas lokal dalam rantai bisnis nasional. Ketiga, Manajemen Investasi Pariwisata, meliputi penyusunan strategi dan rekomendasi kebijakan investasi, promosi investasi pariwisata dan peningkatan jejaring, pendampingan dan advokasi badan usaha untuk peningkatan realisasi investasi, hingga pendampingan perizinan berusaha. Keempat, Pengembangan Usaha Pariwisata Berkelanjutan, yakni inisiatif hijau diperkuat dengan pelatihan teknis, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha berkelanjutan, dan penilaian kinerja keberlanjutan usaha secara berkala. Upaya ini selaras dengan komitmen global terhadap ekonomi sirkular dan transisi energi bersih. Terakhir, Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan guna meningkatkan daya saing usaha pariwisata agar dapat memperluas akses pasar dan layak mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan. Melalui peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar dan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan inovatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata, blended finance, dana usaha pemula, dan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi, agar pembiayaan usaha menjadi lebih inklusif, terutama bagi perempuan dan pelaku usaha desa wisata. Dengan pendekatan komprehensif ini, arah kebijakan ini diharapkan mampu memperluas basis industri pariwisata nasional, mempercepat arus investasi yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta menciptakan ekosistem usaha pariwisata yang inklusif, adaptif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan IV diarahkan pada pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata berkualitas dirancang untuk mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata, khususnya melalui indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memperkuat citra pariwisata Indonesia di pasar global dan domestik melalui strategi promosi yang terintegrasi, inovatif, dan inklusif. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan utama leisure/rekreasi. Pengembangan pasar dan pemasaran dilakukan dengan pendekatan berbasis segmentasi wilayah strategis. Mancanegara I terdiri dari kawasan ASEAN, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Mancanegara II terdiri dari kawasan Asia Timur, Australia, dan Oceania. Mancanegara III mencakup kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika. Sedangkan kawasan Nusantara merupakan tulang punggung volume kunjungan wisatawan nusantara.

Pengembangan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata diwujudkan dengan pemanfaatan kanal digital dan teknologi berbasis AI, Kampanye promosi tematik dan berbasis narasi lokal (storytelling), Penggunaan AR/VR untuk konten promosi imersif, serta kemitraan strategis dengan media global, pelaku industri, dan komunitas diaspora. Pengembangan merek nasional "Wonderful Indonesia" diorientasikan ulang agar relevan dengan generasi muda dan pasar minat khusus. Citra Indonesia sebagai destinasi budaya yang dikuatkan dengan kampanye untuk segmen *ecotourism, adventure tourism, spiritual* dan *wellness*, *sport tourism*, *luxury*, dan *art tourism*. Untuk mendukung hal ini, strategi promosi difokuskan pada Penguatan destinasi pariwisata prioritas dan regeneratif; partisipasi aktif dalam bursa pariwisata internasional; promosi lintas batas (*cross-border promotion*) di kawasan perbatasan; serta penguatan jaringan diplomasi pariwisata melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,

diaspora, dan lembaga multilateral. Di sisi domestik, pemasaran pariwisata nusantara ditujukan untuk memperluas distribusi kunjungan wisatawan ke destinasi di luar Bali dan Jakarta, dengan penekanan pada destinasi budaya, kuliner, dan ekowisata, kampanye nasional berbasis komunitas dan partisipasi lokal, serta Integrasi promosi dengan platform digital transportasi, akomodasi, dan marketplace pariwisata. Dengan pendekatan ini, arah kebijakan diharapkan mampu menumbuhkan permintaan terhadap pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, memperluas jangkauan pasar secara strategis dan inklusif, memperpanjang lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, serta menghasilkan dampak ekonomi langsung yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Arah Kebijakan V ini dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata, terutama pada indikator devisa pariwisata, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Fokus utama arah kebijakan ini adalah menarik wisatawan dengan tujuan utama bisnis, melalui penguatan ekosistem event pariwisata dan pengembangan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Fokus program dalam arah kebijakan ini mencakup penguatan dan penyelenggaraan event berbasis kekayaan intelektual, di mana setiap kegiatan dikembangkan dari karya budaya, kuliner, seni pertunjukan, cerita rakyat, serta produk kreatif unggulan Indonesia yang memiliki nilai komersial sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. Event-event tersebut dikurasi secara selektif untuk merepresentasikan karakter lokal dan meningkatkan daya saing budaya Indonesia di tingkat global. Hal ini diwujudkan melalui Program Karisma Event Nusantara (KEN) dimana pemerintah berupaya meningkatkan kualitas kurasi event daerah agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas budaya. Selain itu, kebijakan Event by Indonesia dikembangkan untuk menghadirkan kegiatan berskala global yang mencerminkan karakter dan kekuatan bangsa Indonesia di bidang seni, budaya, olahraga, dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata juga memperkuat sektor MICE melalui peningkatan kapasitas penyelenggara, standardisasi fasilitas, dan sinergi lintas sektor guna menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama kegiatan internasional di kawasan Asia Pasifik.

Terakhir, Arah Kebijakan VI difokuskan pada tata kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Transformasi birokrasi menjadi kunci dalam kebijakan ini, dengan menekankan pentingnya dampak kinerja strategis di tingkat kementerian serta dampak kinerja program di setiap kedeputian, guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Dengan enam arah kebijakan utama ini, Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk mendorong pariwisata nasional sebagai sektor unggulan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF (BA 148)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif mengatur bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Ekonomi Kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif masih bergabung dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dialokasikan sebesar Rp279,6 miliar, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp186,7 miliar antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk layanan perkantoran dan belanja non operasional sebesar Rp92,9 miliar antara lain untuk program pengembangan Ekonomi Kreatif serta program dukungan manajemen. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dengan alokasi sebesar Rp22,8 miliar dan Prioritas lainnya dengan alokasi sebesar Rp256,8 miliar.

Dalam APBN tahun 2025, alokasi anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif adalah/Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp279,6 miliar dan outlook realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp279,6 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional tiga yaitu mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi serta Prioritas Nasional lima yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 100 persen.

Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain seluruh program Ekonomi Kreatif serta program dukungan manajemen. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain bertumbuhnya PDB Ekonomi Kreatif, bertumbuhnya ekspor Ekonomi Kreatif, meningkatnya Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif, dan bertumbuhnya investasi Ekonomi Kreatif.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp528,5 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14,2 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui Program Ekonomi Kreatif dan sebesar 85,8 persen untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain untuk melalui beberapa kegiatan seperti Program Ekonomi Kreatif dan Program Dukungan Manajemen. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain yaitu penguatan ekosistem subsektor ekonomi kreatif

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, disusun berdasarkan visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan dengan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas transformasi dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Pengembangan tersebut menggunakan pendekatan rantai nilai yang komprehensif dan terintegrasi untuk melaksanakan program prioritas demi mencapai target indikator kinerja utama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif secara efektif. Rantai nilai ekonomi kreatif mencakup lima tahapan strategis yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, dengan dukungan instrumen kebijakan yang spesifik pada setiap tahapan melalui berbagai kegiatan dalam delapan Klaster Asta Ekraf, yaitu Ekraf Data, Ekraf Bijak, Talenta Ekraf, Infra Ekraf, Ekraf Kaya, Dana Ekraf, Pasar Ekraf, dan Sinergi Ekraf.

KEMENTERIAN KOPERASI
(149)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi antara lain mengatur bahwa Kementerian Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Koperasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Koperasi juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi antara lain seperti: (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, pengembangan talenta, peningkatan daya saing, dan pengawasan koperasi; (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, pengembangan talenta, peningkatan daya saing, dan pengawasan koperasi; dan (3) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM merupakan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM pada November tahun 2024. Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Koperasi audited dialokasikan sebesar Rp.0,-.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Koperasi dialokasikan sebesar Rp473,3 miliar terdiri dari belanja operasional antara lain untuk belanja gaji dan tunjangan, serta belanja non operasional yang terdiri dari anggaran Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran Kementerian Koperasi, antara lain untuk: (1) penguatan regulasi perkoperasian, kelembagaan, tata kelola, dan digitalisasi; (2) pengembangan usaha; (3) peningkatan literasi dan kapasitas Sumber Daya Manusia koperasi; (4) penguatan pengawasan koperasi; (5) peningkatan akses pembiayaan; dan (6) dukungan pelaksanaan program/kegiatan, yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan internal, dan lain sebagainya. Adapun, pelaksanaannya tertuang pada 16 program kerja kementerian yakni: Adapun outlook belanja Kementerian Koperasi pada tahun 2025 akan diproyeksi terealisasi sebesar Rp442,6 miliar.

No	Klaster Program	Program Kerja
1	Penguatan Ekosistem Usaha	Penuntasan Revisi Undang-undang Koperasi & Regulasi Terkait
		Sarjana Penggerak Koperasi
		Fasilitasi Pendirian Bank Koperasi (Kop Bank)
		Kop.id Superapps Koperasi
2	Penguatan Ketahanan Pangan	Penyediaan Bahan Pokok untuk Makan Bergizi Gratis
		Hilirisasi Sawit
		Peningkatan Produksi Susu Nasional Berbasis Koperasi
		Penguatan Produksi Beras berbasis Koperasi
3	Revitalisasi Usaha	Revitalisasi KUD
		Pembebasan KUT (Hapus Buku dan Hapus Tagih) bagi Koperasi

No	Klaster Program	Program Kerja
4	Perluasan Usaha	Pengembangan Koperasi Ojek *Online*
		Distribusi Pupuk melalui Koperasi
		Produksi Energi Biomassa melalui Koperasi
		Penguatan Produksi Tekstil Koperasi
		Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat oleh Koperasi
		Penyediaan Bahan Baku Perumahan Rakyat oleh Koperasi

Kementerian Koperasi juga mendapat amanat dalam mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada bulan Maret 2025, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi lokal yang strategis, dengan peran penting dalam program-program distribusi barang-barang bersubsidi, seperti pupuk bersubsidi, LPG, BBM bersubsidi dll.

Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya dengan alokasi. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat/meningkatkan/mendukung/memperluas kebijakan pengembangan koperasi, regulasi perkoperasian, kelembagaan dan tata kelola, pengembangan usaha, pelatihan dan literasi perkoperasian, akses pembiayaan, dan pengawasan koperasi. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pengembangan digitalisasi dan layanan interoperabilitas data, pengembangan jaringan usaha, penguatan kepatuhan koperasi, pelaksanaan tindak lanjut pengawasan koperasi. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 24,57 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar nol persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN sebesar 1,6 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal tidak ada dan kontrak tahun jamak tidak ada. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya, antara lain: (1) adanya kepastian hukum serta pelindungan bagi anggota dan pelaku usaha koperasi; (2) meningkatnya daya saing koperasi;(3) meningkatnya literasi perkoperasian di masyarakat; (4) pelayanan koperasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan; (5) tersedianya akses permodalan/ mengurangi ketergantungan pada rentenir atau pinjaman ilegal; (6) membuka peluang usaha dan potensi perluasan lapangan kerja; (7) mempermudah akses komoditas dan layanan kepada masyarakat; dan (8) penguatan ekonomi desa.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp.962,0 miliar yang terdiri dari pagu dukungan manajemen, program perkoperasian dan dekonsentrasi. Dari total anggaran yang ada, sebesar 41,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui: (1) kegiatan penyusunan kebijakan bidang ekonomi dan keuangan; (2) pengembangan sistem informasi pemerintahan; (3) penguatan regulasi perkoperasian, digitalisasi, dan data koperasi; (4) pendampingan kelembagaan dan tata kelola; (5) dukungan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis; (6) pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia koperasi; (7) peningkatan akses pembiayaan; (8) pengembangan 80.1 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan (9) penguatan pengawasan koperasi, dan sebesar 59,0 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti: (1) layanan badan hukum; (2) konferensi perkoperasian; (3) penguatan kepatuhan koperasi; (4) pelaksanaan tindak lanjut

pengawasan koperasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi program/kegiatan; (5) pengawasan internal; serta (6) dukungan manajemen lainnya dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, antara lain: (1) penguatan kualitas kelembagaan koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (2) penerapan digitalisasi; (3) meningkatkan daya saing melalui pengembangan usaha koperasi; (4) penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia koperasi; (5) peningkatan akses pembiayaan koperasi; dan (6) dan peningkatan kualitas pengawasan koperasi.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Koperasi pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi, antara lain: (1) penguatan ekosistem digital Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (2) meningkatkan daya saing melalui pengembangan usaha koperasi, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia koperasi; serta (3) pengawasan berbasis partisipasi anggota (social control) dan konsolidasi jaringan koperasi nasional.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi ditingkat lokal yang mampu menjawab berbagai tantangan nyata di lapangan. Pertama, koperasi berperan dalam memastikan distribusi barang-barang bersubsidi seperti gas LPG, BBM subsidi, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya agar sampai ke masyarakat secara tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah. Melalui sistem distribusi yang transparan dan berbasis data keanggotaan, koperasi dapat mencegah kebocoran subsidi dan memastikan keadilan dalam akses kebutuhan dasar.

Kedua, koperasi menjadi penggerak peningkatan nilai hasil produksi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan. Melalui penyediaan fasilitas cold storage, pengolahan pasca panen, dan sistem logistik yang terorganisasi. Hasil bumi dan laut masyarakat desa dapat disimpan, diproses, dan dipasarkan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini akan menciptakan stabilitas harga, menekan praktik tengkulak, dan memperkuat posisi tawar petani serta nelayan.

Ketiga, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga memperkuat akses layanan dasar masyarakat melalui pendirian klinik dan apotek. Layanan ini mendekatkan fasilitas kesehatan ke wilayah perdesaan dan kelurahan yang mengalami kesenjangan akses, sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal di bidang kesehatan dan farmasi.

Keempat, koperasi menjadi solusi atas masalah pembiayaan mikro di tingkat akar rumput. Melalui gerai simpan pinjam yang dikelola dengan prinsip koperasi, masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang mudah, terjangkau, dan berprinsip pada keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir, tengkulak, atau praktik ijon yang merugikan dan memperpanjang siklus kemiskinan.

Secara keseluruhan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga agen transformasi sosial yang memperkuat kemandirian masyarakat dan memperkecil kesenjangan struktural di tingkat lokal. Penguatan kelembagaan koperasi ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi gotong royong yang inklusif dan berkelanjutan.

KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (BA 150)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain mengatur bahwa Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian ini juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungannya. Selain itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah turut berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang memiliki program pemberdayaan UMKM, seperti Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih menjadi bagian dalam anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah *audited* dialokasikan sebesar Rp1.527,28 miliar, dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk: (1) memperkuat basis data UMKM *by name by address* melalui pelaksanaan pendataan lengkap Koperasi dan UMKM yang saat ini telah terkumpul data UMKM sebanyak 30,17 juta data hasil integrasi data Regsosek, Bappenas tahun 2022; (2) memperkuat koordinasi dalam penanganan Koperasi Bermasalah serta terwujudnya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi; (3) meningkatkan kapasitas usaha UMKM melalui fasilitasi NIB, Sertifikasi dan Standarisasi Usaha; (4) mendukung keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Rantai Pasok Industri melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama, melalui penyediaan alat produksi dan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih di 7 lokasi pada Tahun 2024 dan dikelola oleh Koperasi; (5) memperluas akses pemasaran serta pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha melalui penyaluran KUR dan alternatif pembiayaan lainnya; (6) memperluas pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada Tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator; (7) mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem; dan (8) Pengembangan Layanan Rumah Kemasan, untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan dengan memanfaatkan Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) atau bekerja sama dengan koperasi dalam hal pengelolaan manajemennya. Pada Tahun 2024 telah terbentuk 18 unit Rumah Kemasan. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk perlaksanaan kegiatan strategis Kementerian, diantaranya: (1) Digitalisasi UMKM untuk mendorong UMKM *onboarding digital*; (2) Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar 40 persen bagi UMKM; (3) Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui Koperasi untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh Koperasi; (4) Perluasan Kemitraan UMKM melalui program Kemitraan Rantai Pasok dan *Business Matching*,

antara UMKM dengan Usaha Besar baik BUMN maupun swasta; (5) Program SOLUSI (Solar Untuk Koperasi) Nelayan merupakan program kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan; dan (6) Program Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah melalui Koperasi untuk memastikan kesejahteraan petani sawit melalui hilirisasi produk olahan sawit oleh Koperasi.

Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara bahwa terdapat pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain: (1) memperkuat basis data UMKM *by name by address* melalui program SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahanm pelindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan Basis Data Tunggal UMKM sebagai sumber datanya; (2) memperluas akses pemasaran serta pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha melalui penyaluran KUR dan alternatif pembiayaan lainnya; (3) memperluas pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Entrepreneur Hub sebagai Ekosistemnya; dan (4) meningkatkan kapasitas usaha UMKM melalui fasilitasi NIB, Sertifikasi dan Standarisasi Usaha melalui program Festival pelindungan dan kemudahan Usaha Mikro.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: (1) peningkatan daya saing yang mencakup kemudahan legalitas usaha; (2) akses pembiayaan; (3) akses perluasan pasar dan kemitraan strategis; serta (4) penguatan ekosistem kewirausahaan. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain: Proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan prioritas khususnya yang memiliki pagu besar, antara lain seperti pendataan lengkap UMKM, Rumah Produksi Bersama, dan Rumah Kemasan memerlukan waktu yang relatif panjang, sehingga ketersediaan waktu pelaksanaan anggaran relatif terbatas, dan cenderung mengalami penumpukan di Triwulan IV. Sebagai respon atas terbentuknya Kabinet Merah Putih, dimana Kementerian Koperasi dan UKM mengalami pemecahan menjadi 2 (dua) Kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, diperlukan pergeseran belanja antar Satker guna memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya kebutuhan operasional. Beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai strategi pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, antara lain: (1) Rumah Produksi Bersama dan Pabrik Minyak Makan Merah, sebagai bentuk modernisasi koperasi dan penguatan industri menengah berbasis sumber daya lokal; (2) Korporatisasi petani dan koperasi multipihak untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani; (3) Transformasi pembiayaan UMKM dengan pendekatan inovatif, khususnya dalam rantai pasok salah satunya melalui pembiayaan KUR Klaster; (4) SOLUSI (Solar Untuk Koperasi) Nelayan yang merupakan kolaborasi program antara Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN untuk m eningkatkan kesejahteraan nelayan melalui akses pasar dan pembiayaan; (5) *Entrepreneur Hub* atau *e-Hub* sebagai platform digital untuk pengembangan *Start-Up* dan wirausaha muda; dan (5) Reformasi Badan Layanan Usaha (BLU) dengan LPDB-KUKM menjadi solusi pembiayaan koperasi, dan SMESCO sebagai *center of excellence* bagi produk UMKM.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dialokasikan sebesar Rp463,9 miliar, dengan *outlook* pada tahun 2025 diproyeksikan terealisasikan sebesar Rp463,6 miliar, terdiri dari belanja gaji dan pegawai serta belanja operasional dan pemeliharaan,

antara lain untuk operasional dan pemeliharaan gedung kantor, renovasi gedung perkantoran, serta sewa kendaraan. Belanja non-operasional antara lain untuk pelaksanaan program prioritas nasional dan program strategis Kementerian UMKM. Dari alokasi anggaran yang ada, anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya serta kegiatan strategis kementerian. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat, meliputi: (1) Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG); (2) Koordinasi dalam Perumusan Program Kartu Usaha (Produktif), dan (3) Keterlibatan UMKM dalam Pembangunan 3 Juta Rumah. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan daya saing yang mencakup kemudahan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses perluasan pasar dan kemitraan strategis, meliputi: (1) program SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan pelindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan Basis Data Tunggal UMKM sebagai sumber datanya; (2) memperluas akses pemasaran serta pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha melalui penyaluran KUR dan alternatif pembiayaan lainnya; dan (3) meningkatkan kapasitas usaha UMKM melalui fasilitasi NIB, Sertifikasi dan Standarisasi Usaha melalui program Festival pelindungan dan kemudahan Usaha Mikro.

Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni sebesar 26,73 persen dari total Rupiah Murni anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal, antara lain: (1) memperkuat basis data UMKM *by name by address* pada platform SAPA UMKM melalui integrasi dan pemeliharaan data UMKM; (2) memperluas akses pemasaran serta pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha melalui penyaluran KUR dan alternatif pembiayaan lainnya; (3) memperluas pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Entrepreneur Hub sebagai Ekosistemnya; dan (4) meningkatkan kapasitas usaha UMKM melalui fasilitasi NIB, Sertifikasi dan Standarisasi Usaha melalui program Festival pelindungan dan kemudahan Usaha Mikro. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain peningkatan daya saing yang mencakup kemudahan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses perluasan pasar dan kemitraan strategis, serta penguatan ekosistem kewirausahaan.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp546,6 miliar sebagaimana Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor: S-356/MK.02/2025 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, tanggal 15 Mei 2025, Nomor: B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 pada tanggal 15 Mei 2025. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk mendukung Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat, meliputi: (1) Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG); (2) Koordinasi dalam Perumusan Program Kartu Usaha (Produktif); dan (3) Keterlibatan UMKM dalam Pembangunan 3 Juta Rumah. Sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk meningkatkan daya saing yang mencakup kemudahan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses perluasan pasar dan kemitraan strategis, sebagaimana mandat RPJMN 2025-2029 meliputi: (1) program SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahanm pelindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan Basis Data Tunggal UMKM sebagai sumber datanya; (2) memperluas pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Entrepreneur Hub sebagai Ekosistemnya; (3) memperluas akses pemasaran serta pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha melalui penyaluran KUR dan alternatif pembiayaan lainnya; dan (4) meningkatkan

kapasitas usaha UMKM melalui fasilitasi NIB, Sertifikasi dan Standarisasi Usaha melalui program Festival pelindungan dan kemudahan Usaha Mikro.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain Transformasi Usaha melalui Formalisasi, sertifikasi dan standardisasi usaha, diantaranya: Target NIB hingga Tahun 2029 sebanyak 15,3 juta dan Sertifikasi Halal hingga Tahun 2029 sebanyak 14 Juta; (2) Keterlibatan Perluasan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis; (3) Pelaksanaan Program Kartu Usaha; dan (4) memperluas akses pemasaran serta pembiayaan bagi UMKM dan Wirausaha melalui penyaluran KUR dan alternatif pembiayaan lainnya.

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (BA 151)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain mengatur bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain seperti pelaksanaan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal, serta pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal.

Dalam APBN tahun 2024, anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi audited terealisasi sebesar Rp3.159,1 miliar. Dari realisasi anggaran tersebut, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk pendampingan desa, penanganan konvergensi stunting, pembinaan pemerintah desa tentang prioritas pemanfaatan dana desa, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, pembangunan RTJK, pembangunan dan peningkatan SAB di kawasan transmigrasi, ketahanan pangan di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, pembangunan dan peningkatan jalan non status, dan pengembangan desa digital melalui Akademi Desa 4.0, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Khusus alokasi anggaran yang telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 67,31 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN sebesar 31,91 persen, dan Non Rupiah Murni selain PLN sebesar 0,78 persen. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2025 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain pendampingan desa, koordinasi dan sosialisasi pemanfaatan dana desa, penanganan konvergensi stunting, sarana prasarana desa wisata, fasilitasi pengembangan BUM Desa dan tidak ada kontrak tahun jamak. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain: (i) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan SDA, lingkungan, kebencanaan dan ketahanan pangan, (ii) meningkatnya kapasitas pelaku wisata dalam mendukung desa wisata, (iii) masyarakat mendapatkan penanganan konvergensi stunting, (iv) tersedianya sarana dan prasarana desa wisata untuk mendukung destinasi wisata desa, (v) terfasilitasinya pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, (vi) tersedianya sarana air bersih di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi, (vii) tersedianya RTJK dan fasilitas umum di kawasan transmigrasi, (viii) berkembangnya desa digital melalui Akademi Desa 4.0. Kendala/tantangan yang ditemukan dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara umum antara lain kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/

MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan beberapa terobosan kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyaluran dan Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dialokasikan sebesar Rp2.192,4 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran di 2 (dua) gedung kantor dan 5 (lima) UPT Balai, dan belanja non operasional antara lain untuk pendampingan desa, penanganan konvergensi pencegahan stunting, fasilitasi pengembangan BUM Desa, peningkatan kapasitas masyarakat melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), penyerasian pembangunan daerah tertinggal, pelatihan masyarakat, dan Prioritas Nasional lainnya. Outlook anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp2.211,9 miliar.

Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan status perkembangan desa melalui pendampingan desa oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), fasilitasi konvergensi penurunan stunting, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), fasilitasi pengembangan BUM Desa, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk dukungan manajemen internal unit eselon I. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni sebesar 84,7 persen, Non Rupiah Murni yang berasal dari PLN dan PDN sebesar 15,3 persen, dan tidak ada Non Rupiah Murni selain PLN dan PDN. Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya yang masih tetap berlanjut ke tahun 2026 sebagai kontrak tahun tunggal antara lain Pengelolaan Pendamping Desa, Fasilitasi Pengembangan BUM Desa, Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting, Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor, dan Pelatihan Masyarakat. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain desa mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan potensi di desa, BUM Desa mampu memberdayakan ekonomi di desa dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, desa mampu mengekspor produk unggulan, dan masyarakat meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan BUM Desa dan Desa Wisata.

Dalam APBN tahun 2026, anggaran dialokasikan sebesar Rp2.504,2 miliar. Dari total anggaran yang ada, sebesar 75,3 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional, antara lain melalui kegiatan pendampingan desa, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, pembangunan sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan, pembangunan sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan, fasilitasi pengembangan BUM Desa, peningkatan kapasitas masyarakat di daerah tertinggal di bidang sosial budaya dan kelembagaan, dan sebesar 24,7 persen dialokasikan untuk mendukung Prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan masyarakat desa dan daerah tertinggal. Kebijakan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain penyusunan kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung Visi, 8 Misi (Asta Cita), dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan penerbitan petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain regulasi tentang rincian penggunaan dana desa, penataan ulang sistem kolaborasi lintas K/L dan Pemda, integrasi sistem satu data desa, kebijakan pembangunan kawasan perdesaan, perancangan cetak biru pendamping desa dalam rangka optimalisasi dan penguatan pendamping desa, serta pembinaan kepada daerah tertinggal entas.

KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
(BA 152)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian Transmigrasi juga menjalankan fungsi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Transmigrasi antara lain seperti pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Transmigrasi, pengawasan atas pelaksanaan tugas serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Dalam APBN tahun 2025, anggaran Kementerian Transmigrasi dialokasikan sebesar Rp122,4 miliar, terdiri dari belanja operasional antara lain untuk Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran untuk kantor pusat dan 4 (empat) UPT Balai, dan belanja non operasional antara lain untuk mendukung Program Prioritas Arahan Presiden melalui program Transformasi Transmigrasi dengan program 5 T (Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusa dan Transmigrasi Gotong Royong), dan Prioritas Nasional lainnya. Dari alokasi anggaran yang ada, telah dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional/program prioritas arahan presiden dan Prioritas lainnya. *Outlook* anggaran Kementerian Transmigrasi tahun 2025 diproyeksikan terealisasi sebesar Rp83,5 miliar. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional diarahkan untuk meningkatkan persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif, menciptakan ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran, mewujudkan SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi, mewujudkan pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi yang berdaya saing, mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, sedangkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas lainnya diarahkan untuk dukungan manajemen internal unit eselon I. Khusus alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional, bersumber dari Rupiah Murni. Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat dengan adanya intervensi kebijakan belanja untuk mendukung Prioritas Nasional dan/atau Prioritas lainnya antara lain masyarakat transmigran bisa mendapatkan kepastian hukum status lahan yang dimiliki, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di kawasan transmirgasi, peningkatan status desa di kawasan transmigrasi, meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi.

Dalam APBN tahun 2026, Anggaran Kementerian dialokasikan dialokasikan sebesar Rp1.902,0 miliar, dari total anggaran yang ada, sebesar 66,4 persen dialokasikan untuk mendukung Program Prioritas Arahan Presiden melalui program Transformasi Transmigrasi dengan program 5 T (Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusa dan Transmigrasi Gotong Royong), sebesar 12,0 persen dialokasikan untuk pemberian mandatory pada Transmigran pada Satuan Permukiman Bina (Catu Pangan Transmigran, Sarana Produksi Pertanian, pengembangan ekonomi sastuan permukiman, Sertifikasi lahan, Layanan Sosial Budaya, sarana prasarana dasar satuan permukiman dan Beasiswa Patriot), dan sebesar 21,6 persen merupakan

program dukungan manajemen dalam mendukung Program Prioritas dan 8 Misi (Asta Cita) yaitu Asta cita ke-2 dan Asta cita ke-6.

Proyeksi kebijakan strategis Kementerian Transmigrasi pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi antara lain untuk memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 6. Dalam mencapai PN 2, Kementerian Transmigrasi berkontribusi mendukung Program Prioritas (PP) 10, yaitu "swasembada pangan" serta swasembada energi dan ekonomi melalui berbagai program pada berbagai bidang di Kawasan transmigrasi.

Pada PN 6 tersebut, Kementerian Transmigrasi berkontribusi pada Program Prioritas (PP) 7, yaitu "Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan" yang kemudian diturunkan ke Kegiatan Prioritas (KP) 6, yaitu "Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi". Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan pada PP 7 dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor, yang salah satunya fokus pada sasaran pengembangan Kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi asset (tanah) transmigrasi serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil.

Matris Ringkasan
Target dan Capaian Output Strategis Tahun 2024 – 2026

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**
Bagian Anggaran : **BA 001**

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Konstitusional MPR yang Berkualitas	Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	Pemasyarakatan Konstitusi di Daerah pemilihan oleh Anggota MPR (orang)	644.050	658.800	374.550	658.800	813.600		
2			Pemasyarakatan Konstitusi oleh Pimpinan MPR dan Alat Kelengkapan (orang)	96.900	142.500	23.250	142.500	195.000		
3			Pemasyarakatan Konstitusi oleh Badan Sosialisasi MPR (orang)	54.826	64.704	14.660	64.704	42.612		
4	Terwujudnya Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Konstitusional MPR yang Berkualitas	Kebijakan Bidang Politik	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Badan Pengkajian (rekomendasi)	1	1	1	1	1		
5			Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga (rekomendasi)	1	1	1	1	1		
6			Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan (rekomendasi)	1	1	1	1	1		
7	Terwujudnya Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Konstitusional MPR yang Berkualitas	Kebijakan Bidang Politik	Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan Lembaga (kali)	994	1.332	740	1.332	2.801		
8	Terwujudnya Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Konstitusional MPR yang Berkualitas	Persidangan Lembaga Legislatif	Sidang Paripurna MPR	4	1	0	1	1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Bagian Anggaran : BA 002

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan RUU Usul Inisiatif DPR RI dan RUU Usul Pemerintah yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan prioritas pembangunan nasional	Undang-Undang (RUU)	Undang-Undang Usul DPR oleh Komisi (RUU) Undang-Undang Usul DPR oleh Baleg,Pansus, Perorangan Anggota (RUU) Undang-Undang Usul Pemerintah oleh Komisi (RUU) Undang-Undang Usul Pemerintah oleh Baleg dan Pansus (RUU) RUU Kumulatif Terbuka (RUU)	28	51	18	51	47	-	-
2	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Penyusunan Naskah Akademik, dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Fasilitasi *Meaningfull Participation* dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Polhukam (Lembaga)	-	-	-	-	30	Fasilitasi *Meaningfull Participation* dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Polhukam	-
3	Meningkatnya kualitas dukungan layanan manajemen internal di Bidang Penyusunan Naskah Akademik, dan Draft RUU terkait Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dalam Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, industri, Pembangunan, dan Kesra	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Fasilitasi *Meaningfull Participation* dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Ekkuinbangkesra (Lembaga)	-	-	-	-	20	Fasilitasi *Meaningfull Participation* dalam Penguatan Proses Penyusunan RUU dan Pembentukan UU Inisiatif DPR Bidang Ekkuinbangkesra	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan
Bagian Anggaran : 004

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Manfaat Hasil Pemeriksaan Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Investigasi dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik BPK	Pemeriksaan Keuangan Negara (Laporan, Pendapat Hukum, LHP, Bahan Pertimbangan, Pertimbangan)	LHP LKPP (LHP)	1	1	1	1	1		
			Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP)	715	753	681	753	723		
			Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP)	234	348	3	348	404		
			Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP)	5.581	5.885	5.276	5.885	1.030		
			Laporan Pemantauan (Laporan)	2.784	2.820	230	2.820	2.863		
			IHPS (Laporan)	3	120	59	120	136		
			Konsep Bahan pendapat (Laporan)	2	64	-	64	69		
			Hasil Kajian dan Penelitian (Laporan)	7	6	-	6	8		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
Bagian Anggaran : 005

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya (6)(7)	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
1	Terselenggaranya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, Orang	032 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Orang	50.472	44.698	31.087	44.698	65.826	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
2	Terselenggaranya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	QCA - Perkara Hukum Perseorangan, Perkara	001 - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara, Perkara	1.229	1.000	514	1.000	1.174	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
3	Terselenggaranya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	QCA - Perkara Hukum Perseorangan, Perkara	002 - Sidang di luar Gedung Pengadilan,Perkara	6.729	6.679	3.402	6.679	7.031	Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
4	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis di lingkungan Peradilan Umum	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Orang	002 - Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, Orang	252	240	107	240	80	Bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan Hukum	a. pendidikan g. Pengarusutamaan Gender p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
5	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama	QCA. Perkara Hukum Perseorangan, Perkara	001- Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, Perkara	26.917	20.896	12.306	20.896	21.941	Perkara peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
6	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama	QCA. Perkara Hukum Perseorangan, Perkara	002 - Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung, Perkara	38.960	32.455	23.673	32.455	32.526	Perkara di lingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
7	Terselenggaranya kemudahan akses peradilan di lingkungan Peradilan Agama	QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, Orang	003 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama, Orang	235.248	226.077	141.654	226.077	243.675	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
8	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, Orang	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Orang	3.088	3.264	1.731	3.264	3.362	Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
9	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	QCA. Perkara Hukum Perseorangan, Perkara	001 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer, Perkara	437	393	212	393	384	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan militer	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
10	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	QCA. Perkara Hukum Perseorangan, Perkara	002 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Perkara	21	30	8	30	36	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kejaksaan Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 006

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	1103.QMB - Komunikasi Publik	1103.QMB.051 Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	363.135	4.138	2.563	4.138	4.135	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	
2	Meningkatknya efektivitas pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset	7066.QHB - Operasi Bidang Keamanan	7066.QHB.051 Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	38	38	18	38	25	Operasi Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara	
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif	1109.PBD - Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	-	-	1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Penyelesaian Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan kesehatan yustisialan kegiatan kesehatan yustisial	1091.RPW - Prasarana Bidang Hukum	1091.RPW.051 Pengembangan RSU Adhyaksa Daerah Khusus Jakarta dan Pembangunan RSU Adhyaksa Bali	-	-	-	-	2	-	
5	Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendaraan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai	1091.RPW - Prasarana Bidang Hukum	1091.RPW.052 Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Provinsi Maluku	-	-	-	-	1	-	
		1091.RPW - Prasarana Bidang Hukum	1091.RPW.053 Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Provinsi Papua	-	-	-	-	1	-	
		1091.RPW - Prasarana Bidang Hukum	1091.RPW.054 Pembangunan Rumah Susun Negara/Mess Kejaksaan Negeri Mimika, Provinsi Papua	-	-	-	-	1	-	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Sekretariat Negara
Bagian Anggaran : 007

No.	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
1	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	PEC-Kerja Sama (Kesepakatan)	Layanan Kerja Sama Selatan-Selatan (Kesepakatan)	14	10	2	8	10	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi.
2	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	PEC-Kerja Sama (Dokumen)	Dokumen Manajemen Pengetahuan KSST (Dokumen)	-	3	0	1	3	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi.
3	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (Dokumen)	Knowledge Management KSST (Standar Pengukuran Monitoring dan Evaluasi KSST, Alumni Management) (Dokumen)	-	-	-	-	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi.

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Dalam Negeri
Bagian Anggaran : 010

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		
			Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Target	Volume Realisasi s.d TW III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara	PEC/Kesepakatan	Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara	4	Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	3	2	3	2	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah yang merupakan Perwujudan dari Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Pembangunan Daerah	UBA/ Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	412	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	546	546	546	546	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pendidikan
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	UAC/ Orang	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	930	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	3060	-	-	5760	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
4	Meningkatnya produk hukum daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah	2024: UAE/Rekomendasi 2025: UBA/ Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri	7	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	38	34	38	38	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
4	Meningkatnya kualitas standard dan kompetensi pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri	FAC/ Orang	Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda	7760	Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	8.433	6285	8433	6995	-	Reformasi Birokrasi
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	UBA/ Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	542	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	300	366	366	360	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
6	Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi	QEI/ Lembaga	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	9	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	8	8	8	8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
7	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	QAB/ Lembaga	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	6.774	Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional	1300	444	1300	1375	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
8	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	FAB/ Sistem Informasi	Pengelolaan Implementasi SIPD	2	Pengelolaan Implementasi SIPD	10	10	10	1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
9	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah	FBA/ Daerah (Prov/Kab/Kota)	Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	38	Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	38	35	38	38	-	Lain-lain
10	Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya	EBC/ Orang	Layanan Pendidikan Kedinasan	3967	Layanan Pendidikan Kedinasan	3541	3538	3538	7	-	Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Luar Negeri
Bagian Anggaran : 011

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Kedaulatan NKRI yang berintegritas	Kerja Sama, Kesepakatan	Penetapan Batas Maritim/ Penegasan Batas Darat, Kesepakatan	8	5		5	5	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
2	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	Forum, Forum	Peran aktif Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB, Forum	15	1	0	1	11	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
3	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	Forum, Forum	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB, Kegiatan	26	1	0	1	28	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
4	Postur Diplomasi yang Memadai	Kebijakan Bidang Politik, Dokumen	Koordinasi Penyusunan Regulasi Pendukung Postur Diplomasi, Dokumen	-	-		-	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
5	Kebijakan di Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia yang Telah Sesuai dengan Prioritas Nasional	Kebijakan Bidang Politik, Rekomendasi Kebijakan	Grand Design Strategi dan Dasar Hukum KSPI, Rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
6	Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	Kebijakan Bidang Politik, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan terkait Diplomasi Ekonomi guna Mendorong Kemitraan Strategis, Rekomendasi Kebijakan	-	2	2	2	2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
7	Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk PMI yang Integratif	Pelayanan Publik kepada masyarakat, Orang	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri, Orang	32448	23150	13619	23150	10500	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
8	Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk PMI yang Integratif	Kerja Sama, Kegiatan	Koordinasi dan Kerja Sama Pelayanan dan Pelindungan, Kegiatan	-	3	25%	3	3	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9	Pelindungan WNI dan pelayanan publik Perwakilan RI yang prima	Pelayanan Publik kepada masyarakat, Orang	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Perwakilan RI), Orang	180066	106414	59012	106414	120429	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
10	Keterlibatan Diaspora Indonesia secara aktif dalam Pembangunan Nasional	Kebijakan Bidang Politik, Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Peningkatan Peran Diaspora dalam Pembangunan Nasional, Rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d. 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertahanan RI
Bagian Anggaran : 012

No	Sasaran (*Outcome*), Klasifikasi Rincian *Output*, dan Rincian *Output* Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan satuannya	Rincian *Output* (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras pertahanan yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	RBC, km	Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan, KM	0	0	0	0	194	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
2.	Terpenuhinya kebutuhan alutsista strategis yang siap untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RAF, Paket	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Paket	0	0	0	0	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
3.	Terpenuhinya kebutuhan alutsista integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	RAF, Paket	Pengadaan Senjata, Paket	3	0	0	0	0	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
	Terpenuhinya kebutuhan alutsista integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	RAF, Paket	Pengadaan Munisi, Paket	9	0	0	0	0	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
	Terpenuhinya kebutuhan alutsista integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI	RAF, Paket	Pengadaan Materiel Alutsista, Paket	4	0	0	0	0	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta

No	Sasaran (*Outcome*), Klasifikasi Rincian *Output*, dan Rincian *Output* Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan satuannya	Rincian *Output* (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
4.	Persentase pemenuhan kebutuhan Rumdis untuk mendukung pelaksanaan Tupok TNI AD	RBM, KK	Pembangunan Rumdis Prajurit TNI AD (SBSN) KK	862	718	37,75%	100,00%	1214	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
5.	Persentase pemenuhan Pos Pamtas yang layak	RBM, Pos	Pembangunan Pos Pamtas, Pos	3	0	0	0	5	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
6.	Persentase tercapainya sasaran Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Rantis Kegiatan Prioritas sesuai tahapan yang direncanakan	RFE, Unit	Pemeliharaan Prioritas Rantis, Unit	24	0	0	0	0	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
7.	Terwujudnya kesiapsiagaan operasi Matra Laut dalam rangka penegakan hukum, menjaga keamanan wilayah laut nasional dan internasional sesuai ketentuan hukum nasional serta hukum internasional yg telah diratifikasi utk pelaksanaan tugas OMP dan OMSP TNI	QHA, Kegiatan	Operasi Bidang Pertahanan, Kegiatan	1	14	0	14	15	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
8.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista dan Sarpras pertahanan Matra Laut yg siap digunakan utk pelaksanaan tugas TNI AL	RAF, Unit	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Unit	8	2	0	2	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
		RBM, Unit	Operasi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Unit	5	3	0	3	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta

No	Sasaran (*Outcome*), Klasifikasi Rincian *Output*, dan Rincian *Output* Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan satuannya	Rincian *Output* (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9.	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas TNI AU (sesuai EF)	RAF, Unit	Peningkatan/ Pengadaan Senri Senrat, Unit	198 Unit	60 Unit	0	60 Unit	60 Unit	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
10.	Terpeliharanya kesiapan Alutsista Matra Udara untuk pelaksanaan tugas TNI AU	RCF, Unit	Pesawat Terbang, Unit	126 Unit	126 Unit	0	126 Unit	117 Unit	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
		RCF, Unit	Radar, Unit	19 Unit	9 Unit	0	9 Unit	29 Unit	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan
Bagian Anggaran : 015

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan	QAE-Pelayanan Publik kepada UMKM	Promosi Ekspor UMKM (PN), UMKM	145	100	35	100	50	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
2	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan	QHB-Operasi Bidang Keamanan	Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN), operasi	-	1	-	1	1	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN), Rekomendasi Kebijakan	-	5	-	5	5	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
4	Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	UAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN), Laporan	-	5	4	5	5	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	003 - Anggaran Responsif Gender
5	Pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif dan risiko yang prudent	UAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Dukungan Penjaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN), Laporan	2	2	-	2	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
6	Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	UAL-Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN), Dokumen	5000	100000	33142	100000	50000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
7	Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Pengembangan SINSW (PN), Sistem Informasi	-	1	-	1	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
8	Pencapaian tugas khusus yang efektif	UAM-Hasil Kelolaan Dana	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN), Usaha Mikro	2208840	1470000	836956	1470000	1480000	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	003 - Anggaran Responsif Gender
9	Pencapaian tugas khusus yang efektif	UAM-Hasil Kelolaan Dana	Beasiswa Afirmasi (PN), Orang	-	1000	287	1000	1000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	003 - Anggaran Responsif Gender, 005 - Anggaran Pendidikan
10	Pencapaian tugas khusus yang efektif	UAM-Hasil Kelolaan Dana	Pengelolaan dan Penyaluran Dana Riset (PN), Orang	-	-	-	-	25	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	005 - Anggaran Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN
Bagian Anggaran : 18

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/ Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1762.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	1762.RAI.621 & 1762.RAI.627 Kawasan Padi (hektar)	853.546	2.626.000	1.746.195	2.626.000	2.600.000	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan
2	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7922.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7922.RBK.011 Irigasi Perpompaan (unit)	9.487	775	540	775	15.000	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan
3	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7923.RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	7923.RBO.005 Cetak Sawah (hektar)	703	225.000	11.735	225.000	250.000	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan
4	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7923.RBR Dukungan Teknis	7923.RBR.001 SID Cetak Sawah (dokumen)	102.259	225.000	12.075	225.000	300.000	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan
5	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1796.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1796.RAG.006 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (unit)	91.108	75.731	34.000	75.731	42.388	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/ Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
6	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3993.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3993.RAG.003 Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian (kg)	54.244.320	460.326.434	50.339.928	460.326.434	250.823.900	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan
7	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	5885.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5885.RAG.001 & 5885.RAG.003 Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Unit)	1.407	4.921	2.943	4.921	3.120	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sietem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan Pangan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perindustrian
Bagian Anggaran : BA 019

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	02 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 (Perusahaan)	172	36	4	36	43	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	- Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi - Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
2	03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal dalam Negeri	Sertifikasi Produk (Produk)	Sertifikasi TKDN (Produk)	4756	630	0	630	830	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
3	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (IKM)	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM)	4801	1032	0	1032	3723	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Revitalisasi/hilirisasi industri
4	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan Kelembagaan dan mesin/peralatan (Kelompok Masyarakat)	46	5	1	5	5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Revitalisasi/hilirisasi industri
5	05 - Penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (IKM)	IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (IKM)	49	25	0	25	103	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	- Revitalisasi/hilirisasi industri - Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
6	03 - Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal dalam Negeri	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar)	Pengembangan Standardisasi Industri (Standar)	75	30	14	30	28	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	- Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
7	02 - Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (industri)	Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki (Industri)	40	21	13	21	33	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	- Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global - Revitalisasi/ Hilirisasi Industri
8	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pelatihan Bidang Industri (orang)	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Orang)	22640	630	0	630	1615	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pendidikan Vokasi Bidang Industri (orang)	Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler (Orang)	10496	2537	sedang dalam masa pendidikan	2537	11323	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pendidikan
10	08 - Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pendidikan Vokasi Bidang Industri (orang)	SDM yang Mengikuti Pendidikan Menengah Kejuruan Industri (Orang)	8470	1712	sedang dalam masa pendidikan	1712	8493	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**
Bagian Anggaran : **020**

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	01-Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan (Rekomendasi Kebijakan)	11	10	3	4	10	PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
2	02-Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Rekomendasi Keprospekan Migas (Rekomendasi Kebijakan)	4	2	0	2	4		
3	31-Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Volume Biofuel untuk Domestik (Rekomendasi Kebijakan)	1 Realisasi pemanfaatan biofuel untuk domestik: 13,157 juta kL	1	0 Realisasi: 6,83 juta kL	1 Prognosa: 13,5 juta kL	1		004 - Mitigasi perubahan Iklim
4	31-Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Penurunan Intensitas Energi Final (Rekomendasi Kebijakan)	1 Realisasi penurunan intensitas energi final: 1,04 juta SBM/miliar Rp	3	0 Realisasi: 0,96 SBM/Milyar Rp	3 Prognosa: 0,96 SBM/Milyar Rp	3		004 - Mitigasi perubahan Iklim
5	31-Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Penawaran Wilayah Panas Bumi (Rekomendasi Kebijakan)	5 WKP Toka Tindung, WKP Wapsalit, WPSPE Koto Sani Tanjung Bingkung, WPSPE Bora Pulu & WPSPE Samosir	2	1 WKP Wapsalit	6	1		004 - Mitigasi perubahan Iklim
6	31-Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Penetapan Wilayah Panas Bumi (Rekomendasi Kebijakan)	7 WKP Cisolok Cisukarame, WKP Nage, WKP Toka Tindung, WKP Huu Daha, WPSPE Koto Sani Tanjung Bingkung, WPSPE Bora Pulu, WPSPE Samosir	2	3 WKP Banda Baru, WPSPE Cisurupan Kertasari, WPSPE Bittuang	6	1		004 - Mitigasi perubahan Iklim
7	31-Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	QEG-Bantuan Peralatan / Sarana	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) (Unit)	3 1. PLTMH Tenguwe 2. PLTMH Patamuan 3. PLTMH Long Berini	3	0	3	3		001 - Anggaran Infrastruktur, 003 - Anggaran Responsif Gender, 004 - Mitigasi perubahan Iklim
8	21-Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga (penyalur)	583	87	71	87	68		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9	21-Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga (penyalur)	71	16	0	16	52	PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
10	01-Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Unit/Ruas)	1 (Progress Pelaksanaan: 38,34%)	1 (Progress Pelaksanaan : 98,69%)	1 (Progress Pelaksanaan: 71,60%)	1 (Progress Pelaksanaan: 98,69%)	1		001 - Anggaran Infrastruktur
11	01-Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai - Sei Mangkei (Unit/Ruas)	0	1	1	1	1		001 - Anggaran Infrastruktur
12	01-Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	UAG-Pengawasan Pembangunan	Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN (Laporan)	3 laporan (Kumulatif s.d 2024 sejumlah 240.400 SR)	3	Progress: koordinasi bersama para pihak terkait	3	3		001 - Anggaran Infrastruktur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perhubungan
Bagian Anggaran : 022

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1.	Terwujudnya Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan	CDP - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Unit)	045 - Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola (Unit)	648	520	520	520	126		Infrastruktur
		CDP - OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Unit)	040 - Terminal Penumpang Tipe-A dikelola (Unit)	107	110	109	113	113		Infrastruktur
		RAC - Sarana Bidang Konektivitas Darat (Unit)	269 - Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) (Unit)	287	311	0	152	126		Infrastruktur
2	Terwujudnya Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan yang Efisien	QAH - Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	177 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Medan (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			178 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Palembang (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			181 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Denpasar (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			182 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bandung (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			183 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surabaya (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			184 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			185 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Makassar (Prioritas Nasional) (Layanan)	1	1	1	1	0		Infrastruktur
			257 - Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional) (Layanan)	0	1	0	1	1		Infrastruktur
3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	QAH - Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan	120	105	0	105	107	05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Revitalisasi/ Hilirisasi Industri
		QAH - Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Layanan Konektivitas Angkutan Barang	37	1	0	1	39	05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Revitalisasi/ Hilirisasi Industri
		QAH - Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Layanan Konektivitas Angkutan Ternak	9	6	0	6	6	05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Revitalisasi/ Hilirisasi Industri
		QAH - Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Layanan Konektivitas Angkutan Rede	16	1	0	1	18	05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Revitalisasi/ Hilirisasi Industri

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
4	Meningkatnya kinerja penyediaan infrastruktur konektivitas transportasi	Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Unit)	Patimban Port Development Project (I)	1	1	0	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
		Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Unit)	Patimban Port Development Project (II)	1	1	0	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
		Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Unit)	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan	1	1	0	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
		Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Unit)	Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Salakan	1	1	0	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
		Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Unit)	Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi	1	1	0	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
		Prasarana Bidang Konektivitas Laut (Unit)	Replacement Fasilitas Pelabuhan Marapokot	1	1	0	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
5	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Udara	QAH - Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Angkutan Udara Perintis Penumpang (Rute)	264	266	252	266	262	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
			Angkutan Udara Perintis Kargo (Rute)	45	47	43	47	47	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
6	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	RBE.Prasarana Bidang Konektivitas Udara (PN)	Pembangunan Bandara Baru (Unit)	1	0	0	0	0	-	
			Pengembangan Bandara (Unit)	58	17**)	11	17	17	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur
7	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	RAD.Sarana Bidang Konektivitas Udara	Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan (Unit)	1	1	0	1	0	-	
			Pengadaan peralatan pengujian kinerja runway (Unit)	1	0	0	0	0	-	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
8	Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	4643.RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Pembangunan Jalur KA termasuk Reaktivasi (Km, Paket)	0	0	0	0	0	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
9	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	4641.RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda (Km, Paket)	58,88	8,8	1	0	7	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
			Peningkatan dan Rehabilitasi/Perawatan Jalur KA(Km, Paket)	156,69	57,265	0	40,265	96,58	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
			Elektrifikasi Jalur KA (Km, Paket)	0	1	1	1	1	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
			Pembangunan/Modernisasi/ Peningkatan Stasiun KA (Unit, Paket)	0	9	2	2	4	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
			Pembangunan/Peningkatan Persinyalan dan Telekomunikasi (Km, Paket, Unit)	0	2	0	0	3	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
		4641.QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis (layanan)	5	7	5	5	7	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
10	Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	4642.RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (Lokasi/Paket)	Kegiatan Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian (Balai)	7	15	9	15	15	03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur

Catatan (Perhubungan Udara):

*) Tahun Anggaran 2025 menggunakan Pembaruan RKP 2025 dampak Efisiensi Anggaran
**) Terdapat 11 Lokasi yang merupakan luncuran SBSN 2024

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2021 S.D 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Bagian Anggaran : 024

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2026
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026	
			Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target	
1	Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (orang)	96.762.367	96.800.000	96.760.922	96.800.000	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
2	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (Orang)	50.517.073	49.603.175	49.603.175	49.603.175	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
3	Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan	Paket penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	13 vaksin	1 Paket	0	1 Paket	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	1 paket	1 Paket	0	1 Paket	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	1 paket	1 Paket	0	1 Paket	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Paket penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS	1 paket	1 Paket	0	1 Paket	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
4	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (Orang)	3.409				
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Papua dan Papua Barat (orang)	100	93	79	90	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (Orang)		7.654	6.603	7.545	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2026
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026	
			Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
5	Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan (Ibu Hamil KEK)	45.000				
		Balita kurus yang mendapat Makanan Tambahan (balita kurus)	100.000				Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Balita yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock [LP - 4] (Orang)		163.524	127	163.524	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
6	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Pendayagunaan dokter spesialis (orang)	676	670	370	670	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat (orang)	25	20	9	20	
		Penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu (orang)	4.185				Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Penugasan khusus tenaga kesehatan secara tim (orang)	1.000				
		Penugasan khusus tenaga kesehatan di wilayah Papua (orang)	200	61	1		
		Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer (Orang)		2.228	4	2.263	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
		Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer di wilayah Papua (Orang)		61	1	62	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2026
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026	
			Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
7	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan	Pemantauan dan evaluasi RS kelas D/D Pratama yg ditingkatkan kualitasnya menjadi kelas C (Laporan)		12	0	12	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
8	Menurunnya insiden penyakit menular.	Kasus TBC yang mendapatkan pengobatan (LP-6) (Orang)		200	0	200	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama
Bagian Anggaran : 025

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
	01-Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan								04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Anggaran Pendidikan
		QEK-Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah								
			BOS							
			001-Siswa penerima BOS Tk Adi		944	409	944	929		
			002-Siswa Mula Dhammasekha penerima BOS		85	-	85	175		
			002-Siswa penerima BOS Tk Madya		339	60	339	427		
			003-Siswa penerima BOS Tk Utama		467	280	467	632		
			003-Siswa Uttama Dhammasekha penerima BOS		42	10	42	130		
			004-Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS		13.333	6.625	13.333	14.833		
			005-Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS		36.621	15.359	36.621	36.621		
			005-Siswa MI Penerima BOS		4.265.178	234.419	4.265.178	4.532.161		
			005-Siswa SMPTK Penerima BOS		6.627	3.359	6.627	7.292		
			006-Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS		205.024	86.807	205.024	205.024		
			006-Siswa MTs Penerima BOS		3.268.530	749.788	3.268.530	3.433.995		
			006-Siswa SDTK Penerima BOS		5.490	2.539	5.490	5.770		
			007-Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS		127.545	63.620	127.545	127.545		
			007-Siswa MA Penerima BOS		1.625.424	269.999	1.625.424	1.708.454		
			007-Siswa penerima BOS Tk Pratama		2.317	1.131	2.317	394		
			008-Siswa SMAK Penerima BOS		6.396	5.490	6.396	6.396		
			PIP							
			001-Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP		23.487	16.790	23.487	23.487		
			001-Siswa Madrasah MI Penerima PIP		1.028.209	528.209	1.028.209	1.028.209		
			001-Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP		21.328	12.160	21.328	21.328		
			002-Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP		92.533	71.733	92.533	92.533		
			002-Siswa Madrasah MTs Penerima PIP		907.961	507.961	907.961	907.961		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
			002-Siswa SMPTK Penerima PIP		5.729	2.842	5.729	6.129	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
			003-Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP		45.571	44.537	45.571	45.571		
			003-Siswa Madrasah MA Penerima PIP		393.493	145.000	393.493	421.846		
			003-Siswa SDTK Penerima PIP		3.053	1.118	3.053	3.303		
			004-Siswa penerima PIP Tk Adi		748	424	748	929		
			005-Siswa penerima PIP Tk Madya		322	81	322	427		
			006-Siswa penerima PIP Tk Utama		420	256	420	632		
			009-Siswa SMAK Penerima PIP		4.054	3.830	4.054	4.054		
	02-Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa									
	03-Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan									
	04-Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP									
		QEK-Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah								
			INSENTIF							
			002-Insentif Guru PAI Non PNS		33.000	893	33.000	22.000		
			001-Guru Agama Khonghucu Non PNS Penerima Insentif		178	34	178	170		
			001-Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Insentif		3.825	521	3.825	3.975		
			001-Guru Agama Non ASN Penerima Insentif		2.373	377	2.373	2.373		
			001-Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Insentif		2.898	775	2.898	2.932		
			001-Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif		35.700	697	35.700	35.593		
			002-Guru SMAK Non ASN Penerima Insentif		512	182	512	512		
			004-Guru Non-PNS Penerima Insentif		607.780	303.890	607.780	216.500		
			002-Guru Non ASN Penerima Insentif		1.761	497	1.761	2.381		
			TPG							

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
			002-Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi		1.338	188	1.338	1.338		
			002-Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Profesi		238	42	238	746		
			003-Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Profesi		1.094	197	1.094	10.041		
			004-Guru SMAK Non ASN penerima Tunjangan Profesi		4	-	4	4		
			005-Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi		195.551	75.318	195.551	211.005		
			008-Guru Taman Seminari Non ASN penerima Tunjangan Profesi		1	-	1	42		
			001-Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi		165	39	165	165		
			001-Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS		27.619	5.119	27.619	27.619		
	02-Meningkatnya kualitas tenaga pendidik									
	03-Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan								04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
		BEI-Bantuan Lembaga								
			BOPTN							
			001-BOPTN		5	-	5	5		
			BOPTN				-			
			001-BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen		17.187	8.494	17.187	16		
			001-BOPTN PTK Buddha		2	-	2	4		
			003-BOPTN		64	6	64	116		
			004-BOPTN		1	-	1	1		
		QEJ-Bantuan Pendidikan Tinggi								
			KIP							
			001-Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah		7.754	5.008	7.754	7.754		
			001-Mahasiswa penerima KIP Kuliah		3.812	2.664	3.812	3.812		
			001-Mahasiswa PTKB Penerima KIP Kuliah		1.208	871	1.208	1.208		
			004-Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik		2.149	1.071	2.149	2.149		
			007-Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah		118.443	63.653	118.443	99.815		
			001-Mahasiswa PTK Swasta Islam penerima KIP Kuliah		4.890	-	4.890	4.003		
			002-Mahasiswa PTK Swasta Kristen Penerima KIP Kuliah		187	-	187	8.763		
			003-Mahasiswa PTK Swasta Katolik Penerima KIP Kuliah		620	-	620	3.034	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang	Pendidikan
			004-Mahasiswa PTK Swasta Hindu penerima KIP Kuliah		250	-	250	1.842		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
			005-Mahasiswa PTK Swasta Buddha penerima KIP Kuliah		65	-	65	281	Disabilitas	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan
Bagian Anggaran : 026

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	01 Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.	SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	132.595 Orang	60.000 Orang	12.682 Orang	60.000 Orang	60.145 orang	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	005 Anggaran Pendidikan
	02 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.								PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
									PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
									PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
2		SCH Pelatihan Bidang Industri (Orang, Kegiatan)	Pemagangan dalam dan luar negeri (Orang)	61.937 Orang	18.400 Orang	13.907 Orang	24.739 Orang	5.072 orang	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	005 Anggaran Pendidikan
									PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
3		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang, Sertifikat)	Sertifikasi Kompetensi (Orang)	183.595 Orang	82.666 Orang	5.631 Orang	82.666 Orang	43.144 orang	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	005 Anggaran Pendidikan
									PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
4		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	Fasiliasi Penempatan Tenaga Kerja (Orang)	117.970 Orang	10.640 Orang	10.030 Orang	10.640 Orang	1.090.000 orang	PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	000 Bukan Tematik
									PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
5		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	Layanan Pasar Kerja (Orang)	555.560 Orang	497.501 Orang	435.907 Orang	497.501 Orang	740.000 Orang	PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik
6		QEA Bantuan Masyarakat (Orang)	TKM Pemula (Orang)	43.053 Orang	10.000 Orang	0 Orang	10.000 Orang	10.000 orang.	PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	000 Bukan Tematik
									PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
									PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
7		QEA Bantuan Masyarakat (Orang)	TKM Lanjutan (Orang)	6.130 Orang	1.000 Orang	0 Orang	1.000 Orang	1.000 orang.	PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	000 Bukan Tematik
									PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
8		BEI Bantuan Lembaga (Lembaga)	Padat Karya (Orang)	1.244 Orang	200 Lembaga	0 Lembaga	200 Lembaga	200 Lembaga/6.000 orang.	PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	000 Bukan Tematik
9		BEA Bantuan Masyarakat (Orang)	Bantuan Iuran JKP (Orang)	152.735.270 Orang	140.702.218 Orang	12.055.501 Orang	140.702.218 Orang	104.803.992 orang	PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	000 Bukan Tematik

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
									PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
10		AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	Dialog sosial Hubungan Industrial (Orang)	3.125 Orang	2.614 Orang	1.100 Orang	2.614 Orang	1.800 orang	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik
11		AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	Pemetaan Kerawanan HI (Badan Usaha)				0	717 Badan Usaha	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
12		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	Pembinaan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Orang)	3.316 Orang	3.434 Orang	70 Orang	3.434 Orang	3.540 orang	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik
13		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	Fasilitasi kesejahteraan pekerja (Orang)					1.980 orang	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
14		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (Badan usaha, Miliar USD)	Peraturan Perusahaan (Badan Usaha)	2.000 Badan Usaha	1.200 Badan Usaha	1.043 Badan Usaha	1.200 Badan Usaha	720 Badan Usaha	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik
15		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (Badan usaha, Miliar USD)	Struktur Skala Upah (Badan Usaha)	1.560 Badan Usaha	1.560 Badan Usaha	0 Badan Usaha		913 badan usaha	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik
16		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (Badan Usaha, Laporan)	WLKP Online (Badan Usaha)	448.090 Badan Usaha	448.090 Badan Usaha	260.833 Badan Usaha	448.090 Badan Usaha	730.375 badan usaha	PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	000 Bukan Tematik
17		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (Badan Usaha, Laporan)	Layanan pembinaan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum ketenagakerjaan (Perusahaan)	7.500 Badan Usaha	6.721 Badan Usaha	0 Badan Usaha		97.254 Perusahaan	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik
18		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (Badan usaha, Miliar USD)	Fasilitasi Sertifikasi SMK3 bagi Perusahaan (Badan Usaha)	1.600 Badan Usaha	1.600 Badan Usaha	1.500 Badan Usaha	1.600 Badan Usaha	2.808 badan usaha	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
19		QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha (Badan usaha, Penyalur, Hektar)	Layanan Pengujian K3 pada Perusahaan (Badan Usaha)	3.995 Badan Usaha	600 Badan Usaha	0 Badan Usaha		4.565 badan usaha	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	000 Bukan Tematik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Sosial
Bagian Anggaran : 027

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
					Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	QEB Bantuan Keluarga	201 Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	KPM/Bln	10.000.000	10.000.000	TW I: 10.000.000 TW II: 8.108.740	10.000.000	10.000.000	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
2	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	QEE Bantuan Kebencanaan	101 Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat	Orang/Thn	530.000	530.000	277.145	530.000	65.000	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
3	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	QEE Bantuan Kebencanaan	102 Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial	Orang/Thn	6.033	3.700	3.032	3.700	3.900	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
4	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	QEB Bantuan Keluarga	301 KPM Yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah	KPM/Thn	1.484	1.500	48	1.500	1.540	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
5	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	QEB Bantuan Keluarga	101 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	KPM/Bln	18.370.020	18.800.000	18.277.083	18.277.083	18.250.000	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
6	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	QEB Bantuan Keluarga	101 KPM yang dirujuk untuk mendapatkan program pendampingan usaha	KPM/Thn	8.526	10.000	472	10.000	15.000	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
7	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	QEB Bantuan Keluarga	101 Warga KAT Yang diberdayakan	KK/Thn	3.720	2.800	-	2.800	2.800	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Perlindungan Sosial
8	Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	101 Bantuan ATENSI Bagi Kelompok Rentan, Korban NAPZA ODHIV, Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Orang/Thn	224.065	164.740	108.164	164.740	65.256	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Perlindungan Sosial
9	Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	104 Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang/Bln	33.374	36.000	36.000	36.000	8.000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Perlindungan Sosial
10	Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	104 Lanjut Usia yang mendapatkan Bantuan Permakanan	Orang/Bln	100.000	101.000	101.000	101.000	12.000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Perlindungan Sosial
11	Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	106 Anak YAPI yang mendapatkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang/Bln	274.053	270.000	270.000	270.000	10.000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Perlindungan Sosial

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
					Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
12	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	101 Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa Sekolah Rakyat	Orang/Thn	-	1.554	-	1.554	1.854	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
13	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	RAA Sarana Bidang Pendidikan	101 Pengelolaan Sarana Prasarana di Sekolah Rakyat	Paket	-	55.376	-	55.376	55.376	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
14	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	SBB Pendidikan Menengah	101 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Rakyat	Orang/Bln	-	5.495	-	5.495	15.420	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
15	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	SBC Pendidikan Dasar	101 Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Rakyat	Orang/Bln	-	4.110	-	4.110	14.405	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
16	Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	SBC Pendidikan Dasar	102 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sekolah Rakyat	Orang/Bln	-	175	-	175	12.675	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bagian Anggaran : 032

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.7022.RBQ. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	006.Klaster Komoditas Unggulan Air Payau (Kawasan)	-	1	1	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2363.PBW. Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	003.Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam(Rekomendasi Kebijakan)	10	8	21	-	10	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2363.QEG. Bantuan Peralatan / Sarana	003.Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun(Unit)	1	46	1	-	-	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2363.RAI. Sarana Pengembangan Kawasan	001.Lahan Garam yang difasilitasi(Hektar)	30	81	1.000	1.000	-	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2363.RBO. Prasarana Pengembangan Kawasan	002.Revitalisasi Lahan Garam(Hektar)	-	-	-	-	1.500	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
6	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2363.RBQ. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001.Prasarana Usaha Garam(Unit)					20	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Gender; Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2339.QEH. Bantuan Kelompok Masyarakat	001.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)(Kelompok Masyarakat)			1	-	250	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan; Kopdeskel Merah Putih
8	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2339.QEH. Bantuan Kelompok Masyarakat	005.Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)(Kelompok Masyarakat)			3	-	3	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan; Kopdeskel Merah Putih
9	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.PDC. Sertifikasi Produk	002.Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi(produk)	1.614	1.696	2.981	1.354	10.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
10	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.PDF. Sertifikasi Lembaga	001.Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer(Lembaga)	800	800	500	62	3.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
11	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.PDF. Sertifikasi Lembaga	002.Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi(Lembaga)	788	788	500	126	3.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
12	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk	001.Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya(produk)	85	94	33	6	200	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
13	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	002.UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan(Lembaga)	1.067	1.229	500	178	200	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
14	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.RAL. Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001.Sarana Pengujian Mutu(Unit)	8	8	1	-	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
15	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.3989.RBQ. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001.Prasarana Pengujian Mutu(Unit)	12	12	1	-	39	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
16	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.7010.PDD. Standarisasi Lembaga	001.Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu(Lembaga)	48	47	37	-	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
17	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.7010.PDD. Standarisasi Lembaga	002.Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium(Lembaga)	46	46	36	1	40	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
18	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.7010.PDD. Standarisasi Lembaga	003.Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan(Lembaga)	25	25	25	1	27	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
19	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.7010.QDC. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001.Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan(Orang)	2.910	2.910	6.325	-	10.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
20	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.7010.QIA. Pengawasan dan Pengendalian Produk	001.Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi(produk)	101	101	39	-	10	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
21	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	EC.2357.PEH. Promosi	001.Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan)(promosi)	194	194	174	14	150	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Makan Bergizi Gratis, Upaya Konvergensi Penanganan Stunting, Gender, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
22	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	DL.2376.RAA. Sarana Bidang Pendidikan	711.Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan(Paket)	28	28	3	-	9	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
23	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	DL.2376.RAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	715.Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi(Unit)	9	9	2	2	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
24	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	DL.2376.RBI. Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	721.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)	4	4	1	-	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
25	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	DL.2376.RBJ. RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	725.Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)	10	7	2	-	6	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
26	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	DL.2376.SAC. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	811.Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten(Orang)	8.020	8.152	7.615	2.476	12.634	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
27	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	DL.2376.SDC. Penelitian dan Pengembangan Modeling	843.Ilmu Pengetahuan atau Teknologi Pendidikan Tinggi yang Diterapkan kepada Masyarakat(Unit)	-	-	-	-	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pendidikan
28	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001.Operasi Kapal Pengawas(Operasi)	1.008	847	1.415	427	6	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
29	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	002.Operasi Pesawat Patroli(Operasi)	170	192	140	66	250	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
30	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2350.QHD. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	003.Operasi Speedboat Pengawas(Operasi)	433	403	287	133	30	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
31	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	WA.2329.RAN. Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	002.Sarana Data Citra Satelit Radar(Unit)	51	51	6	-	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi,Infrastruktur, Mitigasi perubahan Iklim, Adaptasi perubahan iklim, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
32	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	WA.2329.RCL. OP Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	001.OM Sarana Data Citra Satelit Radar(Unit)	1	1	3	-	3	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi, Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
33	Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	FD.2362.REA. Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	004.Oceans for Prosperity Project - Lautra(Hektar)	25.853.763	25.853.763	24.430.508	-	20.000.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
34	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2338.RBQ. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	003.Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I(Unit)	2	2	4	-	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru
35	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.2338.RBQ. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	004.Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port(Unit)	4	4	8	-	4	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
37	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	HB.7022.RBQ. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	003.Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)(Unit)			13	2	7	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Bagian Anggaran : 035

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030	1	1	0	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
2	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja	1	1	0	1	1	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
3	Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	PBF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	2	2	1	2	2	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
4	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Aksesi Indonesia ke OECD	0	1	0	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
5	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	-	1	0	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
6	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	3	1	0	1	1	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
7	Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional	1	2	1	2	4	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
8	Terwujudnya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	1	1	0	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
9	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1	0	1	1	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
10	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas	PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan)	002-Rekomendasi Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan	1	1	0	1	1	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
11	Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas	PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan)	002-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	1	2	1	2	2	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
12	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor	-	1	0	1	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
13	Terwujudnya Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka yang Berkualitas	PBK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan)	002-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri Besi dan Baja	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
14	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah (Rekomendasi Kebijakan)	001-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
15	Terwujudnya Pelayanan Investasi dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang	QAH-Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	004-Pelayanan Investasi Administrator KEK Arun Lhokseumawe	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
16	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah (Rekomendasi Kebijakan)	002-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Sei Mangkei	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
17	Terwujudnya Pelayanan Investasi dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang	QAH-Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	001-Pelayanan Investasi Administrator KEK Sei Mangkei	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
18	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah (Rekomendasi Kebijakan)	003-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Galang Batang	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
19	Terwujudnya Pelayanan Investasi dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang	QAH-Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	002-Pelayanan Investasi Administrator KEK Galang Batang	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
20	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah (Rekomendasi Kebijakan)	004-Rekomendasi Peningkatan Investasi di KEK Gresik	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
21	Terwujudnya Pelayanan Investasi dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang	QAH-Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	003-Pelayanan Investasi Administrator KEK Gresik	-	-	-	-	1	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
22	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Berkualitas dan Berkelanjutan	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	003-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan	-	-	-	-	3	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
23	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan	PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan)	001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel	-	-	-	-	4	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bagian Anggaran : 036

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kebijakan Bidang Sosial	Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN (Rekmondasi Kebijakan)	9	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental (Rekmondasi Kebijakan)	3	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaga)	76	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan	Komunikasi Publik	Penguatan Pusat perubahan di tingkat daerah (Lembaga)	34	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan	Komunikasi Publik	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat (Layanan)	1	-	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualilas Kesehatan	Koordinasi	Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (Koordinasi)	1	2	-	2	1	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
7	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualilas Kesehatan	Koordinasi	Koordinasi Penanggulangan Tuberkulosis (Koordinasi)	1	2	-	2	1	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
8	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualilas Kesehatan	Kebijakan Bidang Kesehatan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	2	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Bagian Anggaran : 041

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terlaksananya program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur energi IKN	4407.PBA.004	Rumusan kebijakan di bidang BUMN dalam pembangunan infrastruktur energi IKN	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1			
2	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka pengembangan sektor hulu dan hilir migas	4407.PBA.006	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pengembangan sektor hulu dan hilir migas	Rekomendasi Kebijakan	-	2	0	2			
3	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka hilirisasi bahan tambang	4408.PBA.004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka hilirisasi bahan tambang	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1			
4	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka Pengembangan EV Battery	4408.PBA.005	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan EV Battery	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1	1	PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	02-Ekonomi Berkelanjutan
5	Terlaksananya program pemerintah dalam penguatan BUMN Farmasi	4409.PBA.006	Rumusan Kebijakan Penguatan dan Penataan Bisnis Holding BUMN Farmasi	Rekomendasi Kebijakan	-	3	0	3			
6	Terlaksananya program pemerintah dalam Pengembangan Rumah Sakit dan Center of Excellence	4409.PBA.007	Rumusan Kebijakan Pengembangan Rumah Sakit dan Center of Excellence di Holding RS BUMN	Rekomendasi Kebijakan	-	3	0	3			
7	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka mendukung Industri Pertahanan Nasional yang Maju, Kuat, dan Mandiri	4410.PBA.005	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN Dalam Rangka Mendukung Defend ID sebagai Industri Pertahanan Nasional yang Maju, Kuat, dan Mandiri	Rekomendasi Kebijakan	-	2	0	2			
8	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro	4412.PBA.004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka pembiayaan UMKM dan Ultra Mikro	Rekomendasi Kebijakan	-	3	0	3	1	PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	07-Pembiayaan Sektor Strategis
9	Terlaksananya program pemerintah dalam restrukturisasi Waskita Karya dan Wijaya Karya	4413.PBA.004	Rumusan kebijakan dalam restrukturisasi Waskita Karya dan Wijaya Karya	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1			
10	Terlaksananya program pemerintah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	4413.PBA.005	Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1	1	PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	05-Infrastruktur Konektivitas
11	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka restrukturisasi BUMN perkebunan dan kehutanan	4415.PBA.004	Rumusan Kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka restrukturisasi BUMN perkebunan dan kehutanan	Rekomendasi Kebijakan	-	4	0	4			
12	Terlaksananya program pemerintah dalam Peningkatan Swasembada Gula	4415.PBA.005	Rumusan kebijakan bidang BUMN dalam Peningkatan Swasembada Gula	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1	1	PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	03-Ketahanan Energi dan Pangan
13	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Operasional Bandara	4416.PBA.004	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Operasional Bandara	Rekomendasi Kebijakan	-	2	0	2			
14	Terlaksananya program pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Event di 5 Destinasi Pariwisata	4416.PBA.005	Rumusan KebijakanPengembangan Infrastruktur dan Penyelenggaraan Event di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas	Rekomendasi Kebijakan	-	4	0	4			
15	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka Pengembangan Health and Wellness Tourism di Sanur	4416.PBA.006	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Health and Wellness Tourism di Sanur	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1			
16	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka Penataan Hub and Spoke serta Pengembangan Air Connectivity Domestik dan Internasional	4416.PBA.007	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Penataan Hub and Spoke serta Pengembangan Air Connectivity Domestik dan Internasional	Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1			
17	Terlaksananya program pemerintah dalam rangka Pengembangan Kapasitas Navigasi Penerbangan dan Penataan Metroplex System Greater Jakarta	4416.PBA.008	Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam rangka Pengembangan Kapasitas Navigasi Penerbangan dan Penataan Metroplex System Greater Jakarta	Rekomendasi Kebijakan	-	2	0	2			

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
					Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
18	Terlaksananya program pemerintah dalam Penguatan Kapasitas BUMN	4421.PBA.002	Rumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas BUMN	Rekomendasi Kebijakan	-	2	0	2	1	PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	01-Kinerja BUMN
19	Terlaksananya program pemerintah dalam Restrukturisasi dan Transformasi BUMN	4828.PBA.004	Rumusan Kebijakan Bidang Pembinaan BUMN dalam rangka Restrukturisasi dan Transformasi oleh ID FOOD dan PIHC	Rekomendasi Kebijakan	-	2	0	2			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Anggaran 047

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya PUG di bidang politik dan hukum	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	15	13	6	7	13	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
2	Meningkatnya PUG di Bidang Sosial dan Budaya	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	KL Penggerak PUG yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Penyelenggaraan PUG	13	6	3	3	11	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
3	Meningkatnya PUG di bidang ekonomi	Pelatihan Bidang Sosial	SDM yang diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan	11000	3550	1775	1775	2400		Pengarusutamaan Gender
4	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, RP, Perempuan perdamaian dan keamanan dan perempuan dalam kebencanaan, KK yang Responsif Gender	40	19	9	10	19		Pengarusutamaan Gender
5	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yang diberikan Pendampingan tentang pelaksanaan kebijakan dan Layanan PHP dari TPPO	38	12	6	6	12		Pengarusutamaan Gender
6	Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	262	280	140	140	300	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (PHAPL)	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	143	13	6	7	12	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
8	Meningkatnya pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak (PHSIPA)	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA	548	13	6	7	13	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
9	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan Pendidikan (PHAKP)	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan dan Pendidikan	69	13	6	7	13	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
10	Meningkatnya perlindungan anak kondisi khusus	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah yg diberikan bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus (Korban Jaringan Terorisme)	10	10	5	5	10	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
11	Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Pelayanan Publik kepada masyarakat	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tingkat Nasional	550	425	213	212	500	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
12	Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 129	35	1	1	0	1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	Pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di daerah (Prov/Kabupaten/Kota)	30	50	25	25	50	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bagian Anggaran : 048

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Volume Target		
1	Terwujudnya kelembagaan yang efektif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	AAD - Peraturan Presiden (Peraturan Presiden)	6189.AAD.010-PerPres tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (Perpres)	-	1	-	1	-		
		AAG - Peraturan Menteri (Peraturan Menteri)	6189.AAG.001 - Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2030 (Permen)	-	1	-	1	-		
2	Terwujudnya ASN yang profesional	UAB - Sistem Informasi Pemerintahan	6194.UAB.001 - Pengembangan Platform Digital Manajemen ASN (Sistem Informasi)	-	1	-	1	1	6194.UAB.001 - Pengembangan Platform Digital Manajemen ASN	m. Reformasi Birokrasi
3	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	UAI - Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	6191.UAI.002 - Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga)	-	116	-	116	116	6191.UAI.002 - Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga)	m. Reformasi Birokrasi
		FAI - Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Lembaga)	6191.FAI.022 - Evaluasi Reformasi Birokrasi (Lembaga)	628	630	-	630	634		
			6191.FAI.024 - Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaga)	624	630	-	630	634		
4	Terwuiudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	FAI - Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Lembaga)	6191.FAI.023 - Evaluasi WBK/WBBM (Unit kerja)	1200	250	-	250	1200		
5	Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas dan inklusif	UAI - Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	6195.UAI.010 - Survei Kepuasan Masyarakat (Lembaga)	550	195	-	195	500	6195.UAI.010 - Survei Kepuasan Masyarakat (Lembaga)	m. Reformasi Birokrasi
			6195.UAI.011 - Penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS)	-	3	-	3	-		
			6195.UAI.014 - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaga)	-	108	-	108	610	6195.UAI.014 - Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaga)	m. Reformasi Birokrasi
		FAI - Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (Lembaga)	FAI.6191.030 - Standar Pelayanan Publik (Lembaga)	100	10	-	10			
			FAI.6191.032 - Forum Konsultasi Publik (Lembaga)	400	30	-	30			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BADAN INTELIJEN NEGARA
Bagian Anggaran : 050

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
1	Menurunnya Tingkat Ancaman Bidang Kontra Intelijen	2856.QHB.Operasi Bidang Keamanan (Operasi, Hari Operasi)	2856.QHB.007.Operasi Intelijen Kontra Terorisme (Operasi)	896	896	444	896	96	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi Hijau
2	Menurunnya Tingkat Ancaman Bidang Kontra Intelijen	2856.QHB.Operasi Bidang Keamanan (Operasi, Hari Operasi)	2856.QHB.008.Operasi Intelijen Kontra Separatisme (Operasi)	786	786	387	786	86	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi Hijau
3	Terwujudnya Pengendalian Intern (First & Second Layer) yang Efektif, Efisien, dan Ekonomis dalam Operasi Intelijen Bidang Siber	3074.QHB.Operasi Bidang Keamanan (Operasi, Hari Operasi)	3074.QHB.006.Penguatan Operasi Intelijen Siber (Operasi)	284	284	165	284	-	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi Hijau
4	Terwujudnya Pengendalian Intern (First & Second Layer) yang Efektif, Efisien, dan Ekonomis dalam Operasi Intelijen Bidang Siber	3074.QHB.Operasi Bidang Keamanan (Operasi, Hari Operasi)	3074.QHB.007.Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia (Operasi)	18	18	0	18	-	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi Hijau
5	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Meritokrasi, Profesionalitas dan Berintegritas	2851.QDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	2851.QDB.001.Pembentukan Tim Respon Ancaman Siber (Tim)	1	1	0	1	-	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Pendidikan, Ekonomi Hijau, Pendidikan
6	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Meritokrasi, Profesionalitas dan Berintegritas	2851.RAF.Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (Unit, Paket)	2851.RAF.002.Integrasi Cyber Intelligent Analytics (Unit)	7	7	0	7	-	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Pendidikan, Ekonomi Hijau

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
7	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Meritokrasi, Profesionalitas dan Berintegritas	2851.TBC.Layanan Manajemen SDM Internal (Orang,Layanan,Rekomendasi)	2851.TBC.001.Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber (Orang)	25	50	32	50	-	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Pendidikan, Ekonomi Hijau, Pendidikan
8	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi Berbasis Meritokrasi, Profesionalitas dan Berintegritas	2851.DBA.Pendidikan Tinggi (Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi)	2851.DBA.001.Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (Orang)	-	-	-	-	160	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Pendidikan, Ekonomi Hijau, Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Bagian Anggaran : 051

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional	PBE. Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Rekomendasi Kebijakan	Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, Rekomendasi Kebijakan	0	1	0	1	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi
		RAF. Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Perluasan Cakupan Area National Cyber Security Operation Center, Titik (Tbps)	0	1	0	1	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan Infrastruktur
			Infrastruktur Kriptografi Nasional (*Cryptography as a Service*), Unit	1	1	0	1	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan Reformasi Birokrasi, dan Infrastruktur
			Penguatan Ekosistem Keamanan Siber di Indonesia, Paket	0	0	0	0	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan Infrastruktur
		PDC. Sertifikasi Produk, Produk	Sertifikasi produk teknologi keamanan siber dan sandi berdasarkan standar yang diakui oleh BSSN dalam rangka menjamin keamanan Infrastruktur Informasi Vital (IIV), Produk	0	2	0	2	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi, Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
		BDB. Fasilitasi dan Pembinaan, Lembaga	Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Administrasi Pemerintahan : Pusat, Lembaga	-	105	72	105	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan Reformasi Birokrasi
			Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor ESDM dan Pangan, Lembaga	20	45	24	40	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan Ketahanan Pangan
		PDI. Sertifikasi Profesi dan SDM, Orang	Sertifikasi SDM Berdasarkan Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi, Orang	-	360	321	325	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Nasional	PEC. Kerja Sama, kesepakatan	Kerjasama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber, kesepakatan	-	1	0	1	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi dan Komunikasi
		QHB. Operasi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Operasi	Operasi Audit Keamanan SPBE, Operasi	-	13	1	7	0	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, sert Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Koruppsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pertahanan Semesta, Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi, Reformasi Birokrasi

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
Bagian Anggaran : 054

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/LAPORAN PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB (Layanan)	525						
2	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/ LAPORAN NERACA SATELIT PARIWISATA NASIONAL (TSA) (Layanan)	1						
3	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS EKONOMI 2026 (Layanan)	526						
4	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA (Layanan)	1						
5	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK WISATAWAN MANCANEGARA (Layanan)	35					01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
6	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK E-COMMERCE (Layanan)	394						
7	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PERTANIAN (Layanan)	526						
8	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN (Layanan)	526						
9	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Data dan Informasi Publik (Layanan)	PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA (Layanan)	514						
10	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam	Data dan Informasi Publik (Layanan/Dokumen)	PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK STATISTIK RESMI (Layanan/Dokumen)		14	-	14	130	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ketahanan Pangan
11	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan	Data dan Informasi Publik (Data)	DATA 5 SASARAN VISI INDONESIA EMAS DAN 45 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (Data)					1,365		*Crosscutting issue*
12	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam	Data dan Informasi Publik (Layanan/Dokumen)	PUBLIKASI/LAPORAN PENYUSUNAN INFLASI (Layanan/Dokumen)		193	1	193	193		Lain-Lain
13	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL (Lembaga)		547	46	547	559		Reformasi Birokrasi
14	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Desa/Kelurahan)	PEMBINAAN DESA CINTA STATISTIK (Desa/Kelurahan)					2,982	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Reformasi Birokrasi

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
15	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional	Kerja Sama (Kesepakatan)	LAPORAN KERJASAMA OECD BIDANG STATISTIK (Kesepakatan)					-	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Lain-Lain

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian PPN/Bappenas
Bagian Anggaran : (055)

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai bidangnya	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rekomendasi Kebijakan/Kajian	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan, Rekomendasi Kebijakan	1	1	0,50	1	1		
2		Sosialisasi dan Penyelarasan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rekomendasi Kebijakan/Kajian	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1		
3		Sosialisasi dan Penyelarasan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rekomendasi Kebijakan/Kajian	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1		
4		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark, Rekomendasi Kebijakan	1	1	0,57	1	1	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
5		Kerja Sama, Kesepakatan/Dokumen/Kegiatan	Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, Kesepakatan/Dokumen/Kegiatan	1	1	0,48	1	1	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
6		OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi	Sistem Informasi KRISNA, Unit	1	1	0,47	1	1	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi
7		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	Beasiswa Pendidikan PNS Perencana Pembangunan Nasional, orang	-	166	14	14	237	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
8		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rekomendasi Kebijakan, Kajian	Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Biru, Rekomendasi Kebijakan	-	1	0,14	1	1	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
9		Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Rekomendasi Kebijakan, Kajian	Kebijakan Perencanaan Ekonomi Hijau pada Sektor Prioritas, Rekomendasi Kebijakan,	-	1	73,57	1	1	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ekonomi Hijau

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
10	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai bidangnya	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi	Sistem Informasi E-Monev, Unit		1	50,02	1	1	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi Birokrasi
11		Koordinasi, Kegiatan	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Kegiatan	-	1	0,50	1	1	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
12	Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim, Rekomendasi Kebijakan/Kajian/ Rekomendasi	Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI), Rekomendasi Kebijakan	1	1	0,40	1	1	02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan & Transisi Energi
13		Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Papua, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	-	1	0,75	1	1		
14	Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Rekomendasi Kebijakan/Kajian	Kebijakan Satu Data Indonesia, Rekomendasi Kebijakan	1	1	0,52	1	1	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
15		Koordinasi, Kegiatan	Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Kegiatan	1	1	0,36	1	1	07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Bagian Anggaran : 056

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
1	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5569.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5569.BIA.004 Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	1.174,00	238.000,00	-	238.000,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5569.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5569.BIA.005 Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan	296.612,22	456.155,00	-	456.155,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5569.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5569.BIA.006 Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu	24.410,88	4.800,00	-	4.082,66	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	6423.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6423.BIA.004 Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	313.861,90	711,00	311,24	711,00	35	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
5	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	6423.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6423.BIA.005 Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan	313.861,90	8,00	1,65	8,00	101	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	6423.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6423.BIA.006 Data Pengawasan dan Pengendalian P4T di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Perbatasan, dan Wilayah Tertentu	313.861,90	6,00	-	6,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
7	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5570.AFA.001 Rancangan NSPK dan Peraturan Bidang Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	1,00	-	1,00	16	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
8	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5570.BIA.001 Data Indikasi Pelanggaran P4T	7.109,66	290.509,00	125,14	290.509,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
9	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5570.BIA.002 Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Melebihi Batas Ketentuan	-	500,00	-	500,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5570.BIA.003 Rekomendasi Hasil Penertiban Tanah Telantar	-	4.000,00	-	4.000,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
11	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5570.BIA.004 Rekomendasi Tindak lanjut Optimalisasi Penertiban Tanah Telantar	1.138,00	13.933,00	-	13.933,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
12	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produkti tas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5570.QIA.001 Rekomendasi Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah Berakhir Jangka Waktu	1.138,00	8.400,00	-	8.400,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
13	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produkti tas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	5570.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5570.QIA.002 Rekomendasi Pendayagunaan Tanah Telantar	1.138,00	12.434,00	-	12.434,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
14	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produkti tas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	6424.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6424.BIA.001 Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	87,00	107,00	42,31	104,60	452	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
15	01 - Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produkti tas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	6424.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6424.BIA.002 Data Indikasi Pelanggaran P4T	17,00	300,00	-	268,42	3,671	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
16	02 - Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	5554.ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	5554.ABT.001 Neraca Penatagunaan Tanah	2,00	2,00	1,62	2,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
17	02 - Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	5554.ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	5554.ABT.002 Data Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	2,00	4,00	2,92	4,00	0	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
18	02 - Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	5554.ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	5554.ABT.003 Pemutakhiran Data LBS	-	1,00	0,69	1,00	7	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
19	02 - Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	5554.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5554.AFA.001 NSPK Penatagunaan Tanah	2,00	3,00	0,57	3,00	18	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
20	02 - Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	5554.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5554.FAE.001 Rekomendasi Kinerja Pelaksanaan Penatagunaan Tanah	6,00	6,00	2,46	6,00	266	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 S.D 2026

Kementerian/Lembaga : Perpustakaan Nasional
Bagian Anggaran : 057

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Tahun 2025		Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome		Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya		Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Target	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Volume Target		
1	Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan	1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	1	Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara Sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) (Lembaga)	11	4	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				2	Pembinaan dan Pelestarian Naskah Kuno Nusantara (Lembaga)	5	5	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Pendidikan
									untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
		2	Sarana Bidang Pendidikan (Naskah)	1	Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno Nusantara (Naskah)	2.000	450	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				2	Alih Bahasa Naskah Kuno Nusantara (Naskah)	157	102	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				3	Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara (Naskah)			100	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				4	Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara (Naskah)	80	35	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				5	Saduran Naskah Kuno Nusantara (Naskah)	10	10	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Pendidikan
									masyarakat yang adil dan makmur	
				6	Penyediaan Bahan Literasi Berbasis Koleksi Langka (Naskah)	-	-	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				7	Kajian Naskah Kuno Nusantara (Naskah)	20	20	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				8	Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of The World (MoW) (Naskah)	-	-	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				9	Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi	9.900	9.900	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
				10	Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media			6.500	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Pendidikan
									masyarakat yang adil dan makmur	
				11	Bahan Perpustakaan yang Dikonservasi	184.465	176.378	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Tahun 2025		Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya		Rincian Output (RO) dan satuannya		Volume Target	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Volume Target		
			12	Bahan Perpustakaan yang Dialih media				38.000	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan
2	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1 Pelatihan Bidang Pendidikan (Orang)	1	Peserta Pelatihan Kepustakawanan (Orang)		15.000	15.000	3.600	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			2	Peserta Pelatihan Kepustakawanan Metode Pembelajaran Bauran (Orang)		60	60	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		2 Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang)	1	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan (Orang)		450	100	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			2	Fasilitasi Sertifikasi Pustakawan (Orang)		500	500	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			3	Penguatan Uji Kompetensi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Perpustakaan (Orang)		432	100	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		3 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	1	Perpustakaan Tergabung Jejaring (Perpustakaan)		654	137	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			2	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Umum (Perpustakaan)		10.034	10.034	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			3	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Perpustakaan)		3.275	3.275	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			4	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi (Perpustakaan)		900	900	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		4 Akreditasi Lembaga (Lembaga)	1	Akreditasi Perpustakaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Khusus, dan Perguruan Tinggi (Perpustakaan)		100	100	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			2	Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Kecamatan/Desa/Kelurahan (Perpustakaan)		2.545	2.545	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
			5	Penjaminan Mutu Perpustakaan Terakreditasi (Perpustakaan)		40	40	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		5 Bantuan Lembaga (Lembaga)	1	Bantuan Sarana untuk Perpustakaan Umum (Perpustakaan)		10.137	10.119	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome		Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya		Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2025		Tahun 2026		
						Volume Target	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Volume Target		
				2	Bantuan Sarana untuk Perpustakaan Khusus (Perpustakaan)	1.852	1.852	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
				3	Perpustakaan yang mendapatkan Program Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Perpustakaan)	1.450	189	750	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
				4	Bantuan Sarana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi (Perpustakaan)	150	150	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		6	Sosialisasi dan Diseminasi (Orang)	1	Masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca (Orang)	60.000	9.460	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		7	Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang)	1	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno (Orang)	1.500	1.500	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
				2	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Prokl (Orang)amator Bung Hatta	850	375	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		8	Sarana Bidang Pendidikan (Paket)	1	Jurnal Elektronik yang Dilanggan (Paket)	251.766	227.573	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		9	Bantuan Produk dan Peralatan (Paket)	1	Akses Baca Digital di Daerah (Paket)	50	10	-	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan
		10	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	1	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi (Kelompok Masyarakat)	1.000	1.000	1000	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z)	Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Komunikasi dan Digital
Bagian Anggaran : 059

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Kab/Kota)	OM Palapa Ring, (Kab/Kota)	57	57	57	57	57	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Titik/Lokasi)	OM BTS 4G/Lastmile, (Titik/Lokasi)	6794	6746*	6747	7300	6.746**	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Titik/Lokasi)	OM Akses Internet, (Titik/Lokasi)	34900	31869*	27858	36830	31858	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
4	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Unit)	OM SATRIA 1, (Unit)	150	150	150	150	150	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
5	Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi, (Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband, (Rekomendasi Kebijakan)	7	3	2 Rekomendasi Kebijakan (1. Permen Komdigi 2/2025 tentang Perubahan atas Permen Kominfo 2/2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas 2. Permen Komdigi 13/2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 1,4GHz)	3	1	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Transformasi Digital
6	Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Unit)	Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS), (Unit)	1	1	1	1	1	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
7	Pengembangan Laboratorium BBPPT menjadi Laboralorium Pusat Penguiian Perangkat Digital	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikas. (Unit)	Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat TIK di BBPPT, (Unit)	1	1	1 (Proses lelang pengadaan alat ukur 1 unit SAR Test System)	1	1	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
8	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan internet	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Unit)	Sistem Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif, (Unit)	1 (4.094.514 Konten Negatif diblokir)	1	1 (1.570.187 Konten Negatif diblokir s.d. 20 Juli 2025)	1	1	PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Ruang Digital
9	Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Titik/Lokasi)	Pusat Data Nasional, Titik/Lokasi	1	1	1 (Penyediaan PDN telah selesai 100%, namun masih dalam tahap konfigurasi teknis persiapan operasional layanan IaaS)	1		PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
10	Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Titik/Lokasi)	OM Pusat Data Nasional, Titik/Lokasi		1	1 (*Managed Service* telah berkontrak, pembelian lisensi *one time risk assesment* dan *assesment firm ware*)	1	1	PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
11	Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik	Komunikasi Publik, (Layanan)	Pengelolaan dan Diseminasi Informasi Terkait Makan Siang Bergizi, (Orang)	N/A (Output Baru)	13.818.750	2.941.777	13.818.750	25.000.000	PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila,Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Makan Bergizi Gratis

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kepolisian RI
Bagian Anggaran : 060

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Tercapainya Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	QCE-Penanganan Perkara, Satuan Perkara/Berkas Perkara	002-Penanganan Tindak Pidana Siber (PN), Satuan Perkara	351	30	30	30	30	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
2	Terwujudnya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	QCE-Penanganan Perkara, Satuan Perkara/Berkas Perkara	002-Penanganan Tindak Pidana Narkoba (PN), Satuan Perlkara	519	7	7	7	7	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
3	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	QAH-Pelayanan Publik Lainnya, Satuan layanan/bidang/dokumen/Miliar Rp/titik	001-Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN), Satuan Layanan	1	1	0	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
4	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	QCE-Penanganan Perkara, Satuan Perkara/Berkas Perkara	001-Penanganan Judi Konvensional dan Online, Satuan Perkara					411	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
5	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	QCE-Penanganan Perkara, Satuan Perkara/Berkas Perkara	002-Penanganan Penyelundupan Manusia (People Smuggling), Satuan Perkara					40	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
6	Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	RBM-Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Satuan Unit / Kawasan	007-Pemenuhan Rumah Negara Polri (sumber dana SBSN) (PN), Satuan Unit	1066	1241	341	1241	793	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
7	Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	RBM-Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Satuan Unit / Kawasan	008-Pembangunan Pos Pol SubSektor di Wilayah Perbatasan (PN), Satuan Unit	4	1	0	1	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
8	Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	RBM-Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Satuan Unit / Kawasan	012-Pemenuhan Rumah Sakit Polri (PN), Satuan Unit	2				1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
9	Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	RBM-Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Satuan Unit / Kawasan	013-Pembangunan Polsek (PN), Satuan Unit	10	1	0	1	2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
10	Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	RBM-Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, Satuan Unit / Kawasan	Pembangunan Polsek (PN) (sumber SBSN), Satuan Unit					16	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Bagian Anggaran : 063

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001-Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	#N/A	2.135	1.917	2.135	282	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
2	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga/Laporan/Badan Usaha/Keputusan)	001-Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	6.380	3.738	1.817	3.738	495	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
3	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga/Laporan/Badan Usaha/Keputusan)	003-Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	#N/A	437	322	437	58	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	006 - Anggaran Kesehatan
4	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga/Laporan/Badan Usaha/Keputusan)	004-Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	36.052	23.718	11.381	23.718	3.141	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
5	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk/Laporan/Keputusan)	001-Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	23.339	18.114	8.362	18.114	2.399	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
6	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk/Laporan/Keputusan)	002-Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	59.060	40.836	17.291	40.836	5.408	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
7	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	PDD-Standarisasi Lembaga (Lembaga/Unit Kerja)	001-Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	-	1	31	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
8	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	RAB-Sarana Bidang Kesehatan (Paket/Unit)	001-Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73	120	29	120	10	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan
9	03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	001-UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1.284	841	189	841	111	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	003 - Anggaran Responsif Gender, 006 - Anggaran Kesehatan
10	04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	QCD-Perkara Hukum Badan Usaha (Perkara)	U74-Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT	#N/A	182	92	182	31	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Lembaga Ketahanan Nasional RI
Bagian Anggaran : 064

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Nasional dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional	Pendidikan Non Gelar	Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), Orang	200	110	-	110	220	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	
2	Meningkatkan Kapabilitas Ketahanan Nasional bagi Pimpinan Nasional	Pendidikan Non Gelar	Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N), Orang	0	80	-	190	80	-	
3	Terbentuknya Komponen Bangsa yang memahami dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Orang	730	200	100	200	1046	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	
4	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Nasional dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Training Of Trainner (TOT) Nilai- Nilai Kebangsaan, Orang	450	300	100	300	500	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	
5	Terbentuknya Komponen Bangsa yang memahami dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Dialog Wawasan Kebangsaan, Orang	200	1400	400	1400	4400	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	
6	Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel	Kebijakan Bidang Politik	Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik, Rekomendasi Kebijakan	7	7	0	3	5	-	
7	Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan sumber kekayaan alam, rekomendasi kebijakan	7	8	0	3	5	-	
8	Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel	Kebijakan Bidang Sosial	Kajian Strategik Bidang Sosial, Budaya, dan Demografi, Rekomendasi Kebijakan	7	7	0	3	6	-	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9	Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Kajian Strategis Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Geografi, Rekomendasi Kebijakan	7	7	0	3	5	-	
10	Terukurnya Indeks Ketahanan Nasional	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Pemodelan, Rekomendasi Kebijakan	3	3	0	1	3	-	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM**
Bagian Anggaran : **065**

No.	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional sesuai RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	2024	2025			Tahun 2026		
				Realisasi	Target	Volume Realisasi	Proyeksi Volume	Volume Target		
1	**Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal**									
	Meningkatnya Tata Kelola Deregulasi, Pemberdayaan Usaha, dan Pengembangan Potensi Daerah Bidang Penanaman Modal	PBB	Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah (Rekomendasi Kebijakan)	2	1	1	1	1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
		QDG	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok (UMKM)	594	500	519	519	250		
2	**Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**									
	Terwujudnya Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal dan Hilirisasi yang Efektif	QDH	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal (Badan Usaha)	115	90	49	90	23	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	000 - Bukan Tematik
		QAH	Satuan Tugas Percepatan Investasi (Layanan)	18	3	0	3	3		
3	**Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**									
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	PBB	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Jasa dan Kawasan (Rekomendasi Kebijakan)	2	1	0	1	1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
		QDH	Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Badan Usaha)	2	3	2	3	2		
4	**Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis**									
	Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis	PBB	Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Migas dan Minerba (Rekomendasi Kebijakan)	3	7	0	7	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
			Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis di 15 Komoditas Prioritas;	-	-	-	-	15		

No.	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional sesuai RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	2024	2025			Tahun 2026		
				Realisasi	Target	Volume Realisasi	Proyeksi Volume	Volume Target		
5	**Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal**									
	Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal	PEH	Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional (Promosi)	3	3	0	3	3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
6	**Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal**									
	Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Penanaman Modal	PEC	Hasil perundingan kerja sama penanaman modal Bilateral, Regional dan Multilateral (Kesepakatan)	39	40	26	40	33	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
7	**Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal**									
	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Optimal	QKC	Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	0	1	1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
8	**Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal**									
	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	UAB	Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi)	1	-	-	-	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	000 - Bukan Tematik
			Pemeliharaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Sistem Informasi)	-	1	0	1	1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional
Bagian Anggaran : 066

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap Pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Pelatihan Bidang Sosial (Satuan: Orang)	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan (Satuan: Orang)	1749	1910	324	1910	950	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
2	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap Pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Satuan: Lembaga)	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan (Satuan: Lembaga)	126	392	81	392	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
3	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Satuan: Desa, Desa/Kelurahan)	Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (Satuan: Desa)	418	214	24	214	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
4	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Satuan: Keluarga)	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga (Satuan: Keluarga)	1095	4280	1020	4280	-	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Satuan: Kelompok Masyarakat)	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (Satuan: Kelompok Masyarakat)	18	9	3	9	11	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
6	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Satuan: Kelompok Masyarakat)	Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba (Satuan: Kelompok Masyarakat)	34	81	13	81	46	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Perlindungan Sosial
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Standardisasi Lembaga (Satuan: Lembaga)	Fasilitasi Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi (Satuan: Lembaga)	20	20	0	20	10	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Kesehatan
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Satuan: Kelompok Masyarakat)	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) (Satuan: Kelompok Masyarakat)	401	225	30	225	220	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Kesehatan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Operasi Bidang Keamanan (Satuan: Operasi, Hari Operasi)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Satuan: Operasi)	6	7	2	7	2	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
10	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Operasi Bidang Keamanan (Satuan: Operasi, Hari Operasi)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) (Satuan: Operasi)	5	9	3	9	1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
Bagian Anggaran : 068

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	SCJ Pelatihan Bidang Sosial (Orang)	7560.SCJ.001 SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan internasional (Orang)	-	60	30	60			Kesehatan
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	3316.PFA.001 Pedoman di bidang akses pelayanan KB (NSPK)	3	2	1,3	2			
			3317.PFA.001 Pedoman terkait pengasuhan dan pendampingan anak usia dini dalam rangka pembentukan karakter (NSPK)	2	2	1	2			
			3319.PFA.001 Pedoman di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja (NSPK)	2	2	0	2			
			3324.PFA.001 Pedoman di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan (NSPK)	1	1	0	1			
			3324.PFA.002 Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga (NSPK)	2	1	0	1			
			3327.PFA.001 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (NSPK)	2	1	0	1			
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Provinsi)	3316.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB (Provinsi)	34	34	8	34			
			3317.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pembinaan keluarga dengan anak usia dini (Provinsi)	34	34	16	34			
			3317.UBA.002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) (Provinsi)	-	34	18	34			
			3318.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi penguatan SDM Lini lapangan	34	34	11	34			
			7713.UBA.002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam Peningkatan Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga	-	38	6	38			
			3319.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Ayah Teladan (GATE) (Provinsi)	-	34	0	34			
			3319.UBA.002 Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan BKR (Provinsi)	34	34	8	34			
			3319.UBA.003 Provinsi yang mendapatkan pembinaan pelembagaan GenRe (Provinsi)	34	34	0	34			
			3320.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan (Provinsi)	34	34	4	34			
			3322.UBA.002 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus (Provinsi)	34	34	10	34			
			3322.UBA.001 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi, intensifikasi dan integrasi pelayanan KB di wilayah khusus (DKI Jakarta) (Kab/Kota)	4	4	1	4			
			3324.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya (Provinsi)	-	34	0	34			
			3324.UBA.002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) (Provinsi)	34	34	0	34			
			3327.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB (Provinsi)	34	34	14	34			
			3328.UBA.002 Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB	6	-	-	-			
			3331.UBA.002 Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus (Kab/Kota)	244	218	89	218			

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Provinsi)	3331.UBA.001 Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	514	-	-	-			Kesehatan
			7558.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) (Provinsi)	-	34	13	34			
			7559.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi penguatan SDM Lini lapangan (Provinsi)	34	34	11	34			
			7713.UBA.001 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (Provinsi)	-	34	0	34			
			7713.UBA.002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam Peningkatan Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga (Provinsi)	-	38	6	38			
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7713.UAE.002 Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga (Laporan)	-	8	0	8			
		QEI Bantuan Lembaga (Lembaga)	3316.QEI.001 Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon (DKI Jakarta) (Lembaga)	660	876	194	876			
			3331.QEI.001 Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) (Lembaga)	21.361	20.832	10.702	20.832			
		QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Keluarga)	3317.QDE.001 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) (Keluarga)	93.800	93.800	9.380	93.800	93800		
			3331.QDE.001 Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (Keluarga)	8.070.754	7.976.954	2.617.660	7.976.954			
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	3319.QDD.001 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) (Kelompok Masyarakat)	384	384	154	384			
			3328.QDD.001 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) (Kelompok Masyarakat)	-	30	9	30			
			3323.QDD.001 Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	12	-	-	-			
			3324.QDD.001 Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	179	-	-	-			
			3329.QDD.001 Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	38	-	-	-			
			3331.QDD.001 PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Kelompok Masyarakat)	33.905	33.905	15.757	33.905			
			3331.QDD.002 Kampung Keluarga Berkualitas (Kelompok Masyarakat)	-	2.540	914	2.540			
			3331.QDD.002 Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	10.214	-	-	-			
			3331.QDD.004 Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1.028	-	-	-			
			3331.QDD.006 Rumah data kependudukan paripurna yang dibentuk dan difasilitasi di kampung KB	2.844	-	-	-			

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Bagian Anggaran : 074

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
1	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga/ Laporan/ Badan Usaha/ Penyalur/ Keputusan)	001 Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM (Lembaga)	-	7	-	7	-		
2	Meningkatnya Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis yang berkesesuaian dengan Prinsip-Prinsip HAM	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Lembaga/ Laporan/ Badan Usaha/ Penyalur/ Keputusan)	001 Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi K/L melalui Penilaian HAM (Lembaga)	-	-	-	-	10	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Bukan Tematik
3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	001 Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	-	1	-		
4	Terwujudnya Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Efektif	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang/ Akta/ Bidang/ Laporan)	001 Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (Orang)	-	-	-	-	400	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Bukan Tematik
5	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	002 Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Pelibatan Multipihak dalam Mendorong Situasi HAM yang Kondusif di Papua (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	-	1	-		
6	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	001 Rekomendasi Pengembangan Cetak Biru Penguatan Sistem Koordinasi dan Integrasi lembaga pengada layanan dalam pelaksanaan SPPT-PKKTP (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	0	1	-		
7	Menguatnya norma, perangkat dan kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak korban dan penguatan mekanisme khusus pemenuhan HAM bagi perempuan	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	002 Rekomendasi penguatan arah kebijakan penyikapan kekerasan berbasis gender berperspektif kepulauan dan inklusif di era digital (Rekomendasi Kebijakan)	-	1	0	1	-		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
8	Terwujudnya model penanganan pelindungan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, berbasis kepulauan dan digital	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	001 Transformasi dan Inovasi Digital yang Inklusif dengan Memastikan Prinsip Due Diligence (uji cermat tuntas) untuk Penyikapan Kompleksitas KtP (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	1	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Bukan Tematik
9	Terwujudnya model penanganan pelindungan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, berbasis kepulauan dan digital	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	002 Pemajuan Kerangka Regulasi dan Kolaborasi untuk Mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam Menjaga Keberagaman dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	10	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Bukan Tematik
10	Meningkatnya kondisi sosial, hukum dan kebijakan berperspektif gender dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif, inklusif, efektif, sistemik, berkelanjutan, berbasis kepulauan dan digital	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajian)	004 Penguatan Peran Kepemimpinan Lembaga Nasional HAM melalui Kolaborasi Lintas Pihak untuk Meningkatkan Kapasitas Penyikapan Kekerasan terhadap Perempuan serta Pelanggaran HAM secara Komprehensif dan Inklusif (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	2	01-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Bukan Tematik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Bagian Anggaran : 075

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (Strengthening of Marine Meteorology) (Layanan)	20	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami (Unit)	20	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Konektivitas Udara	Pembangunan AWOS pada Bandara di Wilayah Prioritas dan Wilayah 3T	3	-	-	-	4	PN 3- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi
4	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sistem operasional informasi Kualitas Udara (Unit)	10	-	-	-	7	PN 2 -Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Swasembada Pangan Swasembada Air Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pembangunan Rendah Karbon
5	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Informasi Meteorologi Maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) (Orang)	3.900	1.600	180	1.600	3.000	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim
6	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Orang)	3.070	945	160	945	1.630	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim
7	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG)(Orang)	6.800	2.110	101	2.110	4.600	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim
8	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar (Rekomendasi)	3	1	0	1	2	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim
9	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project (IDRIP)	-	144	0	144	-	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
10	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peralatan monitoring dampak akibat gempabumi dengan peralatan intensitymeter dan accelerograph melalui IDRIP	-	4	4	4	-	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim
11	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Optimalisasi sistem layanan teknologi komputasi dan pengelolaan data melalui IDRIP	-	1	0	1	-	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim
12	Terwujudnya Layanan Prima Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tematik Berbasis Dampak dan Resiko	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	peralatan Penguatan Strengthening climate and weather service capacity Phase II (SIMM 2)	-	13	0	13	1	PN 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna Pembangunan Berketahanan Iklim

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum
Bagian Anggaran : 076

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sesuai Perpres tentang Rincian APBN (**Lampiran III.2: Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga**)		RO Yang Paling Strategis/ *Eye Catching/Real Work* /Mendukung Prioritas Presiden, yang diturunkan dari KRO							
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Persiapan Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal (Lembaga)	552	552	0	552	552	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
			Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal (Lembaga)	552	552	0	552	552	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
2	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pilkada	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Persiapan Pembangunan Sistem Informasi Pemilu (Lembaga)	553	553	553	553	553	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu
			Fasilitasi Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi (Lembaga)	553	553	553	553	553	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu
3	Terlaksananya Pendataan DPT Berkelanjutan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan (Lembaga)	553	553	553	553	553	Pendataan DPT Berkelanjutan	Pendataan DPT Berkelanjutan
			Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan (Lembaga)	553	553	553	553	553	Pendataan DPT Berkelanjutan	Pendataan DPT Berkelanjutan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 S.D 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Konstitusi
Bagian Anggaran : 077

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN						Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2026
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus (perkara)	308	308	-	-	-	-
2	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi (orang)	1.800	3.699	-	-	1.500	Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara0
3	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi (laporan)	-	-	3	3	3	Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi
4	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Penyusunan Kebijakan Pengaduan Konstitusional / *Constitutional Complaint* (rekomendasi kebijakan)	-	-	1	1		
5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan (unit)	-	-	1	1	1	Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan
6	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	Pembangunan e-learning (sistem informasi)	-	-	1	1	1	Pembangunan e-learning
7	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan MKMK (rekomendasi kebijakan)	-	-	-	-	1	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan MKMK
8	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional	Grand Design Pengembangan SDM, peningkatan kompetensi dan Profesionalisme untuk SDM Berkualitas (dokumen)	-	-	-	-	1	Grand Design Pengembangan SDM, peningkatan kompetensi dan Profesionalisme untuk SDM Berkualitas
9	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional	Identikasi Kebutuhan Pemenuhan SDM MK berdasarkan Anjab MK (dokumen)	-	-	-	-	1	Identikasi Kebutuhan Pemenuhan SDM MK berdasarkan Anjab MK

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Bagian Anggaran : 078

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Orang, Kegiatan)	002 Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum (Orang)	661	750	352	758	11	002 Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum TPPU (Kegiatan)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
2	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional (Rekomendasi Kebijakan)	0	9	1	9	4	002 Pelaksanaan Implementasi dan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan Konvensi Internasional (Rekomendasi Kebijakan)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
3	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	PEC Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)	003 Kerja Sama Internasional dalam Keanggotaan FATF (Dokumen)	0	5	3	5	20	003 Kontribusi Indonesia dalam Keanggotaan FATF (Kesepakatan)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
4	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	003 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian (Perkara)	0	2	2	2	3	003 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Perjudian (Perkara)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
5	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	004 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup (Perkara)	0	5	1	8	6	004 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Lingkungan Hidup (Perkara)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
6	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	005 Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi (Perkara)	0	102	76	103	54	001 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Korupsi (Perkara)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
7	Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia	QCE Penanganan Perkara (Perkara, Berkas Perkara)	006 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Narkotika (Perkara)	0	5	1	7	35	002 Hasil Analisis dan Pemeriksaan Sektor Narkotika (Perkara)	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Informasi Geopasial
Bagian Anggaran : 083

No	Sasaran/*Outcome* *	Klasifikasi Rincian Output - Satuan	Rincian Output - satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target **		
1	Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial	QMA - Data dan Informasi Publik (Data)	Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)	0	4 Data (1.377 Km2)	0	0	8 Data	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
2	Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial	QMA - Data dan Informasi Publik (Peta)	Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)	760	0	0	0	4 Peta (5.982 Km2)	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
3	Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial	QMA - Data dan Informasi Publik (Peta)	Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:50.000, 1: 250.000, 1: 500.000, 1: 1.000.000 (ILASPP)	0	5 Peta (1.186 Km2)	0	5	5 Peta (198.091 Km2)	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
4	Meningkatnya Tema IGT yang telah dibina	PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan(Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi Kompilasi dan Integrasi IGT	15	13	2	6	0	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
5	Meningkatnya Kapabilitas K/L/P Pengguna IG	PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan(Rekomendasi Kebijakan)	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Geospasial (ILASPP)	0	0	0	0	1	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
6	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Akses Penghubung Simpul Jaringan	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	-	16	0	0	0	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
7	Terjaminnya kualitas tenaga profesional bidang Informasi Geospasial	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat(Orang)	Pembinaan SDM Bidang IG	120	50	33	70	0	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	

No	Sasaran/*Outcome* *	Klasifikasi Rincian Output - Satuan	Rincian Output - satuan	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target **		
8	Meningkatnya kapasitas penyimpanan Geospatial Computing Center untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial	RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	Kapasitas Penyimpanan Geospatial Computing Center	-	1	0	1	0	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
9	Terselenggaranya layanan Geospatial Computing Center untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu	RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	Perangkat Pengolah Data Geospatial Computing Center 2025	-	3	0	3	0	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
10	Terselenggaranya layanan Geospatial Computing Center untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu	RDS-OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi(Titik Lokasi)	Pemeliharaan Prasarana Geospasial Computing Center	2	2	1	2	1	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	

*) merujuk ke Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
**) merujuk pada hasil penelaahan alokasi anggaran BIG TA 2026

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Bagian Anggaran : 084

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN			Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/ Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha atau organisasi	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	Fasilitasi dan Pembinaan SNI Bina UMK (UMKM)	3.718	2.050	2.383	2.400	2.050	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
2	Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha atau organisasi	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	Jaringan Pembinaan Penerapan SNI Kepada UMKM di Daerah (UMKM)	577	535	240	535	-		
3	Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha atau organisasi	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (Industri/ IKM/ Miliar USD)	Fasilitasi Penerapan SNI termasuk sektor hilirisasi (Industri)	-	971	471	971	800	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
4	Meningkatnya penerapan SNI oleh pelaku usaha atau organisasi	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (Industri/ IKM/ Miliar USD)	Fasilitasi Keberterimaan Produk ber-SNI dalam Perdagangan Internasional	-	-	-	-	20	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
5	Meningkatnya SDM SPK Nasional yang Berakhlak untuk Peningkatan Daya Saing	Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang/ Akta/ Keping/ Bidang)	Layanan Pelatihan Publik (Orang)	460	1.760	809	1.760	1.780	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
6	Meningkatnya penerapan SNI dan persyaratan acuan dalam tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja,Industri dan UMKM (Rekomendasi Kebijakan/ Kajia)	Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Rekomendasi Kebijakan)	-	67	25	67	67	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
7	Meningkatnya ketersediaan Sistem Pengembangan Standar yang Efektif dan Efisien	Standarisasi Produk (produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar)	Standar bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian termasuk mendukung sektor hilirisasi (Standar)	-	-	-	-	200	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
8	Meningkatnya ketersediaan Sistem Pengembangan Standar yang Efektif dan Efisien	Standarisasi Produk (produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar)	Standar bidang Mekanika, Energi, Infrastruktur, dan Teknologi Informasi (Standar)	-	-	-	-	200	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
9	Meningkatnya ketersediaan Sistem Pengembangan Standar yang Efektif dan Efisien	Standarisasi Produk (produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar)	Rekomendasi Pengembangan Standar Internasional (Rekomendasi)	-	-	-	-	5	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
10	Meningkatnya ketersediaan Sistem Pengembangan Standar yang Efektif dan Efisien	Standarisasi Produk (produk/ Ekor/ Peralatan/ Rekomendasi/ Standar)	Standar dalam rangka mendukung ekspor (standar)	-	50	1	50	-		
11	Meningkatnya ketersediaan Sistem Pengembangan Standar yang Efektif dan Efisien	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar)	Sistem dan kebijakan pengembangan standar (NSPK)	3	5	3	5	3	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
12	Meningkatnya ketersediaan LPK (laboratorium, PUP, PBA) yang diakreditasi untuk mendukung daya saing produk Indonesia	Akreditasi Lembaga (Lembaga)	Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggaran Uji Profisiensi (Lembaga)	1.431	1.270	574	1.270	1.290	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/ Isu Strategis
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
13	Meningkatnya ketersediaan LPK (Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi) yang diakreditasi untuk mendukung daya saing produk Indonesia	Akreditasi Lembaga (Lembaga)	Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifi kasi (Lembaga)	1.390	800	453	800	816	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
14	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	Akreditasi Lembaga (Lembaga)	Evaluasi Assesmen Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Sertifikasi (Lembaga)	-	825	566	825	860	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
15	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar)	Sistem dan Skema Akreditasi (NSPK)	39	43	13	43	43	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
16	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang MRB ke Sistem Internasional untuk mendukung	Akreditasi Produk (produk)	Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi (Produk)	1	3	-	3	-		
17	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang TK ke Sistem Internasional untuk mendukung	Akreditasi Produk (produk)	Akreditasi Layanan Diseminasi SNSU Termoelektrik dan Kimia (Produk)	1	1	-	1	-		
18	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang MRB ke Sistem Internasional untuk mendukung produk Indonesia	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi (NSPK)	-	-	-	-	4	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
19	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang TK ke Sistem Internasional untuk mendukung produk Indonesia	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Sistem pengukuran dan bahan acuan SNSU Termoelektrik dan Kimia (NSPK)	-	-	-	-	2	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang MRB ke Sistem Internasional untuk mendukung produk Indonesia	Penyidikan dan Pengujian Peralatan (Unit)	Diseminasi SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi (unit)	-	-	-	-	1.200	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang TK ke Sistem Internasional untuk mendukung produk Indonesia	Penyidikan dan Pengujian Peralatan (Unit)	Diseminasi SNSU Mekanika, Termoelektrik dan Kimia (unit)	-	-	-	-	820	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
20	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang MRB ke Sistem Internasional untuk mendukung	Penyidikan dan Pengujian Peralatan (Unit/ Sertifikat)	Penyidikan dan Pengujian SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi (Sertifikat)	1.311	1.175	655	1.175	-		
21	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang TK ke	Penyidikan dan Pengujian Peralatan (Unit/ Sertifikat)	Penyidikan dan Pengujian SNSU Termoelektrik dan Kimia (Sertifikat)	1.112	750	572	750	-		
22	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional di bidang MRB ke Sistem Internasional untuk mendukung produk Indonesia	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (Unit)	SNSU Radiasi dan Medik (Unit)	120	7	2	7	-		
23	Meningkatnya perencanaan, pengelolaan organisasi dan RB, manajemen kinerja dan Kerjasama yang efektif untuk mencapai sasaran	Kerja sama (Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan)	Pengelolaan Kerja Sama (Dokumen)	-	2	-	2	2	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bagian Anggaran : 085

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan ketenaganukliran	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Pengawasan Keselamatan dan Keamanan pada Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	600 lembaga	600 lembaga	130 lembaga	600 lembaga	100 lembaga	PN 04	Kesehatan
			002-Pengawasan Ketenaganukliran terhadap Fasilitas Kesehatan Rujukan KJSU dan KIA berbasis Teknologi Nuklir	-	150 lembaga	30 lembaga	150 lembaga	47 lembaga	PN 04	Kesehatan
			005-Pengawasan Keselamatan pada Instalasi Nuklir dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspeksi	10 lembaga	10 lembaga	4 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	PN 04	Iptek
			006-Laporan Hasil Pengawasan Bahan Nuklir dan Proteksi Fisik	23 lembaga	23 lembaga	10 lembaga	23 lembaga	15 lembaga	PN 04	Iptek
			007-Pengawasan Keselamatan Lingkungan dan Limbah Radioaktif	22 lembaga	30 lembaga	12 lembaga	30 lembaga	10 lembaga	PN 02	Lingkungan Hidup
			008-Pengawasan terhadap Fasilitas Penyimpanan Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan pada Perusahaan Bangkrut, Pailit atau tidak Beroperasi	5 lembaga	10 lembaga	1 lembaga	10 lembaga	2 fasilitas	PN 02	Lingkungan Hidup

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan ketenaganukliran	QII-Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	001-Peta Rona Awal Radioaktivitas Lingkungan Calon Tapak PLTN	1 dokumen teknis	20 hektar	2 hektar	20 hektar	3 hektar	-	Energi
		RDH-OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	001-Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional dengan pemasangan I-RDMS	1 unit	6 unit	0 unit	6 unit	1 unit	PN 04	Iptek

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Lembaga Administrasi Negara
Bagian Anggaran : 086

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN yang Berkualitas	Kebijakan Bidang Aparatur	Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi	1 rekomendasi kebijakan	0	0	0	0	Bukan PN	Bukan Tematik
2		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	ASN Talent Academy	30 orang	40 orang	0	40 orang	0	Bukan PN	Bukan Tematik
3	Terwujudnya Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	Kebijakan Bidang Aparatur	Rencana Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan) Nasional Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Nasional		1 rekomendasi kebijakan	0	1 rekomendasi kebijakan	0	Bukan PN	Bukan Tematik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d. 2026

Kementerian/Lembaga : Arsip Nasional Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 087

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Kepatuhan Publik Terhadap Kebijakan Kearsipan	(QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI), Lembaga	50					(PN-7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	-
2	Meningkatnya Kepatuhan Publik Terhadap Kebijakan Kearsipan	(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI), Lembaga	78					(PN-7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	-
3	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	(UBA) Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (SRIKANDI), Lembaga	80					(PN-7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	-
4	Terwujudnya Budaya Tertib Arsip secara Nasional	(UAI) Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang di Awasi, Lembaga	632	130	0	130	130	(PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
5	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh dan Terpercaya	(UAA) Kearsipan	Arsip Yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), Arsip	10	7	0	7	7	(PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
6	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh dan Terpercaya	(UAA) Kearsipan	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang didigitalisasi, Arsip	532.045	593.000	57.908	593.000	613.000	(PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
7	Terwujudnya Memori Kolektif Bangsa Indonesia yang Autentik, Utuh dan Terpercaya	(UAA) Kearsipan	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN, Arsip	38.246	65.000	98.365	194.023	65.000	(PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
8	Pengembangan Prasarana Pusat Layanan Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara	(RBN) Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Prasarana Pusat Layanan Khazanah Kearsipan Melayu Nusantara, Unit					1	(PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Kepegawaian Negara
Bagian Anggaran : 088

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga	Penerapan Perencanaan Kebutuhan ASN berbasis Prioritas Nasional (RPJM) dan Potensi Daerah, Lembaga					123	Standar Penilaian Kompetensi dan Potensi	Bukan Tematik
2	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Orang	Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, Orang	70907					Penerapan Manajemen Kinerja Periodik (Harian,Bulanan,Tahunan) secara Digital untuk Mendukung Total Reward	Bukan Tematik
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, NSPK	Penyusunan Standar Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN, NSPK	1					Penerapan Perencanaan Kebutuhan ASN berbasis Prioritas Nasional (RPJM) dan Potensi Daerah	Bukan Tematik
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Lembaga	Penerapan Manajemen Kinerja Periodik (Harian,Bulanan,Tahunan) secara Digital untuk Mendukung Total Reward, Lembaga					384	Pengembangan Backend Services Layanan Kepegawaian	Bukan Tematik
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Kebijakan Bidang Aparatur, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan tentang Sistem Penggajian Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah, Rekomendasi Kebijakan	1					Penguatan Data Profile ASN	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Roadmap Penerapan Sistem Pensiun, Rekomendasi Kebijakan		1	30%	1		Interoperabilitas Database Profile ASN	Bukan Tematik
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Data dan Informasi Publik, Layanan	Database Profile ASN, Layanan		1	12%	1	1	Pengukuran Penerapan Kebijakan Sistem Merit ASN	Bukan Tematik
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan	Data dan Informasi Publik, Layanan	Interoperabilitas Database Profile ASN, Layanan					1	Pengawasan Penerapan Sistem Merit ASN	Bukan Tematik
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Rekomendasi	Pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Penindakan atas Pelanggaran Penerapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Rekomendasi		100	31	100			
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, Lembaga	Pengukuran Penerapan Kebijakan Sistem Merit ASN, Lembaga					639		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Bagian Anggaran : (089)

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN			Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Nilai potensi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	6.311.468,94						
		Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien	Rupiah (Juta)	60.071.396,16						
		Nilai penghematan dan penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	11.957.174,17	10.099.661	21.228.523	21.228.523	10.302.125	Rekomendasi Strategis Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	PP	15						
		Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	KP	71						
		Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang tercapai sesuai target	PPS	26						
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	58						
		Persentase Keberhasilan Pengawasan Prioritas Presiden oleh BPKP	Persen					50	Rekomendasi Strategis Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional	
		Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional	Predikat		Optimal		Optimal	Optimal	Rekomendasi Strategis Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pembangunan Nasional	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan	Jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan usaha yang baik	BU	77						
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Jumlah K/L dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	K/L	54						
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	92						
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	31						

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/D/BU	Persentase K/L dengan Maturitas SPIP >= Level 3	(%) Persen		47,57		47,57	51,46	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik Terdefinisi	(%) Persen	74,20	39,47		39,47	44,74	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik Terdefinisi	(%) Persen		9,84		9,84	17,72	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	(%) Persen		49,00		49,00	56,00	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ≥ Level 3	(%) Persen	83,95	39,47		39,47	47,37	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ≥ Level 3	(%) Persen		10,04		10,04	21,26	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase K/L dengan MRI >= Level 3	(%) Persen	82,93						
		Persentase Provinsi dengan MRI >= Level 3	(%) Persen	58,82						
		Persentase Kabupaten/Kota dengan MRI >= Level 3	(%) Persen	32,28						
		Persentase BU dengan MRI >= 3	(%) Persen	35,12						
		Persentase BUMN dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	(%) Persen		26,18	3,13	26,18	33,48	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/D/BU	Persentase BUMD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	(%) Persen		11,17	0,09	11,17	16,43	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
		Persentase BLU/BLUD dengan Maturitas Manajemen Risiko dalam Kategori Fase Praktik yang Baik	(%) Persen		10,17		10,17	19,61	Rekomendasi atas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	Indeks Kapabilitas Pengawasan BPKP	Indeks Skala 1-5	4,00	4,61		4,61	4,62		
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Skala 100	87,22						

Keterangan: Terdapat perubahan Rencana Strategis BPKP Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2025

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Bagian Anggaran : 090

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)*
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor non migas ke pasar potensial	Promosi (Promosi)	Promosi Dagang dan Misi Dagang (Kegiatan Promosi)	21	25	-	25	43	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Partisipasi pada Rantai Nilai Global
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor non migas ke pasar potensial	Promosi (Promosi)	Trade Expo Indonesia (Promosi)	6	2	-	2	1	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Partisipasi pada Rantai Nilai Global
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan	Kebijakan Bidang Investasi da	Rekomendasi Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar (rekomendasi kebijakan)	50	32	15	32	27	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Partisipasi pada Rantai Nilai Global
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ Fasilitasi Kebijakan Ekspor dan Impor	Pelayanan Publik kepada bad	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor Indonesia (Badan Usaha)	1.000.000	903.468	563.817	903.468	700**	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Partisipasi pada Rantai Nilai Global
5	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan	Pengawasan dan Pengendali	Pengawasan post border (Produk)	2.200	807	301	807	855	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan AntarWilayah
6	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan/ Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang	Data dan Informasi Publik (La	Penyediaan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Data dan informasi)	1	2	1	2	1	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
7	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan	Pengawasan dan Pengendali	Pengawasan Barang Beredar di Pasar (Produk)	750	325	98	325	375	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan AntarWilayah
8	Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas	Fasilitasi dan Pembinaan Mas	Pelaku Usaha dan Petani yang Mengikuti Bimbingan Teknis SRG dan PLK (Orang)	360	440	-	440	450	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan AntarWilayah
9	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel dan Profesional/ Layanan Manajemen SDM dan Organisasi	Pendidikan Tinggi (Orang)	Pendidikan Vokasi D3 Metrologi dan Instrumentasi (Orang)	250	260	189	260	260	04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas	
10	Mewujudkan Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab/Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan	Fasilitasi dan Pembinaan Mas	Konsumen Yang Di Edukasi (Orang)	5.000	2.500	2.125	2.500	2.500	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perdagangan AntarWilayah
11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor jasa prioritas	Fasilitasi dan Pembinaan UMK	Export Coaching Program (UMKM)	180	210	200	210	240	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Partisipasi pada Rantai Nilai Global
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Perjanjian (Perjanjian)	Perjanjian Perdagangan ASEAN-Canada (Perjanjian)	1	1	-	1	1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	
13	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Perjanjian (Perjanjian)	Indonesia-EU CEPA (Perjanjian)	1	1	-	1	1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	
14	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Perjanjian (Perjanjian)	Indonesia-Peru CEPA (Perjanjian)	1	1	-	1	1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Perjanjian (Perjanjian)	Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA (Perjanjian)	1	1	-	1	1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	Perjanjian (Perjanjian)	Indonesia-GCC CEPA (Perjanjian)	1	1	-	1	1	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)*
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa/ekspor jasa prioritas	Pelayanan Publik kepada badan usaha (Badan Usaha)	Layanan Inquiry dan Temu Bisnis (Badan Usaha)	251	200	40	200	200	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Partisipasi pada Rantai Nilai Global
18	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan***	-	500	-	500	500	05 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	

Ket *) Sesuai dengan rancangan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029
**) Nama RO sesuai rancangan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah Layanan Penerbitan Surat Asal Barang
***) Nama RO sesuai rancangan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Bagian Anggaran : 092

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	QDC, Orang	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani, Orang	9400	4.500	-	4.500	605	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani	Pendidikan
2	Meningkatnya Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi	QDC, Orang	Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi Berolahraga, Orang	170000	170.000	-	170.000	4.211	Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi Berolahraga	Pendidikan
3	Terwujudnya Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional	QDC, Orang	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional, Orang	140	140	-	140	237	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional	Pendidikan
4	Terwujudnya Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	QDC, Orang	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade, Orang	400	99	-	99	4.299	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	Pendidikan
5	Meningkatnya Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	QDC, Orang	Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, Orang	678	370	-	370	400	Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	Pendidikan
6	Terwujudnya Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di Tingkat Regional dan Internasional yang Terfasilitasi	QEI, Lembaga	Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di Tingkat Regional dan Internasional yang Terfasilitasi, Lembaga	3	6	-	6	2	Kejuaraan Multi Event Olahraga Prestasi di Tingkat Regional dan Internasional yang Terfasilitasi	Pariwisata
7	Meningkatnya Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	PDI, Orang	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional, Orang	312	312	-	312	600	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional	Pendidikan
8	Terwujudnya Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembangan	QEI, Lembaga	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Lembaga	17	15	-	15	30	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Pendidikan
9	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor Penyelenggaran Pelayanan Kepemudaan Pusat dan Daerah	PEA, Kegiatan	Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor Penyelenggaran Pelayanan Kepemudaan Pusat dan Daerah, Orang	10	5	-	5	7	Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor Penyelenggaran Pelayanan Kepemudaan Pusat dan Daerah	Pendidikan
10	Meningkatnya Pemuda yang terfasilitasi dan Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional	QDC, Orang	Pemuda yang terfasilitasi dan Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional, Orang	309	249	-	249	200	Pemuda yang terfasilitasi dan Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional	Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagian Anggaran : 093

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Integrasi dan Optimalisasi Data Insight Pemberantasan Korupsi	RBR-Dukungan Teknis (dokumen)	Dokumen Perancangan, Kajian, Konsep, Panduan Manajemen Risiko Kecurangan pada Layanan Pemerintah (Dokumen)					2	07-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemebrantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
2	Terbangunnya Persepsi Antikorupsi Masyarakat	PEF-Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	Kampanye (Digital dan Non Digital) Nilai Antikorupsi (Orang)	6.089.980.000	12.289.890	4.574.392	12.289.980	12.289.890		
3	Meningkatnya kompetensi antikorupsi dan integritas penyelenggara pemerintahan	UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (orang)	Pelatihan Integritas ASN dan APH (Orang)	n/a	1000	865	1000	1050		
4	Meningkatnya kompetensi antikorupsi dan integritas masyarakat	UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (orang)	Pelatihan Penguatan Integritas untuk Masyarakat Umum, Badan Usaha dan Legislatif (Orang)	n/a	500	140	500	525		
5	Terciptanya ekosistem pendidikan berintegritas	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (lembaga)	Fasilitasi dan Pembinaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, ASN melalui Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Berbasis Bukti (Lembaga)	n/a	n/a	n/a	n/a	83		
6	Optimalnya penyidikan tindak pidana korupsi	QCE-Penanganan Perkara	Layanan Penyidikan Perkara TPPU Berbasis Risiko dan Dokumen Intelejen Keuangan (Perkara)	n/a	n/a	n/a	n/a	8		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : DPD RI
Bagian Anggaran : 095

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
					Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	BMB - Komunikasi Publik	Kegiatan Aspirasi Masyarakat dan Daerah oleh Anggota DPD RI	Layanan	38	38	-	38	-	-	Lain-lain
2	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	BMB - Komunikasi Publik	Kegiatan Anggota DPD RI pada Masa Kegiatan di Daerah (Masa Reses)	Layanan	-	-	-	-	5		
3	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	BMB - Komunikasi Publik	Kunjungan Kerja Perseorangan di Daerah Pemilihan (Kundapil) oleh Anggota DPD	Layanan	-	-	-	-	7	-	Lain-lain
4	Meningkatnya kualitas	AAA - Undang-Undang	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite I	RUU	1	1	-	1	2	-	Lain-lain
5	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	AAA - Undang-Undang	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite II	RUU	1	1	-	1	2	-	Lain-lain
6	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	AAA - Undang-Undang	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite III	RUU	1	1	-	1	2	-	Lain-lain
7	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	AAA - Undang-Undang	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite IV	RUU	1	1	-	1	2	-	Lain-lain
8	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	AAA - Undang-Undang	RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Panitia Perancang Undang - Undang	RUU	1	1	-	1	1	-	Lain-lain
9	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	-	5	3	2	-	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
10	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Rancangan Undang - Undang	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
11	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang Usul Pemerintah dan DPR	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	2	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
12	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang APBN	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	4	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
13	Meningkatnya kualitas legislasi RUU	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang Lainnya	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
14	Meningkatnya kualitas	AEA - Koordinasi	Pemasyarakatan Keputusan DPD RI	Kegiatan	10	5	1	4	-		
15	Meningkatnya kualitas pengawasan atas	AEA - Koordinasi	Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI	Laporan	-	-	-	-	13	-	Lain-lain
16	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan	ABC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I	Rekomendasi Kebijakan	5	6	-	6	6	-	Lain-lain
17	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan	ABC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III	Rekomendasi Kebijakan	4	5	1	5	3	-	Lain-lain
18	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan	ABC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II	Rekomendasi Kebijakan	5	5	4	5	5	-	Lain-lain
19	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan	ABC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV	Rekomendasi Kebijakan	4	5	2	5	5	-	Lain-lain
20	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	4	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
21	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-	PBC - Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda untuk Pemantauan dan Peninjauan atas pelaksanaan undang-undang	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
					Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
22	Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif	UAB - Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Bagi Anggota Legislatif dan Konstituen	Aplikasi	-	4	-	4	4	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain
23	Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif	SCA - Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengoperasian Sistem Informasi	Orang	-	456	-	456	456	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Lain-lain

Catatan: Terdapat RO-RO yang tidak berlanjut di Tahun 2026 karena adanya perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025-2029

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Komisi Yudisial
Bagian Anggaran : 100

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	PDG - Standarisasi Profesi dan SDM (Orang)	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan (Orang)	600	600	203	397	620	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
2	Meningkatnya Layanan Penanganan dan Pencegahan Perbuatan Merendahkan	PEA - Koodinasi (Kegiatan)	Advokasi Preventif (Kegiatan)	12	0	0	0	0	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	QIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Laporan)	Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu (Laporan)	70	0	0	0	0	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
4	Indeks Integritas Hakim	TBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	Pengukuran Indeks Integritas Hakim (Dokumen)	5	5	0	5	5	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
5	Tersedianya database profil hakim yang terintegrasi	QIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Laporan)	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim (Laporan)	0	3	0	3	3	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
6	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas hakim dan peradilan	TBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	Rekomendasi Hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial (Dokumen)	0	3	0	3	3	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
7	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas	QIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Laporan)	Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan Hakim untuk Kemudahan Akses Publik yang Transparan dan Akuntabel (Laporan)	0	0	0	0	2	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
8	Meningkatnya Manajemen Kinerja Penghubung KY	TBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	Rekomendasi Tindaklanjut Penguatan Kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial (Dokumen)	0	0	0	0	0	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman
9	Terselenggaranya Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA yang andal	ADG - Standarisasi Profesi dan SDM (Orang)	Standarisasi Calon Hakim Agung / Ad Hoc di MA	40	61	0	61	60		
10	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas	BIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Laporan)	Penyelenggaraan Kegiatan Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH	1200	1850	747	1103	1850		
11	Terselenggaranya Pemantauan Persidangan dan Penyelenggaraan Peradilan	BIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Laporan)	Laporan Hasil Pemantauan Persidangan	50	440	380	60	450		
12	Meningkatnya Layanan Penanganan dan Pencegahan	AEA - Koodinasi (Kegiatan)	Advokasi Preventif (Kegiatan)	0	10	1	9	11		
13	Meningkatnya Layanan Penanganan dan Pencegahan	AEA - Koodinasi (Kegiatan)	Advokasi Represif (Kegiatan)	15	20	11	9	22		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Anggaran : 103

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
(3)	(4)	(5)	(6), (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya daerah yang memiliki desa tangguh bencana	3882.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	3882.UBB.001 Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Destana (Desa Tangguh Bencana) - (Desa)	180	10	0	2		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan, Pengarusutamaan Gender, Pariwisata & Ekonomi Kreatif
2	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik	3884.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3884.UBA.001 Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif - (Daerah)	3	3	1	3		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Perlindungan sosial, Infrastruktur, Pengarusutamaan gender
3	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3885.QAH Pelayanan Publik Lainnya	3885.QAH.001 Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana (layanan)	-	5	0	1		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pendidikan Pengarusutamaan Gender
4	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3885.QAH Pelayanan Publik Lainnya	3885.QAH.002 Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daerah Pascabencana (layanan)	-	6	0	2		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pariwisata & ekonomi kreatif Pengarusutamaan Gender
5	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3885.QAH Pelayanan Publik Lainnya	3885.QAH.003 Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Pascabencana (layanan)	-	5	0	1		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	ekonomi hijau Pengarusutamaan Gender
6	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3885.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3885.QDD. 001 Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial di Daerah Pascabencana (kelompok masyarakat)	-	-	-	5		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
7	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3885.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3885.QDD. 002 Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi di Daerah Pascabencana (kelompok masyarakat)	-	-	-	6		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
8	Meningkatnya Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	3885.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3885.QDD. 003 Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sumber Daya Alam di Daerah Pascabencana (kelompok masyarakat)	-	-	-	5		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
9	Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi	3888.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	3888.UAC.001 Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana - (Orang)	120	120	80	80		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
10	Meningkatnya Dukungan Sumber Daya Saat Keadaan Darurat Bencana	3891.QEE Bantuan Kebencanaan	3891.QEE.004 Penyalurkan Dana Siap Pakai - (Paket)	46113	72	36	72	30	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Bidang Data, Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana	3893.QMB Komunikasi Publik	3893.QMB.002 Budaya Sadar Bencana - (Layanan)	2	-	-	-		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
12	Meningkatnya Kualitas Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana	4280.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4280.PBS.001 Pemetaan Komponen Bahaya Pendukung Peta Risiko Bencana (PN) - (Rekomendasi Kebijakan)	1	-	-	-		Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Ketahanan pangan, Infrastruktur, Perlindungan Sosial

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
13	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	4281.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4281.PBS.001 Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana (PN) - (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	0	2		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
14	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	4281.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4281.PBS.002 Analisis Strategi Penanggulangan Bencana di Tingkat Global dan Regional (PN) - (Rekomendasi Kebijakan)	2	2	0	2		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
15	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	4281.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4281.PBS.003 Analisis Capaian dan Internalisasi serta Advokasi RIPB, Renas PB dan SFDRR (PN) - (Rekomendasi Kebijakan)	-	2	0	2		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
16	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	4282.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	4282.PBS.001 Rancang Bangun Sistem PB - (Rekomendasi Kebijakan)	1	-	-	-		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
17	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana	4282.PEA Koordinasi	4282.PEA.001 Kebijakan Koordinasi Bidang PB - (Kegiatan)	4	-	-	-		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Bagian Anggaran : 104

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwulan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Layanan Reintegrasi Sosial Pekerja Migran Indonesia di BP3MI (Orang)	-	500	180*	500	250	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberdantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelelundupan	Perlindungan Sosial
			Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dari Penempatan Pemerintah (Orang)	-	20	7	20	17		Perlindungan Sosial
			Layanan Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia di BP3MI (Orang)	24.345	12.000	21.110	24.500	5.000		Perlindungan Sosial
			Layanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Pekerja Migran Indonesia oleh Penempatan oleh Pemerintah (Orang)	8.563	22.540	4.800	15.540	5.000		Pendidikan
			Layanan Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di BP3MI (Orang)	2.120	500	440	500	250		Perlindungan Sosial, Pengarusutamaan Gender
			Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah di BP3MI (Orang)	182.362	236.604	144.385	236.604	250.000		Perlindungan Sosial

Ket: *) Realisasi Volume Rincian Output pada Rehabilitasi dan Reintegrasi selain yang dilaksanakan secara mandiri oleh KP2MI/BP2MI juga dicapai dengan kolaborasi dengan stakeholder sebanyak 289 orang

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2025 DAN PROYEKSI TAHUN 2026

Kementerian/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Anggaran : BA 106

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
			Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target		
1	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan (Rancangan Peraturan)	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	2 Rancangan Peraturan	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
2	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah (Produk)	2 Produk	2 Produk	2 Produk	4 Produk	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
3	Meningkatnya jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan (K/L/Pemda)	2 Lembaga (K/L/Pemda)	2 Lembaga (K/L/Pemda)	2 Lembaga (K/L/Pemda)	5 Lembaga (K/L/Pemda)	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
4	Terwujudnya kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional (Kegiatan)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	8 Kegiatan	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	r. Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
5	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ (UMKM)	9863 UMKM	500 UMKM	500 UMKM	1500 UMKM	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberatasan Kemiskinan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
6	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital (UMKM)	50 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	500 UMKM	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberatasan Kemiskinan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
7	Meningkatnya maturitas tata kelola pengadaan Desa	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 (Desa)	2 Desa	2 Desa	2 Desa	18 Desa	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
8	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi (Modul Aplikasi)	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	1 Modul Aplikasi	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	q. Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN					Proyeksi	Nama Prioritas Nasional Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
			Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	Perkiraan Volume Target		
9	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	SDM PBJ dan Non-JF PBJ (Orang)	7600 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
10	Meningkatnya UKPBJ yang memiliki maturitas level 3	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 (UKPBJ)	439 Lembaga (UKPBJ)	35 Lembaga (UKPBJ)	35 Lembaga (UKPBJ)	40 Lembaga (UKPBJ)	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
11	Terwujudnya kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan	Peserta pelatihan anti korupsi PBJ (Orang)	200 Orang	200 Orang	200 Orang	400 Orang	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
12	Terwujudnya kapabilitas untuk pencegahan korupsi pengadaan	K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan (K/L/Pemda)	2 Lembaga (K/L/Pemda)	2 Lembaga (K/L/Pemda)	2 Lembaga (K/L/Pemda)	30 Lembaga (K/L/Pemda)	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Bagian Anggaran : 107

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	1. Meningkatnya Kualilas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2. Meningkatnya Kualilas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan 3. Meningkatnya Keandalan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan 4. Meningkatnya Keandalan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan 5. Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan 6. Meningkatnya Kineria Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional) / Unit	6	5	0	5	0	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
2			Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional) / Unit	40	20	0	20	0	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
3			Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional) / Unit	0	20	0	20	0	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
4			Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional) / Unit	25	4	0	4	0	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
5			Peralatan SAR (Prioritas Nasional) / Unit	103	25	0	25	0	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
6		Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana	Prasarana SAR (Prioritas Nasional) / Unit	1	2	0	2	0	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
7		OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana	Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional) / Unit	2.121	2.635	1.160	2.635	2.606	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
8		OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana	Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional) / Unit	87	120	60	120	117	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
9		Operasi Bidang Pencarian, dan Pertolongan, dan Penanganan Bencana	Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR (Prioritas Nasional) / Operasi	99.3	43	50	43	46	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur
10			Dukungan Operasi SAR (Prioritas Nasional) / Operasi	100	1	50	1	1	Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Infrastruktur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Bagian Anggaran : 108

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	Indeks Persepsi Persaingan Usaha (Kajian)	1	1	0	1	1	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
			Surat Saran Hasil Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan terkait Persaingan Usaha (Rekomendasi Kebijakan)	4	7	3	7	6	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
		Penanganan Perkara	Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha yang terselesaikan (Perkara)	8	7	2	7	24	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
			Penuntutan terhadap Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi (Berkas Perkara)	16	7	2	7	24	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
			Putusan Majelis Komisi Perkara Persaingan Usaha (Perkara)	8	8	2	8	13	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
			Penanganan Dugaan Pelanggaran Kemitraan (Berkas Perkara)	3	3	0	3	3	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Advokasi kemitraan ke lembaga (Lembaga)	8	4	2	4	0	PN 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha (Badan Usaha)	2	4	1	4	0	PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
		Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penilaian Awal Notifikasi Merger dan Akuisisi (Laporan)	67	26	5	26	28	PN 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
			Indeks Kemitraan (Laporan)	1	1	0	1	1	PN 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Ombudsman Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 110

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwuan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat, Orang	978	700	421	700	725	Prioritas Nasional 07	a sampai dengan s
2	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan, Orang	9325	7000	3228	7000	7100	Prioritas Nasional 07	a sampai dengan s
3	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik, Orang	7	7	2	7	17	Prioritas Nasional 02 dan 07	a, c, dan o
4	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pelayanan Publik kepada masyarakat	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik, Orang	-	34	20	34	34	Prioritas Nasional 02 dan 07	a, c, dan o
5	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga, Lembaga	39	85	0	85	85	Prioritas Nasional 02 dan 07	m
6	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah	552	552	0	552	552	Prioritas Nasional 02 dan 07	m
7	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pelayanan Publik Lainnya	Akses Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan	34	2	0	2	3	-	-
8	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik, Kajian	41	46	1	46	1	-	a, c, dan o
9	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan, Kelompok Masyarakat	-	34	18	34	1	-	-

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwuan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
10	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal dan bagi Masyarakat di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan, Lembaga	1	2	0	2	1	-	a, b, dan f

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2025 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Bagian Anggaran : 111

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udara serta lintas batas negara	Koordinasi	Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat, Kegiatan	1	-	1	1		Lain-lain
2			Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut, Kegiatan	1	-	1	1		Lain-lain
4		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara, Orang	100	-	100	100		Lain-lain
5			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut, Orang	50	50	50	100	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Lain-lain
6	Meningkatnya pengelolaan potensi unggulan berbasis tata ruang kawasan perbatasan negara	Pemantauan lembaga	Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Laporan	2	-	2	11		Lain-lain
7			Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Laporan	3	-	3	11		Lain-lain

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
8	Meningkatnya pemerataan pembangunan, sarana dan prasarana, infrastruktur layanan dasar, serta layanan pemerintahan dikawasan perbatasan	Pemantauan lembaga	Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas (IPKP Kecamatan Lokpri) di Kawasan Perbatasan, Laporan	5	-	5	12		Lain-lain
9		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Dukungan penanggulangan stunting dan Gerakan masyarakat sehat di Kawasan perbatasan, Orang dan kegiatan	100	-	100	1		Lain-lain
10		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara, Orang	550	-	550	75	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan kemiskinan	Lain-lain

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bagian Anggaran : 112

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN			Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Akesibilitas dan Mutu Prasarana Pelayanan	Sarana Pengembangan Kawasan - 5127.RAI.001	WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang, 1 Unit	1 Unit	-	-	-	-		
2		Sarana Pengembangan Kawasan - 5127.RAI.002	WTP 230 l/dtk di Waduk Monggak, 1 Unit	-	-	-	-	-		
3		Sarana Pengembangan Kawasan - 5127.RAI.003	WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi, 1 Unit	1 Unit	-	-	-	-		
4		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) - 5127.RBC.002	Bundaran Punggur, 1,6 km	1,6 km	-	-	-	-		
5		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) - 5127.RBC.003	Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - Underpass Pelita) , 1,2 km	1,2 km	-	-	-	-		
6		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) - 5127.RBC.004	Jalan Alternatif Bandara, 1 km	1 km	-	-	-	-		
7		Prasarana Bidang Konektivitas Laut - 5127.RBD.001	Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang, 1 Unit	1 Unit	-	-	-	-		
8		Prasarana Bidang Konektivitas Laut - 5127.RBD.002	Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil, 1 Unit	-	-	-	-	-		
9		Prasarana Jaringan Sumber Daya Air - 5127.RBS.001	Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam), 4 km	4 km	-	-	-	-		
10		Prasarana Jaringan Sumber Daya Air - 5127.RBS.002	Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi (NDP), 12,2 km	12,2 km	-	-	-	-		
11		Prasarana Jaringan Sumber Daya Air - 5127.RBS.003	Interkoneksi Pipa 800mm IPA Mukakuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning, 1,1 km	1,1 km	-	-	-	-		
12		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) - 5127.RBC.001	Jalan Gajah Mada (Landing point Fly Over - Simpang Laluan Madani), 1,3 km	-	1,3 km	-	-	1,3 km		
13		Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) - 5127.RBC.002	Jalan R. Suprapto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning), 1,4 km	-	1,4 km	-	-	1,4 km		
14		Prasarana Bidang Konektivitas Laut - 5127.RBD.001	Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil, 1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
Bagian Anggaran 113

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme (melalui FKPT)	Forum (Forum)	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Forum	35	NPN	NPN	NPN	NPN	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
2	Terwujudnya Penguatan Kesiapsiagaan Nasional	Koordinasi (Kegiatan)	Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional, Kegiatan	12	12	6	12	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
3	Terwujudnya Penguatan Deradikalisasi Terorisme	Koordinasi (Kegiatan)	Deradikalisasi Luar Lapas, Kegiatan	NPN	45	17	45	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
4	Menurunnya Penyebaran Paham Radikal Terorisme	Operasi Bidang Keamanan (Operasi)	Kegiatan Kontra Radikalisasi, Operasi	NPN	NPN	NPN	NPN	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
5	Meningkatnya Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	Operasi Bidang Keamanan (Operasi)	Analisis dan Pengendalian Krisis, Operasi	NPN	NPN	NPN	NPN	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
6	Meningkatnya Infrastruktur Penanggulangan Aksi Terorisme	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan (Paket)	Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism (CTPVE), paket	RO dimulai di Tahun 2026	RO dimulai di Tahun 2026	RO dimulai di Tahun 2026	RO dimulai di Tahun 2026	1	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
7	Terwujudnya Kolaborasi Institusi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	Koordinasi (Kegiatan)	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, Kegiatan	NPN	NPN	NPN	NPN	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
8	Terwujudnya Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	Koordinasi (Kegiatan)	Sasaran wilayah pelibatan secara terpadu Kementerian dan Lembaga K/L pelaksanaan program penanggulangan terorisme, Kegiatan	NPN	NPN	NPN	NPN	0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bagian Anggaran : 115

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sesuai Perpres tentang Rincian APBN (**Lampiran III.2: Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga**)		RO Yang Paling Strategis/ *Eye Catching/Real Work* /Mendukung Prioritas Presiden, yang diturunkan dari KRO							
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	4358.BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	4358.BDB.001 - Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Lembaga)	549	-	-	-	-	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	-
		5245.BDB.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	5245.BDB.001 - Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Lembaga)	34	-	-	-	-		
		7013.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	7013.QDB.001 - Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Lembaga)	-	4	1	4	4		
			7013.QDB.002 - Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif (Lembaga)	-	38	13	38	38		
		7014.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Laporan)	7014.QIC.001 - Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Pusat (Laporan)	-	1	0	1	1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
			7014.QIC.002 - Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Laporan)	-	552	184	552	552		
		7015.UAB - Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi)	7015.UAB.001 - Persiapan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Modul)	-	1	0	1	1		
			7015.UAB.002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Sistem Informasi)	-	1	0	1	1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Bagian Anggaran : 116

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5142.QMA.001	Layanan Siaran Komunitas Khusus	-	1	0	1	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
2	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5142.QMA.002	Layanan Siaran Sektor Prioritas	-	1	0	1	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
3	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang	5142.QMA.003	Layanan Siaran Unggulan Olahraga	-	1	0	1	1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
4	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5144.QMA.003	Layanan Siaran Multiplatform sasaran luar negeri	-	1	0	1	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
5	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5144.QMA.005	Layanan Konten Digital	9	1	0	1	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
6	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5145.QMA.002	Layanan konten digital	-	230	43	230	-	0	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
7	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5145.QMA.003	Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	67	92	14	92	67	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umta beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
8	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5145.QMA.005	Podcast (Ekonomi Digital)	-	-	-	-	2484	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
9	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5146.QMA.001	Layanan Siaran Pemberitaan Sektor Prioritas Berbasis Multiplatform	1	1	0	1	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
10	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5146.QMA.003	Layanan Konten Terkait Ekonomi Digital	1	-	-	-	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
11	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5146.QMA.005	Layanan Konten Digital	-	1	0	1	0	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
12	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5141.RAN.001	Pengadaan Pemancar FM Baru beserta peralatan pendukung	20	20	0	20	0	0	
13	Tersedianya akses program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio	5141.RAN.002	Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana Teknik	0	0	0	0	114	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : **LPP TVRI**
Bagian Anggaran : **117**

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)*
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan Satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
1	Meningkatnya kualitas siaran internasional	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Siaran Berita (Layanan)	1	0	0	0	0	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	-
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik dan Multiplekser	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	Pembangunan Transmisi Pada Wilayah Layanan (Unit)	48	26	1	26	0	03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
3	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan Current Affairs serta Siaran Internasional	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	Siaran Informasi Publik Menuju Indonesia Emas (Layanan)	0	1	0	1	0	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-
4	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Siaran Program Penguatan Ekonomi Kreatif (Layanan)	0	1	0	1	0	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-
5	Meningkatnya kualitas konten siaran olahraga	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Siaran Peningkatan Kesehatan dan Destinasi Wisata Berbasis Olahraga (Layanan)	0	1	0	1	0	02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik dan Multiplekser	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	Pembangunan transmisi dan Multipleksing pada Wilayah Layanan (Unit)	0	0	0	0	6	03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan Teknik dan Multiplekser	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	Penguatan Infrastruktur Transmisi Digital pada Wilayah Layanan (Unit)	0	0	0	0	5	03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
8	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan Current Affairs serta Siaran Internasional	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Siaran Informasi dalam Penguatan Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swamsebeda Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (Layanan)	0	0	0	0	1	01 Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)*
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan Satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
9	Meningkatnya kualitas program siaran non berita (pendidikan, hiburan)	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Siaran Program dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabillitas (Layanan)	0	0	0	0	1	01 Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-
10	Meningkatnya kualitas program siaran berita dan Current Affairs serta Siaran Internasional	Pelayanan Publik Lainnya (Layanan)	Siaran Informasi Publik dalam Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan (Layanan)	0	0	0	0	1	01 Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Bagian Anggaran : 118

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Daya Saing Kawasan Strategis KPBPB Sabang	RAI (Unit)	Peningkatan Gangway Pelabuhan Penyeberangan Balohan (unit)	1	1	0,5	1	1	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur
2		RDD (Unit)	Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan (unit)	1	1	0,5	1	1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : BAKAMLA RI
Bagian Anggaran : 119

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Kemajuan Diplomasi Maritim	Kerja Sama	Kerja Sama Luar Negeri Strategis, Kegiatan	-	3	1	3	6	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonoimi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
2	Meningkatnya Keberhasilan Operasi Laut	Operasi Bidang Keamanan	Patroli Bersama, Hari Operasi	128	115	60	115	185		Pertahanan Semesta
			Patroli Mandiri, Hari Operasi	85	60	25	60	100		Pertahanan Semesta
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	Sarana Keamanan dan Keselamatan Laut Pendukung Keberhasilan Operasi Laut, Unit	-	5	-	5	5		Pertahanan Semesta
			Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Setokok, Kawasan	1	1	-	1	1		Pertahanan Semesta
			Pembangunan Fasilitas Personel, Kawasan	-	1	-	1	-		Pertahanan Semesta
4	Terwujudanya Tata Kelola Kelembagaan Keamanan dan Keselamatan Laut yang Komperhensif, Terintegrasi, efektif dan efisien	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Sarana Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut, Kajian	-	1	-	1	1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonoimi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pertahanan Semesta
5	Meningkatnya Kualitas Hukum Keamanan dan Keselamatan Laut	Kebijakan Bidang Peratahanan dan Keamanan	Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Keamanan Laut, Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	1	1		Pertahanan Semesta

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Bagian Anggaran : 122

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila	Kerja Sama	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas	45 Kesepakatan						
2		Kemitraan	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Organisasi Sosial, Politik, serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas	24 Kesepakatan						
3		Kebijakan Bidang Sosial	Rekomendasi Hasil Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila		2 Rekomendasi Kebijakan	0	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
4		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	150 Kelompok Masyarakat	217 Kelompok Masyarakat	60	217 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
5		Komunikasi Publik	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	5 Layanan	4 Layanan	2	4 Layanan			Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
6			Layanan Komunikasi melalui Media Massa	4 Layanan	3 Layanan	0	3 Layanan			Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
7		Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila					20.000 Orang		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
8			Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila					1.000.000 Orang		Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
9	Terwujudnya (perumusan arah kebijakan dan rekomendasi) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dibidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila	3 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakam	0	5 Rekomendasi Kebijakam	7 Rekomendasi Kebijakan		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
10			Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Regulasi Yang Selaras Dengan Nilai Pancasila		4 Rekomendasi Kebijakam	0	4 Rekomendasi Kebijakam	6 Rekomendasi Kebijakan		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
11	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Kebijakan Bidang Sosial	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Pembinaan Ideologi Pancasila	2 Rekomendasi Kebijakan						
12		Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila		2 Rekomendasi Kebijakam	0	2 Rekomendasi Kebijakam	2 Rekomendasi Kebijakan		Pendidikan
13		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila		2 Rekomendasi Kebijakam	0	2 Rekomendasi Kebijakam	2 Rekomendasi Kebijakan		Pendidikan
14		Kebijakan Bidang Sosial	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP	4 Rekomendasi Kebijakan						
15		Akreditasi Lembaga	Akreditasi Lembaga Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila	23 Lembaga	15 Lembaga	8	15 Lembaga	10 Lembaga		Pendidikan dan Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
16	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur Negara, Lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan Lembaga pendidikan nonformal dan informal	Sertifikasi Profesi dan SDM	Sertifikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP	572 Orang	593 Orang	120	593 Orang	704 Orang		Pendidikan dan Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
17		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	9 NSPK						
18		Pelatihan Bidang Sosial	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	105 Orang	8.520 Orang	2.104 Orang	8.520 Orang	9.984 Orang		Pendidikan dan Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
19			Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	856 Orang						
20		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Paskibraka dan Pumapaskibraka Duta Pancasila	5.822 Orang	6.732 Orang	6.657 Orang	6.732 Orang	6.903 Orang		Pendidikan dan Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
21	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Kebijakan Bidang Politik	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara	1 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakam	0	2 Rekomendasi Kebijakam	2 Rekomendasi Kebijakan		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
22			Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN Yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara	1 Rekomendasi Kebijakan						
23			Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakam	0	1 Rekomendasi Kebijakam	1 Rekomendasi Kebijakan		Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Bagian Anggaran : 123

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM, Rekomendasi Kebijakan	001. Perwujudan Victim Trust Fund, Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-	-	-	-
			001. Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1	1	Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	-
			002. Penguatan Kebijakan Pemulihan Korban Melalui Mekanisme Restitusi dan/atau Victim Trust Fund (Dana Bantuan Korban), Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	1	-	-	-
			002. Kajian Grand Design Innovative Financing Perlindungan dan Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	Kajian Grand Design Innovative Financing Perlindungan dan Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana	
			003. Cetak Biru Pengembangan Sistem Informasi Layanan Terpadu Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Berbasis Teknologi Informasi, Rekomendasi Kebijakan	-	1	0	0	1	-	
			003. Kajian Kebijakan Interoperabilitas Data Perlindungan Saksi dan Korban	-	-	-	-	1	Kajian Kebijakan Interoperabilitas Data Perlindungan Data Perlindungan Saksi dan Korban	
		QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Orang	001. Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban, Orang	1055	-	-	-	-	-	-
			001. Akselerasi Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban TPPO, Orang	-	210	97	210	-	-	-
		QMA Data dan Informasi Publik, Data	002. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban, Dokumen	1	1	0	1	1	Indeks Perlindungan Saksi dan Korban	Transformasi Akses terhadap Keadilan
		RDU OM Prasarana Bidang Hukum	001. Prasaranan Fasilitasi Perlindungan Sakso dan Korban, Unit	-	5	0	5	-	-	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Riset dan Inovasi Nasional
Bagian Anggaran : 124

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN Tahun 2026/ Isu Strategis(dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome* (Sasaran Program / Sasaran Kegiatan)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwulan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi / Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Peserta Peningkatan Kualifikasi Talenta Riset dan Inovasi (Orang)	993	810	696	810	895	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi / Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi (Orang)	10507	15870	11840	15870	11000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pengarusutamaan Gender
3	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Kolaborasi Riset dan Inovasi / Menguatnya ekosistem kolaborasi riset melalui pengembangan pusat inovasi dan hub tematik	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pusat Kolaborasi Riset Terfasilitasi (Lembaga)	25	35	34	35	40	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
4	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan (Purwarupa)	-	11	1	11	10	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Ketahanan & Transisi Energi
5	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Energi (Purwarupa)	-	7	Progress pelaksanaan sebesar 80%	7	14	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Ketahanan & Transisi Energi
6	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi PLTU Hijau untuk Mendukung Swasembada Energi (Purwarupa)	-	-	-	-	8	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Ketahanan & Transisi Energi
7	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Bersih (Purwarupa)	15	12	1	12	6	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Mitigasi perubahan Iklim
8	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara (Purwarupa)	14	22	1	22	26	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Mitigasi perubahan Iklim, Adaptasi perubahan iklim

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN Tahun 2026/ Isu Strategis(dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome* (Sasaran Program / Sasaran Kegiatan)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwulan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Biota yang Terkonservasi (Purwarupa)	-	11	1	11	12	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Mitigasi perubahan Iklim, Adaptasi perubahan iklim
10	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Obat dan Vaksin (Purwarupa)	25	19	4	19	15	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
11	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Alat Kesehatan (Purwarupa)	12	15	2	15	12	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
12	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Riset dan Inovasi Kedokteran Presisi (Purwarupa)	7	15	1	15	12	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
13	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Medis dan Industri (Purwarupa)	-	6	Progress pelaksanaan sebesar 80%	6	10	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
14	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Nuklir untuk Radioisotop dan Radiofarmaka (Purwarupa)	-	10	Progress pelaksanaan sebesar 80%	10	6	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
15	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Material Maju untuk Kesehatan (Purwarupa)	-	11	Progress 76%	11	8	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
16	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Pengembangan Platfrom Vaksin TB untuk Mendukung Kemandirian Kesehatan (Purwarupa)	-	-	-	-	8	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
17	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Tanaman (Purwarupa)	3	14	2	14	12	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN Tahun 2026/ Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome* (Sasaran Program / Sasaran Kegiatan)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwulan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
18	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Budidaya Ternak (Purwarupa)	1	8	0	8	11	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
19	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kelautan untuk Ekonomi Biru (Purwarupa)	-	3	1	3	6	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
20	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi untuk Hilirisasi Sumber Daya Akuatik (Purwarupa)	-	7	Progress pelaksanaan kegiatan sebesar 83,32%	7	4	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
21	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Flagship Riset dan Inovasi Pangan untuk Mendukung MBG (Purwarupa)	-	-	-	-	4	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Makan Bergizi Gratis
22	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Riset dan Inovasi Hilirisasi Produk Pertanian (Purwarupa)	-	14	1	14	10	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
23	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Manufaktur Industri Berbasis Sumber Daya Lokal (Purwarupa)	-	8	0	8	8	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
24	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Hilirisasi Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan (Purwarupa)	-	8	Progress 76%	8	9	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
25	Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi / Menguatnya Ekosistem Kolaborasi Riset melalui Pengembangan Hub Tematik	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Mitra Fasilitasi Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang Diseleksi (Lembaga)	3926	7930	5949	7930	8910	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi / Meningkatnya Kompetensi SDM Riset dan Inovasi	Sertifikasi Profesi dan SDM	Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Bidang Riset dan Inovasi (Orang)	3991	2000	1962	2000	2000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN Tahun 2026/ Isu Strategis(dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome* (Sasaran Program / Sasaran Kegiatan)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Triwulan III	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
27	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Pesawat Udara (Purwarupa)	2	8	Progress pelaksanaan sudah mencapai 94,44%	8	12	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
28	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset Inovasi Big Data (Purwarupa)	-	9	Progress pelaksanaan riset mencapai 71,89%	9	4	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
29	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT (Purwarupa)	-	5	Progress pelaksanaan riset mencapai 69,80%	5	10	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilita	
30	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Jaringan Detektor Bawah Air (Purwarupa)	-	3	Progress pelaksanaan riset mencapai 73%	3	6	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
31	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Kebencanaan dan Sumber Daya Kebumian (Purwarupa)	-	14	Progress pelaksanaan kegiatan sebesar 82,98%	14	16	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
32	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Satelit (Purwarupa)	-	12	Progress pelaksanaan sudah mencapai 88,34%	12	12	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
33	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Pengembangan Teknologi Proses Material Terbarukan (Purwarupa)	-	6	Progress 76%	6	7	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
34	Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global / Meningkatnya kuantitas publikasi ilmiah global melalui hasil riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi untuk Kedaulatan Berbasis Nanoteknologi dan Material (Purwarupa)	-	6	Progress 76%	6	8	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d. 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Pangan Nasional
Bagian Anggaran : 125

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan Satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d. semester I	Proyeksi Volume Target		
1	Terjaganya Cadangan Pangan Nasional	Bantuan Masyarakat (orang)	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (orang)	22.004.077	18.277.083	18.277.083	18.277.083	PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-
2	Meningkatkanya Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (kelompok masyarakat)	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan (kelompok masyarakat)	100	47	30	76		Percepatan Penurunan Stunting
3	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan	Perizinan Produk (Produk)	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (produk)	4390	900	581	800		-
4	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pengendalian Produk (laporan)	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (laporan)	39	39	0	39		Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG)
5	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Bantuan Produk (orang)	Bantuan Pangan dalam rangka Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (orang)	180.000	64.800	0	15.500		-
6	Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antarwaktu dan antar wilayah	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (kelompok masyarakat)	Pangan yang terdistribusi (kelompok masyarakat)	75	50	24	50	PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	-
7	Terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (kelompok masyarakat)	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan (kelompok masyarakat)	514	39	39	39	PN 7: Pengendalian Inflasi	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Otorita Ibu Kota Nusantara
Bagian Anggaran : 126

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya infrastruktur Penyelenggaraan Pemerintahan (SP 9)	Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Sistem Perizinan terkait dengan pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan, Layanan	11	15	5	15	2 Layanan	PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Lain-lain
2	Terwujudnya Perencanaan Kota Kelas Dunia (SP 1)	Prasarana Pengembangan Kawasan	Pengadaan Tanah, Bidang	Tidak ada di TA 2024	2	0	2	596.04 Hektar		Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
3	Meningkatkan kapabilitas SDM Penduduk IKN yang kompeten	Kebijakan Bidang Sosial	Kebijakan Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Kajian	2	10	4	10	tidak ada		Peningkatan Daya Saing
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang handal dan	Pembinaan Pengendalian Malaria di Wilayah Ibu Kota Nusantara	Pembinaan Pengendalian Malaria di Wilayah Ibu Kota Nusantara, Kelompok Masyarakat	Tidak ada di TA 2024	5	0	5	5 Layanan		Kesehatan
5	Meningkatkan kapabilitas SDM Penduduk IKN yang kompeten dan berdaya saing tinggi (SP 4)	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Masyarakat	Tidak ada di TA 2024	5	3	5	7 Kelompok Masyarakat		Peningkatan Daya Saing
6	Meningkatkan kapabilitas SDM Penduduk IKN yang kompeten	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Ibu Kota Nusantara	Pembinaan Ekonomi Masyarakat Ibu Kota Nusantara, UMKM	Tidak ada di TA 2024	21	8	21	57 UMKM		Pariwisata & ekonomi kreatif
7	Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik bagi masyarakat IKN (SP 10)	Pelayanan Publik Lainnya	Penyediaan Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN	Tidak ada di TA 2024	2	1	2	1 Dokumen/Layanan		Infrastruktur
8	Terwujudnya Pembangunan Kawasan IKN berkelas dunia (SP 2)	Dukungan Teknis Bidang Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	Dukungan Teknis Bidang Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan, Dokumen	Tidak ada di TA 2024	2	2	2	1 Dokumen/Layanan		Infrastruktur
9	Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik bagi masyarakat	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	OM Hunian, Unit	Tidak ada di TA 2024	5	5	5	82 Unit		Infrastruktur
10	Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik bagi masyarakat	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	OM Gedung Perkantoran, Unit	Tidak ada di TA 2024	5	4	5	5 Unit		Infrastruktur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

ıterian/Lembaga : Badan Karantina Indonesia
ian Anggaran : 127

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN			Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
			Layanan Sertifikasi Kesehatan Karantina Hewan (produk)					433.992	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
			Layanan Sertifikasi Kesehatan Karantina Ikan (produk)					362.548	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
			Layanan Sertifikasi Kesehatan Karantina Tumbuhan (produk)					553.866	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
		Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pengawasan Dan Pencegahan Pelanggaran Karantina (produk)	71	71	35	71	38	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
		Sarana Bidang Pertanian, Ke	Sarana Karantina (unit)	26	26	15	26	*468*	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Prasarana Karantina (unit)	347	347	170	347		Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan
			Prasarana Karantina-SBSN (M2)					*32.651*	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Gizi Nasional
Bagian Anggaran : 128

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan di wilayah I	01.AEA.Koordinasi	7071.AEA.001.Laporan Koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi di wilayah 1	-	44	15,20	44	12		00. Bukan Tematik
2	Terwujudnya koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan di wilayah I	02.AEA.Koordinasi	7071.AEA.002.Laporan koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi di wilayah 2	-	59	15,95	59	12		00. Bukan Tematik
3	Terwujudnya koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan di wilayah I	03.AEA.Koordinasi	7071.AEA.003.Laporan koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi di wilayah 3	-	44	14,20	44	12		00. Bukan Tematik
4	Terwujudnya koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan di wilayah I	01.SCM.Pelatihan Bidang Kesehatan	7071.SCM.001.Pelatihan petugas penjamah makan yang dilatih di Wilayah I	-	63.350	19.005,00	63.350	20.250	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
5	Terwujudnya koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan di wilayah I	02.SCM.Pelatihan Bidang Kesehatan	7071.SCM.002.Pelatihan petugas penjamah makan yang dilatih di Wilayah II	-	128.250	31.695,50	128.250	40.500	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
6	Terwujudnya koordinasi penyediaan dan penyaluran makan bergizi oleh kantor pelayanan sesuai dengan ketentuan di wilayah I	03.SCM.Pelatihan Bidang Kesehatan	7071.SCM.003.Pelatihan petugas penjamah makan yang dilatih di Wilayah III	-	58.400	17.520,00	58.400	20.250	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
7	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah PAUD/RA/TK/sederajat	01.QEA.Bantuan Masyarakat	7072.QEA.001.Bantuan makan bergizi kepada anak sekolah PAUD/RA/TK/sederajat	-	2.028.609	1.014.303,00	2.028.609	8.119.133		005 - Anggaran Pendidikan
8	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah SD/MI Sederajat	02.QEA.Bantuan Masyarakat	7072.QEA.002.Bantuan makan bergizi kepada anak SD/MI/sederajat	-	7.015.780	3.507.888,00	7.015.780	28.346.877		005 - Anggaran Pendidikan
9	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah SMP/MTs Sederajat	03.QEA.Bantuan Masyarakat	7072.QEA.003.Bantuan makan bergizi kepada anak SMP/MTs/sederajat	-	3.323.198	1.661.600,00	3.323.198	13.902.971		005 - Anggaran Pendidikan

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
10	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah SMA/MA/sederajat	04.QEA.Bantuan Masyarakat	7072.QEA.004.Bantuan makan bergizi kepada anak SMA/MA/SMK/sederajat	-	3.023.176	1.511.587,00	3.023.176	12.583.037		005 - Anggaran Pendidikan
11	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak SLB	05.QEA.Bantuan Masyarakat	7072.QEA.005.Bantuan makan bergizi kepada anak SLB	-	40.253	20.126,00	40.253	162.304		005 - Anggaran Pendidikan
12	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada Santri	06.QEA.Bantuan Masyarakat	7072.QEA.006.Bantuan makan bergizi kepada anak Santri	-	81.479	40.740,00	81.479	4.020.500		005 - Anggaran Pendidikan
13	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah PAUD/RA/TK/sederajat	01.RAB.Sarana Bidang Kesehatan	7072.RAB.002.Alat ukur perkembangan tinggi dan berat badan siswa terintegrasi dalam sistem pemantauan	-	5.000	1.500,00	5.000	-	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
14	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah PAUD/RA/TK/sederajat	01.RAB.Sarana Bidang Kesehatan	7072.RAB.003.Satuan Pelayanan Dapur Makan Bergizi	-	5.000	1.750,00	5.000	6800	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
15	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada anak sekolah PAUD/RA/TK/sederajat	01.RBV.Prasarana Bidang Kesehatan	7072.RBV.001.Dapur untuk penyediaan makan bergizi (PN)	-	1.542	462,10	1.542	514	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
16	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran makan bergizi Gratis kepada Ibu Hamil	01.QEA.Bantuan Masyarakat	7073.QEA.001.Bantuan makan bergizi kepada Ibu hamil bermasalah	-	72.767	36.384,00	72.767	-	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting
17	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran makan bergizi Gratis kepada Ibu Hamil	01.QEA.Bantuan Masyarakat	7073.QEA.002.Bantuan makan bergizi kepada Ibu hamil sehat	-	340.462	170.231,00	340.462	2.200.000,00	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
18	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada Balita	02.QEA.Bantuan Masyarakat	7073.QEA.003.Bantuan makan bergizi kepada Balita BB Kurang dan Tidak Naik	-	534.827	267.414,00	534.827	-	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting
19	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada Balita	02.QEA.Bantuan Masyarakat	7073.QEA.004.Bantuan makan bergizi kepada Balita Gizi Kurang	-	69.053	34.524,00	69.053	-	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting
20	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada Balita	02.QEA.Bantuan Masyarakat	7073.QEA.005.Bantuan makan bergizi kepada Balita sehat	-	1.149.675	574.836,00	1.149.675	2.585.329	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting
21	Terselenggaranya penyediaan dan penyaluran Makan Bergizi Gratis pada Balita	02.QEA.Bantuan Masyarakat	7073.QEA.006.Bantuan makan bergizi kepada ibu menyusui	-	210.984	105.492,00	210.984	2.640.000	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting
22	Terwujudnya sistem pemenuhan gizi nasional yang optimal	01.ABG.Kebijakan Bidang Kesehatan	7074.ABG.001.Rekomendasi kebijakan terkait sistem pemenuhan gizi nasional	-	6	0,00	6	8	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
23	Terwujudnya tata kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang optimal	02.ABG.Kebijakan Bidang Kesehatan	7074.ABG.002.Rekomendasi kebijakan terkait bidang Tata Kelola Pemenuhan Gizi	-	4	0,00	4	7	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
24	Terwujudnya Sistem Manajemen Risiko dalam Pemenuhan Gizi Nasional yang optimal	03.ABG.Kebijakan Bidang Kesehatan	7074.ABG.003.Rekomendasi kebijakan terkait Manajemen Risiko	-	4	0,00	4	6	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
25	Terwujudnya sistem pemenuhan gizi nasional yang optimal	01.PFA.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7074.PFA.001.Standar tentang sistem pemenuhan gizi nasional	-	4	0,00	4	6	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
26	Terwujudnya tata kelola Pemenuhan Gizi Nasional yang optimal	02.PFA.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7074.PFA.002.Standar tentang Tatakelola Pemenuhan Gizi	-	4	0,00	4	6	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
27	Terwujudnya Sistem Manajemen Risiko dalam Pemenuhan Gizi Nasional yang optimal	03.PFA.Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7074.PFA.003.Standar tentang Manajemen Risiko	-	4	0,00	4	6	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
28	Terwujudnya Sistem Manajemen Risiko dalam Pemenuhan Gizi Nasional yang optimal	03.QMB.Komunikasi Publik	7074.QMB.001.Layanan pengaduan dan informasi yang diberikan	-	1	0,00	1	1	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
29	Terwujudnya sistem informasi pemenuhan gizi nasional yang optimal	01.UAB.Sistem Informasi Pemerintahan	7075.UAB.001.Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional	-	1	0,00	1	1	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
30	Terselenggaranya kegiatan promosi dan edukasi tentang Pemenuhan Gizi	01.AEH.Promosi	7076.PEH.001.Promosi tentang Pemenuhan Gizi	-	25.020	2.500,00	25.020	10	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
31	Terselenggaranya kegiatan promosi dan edukasi tentang Pemenuhan Gizi	01.AEH.Promosi	7076.PEH.002.Edukasi tentang Pemenuhan Gizi	-	12	3,00	12	12	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
32	Terlaksananya kerjasama dan kemitraan dalam mendukung pemenuhan gizi nasional	01.AEE.Kemitraan	7077.PEE.002.Kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal dalam implementasi pemenuhan makan bergizi	-	80	0,00	80	38	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
33	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi nasional	01.QDD.Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7078.QDD.001.Pemberdayaan yang diberikan pada komunitas masyarakat	-	5.000	1.358,00	5.000	5000	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
34	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi nasional	01.QDG.Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	7078.QDG.001.Pemberdayaan pelaku usaha daerah/umkm/perorangan dalam mendukung program makan bergizi	-	2.000	701,00	2.000	3000	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
35	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan program pemenuhan gizi	01.QIC.Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7079.QIC.001.Satuan pelayanan/ dapur di wilayah I yang yang dipantau dan diawasi	-	1.267	468,00	1.267	3314	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
36	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan program pemenuhan gizi	01.QIC.Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7079.QIC.002.Satuan pelayanan/ dapur di wilayah II yang yang dipantau dan diawasi	-	2.565	1.000,00	2.565	6626	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik
37	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan program pemenuhan gizi	01.QIC.Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7079.QIC.003.Satuan pelayanan/ dapur di wilayah III yang yang dipantau dan diawasi	-	1.168	457,00	1.168	3314	04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	00. Bukan Tematik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Bagian Anggaran : 129

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Vol Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya Pelaksanaan Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Politik dan Keamanan Lintas Sektoral yang Efektif	7296.PBC	7296.PBC.001 Rekomendasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan, Rekomendasi					2	Prioritas Nasional 1	
2		7296.PBC	7296.PBC.002 Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Kepemiluan, Rekomendasi					2	Prioritas Nasional 1	
3		7296.PBC	7296.PBC.003 Rekomendasi Kebijakan Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada Serentak, Rekomendasi	2	2	1	2	1	Prioritas Nasional 1	
4		7378.PBE	7378.PBE.009 Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Nusantara, Rekomendasi	1	1	0	1	1	Prioritas Nasional 7	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
5		7379.PBE	7379.PBE.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara, Rekomendasi	1	1	0	1	1	Prioritas Nasional 2	Pertahanan Semesta

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/Outcome	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Vol Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
6	Terwujudnya Pelaksanaan Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Politik dan Keamanan Lintas Sektoral yang Efektif	7379.PBE	7379.PBE.002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum , Rekomendasi	1	1	0	1	1	Prioritas Nasional 2	Pertahanan Semesta
7		7379.PBE	7379.PBE.003 Rekomendasi Kebijakan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penguatan Penegakan Hukum, Rekomendasi					1	Prioritas Nasional 7	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
8		7379.PBE	7379.PBE.004 Rekomendasi Kebijakan Standar Kurikulum, Kompetensi, Sertifikasi, Akreditasi dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Profesi Lintas Lembaga Penegak Hukum, Rekomendasi					1	Prioritas Nasional 7	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
9		7380.PBO	7380.PBO.001 - Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibu Kota Nusantara, Rekomendasi	1	1	0	1	1	Prioritas Nasional 2	Pertahanan Semesta

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Bagian Anggaran : 130

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	01-Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Efektif	PBD-Kebijakan Bidang Hukum dan	001-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	Rekomendasi Kebijakan		1		1		001-Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum Pidana yang Mengedepankan Keadilan Restoratif	
2	01-Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Efektif	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	003-Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum dan Keadilan Restoratif	Rekomendasi Kebijakan		2		2			
3	01-Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yang Efektif	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	004-Rekomendasi Kebijakan Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum	Rekomendasi Kebijakan		2		2			
4	SK 3-Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif	PBD-Kebijakan Bidang Hukum dan	001-Rekomendasi kebijakan penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif	Rekomendasi kebijakan					1	001-Rekomendasi kebijakan penguatan substansi hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif	
5	SK 3-Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait materi hukum dan keadilan restoratif	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	003-Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (materi hukum, kelembagaan hukum dan penegakan hukum)	Rekomendasi kebijakan					1		
6	SK 4-Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja pembangunan hukum dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	005-Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pilar pembangunan hukum (budaya, informasi dan komunikasi hukum)	Rekomendasi kebijakan					1		
7	SK 2-Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	002-Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) pembangunan HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat	Rekomendasi kebijakan					1		
8	SK 2-Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Strategi Pelayanan Keimigrasian	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	002-Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) Penegakan dan pelayanan keimigrasian terkait strategi pelayanan keimigrasian	Rekomendasi kebijakan					1		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN									Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya		Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
					Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
9	SK 4-Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi kebijakan capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait strategi pelayanan pemasyarakatan	ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan	005-Rekomendasi kebijakan sinkronisasi dan koordinasi kelompok kerja nasional (Desk) penegakan hukum perlakuan pemasyarakatan terkait strategi pelayanan pemasyarakatan	Rekomendasi kebijakan					1		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Bagian Anggaran : 131

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	01 - Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan 2 - Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Logistik Pangan Dalam Negeri 3 - Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Sistem Distribusi Pangan	7458.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pangan	-	2 RK	-	2 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Logistik Pangan Dalam Negeri	-	5 RK	-	5 RK	2RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Sistem Distribusi Pangan	-	2 RK	-	2 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Program Prioritas Nasional Bidang Tata Niaga dan Distribusi Pangan	-	3 RK	-	3 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
2	01 - Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan 02 - Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	7459.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	-	2 RK	-	2 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	-	6 RK	-	6 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	-	2 RK	-	2 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Holtikultura	-	5 RK	-	5 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan	-	5 RK	-	5 RK	1 RK	-	Bukan Tematik
			Rekomendasi Kebijakan Program Prioritas Nasional Bidang Usaha Pangan dan Pertanian	-	6 RK	-	6 RK	2 RK	-	Bukan Tematik

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TA 2024 - 205 dan Proyeksi 2026
Bagian Anggaran : 132

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN						Proyeksi	Prioritas Nasional Tahun 2026
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
1	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim	20 RK	20 RK	-	-	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim	19 RK	19 RK	-	-	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi	22 RK	22 RK	-	-	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	17 RK	17 RK	-	-	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16 RK	16 RK	-	-	-	-
		Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan	17 RK	17 RK	-	-	-	-
2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-	-
3	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi	-	-	21 RK	21 RK	22 RK	-
		Rekomendasi Bidang Koordinasi Konektivitas	-	-	21 RK	21 RK	21 RK	-
		Rekomendasi Bidang Koordinasi Konektivitas	-	-	21 RK	21 RK	16 RK	-

No	Sasaran (Outcome) dan Keluaran (Output) Sesuai Perpres tentang Rincian APBN						Proyeksi	Prioritas Nasional Tahun 2026
	Sasaran/Outcome	Nama Keluaran (Output) dan satuannya	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Volume Target	Volume Realisasi	Volume Target	Perkiraan Volume Realisasi	PerkiraanVolume Target	
		Rekomendasi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	-	-	21 RK	21 RK	12 RK	-
4	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen	-	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bagian Anggaran : 134

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat, Rekomendasi Kebijakan	0	4	0	4	2	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
2	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2	0	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
3	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan Pekerja Migran, Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	1	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
4	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan Pekerja Migran, Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	1	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
5	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Rekomendasi Kebijakan	0	3	0	3	2	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing / Investasi dan Perdagangan Global
6	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat	0	2	0	2	2	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing / Investasi dan Perdagangan Global

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
7	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2	2	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing / Investasi dan Perdagangan Global
8	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2	2	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing / Investasi dan Perdagangan Global
9	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Penguatan Peraturan Perlindungan Pekerja Migran, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2	2	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelendupan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
10	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Perlindungan Hukum dan Pekerja Migran, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2		7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelendupan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
11	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses CPMI terhadap Pekerja Terampil di Pasar Global, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2		7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelendupan	Peningkatan Daya Saing / Investasi dan Perdagangan Global
12	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung Kesejahteraan PMI Purna Penempatan, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2		7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelendupan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
13	Meningkatnya koordinasi dalam kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran	Koordinasi	Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran, Kegiatan	0	2	0	2	1	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelendupan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
14	Meningkatnya koordinasi dalam kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran	Koordinasi	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk Pelatihan Vokasi, Kegiatan	0	2	0	2		3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Daya Saing / Investasi dan Perdagangan Global

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
15	Meningkatnya Koordinasi dalam Mengembangkan dan Menyelaraskan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kebijakan Bidang Sosial, Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial, Rekomendasi Kebijakan	0	2	0	2	2	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan
16	Meningkatnya Koordinasi dalam Mengembangkan dan Menyelaraskan Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kebijakan Bidang Sosial	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Rekomendasi Kebijakan	0	4	0	4	3	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Perlindungan Sosial Adaptif dan Pengentasan Kemiskinan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Hukum
Bagian Anggaran : 135

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Undang-Undang, RUU	RUU KUH Acara Perdata, (RUU)	1	1	0	1	1	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
			RUU Kepailitan dan PKPU, (RUU)	1	1	0	1	1		
			RUU Narkotika dan Psikotropika (RUU)	1	1	0	1	1		
2	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, Orang	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, (orang)	14.104	6.263	2.045	6263	6271	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi, (Kelompok Masyarakat)	131	839	542	839	843		
3	Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, (orang)	*Training of Facilitato*r (ToF) Implementasi KUHP, (orang)		342	90	342	300	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
			Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah, (orang)		120	30	120	120		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
Bagian Anggaran : 136

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terlindunginya Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia	AEA - Koordinasi	AEA.001 - Verifikasi Data Korban dan Identifikasi Kebutuhan Korban dalam rangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat secara Non Yudisial	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	Perlindungan Sosial
2		BEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	"BEH.001 - Pemulihan Korban Pelanggaran HAM, Konflik Sosial, Konflik Agama, Suku atau Etnis Bencana Alam, Serta Masyarakat yang Terdampak karena Kebijakan Pembangunan (Bantuan Pemerintah)"	-	-	-	-	20 Kelompok Masyarakat	-	Perlindungan Sosial
3		BEH - Bantuan Kelompok Masyarakat	"BEH.002 -Pemenuhan Kebutuhan Korban Pelanggaran HAM Berat Non Yudisial Yang Telah Teridentifikasi (12 Kasus output) dan Pemenuhannya oleh Kemenham"	-	-	-	-	1 Kelompok Masyarakat	-	Perlindungan Sosial
4		BAH - Pelayanan Publik Lainnya	BAH.001 -Layanan Pengaduan HAM	288	288	0	-	350 Layanan	-	Perlindungan Sosial
5		AEA - Koordinasi	AEA.002 - Koordinasi Pendampingan Dalam Rangka Akselerasi Pelaksanaan 17 Program Prioritas Kabinet 2024 - 2029	-	-	-	-	1 Laporan	-	Pendidikan, Kesehatan, Makan Bergizi Gratis, Supremasi Hukum & Ketertiban Masyrakat
6		FAE - Pemantauan, Evaluasi, serta Pelaporan	"FAE.X01 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Instrumen HAM Internasional"	-	5	0	-	8 Laporan	-	Kepemimpinan Indonesia & Penguatan Diplomasi
7		FBB - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	"FBB.001 - Pembentukan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian)"	-	-	-	-	150 Desa/Kelurahan	-	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
8		FBB - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	FBB.001 - Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar HAM	-	-	-	-	10 Desa/Kelurahan	-	Pendidikan, Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
9		PBD - Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	PBD.001 - Analisis dan Evaluasi RPUU dan PUU dari Perspektif HAM	-	1	0	-	10 Rekomendasi Kebijakan dan 190 Rekomendasi Kebijakan di Wilayah	"1.	Analisis dan Evaluasi RPUU dan PUU dari Perspektif HAM; 2.

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
10	Terlindunginya Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia	QMA - Data dan Informasi Publik	QMA.001 -Pengukuran Indeks HAM	-	1	0	-	1 Dokumen	Pengukuran Indeks HAM	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
11		UAB - Sistem Informasi Pemerintahan	UAB.001 - Satu Data HAM	1	1	0	-	1 Sistem Informasi	Satu Data HAM	Digitalisasi/Teknologi Informasi & Komunikasi
12	Terlindunginya Hak Asasi Manusia seluruh rakyat Indonesia	PAA - Undang-undang	"PAA.001 - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia"	-	-	-	-	1 RUU	"Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia"	Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Bagian Anggaran : 137

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya keberhasilan program pembimbingan klien Pemasyarakatan	1577.PEA Koordinasi	1577.PEA.001 Piloting Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa (Keg/Wilayah)	10 Keg/Wilayah						p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
2	Meningkatnya keberhasilan program pembimbingan klien Pemasyarakatan	1577.PEA Koordinasi	1577.PEA.002 Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Keg/Wilayah)	13 Keg/Wilayah						p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
3	Meningkatnya keberhasilan program pembimbingan klien Pemasyarakatan	1577.PEA Koordinasi	1577.PEA.003 Piloting dan Review Kurikulum Pendidikan Khusus Bagi Anak di LPKA (Kegiatan)	20 Kegiatan						a. Pendidikan
4	Tersedianya Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan	1578.QMA Data dan Informasi Publik	1578.QMA.001 Perluasan Implementasi SPPT TI (Keg/Wilayah)	7 Keg/Wilayah						q. Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
5	Meningkatnya kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	1579.PFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1579.PFA.001 Penyelenggaraan Penguatan Program Pengendalian Penyakit Menular (NSPK)	1 NSPK						b. Kesehatan
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	6165.PEA Koordinasi	137.BF.6165.PEA.001 Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)		5 Kegiatan	0%	100%			p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
7	Tersedianya Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan	6166.QMA Data dan Informasi Publik	137.BF.6166.QMA.001 Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Pemasyarakatan (Dokumen)		1 Dokumen	7,70%	100%			q. Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
8	SK 2: Mewujudkan Perumusan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	137.BF.6165.PAH Peraturan lainnya	137.BF.6165.PAH.001 Penyusunan Peraturan Mengenai Mekanisme Pengawasan Klien Pemasyarakatan melalui pemberdayaan Masyarakat (Rancangan Peraturan)					1 Rancangan Peraturan	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
9	SK 4: Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	137.BF.6166.QMA Data dan Informasi Publik	137.BF.6166.QMA.001 Penyelenggaraan Layanan SPPT-TI Bidang Pemasyarakatan di seluruh UPT (Data)					1,0 Data	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	q. Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
10	SK 8: Mewujudkan Perumusan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	137.BF.6168.QMA Data dan Informasi Publik	137.BF.6168.QMA.001 Penguatan Sinergi APH dalam upaya Zero Overstaying bagi Tahanan (dokumen)					12,0 dokumen	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

11	SK 13: Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	137.BF.6170.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	137.BF.6170.QDB.001 Fasilitasi Pendampingan Bantuan Litigasi pada Tahanan oleh LBH dan Firma Hukum (Lembaga)					165 Lembaga	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
12	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	137.BF.6158.PFA.001 Tata Kelola Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri (NSPK)					1 NSPK	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
13	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.002 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuala Lumpur (Orang)					4.500 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
14	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.005 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di LuarNegeri di Hongkong (Orang)					10.000 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
15	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.006 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Tokyo (Orang)					500,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
16	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.008 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Den Haag (Orang)					400,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
17	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.010 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Sydney (Orang)					400,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
18	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.011 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuching (Orang)					3.000,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
19	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.013 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Los Angeles (Orang)					3.000,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial

20	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.014 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Jeddah (Orang)					1.000,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
21	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.019 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di KDEI Taipei (Orang)					3.500,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
22	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	137.BF.6158.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6158.QIB.021 Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kota Kinabalu (Orang)					5.000,0 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial
23	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	137.BF.6159.QHB Operasi Bidang Keamanan	137.BF.6159.QHB.U01. Operasi Mandiri Tingkat Pusat - Pusat (operasi)					90 operasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
24	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	137.BF.6161.QHB Operasi Bidang Keamanan	137.BF.6161.QHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah (operasi)					2.899 operasi	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
25	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	137.BF.6161.QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	137.BF.6161.QIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang)					22.913.100 Orang	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	c. Perlindungan Sosial p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
26	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Imigrasi	137.WA.6162.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	137.WA.6162.PBD.001 Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Rekomendasi Kebijakan)					1,0 Rekomendasi Kebijakan	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat
27	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan	137.WA.7861.PAH Peraturan lainnya	137.WA.7861.PAH.002 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat (Rancangan Peraturan)					1,0 Rancangan Peraturan	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	p. Supremasi Hukum & Ketertiban Masyarakat

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bagian Anggaran: 138

No.	Nama Program Prioritas	Satuan	2024		2025 (10 November)		2026
			Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Target Volume RO	Volume Realisasi	Proyeksi Volume Target
1	**Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar**	**Orang**	**18.594.627**	**18.899.557**	**18.594.627**	**11.295.279**	**19.482.627**
a	Siswa SD/Paket A yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10.360.614	10.360.614	10.360.614	6.796.219	10.360.614
b	Siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4.369.968	4.369.968	4.369.968	2.891.745	4.369.968
c	Siswa SMA/Paket C yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.935.774	2.043.463	1.935.774	725.134	1.935.774
d	Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1.928.271	2.125.512	1.928.271	882.181	1.928.271
e	Siswa PAUD yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang					888.000
2	**Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)**	**Orang**	**3.943**	**4.072**	**4.679**	**4.616**	**5.519**
3	**Guru dan Kepala Sekolah Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi**	**Orang**	**242.640**	**252.536**	**392.802**	**399.831**	**392.870**
a	Guru TK/TKLB Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi	Orang	51.428	52.011	71.588	71.226	71.624
b	Guru Dikdas Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi	Orang	75.020	78.499	160.477	161.162	160.493
c	Guru Dikmen Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi	Orang	68.427	74.231	103.131	107.922	103.141
d	Kepala Sekolah Non-PNS yang menerima Tunjangan Profesi	Orang	47.765	47.795	57.606	59.521	57.612
4	**Guru dan Kepala Sekolah Non-PNS yang menerima Tunjangan Khusus**	**Orang**	**28.892**	**28.912**	**26.705**	**26.900**	**28.892**
a	Guru TK/TKLB yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	891	926	774	822	891
b	Guru Dikdas yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	23.341	23.321	21.897	21.886	23.341
c	Guru Dikmen yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	4.269	4.269	3.558	3.572	4.269
d	Kepala Sekolah yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	391	396	476	620	391
5	**Guru Non-PNS yang menerima Insentif**	**Orang**	**57.000**	**56.836**	**365.542**	**364.216**	**377.143**
a	Guru TK/TKLB/Dikmas Non-PNS yang menerima Insentif	Orang	30.951	30.660	43.501	42.175	55.102
b	Guru Dikdas Non-PNS yang menerima Insentif	Orang	23.344	23.405	260.593	260.593	260.593
c	Guru Dikmen Non-PNS yang menerima Insentif	Orang	2.705	2.771	61.448	61.448	61.448
6	**Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi**	**Orang**	**625.343**	**640.953**	**804.158**	**344.833**	**41.692**
7	**Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)**	**Orang**	**51.939**	**57.604**	**11.790**	**3.370**	**11.790**
8	**Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)**	**Orang**	**23.637**	**24.732**	**7.909**	**2.057**	**7.909**
9	**Beasiswa Unggulan**	**Orang**	**5.063**	**6.475**	**437**	**101**	**186**

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Bagian Anggaran : BA 139

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN			Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah Satuan: Orang	1.022.084	1.044.174	816.167	1.044.174	1.047.221	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Perlindungan Sosial
2	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Bantuan Pendidikan Tinggi	Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Satuan: Orang	7.676	9.174	6.412	9.003	10.000	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pendidikan dan Perlindungan Sosial
3	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) Satuan: unit	21	15	5	15	14	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pendidikan
4	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Sarana Bidang Pendidikan	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) Satuan: paket	23	3	2	3	1.446	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pendidikan
5	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) Satuan: unit	16	10	1	10	12	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pendidikan
6	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Sarana Bidang Pendidikan	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) Satuan: paket	54	-	-	-	35	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pendidikan

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026	
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
7	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Bantuan Lembaga	PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Competitive Fund (BOPTN Penelitian) (SBKK) Satuan: Lembaga	1.225	1.500	1.526	1.526	1.238	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
8	Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	Bantuan Lembaga	PT Penerima Bantuan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Competitive Fund (BOPTN Penelitian) Satuan: Lembaga	-	900	1.065	1.065	800	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
9	Meningkatnya Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Mengelola Iptek dan Inovasi	Bantuan Lembaga	PT Penerima Bantuan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri, PUIPT, STP dan Konsorsium (BOPTN Penelitian) Satuan: Lembaga	-	45	7	45	25	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
10	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset pada Bidang-Bidang Prioritas	Bantuan Lembaga	PT penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) Satuan: Lembaga	337	450	79	531	-	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
10	Meningkatnya kualitas keluaran riset yang berdampak	Penelitian dan Pengembangan Produk	Hilirisasi Produk Riset dan Hasil Transfer Teknologi Bekerjasama dengan Mitra (BOPTN Penelitian) Satuan: Produk	-	-	-	-	600	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
11	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset pada Bidang-Bidang Prioritas	Bantuan Lembaga	Prototipe dari Perguruan Tinggi yang Diberikan Bantuan Luaran Penelitian Satuan: Purwarupa	247	330	377	377	-	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
11	Meningkatnya kualitas keluaran riset yang berdampak	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	Pengujian Produk Hasil Riset (BOPTN Penelitian) Satuan Purwarupa	-	-	-	-	350	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
12	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah Unggul Garuda Baru yang Dibangun Satuan: Unit	-	4	-	4	4	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
13	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Sekolah yang Bertransformasi menjadi Sekolah Unggul Garuda Satuan: Lembaga	-	12	12	12	5	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan
14	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Bantuan Lembaga	Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK) Satuan: Lembaga	-	10	9	17	25	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kebudayaan
Bagian Anggaran : 140

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Penguatan Pemajuan Kebudayaan pada Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (Kelompok Masyarakat)	-	1.500	241	1.500	1.500	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
2	Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Pelayanan Publik kepada masyarakat (Orang, Akta, Bidang, Laporan)	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya (Orang)	3.002.000	3.002.000	583.071	3.002.000	3.950.000	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
3	Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan (unit)	Koleksi, Cagar Budaya Nasional, dan Benda Budaya Yang Dikelola (Unit)	275.518	250.000	9.296	250.000	250.000	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
4	Penguatan Pemberdayaan Nilai Budaya dan Kekayaan Intelektual	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	Fasilitasi Peningkatan Layanan Pelindungan Kebudayaan (Lembaga)	-	200	150	200	400	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
5	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi (Layanan)	24	27	4	27	30	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
6	Pengembangan Budaya Digital	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	Konten Budaya Digital yang dikembangkan dan dimanfaatkan (Layanan)	-	100	2	100	105	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Pro	-
7	Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	Platform Distribusi dan Kerjasama Konten Kebudayaan (Layanan)	3	3	1	3	3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
8	Penguatan Diplomasi Kebudayaan	Konferensi dan Event (Kegiatan)	Event Pertukaran Budaya (Kegiatan)	-	1	-	1	3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
9	Penguatan Promosi Kebudayaan	Promosi (promosi, Kegiatan)	Promosi Kebudayaan melalui Media dan Edukasi (Promosi)	-	4	-	4	5	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-
10	Penguatan Kerja Sama Kebudayaan	Forum (forum)	Forum Kerja Sama Internasional dan Domestik (Forum)	-	10	9	10	10	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	-

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2025 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Penyelenggara Haji
Bagian Anggaran : BA 141

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi dan dokumen calon	pelayanan publik kepada masyarakat	layanan administrasi haji dalam negeri	0	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	Digitalisasi Tata Kelola	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jamaah haji di dalam negeri	pelayanan publik kepada masyarakat	layanan administrasi haji dalam negeri	0	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	Transformasi Layanan Haji	
3	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dan kapasitas petugas haji	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Petugas Haji yang profesional	0	950 petugas	1.127 petugas	1.127 petugas	1.200 petugas	Peningkatan Kapasitas Petugas Haji	
			Jemaah Haji Reguler yang terbina	0	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	Digitalisasi Siskohat & Manasik	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	layanan administrasi haji luar negeri	0	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	203.320 jemaah	Transformasi Layanan Haji	
5	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan haji di dalam negeri	Fasilitasi dan pembinaan lembaga	Lembaga Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina	0	70 Lembaga	30 Lembaga	70 Lembaga	75 Lembaga	Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu	
6	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan haji di luar negeri	Fasilitasi dan pembinaan lembaga	Lembaga Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang terbina	0	70 Lembaga	30 Lembaga	70 Lembaga	75 Lembaga	Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu	
7	Meningkatnya kualitas layanan bidang perencanaan dan anggaran	Layanan manajemen kinerja internal	Layanan perencanaan dan penganggaran	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		
8	Meningkatnya kualitas layanan bidang organisasi dan tata laksana	Layanan dukungan manajemen internal	Layanan organisasi dan tatakelola internal	0	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan		
	Meningkatnya kualitas layanan bidang Pengembangan SDM	Layanan manajemen SDM internal	Layanan manajemen SDM	0	60 orang	42 orang	42 orang	60 orang		
9	Meningkatnya kualitas layanan bidang hukum dan advokasi	Layanan dukungan manajemen internal	Layanan Hukum	0	2 layanan	0	2 layanan	2 layanan		
10	Meningkatnya kualitas layanan BMN	Layanan dukungan manajemen internal	Layanan BMN	0	1 layanan	0	1 layanan	1 layanan		
11	Meningkatnya kualitas layanan keuangan	Layanan manajemen kinerja internal	Layanan manajemen Keuangan	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen		
12	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Layanan dukungan manajemen internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	0	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Bagian Anggaran : 142

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	Sertifikat Produk (sertifikat)	1. Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian (sertifikat)	25.600	10.000	8.442	15.000	15.000	PN-2 dan PN-8	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
			2. Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha (sertifikat)	959.357	1.148.565	232.206	1.200.000	1.350.000	PN-2 dan PN-8	
			3. Registrasi Produk (sertifikat)	(NB)	100	1.083	3300	3.000	PN-2 dan PN-8	
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (lembaga)	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan JPH (lembaga)	(NB)	120	73	120	350	PN-2 dan PN-8	
		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (orang)	SDM yang mendapatkan pembinaan JPH (orang)	(NB)	55	14	55	1.300	PN-2 dan PN-8	
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (lembaga)	1. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan JPH (lembaga)	(NB)	120	67	120	100	PN-2 dan PN-8	
			2. SDM Halal yang mendapatkan Pengawasan JPH (lembaga)	(NB)	1.000	626	1.000	1.000	PN-2 dan PN-8	
3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi JPH	Kemitraan (kesepakatan)	Dokumen kemitraan Jaminan Produk Halal (kesepakatan)	27	90	64	90	30		
		Norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK)	Dokumen NSPK Jaminan Produk Halal (NSPK)	5	8	5	8	8	PN-8	
		Akreditasi Lembaga (lembaga)	Lembaga Halal yang terakditasi (lembaga)	72	17	57	50	33	PN-2 dan PN-8	

Keterangan:
1. (NB) Terdapat perubahan/penambahan Rincian output (RO) pada Tahun Anggaran 2024 dengan RO Tahun Anggaran
2. (PN-2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. (PN-8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kehutanan
Bagian Anggaran : 143

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Meningkatnya kegiatan penghijauan dan perbaikan kualitas perbenihan tanaman hutan	REA- Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (RBK)	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya (Hektar)	-	40.000	40.000	75.000	PN2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Ekonomi Hijau, Ketahanan Pangan
2	Optimalnya kegiatan reboisasi dan penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan untuk meningkatkan luas tutupan hutan	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem (RBK)	Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan (Hektar)	17.049	500	500	6.400	PN2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PN8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Ekonomi Hijau, Ketahanan Pangan
3	Pengendalian pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dalam mendukung fungsi ekologi	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan (ribu hektar)	474,4	428	428	428	PN2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ekonomi Hijau, Ketahanan Pangan
4	Peningkatan pengembangan usaha perhutanan sosial melalui penguatan kelembagaan, dan kewirausahaan kelompok masyarakat	QDD- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kemandirian Usaha KUPS (Kelompok Masyarakat)	580	532	532	860	PN6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pendidikan, Perlindungan Sosial, Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
5	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (Juta m3)	48,91	55	55	55,00	PN2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Revitalisasi/ Hilirisasi Industri, Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global, Perlindungan Sosial
6	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	Nilai Ekspor Hasil Hutan (Miliar USD)	12,74	12,83	12,83	13,05	-	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi, Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global
7	Pengendalian pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung untuk mendukung perekonomian nasional	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Ribu Ton)	870	500	500	500	PN2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global, Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM, Perlindungan Sosial
8	Peningkatan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan untuk mendukung PNBP dari hutan produksi dan hutan lindung	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan Hutan (Triliun Rupiah)	3,03	2,79	2,79	2,84	PN2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ekonomi Hijau, Peningkatan Daya Saing/ Investasi dan Perdagangan Global

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2025 dan 2026

Kementerian/lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Bagian Anggaran : 144

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	Nama Prioritas Nasional
1	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Poin	0,567	0,576	Prioritas Nasional 2
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	76,49	76,67	Prioritas Nasional 2
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	58	61	Prioritas Nasional 2
		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional	Poin	0,44	0,47	Prioritas Nasional 2
3	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	Persen	5,34	5,34	Prioritas Nasional 2
		Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH	Miliar Rupiah	93,7	455,02	Prioritas Nasional 2
4	Menguatnya penegakan hukum lingkungan hidup lintas sektor	Persentase ketaatan pelaku usaha atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Persen	30	40	Prioritas Nasional 2

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pekerjaan Umum
Bagian Anggaran : BA. 145

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Bendungan on going (kumulatif)	26 (15 Lanjutan dan 11 Selesai)	15 (15 Lanjutan dan 0 Selesai)	0	15 (15 Lanjutan dan 0 Selesai)	15 (14 Lanjutan dan 1 Selesai)	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
2	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Pembangunan Sarana dan Prasana Air Baku (m3/detik)	2,42	0,25	0	0,25	0,5	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
3	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Irigasi (Ha)	33.386 (Capaian termasuk pendanaan melalui DAK)	13.000	0	13.849	15.851	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan; Infrastruktur
4	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Ha)	174.698 (Capaian termasuk pendanaan melalui DAK)	123.000	0	535.315	197.430	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ketahanan Pangan; Infrastruktur
5	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai (km)	172,13	25	0	45	90	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
6	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pembangunan Jalan Nasional (km)	583,3	115,2	22,53	115,2	157,53	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
7	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Pembangunan Jembatan (m)	5.109,31	2.130,48	254,98	2130,481	4.081,98	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
8	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Pembangunan Jalan Tol (km)	348,84	25,70	12,47	25,70	27,23	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
9	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Pembangunan Flyover/Underpass (m)	472,66	1.022,00	223,752	1022	150,00	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
10	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	Preservasi Jalan Nasional	1.899,00	569,52	43,16	569,52	1.571,15	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
11	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Pembangunan dan Peningkatan SPAM (Liter/detik)	1.670	**1.250 L/detik** (Pembangunan SPAM Regional Wosusokas Jawa Tengah dan SPAM Reg. Mamminasata Sulawesi Selatan)	0	1.250	800,0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
12	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Perluasan SPAM (SR)	73.604	**3.643 SR** (Penanganan Bencana SPAM Sumbar, Perpippan SPAM Kamijoro, SPAM Akmil, SPAM Sebaif Grati, SPAM Curio)	0	3.643	59.489,0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
13	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	91.655	**24.160 SR** (21 Provinsi)	0	24.160	37.600	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
14	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (KK)	1.749	**400 KK** (Jakarta Sewerage Development Program zone 1 & 6, CISP merupakan pekerjaan yang melewati 2025)	0	400	63,2	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
15	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu (KK)	83.141	**20.480 KK** (28 Provinsi)	11.563	20.480	25.000	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Air; Infrastruktur
16	Meningkatnya Rumah Tangga yang Sampahnya Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Sistem Pengelolaan Persampahan (KK)	136.750	**29.257 KK** (ISWMP: TPST Bandung, Kota Depok, Cimahi merupakan pekerjaan yang melewati 2025. TPS Kota Banjarmasin)	0	29.257	402,0	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Ekonomi Hijau, Infrastruktur
17	Meningkatnya Rumah Tangga yang Sampahnya Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (KK)	35.183	**6.200 KK** (11 Provinsi)	4.800	6.200	16.000	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Ekonomi Hijau, Infrastruktur
18	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN (unit) dan Pembangunan Gedung Umum/Negara (m2)	7 Unit dan 3.684 m2	**8 Unit** (Sarpras IB dan II, Masjid Negara, Basilika, Gereja, Kemenko 2 dan 4, Wing 1 dan 2 PUPR) dan **268.425 m2** (Gedung dan Kantor DOB Papua Selatan, RBRA Asmat, BPKP Malut, Mako Paspampres dan PWRI)	0,00	8 unit dan 182.456 m2	39.789,0	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Infrastruktur
19	Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Pengembangan Kawasan Permukiman (Hektar)	177.91	**155,4 Hektar** Tanjung Banun, Land Development DOB Papua Barat Daya dan Papua Selatan, Relokasi Bencana Gn Ruang, Kawasan Medan Belawan II, Bahodopi, Pulau Penyengat, Kawasan Lelief Waibulan	0	155,4	91	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Infrastruktur

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
20	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan (hektar)	1.032,59	**676 Hektar** (34 Provinsi)	301	676	600	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Infrastruktur
21	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah (unit)		8	8	8	41	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan; Infrastruktur
22	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah Rakyat (Unit)		39	36	39	104	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan; Infrastruktur
23	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Revitalisasi Sarana Prasarana Madrasah (Unit)		152	152	152	1000	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan; Infrastruktur
24	Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi (Unit)		19	19	19	5	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan; Infrastruktur
25	Meningkatnya penyediaan dan kualitas prasarana pendidikan tinggi sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan (Unit)		8	0	8	2	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Pendidikan; Infrastruktur
26	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga (Unit)		7	0	7	9	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Infrastruktur
27	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perekonomian (Unit)		9	9	9	9	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
28	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN (Unit)		1	0	1	0	06-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Infrastruktur

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
29	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Peribadatan (Unit)		0	0	0	2	08-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Infrastruktur
30	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Kesehatan (Unit)		1	1	1	2	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kesehatan
31	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya (Unit)		2	0	2	1	04-Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Infrastruktur
32	Meningkatnya penyediaan dan kualitas sarana prasarana perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya sesuai penugasan kepada Kementerian PU	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Revitalisasi Prasarana Cagar Budaya (Kawasan)		2	2	2	2	08-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Infrastruktur, Pariwisata & Ekonomi Kreatif

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Anggaran : 146

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
1	Peningkatan kualitas rumah (BSPS-PK)	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit)	unit	130.394	45.073	-	45.073	400.000		
2	Pembangunan rumah rumah khusus	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit)	unit	2.866	476	416	476	654		
3	Penyediaan rumah susun	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit)	unit	5.900	2.464	120	2.464	822		
4	Bantuan PSU Rumah Umum	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit)	unit	21.159	2.986	-	2.986	2.007		
5	Penanganan permukiman kumuh terpadu	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit)	hektar	-	263	-	263	150		
6	Sanitasi	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman (Unit)	unit					2.000		

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pariwisata
Bagian Anggaran : 147

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	01 Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 SDM Ekraf yang memperoleh Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif (Orang)	11800	-	-	-	-	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pariwisata & ekonomi kreatif
2	02 Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	PDD Standarisasi Lembaga (Lembaga, Unit Kerja)	001 Badan Usaha yang Mendapatkan Standardisasi Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaga)	495	-	-	-	-	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata & ekonomi kreatif
3	03 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	PEH Promosi (promosi, Kegiatan)	001 Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler) (promosi)	22	-	-	-	-	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata & ekonomi kreatif
4	04 Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	510	-	-	-	-	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pariwisata & ekonomi kreatif
5	05 Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri (Industri, IKM, Miliar USD)	002 Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Melakukan/Mendapatkan Investasi (Industri)	445	-	-	-	-	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata & ekonomi kreatif
6	06 Terwujudnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif	PDC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)	001 Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (produk)	1259	-	-	-	-	01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pariwisata & ekonomi kreatif
7	07 Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 Pelaku Ekraf yang mendapat penguatan kapasitas melalui Kreasi Indonesia (Orang)	800	-	-	-	-	03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pariwisata & ekonomi kreatif
8	08 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1	-	-	-	-	00 Bukan Prioritas Nasional	Pariwisata & ekonomi kreatif
9	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEA - Koordinasi	001 - Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata (Kegiatan)	-	30	15	30	8	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
10	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEA - Koordinasi	002 - Penerapan Destinasi Wisata Bersih (Kegiatan)	-	14	10	14	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
11	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PBP - Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Regeneratif (Rekomendasi)	-	1	0	1	6	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
12	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEA - Koordinasi	001 - Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) (Kegiatan)	-	4	0	4	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
13	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEE - Kemitraan	001 - Kemitraan Co-Branding (Kesepakatan)	-	1	0	1	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
14	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Diseminasi Strategi dan Komunikasi Pemasaran (Orang)	-	0	0	0	750	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
15	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	001 - Konten dan Sarana Promosi (Promosi)	-	2	0	2	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
16	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	002 - Penyusunan NSPK Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu (NSPK)	-	1	0	1	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
17	02 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	CCL - OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Layanan Pemeliharaan Sarana TIK (Unit)	-	1	0	1	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
18	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	001 - Publikasi (Promosi)	-	17	8	17	17	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
19	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Diseminasi Pemasaran Pariwisata Nusantara (Orang)	-	2400	2310	2400	6450	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
20	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	001 - Promosi Pariwisata Nusantara di Destinasi Lainnya (Promosi)	-	2	0	2	5	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
21	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Penyusunan NSPK Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (NSPK)	-	0	0	0	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
22	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	001 - Promosi Pariwisata Nusantara (Promosi)	-	22	17	22	26	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
23	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Pasar Asia Tenggara, Asia Selatan dan Tengah (NSPK)	-	1	0	1	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
24	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	001 - Promosi Pariwisata Mancanegara I (Promosi)	-	5	2	5	13	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
25	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Pasar Asia Timur dan Ausceania (NSPK)	-	0	0	0	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
26	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	001 - Promosi Pariwisata Mancanegara II (Promosi)	-	4	1	4	14	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
27	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - NSPK Bidang Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika & Afrika (NSPK)	-	0	0	0	2	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
28	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	001 - Promosi Pariwisata Mancanegara III (Promosi)	-	1	0	1	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
29	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	001 - Promosi Wisata MICE di Pasar Internasional (Promosi)	-	4	4	4	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
30	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	002 - Promosi Wisata MICE melalui Misi Penjualan (Promosi)	-	2	1	2	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
31	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	003 - Promosi Wisata MICE melalui Perjalanan Wisata Pengenalan (Promosi)	-	2	0	2	1	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
32	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEH - Promosi	004 - Pemasaran Wisata MICE melalui Media (Promosi)	-	3	0	3	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
33	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	002 - Promosi dan Publikasi Event Daerah (Promosi)	-	5	3	5	5	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
34	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	003 - Promosi Events Nasional (Promosi)	-	12	4	12	20	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
35	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	001 - Promosi Event Internasional (Promosi)	-	5	2	5	5	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
36	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 - Penyusunan NSPK Event Internasional (NSPK)	-	1	0	1	2	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
37	02 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Bimbingan Teknis Pengembangan Wisata MICE (Orang)	-	1300	800	1300	1275	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
38	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEG - Konferensi dan Event	001 - Pelaksanaan Bidding dan Delegate Boosting MICE yang diselenggarakan (Kegiatan)	-	5	1	5	3	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
39	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEG - Konferensi dan Event	002 - Penyelenggaraan Event Konferensi (Kegiatan)	-	5	2	5	8	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
40	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEG - Konferensi dan Event	003 - Pendukungan Event MICE Dalam Negeri (Kegiatan)	-	15	5	15	6	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
41	02 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Bimbingan Teknis Pengembangan Event Daerah (Orang)	-	100	30	100	100	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
42	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	001 - Pengembangan Promosi Event Daerah (Promosi)	-	5	0	5	5	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
43	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	AEH - Promosi	002 - Promosi dan Publikasi Event Daerah (Promosi)	-	5	3	5	5	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
44	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEG - Konferensi dan Event	001 - Pendukungan Event Daerah (Kegiatan)	-	60	26	60	60	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
45	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEG - Konferensi dan Event	002 - Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional (Kegiatan)	-	31	11	31	31	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
46	02 Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	AEF - Sosialisasi dan Diseminasi	001 - Bimbingan Teknis Pengembangan Event Internasional (Orang)	-	0	0	0	500	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif
47	01 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata	PEG - Konferensi dan Event	001 - Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional (Kegiatan)	-	33	15	33	35	03 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Pariwisata & ekonomi kreatif

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
Bagian Anggaran : 148

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
				Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif	PBK.Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	Finalisasi Rencana Strategis 2025-2029 dan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) KemenEkraf , Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	0	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif	QDH. Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Literasi Bisnis untuk Badan Usaha Ekonomi Kreatif, Badan usaha	-	100	100	100	120	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	Menguatnya kapasitas faktor enabler (enabling factors) ekosistem ekonomi kreatif	PDC. Sertifikat Produk	Produk Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual, Produk	-	450	450	450	240	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) Kuliner, Industri	-	18	18	18	18	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) Kriya, Industri	-	12	12	12	6	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
6	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) Fesyen, Industri	-	10	10	10	10	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Inkubasi Seni Rupa dan Seni Pertunjukan, Industri	-	2	2	2	4	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Inkubasi Desain Produk dan Desain Komunikasi Visual, Industri	-	4	4	4	20	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Fasilitasi Pendukungan Location Scouting Film Asing dan Pasca Produksi Film Lokal, Industri	-	3	2	3	6	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	DIGI-PRO Musik, Industri	-	1	0	1	0	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN							Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target	
11	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	InKraf Musik, Industri	-	2	1	2	10	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	PEH. Promosi	Fasilitasi Pameran Produk Kriya, Promosi	-	1	1	1	3	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	PEH. Promosi	Promosi Produk Ekonomi Kreatif Subsektor Musik, Promosi	-	1	0	1	5	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	PEA. Koordinasi	Fasilitasi Fashion show	-	1	1	1	2	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	BDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Dukungan Arch ID	-	1	1	1	0	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
16	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDJ.Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	Inkubasi Startup Gim, Startup	-	13	10	13	50	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDJ.Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	Inkubasi Startup Digital, Startup	-	12	0	12	12	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDJ.Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	Inkubasi Startup Berbasis Teknologi Baru, Startup	-	5	5	5	10	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDJ.Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	Inkubasi Startup Berbasis Teknologi Baru, Startup	-	20	0	20	10	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	SCL.Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	Pelatihan Talenta Digital, Orang	-	300	300	300	1000	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
21	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	SCL.Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Subsektor Periklanan, Orang	-	50	15	50	0	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	SCL.Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	Masterclass Pengembangan Skenario Original Series (SCENE), Orang	-	50	50	50	200	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional	QDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kegiatan Industri Kreatif Subsektor Penerbitan dan Fotografi, Industri	-	11	9	11	240	(03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koperasi
Bagian Anggaran : 149

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target		
1	Tercapainya Tatakelola Organisasi Badan Hukum	7625/PAA/RUU	001. RUU Perkoperasian	0	1	-	-	1	001. RUU Perkoperasian	Terwujudnya Revisi Undang-Undang Perkoperasian
2	Terwujudnya Pendampingan Restrukturisasi Koperasi	7626/QDF/KOPERASI	001.Pendampingan Restrukturisasi Koperasi	0	50	4	50	200	001.Pendampingan Restrukturisasi Koperasi	Pendampingan & Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model penggabungan
3	Terwujudnya Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi	7631/QDF/KOPERASI	001.Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Agromaritim	0	35	1	35	150	001.Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Agromaritim	
4	Terwujudnya Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi	7631/QDF/KOPERASI	002.Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Aneka Usaha	0	35	0	35	150	002.Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Aneka Usaha	
5	Tercapainya Pendampingan Kemitraan	7632/QDF/KOPERASI	001.Pendampingan Kemitraan Usaha Koperasi	0	37	3	37	100	001.Pendampingan Kemitraan Usaha Koperasi	Fasilitasi Kemitraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
6	Terwujudnya Fasilitasi Tatakelola Kemitraan	7632/QDF/KOPERASI	002.Fasilitasi Tatakelola Kemitraan Koperasi	0	37	1	37	75	002.Fasilitasi Tatakelola Kemitraan Koperasi	
7	Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Koperasi Dalam Program Makan Bergizi	7632/QDF/KOPERASI	003.Fasilitasi Kemitraan Koperasi Dalam Program Makan Bergizi Gratis	0	10	1	10	80	003.Fasilitasi Kemitraan Koperasi Dalam Program Makan Bergizi Gratis	Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Koperasi Dalam Program Makan Bergizi Gratis
8	Terwujudnya Pendampingan Produksi	7633/QDF/KOPERASI	001.Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Agromaritim	0	37	4	37	150	001.Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Agromaritim	
9	Terwujudnya Pendampingan Produksi	7633/QDF/KOPERASI	002.Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Aneka Usaha	0	37	0	37	100	002.Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Aneka Usaha	
10	Terwujudnya Pengembangan jaringan usaha dan penguatan	7634/QAF/KOPERASI	Pengembangan jaringan usaha dan penguatan koperasi	0	15	0	15	250	Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
11	Terwujudnya Fasilitasi Pelatihan Intensif Bootcamp dan Magang Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	7636/SCF/ORANG	001. Fasilitasi Pelatihan Intensif Bootcamp dan Magang Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	0	120	0	120	200	001. Fasilitasi Pelatihan Intensif Bootcamp dan Magang Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	Magang Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
12	Terwujudnya Fasilitasi dan Pembinaan Peran Koperasi dalam Distribusi	7640/QDF/KOPERASI	002.Fasilitasi dan Pembinaan Peran Koperasi dalam Distribusi	0	30	0	30	50	002.Fasilitasi dan Pembinaan Peran Koperasi dalam Distribusi	
13	Terwujudnya Fasilitasi dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi	7644/QDF/KOPERASI	001.Fasilitasi dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi	0	100	18	100	200	001.Fasilitasi dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Bagian Anggaran : 150

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I *)	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun *)	Proyeksi Volume Target *)		
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (UMKM)	Sosialisasi dan Kebijakan Hukum bagi Usaha Mikro	2.500	2.500	-	-	-		
2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Redisign PLUT KUMKM/NEW PLUT (Pembentukan Expert Pool) (Lembaga PLUT)	63	63	-	-	-		
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan (Orang)	1.185	1.185	-	-	-		
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan (UMKM)	2.630	2.630	-	-	-		
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Lembaga Inkubator yang ditumbuhkembangkan (Lembaga)	40	40	-	-	-		
6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan (UMKM)	200	200	-	-	-		
7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Startup	Jumlah Startup yang dikembangkan melalui Inkubasi (StartUp)	180	190	-	-	-		
8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Data dan Informasi Publik	Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM (Layanan)	2	2	-	-	-		
9	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Data dan Informasi Publik	Pemetaan Data Makro Ekonomi KUMKM (Layanan)	1	1	-	-	-		
10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Promosi	Partisipasi Expo Internasional (Promosi)	1	1	-	-	-		
11	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk (UMKM)	180	165	-	-	-		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I *)	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun *)	Proyeksi Volume Target *)		
12	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi (UMKM)	300	300	-	-	-		
13	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk (UMKM)	255	105	-	-	-		
14	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis (Orang)	800	800	-	-	-		
15	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha (Orang)	1.500	1.500	-	-	-		
16	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Wirausaha yang ditingkatkan melalui Dunia Usaha Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri (Orang)	2.415	2.000	-	-	-		
17	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan (UMKM)	179	179	-	-	-		
18	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pendidikan Non Gelar	UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melauli Sertifikasi (Orang)	210	180	-	-	-		
19	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pendidikan Non Gelar	Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatan Kapasitasnya (Orang)	650	650	-	-	-		
20	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Data dan Informasi Publik	Pendataan Lengkap KUMKM (Data)	3.684.929	4.000.000	-	-	-		
21	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pendidikan Non Gelar	UKM yang dilatih Peningkatan Kompetensi Bisnis di Wilayah Kemiskinan Ekstrem (Orang)	300	300	-	-	-		
22	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Bantuan Peralatan / Sarana	Pengembangan Rumah Kemasan bagi Usaha Mikro (Unit)	18	18	-	-	-		
23	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Sarana Pengembangan Kawasan	UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan Factory Sharing (Unit)	1	1	-	-	-		

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I *)	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun *)	Proyeksi Volume Target *)		
24	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	UKM/Start-Up yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis (Orang)	2.308	2.044	-	-	-		
25	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha (UMKM)	1.035	1.025	-	-	-		
26	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan (UMKM)	1.450	1.450	-	-	-		
27	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) (UMKM)	6.300	7.300	-	-	-		
28	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi Pembiayaan KUR Klaster (UMKM)	120	300	-	-	-		
29	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk (UMKM)	22.551	22.551	-	-	-		
30	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Sosialisasi Formalisasi Usaha Mikro Strategis	2.400	2.400	-	-	-		
31	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan izin usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB)	5.000	5.000	-	-	-		
32	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Afirmatif	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Afirmatif (UMKM)	-	-	-	59	12.750	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
33	Memperluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi Keterlibatan Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (UMKM)	-	-	-	1.000	10.000	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Makan Bergizi Gratis

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I *)	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun *)	Proyeksi Volume Target *)		
34	Meningkatnya Formalisasi Usaha Mikro	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	5.000	7.500	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
35	Meningkatnya Standardisasi dan Sertifikasi bagi Usaha Mikro	Sertifikasi Produk	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro (Produk)	-	-	-	10.150	537	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
36	Meningkatnya Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro (Orang)	-	-	-	250	516	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
37	Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	7.750	1.066	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
38	Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Mikro	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga PLUT-UMKM (Lembaga)	-	-	-	12	10	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
39	Meningkatnya Formalisasi Kualitas Produk Usaha Kecil	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil (UKM)	-	-	-	130	134	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
40	Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Kecil	Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil	Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil (Unit)	-	-	-	10	1	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I *)	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun *)	Proyeksi Volume Target *)		
41	Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Kecil	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Digitalisasi bagi Usaha Kecil (UKM)	-	-	-	150	2.337	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
42	Meningkatnya Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Menengah	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan dan Investasi bagi Usaha Menengah (UMKM)	-	-	-	250	85	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
43	Meningkatnya Perluasan Kemitraan bagi Usaha Menengah	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi Perluasan Kemitraan dan Pengembangan Rantai Pasok bagi Usaha Menengah (UMKM)	-	-	-	432	115	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
44	Meningkatnya Kapasitas Produksi Usaha Kecil	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	Fasilitasi Digitalisasi Produksi bagi Usaha Kecil (UMKM)	-	-	-	150	103	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi
45	Meningkatnya Kualitas Wirausaha	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan (Orang)	-	-	-	200	25	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
46	Memperkuat Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Koordinasi	Koordinasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Kegiatan)	-	-	-	2	1	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
47	Memperkuat Tersusunnya Regulasi tentang Kewirausahaan	Peraturan Lainnya	Peraturan tentang Kewirausahaan (Rancangan Peraturan)	-	-	-	1	2	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
48	Memperkuat Layanan Pembinaan Inkubasi StartUp	Fasilitasi dan Pembinaan Startup	Layanan Pembinaan Inkubasi Startup (StartUp)	-	-	-	20	5	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I *)	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun *)	Proyeksi Volume Target *)		
49	Memperluas Pendampingan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Pendampingan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha (Orang)	-	-	-	550	80	03-Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan & Pembangunan Koperasi Merah Putih dan UMKM
50	Memperkuat Sistem Infomasi Kementerian UMKM	Data dan Informasi Publik	Sistem Informasi Kementerian UMKM (Sistem Informasi)	-	-	-	1	1	06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Digitalisasi/ Teknologi Infomasi & Komunikasi

Keterangan:

*) Untuk Tahun 2025 terdapat perubahan nomenklatur RO dan KRO yang merupakan dampak dari pemecahan Kementerian
Tahun 2026 belum dapat dicantumkan Program/Kegiatan mengingat berdasarkanSurat Bersama Pagu Anggaran

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Bagian Anggaran : 151

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
1	Meningkatnya status pembangunan desa	RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan (unit)	001 Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan (unit)	43	8	-	8	405	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
2	Meningkatnya status pembangunan desa	UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Desa, DesaKelurahan)	001 Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa (Desa)	75.265	75.265	37.609	75.265	75.259	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
3	Meningkatnya status pembangunan desa	UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Desa, DesaKelurahan)	002 Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting (Desa)	23	10.004	-	10.004	10.000	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
4	Meningkatnya status pembangunan desa	UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Desa, DesaKelurahan)	003 Monitoring dan Evaluasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa (Desa)	75.265	75.265	36.499	75.265	75.259	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
5	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	PEC Kerja sama (Kesepakatan)	002 Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor (Kesepakatan)	4	3	-	3	10	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
6	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (Badan usaha)	001 Fasilitasi Pengembangan BUMDesa (Badan usaha)	200	218	-	218	820	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
7	Meningkatnya status pembangunan desa	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Orang)	001 Pendampingan Desa (Orang)	32.165	35.000	29.568	29.125	29.125	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
8	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	002 Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan (Kelompok Masyarakat)	1.110	1.110	-	1.110	1.110	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	

MATRIKS RINGKASAN TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS TAHUN 2024 s.d 2026

Kementerian/Lembaga : Kementerian Transmigrasi
Bagian Anggaran : 152

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
1	meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif	QCC. Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	001.Layanan Penanganan Perkara Tanah Transmigrasi (perkara)		63	-	63	55	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		QDC.Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001.Fasilitasi dan Pembinaan Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi (orang)		25.211	690	25.211	43.536	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		UBA. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001. Fasilitasi Pengurusan HPL Transmigrasi (daerah)		32	3	32	28	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
2	mewujudkan pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi yang berdayasaing, mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdayasaing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar	QDB.Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Ekonomi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (lembaga)	-	89	-	89	10	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
3	mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah	RAI. Sarana Pembangunan Kawasan	029. Sarana Permukiman yang dibangun di Kawasan Transmigrasi (Unit)		854	-	854	123	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RAI. Sarana Pembangunan Kawasan	030. Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Unit)		44	-	44	9	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RAI. Sarana Pembangunan Kawasan	031. Sarana Permukiman yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (Unit)		283	-	283	76	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBC. Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan)	001.Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (Km)		59,31	-	59,31	55,84	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBC. Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan)	002.Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Km)		32,59	-	32,59	16,01	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	

No	Sasaran (Outcome), Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output Sesuai Perpres tentang Rincian APBN								Nama Prioritas Nasional Sesuai Rancangan RKP Tahun 2026	Nama Tematik APBN/Isu Strategis (dalam hal RO dimaksud terkait langsung)
	Sasaran/*Outcome*	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan satuannya	Rincian Output (RO) dan satuannya	Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026		
				Volume Realisasi	Volume Target	Volume Realisasi s.d Semester I	Proyeksi Volume Realisasi s.d Akhir Tahun	Proyeksi Volume Target*		
		RBC. Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan)	003.Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi (Km)		35,50	-	35,50	2,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBF. Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan)	001.Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi (M)		270	-	270	50	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBF. Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan)	002.Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (M)		199	-	199	74	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBS.Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	001.Sistem Drainase yang dibangun di Kawasan Transmigrasi (Km)		2,49	-	2,49	1,20	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBS.Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	004.Sistem Drainase yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (Km)		17,65	-	17,65	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		RBS.Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	005.Sistem Drainase yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Km)		0,25	-	0,02	1,50	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		QEB. Bantuan Produk dan Peralatan	005.Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Unit)		667	-	667	1.874	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		QDE. Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	003.Bantuan Catu Pangan di Provinsi (Keluarga)		1.736	-	1.736	1.514	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		QEB. Bantuan Keluarga	004.Bantuan Catu Pangan di Kabupaten (Keluarga)		146	-	146	1013	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
4	Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi	PBP. Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	001. Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	-	-	-	-	200	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
		QEJ. Bantuan Pendidikan Tinggi	001. Bantuan Pendidikan Tinggi Transmigrasi	-	-	-	-	1000	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	